2021 Laporan Tahunan
Annual Report

PELINDO



United We Stand

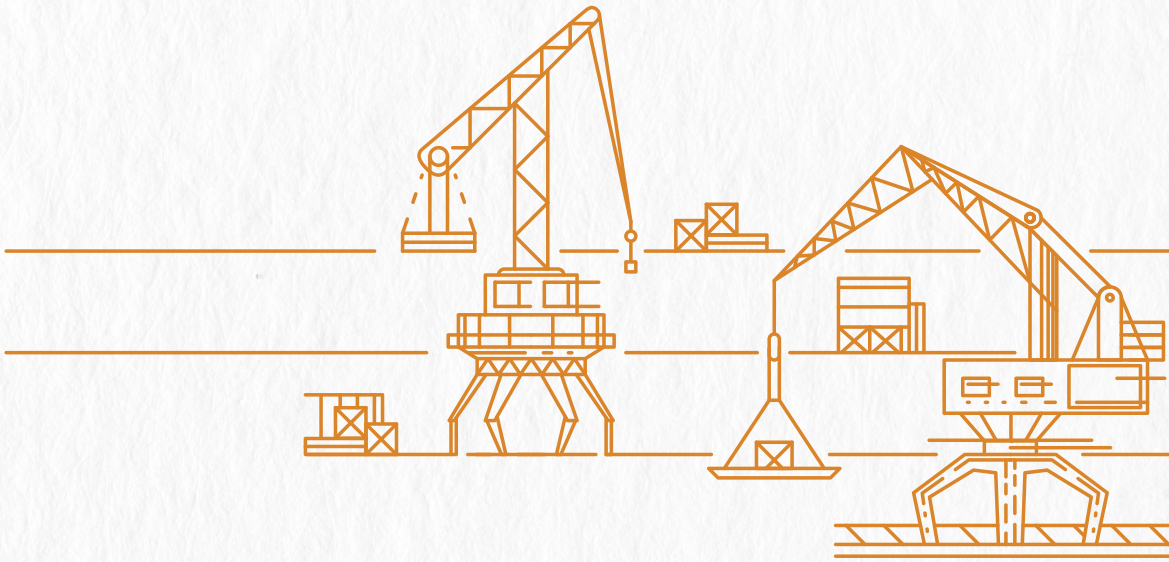
Bersatu Kami Kuat

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

TEMA DAN ARTI TEMA

THEMES AND EXPLANATION OF THEMES





United We Stand

Bersatu Kami Kuat

Inisiatif strategis pemerintah untuk mewujudkan jaringan koneksi nasional dan ekosistem logistik yang lebih kokoh diwujudkan melalui penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan selanjutnya menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan penggabungan ini, diharapkan jaringan koneksi maritim, baik koneksi antara pelabuhan-pelabuhan dalam negeri maupun di luar negeri akan semakin meningkat. Melalui penggabungan ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), selanjutnya disebut Pelindo, memiliki kendali strategis yang lebih baik dan dukungan faktor finansial yang kuat sehingga operasional bisnis Pelindo akan lebih terkoordinasi, efisien, efektif, dan memiliki standar tertentu yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama pengguna jasa.

Penggabungan keempat entitas usaha tersebut merupakan terobosan bisnis pelabuhan yang sebelumnya bersifat regional, kini bertransformasi menjadi skala nasional. Dengan membentuk 4 (empat) korporasi *subholding* setara BUMN yaitu, *Subholding* Pelindo Terminal Peti Kemas, *Subholding* Pelindo Multi Terminal, *Subholding* Pelindo Jasa Maritim, dan *Subholding* Pelindo Solusi Logistik. Maka skema bisnis akan lebih terfokus pada tiap-tiap kluster sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan Pelindo dan efisiensi usaha. Integrasi juga membuat kendali strategis yang lebih baik dalam perencanaan keseluruhan untuk jaringan, pengurangan biaya logistik, dan meningkatkan infrastruktur serta kapasitas. Entitas usaha yang sebelumnya bergerak secara mandiri kini telah bertransformasi menjadi Pelindo yang terintegrasi dan mampu mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

The government's strategic initiative to create a stronger national connection network and logistics ecosystem was realized through the merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) that subsequently became PT Pelabuhan Indonesia (Persero). With this merger, it is hoped that the maritime connection network between domestic and international ports will grow. Through this merger, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), hereinafter referred to as Pelindo, will have better strategic control and strong financial support so that Pelindo's business operations will be more coordinated, efficient, effective, and standards that will have a good impact on the communities, especially service users.

The merger of the four business entities is a breakthrough in a port business that was previously regional in nature, to be transformed on a national scale. By establishing 4 (four) SOE-equivalent subholding corporations, Pelindo Terminal Peti Kemas Subholding, Pelindo Multi Terminal Subholding, Pelindo Jasa Maritim Subholding, and Subholding Pelindo Solusi Logistik Subholding. The business scheme will be more focused on clusters to increase Pelindo's service capacity and business efficiency. Integration will also provide better strategic control over overall planning for the network, reduce logistics costs, and improve the infrastructure and capacity. The previously independent business entities have been transformed into an integrated Pelindo to create a national maritime ecosystem network through increased network connectivity and service integration to support the country's economic growth now.

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

2020



Keunggulan Operasi dan Komersial demi Stabilisasi Bisnis
Operational and Commercial Excellence for Business Stabilization

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mulai bersiap untuk menjadi *World Class Maritime Ecosystem*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tahapan yang ingin dicapai Perseroan pada tahun 2020 sebagai pijakan menuju visi di tahun 2024 adalah "Stabilisasi Bisnis Perusahaan melalui Keunggulan Operasi dan Komersial".

Untuk mendukung stabilitas bisnis, Perseroan melakukan 5 (lima) *milestone* utama, yang meliputi kesehatan dan keselamatan lingkungan, improvisasi proses bisnis, optimalisasi pendapatan dan peningkatan efektivitas biaya, peningkatan kemampuan digital, serta optimalisasi *capital expenditure* guna menghadirkan nilai tambah.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is starting to prepare to become a World Class Maritime Ecosystem. In connection with this, the stage that the Company wants to achieve in 2020 as a stepping stone towards the vision for 2024 is the "Stabilization of the Company's Business through Operational and Commercial Excellence".

To support business stability, the Company has implemented 5 (five) main milestones, which include environmental health and safety, business process improvement, revenue optimization and cost effectiveness improvement, digital capability enhancement, and capital expenditure optimization to provide added value.

2019



Ekspansi Bisnis untuk Mencapai Kinerja Unggul yang Berkelanjutan
Business Expansion For Sustainable Superior Performance

Pada tahun 2019, Perseroan memiliki target untuk meningkatkan laba dari pertumbuhan organik dan non-organik. Hal ini dicapai selain dengan meningkatkan performa 12 (dua belas) cabang yang telah dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan yang bergerak di bisnis pelabuhan, Perseroan juga akan berfokus pada kegiatan akuisisi pelabuhan baru di beberapa wilayah, seperti Patimban, Kawasan Berikat Nusantara (KBN), dan lain-lain.

Untuk mendukung target ini, Perseroan juga bekerja sama dengan beberapa kawasan industri, perusahaan pelayaran serta akan meningkatkan performansi anak perusahaan khususnya yang bergerak di bisnis pendukung. Di samping itu, pada tahun 2019, Perseroan telah melakukan *National Connectivity Program* dengan mengimplementasikan proyek strategis yaitu Pembangunan *Container Terminal* 2 (CT 2) di *New* Priok, Pelabuhan Kijing di Pontianak, Jalan Tol Cilincing Cibitung, dan beberapa proyek strategis lain. Sebagai langkah untuk mewujudkan *Global Expansion*, Perseroan melakukan kerja sama dengan beberapa *sister port*, ekspansi bisnis Anak Perusahaan, aktif dalam kegiatan atau organisasi *international* seperti *chainport*, ASEAN *Ports Association* (APA), *International Association of Ports and Harbors* (IAPH), serta beberapa kegiatan lain.

In 2019, the Company has a target to increase profit from organic growth and non-organic. This was achieved by improving the performance of 12 (twelve) branches managed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its subsidiaries engaged in the port business with the Company will also focus on the acquisition of new ports in several regions, such as Patimban, Kawasan Berikat Nusantara (KBN), and others.

To support this target, the Company also cooperated with several industrial estates, shipping companies and improved the performance of subsidiaries, especially those engaged in supporting businesses. Apart from that, in 2019 the Company has carried a National Connectivity Program by implementing the strategic projects, namely the Construction of Container Terminal 2 (CT 2) in New Priok, Kijing Port in Pontianak, Cilincing Cibitung Toll road and several other strategic projects. As a step towards realizing Global Expansion, the Company entered into cooperation with several sister ports, performed Subsidiaries' business expansion, and actively involved in international activities or organizations such as chainport, APA, IAPH and several other activities.

2018



Membangun Pelabuhan Digital yang Unggul
Establishment of Excellence Digital Port

Arah menuju *World Class Performance* di 2020 telah mampu dicapai sesuai dengan *roadmap* yang telah dicanangkan. Pada tahun 2018, PT Pelindo II (Persero) telah melalui fase *Establishment of Performance*. Kinerja Perseroan tahun 2018 telah mampu melampaui yang telah ditargetkan. Hal ini merupakan hasil dari diterapkannya aktivitas pelayanan dan operasional berbasis teknologi informasi (*Digital Port*). Bahkan, Perseroan merupakan *Digital Port* pertama di Indonesia. Perseroan telah menerapkan 6 (enam) fitur digital pelayanan secara efektif, sehingga pelayanan yang diberikan telah mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang selanjutnya mampu meningkatkan kinerja Perseroan. Keenam fitur layanan tersebut, yaitu *Master Costumer Data, Costumer Profiling, Costumer Service, Costumer Visit Management, Costumer Survey,* dan *Sales* dikemas dalam fitur aplikasi *Digital Costumer Relationship Management* (CRM) di seluruh Kantor Cabang dan dua Anak Perusahaan IPC, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT IPC Terminal Peti Kemas.

The direction towards World Class Performance in 2020 has been achieved in accordance with the planned roadmap. In 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has gone through the phase of Establishment of Performance. The Company's performance in 2018 has been able to exceed the targets. This achievement is the result of the implementation of information technology-based service and operational activities (Digital Port). In fact, the Company is the first Digital Port in Indonesia. The Company has implemented the six (6) digital service features effectively, hence the services provided have succeeded in increasing customer satisfaction and loyalty, which in turn improving the Company's performance. The six service features, namely Master Costumer Data, Customer Profiling, Customer Service, Customer Visit Management, Customer Survey, and Sales are contained in the Digital Customer Relationship Management (CRM) application feature in all Branch Offices and two Subsidiaries of IPC, i.e. PT Pelabuhan Tanjung Priok and PT IPC Terminal Peti Kemas.

JEJAK LANGKAH
MILESTONE

1960

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan dengan status Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang Pengelolaan Pelabuhan Umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established with the status of a State Enterprise (PN) in accordance to the 1960 Government Regulation No. 19 concerning the Management of Ports by the Port Management Agency (BPP).

1964-1969

Kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Otoritas Pelabuhan, meskipun PN masih menangani aspek komersial.
The port's operational activities were coordinated by a government agency called the Port Authority, though PN still handled its commercial aspects.

1969-1983

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/1969, BPP dikelola masing-masing pelabuhan. BPP menggantikan PN setelah Otoritas Pelabuhan dibubarkan.
According to the Government Regulation Number 18/1969, the BPP managed each seaport. BPP replaced PN after the Port Authority was dissolved.

1985

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No. 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi 4 wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV. Keempat Perum itu merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
Based on the Government Regulation No. 15/1983 juncto PP No. 5 dated February 5, 1985, Perum Pelabuhan was merged and divided into four operational areas, under the names of Perum Pelabuhan I to IV. The four Companies later on became State-Owned Enterprises under the supervision of Ministry of Transportation of Republic of Indonesia.

1992

Badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/1991, sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan perubahan pada nama perusahaan menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II", dan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN, sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Desember 1992.
The legal form of Perum was changed into Limited Liability Company (PT) based on the Government Regulation No. 57/1991, whose shares are fully owned by the Republic of Indonesia resulted in changes to the Company's name to" Perseroan Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia II", under the management of the Ministry of SOEs, stipulated in Notarial deed No. 3 dated December 1, 1992.

2012

Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan *branding* identitas baru dan bertransformasi menjadi IPC, sebuah perusahaan penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasional, dalam rangka mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan kelas dunia.
On February 22, 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) launched its new identity and transformed into IPC, a leading port services company in Indonesia, to be more efficient and modern in every aspect of operations in order to achieve its goal to become a world-class port operator.

2013

IPC fokus kepada pengembangan langkah strategis perusahaan. Melanjutkan keberhasilan transformasi, IPC harus bergerak lebih cepat, efektif, dan efisien dalam melayani kebutuhan jasa pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan optimisme dan keyakinan yang sungguh-sungguh, IPC siap melangkah mencapai terobosan-terobosan usaha di tahun-tahun selanjutnya serta menyiapkan diri menjadi yang terdepan, terbaik, dan tersehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pelabuhan yang dipandang oleh dunia. Salah satu capaian terbesar di tahun ini adalah *Groundbreaking* Terminal *New* Priok oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
IPC focused on developing Company's strategic steps. Continuing the success of corporate transformation, the Company must move faster, effectively, and efficiently in serving the needs of customer service or port service user. Through optimism and confidence, the Company was ready to step into business breakthroughs in the next years and prepare to be the leader, the best, and healthiest in supporting Indonesia's economic growth and the respected port of the world. One of biggest achievements in this year was New Priok Terminal Groundbreaking by President of Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono..

2014

Pada tahun 2014, IPC melakukan banyak investasi pada entitas anak, nilainya sebesar Rp1,43 triliun, meningkat 33,64% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp1,07 triliun. Selain itu, IPC juga menanamkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Dalam rangka peningkatan kinerja, IPC juga telah melakukan sejumlah studi dan riset terkait dengan industri maritim. Di antaranya, dilakukan bersama *World Bank* tentang "*Implementation of reducing logistic cost in Indonesia & Port Development priority projects and financing strategy*". Untuk mewujudkan pelayanan satu atap yang memuaskan bagi seluruh pelanggan, IPC melalui Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Operasi dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *pilot project*, telah menyediakan tempat pelayanan dengan suasana yang nyaman, terbuka, fleksibel, dan modern.

In 2014, the Company invested Rp1.43 trillion in subsidiaries, increased 33.64% compared to to Rp1.07 trillion in 2013. In addition, the Company also invested in human resources development, particularly in domestic and overseas education. In order to do a better performance, the Company has also conducted several studies and researches related to maritime industry. Among them are jointly carried out with the World Bank on "Implementation of Reducing Logistic Cost in Indonesia & Port Development Priority Projects and Financing Strategy". To establish onestop service to meet customers' demand, the Company provides an open, convenient, flexible, and modern service area through cooperation between its Directorate of Commercial/Business Development and Directorate of Operations and Branches of Tanjung Priok Port.

2015

Di tahun ini, IPC berhasil menerbitkan obligasi di pasar modal internasional atau *global bond* sebesar USD1,6 miliar. Selain itu, IPC juga semakin menorehkan prestasi di jaringan komunitas pelabuhan dunia dengan menjalin kerja sama dalam rangka *sister port* dengan *Port of Townsville* Ltd, Australia dan Shenzhen *Port Authority*. Dari sisi operasional, IPC telah melakukan banyak pemanfaatan dan pembaharuan di seluruh aspek fasilitas kepelabuhan saat ini seperti penerapan sistem OPUS dalam pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok, Panjang, Pontianak dan Palembang. Salah satu Prestasi lainnya yang diukir oleh IPC di tahun 2015 adalah diresmikannya IPC *Corporate University* oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. IPC *Corporate University* merupakan bagian dari program transformasi strategis dan visioner dalam rangka menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan *soft infrastructure*. Melalui IPC *Corporate University*, IPC berharap untuk dapat mencetak generasi gemilang yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi teknis kepelabuhanan dan logistik, manajemen dan kepemimpinan yang dapat diandalkan.

In 2015, IPC successfully issued bonds in the international capital markets or the global bond amounted to USD1.6 billion. In addition, IPC also increasingly created some achievements in the world with a network port community and worked together as the sister port of the Port of Townsville Ltd, Australia and Shenzhen Port Authority. From the operational point of view, the Company did a lot of utilization and renewal in all aspects of port existing facilities such as the implementation of the OPUS system in the management of container terminal in Tanjung Priok, Panjang, Pontianak and Palembang. Another achievement made by IPC in 2015 was the launch of IPC Corporate University by the President of Republic of Indonesia Joko Widodo. IPC Corporate University is part of a strategic and visionary transformation program in order to prepare things related to soft infrastructure. Through IPC Corporate University, the Company expects to be able to produce a glorious generation of highly competitive with the technical competence of port and logistics, management and reliable leadership.

2016

Perusahaan memasuki fase pertama *Corporate Roadmap*, yaitu *Fit in Infrastructure* dengan fokus pada penataan tata kelola atau *governance* yang mencakup proses bisnis, SOP, dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; disertai dengan penyelarasan (*fine-tuning*) dalam semua aspek. Salah satu pencapaian terbesar perusahaan di tahun 2016 adalah peresmian pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok/*New* Priok *Container* Terminal 1 (NPCT1) oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 September 2016. Selain itu, Perusahaan juga berhasil mencapai skor GCG dengan nilai 93,316 dan skor KPKU dengan nilai 532,25.

The Company began the first phase of the Corporate Roadmap, The Fit in Infrastructure phase with the focus to governance management that covers business process, SOP, and structure; corporate culture, corporate and business model restructuring; and business redefinition; along with fine tuning in all aspects. One of the biggest achievements of the Company in 2016 was the inauguration of the Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok/PT New Priok Container Terminal 1 (PT NPCT1) by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo on September 13, 2016. In addition, the Company also managed to achieve 93.316 GCG score and 532.5 KPKU score.

2017

Pada Fase *Enhancement*, IPC menutup tahun 2017 dengan membukukan capaian kinerja keuangan dan operasional yang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh yang pertama kalinya dalam sejarah IPC didirikan, IPC mampu meraih pencapaian tertinggi yaitu tahun buku 2017 pendapatan usaha dicatatkan sebesar Rp10,91 triliun dan laba bersih Rp2,21 triliun EBITDA Rp4,03 triliun, BOPO 70,15%. Sementara pada aspek operasional, realisasi trafik arus peti kemas tercapai 6,93 juta TEUs, arus barang terealisasi 57,09 juta ton, kunjungan kapal pencapaiannya 34.662 unit, serta arus penumpang sebanyak 612.680 orang.

IPC memberikan jasa layanan yang diberi nama "*Java South East Asia Express Services/Java SEA Express Services*" atau disingkat "*JAX Services*", dengan rute pelabuhan Tanjung Priok ke *West Coast* (LA dan Oakland) Amerika Serikat. Rute ini dilayani melalui perusahaan pelayaran CMA-CGM atau *Compagnie Maritime d'Affrètement-Compagnie Gènèrale Maritime* yang juga membuka akses langsung ke Eropa. Kehadiran kapal kontainer berkapasitas 10.000 TEUs di Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan kapal terbesar yang pernah bersandar di pelabuhan tersebut.

In Enhancement Phase, IPC closed the year 2017 by posting outstanding financial and operational performance achievements. This is because for the first time in the history since IPC was established, IPC achieved the highest achievement for the fiscal year 2017. Revenue was recorded at Rp10.91 trillion and net profit was at Rp2.21 trillion, EBITDA was at Rp4.03 trillion, BOPO was at 70.15 percent. While operationally, the realization of container flow traffic reached 6.93 million TEUs, the flow of goods reached 57.09 million tons, ships visit reached 34,662 units and passengers were as much as 612,680 people.

IPC provides services under the Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services, or abbreviated as "JAX Services", connecting Tanjung Priok Port to US West Coast ports at LA and Oakland. This route is served through the CMACGM (Compagnie Maritime d'Affrétement-Compagnie Générale Maritime) shipping company, which also opens direct access to Europe. The presence of the first 10,000 TEUs container vessel at the Tanjung Priok Port Branch signals the milestone of the largest ship ever to dock at the port.

2018

Tahun 2018 merupakan tahun "*Establishment*" dengan fokus tahun ini adalah *"Volume Growth"*, "*Profitability Growth*" dan "*Holding Establishment".*

2018 is the year of "Establishment" with the focus of "Volume Growth", "Profitability Growth" , and "Holding Establishment".

2019

Capaian IPC di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 12 cabang pelabuhan telah memiliki sistem operasi berbasis digital yang setara dengan tingkat kebutuhan masing-masing cabang pelabuhan;
- IPC memperkenalkan *Single Truck Identity Database* (TID) yang merupakan basis data truk yang hilir mudik di pelabuhan IPC. Tanjung Priok sebagai *pilot project* dan akan diimplementasikan secara penuh di cabang pelabuhan lainnya pada tahun 2020;
- IPC berhasil membangun kerjasama *sisterport* dengan 11 pelabuhan yaitu *Port of* Ningbo-China, *Port of* Guangzhou – China, *Port of* Shenzhen-China, *Port of* Baku-Azerbaijan, *Port of* Townsville-Australia, *Port of* Lazaro Cardenas – Mexico, *Port of* Hamad-Qatar, *Port of* Djibouti – Afrika Timur, *Port of* Sabah-Malaysia dan *Port of* Los Angeles – Amerika;
- Pertengahan tahun 2019, lembaga pemeringkat independen *Standard & Poor's* meningkatkan peringkat IPC menjadi BBB dari peringkat sebelumnya BBB- dengan *outlook stable* (*prospek stable*) yang menunjukan bahwa tren kinerja positif perusahaan; dan
- Penilaian KPKU dan skor GCG menunjukan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir. Untuk *score* KPKU pada tahun 2019 IPC berhasil mencapai 616,75 dengan predikat *Emerging Industry Leader*. Sementara dari aspek GCG tahun 2019 kembali mencatat peningkatan signifikan dan mencapai skor 98,30 dengan kategori Sangat Baik.

IPC's achievements in 2019 are as follows:

- 12 Port Branches already have digital-based operating systems that are to the level of needs of each port branch;
- IPC introduced Single Truck Identity Database (TID), which is a database of trucks going back and forth at the ports of IPC. Tanjung Priok as a pilot project and will be fully implemented in other port branches in 2020;
- IPC succeeded in establishing sister port cooperation with 11 ports, namely Port of Ningbo-China, Port of Guangzhou-China, Port of Shenzhen-China, Port of Baku-Azerbaijan, Port of Townsville - Australia, Port of Lazaro Cardenas - Mexico, Port of Hamad-Qatar, Port of Djibouti - East Africa, Port of Sabah-Malaysia and Port of Los Angeles - America;
- In mid-2019, the independent rating agency Standard & Poor's upgraded IPC rating to BBB from the previous rating of BBB- with a stable outlook indicating a positive performance trend in the Company;
- KPKU assessment and GCG scores show an increasing trend over the past 4 years. For 2019 KPKU score, IPC reached 616.75 with the title of Emerging Industry Leader. While 2019 GCG aspect was recorded a significant increase once more and reached a score of 98.550 with the category of Very Good; and
- Changes in Types of Share and Changes in Articles of Association Deed No. 09 dated August 21, 2019 by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,.

2020

- Inisiatif Kerja Sama Awal (MoU) dengan 2 (dua) pelabuhan asing, yaitu *Port of* Rotterdam dan *Port of* Constantza, Romania;
- Akuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49 persen porsi kepemilikan saham PT ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000;
- Mendukung pembentukan *Holding* Rumah Sakit BUMN atau *Indonesia Health Corporation* (IHC) melalui kepemilikan saham IPC di PT Pertamina Bina Medika IHC sebesar 2 persen; dan
- *Progress* pekerjaan konstruksi pembangunan fisik Terminal Kijing Tahap I per 31 Desember 2020 sebesar 80,01 persen, serta sedang dilaksanakan pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I dan Menara Maritim Indonesia.
- Initial Cooperation Initiatives (MoU) with two overseas ports, the Port of Rotterdam and Port of Constantza, Romania;
- Acquisition of shares by PT Multimedia Nusantara in PT ILCS amounting to 4,900,00 shares, equivalent to 49 percent of shares of PT ILCS with a transfer value amounting to Rp49,200,000;
- Supported the establishment of State-Owned Enterprise Hospital Holding, the Indonesia Health Corporation (IHC) by acquiring 2 percent of PT Pertamina Bina Medika IHC shares by IPC; and
- Progress of physical construction work of Kijing Terminal Phase I as of December 31, 2020 reached 80.01 percent. At the same time, the construction of Kalibaru Utara Terminal Phase I, and Indonesia Maritime Tower was in progress.

2021

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan berganti nama menjadi "PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo".

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) were merged into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with a name change to "PT Pelabuhan Indonesia (Persero) abbreviated as Pelindo".

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

TEMA DAN ARTI TEMA THEMES AND EXPLANATION OF THEMES	2
DAFTAR ISI TABLE OF CONTENT	10
SEKILAS TENTANG PERSEROAN THE COMPANY AT A GLANCE	12
KONTRIBUSI TERBAIK KAMI OUR BEST CONTRIBUTION	13
KILAS KINERJA 2021 PERFORMANCE HIGHLIGHTS	22
PENCAPAIAN KINERJA PENTING TAHUN 2021 IMPORTANT PERFORMANCE ACHIEVEMENTS IN 2021	24
INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCE	40
PERISTIWA PENTING IMPORTANT EVENTS	41
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF DIRECTORS' AND BOARD OF COMMISSIONERS' REPORTS	48
LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' REPORT	50
LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT	72
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) STATEMENT BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS CONCERNING RESPONSIBILITY FOR THE 2021 ANNUAL REPORT OF PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	86
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	88
IDENTITAS PERUSAHAAN COMPANY IDENTITY	90
NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG NAMES AND ADDRESSES OF REGIONAL OFFICES AND BRANCH OFFICES	92
BRAND PERUSAHAAN COMPANY BRAND	96
BIDANG USAHA BUSINESS FIELDS	101
PRODUK DAN JASA PRODUCTS AND SERVICES	103
PETA WILAYAH USAHA MAP OF BUSINESS AREAS	108
DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI ASSOCIATION MEMBERSHIP	109
STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE	110
PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' PROFILES	112
PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILES	142
INFORMASI YANG TERSEDIA DI *WEBSITE* INFORMATION AVAILABLE ON THE WEBSITE	210
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	212
TINJAUAN PEREKONOMIAN ECONOMIC REVIEW	214
TINJAUAN OPERASIONAL OPERATIONAL REVIEW	234
TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW	288

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL 384

STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL STRATEGY 386

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 388

STRUKTUR PENGELOLA DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL DIRECTORATE MANAGEMENT STRUCTURE 398

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY 400

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY 402

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE 412

PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
ACHIEVEMENTS IN CORPORATE GOVERNANCE 414

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
BASIS OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION 416

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
STRUCTURE AND MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE 418

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA
GUIDELINES OF PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE 632

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT 648

PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*
BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES 659

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 660

LAMPIRAN
APPENDIX 664

KRITERIA OJK, ARA DAN SK-16
OJK, ARA AND SK-16 CRITERIA 666

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT 726

SEKILAS TENTANG PERSEROAN

THE COMPANY AT A GLANCE



KONTRIBUSI TERBAIK KAMI
OUR BEST CONTRIBUTION

PENGGABUNGAN PELINDO

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan BUMN *Non-Listed* yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, secara legal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bertindak sebagai *surviving entity* (perusahaan yang bertahan). Kemudian berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi "PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo".

Perjalanan Penggabungan Pelindo sebelumnya telah lama diwacanakan. Dimulai pada tahun 2009, dilakukan penyusunan Kajian *Holding* Pelabuhan dan Pengerukan. Kemudian disusul pada tahun 2012 telah disusun Kajian Integrasi Pelindo I, II, III, dan IV. Selanjutnya pada tahun 2013, telah disusun juga studi *Holding* Pelabuhan Indonesia dan pembentukan PT Terminal Petikemas Indonesia. Pada tahun 2016, dibentuk PMO Nasional dan dilanjutkan dengan penyusunan studi Pelindo *Incorporated*, yang saat itu bermaksud untuk menyatukan Anak Perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) yang memiliki bidang usaha sejenis. Selanjutnya, pada tahun 2017 dilaksanakan inisiasi Pembentukan *Holding* Maritim dan pada tahun 2018 dilaksanakan studi *Integrated Port Network* yang mengidentifikasi 7 (tujuh) Hub Pelabuhan RJPMN, hingga pada tahun 2019 dilaksanakan inisiasi Pembentukan *Subholding* Petikemas.

Perkembangan berikutnya adalah terbentuknya Tim Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Badan Usaha Milik Negara dalam Layanan Pelabuhan oleh Kementerian BUMN pada bulan Desember 2019 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-311/MBU/12/2019, sebagai bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan konektivitas perdagangan yang dapat berkontribusi menurunkan biaya logistik nasional. Keputusan ini kemudian terus diperbarui dalam Keputusan Menteri BUMN No. SK-83/MBU/Wk2/11/2020 tanggal 13 November 2020 dan Keputusan Menteri BUMN No. SK-33/MBU/Wk2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021. Kementerian BUMN berinisiatif untuk menjalankan proses konsolidasi BUMN dalam Layanan Kepelabuhanan agar penataannya tidak berdasarkan wilayah dan memberikan kapasitas maksimal dalam konektivitas maritim dan konektivitas dengan kawasan strategis yang terkait

PELINDO MERGER

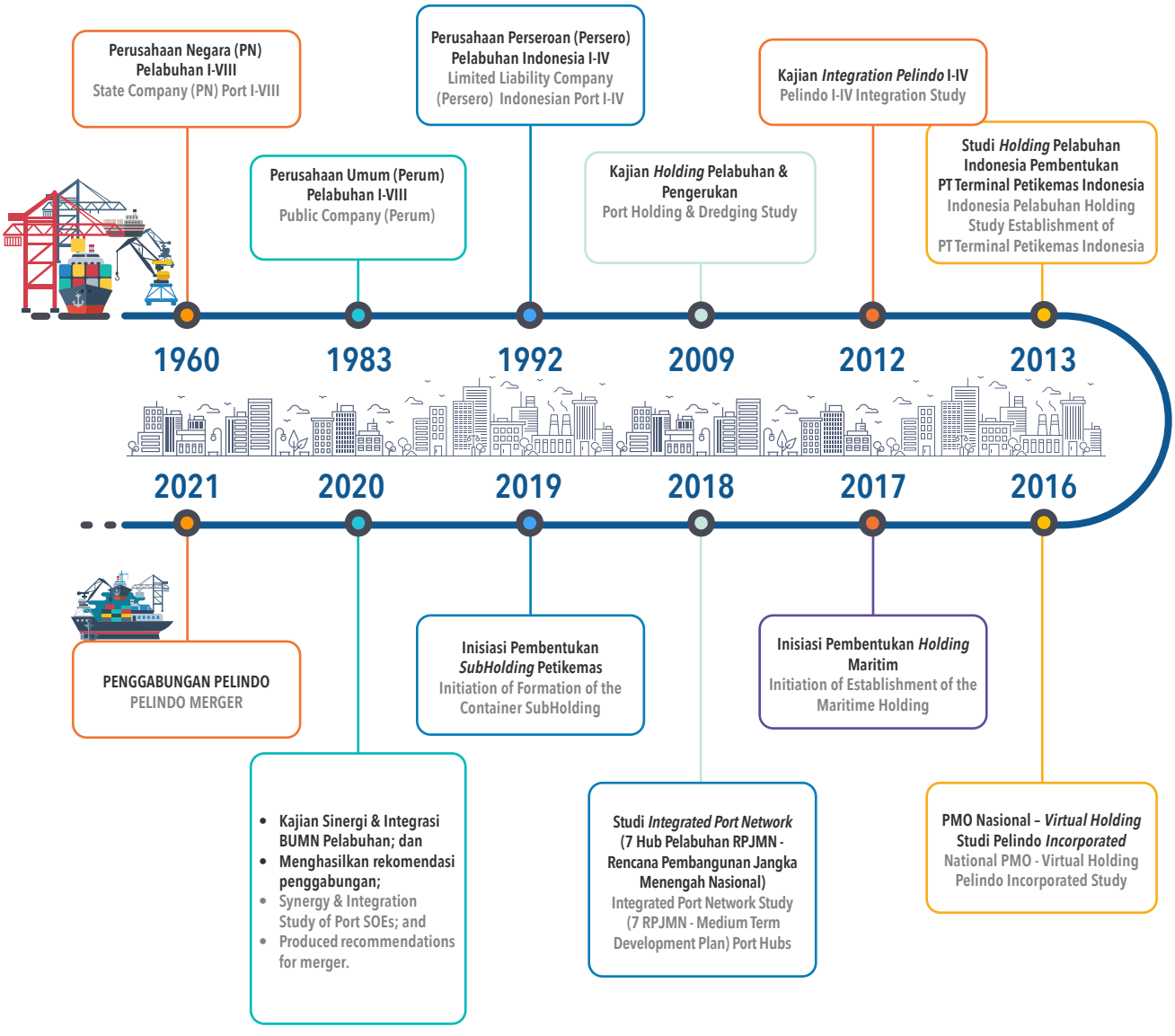
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) are non-listed state-owned companies whose shares are 100% owned by the Ministry of SOEs as shareholders representing the Republic of Indonesia. On October 1, 2021, legally PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) were merged into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Government Regulation No. 101 Year 2021. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) acts as the surviving entity. Then based on the Republic of Indonesia Minister of SOEs Letter No. S-756/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Approval of Change of Name, Change of Articles of Association and Company Logo, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to "PT Pelabuhan Indonesia (Persero), abbreviated as Pelindo".

The journey to Merge Pelindo had been under discussion for a long time, starting in 2009, when a Port Holding and Dredging Study was prepared. In 2012, Pelindo I, II, III, and IV Integration Studies had been compiled. In 2013, the Indonesian Port Holding Study and establishment of PT Terminal Petikemas Indonesia were prepared. In 2016, the National PMO was formed and continued with the preparation of the Pelindo Incorporated study, which at that time was intended to merge the Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) with similar business fields. Furthermore, in 2017 a Maritime Holding Formation initiation was carried out and in 2018 an Integrated Port Network study identified 7 (seven) RJPMN Port Hubs, and then in 2019 the Formation of the Container Subholding was initiated.

The next development was the formation by the Ministry of SOEs in December 2019 of a Team for the Acceleration of Synergy Improvement and Integration of State-Owned Enterprises in Port Services as stated Minister of SOEs Decree No. SK-311/MBU/12/2019, as part of the Government's strategic program to improve trade connectivity and contribute to lowering national logistics costs. This decision was further updated in the Minister of SOEs Decree No. SK-83/MBU/Wk2/11/2020 dated November 13, 2020 and the Minister of SOEs Decree No. SK-33/MBU/Wk2/03/2021 dated March 29, 2021. The Ministry of SOEs took the initiative to carry out the SOE Port Services consolidation process not based on region, but by strategic areas to create maritime connectivity throughout Indonesia. By so doing, SOEs port services would be more efficient in their operations and investment, create an optimal sea transportation network, and provide excellent services supported by standards

di seluruh Indonesia. Dengan demikian, BUMN dalam layanan pelabuhan dapat menjadi lebih efisien dalam operasional dan investasi, tercipta jaringan transportasi laut yang optimal, serta dapat memberikan pelayanan yang prima dengan didukung oleh infrastruktur kepelabuhanan yang standar dan memadai. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Kajian Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan yang menghasilkan *output* berupa desain penggabungan keempat Pelindo pada tahun 2020.

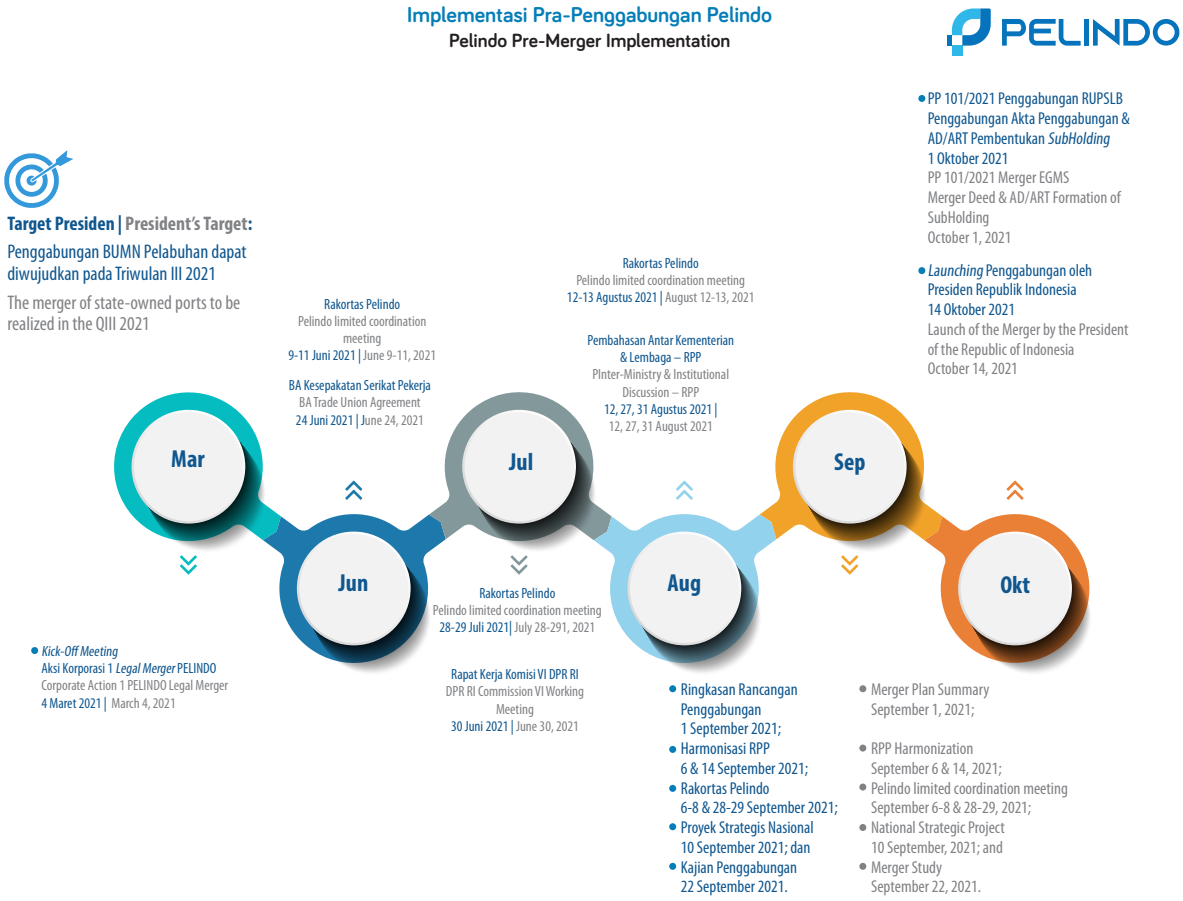
and an adequate port infrastructure. This was realized by preparing a Synergy and Integration Study for Port SOEs that resulted in a design for merging the four Pelindo in 2020.



Implementasi Pra-Penggabungan Pelindo dieksekusi selama 7 (tujuh) bulan dimulai sejak *Kick-off* di bulan Maret 2021 hingga tercapai legal *merger* efektif pada tanggal 1 Oktober 2021 serta secara resmi dilakukan *Launching* Penggabungan Pelindo oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2021.

Pre-Merger of Pelindo was executed for 7 (seven) months starting from Kick-off in March 2021 until a legal merger was reached effective on October 1, 2021 and the President of the Republic of Indonesia officially launched the Merger of Pelindo on October 14, 2021.

Implementasi Pra-Penggabungan Pelindo
Pelindo Pre-Merger Implementation

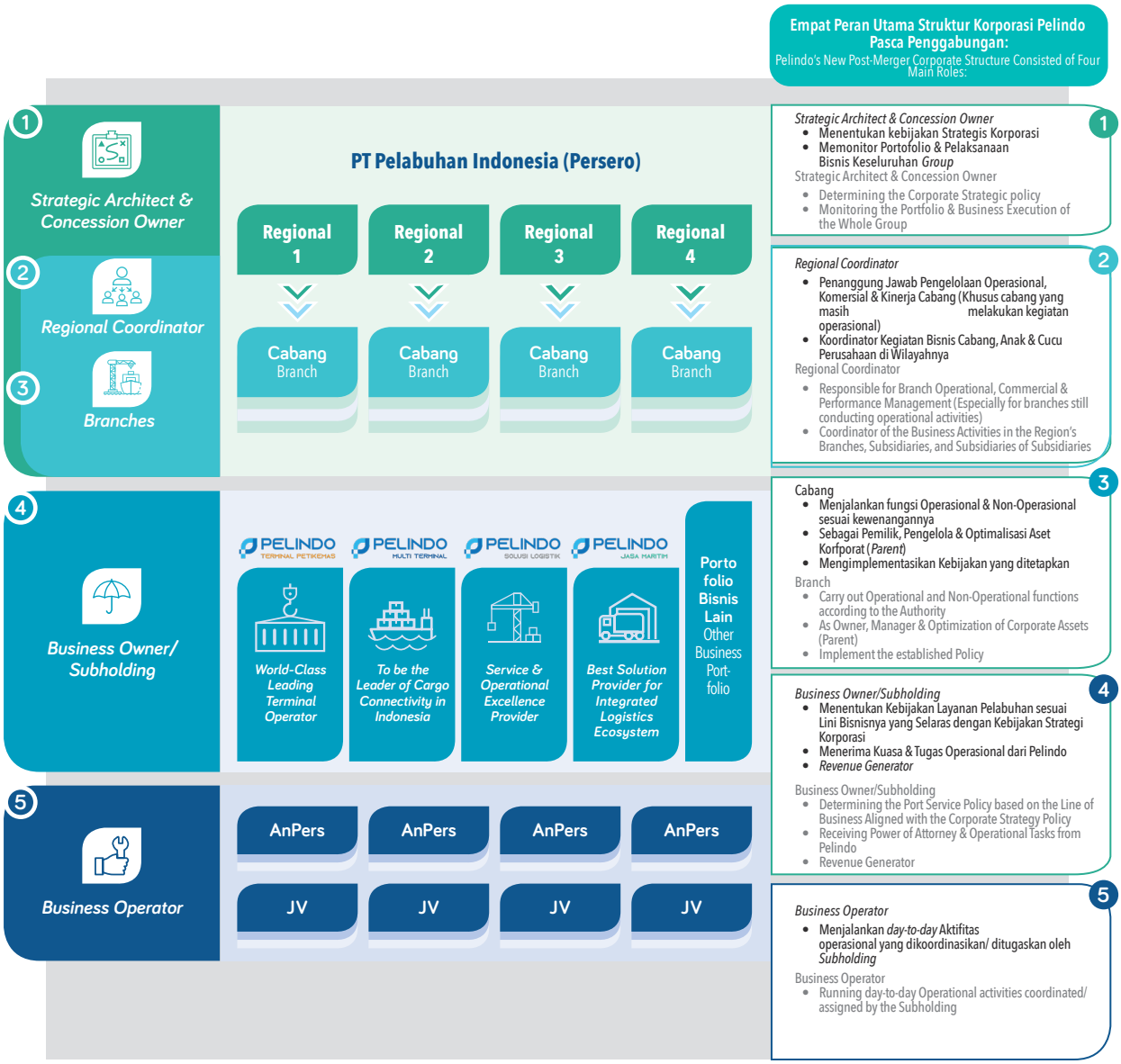


STRUKTUR KORPORASI PELINDO PASCA PENGGABUNGAN

Berdasarkan Kajian Penggabungan Usaha Pelindo, Pelindo memiliki struktur korporasi baru pasca penggabungan yang terdiri dari empat peran utama yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang memegang peran *Strategic Architect & Concession Owner*, Regional 1 hingga Regional 4 yang memegang peran sebagai Regional *Coordinator*, 4 (empat) perusahaan *Subholding* yang memegang peran sebagai *Business Owner*, serta Anak Perusahaan Pelindo saat ini yang akan memegang peran sebagai *Business Operator*. Secara umum, empat peran utama struktur korporasi Pelindo pasca penggabungan adalah pada sebagai berikut:

PELINDO CORPORATE STRUCTURE AFTER THE MERGER

Based on the Pelindo Business Merger Study, Pelindo's new post-merger corporate structure consisted of four main roles, namely PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the role as Strategic Architect & Concession Owner, Regional 1 to Regional 4 with the role of Regional Coordinator, 4 (four) Subholding companies with the role of a Business Owner, as well as an existing Pelindo Subsidiary with the role as a Business Operator. Overall, the four main roles in Pelindo's post-merger corporate structure are as follows:

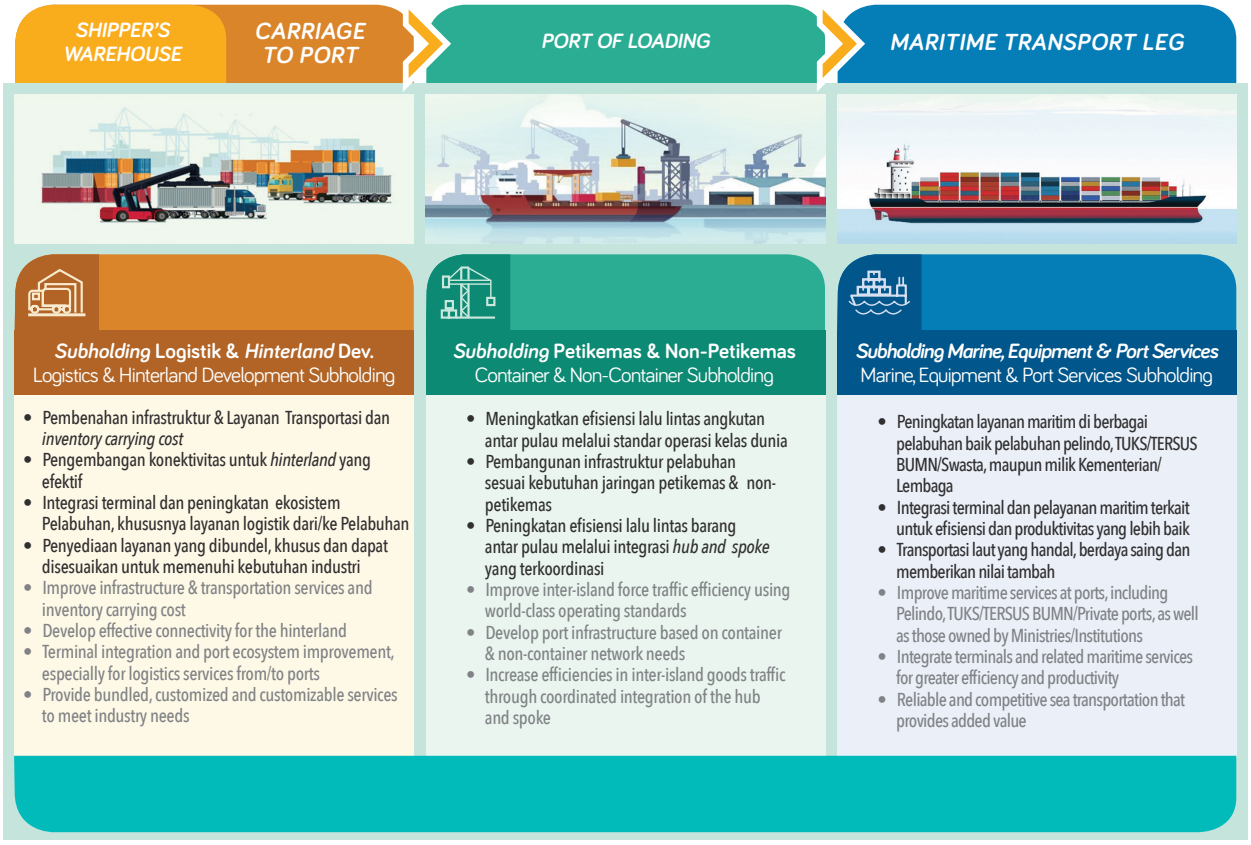


PERAN *SUBHOLDING* DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI RANTAI LOGISTIK

Dengan dibentuknya *subholding*, diharapkan masing-masing perusahaan dapat memegang peran yang telah diamanatkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku *Holding Company*. Empat *Subholding* Pelindo akan memegang peranan penting sepanjang mata rantai logistik di Indonesia sehingga diharapkan dapat menghadirkan nilai lebih *(added value)* bagi *Group* Perusahaan, masyarakat, maupun Negara Republik Indonesia.

SUBHOLDING ROLE FOR IMPROVING THE LOGISTICS CHAIN EFFICIENCY

By establishing the subholding, it is hoped that each company will play a role as mandated by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) the holding Pelindo's four subholdings will play an important role in the logistics chain in Indonesia so they are expected to provide added value for the Company Group, the community, and the Republic of Indonesia.



SERAH OPERASI BISNIS DAN *INBRENG* SAHAM

Pasca *legal merger*, dilaksanakan restrukturisasi organisasi Pelindo untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan penciptaan nilai yaitu serah operasi bisnis dan *inbreng* saham. Pada tanggal 21 Desember 2021, telah ditandatangani Berita Acara terkait Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan dari perusahaan induk yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada empat *Subholding* yang sesuai dengan lini bisnis masing-masing. Pertama, serah operasi bisnis dan pelayanan kepada *Subholding* PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Berita Acara No. KS.01/21/12/1/LAUH/KMPR/PLND-21. Kedua, adalah serah operasi bisnis dan pelayanan kepada *Subholding* PT Pelindo Multi Terminal melalui Berita Acara No. KS.01/21/12/2/LAUH/KMPR/PLND-21. Ketiga, serah operasi bisnis dan pelayanan kepada *Subholding* PT Pelindo Jasa Maritim melalui Berita Acara No. KS.01/22/12/1/LAUH/KMPR/PLND-21. Keempat, pengalihan usaha bisnis kepada *Subholding* PT Pelindo Solusi Logistik melalui Berita Acara No. KS.01/22/12/2/LAUH/KMPR/PLND-21.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 2022, dilakukan penataan anak perusahaan dengan melakukan pengalihan saham (*inbreng*) yang dimiliki oleh Pelindo pada anak perusahaan kepada *Subholding* sesuai dengan klasternya yaitu Klaster Petikemas, Klaster Non-Petikemas, dan Klaster Marine, *Equipment* dan *Port Services*. Pengalihan saham (*inbreng*) anak perusahaan ke dalam klaster *Subholding* ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2021 melalui surat No. S-1048/MBU/12/2021, Nomor: S-1049/MBU/12/2021, dan No. S-1050/MBU/12/2021.

HANDOVER OF BUSINESS OPERATIONS AND INBRENG SHARES

Post-legal merger, the Pelindo Organization restructuring took place to optimize the resources owned and increase added value, through the handover of business operations and inbreng shares. On December 21, 2021, the Meeting Minutes were signed concerning the handover of business operations and services from the parent company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to four subholding in accordance with their respective business lines. Firstly, the handover of business operations and services to Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas through the Meeting Minutes No. KS.01/21/12/1/LAUH/KMPR/PLND-21. Secondly, the handover of business operations and services to Subholding PT Pelindo Multi Terminal through the Meeting Minutes No. KS.01/21/12/2/LAUH/KMPR/PLND-21. Thirdly, the handover of business operations and services to Subholding PT Pelindo Maritime Services through the Meeting Minutes No. KS.01/22/12/1/LAUH/KMPR/PLND-21. Fourth, the transfer of business to PT Pelindo Solusi Logistik Subholding through Minutes No. KS.01/22/12/2/LAUH/KMPR/PLND-21.

On January 3, 2022, a subsidiary arrangement was carried out by transferring the shares (inbreng) owned by Pelindo in subsidiaries to the Subholding through a cluster arrangement, called the Container Cluster, Non-Container Cluster, and the Marine, Equipment and Port Services Cluster. The subsidiaries transferred (inbreng) into the Subholding clusters received approval from the Republic of Indonesia Ministry of SOEs on December 30, 2021 through Letter No. S-1048/MBU/12/2021, No. S-1049/MBU/12/2021, and No. S-1050/MBU/12/2021.

Adapun proses *inbreng* saham Pelindo pada Anak Perusahaan ke dalam Klaster Logistik dan *Hinterland Development* masih dalam pengkajian lebih lanjut. Daftar anak-anak perusahaan yang telah di*inbreng*kan ke dalam *Subholding* adalah sebagai berikut:

The process of integrating Pelindo's shares in Subsidiaries into the Logistics and Hinterland Development Cluster is still under further study. The list of subsidiaries transferred into a Subholding are as follows:

PELINDO TERMINAL PETIKEMAS

PELINDO CONTAINER CLUSTER

No.	Perusahaan Company	Jumlah Lembar Saham Dialihkan Number of Shares Transferred	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)	Kepemilikan Pelindo Pelindo Ownership
1	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	1.079.138	1.079.138.000.000	96,84%
2	PT Terminal Petikemas Surabaya	254.489.274	127.244.637.000	99,50%
3	PT Terminal Teluk Lamong	134.325	134.325.000.000	99,50%
4	PT Prima Terminal Petikemas	855.724.000	855.724.000.000	70,00%
5	PT Kaltim Kariangau Terminal	125	62.500.000	50,00%
6	PT IPC Terminal Petikemas	24.750	24.750.000.000	99,00%

PELINDO MULTI TERMINAL

PELINDO MULTI TERMINAL

No.	Perusahaan Company	Jumlah Lembar Saham Dialihkan Number of Shares Transferred	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)	Kepemilikan Pelindo Pelindo Ownership
1	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.	1.296.144.749	129.614.474.900	71,28%
2	PT Pelabuhan Tanjung Priok	24.750	24.750.000.000	99,00%

PELINDO JASA MARITIM

PELINDO MARITIME SERVICES

No.	Perusahaan Company	Jumlah Lembar Saham Dialihkan Number of Shares Transferred	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)	Kepemilikan Pelindo Pelindo Ownership
1	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	2.475.000	24.750.000.000	99,00%
2	PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	4.063.504.600	406.350.460.000	78,89%
3	PT Equiport Inti Indonesia	28.050	28.050.000.000	99,29%
4	PT Energi Pelabuhan Indonesia	2.400.000	24.000.000.000	55,00%
5	PT Pelindo Marine Service	305.000.000	305.000.000.000	98,23%
6	PT Pengerukan Indonesia	611.622	611.622.000.000	99,91%

Perjalanan Restrukturisasi Pelindo masih memerlukan berbagai tindak lanjut di tahun 2022 antara lain, seperti Rencana *Inbreng* anak-anak perusahaan pada Klaster Logistik dan *Hinterland Development*, penyusunan *Masterplan* dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk masing-masing *Subholding*, serta pemurnian bisnis pada setiap klaster sesuai dengan fokus lini bisnisnya. Di tengah berbagai aksi korporasi yang telah dan sedang dijalankan, dapat dirangkum sejumlah prinsip dasar *(guiding principles)*, pelajaran *(lessons learned)*, serta faktor penentu keberhasilan *(key success factors)* dari Penggabungan Pelindo sebagai berikut.

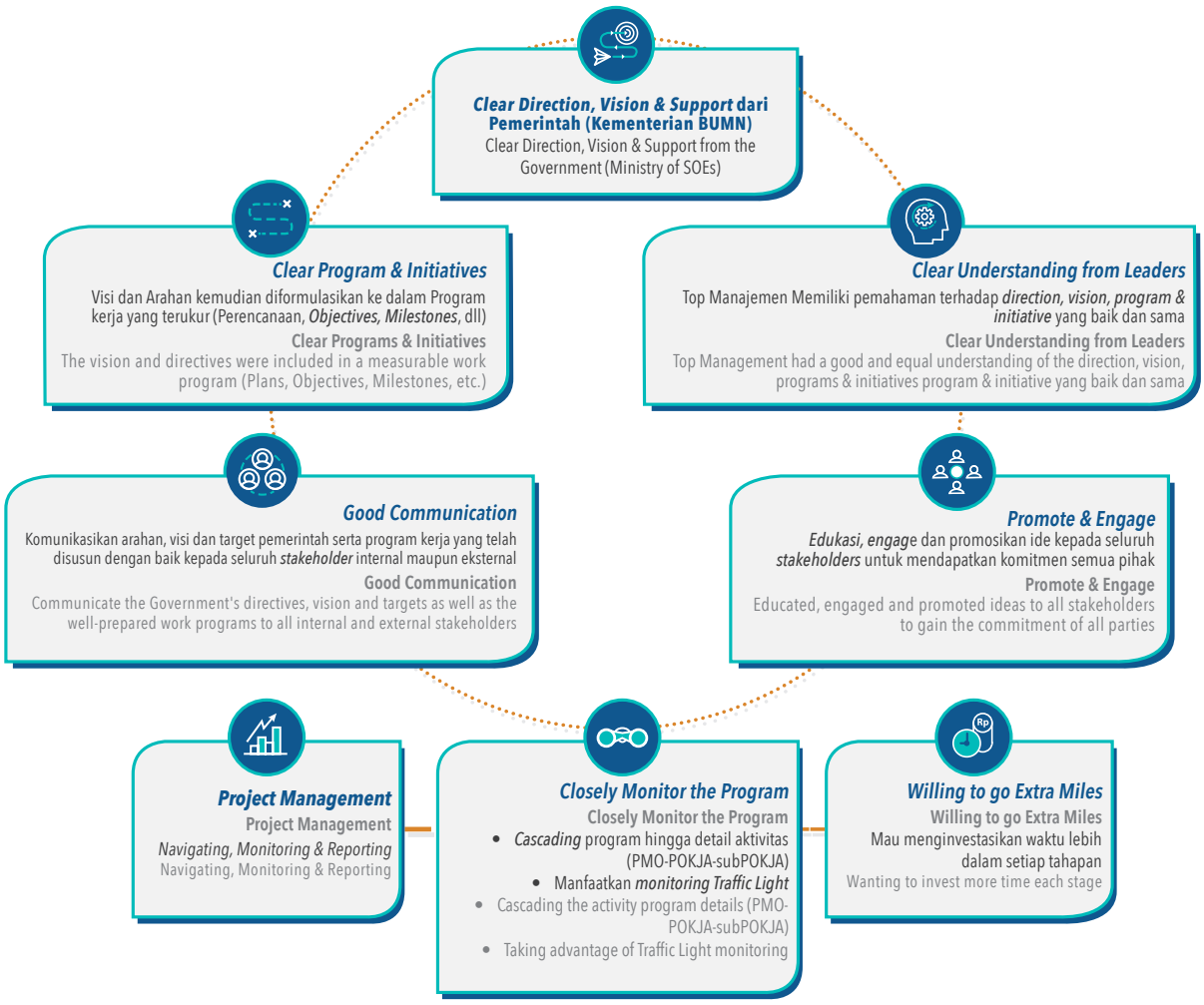
Pelindo's restructuring journey still requires various follow-ups in 2022, including the Inbreng Plan of subsidiaries in Logistics and Hinterland Development Cluster, preparation of Company's Master Plan and Long-Term Plan (RJPP) for each Sub-holding, as well as business purification in each cluster according to their business focus. In the midst of various corporate actions that have been and are being implemented, a number of basic principles (guiding principles), lessons learned, and key success factors from Pelindo Merger can be summarized as follows.

Guiding Principles Penggabungan
Merger Guiding Principles

Sejumlah *Guiding Principles* disepakati di awal pelaksanaan implementasi penggabungan Pelindo:
Guiding Principles were agreed upon at the start of the Pelindo merger:

- Minimum *disruption* pada aspek operasional & pelayanan pelanggan selama masa transisi
  Minimum disruption in operational & customer services during the transition period
- Tidak ada rasionalisasi dan pengurangan remunerasi pekerja, yang mulai dan terus dikomunikasikan sedari awal
  No rationalization and reduction of employees' remuneration, which was communicated from the beginning
- Serikat Pekerja dilibatkan semenjak awal proses sebagai *Partner* dalam keseluruhan proses penggabungan
  Trade Unions to be involved from the start of the process as Partners in the entire merger process
- Terus menjaga & Mengedepankan koordinasi dan komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal
  Continue to maintain & prioritize coordination and/or communication with internal and external parties

Lesson Learned



LESSON LEARNED - ADDITIONAL



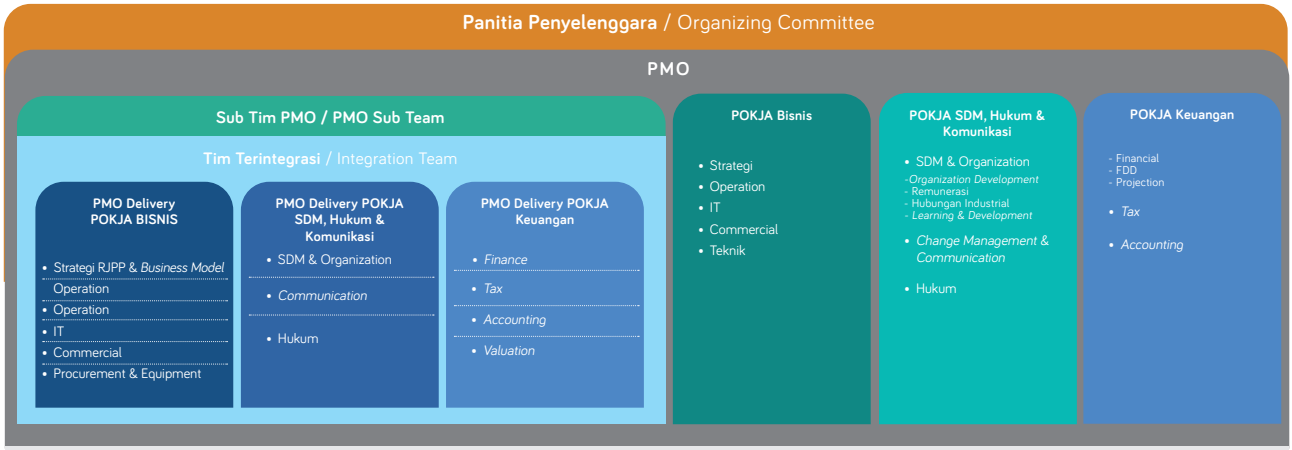
Faktor penentu keberhasilan Penggabungan BUMN Pelabuhan:
Key Success Factors of the Port SOE Merger:

Peraturan & Hukum Regulations & Laws	**Penggabungan BUMN Pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan & hukum yang berlaku** The SOE Port merger was carried out while still paying attention to and complying with applicable regulations & laws
Dukungan Kementerian & Lembaga Ministry & Institutions Support	**Penggabungan BUMN Pelabuhan mendapatkan dukungan penuh dari DPR, Kementerian Teknis, dan Lembaga Pemerintah terkait** The SOE Port merger received full support from DPR, Technical Ministry, and related Government Institutions
Clear Objectives & Guidance Clear Objectives & Guidance	**Terdapat arahan strategis yang jelas dan terstruktur sehingga dapat mencapai objektif yang telah ditentukan** There were clear and structured strategic directives the predetermined objectives could be achieved
***Framework* PMO & POKJA** PMO & POKJA Framework	**Penerapan *framework* dan model operasi yang tepat dari *Project Management Office* (PMO) dan Kelompok Kerja (Pokja) untuk memastikan implementasi penggabungan dan eksekusi bisnis paska penggabungan berjalan dengan lancar** Implemented the right framework and operating model for the Project Management Office (PMO) and Working Groups (Pokja) to ensure smooth merger and post-merger business execution
Detail Gap Analysis Detail Gap Analysis	**Pemetaan kondisi dan/atau kapabilitas saat ini dan/atau kapabilitas yang akan dituju sehingga defisiensi/*gap* dapat tergambar dengan menyeluruh** Mapping of current conditions and/or capabilities and/or capabilities to be addressed so that deficiencies/gaps can be described thoroughly
Change Management Change Management	**Penyelarasan budaya manajemen perubahan sebagai dasar membangun kolaborasi dan komunikasi yang baik bagi seluruh *stakeholder*** Aligned the change management culture as the basis for building good collaboration and communication for all stakeholders

Struktur Organisasi tim yang menjalankan implementasi Pra-Penggabungan Pelindo yang utama terdiri dari *Organizing Committee, Project Management Office* (PMO), *Sub* Tim PMO, Pokja Bisnis, Pokja SDM, Hukum dan Komunikasi dan Pokja Keuangan. Selain itu, *framework Project Management* juga digunakan dalam Penggabungan Pelindo, yang aktivitas utamanya adalah menjalankan proses *initiation, planning, execution,* dan *closing*.

The organizational structure of the team responsible for the main pre-merger of Pelindo was made up of an Organizing Committee, Project Management Office (PMO), PMO Sub Team, Business Working Group, HC, Legal and Communication Working Group and the Finance Working Group. In addition, a Project Management Framework was also used for the Pelindo merger, whose main activity was to handle the initiation, planning, execution, and closing.

Team Formation



PMO *Delivery Team*
- Memberikan navigasi kepada *Business Owners*/POKJA untuk menjalankan aksi dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi masing-masing
- Menyusun *framework*, pendekatan, dan metodologi serta melakukan aktivitas pendukung untuk menjalankan operasional
- Menyediakan masukan teknis dan keahlian untuk inisiatif terseleksi

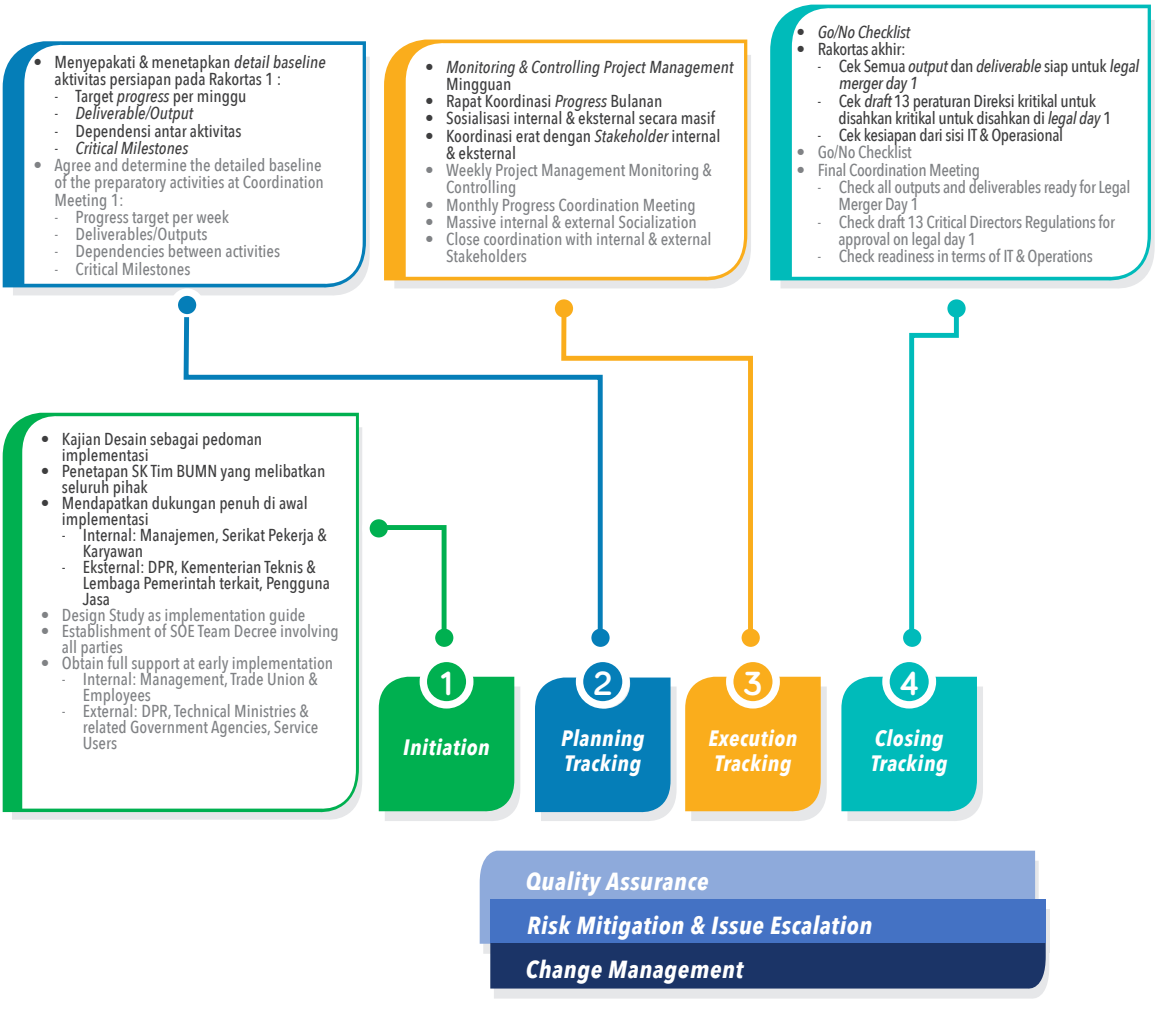
***Business Owners*/PKJA**
- Bertanggung jawab sebagai pemilik setiap inisiatif strategis atau program, termasuk namun tidak terbatas pada ruang lingkup, *timeline*, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan
- Memberikan keputusan strategis dan taktikal
- Menyediakan dan memastikan sumber daya telah tersedia untuk mendukung inisiatif

PMO Delivery Team
- Navigate Business Owners/POKJA to deliver action items in order to support business in achieving their functions and goals
- Provide framework, approach, and methodology and perform supporting activities to enable the operations
- Provide technical inputs and the know-how for selected initiatives as agreed

Business Owners/POKJA
- Be responsible as owners of each strategic initiatives or actions plans including but not limited to scope, timeline, budget, and resources
- Provide strategic and tactical decisions regarding overall initiatives and roadmap
- Provide and ensure that resources are available to support overall initiatives

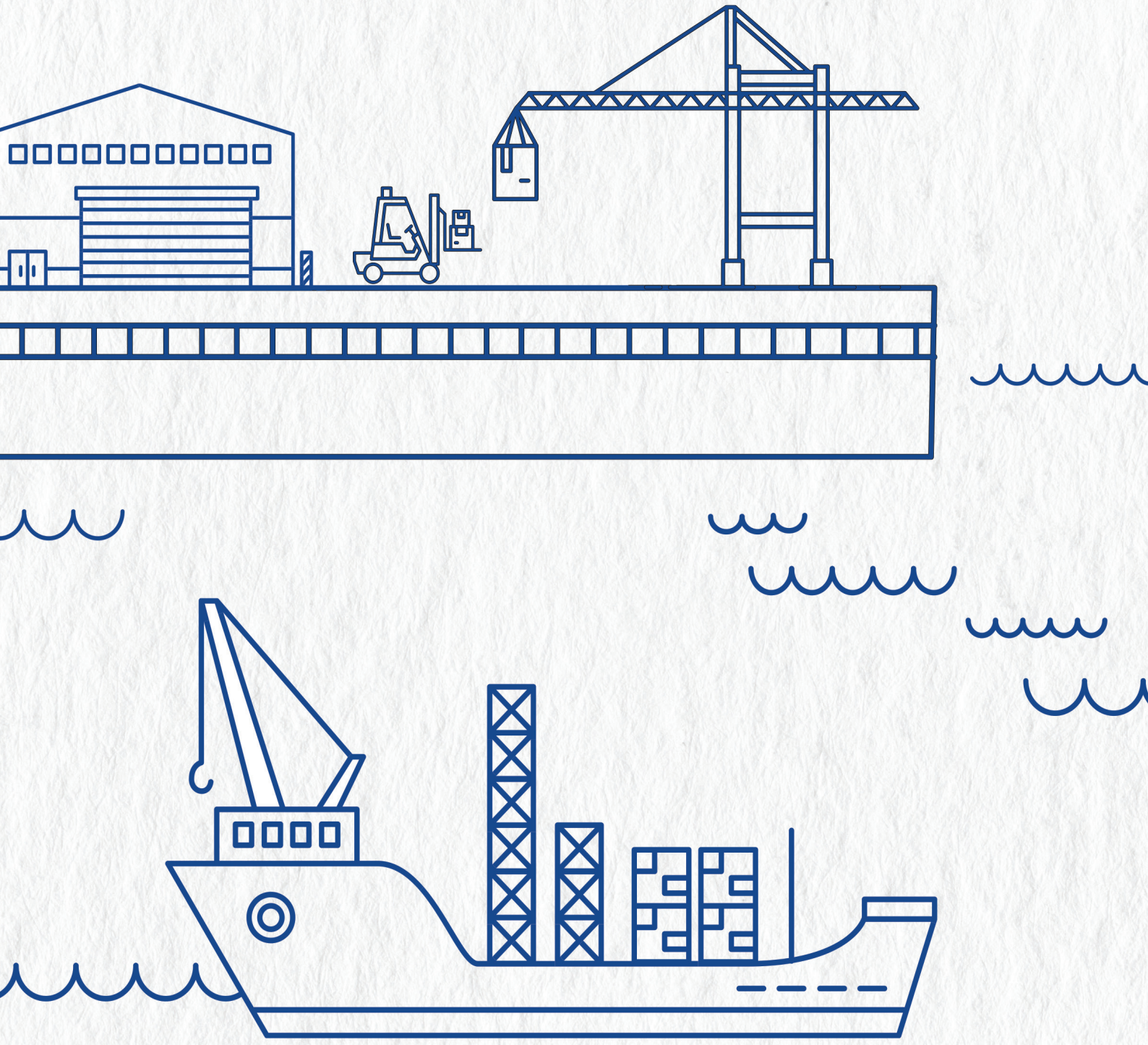
Project Management Penggabungan Pelindo

Pelindo Merger Project Management

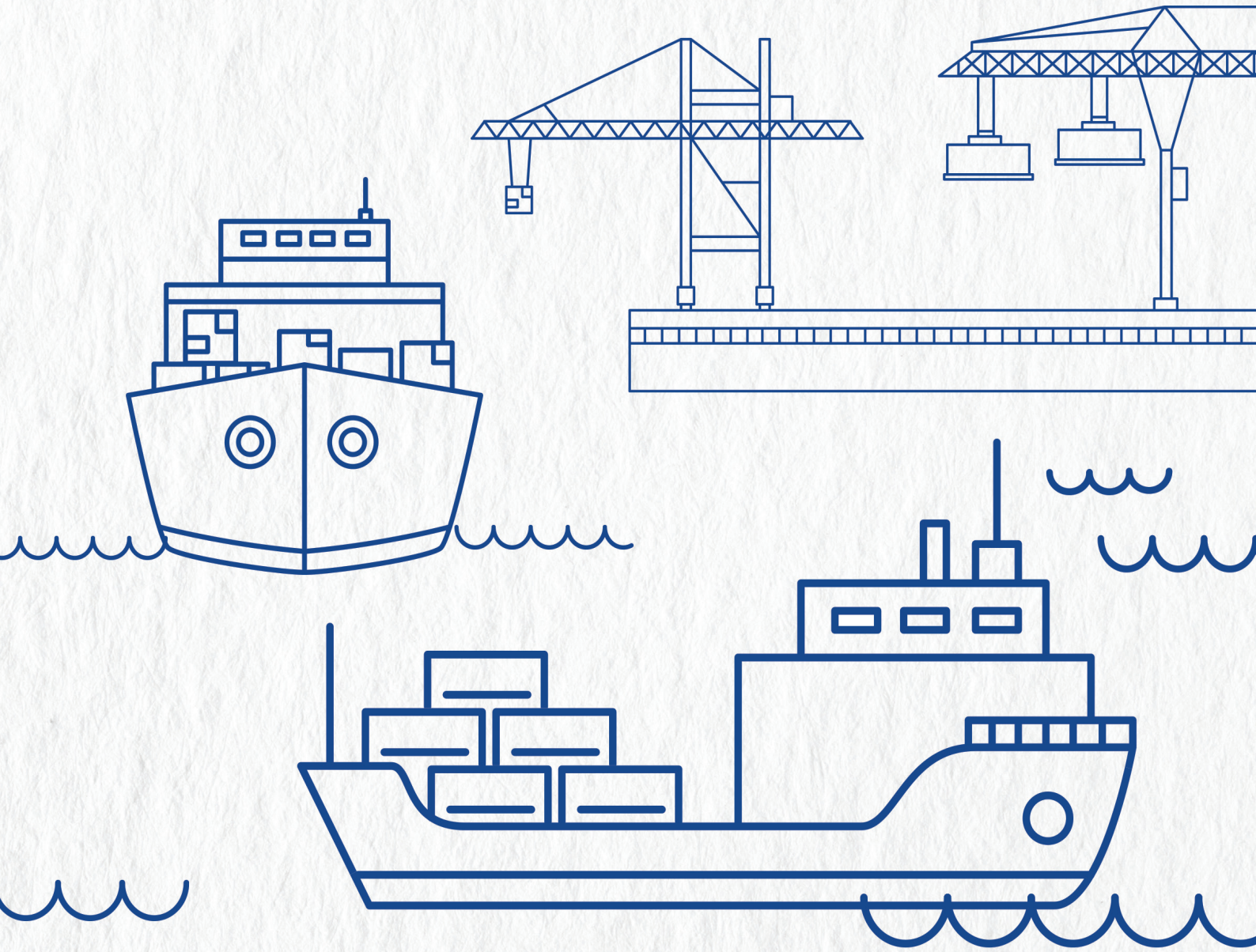


KILAS KINERJA 2021

Performance Highlights



01



PENCAPAIAN KINERJA PENTING TAHUN 2021

IMPORTANT PERFORMANCE ACHIEVEMENTS IN 2021

1. Total Arus Kapal dalam satuan Unit tahun 2021 mencapai 254.669 Unit meningkat 21,14% dari tahun 2020 yang mencapai 229.932 unit.
2. Total Arus Kapal dalam satuan GT tahun 2021 mencapai 1.186.217.247 GT meningkat 10,76% dari tahun 2020 yang mencapai 1.042.573.078 GT.
3. Total Arus Petikemas dalam satuan *box* tahun 2021 mencapai 13.234.256 *box*, meningkat 18,95% dari tahun 2020 yang mencapai 11.125.677 *box*.
4. Total Arus Petikemas dalam satuan teus tahun 2021 mencapai 17.056.636 teus, meningkat 21,55%, dari tahun 2020 yang mencapai 14.032.351 teus.
5. Total Arus Barang Non-Petikemas dalam satuan ton tahun 2021 mencapai 146.200.809 ton, meningkat 13,16% dari tahun 2020 yang mencapai 129.198.339 ton.
6. Total Arus Barang Non-Petikemas dalam satuan M3 tahun 2021 mencapai 4.515.637 M^3, meningkat 10,99% dari tahun 2020 yang mencapai 4.068.667 M^3.
7. Total Arus Barang Non-Petikemas dalam satuan MMBTU tahun 2021 mencapai 7.820.960 MMBTU, meningkat 905,66% dari tahun 2020 yang mencapai 777.694 MMBTU.
8. Total Arus Barang Non-Petikemas dalam satuan ekor tahun 2021 mencapai 635.120 ekor, meningkat 72,62% dari tahun 2020 yang mencapai 367.924 ekor.
9. Total Arus Penumpang pada tahun 2021 mencapai 8.056.905 orang, meningkat 11,27% dari tahun 2020 yang mencapai 7.240.547 orang.
10. Pendapatan operasi tahun 2021 mencapai Rp28,81 triliun, meningkat 14,28% dari tahun 2020 yang mencapai Rp25,21 triliun.
11. Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba merging entity tahun 2021 mencapai Rp3,18 triliun, meningkat 7,34% dari tahun 2020 yang mencapai Rp2,96 triliun.
12. Ekuitas tahun 2021 mencapai Rp42,05 triliun, meningkat 4,42% dari tahun 2020 yang mencapai Rp40,27 triliun.

1. Total Ship Traffic in 2021 amounted to 254,669 Units, an increase of 21.14% from 229,932 in 2020.
2. Total Ship Traffic in 2021 amounted to 1,186,217,247 GT Units, an increase of 10.76% from 1,042,573,078 in 2020.
3. Total Container Traffic in 2021 amounted to 13,234,256 box units, an increase of 18.95% from 11,125,677 in 2020.
4. Total Container Traffic in 2021 amounted to 17,056,636 TEUs, an increase of 21.55%, from 14,032,351 in 2020.
5. Total Non-Container Goods Traffic in 2021 amounted to 146,200,809 tons, an increase of 13.16% from 129,198,339 in 2020.
6. Total Non-Container Goods Traffic in 2021 amounted to 4,515,637 M^3, an increase of 10.99% from 4,068,667 M^3 in 2020.
7. Total Non-Container Goods Traffic in 2021 amounted to 7,820,960 MMBTU, an increase of 905.66% from 777,694 in 2020.
8. Total Non-Container Goods Traffic in 2021 amounted to 635,120 animals, an increase of 72.62% from 367,924 in 2020.
9. Total Passenger Traffic in 2021 amounted to 8,056,905 people, an increase of 11.27% from 7,240,547 in 2020.
10. Operating revenues in 2021 amounted to Rp28.81 trillion, an increase of 14.28% from Rp25.21 trillion in 2020.
11. Income for the year after effect of merging entity's income in 2021 amounted to Rp3.18 trillion, an increase of 7.34% from Rp2.96 trillion in 2020.
12. Equity in 2021 amounted to Rp42.05 trillion, an increase of 4.42% from Rp40.27 trillion in 2020.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

OVERVIEW OF IMPORTANT FINANCIAL DATA ACCOUNTING

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Financial Overview and Financial Ratio

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION			
ASET ASSETS			
ASET LANCAR CURRENT ASSETS			
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
Investasi jangka pendek Short-term investment	5.718.525.973	11.094.379.218	2.624.641.107
Piutang Usaha -neto Trade receivables - net			
Pihak Ketiga Third parties	1.253.132.841	1.277.605.993	1.427.409.151
Pihak Berelasi Related parties	263.129.705	279.352.489	567.011.017
Piutang lain-lain - neto Other receivables, net			
Pihak Ketiga Third parties	126.988.519	103.528.199	238.179.011
Pihak Berelasi Related parties	1.153.378.016	1.316.074.276	1.432.457.049
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	258.677.724	192.477.003	254.756.941
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues			
Pihak Ketiga Third parties	297.585.161	435.894.846	437.277.939
Pihak Berelasi Related parties	33.383.321	67.889.867	123.414.505
Persediaan Inventories	217.674.563	187.041.439	201.270.798
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	1.080.535.298	1.161.817.240	1.662.075.285
Aset lancar lainnya Other current assets	55.194.659	154.078.392	117.794.047
Total Aset Lancar Total Current Assets	23.380.594.367	27.883.195.752	30.906.300.774
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS			
Investasi Jangka Panjang Long-term investments	3.751.638.877	3.518.317.017	3.635.325.634
Properti investasi – neto Investment properties - net	873.433.978	867.416.746	885.703.650
Aset tetap – neto Fixed assets - net	46.300.182.922	44.578.602.925	42.239.772.185
Aset kerjasama operasi - neto Joint operation assets - net	408.013.146	434.117.133	461.100.101
Aset hak-guna - neto Right-of-use assets - net	452.002.189	516.020.761	-
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	587.268.838	753.558.421	241.393.302
Aset tak berwujud - neto Intangible assets - net	38.760.454.848	36.701.629.229	32.528.607.574

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	750.660.351	1.312.773.446	1.174.901.960
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	964.824.984	2.011.116.364	2.461.193.103
Total Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	92.848.480.133	90.693.552.042	83.627.997.509
TOTAL ASET **TOTAL ASSETS**	**116.229.074.500**	**118.576.747.794**	**114.534.298.283**
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY			
LIABILITAS LIABILITIES			
LIABILITAS JANGKA PENDEK **CURRENT LIABILITIES**			
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	5.196.855	4.000.000	34.193.914
Utang usaha Trade payables			
Pihak Ketiga Third parties	1.338.142.064	1.686.203.358	3.044.115.352
Pihak Berelasi Related parties	1.926.350.211	3.267.820.968	3.672.159.168
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	1.298.045.484	1.379.039.522	1.207.043.755
Utang pajak Taxes payable	578.540.987	647.527.154	827.210.649
Beban akrual Accrued expenses	3.699.192.020	3.664.488.679	3.838.675.350
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities			
Utang obligasi Bonds payable	-	499.768.052	-
Utang Bank Bank loans	2.365.898.747	504.471.670	388.678.828
Liabilitas Sewa Lease liabilities	76.345.578	75.354.511	-
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities			
Pihak Ketiga Third parties	1.182.432.796	1.023.914.350	762.147.091
Pihak Berelasi Related parties	1.066.277.650	930.066.278	608.481.268
Total Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**13.536.422.392**	**13.682.654.542**	**14.382.705.375**

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES			
Liabilitas jangka Panjang- setelah dikurangi bagian lancar LONG-TERM LIABILITIES - OF CURRENT MATURITIES			
Utang obligasi Bonds payable	40.176.176.480	39.699.180.499	39.615.134.308
Utang Bank Bank loans	6.656.343.511	11.128.996.490	8.613.919.696
Liabilitas Sewa Lease liabilities	257.540.134	319.371.402	-
Utang lembaga keuangan non-bank Loan from non-bank financial institution			
Pihak Ketiga Third parties	476.290.919	332.402.837	213.793.871
Pihak Berelasi Related parties	949.751.736	670.300.506	437.976.537
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	105.071.621	117.774.083	91.505.345
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	4.495.055.535	4.620.448.208	4.604.082.256
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Other long-term liabilities	962.389.202	792.645.412	702.551.614
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	6.560.923.531	6.938.142.497	4.822.593.130
Total Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-current Liabilities**	**60.639.542.669**	**64.619.261.934**	**59.101.556.757**
TOTAL LIABILITAS **TOTAL LIABILITIES**	**74.175.965.061**	**78.301.916.476**	**73.484.262.132**
EKUITAS EQUITY			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk **Equity attributable to owners of the parent entity**			

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B Modal dasar - 33.000.000 saham dan, terdiri dari: 1 saham seri A dwiwarna dan 32.999.999 saham Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 4.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.457.067 saham terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 8.457.066 saham Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1.444.029 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively Authorized capital – 33,000,000 shares, consist of: 1 Series A Dwiwarna share and 32,999,999 Series B shares as of December 31, 2021 2020 and 2019 Issued and fully paid - 8,457,067shares consists of: 1 Series A Dwiwarna share and 8,457,066 Series B shares as of December 31, 2021 and 1,444,029 shares as of December 31, 2020 and 2019	8.475.067.000	1.444.029.000	1.444.029.000
Modal donasi Donated capital	26.825.982	26.825.982	26.825.982
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(1.128.322.898)	(205.004.707)	(317.597.475)
Komponen ekuitas lainnya Other equity component	1.466.121	-	-
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali Difference in value of transactions with non-controlling interest	836.072.934	836.072.934	836.072.934
Ekuitas *merging entity* Merging entity equity	-	21.516.406.212	21.050.900.765
Saldo laba Retained earnings			
Ditentukan penggunaannya Appropriated	29.925.514.788	15.021.058.681	13.273.514.540
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	4.434.909.230	993.019.548	2.455.762.802
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	(2.062.503.591)	(1.119.546.220)	(105.008.860)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto **Equity attributable to owners of the parent entity – net**	**40.509.029.566**	**38.512.861.430**	**38.664.499.688**
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	1.544.079.873	1.761.969.888	2.385.536.463
EKUITAS NETO **TOTAL EQUITY**	**42.053.109.439**	**40.274.831.318**	**41.050.036.151**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS **TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**	**116.229.074.500**	**118.576.747.794**	**114.534.298.283**

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Pendapatan operasi Operating revenues	28.814.806.337	26.591.131.827	-
Pendapatan konstruksi Construction revenues	3.195.512.405	3.924.471.433	-
Beban operasi Operating expenses	(22.503.946.817)	(20.675.933.360)	-
Beban konstruksi Construction expenses	(3.195.512.405)	(3.924.471.433)	-
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto Other operating income (expense) - net	229.338.106	(196.538.108)	-
LABA USAHA **INCOME FROM OPERATIONS**	**6.540.197.626**	**5.718.660.359**	**-**
Pendapatan keuangan Finance income	407.775.884	699.581.748	-
Beban keuangan Finance costs	(2.540.082.866)	(2.544.366.171)	-
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	255.107.588	(39.998.707)	-
LABA SEBELUM PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN **INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX**	**4.662.998.232**	**3.833.877.229**	**-**
Beban pajak final Final tax expense	(487.671.869)	(436.180.278)	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN **INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX**	**4.175.326.363**	**3.397.696.951**	**-**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN **CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)**			
Kini Current	(847.733.176)	(745.867.105)	
Tangguhan Deferred	(151.447.911)	307.112.625	
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.176.145.276**	**2.958.942.471**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN **OTHER COMPREHENSIVE INCOME**			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi **Item that will not be reclassified to profit or loss**			
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net off tax	94.351.746	(1.643.196.940)	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi **Item that will be reclassified to profit or loss**			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	13.379.913	(329.050.522)	

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual Changes in fair value of available-for-sale financial assets	(47.180.224)	108.347.081	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.236.696.711**	**1.095.042.090**	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**			
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	3.292.133.734	3.076.425.168	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	(115.988.458)	(117.482.697)	
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.176.145.276**	**2.958.942.471**	
Penyesuaian atas laba *merging entity*: Adjustment of merging entity's other income:			
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	(2.280.313.686)	(1.805.995.892)	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	130.572.397	88.960.075	
	(2.149.741.289)	(1.717.035.817)	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE TO:**			
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	1.011.820.048	1.270.429.276	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	14.583.939	(28.522.622)	
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**1.026.403.987**	**1.241.906.654**	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY INCOME ATTRIBUTABLE TO:**			
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	3.351.776.051	1.212.324.495	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	(115.079.340)	(117.282.405)	

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.236.696.711**	**1.095.042.090**	
Penyesuaian atas laba komprehensif lainnya *merging entity*: Adjustment of merging entity's other comprehensive income:			
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	(2.170.608.365)	(956.432.580)	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	129.586.062	88.563.419	
	(2.041.022.303)	(867.869.161)	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE TO:**			
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	1.181.167.686	255.891.915	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	14.506.722	(28.718.786)	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**1.195.674.408**	**227.173.129**	
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) **BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)**	**1.028.217**	**2.130.446**	
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh) **DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)**	**842.992**	**1.560.716**	
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	28.876.470.288	27.085.501.244	
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya Payment to contractors, suppliers and others	(15.555.859.324)	(14.473.317.581)	
Pembayaran kepada karyawan Payment to employees	(5.661.556.853)	(5.472.976.164)	
Pembayaran pajak penghasilan Payment for income taxes	(1.319.862.044)	(997.779.715)	
Penghasilan bunga Interest received	1.336.818.218	1.196.017.199	
Penerimaan Pajak Tax receipt	1.078.288.509	63.644.781	
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi **Net Cash Provided by Operating Activities**	**9.828.607.048**	**7.401.089.764**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI **CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**			

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
Penerimaan dividen Receipt of dividend	322.271.932	240.088.963	
Laba penjualan aset tetap Gain on disposal of fixed assets	(1.969.868)	2.941.075	
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets and intangible assets	(6.908.699.330)	(9.290.836.817)	
Penerimaan (penempatan) investasi jangka pendek Receipt of (placement) short-term investments	5.742.520.260	(8.147.327.201)	
Penjualan (penambahan) pada penyertaan saham Sales (additional) of investment in shares	(2.674.308.254)	142.500.000	
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi **Net Cash Used in Investing Activities**	**(3.520.185.260)**	**(17.052.633.980)**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES			
Setoran modal saham Capital additional	1.201.500.000	84.100.000	
Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya Receipt (payment) of bank and other financial institution loans	(4.345.416.914)	962.524.322	
Penerimaan Pinjaman Receipt of loans	1.611.983.309	3.431.790.723	
Pembayaran Bunga Interest payment	(2.752.569.073)	(3.537.254.879)	
Pembayaran Liabilitas Sewa Payments of lease liabilities	(162.741.729)	(153.938.339)	
Pembayaran Dividen Payment of dividend	(560.000.000)	(1.377.043.949)	
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan **Net Cash Used in Financing Activities**	**(5.007.244.407)**	**(589.822.122)**	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS **NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**	**1.301.177.381**	**(10.241.366.338)**	
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	8.154.416	34.409.204	
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**	**11.613.056.790**	**21.820.013.924**	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**	**12.922.388.587**	**11.613.056.790**	
RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS			
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Aset Ratio of Profit (Loss) to Total Assets	0,03	0,01	0,02
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas Ratio of Profit (Loss) To Equity	0,08	0,02	0,06
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan Profit (Loss) To Income Ratio	0,09	0,03	0,10
Cash Ratio Cash Ratio	1,53	0,87	1,12
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	1,76	1,98	1,44

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Liabilities to Total Assets Ratio	0,64	0,66	0,64
Operating Ratio Operating Ratio	78,48	78,29	76,45
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Equity to Total Assets Ratio	0,36	0,34	0,36

*Disajikan kembali
* Restatement
Keterangan: Data Ikhtisar Keuangan mengikuti Laporan Keuangan Pasca *Merger*
Note: Financial Summary Data following the Post-Merger Financial Report

IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL OVERVIEW

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020
OPERASI KEPELABUHAN PORT OPERATIONS			
Arus Kapal Ship Traffic			
Dermaga Umum General Wharves			
Internasional International	Unit	11.805	15.647
	GT	201.654.893	256.676.692
Domestik Domestic	Unit	121.331	114.383
	GT	365.275.148	274.691.231
Total Dermaga Umum **Total General Wharves**	**Unit**	**133.136**	**130.030**
	GT	566.930.041	531.367.923
Non-Dermaga Umum Non-General Wharves			
Internasional International	Unit	16.383	12.593
	GT	244.159.765	205.638.361
Domestik Domestic	Unit	105.150	87.309
	GT	335.932.191	305.566.794
Total Non-Dermaga Umum **Total Non-General Wharves**	**Unit**	**121.533**	**99.902**
	GT	**619.287.206**	**511.205.155**
Total Arus Kapal **Total Ship Traffic**	**Unit**	**254.669**	**229.932**
	GT	**1.186.217.247**	**1.042.573.078**
Arus Petikemas Container Traffic			
Pelayanan Luar Negeri Overseas Service	Box	5.230.284	4.085.381
	Teus	7.872.429	6.010.578
Pelayanan Luar Negeri Overseas Service	Box	8.003.972	7.040.296
	Teus	9.184.207	8.021.773

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020
Total Arus Petikemas **Total Container Traffic**	**Box**	**13.234.256**	**11.125.677**
	Teus	**17.056.636**	**14.032.351**
Arus Barang Non-Petikemas Non-Containerized Goods Traffic			
Dermaga Umum **General Wharves**			
General Cargo	Ton	9.774.309	9.874.741
	M³	4.494.597	4.068.667
Bag Cargo	Ton	5.424.664	4.061.793
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	37.182.559	28.878.398
Curah Kering Dry Bulk	Ton	60.314.892	50.339.692
Gas	Ton	19.155	0
	MMBTU	7.820.960	777.694
Kendaraan Vehicles	Ton	4.692.647	2.765.535
	Unit	1.519.404	11.520.303
Hewan Animals	Ton	205.041	247.792
	Ekor	635.120	367.924
Total Dermaga Umum **Total General Wharves**	**Ton**	**117.613.268**	**96.167.951**
	M³	**4.494.597**	**4.068.667**
	Unit	**1.519.404**	**11.520.303**
	MMBTU	**7.820.960**	**777.694**
	Ekor	**635.120**	**367.924**
Non-Dermaga Umum Non-General Wharves			
General Cargo	Ton	298.316	55.152
	M3	21.040	-
Bag Cargo	Ton	-	-
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	2.428.979	13.608.317
Curah Kering Dry Bulk	Ton	25.860.246	19.366.918
Gas	Ton	-	-
	MMBTU	-	-
Kendaraan Vehicles	Ton	-	-
	Unit	-	-
Hewan Animals	Ton	-	-
	Ekor	-	-
Total Non-Dermaga Umum **Total Non-General Wharves**	**Ton**	**28.587.541**	**33.030.387**
	M³	**21.040**	**-**
	Unit	**-**	**-**
	MMBTU	**-**	**-**
	Ekor	**-**	**-**
Total Arus Barang Non-Petikemas **Total Non-Containerized Goods Traffic**	**Ton**	**146.200.809**	**129.198.339**
	M³	**4.515.637**	**4.068.667**
	Unit	**1.519.404**	**11.520.303**
	MMBTU	**7.820.960**	**777.694**
	Ekor	**635.120**	**367.924**

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020
ARUS PENUMPANG PASSENGER TRAFFIC			
Luar Negeri Overseas			
Embarkasi Embarkation	Orang People	338	185.421
Debarkasi Debarkation	Orang People	1.538	199.351
Jumlah Luar Negeri Total Overseas	**Orang** People	**1.876**	**384.772**
Dalam Negeri Domestic			
Embarkasi Embarkation	Orang People	4.085.873	3.421.322
Debarkasi Debarkation	Orang People	3.969.156	3.434.453
Jumlah Dalam Negeri Total Domestic		**8.055.029**	**6.855.775**
Jumlah Total	**Orang** People	**8.056.905**	**7.240.547**

INFORMASI SAHAM

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebanyak 8.475.067 saham dan 1.444.029 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp8.475.067.000.000 dan Rp1.444.029.000.000.

Sampai dengan 31 Desember 2021, Pelindo belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Sedangkan informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

SHARE INFORMATION FINANCIAL MANAGEMENT

The issued and fully paid capital as of December 31, 2021 and 2020 was 8,475,067 shares and 1,444,029 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share, so the total issued and fully paid capital was Rp8,475,067,000,000 and Rp1,444,029. 000,000.

As of December 31, 2021, Pelindo had not listed its shares on the stock exchange. Therefore, there is no information to report on price information, stock market capitalization, and stock trading volume. The capital stock information for the past two years is presented as follows:

Tabel Harga Saham
Share Price

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	2019
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B Modal dasar - 33.000.000 saham dan, terdiri dari: 1 saham seri A dwiwarna dan 32.999.999 saham Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 4.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.457.067 saham terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 8.457.066 saham Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1.444.029 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Capital Stock - Nominal value of IDR 1,000,000 (full value) per share of each for Series A Dwiwarna and Series B Basic capital - 33,000,000 shares and, consisting of: 1 Dwiwarna series shares and 32,999,999 Series B shares on December 31, 2021 and 4,000,000 shares as of December 31, 2020 and 2019 The issued and fully paid-up capital - 8,457,067 shares consisted of 1 Dwiwarna series shares and 8,457,066 Series B shares on December 31, 2021 and 1,444,029 shares on December 31, 2020 and 2019	8.475.067.000	1.444.029.000	1.444.029.000

AKSI KORPORASI

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bertindak sebagai *surviving entity* (perusahaan yang bertahan). Kemudian berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan nama, Perubahan Anggaran dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi "PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo".

Komposisi modal saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut (nominal penuh):

CORPORATE ACTIONS

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) were merged into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Government Regulation No. 101 of 2021, where PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) acts as the surviving entity. Then based on the Republic of Indonesia Minister of SOEs Letter No. S-756/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Approval of Change of Name, Change of Articles of Association and Company Logo, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to "PT Pelabuhan Indonesia (Persero), or abbreviated to Pelindo".

The share capital composition for Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, and Pelindo IV before and after the merger is as follows (full amount):

Sebelum Penggabungan Before Merger	
Pelindo I	
Modal Dasar Authorized capital	Rp6.800.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid capital	Rp1.700.000.000
Pelindo II	
Modal Dasar Authorized capital	Rp4.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid capital	Rp1.444.029.000
Pelindo III	
Modal Dasar Authorized capital	Rp3.200.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid capital	Rp2.218.953.000
Pelindo IV	
Modal Dasar Authorized capital	Rp10.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid capital	Rp3.112.085.000
Setelah Penggabungan After Merger	
Pelindo	
Modal Dasar Authorized capital	Rp33.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid capital	Rp8.475.067.000

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMATION ON BONDS, SUKUK, AND/OR CONVERTIBLE BONDS

Informasi Obligasi

Information On Bonds

Tabel Informasi Obligasi Pelindo
Information on Pelindo Bonds

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date Issued	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (miliar) Amount of Bonds (billion)	Harga Penawaran Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date
1	Obligasi Domestik (PIGN C) Domestic Bond (PIGN C)	21 Juni 2016 June 21, 2016	7 Tahun 7 years	IDR	400.000	100%	21 Juni 2023 June 21, 2023
2	Obligasi Domestik (PIGN D) Domestic Bond (PIGN D)	21 Juni 2016 June 21, 2016	10 Tahun 10 years	IDR	50.000	100%	21 Juni 2026 June 21, 2026
3	Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	10 Tahun 10 years	USD	1.100	98,99%	5 Mei 2025 May 5, 2025
4	Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	30 Tahun 30 years	USD	500	98,17%	5 Mei 2025 May 5, 2025
5	Obligasi Global Global Bond	2 Mei 2018 May 2, 2018	5 Tahun 5 years	USD	500	98,90%	2 Mei 2023 May 2, 2023
6	Obligasi Global Global Bond	1 Oktober 2014 October 1, 2014	10 Tahun 10 years	USD	500	99,41%	1 Oktober 2024 October 1, 2024
7	Obligasi Domestik (PIKI A) Domestic Bond (PIKI A)	5 Juli 2018 July 5, 2018	5 Tahun 5 years	IDR	380.000	100%	5 Juli 2023 July 5, 2023
8	Obligasi Domestik (PIKI B) Domestic Bond (PIKI B)	5 Juli 2018 July 5, 2018	7 Tahun 7 years	IDR	1.820.000		5 Juli 2025 July 5, 2025
9	Obligasi Domestik (PIKI C) Domestic Bond (PIKI C)	5 Juli 2018 July 5, 2018	10 Tahun 10 years	IDR	800.000		5 Juli 2028 July 5, 2028

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2021, Pelindo belum menerbitkan sukuk.

INFORMATION ON SUKUK

As of December 31, 2021, Pelindo had not issued any sukuk.

OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2021, Pelindo belum menerbitkan obligasi konversi.

CONVERTIBLE BONDS

As of December 31, 2021, Pelindo has not issued any convertible bonds.

	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
			2021	2020	
	9,50%	Belum Lunas Not yet paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
	9,75%	Belum Lunas Not yet paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
	4,25%	Belum Lunas Not yet paid	Moody's : Baa3(*Stable*) Fitch : BBB- (*Stable*)	Moody's : Baa3(*Stable*) Fitch : BBB- (*Stable*)	The Bank of New york Mellon
	5,38%	Belum Lunas Not yet paid	Moody's : Baa3(*Stable*) Fitch : BBB- (*Stable*) S&P : BBB-(*Negative*)	Moody's : Baa3(*Stable*) Fitch : BBB- (*Stable*) S&P : BBB-(*Negative*)	The Bank of New york Mellon
	4,50%	Belum Lunas Not yet paid	Moody's : Baa3(*Stable*) Fitch : BBB- (*Stable*) S&P : BBB-(*Negative*)	Moody's : Baa3(*Stable*) Fitch : BBB- (*Stable*) S&P : BBB-(*Negative*)	The Bank of New york Mellon
	4,88%	Belum Lunas Not yet paid	Moody's : Baa3(*Stable*) Fitch : BBB- (*Stable*) S&P : BBB-(*Negative*)	Moody's : Baa3(*Stable*) Fitch : BBB- (*Stable*) S&P : BBB-(*Negative*)	The Bank of New york Mellon
	8,00%	Belum Lunas Not yet paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
	9,15%	Belum Lunas Not yet paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
	9,35%	Belum Lunas Not yet paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCE



Per 31 Desember 2021, Pelindo tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

As of December 31, 2021, Pelindo did not have any other funding sources.

PERISTIWA PENTING
IMPORTANT EVENTS



01 Januari | *January*

Kementerian Perhubungan bersama Pelindo III melakukan *launching* Pelayaran Perdana Lintas Penyeberangan LDF di Pelabuhan Patimban Subang
The Ministry of Transportation together with Pelindo III launching the LDF First Cruise Crossing at Patimban Port, Subang



02 Februari | *February*

Pelindo I dorong akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan Kuala Tanjung *Port and Industrial Estate*
Pelindo I drives regional economic growth acceleration through the development of Kuala Tanjung Port and Industrial Estate



03 15-18 Februari | 15-18 *February*

Rapat kerja nasional (RAKERNAS)
National Working Meeting (Rakernas)



04 Maret | *March*

Kembangkan industri pengelolaan ikan, Presiden Joko Widodo tinjau Pelabuhan Yos Sudarso Ambon
To develop the fish management industry, President Joko Widodo inspects the Yos Sudarso Port of Ambon



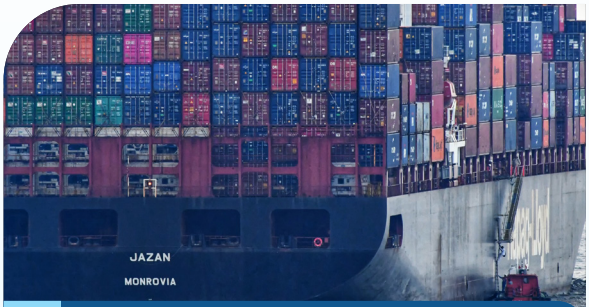
05 Maret | *March*

Menteri BUMN, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan melepas ekspor produk pertanian ke 12 negara tujuan di Terminal Teluk Lamong
The Minister of SOEs, the Minister of Agriculture and the Minister of Trade release the export of agricultural products to 12 destination countries at Teluk Lamong Terminal



06 23 Maret | 23 *March*

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC *Group* menandatangani kesepakatan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Cabang Pelabuhan Bengkulu dengan PT Agro Mega Perkasa dan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan BUMD Bengkulu *Impor Expor* (Bimex)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC Group signs a Cooperation Agreement (PKS) between the Bengkulu Port Branch and PT Agro Mega Perkasa and a Memorandum of Understanding (MoU) between PT Pelabuhan Tanjung Priok and BUMD Bengkulu Import Export (Bimex)



07 April | *April*

Meskipun di tengah pandemi COVID-19, arus petikemas IPC tahun 2020 tembus 6,9 juta TEUs
Even during the COVID-19 pandemic, the flow of IPC containers in 2020 reached 6.9 million TEUs



08 April | *April*

Dukung pembangunan Ibu Kota Negara, Pelindo IV terima kunjungan Menteri PPN/Bappenas di Pelabuhan Semayang Balikpapan
To support the development of the National Capital, Pelindo IV received a visit from the Minister of National Development



09 Mei | May

Kembangkan Kuala Tanjung PIE, Pelindo I jalin kerja sama strategis dengan Port of Rotterdam & Zhejiang Seaport Group
To develop Kuala Tanjung PIE, Pelindo I establishes a strategic cooperation with the Port of Rotterdam & Zhejiang Seaport Group



10 19 Mei | *19 May*

Topping off pada proyek pembangunan gedung perkantoran Maritime Tower
Topping off Maritime Tower office building project



11 10 Juni | *10 June*

Vaksinasi massal COVID-19 untuk masyarakat maritim, tanjung priok
Mass Vaccination of COVID-19 for Maritime, Tanjung Priok Communities



12 15 Juni | | *15 June*

Penandatanganan fasilitas pinjaman korporasi dalam rangka sinergi & Integrasi BUMN Kepelabuhanan
Signing a Corporate Loan Facility in the Context of Synergy & Integration of SOE Ports



13 15 Juni | *15 June*

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC bersama segenap *stakeholders* kepelabuhanan, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersinergi mewujudkan Pelabuhan Bersih

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC together with all port stakeholders, the Tanjung Priok Port Authority Office, Tanjung Priok Main Harbormaster Office, and Tanjung Priok Port Police synergized to create a Clean Port



14 23 Juni | *23 June*

Forum Diskusi dan Deklarasi Bersama Pelabuhan Bersih

Discussion Forum and Joint Declaration on Clean Ports



15 25 Juni | *25 June*

Serikat Pekerja Dukung Integrasi Pelindo

Labor Union support for Pelindo Integration



16 Juli | *July*

Menteri BUMN tinjau pembangunan Benoa *Maritime Tourism Hub* (BMTH)

The Minister of SOEs reviews the Benoa Maritime Tourism Hub (BMTH) construction



17 Juli | *July*

Proyek jalan tol Cibitung – Cilincing seksi I mulai beroperasi

The Cibitung – Cilincing toll road section I project starts to operate



18 Agustus | *August*

Merdeka Ekspor 2021: IPC Group layani Rp1,6 triliun Ekspor Pertanian

Merdeka Exports 2021: IPC Group services Rp1.6 trillion in agricultural exports



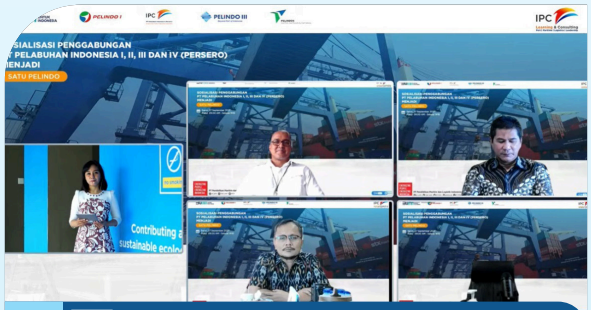
19 8 Agustus | *8 August*

Launching penerapan sistem *Single Truck Identification* Data atau *Single* TID (STID)
Launching the implementation of Single Truck Identification Data or Single TID system



20 10 Agustus | *10 August*

Pemberlakuan *Auto Gate* di *Buffer* Area Pelabuhan Tanjung Priok
Enforcement of Auto Gate in Tanjung Priok Port Buffer Area



21 September | *September*

Pelindo I-IV gelar sosialisasi tentang *merger* kepada asosiasi dan instansi terkait
Pelindo I-IV holds socialization on mergers with related associations and agencies



22 1 September| | *1 September*

Press conference rancangan penggabungan P1-P4
Press Conference on the P1-P4 Merger Plan



23 9 September | *9 September*

Talkshow How to Build a Winner
Talkshow How to Build A Winner



24 21 September | *21 September*

Townhall meeting pada tanggal 21 september 2021
Townhall Meeting on September 21, 2021



25 1 Oktober | *1 October*

Empat BUMN Pelabuhan resmi menjadi satu Pelindo
Four SOE ports officially become one Pelindo



28 14 Oktober | *14 October*

Brand launching PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Brand Launching



26 1 Oktober | *1 October*

Merger Pelabuhan diresmikan Presiden Joko Widodo
Port Merger inaugurated by President Joko Widodo



29 18 Oktober | *18 October*

Talkshow Business Judgement Rule dalam Perspektif Pelaku Usaha dan Penegak Hukum
Talkshow Business Judgment Rule for Businesses and Law Enforcers



27 8 Oktober | *8 October*

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo menerima peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo receives AAA rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)



30 November | *November*

Arus Petikemas Pelindo tembus 15,5 juta TEUs
Pelindo Container traffic reaches 15.5 million TEUs



31 5 November | *5 November*

Komitmen BUMN Kembangkan *Green & Smart Port* Dalam Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim di *Cop26*
BUMN Commitment to Develop a Green & Smart Port to Support Cop26 Climate Change Mitigation



33 24 Desember | *24 December*

Pemberian PMN Tahun 2021 ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk mendukung sektor pariwisata
Granting PMN 2021 to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to support the tourism sector



32 Desember | *December*

Serah terima operasi antara Pelindo kepada *Subholding*
Handover of operations between Pelindo and Subholding



34 28 Desember | *28 December*

Penandatanganan Pakta Integritas Insan Maritim di Pelabuhan Indonesia
Signing of Maritime Integrity Pact at Indonesian Ports



35 31 Desember | *31 December*

Gebyar Ekspor Pertanian Tahun 2021 Bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta & Kapolda Metro Jaya
Celebrating Agricultural Exports in 2021 with the Deputy Governor of DKI Jakarta & Kapolda Metro Jaya

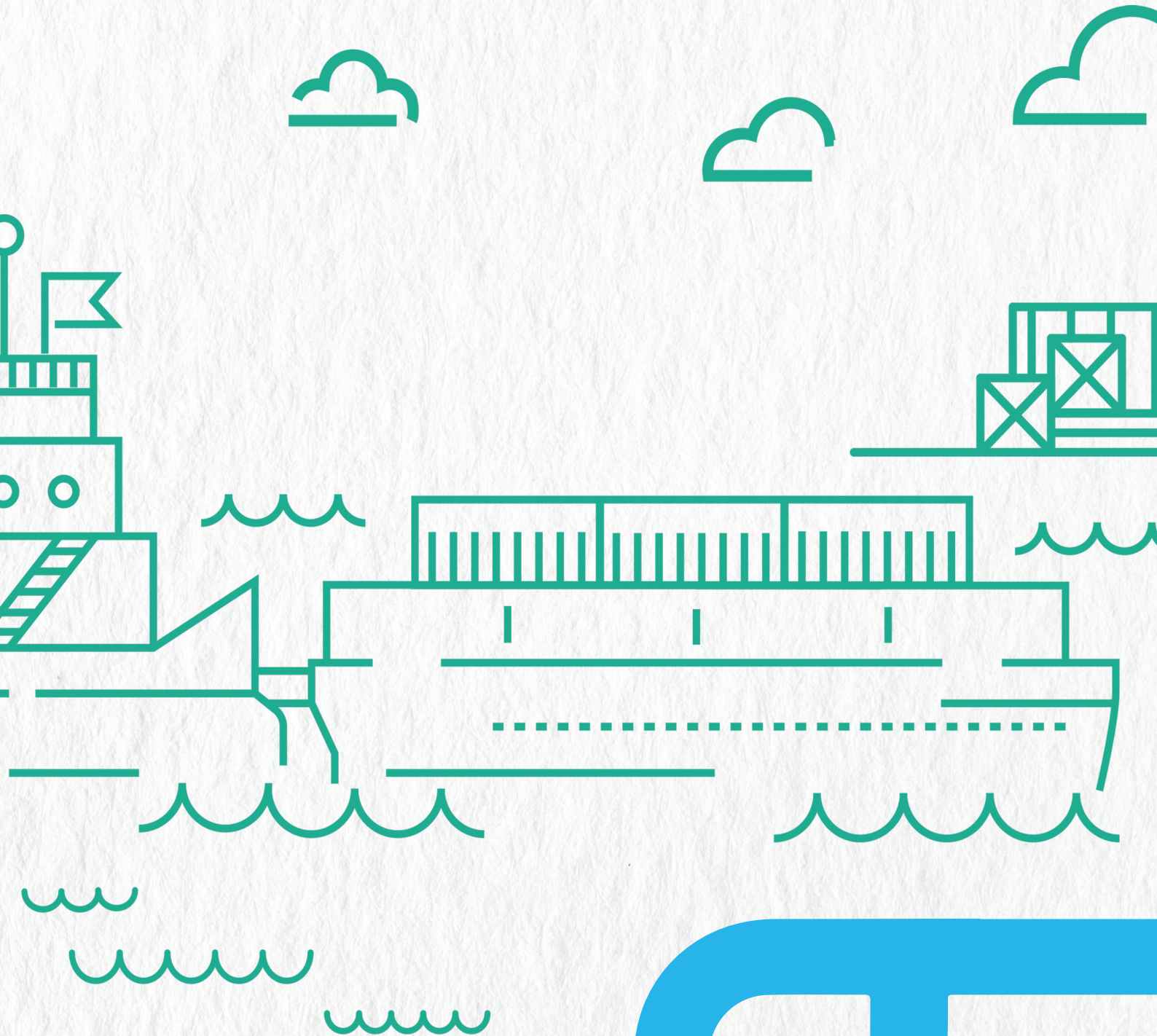


LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF DIRECTORS' AND BOARD OF COMMISSIONERS' REPORTS



02



LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' REPORT



Arif Suhartono
Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmatNya kepada kita semua, Pelindo dapat memberikan kinerja yang baik meskipun kondisi perekonomian masih terhambat oleh pandemi COVID-19. Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan pekerja senantiasa berkomitmen untuk memberikan yang terbaik sehingga target-target Perseroan yang ditetapkan secara umum tercapai.

Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat penting bagi Perseroan dengan digabungkannya Pelindo I, III dan IV ke dalam Pelindo II yang merupakan inisiatif strategis pemerintah selaku pemegang saham untuk mewujudkan jaringan koneksi nasional dan ekosistem logistik yang lebih kokoh. Dengan penggabungan ini diharapkan jaringan koneksi maritim, baik koneksi antara pelabuhan-pelabuhan dalam negeri maupun di luar negeri akan semakin meningkat.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan jalannya kepengurusan Perseroan untuk Tahun buku 2021 yang meliputi kinerja Perseroan, analisis prospek Perseroan, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

ANALISIS ATAS KINERJA PERSEROAN

Kinerja Perseroan tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian baik perekonomian global maupun nasional serta kondisi industri pelabuhan khususnya. Berdasarkan tren yang diamati, terutama upaya vaksinasi, diproyeksikan pemulihan ekonomi akan terjadi secara bertahap seiring dengan tingkat vaksinasi dan terjadinya *herd immunity*. Secara umum ekonomi global diperkirakan akan terus mengalami pemulihan secara positif dan mencapai level PDB 2019 antara periode 2021 dan 2022 berdasarkan proyeksi *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*. Sebagai contoh, Cina sebagai negara yang mengalami pandemi COVID-19 paling awal sudah mengalami pemulihan ekonomi yang signifikan dan melampaui nilai PDB tahun 2019. Sedangkan negara lain seperti Amerika dan India diperkirakan akan mengalami pemulihan, melampaui nilai PDB tahun 2019, pada 2021-2022. Negara-negara Eropa dan Jepang diperkirakan akan mengalami pemulihan di 2022. Selain PDB, indikator lain seperti *Manufacturing Purchasing Managers' Index* (PMI), *retail and arecreation mobility*, penjualan kendaraan penumpang, dan tingkat penjualan ritel juga menunjukkan tingkat pemulihan yang positif.

Kendati demikian, masih terdapat ketidakpastian mengenai pemulihan ekonomi global. Secara umum pemulihan kondisi ekonomi global dipengaruhi beberapa faktor terkait infeksi COVID-19: (1) peningkatan infeksi varian delta, (2) tingkat vaksinasi, (3) kemungkinan munculnya varian baru yang lebih berbahaya. Penyebaran varian delta telah diamati di berbagai negara dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Di beberapa negara dapat dilihat kenaikan tingkat penyebaran varian delta

Dear Shareholders and Stakeholders,

With praise and gratitude we pray to the presence of God Almighty, for the abundance of His grace to all of us that helped Pelindo deliver a good performance even though the economic condition was still hampered by the COVID-19 pandemic. The Board of Directors together with all levels of management and employees remained committed to providing the best so that the general targets set for the Company were achieved.

2021 was a very important year for the Company with the merger of Pelindo I, III and IV into Pelindo II, a strategic initiative by the Government as a shareholder to create a stronger national connection network and logistics ecosystem. With this merger, it is hoped that the maritime connection network between connections between domestic and international ports will increase.

Please allow us to submit our report on the management of the Company for the fiscal year 2021, including the Company's performance, analysis of the Company's prospects, developments in corporate governance, performance assessments for the Committees below the Board of Directors, and changes in the Board of Directors' composition.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

The Company's performance was impacted by the global and national economic conditions, and the condition of the port industry in particular. Based on the observed trends, especially the vaccination efforts, it is projected that economic recovery will occur gradually in line with vaccination rates and the achievement of herd immunity. Overall, the global economy is expected to continue to recover positively and reach the 2019 GDP level between 2021 and 2022 based on the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank projections. China as the country that experienced the earliest COVID-19 pandemic experienced a significant economic recovery and exceeded its 2019 GDP. Other countries such as America and India are expected to experience recovery, exceeding the 2019 GDP in 2021-2022, with European countries and Japan expected to recover in 2022. In addition to GDP, other indicators including the Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), retail and creation mobility, passenger vehicle sales, and retail sales also showed a positive rate of recovery.

Nevertheless, there is still uncertainty concerning the global economic recovery as the recovery can be influenced by several factors related to COVID-19 infection: (1) increased infections of the delta variant, (2) vaccination rates, (3) the possibility of the emergence of new, more dangerous variants. The spread of the delta variant has been observed in various countries in the last few months, and in some countries, we can see an increase in the spread of the delta variant after easing social

paska pelonggaran pembatasan sosial. Kenaikan infeksi juga menyebabkan gelombang infeksi baru untuk berbagai negara yang sebelumnya telah menunjukkan proyeksi pemulihan yang baik. Sejauh ini vaksin telah terbukti membantu mengurangi tingkat transmisi virus, *hospitalization*, mengurangi fatalitas, dan juga meningkatkan kecepatan pemulihan pasien. Walaupun dampak dari vaksin bervariasi dari jenis vaksin dan juga kondisi individual, tetapi vaksinasi populasi merupakan usaha terus-menerus dari pemerintah masing-masing negara untuk menekan penyebaran virus. Kendati demikian, masih terdapat banyak hambatan dalam meningkatkan *uptake* vaksin baik dari aspek suplai, distribusi, hingga edukasi masyarakat. Selain itu, populasi yang tidak tervaksinasi dikhawatirkan akan menjadi tempat yang rentan untuk munculnya varian baru yang lebih berbahaya. Varian baru yang lebih berbahaya merupakan suatu faktor penting yang akan mengubah proyeksi pemulihan ekonomi global.

restrictions. The rise in infections has also led to a new wave of infections in countries that previously showed good recovery projections. So far the vaccines have proven to help reduce the rate of virus transmission, hospitalization, reduced fatalities, and also increased the speed of patient recovery. Although the impact of vaccines varies based on vaccine types, as well as individual conditions, vaccinating the population is an ongoing effort by the governments of each country to suppress the spread of the virus. However, there are still many obstacles in increasing vaccine uptake, both from the supply aspect, distribution, and public education. In addition, the unvaccinated population is seen as a vulnerable place for the emergence of new, more dangerous variants. The new, more dangerous variants are an important factor that will change the outlook for the global economic recovery.

Perbaikan perekonomian nasional masih terus berlanjut di tengah kondisi perekonomian global yang masih mengalami ketidakpastian. Tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan menetapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan fondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju.

Improvements in the national economy continued during the uncertain global economic conditions. 2021 was an important period for the acceleration of the national economic recovery from the impact of the COVID-19 pandemic, as well as a momentum year to continue and establish policy reforms to prepare a solid foundation to carry out economic transformation towards a developed country.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69% (*Cumulative to Cumulative*/CtC), berbalik dari pertumbuhan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04%. Terhadap perekonomian nasional pada tahun 2021, Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar yaitu 57,89% dengan pertumbuhan 3,66%, diikuti Sumatera sebesar 21,70% dengan pertumbuhan 3,18%, Kalimantan sebesar 8,25% dengan pertumbuhan 3,18%, Sulawesi sebesar 6,89% dengan pertumbuhan 5,67%, kemudian Maluku dan Papua sebesar 2,49% dengan pertumbuhan 10,09%.

Based on data from the Central Statistics Agency, in 2021 the Indonesian economy grew by 3.69% (Cumulative to Cumulative/CtC), reversing from the growth in 2020 that saw a contraction of 2.07%. In terms of production, the highest growth occurred in health services and social activities at 10.46%. In terms of expenditure, the highest growth was achieved by the exports of goods and services at 24.04%. For the national economy in 2021, Java Island contributed the largest proportion with 57.89% or a growth of 3.66%, followed by Sumatra with 21.70% or a growth of 3.18%, Kalimantan with 8.25% or a growth of 3.18%, Sulawesi with 6.89% or a growth of 5.67%, then Maluku and Papua with 2.49% or a growth of 10.09%.

Dari sisi industri pelabuhan, berdasarkan data dari Otoritas Pelabuhan *New York* dan *New Jersey*, pada informasi *the Port Authority of New York and New Jersey's website* melaporkan bahwa Maret 2021 tercatat *traffic* petikemas bulanan tertinggi dibandingkan Maret 2019 dengan peningkatan sebesar 35%. Hal ini menunjukkan ketahanan sisi permintaan pelanggan dan rantai pasokan global dalam memasuki tahun kedua pandemi COVID-19.

In terms of the port industry, based on data from the Port Authority of New York and New Jersey, their website reported that March 2021 saw the highest monthly container traffic compared to March 2019 with an increase of 35%. This shows the resilience of customers demand and global supply chains when entering the second year of the COVID-19 pandemic.

Peningkatan ukuran kapal kontainer juga terus terjadi dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan adaptasi terhadap infrastruktur pelabuhan. Ukuran kapal rata-rata telah meningkat ~130% secara global sejak tahun 2000 hingga 2015 dan diprediksi akan terus meningkat untuk memanfaatkan skala ekonomi. Hal ini akan mendorong pembangunan infrastruktur di sekitar pelabuhan sehingga akan memungkinkan pembuatan hub internasional

The increase in the size of container ships also continues to occur from year to year, so adaptation to port infrastructure is needed. Average ship sizes have increased by ~130% globally from 2000 to 2015 and are expected to continue to grow to take advantage of economies of scale. This will encourage the development of an infrastructure around the ports to allow them to become an international maritime hub. The

maritim. Implikasi tren ini terhadap bisnis pelabuhan adalah dibutuhkannya pembangunan infrastruktur pelabuhan di sekitar perdagangan besar, dimungkinkannya pembangunan hub dan *spoke* internasional dan domestik maritim, proses operasional yang semakin kompleks, dan peningkatan risiko bagi operator dan pemilik pelabuhan.

implications of this trend for the port business are the need for port infrastructure development around wholesale trade, the possibility of developing international and domestic maritime hubs & spokes, increasingly complex operational processes, and increased risk for port operators and owners.

Saat ini, perdagangan petikemas maritim di Asia masih berpusat di China dengan volume rute regional 24,4 juta TEU dan volume perdagangan yang tinggi antara China-Asia Timur dan China-Asia Tenggara. Namun, tingkat pertumbuhan volume perdagangan rute regional China pada 2019 adalah 0%. Di sisi lain, Asia Tenggara mengalami pertumbuhan lebih tinggi dalam lalu lintas *in/outbound* petikemas. Rute regional Asia Tenggara memiliki volume perdagangan 40,4 juta TEU dengan tingkat pertumbuhan 3%.

Currently, maritime container trade in Asia is still centered in China with a regional route volume of 24.4 million TEU and a high volume of trade between China-East Asia and China-Southeast Asia. However, China's regional route trade volume growth rate in 2019 was 0%. On the other hand, Southeast Asia experienced higher growth in container in/outbound traffic. The Southeast Asian regional route had a trade volume of 40.4 million TEU with a growth rate of 3%.

Dalam pasar non petikemas, volume perdagangan tertinggi terjadi antara China dan Asia Tenggara dengan volume mencapai 397,7 juta Ton. Volume perdagangan antara Asia Tenggara dengan Asia Timur Laut juga cukup tinggi dengan 120,1 juta Ton. Dalam rute regional, Asia Tenggara memiliki volume lebih tinggi dengan volume 212,3 juta Ton, namun tingkat pertumbuhan pada rute regional China lebih tinggi dengan tingkat pertumbuhan 2019 sebesar 10%.

In the non-container market, the highest trade volume occurred between China and Southeast Asia with a volume reaching 397.7 million tons. The trade volume between Southeast Asia and Northeast Asia was also quite high with 120.1 million tons. In regional routes, Southeast Asia has the higher volume with a volume of 212.3 million Tons, but the growth rate on China's regional routes is higher with the 2019 growth rate of 10%.

Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan industri pelabuhan tersebut, masing-masing entitas usaha telah menetapkan dan melaksanakan strategi yang menjadi dasar untuk perumusan strategi pasca merger. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menetapkan strategi jangka panjang pasca merger yang diturunkan dalam *roadmap* strategi periode 2021-2025 yang dibagi ke dalam 4 (empat) pilar strategi sebagai berikut:

1. Transformasi Pelabuhan Kelas Dunia
   Pilar strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai perusahaan penyedia jasa kepelabuhan kelas dunia. Fokus pilar strategi ini adalah peningkatan performa operasi dan pelayanan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), melalui peningkatan standar kualitas operasional pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan cara memanfaatkan teknologi digital, sedangkan peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan dilakukan melalui pemberian jasa layanan yang bersifat *customer centric* (berbasis pelanggan). Selain itu, peningkatan performa juga dilakukan dengan dimulainya pengembangan *sustainable ports* bagi pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Fokus terakhir dari pilar ini adalah mempersiapkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk berekspansi secara regional di Kawasan Asia Tenggara.
2. Penguatan Ekosistem Logistik
   Pilar strategi kedua dilakukan untuk membuat hubungan dengan pemain ekosistem logistik laut dan darat agar dapat mengoptimalkan biaya logistik nasional. Fokus dari pilar strategis ini adalah menjalin kerja sama dan juga potensi integrasi sistem atau layanan dengan pemain logistik laut dan darat sehingga biaya logistik dapat dioptimalkan, serta

In the face of the economic and port industry conditions, each business entity determined and implemented a strategy to form the basis for the post-merger strategy. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) established a long-term post-merger strategy in the 2021-2025 strategic roadmap, which was divided into the following 4 (four) strategy pillars:

1. World Class Port Transformation
   This strategy pillar is carried out to increase PT Pelabuhan Indonesia (Persero) capabilities as a world-class port service provider. This strategy pillar's focus is to improve the operation and service performance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ports, by improving the operational quality standards of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ports by utilizing digital technology, while improving the quality of port services is carried out by providing customer-centric services. In addition, performance improvement is also carried out by starting the development of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sustainable ports. The final focus of this pillar is to prepare PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to expand regionally in the Southeast Asian Region.

2. Strengthening the Logistics Ecosystem
   The second strategic pillar is carried out to build relationships with marine and land logistics ecosystem players to optimize national logistics costs. The focus of this strategic pillar is to establish cooperation and also the potential for system or service integration with sea and land logistics players so that logistics costs can be optimized, as well as establishes

menjalin kerjasama dengan kawasan industri/logistik untuk mendorong peningkatan arus barang.

Kerjasama dengan kawasan industri/logistik dibutuhkan untuk mendukung konektivitas dengan bagian *hinterland*, serta mempermudah pemberian layanan logistik *end-to-end* bagi pelaku industri. Adanya hubungan dengan pelaku kawasan industri yang berada di satu daerah dengan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berpotensi meningkatkan pelayanan bagi pelanggan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dari sisi kecepatan dan kemudahan.

Kerjasama dengan pelaku logistik darat juga sangat penting karena peran transportasi darat dalam membawa barang keluar dari pelabuhan dan menuju ke *end-user* dari barang tersebut. Adanya kerjasama dengan pelaku logistik darat akan meningkatkan performa operasi pelabuhan karena berpotensi meningkatkan *flow throughput*. Logistik darat yang dimaksud juga tidak terbatas pada truk saja, tapi juga mencakup angkutan kereta api sebagai solusi logistik darat keluar dari pelabuhan.

3. Efisiensi *Supply Chain* Maritim
   Pilar strategis ketiga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi *supply chain* maritim di Indonesia. Fokus dari pilar strategi ini ialah memperluas jaringan pelabuhan nasional. Walaupun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan pemain utama dan tulang punggung kepelabuhan di Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) hanya memiliki sebagian kecil pelabuhan yang ada di Indonesia. Pelabuhan lain dimiliki pihak swasta dan juga yang masih dioperasikan pemerintah merupakan potensi besar untuk menjadi target pengembangan konektivitas bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Selain itu, integrasi antar jaringan pelabuhan, moda transportasi dan kawasan pendukung (kawasan industri/logistik) juga menjadi fokus pilar.
4. Peningkatan *Value* Perusahaan
   Pilar strategis keempat dilakukan untuk meningkatkan *value* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dengan cara memperkuat struktur keuangan perusahaan agar dapat terciptanya sistem keuangan yang *prudent* dan stabil, mengoptimalkan pengelolaan aset, dan memfokuskan Perseroan untuk mengembangkan bisnis secara vertikal dan horizontal dengan memanfaatkan kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Untuk memastikan agar proses pencapaian sasaran sesuai dengan strategi dan visi yang telah ditetapkan untuk 2025, maka disusun *roadmap* yang berfungsi sebagai *guidance* yang akan memberikan gambaran terkait proses, tahapan, dan capaian yang harus diprioritaskan untuk mencapai sasaran akhir atau visi Perseroan. Berdasarkan *roadmap* strategi Jangka Panjang Perseroan 2021-2025, pada tahun 2021 Perseroan berada pada fase 2021 – 2022 yaitu *Business Alignment and Integration*. Pada fase ini, Pelindo akan berfokus pada:

cooperation with industrial/logistics areas to encourage increased goods traffic.

Cooperation with industrial/logistics areas is needed to support connectivity with the hinterland, as well as facilitate the provision of end-to-end logistics services for industrial players. Relationships exist with industrial estate players in the same area as the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) port who have the potential to improve services for customers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in terms of speed and convenience.

Cooperation with land logistics businesses is also very important due to the role played by land transportation for bringing goods out of ports and delivering the goods to the end-users. Cooperation with land logistics businesses will improve the port operations performance as it has the potential to increase flow throughput. The land logistics in question are not limited to trucks, but also includes rail transportation as a land logistics solution out of ports.

3. Maritime Supply Chain Efficiency
   The third strategic pillar aims to improve the maritime supply chain efficiency in Indonesia. The focus of this strategic pillar is to expand the national port network. Although PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is a major player and the backbone of ports in Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) only owns a small portion of ports in Indonesia. Other ports are owned by the private sector and also by the government and have the potential to become a target for connectivity development for PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Integration between port networks, transportation modes and supporting areas (i.e. industrial/logistics areas) is also this pillar's focus.

4. Increasing Company Value
   The fourth strategic pillar is to increase the value of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), by strengthening the Company's financial structure to create a prudent and stable financial system, optimize asset management, and focus the Company on developing business vertically and horizontally by utilizing PT Pelabuhan Indonesia (Persero) existing capabilities and competencies.

To ensure the target achievement process is in accordance with the strategy and vision set for 2025, a roadmap has been prepared to serves as guidance and provide an overview of the processes, stages, and achievements that must be prioritized to achieve the Company's final targets or vision. Based on the Company's 2021-2025long-term strategy roadmap, in 2021 the Company was in the 2021-2022 phase, namely Business Alignment and Integration. In this phase, Pelindo will focus on:

1. Fokus pada penyelarasan bisnis paska integrasi melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan.
2. Melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis.
3. Reorganisasi perusahaan dan pengembangan budaya terintegrasi.

Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan, Direksi telah memimpin penyusunan strategi yang dilaksanakan dalam rapat-rapat pasca merger yang dituangkan dalam *Roadmap* Strategi Jangka Panjang periode 2021-2025. Direksi memastikan implementasi strategi dengan melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan melalui evaluasi laporan-laporan yang dilakukan secara berkala. *Monitoring* implementasi strategi yang telah dilakukan oleh Direksi berhasil memenuhi target kinerja Perseroan.

Penerapan strategi di tiap-tiap entitas usaha sebelum *merger* yang dilanjutkan dengan penerapan strategi pasca *merger* telah memberikan hasil pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan Perseroan. Pencapaian tersebut terlihat dari terpenuhinya target kinerja operasional pada tahun 2021.

Capaian Arus kapal dalam satuan GT berhasil melampaui target yang mencapai 100,01%. Arus petikemas dalam satuan *box* tahun 2021 berhasil melampaui target yang mencapai 106,85% demikian pula dalam satuan teus tercapai 107,10%. Arus barang non petikemas dalam satuan ton tahun 2021 berhasil melampaui target yang mencapai 106,85%. Arus barang non petikemas dalam satuan unit berhasil melampaui target yang mencapai 168,55%.

Pada tahun 2021, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja operasional yang baik. Dari sisi operasi kepelabuhan, arus kapal dalam satuan unit tahun 2021 mencapai 254.669 unit, meningkat 10,76% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 229.932 unit. Demikian pula dengan arus kapal dalam satuan GT tahun 2021 mencapai 1.186.217.247 GT, meningkat 13,78% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1.042.573.078 GT. Arus petikemas dalam satuan box tahun 2021 mencapai 13.234.256 box, meningkat 18,95% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 11.125.677 box. Demikian pula dengan arus petikemas dalam satuan teus yang meningkat sebesar 21,55%, dari 14.032.351 teus di tahun 2020 menjadi 17.056.636 teus di tahun 2021. Arus barang non petikemas dalam satuan ton tahun 2021 mencapai 146.200.809, meningkat 13,16% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 129.198.339 ton.

Dari sisi arus penumpang, realisasi arus penumpang pada tahun 2021 mencapai 8.056.905 orang, meningkat 11,27% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7.240.547 orang. Selain itu, pada jasa lainnya, realisasi produksi pengusahaan properti untuk persewaan lahan di tahun 2021 dalam satuan M2 mencapai 33.742.879 M2, meningkat 82,06% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 18.534.151 M2. Sedangkan realisasi

1. Post-integration business alignment through standardization and operational and commercial integration to improve service quality.
2. Integrated investments for business development.
3. Company reorganization and integrated culture development.

When formulating the Company's strategies and strategic policies, the Board of Directors has guided by the strategies implemented in post-merger meetings as outlined in the Long-Term 2021-2025 Strategic Roadmap. The Board of Directors ensures the strategies implementation by evaluating the effectiveness of the strategies through regular evaluation reports. The strategy monitoring by the Board of Directors has succeeded in meeting the Company's performance targets.

Strategies in each business entity prior to the merger followed by the post-merger strategy have resulted in the Company achieving the set targets. These achievements can be seen in the fulfillment of operational performance targets in 2021.

Ship traffic in GT units exceeded the target by 100.01%. Container traffic in box units in 2021 exceeded the target by 106.85%, as well as by 107.10% for teus units. Non-container goods traffic in tons in 2021 exceeded the target by 106.85%, with non-container goods traffic in units exceeding the target by 168.55%.

In 2021, the Company recorded a good operational performance. In terms of port operations, ship traffic in 2021 reached 254,669 units, an increase of 10.76% compared to 229,932 units in 2020, and ship traffic in GT units in 2021 reached 1,186,217,247 GT, an increase of 13.78% compared to 1,042,573,078 GT in 2020. Container traffic in box units in 2021 reached 13,234,256 boxes, an increase of 18.95% compared to 11,125,677 boxes in 2020. Container traffic in TEUs increased by 21.55%, from 14,032,351 TEUs in 2020 to 17,056,636 TEUs in 2021. Non-container goods traffic in tons in 2021 reached 146,200,809, an increase of 13.16% compared to 129,198,339 tons in 2020.

Passenger traffic in 2021 reached 8,056,905 people, an increase of 11.27% compared to 7,240,547 people the previous year. In addition, for other services, property operations for land leasing in 2021 reached 33,742,879 M2, an increase of 82.06% compared to 18,534,151 M2 in 2020. TBAL production for water leasing in 2021 reached 383,739 M2, an increase of 0.46% compared to 381,999 M2 in 2020. Property Concession production for

produksi Pengusahaan TBAL untuk Persewaan Perairan di tahun 2021 dalam satuan M2 mencapai 383.739 M2, meningkat 0,46% dibandingkan tahun 2020 sebesar 381.999 M2. Realisasi produksi Pengusahaan Properti untuk Persewaan Bangunan dalam satuan M2 mencapai 877.833 M2, meningkat 60,32% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 275,537 M2. Realisasi produksi pengusahaan air untuk penggunaan air kapal di tahun 2021 mencapai sebesar 2.318.058 ton, meningkat 162,68% dibandingkan tahun 2020 sebesar 882.457 ton. Untuk pengusahaan air, penggunaan air minum di tahun 2021 mencapai sebesar 571.421 ton, meningkat 82,27% dibandingkan tahun 2020 sebesar 313.498 ton. Kemudian, pada pelayanan jasa rupa-rupa, pas pelabuhan orang di tahun 2021 dalam satuan lembar mencapai 3.794.742 lembar, meningkat 28,68% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2.948.945 lembar. Demikian pula dengan pas harian kendaraan yang meningkat 77,62% dari 8.120.614 lembar di tahun 2020 menjadi 14.423.543 lembar di tahun 2021.

Building Leases in M2 units reached 877,833 M2, an increase of 60.32% compared to 275,537 M2 in 2020. The water business production for ship water in 2021 reached 2,318,058 tons, an increase of 162.68% compared to 882,457 tons in 2020. The public water business for drinking water in 2021 was 571,421 tons, an increase of 82.27% compared to 313,498 tons in 2020. Then, for miscellaneous services, passenger passes in 2021 reached 3,794,742 pieces, an increase of 28.68% compared to 2,948,945 in 2020. Likewise, the daily vehicles passes increased by 77.62% from 8,120,614 pieces in 2020 to 14,423,543 pieces in 2021.

Selain kinerja operasional, Perseroan juga telah mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Pendapatan operasi tahun 2021 mencapai Rp28,81 triliun, meningkat 14,28% atau Rp3,60 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp25,21 triliun. Seiring dengan peningkatan pendapatan bunga tersebut, laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* juga mengalami peningkatan. Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2021 sebesar Rp3,18 triliun, meningkat 7,34% atau sebesar Rp217,20 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,96 triliun. Dengan meningkatnya laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity*, maka ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan. Ekuitas tahun 2021 mencapai Rp42,05 triliun, meningkat 4,42% atau Rp1,78 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp40,27 triliun.

In addition to operational performance, the Company has also recorded good financial performance. Operating revenues in 2021 amounted to Rp28.81 trillion, an increase of 14.28%, or Rp3.60 trillion compared to Rp25.21 trillion in 2020. Following an increase in interest income, Income for the year after effect of merging entity's income also increased. Income for the year after effect of merging entity's income in 2021 amounted to Rp3.18 trillion, an increase of 7.34%, or Rp217.20 billion compared to Rp2.96 trillion in 2020. With the increase in income for the year after effect of merging entity's income, the Company's equity also increased. Equity in 2021 amounted to Rp42.05 trillion, an increase of 4.42%, or Rp1.78 trillion compared to Rp40.27 trillion in 2020.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

Berbagai capaian positif yang diperoleh di tahun 2021 tidak lepas dari kemampuan Perseroan dalam menghadapi kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, *gap* pengembangan SDM dan organisasi yang terlihat dari kurang cepatnya unit kerja untuk beradaptasi dengan perubahan model bisnis baru dan kompetensi SDM belum merata untuk semua pelabuhan ketika integrasi dilakukan.

Dalam menghadapi kendala tersebut, Perseroan telah melakukan pengembangan kapabilitas dan kualitas SDM. Di samping itu, Perseroan juga menghadapi *gap* teknologi yaitu masih terbatasnya penerapan teknologi yang terintegrasi untuk mendukung proses operasional.

Dalam menghadapi kendala tersebut, Perseroan telah melakukan penguatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (termasuk pengembangan integrasi sistem perusahaan (Ops dan Non-Ops) serta integrasi dengan sistem *stakeholders*/eksternal).

CONSTRAINTS FACED BY THE COMPANY

The positive achievements obtained in 2021 were the result of the Company's ability to face constraints. These included the gap in HC and organizational development as seen in the work units' lack of speed in adapting to changes in new business models and the unevenness of HC competencies in all ports when integration was carried out.

To deal with these obstacles, the Company has developed the HC capability and quality. In addition, the Company also faces a technology gap, namely the limited application of integrated technology to support operational processes.

To deal with this, the Company strengthened the use of technology and information systems (including the development of enterprise system integration (Ops and Non-Ops) as well as integration with stakeholder/external systems).

Perseroan juga menghadapi *gap* kapabilitas bisnis yaitu belum berkembangnya kapabilitas dan kemampuan layanan di segmen logistik, *hinterland development, marine*, serta *port services* belum memiliki perkembangan yang baik. Untuk menghadapi kendala tersebut, Perseroan melakukan kerjasama dan juga potensi integrasi sistem atau layanan dengan pemain logistik laut dan darat sehingga biaya logistik dapat dioptimalkan, serta menjalin kerjasama dengan kawasan industri/logistik untuk mendorong peningkatan arus barang. Kerjasama dengan kawasan industri/logistik inu dilakukan untuk mendukung konektivitas dengan bagian *hinterland*, serta mempermudah pemberian layanan logistik *end-to-end* bagi pelaku industri. Adanya hubungan dengan pelaku kawasan industri yang berada di satu daerah dengan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berpotensi meningkatkan pelayanan bagi pelanggan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dari sisi kecepatan dan kemudahan.

The company also faced a business capability gap, due to the underdevelopment of its service capabilities and abilities in the logistics, hinterland development, marine, and port services segments. To deal with these obstacles, the Company worked with potential systems or services integration with sea and land logistics businesses so that logistics costs could be optimized, as well as collaborated with industrial/logistics areas to encourage increased goods traffic. This cooperation with industrial/logistics areas was carried out to support connectivity with the hinterland section, as well as facilitate the provision of end-to-end logistics services for industry players. Relationships exist with industrial estate players in the same area as the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) port who have the potential to improve services for customers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in terms of speed and convenience.

ANALISIS PROSPEK USAHA

Pertumbuhan ekonomi global diprediksikan akan melanjutkan tren positif sampai tahun 2026 walaupun akan melandai dari realisasi pertumbuhan tahun 2021 sebesar 5,5%. Pertumbuhan positif ini tentu akan diikuti oleh pertumbuhan arus barang secara internasional. Kondisi pandemi telah menciptakan tren kebiasaan baru yang salah satunya adalah terkait belanja daring (*online shopping*). Pertumbuhan bisnis *e-commerce* pun meningkat pesat sebagai jawaban akan kebutuhan belanja daring ini. Hampir sebagian besar barang-barang *e-commerce* diangkut dalam kemasan petikemas yang turut memberikan efek positif pada pertumbuhan arus petikemas global. Potensi pertumbuhan arus petikemas global ini dapat dioptimalkan dengan pengembangan *international transshipment* memanfaatkan lokasi wilayah pelabuhan Pelindo yang berada di jalur pelayaran dunia.

BUSINESS PROSPECTS ANALYSIS

Global economic growth is predicted to continue a positive trend until 2026 although it will follow an upward-sloping curve from the growth seen in 2021 of 5.5%. This positive growth will be followed by growth in the flow of goods internationally. The pandemic created a new habit trend, one being the move to online shopping, and the e-commerce business has increased rapidly in response to this change. Most e-commerce goods are transported in container packaging and this will have a positive effect on global container traffic growth. This growth potential can be optimized by developing international transshipment in the Pelindo port areas located on the world's shipping lanes.

Untuk kargo non petikemas, pasar arus barang domestik masih memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan pada saat ini Pelindo hanya memiliki pangsa pasar sebagian kecil dari pasar nasional. Pelindo dapat melakukan kerjasama dalam beberapa skema dengan pelabuhan non petikemas yang terdiri dari pelabuhan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan pelabuhan milik Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah. Kekurangan yang dimiliki Pelindo untuk dapat menjalin kerjasama adalah tarif yang secara umum relatif lebih tinggi dari para pelaku swasta. Selain hal tersebut, Pelindo perlu merumuskan nilai lebih yang dapat diberikan kepada mitra pemilik/pengelola pelabuhan non petikemas domestik.

For non-container cargo, the market for domestic goods traffic still has a huge potential as currently Pelindo only has a small market share of the national market. Pelindo will cooperate in several schemes with non-container ports including the Special Terminal (Tersus)/Terminal for Self Interest (TUKS) and ports belonging to Government Ministries/Institutions (K/L). Pelindo's weakness in establishing these corporations is that the tariffs are generally higher than private businesses. In addition, Pelindo needs to formulate additional value for its partners who own/manage domestic non-container ports.

Berbagai perkiraan terhadap membaiknya kondisi perekonomian, Pelindo memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki Pelindo antara lain sebagai berikut:

1. Visi/Program Pemerintah
   Pengembangan infrastruktur maritim dan intensifikasi program pemerintah di bidang maritim berpotensi mendukung rencana integrasi Pelindo.
2. Potensi Pengembangan Layanan dan Rantai Nilai Kepelabuhan
   a. Mengembangkan penawaran jasa pelabuhan yang lebih terintegrasi dengan hadirnya layanan di segmen logistik,

Current forecasts for improving economic conditions will provide opportunities for Pelindo to grow. Pelindo's opportunities include:

1. Government Vision/Program
   Maritime infrastructure development and the intensification of Government programs in the maritime sector have the potential to support Pelindo's integration plan.
2. Potential for Port Service and Value Chain Development
   a. Developing a more integrated port service offering with services in the logistics, hinterland development,

hinterland development, marine, serta *port services* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
   b. Peningkatan sinergi dengan BUMN lain di segmen transportasi pelayaran dan logistik.
3. Pemanfaatan Teknologi
   Potensi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jasa layanan kepelabuhan.
4. *Strategic Partnership*
   Peningkatan kerja sama usaha dengan mitra strategis dan strategi aliansi.

Dengan dilakukannya penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Pelindo II, Perseroan optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Penggabungan keempat entitas usaha tersebut diharapkan jaringan koneksi maritim, baik koneksi antara pelabuhan-pelabuhan dalam negeri maupun di luar negeri akan semakin meningkat. Melalui penggabungan ini, Perseroan memiliki kendali strategis yang lebih baik dan dukungan faktor finansial yang kuat sehingga operasional bisnis Pelindo akan lebih terkoordinasi, efisien, efektif, dan memiliki standar tertentu yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama pengguna jasa. Dengan kata lain, Perseroan memiliki prospek usaha yang baik yang juga didukung oleh kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan, yaitu:

1. Luas dan Kendali Jaringan, serta Pangsa Pasar Petikemas
   a. Jangkauan jaringan pelabuhan yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia.
   b. Kendali strategis lebih baik secara nasional melalui adanya perencanaan keseluruhan untuk jaringan dan investasi aset.
   c. Menguasai pasar petikemas Indonesia secara dominan.
2. Kelengkapan Jasa Kepelabuhan dan Portofolio Terdiversifikasi
   a. Rantai jasa usaha yang lengkap di bisnis kepelabuhan, memiliki 4 (empat) klaster yaitu:
      - Petikemas
      - Non Petikemas
      - Logistik and *Hinterland Development*
      - *Marine, Equipment and Port Services*
   b. Memiliki *portfolio* yang terdiversifikasi di luar bisnis kepelabuhan.
3. *Strategic Port*
   Memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan *transshipment hub*.
4. *Stakeholder Relation*
   Dukungan aspek legalitas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan.
5. *Business Experience*
   Pengalaman dan rekam jejak dalam pelaksanaan aktivitas pelabuhan (*port know-how*).

Berdasarkan *roadmap* strategi perusahaan yang terdapat pada Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2021-2025, pada tahun 2022 Pelindo berada pada fase *Business Alignment and Integration*. Pada fase ini Pelindo akan berfokus pada:

marine, and port services segments at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
   b. Increased synergy with other SOEs in the shipping and logistics transportation segment.
3. Use of Technology
   Potential use of technology and digitalization to increase the port services effectiveness and efficiency.
4. Strategic Partnership
   Increasing business cooperation with strategic partners and strategic alliances.

Following the merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV into Pelindo II, the Company is optimistic it will continue to improve its performance in the short term and in the long term. The merger of the four business entities is expected to increase the maritime connection network for connections between domestic and international ports. Through this merger, the Company has better strategic control and strong financial support as Pelindo's business operations will be more coordinated, efficient, effective, and have certain standards that will have a good impact on the community, especially service users. In other words, the Company has good business prospects supported by the Company's strengths, namely:

1. Network Area and Control, and Container Market Share
   a. The wide reach of the port network throughout Indonesia.
   b. Better strategic control nationally through overall planning for network and asset investments.
   c. Dominates the Indonesian container market.
2. Completeness of Port Services and a Diversified Portfolio
   a. A complete business service chain in the port business with 4 (four) clusters:
      - Containers
      - Non Containers
      - Logistics and Hinterland Development
      - Marine, Equipment and Port Services
   b. A diversified portfolio outside the port business.
3. Strategic Port
   Strategic locations for transshipment hubs.
4. Stakeholder Relations
   Support for high legality aspects in every business activity carried out.
5. Business Experience
   Experience and track record in carrying out port activities (port know-how).

Based on the Company's strategic roadmap in the Company's Long Term Plan Book (RJPP) for 2021-2025, in 2022 Pelindo will be in the Business Alignment and Integration phase. In this phase, Pelindo will focus on:

1. Penyelarasan bisnis paska integrasi melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan.
2. Melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis.
3. Reorganisasi perusahaan dan pengembangan budaya terintegrasi.

Selaras dengan fase *Business Alignment and Integration,* inisiatif strategis yang akan dilakukan baik pada tahap perencanaan maupun tahap eksekusi pada tahun 2022 antara lain:

1. Inisiatif Strategis Tahap Perencanaan Pada Tahun 2021:
   a. Digitalisasi dan sistemisasi operasi kepelabuhan.
   b. Pengembangan infrastruktur dan peralatan pelabuhan.
   c. Additional *marine service offering* untuk *key account* Pelindo.
   d. Alokasi modal terintegrasi.
   e. Restrukturisasi organisasi.
   f. Pengembangan fungsi *shared service*
   g. Sentralisasi *knowledge management.*
   h. Internalisasi budaya Pelindo terintegrasi.
2. Inisiatif Strategis Tahap Pelaksanaan Pada Tahun 2021:
   a. Standardisasi operasi pelabuhan.
   b. *Key account management* terintegrasi.
   c. Penurunan/optimalisasi *financing cost.*
   d. Pengadaan bersama/terpusat.
   e. Optimalisasi aset.
3. Inisiatif Strategis Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Pada Tahun 2021:
   a. Pembuatan klaster dan model bisnis.
   b. Optimisasi bisnis *core* dan *non core* untuk memperluas akses pendanaan.
   c. Program *Learning and Development* (L *and* D) terintegrasi untuk standardisasi dan peningkatan kualitas SDM.
   d. Implementasi *enterprise architect* dan IT *Masterplan.*

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja Perseroan. Dalam menjalankan bisnisnya, Pelindo yang sebelumnya merupakan gabungan dari Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness,* dan *trusted* terimplementasi di lingkungan bisnis Perseroan. Keenam asas tersebut diimplementasikan melalui komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, pemenuhan kepentingan Pemegang Saham, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pengungkapan informasi dan transparansi.

Pelindo menyadari arti pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Pengelolaan Pelindo selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, juga harus menjunjung tinggi norma-norma perilaku dan nilai etik berbisnis untuk meningkatkan

1. Post-integration business alignment through operational and commercial standardization and integration to improve service quality.
2. Integrated investments for business development.
3. Company reorganization and integrated culture development.

In the Business Alignment and Integration phase, strategic initiatives to be carried out at the planning and execution stages in 2022 include:

1. Strategic Initiatives Planning Phase in 2021:
   a. Digitization and systemization of port operations.
   b. Development of port infrastructure and equipment.
   c. Additional marine service offering for Pelindo key accounts.
   d. Integrated capital allocation.
   e. Organizational restructuring.
   f. Shared service function development
   g. Centralized knowledge management.
   h. Internalization of Pelindo integrated culture.
2. Strategic Initiatives Implementation Phase in 2021:
   a. Standardization of port operations.
   b. Integrated key account management.
   c. Reducing/optimizing financing costs.
   d. Joint/centralized procurement.
   e. Asset optimization.
3. Strategic Initiatives in the Planning and Implementation Phase in 2021:
   a. Cluster creation and business model.
   b. Optimization of core and non-core businesses to expand access to funding.
   c. Integrated Learning and Development (L and D) program for standardization and quality HC improvement.
   d. Implementation of enterprise architect and IT Masterplan.

CORPORATE GOVERNANCE

The application of the Good Corporate Governance (GCG) principles will contribute to improving the Company's performance. In running its business, Pelindo previously a combination of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV always applied GCG principles in all business activities. These principles are applied in the Company's business include transparency, accountability, responsibility, independence fairness and trusted. These six principles are applied through the commitment to the sustainable implementation of good corporate governance, fulfilling the interests of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors duties and responsibilities, as well as information disclosure and transparency.

Pelindo understands the importance of applying GCG principles as a way to increasing Shareholder and Stakeholder trust. Pelindo's management, in addition to complying with applicable laws and regulations, must also uphold the norms of behavior and business ethical values to improve the Company's reputation and image. To that end, the Company has already established

reputasi dan citra Perseroan. Untuk itu, Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku/Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*). Kode Etik Bisnis merupakan panduan berisi prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan. Kode Etik ini diharapkan menjadi aspirasi bagi Insan Pelindo untuk mencapai visi dan misi Pelindo. Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dibangun atas fondasi yang kuat dari visi, misi, tata nilai serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha Pelindo. Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan Pelindo yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan. Kode Etik Bisnis ini akan membantu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mengatasi isu-isu seputar etika atau dilema yang berpotensi dihadapi dalam bekerja. Pedoman Kode Etik Perseroan telah dilakukan pemutakhiran dengan melihat berbagi Pedoman yang ada di PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).

Good Corporate Governance Guidelines and a Code of Conduct. The Code of Business Ethics contains the principles that govern behavior in implementing corporate values. This Code of Conduct is expected to aspire Pelindo Personnel to achieve Pelindo's vision and mission. The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Code of Conduct is built on a strong foundation of the vision, mission, values, and Good Corporate Governance principles when carrying out Pelindo's business activities. This Code of Conduct applies to all Pelindo Personnel, from the Board of Commissioners, Board of Directors to all Employees. This Code of Conduct helps PT Pelabuhan Indonesia (Persero) overcome ethical issues or dilemmas that may be faced at work. The Company's Code of Conduct guidelines have been updated by looking at the existing guidelines at PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).

Untuk mengetahui efektivitas dan mengukur tingkat implementasi praktik GCG di lingkup usaha, Perseroan setiap tahunnya melakukan asesmen GCG. Prosedur pelaksanaan penilaian GCG Pelindo mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER- 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara; dan
5. Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No.SE14/ MBU/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Program *Assessment* dan *Review* Pelaksanaan GCG.

To determine the effectiveness and measure the level of GCG practices application in the business, the Company conducts a GCG assessment annually. The procedure for Pelindo's GCG assessment refers to several provisions, including:

1. Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
2. Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 as an amendment to the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
3. Minister of SOEs Decree No. KEP-117/MMBU/2002 dated August 1, 2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in SOEs;
4. Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs; and
5. Ministry of SOEs Circular Letter No. SE14/ MBU/2010 dated November 11, 2010 concerning Program Assessment and Review of GCG Implementation.

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam penerapan GCG, Perseroan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: HK.01/20/12/1/ ADKS/UTMA/PLND-21 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Jumlah wajib lapor di lingkungan Pelindo sebanyak 401 orang. Pada tahun 2021, wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 393 orang dan sebanyak 8 orang belum melaporkan.

As a form of the Company's commitment to implementing GCG, the Company coordinates the management and administration of the State Official's Wealth Report (LHKPN). The Company's policy concerning management and administration of the State Official's Wealth Report (LHKPN) was ratified based on the Board of Directors Decree No. HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 dated December 20, 2021 concerning the Wealth Reporting Guidelines for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officers within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The number of people required to report within Pelindo is 401 people. In 2021, 393 people reported their LHKPN, and 8 people did not report.

Perseroan juga melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan Pelindo memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan Pelindo untuk tidak terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap. Dalam kondisi tertentu, saat Insan Pelindo tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dengan pemberian tersebut di luar ketentuan atau pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada/melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Pelindo, maka yang bersangkutan wajib melaporkan baik secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai mekanisme yang telah diatur. Selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi yang dihadiri oleh 240 pekerja via *zoom meeting*.

The Company also has a gratification control program in accordance with applicable regulations. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) realizes that in establishing a working relationship with third parties, it often involves the gratification practices, so guidelines are required to control this practice. This is so that all Pelindo Personnel have the same understanding of the treatment of gratification, and to help Pelindo Personnel not to be entangled in gratification practices including bribery. Under certain conditions, when Pelindo personnel cannot avoid receiving a gift from a Third Party if the gift is outside the provisions, or the gift is already in a place, or has been entrusted to/through another person without the knowledge of the Pelindo Personnel, then the person concerned must report either directly to KPK or through the Gratification Control Unit (GCU) based on the regulated mechanism. During 2021, the Company carried out socialization related to gratification control, which was attended by 240 employees via zoom meetings.

Selain itu, Perseroan telah memiliki kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroan yang bersangkutan (*whistleblowing system*). *Whistleblowing system* (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik. Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen Pelindo beserta seluruh cabang pelabuhan dan grup perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan. Selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan sosialisasi terkait *whistleblowing system* yang dihadiri oleh 240 pekerja via *zoom meeting*.

In addition, the Company has a policy for reporting alleged irregularities in the Company (whistleblowing system). The Whistleblowing system (WBS) known as Pelindo Bersih was introduced to provide opportunities for all Pelindo personnel and other stakeholders to submit reports regarding indications of violations of applicable ethical values, based on evidence that can be justified and with good intentions. Pelindo Bersih is a program for Pelindo management and all port branches and company groups to create a workplace that is clean from fraud, corruption and extortion. During 2021, the Company carried out socialization related to the whistleblowing system, which was attended by 240 employees via zoom meetings.

Terkait pemegang saham dan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan RUPS melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak diterbitkannya pengumuman dan surat pemanggilan pelaksanaan rapat tersebut, seluruh bahan yang akan dibahas dalam RUPS telah tersedia di kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, para Pemangku Kepentingan yang menjadi peserta rapat dapat mengambil bahan tersebut. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelaksanaan RUPS didahului dengan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

For shareholders, the General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest institution in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and a forum for Shareholders to make important decisions, where authority is not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and laws and the applicable laws and regulations. The GMS is carried out through a process of announcement and summons for the GMS in accordance with applicable regulations. After the publication of the announcement and summons for the meeting, all materials to be discussed at the GMS will be made available at the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) office, so that Stakeholders who attend the meeting can take the material. The GMS consists of the Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS is held by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) every year, and includes the Annual GMS on the Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), and the Annual GMS on the Company's Work Plan and Budget (RKAP), while Extraordinary GMS can be held at any time based on the needs and interests of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The GMS is preceded by an invitation to the GMS, which is carried out in accordance with applicable regulations.

Pada tahun 2021, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 29 Januari 2021. Kemudian, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan tentang Pengesahan Laporan Tahunan tahun Buku 2020 secara tepat waktu yaitu pada tanggal 10 Mei 2021.

In 2021, the Company held the Annual GMS for the Company's Work Plan and Budget in a timely manner, on January 29, 2021. The Company also held the Annual GMS for the Ratification of the Annual Report for Fiscal Year 2020 in a timely manner, on May 10, 2021.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris bertugas, melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris; serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta kebijaksanaan pemerintah, terutama dibidang-bidang yang berhubungan dengan tujuan dan lapangan usaha Perseroan.

In relation to the Board of Commissioners duties and responsibilities, the Board of Commissioners is in charge of supervising the management of the Company by the Board of Directors. The Board of Commissioners also performs tasks specifically assigned to the Board of Commissioners; as well as supervises the implementation of regulations and provisions as well as government policies, especially in fields related to the Company's objectives and business fields.

Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komisaris Utama/Komisaris Independen melaksanakan tugas terkait koordinator Umum dan bidang remunerasi. Komisaris Independen melaksanakan tugas di bidang sosial, tanggung jawab sosial dan lingkungan, CSR dan kemasyarakatan serta bidang Audit. Komisaris melaksanakan tugas di bidang teknik, komersial, manajemen risiko, bidang transformasi dan pengembangan bisnis, bidang sumber daya manusia, hukum, pengadaan barang dan jasa, serta di bidang operasional dan sistem informasi.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

1. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;
2. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan sepanjang hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan;
4. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan; dan
5. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

The Board of Commissioners has divided its duties and determined the factors needed to support the implementation of the Board of Commissioners' duties. The President Commissioner/ Independent Commissioner carries out duties as the General and remuneration sector Coordinator. Independent Commissioners carry out duties in social, social and environmental responsibility, CSR and community affairs, as well as in the field of Audit. The Commissioners carry out duties in the fields of engineering, commercial, risk management, business transformation and development, human capital, law, procurement of goods and services, as well as operations and information systems.
In carrying out its duties, the Board of Commissioners avoids conflicts of interest by:

1. Avoiding any activity that can affect their independence in carrying out their duties;
2. Completing a Special Register containing information on their and/or their families ownership of shares in other companies, including if they do not have shares, with updates each year at the end of the year and are obliged to notify the Company if there are changes to the data in accordance with the applicable laws and regulations;
3. Not responding to requests for donations from any party and for any reason, whether direct requests from certain parties including but not limited to officials/employees within government agencies and political parties, including those related to the procurement of goods and services in the Company to the extent this may influence the making of a decision;
4. Guided not to take advantage of their position for personal interests or for the interests of other people or related parties that are contrary to the interests of the Company; and
5. Making a disclosure in the event of a conflict of interest, and the member of the Board of Commissioners concerned may not be involved in the Company's decision-making process related to this matter.

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite yaitu, Komite Audit, Komite Nominasi

To enhance the role of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners has established 3 (three) Committees, the Audit Committee, the

dan Remunerasi serta Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah melaksanakan proses nominasi dan remunerasi secara baik memadai. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas kebijakan dan pelaksanaan Pemantau Manajemen Risiko. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah melaksanakan proses Risiko secara baik memadai.

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih Dewan Komisaris; dan/atau Permintaan tertulis dari Direksi. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 40 (empat puluh) kali. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Direksi, tugas pokok Direksi adalah, memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan serta menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Nomination and Remuneration Committee and the GCG and Risk Management Monitoring Committee. The Audit Committee is a supporting organ below the Board of Commissioners, and was formed to assist the Board of Commissioners in supervising the management of IPC in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). The Nomination and Remuneration Committee was formed with the aim of providing input to the Board of Commissioners that the Company has carried out the nomination and remuneration process properly and adequately. The GCG and Risk Management Monitoring Committee is a committee formed by the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the intention of assisting the Board of Commissioners in carrying out their obligations to monitor, supervise and assess the policies and implementation of Risk Management Monitoring. The GCG and Risk Management Monitoring Committee was formed with the aim of providing input to the Board of Commissioners that the Company has implemented the Risk process properly and adequately.

The Board of Commissioners has a Secretary to the Board of Commissioners to support the secretarial duties of the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners is appointed to assist the smooth running of the Board of Commissioners duties, particularly in the field of secretarial and liaison between the Board of Commissioners and other parties, including the Board of Directors. The Secretary to the Board of Commissioners carries out the following duties:

1. Prepares the meeting, including the Board of Commissioners' briefing sheet;
2. Prepares the minutes of the Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions;
3. Administers the documents of the Board of Commissioners, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepares the Work Plan and Budget for the Board of Commissioners; and
5. Drafts Reports for the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners holds effective Board of Commissioners meetings and attends the meetings in accordance with the laws and regulations. The Board of Commissioners Meetings may be held at any time, or if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners; and/or written request from the Board of Directors. During 2021, the Board of Commissioners held 40 (forty) Board of Commissioners Meetings. In addition, the Board of Commissioners held 12 (twelve) Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

In relation to the Board of Directors duties and responsibilities, the main duties of the Board of Directors are to lead and manage the Company in accordance with the Company's objectives and always strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company as well as control, maintain and manage the Company's assets. The Board of Directors duties include.

1. Direktur Utama
   a. Sebagai Pimpinan Perusahaan, Direktur Utama bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi untuk menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan melaksanakan kegiatan usaha perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Manajemen (RKM) dalam rangka tercapainya tujuan perusahaan; dan
   b. Sebagai Pimpinan Direktorat Utama, Direktur Utama memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan sekretariat perusahaan, satuan pengendalian internal, dan manajemen integrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku berdasarkan pada prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan, dan tercapainya tujuan Integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Wakil Direktur Utama
   Sebagai koordinator dalam memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan Hukum dan Pembinaan Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi Pemegang Saham.
3. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
   Bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan strategis fungsional yang meliputi penetapan dan pengelolaan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan bidang keuangan serta manajemen risiko untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi Pemegang Saham.
4. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
   Melaksanakan tugas khusus pada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum serta memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
5. Direktur Strategi
   Bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan strategis yang meliputi Perencanaan Strategi, Pengembangan dan Kerja Sama Usaha, dan Teknologi Informasi & Komunikasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi Pemegang Saham.
6. Direktur Investasi
   Melaksanakan tugas khusus pada Direktorat Investasi serta memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
7. Direktur Pengelola
   Mengarahkan, menetapkan dan menyetujui atas kebijakan-kebijakan strategis terkait pengelolaan pelayanan bisnis bidang komersial, bidang operasional, pengelolaan Regional dan Cabang, sinergi hubungan Perusahaan serta menetapkan program kerja bidang pengelolaan perusahaan untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham.

1. President Director
   a. As the Head of the Company, the President Director acts as the leader of the Board of Directors members in preparing the Company's Long Term Plan (RJPP), and carrying out the Company's business activities as stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Management Work Plan (RKM) in order to achieve the Company's goals; and
   b. As the Head of the Main Directorate, the President Director leads and defines the strategies for elaboration in the RJPP, RKAP and RKM for the activities of the corporate secretary, internal control unit, and integrated management to ensure compliance with applicable regulations based on the principles of good corporate governance, the effectiveness of internal control, risk management and good corporate governance in order to achieve the Company's goals, and to achieve the integration objectives of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Vice President Director
   As a coordinator in leading and setting strategy as an elaboration of the RJPP, RKAP and RKM in Legal activities and Subsidiary Development for support the achievement of the company's vision and mission and aspiration of Shareholders.
3. Finance and Risk Management Director
   Responsible for functional strategic policies including the establishment and management of strategic policies related to finance and risk management to support the achievement of the Company's vision and mission and Shareholder aspirations.
4. Human Resources and General Affairs Director
   Carries out the special duties of the Human Resources and General Affairs Director and provides advice and consideration in accordance with Company policy.
5. Strategy Director
   Responsible for strategic policies which includes Strategic Planning, Development and Business Cooperation, and Information & Communication Technology to support the achievement of the company's vision and mission and aspirations of Shareholders.
6. Investment Director
   Carry out special duties at the Investment Directorate and provides advice and considerations in accordance with Company policy.
7. Managing Director
   Directs, determines and approves strategic policies related to the management of business services in the commercial sector, operational sector, Regional and Branch management, synergy of Company relations and work programs in the field of corporate management to support the achievement of the Company's vision and mission and shareholder aspirations.

Setiap anggota Direksi harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
   a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   c. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud Poin a di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
      - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
      - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
      - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

   d. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau atas usul dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali.

Direksi telah menyelenggarakan fungsi Sekretariat perusahaan yang berkualitas dan efektif. Sekretariat Perusahaan merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai *Compliance Officer* yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG. *Group Head* Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholders*.

Each member of the Board of Directors must comply with the following ethics related to conflicts of interest:

1. Must complete a Special Register containing information on their and/or their families ownership of shares in other companies, including if they do not have shares, with updates each year at the end of the year and are obliged to notify the Company if there are changes to the data in accordance with the applicable laws and regulations;

2. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
   a. There is a case before the Court between the Company and the relevant member of the Board of Directors;
   b. The member of the Board of Directors concerned has a conflict of interest with the Company;
   c. In the event of a situation as referred to in Point a above, those who are entitled to represent the Company are:
      - Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
      - The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; and
      - Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.

   d. In the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company and there is not a single member of the Board of Commissioners, the Company is represented by another party appointed by the GMS.

The Board of Directors holds Board of Directors Meetings, and attends the Board of Commissioners Meeting in accordance with the laws and regulations. The Board of Directors can hold a meeting whenever deemed necessary by the President Director or at the suggestion of at least 1/3 (one third) of the total members of the Board of Directors by mentioning the matters to be discussed. In 2021, the Board of Directors held 22 (twenty two) Board of Directors Meetings.

The Board of Directors has established a quality and effective corporate secretary function. The Corporate Secretary is a corporate governance organ that plays a significant role as a Compliance Officer who assists the Board of Directors in implementing GCG principles and complying with the provisions of GCG practices. The Group Head of the Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) reports directly to the President Director and is tasked with carrying out the mission to support the creation of a consistent and sustainable good corporate image through effective communication programs to all stakeholders.

Terkait pengungkapan informasi dan transparansi, Perseroan senantiasa menerapkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan bagi para Pemangku Kepentingan. Informasi Perseroan dapat diakses melalui situs resmi maupun laporan-laporan yang diterbitkan secara berkala, baik Laporan Tahunan, Siaran Pers, maupun laporan dari media komunikasi lainnya. Situs resmi Pelindo di www.pelindo.co.id tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan juga senantiasa memutakhirkan Informasi yang disediakan dalam *website* Perseroan secara berkala.

For information disclosure and transparency, the Company always discloses information required for Stakeholders. Company information can be accessed through the official website as well as reports published regularly, through Annual Reports, Press Releases, and reports using other communication media. Pelindo's official website at www.pelindo.co.id is available in Indonesian and English. The Company also continuously updates the information provided on the Company's website on a regular basis.

Perseroan juga melaksanakan pengungkapan informasi penting melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan. Laporan tahunan mencantumkan identitas Perseroan dengan jelas, yakni terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas Perseroan. Laporan Tahunan disajikan dalam *website* Perseroan dan dapat diunduh. Perseroan telah menyajikan informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku. Dalam Laporan Tahunan juga telah memuat antara lain, informasi saham; informasi obligasi; Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi; profil perusahaan secara lengkap; Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan; pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta Laporan Keuangan. Sepanjang tahun 2021, Perseroan juga telah memperoleh berbagai penghargaan di berbagai bidang. Informasi penghargaan yang telah diperoleh Perseroan disajikan dalam Bab Profil Perusahaan.

The Company also discloses important information through the Annual Report and Financial Statements. The annual report is presented in Indonesian and English. The annual report clearly states the identity of the Company, by stating the year of the Annual Report and the identity of the Company. The Annual Report is published on the Company's website and can be downloaded. The Company presents financial information with comparisons for the past 5 (five) fiscal years. The Annual Report also contains share information; bond information; the Board of Commissioners Report and the Board of Directors Report; complete Company profiles; a Management Discussion and Analysis on Company Performance; disclosure of Good Corporate Governance practices and Financial Statements. In 2021, the Company also received awards in various fields. Information on awards obtained by the Company can be seen in the Company Profile Chapter.

Sepanjang tahun 2021, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan telah melaksanakan kegiatan *assessment* GCG untuk tahun buku 2020 yang dilakukan di tiap-tiap entitas usaha sebelum *merge* yaitu Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV. Dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, skor yang diperoleh untuk Pelindo I sebesar 95,63 atau dengan predikat "Sangat Baik", Pelindo II sebesar 98,73 atau dengan predikat "Sangat Baik", Pelindo III sebesar 93,156 atau dengan predikat "Sangat Baik" dan Pelindo IV sebesar 91,93 atau dengan predikat "Sangat Baik". Berdasarkan hasil *assessment* tersebut, pada tahun 2021 tiap-tiap entitas usaha telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

In 2021, development of the corporate governance implementation was carried out by the Company, and the Company carried out GCG assessments for the fiscal year 2020 for each business entity prior to the merger, namely Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV. The assessment criteria used was based on the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The score obtained for Pelindo I was 95.63 with the predicate "Very Good", Pelindo III scored 93,156 with the predicate "Very Good" and Pelindo IV scored 91.93 with the predicate "Very Good". Based on the assessment results, in 2021 each business entity has followed up as follows:

Pelindo I

1. Pedoman Perilaku telah memuat pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Perseroan telah melakukan kegiatan diseminasi/sosialisasi terkait pengendalian Gratifikasi kepada *Stakeholders* Perusahaan;
3. Perseroan telah melakukan kegiatan pengelolaan gratifikasi di lingkungan perusahaan;
4. Perseroan telah membuat laporan hasil pelatihan yang telah dijalani oleh anggota Direksi;
5. Perseroan telah membuat laporan Kinerja Teknologi yang

Pelindo I

1. The Code of Conduct contains a statement of commitment from the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. The Company carried out dissemination/socialization activities related to Gratification control to the Company's Stakeholders;
3. The Company carried out gratification management activities within the company;
4. The Company prepared a report on the results of training undertaken by members of the Board of Directors;
5. The Company prepared a Technology Performance report

disampaikan kepada Dewan Komisaris mencantumkan hasil Audit IT; dan

6. Kebijakan pengaturan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan telah mencakup pengangkatan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.

Pelindo II

1. Program kerja tahunan komite lainnya telah memuat paling sedikit sesuai dengan piagam komite lainnya dan mencakup *self assessment* kinerja komite lainnya;
2. Perseroan telah mengesahkan *Draft Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan *Information Technology Detail Plan* (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP;
3. Pelaksanaan kegiatan kemitraan telah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam RKAP; dan
4. Pimpinan Fungsi Audit Internal telah memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat.

Pelindo III

1. Perseroan telah memutakhirkan pedoman *Code of Corporate Governance* (CoCG) dan sudah disahkan dan ditandatangani oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Perseroan telah memutakhirkan pedoman perilaku dan sudah disahkan dan ditandatangani oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Perseroan telah memutakhirkan kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistleblowing system*);
4. Telah terdapat program/rencana sosialisasi ketentuan penerapan *whistleblowing system* yang secara khusus ditujukan kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun pekerja Perseroan;
5. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan *whistleblowing system* yang mencakup perangkat pendukung, sosialisasi yang telah dilakukan dan efektivitas unit pelaksana dan media;
6. Telah terdapat aturan yang secara eksplisit menetapkan maksimal jumlah jabatan sebagai Dewan Komisaris yang dapat dipegang seorang anggota Dewan Komisaris;
7. Telah terdapat pedoman/penilaian kinerja Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh pemegang saham;
8. Telah terdapat pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh pemegang saham; dan
9. Perseroan telah memutakhirkan Kebijakan Dewan Komisaris dalam pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem pengendalian intern.

Pelindo IV

1. Perseroan telah melakukan pemutakhiran terhadap Pedoman GCG, Pedoman Perilaku, dan *Board Manual;*

to submit to the Board of Commissioners stating the results of the IT Audit; and

6. Regulatory policies for Subsidiaries and Joint Ventures have included the appointment of the Board of Commissioners/ Supervisory Board and Board of Directors, setting performance targets and performance appraisals as well as incentives for the Board of Commissioners/Supervisory Board and Directors.

Pelindo II

1. The other committee's annual work program is in line with the other committee's charter and includes self-assessments of the performance of other committees;
2. The Company approved the Draft Information Technology Master Plan (ITMP) as a guideline for the development of information technology and the Information Technology Detail Plan (ITDP) as a further elaboration of the ITMP, to be used as a reference for implementing the annual planning according to the ITMP;
3. The partnership activities are in accordance with the work plan set out in the RKAP; and
4. The Head of the Internal Audit Function has the recognized expertise in the internal auditor profession by obtaining the right professional certification.

Pelindo III

1. The Company updated the Code of Corporate Governance (CoCG) guidelines and they have been approved and signed by the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. The Company updated the code of conduct and it has been approved and signed by the Board of Directors and Board of Commissioners;
3. The Company updated the policy regarding reporting alleged irregularities in the company (whistleblowing system);
4. There is a program/plan to socialize the provisions for the implementation of the whistleblowing system, specifically addressed to the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the Company;
5. An evaluation was carried out on the implementation of the whistleblowing system including supporting devices, socialization carried out and the effectiveness of the implementing unit and the media;
6. There are rules that explicitly stipulate the maximum number of positions on the Board of Commissioners that can be held by a member of the Board of Commissioners;
7. There are guidelines for the Board of Commissioners performance assessment by the shareholders;
8. There are guidelines for the preparation of the Board of Commissioners supervisory duties report on determined by the shareholders; and
9. The Company updated the Board of Commissioners' Policy by providing advice on internal control system policies.

Pelindo IV

1. The Company updated the GCG Guidelines, Code of Conduct, and Board Manual;

2. Perseroan telah melakukan pemutakhiran Piagam Komite Risiko;
3. Perseroan telah membuat laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi;
4. Perseroan telah menyempurnakan Kebijakan Teknologi Informasi, termasuk menyusun *Information Technology Master Plan* (ITMP) dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris; Melakukan Audit Teknologi Informasi (TI) oleh Audit Eksternal, menyesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem TI kepada Dewan Komisaris;
5. Perseroan telah menyempurnakan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta penetapan remunerasinya;
6. Perseroan telah melakukan pengukuran kepuasan pemasok;
7. Perseroan telah melakukan pemutakhiran Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*); dan
8. Perseroan telah menetapkan (menyempurnakan) kebijakan tentang sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 2 (dua) Komite di bawah Direksi, terdiri dari Komite Pelindo Bersih dan Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Direksi berdasarkan rapat dan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama tahun buku. Sepanjang tahun 2021, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Informasi komposisi anggota Direksi pada bagian ini diawali dengan komposisi Direksi pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) karena *merger* dilakukan dengan menggabungkan PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) PERIODE 1 JANUARI 2021 – 14 MARET 2021

Komposisi Direksi periode 1 Januari 2021 – 14 Maret 2021 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo II. Komposisi Direksi dapat dilihat di bawah ini.

2. The Company updated the Risk Committee Charter;
3. The Company prepared a report on the results of training undertaken by members of the Board of Directors;
4. The Company refined the Information Technology Policy, including preparing the Information Technology Master Plan (ITMP) and submitting its implementation report to the Board of Commissioners; Conducted an Information Technology (IT) Audit by External Audit, adjusted to the needs of the Company, and submitted a report on the implementation of the IT System to the Board of Commissioners;
5. The Company perfected the regulatory policy for subsidiaries (subsidiary governance), the appointment and dismissal of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries as well as the determination of their remuneration;
6. The Company has measured supplier satisfaction;
7. The Company updated the Internal Audit Charter; and
8. The Company established (improved) policies on corporate information control systems and procedures with the aim of securing important company information.

COMMITTEES' BELOW THE BOARD OF DIRECTORS ASSESSMENT

In carrying out its management duties, the Board of Directors is assisted by 2 (two) Committees consisting of the Pelindo Bersih Committee, and the Governance, Risk Management and Compliance Committee. The procedure for evaluating these Committees performance is carried out by the Board of Directors periodically with the evaluation criteria based on meetings held, and the implementation of duties carried out during the fiscal year. For 2021, the Board of Directors is of the opinion that the Committees below the Board of Directors carried out their duties and responsibilities properly.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP COMPOSITION

Information on the Board of Directors membership composition in this section starts with the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors composition, as the merger was carried out by merging PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) BOARD OF JANUARY 1, 2021 – MARCH 14, 2021

The Board of Directors composition for the period January 1, 2021 – 1 March 14, 2021 included 8 (eight) people consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 6 (six) Directors. All members of the Board of Directors were domiciled in the Pelindo II Head Office working area. The Board of Directors composition can be seen below.

Arif Suhartono	:	Direktur Utama President Director
Hambra	:	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Rima Novianti	:	Direktur Komersial Commercial Director
Zuhri Iryansyah	:	Direktur Teknik Engineering Director
Muarip	:	Direktur Operasi Operations Director
Ihsanuddin Usman	:	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director
Ogi Rulino	:	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director
Yon Irawan	:	Direktur Keuangan Finance Director

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) PERIODE 15 MARET 2021 - 30 SEPTEMBER 2021

Pada tanggal 15 Maret 2021, Desember berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, telah dilakukan pemberhentian dengan hormat Bapak Yon Irawan sebagai Direktur Keuangan dan Pengangkatan Bapak Mega Satria sebagai Direktur Keuangan yang dilaksanakan dalam rangka penataan susunan keanggotaan Direksi.

Dengan demikian, komposisi Direksi periode 15 Maret 2021 sampai dengan 30 September 2021 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo II. Komposisi Direksi dapat dilihat di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD MARCH 15, 2021 – SEPTEMBER 30, 2021

On March 15, 2021, December based on the Minister of SOEs as a PT Pelabuhan Indonesia (Persero) GMS Decree No. SK-79/MBU/03/2021 dated March 15, 2021, Yon Irawan was dismissed with honor as Finance Director, and Mega Satria was appointed of as Finance Director, carried out in the context of structuring the Board of Directors membership composition.

Thus, the Board of Directors composition for the period from March 15, 2021 to September 30, 2021 included 8 (eight) people consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 6 (six) Directors. All members of the Board of Directors were domiciled in the Pelindo II Head Office working area. The Board of Directors composition can be seen below.

Arif Suhartono	:	Direktur Utama President Director
Hambra	:	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Rima Novianti	:	Direktur Komersial Commercial Director
Zuhri Iryansyah	:	Direktur Teknik Engineering Director
Muarip	:	Direktur Operasi Operations Director
Mega Satria	:	Direktur Keuangan Finance Director
Ihsanuddin Usman	:	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director
Ogi Rulino	:	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 1 OKTOBER 2021 – 31 DESEMBER 2021 (PASCA MERGER)

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan berganti nama menjadi "PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo". Dengan demikian, komposisi Direksi periode 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili di wilayah kerja Pelindo. Komposisi Direksi dapat dilihat di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD OCTOBER 1, 2021 – DECEMBER 31, 2021(POST MERGER)

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merged into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and changed their names to "PT Pelabuhan Indonesia (Persero) abbreviated as Pelindo". Thus, the composition of the Board of Directors for the period from October 1, 2021 to December 31, 2021, included 7 (seven) people, consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 5 (five) Directors. All Directors are domiciled in the Pelindo working area. The Board of Directors composition can be seen below.

Arif Suhartono	:	Direktur Utama President Director
Hambra	:	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Mega Satria	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director
Ihsanuddin Usman	:	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director
Prasetyo	:	Direktur Strategi Strategy Director
Boy Robyanto	:	Direktur Investasi Investment Director
Putut Sri Muljanto	:	Direktur Pengelola Managing Director

PENUTUP

Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen, dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada seluruh insan Pelindo yang telah bekerja keras di tengah tantangan kondisi perekonomian. Atas dedikasi dari seluruh insan Pelindo, Direksi mengucapkan terima kasih sehingga Pelindo mampu memperoleh kinerja yang baik di tahun 2021.

Atas arahan yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris yang sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan, Direksi memberikan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

CLOSING

The Board of Directors would like to express its highest appreciation for the trust, commitment, and cooperation of all stakeholders, especially to all Pelindo personnel who have worked hard during the challenging economic conditions. For the dedication of all Pelindo personnel, the Board of Directors would like to express its gratitude whereby Pelindo achieved a good performance in 2021.

For the directives given by the Board of Commissioners, which greatly contributed to the achievement of the Company's performance, the Board of Directors would like to express its highest gratitude and appreciation.

Ke depannya, melalui penggabungan yang telah terlaksana, Pelindo memiliki kendali strategis yang lebih baik dan dukungan faktor finansial yang kuat, sehingga operasional bisnis Pelindo akan lebih terkoordinasi, efisien, efektif, dan memiliki standar tertentu yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama pengguna jasa. Direksi dan seluruh jajaran manajemen akan berkomitmen untuk merealisasikan visi dan tujuan penggabungan usaha Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia.

Moving forward, thanks to the merger that has already taken place, Pelindo will now have better strategic control and strong financial support so that Pelindo's business operations will be more coordinated, efficient, effective, and follow standards that will have a good impact on the community, especially service users. The Board of Directors and all levels of management remain committed to realizing the vision and goal of the business merger to be a World Class Leader in the Integrated Maritime Ecosystem.

Jakarta, 18 April 2022
Jakarta, April 18, 2022

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Arif Suhartono
Direktur Utama
President Director

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT



Marsetio

Komisaris Independen/
Plt. Komisaris Utama
Independent Commissioner/
Acting President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, pada tahun 2021 Pelindo dapat mencatatkan kinerja yang baik di tengah kondisi perekonomian yang belum mengalami pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021 Pelindo I, III, dan IV digabungkan ke dalam Pelindo II. Penggabungan Pelindo merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi operasi di seluruh pelabuhan nasional dengan standardisasi teknologi informasi (TI). Pelindo yang sebelumnya bergerak secara mandiri kini telah bertransformasi menjadi Pelindo yang terintegrasi.

Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang terdiri dari penilaian atas kinerja Direksi selama tahun 2021, pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi, penerapan tata kelola Perseroan yang baik, penilaian atas Komite di bawah Dewan Komisaris dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris memberikan penilaian atas kinerja Direksi dengan cara memberikan nasihat kepada Direksi serta melakukan pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi yang dijelaskan sebagai berikut.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan utama. Kegiatan tersebut antara lain, rapat internal Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan kolegial, serta bila diperlukan Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi terkait, untuk memberikan penjelasan atau tambahan data/informasi atas permasalahan atau usulan yang perlu mendapat rekomendasi persetujuan Dewan Komisaris. Selanjutnya, rekomendasi dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan melalui surat kepada Direksi, diantaranya ditembuskan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara/Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN.

Kegiatan pengawasan juga dilakukan kunjungan ke Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sehingga Dewan Komisaris mendapatkan gambaran secara lebih jelas atas beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Cabang dalam memberikan jasa kepelabuhanan maupun masalah terkait lainnya. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilakukan pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebelum *merger* dan pada PT Pelabuhan

Dear Shareholders and Stakeholders,

With thanks to the presence of God Almighty, for His mercy and grace, in 2021 Pelindo recorded a good performance amidst the economic conditions that have not yet fully recovered from the COVID-19 pandemic.

In 2021 Pelindo I, III, and IV merged with Pelindo II. The Pelindo merger is a step towards improving operational efficiencies in all national ports using standardized information technology (IT). The Pelindo that previously operated independently were transformed into an integrated Pelindo.

We would like to present the Board of Commissioners' supervisory and advisory report on the Company's management in fiscal year 2021, together with our assessment on the Board of Directors' performance during 2021, our view on the business prospects prepared by the Board of Directors, good corporate governance implementation, our assessment of the Committees below the Board of Commissioners, and changes in the Board of Commissioners composition.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The Board of Commissioners assesses the Board of Directors performance, by providing advice and supervising their execution of the following strategies.

FREQUENCY AND HOW WE PROVIDE ADVICE TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors through several activities, including Board of Commissioners internal meetings held for collegial decision making, and if necessary in internal meetings of the Board of Commissioners, by inviting the relevant Directors to provide, explanations or additional data/information on problems or proposals that require from the Board of Commissioners approval. Following these meetings, the Board of Commissioners' recommendations and opinions are submitted through letters to the Board of Directors, with copies to the Minister of State-Owned Enterprises/Deputy for Construction and Transportation Facilities and Infrastructure at the Ministry of SOEs.

The supervisory activities were also carried out by visiting the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Port Branches, so the Board of Commissioners could gain a clearer picture of some of the problems faced by the Branches in providing port services, and any other related problems. In 2021, the Board of Commissioners held a 12 (twelve) Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, conducted at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) before the merger, and by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) after the merger. The Board of Commissioners' working

Indonesia (Persero) setelah *merger*. Kunjungan kerja Dewan Komisaris ke beberapa Cabang Pelabuhan pada tahun 2021 tidak dilaksanakan karena masih pandemi COVID-19.

PENGAWASAN TERHADAP PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap perumusan strategi dan implementasi strategi Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris. Pengawasan terhadap perumusan strategi Perseroan dilaksanakan dengan melakukan telaah atas *roadmap* strategi jangka panjang 2021-2025 yang telah disusun oleh Direksi. Sedangkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap implementasi strategi dilakukan dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris yang meliputi di antaranya:

1. Pengawasan terhadap Rencana Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap;
2. Pengawasan terhadap penghapusan Aktiva Tetap;
3. Pengawasan terhadap perubahan Kewenangan serta *Draft* Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Sama dengan Mitra; dan
4. Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat.

PANDANGAN ATAS KINERJA DIREKSI

Pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini, tahun 2021 menjadi fase pemulihan dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan GDP Global berhasil mencapai angka 5,5% pada tahun 2021, setelah sebelumnya mengalami minus sebesar 3,4% pada tahun 2020. Pemulihan ini dikarenakan adanya perubahan baru pada kebiasaan masyarakat, pemerintah, maupun bisnis karena telah beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini. Pertumbuhan ini diperkirakan akan berlangsung pada beberapa tahun ke depan tetapi dengan angka pertumbuhan yang melandai hingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi global akan kembali pada proyeksi normal seperti sebelum terjadinya pandemi. Namun demikian, pemulihan ekonomi global yang terjadi di tahun 2021 diwarnai oleh dua isu yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kekhawatiran akan tingginya inflasi yang diakibatkan tidak seimbangnya *supply and demand*. Berdasarkan data diberikan oleh *World Economic Outlook* pada Oktober 2021, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada negara-negara di dunia bervariasi mulai dari 0 sampai 6% dengan beberapa negara tercatat masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Pada beberapa negara yang berkembang atau *Emerging Markets and Developing Economies* (EMDE), berdasarkan data hasil proyeksi pada Oktober 2021, diperkirakan bertumbuh sebesar 6,4% pada 2021. Sedangkan pada negara maju atau *Advanced Economies* (AEs), diperkirakan bertumbuh sebesar 5,2%.

Meskipun perekonomian global masih mengalami ketidakpastian, namun perbaikan perekonomian nasional masih terus berlanjut. Perekonomian Indonesia cenderung terus mengalami pemulihan pada tahun 2021, walaupun adanya perlambatan akibat gelombang Delta COVID-19 antara bulan Juni hingga Agustus

visits to the Port Branches were not carried out in 2021 due to the COVID-19 pandemic.

STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION SUPERVISION

During 2021, the Board of Commissioners supervised the Company's strategy formulation and implementation of strategy, and provided advice to the Board of Directors in accordance with the Board of Commissioners main duties and functions. Supervision of the Company's strategy formulation was carried out by reviewing the long-term 2021-2025 strategic roadmap prepared by the Board of Directors. The supervision of the strategy implementation was carried out by the Board of Commissioners directing, monitoring, and evaluating the implementation of strategic policies as part of its supervisory duties, which included:

1. Supervision of the Use of Fixed Assets Cooperation Plan;
2. Supervision of Fixed Assets being written off;
3. Supervision of Authority changes, and the Board of Directors Draft Decree concerning Cooperation with Partners Guidelines; and
4. Changes in the Head Office Organizational Structure.

VIEW ON THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The COVID-19 pandemic is still ongoing, with 2021 being a recovery phase compared to 2020. In 2021, Global GDP growth reached 5.5%, compared to minus 3.4% in 2020. This recovery was the result of changes in the communities, Government, and business habits as they adapted to the pandemic conditions, and the recovery is expected to continue in the years ahead, with a gradual growth rate so that by the end of the pandemic the global economic growth will return to its previous position. However, the global economic recovery that occurred in 2021 was marked by two issues, namely uneven economic growth and concerns over high inflation caused by an imbalance of supply and demand. Based on data provided by the World Economic Outlook in October 2021, the economic growth that occurred in countries in the world varied from 0 to 6% with several countries recorded still experiencing negative growth. In developing countries or Emerging Markets and Developing Economies (EMDE), based on projected data in October 2021, it is estimated to grow by 6.4% in 2021. While in developed countries or Advanced Economies (AEs), it is estimated to grow by 5. 2%.

Although the global economy is still experiencing uncertainty, the national economy continues to improve. The Indonesian economy is likely to continue to recover in 2021, despite the slowdown due to the COVID-19 Delta wave between June and August 2021. After experiencing growth of 7.07% (Year on

2021. Setelah mengalami pertumbuhan sebesar 7,07% (*Year on Year*/YoY) pada kuartal kedua, pertumbuhan melambat pada kuartal ketiga menjadi sebesar 3,51% (YoY). Namun setelah berhasil melewati fase kritis gelombang Delta, pertumbuhan kuartal keempat kembali meningkat menjadi 5,02% (YoY).

Year/YoY) in the second quarter, growth slowed in the third quarter to 3.51% (YoY). However, after successfully passing the critical phase of the Delta wave, the fourth quarter growth picked up again to 5.02% (YoY).

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0±1%. Inflasi IHK tahun 2021 adalah sebesar 1,87% (YoY), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK tahun 2020 sebesar 1,68% (YoY). Inflasi yang cukup rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Di tengah kekhawatiran akan tingginya inflasi secara global, rendahnya inflasi dalam negeri menunjukkan langkah-langkah dan kebijakan pemerintah yang cukup efektif.

Consumer Price Index (CPI) inflation in 2021 remained low and below the target range of 3.0±1%. CPI inflation in 2021 was 1.87% (YoY), an increase compared 1.68% (YoY) in 2020. The low inflation in 2021 was influenced by weak domestic demand as a result of the COVID-19 pandemic, adequate supplies, and policy synergy between Bank Indonesia and the Government at the central and regional levels to maintain price stability. Amid concerns over high global inflation, low domestic inflation indicated that the Government's measures and policies had been effective.

Dari sisi industri pelabuhan, meningkatnya tingkat kontainerisasi komoditas didorong oleh perbaikan infrastruktur dan operasional pelabuhan. Saat ini, tingkat kontainerisasi komoditas di Indonesia hanya mencapai 14% dengan komoditas utama berupa produk manufaktur, sayuran, makanan siap saji, dan protein (hewan). Dengan pengembangan pelabuhan yang terus dilakukan, tingkat kontainerisasi diprediksi akan terus meningkat. Pertumbuhan kontainerisasi diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang tetap apabila pertumbuhan GDP berada pada prediksi *baseline* 5,2%. Namun, bila prediksi pertumbuhan GDP agresif 8,5%, maka akan terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan kontainerisasi sebanyak 4%.

From the port industry side, the increasing level of commodity containerization was driven by improvements in infrastructure and port operations. Currently, the level of commodity containerization in Indonesia has only reached 14% with the main commodities being manufactured products, vegetables, ready-to-eat foods, and protein (animals). As port development continues, the containerization rate is predicted to continue to increase. Containerization growth is predicted to experience steady growth if the GDP growth is at the predicted baseline of 5.2%. However, if there is an aggressive GDP growth is 8.5%, there will be an increase in containment growth of 4%.

Selain itu, kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada bidang jalur perdagangan maritim selama awal tahun 2021. Adanya fase pemulihan terlihat dari aktivitas di pelabuhan yang menunjukkan ketahanan dalam permintaan konsumen dan rantai pasokan global, namun perdagangan yang tidak seimbang (*imbalance trading*) dan pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak merata (*uneven economic growth*) juga menyebabkan peristiwa kekurangan petikemas di wilayah Timur.

In addition, new habits after the COVID-19 pandemic also affected the maritime trade routes during early 2021. A recovery phase can be seen in ports activities that demonstrated resilience to consumer demand and global supply chains, however, imbalance trading and uneven economic growth in the world also led to a shortage of containers in the East.

Dalam pasar non-petikemas, volume perdagangan tertinggi terjadi antara Tiongkok dan Asia Tenggara dengan volume mencapai 397,7 juta Ton. Dengan tingginya volume perdagangan maritim di Asia dan pertumbuhan perdagangan di Asia Tenggara, terdapat potensi pengembangan bisnis pelabuhan, terutama untuk jalur perdagangan *Far East-Europe* yang melewati Selat Malaka. Di Indonesia sendiri, volume perdagangan petikemas dan non petikemas masih berpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini berkaitan dengan terfokusnya populasi dan GDP Indonesia di Jawa dan Sumatera, di mana lebih dari 50% populasi dan kontribusi GDP Indonesia berasal dari Jawa.

In the non-container market, the highest trading volume was between China and Southeast Asia with volumes reaching 397.7 million tons. With the high volume of maritime trade in Asia and the growth of trade in Southeast Asia, there is potential for developing the port business, especially for the Far East-Europe trade route that passes through the Malacca Strait. In Indonesia itself, the volume of container and non-container trade is still centered on the islands of Java and Sumatra. This is related to Indonesia's population and GDP on Java and Sumatra, where more than 50% of Indonesia's population and GDP contribution comes from Java.

Di tengah kondisi perekonomian dan industri pelabuhan tersebut, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2021. Dari sisi operasi kepelabuhan, arus kapal dalam satuan

In the midst of these economic and port industry conditions, the Board of Directors faced the challenges and opportunities that occurred by recording a good performance in 2021. In terms of port operations, total ship traffic in 2021 reached 254,669 units,

unit tahun 2021 mencapai 254.669 unit, meningkat 10,76% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 229.932 unit. Arus kapal dalam satuan GT tahun 2021 mencapai 1.186.217.247 GT, meningkat 13,78% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1.042.573.078 GT. Arus petikemas dalam satuan *box* tahun 2021 mencapai 13.234.256 *box*, meningkat 18,95% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 11.125.677 *box*. Arus petikemas dalam satuan teus yang meningkat sebesar 21,55%, dari 14.032.351 teus di tahun 2020 menjadi 17.056.636 teus di tahun 2021. Arus barang non petikemas dalam satuan ton tahun 2021 mencapai 146.200.809, meningkat 13,16% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 129.198.339 ton.

an increase of 10.76% compared to 229,932 in 2020. Total ship traffic in 2021 reached 1,186,217,247 GT units, an increase of 13.78% compared to 1,042,573,078 in 2020. Total container traffic in 2021 reached 13,234,256 box units, an increase of 18.95% compared to 11,125,677 in 2020. Total container traffic in 2021 reached 17,056,636 TEUs, an increase of 21.55% compared to 14,032,351 in 2020. Total non-container good traffic in 2021 reached 146,200,809 tons, an increase of 13.16% compared to 129,198,339 in 2020.

Dari sisi arus penumpang, arus penumpang pada tahun 2021 mencapai 8.056.905 orang, meningkat 11,27% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7.240.547 orang. Selain itu, pada jasa lainnya, realisasi produksi pengusahaan properti untuk persewaan lahan di tahun 2021 dalam satuan M^2 mencapai 33.742.879 M^2, meningkat 82,06% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 18.534.151 M^2. Sedangkan produksi Pengusahaan TBAL untuk Persewaan Perairan di tahun 2021 dalam satuan M^2 mencapai 383.739 M^2, meningkat 0,46% dibandingkan tahun 2020 sebesar 381.999 M^2. Produksi Pengusahaan Properti untuk Persewaan Bangunan dalam satuan M^2 mencapai 877.833 M^2, meningkat 60,32% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 275,537 M^2. Produksi pengusahaan air untuk penggunaan air kapal di tahun 2021 mencapai sebesar 2.318.058 ton, meningkat 162,68% dibandingkan tahun 2020 sebesar 882.457 ton. Untuk pengusahaan air, penggunaan air minum di tahun 2021 mencapai sebesar 571.421 ton, meningkat 82,27% dibandingkan tahun 2020 sebesar 313.498 ton. Kemudian, pada pelayanan jasa rupa-rupa, pas pelabuhan orang di tahun 2021 dalam satuan lembar mencapai 3.794.742 lembar, meningkat 28,68% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2.948.945 lembar. Demikian pula dengan pas harian kendaraan yang meningkat 77,62% dari 8.120.614 lembar di tahun 2020 menjadi 14.423.543 lembar di tahun 2021.

Passenger traffic in 2021 reached 8,056,905 people, an increase of 11.27% compared to 7,240,547 people the previous year. In other services, property operations for land rental in 2021 reached 33,742,879 M^2, an increase of 82.06% compared to 18,534,151 M^2 in 2020. TBAL production for water leasing in 2021 reached 383,739 M^2, an increase of 0.46% compared to 381,999 M^2 in 2020. Property Concession production for Building Leases reached 877,833 M^2, an increase of 60.32% compared to 275,537 M^2 in 2020. Water business production for ship water in 2021 reached 2,318,058 tons, an increase of 162.68% compared to 882,457 tons in 2020. The public water business for drinking water in 2021 was 571,421 tons, an increase of 82.27% compared to 313,498 tons in 2020. In other miscellaneous services, passenger passes in 2021 reached 3,794,742, an increase of 28.68% compared to 2,948,945 in 2020. Likewise, the daily vehicle passes increased by 77.62% from 8,120,614 in 2020 to 14,423,543 in 2021.

Selain kinerja operasional, Perseroan juga telah mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Pendapatan operasi tahun 2021 mencapai Rp28,81 triliun, meningkat 14,28% atau Rp3,60 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp25,21 triliun. Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2021 sebesar Rp3,18 triliun, meningkat 7,34% atau sebesar Rp217,20 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,96 triliun. Ekuitas tahun 2021 mencapai Rp42,05 triliun, meningkat 4,42% atau Rp1,78 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp40,27 triliun.

In addition to operational performance, the Company also recorded a good financial performance. Operating revenues in 2021 amounted to Rp28.81 trillion, an increase of 14.28%, or 3.60 trillion from Rp25.21 trillion in 2020. Income for the year after effect of merging entity's income in 2021 amounted to Rp3.18 trillion, an increase of 7.34%, or Rp217.20 trillion from Rp2.96 trillion in 2020. Equity in 2021 stood at Rp42.05 trillion, an increase of 4.42%, or Rp1.78 trillion from Rp40.27 trillion in 2020

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan Perseroan juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara terdapat tiga aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Untuk indikator aspek keuangan dan aspek

In addition to operational and financial performance, the Company's health level also one of the considerations taken into account by the Board of Commissioners when assessing the Board of Directors performance. Based on the Minister of SOEs Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning The Health Assessment of State-Owned Enterprises, there are three aspects to the assessment, namely financial, operational, and administrative. The financial and administrative aspects

administrasi indikatornya sudah ditentukan di dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, sedangkan untuk aspek operasional disesuaikan dengan bisnis Perseroan. Hasil skor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk realisasi tahun 2021 sebesar 82,00 yang berada dalam kategori SEHAT dengan nilai AA.

indicators are determined in the Minister of SOEs Decree No. KEP-100/MBU/2002, while the operational aspect is adjusted to the Company's business. In 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) score was 82.00 in the HEALTHY category with an AA score.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Secara umum, kondisi perekonomian global di tahun 2022 diperkirakan akan membaik yang didukung peningkatan mobilitas dan stimulus kebijakan di berbagai negara serta kemajuan penanganan COVID-19. Pertumbuhan ekonomi global diprediksikan akan melanjutkan tren positif sampai tahun 2026, walaupun akan melandai dari realisasi pertumbuhan tahun 2021 sebesar 5,5%. Kondisi pandemi telah menciptakan tren kebiasaan baru yang salah satunya adalah terkait belanja daring (*online shopping*). Pertumbuhan bisnis *e-commerce* pun meningkat pesat sebagai jawaban akan kebutuhan belanja daring ini. Hampir sebagian besar barang-barang *e-commerce* diangkut dalam kemasan petikemas yang turut memberikan efek positif pada pertumbuhan arus petikemas global. Untuk kargo non petikemas, pasar arus barang domestik masih memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan pada saat ini Pelindo hanya memiliki pangsa pasar sebagian kecil dari pasar nasional. Pelindo dapat melakukan kerjasama dalam beberapa skema dengan pelabuhan non petikemas yang terdiri dari pelabuhan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan pelabuhan milik Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah.

VIEW ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

In general, global economic conditions are expected to improve in 2022, supported by increased mobility and the policy stimulus in various countries as well as their progress in handling COVID-19. Global economic growth is predicted to continue a positive trend until 2026, although it will follow an upward-sloping curve from the growth seen in 2021 of 5.5%. The pandemic created a new habit trend, one being the move to online shopping, and the e-commerce business has increased rapidly in response to this change. Most e-commerce goods are transported in container packaging this will have a positive effect on global container traffic growth. For non-container cargo, the market for domestic goods traffic still has huge potential as currently Pelindo has a small market share of the national market. Pelindo will cooperate in several schemes with non-container ports including the Special Terminal (Tersus)/Terminal for Self Interest (TUKS) and ports belonging to Government Ministries/Institutions (K/L).

Berdasarkan prediksi kondisi perekonomian dan industri pelabuhan serta kekuatan internal Perseroan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sudah tepat. Selain itu, dengan dilakukannya penggabungan Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV ke dalam Pelindo II, Dewan Komisaris optimis Perseroan dapat meningkatkan kinerjanya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada di antaranya adalah Visi/Program Pemerintah terkait pengembangan infrastruktur maritim dan intensifikasi program pemerintah di bidang maritim berpotensi mendukung rencana integrasi Pelindo. Potensi Pengembangan Layanan dan Rantai Nilai Kepelabuhan dapat mengembangkan penawaran jasa pelabuhan yang lebih terintegrasi dengan hadirnya layanan di segmen logistik, *hinterland development*, marine, serta *port services* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Hal tersebut juga merupakan peluang bagi Pelindo di dukung oleh peningkatan sinergi dengan BUMN lain di segmen transportasi pelayaran dan logistik.

Based on the economic conditions and the port industry predictions as well as the Company's internal strength, the Board of Commissioners is of the opinion that the business prospects the prepared by the Board of Directors are correct. In addition, following the merger of Pelindo I, Pelindo III, and Pelindo IV into Pelindo II, the Board of Commissioners is optimistic that the Company will improve its performance in the short term and in the long term. The Board of Commissioners believes that the Company will take advantage of the opportunities that exist, including the Government's Vision/Program for maritime infrastructure development and the intensification of government programs in the maritime sector that have the potential to support Pelindo's integration plan. The Port Service potential and Value Chain Development will bring about a more integrated port service offering with services in the logistics, hinterland development, marine, and port services segments at PT Pelabuhan Indonesia (Persero). There are also opportunities for Pelindo to be supported by increased synergies with other SOEs in the shipping and logistics transportation segment.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pelindo yang sebelumnya merupakan gabungan dari Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aspek

VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

In carrying out its business activities, Pelindo, which is a combination of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, and Pelindo IV always applies the principles of Good Corporate Governance in all business aspects by referring to the applicable laws and

bisnisnya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelindo juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) setiap tahun secara berkesinambungan. Pelindo meyakini bahwa unsur keterbukaan di lingkungan kerja dan proses kerja yang sesuai dengan tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan akan membantu Perseroan bergerak maju. Oleh karena itu, implementasi GCG menjadi perhatian utama bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi.

regulations. Pelindo is also committed to continuously improving the Good Corporate Governance (GCG) implementation every year. Pelindo believes that the element of transparency in the work environment and work processes, in accordance with the predetermined goals and mechanisms, will help the Company move forward.Therefore, GCG implementation is a major concern for the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menerapkan GCG dengan efektif dan konsisten di 2021. Dalam menilai penerapan GCG di Pelindo, Dewan Komisaris memberikan penilaian terhadap sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors implemented GCG effectively and consistently in 2021. For assessing the GCG implementation at Pelindo, the Board of Commissioners also assesses the risk management system, internal control system, and whistleblowing system.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko melibatkan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan dan pelaporan risiko. Komunikasi dan konsultasi membatu *risk owner* dalam memahami risiko, sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang dipelukan. Komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sementara konsultasi mencakup umpan balik (*feedback*) dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat dan dapat dimengerti. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu. Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan penilaian risiko yang memadai. Ruang lingkup, konteks dan kriteria mencakup penentuan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management process involves the systematic application of policies, procedures and practices for communication and consulting activities, context setting, and risk assessment, treatment, monitoring, reviewing, recording and reporting. Communication and consulting helps the risk owner understand the risk, as the basis for making decisions, and the reason for taking the required action. Communication increases awareness and an understanding of the risk, while consultation includes feedback and information gained to support decision-making. Coordination must be factual, timely, relevant, accurate and understandable. Information exchange must pay attention to the confidentiality and integrity of information, including individual copyright. The purpose of establishing the scope, context and criteria is to adapt the risk management process, enable effective risk assessment and adequate risk assessment. The scope, context and criteria include determining the process scope and understanding the external and internal context.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 (sebelum integrasi Pelindo) Perseroan mengelola risiko dengan lingkup eks-Pelindo 2. Setelah tanggal 1 Oktober 2021, dimana telah dilakukan legal merger Pelindo 1, 2, 3 dan 4, Perseroan kemudian menyusun ulang profil risiko tahun 2021 sebagai dampak adanya perubahan kondisi internal (perubahan struktur organisasi, penempatan ulang Sumber Daya Manusia, perubahan kebijakan perusahaan dan lain-lain) dan kondisi eksternal perusahaan (integrasi Pelindo, perubahan Aspirasi Pemegang Saham dan lainnya).

Up to the third quarter of 2021 (before the integration of Pelindo) the Company managed risks within the scope of ex-Pelindo 2. After October 1, 2021, when the legal merger of Pelindo 1, 2, 3 and 4 was carried out, the Company then rearranged the risk profile for 2021 to reflect the impact of changes in internal conditions (changes in organizational structure, relocation of Human Capital, changes in Company policies and others), and the external conditions of the Company (Pelindo integration, changes in Shareholders' Aspirations and others).

Mekanisme pelaksanaan evaluasi Manajemen Risiko dilakukan secara berjenjang, mulai dari Cabang Pelabuhan ke Fungsi Manajemen Risiko Regional kemudian diteruskan ke *Group Head* Manajemen Risiko Kantor Pusat, sedangkan untuk anak perusahaan ke Divisi Manajemen Risiko *Subholding* kemudian dilaporkan ke *Group Head* Manajemen Risiko Kantor Pusat dan untuk anak perusahan di luar cluster bisnis, dilakukan evaluasi secara langsung oleh *Group Head* Manajemen Risiko Kantor Pusat. Evaluasi telah dilakukan dengan melihat data pada pengisian profil risiko pada kertas kerja *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dengan pendekatan

The mechanism for implementing the Risk Management evaluation is carried out in stages, starting from the Port Branch to the Regional Risk Management Function then forwarded to the Head Office Risk Management Group, while for subsidiaries to the Subholding Risk Management Division then reported to the Head Office Risk Management Group, and for subsidiaries outside the business cluster evaluations are carried out directly by the Head Office Risk Management Group. The evaluations looked at the data when completing the risk profile in the Risk Control Self Assessment (RCSA) working paper, with an approach to the

efektivitas tindakan mitigasi yang telah dilaksanakan oleh pemilik risiko (*Risk Owner*), kemudian divalidasi dan diverifikasi kembali dengan menunjukkan data-data kinerja operasional, keuangan, investasi dan data pendukung lainnya serta menggunakan data kejadian yang merugikan (*loss event).*

effectiveness of mitigation actions taken by the risk owner (Risk Owner), then validated and re-verified by looking at operational, financial performance data, investment and other supporting data as well as using loss event data.

Hasil evaluasi disampaikan melalui Nota Dinas kepada Unit Kerja terkait ataupun dilakukan pembahasan secara langsung bersama dengan *risk owner* dengan mekanisme memberikan masukan, saran, dan *feed back* terkait pengisian RCSA. Rencana mitigasi yang sudah ada akan dilakukan *monitoring* dengan periode bulanan dan pelaporan dilakukan pertriwulanan. Selanjutnya, laporan *monitoring* profil risiko triwulanan akan disusun dan disampaikan kepada *Group* Anggaran dan Pelaporan untuk dimuat dalam laporan manajemen triwulanan korporat.

The evaluation results are submitted through an Official Memo to the relevant Work Units, or through direct discussions with the risk owners to provide input, suggestions, and feedback related to filling out the RCSA. The existing mitigation plan is monitored on a monthly basis and then reported quarterly. In addition, a quarterly risk profile monitoring report will be prepared and submitted to the Budget and Reporting Group to be included in the corporate quarterly management report.

Dewan Komisaris Perseroan memiliki organ pendukung yakni Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Di Triwulan IV tahun 2021, nama komite ini kemudian diubah menjadi Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko (disingkat "Komite GCG dan PMR").

The Company's Board of Commissioners has a supporting organ, the Risk Management Monitoring Committee (KPMR) in charge of monitoring and evaluating the Risk Management work unit duties implementation, and providing recommendations to the Board of Commissioners. In the fourth quarter of 2021, this committee's name was changed to the Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee (abbreviated as "GCG and RMM Committee").

Group Head Manajemen Risiko Kantor Pusat secara periodik selalu melakukan pertemuan dengan Komite GCG dan PMR dalam rangka melakukan koordinasi terkait rencana dan monitoring proses implementasi Manajemen Risiko Perseroan. Hasil koordinasi dituangkan dalam bentuk notulen rapat untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh *Group Head* Manajemen Risiko. Koordinasi yang secara rutin telah dilakukan dengan Komite GCG dan PMR di tahun 2021 adalah Koordinasi Bulanan dan Koordinasi Triwulanan. Adapun topik yang dibahas dalam koordinasi tersebut diantaranya meliputi Usulan Profil Risiko RKAP, Hasil Monitoring Profil Risiko Triwulanan dan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris. Dewan Komisaris berpandangan bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai.

The Head Office Risk Management Group holds regular meetings with the GCG and RMM Committee to coordinate the planning and monitoring of the Company's Risk Management implementation process. The Risk Management Group Head records the coordination results in meeting minutes for further action. Routine coordination carried out with the GCG and RMM Committees in 2021 included the Monthly Coordination and Quarterly Coordination. The coordination topics discussed include the Proposed RKAP Risk Profile, Results of Quarterly Risk Profile Monitoring, and other matters of concern to the Board of Directors and Commissioners. The Board of Commissioners is of the view that the risk management system has been running properly.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan GCG, karena dapat mendorong Perseroan menjadi lebih transparan, akuntabel, *responsible*, mandiri, adil, dan terpercaya. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan andal mampu memberikan keyakinan bagi para *stakeholder* bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif di Perseroan menjadi tanggung jawab dari Manajemen Perseroan. Guna mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System is a very important aspect in GCG implementation, as it encourages the Company to be more transparent, accountable, responsible, independent, fair, and trusted. An effective and reliable Internal Control System provides confidence to stakeholders that all available resources are managed properly in order to achieve the Company's goals. A reliable and effective Internal Control System in the Company is the responsibility of the Company's Management who support the development of the Company's Internal Control System.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah mengacu ke *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari

The Company's Internal Control System refers to the Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) as a comprehensive framework to measure the internal control effectiveness through 5 (five) components, namely:

5 (lima) komponen, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
1. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
2. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
3. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*); dan
4. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta konsistensi implementasinya. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2021 telah dilakukan secara *self assessment* dengan hasil bahwa seluruh Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terbukti dapat berjalan cukup efektif. Hal tersebut menunjukan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mematuhi elemen-elemen pengendalian internal yang telah disusun.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada tahun 2021. Kecukupan pengendalian internal tercermin dalam laporan hasil audit yang telah disampaikan oleh SPI kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan serta dengan niat baik. Pelindo menyediakan aplikasi/sistem untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pelindo, cabang pelabuhan, dan grup perusahaan melalui sistem yang independen. Melalui sistem ini, Pelindo dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional. Bagi insan Pelindo atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan. Perseroan menjamin terhadap pelapor dari segala

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication; and
5. Monitoring and Evaluation.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regularly evaluates the Internal Control System effectiveness, to assess the reliability of the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Internal Control System and the consistency in its application. The internal control system evaluation in 2021 was carried out through self-assessment with the results showing that the entire PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Internal Control System was effective. This shows that PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has complied with the predetermined internal control elements.

The Board of Commissioners is of the view that the internal control system has been running properly. The Board of Commissioners would also like to express its appreciation for the performance achieved by the Internal Audit Unit (IAU) in 2021. The internal control adequacy is reflected in the audit report submitted by IAU to the Board of Directors and Board of Commissioners.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

A Whistleblowing system (WBS), called Pelindo Bersih, was introduced to provide opportunities for all Pelindo personnel and other stakeholders to report any indications of violations of applicable ethical values, based on accountable evidence and with good intentions. Pelindo established the application/system to receive reports related to fraudulent acts, corruption, and extortion, from all stakeholders who have information and wish to report an act indicating a violation committed by Pelindo, port branches, and company group personnel through an independent system. Through this system, Pelindo will become a better Company making it more competitive at the national and international levels. Pelindo personnel or stakeholders who report will be given protection, in terms of identity confidentiality and from possible retaliation by the reported party.

The Company will guarantee the whistleblower's identity confidentiality, except when the authorities require such disclosure. Reports made without any identity will still be processed, however, the seriousness of the report content, credibility, and evidence submitted will be considered, as well as the possibility to confirm the report. The Company will protect the whistleblowers against all lawsuits, both criminal and civil, intimidation, punishment or unpleasant actions from any

tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikanya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal antara lain, pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya (*personal file record*).

parties for the testimony reported, unless the testimony and/or report is not given in good faith. The Company will protect the whistleblower against the possibility of other matters, including unfair dismissal, demotion from rank for reasons that are unclear and detrimental, recorded in their personal data file (personal file record).

Periode Oktober – Desember 2021 atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terdapat laporan yang masuk melalui saluran WBS yang terdiri dari 47 laporan *out of scope* dan 1 (satu) laporan terkait kategori jenis pelanggaran WBS. Satu laporan terkait kategori jenis pelanggaran WBS telah ditindaklanjuti dengan pencapaian 100% dan pada laporan yang termasuk dalam kategori *out of scope* telah disarankan oleh pengelola WBS Independen untuk melakukan pelaporan kepada saluran *customer service* Pelindo. Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan dan/atau perundang-undangan. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipliner masing-masing wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Direksi Terkait Indisipliner. Berdasarkan 1 (satu) laporan yang masuk telah ditindaklanjuti dan tidak terbukti bersalah sehingga tidak terdapat pemberian sanksi.

For the period October – December 2021 under the name of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) there were 47 out of scope reports, and 1 (one) report related to a WBS violation category, entered through the WBS. The one report related to a WBS violation category was followed up with 100% achievement, and for out of scope reports received, the Independent WBS manager suggested they report to the Pelindo customer service channel. Any reported party who is found guilty may be sentenced in accordance with the applicable regulations in the Company and/or the legislation. The Indiscipline Team in each work area in accordance with the Board of Directors Regulations concerning Indiscipline can carry out sentencing. The 1 (one) report received was followed up and was not proven so there was no sanction imposed.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit berperan dalam me-*review* pelaksanaan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern terkait dengan penerapan WBS. Satuan Pengawasan Intern memiliki tanggung jawab menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eksternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim Pelindo Bersih sebagai *counterpart*. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS di Perseroan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan arahan agar ke depannya penerapan WBS lebih ditingkatkan lagi efektivitasnya.

The Board of Commissioners through the Audit Committee plays an active role in reviewing the Internal Audit Unit's responsibilities related to the WBS. The Internal Audit Unit has the responsibility to receive and monitor internal and external complaints as well as to make monthly reports to the Pelindo Bersih Team as a counterpart. The Board of Commissioners is of the view that the Company's WBS in the has been running properly However, the Board of Commissioners provided directives that in the future the WBS effectiveness can be further improved.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Prosedur penilaian terhadap kinerja Komite dilakukan secara periodik. Kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Pelaksanaan Rapat Internal Komite dan Laporan Penugasan Komite.

COMMITTEES BELOW THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by committees below the Board of Commissioners including the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee and the GCG and Risk Management Monitoring Committee, and their performances are evaluated periodically. The criteria for evaluating these Committees performance forms part of the Board of Commissioners' KPI, as approved by the Shareholders. The criteria for evaluating the Committees performance are through Committee Internal Meetings and the Committee's Assignment Reports.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi aspek-aspek operasional dan strategis Perseroan dengan baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Informasi komposisi anggota Dewan Komisaris pada bagian ini diawali dengan komposisi Dewan Komisaris pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) karena merger dilakukan dengan menggabungkan PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) PERIODE 1 JANUARI 2021 – 30 SEPTEMBER 2021

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 September 2021 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo II. Komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

For 2021, the Board of Commissioners' assessment is that these committees carried out their duties and responsibilities in supervising the operational and strategic aspects of the Company well.

CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

Information on the Board of Commissioners membership composition in this section begins with the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners composition before the merger of PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2021 – SEPTEMBER 30, 2021

The Board of Commissioners composition for the period January 1, 2021 to September 30, 2021 included 7 (seven) people, consisting of 1 (one) President Commissioner/Independent Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners. All Commissioners were domiciled in the Pelindo II Head Office working area. The Board of Commissioners composition can be seen below.

Moermahadi Soerja Djanegara	:	Komisaris Utama/Komisaris Independen Commissioner/Independent Commissioner
R. Agus H. Purnomo	:	Komisaris Commissioner
Nurrachman	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Didi Sumedi	:	Komisaris Commissioner
Sudung Situmorang	:	Komisaris Commissioner
Darwanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Antonius Rainier Haryanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 1 OKTOBER 2021 – 8 DESEMBER 2021 (PASCA MERGER)

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo. Dengan demikian Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Oktober 2021 sampai dengan 8 Desember 2021 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu)

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD OCTOBER 1, 2021 – DECEMBER 8, 2021 (POST MERGER)

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) were merged into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and changed their names to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or abbreviated as Pelindo. The Board of Commissioners composition for the period October 1, 2021 to December 8, 2021 was 7 (seven) people consisting of 1 (one) Independent

orang Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo II. Komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

Commissioner, acting as President Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners. All of the Board of Commissioners are domiciled in the Pelindo working area. The Board of Commissioners composition and basis of appointment can be seen in the table below.

Marsetio	:	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/Acting President Commissioner
R. Agus H. Purnomo	:	Komisaris Commissioner
Didi Sumedi	:	Komisaris Commissioner
Sudung Situmorang	:	Komisaris Commissioner
Antonius Rainier Haryanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Irma Suryani Chaniago	:	Komisaris Independen Independent Commissioner

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 9 DESEMBER 2021 – 31 DESEMBER 2021 (PASCA MERGER)

Pada tanggal 9 Desember berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-396/MBU/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero), telah dilakukan pemberhentian dengan hormat Sdri. Irma Suryani Chaniago sebagai Komisaris Independen dan Pengangkatan Sdr. Muchtar Luthfi Mutty sebagai Komisaris Independen yang dilaksanakan atas kebutuhan Perseroan. Sehingga susunan Dewan Komisaris pada periode 9 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo. Komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD DECEMBER 9, 2021 – DECEMBER 31, 2021 (POST MERGER)

On December 9 based on the Minister of SOEs as a PT Pelabuhan Indonesia (Persero) GMS Decree No. SK-396/MBU/12/2021 dated December 9, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company, Irma Suryani Chaniago was dismissed with honor as an Independent Commissioner and Muchtar Luthfi Mutty was appointed as Independent Commissioner based on the needs of the Company. Thus, the Board of Commissioners composition for the period December 9, 2021 to December 31, 2021 consisted of 7 (seven) people including 1 (one) Independent Commissioner/Acting President Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners. All Commissioners are domiciled in the Pelindo Head Office working area. The composition and basis for the appointment of the Board of Commissioners can be seen in the table below.

Marsetio	:	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/Acting President Commissioner
R. Agus H. Purnomo	:	Komisaris Commissioner
Didi Sumedi	:	Komisaris Commissioner
Sudung Situmorang	:	Komisaris Commissioner
Antonius Rainier Haryanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Muchtar Luthfi Mutty	:	Komisaris Independen Independent Commissioner

PENUTUP

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perseroan di tahun 2021. Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen dan kerja keras Direksi, manajemen, dan seluruh Pekerja sehingga Pelindo telah mampu menghadapi tantangan dan telah menyajikan kinerja yang baik di tengah kondisi yang menantang di tahun 2021.

Kepada para pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Perseroan dapat terus memberikan yang terbaik bagi Perseroan di masa yang akan datang.

CLOSING

This concludes the Board of Commissioners supervisory duties report on the performance and implementation of the Company's business in 2021. On this occasion, the Board of Commissioners would like to express its high appreciation for the commitment and hard work of the Board of Directors, management, and all employees that has enabled Pelindo to face the challenges and delivered a good performance, during the challenging conditions in 2021.

To all other stakeholders, the Board of Commissioners would like to express its gratitude for the trust given. Going forward, the Board of Commissioners sincerely hopes that all levels of the Company will continue to provide the best for the Company.

Jakarta, 18 April 2022
Jakarta, April 18, 2022

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



Marsetio
Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama
Independent Commissioner/Acting President Commissioner

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 April 2022
Jakarta, April 18, 2022

Anggota Direksi,
Members of the Board of Directors,

ARIF SUHARTONO
Direktur Utama
President Director

HAMBRA
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

MEGA SATRIA
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

IHSANUDDIN USMAN
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director

PRASETYO
Direktur Strategi
Strategy Director

BOY ROBYANTO
Direktur Investasi
Investment Director

PUTUT SRI MULJANTO
Direktur Pengelola
Managing Director

STATEMENT BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS CONCERNING RESPONSIBILITY FOR THE 2021 ANNUAL REPORT OF PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

We, the undersigned testify that all information disclosed, in the 2021 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), is presented in its entirety. We are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 18 April 2022
Jakarta, April 18, 2022

Anggota Komisaris,
Members of the Board of Commissioners,



MARSETIO
Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama
Independent Commissioner/Acting President Commissioner



R. AGUS H. PURNOMO
Komisaris
Commissioner



DIDI SUMEDI
Komisaris
Commissioner



SUDUNG SITUMORANG
Komisaris
Commissioner



ANTONIUS RAINIER HARYANTO
Komisaris Independen
Independent Commissioner



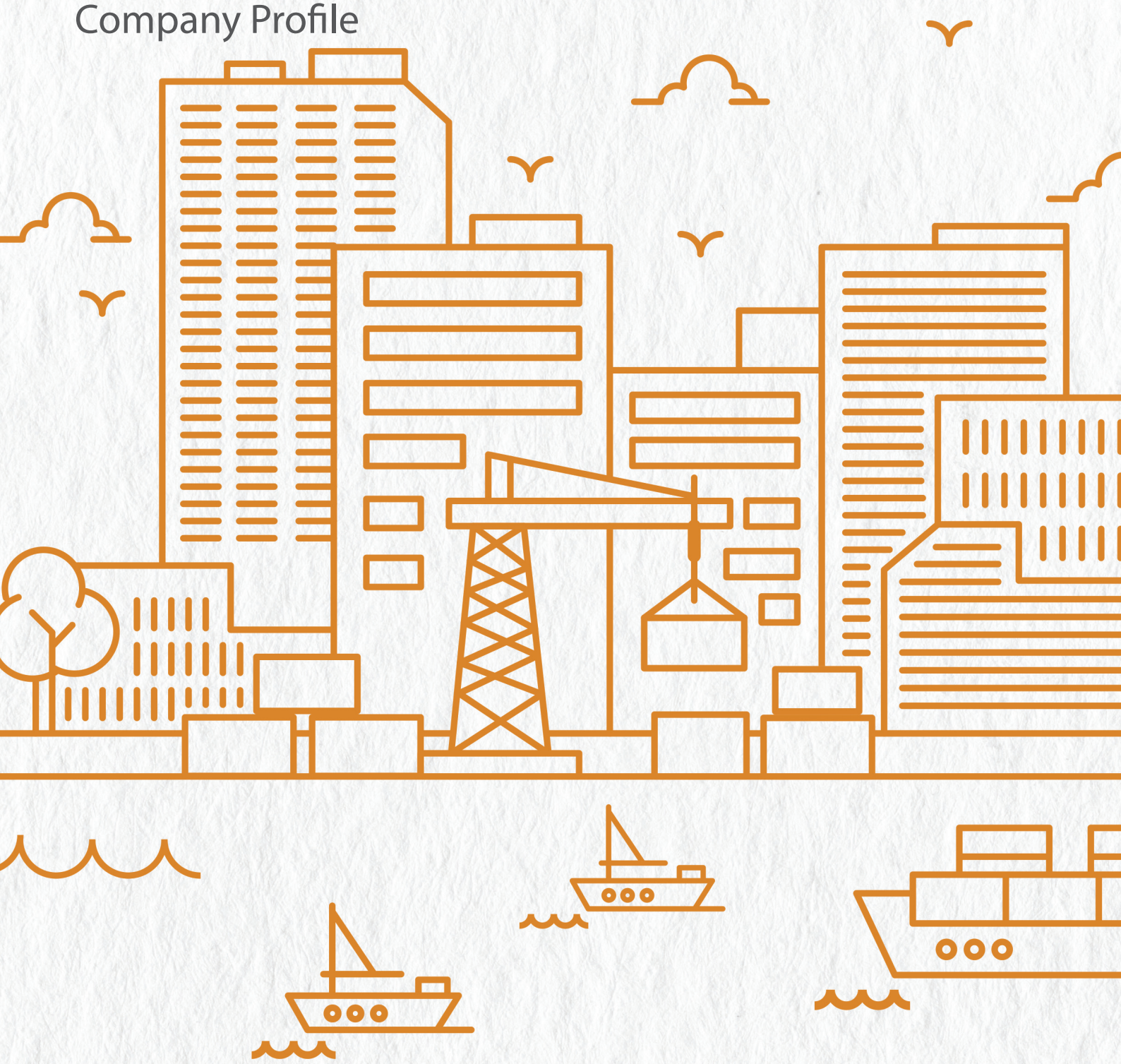
HERU SUKANTO
Komisaris Independen
Independent Commissioner



MUCHTAR LUTHFI MUTTY
Komisaris Independen
Independent Commissioner

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



03



IDENTITAS PERUSAHAAN
COMPANY IDENTITY



Nama Perusahaan
Company Name

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Nama Panggilan/Short Name

Pelindo

Bidang Usaha/Business Lines

Jasa Kepelabuhan dan Logistik
Port and Logistics Services

Tanggal Pendirian/Date of Establishment

5 Februari 1960
February 5, 1960

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 1992
Deed of Establishment dated No. 3 December 1, 1992

Status/Status

Badan Usaha Milik Negara (Persero)
State-owned enterprise (Persero)

Kepemilikan/Ownership

100%
Pemerintah Republik Indonesia
by the Government of the Republic of Indonesia

Modal Dasar
Authorised Capital
Rp33.000.000.000.000
Rp33,000,000,000,000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid Capital
Rp8.475.067.000.000
Rp8,475,067,000,000

Data Jaringan Kantor
Office Network Data

- **Kantor Pusat: 1**
  Head Office: 1
- **Regional I: 24 Pelabuhan**
  Regional I: 24 Ports
- **Regional II: 24 Pelabuhan**
  Regional II: 24 Ports
- **Regional III: 46 Pelabuhan**
  Regional III: 46 Ports
- **Regional IV: 28 Pelabuhan**
  Regional IV: 28 Ports

Sekretariat Perusahaan/Corporate Secretary
Ali Mulyono

Email : corp_sec@pelindo.co.id

Jumlah Pekerja
Number of Employees
7.370 orang per 31 Desember 2021*
7,370 people as of December 31, 2021*

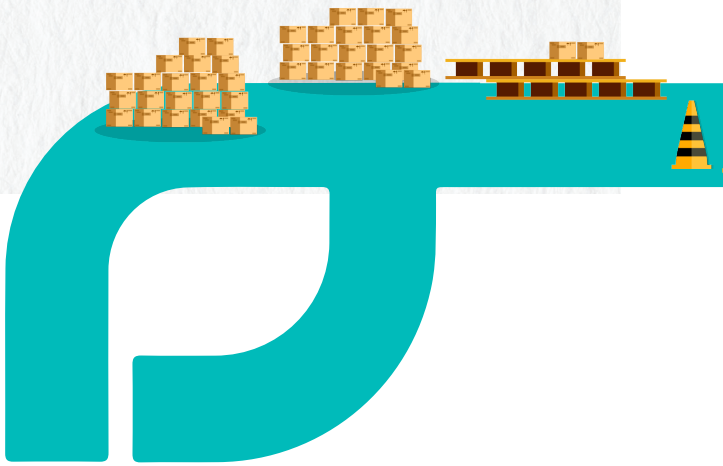
*Pekerja Organik *Organic Employees

Alamat Kantor/Alamat Korespondensi
Office Address/Correspondence Address

Kantor Pusat/Head Office
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14310, Indonesia
Telp: 021 4301080
Email : info@pelindo.co.id
Web : www.pelindo.co.id

Media Sosial
Facebook : BUMN Pelabuhan Indonesia
Twitter : @indonesiaport
Instagram : @pelindo
Youtube : Pelindo





NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

Names and Addresses of Regional Offices and Branch Offices

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG
NAMES AND ADDRESSES OF REGIONAL OFFICES AND BRANCH OFFICES

REGIONAL I

Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Jl. Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan 21332 Telp: (0632) 92022 Fax: - Email: tbasahan@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Pangkalan Susu** Jl. Pelabuhan No. 3 Pangkalan Susu Telp: (0620) 51018 Fax: - Email: pangkalansusu@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Belawan** Jl. Kapten R. Sulian No. 1 Belawan Telp: (061) 6941919 Fax: - Email: belawan@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Gunung Sitoli Jl. Yos Sudarso, Gunungsitoli Telp: (0639) 21662 Fax: - Email: gunungsitoli@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Meulaboh** Pocut Baren No. SK-III/04, Meulaboh Aceh Barat 23611 Telp: (0655) 7551842 Fax: - Email: meulaboh@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Lhokseumawe** Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh Lhokseumawe, Aceh Utara 24354 Telp: (0645) 56816 Fax: - Email: lhoukseumawe@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Sibolga Jl. Horas Pelabuhan Baru, Sibolga 22532 Telp: (0631) 327041 Fax: Email: sibolga@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Kuala Langsa** Pelabuhan Kuala Langsa, Langsa Barat, Kota Langsa 24355 Telp: (0641) 23021 Fax: Email: kualalangsa@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Batam** Jl. Kuda Laut No. 8 Batu Ampat, Batam 29452 Telp: (0778) 452729 Fax: Email: batam@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Malahayati Laksamana Malahayati KM. 32,5 Desa Lamreh Krueng Raya, Kec. Mesjid Raya Aceh Besar 23301 Telp: (0651) 21022 Fax: - Email: malahayati@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Sungai Kolak Kijang** Jl. Sri Bayintan Kijang No. 1 Bintan Telp: (0771) 61359 Fax: - Email: seikolakkijang@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Tanjung Balai Karimun** Jl. Teluk Air No. 12, Tanjung Balai Karimun 29661 Telp: (0777) 23570 Fax: - Email: tbkarimun@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Tanjung Pinang Jl. Sri Bayintan Kijang No. 1 Bintan 29151 Telp: (0771) 21153 Fax: - Email: tanjungpinang@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Sungai Pakning** JL. Kom. Laut Yos Sudarso No. 2, Sei Pakning 28761 Telp: (0766) 391470 Fax: - Email: seipakning@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Dumai** Jl. Sultan Syarif Kasim No. 1 Dumai Telp: (0765) 31469 Fax: - Email: dumai@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Bengkalis Jl. Jend Sudirman, Bengkalis Telp: (0766) 21267 Fax: - Email: bengkalis@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Tembilahan** Jl. Jend. Sudirman No. 76 Tembilahan 29121 Telp: (0768) 21050 Fax: - Email: tembilahan@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Rengat/Kuala Cenaku** Jl. Raya Kuala Cinaku, Rengat Telp: (0769) 21437 Fax: - Email: rengat@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Kuala Enok Jl. Pelabuhan No. 1 Kuala Enok 29271 Telp: (0768) 328441 Fax: - Email: kualaenok@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Pekanbaru** Jl. Pertiwi Ujung, Desa Pinang Sebatang Timur Telp: (0761) 9950182 Fax: - Email: pekanbaru@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Bagan Siapi-Api** Jl. Utama Bagan Siapi-api Telp: (0767) 21056 Fax:- Email: bagansiapiapi@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Selatpanjang Jl. Pelabuhan Beran No. 1, Selatpanjang 28753 Telp: (0763) 31025 Fax: - Email: selatpanjang@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Kuala Tanjung** Pelabuhan No. Kuala Tanjung Kec. Sei Suka, Batubara 21257 Telp: (0622) 31002 Fax: - Email: kualatanjung@pelindo1.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Pulau Sambu** Jl. Pelabuhan No. 2 Pulau Sambu 29411 Telp : (0771) 310 059 Email : pulausambu@pelindo1.co.id

REGIONAL II

Pelabuhan Tanjung Priok Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 Telp: (021) 4301080 Fax: - Email: priok@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Sunda Kelapa** Jl. Maritim No. 8 Sunda Kelapa, Jakarta, 14430 Telp: (021) 6928888 Fax: - Email: sundakelapa@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	**Pelabuhan Panjang** Jl. Yos Sudarso No. 337 Telp: (0721) 31149 Fax: - Email: cs.panjangport@indonesiaport.co.id Web: www.pelindo.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG
NAMES AND ADDRESSES OF REGIONAL OFFICES AND BRANCH OFFICES

Pelabuhan Banten
Jl. Raya Pelabuhan No. 1 Ciwandan, Banten, 42446
Telp: 08119150034
Fax: -
Email: banten@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Cirebon
Jl. Perniagaan No. 4 Cirebon, Jawa Barat 45112
Telp: (0231) 204109
Fax: -
Email: cirebon@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Boom Baru Palembang
Jl. Belinyu No. 1, Boom Baru Pale,bang 30115
Telp: (0711) 710611
Fax: -
Email: palembang@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Teluk Bayur
Jl. Semarang No. 3 Teluk Bayur, Sumatera Barat 25217
Telp: (0751) 61646
Fax: -
Email: telukbayur@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Talang Duku
Raya Pelabuhan KM. 9 Talang Duku, Jambi 36363
Telp: (0741) 35070
Fax: -
Email: cs.jambi@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Muara Sabak
Jl. Sultan Sarif Kasim Desa Kp. Singkep, Kec. Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 36764
Telp: (0741) 35070
Fax: -
Email: cs.jambi@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kuala Tungkal
Jl. Kesejahteraan , Tungkal III
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Telp: (0741) 35070
Fax: -
Email: cs.jambi@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pontianak
Jl. Pak Kasim No. 11 Pontianak, Kalimantan Barat
Telp: (0561) 732181
Fax: -
Email: pontianak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sintete
Jl. Pelabuhan Sintete No.2 Kec. Semparuk Kab. Sambas
Telp: (0562) 6304310
Fax: -
Email: pelindoperintissintete@yahoo.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ketapang
Jl. Gajah Mada No. 544 Desa
Sukabangun, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
Telp: -
Fax: -
Email: ipcketapang@gmail.com
Web: www.pelindo.co.ids

Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu
Jl. Yos Sudarso No. 9 Pulau Bai, Bengkulu 38216
Telp: (0736) 51409
Fax: -
Email: bengkulu@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pangkal Balam
Jl. Yos Sudarso No. 1 Bangka
Telp: (0717) 424990
Fax: -
Email: pangkalanbalam@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Pandan
Jl. Pelabuhan No. 1 Belitung
Telp: (0719) 21049
Fax:
Email: tanjungpandan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Air Bangis
Pasar Muara, Jorong muara air bangis, kec. Seiberemas Kab.Pasaman Barat

Pelabuhan Muara Padang
Jl. Batang Muara Padang

Pelabuhan Sungai Lais
Jl. Mayor zen, Kel. Sei selincah, Kec. Kalidoni, Palembang

Terminal Kijing, Mempawah
Jend. A Yani. (Jalan Raya Provinsi), Kec. Sui Kunyit Kab. Mempawah Kalimantan Barat

Pelabuhan Bojonegara
Jl. Raya Bojonegara Ds Puloampel Serang Banten

Pelabuhan Belinyu
Yos Sudarso Mantung Belinyu Bangka

Pelabuhan Sungai Selan
Jl. Nelayan Sungai selan Bangka Tengah

Pelabuhan Muntok
Jl. Yos Sudarso RT. 003 RW.05 Tanjung Muntok Bangka Barat

REGIONAL III

Pelabuhan Tanjung Perak
Jl. Perak Timur No. 620 Surabaya
Telp: (031) 3291992-6
Fax: -
Email: tanjungperak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Gresik
Jl. Yos Sudarso No. 1 Gresik
Telp: (031) 3981941/3974542
Fax: -
Email: gresik@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pasuruan
Jl. Komondor Yos Sudarso No. 150 Pasuruan
Telp: (0343) 424725
Fax: -
Email: tanjungperak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Tembaga
Jl. Tanjung Tembaga Timur No. 10 Probolinggo
Telp: (0335) 421363, 421385
Fax: -
Email: tanjungtembaga@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Panarukan
Jl. Pelabuhan Panarukan No. 10 Panarukan Situbondo
Telp: (0338) 672416
Fax: -
Email: tanjungperak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Wangi
Jl. Raya Situbondo Ketapang, Banyuwangi
Telp: (0333) 510636
Fax: -
Email: tanjungwangi@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Boom Banyuwangi
Jl. Ikan cucut No. 27 Pantai Boom Marina Banyuwangi Kel. Mandar, Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi
Telp: (0333) 4465930
Fax: -
Email: boom.marina@pelindoproperti.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kalianget
Jl. Raya Pelabuhan No. 06 Kali Anget
Telp: -
Fax: -
Email: wawanwarso@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Emas
Jl. Coaster No. 10 Semarang
Telp: (024) 3545721-4
Fax: -
Email: tanjungemas@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG
NAMES AND ADDRESSES OF REGIONAL OFFICES AND BRANCH OFFICES

Pelabuhan Pelabuhan Tegal
Jl. RE Martadinata No. 9 Tegal
Telp: (083) 351488
Fax: -
Email: tjms-rtgl@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Intan
Jl. Laut Jawa Cilacap
Telp: (0282) 534651-2
Fax: -
Email: tanjungintan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Benoa
Jl. Raya Pelabuhan Benoa Denpasar
Telp: (0361) 720560
Fax: -
Email: benoa@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Celukan Bawang
Jl. Pelabuhan Celukan Bawang No. 35 Buleleng Bali
Telp: (0362) 92333
Fax: -
Email: celukanbawang@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Lembar
Jl. Raya Pelabuhan No. 5 Lembar Lombok
Telp: (0370) 681260
Fax: -
Email: lembar@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Badas
Jl. Labuhan Badas No. 11 Sumbawa, Nusa Tenggara Timur
Telp: (0371) 2629120
Fax: -
Email: badas@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bima
Jl. Martadinata No. 1 Kel. Tanjung Kec. Rasane Barat Kota Bima
Telp: 082339407472
Fax:
Email: bima@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tenau Kupang
Jl. Yos Sudarso No. 23, Kupang Nusa Tenggara Timur
Telp: (0380) 890071, 890072
Fax: -
Email: tenaukupang@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Waingapu
Jl. Nanga Mesi No. 16 Waingapu, Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Telp: (0381) 21150
Fax: -
Email: waingapu@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ende
Jl. Hatta No. 1 Ende, Flores Nusa Tenggara
Telp: (0381) 21150
Fax: -
Email: ende@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ippi
Kel. Tetandara, Ende Selatan, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur
Telp: (0381) 21150
Fax: -
Email: ippi@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Maumere
Jl. Kuneng No. 2 Maumere Nusa Tenggara Timur
Telp: (0382) 21054
Fax: -
Email: maumere@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kalabahi
Jl. RE Martadinata No. 3 Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur
Telp: (0386) 21023
Fax: -
Email: ende@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo
Pelabuhan Multipurpose Manjarite Kel. Wae Kelambu Kec. Komodo
Telp: 081237726018
Fax: -
Email: planner.bajo@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Banjarmasin
Jl. Barito Hilir Trisakti No. 6, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp: (0511) 3365866
Fax: -
Email: banjarmasin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Basirih
Jl. Teluk Mendung RT. 17 RW 01 Mantuil Raya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp: (0511) 3365866
Fax: -
Email: banjarmasin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kotabaru
Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru, Stagen, Kalimantan Selatan
Telp: (0518) 21214
Fax: -
Email: kotabaru@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Stagen
Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru, Stagen, Kalimantan Selatan
Telp: (0518) 21214
Fax:
Email: kotabaru@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Mekar Putih
Jl. Pelabuhan Utama Batubara, Mekar Putih, Kotabaru, Kalimantan Selatan
Telp: (0518) 38866
Fax: -
Email: mekarputih@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Gunung Batu Besar
Jl. Desa Pa'paan, Sampanahan, Kotabaru Kalimantan Selatan
Telp: -
Fax: -
Email: kotabaru@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Batulicin
Jl. Pelabuhan Samudera No. 124 Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Telp: (0518) 70305
Fax: -
Email: batulicin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Satui
Jl. Pelabuhan Satui, Satui Barat RT. 05 RW. 03 Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: (0518) 70305
Fax: -
Email: batulicin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pagatan
Jl. Mangkabumi Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: (0518) 70305
Fax:
Email: batulicin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kuala Kapuas
Jl. Sudirman No. 3 Selat Hilir Kapuas, Kalimantan Selatan
Telp: (0513) 61128
Fax: -
Email: banjarmasin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pulang Pisau
Jl. Samudera No. 1 Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp: (0513) 61128
Fax: -
Email: banjarmasin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bahaur
Jl. Desa Tanjung Perawan, Kahayan Kuala, Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Telp: (0513) 61128
Fax: -
Email: banjarmasin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sampit
Jl. Usman Harun No. 2 Sampit, Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Telp: (0531) 21055
Fax: -
Email: sampit@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kuala Pembuang
Jl. AS. Nasution Kompleks Pelabuhan Seruyan Kuala Pembuang Kalimantan
Telp: -
Fax: -
Email: sampit@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Samuda
Jl. Haji Umar Hasyim Samuda, Mentaya Hilir Kotawaringin, Kalimantan Tengah
Telp: -
Fax: -
Email: sampit@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pagatan Mendawai
Jl. Merdeka No. 4 RT 1 RW 1 Katingan Kuala Katingan Kalimantan Tengah
Telp: -
Fax: -
Email: sampit@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG
NAMES AND ADDRESSES OF REGIONAL OFFICES AND BRANCH OFFICES

Pelabuhan Kumai
Jl. Bendahara No. 248 Kumai Kotawaringin Barat
Telp: (0532) 61468
Fax: -
Email: kumai@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pangkalan Bun
Jl. Pangeran Antasari Gg. Kelapa Sawit, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Telp: (0532) 61468
Fax: -
Email: kumai@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sukamara
Jl. Pelabuhan No. 124 RT 01 RW 03 Mendawai Sukamara, Sukamara Kalimantan Tengah
Telp: (0532) 61468
Fax: -
Email: kumai@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bagendang
Jl. HM Arsyad KM. 23 Sampit, Bagendang, Kalimantan Tengah
Telp: -
Fax: -
Email: sampit@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bumiharjo
Jl. Pelabuhan CPO RT. 18 Tanjung Kalaf, Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Telp: (0532) 2074500
Fax: -
Email: kumai@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sanur
Jl. Raya Pelabuhan benoa, Pedungan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali 80227
Telp: 081338027845
Fax: -
Email: -
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Emas
Jl. Coaster No. 10, Semarang, Jawa Tengah - 50116
Telp : (6224) 3545721 4
Email: tanjungemas@pelindo.co.id

REGIONAL IV

Pelabuhan Sorong
Jl. A. Yani No. 13 Sorong
Telp: (0951) 333649, 321930, 321858
Fax: -
Email: sorong@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Makassar
Jl. Soekarno No. 1 Makassar
Sulawesi Selatan 90173
Telp: (0411) 3616549
Fax: -
Email: makassar@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Jayapura
Jl. Koti II No. 21 Jayapura
Telp: (0967) 533030, 533330, 533035
Fax: -
Email: jayapura@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tolitoli
Jl. Sidoarjo No. 394 Tolitoli
Telp: (0453) 21124
Fax: -
Email: toli-toli@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Nunukan
Jl. Pelabuhan Baru No. 10 Nunukan
Telp: (0556) 23374, 23375
Fax: -
Email: nunukan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ambon
Jl. Yos Sudarso No. 1 Kodya Ambon
Telp: (0911) 353457
Fax: -
Email: ambon@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kendari
Jl. Konggoasa No. 1 Kendari
Telp: (0401) 3121976, 3121087, 3125282
Fax: -
Email: kendari@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ternate
JL. A. Yani Kompleks Pelabuhan, Ternate
Telp: (0921) 3121574, 3121206, 3121129
Fax: -
Email: ternate@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Parepare
Jl. Tarakan No. 1, Parepare Sulawesi Selatan
Telp: (0421) 21635
Fax: (0421) 24071
Email: parepare.pelindoregional4@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Gorontalo
Jl. Mayor Dullan No. 176 Gorontalo
Telp: (0435) 821216, 824216
Fax: -
Email: gorontalo@inaport4.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Manokwari
Jl. Banjarmasin No. 3, Kel. Manokwari Timur, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat
Telp: (0986) 212616
Fax: -
Email: manokwari@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Samarinda
Jl. Niaga Timur No. 130, Pelabuhan Samarinda Kota, Samarinda 75112
Telp: (0541) 741615
Fax: -
Email: samarinda@pelindo.co.id,
inaport4.smr@gmail.com,
samarindapelindo@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Balikpapan
Jl. Yos Sudarso No. 30 Balikpapan
Telp: (0542) 422246, 424061, 731224
Fax: -
Email: balikpapan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bitung
Jl. D. S. Sumolang No. 1 Bitung
Telp: (0438) 21310, 21270
Fax: -
Email:
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tarakan
Jl. Yos Sudarso No. 9 Tarakan
Telp: (0551) 21527, 22142, 24437, 24037
Fax: -
Email: tarakan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pantoloan
Jl. Bahari No. 23
Telp: (0451) 491078
Fax: -
Email: pantoloan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Biak
Jl. Jend. Sudirman No. 51 Biak
Telp: (0981) 21135, 21812, 24070
Fax: -
Email: biak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Fakfak
Jl. Izak Telussa No. 5 Fakfak
Telp: (0956) 25096, 22606, 22607
Fax: -
Email: fakfak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Manado
Jl. Pelabuhan III No. 1 Manado
Telp: (0431) 852138, 86364
Fax: -
Email: -
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Merauke
Jl. Yos Sudarso No. 9 Merauke
Telp: (0972) 321294
Fax: -
Email: merauke@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Makassar New Port
Jl. Nusantara No. 329 Makasar
Telp: (062) 3631289
Fax: -
Email: humastpmp4@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ambon New Port/Pelabuhan Tanjung Redeb
Kantor PT Pelindo (Persero) Regional 4 Tanjung Redeb
Jl. ST. M. Aminuddin RT. 10 No. 09 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Tanjung Redeb Kalimantan Timur
Telp: -
Fax: -
Email: tanjungredeb@inaport4.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Terminal Petikemas Makassar
Jl. Nusantara No. 329, Makasar
Telp: (0411) 3631289
Fax: -
Email: tpk.makassar@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bandanaira
Komplek Pelabuhan Desa Nusantara Bandanaira, Ternate, Maluku, Indonesia.

Pelabuhan Kampung Baru
Jl. Wolter Monginsidi, Baru Ulu, Kec. Balikpapan Bar., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76132

Pelabuhan Pelabuhan Sangata
JL Pelabuhan, No. 6 RT 005, Sangatta, Sangatta Sel., Sanggatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, Indonesia

Pelabuhan Bontang Lhoktua :
Jl. Ir. H. Juanda No.1 Tanjung Laut Kalimantan Timur 75325

Pelabuhan TPK Bitung
Jl. Samuel Languyu No. 1, Kota Bitung, Sulawesi Utara
Telp: (0438) 36680
Fax: (0438) 36676, 36679

BRAND PERUSAHAAN
Company Brand

Penerapan *branding* yang benar merupakan bagian terpenting dari proses mencapai cita-cita Pelindo menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.

Applying the right branding is an important part of the process of achieving Pelindo's goal to be a world-class integrated leader in the maritime ecosystem.

PELINDO

1

Mengambil inspirasi dari bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat dan simpang siur, yang menggambarkan Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terintegrasi yang selalu aktif dan berperan besar dalam transportasi laut sebagai urat nadi perekonomian nasional sekaligus mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.

Takes inspiration from the busy, congested and confusing shape, and describes Pelindo as a provider of integrated port and logistics services that is always active and plays a major role in sea transportation - as the lifeblood of the national economy - as well as supports the realization of the Indonesian sea highway.

2

Mengambil huruf P yang menjadi inisial dari Pelindo sekaligus berbentuk ikan, yang menjadi lambang habitat makhluk hidup laut penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Ini juga menjadi simbol dari komitmen Pelindo untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.

The letter P is the first letter of Pelindo and takes the form of a fish, a symbol of important marine life for Indonesia, which is a maritime country. This is also a symbol of Pelindo's commitment to preserving Indonesia's natural wealth by continuing to contribute to supporting the preservation of marine ecosystems in its operational areas.

3

Warna biru adalah warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan,integritas, profesionalisme dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholders*.

The blue color is the color of the Indonesian sea, which Pelindo is very close to. This color symbolizes stability, trust, integrity, professionalism and devotion. This color also symbolizes Pelindo's efforts, as a BUMN to always provide the best for all stakeholders.



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" atau "Pelindo II") "Perusahaan", "Perseroan", atau "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 *juncto* PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 07 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 1 Oktober 2021 mengenai persetujuan perubahan nama, anggaran dasar dan logo Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

The Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" or "Pelindo II") ("Company" or "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") was initially established as a Public Company ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation ("PP") No. 15 of 1983 in conjunction with PP No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II is a State-Owned Enterprise ("BUMN") under the guidance of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II underwent a change to become a Limited Liability Company (Persero). As a follow-up to this PP, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on a Notarial Deed No. 3 dated December 1, 1992 before Imas Fatimah, S.H.Notary. This deed of establishment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the formation of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) in 1998, the Company has been under the guidance of the Ministry of SOEs. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on a Company's General Meeting of Shareholders Resolution, which was notarized in Notarial Deed No. 07 before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Notary dated October 1, 2021 concerning the approval of the change of name, articles of association and logo of the Company. The Articles of Association amendment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights letter No. AHU-0053936.AH.01.02 October 1, 2021.

Based on Deed No. 09 dated August 21, 2019, the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of SOEs, changed the type of shares, which were originally without series, to Series A and Series B shares Dwiwarna shares.



Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

The Company's purpose and objective is to conduct business in the field of port service operations as well as optimizing the use of the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan. Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihanan dan lainnya.

In addition to the business scope mentioned above, the Company can also establish and run other businesses related to the port business. Currently, the Company and its subsidiaries (hereinafter referred to as the "Business Group") are engaged in several business fields including port services, logistics, information technology services, dredging services, training services and others.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia. Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia. The parent and ultimate parent entity of the Company is the Government of the Republic of Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II), dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai perusahaan hasil penggabungan.

On October 1, 2021, the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") merged into one Company (formerly Pelindo II), with the Company (formerly Pelindo II) as the resulting company.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.

EXPLANATION OF ANY NAME CHANGE

Based on the Republic of Indonesia Minister of SOEs Letter No. S-756/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Approval of Change of Name, Change of Articles of Association and Company Logo, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to PT Pelabuhan Indonesia (Persero), abbreviated to Pelindo.

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE



Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia

To be a world-class integrated leader in the maritime ecosystem.

"Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi" berarti Pelindo mempunyai cita-cita menjadi fasilitator utama pergerakan jaringan logistik nasional dan internasional yang melalui jalur-jalur pelayaran global serta menjadi penggerak utama bagi pemangku kepentingan di bidang kemaritiman di Indonesia.

"Berkelas Dunia" berarti Pelindo menjadi penyedia jasa kepelabuhanan dan terkait kepelabuhanan dengan kinerja dan citra perusahaan yang baik yang berstandar global serta secara berkelanjutan mengembangkan jaringan logistik dan ekspansi bisnis secara global.

"Integrated Maritime Ecosystem Leader" means that Pelindo has the aspiration to become the main facilitator for the movement of national and international logistics networks through global shipping lanes and become the main driver for maritime stakeholders in Indonesia.

"World Class" means Pelindo becomes a provider of port and port-related services with good performance and corporate image with global standards as well as continuously developing logistics networks and business expansion globally.



Mewujudkan Jaringan Ekosistem Maritim Nasional Melalui Peningkatan Konektivitas Jaringan dan Integrasi Pelayanan Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

To realize national maritime ecosystem network through the increment of network connectivity and service integration, to support Indonesian economic growth

Pelindo sebagai perusahaan jasa kepelabuhanan memberikan layanan yang handal dan terintegrasi dengan ekosistem logistik maritim nasional serta aktif dalam mengembangkan jaringan logistik yang efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah-wilayah di Indonesia.

Pelindo, as a port services company, provides reliable and integrated services with the national maritime logistics ecosystem, and is active in developing an efficient logistics network to encourage economic growth in the regions in Indonesia.

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sehubungan dengan penggabungan usaha PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Perseroan telah melakukan pembaharuan dan penyesuaian terhadap visi dan misi Perseroan. Visi dan misi tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan *review* terhadap visi dan misi tersebut pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2021-2025 yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2021.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REVIEW OF THE VISION AND MISSION

In connection with the merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) to become PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the Company renewed and adjusted the Company's vision and mission. This vision and mission was discussed and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Then, the Board of Commissioners and the Board of Directors reviewed the vision and mission on November 9, 2021, during the preparation of the Company's Long Term Plan (RJPP) for 2021-2025.

BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE

A — Amanah Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- Memenuhi janji dan komitmen;
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Uphold the trust given.
- *Fulfill the pledge and the commitment;*
- *Responsible for the tasks, decisions, and actions taken;*
- *Stick to moral and ethical values.*

K — Kompeten Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Continue to learn and develop abilities.
- *Improve self-competence to respond to everchanging challenges;*
- *Help others learn;*
- *Complete tasks of the highest quality.*

H — Harmonis Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Caring for each other and respecting differences.
- *Respect everyone regardless of their background;*
- *Like helping others;*
- *Build a conducive work environment.*

L — Loyal Loyalty

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara;
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Dedicated and prioritizing the interest of the Nation and State.
- *Maintain the good names of fellow employees, leaders, SOE, and the State;*
- *Willing to sacrifice to achieve a greater goal;*
- *Obey the leadership as long as not against with law and ethics.*

A — Adaptif Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

Continuing to innovate and be enthusiastic in driving or facing change
- *Quickly adjust to be better.*
- *Continuously making improvements following technological developments.*
- *Be proactive.*

K — Kolaboratif Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis.
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka bekerja sama menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Build synergistic collaboration.
- *Provide opportunities for various parties to contribute;*
- *Be open in working together to generate added value;*
- *Mobilizing the use of various resources for common goals.*

BIDANG USAHA
BUSINESS FIELDS



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN

Maksud dan tujuan Perseroan menurut Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

KEGIATAN UTAMA

1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE CURRENT ARTICLES OF ASSOCIATION

The Company's purpose and objective based on the Company›s Articles of Association is to conduct business in the field of port service operations as well as optimizing the use of the Company›s resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

To achieve these aims and objectives, the Company carries out the following business activities:

MAIN ACTIVITIES

1. Provision and/or service of harbor pools and waters for traffic and ships' berths;

2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, barang termasuk hewan (*general cargo*), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (*general cargo*), dan kendaraan;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/ bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan penyediaan listrik, air minum dan instalasi limbah pembuangan sampah;
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
10. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
11. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa konsultansi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan;
12. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, *cleaning*, fumigasi serta pelayanan logistik; dan
13. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

KEGIATAN PENDUKUNG

1. Jasa angkutan;
2. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas peralatan;
3. Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhan;
4. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*ship to ship transfer*) termasuk jasa ikutan lainnya;
5. Properti di luar kegiatan utama kepelabuhan;
6. Kawasan industri;
7. Fasilitas pariwisata;
8. Perhotelan;
9. Jasa konsultan dan *surveyor* kepelabuhan;
10. Jasa komunikasi dan informasi;
11. Jasa konstruksi kepelabuhan;
12. Jasa *forwarding*/ekspedisi;
13. Jasa kesehatan
14. Perbekalan dan *catering*;
15. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle* bus;
16. Jas penyelaman (*salvage*);
17. Jasa *tally*;
18. Jasa pas pelabuhan; dan
19. Jasa timbangan.

Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar sudah dijalankan oleh Perseroan.

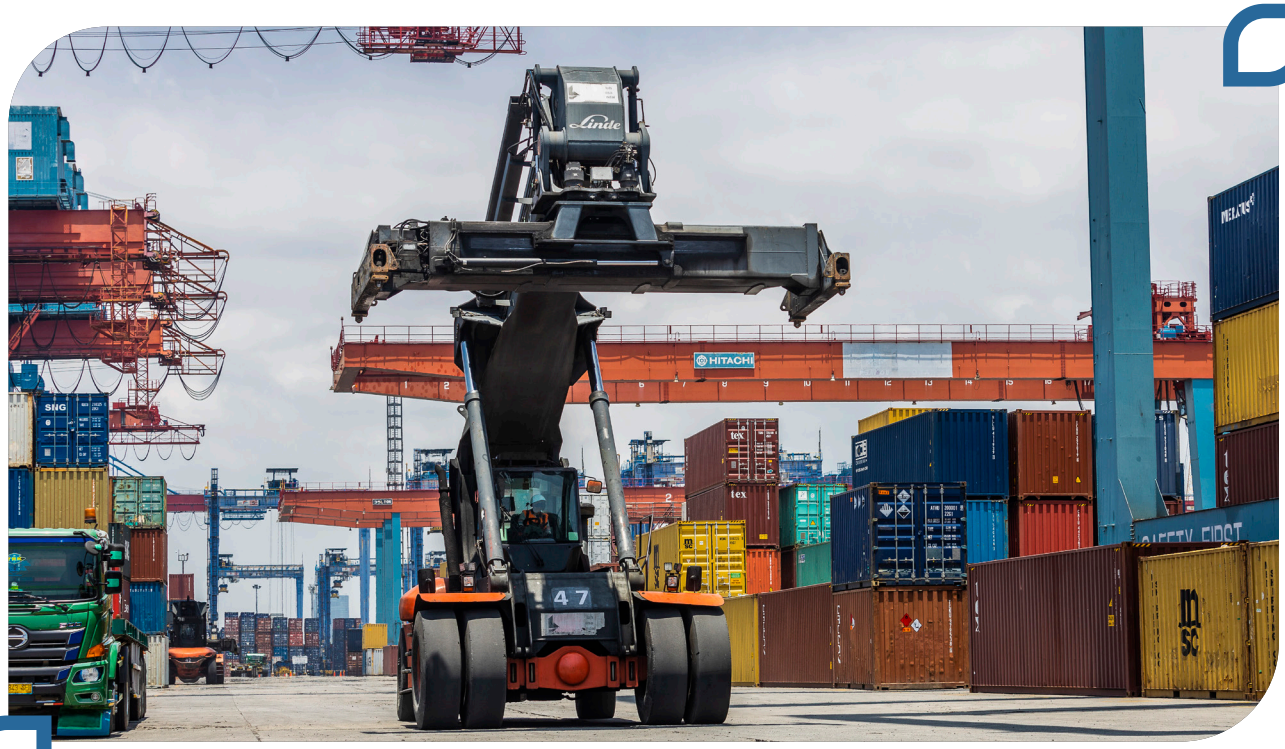
2. Provision and/or services of ship pilotage and towing;
3. Provision and/or service of wharves and other facilities for mooring, loading and unloading containers, liquid bulk, dry bulk, multi purpose, goods including animals (general cargo), and facilities for boarding and dropping off passengers and/or vehicles;
4. Provision and/or loading and unloading services, containers, liquid bulk, dry bulk (general cargo), and vehicles;
5. Provision and/or service of container terminal services, liquid bulk, dry bulk, multi purpose, passengers, public services, and Ro-Ro;
6. Provision and/or service of warehouses and stacking yards and places for storing goods, airport transportation, loading and unloading equipment, and port equipment;
7. Provision and/or land services of buildings and fields, industries and buildings related to the interests of running smooth multi-modal transportation;
8. Provision and/or service of electricity supplies, drinking water and waste disposal installations;
9. Provision and/or fueling services for ships and vehicles in the port environment;
10. Provision and/or service of consolidation and distribution of goods including animals;
11. Provision and/or consulting services, and education and training related to ports;
12. Operation and maintenance of container depots and repairs, cleaning, fumigation and logistics services; and
13. Exploitation of customs area and temporary storage areas.

SUPPORT ACTIVITIES

1. Transportation services;
2. Equipment rental and repair services;
3. Ship and equipment maintenance services in the port sector;
4. Ship-to-ship transfer services, including associated services;
5. Property outside the main port activities;
6. Industrial areas;
7. Tourism facilities;
8. Hospitality;
9. Port consultant and surveyor services;
10. Communication and information services;
11. Port construction services;
12. Forwarding services;
13. Health services
14. Supplies and catering;
15. Waiting area for vehicles and shuttle buses;
16. Diving suits (salvage);
17. Tally services;
18. Port pass service; and
19. Weighing services.

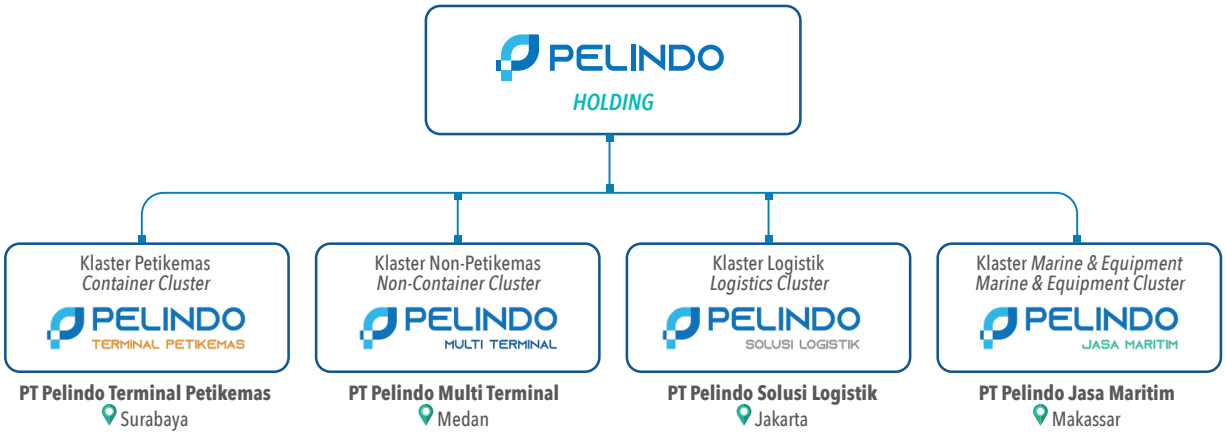
All business activities carried out by the Company are in accordance with the Articles of Association.

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES



Pasca integrasi, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan perusahaan *holding* kepelabuhanan yang memiliki klaster bidang usaha sebagai berikut:

Post-integration, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is a port holding company with the following business clusters:



KLASTER BIDANG USAHA LAYANAN PETIKEMAS

Merupakan pelayanan bongkar muat barang petikemas mulai dari kapal hingga penyerahan kepada pemilik barang. PT Pelindo Terminal Petikemas merupakan perusahaan *subholding* dari

CONTAINER SERVICE BUSINESS CLUSTER

A loading and unloading service for containerized goods from ships to delivery to the goods owners. PT Pelindo Terminal Petikemas is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari yang menjalankan bisnis operasi layanan terminal petikemas. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. ***Stevedoring***, Kegiatan membongkar petikemas dari kapal ke dermaga/*trailer* atau memuat petikemas dari dermaga/trailer ke dalam kapal;
2. ***Haulage***, Layanan pengangkutan petikemas dengan menggunakan *trailer/chassis* dalam daerah kerja pelabuhan dari lambung kapal ke lapangan penumpukan petikemas atau sebaliknya;
3. **Pelayanan Dermaga,** Pelayanan penanganan kapal di dermaga dengan mengatur kelancaran arus/barang di dermaga;
4. ***Receiving/Delivery,*** *Receiving* merupakan kegiatan menerima petikemas dari luar area Terminal sampai tersusun di lapangan penumpukan. *Delivery* adalah kegiatan memindahkan petikemas dari lapangan penumpukan dan menyerahkannya sampai tersusun di atas kendaraan;
5. **Jasa Penumpukan,** Jasa penumpukan petikemas di lapangan penumpukan sampai dengan dikeluarkan dari lapangan penumpukan untuk dimuat atau diserahkan kepada pemilik; dan
6. **Jasa Lainnya,** Merupakan jasa layanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan yang meliputi pemeriksaan karantina, pemeriksaan bea cukai, dan lain sebagainya.

KLASTER BIDANG USAHA LAYANAN NON-PETIKEMAS

Merupakan pelayanan bongkar muat barang non-petikemas mulai dari kapal hingga penyerahan kepada pemilik barang. PT Pelindo Multi Terminal merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari yang menjalankan bisnis operasi layanan terminal non-petikemas. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. **Layanan Terminal Curah Cair**, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas curah cair;
2. **Layanan Terminal Curah Kering**, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas curah kering;
3. **Layanan Terminal Kendaraan**, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat kendaraan;
4. **Layanan Terminal Khusus**, kerja sama layanan operasional maupun terminal operator terminal khusus;
5. **Layanan Terminal *Multipurpose***, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas *cargo* umum; dan
6. **Layanan TUKS**, kerja sama layanan operasional terminal untuk kepentingan sendiri.

(Persero) that acts as the holding for a group of subsidiary companies that run the business of operating container terminal services. The scope of business includes:

1. **Stevedoring**, the activity of unloading containers from ships to the wharf/trailer or loading containers from the wharf/trailer into the ships;
2. **Haulage**, container transportation services using trailer/chassis in the port work areas from the ship's hull to the container stacking fields or vice versa;
3. **Wharf Services**, ship handling services at the wharf by regulating the smooth flow of goods at the wharf;
4. **Receiving/Delivery**, picking up the containers from outside the Terminal area until they are arranged in the stacking field. Delivery is the activity of moving containers from the stacking field and handing them over until stacked on the vehicle;
5. **Stacking Service**, container stacking service in the stacking field until it is removed from the stacking field to be loaded or handed over to the owner; and
6. **Other services** are services that support activities at the port including quarantine inspections, customs inspections, and other services.

NON-CONTAINER SERVICE BUSINESS CLUSTER

A loading and unloading service for non-container goods from ships to delivery to the goods owners. PT Pelindo Multi Terminal is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of operating non-container terminal services. The scope of business includes:

1. **Liquid Bulk Terminal Services,** a dedicated terminal service for loading and unloading liquid bulk commodities;
2. **Dry Bulk Terminal Services,** dedicated terminal services for loading and unloading dry bulk commodities;
3. **Vehicle Terminal Services,** dedicated terminal services for loading and unloading vehicles;
4. **Special Terminal Services,** operational service cooperation and special terminal operator terminals;
5. **Multipurpose Terminal Services,** dedicated terminal services for loading and unloading of general cargo commodities; and
6. **TUKS service,** cooperation in terminal operational services for own interest.

KLASTER BIDANG USAHA LAYANAN LOGISTIK & *HINTERLAND*

Merupakan layanan pendukung terkait logistik dalam jasa kepelabuhanan. PT Pelindo Solusi Logistik merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari dengan lingkup bisnis operasi layanan logistik pendukung jasa kepelabuhanan. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. **Layanan Angkutan/Alat Transportasi Barang,** layanan pengangkutan barang umum untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri dan juga mencakup pengangkutan barang sewa khusus *(door-to-door),* pengangkutan barang melalui pelayaran rakyat dan pelayaran perintis dan lainnya;
2. **Layanan Ekspedisi,** layanan pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar baik yang diangkut melalui kereta/angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara;
3. **Pergudangan dan Penyimpanan,** layanan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir termasuk layanan *cold storage*, pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG), dan layanan pergudangan dan penyimpanan lainnya;
4. **Layanan Angkutan Multimoda,** layanan angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen;
5. **Layanan *Bounded Warehousing*/Kawasan Berikat,** layanan pergudangan dalam wilayah Kawasan Berikat;
6. **Layanan *Container Distribution Centre* (CDC)/*Cargo Consolidation Centre (CCC),*** layanan kegiatan *stripping/stuffing* untuk selanjutnya diangkut dari dan ke kendaraan angkutan barang untuk selanjutnya didistribusikan dan layanan untuk menyimpan petikemas kosong ex *stripping/stuffing*;
7. **Layanan Keagenan Kapal,** layanan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan laut nasional selama berada di Indonesia; dan
8. **Layanan Dermaga Marina *(Marine Tourism),*** layanan usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan kegiatan lain yang terkait kelautan.

KLASTER BIDANG USAHA LAYANAN *MARINE* DAN *EQUIPMENT*

Merupakan pelayanan jasa operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. PT Pelindo Jasa Maritim merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan

LOGISTICS SERVICES & HINTERLAND BUSINESS CLUSTER

A support service related to logistics in port services. PT Pelindo Solusi Logistik is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of logistics support port services. The scope of business includes:

1. **Freight Services/Means of Transportation,** general goods transportation services for domestic and foreign destinations including the transportation of special rental goods (door-to-door), transportation of goods through public shipping and pioneer shipping and others;
2. **Expedition services,** delivery and packing services for large volumes of goods, whether transported by train/land transportation, sea transportation, or air transportation;
3. **Warehousing and Storage,** temporary goods storage services before the goods are sent to the final destination including cold storage services, Warehouse Receipt System (G-SRG) management, and other warehousing and storage services;
4. **Multimodal Transportation Services,** goods transportation services using at least 2 (two) different modes of transportation under 1 (one) contract document;
5. **Bounded Warehousing / Bonded Zone Services,** warehousing services within the Bonded Zone area;
6. **Container Distribution Center (CDC),** Cargo Consolidation Center (CCC) services, services for stripping/stuffing activities for further transportation from and to goods transport vehicles for further distribution and services for storing empty containers ex stripping/stuffing;
7. **Ship Agency Services**, business services to manage the interests of foreign sea transportation company ships and/or national marine company ships while in Indonesia; and
8. **Marina Wharve Services (Marine Tourism),** business services for providing and managing places for mooring or anchoring cruise/tourism ships and other marine-related activities

MARINE AND EQUIPMENT SERVICES BUSINESS CLUSTER

A ship operational services starting from entering to exiting the port. PT Pelindo Jasa Maritim is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of

subsidiari dengan lingkup bisnis operasi layanan kapal, layanan peralatan, dan layanan pendukung kepelabuhanan lainnya. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. **Layanan Jasa kapal,** merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar Pelabuhan, adapun produk atau Jasa Utama Perusahaan dalam Pelayanan Jasa Kapal meliputi:
   a. **Jasa Tunda,** merupakan Produk atau Jasa Utama Perusahaan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal dan membantu kapal yang berolah-gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Proses Pelayanan Jasa Tunda Kapal wajib dilakukan terhadap seluruh kapal-kapal yang berada di wilayah perairan wajib Pandu dan Tunda di mana Perseroan mendapatkan wilayah pelimpahan wajib Pandu dan Tunda;
   b. **Jasa Pandu,** merupakan Produk atau Jasa Utama Perseroan yang wajib diberikan untuk melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga malalui alur Pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan;
   c. **Layanan Jasa Pengangkutan Kapal,** merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah Pelabuhan; dan
   d. **Layanan Jasa Pengelolaan Kapal,** merupakan kegiatan usaha perusahaan bekerja sama dengan Perusahaan Holding dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor Pandu yang digunakan untuk mobilisasi petugas pandu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemanduan kapal di seluruh wilayah perairan.
2. **Layanan Jasa Peralatan,** merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam hal penyediaan suku cadang, perbaikan mesin/alat, serta perdagangan besar mesin dan peralatan.
3. **Layanan Pendukung lainnya:**
   a. **Layanan Pengerukan,** merupakan kegiatan usaha pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan dan lokasi lain yang memerlukan jasa keruk, reklamasi transportasi hasil keruk, pengadaan/pengembangan lahan dan bangunan serta jasa lain yang terkait; dan
   b. **Layanan Penyediaan Utilitas dan Energi**, merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam penyediaan air bersih, kelistrikan, serta jasa lainnya yang terkait.

operating ship services, equipment services, and other port support services. The scope of business includes:

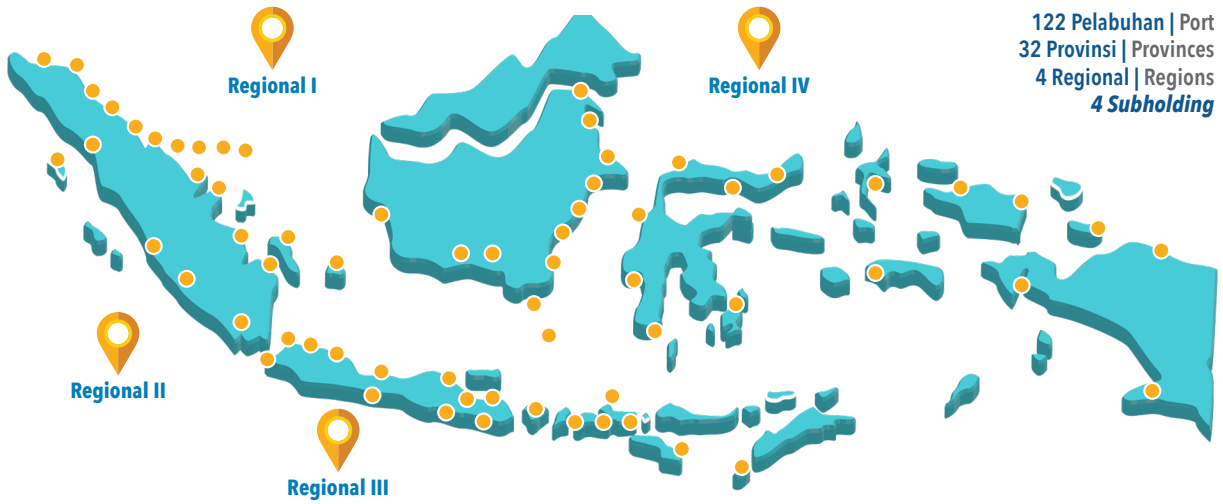
1. **Ship service,** the ships' operational activities from entering to exiting the port, while the Company's main products or services in Ship Services includes:
   a. **Tugboat Service,** the Company's Main Product or Service including pushing and pulling, tugging, escorting and assisting ships moving in shipping lanes, anchorage areas, or ponds for mooring or leaving the wharf. The Tugboat Service process must be carried out for all ships in the Pilot and Tugboat water areas that the Company has delegated as Pilot and Tugboat areas;
   b. **Pilot Service,** is the Company's Main Product or Service to serve ships entering and leaving the wharf through the Port channel, so that shipping navigation can be carried out safely, orderly, and smoothly for the safety of the ships and the environment;
   c. **Ship Transportation Services,** a Company business activity for transportation of materials or goods and production between Port areas; and
   d. **Ship Management Services,** a Company business activity in cooperation with the Holding Company for management and maintenance of Piloting motor boats used to mobilize pilot officers in carrying out ship piloting services in the territorial waters.
2. **Equipment Services,** a Company business activity for supplying spare parts, repairing machines/tools, as well as wholesale trading of machinery and equipment.
3. **Other Support Services:**
   a. **Dredging Services,** a business activity of dredging shipping lanes, port pools and other locations that require dredging services, reclamation of dredged transportation, procurement/development of land and buildings and other related services, and
   b. **Utilities and Energy Provision Services,** a Company business activity for providing clean water, electricity, and other related services.



PETA WILAYAH USAHA
MAP OF BUSINESS AREAS

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan hasil penggabungan empat BUMN Jasa Kepelabuhanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Selanjutnya Surat persetujuan Menteri BUMN RI No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar, dan Logo Perusahaan, maka disetujui PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Per 31 Desember 2021, Pelindo memiliki 122 Pelabuhan yang berada di 4 Regional, 32 Provinsi dan 4 *Subholding*.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) was formed through the merger of four Port Service SOEs based on Government Regulation No. 101 of 2021 concerning the Merger of PT Pelindo I, III, and IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Following the approval letter from the Minister of SOEs RI No. S-756/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning the Change of Name, Change of Articles of Association, and Company Logo, it was agreed that PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo. As of December 31, 2021, Pelindo operates in 122 Ports located in 4 Regions, 32 Provinces and 4 Subholding.



Tabel Wilayah Usaha Pelindo
Pelindo Business Regions

Wilayah Area	Kantor Pusat Head Office	Pelabuhan Port
Regional I	-	24
Regional II	1	24
Regional III	-	46
Regional IV	-	28

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI
ASSOCIATION MEMBERSHIP

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan, Pelindo turut serta berperan aktif di dalam berbagai organisasi. Hingga akhir 2021, Pelindo tercatat sebagai anggota maupun kepengurusan dalam organisasi atau asosiasi sebagai berikut:

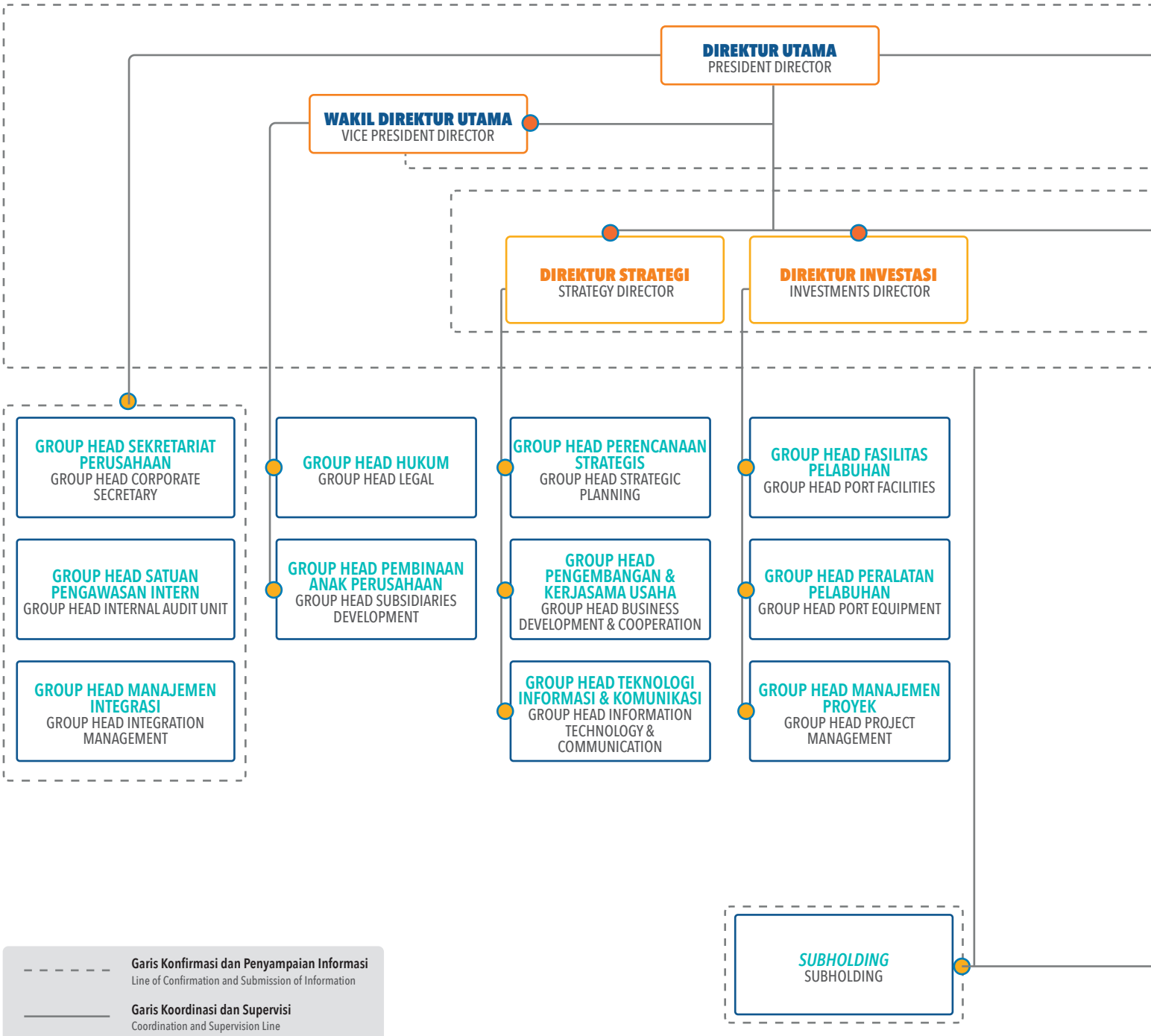
As a Company engaged in the port sector, Pelindo takes an active role in various organizations. At the end of 2021, Pelindo was listed as a member or management in the following organizations or associations:

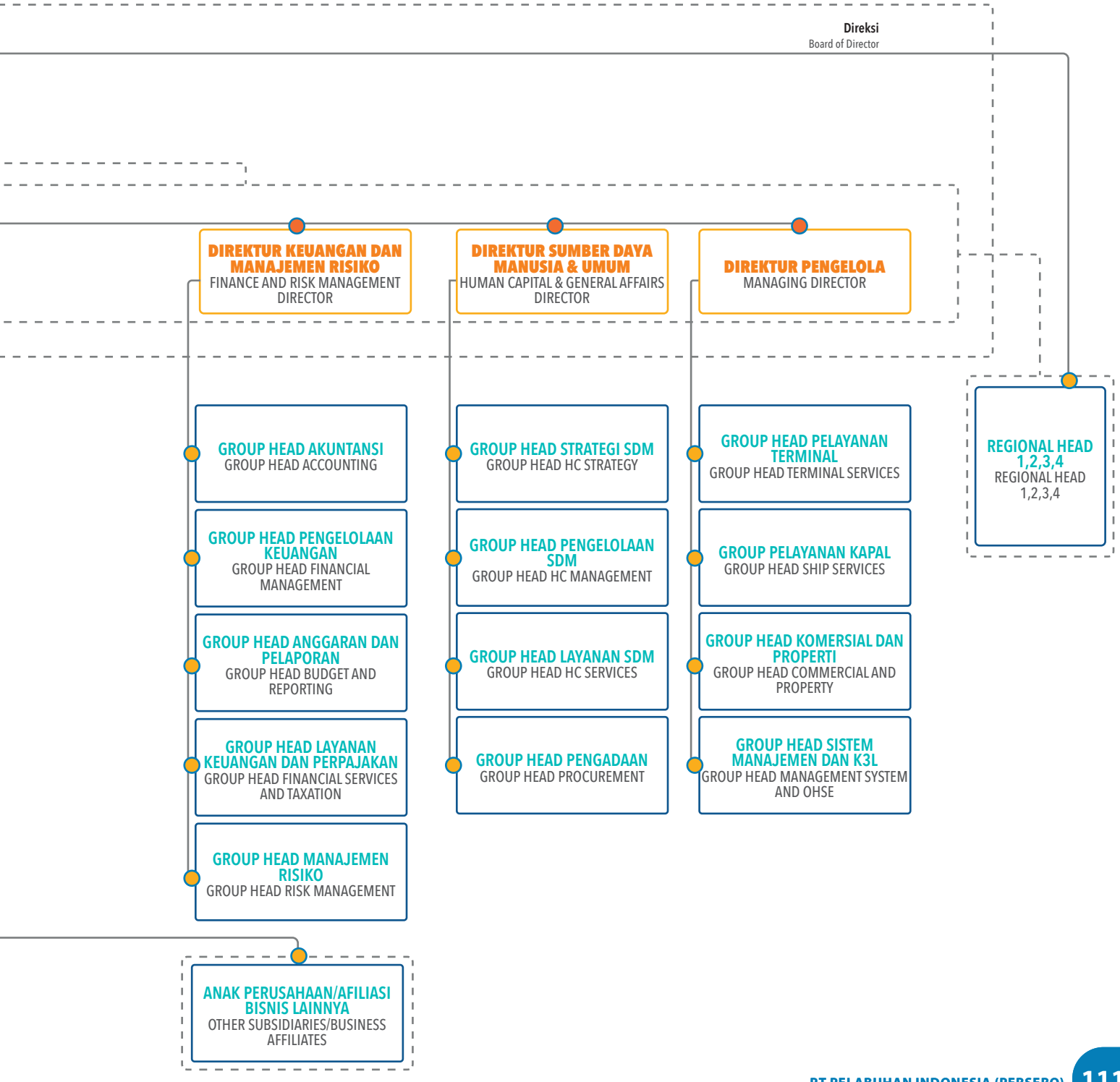
Organisasi Organization	Peran/Dudukan Role/Seat	Manfaat Organisasi Organizational Benefits	Biaya Tahunan Annual Fee
International Association of Port and Harbors (IAPH)	• IAPH adalah organisasi non-pemerintah yang merupakan aliansi pelabuhan global beranggotakan sekitar 160 pelabuhan dan 120 bisnis terkait pelabuhan di 87 negara yang berkedudukan di Jepang; dan • IPC adalah satu-satunya anggota IAPH di indonesia. • IAPH is a non-governmental organization as a global port alliance consisting of around 160 ports and 120 port-related businesses in 87 countries domiciled in Japan; and • IPC is the only IAPH member in Indonesia.	• Mengetahui perkembangan dan teknologi pelabuhan terkini; • Mempromosikan perkembangan dan proyek-proyek Perseroan kepada dunia pelabuhan internasional; • Berperan aktif dalam pembahasan kerja sama lingkup Asia Oceania; dan • Partisipasi pada IAPH World Port Conference dan kegiatan-kegiatan turunan IAPH lainnya. • Understanding the latest port developments and technology; • Promoting the Company's developments and projects to the world of international ports; • Taking an active role in the discussion on cooperation within Asia Oceania; and • Participating in the IAPH World Port Conference and other IAPH derivative activities.	USD7,470
ASEAN Port Association (APA)	• APA adalah asosiasi perusahaan pelabuhan di Asia Tenggara; dan • Keanggotaan Indonesia dalam APA terdaftar atas nama Sektap Pelindo yang merupakan Sekretariat Gabungan PT Pelindo I, II, III, dan IV. • APA is an association of port companies in Southeast Asia.; and • Indonesia's membership in the APA is registered under the name of Sektap Pelindo, a Joint Secretary of PT Pelindo I, II, III, and IV.	• Membuka peluang kerja sama dengan pengusaha bisnis pelabuhan dalam lingkup ASEAN; • Pertukaran informasi pelabuhan dengan pelabuhan ASEAN lainnya; dan • Berpartisipasi pada acara-acara asosiasi, seperti seminar dan acara keolahragaan. • Opening up opportunities for cooperation with port business entrepreneurs within ASEAN; • Exchanging port information with other ASEAN ports; and • Participating in association events, such as seminars and sporting events.	USD5,000
Chain Port	• Komunitas kemitraan Internasional antara Pelabuhan terkemuka dunia. • International partnership community between the world's leading Ports.	• Membuka peluang kerja sama dengan pelabuhan terkemuka dunia; dan • Pertukaran informasi untuk penyambung inovasi, revolusi digital pada pelabuhan, *maritime* dan logistik. • Opening up opportunities for cooperation with the world's leading ports; and • Exchanging information on innovations, digital revolutions in ports, maritime and logistics.	-

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Pelindo telah disahkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/30/11/1/PSKR/UTMA/PLND-21 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 30 November 2021. Berikut struktur organisasi Pelindo per 31 Desember 2021.

Pelindo's organizational structure was ratified through PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/30/11/1/PSKR/UTMA/PLND-21 dated November 30, 2021 concerning the Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The following shows the organizational structure of Pelindo as of December 31, 2021.




Direksi
Board of Director
DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
FINANCE AND RISK MANAGEMENT DIRECTOR
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA & UMUM
HUMAN CAPITAL & GENERAL AFFAIRS DIRECTOR
DIREKTUR PENGELOLA
MANAGING DIRECTOR
REGIONAL HEAD 1,2,3,4
REGIONAL HEAD 1,2,3,4
GROUP HEAD AKUNTANSI
GROUP HEAD ACCOUNTING
GROUP HEAD PENGELOLAAN KEUANGAN
GROUP HEAD FINANCIAL MANAGEMENT
GROUP HEAD ANGGARAN DAN PELAPORAN
GROUP HEAD BUDGET AND REPORTING
GROUP HEAD LAYANAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN
GROUP HEAD FINANCIAL SERVICES AND TAXATION
GROUP HEAD MANAJEMEN RISIKO
GROUP HEAD RISK MANAGEMENT
GROUP HEAD STRATEGI SDM
GROUP HEAD HC STRATEGY
GROUP HEAD PENGELOLAAN SDM
GROUP HEAD HC MANAGEMENT
GROUP HEAD LAYANAN SDM
GROUP HEAD HC SERVICES
GROUP HEAD PENGADAAN
GROUP HEAD PROCUREMENT
GROUP HEAD PELAYANAN TERMINAL
GROUP HEAD TERMINAL SERVICES
GROUP PELAYANAN KAPAL
GROUP HEAD SHIP SERVICES
GROUP HEAD KOMERSIAL DAN PROPERTI
GROUP HEAD COMMERCIAL AND PROPERTY
GROUP HEAD SISTEM MANAJEMEN DAN K3L
GROUP HEAD MANAGEMENT SYSTEM AND OHSE
ANAK PERUSAHAAN/AFILIASI BISNIS LAINNYA
OTHER SUBSIDIARIES/BUSINESS AFFILIATES

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILES



ARIF SUHARTONO

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Banyumas, pada tahun 1970. Usia 51 tahun Per Desember 2021.
Born in Banyumas in 1970. 51 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1994). • S2 bidang Infrastructure Management dari Yokohama National University Jepang (2001). • S2 bidang Business Administration dari Nanyang Technological University Singapura (2017).	• Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994). • Master's degree in Infrastructure Management from Yokohama National University Jepang (2001). • Master's degree in Business Administration from Nanyang Technological University Singapura (2017).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012). • Direktur Komersial PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013). • Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2013-2014). • Pj. PMO Leader PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014). • Direktur Utama Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015). • Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017). • Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019). • Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2019-2020). • Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020 - 2021). • Direktur Utama Pelindo (2021-Sekarang).	• Director of Operations, PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012). • Director of Commercial, PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013). • President Director, PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2013-2014). • Act. PMO Leader PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014). • President Director, Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015). • President Director, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017). • President Director, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019). • Director of Commercial, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2019-2020). • President Director, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020 - 2021). • President Director, Pelindo (2021- present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	Maret 2020 – sekarang (Periode Pertama).	March 2020 – present (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Wakil Komisaris PT Jakarta International Container Terminal (2020-sekarang). • Komisaris Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	• Vice Commissioner PT Jakarta International Container Terminal (2020-present). • President Commissioner PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



HAMBRA

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Ketapang, pada tahun 1968. Usia 53 tahun Per Desember 2021.
Born in Ketapang in 1968. 53 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 bidang Ilmu Hukum dari Universitas Pattimura Ambon (1994). • S2 bidang Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010).	• Bachelor's degree in Legal Studies from Universitas Pattimura Ambon (1994). • Master's degree in Business Law from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Bagian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN (2010-2012). • Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN (2012-2015). • Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN (2015 - 2016). • Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020-2021). • Wakil Direktur Utama Pelindo (2021-Sekarang).	• Head of Corporate Governance and Legislation, Ministry of SOEs (2010-2012). • Head of Legal Bureau, Kementerian BUMN (2012-2015). • Deputy Business Infrastructure, Ministry of SOEs (2015 - 2016). • Vice President Director, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020-2021). • Vice President Director, Pelindo (2021-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-272/MBU/11/2019 dated November, 18 2019 concerning Appointment of Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	November 2019 – sekarang (Periode Pertama).	November 2019 – present (First Period)
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Komisaris Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2020-2022); • Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia (2020-2022); • Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2020-sekarang).	• President Commissioner PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2020-2022); • President Commissioner PT Pengerukan Indonesia (2020-2022); • President Commissioner PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2020-present).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



MEGA SATRIA

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Pekanbaru, pada tahun 1977. Usia 44 tahun Per Desember 2021.
Born in Pekanbaru in 1977. 44 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 bidang Administrasi Bisnis dari Wichita State University-USA (1998). • S2 bidang Administrasi Bisnis dari Loyola University of Chicago-USA (1999).	• Bachelor's degree in Business Administration from Wichita State University-USA (1998). • Master's degree in Business Administration from Loyola University of Chicago-USA (1999).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Treasury Finance Head HSBC Jakarta (1999-2000). • Assistance Vice President Asset Product Manager ABN-Bank Amro (2000-2004). • Kepala Pengembangan Bisnis & Distribusi Penjualan Bank Danamon Syariah (2004-2006). • Head of Country Sales & Business Development Deutsche Bank (2006-2008). • Executive Vice President Business Development & National Distribution Sampoerna Strategic (2008-2012). • Corporate Treasurer PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015). • Abacus Distribution System Indonesia (Anak Perusahaan Garuda Indonesia) (2013-2015). • Chief Financial Officer PT Citilink Indonesia (2015-2017). • Direktur Keuangan dan SDM PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2018). • Direktur Keuangan PT Bukit Asam Tbk (2018-2021). • Direktur Keuangan Pelindo II (2021). • Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Pelindo (2021-Sekarang).	• Treasury Finance Head, HSBC Jakarta (1999-2000). • Assistance Vice President Asset Product Manager, ABN-Bank Amro (2000-2004). • Head of Business Development & Sales Distribution, Bank Danamon Syariah (2004-2006). • Head of Country Sales & Business Development, Deutsche Bank (2006-2008). • Executive Vice President Business Development & National Distribution, Sampoerna Strategic (2008-2012). • Corporate Treasurer, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015). • Abacus Distribution System Indonesia (Garuda Indonesia Subsidiary) (2013-2015). • Chief Financial Officer, PT Citilink Indonesia (2015-2017). • Director of Finance and HR, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2018). • Director of Finance, PT Bukit Asam Tbk (2018-2021). • Director of Finance, Pelindo II (2021). • Finance and Risk Management Director, Pelindo (2021- present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Finance and Risk Management Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-79/MBU/03/2021 dated March 15 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	Maret 2020 – sekarang (Periode Pertama).	March 2020 – present (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021-2022).	President Commissioner PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021-2022).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



IHSANUDDIN USMAN

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Jakarta, pada tahun 1969. Usia 52 tahun Per Desember 2021.
Born in Jakarta in 1969. 52 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 bidang Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (1994). • S2 bidang Innovation & Technology Management dari TSM Business School Twente University Belanda (2000).	• Bachelor's degree in Mining Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994). • Master's degree in Innovation & Technology Management from TSM Business School, Twente University, The Netherlands (2000).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur PT Prima Kompetensi (2004-2008). • Recruitment Manager PT Pertamina (Persero) (2008 -2010). • Leadership & People Development Manager PT Pertamina (Persero) (2010-2014). • VP Pertamina Corporate University PT Pertamina (Persero) (2014-2017). • VP HR & GA PT Pertamina Hulu Energi (2017). • SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero) (2017- 2018). • Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018-2020). • Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020-2021). • Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Pelindo (2021-Sekarang).	• Director, PT Prima Kompetensi (2004-2008). • Recruitment Manager, PT Pertamina (Persero) (2008-2010). • Leadership & People Development Manager, PT Pertamina (Persero) (2010-2014). • VP Pertamina Corporate University, PT Pertamina (Persero) (2014-2017). • VP HR & GA, PT Pertamina Hulu Energi (2017). • SVP Human Capital Development, PT Pertamina (Persero) (2017- 2018). • Director of Business Transformation and Development, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018-2020). • Human Resources and General Affairs Director, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020-2021). • Human Resources and General Affairs Director, Pelindo (2021-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota–Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Human Resources and General Affairs Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	Maret 2020 – sekarang (Periode Pertama).	March 2020 – present (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Komisaris Utama PT New Priok Container Terminal 1 (2020-2022); • Ketua Dewan Pengawas KSO TPK Koja (2020-2022).	• President Commissioner PT New Priok Container Terminal 1 (2020-2022); • Chairman of the KSO TPK Koja Supervisory Board (2020-2022).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



PRASETYO

Direktur Strategi
Strategy Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Mojokerto, pada tahun 1970. Usia 51 tahun Per Desember 2021.
Born in Mojokerto in 1970. 51 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 bidang Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994). • S2 bidang Business Administration dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2019).	• Bachelor's degree in Architectural Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994). • Master's degree in Business Administration from Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2019).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Manager Teknik Cabang Gresik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2009). • Assistant Senior Manager Perencanaan Usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2010). • Assistant Senior Manager Pemeliharaan Bangunan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2011). • Assistant Kepala Biro Perencanaan Bidang Kinerja Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2011). • Assistant Kepala Biro Perencanaan Bidang Perencanaan Strategis PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2012). • General Manager Pelabuhan Benoa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2013). • Senior Manager Supervisi Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2013). • Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia (2014). • Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Korporat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2017). • Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2021). • Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2021). • Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).	• Engineering Manager Gresik Branch, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), (2009). • Assistant Senior Business Planning Manager, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2010). • Assistant Senior Manager Building Maintenance, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2011). • Assistant Head of Planning Bureau, Corporate Performance PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2011). • Assistant Head of Planning Bureau, Strategic Planning PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2012). • General Manager, Pelabuhan Benoa, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2013). • Senior Manager Technical Supervision, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2013). • President Director, PT Pelindo Properti Indonesia (2014). • Head of Strategic Planning and Corporate Performance Bureau, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2017). • Director of Business Transformation and Development, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2021). • President Director, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2021). • Strategy Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Strategy Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	Oktober 2021 – sekarang (Periode Pertama).	October 2021 – present (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.	Does not hold any positions in other companies or institutions.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



BOY ROBYANTO

Direktur Investasi
Investment Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Surabaya, pada tahun 1973. Usia 48 tahun Per Desember 2021.
Born in Surabaya in 1973. 48 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• D3 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994). • S1 bidang Teknik Sipil dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2002). • S2 bidang Manajemen dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2019).	• D3 Diploma in Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994). • Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2002). • Master's degree in Management from Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2019).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• ASM Rancang Bangun Konstruksi Sipil Pelindo III (2014-2015). • ASM Rancang Bangun Pelindo III (2014-2015). • ASM Perencanaan Teknik Pelindo III (2015-2016). • General Manajer Pelindo III Cabang Tenau Kupang (2016-2017). • SVP Port Facility Pelindo III (2017-2018). • Komisaris PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2017-2020). • CEO Regional Kalimantan Pelindo III (2018-2020). • Direktur Teknik Pelindo III (2020). • Direktur Utama Pelindo III (2021). • Direktur Investasi Pelindo (2021-Sekarang)	• ASM Civil Construction Design, Pelindo III (2014-2015). • ASM Design, Pelindo III (2014-2015). • ASM Technical Planning, Pelindo III (2015-2016). • General Manager, Pelindo III Tenau Kupang Branch (2016-2017). • SVP Port Facility, Pelindo III (2017-2018). • Commissioner, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2017-2020). • CEO Regional Kalimantan, Pelindo III (2018-2020). • Technical Director, Pelindo III (2020). • President Director, Pelindo III (2021). • Investment Director, Pelindo (2021- present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Investment Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	Oktober 2021 – sekarang (Periode Pertama).	October 2021 – present (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Komisaris Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2021-sekarang); • Komisaris Utama PT Ambang Barito Nusapersada (2020-sekarang).	• President Commissioner PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2021-present); • President Commissioner PT Ambang Barito Nusapersada (2020-present).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



PUTUT SRI MULJANTO

Direktur Pengelola
Managing Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Magetan, pada tahun 1969. Usia 52 tahun Per Desember 2021.
Born in Magetan in 1969. 52 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga Surabaya (1993). • S2 bidang Manajemen dari Universitas Airlangga Surabaya (2012).	• Bachelor's degree in Economic Management from Universitas Airlangga Surabaya (1993). • Master's degree in Management from Universitas Airlangga Surabaya (2012).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi SDM Kepelabuhanan (2010). • Certified Management Accountant (2014).	• Port HR Certification (2010). • Certified Management Accountant (2014).
Pengalaman Kerja Work Experience	• ASM Perencanaan dan Kerjasama Usaha Pelindo III (2018 - 2019). • Komisaris PT Terminal Teluk Lamong (2019 - sekarang). • Komisaris PT Pelindo Daya Sejahtera (2018-2019). • Komisaris PT Berkah Multi Cargo (2018-2021). • Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III (2018-2021). • Direktur Pengelola Pelindo (2021-Sekarang).	• ASM Business Planning and Cooperation, Pelindo III (2018 - 2019). • Commissioner, PT Pelindo Terminal Teluk Lamong (2019- present). • Commissioner, PT Pelindo Daya Sejahtera (2018- 2019). • Commissioner PT Berkah Multi Cargo (2018-2021). • Director of Operations and Commercial, Pelindo III (2018-2021). • Managing Director, Pelindo (2021-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Managing Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	Oktober 2021 – sekarang (Periode Pertama).	October 2021 – present (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Komisaris PT Pelindo Terminal Teluk Lamong (2019-sekarang).	President Commissioner, PT Pelindo Terminal Teluk Lamong (2019- present).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



RIMA NOVIANTI*

Direktur Komersial
Commercial Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Sukabumi, pada tahun 1970. Usia 51 tahun Per Desember 2021.
Born in Sukabumi in 1970, 51 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia, Depok (2005).	Master's degree in Management Communications, Universitas Indonesia, Depok (2005).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komisaris PT Multi Terminal Indonesia (2014 - 2015). • Direktur Komersial PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 - 2017). • Senior Vice President Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2019). • Direktur Komersial PT Rumah Sakit Pelabuhan (2019 - 2020). • Plt. Komisaris Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019 - saat ini). • Direktur Komersial Pelindo II (2020 – 2021).	• Commissioner, PT Multi Terminal Indonesia (2014 - 2015). • Director of Commercial, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 - 2017). • Senior Vice President Commercial, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2019). • Director of Commercial, PT Rumah Sakit Pelabuhan (2019 - 2020). • Acting President Commissioner, PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019 - present). • Director of Commercial, Pelindo II (2020 – 2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Director of Commercial, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	2 Maret 2020 – 1 Oktober 2021 (Periode Pertama).	March 2, 2020 – October 1, 2021 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.	Does not hold any positions in other companies or institutions.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company

*Berhenti menjabat sejak 1 Oktober 2021
* Ceased serving on October 1, 2021



ZUHRI IRYANSYAH*

Direktur Teknik
Engineering Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Bekasi

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Medan, pada tahun 1969. Usia 52 tahun Per Desember 2021.
Born in Medan in 1969, 52 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	S2 Coastal Engineering and Port Development, UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, Belanda (2011).	Master's degree in Coastal Engineering and Port Development, UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, Belanda (2011).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Teknik PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014 – 2015). • Direktur Konstruksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015 – 2017). • Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017). • Koordinator Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2019). • Senior Vice President Manajemen Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019 - 2020). • Komisaris Utama PT Electronic Data Interchange Indonesia (2020 - saat ini). • Komisaris Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2020 - saat ini). • Direktur Teknik Pelindo II (2020 – 2021).	• Director of Engineering, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014 – 2015). • Director of Construction, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015 – 2017). • Director of Commercial & Business Development, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017). • Strategic Project Coordinator, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2019). • Senior Vice President Strategic Project Management, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019 - 2020). • President Commissioner, PT Electronic Data Interchange Indonesia (2020 - present). • President Commissioner, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2020 - present). • Director of Engineering, Pelindo II (2020 – 2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-208/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Engineering Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-208/MBU/06/2020 dated June 18, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	18 Juni 2020 – 1 Oktober 2021 (Periode Pertama).	June 18, 2020 – October 1, 2021 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.	Does not hold any positions in other companies or institutions.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company

*Berhenti menjabat sejak 1 Oktober 2021
* Ceased serving on October 1, 2021



MUARIP*

Direktur Operasi
Operations Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Bogor

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Juwana, pada tahun 1970. Usia 51 tahun Per Desember 2021.
Born in Juwana in 1970, 51 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	S2 Administrasi Bisnis Kuehne Logistics University, Jerman (2017).	Master's degree in Business, Kuehne Logistics University, Jerman (2017).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Operasi PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2013 - 2015). • Direktur Operasi dan Teknik PT IPC Terminal Peti Kemas (2015 - 2017). • Junior Chief Specialist Operasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2020). • Komisaris Utama PT IPC Terminal Petikemas (2020 - saat ini). • Komisaris Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2020 - saat ini). • Direktur Operasi Pelindo II (2020 – 2021).	• Director of Operations, PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2013 - 2015). • Director of Operations and Engineering, PT IPC Terminal Peti Kemas (2015 - 2017). • Junior Chief Specialist of Operations, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 - 2020). • President Commissioner, PT IPC Terminal Petikemas (2020 - present). • President Commissioner, PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2020 - present). • Director of Operations, Pelindo II (2020 – 2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Operations Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	2 Maret 2020 – 1 Oktober 2021 (Periode Pertama).	March 2, 2020 – October 1, 2021 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.	Does not hold any positions in other companies or institutions.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company

*Berhenti menjabat sejak 1 Oktober 2021
* Ceased serving on October 1, 2021



OGI RULINO*

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis
Business Transformation and Development Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Banda Aceh, pada tahun 1968. Usia 53 tahun Per Desember 2021.
Born in Banda Aceh in 1968, 53 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	S2 Teknik University of Electro-Communications, Jepang (1995).	Master's degree in Engineering, University of Electro-Communications, Japan (1995).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur PT Portco Infranusantara, member of Rajawali Corpora (2014). • Direktur Logistik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2015 -2018). • Direktur Logistik dan Pengembangan Bisnis PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2018 - 2019). • Komisaris Utama PT Multi Terminal Indonesia (2019 - saat ini). • Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 - saat ini). • Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo II (2019 – 2021).	• Director, PT Portco Infranusantara, member of Rajawali Corpora (2014). • Director of Logistics, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2015 -2018). • Director of Logistics and Business Development, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2018 - 2019). • President Commissioner, PT Multi Terminal Indonesia (2019 - present). • President Commissioner, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 - present). • Director of Logistics and Business Development, Pelindo II (2019 – 2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Director of Business Transformation and Development, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	8 April 2019 – 1 Oktober 2021 (Periode Pertama).	April 8, 2019 – October 1, 2021 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.	Does not hold any positions in other companies or institutions.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company

*Berhenti menjabat sejak 1 Oktober 2021
* Ceased serving on March 14, 2021



YON IRAWAN*

Direktur Keuangan
Finance Director

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Yogyakarta, pada tahun 1974. Usia 47 tahun Per Desember 2021.
Born in Yogyakarta in 1974, 47 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	S2 Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya (2013).	Master's degree in Management, Universitas Airlangga, Surabaya (2013).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Corporate Secretary PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014 - 2017). • Komisaris PT Terminal Teluk Lamong (2014 - 2017). • Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Surabaya (2017). • Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2017 - 2020). • Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020 - saat ini). • Direktur Keuangan Pelindo II (2019 – 2021).	• Corporate Secretary, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014 - 2017). • Commissioner, PT Terminal Teluk Lamong (2014 - 2017). • President Director, PT Terminal Peti Kemas Surabaya (2017). • Director of Finance, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2017 - 2020). • President Commissioner, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020 - present). • Director of Finance, Pelindo II (2019 – 2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Business Transformation and Development Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	2 Maret 2020 – 14 Maret 2021 (Periode Pertama).	March 2, 2020 – 14 March, 2021 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.	Does not hold any positions in other companies or institutions.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company

*Berhenti menjabat sejak 14 Maret 2021
* Ceased serving on March 14, 2021



BOY ROBYANTO
Direktur Investasi
Investment Director

ARIF SUHARTONO
Direktur Utama
President Director

PUTUT SRI MULJANTO
Direktur Pengelola
Managing Director



IHSANUDDIN USMAN
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director

HAMBRA
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

MEGA SATRIA
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

PRASETYO
Direktur Strategi
Strategy Director

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' AFFILIATED RELATIONSHIPS

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Board of Director's Affiliated Relationships

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi Board of Directors' Financial, Familial and Management Relationships															
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationships with						Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationships with						Hubungan Kepengurusan Management Relationships	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director		√		√		√		√		√		√		√
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director		√		√		√		√		√		√		√
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director		√		√		√		√		√		√		√
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director		√		√		√		√		√		√		√
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director		√		√		√		√		√		√		√
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director		√		√		√		√		√		√		√
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director		√		√		√		√		√		√		√

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Informasi komposisi anggota Direksi pada bagian ini diawali dengan komposisi Direksi pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) karena merger dilakukan dengan menggabungkan PT Pelabuhan Indonesia I, III , dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP COMPOSITION

Information on the Board of Directors membership composition in this section starts with the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors composition, as the merger was carried out by merging PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) PERIODE 1 JANUARI 2021 – 15 MARET 2021

Komposisi Direksi periode 1 Januari 2021 – 1 Oktober 2021 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo II. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2021 – MARCH 15, 2021

The Board of Directors composition for the period January 1, 2021 – March 15, 2021 consisted of 8 (eight) people including 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 6 (six) Directors. All Directors were domiciled in the Pelindo II Head Office working area. The composition and basis for the appointment of the Board of Directors can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 1 Januari 2021 – 15 Maret 2021
Board of Directors Composition and Basis of Appointment for the period January 1, 2021 – March 15, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/MBU/11/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-272/MBU/11/2019	18 November 2019 November 18, 2019
Rima Novianti	Direktur Komersial Commercial Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik Engineering Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-208/MBU/06/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-208/MBU/06/2020	18 Juni 2020 June 18, 2020
Muarip	Direktur Operasi Operations Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-208/MBU/06/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-208/MBU/06/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-80/MBU/04/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-80/MBU/04/2019	8 April 2019 April 8, 2019
Yon Irawan	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) PERIODE 15 MARET 2021 – 1 OKTOBER 2021

Pada tanggal 15 Maret 2021, Desember berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)" Nomor: SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, telah dilakukan pemberhentian dengan hormat Bapak Yon Irawan sebagai Direktur Keuangan dan Pengangkatan Bapak Mega Satria sebagai Direktur Keuangan yang dilaksanakan dalam rangka penataan susunan keanggotaan Direksi.

Dengan demikian komposisi Direksi periode 15 Maret 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo II. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD MARCH 15, 2021 – OCTOBER 1, 2021

On March 15, 2021, December based on the Minister of SOEs as a" PT Pelabuhan Indonesia (Persero)" GMS Decree No. SK-79/MBU/03/2021 dated March 15, 2021, Yon Irawan was dismissed with honor as Director of Finance and Mega Satria was appointed as Director of Finance in the context of restructuring the Board of Directors membership composition.

Thus, the Board of Directors composition for the period March 15, 2021– October 1, 2021 consisted of 8 (eight) people including 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 6 (six) Directors. All Directors were domiciled in the Pelindo II Head Office working area. The composition and basis for the appointment *of the Board of Directors can be seen in the table below.*

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 15 Maret 2021 – 1 Oktober 2021
Board of Directors Composition and Basis of Appointment for the period March 15, 2021 – October 1, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/MBU/11/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-272/MBU/11/2019	18 November 2019 November 18, 2019
Rima Novianti	Direktur Komersial Commercial Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik Engineering Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-208/MBU/06/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-208/MBU/06/2020	18 Juni 2020 June 18, 2020
Muarip	Direktur Operasi Operations Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-208/MBU/06/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-208/MBU/06/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Mega Satria	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-79/MBU/03/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-79/MBU/03/2021	15 Maret 2021 March 15, 2021
Ihsanuddin Usman	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Ogi Rulino	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-80/MBU/04/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-80/MBU/04/2019	8 April 2019 April 8, 2019

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 1 OKTOBER 2021 – 31 DESEMBER 2021 (PASCA MERGER)

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan berganti nama menjadi "PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo". Dengan demikian, komposisi Direksi periode 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili di wilayah kerja Pelindo. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD OCTOBER 1, 2021 – DECEMBERB 31, 2021(POST MERGER)

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merged to become PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and changed its name to"PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or abbreviated as Pelindo". Thus, the Board of Directors Composition for the period October 1, 2021 to December 31, 2021, consists of 7 (seven) people, including 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 5 (five) Directors. All Directors are domiciled in the Pelindo working area. The composition and basis for appointment of the Board of Directors can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Board of Directors Composition and Basis of Appointment

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/MBU/11/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-272/MBU/11/2019	18 November 2019 November 18, 2019
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-79/MBU/03/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-79/MBU/03/2021	15 Maret 2021 March 15, 2021
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILES



MARSETIO

Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama
Independent Commissioner/Acting President Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Jakarta, pada tahun 1956. Usia 65 tahun Per Desember 2021.
Born in Jakarta in 1956. 65 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• Akademi Angkatan Laut (1981). • S1 bidang Fisip/ADNE, Universitas Wijaya Putra, Surabaya (1997). • S2 bidang MNGT dari Universitas Wijaya Putra, Surabaya (2001). • S3 bidang Ilmu Budaya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002).	• Naval Academy (1981). • Bachelor's degree in Fisip/ADNE from Universitas Wijaya Putra, Surabaya (1997). • Master's degree in MNGT from Universitas Wijaya Putra, Surabaya (2001). • Doctorate in in Cultural Studies from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2002).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia (2012-2014). • Guru Besar Bidang Ilmu Budaya Teknologi Kemaritiman di Universitas Pertahanan Indonesia (2018 – sekarang). • Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim (2021 – sekarang). • Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Pelindo (2021 – sekarang).	• Chief of Staff of the Indonesian Navy (2012-2014). • Professor of Maritime Technology Cultural Sciences at Universitas Pertahanan Indonesia (2018 – present). • Special Advisor to the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment in the Maritime Defense and Security Sector (2021 – present). • Independent Commissioner/Acting President Commissioner Pelindo (2021 – present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	• Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. • Diangkat sebagai Plt. Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	• Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-335/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). • Appointed as Plt. The President Commissioner based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-335/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	1 Oktober 2021 – 30 September 2026 (Periode Pertama).	October 1, 2021 – September 30, 2026 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Guru Besar Bidang Ilmu Budaya Teknologi Kemaritiman di Universitas Pertahanan Indonesia (2018 – sekarang). • Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim (2021 – sekarang). • Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo (2021-sekarang).	• Professor of Maritime Technology Cultural Sciences at Universitas Pertahanan Indonesia (2018 – present). • Special Advisor to the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment in the Maritime Defense and Security Sector (2021 – present). • Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Pelindo (2021-present).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



R. AGUS H. PURNOMO

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Sleman, pada tahun 1961. Usia 60 tahun Per Desember 2021.
Born in Sleman in 1961. 60 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1985). • S2 bidang Manajemen dari STIE Arta Bodhi Iswara Surabaya (2008).	Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1985). Master's degree in Management from STIE Arta Bodhi Iswara Surabaya (2008).
Sertifikasi Certification	• *Self Motivation and Budget Control* (2004) • *Business Problem and Legal Perspective* (2005) • ESQ *Professional* (2007) • *Company Law* (2008)	• Self Motivation and Budget Control (2004) • Business Problem and Legal Perspective (2005) • ESQ Professional (2007) • Company Law (2008)
Pengalaman Kerja Work Experience	• CEO di PT Barata Indonesia (2008-2012). • CEO PT INKA (Persero) (2012-2017). • Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2017 – 2021). • Komisaris Pelindo II (2018 – sekarang).	• CEO, PT Barata Indonesia (2008-2012). • CEO, PT INKA (Persero) (2012-2017). • Director General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2017 – 2021). • Commissioner, Pelindo II (2018 – present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-26/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018 concerning Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	22 Januari 2018 – 21 Januari 2023 (Periode Pertama).	January 22, 2018 – January 21, 2023 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Staf Utama Menteri Pehubungan Bidang Transportasi Laut dan Logisik Maritim (2021 –sekarang). • Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo (2021-sekarang).	• Main Staff of the Minister of Transportation SectorMaritime Transportation and Logistics (2021–now). • Deputy Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee Pelindo (2021-present).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



HERU SUKANTO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Surabaya, pada tahun 1957. Usia 64 tahun Per Desember 2021.
Born in Surabaya in 1957. 64 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 bidang Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya (1982). • S2 bidang Manajemen Pemasaran dari PPM Jakarta (2000).	• Bachelor's degree in Law from Universitas Airlangga Surabaya (1982). • Master's degree in Marketing Management from PPM Jakarta (2000).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Utama Bank Argo BRI Tbk, Jakarta (2012 – 2016). • Direktur Utama Bank Banten Tbk, (2016–2017) . • Komisaris Bank Argo BRI Tbk, Jakarta (2017–2019) . • Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020–2021). • Komisaris Independen Pelindo (2021-sekarang).	• President Director, Bank Argo BRI Tbk, Jakarta (2012–2016). • President Director, Bank Banten Tbk, (2016–2017). • Commissioner, Bank Argo BRI Tbk, Jakarta (2017–2019). • Independent Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020–2021). • Independent Commissioner, Pelindo (2021–present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-335/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	1 Oktober 2021 – 30 September 2026 (Periode Pertama).	October 1, 2021 – September 30, 2026 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.	Does not hold any positions in other companies or institutions.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



ANTONIUS RAINIER HARYANTO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Jakarta, pada tahun 1978. Usia 43 tahun Per Desember 2021.
Born in Jakarta in 1978. 43 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 bidang Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2001). • S2 bidang Teknik Manajemen Lingkungan dari University of New South Wales Sydney (2003).	• Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2001). • Master's degree in Environmental Management Engineering from University of New South Wales Sydney (2003).
Sertifikasi Certification	-	-
Sertifikasi Certification	• *Charter Professional Engineer* • PMP • IPM • *Fellow Engineers* Australia	• Charter Professional Engineer • PMP • IPM • Fellow Engineers Australia
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur (Parttime) PT Deloitte Consulting Indonesia (Januari – April 2020). • Direktur program di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2015 – Juli 2019). • Direktur Transformasi Bisnis PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) IHC (24 Juni 2020 – 9 Juni 2021). • Komisaris Independen di Pelindo II (11 Juni 2021 - sekarang).	• Director (Parttime), PT Deloitte Consulting Indonesia (January – April 2020). • Director program at the Coordinating Ministry for Economic Affairs (June 2015 – July 2019). • Director of Business Transformation, PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) IHC (June 24, 2020 – June 9, 2021). • Independent Commissioner, Pelindo II (June 11, 2021 - present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-192/MBU/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-192/MBU/06/2021 dated June 11, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	11 Juni 2021 – 10 Juni 2026 (Periode Pertama).	June 11, 2021 – June 10, 2026 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Head of Strategic Delivery Unit, Kementerian BUMN (1 April 2021 – sekarang). • Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo (2021-sekarang).	• Head of Strategic Delivery Unit, Ministry of SOEs (April 1, 2021 – present). • Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee (2021-present).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company





SUDUNG SITUMORANG

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Tapanuli Utara, pada tahun 1961. Usia 60 tahun Per Desember 2021.
Born in Tapanuli Utara in 1961. 60 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S2 bidang Hukum dari Universitas Indonesia.	• Master's degree in Law from Universitas Indonesia.
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu NTT (2002). • Kepala Kejaksaan Negeri Blora (2004). • Kepala Kejaksaan Negeri Medan (2009). • Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tanjung Pinang (2015). • Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2016). • Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Tindak Pidana Khusus (2017). • Komisaris Pelindo II (11 Juni 2021 – sekarang).	• Head State Attorney, Kefamenanu NTT (2002). • Head State Attorney, Blora (2004). • Head State Attorney, Medan (2009). • Chief Prosecutor, Riau islands, Tanjung Pinang (2015). • Chief Prosecutor, DKI Jakarta (2016). • Expert Staff for the Indonesian Attorney General for Special Crimes (2017). • Commissioner, Pelindo II (June 11, 2021 – present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-192/MBU/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-192/MBU/06/2021 dated June 11, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	11 Juni 2021 – 10 Juni 2026 (Periode Pertama).	June 11, 2021 – June 10, 2026 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo (2021-sekarang)	Deputy Chairman of Nomination and Remuneration Committee (2021 - present).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company



DIDI SUMEDI

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Bogor, pada tahun 1964. Usia 57 tahun Per Desember 2021.
Born in Bogor in 1964. 57 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 bidang Sosial Politik Administrasi Negara dari Universitas Padjajaran Bandung (1988). • S2 bidang *Master of Business Administration* dari Saint Marys University, Kanada (1996).	• Bachelor's degree in Socio-Political State Administration from Universitas Padjajaran Bandung (1988). • Master's degree in Business Administration from Saint Mary's University, Canada (1996).
Sertifikasi Certification	• *English Preparatory for Master Program.* • *Microeconomics Analysis for Domestic Trade Analysis.* • Pelatihan *Marketing*. • *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights.* • *Logistic Renovation Strategy Korea.* • *Young and Professional Training on International Economics and Trade Policy Analysis.* • Diklat Analisa Perdagangan Internasional. • *Workshop* Kebijakan & Implementasi *E-Commerce* Deperindag. • APEC-SCCP *Trips Training.*	• English Preparatory for Master Program. • Microeconomics analysis for domestic trade analysis. • Marketing Training. • Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. • Korean Logistics Renovation Strategy. • Young and Professional Training on International Economics and Trade Policy Analysis. • International Trade Analysis Training. • Workshop on Department of Industry and Commerce E-Commerce Policy & Implementation. • APEC-SCCP TRIPS Training.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (2020 – 2021). • Komisaris Utama PT Perdagangan Indonesia (Persero) (2020). • Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (2021 – sekarang). • Komisaris Pelindo II (11 Juni 2021 – sekarang).	• Director General of Foreign Trade, Ministry of Trade (2020 – 2021). • President Commissioner, PT Perdagangan Indonesia (Persero)(2020). • Director General for National Export Development (2021 - present). • Commissioner, Pelindo (11 Juni 2021 – present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-192/MBU/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-192/MBU/06/2021 dated June 11, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	11 Juni 2021 – 10 Juni 2026 (Periode Pertama).	June 11, 2021 – June 10, 2026 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (2021 - sekarang). • Wakil Ketua Komite Audit Pelindo (2021 - sekarang).	• Director General for National Export Development (2021 - present). • Deputy Chairperson of the Pelindo Audit Committee (2021 - present).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company





MUCHTAR LUTHFI MUTTY

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Masamba, pada tahun 1956. Usia 65 tahun Per Desember 2021.
Born in Masamba in 1956. 65 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• Program Sarjana Muda APDN Makassar (1978). • Program Sarjana Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta Tahun (1985). • S2 bidang Kajian Ketahanan Nasional dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1994). • S2 bidang Administrasi Negara dari STIA YAPPANN Jakarta (2012).	• APDN Baccalaureate Program, Makassar (1978). • Institute of Government Sciences Undergraduate Program (IIP) Jakarta (1985). • Master's degree in National Resilience Study from Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1994). • Master's degree in State Administration from STIA YAPPANN Jakarta (2012).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Camat Wotu Kabupaten Luwu (1986-1989). • Dosen Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri (1989-1999). • Bupati Luwu Utara (1999-2009). • Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014). • Komisaris PTPN XIV (2010-2014). • Anggota DPR RI (2014-2019). • Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI (2019 – sekarang). • Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Sulawesi Selatan (2020 – sekarang). • Komisaris Independen Pelindo (2021 – sekarang).	• Camat Wotu, Luwu Regency (1986-1989). • Lecturer at the Institute of Government Science, Ministry of Home Affairs (1989-1999). • North Luwu District Head (1999-2009). • Special Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia (2009-2014). • Commissioner at PTPN XIV (2010-2014). • DPR RI Member (2014-2019). • Special Staff for the Deputy Chairperson at MPR RI (2019 –present). • Member of the Governor's Team for the Acceleration of Development (TGUPP) at South Sulawesi Province (2020 – present). • Independent Commissioner at Pelindo (2021 – present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-396/MBU/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.	Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-396/MBU/12/2021 dated December 9, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	9 Desember 2021 – 8 Desember 2026 (Periode Pertama).	December 9, 2021 – December 8, 2026 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI (2019 – sekarang). • Wakil Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo (2021 - sekarang).	• Special Staff of the Vice Chair MPR RI (2019 – present). • Deputy Chairman of the Pelindo Nomination and Remuneration Committee (2021 - present)
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company





MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA*

Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner / Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Bogor

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Bandung, pada tahun 1955. Usia 66 tahun Per Desember 2021.
Born in Bandung in 1955, 66 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• S1 Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung (1981). • S2 dari STIE IPWI Jakarta (2000). • S3 Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung (2005).	• Bachelor of Accounting from Padjadjaran University, Bandung (1981). • Master's degree from STIE IPWI Jakarta (2000). • Doctorate in Accounting Economics from • Universitas Padjadjaran, Bandung (2005).
Sertifikasi Certification	*Certified Public Accountant of Indonesia* (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2009).	Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) from Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2009).
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Komite Audit PT Dahana (Persero) (2007 - 2009). • Anggota Komite Audit PT Djakarta Lloyd (Persero) (2008 - 2009). • Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI (2009 - 2014). • Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan RI (2014 - 2017). • Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (2017 - 2019). • Komisaris Utama/Komisaris Independen Pelindo II (2020 – 2021).	• Audit Committee Member, PT Dahana (Persero) (2007 - 2009). • Audit Committee Member, PT Djakarta Lloyd (Persero) (2008 - 2009). • Member of RI Audit Agency I (2009 - 2014). • Member of RI Audit Agency V (2014 - 2017). • Head of RI Audit Agency (2017 - 2019). • President Commissioner/Independent Commissioner, Pelindo II (2020 – 2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as President Commissioner/Independent Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-68/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	2 Maret 2020 – 1 Oktober 2021 (Periode Pertama).	March 2, 2020 – October 1, 2021 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.	He hold any positions in other companies or institutions.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company

*Berhenti menjabat sejak tanggal 1 Oktober 2021
* Ceased serving on October 1, 2021



NURRACHMAN*

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Bogor

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Klaten, pada tahun 1968. Usia 53 tahun Per Desember 2021.
Born in Klaten in 1968, 53 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	S2 *Management Marketing* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trianandra, Jakarta (2001).	Master's degree in Management Marketing from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trianandra, Jakarta (2001).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Business Chairman Adyawinsa Group of Companies (2003 - sekarang). • Komisaris PT Brantas Adya Solar Energy (2013 - sekarang). • Anggota Unit Pelaksana Program Percepatan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2015 - 2016). • Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015 - 2018). • Komisaris Independen PT Kimia Farma (Persero) Tbk (2018 - 2020). • Komisaris Independen Pelindo II (2020 – 2021).	• Business Chairman, Adyawinsa Group of Companies (2003 - present). • Commissioner, PT Brantas Adya Solar Energy (2013 - present). • Member of the Implementing Unit of the National Electricity Acceleration Program (UP3KN), Ministry of Energy and Mineral Resources (2015 - 2016). • Independent Commissioner, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015 - 2018). • Independent Commissioner, PT Kimia Farma (Persero) Tbk (2018 - 2020). • Independent Commissioner, Pelindo II (2020 – 2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-391/MBU/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Independent Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-391/MBU/12/2020 dated December 14, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	14 Desember 2020 – 1 Oktober 2021 (Periode Pertama).	December 14, 2020 – October 1, 2021 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Business Chairman Adyawinsa Group of Companies (2003 - sekarang). • Komisaris PT Brantas Adya Solar Energy (2013 - sekarang).	• Business Chairman, Adyawinsa Group of Companies (2003 - present). • Commissioner, PT Brantas Adya Solar Energy (2013 - present).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company

*Berhenti menjabat sejak tanggal 1 Oktober 2021
* Ceased serving on October 1, 2021



DARWANTO*

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Rangkasbitung, pada tahun 1961. Usia 60 tahun Per Desember 2021.
Born in Rangkasbitung in 1961, 60 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	• Akademi Angkatan Laut (AAL) (1984). • S1 Hukum Laut. • S2 Administrasi Publik konsentrasi Kebijakan Maritim.	• Naval Academy (AAL) (1984). • Bachelor's degree in Maritime Law. • Public Administration concentrating on Maritime Policy.
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Asisten Perwira Divisi Senjata KRI Ratulangi-400 (1985). • Perwira Torpedo KRI Pasopati-410 (tahun). • Perwira Divisi Senjata KRI Cakra-410 (1990). • Kepala Seksi Operasi dan Latihan Satuan Kapal Selam (1995). • Komandan KRI Arung Samudera (1996-1997). • Komandan KRI Teluk Peleng-535 (1998). • Komandan KRI Dewaruci (1998). • Komandan KRI Cakra-410 (2001). • Komandan Satuan Kapal Selam Koarmatim (2002). • Paban II Jemen Staff Perencanaan Kasal (2006). • Komandan Pangkalan Angkatan Laut Ternate (2007). • Asisten Operasi Panglima Armada Barat (2008). • Wakil Komandan Pangkalan Utama IV Tanjung Pinang Kepulauan Riau (2009). • Paban II Ops Staff Operasi Mabesal (2010). • Komandan Pangkalan Utama IV Tanjung Pinang Kepulauan Riau (2011). • Kepala Staff Komando Angkatan Timur (2012). • Wakil Asisten Operasi Panglima TNI (2013). • Panglima Komando Lintas Laut Militer (2014). • Panglima Armada Kawasan Timur (2015). • Komando Kodiklat TNI Angkatan Laut (2017). • Staff Khusus Kasal (2018). • Kepala Bidang Perencanaan KKIP (2020-sekarang). • Komisaris Independen Pelindo II (11 Juni 2021 - 1 Oktober 2021).	• Assistant Officer, Weapons Division KRI Ratulangi-400 (1985). • Torpedo officer, KRI Pasopati-410 (years). • Officer, KRI Cakra-410 Weapons Division (1990). • Head of Submarine Unit Operations and Training (1995). • Commander of KRI Arung Samudera (1996-1997). • Commander of KRI Teluk Peleng-535 (1998). • Commander of KRI Dewaruci (1998). • Commander of KRI Cakra-410 (2001). • Commander of the Koarmatim Submarine Unit (2002). • Paban II Kasal Planning Staff (2006). • Commander of Ternate Naval Base (2007). • Assistant Operations Commander of Western Fleet (2008). • Deputy Commander of Main Base IV Tanjung Pinang Riau Islands (2009). • Paban II Operations Staff Headquarters Ops (2010). • Commander of Main Base IV Tanjung Pinang Riau Islands (2011). • Chief of Staff of the Eastern Forces Command (2012). • Deputy Assistant Operations to the TNI Commander (2013). • Commander of the Military Seaborne Command (2014). • Commander of the Eastern Fleet (2015). • Kodiklat TNI Naval Command (2017). • Kasal Special Staff (2018). • Head of KKIP Planning Division (2020-present). • Independent Commissioner, Pelindo II (June 11, 2021 - October 1, 2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-192/MBU/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-192/MBU/06/2021 dated June 11, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	11 Juni 2021 – 1 Oktober 2021 (Periode Pertama).	June 11, 2021 – October 1, 2021 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.	He hold any positions in other companies or institutions.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	

*Berhenti menjabat sejak tanggal 1 Oktober 2021
* Ceased serving on October 1, 2021



IRMA SURYANI CHANIAGO *

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Nationality
Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia | Place and Date of Birth/Age
Lahir di Metro, pada tahun 1966. Usia 55 tahun Per Desember 2021.
Born in Metro in 1966, 55 years old as at December 2021.

Riwayat Pendidikan Education History	S1 Ekonomi Manajemen dari STIE Jakarta (2001).	Bachelor's degree in Management from STIE Jakarta (2001).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Cabang PT Kemusuk Tri Dharma (1990-1992). • Senior Staff PT Pelindo II (1992-1998). • General Affair PT Jakarta International Container Terminal (1998-2014). • Direktur Utama PT Maninjau Putra Persada (2011-sekarang). • Anggota DPR-MPR (2014-2019). • Komisaris Independen Pelindo II (2020-2021).	• Branch Head, PT Kemusuk Tri Dharma (1990-1992). • Senior Staff, PT Pelindo II (1992-1998). • General Affair, PT Jakarta International Container Terminal (1998-2014). • President Director, PT Maninjau Putra Persada (2011-present). • Member of DPR-MPR (2014-2019). • Independent Commissioner, Pelindo II (2020-2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.	Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-335/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Periode Menjabat Term of Office	1 Oktober 2021 – 9 Desember 2021 (Periode Pertama).	October 1, 2021 - December 9, 2021
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Direktur Utama PT Maninjau Putra Persada (2011-sekarang).	President Director, PT Maninjau Putra Persada (2011-present).
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki	Does not hold any shares in the Company

*Berhenti menjabat sejak 9 Desember 2021
* Ceased serving on December 9, 2021



R. AGUS H. PURNOMO
Komisaris
Commissioner

ANTONIUS RAINIER HARYANTO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

HERU SUKANTO
Komisaris Independen
Independent Commissioner



MARSETIO
Komisaris Independen/
Plt. Komisaris Utama
Independent Commissioner/Acting President Commissioner

SUDUNG SITUMORANG
Komisaris
Commissioner

DIDI SUMEDI
Komisaris
Commissioner

MUCHTAR LUTHFI MUTTY
Komisaris Independen
Independent Commissioner

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' AFFILIATED RELATIONSHIPS

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Affiliated Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Board of Commissioners' Financial, Familial and Management Relationships													
		Hubungan Keuangan dengan Financial Relationships with						Hubungan Keluarga dengan Familial Relationships with						Hubungan Kepengurusan Management Relationships	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Marsetio	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

PERIODE 1 JANUARI 2021 - 1 OKTOBER 2021

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo II. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERSHIP COMPOSITION AND REASONS FOR THE CHANGES

PERIOD JANUARY 1, 2021 - OCTOBER 1, 2021

The Board of Commissioners composition for the period January 1, 2021 to October 1, 2021 consisted of 7 (seven) people, including 1 (one) President Commissioner/Independent Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners. All Commissioners were domiciled in the Pelindo II Head Office working area. The composition and basis for the appointment of the Board of Commissioners can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2021 – 1 Oktober 2021
Board of Commissioners Composition and Basis of Appointment for the period January 1, 2021 – October 1, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/ MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/ MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-26/ MBU/01/2018 Minister of SOEs Decree No. SK-26/ MBU/01/2018	22 Januari 2018 January 22, 2018
Nurrachman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-391/ MBU/12/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-391/ MBU/12/2020	14 Desember 2020 December 14, 2020
Didi Sumedi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/ MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/ MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Darwanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/ MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/ MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021

PERIODE 1 OKTOBER 2021 – 9 DESEMBER 2021

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan berganti nama menjadi "PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo". Dengan demikian Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Oktober 2021 sampai dengan 9

PERIOD OCTOBER 1, 2021 - DECEMBER 9, 2021

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) were merged into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and changed its name to "PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or abbreviated as Pelindo". Thus, the Board of Commissioners composition for the period October 1, 2021 – December 9, 2021 consisted of 7 (seven) people including 1 (one) Independent

Desember 2021 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo II. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Commissioner, acting as President Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners. All Commissioners were domiciled in the Pelindo II Head Office working area. The Board of Commissioners composition and basis of appointment can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 1 Oktober 2021 – 9 Desember 2021
Board of Commissioners Composition and Basis of Appointment for the period October 1, 2021 – December 9, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Marsetio	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/ MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/ MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-26/ MBU/01/2018 Minister of SOEs Decree No. SK-26/ MBU/01/2018	22 Januari 2018 January 22, 2018
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/ MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/ MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree\ No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/ MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/ MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/ MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Irma Suryani Chaniago	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/ MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/ MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021

PERIODE 9 DESEMBER 2021 – 31 DESEMBER 2021

Pada tanggal 9 Desember berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-396/MBU/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero), telah dilakukan pemberhentian dengan hormat Sdri. Irma Suryani Chaniago sebagai Komisaris Independen dan Pengangkatan Sdr. Muchtar

PERIOD DECEMBER 9, 2021 - DECEMBER 31, 2021

On December 9 based on the Minister of SOEs as a PT Pelabuhan Indonesia (Persero) GMS Decree No. SK-396/MBU/12/2021 dated December 9, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company, Irma Suryani Chaniago was dismissed with honor as an Independent Commissioner and Muchtar Luthfi Mutty was appointed as Independent Commissioner based on the needs of the Company. Thus, the Board of Commissioners composition for the period

Luthfi Mutty sebagai Komisaris Independen yang dilaksanakan atas kebutuhan Perseroan. Sehingga susunan Dewan Komisaris pada periode 9 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

December 9, 2021 to December 31, 2021 consists of 7 (seven) people including 1 (one) Independent Commissioner/Acting President Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners. All Commissioners are domiciled in the Pelindo Head Office working area. The composition and basis for the appointment of the Board of Commissioners can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 9 Desember 2021 – 31 Desember 2021
Board of Commissioners Composition and Basis of Appointment for the period December 9, 2021 - December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Marsetio	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/ MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/ MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-26/ MBU/01/2018 Minister of SOEs Decree No. SK-26/ MBU/01/2018	22 Januari 2018 January 22, 2018
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/ MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/ MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/ MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/ MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/ MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-396/ MBU/12/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-396/ MBU/12/2021	9 Desember 2021 December 9, 2021

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJA

EMPLOYEE PROFILE AND COMPETENCY DEVELOPMENT

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NUMBER OF EMPLOYEES BY GENDER

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (dalam satuan orang)

Number of Employees by Gender (people)

Jenis Kelamin Gender	2021	2020
Pria Male	6.061	6.101
Wanita Female	1.309	1.362
Jumlah **Total**	**7.370**	**7.463**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN LEVEL JABATAN

NUMBER OF EMPLOYEES BY POSITION LEVEL

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Jabatan
(dalam satuan orang)

Number of Employees by Position Level
(people)

Level Jabatan Position Level	2021 Total Total	2020 Total Total
1	9	8
2	43	44
3	90	92
4	130	132
5	138	139
6	273	278
7	379	380
8	409	412
9	594	600
10	784	790
11	1.141	1.150
12	793	800
13	1.006	1.039
14	802	810
15	161	165
16	157	158
17	118	120
18	127	130
19	214	214
20	2	2
Jumlah Total	**7.370**	**7.463**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN GOLONGAN

NUMBER OF EMPLOYEES BY RANK

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Golongan
(dalam satuan orang)

Number of Employees by Rank
(people)

Level Jabatan Position Level	2021	2020
IA	331	332
IIA	120	126
IIB	650	652
IIC	99	90
IID	416	416
IIIA	345	350
IIIB	418	423
IIIC	1.808	1.849
IIID	1.577	1.590
IVA	435	450
IVB	488	492
IVC	411	417
IVD	220	224
IVE	52	52
Jumlah Total	**7.370**	**7.463**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN RENTANG USIA

NUMBER OF EMPLOYEES BY AGE GROUP

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Rentang Usia (dalam satuan orang)

Number of Employees by Age Group (people)

Rentang Usia Age Group	2021 Total Total	2020 Total Total
Di atas 55 tahun Above 55 years old	96	121
51 – 55 tahun/years old	1.066	921
46 – 50 tahun/years old	1.428	1.404
36 – 45 tahun/years old	2.303	2.423
26 – 35 tahun/years old	2.273	2.424
Di bawah 26 tahun Under 26 years old	204	170
Jumlah **Total**	**7.370**	**7.463**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NUMBER OF EMPLOYEES BY EDUCATION LEVEL

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (dalam satuan orang)

Number of Employees by Education Level (people)

Tingkat Pendidikan Education Level	2021 Total Total	2020 Total Total
Pascasarjana Postgraduate	987	970
Sarjana Bachelor's degree	4.019	4.060
Sarjana Muda Baccalaureate	2.179	2.229
SLTA High School	176	193
SLTP Junior High School	9	11
Jumlah **Total**	**7.370**	**7.463**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EMPLOYMENT STATUS

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian (dalam satuan orang)

Number of Employees Based on Employment Status (people)

Status Kepegawaian Employment Status	2021	2020*
Organik Organic	7.370	2.609
Non-Organik Organic	15.580	975
Jumlah **Total**	22.950	3.523

*) Keterangan : Status pegawai pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tbk (sebelum merger).
*) Information : Employment status at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tbk (before the merger).

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJA

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelindo senantiasa mengedepankan pembelajaran berkesinambungan kepada semua pekerja, karena Perseroan percaya bahwa pengembangan kompetensi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis Perseroan. Pelindo memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan Perseroan. Sejalan dengan prinsip tersebut, Perseroan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi pekerja secara intensif dan berkesinambungan.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

COMPETENCY DEVELOPMENT POLICY

Pelindo prioritizes continuous learning for all employees, as the Company believes competency development will have a positive impact on the Company's business growth. Pelindo provides equal opportunities to all employees to take part in the competency development programs organized by the Company. In line with these principles, the Company has organized intensive and continuous employee competency development programs.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN LEVEL JABATAN
Competency Development by Position Level

No.	Level Jabatan Position Level	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Pekerja Number of Employees	Jumlah Pekerja yang Telah Mengikuti Pelatihan Number of Employes Who Attended Training	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan Percentage Who Attended Training at Each Position Level	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Jenis Pelatihan Percentage Who Attended Training for Each Type of Training
1	BOD-1	*Training* dan Seminar Training and Seminar	**Pemenuhan Kompetensi Pekerja dan Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Pekerja** **Fulfillment of Employee Competencies and Fulfillment of Employee Certification Requirements**	254	129	55,12%	50,79%
		Sertifikasi Certification			11		4,33%
2	BOD-2	*Training* dan Seminar Training and Seminar		657	402	63,77%	61,19%
		Sertifikasi Certification			17		2,59%
3	BOD-3	*Training* dan Seminar Training and Seminar		1.317	715	57,40%	54,29%
		Sertifikasi Certification			41		3,11%
4	BOD-4	*Training* dan Seminar Training and Seminar		2.349	1.194	52,83%	50,83%
		Sertifikasi Certification			47		2,00%
5	BOD-5	*Training* dan Seminar Training and Seminar		2.673	1.428	54,58%	53,42%
		Sertifikasi *Certification*			31		1,16%
Jumlah **Total**				**7.250**	**4.015**		

EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam rangka mengukur dan mendukung pengembangan efektivitas Program Pembelajaran, maka dilaksanakan proses evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi Program Pendidikan:
   a. Evaluasi Penyelenggara meliputi pengajar dan fasilitas;
   b. Evaluasi Peserta dilakukan dengan:
      - Penyerahan laporan progress secara berkala, hasil tugas akhir akademis, transkrip, dan ijazah asli kepada Pengelola SDM masing-masing unit kerja dan dilaporkan kepada *Group Head* Pengelolaan SDM Kantor Pusat;
      - Melakukan *sharing knowledge* atas tugas akhir akademik dan pengetahuan lain yang diperoleh pada saat pendidikan.
2. Evaluasi Program Pelatihan:
   a. Evaluasi Penyelenggaraan Pembelajaran (Level 1), yaitu evaluasi terhadap penyelenggaraan suatu pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan program pembelajaran yang diukur melalui metode survei;
   b. Evaluasi Pengetahuan Peserta Pembelajaran (Level 2), yaitu evaluasi terhadap pekerja pada akhir suatu pelatihan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penyerapan pembelajaran dan menyatakan kelulusan pekerja dalam pelatihan tersebut yang diukur melalui metode-metode yang ditetapkan oleh pengajar;
   c. Evaluasi Perilaku Peserta Pembelajaran (Level 3), yaitu evaluasi terhadap pekerja yang telah kembali ke unit kerjanya yang bertujuan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pemanfaatan hasil pelatihan di unit kerja yang diukur melalui hasil observasi atasan selama 3 (tiga) – 6 (enam) bulan;
   d. Evaluasi Dampak Pembelajaran (Level 4), yaitu evaluasi dampak atau manfaat pelatihan terhadap kinerja individu pekerja, atau kinerja unit dimana pekerja bekerja, atau kinerja perusahaan secara keseluruhan.

3. Evaluasi Program Magang:
   a. Evaluasi Penyelenggara meliputi materi magang, proses magang, fasilitas yang diberikan oleh instansi yang menyediakan program magang;
   b. Evaluasi Peserta dilakukan dengan:
      - Menyusun laporan pelaksanaan magang;
      - Melalui *sharing knowledge* hasil magang pada waktu yang ditentukan oleh Pengelola SDM di masing-masing unit kerja dan dilaporkan kepada *Group Head* Pengelolaan SDM Kantor Pusat.

COMPETENCY DEVELOPMENT EVALUATION

To measure and support the Learning Program development effectiveness, the following evaluation process is carried out:

1. Evaluation of Educational Programs:
   a. Operator evaluation includes teachers and facilities;
   b. Participant evaluation is carried out by:
      - Submitting periodic progress reports, academic final results, transcripts, and original certificates to the HC Manager in each work unit, and copied to the Head Office HC Management Group Head;
      - Sharing knowledge on academic final assignments and other knowledge acquired during the education.

2. Evaluation of Training Programs:
   a. Evaluation of Learning (Level 1) including evaluating the implementation of the training aimed to improve the learning program services through a survey method;
   b. Evaluation of Knowledge of Learning Participants (Level 2), by evaluating employees at the end of a training to determine the level of learning absorption, and declaring the employees who have graduated, measured by methods determined by the teachers;
   c. Evaluation of Learning Participants Behavior (Level 3), by evaluating employees who have returned to their work units to determine the changes in behavior and their use of training results in the work units, measured by observations by superiors for 3 (three) – 6 (six) months;
   d. Learning Impact Evaluation (Level 4), by evaluating the impact or benefits from the training in the individual employee's performance, or the performance of the unit where the employees work, or the performance of the Company as a whole.
3. Evaluation of the Internship Program:
   a. Organizer evaluation including internship material, internship process, facilities provided by the agency providing the internship program;
   b. Participant evaluation is carried out by:
      - Preparing reports on the internships implementation;
      - By sharing knowledge on the internship results at a time determined by the HC Manager in each work unit, copied to the HC Management Group Head at the Head Office.

Realisasi Evaluasi Program Pelatihan
Training Program Evaluation Realization

Evaluasi Level 1 Level 1 Evaluation	Evaluasi Level 2 Level 2 Evaluation	Evaluasi Level 3 Level 3 Evaluation	Evaluasi Level 4 Level 4 Evaluation
3,6	81.29	-	-

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melaksanakan penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Biaya pengembangan kompetensi per tanggal 1 Oktober 2021 adalah sebesar Rp11.458.123.600.

COMPETENCE DEVELOPMENT COSTS

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merged into PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The cost of competency development as of October 1, 2021 was Rp11,458,123,600.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Tabel Komposisi Pemegang Saham Pelindo
Pelindo Shareholder Composition

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Total Shares	Nominal (Rp)	Kepemilikan Ownership
Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1.444.028	1.444.028.000.000	*100%*

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melaksanakan penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat kepemilikan saham tanggal 1 Januari 2021.

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merged to become PT Pelabuhan Indonesia (Persero) whose shares are 100 % owned by the Ministry of SOEs as Shareholder representing the Republic of Indonesia. Therefore, there is no share ownership to report as of January 1, 2021.

Tabel Komposisi Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) per 31 Desember 2021
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Shareholder Composition as of December 31, 2021

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Total Shares	Kepemilikan Ownership
Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	8.475.067	100%

Per 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2021, tidak terdapat kepemilikan saham institusi lokal, kepemilikan institusi asing, kepemilikan individu lokal, dan kepemilikan individu asing.

As of January 1, 2021 and December 31, 2021, there is no local institutional ownership, foreign institutional ownership, local individual ownership, and foreign individual ownership.

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Sampai dengan 31 Desember 2021, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar.

COMPOSITION OF THE 20 LARGEST SHAREHOLDERS

As of December 31, 2021, Pelindo as a State-Owned Enterprise is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no information to report on the composition of the 20 (twenty) largest shareholders.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Sampai dengan 31 Desember 2021, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH 5% OR MORE SHARE OWNERSHIP

As of December 31, 2021, Pelindo as a State-Owned Enterprise is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders of 5% or more of the Company has been explained in the description of the composition of shareholders.

KOMPOSISI KELOMPOK PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5%

Sampai dengan 31 Desember 2021, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

COMPOSITION OF THE SHAREHOLDER GROUPS WITH LESS THAN 5% SHARE OWNERSHIP

As of December 31, 2021, Pelindo as a State-Owned Enterprise is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders of 5% or more of the Company has been explained in the description of the composition of shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris maupun Direksi Pelindo tidak mempunyai kepemilikan saham atas Pelindo. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Dengan demikian, Pelindo tidak menyajikan menyajikan rincian anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

The Board of Commissioners and Board of Directors of Pelindo do not own any shares in Pelindo. 100% of the shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. So Pelindo does not report details of members of the Board of Directors or Board of Commissioners who own shares directly or indirectly.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Kepemilikan saham mayoritas Pelindo dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pelindo adalah Negara Republik Indonesia sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

MAJORITY AND CONTROLLING SHAREHOLDER

The majority share ownership of Pelindo is the Government of the Republic of Indonesia with 100% share ownership. Thus, the Majority and Controlling Shareholders of Pelindo is the Government of the Republic of Indonesia, and there is no indirect Majority and Controlling Shareholders, down to individual owners and there are no Shareholders acting on behalf of other shareholders.



DAFTAR ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

LIST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATE COMPANIES AND JOINT VENTURE COMPANIES

SUBHOLDING

SUBHOLDING

No.	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
1.	PT Pelindo Terminal Petikemas	Bongkar Muat Petikemas Loading and Unloading Containers	Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya Jawa Timur 60165 Telp: (031) 3298631 – 37 Email: info.tpk@pelindo.co.id Web: pelindotpk.co.id	PT Pelindo (Persero) 99,9% PT ILCS 0,1 %	2013	Beroperasi Operational	Rp150.007.324.946
2	PT Pelindo Multi Terminal	Operator Terminal *Multipurpose* Multipurpose Terminal Operator	Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Belawan - Medan 20411 Telp: (061) 4100 0055 Email: plmt@pelindomultiterminal.co.id Web: pelindomultiterminal.co.id	PT Pelindo (Persero) 99,9% PT ILCS 0,1 %	2021	Beroperasi Operational	Rp149.135.356.680
3	PT Pelindo Solusi Logistik	Logistik & *Hinterland Development* Logistics & Hinterland Development	Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara 14310 Telp: (021) 4301080 Email: infosolusilogistik@pelindo.co.id	PT Pelindo (Persero) 99,9% PT ILCS 0,1 %	2021	Beroperasi Operational	Rp83.154.426.523
4	PT Pelindo Jasa Maritim	*Marine, Equipment* dan *Port Services* (Pengerukan, Energi dan Utilitas) Marine, Equipment and Port Services (Dredging, Energy and Utilities)	Jl. Soekarno No. 1, Makassar 90173, Sulawesi Selatan Email: sekper.jasamaritim@pelindo.co.id	PT Pelindo (Persero) 99,9% PT ILCS 0,1 %	2021	Beroperasi Operational	Rp125.153.051.226

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
1.	PT IPC Terminal Petikemas	Terminal Peti Kemas dan Konvensional Container and Conventional Terminal	Jl. Raya Pelabuhan, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 Telp: (021) 4301080, 4003899/77 *Website*: www.iptpk.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 99,00% PT Pelabuhan Indonesia Investama:1,00%	2013	Beroperasi Operational	Rp4.537.051.061.326
2	PT Prima Terminal Petikemas	Terminal Peti Kemas (Jasa Kepelabuhanan/BUP) Container Terminal (Port Services/BUP)w	Graha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Telp: (061) 41000055 ext. 2216 Email: prima@primatpk.com Web: www.primatpk.com	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero): 70,00% PT Hutama Karya (Persero): 15,00% PT Wijaya Karya (Persero): 15,00%	2021	Beroperasi Operational	Rp3.211.156.217.381
3	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	Terminal Peti Kemas (Jasa Kepelabuhanan/BUP) Container Terminal (Port Services/BUP)	Jl. Perak Barat 379, Surabaya Telp: (031) 3291596 – 97 Email: info@bjtiport.co.id Web: www.bjtiport.co.id	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): 96,84% Koperasi Pegawai Pelindo III: 3,16%	2002	Beroperasi Operational	Rp4.354.818.813.346

No.	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
4	PT Terminal Petikemas Surabaya	Terminal Petikemas Container Terminal	Jl. Tanjung Mutiara No. 1 Surabaya 60177 Customer Service: (031) 3202020 Humas: 031-3283269 Email: cs@tps.co.id, humas@tps.co.id Web: www.tps.co.id	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): 99,50% Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,50%	1999	Beroperasi Operational	Rp2.706.594.610.000
5	PT Terminal Teluk Lamong	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut Marine Port Service Activities	Jl. Raya Tambak Osowilangun KM 12 Surabaya 60191 Telp: (031) 99001500 Fax: (031) 99001490 Email: terminal@teluklamong.co.id Web: www.teluklamong.co.id	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): 99,50% Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,50%	2014	Beroperasi Operational	Rp795.945.129.528
6	PT Kaltim Kariangau Terminal	Pelayanan Jasa Terminal Bongkar Muat Barang dan Petikemas serta Kegiatan yang Berhubungan dengan Konsolidasi dan Distribusi Barang Terminal Services for Loading and Unloading Goods and Containers and Activities Related to the Consolidation and Distribution of Goods	Jl. Pulau Balang No. 1 KM. 13 Kel. Kariangau Kec. Balikapapan Barat, Balikpapan Telp: 08115377044 Email: callcenter@kariangauterminal.co.id Web: www.kariangauterminal.co.id	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero): 50,00% Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya: 50,00%	2012	Beroperasi Operational	Rp165.185.557.510
7	PT Prima Multi Terminal	Bongkar Muat Petikemas dan Non-Petikemas (Curah Cair, Curah Kering, *General Cargo*) Loading and Unloading of Containers and Non-Containers (Liquid Bulk, Dry Bulk, General Cargo)	Jl. Pelabuhan No. 1 Kuala Tanjung Kec. Sei Suka Kab. Batubara Sumatera Utara 21657 Telp: (0622) 5341871Fax: Email: corp@ktmt.co.id Web: www.primamultiterminal.co.id	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero): 55,00% PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk: 25,00% PT Waskita Karya (Persero) Tbk: 20,00%	2019	Beroperasi Operational	Rp3.781.241.553.427
8	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Bongkar Muat Non Petikemas (Curah Cair, Curah Kering, *General Cargo)* Non-Container Loading and Unloading (Liquid Bulk, Dry Bulk, General Cargo)	Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok - Jakarta Utara Telp: (021) 4301080Fax: Email: ptpmultipurpose@ptp.co.id Web: www.ptp.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 99,00% PT Pelabuhan Indonesia Investama: 1,00%	2013	Beroperasi Operational	Rp4.343.084.726.849
9	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Bongkar Muat Khusus Kendaraan, Alat Berat, *Sparepart* Loading and Unloading Specifically for Vehicles, Heavy Equipment, Spare Parts	Jl. Sindang Laut No. 100 Cilincing Jakarta Utara Telp: (021) 43932251 Fax: (021) 43932250 Email: indo@indonesiacarterminal.co.id Web: www.indonesiacarterminal.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 71,28% PT Pelabuhan Indonesia Investama: 5,54% PT Multi Terminal Indonesia: 0,72% Publik: 22,46%	2012	Beroperasi Operational	Rp1.967.805.778.131

No.	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
10	PT Prima Pengembang Kawasan	• *Real Estate* • Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis • Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi • Konstruksi • Informasi dan Komunikasi • Pengangkutan dan Pergudangan • Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin • Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor • Real Estate • Scientific and Technical Professional Activities • Water Management, Waste Water Management, Waste Recycling Management and Remedial Activities • Construction • Information and Communication • Transportation and Warehousing • Procurement of Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air • Wholesale and Retail Trade, Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles	Graha Pelindo Satu Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411 Telp: (061) 6628088 Email: primakawasan@ptppk.co.id	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero): 90,00% PT Prima Multi Terminal: 10,00%	2015	Beroperasi Operational	Rp905.376.170.431
11	PT Prima Indonesia Logistik	Pengusahaan Kegiatan Bisnis Logistik Logistics Business Activities	Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI, Ujung Baru Belawan Telp: 081397512125 Fax: (061) 6940113 Email: andilesmana@primaindonesialogistik.com, bisnislogistik@primaindonesialogistik.com Web: www.primaindonesialogistik.com	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero): 99,67% Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha TPK Kotamadya Medan: 0,33%	2015	Beroperasi Operational	Rp310.514.655.800
12	PT Multi Terminal Indonesia	Jasa Logistik Logistics Services	Jl. Pulau Payung No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara Telp: (021)-29104000 Email: customercare.ipclogistic.co.id Web: www.ipclogistic.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 99,00% Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 1,00%	2002	Beroperasi Operational	Rp800.856.277.268
13	PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	Logistik and *Hinterland* Logistics and Hinterland	Maritime Tower Lantai 15 Jl. Yos Sudarso No. 9 Kec. Koja, Jakarta Utara 14230 Telp: (021) 6471 8081 Email: corp.sec@portdevco.com Web: www.portdevco.com	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 99,97% PT Pelabuhan Indonesia Investama: 0,03%	2012	Beroperasi Operational	Rp14.762.391.098.886

No.	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
14	PT Nusantara Terminal Services	Perusahaan Bongkar Muat, Usaha Angkutan Multimoda, *Trucking* dan Transportasi Darat, *Project Cargo Marine Services* Loading and Unloading Company, Multimodal Transportation Business, Trucking and Land Transportation, Project Cargo Marine Services	Plasa Intan PT Pelindo (Persero) Lantai 1 Jl. H. I. A. Saleh Dg. Tompo No. 11, Makassar 90112 Telp: (0411) 3624453 Fax: (0411) 3624453 Email: pt.nts_makassar@yahoo.co.id, ptnts.memberofp4@gmail.com	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero): 99,16% Koperasi Karyawan PT Pelabuhan Indonesia IV: 0,84%	2013	Beroperasi Operational	Rp64.531.146.580
15	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	• *Equipment Maintenance* • *Engineering Project & Consultancy* • *Equipment Provider* • *Port Equipment Manufacture* • *Marine Equipment Maintenance* • *Spareparts & Fuel Supplies* • Equipment Maintenance • Engineering Project & Consultancy • Equipment Provider • Port Equipment Manufacture • Marine Equipment Maintenance • Spareparts & Fuel Supplies	Gedung Rukindo Lt. 4 Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14430 Telp: (021) 2243 4285 Email: corpsec@jppi.co.id Web: www.ipcportequipment.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 99,00% PT Pelabuhan Indonesia Investama: 1,00%	2012	Beroperasi Operational	Rp260.510.633.766
16	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	• Pelayanan Jasa Pandu • Pelayanan Jasa Tunda • Pelayanan Jasa • Pengangkutan Kapal • Pelayanan Jasa Pengelolaan Kapal • Pilot Services • Tug Services • Services • Ship Freight • Ship Management Services	Gedung Rukindo Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14430 Gedung Citra Towers North Tower Lantai 21 Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta 10630 Telp: (021) 4306789 Email: corsec@ipcmarine.co.id Web: www.ipcmarine.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 76,89% PT Multi Terminal Indonesia: 0,11% Publik: PT Pelabuhan Indonesia Investama 11,05%, Lain-lain11,80% Treasury Stock: 0,15%	2012	Beroperasi Operational	Rp568.504.900.528
17	PT Energi Pelabuhan Indonesia	Pengelolaan Utilitas yang Meliputi Ketenagalistrikan, Kontraktor Ketenagalistrikan, Pelayanan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Utilities Management Including Electricity, Electricity Contractors, Clean Water Services and Waste Management	Gedung PLN UP3 Tanjung Priok Jl. Yos Sudarso No. 30, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320 Telp: (021) 4305047 Fax: (021) 4305052 Email: corsec@ecopowerport.co.id Web: www.ecopowerport.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 55,00% PT Haleyora Power: 45,00%	2013	Beroperasi Operational	Rp189.901.044.632
18	PT Pengerukan Indonesia	Pengerukan, Reklamasi, Galangan dan Perbengkelan Kapal Dredging, Reclamation, Shipbuilding and Workshop	Gedung PT Rukindo Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14430 Telp: (021) 4301380 Email: corsec@rukindo.co.id, admin@rukindo.co.id Web: www.rukindo.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 99,91% PT Pengembang Pelabuhan Indonesia: 0,09%	1983	Beroperasi Operational	Rp439.020.813.838

No.	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
19	PT Pelindo Marine Service	*Integrated Marine Services* dengan Menyediakan Ragam Layanan Maritim Terintegrasi Mulai dari Jasa Penundaan dan Pemanduan Kapal, Pengerukan dan Penyiapan Lahan, Manajemen Alur Pelayaran, Logistik dan Distribusi Energi, hingga Jaringan Transportasi Multimoda dan Penanganan *Project Cargo* Integrated Marine Services Providing Integrated Maritime Services Ranging from Ship Towing and Pilotage Services, Dredging and Land Preparation, Shipping Channel Management, Logistics and Energy Distribution, to Multimodal Transportation Networks and Project Cargo handling.	Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan Surabaya 60165 Telp: (031) 3282321, 3282278 Email: info@pelindomarines.com	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): 98,23% Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,77%	2011	Beroperasi Operational	Rp1.050.914.547.165
20	PT Equiport Inti Indonesia	Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Alat Berat Heavy Equipment Maintenance and Maintenance Services	Jl. H. I. A. Saleh Dg Tompo No. 11 Makassar 90112 Telp: (0411) 8001649, 8002092 Email: makassar.equiport@gmail.com Web: www.equiport.co.id	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero): 99,29% Koperasi Karyawan PT Pelabuhan Indonesia IV: 0,71%	2012	Beroperasi Operational	Rp115.462.382.195
21	PT Prima Husada Cipta Medan	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, dan Apotik Health Services for Hospitals, Clinics, and Pharmacies	Jl. Stasiun No. 92 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan, 20411 Telp: (061) 6941927 Email: ptphcm@gmail.com Web: www.phcm.co.id	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero): 99,69% Koperasi Karyawan Kantor Pusat Pelindo I: 0,31%	2016	Beroperasi Operational	Rp74.386.950.911
22	PT Pelabuhan Indonesia Investama	Perusahaan Investasi Kepelabuhanan Port Investment Company	Gedung Maritime Tower Lt 11 Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta Utara Telp: (021) 4301080 Email: corsec@ipc-investco.com Web: www.ipc-investco.com	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 99,00% PT Multi Terminal Indonesia: 1,00%	2017	Beroperasi Operational	Rp1.037.361.666.398
23	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Teknologi Informasi Kepelabuhanan Port Information Technology	Jl. Boulevard Timur No. 88 RT. 5/RW. 2 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara Telp: (021) 80678250 Email: customercare@ilcs.co.id Web: www.ilcs.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 99,00% PT Pengembang Pelabuhan Indonesia: 1,00%	2012	Beroperasi Operational	Rp12.220.054.550
24	PT Electronic Data Interchange Indonesia	• Jasa Konsultasi & Pengembangan Teknologi Informasi • *Product & Project* IT sektor *Government* • *Product & Project* IT sektor *Private* • *Product & Project* IT sektor BUMN • *Mass* IT *Product* • Jasa Infrastruktur IT • Information Technology Consulting & Development Services • Government Product & Project IT sector • Private IT products & projects sector • SOE IT products & projects sector • Mass IT Products • IT Infrastructure Services	Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter, Jakarta Utara, 14360, Telp: (021) 650 5829 Fax: (021) 650 5987 Email: corporate@edi-indonesia.co.id Web: www.edi-indonesia.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 51,00% PT Sisindokom Teknologi: 49,00%	1995	Beroperasi Operational	Rp70.583.029.402

No.	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
25	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	• Jasa Konsultasi & Pengembangan Teknologi Informasi • *Product & Project* IT sektor *Government* • *Product & Project* IT sektor *Private* • *Product & Project* IT sektor BUMN • *Mass* IT *Product* • Jasa Infrastruktur IT • Information Technology Consulting & Development Services • Government Product & Project IT sector • Private IT products & projects sector • SOE IT products & projects sector • Mass IT Products • IT Infrastructure Services	Jl. Beringin I No. 1 Pandansari Gadog Kec. Ciawi - Kab. Bogor Jawa Barat 16720 Telp: (0251) 7555622/614 *Marketing*: 08111444601 Email: marketing@pmli.co.id (Marketing), corpsec@pmli.co.id (Corporate Secretary) Web: www.pmli.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 99,00% PT Pelabuhan Indonesia Investama: 1,00%	2013	Beroperasi Operational	Rp94.779.891.120
26	PT Pelindo Daya Sejahtera	• Layanan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya, Pemborongan, Harian Lepas • Layanan Asesmen, Pelatihan dan Konsultasi Asesmen, Psikotes, Rekrutmen, Sertifikasi, Pelatihan, *E-Learning* • Layanan Pendukung Bisnis Sistem Perparkiran, Jasa Kebersihan, Jasa Pertamanan • Manpower Services (Outsourcing, Chartering, Freelance Daily) • Assessment, Training and Consulting Services Assessment, Psychological Test, Recruitment, Certification, Training, E-Learning • Business Support Services Parking System, Cleaning Service, Landscaping Service	Jl. Perak Timur 620, Surabaya Telp: 08113311711 Email: tata.usaha@ptpds.co.id, marketing@ptpds.co.id Web: www.ptpds.co.id	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): 90,00% Koperasi Pegawai Pelindo III: 10,00%	2014	Beroperasi Operational	Rp217.344.320.396

ENTITAS CUCU

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
1	PT New Priok Container Terminal 1	Pelayanan Jasa Terminal Bongkar Muat Barang dan Petikemas serta Kegiatan yang Berhubungan dengan Konsolidasi dan Distribusi Barang Terminal Services for Loading and Unloading Goods and Containers, and Activities Related to the Consolidation and Distribution of Goods	Jl. Terminal Kalibaru Raya Kav. B No. 1 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Telp: (021) 29144888 Fax: (021) 29144888 Email: ccommercial@npct1.co.id Web: www.NPCT1.co.id	IPC TPK: 51% Sea Terminal Management Service PTE.LTD: 49%	2016		US$255 Million
2	PT Berlian Manyar Sejahtera	Terminal Non Petikemas (Jasa Kepelabuhanan/BUP) Non Container Terminal (Port Services/ BUP)	Office Gapura Surya Nusantara (GSN) Lt 2 Jl. Perak Timur 620, Surabaya Telp: (031)-99097788 Email: office@bms.jiipe.co.id Web: www.jiipe.com Port Pelabuhan JIIPE Jl. Raya Manyar KM 11 Manyar - Gresik Jawa Timur	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 60,00% PT Usaha Era Pratama Nusantara: 40,00%	2016	Beroperasi Operational	Rp1.293.096.587.520
3	PT Pelindo Properti Indonesia	Pelaksana Konstruksi, Konstruksi Bangunan Komersial, Konstruksi Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa, Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, DAM dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara Construction, Commercial Building Construction, Hotel Construction, Restaurant and Similar Buildings, Construction of Waterways, Ports, Dams and Other Water Resources Infrastructure, Road Construction Except Flyovers, Roads, Railroads, and Airport Runways	Jl. Perak Barat No. 379 RT. 02 RW. 03 Kel. Perak utara Kec. Pabean Cantian, Surabaya Telp: (031) 3568050 Email: sekper@pelindoproperti.co.id Web: www.pelindoplace.com	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 99,93% PT Usaha Era Pratama Nusantara: 0,07%	2014	Beroperasi Operational	Rp176.148.455.468
4	PT Berkah Industri Mesin Angkat	*Port Equipment Services, Heavy Equipment Services, General Engineering,* dan *General Supplier* Port Equipment Services, Heavy Equipment Services, General Engineering, AND General Supplier	Jl. Perak Timur No. 428, Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya 60165 Telp: (031) 9909-3444 Email: info@ptbima.id Web: www.ptbima.id	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 90,00% Koperasi Pegawai Pelindo III: 10,00%	2015	Beroperasi Operational	Rp202.830.021.100
5	PT Terminal Curah Semarang	Terminal dan Persewaan Tangki Curah Cair Liquid Bulk Tank Terminal and Rental	Jl. Deli No. 8 Pelabuhan, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang 50249 Telp: (024) 86578169	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 51,00% Koperasi Pegawai Pelindo III: 49,00%	2016	Beroperasi Operational	Rp847.345.125
6	PT Lamong Energi Indonesia	Kelistrikan dan Jasa Penunjang Lainnya (Pengelola Pembangkit Listrik, Penyedia Tenaga Listrik dan Fasilitas yang Berhubungan dengan Kelistrikan serta Utilitas di Lingkungan Pelabuhan dan Kawasan Industri) Electricity and Other Supporting Services (Power Plant Managers, Providers of Electricity and Facilities related to Electricity and Utilities in Port and Industrial Areas)	Jl. Raya Tambak Osowilangon KM 12, Surabaya Telp: (031) 9900 1500 Fax: (031) 9900 1490 Email: info@lamongenergi.co.id Web: www.lamongenergi.co.id	PT Terminal Teluk Lamong: 99% Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia: 1%	2017	Beroperasi Operational	Rp179.642.634.790
7	PT Prima Multi Peralatan	Layanan Jasa Pemeliharaan Gedung, Alat Berat Bongkar Muat dan Kapal, Layanan *Engineering* Mekanikal dan Elektrikal Building Maintenance Services, Loading and Unloading Heavy Equipment and Ships, Mechanical and Electrical Engineering Services	Jl. Beringin No. 88E Komplek Cemara Asri, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang 20371 Telp: 081262119880 Email: info@p1-pmp.com Web: www.primamultiperalatan.com	PT Prima Indonesia Logistik: 99% PT Prima Multi Terminal: 1%	2018	Beroperasi Operational	Rp68.209.218.571
8	PT Akses Pelabuhan Indonesia	Pengembangan Jalan Tol Toll Road Development	Maritime Tower Lantai 12 Jl. Yos Sudarso No. 9 Kec. Koja, Jakarta Utara 14230 Telp: (021) 6456310 Email: adm.api@portaccess.co.id Web: www.portacsess.com	PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia: 99,68% PT Pelabuhan Tanjung Priok: 0,32%	2014	Beroperasi Operational	Rp3.283.309.000.000

No..	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
9	PT Menara Maritim Indonesia	Properti, *Real Estate* Property, Real Estate	Maritime Tower Lt 8, Jalan Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara Telp: (021) 22444557 Email: corporate@menara-maritim.co.id	PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia: 99,97% PT Akses Pelabuhan Indonesia: 0,03%	2018	Beroperasi Operational	Rp1.032.080.631.197
10	PT Intan Sejahtera Utama	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (TKAD) Manpower Provider Services (TKAD)	Jl. H. I. A. Saleh Dg. Tompo No. 11, Makassar 90112 Telp: (0411) 8944074 Email: intansejahterautam@gmail.com	PT Nusantara Terminal Services: 99,60% PT Equipport Inti Indonesia: 0,40%	2019	Beroperasi Operational	Rp31.881.371.546
11	PT Pelindo Energi Logistik	Jasa Logistik, baik Bidang Gas, *Liquid*/Cair BBM dan Non-BBM, serta Pengelolaan Limbah Logistics Services for Gas, Liquid Fuel and Non-Fuel, as well as Waste Management	Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan Surabaya 60165 Telp: (031) 328 4275 Fax: (031) 328 4456 Email: info@pel.co.id Web: www.pel.co.id	PT Pelindo Marine Service: 98,90% PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 1,10%	2014	Beroperasi Operational	Rp493.340.591.406
12	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	Jasa Konstruksi Bangunan Pelabuhan dan Dermaga, Pengerukan dan Penyiapan Lahan Port and Wharf Construction Services, Dredging and Land Preparation	Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan Surabaya 60165 Telp: (031) 3283971 Fax: (031) 3283972 Email: info@ptapbs.com Web: www.ptapbs.com	PT Pelindo Marine Service: 93,00% PT Gerbang Sarana Utama: 7,00%	2014	Beroperasi Operational	Rp586.746.542.948
13	PT Berkah Multi Cargo	Usaha Logistik Multimoda: -Solusi Rantai Pasok Logistik -Angkutan Multimoda -Petikemas -Pengelolaan Pergudangan -Project *Cargo Handling* -Kepabeanan Angkutan Multimoda. Multimodal Logistics Business: - Supply Chain Logistics Solutions - Multimodal Transport - Containers - Warehousing Management - Project Cargo Handling - Multimodal Transport Customs.	Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan Surabaya 60165 Telp: (031) 3282271 Email: info@bmclogistic.co.id Web: www.pelindologistics.co.id	PT Pelindo Marine Service: 99,80% Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,20%	2017	Beroperasi Operational	Rp59.817.940.676
14	PT Tanjung Emas Daya Sejahtera	Pengelolaan Jasa *Tally* Tally Service Management	Terminal Berlian Jl. Prapat Kurung Utara, Surabaya, 60165 Telp: (085331237838) Email: tu@teds.co.id Web: www.teds.co.id	PT Pelindo Daya Sejahtera: 99,00% Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,00%	2014	Beroperasi Operational	Rp21.421.497.481

ENTITAS CICIT

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No..	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
1	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Badan Usaha Jalan Tol Toll Road Business Entity	Legalitas Domisili: Waskita Rajawali Tower Lantai 7 Jl. Mayor Jendral M. T. Haryono Kav. 12-13, Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13330 Alamat Korespondensi: Tamansari Hive Office Building Lantai 6 Unit B Jl. Mayor Jenderal D. I. Panjaitan Kav. 2A, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13310. Telp: (021) 2286 4760 Fax: (021) 2286 4761 Email: ctptollways@gmail.com Web: www.ctptollways.co.id	PT Akses Pelabuhan Indonesia – 100%	2021	Beroperasi Operational	Rp10.412.347.000.000

PERUSAHAAN ASOSIASI / ASSOCIATED COMPANIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
1	PT Jakarta International Container Terminal	Pelayanan Jasa Terminal Bongkar Muat Barang dan Petikemas serta Kegiatan yang Berhubungan dengan Konsolidasi dan Distribusi Barang Terminal Services for Loading and Unloading Goods and Containers and Activities related to the Consolidation and Distribution of Goods	Jl. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung-Priok Jakarta 14310 Telp: (021) 80678100 Faks: (021) 80678111 Email: corsec@jict.co.id Web: www.jict.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) : 48,90% Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd.: 51,00% Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 0,10%	1999	Beroperasi Operational	Rp17.012.274.582.999
2	PT Pelabuhan Patimban Internasional	Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Pelabuhan Patimban, Terminal Kendaraan dan Terminal Petikemas Port Business Entity, Patimban Port Manager, Vehicle Terminal and Container Terminal	Menara Bank Mega, Lantai 24 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790 Telp: (021) 79175533 Fax: (021) 79173300	PT Terminal Petikemas Surabaya: 10,00% PT CT Corp Infrastruktur Indonesia: 32,00% PT Indika Logistics and Support Services: 29,00% PT U Connectivity Services: 29,00%	2021	Belum Beroperasi Not yet Operational	-
3	PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Kawasan Industri, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air dan Limbah, Informasi dan Komunikasi Kawasan Industrial Estates, Electricity Procurement, Water and Waste Management, Regional Information and Communication	Jl. Raya Manyar KM. 11 – Manyar, Gresik Telp: (031) 98540999 Fax: (031) 98540998 Web: www.jiipe.com	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 40,00% PT Usaha Era Pratama Nusantara: 60,00%	Mulai Operasi secara Komersial pada tahun 2015	Beroperasi Operational	Rp7.112.198.591.473
4	PT Terminal Nilam Utara	Terminal dan Persewaan Tangki Curah Cair Liquid Bulk Tank Terminal and Rental	Jl. Nilam Utara No. 1, Pabean Cantian, Surabaya Telp: (031) 9909 4737 Web: www.tnu.co.id	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 40,00% PT Andahanesa Abadi: 60,00%	2018	Beroperasi Operational	Rp392.373.648.758
5	MKO Maspion Kendaraan Terminal Indonesia	Pelayanan Jasa Terminal Kendaraan Vehicle Terminal Services	Jl. Beta Kawasan Industri Maspion V, Manyarsidomukti, Manyar Sido Mukti, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik 61151 Telp: (031) 99006314, 39921490 Email: info@maspioncarterminal.co.id, mko.mtki@gmail.com Facebook: Maspion Car Terminal *Website*: www.maspioncarterminal.co.id	PT Indonesia Kendaraan Terminal: 45,00% PT Maspion: 55,00%	2015	Beroperasi Operational	Rp3.048.669.251
6	PT Prima Tangki Indonesia	Jasa Sewa Tangki Timbun Storage Tank Rental Services	Jl. Rencong No. 1B, Pahlawan Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan 20233 Jl. Pelabuhan No. 3 Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab. Batu bara 21257 Telp: (061) 4201 1470 Email: Commercial@Primatangki.co.id Web: www.Primatangki.co.id	PT Prima Indonesia Logistik: 20% Charleston Logistic Pte Ltd: 49% PT Tason Putra Mandiri: 22,80% Tuan Gaotama Setiawan: 8,20%	2019	Beroperasi Operational	Rp196.490.516.635
7	PT Jasamarga Bali Tol	Pengoperasian dan Pelayanan Jalan Tol Toll Road Operation and Service	Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 02, Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan Bali 80222	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): 13,86% PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 64,44% Pemerintah Provinsi Bali: 6,32% Pemerintah Kabupaten Badung: 6,32% PT Angkasa Pura I (Persero): 6,31% PT Adhi Karya (Persero) Tbk: 0,79% PT Hutama Karya (Persero): 0,79% PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero): 0,79% PT Wijaya Karya (Persero): 0,40%	2013	Beroperasi Operational	Rp1.827.452.099.164

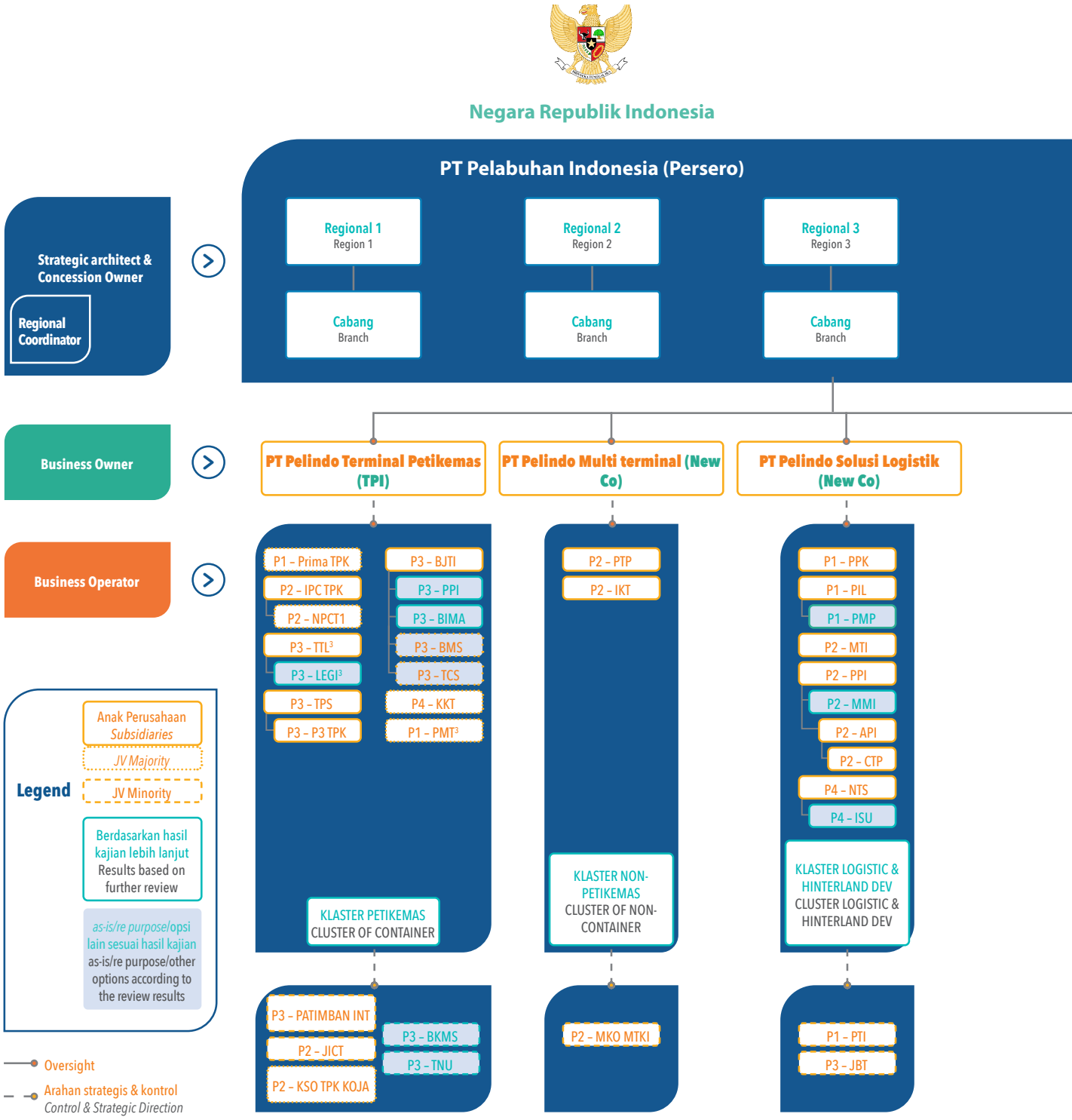
No..	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
8	PT Ambang Barito Nusapersada	Pengelolaan Alur Ambang Sungai Barito Barito River Threshold Management	Jl. Yos Sudarso No. 6 RT. 034/RW. 002 Telaga Biru, Banjarmasin Barat – Banjarmasin Telp: (0511) 4423345 Fax: (0511) 4423346 Web: www.ambapers.com	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): 30,00% PD Bangun Banua Kalimantan Selatan: 60,00%	2009	Beroperasi Operational	Rp133.854.826.759
9	PT Lamong Nusantara Gas	Bisnis Bidang Logistik Bidang Gas Logistics Business, in the Gas Sector	Kantor PGN Area Surabaya Lt. 4B Jl. Pemuda No. 56-58, Surabaya, 60271 Telp: (031) 5490555 Email: info@ptlng.co.id Web: www.ptlng.co.id	PT Pelindo Energi Logistik: 49,00% PT PGN LNG Indonesia: 51,00%	2019	Beroperasi Operational	Rp146.553.231.679
10	PT Rumah Sakit Pelabuhan	Pelayanan Kesehatan Health services	Jl. Kramat Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14260 Telp: (021) 4403026 Web: www.rspelabuhan.com	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) : 32,88% Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 0,12% PT Pertamina Bina Medika – IHC: 67,00%	1999	Beroperasi Operational	Rp720.922.941.504
11	PT Pelindo Husada Citra	Pelayanan Kesehatan Health Services	Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Tanjung Perak - Surabaya Telp: (031) 329 4801-3 Fax: (031) 329 4808 Web: www.phc.co.id	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): 35,24% PT Pertamina Bina Medika: 74,40% Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,41%	1999	Beroperasi Operational	Rp442.917.558.902
12	PT Prima Citra Nutrindo	Jasaboga Catering Services	Jl. Perak Barat No. 55, Surabaya Telp: (031) 99018755 Web: www.pcn-food.com	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 30,00% PT Pelindo Husada Citra: 70,00%	2016	Beroperasi Operational	Rp12.293.540.785

PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA / JOINT VENTURE COMPANY

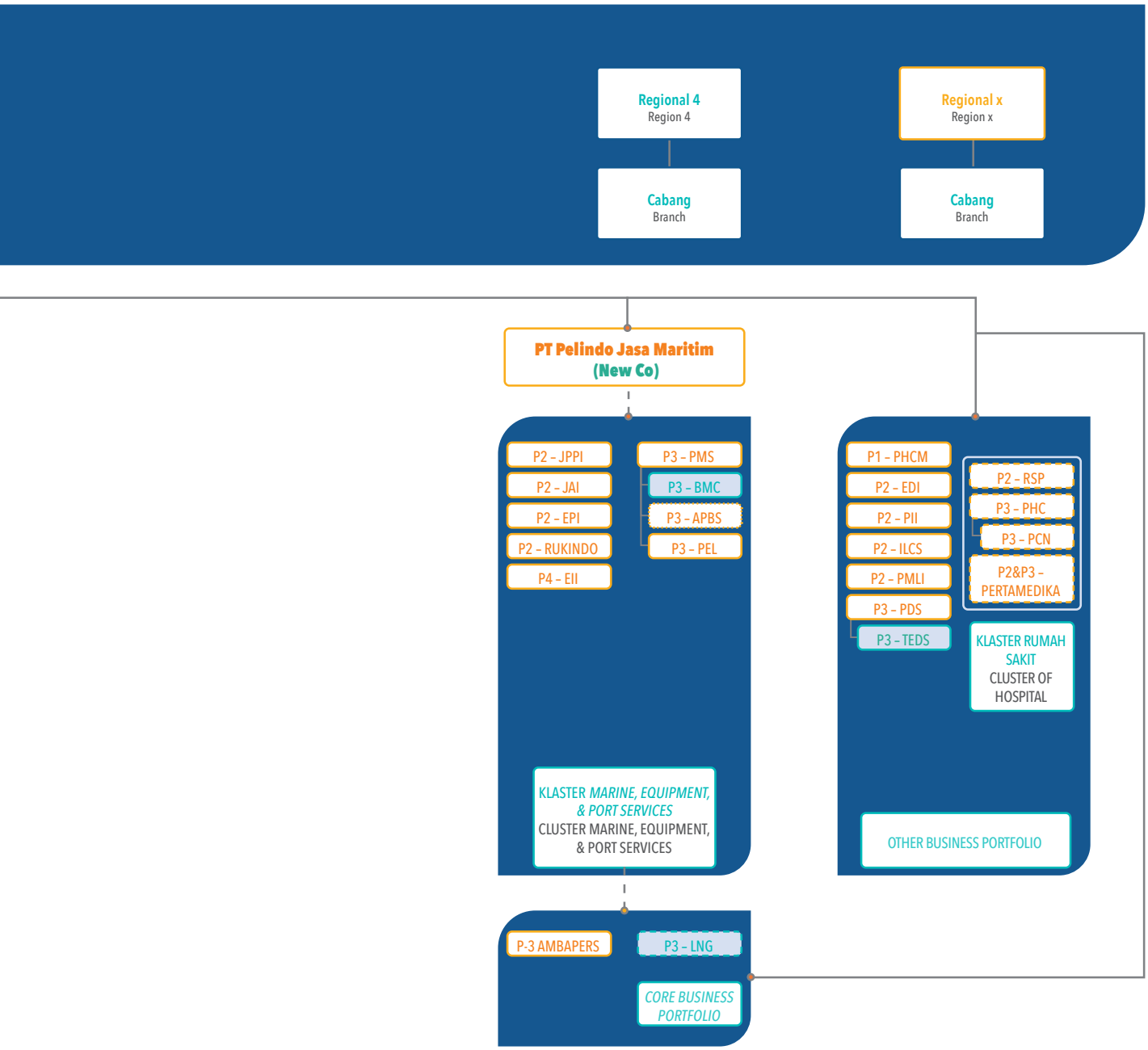
No.	Nama Name	Bidang Usaha Field of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operation	Status Status	Total Aset Total Assets
1`	KSO Terminal Petikemas Koja	Layanan Bongkar Muat dan Penumpukan Petikemas Loading and Unloading Services and Container Stacking	Jl. Digul No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14210 Telp: (021) 4374142 Fax: (021) 437-4150 Web: www.tpkkoja.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 54,91% PT Hutchison Port Indonesia: 45,09%	1998	Beroperasi Operational	Rp6.632.352.081.815

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE



Per 31 Desember 2021, Pelindo tidak memiliki *Special Purpose Vehicle* (SPV).
As of December 31, 2021, Pelindo does not have a Special Purpose Vehicle (SPV).


Regional 4
Region 4
Cabang
Branch
Regional x
Region x
Cabang
Branch
PT Pelindo Jasa Maritim
(New Co)
P2 - JPPI
P2 - JAI
P2 - EPI
P2 - RUKINDO
P4 - EII
P3 - PMS
P3 - BMC
P3 - APBS
P3 - PEL
KLASTER MARINE, EQUIPMENT, & PORT SERVICES
CLUSTER MARINE, EQUIPMENT, & PORT SERVICES
P1 - PHCM
P2 - EDI
P2 - PII
P2 - ILCS
P2 - PMLI
P3 - PDS
P3 - TEDS
P2 - RSP
P3 - PHC
P3 - PCN
P2&P3 - PERTAMEDIKA
KLASTER RUMAH SAKIT
CLUSTER OF HOSPITAL
OTHER BUSINESS PORTFOLIO
P-3 AMBAPERS
P3 - LNG
CORE BUSINESS PORTFOLIO

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) per 31 Desember 2021 belum mencatatkan saham di Bursa Efek. Dengan demikian tidak terdapat informasi tentang tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi, dan nama bursa tempat saham Perseroan dicatatkan.

SHARE ISSUANCE CHRONOLOGY

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as of December 31, 2021 has not listed its shares on any Stock Exchange. Therefore, there is no information to report on corporate actions, share offering price for each corporate action, number of shares listed after each corporate action, and the name of the stock exchange where the Company's shares are listed.

Kronologis pendirian dan penerbitan saham Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

The Company's shares issuance chronology can be explained as follows:

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/ Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Endorsement	Keterangan Description
1	PP No. 57 Tahun 1991 PP No. 57 Year 1991	-	-	Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Perum Pelabuhan II changed its status to become a Limited Liability Company (Persero)
2	Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 1992 Deed of Establishment No. 3 dated December 1, 1992	Imas Fatimah, S.H.	Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993 Republic of Indonesia Minister of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 dated June 17, 1993	Pendirian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Establishment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
3	Akta No. 4 tanggal 5 Mei 1998 Deed No. 4 dated May 5, 1998	Imas Fatimah, S.H.	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. C2-17612.HT.01.04.TH.98 tanggal 6 Oktober 1998 Minister of Law and Human Rights No. C2-17612.HT.01.04.TH.98 dated October 6, 1998	Perubahan Anggaran Dasar Amendments to the Articles of Association
4	Akta No. 2 tanggal 15 Agustus 2008 Deed No. 2 dated August 15, 2008	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H.	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-80894.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 Minister of Law and Human Rights No. AHU-80894.AH.01.02.Year 2008 dated November 3, 2008	Perubahan Anggaran Dasar Telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 Desember 2008 Amendments to the Articles of Association Announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated December 12, 2008
5	Akta No. 3 tanggal 30 Juli 2009 Deed No. 3 dated July 30, 2009	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H.	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-04026 tanggal 16 Februari 2010 Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.10-04026 dated February 16, 2010	Perubahan Anggaran Dasar Amendments to the Articles of Association
6	Akta No. 12 tanggal 21 September 2012 Deed No. 12 dated September 21, 2012	Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Pua, S.H., M.Kn.	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-35061 tanggal 27 September 2012 Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.10-35061 dated September 27, 2012	Perubahan Anggaran Dasar terakhir Last amendments to the Articles of Association

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/ Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Endorsement	Keterangan Description
7	Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Deed No. 03 dated August 02, 2012	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.		Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013 The addition to the Company's issued and fully paid up capital was notified to the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights through Letter of Acceptance of Notification No. AHU-AH.01.10-38219 September 12, 2013
8	Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Deed No. 03 dated August 02, 2012	-	-	• Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000.000 • Dengan adanya penambahan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.017.611.000.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.000 • The Government of the Republic of Indonesia, which in this case was represented by the Minister of State-Owned Enterprises, increased its capital participation in the Company to Rp426,418,000,000 • With the additional capital from the Government of the Republic of Indonesia, the issued/paid-up capital of the Company increased from Rp1,017,611,000,000 to Rp1,444,029,000,000
9	Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019 Deed No. 09 dated August 21, 2019	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.	-	Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Changes in Type of Shares and Changes in the Articles of Association
10	Akta No. 06 tanggal 1 Oktober 2021 Deed No. 06 dated October 1, 2021	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053926.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021 Minister of Law and Human Rights No. AHU-0053926.AH.01.0 dated October 1, 2021	Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Modal yang semula sebesar Rp1.444.029.000.000 menjadi Rp8.475.067.000.000 Amendment to the Articles of Association, and Capital Increase from Rp1,444,029,000,000 to Rp8,475,067,000,000
11	Akta No. 07 tanggal 1 Oktober 2021 Deed No. 07 dated October 1, 2021	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021 Minister of Law and Human Rights No. AHU-0053936.AH.01.02 dated October 1, 2021	Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan Change of Name, Change of Articles of Association and Company Logo

KRONOLOGI PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMASI OBLIGASI

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi
Bonds Issuance Chronology

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date Issued	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (miliar) Amount of Bonds (billion)	Harga Penawaran Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date
1	Obligasi Domestik (PIGN A) Domestic Bond (PIGN A)	21 Juni 2016 June 21, 2016	3 Tahun 3 years	IDR	50.000	100%	21 Juni 2019 June 21, 2019
2	Obligasi Domestik (PIGN B) Domestic Bond (PIGN B)	21 Juni 2016 June 21, 2016	5 Tahun 5 years	IDR	500.000	100%	21 Juni 2021 June 21, 2021
3	Obligasi Domestik (PIGN C) Domestic Bond (PIGN C)	21 Juni 2016 June 21, 2016	7 Tahun 7 years	IDR	400.000	100%	21 Juni 2023 June 21, 2023
4	Obligasi Domestik (PIGN D) Domestic Bond (PIGN D)	21 Juni 2016 June 21, 2016	10 Tahun 10 years	IDR	50.000	100%	21 Juni 2026 June 21, 2026
5	Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	10 Tahun 10 years	USD	1.100	98,99%	5 Mei 2025 May 5, 2025
6	Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	30 Tahun 30 years	USD	500	98,17%	5 Mei 2025 May 5, 2025
7	Obligasi Global Global Bond	2 Mei 2018 May 2, 2018	5 Tahun 5 years	USD	500	98,90%	2 Mei 2023 May 2, 2023
8	Obligasi Global Global Bond	1 Oktober 2014 October 1, 2014	10 Tahun 10 years	USD	500	99,41%	1 Oktober 2024 October 1, 2024
9	Obligasi Domestik (PIKI A) Domestic Bond (PIKI A)	5 Juli 2018 July 5, 2018	5 Tahun 5 years	IDR	380.000	100%	5 Juli 2023 July 5, 2023
10	Obligasi Domestik (PIKI B) Domestic Bond (PIKI B)	5 Juli 2018 July 5, 2018	7 Tahun 7 years	IDR	1.820.000	100%	5 Juli 2025 July 5, 2025
11	Obligasi Domestik (PIKI C) Domestic Bond (PIKI C)	5 Juli 2018 July 5, 2018	10 Tahun 10 years	IDR	800.000	100%	5 Juli 2028 July 5, 2028

Seluruh obligasi Domestik Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Global Perseroan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX).

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2021, Pelindo belum menerbitkan sukuk.

OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2021, Pelindo belum menerbitkan obligasi konversi.

CHRONOLOGY OF BONDS, SUKUK AND/OR CONVERTIBLE BONDS ISSUANCE

INFORMATION ON BONDS

All of the Company's Domestic Bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange, and the Company's Global Bonds are listed on the Singapore Stock Exchange (SGX).

INFORMATION ON SUKUK

As of December 31, 2021, Pelindo has not issued sukuk.

CONVERTIBLE BONDS

As of December 31, 2021, Pelindo has not issued convertible bonds.

	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
			2021	2020	
	8,25%	Lunas Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
	9%	Lunas Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
	9,50%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
	9,75%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero
	4,25%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB-	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB-	The Bank of New york Mellon
	5,38%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB (Stable) S&P: BBB-(Negative)	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB (Stable) S&P: BBB-(Negative)	The Bank of New york Mellon!
	4,50%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB- (Stable) S&P: BBB-(Negative)	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB- (Stable) S&P: BBB-(Negative)	The Bank of New york Mellon
	4,88%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB- (Stable) S&P: BBB-(Negative)	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB- (Stable) S&P: BBB-(Negative)	The Bank of New york Mellon
	8,00%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero
	9,15%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero
	9,35%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Per 31 Desember 2021, Pelindo tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

ISSUANCE AND/OR OTHER SECURITIES LISTING CHRONOLOGY

As of December 31, 2021, Pelindo has no other sources of funding.

INFORMASI PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

ACCOUNTANT PUBLIC SERVICE INFORMATION (AP) AND ACCOUNTANT PUBLIC OFFICES (KAP)

Nama KAP KAP Name	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Jaringan Asosiasi Association Network	Ernst & Young
Alamat KAP KAP Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp: (021) 52895000 Fax: (021) 52894100 Email: Mochamad.D.Syachruna@id.ey.com Web: ey.com/id
Nama AP AP Name	Mochamad Dadang Syachruna
Periode Penugasan Assignment Period	1 Oktober 2021 – 31 Desember 2021 October 1, 2021 – December 31, 2021
Jasa yang Diberikan Services Provided	Melaksanakan audit umum/*general audit* atas Laporan Keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Penilaian KPI, Laporan Keuangan PKBL, Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Laporan KPPK). General audit of PT Pelabuhan Indonesia consolidated Financial Statements, Performance Evaluation Reports, KPI Assessment Reports, PKBL Financial Reports, Activity Reports on the Implementation of Prudential Principles (KPPK Reports).
Fee Audit Audit Fee	Rp9.481.559.998
Fee Non Audit Non-Audit Fee	-

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND/OR PROFESSIONALS

Pemeringkat Efek Securities Rating	Fitch Ratings Singapore Pte Ltd. One Raffles Quay South Tower #22-11 Singapore 048583 Web: www.fitchratings.com
	Moody's Investors Service Singapore Pte. Ltd. 50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623 Web: http://www.moodys.com
	PEFINDO Equiy Tower 30th floor Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Web: www.pefindo.com

Kustodian Custodian	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building - Tower I, 5th *Floor* Jakarta 12190 - Indonesia Web:www.ksei.co.id
Wali Amanat Trustee	BNY Mellon One Temasek Avenue #04-01 Millenia Tower, Singapore 039192 Web: www.bnymellon.com
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Pusat Menara Bank BTN JL Gajah Mada No. I Jakarta Pusat 10130 Indonesia Web: www.btn.co.id
Notaris Notary	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Royal Palace Blok C/16 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A Jakarta Selatan Telp: (021) 8313356, 8313383 Fax: (021) 8313408 Email: nanda.fauz@gmail.com Web: - Jasa yang diberikan: Notarialisasi

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATION

PENGHARGAAN

AWARDS









Tanggal Date	Nama Penghargaan Award Name	Acara Event	Penyelenggara Organizer
31 Maret 2021 March 31, 2021	*Bronze Winner* Kategori *Corporate* PR Bronze Winner Corporate PR Category	PR Indonesia Award PR Indonesia Award	PR Indonesia PR Indonesia
8 April 2021 April 8, 2021	Juara III Kategori Inovasi dan Teknologi Third Place in the Innovation and Technology Category	Anugerah BUMN Award BUMN Award	BUMN Track BUMN Track
22 April 2021 April 22, 2021	*Excellence in Public Relations Practice in Indonesia* Excellence in Public Relations Practice in Indonesia	Corporate Branding PR Awards 2021 Corporate Branding PR Awards 2021	The Iconomics The Iconomics
22 April 2021 April 22, 2021	Arif Suhartono sebagai *Top Leader on CSR Commitment* 2021 Arif Suhartono as Top Leader on CSR Commitment 2021	Top CSR Awards 2021 Top CSR Awards 2021	Top Business Top Business
22 April 2021 April 22, 2021	*# Star 4* # Star 4	Top CSR Awards 2021 Top CSR Awards 2021	Top Business Top Business
17 Agustus 2021 August 17, 2021	*# Star 4* # Star 4	Top GRC Awards 2021 Top GRC Awards 2021	Top Business Top Business
17 Agustus 2021 August 17, 2021	Arif Suhartono sebagai *The Most Committed GRC Leader* Arif Suhartono as The Most Committed GRC Leader	Top GRC Awards 2021 Top GRC Awards 2021	Top Business Top Business
17 September 2021 September 17, 2021	AMI #3 Kategori BUMN Non Tbk Terpopuler di Media Digital 2021 AMI #3 BUMN Non Tbk Most Popular in Media Digital 2021 Category	Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2021 Humas Indonesia (AHI) 2021 Awards	PR Indonesia Group/Humas Indonesia PR Indonesia Group/Humas Indonesia
7 Oktober 2021 October 7, 2021	*# Star 4* # Star 4	Top GRC Awards 2021 Top GRC Awards 2021	Top Business Top Business
7 Oktober 2021 October 7, 2021	Arif Suhartono sebagai *The Most Commited GRC Leader* Arif Suhartono sebagai The Most Commited GRC Leader	TOP GRC Award TOP GRC Award	Top Business Top Business

Tanggal Date	Nama Penghargaan Award Name	Acara Event	Penyelenggara Organizer
12 Oktober 2021 October 12, 2021	BUMN *corporate* PR *Strategy* Kategori *Preparing for The Upcoming Growth with Stronger Reputation* BUMN corporate PR Strategy Kategori Preparing for The Upcoming Growth with Stronger Reputation	3rd BUMN Corporate Brand Awards 2021 3rd BUMN Corporate Brand Awards 2021	ICONOMICS ICONOMICS
24 November 2021 November 24, 2021	*Excellent Financial Performance of Indonesia - Integrating Port Corporations to Increase Effectiveness and Efficiency (Category: Logistics Service Industry) Better* Excellent Financial Performance of Indonesia - Integrating Port Corporations to Increase Effectiveness and Efficiency (Category: Logistics Service Industry) Better	Best BUMN Awards 2021 Building Back Best BUMN Awards 2021 Building Back	Warta Berita Warta Berita

SERTIFIKASI

CERTIFICATION





Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	TUV NORD INDONESIA	Regional 1	Kantor Pusat Regional I Regional Headquarters I	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
			Tanjung Pinang		
			Pekanbaru		
			Gunung Sitoli		
			Belawan		
			Tembilahan		
			Kuala Tanjung		
			Batam		
			TPK Belawan		
			Tanjung Balai Karimun		
			Tanjung Balai Asahan		
			Sibolga		
			Sungai Pakning		







Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	SUCOFINDO	Regional 2	Banten	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
			Bengkulu		
			Cirebon		
			Jambi		
			Palembang		
			Pangkal Balam		
			Panjang		
			Pontianak		
			Sunda Kelapa		
			Tanjung Pandan		
			Tanjung Priok		
			Teluk Bayur		
			Kantor Pusat Regional II		
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	TUV RHEINLAND	Regional 3	Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Nilam Mirah Tanjung Perak Port Nilam Mirah Terminal	21 Februari 2019 February 21, 2019	09 Februari 2022 February 9, 2022
			Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Jamrud Tanjung Perak Harbor Jamrud Terminal		
			Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Kalimas Tanjung Perak Port Kalimas Terminal		
			Pelabuhan Gresik Gresik Harbor		

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
			Pelabuhan Tanjung Tembaga termasuk Pelb. Panarukan & Pelb. Pasuruan Tanjung Copper Port including Pelb. Panarukan & Pelb. Pasuruan		
			Pelabuhan Kalianget Kalianget Harbor		
			Pelabuhan Banjarmasin Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Harbor Trisakti Harbor		
			Terminal Petikemas Banjarmasin Banjarmasin Container Terminal		
			Pelabuhan Kotabaru Kotabaru Harbor		
			Pelabuhan Bagendang Bagendang Harbor		
			Pelabuhan Bumiharjo Bumiharjo Harbor		
			Pelabuhan Kumai Kumai Harbor		
			Pelabuhan Sampit Sampit Harbor		
			Pelabuhan Batulicin Batulicin Harbor		
			Pelabuhan Tanjung Emas Tanjung Emas Harbor		
			Terminal Petikemas Semarang Semarang Petikemas Terminal		
			Pelabuhan Tanjung Intan Tanjung Intan Harbor		
			Pelabuhan Benoa Benoa Harbor		
			Pelabuhan Tenau Kupang Kupang Tenau Harbor		
			Pelabuhan Lembar Lembar Harbor		
			Pelabuhan Tanjung Wangi Tanjung Wangi Harbor		
			Pelabuhan Bima Bima Harbor		
			Pelabuhan Celukan Bawang Celukan Bawang Harbor		
			Pelabuhan Maumere Maumere Harbor		
			Kantor Pusat Regional III Regional Headquarters III		
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Tarakan	27 Februari 2020 27 February 2020	26 Februari 2023 February 26, 2023
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Gorontalo	25 Januari 2020 January 25, 2020	24 Januari 2023 January 24, 2023







Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Ambon	22 Mei 2018 May 22, 2018	21 Mei 2021 May 21, 2021
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Parepare	8 November 2019 November 8, 2019	7 November 2022 November 7, 2022
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Fakfak	1 September 2020 September 1, 2020	31 Agustus 2023 August 31, 2023
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Manokwari	13 Januari 2020 January 13, 2020	12 Januari 2023 January 12, 2023
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Samarinda	7 Juli 2018 July 7, 2018	6 Juli 2024 July 6, 2024
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Makassar New Port	8 November 2021 November 8, 2021	7 November 2024 November 7, 2024
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Balikpapan	6 Oktober 2018 October 6, 2018	6 Oktober 2024 October 6, 2024

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Biak	14 Januari 2014 January 14, 2014	13 Januari 2023 January 13, 2023
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Ternate	30 Desember 2013 December 30, 2013	29 Desember 2022 December 29, 2022
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Makassar	29 Desember 2018 December 29, 2018	28 Desember 2021 December 28, 2021
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Jayapura	8 Agustus 2018 August 8, 2018	7 Agustus 2021 August 7, 2021
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Merauke	10 Januari 2019 January 10, 2019	9 Januari 2022 January 9, 2022
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Sorong	16 Januari 2020 January 16, 2020	15 Januari 2023 January 15, 2023
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	TPK Bitung	30 Agustus 2017 August 30, 2017	29 Agustus 2023 August 29, 2023
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Kendari	11 Desember 2019 December 11, 2019	10 Desember 2022 December 10, 2022
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Pantoloan	6 Juni 2018 June 6, 2018	5 Juni 2021 June 5, 2021
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	TPK Makassar	27 Oktober 2018 October 27, 2018	26 Oktober 2021 October 26, 2021
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Bitung	30 Agustus 2020 August 30, 2020	29 Agustus 2023 August 29, 2023

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Nunukan	25 September 2020 September 25, 2020	24 September 2023 September 24, 2023
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	TUV NORD INDONESIA	Regional 1	Dumai	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
			Malahayati		
			Lhokseumawe		
			Tanjung Pinang		
			Pekanbaru		
			Belawan		
			TPK Belawan		
			Tanjung Balai Karimun		
			Tanjung Balai Asahan		
			Sibolga		
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	TUV NORD INDONESIA	Regional 2	Tanjung Priok	31 Agustus 2018 August 31, 2018	30 Agustus 2021 August 30, 2021
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	TUV NORD INDONESIA	Regional 2	Kantor Pusat Regional II Regional Headquarters II		28 Mei 2022 May 28, 2022

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	TUV RHEINLAND	Regional 3	Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Nilam Mirah Tanjung Perak Port Nilam Mirah Terminal Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Jamrud Tanjung Perak Harbor Jamrud Terminal Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Kalimas Tanjung Perak Port Kalimas Terminal Pelabuhan Gresik Gresik Harbor Pelabuhan Banjarmasin Banjarmasin Harbor Pelabuhan Trisakti Trisakti Harbor Terminal Petikemas Petikemas Terminal Terminal Banjarmasin Banjarmasin Container Terminal Pelabuhan Kotabaru Kotabaru Harbor Pelabuhan Tanjung Emas Tanjung Emas Harbor Terminal Petikemas Semarang Semarang Container Terminal Pelabuhan Tanjung Intan Tanjung Intan Harbor Pelabuhan Benoa Benoa Harbor Pelabuhan Tenau Kupang Kupang Tenau Harbor Kantor Pusat Regional III Regional Headquarters III	21 Februari 2019 February 21, 2019	09 Februari 2022 February 9, 2022
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	TUV RHEINLAND	Regional 3	Pelabuhan Bagendang Bagendang Harbor	23 April 2021 April 23, 2021	22 April 2024 April 22, 2024
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Ambon	28 November 2002 November 28, 2002	27 November 2023 November 27, 2023
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Makassar New Port	5 November 2021 November 5, 2021	4 November 2024 November 4, 2024

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Balikpapan	4 Oktober 2018 October 4, 2018	4 Oktober 2024 October 4, 2024
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Makassar	20 Desember 2018 December 20, 2018	19 Desember 2021 December 19, 2021
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Jayapura	15 Desember 2020 December 15, 2020	14 Desember 2023 December 14, 2023
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Sorong	30 Januari 2019 January 30, 2019	29 Januari 2022 January 29, 2022
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	TPK Bitung	22 Desember 2018 December 22, 2018	21 Desember 2021 December 21, 2021
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	TPK Makassar	17 Desember 2018 December 17, 2018	16 Desember 2021 December 16, 2021
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Bitung	29 Januari 2021 January 29, 2021	28 Januari 2021 January 28, 2021
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	TUV NORD INDONESIA	Regional 1	Dumai	21 Desember 2020 December 21, 2020	20 Desember 2023 December 20, 2023
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	TUV NORD INDONESIA	Regional 1	Batam	30 November 2020 November 30, 2020	29 November 2023 November 29, 2023
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	SCK	Regional 2	Teluk Bayur	16 Agustus 2021 August 16, 2021	15 Agustus 2024 August 15, 2024
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	SUCOFINDO	Regional 2	Jambi	7 Januari 2021 January 7, 2021	7 Januari 2024 January 7, 2024
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Ambon	23 November 2020 November 23, 2020	22 November 2023 November 22, 2023
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Balikpapan	24 Desember 2018 December 24, 2018	23 Desember 2022 December 23, 2022

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Ternate	12 Maret 2020 March 12, 2020	11 Maret 2023 March 11, 2023
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Jayapura	3 Desember 2020 December 3, 2020	2 Desember 2023 December 2, 2023
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	TPK Makassar	21 Oktober 2020 October 21, 2020	20 Oktober 2023 October 20, 2023
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Bitung	7 Januari 2021 January 7, 2021	6 Januari 2024 January 6, 2024
ISO 37001:2016	TUV NORD INDONESIA	Regional 1	Kantor Pusat Regional I Regional Headquarters I	30 November 2020 November 30, 2020	29 November 2023 November 29, 2023
ISO 37001:2016	BSI	Regional 3	Kantor Pusat Regional III Regional Headquarters III	4 Agustus 2020 August 4, 2020	3 Agustus 2023 August 3, 2023
ISO 37001:2016	UNITED REGISTRAR OF SYSTEM	Regional 4	Makassar New Port	5 November 2021 November 5, 2021	4 November 2024 November 4, 2024
ISO 20000-1:2011	BSI	Regional 3	Kantor Pusat Regional III Regional Headquarters III	13 Juli 2018 July 13, 2018	29 September 2021 September 29, 2021
ISO 22301:2019	ICA	Regional 3	Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Nilam Tanjung Perak Port Nilam Terminal	14 Desember 2020 December 14, 2020	14 Desember 2023 December 14, 2023
			Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Jamrud Tanjung Perak Harbor Jamrud Terminal		
			Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Mirah Tanjung Perak Port Mirah Terminal		
			Terminal Petikemas Semarang Semarang Container Terminal		
			Pelabuhan Tanjung Emas Tanjung Emas Harbor		
			Terminal Petikemas Banjarmasin Banjarmasin Container Terminal		
			Pelabuhan Banjarmasin Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Harbor Trisakti Harbor		
			Pelabuhan Benoa Benoa Harbor		
			Kantor Pusat Regional III Regional Headquarters III		

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
ISO 27001:2013	BSI	Regional 3	Kantor Pusat Regional III	11 Maret 2018 March 11, 2018	10 Maret 2021 March 10, 2021
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaa Ministry of Manpower	Regional 1	Lhokseumawe	29 Maret 2019 March 29, 2019	29 Maret 2022 March 29, 2022
			Tanjung Pinang		
			Belawan		
			UGK		
			Malahayati		
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 1	Pekanbaru	29 Maret 2021 March 29, 2021	28 Maret 2024 March 28, 2024
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 1	Dumai	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
			Tembilahan		
			Batam		
			TPK Belawan		
			Tanjung Balai Karimun		
			Gunung Sitoli		
			Sei Pakning		
			Sibolga		
			Kuala Tanjung		
			Tanjung Balai Asahan		
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 2	Bengkulu	29 Maret 2019 March 29, 2019	28 Maret 2022 March 28, 2022
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 2	Sunda Kelapa	29 Maret 2019 March 29, 2019	29 Maret 2022 March 29, 2022
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 2	Pontianak		22 Maret 2022 March 22, 2022
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 2	Palembang	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaa Ministry of Manpower	Regional 2	Tanjung Priok	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023
			Panjang		
			Kantor Pusat Regional II Regional Headquarters II		
			Cirebon		
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 2	Jambi	22 April 2021 April 22, 2021	22 April 2024 April 22, 2024
			Banten		
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 3	Gresik	30 Juli 2018 July 30, 2018	30 Juli 2021 July 30, 2021
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 3	Tanjung Intan	29 Maret 2019 March 29, 2019	28 Maret 2022 March 28, 2022
			Tenau		
			Tanjung Emas		
			Benoa		
			Lembar		
			Kantor Pusat Regional III Regional Headquarters III		

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaa Ministry of Manpower	Regional 3	Pelabuhan Tanjung Perak Tanjung Perak Harbor	29 Maret 2019 March 29, 2019	29 Maret 2022 March 29, 2022
			Terminal Nilam Mirah		
			Terminal Jamrud		
			Terminal Kalimas		
			Tanjung Wangi		
			TPKS		
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 3	Maumere	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
			Bima		
			Trisakti		
			Celukan Bawang		
			Kumai		
			Bumiharjo		
			Bagendang		
			Tanjung Tembaga		
			Sampit		
			TPKB		
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 3	Kotabaru	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 4	Balikpapan	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
			Bitung		
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 4	TPK Makassar	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Regional 4	TPK Bitung	17 September 2020 September 17, 2020	
SMK3 PP NO 50 2012 Sistem Manajemen K3 OHS Management System	Disnaker Povinsi Kaltara Kaltara Provincial Manpower Office	Regional 4	Tarakan	1 Februari 2021 February 1, 2021	
SOCPF Keamanan Pelabuhan OHS Management System	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	Belawan	23 Maret 2018 March 23, 2018	11 Maret 2023 March 11, 2023
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	Tanjung Pinang; Pelabuhan Sei Kolak Kijang Tanjung Pinang; Sei Kolak Kijang harbor	23 Mei 2018 May 23, 2018	8 Mei 2023 May 8, 2023
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	Tanjung Pinang; Terminal Penumpang Pelabuhan Sri Bintan Pura	8 Oktober 2020 October 8, 2020	23 Mei 2024 May 23, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	TPK Belawan	18 Januari 2021 January 18, 2021	21 Desember 2025 December 21, 2025
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	Tanjung Balai Asahan	16 Maret 2021 March 16, 2021	16 Desember 2024 December 16, 2024

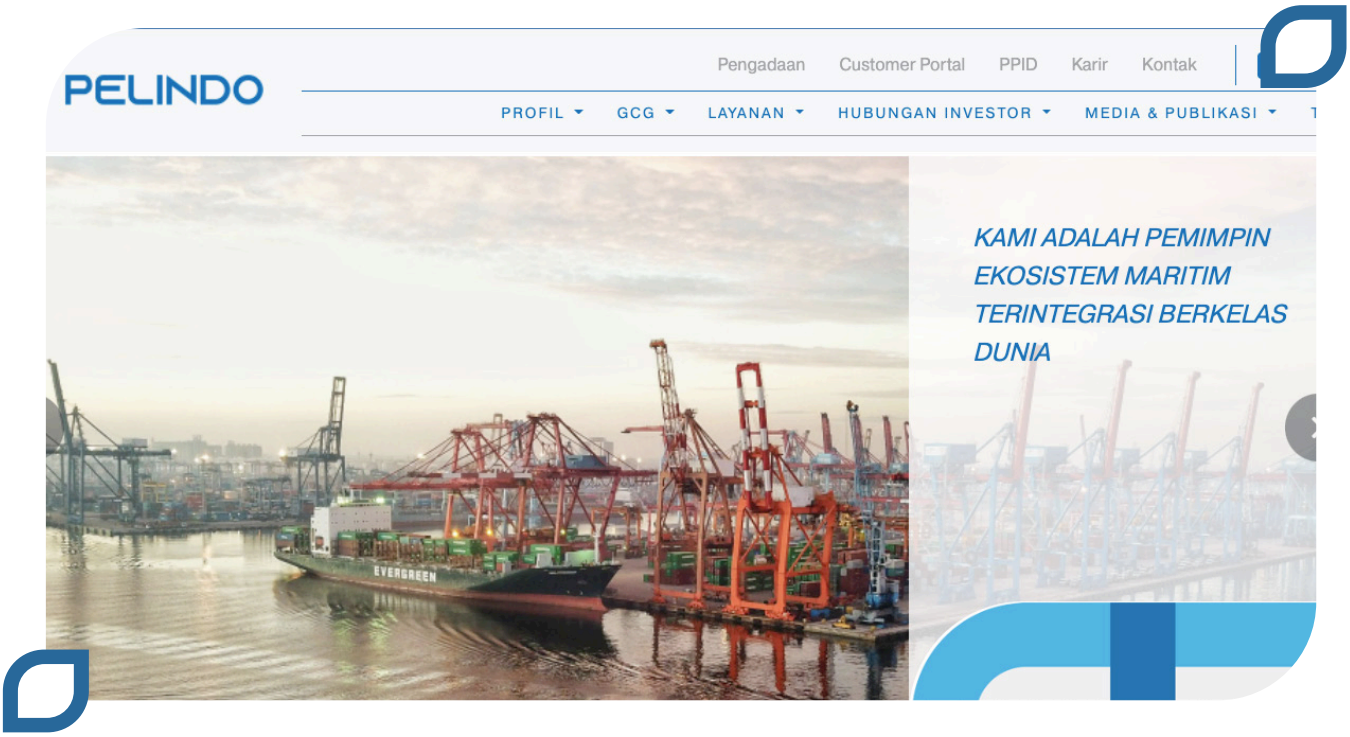
Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	Dumai	18 Maret 2021 March 18, 2021	18 Januari 2026 January 18, 2026
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	Tanjung Balai Karimun	20 September 2021 September 20, 2021	25 Agustus 2026 August 25, 2026
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	Sungai Pakning	27 September 2016 September 27, 2016	17 April 2021 April 17, 2021
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	Malahayati	6 Oktober 2021 October 6, 2021	6 September 2026 September 6, 2026
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	Pekanbaru	6 Oktober 2021 October 6, 2021	7 September 2026 September 7, 2026
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 1	Lhokseumawe	21 Oktober 2021 October 21, 2021	5 September 2026 September 5, 2026
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Pontianak		22 Maret 2022 March 22, 2022
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Tanjung Priok	31 Desember 2018 December 31, 2018	19 Desember 2023 December 19, 2023
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Panjang Kantor Pusat Regional II Regional Headquarters II	23 April 2019 April 23, 2019	13 Agustus 2024 August 13, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Tanjung Pandan	5 September 2019 September 5, 2019	28 Agustus 2024 August 28, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Cirebon		1 Oktober 2024 October 1, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Bengkulu	8 Oktober 2019 October 8, 2019	13 Oktober 2024 October 13, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Jambi	16 September 2019 September 16, 2019	19 Agustus 2024 August 19, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Banten	16 Desember 2019 December 16, 2019	2 November 2024 November 2, 2024

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Palembang	29 Desember 2019 December 29, 2019	20 Oktober 2024 October 20, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Teluk Bayur	17 Februari 2020 17 February 2020	05 April 2025 April 5, 2025
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 2	Pangkal Balam	30 November 2020 November 30, 2020	08 Juli 2025 July 8, 2025
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Tanjung Wangi	16 Maret 2018 March 16, 2018	20 Maret 2023 March 20, 2023
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Lembar	27 Maret 2018 March 27, 2018	27 Maret 2023 March 27, 2023
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Celukan Bawang	2 Mei 2018 May 2, 2018	25 April 2023 April 25, 2023
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Bagendang	19 November 2018 November 19, 2018	15 November 2023 November 15, 2023
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Gresik	10 Desember 2018 10 December 2018	03 Februari 2024 February 3, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Trisakti	16 Januari 2019 January 16, 2019	31 Desember 2024 December 31, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	TPKB	28 Januari 2019 January 28, 2019	23 Februari 2024 February 23, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Tenau	7 Oktober 2019 October 7, 2019	22 Agustus 2024 August 22, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Pelabuhan Tanjung Perak Tanjung Perak Harbor Terminal Jamrud	25 November 2019 November 25, 2019	24 November 2024 November 24, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Benoa	24 Maret 2020 March 24, 2020	21 Oktober 2024 October 21, 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Kotabaru	27 Januari 2021 January 27, 2021	28 Desember 2025 28 December 2025

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Issuer	Unit Wilayah Area Unit	Ruang Lingkup Scope	Tanggal Terbit Issue Date	Tanggal Habis Expiration Date
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Tanjung Intan	18 Maret 2021 March 18, 2021	17 Agustus 2021 August 17, 2021
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	TPKS	27 Agustus 2021 27 August 2021	27 Agustus 2024 27 August 2024
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 3	Tanjung Emas	17 September 2021 17 September 2021	23 Agustus 2026 August 23, 2026
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 4	Tarakan	10 Maret 2017 March 10, 2017	14 Februari 2022 February 14, 2022
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 4	Parepare	21 Juni 2017 June 21, 2017	31 Januari 2022 January 31, 2022
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 4	Jayapura	12 November 2017 November 12, 2017	21 November 2022 November 21, 2022
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 4	Balikpapan	21 Desember 2017 December 21, 2017	18 Desember 2022 December 18, 2022
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 4	Nunukan	2 Oktober 2018 October 2, 2018	14 Mei 2023 May 14, 2023
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 4	Pantoloan	11 Februari 2019 February 11, 2019	28 Agustus 2022 August 28, 2022
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 4	Makassar New Port	16 Februari 2020 February 16, 2020	16 Februari 2025 February 16, 2025
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 4	Gorontalo	8 Juni 2021 June 8, 2021	24 Juni 2025 June 24, 2025
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 4	Bitung	29 Juli 2021 July 29, 2021	28 Desember 2021 December 28, 2021
SOCPF Keamanan Pelabuhan Port Security SOCPF	Direktorat Jenderal Perhubungan Directorate General of Transportation	Regional 4	TPK Makassar	15 November 2021 November 15, 2021	2 Juni 2025 June 2, 2025


PELINDO
PELINDO
SAFETY
PELINDO
PELINDO

INFORMASI YANG TERSEDIA DI *WEBSITE*
INFORMATION AVAILABLE ON THE WEBSITE



Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Pelindo telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi dengan alamat www.pelindo.co.id. Informasi pada *website* Pelindo terdiri dari:

1. *Home*, berisi informasi terkait Berita Pelindo, Grup Pelindo, Wilayah Operasional Pelindo, alamat perusahaan, serta informasi media sosial perusahaan.
   a. Profil, berisi informasi terkait Tentang Pelindo; Visi, Misi dan nilai-nilai Perusahaan; Entitas Bisnis dan Grup Usaha; Manajemen yang berisi profil Dewan Komisaris dan Direksi; Sejarah Pelindo; Struktur Organisasi Pelindo; Organ Perusahaan; serta profil Komite-Komite.

   b. GCG, berisi informasi terkait Pedoman GCG; Organ GCG yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Hak Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Renumerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal; Kode Etik Bisnis; serta *Whistleblowing System*.

The information available on the website refers to OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies. Pelindo has established the Company's website at www.pelindo.co.id containing the following Information:

1. Home: information related to Pelindo News, Pelindo Group, Pelindo Operational Areas, company addresses, and company social media information.
   a. Profile: information related to Pelindo; Company Vision, Mission and Values; Business Entities and Business Groups; Management with the Board of Commissioners and Board of Directors profiles; History of Pelindo; Pelindo Organizational Structure; Company Organs; and profiles of the Committees.
   b. GCG: information related to GCG Guidelines; The GCG organs including the General Meeting of Shareholders (GMS), Shareholders' Rights, Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit; Code of Business Ethics; and Whistleblowing System.

c. Layanan, berisi informasi terkait Wilayah Kerja dan Kegiatan Utama Perseroan.
d. Hubungan Investor, berisi informasi terkait Laporan Tahunan selama 5 (lima) tahun yang dapat diunduh, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan, Investor Memo, Laporan RUPS, Obligasi, Peringkat Utang dan *Outlook*.
e. Media & Publikasi, berisi informasi terkait Kabar Terbaru dan Siaran Pers.
f. TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan).

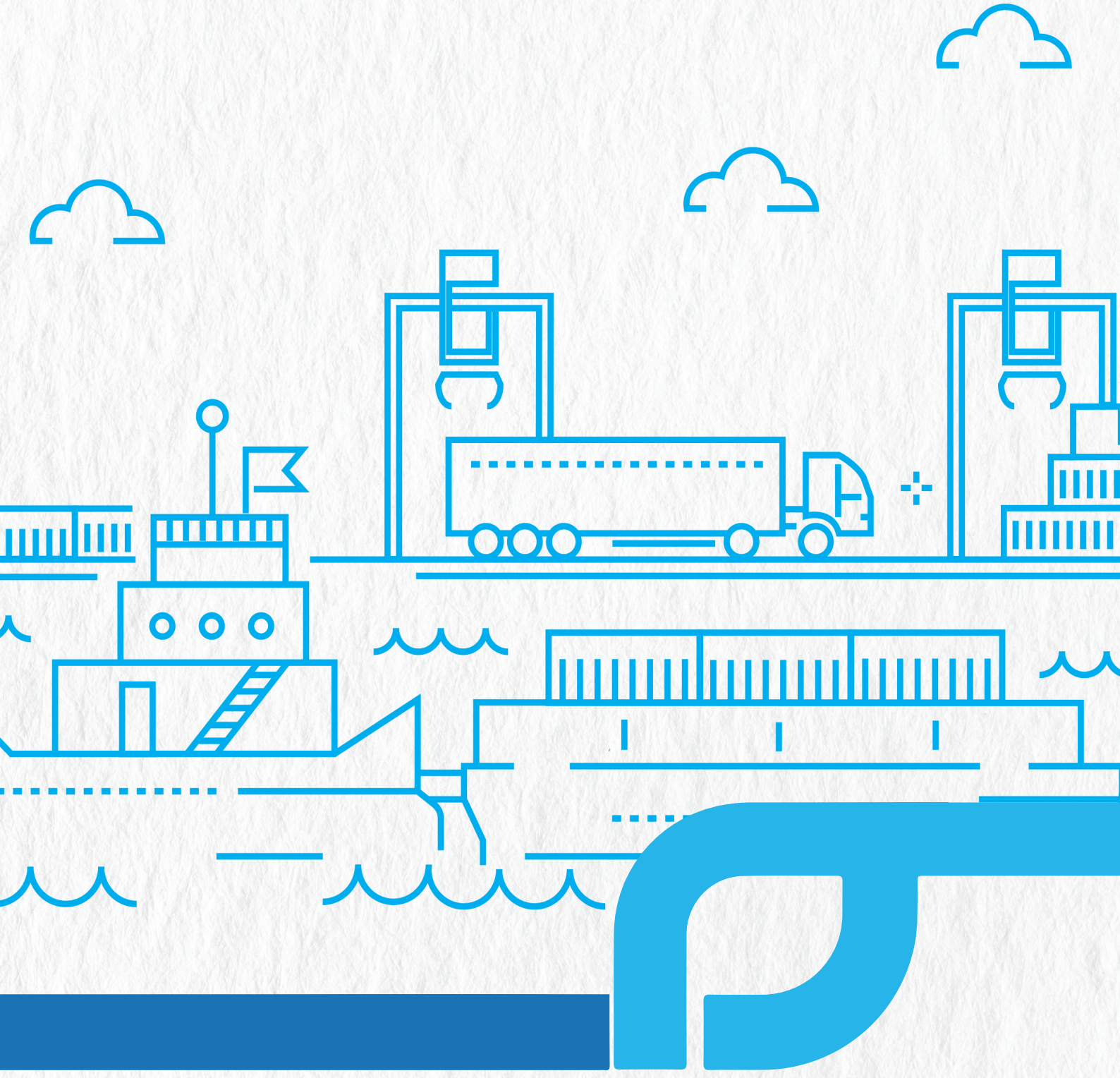
c. Services: information related to the Company's Work Areas and Main Activities.
d. Investor Relations: information related to the Annual Reports for the past 5 (five) years that can be downloaded, Sustainability Reports, Financial Reports, Investor Memo, GMS Reports, Bonds, Debt Ratings and Outlook.
e. Media and Publications: information related to Latest News and Press Releases.
f. SER (Social Environmental Responsibility).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis



04



TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC REVIEW



ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

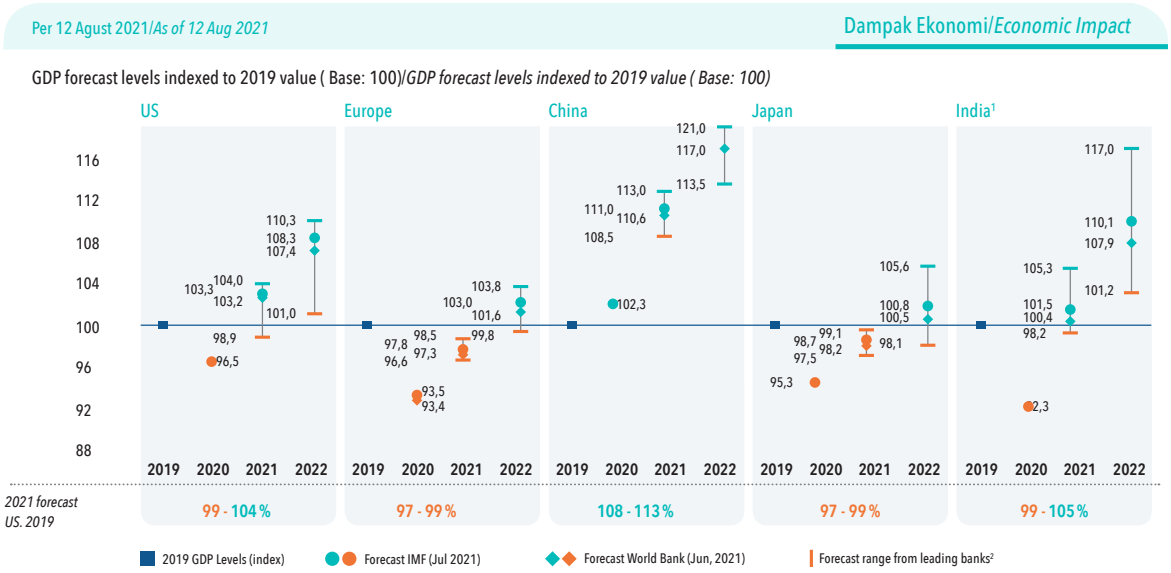
Berdasarkan observasi per minggu pertama Agustus 2021, secara global pemulihan terjadi pada tingkatan yang berbeda sesuai dengan durasi dari tingkat infeksi pertama/tahapan. Secara umum dapat dilihat empat tipe tahapan dalam pemulihan COVID-19 untuk setiap negara yaitu, *"continuation", "resurgence", "crush dan contain",* dan *"vaccinated".* Negara-negara pada tahap *"continuation"* masih dalam perjuangan menekan tingkat infeksi dan belum berhasil meratakan tingkat infeksi/*flattened curve* contohnya Argentina, Brasil. Sedangkan beberapa negara lain seperti Perancis, Spanyol dan Jerman tengah mengalami tahap *"resurgence".* Pada jenis tahapan ini transmisi telah berhasil ditekan sebelumnya, *"flattened"* namun kembali mengalami gelombang infeksi baru. Beberapa negara juga telah berhasil menekan tingkat infeksi, dan secara konsisten berhasil mencegah kenaikan infeksi dalam skala besar seperti Australia, Singapura, dan Korea Selatan. Negara-negara ini berada pada tahapan *"crush and contain".* Pada kategori keempat, transmisi masih mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi relatif menurun seiring dengan naiknya tingkat vaksinasi. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Israel tergolong dalam jenis tahapan ini yang disebut tahap *"vaccinated".*

GLOBAL ECONOMIC ANALYSIS

Based on observations made in the first week of August 2021, globally recovery occurred at different rates according to the duration of the first infection stage. In general, we saw four different stages in the recovery of COVID-19 for each country, namely, "continuation", "resurgence", "crush and contain", and "vaccinated". Countries at the "continuation" stage were still struggling to reduce infection rates and had not succeeded in leveling infection rates/flattened the curve e.g. Argentina, Brazil. Several other countries such as France, Spain and Germany were experiencing a "resurgence" stage. In this stage transmissions that had been successfully suppressed before, "flattened" again experienced a new wave of infections. Several countries also succeeded in reducing infection rates, and have consistently managed to prevent large-scale increases in infections such as Australia, Singapore, and South Korea. These countries were in the "crush and contain" stage. In the fourth category, transmissions are still increasing and decreasing, but decreasing as the vaccination rate increases. Countries such as United State of America, Britain, and Israel belong to this stage called the "vaccinated" stage.

Berdasarkan tren yang diamati, terutama upaya vaksinasi, diproyeksikan pemulihan ekonomi akan terjadi secara bertahap seiring dengan tingkat vaksinasi dan terjadinya *herd immunity*. Secara umum ekonomi global diperkirakan akan terus mengalami pemulihan secara positif dan mencapai level PDB 2019 antara periode 2021 dan 2022, berdasarkan proyeksi *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*. Sebagai contoh, Tiongkok sebagai negara yang mengalami pandemi COVID-19 paling awal sudah mengalami pemulihan ekonomi yang signifikan dan melampaui nilai PDB tahun 2019. Sedangkan negara lain seperti Amerika dan India diperkirakan akan mengalami pemulihan, melampaui nilai PDB tahun 2019, pada 2021-2022. Negara-negara Eropa dan Jepang diperkirakan akan mengalami pemulihan di 2022. Perbandingan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selain PDB, indikator lain seperti *Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), retail and arecreation mobility,* penjualan kendaraan penumpang, dan tingkat penjualan ritel juga menunjukkan tingkat pemulihan yang positif.

Based on the observed trends, especially the vaccination efforts, it is projected that economic recovery will occur gradually in line with vaccination rates and the occurrence of herd immunity. In general, global economies are expected to continue to recover positively and reach 2019 GDP levels between 2021 and 2022, based on projections by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. For example, China as the country that experienced the earliest COVID-19 pandemic experienced a significant economic recovery and exceeded the GDP value in 2019. Meanwhile, other countries such as America and India are expected to experience recovery, exceeding the 2019 GDP value in 2021-2022. European countries and Japan are expected to recover in 2022. A comparison can be seen below. In addition to GDP, other indicators such as the Manufacturing Purchasing Managers' Indeks (PMI), retail and creation mobility, passenger vehicle sales, and the level of retail sales also showed a positive rate of recovery.



Note: As of reports dated 05 June 2020 to 01 Mar 2021. YOY forecasted 2021 values are estimated actual GDP. 1 for India, forecast is for financial year, for other countries the forecast is for calendar year. 2 Range from forecast (where available) of JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America, Flich Solutions, Credit Suisse, Danske Bank, IMO Group, HSBC. Sources: Bloomberg, World Bank, IMF, BCD.

Gambar Proyeksi Pemulihan PDB Terhadap *Baseline* 2019
Sumber: Analisis BCG (Per 12 Agustus 2021)
Picture of GDP Recovery Projection Against 2019 Baseline
Source: BCG Analysis (As of 12 August 2021)

Kendati demikian, masih terdapat ketidakpastian mengenai pemulihan ekonomi global. Secara umum pemulihan kondisi ekonomi global dipengaruhi beberapa faktor terkait infeksi COVID-19: (1) peningkatan infeksi varian delta, (2) tingkat vaksinasi, (3) kemungkinan munculnya varian baru yang lebih berbahaya. Penyebaran varian delta telah diamati di berbagai negara dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Di beberapa negara dapat dilihat kenaikan tingkat penyebaran varian delta paska pelonggaran pembatasan sosial. Kenaikan infeksi juga menyebabkan gelombang infeksi baru untuk berbagai negara yang sebelumnya telah menunjukkan proyeksi pemulihan yang

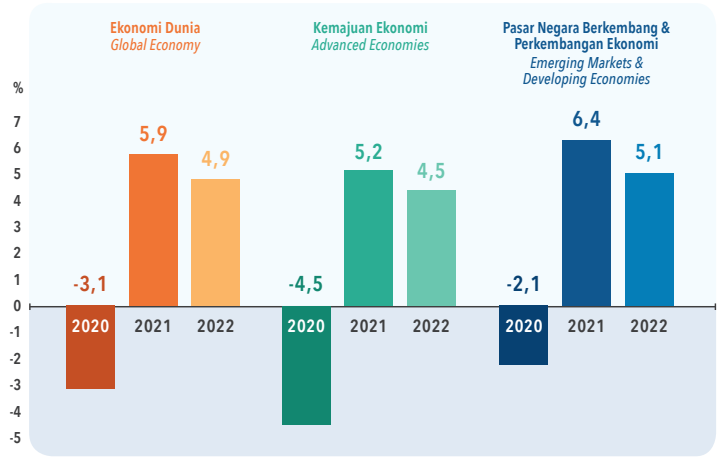
Nevertheless, there is still uncertainty concerning the global economic recovery. In general, global economic recovery is influenced by several factors related to COVID-19 infection: (1) increased infections of the delta variant, (2) vaccination rates, (3) the possibility of the emergence of new, more dangerous variants. The spread of the delta variant has been observed in many countries in the last few months. In some countries, we can see an increase in the spread of the delta variant after the easing of social restrictions. The rise in infections has also led to a new wave of infections in countries that previously showed a good recovery. So far the vaccines have been shown to help

baik. Sejauh ini vaksin telah terbukti membantu mengurangi tingkat transmisi virus, *hospitalization,* mengurangi fatalitas, dan juga meningkatkan kecepatan pemulihan pasien. Walaupun dampak dari vaksin bervariasi dari jenis vaksin dan juga kondisi individual, tetapi vaksinasi populasi merupakan usaha terus-menerus dari pemerintah masing-masing negara untuk menekan penyebaran virus. Kendati demikian, masih terdapat banyak hambatan dalam meningkatkan *uptake* vaksin baik dari aspek suplai, distribusi, hingga edukasi masyarakat. Selain itu, populasi yang tidak tervaksinasi dikhawatirkan akan menjadi tempat yang rentan untuk munculnya varian baru yang lebih berbahaya. Varian baru yang lebih berbahaya merupakan suatu faktor penting yang akan mengubah proyeksi pemulihan ekonomi global.

reduce the rate of virus transmission, hospitalization, reduced fatalities, and also increased the speed of patient recovery. Although the impact of vaccines varies dependent on vaccine type as well as an individual's condition, population vaccinations is an ongoing effort by the governments of each country to suppress the spread of the virus. However, there are still many obstacles in increasing vaccine uptake, both from the aspect of supply, distribution, and public education. In addition, the unvaccinated population is feared to be a vulnerable place for the emergence of new, more dangerous variants. A new, more dangerous variant is an important factor that will change the outlook for the global economic recovery.

Sementara pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini, tahun 2021 menjadi fase pemulihan dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan GDP Global berhasil mencapai angka 5,5% pada tahun 2021 (sumber: *World Bank*), setelah sebelumnya mengalami minus sebesar 3,4% pada tahun 2020. Pemulihan ini dikarenakan adanya perubahan baru pada kebiasaan masyarakat, pemerintah, maupun bisnis karena telah beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini. Pertumbuhan ini diperkirakan akan berlangsung pada tahun-tahun ke depan tetapi dengan angka pertumbuhan yang melandai hingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi global akan kembali pada proyeksi normal seperti sebelum terjadinya pandemi. Namun pemulihan ekonomi global yang terjadi di tahun 2021 diwarnai oleh dua isu yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kekhawatiran akan tingginya inflasi yang diakibatkan tidak seimbangnya *supply and demand*. Berdasarkan data diberikan oleh *World Economic Outlook* pada Oktober 2021, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada negara-negara di dunia bervariasi mulai dari 0 sampai 6% dengan beberapa negara tercatat masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Pada negara-negara yang berkembang atau *Emerging Markets and Developing Economies* (EMDE), berdasarkan data hasil proyeksi pada Oktober 2021, diperkirakan bertumbuh sebesar 6,4% pada 2021. Sedangkan pada negara maju atau *Advanced Economies* (AEs), diperkirakan bertumbuh sebesar 5,2%.

During the ongoing COVID-19 pandemic, 2021 entered into a recovery phase compared to 2020. The Global GDP growth reached 5.5% in 2021 (source: World Bank), after previously experiencing a drop of 3.4% in 2020. This recovery was the result of changes in the communities, Government, and business habits as they adapted to the pandemic conditions, and the recovery is expected to continue in the years ahead, with a gradual growth rate so that by the end of the pandemic the global economic growth will return to its previous position. However, the global economic recovery that occured in 2021 is marked by two issues, namely uneven economic growth and concerns over high inflation caused by an imbalance of supply and demand. Based on data provided by the World Economic Outlook in October 2021, the economic growth that occurred in countries in the world varied from 0 to 6% with several countries recorded still experiencing negative growth. In developing countries or Emerging Markets and Developing Economies (EMDE), based on projected data in October 2021, it is estimated to grow by 6.4% in 2021. While in developed countries or Advanced Economies (AEs), it is estimated to grow by 5. 2%.



Gambar Proyeksi Ekonomi Global Sumber: International Monetary Fund, Oktober 2021
Global Economic Projection Source: International Monetary Fund, October 2021

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

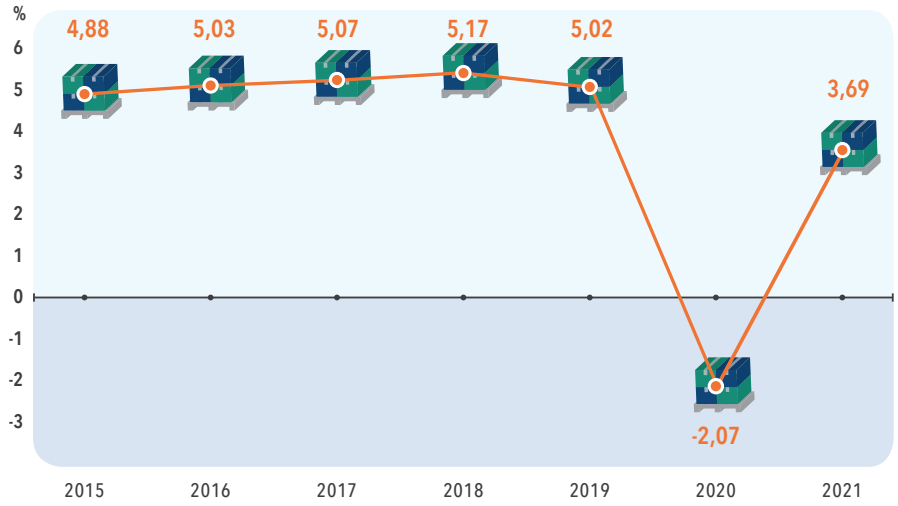
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

Tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan menetapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan fondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju.

NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS

GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)

2021 was an important period in accelerating the national economic recovery from the impact of the COVID-19 pandemic, as well as being a momentum time to continue and establish policy reforms to prepare a solid foundation to carry out economic transformation towards becoming a developed country.



Gambar Pertumbuhan PDB 2015 sampai 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th. XXV, 7 Februari 2022)
GDP growth 2015 to 2021
Source: Central Bureau of Statistics (Statistics Official Gazette No. 14/02/Th. XXV, February 7, 2022)

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69% (*Cumulative to Cumulative*/CtC), berbalik dari pertumbuhan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04%.

Based on data from the Central Statistics Agency, in 2021 the Indonesian economy grew by 3.69% (Cumulative to Cumulative/CtC), reversing from the growth in 2020 that saw a contraction of 2.07%. In terms of production, the highest growth occurred in health services and social activities at 10.46%. In terms of expenditure, the highest growth was achieved by the exports of goods and services at 24.04%.

Terhadap perekonomian nasional pada tahun 2021, Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar yaitu 57,89% dengan pertumbuhan 3,66%, diikuti Sumatra sebesar 21,70% dengan pertumbuhan 3,18%, Kalimantan sebesar 8,25% dengan pertumbuhan 3,18%, Sulawesi sebesar 6,89% dengan pertumbuhan 5,67%, kemudian Maluku dan Papua sebesar 2,49% dengan pertumbuhan 10,09%.

For the national economy in 2021, Java Island contributed the largest proportion with 57.89% or a growth of 3.66%, followed by Sumatra with 21.70% or a growth of 3.18%, Kalimantan with 8.25% or a growth of 3.18%, Sulawesi with 6.89% or a growth of 5.67%, then Maluku and Papua with 2.49% or a growth of 10.09%.

Sebagaimana di dalam Publikasi *"Indonesia Economic Prospects (IEP), December 2021: Green Horizon, Toward a High Growth and Low Carbon Economy"* oleh *World Bank* pada 16 Desember 2021 disampaikan bahwa perekonomian Indonesia cenderung terus mengalami pemulihan pada tahun 2021, walaupun adanya perlambatan akibat gelombang Delta COVID-19 antara bulan Juni hingga Agustus 2021. Setelah mengalami pertumbuhan sebesar 7,07% (*Year on Year*/YoY) pada kuartal kedua, pertumbuhan

In the "Indonesia Economic Prospects (IEP), December 2021: Green Horizon, Toward a High Growth and Low Carbon Economy" Publication by the World Bank on December 16, 2021, it stated that the Indonesian economy was likely to continue to recover in 2021, despite the slowdown due to the COVID-19 Delta wave between June and August 2021. After experiencing growth of 7.07% (Year on Year/YoY) in the second quarter, growth slowed in the third quarter to 3.51% (YoY). However, after successfully

melambat pada kuartal ketiga menjadi sebesar 3,51% (YoY). Namun setelah berhasil melewati fase kritis gelombang Delta, pertumbuhan kuartal keempat kembali meningkat menjadi 5,02% (YoY).

passing the critical phase of the Delta wave, the fourth quarter growth picked up again to 5.02% (YoY).

INFLASI

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0±1%. Inflasi IHK tahun 2021 adalah sebesar 1,87% (YoY), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK tahun 2020 sebesar 1,68% (YoY). Inflasi yang cukup rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. (Sumber: Siaran Pers BI No.24/2/DKom, 3 Januari 2022). Di tengah kekhawatiran akan tingginya inflasi secara global, rendahnya inflasi dalam negeri menunjukkan langkah-langkah dan kebijakan pemerintah yang cukup efektif.

INFLATION

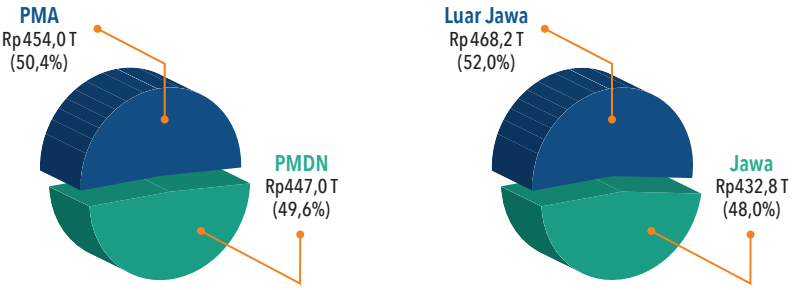
Consumer Price Index (CPI) inflation in 2021 remained low and below the target range of 3.0±1%. CPI inflation in 2021 was 1.87% (YoY), an increase compared 1.68% (YoY) in 2020. The low inflation in 2021 was influenced by weak domestic demand as a result of the COVID-19 pandemic, adequate supplies, and policy synergy between Bank Indonesia and the Government at the central and regional levels to maintain price stability. (Source: BI Press Release No.24/2/DKom, 3 January 2022). Amid concerns over high global inflation, low domestic inflation indicates that the Government's measures and policies have been effective.

INVESTASI

Realisasi Investasi sepanjang tahun 2021 adalah sebesar Rp901 triliun. Capaian realisasi investasi adalah sebesar 104,8% dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Rp858,5 triliun, dan sebesar 100,1% dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo yaitu Rp900 triliun. Realisasi investasi tersebut telah menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja sepanjang Januari ke Desember 2021.

INVESTMENTS

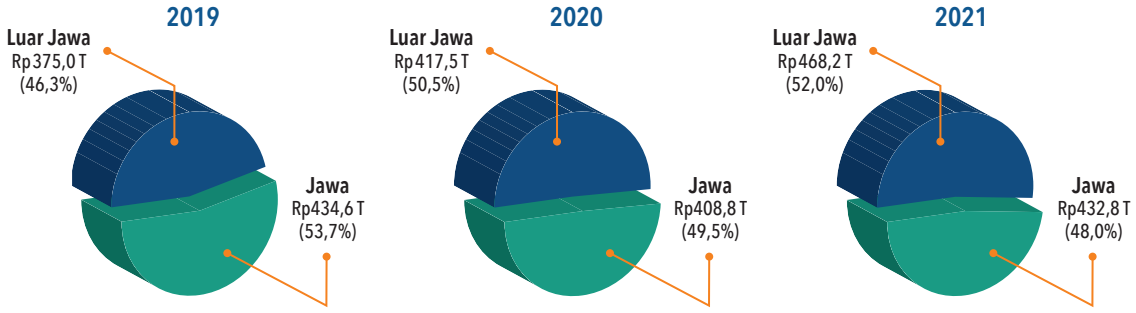
Investments in 2021 amounted to Rp901 trillion, 104.8% of the Medium Term Development Plan (RPJMN) target of Rp858.5 trillion, and 100.1% of the target of Rp900 trillion set by President Joko Widodo. This investment was felt by 1.2 million workers from January to December 2021.



Gambar Sebaran Realisasi Investasi 2021
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Investment Distribution 2021
Source: Investment Coordinating Board (BKPM)

Realisasi investasi tahun 2021 terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp447 triliun atau setara 49,6% dari total realisasi investasi dan Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI) senilai Rp454 triliun, sama dengan 50,4% dari total realisasi investasi. Jika ditinjau dari sebaran terhadap wilayah, realisasi investasi di Jawa adalah senilai Rp432,8 triliun atau setara 48,0% total investasi, sedangkan di luar Jawa senilai Rp468,2 triliun atau setara 52,0% total investasi. Jika melihat tren realisasi investasi di Jawa dan Luar Jawa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, maka dapat dilihat Pemerintah terus meningkatkan porsi investasi di Luar Jawa untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Investments in 2021 consisted of Rp447 trillion in domestic investments (PMDN), or 49.6% of the total investments, and Foreign Direct Investment (FDI) of Rp454 trillion, equal to 50.4% of the total investments. If viewed by region, the investments in Java of Rp432.8 trillion accounted for 48.0% of the total investments, with outside Java at Rp468.2 trillion accounting for 52.0% of the total investments. If you look at investment realization trend in Java and Outside Java from 2019 to 2021, it shows that the Government has continued to increase the portion of investment outside Java to encourage equitable distribution of national economic growth.



Gambar Tren Sebaran Wilayah Realisasi Investasi 2021
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Investment Area Distribution Trend 2021
Source: Investment Coordinating Board (BKPM)

KINERJA PERDAGANGAN

Kinerja ekspor dan impor Indonesia tahun 2021 mencatatkan performa yang positif dengan surplus sebesar USD35,34 miliar. Capaian kinerja ekspor tahun 2021 berhasil mencapai USD231,54 miliar AS atau tumbuh double digit sebesar 41,88% (YoY). Kinerja positif tahun 2021 ditopang oleh neraca perdagangan non migas yang mencapai USD48,60 miliar namun tergerus oleh defisit neraca perdagangan migas yang cukup besar.

Hilirisasi komoditas unggulan, seperti turunan produk *Crude Palm Oil* (CPO), berhasil mendorong performa ekspor Indonesia. Hal tersebut tercermin dari ekspor komoditas lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) yang sepanjang 2021 mencapai USD32,83 miliar atau meningkat sebesar 58,48% (YoY). Selain CPO, hilirisasi komoditas nikel juga memperkuat performa ekspor Indonesia, dengan pertumbuhan ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya (HS 75) mampu tumbuh sebesar 58,89% (YoY) menjadi sebesar USD1,28 miliar. Lebih lanjut, dari 10 besar komoditas utama ekspor, komoditas bijih logam, terak dan abu (HS 26) mengalami pertumbuhan tertinggi yakni 96,32% (YoY) menjadi sebesar USD6,35 miliar. Diikuti oleh ekspor komoditas besi dan baja (HS 72) yang juga naik signifikan mencapai 92,88% (YoY) menjadi senilai USD20,95 miliar. (Sumber: Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI No: HM.4.6/20/SET.M.EKON.3/1/2022).

TRADE PERFORMANCE

Indonesia's exports and imports in 2021 recorded a positive performance with a surplus of USD35.34 billion, with exports in 2021 reaching USD231.54 billion with a double-digit growth of 41.88% (YoY). The positive performance in 2021 was supported by a non-oil and gas trade balance that reached USD48.60 billion, offset by a large oil and gas trade balance deficit.

Downstreaming superior commodities, such as derivative products of Crude Palm Oil (CPO), succeeded in boosting Indonesia's export performance. This can be seen in the export of animal/vegetable fats and oils (HS 15) that in 2021 reached USD32.83 billion, an increase of 58.48% (YoY). In addition to CPO, downstream nickel commodities also strengthened Indonesia's export performance, with export growth of nickel and its derivatives (HS 75) growing by 58.89% (YoY) to USD 1.28 billion. Of the top 10 main export commodities, metal ores, slag and ash (HS 26) experienced the highest growth of 96.32% (YoY) to reach USD6.35 billion, followed by exports of iron and steel (HS 72) that rose significantly by 92.88% (YoY) to USD20.95 billion. (Source: Press Release of the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia No: HM.4.6/20/SET.M.EKON.3/1/2022).

ANALISIS INDUSTRI PELABUHAN

TREN KEPELABUHAN GLOBAL

Saat ini terdapat sebelas tren global dalam industri kepelabuhan yang dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Yang pertama adalah kategori pengembangan ekosistem yang terdiri dari konsolidasi operator pelabuhan, pembentukan aliansi *shipping lines* untuk meningkatkan *bargaining power*, ekspansi *shipping lines* sebagai operator terminal, serta ekspansi *port operator* pelabuhan ke bisnis logistik. Kategori tren kedua yaitu perkembangan teknologi terdiri dari *sustainability effort* dari operator terminal dan *shipping lines,* adopsi *smart ports* di negara maju, serta meningkatnya

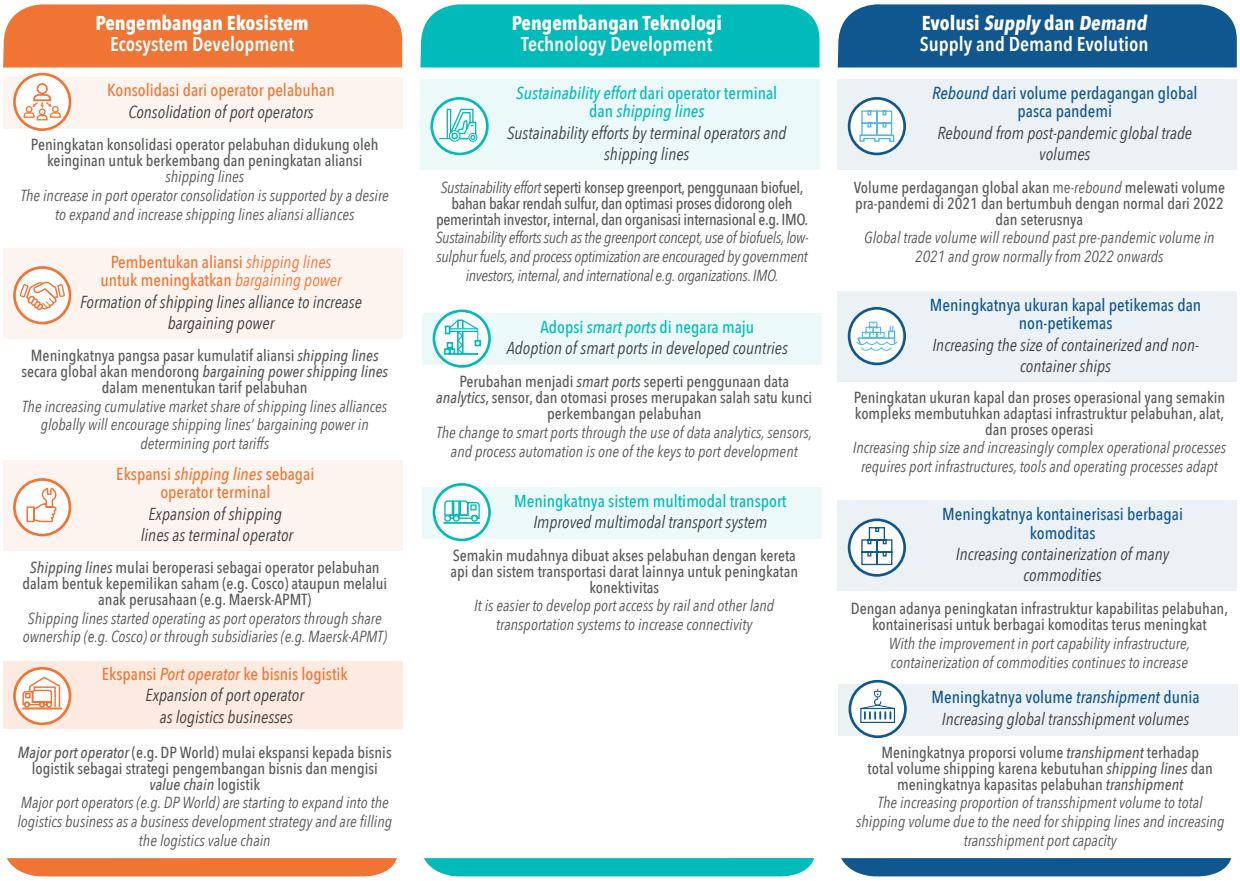
ANALISIS INDUSTRI PELABUHAN

GLOBAL PORT TRENDS

There are currently eleven global trends in the port industry that can be divided into three main categories, as illustrated in following figure. The first is category of development ecosystem consists of consolidating port operators, forming shipping lines alliances to increase bargaining power, expanding shipping lines as terminal operators, as well as expanding port operators into logistics businesses. The second trend category is technological developments consist of sustainability efforts by terminal operators and shipping lines, adoption of smart ports in developed countries, and the increasing multimodal

sistem *multimodal transport*. Lalu aspek terakhir yaitu evolusi *supply and demand* terdiri dari *rebound* dari volume perdagangan global pasca pandemi, meningkatnya ukuran kapal petikemas dan non-petikemas, meningkatnya kontainerisasi berbagai komoditas, serta meningkatnya volume *transhipment* dunia.

transport system. The last aspect concerns the evolution of supply and demand, and consists of a rebound in global trade volumes after the pandemic, increasing the size of containerized and non-container ships, increasing containerization of various commodities, as well as increasing world transshipment volumes.



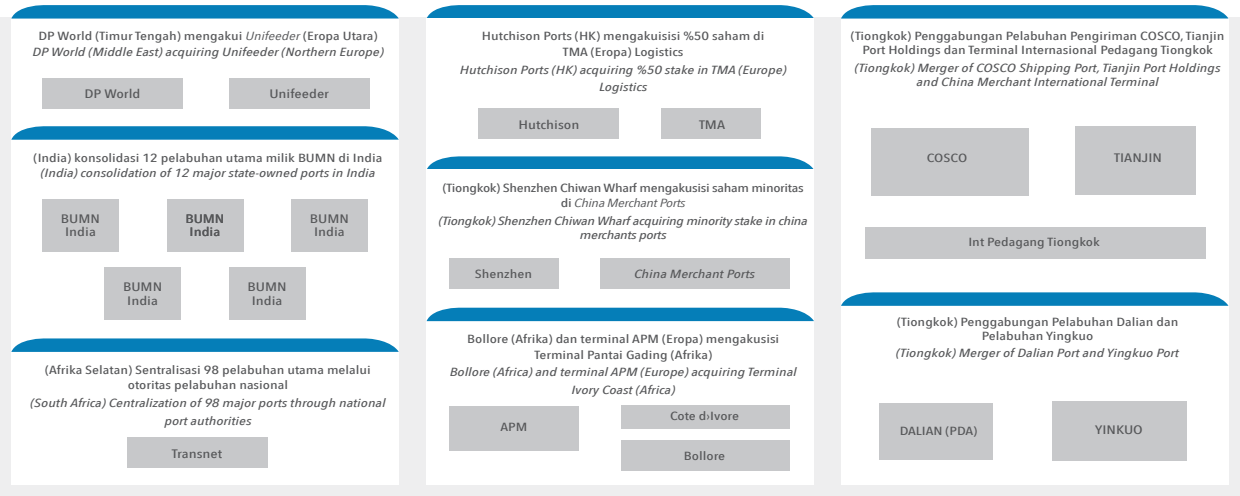
Gambar Sebelas Tren Kepelabuhan Global yang Ada
Sumber: Analisis BCG, 2021
Trends of Eleven Existing Global Port
Source: BCG Analysis, 2021

KONSOLIDASI OPERATOR PELABUHAN

Penggabungan dan akuisisi operator pelabuhan juga banyak terjadi pada beberapa tahun terakhir di seluruh dunia, baik di Asia, Eropa, maupun Afrika seperti diilustrasikan di gambar di bawah ini. Konsolidasi pelabuhan didorong oleh beberapa faktor pasar dan internal seperti adanya limitasi *organic growth* karena akses kepada lahan, *counteraction* dari meningkatnya *bargaining power shipping lines*, serta bertambahnya akses pendanaan dari investor untuk perusahaan pelabuhan. Penggabungan dan akuisisi juga dianggap sebagai strategi yang tidak terlalu berisiko jika dibandingkan dengan *greenfield growth* untuk mengembangkan pelabuhan.

CONSOLIDATING PORT OPERATORS

Mergers and acquisitions by port operators have also occurred a lot in recent years in Asia, Europe and Africa as illustrated in figure below. Port consolidation was driven by several market and internal factors, such as the limitation of organic growth due to access to land, the counteraction of increasing shipping lines bargaining power, as well as increasing access to funding from investors for port companies. Mergers and acquisitions were also considered a less risky strategy when compared to greenfield growth to develop ports.



Gambar Konsolidasi pelabuhan di Asia, Eropa dan Afrika dari tahun 2019 ke Q1 2020
Sumber: Drewry, BCG Analysis, 2021
Port Consolidation Figure in Asia, Europe and Africa from 2019 to Q1 2020
Source: Drewry, BCG Analysis, 2021

ALIANSI *SHIPPING LINES* DAN EKSPANSI SEBAGAI OPERATOR PELABUHAN

Aliansi *shipping line* dimulai pada tahun 1990-an, dan anggotanya terus meningkatkan pangsa pasar kumulatif global. Pada tahun 2020 pangsa pasar kumulatif global aliansi *shipping line* mencapai 81%, di mana tiga aliansi terbesar adalah 2M (Maersk dan MSC), *Ocean Alliance* (CMA CGM, Cosco dan Evergreen), dan *The Alliance* (Hapag-Lloyd, Yang Ming, dan Ocean Network Express). Aliansi *shipping line* didorong oleh kebutuhan dalam menghadapi persaingan dengan para pemain besar, perluasan area pelayanan dan ketersediaan kapal, dan memanfaatkan *economies of scale* serta menurunkan biaya.

Selain aliansi, strategi lain yang dilakukan *shipping lines* adalah ekspansi bisnis sebagai operator pelabuhan, strategi ini didorong oleh potensi peningkatan *competitive advantage* yang dapat dimiliki oleh *shipping lines*. Ekspansi dapat dilakukan melalui kepemilikan saham atau anak perusahaan. Beberapa contoh ekspansi *shipping lines* sebagai operator pelabuhan adalah Cosco *shipping* yang berinvestasi di 30 terminal di seluruh dunia. Sementara itu, Maersk melakukan ekspansi melalui anak perusahaannya, APM Terminal, yang merupakan salah satu operator pelabuhan global terbesar.

SHIPPING LINES ALLIANCES AND EXPANSION AS PORT OPERATORS

The shipping line alliance started in the 1990s, and its members continue to increase its global cumulative market share. In 2020 the global cumulative market share of shipping line alliances reached 81%, where the three largest alliances were 2M (Maersk and MSC), Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco and Evergreen), and The Alliance (Hapag-Lloyd, Yang Ming, and OceanNetwork Express). Shipping line alliances are driven by the need to face competition by big players, to expand service area and ship availability, and to take advantage of economies of scale and reduce costs.

In addition to alliances, another strategy carried out by shipping lines is business expansion as a port operator, this strategy is driven by the potential for increasing their competitive advantage. Expansion can be achieved through share ownership or subsidiaries. Examples of expansion of shipping lines as port operators include Cosco shipping that has invested in 30 terminals worldwide, and Maersk that is expanding through its subsidiary, APM Terminal, to become one of the largest global port operators.

EKSPANSI PORT OPERATOR KE BISNIS LOGISTIK

Untuk turut meningkatkan kontrol dari kualitas pelayanan di pelabuhan, para operator pelabuhan global juga sudah masuk ke bisnis logistik darat dan hal ini sedang menjadi tren yang sedang terjadi, seperti DP World, Hutchison Ports, PSA dan Evergreen. DP World memiliki bisnis *trucking* dan *distribution centres* di seluruh dunia untuk mendukung bisnis kepelabuhannya. Hutchison Ports menyediakan jasa *freight forwarding*, *warehousing*, *project logistics*, serta *intermodal management*. PSA menyediakan jasa *internet of logistics* yang dapat meng-*trace* perpindahan barang di seluruh aspek *value chain* logistik dan menyediakan jasa *analytics* untuk logistik yang diberikan. Evergreen Logistics menyediakan jasa *freight forwarding*, *project logistics*, *warehousing*, dan juga jasa logistik udara. Tren masuknya operator pelabuhan global ke dalam bisnis logistik darat ini juga didorong oleh berbagai sisi internal dan eksternal, yaitu untuk meningkatkan kontrol terhadap performa *end-to-end* dari *value chain* logistik, mengambil bagian dari pasar logistik darat yang merupakan bagian besar dari pasar logistik, dan didorong oleh kemampuan investasi yang besar sebab bisnis pelabuhan cukup *profitable*.

EXPANSION OF PORT OPERATORS INTO LOGISTICS BUSINESSES

To help improve service quality control at ports, global port operators also entered the land logistics business and this is an ongoing trend, and includes DP World, Hutchison Ports, PSA and Evergreen. DP World owns trucking businesses and distribution centers around the world to support its port business. Hutchison Ports provides freight forwarding, warehousing, project logistics, and intermodal management services. PSA provides an internet of logistics services that can trace the movement of goods in all aspects of the logistics value chain, and provide analytics services for the logistics provided. Evergreen Logistics provides freight forwarding, project logistics, warehousing, and also air logistics services. The trend of global port operators entering into the land logistics business is also driven by various internal and external factors, namely to increase control over the end-to-end performance of the logistics value chain, take part in the land logistics market which is a large part of the logistics market, driven by a large investment capacity as the port business is quite profitable.

SUSTAINABILITY EFFORT DARI OPERATOR TERMINAL DAN *SHIPPING LINES*

Meningkatnya *sustainability effort* yang dilakukan oleh operator pelabuhan dan *shipping lines* didorong oleh faktor internal dan eksternal seperti meningkatnya tekanan dari pemerintah, pemberian premium dari investor dan bank kepada perusahaan yang lebih *sustainable*, dan pengurangan biaya dari efisiensi bahan bakar. Beberapa pemain global seperti Maersk, CMA CGM, MSC, Cosco Shipping dan Wasa Line. Maersk berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan penggunaan karbon. CMA CGM mengganti bahan bakar karbon menjadi *biofuel*. MSC menggunakan campuran 30% *biofuel*, dan menghasilkan pengurangan emisi CO_2 sebanyak 15-20%. Cosco Shipping mengoptimalisasi proses di pelabuhan dan navigasi untuk mengurangi waktu *turnaround*. Wasa Line menggunakan baterai sebagai pengganti bahan bakar.

SUSTAINABILITY EFFORT FROM TERMINAL OPERATORS AND SHIPPING LINES

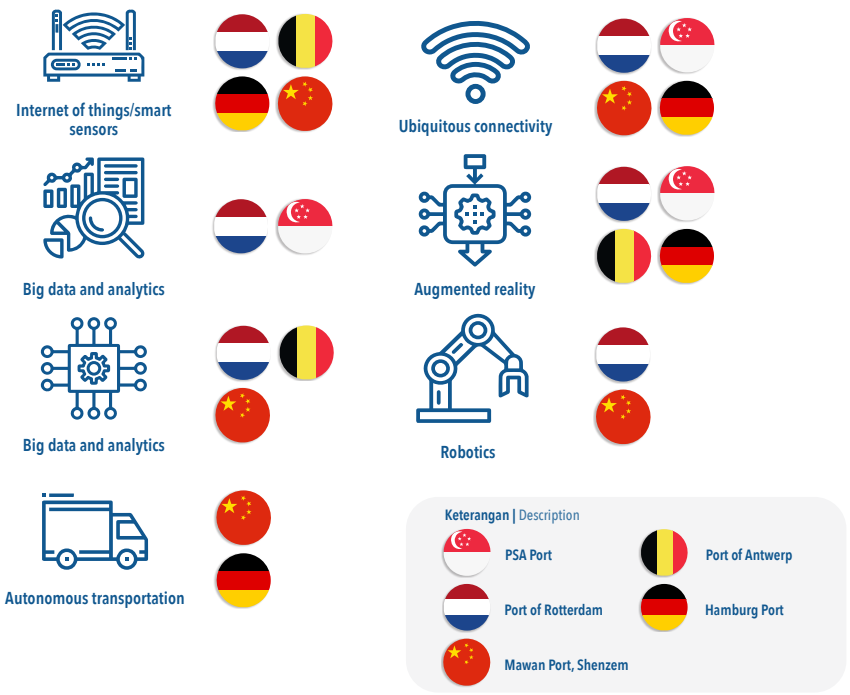
The increasing sustainability efforts made by port operators and shipping lines are driven by internal and external factors such as increased pressure from their governments, premiums from investors and banks to companies that are more sustainable, and reduced costs from fuel efficiency. Global players include Maersk, CMA CGM, MSC, Cosco Shipping and Wasa Line. Maersk is looking to increase efficiency and reduce carbon use. CMA CGM is replacing carbon fuels into biofuels. MSC is using a blend of 30% biofuels, which results in a 15-20% reduction in CO2 emissions. Cosco Shipping is optimizing port and navigation processes to reduce turnaround time. Wasa Line is using batteries instead of fuel.

ADOPSI *SMART PORTS* DI NEGARA MAJU

Adopsi *smart ports* terus menjadi semakin populer, terutama di negara maju. Beberapa contoh *digital tools* yang digunakan oleh *smart ports* adalah penggunaan *internet of things* dan *smart sensors*, *big data analytics*, AI dan *machine learning*, *ubiquitous connectivity*, *augmented reality*, *autonomous transportation* serta *robotics*. Salah satu contoh *smart ports* yang ada saat ini adalah *Port of Antwerp* di Belgia yang menggunakan teknologi *blockchain*, *augmented reality*, dan sensor untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Gambar di bawah ini memperlihatkan secara lengkap *smart ports* di beberapa negara serta *digital tools* yang digunakan di masing-masing *smart ports*.

SMART PORTS ADOPTION IN DEVELOPED COUNTRIES

The adoption of smart ports continues to be increasingly popular, especially in developed countries. Examples of digital tools used by smart ports are the use of the internet of things and smart sensors, big data analytics, AI and machine learning, ubiquitous connectivity, augmented reality, autonomous transportation and robotics. One example of a smart port is the Port of Antwerp in Belgium that uses blockchain technology, augmented reality, and sensors to increase security and efficiency. Figure below shows in full the smart ports in several countries as well as the digital tools used in each smart port.



Gambar *Smart Ports* di Beberapa Negara Serta *Digital Tools* yang Digunakan
Sumber: Orbis Research, Press research, BCG Analysis, 2021
Smart Ports Figure in Several Countries and Digital Tools Used
Source: Orbis Research, Press research, BCG Analysis, 2021

MENINGKATNYA SISTEM TRANSPORTASI MULTIMODAL

Meningkatnya sistem transportasi multimodal yang dilakukan oleh berbagai negara global didorong oleh upaya peningkatan infrastruktur, *sustainability*, dan *congestion* jalanan di pelabuhan. Semakin banyaknya pelabuhan yang terhubung dengan infrastruktur intermodal (kereta api, bandara, dan sistem transportasi lain) juga akan mendukung konektivitas pelabuhan dan menjadikan transportasi laut menjadi semakin menarik sebagai salah satu sarana perdagangan global. Sistem transportasi intermodal juga memberikan opsi yang lebih ramah lingkungan, terutama untuk kargo yang dikirimkan ke tempat dengan jarak yang panjang. Namun, sistem ini memadatkan jalanan dengan truk karena volume perdagangan yang kian membesar setiap tahunnya. Volume barang yang dikirimkan oleh intermodal diprediksi akan berkembang. *Forecast* terhadap volume intermodal akan naik sebesar 3% per tahun hingga 2024 dan pelabuhan akan menjadi titik utama intermodal terutama untuk *consumer goods, capital goods*, dan *industrial supplies*.

REBOUND PERDAGANGAN

Berdasarkan data dari Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey dalam laporan *"COVID-19 Pandemic Impact on Port Authority Facility Volumes Continues Into March 2021"*, pada informasi *the Port Authority of New York and New Jersey's website* melaporkan bahwa Maret 2021 tercatat *traffic* petikemas bulanan tertinggi dibandingkan Maret 2019 dengan peningkatan sebesar 35%. Hal ini menunjukkan ketahanan sisi permintaan pelanggan dan rantai pasokan global dalam memasuki tahun kedua pandemi COVID-19.

INCREASING MULTIMODATED TRANSPORTATION SYSTEM

The increasing multimodal transportation systems carried out by global countries is driven by efforts to improve infrastructure, sustainability, and road congestion at ports. The increasing number of ports connected to intermodal infrastructure (trains, airports, and other transportation systems) also supports port connectivity and makes sea transportation more attractive as a means of global trade. The intermodal transportation system also provides a more environmentally friendly option, especially for cargo delivered over long distances. However, this system leads to congestion on the roads by trucks due to the increasing volume of trade every year. The volume of goods shipped by intermodal is predicted to grow. Intermodal volume is forecasted to increase by 3% per year until 2024, and ports will become the main point of intermodal, especially for consumer goods, capital goods, and industrial supplies.

TRADE REBOUND

Based on data from the Port Authority of New York and New Jersey in their report "COVID-19 Pandemic Impact on Port Authority Facility Volumes Continues Into March 2021", the Port Authority of New York and New Jersey's website reported that March 2021 saw the highest monthly container traffic compared to March 2019 with an increase of 35%. This shows the resilience of customers demand and global supply chains when entering the second year of the COVID-19 pandemic.

MENINGKATNYA UKURAN KAPAL KONTAINER

Peningkatan ukuran kapal kontainer juga terus terjadi dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan adaptasi terhadap infrastruktur pelabuhan. Ukuran kapal rata-rata telah meningkat ~130% secara global sejak tahun 2000 hingga 2015 dan diprediksi akan terus meningkat untuk memanfaatkan skala ekonomi. Hal ini akan mendorong pembangunan infrastruktur di sekitar pelabuhan sehingga akan memungkinkan pembuatan *hub* internasional maritim. Implikasi tren ini terhadap bisnis pelabuhan adalah dibutuhkannya pembangunan infrastruktur pelabuhan di sekitar perdagangan besar, dimungkinkannya pembangunan *hub & spoke* internasional dan domestik maritim, proses operasional yang semakin kompleks, dan peningkatan risiko bagi operator dan pemilik pelabuhan.

MENINGKATNYA KONTAINERISASI BERBAGAI KOMODITAS

Meningkatnya tingkat kontainerisasi komoditas didorong oleh perbaikan infrastruktur dan operasional pelabuhan. Saat ini, tingkat kontainerisasi komoditas di Indonesia hanya mencapai 14% dengan komoditas utama berupa produk manufaktur, sayuran, makanan siap saji, dan protein (hewan). Dengan pengembangan pelabuhan yang terus dilakukan, tingkat kontainerisasi diprediksi akan terus meningkat, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.5. Pertumbuhan kontainerisasi diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang tetap apabila pertumbuhan GDP berada pada prediksi *baseline* 5,2%. Namun, bila prediksi pertumbuhan GDP agresif 8,5%, maka akan terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan kontainerisasi sebanyak 4%.

INCREASING SIZE OF CONTAINER SHIPS

The increase in the size of container ships also continues to occur from year to year, so adaptation to port infrastructure is needed. Average ship sizes have increased by ~130% globally from 2000 to 2015 and are expected to continue to grow to take advantage of economies of scale. This will encourage the development of an infrastructure around the ports to allow them to become an international maritime hub. The implications of this trend for the port business are the need for port infrastructure development around wholesale trade, the possibility of developing international and domestic maritime hubs & spokes, increasingly complex operational processes, and increased risk for port operators and owners.

INCREASING CONTAINERIZATION OF COMMODITIES

The increasing level of commodity containerization is driven by infrastructure and port operations improvements. Currently, the level of commodity containerization in Indonesia has only reached 14% with the main commodities being manufactured products, vegetables, ready-to-eat foods, and protein (animals). As port development continues, the containerization rate is predicted to continue to increase, as illustrated in Figure 3.5. Containerization growth is predicted to experience steady growth if the GDP growth is at the predicted baseline of 5.2%. However, if there is an aggressive GDP growth is 8.5%, there will be an increase in containment growth of 4%.

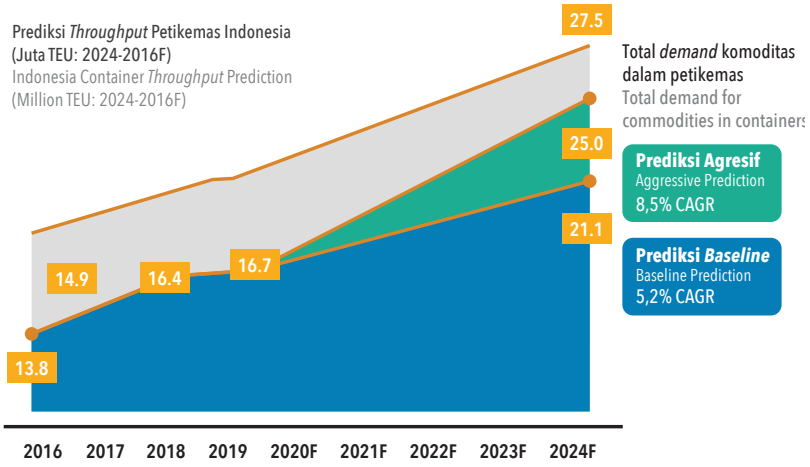
Saat ini, tingkat kontainerisasi komoditas di indonesia hanya mencapai 14%
Currently, the commodity containerization level in Indonesia has only reaches 14%

Model permintaan komoditas yang dapat dikontainerisasi
Containerized commodity demand model

Throughput **petikemas Indonesia berdasarkan provinsi juta Ton, 2019**
2019, Indonesian container throughput by province million Tons



Dengan pengembangan pelabuhan yang dilakukan, tingkat kontainersasi diprediksi akan terus meningkat
With the port development being carried out, the containerization rate is predicted to continue to increase



Gambar kontainerisasi komoditas di Indonesia dan prediksi tingkat kontainerisasi
Sumber: Kajian Integrasi BUMN Pelabuhan, Badan Pusat Statistik, MoT, RPJMN, Analisis BCG, 2021
Commodity containerization figure in Indonesia and predictions of containerization rates
Source: Study on Integration of Port SOEs, Central Statistics Agency, MoT, RPJMN, BCG Analysis, 2021

MENINGKATNYA VOLUME *TRANSHIPMENT* DUNIA
Meningkatnya proporsi volume *transhipment*, seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas, didorong oleh infrastruktur dan pola pelayaran *shipping lines*. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan volume ini antara lain: 1) meningkatnya terminal khusus *transshipment* di dunia di mana para pelaku operator pelabuhan mengembangkan *transhipment hub* sebagai tempat menaruh

INCREASING WORLD TRANSHIPMENT VOLUME
The increasing proportion of transshipment volumes, as illustrated in figure above, was driven by the shipping lines infrastructure and shipping patterns. Factors driving this volume increase included: 1) increased special transshipment terminals in the world where port operators develop transshipment hubs as a place to place containers in the middle to create new routes

petikemas di tengah agar dapat menciptakan rute baru dan koneksi bagi *shipping lines* yang telah menempuh jarak pelayaran jauh, 2) efisiensi rute yang dilakukan *shipping network* untuk mengoptimalkan biaya operasi, 3) meningkatnya perdagangan global dan hubungan antar negara dengan jarak jauh.

Selain sebelas tren di atas, kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada bidang jalur perdagangan maritim selama awal tahun 2021. Adanya fase pemulihan terlihat dari aktivitas di pelabuhan yang menunjukkan ketahanan dalam permintaan konsumen dan rantai pasokan global, namun perdagangan yang tidak seimbang *(imbalance trading)* dan pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak merata *(uneven economic growth)* juga menyebabkan peristiwa kekurangan petikemas di wilayah Timur.

UNPRECEDENTED SHORTAGE FOR CONTAINERS

Dalam laporan *Global shipping container shortage: the story so far, Ship Technology*, April 2021 bahwa saat ini, terjadi kekurangan petikemas kosong pada wilayah kebanyakan di negara-negara timur seperti Tiongkok, di mana Tiongkok menjadi salah satu negara yang melakukan ekspor terbesar ke negara-negara lain terutama di wilayah barat. Penyebab utama kekurangan ini kompleks, termasuk ketidakseimbangan manajemen kapasitas oleh operator pada awal krisis dan penundaan terkait adanya COVID-19 yang sedang berlangsung di titik-titik koneksi transportasi seperti Pelabuhan. Hal ini terjadi pada fase awal *lockdown* petikemas kosong tidak bisa kembali ke Tiongkok atau dibiarkan menumpuk di negara tujuan, serta perubahan pola perdagangan dan peningkatan permintaan pada awal 2021 yang membuat kapal-kapal sangat terburu-buru untuk kembali sehingga kapal-kapal tersebut dipaksa untuk meninggalkan kontainer kosong ketika kembali ke Tiongkok (dalam laporan *"No relief: Global container shortage likely to last until 2022",* American Shipper, April 2021).

PERDAGANGAN MARITIM GLOBAL

Asia, Eropa, dan Amerika Utara adalah fokus perdagangan global dengan volume paling tinggi. Perdagangan rute regional terbesar berada di Asia dengan volume 44,5 juta TEU pada tahun 2019. Dua jalur perdagangan internasional utama adalah *Far East-Europe* dengan volume 24,5 juta TEU dan *Far East-North America* dengan volume 23,7 juta TEU, seperti yang terlihat pada gambar 3.7. Tingginya volume perdagangan petikemas dari dan ke *Far East* disebabkan oleh bergabungnya Tiongkok dengan WTO pada tahun 2001, menyebabkan relokasi pusat produksi dari negara-negara maju ke Tiongkok.

and connections for shipping lines travelling long shipping distances, 2) route efficiencies by shipping networks to optimize operating costs, 3) increased global trade and long-distance relations between countries.

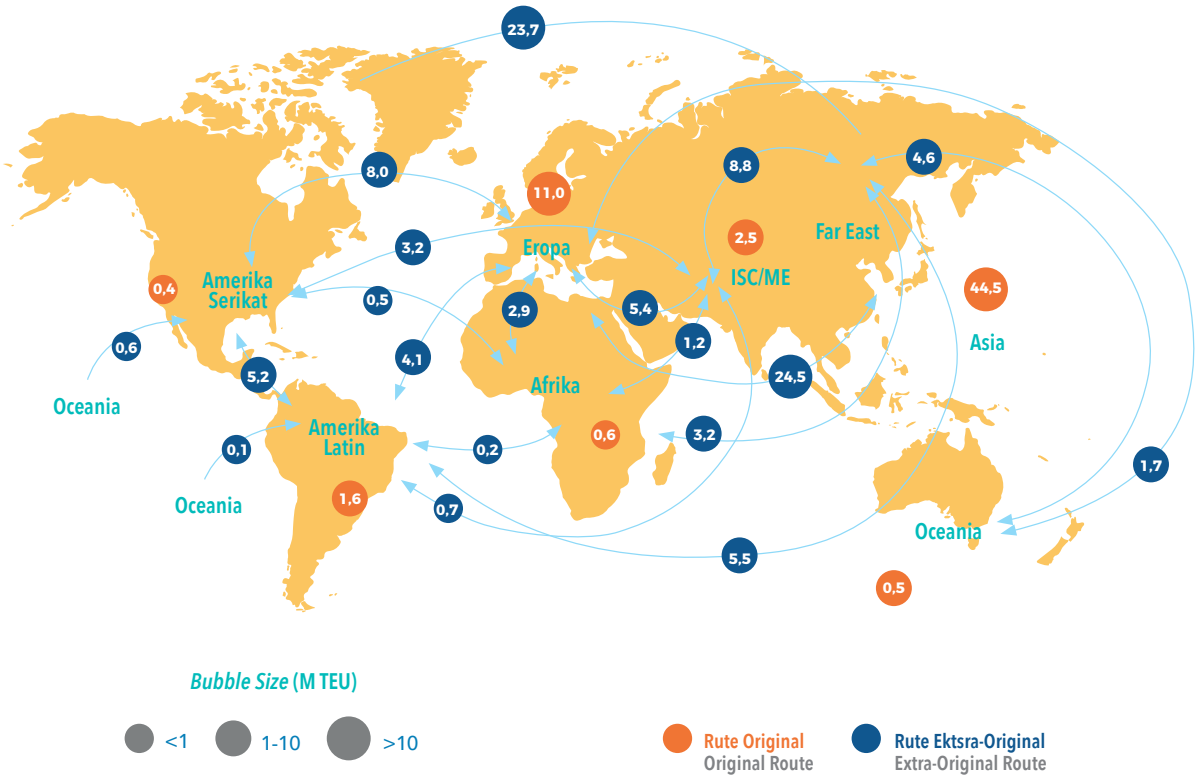
In addition to the eleven trends shown above, new habits post COVID-19 pandemic also affected the maritime trade routes during early 2021. The recovery phase was seen in the activities at ports that although demonstrating resilience to consumer demand and global supply chains, due to an imbalance in trading, and uneven economic growth in the world also caused a shortage of containers in the East.

UNPRECEDENTED SHORTAGE OF CONTAINERS

The Global shipping container shortage report: the story so far, Ship Technology, April 2021, stated that currently, there was a shortage of empty containers in most of the regions in eastern countries such as China, where China is one of the countries that carries out the largest exports to other countries, especially in the western region. The underlying causes of this shortfall were complex, including imbalanced capacity management by operators at the start of the crisis and delays related to the ongoing COVID-19 at transport connection points including ports. This happened in the early phase of the lockdown where empty containers could not return to China or were allowed to accumulate in destination countries, as well as changes in trading patterns and an increase in demand in early 2021, which saw ships in such a hurry to return being forced to return home leaving empty containers (in the report "No relief: Global container shortage likely to last until 2022", American Shipper, April 2021).

GLOBAL MARITIME TRADE

Asia, Europe and North America are the focus with the highest volume of global trade. The largest regional route trade was in Asia with a volume of 44.5 million TEUs in 2019. The two main international trade routes were Far East-Europe with a volume of 24.5 million TEU and Far East-North America with a volume of 23.7 million TEU, as shown in figure 3.7. The high volume of container trade to and from the Far East was caused by China's joining the WTO in 2001, causing a relocation of production centers from developed countries to China.



Key takeaways

- Dua jalur perdagangan internasional utama adalah *Far East-Europe* dan *Far East-North America*
- The two main international trade routes are far Far East-Europe and Far East-North America
- Tiongkok bergabung dengan WTO pada tahun 2001 menyebabkan relokasi pusat produksi dari negara maju ke Tiongkok. Fenomena ini terjadi telah menjadi mesin pertumbuhan utama untuk pasar petikemas
- China joined the WTO in 2001 leading to the relocation of production centers from developed countries to China. This phenomenon became a major growth engine for the container market
- Pasar intra *Far East* memiliki volume terbesar, tetapi dengan jarak yang lebih pendek. Pasar ini telah berkembang pesat sejak awal 2000-an
- Intra Far East market has the largest volume, but with a shorter distance. This market has grown rapidly since the early 2000s

Gambar Volume Perdagangan Maritim Global
Sumber: IHS GTA *Forecasting* Mei 2020, *Intra China and Intra Europe Demand* dari Beragam Sumber BCG (Eurostat, China Port Associations, Drewry, dan lain-lain), Analisis BCG 2021

Asia Trade Volume Figure
Source: IHS GTA Forecasting May 2020, Intra China and Intra Europe Demand from Multiple BCG Sources (Eurostat, China Port Associations, Drewry, etc.), 2021 BCG Analysis

Saat ini, perdagangan petikemas maritim di Asia masih berpusat di Tiongkok dengan volume rute regional 24,4 juta TEU dan volume perdagangan yang tinggi antara Tiongkok-Asia Timur dan Tiongkok-Asia Tenggara. Namun, tingkat pertumbuhan volume perdagangan rute regional Tiongkok pada 2019 adalah 0%. Di sisi lain, Asia Tenggara mengalami pertumbuhan lebih tinggi dalam lalu lintas *in/outbound* petikemas. Rute regional Asia Tenggara memiliki volume perdagangan 40,4 juta TEU dengan tingkat pertumbuhan 3%.

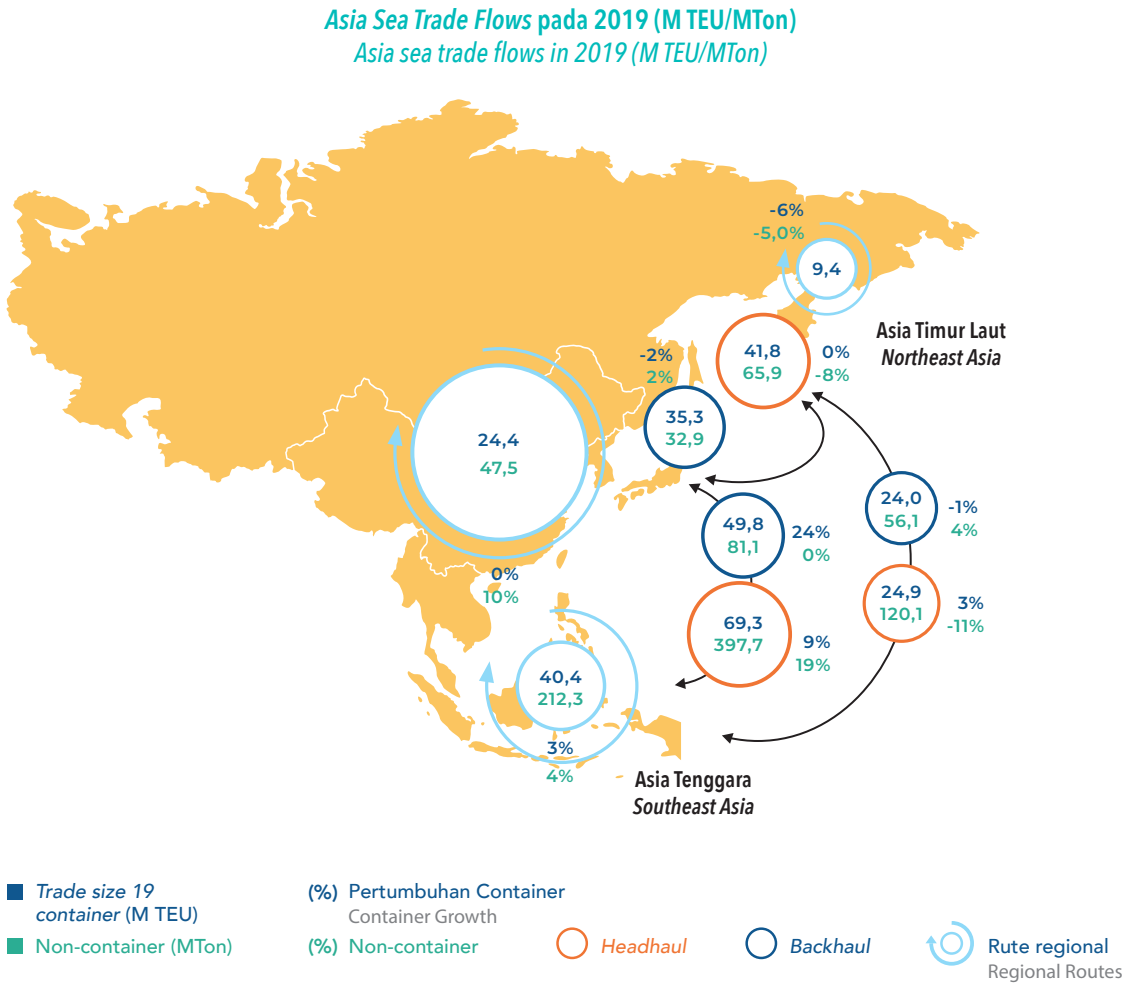
Currently, maritime container trade in Asia is still centered in China with a regional route volume of 24.4 million TEU and a high volume of trade between China-East Asia and China-Southeast Asia. However, China's regional route trade volume growth rate in 2019 was 0%. On the other hand, Southeast Asia experienced higher growth in container in/outbound traffic. The Southeast Asian regional route had a trade volume of 40.4 million TEU with a growth rate of 3%.

Dalam pasar non-petikemas, volume perdagangan tertinggi terjadi antara Tiongkok dan Asia Tenggara dengan volume

In the non-container market, the highest trade volume occurred between China and Southeast Asia with a volume reaching

mencapai 397,7 juta ton. Volume perdagangan antara Asia Tenggara dengan Asia Timur Laut juga cukup tinggi dengan 120,1 juta ton. Dalam rute regional, Asia Tenggara memiliki volume lebih tinggi dengan volume 212,3 juta ton, namun tingkat pertumbuhan pada rute regional Tiongkok lebih tinggi dengan tingkat pertumbuhan 2019 sebesar 10%.

397.7 million tons. The trade volume between Southeast Asia and Northeast Asia was also quite high with 120.1 million tons. In regional routes, Southeast Asia has the higher volume with a volume of 212.3 million tons, but the growth rate on China's regional routes is higher with the 2019 growth rate of 10%.



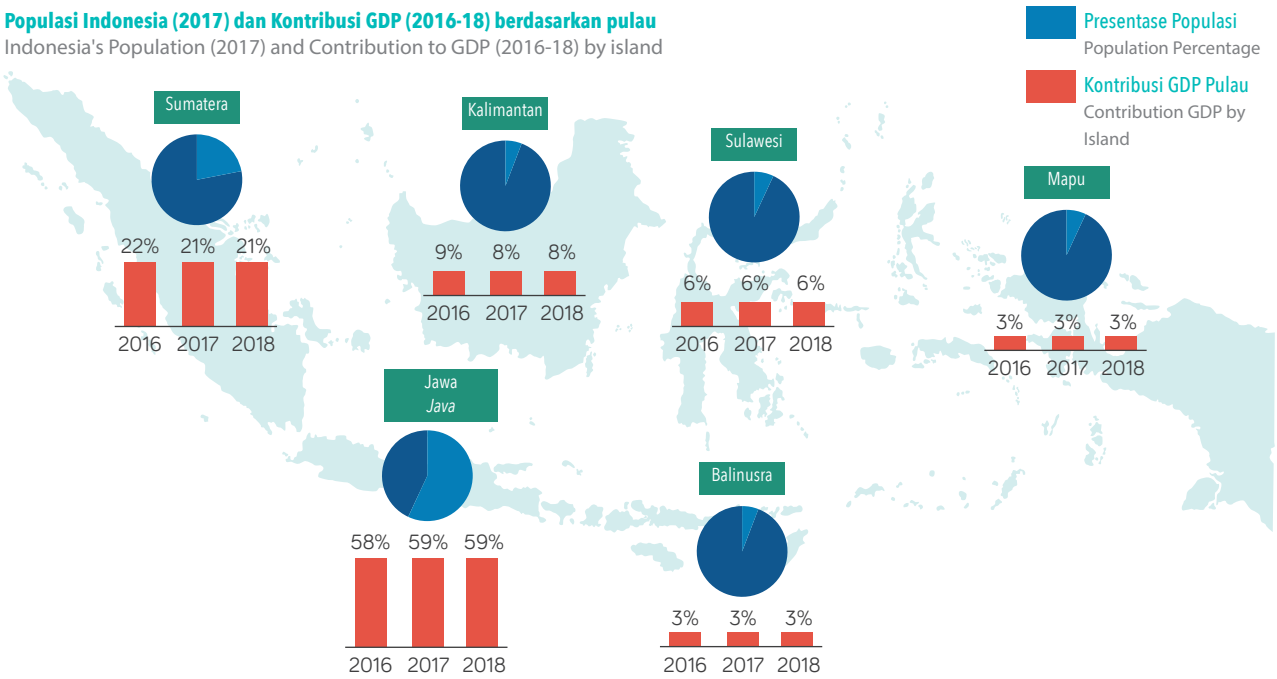
Gambar Volume Perdagangan Asia
Sumber: BCG *Container Demand and Supply Forecast Model* (IHS GTA *Forecasting* (Akhir 2020), Alphaliner, EIU, Oxford Economics), Data Pelindo, MoT, BPS, RPJMN, *Press Research*, Analisis BCG, 2021

Asia Trade Volume Figure
Source: BCG Container Demand and Supply Forecast Model (IHS GTA Forecasting (End of 2020), Alphaliner, EIU, Oxford Economics), Data Pelindo, MoT, BPS, RPJMN, Press Research, Analisis BCG, 2021

Dengan tingginya volume perdagangan maritim di Asia dan pertumbuhan perdagangan di Asia Tenggara, terdapat potensi pengembangan bisnis pelabuhan, terutama untuk jalur perdagangan *Far East-Europe* yang melewati Selat Malaka. Di Indonesia sendiri, volume perdagangan petikemas dan non-petikemas masih berpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini berkaitan dengan terfokusnya populasi dan GDP Indonesia di Jawa dan Sumatera, di mana lebih dari 50% populasi dan kontribusi GDP Indonesia berasal dari Jawa, seperti yang ada di dalam gambar di bawah ini.

With the high volume of maritime trade in Asia and the growth of trade in Southeast Asia, there is potential for developing the port business, especially for the Far East-Europe trade route that passes through the Malacca Strait. In Indonesia itself, the volume of container and non-container trade is still centered on the islands of Java and Sumatra. This is related to Indonesia's population and GDP on Java and Sumatra, where more than 50% of Indonesia's population and GDP contribution comes from Java, as shown in Figure below.

Populasi Indonesia (2017) dan Kontribusi GDP (2016-18) berdasarkan pulau
Indonesia's Population (2017) and Contribution to GDP (2016-18) by island



Gambar Populasi dan kontribusi *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia Berdasarkan Pulau
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019
Figure of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) Population and Contribution by Island
Source: Central Bureau of Statistics 2019

ANALISIS POSISI PELINDO DALAM INDUSTRI

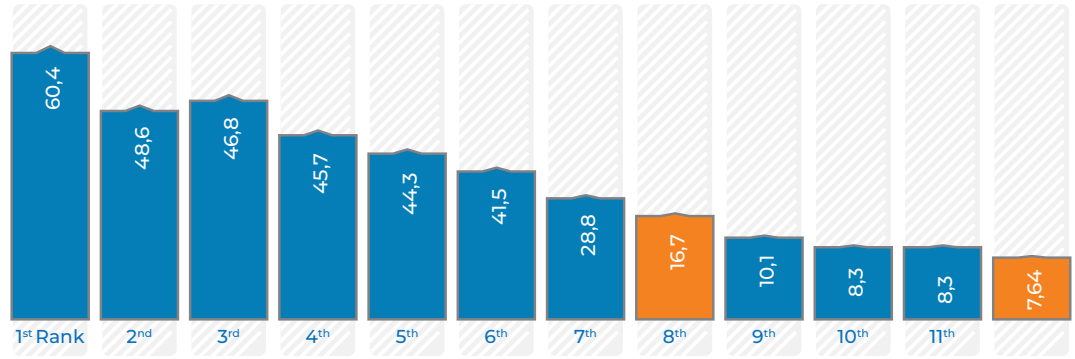
Penggabungan keempat Pelindo menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan menghasilkan operator petikemas terbesar nomor 8 di dunia dengan *throughput* sebesar 16,7 juta TEUs (berdasarkan *Annual Report* 2019), di mana realisasi tahun 2021 adalah sebesar 17,1 juta TEUs. Peningkatan skala PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ini diharapkan akan meningkatkan *brand awareness* pelabuhan di Indonesia yang berdampak secara positif terhadap peningkatan trafik di masa datang.

PELINDO INDUSTRY ANALYSIS

The merger of the four Pelindo into PT Pelabuhan Indonesia (Persero) resulted in the 8th largest container operator in the world with a throughput of 16.7 million TEUs (based on the 2019 Annual Report), with the throughput in 2021 reaching 17.1 million TEUs. The increase in the scale of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is expected to increase brand awareness of ports in Indonesia, which will have a positive impact on increasing traffic in the future.

Top 10 Operator Terminal Global dan Internasional
Top 10 Global and International Terminal Operators

Dalam Juta TEU, 2019
In Million TEU, 2019



Operator Terminal melanjutkan memperluas wilayah operasinya dan menangkap peluang arus perdagangan petikemas dunia
Terminal Operators continue to expand their area of operations and seize opportunities for world container trade traffic

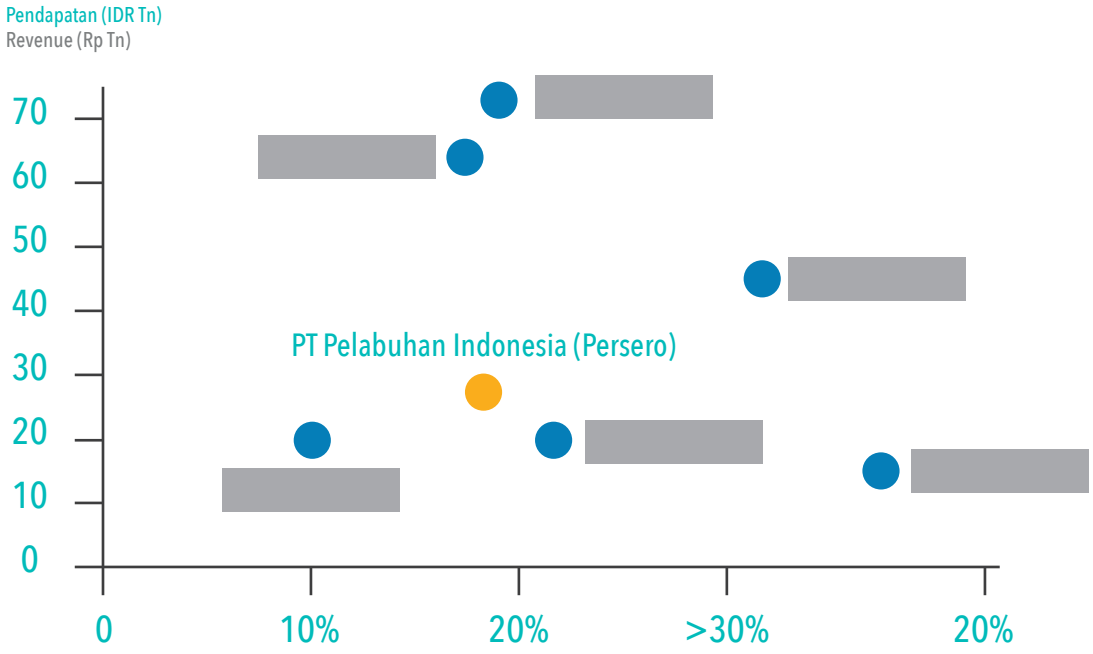
Gambar Top 10 Operator Terminal Global dan Internasional
Sumber: Drewry maritime research, Annual Report Pelindo I-IV
Figure Top 10 Operator Terminal Global dan Internasional
Sumber: Drewry maritime research, Annual Report Pelindo I-IV

Dari sisi finansial dibandingkan dengan *global world class operators*, yaitu operator pelabuhan dunia dengan *throughput* paling besar seperti PSA, DP World, CM Port, ICTSI, Hutchison, dan Evergreen, performa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) masih dapat ditingkatkan. Pendapatan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berada di atas beberapa operator pelabuhan global namun masih berada di bawah PSA, Hutchison dan DP World. Dari segi NPM, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga berada di tengah operator global, walaupun masih berada di bawah Evergreen, PSA, dan CM Port.

From a financial perspective, compared to global world class operators, namely the world port operators with the largest throughput, such as PSA, DP World, CM Port, ICTSI, Hutchison, and Evergreen, the performance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) can still be improved. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s revenue is above many global port operators but still below PSA, Hutchison and DP World. In terms of NPM, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is also in the middle of the global operators, although still below Evergreen, PSA, and CM Port.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki performa finansial yang cukup bersaing dengan *Global Word Class Port Operators*

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) records a financial performance that competes with Global World Class Port Operators



Gambar Performa Finansial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Versus *Benchmark*
Sumber: *Annual Report* Masing-Masing Perusahaan

Financial Performance Figure PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Versus Benchmark
Source: Annual Report of Each Company

Competitive Profile Matrix digunakan untuk mengidentifikasi hubungan peran posisi/kedudukan para pesaing dengan posisi strategis perusahaan. Berikut adalah *Competitive Profile Matrix* yang membandingkan Pelindo dengan perusahaan sejenis (*benchmarking*) di tingkat regional maupun global dengan menggunakan *key success factor*. Berikut CPM untuk layanan jasa kepelabuhanan petikemas.

A Competitive Profile Matrix is used to identify the relationship between the roles as competitors' positions with the company's strategic position. The following shows a Competitive Profile Matrix that compares Pelindo with similar companies (benchmarking) at regional and global levels using key success factors. The following shows the CPM for container port services.

Tabel *Competitive Profile Matrix* untuk Layanan Jasa Kepelabuhanan Petikemas Tahun 2021
Competitive Profile Matrix for Container Port Services in 2021

Key Success Factor	Weight	PSA		Port Klang		Tanjung Pelepas		Kuala Tanjung		Tanjung Priok		Tanjung Perak	
		Score	W x S	Score	W x S	Score	W x S	Score	W x S	Score	W x S	Score	W x S
Kedekatan dengan Jalur Utama Proximity to Main Routes	0,20	5	1	5	1	5	1	5	1	3	0,6	2	0,4
Kerja Sama dengan *Shipping Lines* Cooperation with Shipping Lines	0,16	5	0,8	5	0,8	5	0,8	2	0,32	2	0,32	2	0,32
Fasilitas Pelabuhan Port Facilities	0,15	5	0,75	5	0,75	5	0,75	2	0,3	4	0,6	3	0,45
Kerja Sama dengan Pelabuhan Lain Cooperation with Other Ports	0,08	5	0,4	5	0,4	5	0,4	3	0,24	4	0,32	4	0,32
Konektivitas Intermoda Intermodal Connectivity	0,09	5	0,45	5	0,45	5	0,45	5	0,45	5	0,45	5	0,45
Tarif Kompetitif Competitive Rates	0,16	5	0,8	4	0,64	4	0,64	3	0,48	3	0,48	4	0,64
Kinerja Operasional Pelabuhan Port Operational Performance	0,10	5	0,5	5	0,5	5	0,5	2	0,2	3	0,3	3	0,3
Kedekatan dengan *Hinterland* Proximity to Hinterland	0,06	2	0,12	3	0,18	3	0,18	3	0,18	5	0,3	5	0,3
Total Score	**1,00**		**4,82**		**4,72**		**4,72**		**3,17**		**3,37**		**3,18**

Dari tabel tersebut terlihat bahwa posisi 3 Pelabuhan Utama Pelindo (Pelabuhan Tanjung Priok, Kuala Tanjung dan Tanjung Perak) memiliki *gap* yang cukup jauh dengan pelabuhan *benchmark*. Pelabuhan Kuala Tanjung yang memiliki lokasi strategis dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi *transshipment* hub internasional masih tertinggal cukup jauh di beberapa faktor, sehingga diperlukan *roadmap* transformasi perusahaan yang memuat mengenai perencanaan dan rencana aksi dalam menyiapkan pelabuhan-pelabuhan utama berikut dengan kesiapan *enabler*-nya seperti SDM yang unggul dan ICT terintegrasi guna mencapai visi perusahaan berkelas dunia. Akan tetapi, CPM tersebut masih *arguable* sehingga diperlukan *tools analysis* lain yang dapat menunjukkan *level* eksisting pelabuhan-pelabuhan Pelindo. Adapun CPM Layanan jasa kepelabuhanan non-petikemas sebagai berikut.

From the table, it can be seen that the position of 3 Pelindo Main Ports (Tanjung Priok, Kuala Tanjung and Tanjung Perak) has a large gap with the benchmark port. Kuala Tanjung Port, which has a strategic location and has the potential to be developed into an international transshipment hub, is still quite far behind in several factors, so a company transformation roadmap is needed that includes planning and action plans in preparing major ports along with the readiness of their enablers such as superior human resources. and integrated ICT to achieve its vision as a world-class company. However, the CPM is still arguable so other analysis tools are needed that can show the existing level of Pelindo ports. The CPM for non-container port services is as follows.

Tabel Competitive *Profile Matrix* untuk Layanan Jasa Kepelabuhanan Non-Petikemas Tahun 2021
Competitive Profile Matrix for Non-Container Port Services

Key Success Factor	*Weight*	*Port of Qingdao*		*Port of Rotterdam*		Kuala Tanjung		Tanjung Priok		Tanjung Perak	
		Score	*W x S*	*Score*	*W x S*	*Score*	*W x S*	*Score*	*W x S*	*Score*	*W x S*
Kedekatan dengan Jalur Utama Proximity to Main Routes	0,20	3	0,6	4	0,8	5	1	2	0,4	2	0,4
Kesiapan dan Kelengkapan Fasilitas Pelabuhan Readiness and Completeness Of Port Facilities	0,16	5	0,8	5	0,8	2	0,32	3	0,48	3	0,48
Penguatan dan Pengembangan Ekosistem Non-Petikemas Strengthening and Developing Non-Container Ecosystems	0,15	4	0,6	5	0,75	4	0,6	4	0,6	4	0,6
Operasional Pelayanan yang Efektif dan Efisien Effective and Efficient Service Operations	0,08	5	0,4	5	0,4	1	0,08	4	0,32	4	0,32
Aksesibilitas dari/ke Pelabuhan Accessibility from/to the Ports	0,09	5	0,45	5	0,45	5	0,45	5	0,45	5	0,45
Infrastruktur Sistem Operasi IT Terintegrasi Integrated IT Operating System Infrastructure	0,16	5	0,8	5	0,8	2	0,32	4	0,64	4	0,64
Kesiapan *Human Capital* Human Capital Readiness	0,16	5	0,8	5	0,8	2	0,32	3	0,48	3	0,48
Total Score	1,00		4,82		4,72		3,09		3,37		3,37

Dari tabel tersebut terlihat bahwa posisi 3 Pelabuhan Utama Pelindo (Pelabuhan Tanjung Priok, Kuala Tanjung dan Tanjung Perak) memiliki *gap* yang juga cukup jauh dengan pelabuhan *benchmark*. Diperlukan transformasi pelabuhan utama Pelindo guna menghadapi persaingan tidak hanya di tingkat regional tetapi juga global.

From the table, it can be seen that the position of 3 Pelindo Main Ports (Tanjung Priok, Kuala Tanjung and Tanjung Perak) has a gap that is also quite far from the benchmark port. Pelindo's main port transformation is needed to face competition not only at the regional but also global level.

TINJAUAN OPERASIONAL
OPERATIONAL REVIEW



STRATEGI PERUSAHAAN

RUMAH STRATEGI PERUSAHAAN

Strategi bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan diturunkan dari visi dan misi, serta tujuan berdirinya PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Kami telah memformulasikan tema strategis dari tujuan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), 4 tema strategis telah teridentifikasi yaitu:

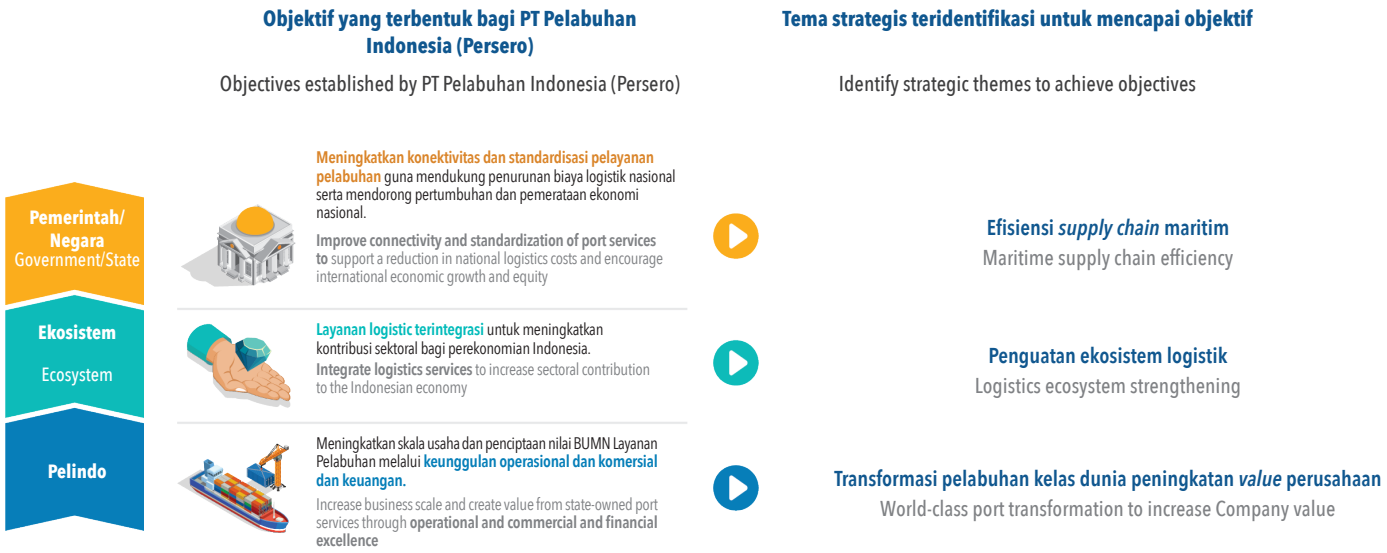
1. Transformasi pelabuhan kelas dunia;
2. Penguatan ekosistem logistik;
3. Efisiensi *supply chain* maritim; dan
4. Peningkatan *value* perusahaan.

CORPORATE STRATEGY

CORPORATE STRATEGY HOUSE

The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategy is derived from its vision and mission, as well as the objectives for establishing PT Pelabuhan Indonesia (Persero). We have formulated a strategic theme from the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) goals, with 4 strategic themes being identified, namely:

1. World-class port transformation;
2. Strengthening the logistics ecosystem;
3. Maritime supply chain efficiency; and
4. Increasing Company value.



Gambar Objektif dan Tema Strategis yang Terbentuk
Sumber: Analisis BCG, 2021

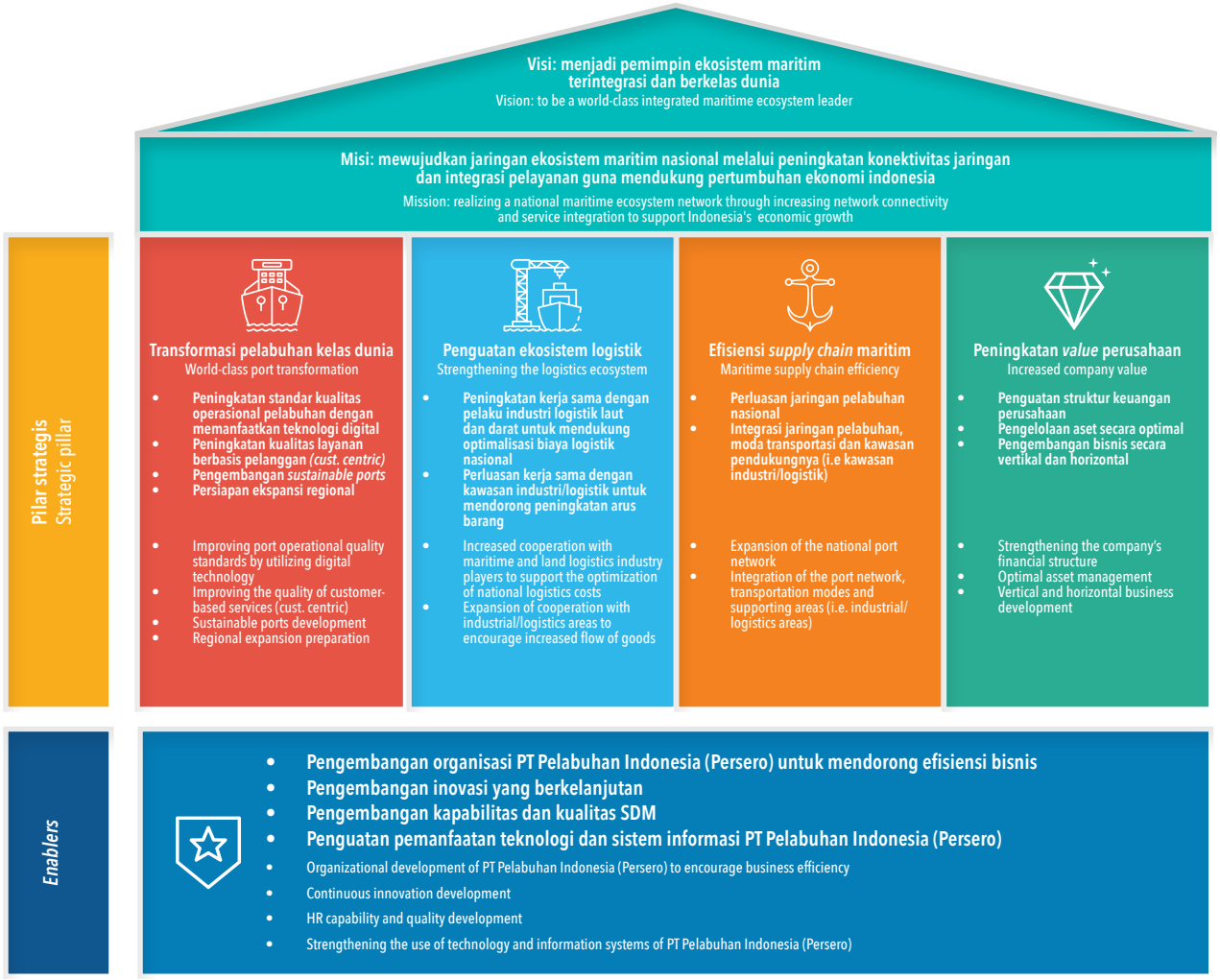
Objective Images and Strategic Themes Formed
Source: BCG Analysis, 2021

Tema strategis yang telah teridentifikasi menjadi pilar-pilar utama bagi rumah strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk periode 2021-2025. Tema strategis juga menjadi acuan untuk mendefinisikan sub-tema strategis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk 5 (lima) tahun kedepan yang akan menjadi basis dalam mendefinisikan inisiatif strategis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Untuk mendukung ketercapaian pilar strategis utama, telah dirancang juga *key enablers* yang harus dipenuhi. *Key enablers* merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama yang akan mendorong kelancaran implementasi strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan memperkuat fondasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mencapai visinya sebagai pemimpin ekosistem maritim Indonesia yang berkelas dunia.

The strategic themes identified have become the main pillars for the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategic house for the period 2021-2025. The strategic themes also became the reference for defining strategic sub-themes for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the next 5 (five) years to form the basis for defining strategic initiatives at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

To support the achievement of the main strategic pillars, key enablers have also been designed that must be met. Key enablers are a set of main actions and activities that will encourage the smooth implementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategy and strengthen the foundation for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) achieving its vision as a world-class leader of Indonesia's maritime ecosystem.



Gambar Rumah Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2021-2025
Sumber: Analisis BCG, 2021

Strategy House Figure PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2021-2025
Source: BCG Analysis, 2021

Penjelasan dari masing-masing komponen rumah strategis adalah sebagai berikut:

- **Visi dan Misi**
  Rumah strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki visi untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan berkelas dunia, dan misi untuk mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

- **Pilar Strategis, yg terdiri dari:**
  1. Transformasi Pelabuhan Kelas Dunia
     Pilar strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai perusahaan penyedia jasa kepelabuhan kelas dunia. Fokus pilar strategi ini adalah peningkatan performa operasi dan pelayanan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), melalui peningkatan standar

Each strategic house component is explained as follows:

- **Vision and Mission**
  The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategic house has a vision be a world-class integrated leader in the maritime ecosystem, and a mission to realize national maritime ecosystem network through the increment of network connectivity and service integration, to support Indonesian economic growth.

- **Strategic pillar consisting of:**
  1. World Class Port Transformation
     This strategy pillar is carried out to increase PT Pelabuhan Indonesia (Persero) capabilities as a world-class port service provider. This strategy pillar's focus is to improve the operation and service performance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ports, by improving the operational quality standards of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

kualitas operasional pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan cara memanfaatkan teknologi digital, sedangkan peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan dilakukan melalui pemberian jasa layanan yang bersifat *customer centric* (berbasis pelanggan). Selain itu, peningkatan performa juga dilakukan dengan dimulainya pengembangan *sustainable ports* bagi pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Fokus terakhir dari pilar ini adalah mempersiapkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk berekspansi secara regional di Kawasan Asia Tenggara.

2. Penguatan Ekosistem Logistik
Pilar strategi kedua dilakukan untuk membuat hubungan dengan pemain ekosistem logistik laut dan darat agar dapat mengoptimalkan biaya logistik nasional. Fokus dari pilar strategis ini adalah menjalin kerja sama dan juga potensi integrasi sistem atau layanan dengan pemain logistik laut dan darat sehingga biaya logistik dapat dioptimalkan, serta menjalin kerja sama dengan kawasan industri/logistik untuk mendorong peningkatan arus barang.

Kerja sama dengan kawasan industri/logistik dibutuhkan untuk mendukung konektivitas dengan bagian *hinterland*, serta mempermudah pemberian layanan logistik *end-to-end* bagi pelaku industri. Adanya hubungan dengan pelaku kawasan industri yang berada di satu daerah dengan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berpotensi meningkatkan pelayanan bagi pelanggan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dari sisi kecepatan dan kemudahan.

Kerja sama dengan pelaku logistik darat juga sangat penting karena peran transportasi darat dalam membawa barang keluar dari pelabuhan dan menuju ke *end-user* dari barang tersebut. Adanya kerja sama dengan pelaku logistik darat akan meningkatkan performa operasi pelabuhan karena berpotensi meningkatkan *flow throughput*. Logistik darat yang dimaksud juga tidak terbatas pada truk saja, tapi juga mencakup angkutan kereta-api sebagai solusi logistik darat keluar dari pelabuhan.

3. Efisiensi *Supply Chain* Maritim
Pilar strategis ketiga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi *supply chain* maritim di Indonesia. Fokus dari pilar strategi ini ialah memperluas jaringan pelabuhan nasional. Walaupun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan pemain utama dan tulang punggung kepelabuhan di Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) hanya memiliki sebagian kecil pelabuhan yang ada di Indonesia. Pelabuhan lain dimiliki pihak swasta dan juga yang masih dioperasikan pemerintah merupakan potensi besar untuk menjadi target pengembangan konektivitas bagi PT Pelabuhan

ports by utilizing digital technology, while improving the quality of port services is carried out by providing customer-centric services. In addition, performance improvement is also carried out by starting the development of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sustainable ports. The final focus of this pillar is to prepare PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to expand regionally in the Southeast Asian Region.

2. Strengthening the Logistics Ecosystem
The second strategic pillar is carried out to build relationships with marine and land logistics ecosystem players to optimize national logistics costs. The focus of this strategic pillar is to establish cooperation and also the potential for system or service integration with sea and land logistics players so that logistics costs can be optimized, as well as establishes cooperation with industrial/logistics areas to encourage increased goods traffic.

Cooperation with industrial/logistics areas is needed to support connectivity with the hinterland, as well as facilitate the provision of end-to-end logistics services for industrial players. Relationships exist with industrial estate players in the same area as the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) port who have the potential to improve services for customers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in terms of speed and convenience.

Cooperation with land logistics businesses is also very important due to the role played by land transportation for bringing goods out of ports and delivering the goods to the end-users. Cooperation with land logistics businesses will improve the port operations performance as it has the potential to increase flow throughput. The land logistics in question are not limited to trucks, but also includes rail transportation as a land logistics solution out of ports.

3. Maritime Supply Chain Efficiency
The third strategic pillar aims to improve the maritime supply chain efficiency in Indonesia. The focus of this strategic pillar is to expand the national port network. Although PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is a major player and the backbone of ports in Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) only owns a small portion of ports in Indonesia. Other ports are owned by the private sector and also by the government and have the potential to become a target for connectivity development for PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Integration between port networks, transportation

Indonesia (Persero). Selain itu, integrasi antar jaringan pelabuhan, moda transportasi dan kawasan pendukung (i.e. kawasan industri/logistik) juga menjadi fokus pilar.

4. Peningkatan *Value* Perusahaan
Pilar strategis keempat dilakukan untuk meningkatkan *value* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dengan cara memperkuat struktur keuangan perusahaan agar dapat terciptanya sistem keuangan yang *prudent* dan stabil, mengoptimalkan pengelolaan aset, dan memfokuskan perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara vertikal dan horizontal dengan memanfaatkan kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

- ***Enablers***
Seluruh pilar strategis didukung oleh adanya *enablers* yang harus direalisasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sub-pilar strategis *enablers* mencakup bidang-bidang pendukung keberjalanan bisnis utama, yaitu pengembangan organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk mendorong efisiensi bisnis, pengembangan inovasi yang berkelanjutan, pengembangan kapabilitas dan kualitas SDM, serta penguatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (termasuk pengembangan integrasi sistem perusahaan (Ops dan Non-Ops) serta integrasi dengan sistem *stakeholders*/eksternal i.e. NLE).

ALIGNMENT AGENDA PRIORITAS BUMN

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ini disusun selaras dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Rencana strategis Kementerian BUMN. Proses *alignment* antara RJPP perusahaan dengan RJPP Kementerian BUMN dilakukan dengan menyelaraskan komponen pilar strategis dengan agenda prioritas Kementerian BUMN dapat dilihat di Gambar Matriks.

modes and supporting areas (i.e. industrial/logistics areas) is also this pillar's focus.

4. Increasing Company Value
The fourth strategic pillar is to increase the value of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), by strengthening the Company's financial structure to create a prudent and stable financial system, optimize asset management, and focus the Company on developing business vertically and horizontally by utilizing PT Pelabuhan Indonesia (Persero) existing capabilities and competencies.

- **Enablers**
All strategic pillars are supported by enablers that must be realized by PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The strategic sub-pillars for enablers include areas of support for the main business operations, namely the development of the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) organization to promote business efficiency, development of sustainable innovations, development of HC capabilities and quality, as well as strengthening the use of technology and information systems (including development of integration company systems (Ops and Non-Ops) and integration with stakeholder/external systems i.e. NLE)'

SOE PRIORITY AGENDA ALIGNMENT

The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) RJPP was prepared in line with the Ministry of SOEs Strategic Plan for 2020-2024 as stated in the Minister of SOEs Regulation No. PER-08/MBU/08/2020 dated August 7, 2020 concerning the Ministry of SOEs Strategic Plan. The alignment process between the Company's RJPP and the Ministry of SOEs RJPP is carried out by aligning the strategic pillars components with the Ministry of SOEs priority agenda, as shown in Figure of Matrix.

Business Model Innovation

1. Standardisasi operasi pelabuhan
2. Pengembangan infrastruktur dan peralatan pelabuhan
3. *Key account management* yang terintegrasi
4. *Additional marine service offering* untuk *key account*
5. Pengadaan bersama/terpusat
6. Restrukturisasi organisasi dan tata kelola Pelindo
7. KPI terintegrasi untuk mengukur kinerja
8. Pembuatan klaster dan model bisnis
9. Penguatan *corporate branding* dan *marketing-comm*
10. Perencanaan penerapan *sustainability effort* di pelabuhan *(green port)*
11. Pengembangan fungsi *shared services*

1. Standardize port operations
2. Develop port infrastructure and equipment
3. Integrate key account management
4. Offer additional marine services for key accounts
5. Joint/centralized procurement
6. Restructure Pelindo organization and governance
7. Integrate KPIs to measure performance
8. Create cluster and business model
9. Strengthen corporate branding and marketing-comm
10. Plan the implementation of sustainability efforts at the ports (green port)
11. Develop shared services function

Technology Leadership

1. Digitalisasi dan sistemasi operasi kepelabuhan
2. Pemanfaatan *data analytics* untuk pengembangan bisnis
3. Implementasi *enterprise architect* dan IT *masterplan*

1. Digitize and systemize port operations
2. Use data analytics for business development
3. Implement enterprise architect and IT master plan



Energize Investment

1. Penurunan/optimalisasi *financing cost*
2. Optimalisasi bisnis *core* dan *non-core* untuk memperluas akses pendanaan
3. Alokasi modal terintegrasi
4. Pengembangan *supply chain financing*
5. Optimalisasi aset

1. Reduce/optimize financing costs
2. Optimize core and non-core businesses to expand access to funding
3. Integrate capital allocation
4. Develop supply chain financing
5. Asset optimization

Economic & Social Value for Indonesia

1. Pengembangan layanan operasi TUKS dengan bekerja sama dengan BUMN dan swasta
2. Pengembangan layanan operasi pelabuhan milik kementerian perhubungan
3. Pengembangan potensi pelabuhan melalui kerja sama dengan *strategic partners* (e.g. INA)
4. Eksplorasi kerja sama untuk pengembangan international *transhipment hub*
5. Kerja sama dengan pelaku bisnis pelayaran domestik
6. Kerja sama antar pelabuhan untuk optimalisasi konsep *hub and spoke* dengan integrasi data
7. Perencanaan ekspansi regional di bisnis kepelabuhan
8. Kerja sama dengan pelaku industri logistik darat
9. Kerja sama dengan kawasan industri/logistik

1. Develop TUKS operation services in collaboration with BUMN and the private sector
2. Develop port operation services belonging to the ministry of transportation
3. Develop port potential through collaboration with strategic partners (e.g. INA)
4. Explore cooperation for developing international transshipment hubs
5. Cooperate with domestic shipping businesses
6. Cooperate with ports to optimize the concept of hub and spoke with data integration
7. Plan for regional expansion in the port business
8. Cooperate with land logistics industry businesses
9. Cooperate with industrial/logistics areas

Unleash Talent

1. Program L&D terintegrasi untuk standarisasi dan peningkatan kualitas SDM
2. Sentralisasi *knowledge management* kepelabuhan
3. Internalisasi budaya

1. Integrate L&D program to standardize and improve HC quality
2. Centralize port knowledge management
3. Internalize culture

Gambar Matriks Keterkaitan Sub-Pilar Strategis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Agenda Prioritas Kementerian BUMN
Sumber: Analisis BCG 2021

Figure of Matrix Strategic Sub-Pillar of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the Priority Agenda of the Ministry of SOEs
Source: 2021 BCG Analysis

ROADMAP PERUSAHAAN

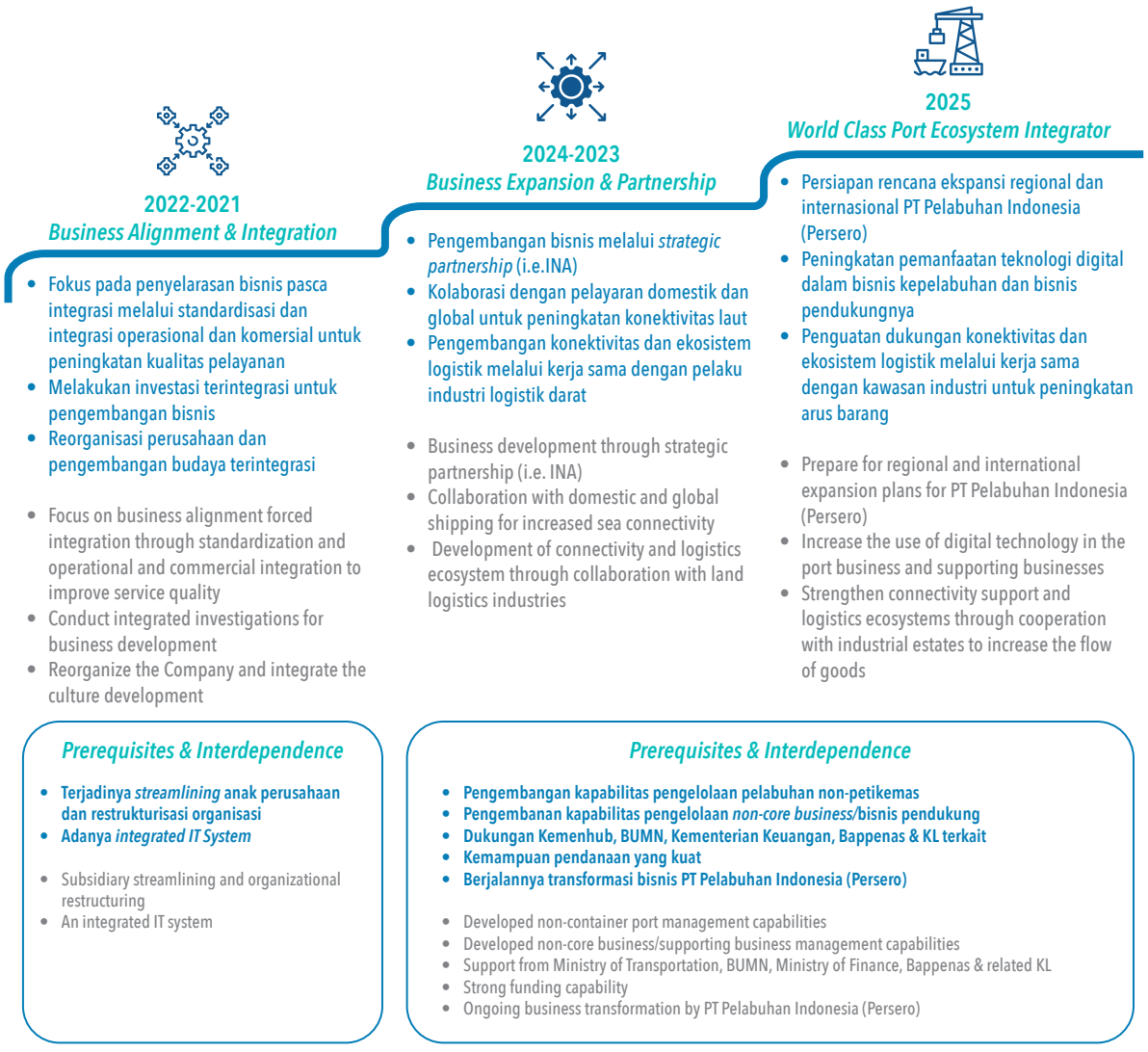
Untuk memastikan agar proses pencapaian sasaran sesuai dengan strategi dan visi yang telah ditetapkan untuk 2025, maka perlu disusun *roadmap* (peta jalan) yang berfungsi sebagai *guidance* (panduan) yang akan memberikan gambaran terkait proses, tahapan, dan capaian yang harus diprioritaskan untuk mencapai sasaran akhir atau visi perusahaan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyusun *roadmap* hingga akhir periode RJPP ini di mana sasaran perusahaan yang hendak diraih akan menjadi acuan dalam proses implementasi strategi pada setiap tahunnya. Adapun *roadmap* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

COMPANY ROADMAP

To ensure the achievement of goals in accordance with the strategy and vision for 2025, a roadmap was developed as a guide to provide an overview of the processes, stages, and achievements that must be prioritized to achieve the Company's ultimate target or vision.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has compiled a roadmap until the end of this RJPP period where the Company's goals to be achieved will be a reference for the strategy implementation process each year. The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) roadmap is as follows:



Gambar *Roadmap* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk tahun 2021-2025 Sumber: Analisis BCG, 2021
Roadmap Figure of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2021-2025 Source: BCG Analysis, 2021

Berikut penjelasan untuk masing-masing *roadmap* pada setiap tahun:

1. **2021-2022: *Business Alignment and Integration***
   Setelah proses penggabungan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di tahun 2021, maka tahun 2021 hingga 2022 akan menjadi fase *business alignment and integration* di mana akan berfokus pada:
   a. Fokus pada penyelarasan bisnis pasca integrasi melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan;
   b. Melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis; dan
   c. Reorganisasi perusahaan dan pengembangan budaya terintegrasi.

2. **2023-2024: *Business Expansion and Partnership***
   Pada tahun 2023-2024, setelah penyelarasan dan integrasi berjalan lancar maka PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan mulai fokus untuk melakukan ekspansi dan menjalin kerja sama bisnis di mana akan fokus pada:
   a. Peningkatan Pengembangan bisnis melalui *Strategic Partnership* (i.e. INA);
   b. Kolaborasi dengan pelayaran domestik & global untuk peningkatan konektivitas laut; dan
   c. Pengembangan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan pelaku industri logistik darat.

3. **2025: *World-Class Port Ecosystem Integrator***
   Setelah melakukan ekspansi dan kerja sama dalam rangka pengembangan bisnis, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan fokus mewujudkan *World Class Port Ecosystem Integrator* melalui:
   a. Persiapan rencana ekspansi regional dan internasional PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   b. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis kepelabuhan & bisnis pendukungnya; dan
   c. Penguatan dukungan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan kawasan industri untuk peningkatan arus barang.

Mengingat semua *milestone* pada setiap *roadmap* yang telah direncanakan adalah "pijakan" untuk mencapai *World-Class Port Ecosystem Integrator,* maka penting bagi perusahaan untuk memastikan dan mendayagunakan semua sumber daya yang ada untuk menjalankan semua *strategic pillars* beserta *key enablers* sehingga *milestone* dan sasaran perusahaan dapat tercapai.

PROYEK STRATEGIS 2021

Pembangunan Proyek Strategis pada tahun 2021 di antaranya adalah Pembangunan Terminal Kijing di Kalimantan Barat, Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru di Tanjung Priok, Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru (*New Priok Eastern Access*), Pembangunan Terminal Teluk Lamong, Pembangunan Bali *Maritime Tourism Hub* (BMTH), dan Pembangunan Makassar *New Port.*

The following explains the roadmap for each period:

1. **2021-2022: Business Alignment and Integration**
   After the merger of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, and Pelindo IV to become PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2021, 2021 to 2022 will be a phase of business alignment and integration which will focus on:
   a. Post-integration business alignment through standardization and operational and commercial integration to improve service quality;
   b. Integrated investments for business development; and
   c. Company reorganization and integrated culture development.

2. **2023-2024: Business Expansion and Partnership**
   In 2023-2024, after the alignment and integration runs smoothly, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will begin to focus on expanding and establishing business partnerships that will focus on:
   a. Improved business development through Strategic Partnerships (i.e. INA);
   b. Collaboration with domestic & global shipping for increased sea connectivity; and
   c. Development of connectivity and logistics ecosystem through collaboration with land logistics industry players.

3. **2025: World-Class Port Ecosystem Integrator**
   After expanding and collaborating for its business development, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will focus on becoming a World Class Port Ecosystem Integrator through:
   a. Preparing regional and international expansion plans for PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   b. Increasing the use of digital technology in the port business & supporting businesses; and
   c. Strengthening connectivity support and logistics ecosystem through cooperation with industrial estates to increase goods traffic.

As all milestones in each roadmap have been planned as the "steps" to achieve World-Class Port Ecosystem Integrator, it is important for the Company to ensure and utilize all available resources to carry out all strategic pillars along with key enablers so the Company's milestones and goals can be achieved.

STRATEGIC PROJECTS 2021

Strategic project developments in 2021 included the construction of the Kijing Terminal in West Kalimantan, the construction of the Kalibaru Container Terminal in Tanjung Priok, the construction of the Kalibaru Eastern Access Road (New Priok Eastern Access), the construction of the Teluk Lamong Terminal, the construction of the Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), and Makassar New Port Development.

PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING

Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung program tol laut yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan konektivitas laut serta meningkatkan daya saing produk sumber daya alam dari Kalimantan. Terminal Kijing diproyeksikan untuk menjadi *hub port* di kawasan regional yang dirancang memiliki fasilitas terminal petikemas, curah cair, curah kering dan *multipurpose* berstandar internasional serta memiliki kapasitas *ultimate* hingga 2 juta TEUs/tahun (petikemas), 12 juta ton/tahun (curah cair), 15 juta ton/tahun (curah kering), dan 1 juta ton/tahun (*multipurpose*).

Pembangunan Terminal Kijing Phase 1 tahun 2021 terealisasi sebesar Rp411,23 miliar atau terserap 95,54% dari nilai RKAP 2021 sebesar Rp430,44 miliar. Realisasi tersebut di antaranya adalah untuk pembangunan fisik terminal di mana sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai progres 91,01%. Saat ini, pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan *finishing* pada area dermaga, proses rekonstruksi pada area *trestle, Port Management Area* (PMA) dan *Piperack*. Untuk pekerjaan area darat yaitu pekerjaan bangunan fasilitas darat (Gedung Kantor, *Container Freight Station* (CFS), *Workshop* dan lainnya), pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan instalasi fasilitas IT dan *plumbing*, pekerjaan relokasi aset, serta pekerjaan pembangunan pagar pengaman perimeter pada lahan 200 Ha.

KIJING TERMINAL DEVELOPMENT

The Kijing Terminal construction and development is a National Strategic Project (PSN) to support the sea highway program launched by the Government to improve marine connectivity and increase the competitiveness of natural resource products from Kalimantan. Kijing Terminal is projected to become a hub port in the regional area, and has been designed to international standards for containers, liquid bulk, dry bulk and multipurpose terminal facilities and has an ultimate capacity of up to 2 million TEUs/year (containers), 12 million tons/year (liquid bulk), 15 million tons/year (dry bulk), and 1 million tons/year (multipurpose).

The Kijing Phase 1 Terminal construction costs in 2021 were Rp411.23 billion or 95.54% of the 2021 RKAP target of Rp430.44 billion. These costs include the physical construction of the terminal where until the end of 2021 the progress has reached 91.01%. Currently, finishing work being carried out on the wharf area, with reconstruction in the trestle area, Port Management Area (PMA) and Piperack. The land area work includes land facility building work (Office Buildings, Container Freight Stations (CFS), Workshops and others), mechanical electrical work, IT facility installation work and plumbing, asset relocation work, as well as construction of a perimeter safety fence on 200 Ha of land.



Pekerjaan *Port Management Area* (PMA)
Port Management Area (PMA) work



Pekerjaan Dermaga
Wharf work



Pekerjaan Bangunan Fasilitas Darat
Land facility building work



Pekerjaan Lapangan Penumpukan
Stacking field work



Pekerjaan *Trestic* dan *Piperack*
TRESTIC and PIPERACK work



Pekerjaan *Piperack*
Piperack's work



Aerial View



Pekerjaan *Causeway* dan *Piperack*
Causeway and Piperack work

PEMBANGUNAN TERMINAL KALIBARU

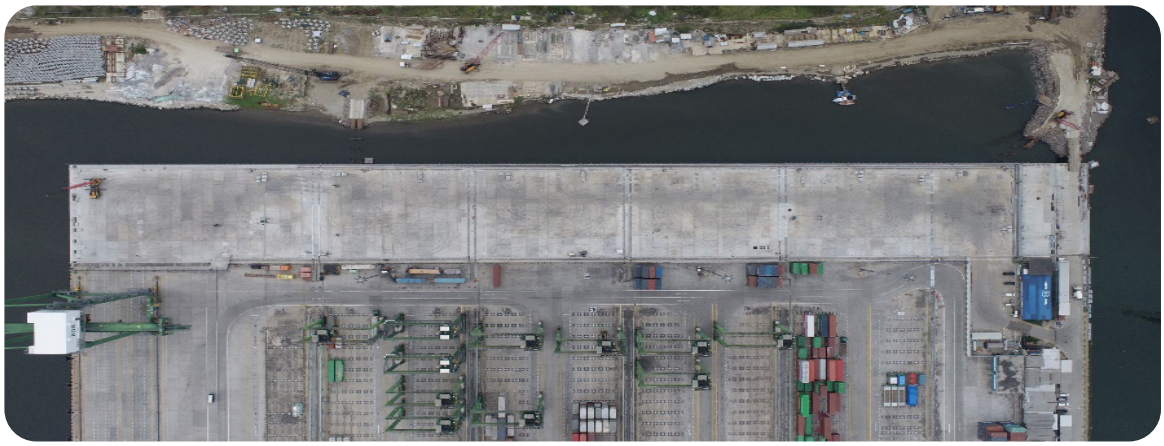
Pembangunan Terminal Kalibaru bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka mendukung distribusi logistik nasional. Pembangunan Terminal Kalibaru *Phase* 1A (CT1 dan Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam) telah selesai dan telah beroperasi sejak September 2016. Sementara, pekerjaan

KALIBARU TERMINAL CONSTRUCTION

The Kalibaru Terminal construction involves increasing the Tanjung Priok Port capacity to support the distribution of national logistics. The Kalibaru Terminal Phase 1A (CT1 construction, and Channel and Pond Dredging Work) has been completed and has been operating since September 2016. Meanwhile, the work

yang saat ini sedang dilaksanakan adalah pembangunan fisik CY 57M dan *Breakwater Type C Disposal B,* di mana sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 telah mencapai progres sebesar 97,49% dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 21 (dua puluh satu) bulan sejak bulan Agustus 2020 atau berakhir pada bulan Mei 2022.

currently being carried out is the physical construction of CY 57M and Breakwater Type C Disposal B, which by the fourth quarter of 2021 had progressed by 97.49%, over an implementation period of 21 (twenty one) months from August 2020 and ending in May 2022.



Telah Selesainya Pembangunan *Container Yard* 57M
Construction of the 57M container yard completed

Pembangunan Terminal Kalibaru Utara tahun 2021 terealisasi sebesar Rp480,05 miliar atau terserap 71,96% dari nilai RKAP Tahun 2021 sebesar Rp667,10 miliar. Proyek lanjutan dari Pembangunan Terminal Kalibaru adalah konstruksi Terminal Kalibaru *Phase* 1B yang saat ini sedang dalam proses pengadaan.

The Kalibaru Utara Terminal construction costs in 2021 were Rp480.05 billion, or 71.96% of the 2021 RKAP target of Rp667.103 billion. The Kalibaru Terminal construction continuation project involves the Kalibaru Terminal Phase 1B construction, which is currently in the procurement process.

PEMBANGUNAN JALAN AKSES TIMUR KALIBARU

Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru (*New Priok Eastern Access*/NPEA) bertujuan untuk menjadi askes utama dalam operasional pengembangan jangka panjang Terminal Kalibaru yang direncanakan akan membangun Terminal Petikemas (CT-2 dan CT-3) dengan kapasitas masing-masing 1,5 juta TEUs/tahun dan Terminal Produk (PT-1 dan PT-2) dengan kapasitas masing-masing 500,000 m3. Jalan akses tersebut akan terhubung langsung dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing sehingga dapat menghubungkan Terminal Kalibaru menuju ke *hinterland* atau kawasan industri di bagian timur Jakarta (Cibitung, Cikarang, dan Karawang).

KALIBARU EASTERN ACCESS ROAD CONSTRUCTION

The Kalibaru Eastern Access Road (New Priok Eastern Access/NPEA) construction aims to become the main access in the long-term development operation of the Kalibaru Terminal, with plans to build Container Terminals (CT-2 and CT-3) with a capacity of 1.5 million TEUs/year and Product Terminals (PT-1 and PT-2) with a capacity of 500,000 m3 each. The access road will be directly connected to the Cibitung-Cilincing Toll Road that will connect the Kalibaru Terminal to the hinterland or industrial areas in the eastern part of Jakarta (Cibitung, Cikarang, and Karawang).

PEMBANGUNAN BALI *MARITIME TOURISM HUB* (BMTH)

Pembangunan dan pengembangan kawasan *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH) bertujuan untuk memimpin hub pariwisata di kawasan Indonesia Timur. BMTH dikembangan menggunakan konsep *green port* yang berfokus pada pelestarian alam bakau dan ruang hijau di sekitar Pelabuhan Benoa. Rencana bisnis BMTH berfokus pada pengembangan sektor pariwisata di 6 (enam) lini utama yaitu: lini bisnis *cruise;* lini bisnis *yacht;* lini bisnis perikanan; lini bisnis logistic (*Liquefied Natural Gas*/LNG dan Petikemas); lini bisnis atraksi dan taman wisata; serta lini bisnis UMKM dan ritel. Terdapat 5 (lima) zona pengembangan *Bali Maritime Tourism Hub*, yaitu:

BALI MARITIME TOURISM HUB (BMTH) CONSTRUCTION

The development and construction of the Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) aims to create a leading tourism hub in the East Indonesia region. BMTH uses the green port concept that focuses on preserving the mangroves and green spaces around Benoa Harbor. BMTH's business plan focuses on developing the tourism sector in 6 (six) main business lines: cruise; yacht; fishery; logistics (LNG and Containers); attractions and parks; as well as MSME and retail. There are 5 (five) development zones in the Bali Maritime Tourism Hub:

1. Zona Pelabuhan Eksisting, merupakan area eksisting dari Pelabuhan Benoa yang akan difokuskan pada sektor pariwisata, terutama terminal *cruise;*
2. Zona Perikanan, terletak pada sisi barat pelabuhan eksisting yang akan difokuskan pada sektor perikanan;
3. Zona Pengembangan I, merupakan area reklamasi yang berada di sisi barat Pelabuhan Benoa eksisting, akan difokuskan pada sektor pariwisata khususnya *yacht*, *fish market*, dan Taman Segara Kerthi;
4. Zona Pengembangan II, merupakan area reklamasi yang berada di sisi timur laut Pelabuhan Benoa eksisting, akan difokuskan pada sektor logistik yaitu LNG, dan Petikemas; dan
5. Zona Bali Tenten, akan difokuskan sebagai fasilitas pendukung pariwisata seperti *recidental area, conference center* dan ritel dengan mengusung konsep *local content in modern design.*

Pembangunan BMTH sampai dengan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp327,94 miliar atau terserap 76,79% dari nilai RKAP Tahun 2021 sebesar Rp427,07 miliar. Pekerjaan yang telah diselesaikan tahun 2021 yaitu pekerjaan Penyiapan Infrastruktur Dasar Dan Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata di Pelabuhan Benoa (Pekerjaan Jalan, Saluran, Pedestrian, dan Lansekap) dan Pekerjaan Penyiapan Infrastruktur Dasar dan Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata di Pelabuhan Benoa (Pekerjaan Fasilitas Umum dan *Artwork*). Adapun pekerjaan yang masih dalam tahap konstruksi yaitu pekerjaan *revetment* dan *retaining wall Dumping* 1 dan pekerjaan *revetment* dan *retaining wall dumping* 2 dan Dermaga Curah Cair Pelabuhan Benoa.

1. Existing Port Zone, the existing area of Benoa Harbor that will focus on the tourism sector, especially the cruise terminal;
2. Fishery Zone, located on the west side of the existing port that will focus on the fishery sector;
3. Development Zone I, a reclamation area located on the west side of the existing Benoa Harbor that will focus on the tourism sector, especially yachts, fish market, and Segara Kerthi Park;
4. Development Zone II, a reclamation area located on the northeast side of the existing Benoa Port that will focus on the logistics sector for LNG and Containers; and
5. Bali Tenten Zone, that will focus on supporting tourism facilities such as residential areas, conference centers and retail by using the concept of local content in modern design.

The BMTH development costs in 2021 were Rp327.94 billion or 76.79% of the 2021 RKAP target of Rp427.07 billion. The work completed in 2021 included work on the preparation of the basic infrastructure and public facilities to support tourism at the Benoa port (roads, canals, pedestrian and landscape works) and the preparation of basic infrastructure and public facilities to support tourism at the Benoa port (public facilities and artwork). The remaining work still in the construction stage includes the Dumping 1 revetment and retaining wall work and Dumping 2 revetment and retaining wall work and the Benoa Harbor Liquid Bulk Wharf.

































PEMBANGUNAN MAKASSAR *NEW PORT*

Makassar *New Port* merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 109 Tahun 2020 untuk mendukung program Tol Laut yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Makassar *New Port* juga dibangun untuk mendukung Pelabuhan Makassar yang akan segera mencapai batas kapasitas maksimumnya.

Pembangunan Makassar *New Port* Tahap IB dan Tahap IC sampai dengan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp930,97 miliar atau terserap 111,08 % terhadap RKAP Tahun 2021 sebesar Rp838,10 miliar. Progres fisik konstruksi Pembangunan Makassar *New Port* Tahap IB dan Tahap IC sampai dengan Tahun 2021 telah mencapai 84,67% (delapan puluh empat koma enam tujuh persen). Saat ini, pekerjaan yang sedang dilaksanakan mencakup:

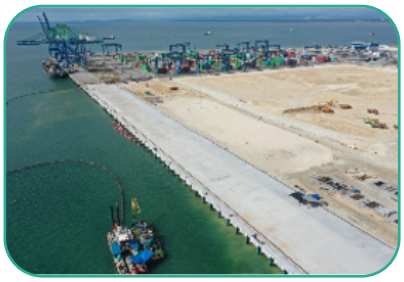
1. Pelaksanaan Pekerjaan Dermaga;
2. Pelaksanaan Pekerjaan Lapis Fondasi *Paving;*
3. Pelaksanaan Pekerjaan *Rehandling* Pasir Depan Dermaga; dan
4. Pengerukan Kolam Pelabuhan.

MAKASSAR NEW PORT CONSTRUCTION

The Makassar New Port is a National Strategic Project (PSN) as stated in Republic of Indonesia Presidential Regulation (Perpres RI) No. 109 of 2020 to support the Sea Highway program to increase Indonesia's economic growth. The Makassar New Port was also built to support the existing Makassar Port, which will soon reach its maximum capacity limit.

The Makassar New Port Phase IB and Phase IC construction costs in 2021 were Rp924.98 billion, or 110.37% of the 2021 RKAP target of Rp838.10 billion. The physical progress in the Makassar New Port Development Phase IB and Phase IC in 2021 reached 84.67% (eighty four point six seven percent). The remaining work in progress includes:

1. Implementation of Wharf Works;
2. Implementation of Paving Foundation Work;
3. Implementation of Sand Rehandling Work in front of the Wharf; and
4. Harbor Pond Dredging.







PENGEMBANGAN KAPASITAS TERMINAL TELUK LAMONG

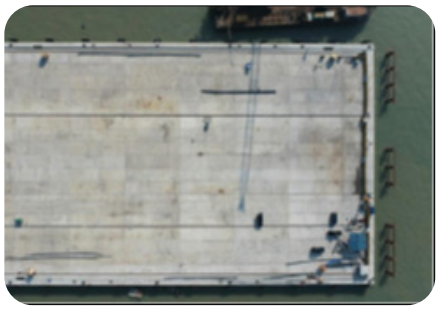
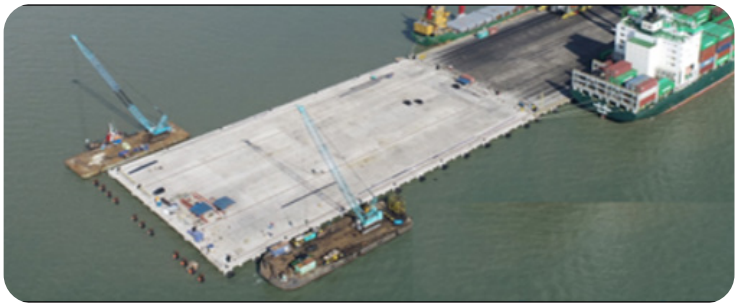
Pengembangan Kapasitas Terminal Teluk Lamong sampai dengan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp76,61 miliar atau terserap 33,31% dari nilai RKAP 2021 sebesar Rp230 miliar. Realisasi tersebut antara lain Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Petikemas 150x80m di Terminal Teluk Lamong dan Pekerjaan Kehandalan Instalasi Listrik Terminal Teluk Lamong.

Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Petikemas 150x80 Terminal Teluk Lamong, untuk pelaksanaan fisik lapangan telah selesai 100% (seratus persen). Sebagai tambahan informasi, untuk pekerjaan utama pembangunan dermaga petikemas 150x80m telah selesai 100% (seratus persen) dan telah dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2021. Sehingga nantinya Dermaga Petikemas Terminal Teluk Lamong dalam menunjang aktivitas Bongkar Muat (B/M) domestik dan internasional, panjang keseluruhan tambatan domestik 600 meter dan internasional 650 meter dan tambatan tersebut disebut mampu menyandari empat kapal sekaligus atau maksimal kapal dengan ukuran maksimal 50.000 DWT. Ke dalaman kolam dalam dermaga domestik mencapai -11 mLWS dan internasional -14 mLWS.

TELUK LAMONG TERMINAL CAPACITY DEVELOPMENT

Teluk Lamong Terminal Capacity Development costs in 2021 were Rp76.61 billion, or 33.31% of the 2021 RKAP target of Rp230 billion. Work completed included the 150x80m Container Wharf Extension Work at Teluk Lamong Terminal, and the Electrical Installation Reliability Work at Teluk Lamong Terminal.

The 150x80 container wharf extension work at Teluk Lamong Terminal, and the physical implementation of the fields has been completed 100% (one hundred percent). The main work on the 150x80m container wharf construction was completed 100% (one hundred percent) and the handover took place on December 31, 2021. So that the Teluk Lamong Terminal Container wharf can support domestic and international B/M activities, the total length of the domestic mooring is now 600 meters, and the international mooring is now 650 meters. The mooring has a capacity for anchoring four ships at once, or ships with a maximum size of 50,000 DWT. The depth of the pond in the domestic wharf reaches -11 mLWS, and international wharf reaches -14 mLWS.





ASPEK PEMASARAN

Uraian aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran serta pangsa pasar atas produk dan jasa Pelindo

MARKETING ASPECT

Description of the marketing aspects includes marketing strategies as well as market share for Pelindo products and services.

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran yang tepat akan mendorong peningkatan pangsa produk dan jasa Pelindo. Berikut adalah uraian mengenai strategi pemasaran Pelindo yang dilakukan masing-masing regional Pelindo di tahun 2021.

MARKETING STRATEGY

Following the right marketing strategy will encourage an increase in Pelindo's products and services share. The following explains the Pelindo marketing strategy carried out by each Pelindo region in 2021.

REGIONAL 1

Regional 1 menerapkan konsep yang menitikberatkan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Regional 1 berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan dan memperluas pangsa pasar yang meliputi beberapa aspek terkait yaitu:

1. **Aspek Produk dan Layanan**
   Dalam memberikan layanan jasa kepelabuhanan, Regional 1 telah memberikan layanan jasa sesuai dengan target kinerja operasional dan diharapkan dapat juga memenuhi harapan pelanggan. Layanan jasa yang diberikan berfokus pada sisi waktu yaitu kecepatan layanan (pelayanan pemanduan, penundaan dan juga bongkar muat barang)

REGIONAL 1

The marketing strategy carried out by Regional 1 focuses on improving the quality of customer service and expanding market share, which includes several related aspects as follows:

1. **Product and Service Aspect**
   In providing port services, Regional 1 has provided services in accordance with operational performance targets and is expected to also meet customer expectations. The services provided focus on the time side, namely the speed of service (scouting services, delays and also loading and unloading of goods) and service quality (accuracy and work safety).

dan kualitas layanan (ketepatan dan keselamatan kerja). Untuk memberikan peningkatan kualitas layanan dari sisi peralatan, Regional 1 telah menyusun rencana investasi untuk beberapa Cabang Pelabuhan antara lain yaitu penambahan kapal tunda di Cabang Belawan dan Dumai. Selain dari sisi kegiatan operasional, Regional 1 juga telah menyediakan wadah untuk menampung keluhan-keluhan pelanggan dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan secara *general* yaitu *customer care* (komunikasi melalui telepon kantor dan seluler);

2. **Aspek Tarif**
   Regional 1 telah mengeluarkan kebijakan pemberian keringanan (diskon/reduksi) tarif dan atau insentif (*cashback*) khususnya pada segmen pelayanan jasa kapal. Selama masa pandemi tahun 2021, Regional 1 memberikan relaksasi kepada *customer* yaitu *free storage*. Selain itu, Regional 1 juga telah memberikan keringanan (diskon) kepada salah satu TOP *Customer* di Cabang TPKB (atas permintaan pelanggan tersebut) dengan melalui evaluasi terlebih dahulu;
3. **Aspek Hubungan Pelanggan dan *Stakeholder***
   Salah satu faktor penting dalam strategi pemasaran adalah menjaga hubungan baik dan harmonis dengan para *stakeholder*. Regional 1 telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan engagement dengan pelanggan dan *stakeholder*. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
   a. Kegiatan Retensi *Customer* dan *Consultative Session*
      Kegiatan retensi *customer* dan *consultative session* ini sebagai media untuk mendengarkan *feedback* dan meningkatkan *engagement* dengan pengguna jasa terhadap kinerja pelayanan Regional 1;
   b. Kegiatan *Customer Appreciation*
      Kegiatan apresiasi pengguna jasa kepada *top* 15 kontributor pendapatan di lingkungan Regional 1 yaitu sebagai penghargaan atas kontribusi pendapatan terbesar pengguna jasa dan sebagai media untuk mendengarkan *feedback* dari pengguna jasa terhadap kinerja pelayanan tahun sebelumnya dan juga harapan terhadap kinerja pelayanan tahun berikutnya;
   c. Kegiatan *Customer Reward*
      Merupakan media apresiasi dan meningkatkan *engagement* kepada pelanggan khususnya pelanggan utama (*top contributor*). Kegiatan ini dilakukan di Yogyakarta selama 4 (empat) hari; dan
   d. Kegiatan *Customer Hearing*
      Dilakukan pada akhir tahun 2021 dengan tema "*Moving Toward Synergy and Collaboration In Port Performance Improvement*".

REGIONAL 2

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Regional 2 fokus terhadap pengelolaan dan peningkatan layanan kepada pelanggan. Dengan metode tersebut akan terjalin hubungan yang baik antara Regional 2 dengan pelanggan. Beberapa aspek yang mendukung strategi pemasaran antara lain:

1. **Aspek Hubungan Pelanggan dan *Stakeholder***
   Kegiatan pemasaran tidak lepas dengan hubungan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang baik dengan pelanggan maka

To provide improved service quality in terms of equipment, Regional 1 has prepared investment plan for several Port Branches, including the addition of tugboats at Belawan and Dumai branches. Apart from operational activities, Regional 1 has also provided a forum to accommodate customer complaints and also to answer customer questions in general, namely customer care (communication via office and cellular telephones);

2. **Tariff Aspect**
   Regional 1 has issued a policy of granting waivers (discounts/reductions) in tariffs and/or incentives (cashback), especially in the ship service segment. During the 2021 pandemic, Regional 1 gave relaxation to customers, namely free storage. In addition, Regional 1 has also provided relief (discount) to one of TOP Customers at TPKB Branch (at the customer›s request) through a prior evaluation;
3. **Customer and Stakeholder Relations Aspect**
   One of the important factors in marketing strategy is maintaining good and harmonious relationship with stakeholders. Regional 1 has carried out several activities aimed at increasing engagement with customers and stakeholders. The activities that have been carried out are as follows:
   a. Customer Retention Activities and Consultative Session
      The customer retention and consultative session activity serves as a medium for listening to feedback and increasing engagement with service users on Regional 1 service performance;
   b. Customer Appreciation Activities
      Service user appreciation activities to the top 15 revenue contributors in Regional 1, namely as an appreciation for the largest revenue contribution of service users and as a medium to listen to feedback from service users on service performance in the previous year and also expectations for service performance the following year;
   c. Customer Reward Activities
      Is a media of appreciation and increasing engagement with customers, especially the main customers (top contributors). This activity was carried out in Yogyakarta for 4 (four) days; and
   d. Customer Hearing Activities
      Held at the end of 2021 with the theme «Moving Toward Synergy and Collaboration in Port Performance Improvement»

REGIONAL 2

The marketing strategy in Regional 2 focuses on managing and improving customer service. By following this method, good relationships will be established between Regional 2 and customers. Several aspects that support the marketing strategy include:

1. **Customer and Stakeholder Relations Aspect**
   Marketing activities are important for building customer relationships. By fulfilling customer needs additional

segala hal kebutuhan pelanggan yang dapat menjadi potensi penambahan pendapatan perusahaan dapat di-*capture* dan difasilitasi sesuai kemampuan perusahaan. Selain itu untuk menjaga retensi pelanggan dan menarik minat pelanggan baru terhadap layanan yang diberikan oleh Regional 2, telah dilakukan beberapa kegiatan pemasaran berupa *customer visit* kepada pelanggan eksisting maupun calon pelanggan potensial serta kegiatan lain untuk meningkatkan *engagement* ke pelanggan seperti *customer gathering, customer awarding* dan *customer survey*. Dengan penggabungan PT Pelindo dan terbentuknya *subholding* yang menangani langsung kegiatan operasional pelabuhan, maka Regional 2 berperan sebagai *stakeholder management* untuk mendukung kelancaran bisnis dan operasional di cabang pelabuhan maupun *subholding* di lingkungan Regional 2;

2. **Aspek Produk dan Layanan**
   Dalam memasarkan produk dan layanan yang diberikan, Regional 2 telah melakukan sosialisasi ataupun publikasi di media sosial ataupun dalam forum pertemuan resmi di tingkat cabang ataupun regional. Selain itu, dalam memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan yang dibutuhkan, Regional 2 telah mengimplementasikan beberapa portal pengajuan layanan antara lain sistem *E-Service*, VMS, NPK-TOS, i-Hub dan sistem operasi lain yang didukung juga dengan tersedianya *channel E-Care* untuk penanganan keluhan pelanggan. Sebagai media *marketing tools*, informasi mengenai jenis layanan dan fasilitas di lingkungan Regional 2 juga telah disusun dalam bentuk *product catalogue;*
3. **Aspek Tarif**
   Terkait aspek tarif yang berlaku di lingkungan Regional 2 juga dapat dilihat oleh pelanggan melalui *website* perusahaan dan portal pengajuan layanan untuk menjamin transparansi tarif pelabuhan. Dalam menjaga persaingan dengan kompetitor, Regional 2 juga menerapkan beberapa kebijakan yang dapat diberikan kepada pelanggan sesuai kondisi di lapangan antara lain:
   a. Penawaran tarif diferensiasi dengan mekanisme kerja sama *Business to Business* (B to B);
   b. Pemberian *reward* atas capaian kontribusi pelanggan kepada Perseroan;
   c. Pemberian insentif berupa kompensasi atau kemudahan yang diberikan dalam rangka menjaga retensi pelanggan;
   d. Pemberian potongan tarif (diskon) sesuai ketentuan yang berlaku; dan
   e. Pemberian relaksasi jangka waktu pembayaran nota tagihan dalam kondisi tertentu.

REGIONAL 3

Menghadapi Persaingan bisnis yang semakin ketat di industri pelabuhan saat ini, Regional 3 telah menetapkan beberapa program pemasaran untuk dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan capaian pendapatan. Selama tahun 2021, berbagai program pemasaran seperti pengembangan produk/layanan bekerja sama dengan pihak pemerintah/swasta, menetapkan *pricing strategy* yang menarik bagi pelanggan, dan pengelolaan SDM komersial dilakukan secara terintegrasi untuk dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan perusahaan.

Company revenue can be captured and facilitated based on the Company's abilities. To retain existing customers and attract new customers to the services provided by Regional 2, several marketing activities have been carried out including customer visits to existing and potential customers and other activities to increase customer engagement such as customer gatherings, customer awards and customer surveys. Following the merger of PT Pelindo and the formation of a subholding to directly handle port operational activities, Regional 2 plays a stakeholder management role to support the smooth running of business and operations at the port branch and subholding in Regional 2;

2. **Product and Service Aspect**
   For marketing its products and services, Regional 2 has carries out socialization or publications on social media or through official meeting forums at the branch or regional level. To make it easier for customers to access the services they need, Regional 2 has implemented several service submission portals including the E-Service system, VMS, NPK-TOS, i-Hub and other operating systems supported by the E-Care channels for handling customer complaints. As a media marketing tool, information on the types of services and facilities in Regional 2 has also been compiled in a product catalog;
3. **Tariff Aspect**
   Customers can also view the tariff aspect in Regional 2 through the Company's website and service application portal to ensure transparency of port tariffs. To compete against its competitors, Regional 2 has also established several policies for customers, covering:
   a. Differentiation rates with a Business to Business (B to B) cooperation mechanism;
   b. Rewards for the achievement of customer contributions to the Company;
   c. Incentives in the form of compensation or facilities provided to maintain customer retention;
   d. Discount rates in accordance with applicable regulations; and
   e. Relaxation of invoice payment periods under certain conditions.

REGIONAL 3

Facing the increasingly fierce business competition in today's port industry, Regional 3 has established marketing programs to expand its market share and increase its revenue. During 2021, various marketing programs including product/service development in collaboration with the Government/private sector, setting attractive pricing strategies for customers, and managing commercial HC were instigated in an integrated manner to achieve the Company's targets. The Company also continued to improve its service quality by investing in

Perbaikan kualitas layanan juga terus dilakukan Perseroan dengan melakukan investasi pada peralatan dan fasilitas, standarisasi pelayanan, serta digitalisasi proses. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, selain melalui *event customer gathering*, Perseroan juga melakukan *redesign* pada pengelolaan suara pelanggan yang kini telah terintegrasi melalui sistem secara *online*. Hal ini tentu saja akan memudahkan pelanggan untuk menyampaikan suaranya baik berupa keluhan maupun kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan Perseroan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

equipment and facilities, standardizing services, and digitizing processes. To maintain good customers relationships, as well as the customer gatherings, the Company also redesigned customer voice management to integrate it through an online system. This will make it easier for customers to voice their complaints or criticisms and suggestions that can be used as a reference for the Company to make further improvements.

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Regional 3 selama tahun 2021 berfokus pada penetrasi pasar dan pengembangan produk/jasa eksisting dengan tujuan untuk memenuhi harapan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Adapun strategi yang dilakukan terbagi menjadi beberapa aspek, antara lain:

1. **Produk/Layanan**
   Selain melakukan investasi peralatan dan fasilitas pelabuhan untuk peningkatan kualitas produk/layanan yang diberikan kepada pelanggan, Regional 3 juga melakukan pengembangan produk/layanan seperti melakukan kerja sama dengan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), kerja sama pembangunan *shorebase*, kerja sama pengoperasian Pusat Logistik Berikat (PLB) dan paket layanan *port to door* atau *door to door service;*

2. **Saluran Promosi *(Promotion Channel)***
   Adapun saluran/media untuk mempromosikan produk/jasa kepada pelanggan yang telah dilakukan, antara lain:
   a. *Personal selling;*
   b. Pameran;
   c. Pengiklanan;
   d. *Customer gathering/sharing session;*
   e. *Customer visit;* dan
   f. Publikasi melalui media sosial dan media cetak.

3. **Sumber Daya Manusia/SDM *(People)***
   Strategi yang digunakan adalah dengan membentuk SDM untuk mendukung aktivitas pemasaran yang melaksanakan 2 (dua) fungsi berikut, antara lain:
   a. Fungsi *Sales* (Penjualan)
      Peran ini dilakukan oleh pelaksana *Marketing Sales Officer* (MSO) yang ahli dalam melakukan pemasaran dan memahami proses bisnis perusahaan. Fungsi ini berfokus pada peningkatan pengusahaan dan penjualan produk/jasa serta pangsa pasar; dan
   b. Fungsi Bina Pelanggan
      Peran ini dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan pelanggan yang berfokus pada pendukung fungsi *sales* (penjualan) dalam rangka memastikan pelanggan mendapat pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku, memastikan kepuasan pelanggan dan menangani atau menyelesaikan suara pelanggan.

4. **Harga *(Price)***
   Strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan tarif atau harga pada saat mempromosikan produk/jasa, antara lain:

Regional 3 marketing strategy during 2021 focused on market penetration and development of existing products/services with the aim of meeting expectations and increasing customer satisfaction. The strategies carried out covered several aspects, including:

1. **Products/Services**
   In addition to investing in port equipment and facilities to improve the customer products/services quality, Regional 3 also developed its products/services by collaborating with Terminals for Own Interest (TUKS), cooperating in shorebase development, and cooperating in operating Bonded Logistics Centers (PLB), and port to door or door to door service packages;

2. **Promotion Channel**
   The channels/media used to promote customer products/services included:
   a. Personal selling;
   b. Exhibitions;
   c. Advertising;
   d. Customer gathering/sharing session;
   e. Customer visits; and
   f. Publications in social media and print media.

3. **Human Capital/HC (People)**
   The strategy used is to build HC that supports marketing activities for the 2 (two) following functions:

   a. Sales Function
      This role is carried out by the Marketing Sales Officer (MSO), an expert in marketing and understanding of the Company's business processes. This function focuses on building the business and sales of products/services as well as market share; and
   b. Customer Development Function
      This role is carried out by customer service executives who focus on supporting the sales function to ensure customers receive services in accordance with applicable procedures, to ensure customer satisfaction, and to handle or resolve customer complaints or criticisms and suggestions.

4. **Price**
   The strategy involves using a tariff or price approach when promoting products/services, including:

a. Menawarkan tarif yang kompetitif dibandingkan pesaing;
b. Menawarkan tarif dengan paket *bundling* jasa;
c. Pemberian stimulus/diskon;
d. Komisi penjualan (*return commission*);
e. Memberikan kebijakan kelonggaran jangka waktu pembayaran (*term of payment*).

REGIONAL 4

Sesuai dengan arah pengembangan perusahaan antara lain perkuatan kemampuan pengelolaan pada lini bisnis utama dan terintegrasi dengan ekosistem logistik, ekstensifikasi bisnis di luar area wilayah kerja, mengupayakan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan non-komersil, dan pengembangan produk dan layanan pada lini bisnis utama, serta komersialisasi aset-aset yang kurang optimal, PT Pelindo (Persero) Regional 4 berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. **Aspek Layanan**
   a. Regional 4 berupaya untuk melakukan komersialisasi lahan dan bangunan yang belum optimal serta penempatan alat yang lebih fleksibel antar cabang sesuai kebutuhan;
   b. Untuk peningkatan *Level of Service* Regional 4 juga berupaya melakukan digitalisasi produk layanan kepelabuhanan baik pada segmen utama barang, petikemas dan kapal, juga pada segmen jasa terkait kepelabuhanan lainnya; dan
   c. Melakukan transformasi pada segmen layanan utama petikemas dan kapal.

2. **Aspek Pelanggan**
   a. Penerapan sistem manajemen hubungan pelanggan (*Customer Relationship Management*/CRM) berbasis digital dengan melakukan pengelolaan suara pelanggan terintegrasi; dan
   b. Pengelolaan *Key Account Management* (KAM) yakni pengelolaan kepada pelanggan utama untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kontribusi yang diberikan pelanggan kepada perusahaan dan mendorong pelanggan untuk meningkatkan kontribusi, loyalitas dan kepuasannya.

3. **Aspek Pasar**
   Peningkatan pangsa pasar dengan melakukan ekspansi regional di bisnis kepelabuhanan untuk meningkatkan pangsa pasar PBM untuk pelayanan petikemas dan non-petikemas pada wilayah non-derum Regional 4.

PANGSA PASAR

Secara keseluruhan realisasi *throughput* petikemas Pelindo tahun 2021 adalah sebesar 17,1 juta teus dan non-petikemas sebesar 146,2 juta ton. Realisasi arus petikemas mencapai 107% dari RKAP 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 22% dari realisasi tahun sebelumnya, sedangkan realisasi arus non-petikemas mencapai 107% dari RKAP 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 9% dari realisasi tahun sebelumnya.

a. Offering competitive rates compared to competitors;
b. Offering tariffs with service bundling packages;
c. Giving stimulus/discounts.;
d. Giving a sales commission (return commission);
e. Applying a terms of payment leniency policy.

REGIONAL 4

In line with the Company's development direction that includes strengthening management capabilities in the main business lines and integrating the logistics ecosystem, business extensification outside the work areas, looking for non-commercial ports management opportunities, developing products and services in the main business lines, as well as the less than optimal commercialization of assets, PT Pelindo (Persero) Regional 4 took the following strategic steps in several aspects:

1. **Service Aspect**
   a. Regional 4 looked to commercialize land and buildings that are less than optimal and to place more flexible tools between branches on an as-needed basis;
   b. To increase the Regional 4 Level of Service, it also looked to digitize port service products in the main goods, containers and ships segments, as well as in other port-related service segments; and
   c. To transform the main container and ship service segments.

2. **Customer Aspect**
   a. Implemented a digital-based customer relationship management (Customer Relationship Management/CRM) system by integrating it with customer voice management; and
   b. Utilized Key Account Management (KAM) to provide services in line with the customer's contribution to the Company, and to encourage customers to increase their contribution, loyalty and satisfaction.

3. **Market Aspect**
   Increased market share by conducting regional port business expansion to increase the PBM market share for container and non-container services in the non-drum Regional 4 area.

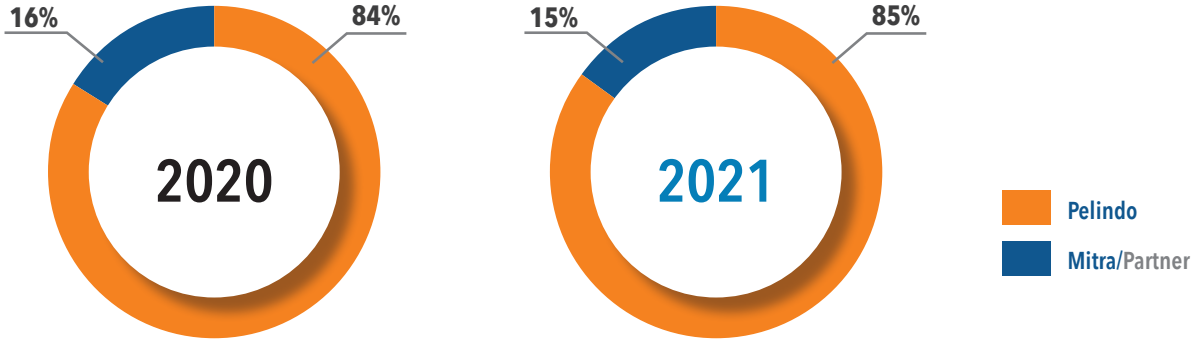
MARKET SHARE

Overall, Pelindo's container throughput in 2021 was 17.1 million TEUs and 146.2 million tons for non-containers. The container traffic reached 107% of the 2021 RKAP, an increase of 22% from the previous year's traffic, while the non-container traffic reached 107% of the 2021 RKAP and increased by 9% from the previous year's traffic.

Untuk terminal petikemas, rata-rata pangsa Pelindo pada tahun 2021 adalah sebesar 85%, meningkat dari tahun 2020 sebesar 84%. Hal ini berarti, sekitar 15% dari *throughput* petikemas Pelindo tahun 2021 dikerjakan oleh mitra. Sehingga masih terdapat peluang peningkatan pendapatan yang cukup besar jika Pelindo dapat memaksimalkan persentase dari arus petikemas yang dikerjakan sendiri.

For container terminals, Pelindo's average share in 2021 was 85%, an increase from 84% in 2020. This means that around 15% of Pelindo's container throughput in 2021 was carried out by partners. So there is still a significant opportunity to increase revenue if Pelindo can maximize the percentage of container traffic managed by itself.

Pangsa Pasar Petikemas Pelindo
Pelindo Container Market Share



Adapun data pangsa pasar tahun 2020-2021 untuk pelabuhan non-petikemas atau pelabuhan *multipurpose* disajikan pada tabel berikut:

The 2020-2021 market share for non-container ports or multipurpose ports is shown in the following table:

Tabel Pangsa Pasar Pelabuhan Non Petikemas
Non-Container Port Market Share

No	Uraian Description	Konsolidasi Consolidated						
			2021			2020		
		Satuan Unit	Trafik Traffic	*Stevedoring* Stevedoring	Pangsa Pasar Market Share	Trafik Traffic	*Stevedoring* Stevedoring	Pangsa Pasar Market Share
1	Petikemas Container	Box	2.350.965	1.806.782	77%	2.412.358	1.826.711	76%
2	*General Cargo*	Ton	8.760.370	2.406.851	27%	9.216.777	2.308.561	25%
		M^3	1.586.090	790.649	50%	1.188.118	371.840	31%
3	*Bag Cargo*	Ton	3.457.600	1.178.953	34%	11.063.795	1.206.095	11%
		M^3	1.376.755	72.417		13.901.368	-	0%
4	Curah Kering Dry Bulk	Ton	64.970.213	49.697.268	76%	67.605.438	53.196.790	79%
		M^3	-	-		-	-	0%
5	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	28.047.447	19.050.161	68%	43.219.826	18.362.795	42%
		M^3	-	-		-	-	-

Tabel Pangsa Pasar Pelabuhan Non Petikemas
Non-Container Port Market Share

No	Uraian Description	Konsolidasi Consolidated						
			2021			2020		
		Satuan Unit	Trafik Traffic	*Stevedoring* Stevedoring	Pangsa Pasar Market Share	Trafik Traffic	*Stevedoring* Stevedoring	Pangsa Pasar Market Share
6	Gas	MMBTU	18.393	18.393	100%	-	-	-
			422.137	-		310.860	-	-
7	Kendaraan Vehicles	Unit	641.286	118.116	18%	538.717	86.258	16%
8	Motor	Unit	42.571	71	0%	22.325	3.610	16%



TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha) yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya. Segmen usaha Pelindo dikelompokan ke dalam segmen usaha Operasi Kepelabuhanan dan Jasa Lainnya

REVIEW OF OPERATIONS PER BUSINESS

Segments are distinguishable parts of the Group involved in providing certain products or services (business segments), which are subject to risks and rewards that are different from those of other segments. Pelindo's business segments are grouped into the Port Operations and Other Services business segments.

PENJELASAN DAN PRODUKTIVITAS SEGMEN USAHA

OPERASI KEPELABUHAN

Operasi kepelabuhan meliputi arus kapal, arus petikemas, arus barang non-petikemas dan arus penumpang.

ARUS KAPAL

Realisasi arus kapal dalam satuan unit tahun 2021 mencapai 254.669 unit, meningkat 10,76% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 229.932 unit. Demikian pula dengan realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2021 mencapai 1.186.217.247 GT, meningkat 13,78% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1.042.573.078 GT. Hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kunjungan kapal Roro di Dermaga Umum pada Cabang Tanjung Wangi, Lembar dan Terminal Jamrud akibat tingginya kegiatan kapal PT Atosim Lampung Pelayaran dengan jumlah kunjungan minimal 30 *call*/bulan. Hal yang sama juga terjadi pada Cabang Gresik khususnya kegiatan kapal curah cair non-BBM di TUKS.

EXPLANATION AND PRODUCTIVITY OF BUSINESS SEGMENTS

PORT OPERATIONS

Port operations includes ship traffic, container traffic, non-container goods traffic and passenger traffic.

SHIP TRAFFIC

Ship traffic in 2021 reached 254,669 units, an increase of 10.76% compared to 229,932 units in 2020. Ship traffic in GT units in 2021 reached 1,186,217,247 GT, an increase of 13.78% compared to 1,042,573,078 GT in 2020. This was due to an increase in Roro ship visits to the Public Wharves at Tanjung Wangi Branch, Lembar and Jamrud Terminals due to high activity from PT Atosim Lampung Pelayaran ships with the minimum number of visits reaching 30 calls/month. The same also happened to the Gresik Branch, especially for non-fuel liquid bulk ship activities at TUKS.

Tabel Arus Kapal
Table Ship Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Dermaga Umum General Wharves					
Internasional International	Unit	11.805	15.647	(3.842)	(24,55)
	GT	201.654.893	256.676.692	(55.021.799)	(21,44)
Domestik Domestic	Unit	121.331	114.383	6.948	6,07
	GT	365.275.148	274.691.231	90.583.917	32,98
Total Dermaga Umum **Total General Wharves**	**Unit**	**133.136**	**130.030**	**3.106**	**2,39**
	GT	**566.930.041**	**531.367.923**	**35.562.118**	**6,69**
Non-Dermaga Umum Non General Wharves					
Internasional International	Unit	16.383	12.593	3.790	30,10
	GT	244.159.765	205.638.361	77.716.654	37,79
Domestik Domestic	Unit	105.150	87.309	17.841	20,43
	GT	335.932.191	305.566.794	30.365.397	9,94
Total Non-Dermaga Umum **Total Non General Wharves**	**Unit**	**121.533**	**99.902**	**21.631**	**21,65**
	GT	**619.287.206**	**511.205.155**	**108.082.051**	**21,14**

Tabel Arus Kapal
Table Ship Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Total Arus Kapal **Total Ship Traffic**	**Unit**	**254.669**	**229.932**	**24.737**	**10,76**
	GT	**1.186.217.247**	**1.042.573.078**	**143.644.169**	**13,78**

ARUS PETIKEMAS

Realisasi arus petikemas dalam satuan box tahun 2021 mencapai 13.234.256 box, meningkat 18,95% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 11.125.677 box. Demikian pula dengan arus petikemas dalam satuan teus yang meningkat sebesar 21,55%, dari 14.032.351 TEUs di tahun 2020 menjadi 17.056.636 TEUs di tahun 2021. Hal ini antara lain dipengaruhi:

1. Regional 2
   a. Adanya peningkatan kegiatan kapal *adhoc* di tahun 2021 sebanyak 104,701 teus, selain itu penambahan *service* baru seperti CIS (OOCL), CS2 (CMA,WANHAI), CIS/CIM2 (OOCL, GOLDSTAR, ONE), CMI2 (SITC), NSJ (TSINE/BENLINE) dan Direct US (Ali Express) pada JICT; dan
   b. Adanya kenaikan arus petikemas Pelayaran PT Salam Pasific Indonesia Line, PT Tanto Intim Line, PT Caraka Tirta Perkasa, PT Indo Container Line, PT Pelayaran Tresnamuda Sejati pada IPC TPK Tanjung Priok 1.
2. Regional 3
   a. Kunjungan kapal petikemas luar negeri di PT Terminal Teluk Lamong yaitu kegiatan *adhoc* dari pelayaran KMTC Line, GSL Line, Cosco, CMA, dan Evergreen. Peningkatan juga terjadi pada kunjungan kapal domestik dari agen pelayaran Mentarimas Multimoda untuk rute Indonesia bagian Tengah dan Timur seperti untuk rute Lembar, Kendari, Kumai, Sampit dan Gorontalo. Secara total, rute Sampit dan Kumai terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 30% dan 69% untuk pelayaran besar di TTL seperti Temas, 3M, dan Meratus;
   b. Peningkatan arus petikemas domestik dan internasional juga terjadi pada Terminal Petikemas Semarang, hal ini disebabkan adanya penambahan *windows* SITC CMI II dan juga peningkatan dari beberapa perusahaan seperti Orient Overseas Container Line co.,Ltd., Mediterranean Shipping Company, Samudera Shipping Line dan Wan Hai Lines, Meratus lines dan Pelayaran Indo Container Lines; dan
   c. Tercapainya kegiatan petikemas domestik baik dari sisi bongkar maupun muat petikemas terjadi pada TPKB, Terminal Jamrud dan Terminal Nilam-Mirah.

CONTAINER TRAFFIC

Container traffic in box units in 2021 reached 13,234,256 boxes, an increase of 18.95% compared to 11,125,677 boxes in 2020. Container traffic in TEUs increased by 21.55%, from 14,032,351 TEUs in 2020 to 17,056,636 TEUs in 2021. This was mainly due to:

1. Region 2
   a. An increase in adhoc vessel activities in 2021 of 104.701 TEUs, plus the addition of new services such as CIS (OOCL), CS2 (CMA, WANHAI), CIS/CIM2 (OOCL, GOLDSTAR, ONE), CMI2 (SITC), NSJ (TSINE/BENLINE) and Direct US (Ali Express) on JICT; and
   b. An increase in shipping containers traffic by PT Salam Pacific Indonesia Line, PT Tanto Intim Line, PT Caraka Tirta Perkasa, PT Indo Container Line, PT Pelayaran Tresnamuda Sejati at IPC TPK Tanjung Priok 1.
2. Region 3
   a. Foreign container ship visits at PT Terminal Teluk Lamong as ad hoc activities from KMTC Line, GSL Line, Cosco, CMA, and Evergreen shipping. An increase also occurred in domestic ship visits from shipping agency Mentarimas Multimoda for Central and Eastern Indonesia routes, for the Lembar, Kendari, Kumai, Sampit and Gorontalo routes. In total, the Sampit and Kumai routes saw a significant increase of 30% and 69% for large shipping activities in TTL in Temas, 3M, and Meratus;
   b. An increase in domestic and international container traffic also occurred at the Semarang Container Terminal, due to the addition of the SITC CMI II windows, and also an increase from several companies such as Orient Overseas Container Line co., Ltd., Mediterranean Shipping Company, Samudera Shipping Line and Wan Hai Lines, Meratus lines and Pelayaran Indo Container Lines; and
   c. The achievement of domestic container activities for loading and unloading containers occurred at TPKB, Jamrud Terminal and Nilam-Mirah Terminal.

Tabel Arus Petikemas
Table Container Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Pelayanan Luar Negeri Overseas Services	Box	5.230.284	4.085.381	1.144.903	28,02%
	Teus	7.872.429	6.010.578	1.861.851	30,98%
Pelayanan Dalam Negeri Domestic Services	Box	8.003.972	7.040.296	963.676	13,69%
	Teus	9.184.207	8.021.773	1.162.434	14,49%
Total Arus Petikemas **Total Container Traffic**	**Box**	**13.234.256**	**11.125.677**	**2.108.579**	**18,95%**
	Teus	**17.056.636**	**14.032.351**	**3.024.285**	**21,55%**

ARUS BARANG NON-PETIKEMAS

Realisasi arus barang non-petikemas dalam satuan ton tahun 2021 mencapai 146.200.809, meningkat 13,16% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 129.198.339 ton. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

1. Adanya peningkatan produksi kegiatan bongkar kargo pada beberapa *cargo owner* seperti PT Charoen Phokpand Indonesia Tbk (kedelai), PT Sreeya Sewu Tbk dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (kebutuhan bahan baku) pada PT Terminal Teluk Lamong; dan
2. Peningkatan juga terjadi pada PT BJTI khususnya komoditi pupuk dari PT Permata Agro Persada, PT Fertilizer Inti Technology, dan PT Multi Mas Chemindo, serta komoditas klinker PT Semen Indonesia (Persero).

Realisasi arus barang non-petikemas dalam satuan M^3 tahun 2021 mencapai 4.515.637 M^3, meningkat 10,99% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 4.068.667 M^3. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan *general cargo* dari dermaga umum yang mencapai 425.930 M^3.

Realisasi arus barang non-petikemas dalam satuan unit tahun 2021 mencapai 1.519.404 unit, menurun 86,81% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 11.520.303 unit. Hal ini disebabkan oleh turunnya jumlah bongkar/muat kendaraan pada dermaga umum.

Realisasi arus barang non-petikemas dalam satuan MMBTU tahun 2021 mencapai 7.820.960 MMBTU, meningkat 905,66% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 777.694 MMBTU. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan kegiatan bongkar gas pada dermaga umum.

Realisasi arus barang non-petikemas dalam satuan ekor tahun 2021 mencapai 635.120 ekor, meningkat 72,62% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 367.924 ekor. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan di Regional 3 yaitu meningkatnya bongkar muat hewan pada Terminal Jamrud dan Kalimas akibat naiknya permintaan daging oleh konsumen. Peningkatan hewan sapi di Cabang Bima dan Tenau Kupang pada saat Hari Raya Idul Adha dengan tujuan Pulau Jawa dan Kalimantan

NON-CONTAINER GOODS TRAFFIC

Non-container goods traffic in units of tons in 2021 reached 146,200,809, an increase of 13.16% compared to 129,198,339 tons in 2020. This was mainly due to:

1. An increase in the cargo unloading activities for several cargo owners such as PT Charoen Phokpand Indonesia Tbk (soybeans), PT Sreeya Sewu Tbk and PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (raw material needs) at PT Terminal Teluk Lamong; and
2. An increase also occurred in PT BJTI, especially for fertilizer commodities from PT Permata Agro Persada, PT Fertilizer Inti Technology, and PT Multi Mas Chemindo, as well as clinker commodities from PT Semen Indonesia (Persero).

Non-container goods traffic in M^3 units in 2021 reached 4,515,637 M^3, an increase of 10.99% compared to 4,068,667 M3 in 2020. This was mainly due to the growth of general cargo from public wharves that reached 425,930 M^3.

Non-container goods traffic in units in 2021 reached 1,519,404 units, a decrease of 86.81% compared to 11,520,303 units in 2020. This was due to a decrease in the number of loading/unloading vehicles at the public wharves.

Non-container goods traffic in MMBTU units in 2021 reached 7,820,960 MMBTU, an increase of 905.66% compared to 777,694 MMBTU in 2020. This was due to an increase in gas unloading activities at the public wharves.

Non-container goods traffic in animals in 2021 reached 635,120 fish, an increase of 72.62% compared to 367,924 in 2020. This was mainly due to:

1. An increase in Regional 3 for the loading and unloading of animals at Jamrud and Kalimas Terminals due to increased demand for meat by consumers. An increase in cattle at the Bima and Tenau Kupang branches during the Eid al-Adha holiday for the Java and Kalimantan islands as well as allowing

serta mulai diijinkannya berlayar kapal muatan ternak di Cabang Waingapu;

2. Peningkatan di Regional 4 yaitu meningkatnya arus hewan di Pelabuhan Pare-Pare dan Samarinda.

ships to transport livestock cargo in the Waingapu Branch;

2. Improvements in Regional 4 that increased animal traffic in the Pare-Pare and Samarinda Ports.

Tabel Arus Barang Non-Petikema
Table Non-Container Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Dermaga Umum General Wharves					
General Cargo	Ton	9.774.309	9.874.741	(100.432)	(1,02)
	M^3	4.494.597	4.068.667	425.930	10,47
Bag Cargo	Ton	5.424.664	4.061.793	1.362.871	33,55
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	37.182.559	28.878.398	8.304.161	28,76
Curah Kering Dry Bulk	Ton	60.314.892	50.339.692	9.975.200	19,82
Gas	Ton	19.155	0	19.155	100,00
	MMBTU	7.820.960	777.694	7.043.266	905,66
Kendaraan Vehicles	Ton	4.692.647	2.765.535	1.927.112	69,68
	Unit	1.519.404	11.520.303	(10.000.899)	(86,81)
Hewan Animals	Ton	205.041	247.792	(42.751)	(17,25)
	Ekor Animals	635.120	367.924	267.196	72,62
Total Dermaga Umum **General Wharves Total**	**Ton**	**117.613.268**	**96.167.951**	**21.445.317**	**22,30**
	M^3	**4.494.597**	**4.068.667**	**425.930**	**10,47**
	Unit	**1.519.404**	**11.520.303**	**(10.000.899)**	**(86,81)**
	MMBTU	**7.820.960**	**777.694**	**7.043.266**	**905,66**
	Ekor **Animals**	**635.120**	**367.924**	**267.196**	**72,62**
Non-Dermaga Umum Non-General Wharves					
General Cargo	Ton	298.316	55.152	243.164	81,51
	M^3	21.040	-	21.040	100,00
Bag Cargo	Ton	-	-	-	-
Curah Cair	Ton	2.428.979	13.608.317	(11.179.338)	(460,25)
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	25.860.246	19.366.918	6.493.328	25,11
Gas	Ton	-	-	-	-
	MMBTU	-	-	-	-
Kendaraan Vehicles	Ton	-	-	-	-
	Unit	-	-	-	-
Hewan Animals	Ton	-	-	-	-
	Ekor Animals	-	-	-	-
Total Non-Dermaga Umum **Non-General Wharves Total**	**Ton**	**28.587.541**	**33.030.387**	**(4.442.846)**	**(13,45)**
	M^3	**21.040**	**-**	**21.040**	**100,00**
	Unit	**-**	**-**	**-**	**-**
	MMBTU	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ekor **Animals**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel Arus Barang Non-Petikema
Table Non-Container Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Total Arus Barang **Total Cargo Traffic**	**Ton**	**146.200.809**	**129.198.339**	**17.002.470**	**13,16**
	M³	**4.515.637**	**4.068.667**	**446.970**	**10,99**
	Unit	**1.519.404**	**11.520.303**	**(10.000.899)**	**(86,81)**
	MMBTU	**7.820.960**	**777.694**	**7.043.266**	**905,66**
	Ekor **Animals**	**635.120**	**367.924**	**267.196**	**72,62**

ARUS PENUMPANG

Realisasi arus penumpang pada tahun 2021 mencapai 8.056.905 orang, meningkat 11,27% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7.240.547 orang. Peningkatan ini disebabkan penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) PPKM mulai Triwulan III dari Pemerintah sehingga berdampak terhadap mobilitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut.

PASSENGER TRAFFIC

Passenger traffic in 2021 reached 8,056,905 people, an increase of 11.27% compared to 7,240,547 people the previous year. This increase was due to a decrease in the Government PPKM levels that started in the third quarter, so that people's mobility using sea transportation was less impacted.

Tabel Arus Penumpang
Table Passenger Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Luar Negeri Overseas					
Embarkasi Embarkation	Orang	338	185.421	(185.083)	(99,82)
Debarkasi Debarkation	Orang	1.538	199.351	(197.813)	(99,23)
Jumlah Luar Negeri **Total Overseas**		**1.876**	**384.772**	**(382.896)**	**(99,51)**
Dalam Negeri Domestic					
Embarkasi Embarkation	Orang	4.085.873	3.421.322	664.551	19,42
Debarkasi Debarkation	Orang	3.969.156	3.434.453	534.703	15,57
Jumlah Dalam Negeri **Total Domestic**		**8.055.029**	**6.855.775**	**1.199.254**	**17,49**
Jumlah **Total**	**Orang**	**8.056.905**	**7.240.547**	**816.358**	**11,27**

JASA LAINNYA

Segmen Jasa Lainnya meliputi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) dan Fasilitas Rupa-Rupa.

OTHER SERVICES

Other Services Segment includes Land, Building, Water and Electricity Concessions (TBAL) and Miscellaneous Facilities.

PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK (TBAL)

TBAL merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih serta energi listrik.

LAND, BUILDING, WATER AND ELECTRICITY ENTERPRISES (TBAL)

TBAL is a rental service for land, buildings, clean water and electricity.

Tabel Produksi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL)
Land, Building, Water and Electricity Concession (TBAL) Production

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Pengusahaan Properti Property Operations					
Pengusahaan Lahan Land Concession					
Sewa Rental	M^2	33.742.879	18.534.151	15.208.728	82,06%
Throughput Fee/Kontribusi Throughput Fee/Contribution	Ton	9.178.471	3.474.643	5.703.828	164,16%
	Unit	10	84	(74)	(88,10%)
	M^3	-	-	-	-
	M^2	-	-	-	-
Pengusahaan Perairan **Aquatic Concession**	**M^2**	**383.739**	**381.999**	**1.740**	**0,46%**
Pengusahaan Bangunan **Building Concession**	**M^2**	**877.833**	**146.490**	**731.343**	**499,25%**
	M^3	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ton	**372.576**	**-**	**372.576**	**100,00%**
	Kali/ Times	**-**	**-**	**-**	**-**
Konsolidasi dan Distribusi Barang **Consolidation and Goods Distribution**	**Paket/ Packages**	**441.737**	**275.537**	**166.200**	**60,32%**
Pengusahaan Air/Listrik Water/Electricity Business					
Pengusahaan Air **Water Business**		**3.639.497**	**13.188.280**	**(9.548.783)**	**(72,40%)**
Pengusahaan Air Kapal **Ship Water Business**					
Sumber yang Diusahakan Sources Worked on	Ton	2.318.058	882.457	1.435.601	162,68%
Sumber yang Dikerjasamakan Sources Collaborated on	Ton	25.767	571.082	(545.315)	(95,49%)
Pengusahaan Air Umum **Public Water Business**		**27.546**	**31.533**	**(3.987)**	**(12,64%)**
Sumber yang Diusahakan Sources Worked on	Ton	571.421	313.498	257.922	82,27%
Sumber yang Dikerjasamakan Sources Collaborated on	Ton	213.065	216.443	(3.378)	(1,56%)
Pengusahaan Listrik **Electricity Business**	**KWh**	**43.806.538**	**45.400.979**	**(1.594.441)**	**(3,51%)**

Pengusahaan Properti

Realisasi produksi pengusahaan properti untuk persewaan lahan di tahun 2021 dalam satuan M^2 mencapai 33.742.879 M^2, meningkat 82,06% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 18.534.151 M^2. Sedangkan realisasi produksi Pengusahaan TBAL untuk Persewaan Perairan di tahun 2021 dalam satuan M2 mencapai 383.739 M^2, meningkat 0,46% dibandingkan tahun 2020 sebesar 381.999 M^2. Sementara itu, realisasi produksi Pengusahaan Properti untuk Persewaan Bangunan dalam satuan M^2 mencapai 877.833 M^2, meningkat 60,32% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 275,537 M^2.

Property Operations

Property operations for land rental in 2021 reached 33,742,879 M^2, an increase of 82.06% compared to 18,534,151 M^2 in 2020. TBAL production for water leasing in 2021 reached 383,739 M^2, an increase of 0.46% compared to 381,999 M^2 in 2020. Property Concession production for Building Leases reached 877,833 M^2, an increase of 60.32% compared to 275,537 M^2 in 2020.

Pengusahaan Air

Realisasi produksi pengusahaan air untuk penggunaan air kapal di tahun 2021 mencapai sebesar 2.318.058 ton, meningkat 162,68% dibandingkan tahun 2020 sebesar 882.457 ton. Sementara itu, untuk pengusahaan air untuk penggunaan air minum di tahun 2021 mencapai sebesar 571.421 ton, meningkat 82,27% dibandingkan tahun 2020 sebesar 313.498 ton.

Water Business

The water business production for ship water in 2021 reached 2,318,058 tons, an increase of 162.68% compared to 882,457 tons in 2020. The public water business for drinking water in 2021 was 571,421 tons, an increase of 82.27% compared to 313,498 tons in 2020.

Pengusahaan Listrik

Realisasi produksi pengusahaan listrik di tahun 2021 dalam satuan KWH mencapai 43.806.538 KWH, menurun 3,51% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 45.400.979 KWH.

Electricity Business

The electricity business production in 2021 reached 43,806,538 KWH, a decrease of 3.51% compared to 45,400,979 KWH in 2020.

PELAYANAN JASA RUPA-RUPA

Merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan. pelayanan jasa rupa-rupa antara lain meliputi pas terminal penumpang, pas pelabuhan, fasilitas *repair/docking* kapal, dan produksi kerja sama.

MISCELLANEOUS SERVICES

Is a service that supports activities at the ports. The miscellaneous services include, passenger terminal passes, port passes, ship repair/docking facilities, and joint production.

Realisasi sampai dengan periode tahun 2021 untuk produksi pelayanan jasa rupa-rupa di lingkungan Pelindo dapat dilihat pada tabel berikut:

For 2021 the Pelindo miscellaneous services can be seen in the following table:

Tabel Produksi Pelayanan Jasa Rupa-Rupa
Miscellaneous Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Pas Terminal Penumpang Passenger Terminal Pass					
Pas Penumpang Passenger Pass	Lembar Passes	3.723.068	6.986.978	(3.263.910)	-46,71%
Pas Pelabuhan (Orang) Harbor Pass (People)					
Pas Harian Orang Daily Pass People	Lembar Passes	3.794.742	2.948.945	845.797	28,68%
Pas Berlangganan Orang Subscription Pass People	Lembar Passes	113.381	113.952	(571)	-0,50%
Pas Pelabuhan (Kendaraan) Port Pass (Vehicles)					
Pas Harian Kendaraan Daily Pass Vehicles	Lembar Passes	14.423.543	8.120.614	6.302.929	77,62%
	Box	3.371.661	1.932.656	1.439.004	74,46%
	Ton	14.622.589	9.774.060	4.848.529	49,61%
	M^3	507.743	363.498	144.245	39,68%
	Unit	54.635	96.541	(41.906)	-43,41%
	Ekor Animals	5.707	2.975	2.732	91,83%

Tabel Produksi Pelayanan Jasa Rupa-Rupa
Miscellaneous Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Pas Berlangganan Kendaraan Subscription Pass Vehicles	Lembar Passes	42.894	43.922	(1.028)	-2,34%
	Box	768	720	48	6,67%
	Ton	21.628.608	-	21.628.608	100,00%
	M^3	-	-	-	-
	Unit	-	-	-	-
	Ekor Animals	-	-	-	-
Fasilitas Repair/*Docking* Kapal Ship Repair/Docking Facilities					
Fasilitas Repair/*Docking* Kapal Ship Repair/Docking Facilities	Unit	2.454	-	2.454	-
Produksi Kerja Sama Production Cooperation					
Kerja Sama Alat Equipment Cooperation	Unit	415	794	(379)	-47,73%
	Jam Hours	2.539.508	2.591.831	(52.323)	-2,02%
	Ton	2.105.245	2.526.739	(421.494)	(16,68%)
	M^3	-	-	-	-
Kerja Sama Kapal Khusus Special Ship Cooperation	Jam Hours	-	-	-	-
	M^3	-	-	-	-
Kerja Sama Pelabuhan Port Cooperation	Jam Hours	-	-	-	-
	Ton	7.677.655	4.765.561	2.912.095	61,11%
	M^3	756.521	711.245	45.276	6,37%
Kerja Sama Jasa Air Kapal Water Ships Service Cooperation	Ton	400	147	253	172,11%
Kerja Sama Jasa *Cold Processing*/Ikan Cold Processing/Fish Service Cooperation	Ton	-	-	-	-
Kerja Sama *Bunker* BBM Fuel Bunker Cooperation	Ton	47.454.516	52.820.253	(5.365.737)	-10,16%
Kerja Sama Jasa *Dock*/Galangan Dock/Dock Service Cooperation	Unit	-	-	-	-
	Paket Packages	-	-	-	-
Kerja Sama Jasa Dermaga Ikan Fish Wharve Service Cooperation	Ton	-	-	-	-
Kerja Sama Jasa CPO/Bungkil/Minyak Goreng CPO/Cake/Cooking oil Service Cooperation	Ton/Liter	-	-	-	-
Kerja sama Jasa Penumpukan Stacking Service Cooperation	Ton	-	-	-	-
	M^3	-	-	-	-
	Unit	5.239	4.751	488	10,27%
	Box	-	-	-	-
Kerja sama Jasa SPBU Gas Station Service Cooperation	Ton/Liter	-	-	-	-
Kerja sama Jasa Taksi/Angkutan Penumpang Taxi/Passenger Transport Service Cooperation	Unit	-	-	-	-
Fee For Service	Ton	9.916	-	9.916	-
	M^3	-	-	-	-
Daily Pass Vehicles		-	-	-	-

Pas Terminal Penumpang

Pas penumpang di tahun 2021 dalam satuan lembar mencapai 3.723.068 lembar, turun 46,71% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 6.986.978 lembar. Hal tersebut sejalan dengan penurunan arus kunjungan penumpang karena belum normalnya kegiatan naik turun penumpang. Selain itu adanya larangan mudik pada saat Lebaran 2021 memberikan dampak terhadap penurunan produksi pas penumpang di Cabang Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Asahan dan Dumai. Penurunan produksi pas penumpang juga mengalami penurunan pada Cabang Makassar, Sorong, Ambon, Balikpapan, Ternate, Parepare, Nunukan dan Tolitoli.

Pas Pelabuhan

Pas pelabuhan orang di tahun 2021 dalam satuan lembar mencapai 3.794.742 lembar, meningkat 28,68% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2.948.945 lembar. Demikian pula dengan pas harian kendaraan yang meningkat 77,62% dari 8.120.614 lembar di tahun 2020 menjadi 14.423.543 lembar di tahun 2021.

Passenger Terminal Pass

Passenger passes in 2021 reached 3,723,068, a decrease of 46.71% compared to 6,986,978 in 2020. This was due to a decrease in passenger visits and the up and down activities of passengers not yet returning to normal. Also there was a ban on people going home during Lebaran 2021 that saw a decrease in passenger passes at the Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Asahan and Dumai branches. A decline in passenger passes was also experienced at the Makassar, Sorong, Ambon, Balikpapan, Ternate, Parepare, Nunukan and Tolitoli branches.

Harbor Pass

The passenger's harbor passes in 2021 reached 3,794,742, an increase of 28.68% compared to 2,948,945 in 2020. Likewise, vehicle passes increased by 77.62% from 8,120,614 in 2020 to 14,423,543 in 2021.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN USAHA

Pendapatan segmen usaha tahun 2021 mencapai Rp28,81 triliun, meningkat 8,36% atau sebesar Rp2,22 triliun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp26,59 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan operasi eksternal dari operasi kepelabuhan. Peningkatan pendapatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan yang mencapai 7,34% atau sebesar Rp217,20 miliar dari Rp2,96 triliun di tahun 2020 menjadi Rp3,18 triliun di tahun 2021.

INCOME AND PROFITABILITY BY BUSINESS SEGMENT

Business segment revenue in 2021 reached Rp28.81 trillion, an increase of 8.36% or Rp2.22 trillion compared to Rp26.59 trillion in 2020. This increase was mainly due to growth in external operating revenues from port operations. The increase in revenues resulted in an increase in profit for the year of 7.34%, or Rp217.20 billion from Rp2.96 trillion in 2020 to Rp3.18 trillion in 2021.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi
Table Operating Segment Revenue and Profitability

(dalam ribuan Rupiah)/(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenues					
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	28.353.022.778	461.783.559	28.814.806.337	-	28.814.806.337
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	5.399.655.411	1.317.551.756	6.717.207.167	(6.717.207.167)	-
Total pendapatan operasi segmen **Total segment operating revenues**					**28.814.806.337**
Beban operasi Operating expenses	(27.309.172.059)	(1.649.297.717)	(28.958.469.776)	6.454.522.959	(22.503.946.817)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating income - net	2.041.653.978	(39.558.040)	2.002.095.938	(1.772.757.832)	229.338.106
Laba usaha Operating income					6.540.197.626
Pendapatan keuangan Finance income	587.319.404	5.235.434	592.554.838	(184.778.954)	407.775.884
Beban keuangan Finance costs	(3.357.351.484)	(78.509.211)	(3.435.860.695)	895.777.829	(2.540.082.866)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Equity in income of associates and joint control entity - net	1.626.599.275	-	1.626.599.275	(1.371.491.687)	255.107.588
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax					4.662.998.232
Beban pajak final Final tax expense	(473.745.661)	(13.926.208)	(487.671.869)	-	(487.671.869)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax					4.175.326.363
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense					
Kini Current	(821.369.756)	(26.363.420)	(847.733.176)	-	(847.733.176)
Tangguhan Deferred	(150.992.261)	(455.650)	(151.447.911)	-	(151.447.911)
Laba tahun berjalan Income for the year					3.176.145.276

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi
Table Operating Segment Revenue and Profitability

(dalam ribuan Rupiah)/(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
Posisi keuangan Financial position					
Aset segmen Segment assets	140.129.226.645	2.199.514.469	142.328.741.114	(26.099.666.614)	116.229.074.500
Liabilitas segmen Segment liabilities	90.795.308.159	2.036.440.753	92.831.748.912	(14.529.832.436)	78.301.916.476
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	4.161.043.395	71.865.183	4.232.908.578	(1.033.436.603)	3.199.471.975

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi
Table Operating Segment Revenue and Profitability

(dalam ribuan Rupiah)/(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenues					
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	25.564.536.111	1.026.595.716	26.591.131.827	-	26.591.131.827
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	5.654.340.622	1.040.617.946	6.694.958.568	(6.694.958.568)	-
Total pendapatan operasi segmen **Total segment operating revenues**					26.591.131.827
Beban operasi Operating expenses	(25.157.491.937)	(2.010.773.976)	(27.168.265.913)	6.492.332.553	(20.675.933.360)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating income - net	(170.496.231)	134.828.547	(35.667.684)	(160.870.424)	(196.538.108)
Laba usaha Operating income					5.718.660.359
Pendapatan keuangan Finance income	822.774.118	(4.432.727)	818.341.391	(118.759.643)	699.581.748
Beban keuangan Finance costs	(3.396.549.936)	(20.047.524)	(3.416.597.460)	872.231.289	(2.544.366.171)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Equity in income of associates and joint control entity - net	1.112.175.109	-	1.112.175.109	(1.152.173.816)	(39.998.707)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax					3.833.877.229
Beban pajak final Final tax expense	(434.688.403)	(1.533.430)	(436.221.833)	41.555	(436.180.278)

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi
Table Operating Segment Revenue and Profitability

(dalam ribuan Rupiah)/(in thousand Rupiah)

Uraian / Description	2021				
	Operasi Kepelabuhanan / Port Operations	Jasa Lainnya / Other Services	Total Sebelum Eliminasi / Total Before Elimination	Eliminasi / Elimination	Total
Laba sebelum pajak penghasilan badan / Income before corporate income tax					3.397.696.951
Pajak penghasilan badan / Corporate income tax expense					
Kini / Current	(725.083.124)	(31.651.454)	(756.734.578)	10.867.470	(745.867.108)
Tangguhan / Deferred	298.823.770	8.288.855	307.112.625	-	307.112.625
Laba tahun berjalan / Income for the year					2.958.942.468
Posisi keuangan / Financial position					
Aset segmen / Segment assets	141.344.212.696	9.892.111.717	151.236.324.413	(32.659.576.619)	118.576.747.794
Liabilitas segmen / Segment liabilities	92.292.535.867	819.275.449	93.111.811.316	(14.809.894.840)	78.301.916.476
Penyusutan dan amortisasi segmen / Segment depreciation and amortization	1.368.562.653	1.794.588.672	3.163.151.325	99.172.645	3.262.323.970

Uraian / Description	Pertumbuhan 2021-2020 (dalam nilai Rupiah) / 2021-2020 Growth (in Rupiah)				
	Operasi Kepelabuhanan / Port Operations	Jasa Lainnya / Other Services	Total Sebelum Eliminasi / Total Before Elimination	Eliminasi / Elimination	Total
Pendapatan operasi segmen / Segment operating revenues					
Pendapatan operasi eksternal / External operating revenues	2.788.486.667	(564.812.157)	2.223.674.510	-	2.223.674.510
Pendapatan operasi antar segmen / Inter-segment operating revenues	(254.685.211)	276.933.810	22.248.599	(22.248.599)	-
Total pendapatan operasi segmen / Total segment operating revenues					2.223.674.510
Beban operasi / Operating expenses	(2.151.680.122)	361.476.259	(1.790.203.863)	(37.809.594)	(1.828.013.457)
Pendapatan operasi lainnya - neto / Other operating income - net	2.212.150.209	(174.386.587)	2.037.763.622	(1.611.887.408)	425.876.214
Laba usaha / Operating income					821.537.267
Pendapatan keuangan / Finance income	(235.454.714)	9.668.161	(225.786.553)	(66.019.311)	(291.805.864)
Beban keuangan / Finance costs	39.198.452	(58.461.687)	(19.263.235)	23.546.540	4.283.305

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi
Table Operating Segment Revenue and Profitability

(dalam ribuan Rupiah)/(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Equity in income of associates and joint control entity - net	514.424.166	-	514.424.166	(219.317.871)	295.106.295
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax					829.121.003
Beban pajak final Final tax expense	(39.057.258)	(12.392.778)	(51.450.036)	(41.555)	(51.491.591)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax					777.629.412
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense	-	-	-	-	-
Kini Current	(96.286.632)	5.288.034	(90.998.598)	(10.867.470)	(101.866.068)
Tangguhan Deferred	(449.816.031)	(8.744.505)	(458.560.536)	-	(458.560.536)
Laba tahun berjalan Income for the year					217.202.808
Posisi keuangan Financial position					
Aset segmen Segment assets	(1.214.986.051)	(7.692.597.248)	(8.907.583.299)	6.559.910.005	(2.347.673.294)
Liabilitas segmen Segment liabilities	(1.497.227.708)	1.217.165.304	(280.062.404)	280.062.404	-
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	2.792.480.742	(1.722.723.489)	1.069.757.253	(1.132.609.248)	(62.851.995)

KINERJA ENTITAS ANAK

Uraian kinerja entitas anak Pelindo disajikan sebagai berikut.

SUBSIDIARIES' PERFORMANCE

Pelindo's subsidiary performance is presented as follows.

PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

Tabel Kinerja Usaha PT IPC Terminal Petikemas
PT IPC Terminal Petikemas Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan operasi Operating revenues	2.511.416.339	2.419.973.612	91.442.727	3,78
Beban operasi Operating expenses	(2.291.778.398)	(2.148.175.746)	(143.602.652)	6,68
Pendapatan (beban) operasi Operating (expenses) revenues	276.574.744	(18.073.560)	294.648.304	(1.630,27)
Laba usaha **Operating profit**	**496.212.685**	**253.724.306**	**242.488.379**	**95,57**
Pendapatan keuangan Finance income	14.990.568	20.551.294	(5.560.726)	(27,06)
Beban keuangan Finance costs	(218.006.130)	(226.355.039)	8.348.909	(3,69)
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi Share of profits (losses) in associates	56.314.207	(41.020.997)	97.335.204	(237,28)
Laba sebelum pajak penghasilan badan **Income before corporate income tax**	**349.511.330**	**5.899.564**	**343.611.766**	**5824,36**
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan **Corporate income tax benefit (expense)**				
Kini Current	(72.599.420)	(52.709.806)	(19.889.614)	37,73
Tangguhan Deferred	(26.581.097)	30.611.126	(57.192.223)	(186,83)
Laba (rugi) tahun berjalan **Income (loss) for the year**	**250.330.813**	**(16.199.116)**	**266.529.929**	**(1.645,34)**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp496,21 miliar, meningkat 95,57% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp253,74 miliar.

Operating Income (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp497.21 billion, an increase of 95.57% compared to Rp253.74 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp250,33 miliar, meningkat 1.645,34% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kerugian sebesar Rp16,20 miliar.

Income (Loss) – Net

Income for the year in 2021 was Rp250.33 billion, an increase of 1,645.34% compared to the loss of Rp16.20 billion in 2020.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Tabel Kinerja Usaha PT Prima Terminal Petikemas
PT Prima Terminal Petikemas Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan operasi Operating Revenues	95.619.172	-	95.619.172	100,00
Pendapatan konstruksi Construction revenues	42.430.265	758.143.857	(715.713.592)	(94,40)
Beban operasi Operating Expenses	(118.536.761)	(38.462.024)	(80.074.737)	208,19
Beban konstruksi Construction expenses	(42.430.265)	(758.143.857)	715.713.592	(94,40)
Rugi usaha **Operating loss**	**(22.917.589)**	**(38.462.024)**	**15.544.435**	**(40,42)**
Pendapatan keuangan Finance income	385.032	2.434.228	(2.049.196)	(84,18)
Beban keuangan Finance costs	(136.647.890)	(73.123)	(136.574.767)	186.774,02
Pendapatan (beban) lain-lain, neto Other revenues (expenses), net	(7.939.231)	38.145.201	(46.084.432)	(120,81)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan badan **Profit (loss) before corporate income tax**	**(167.119.678)**	**2.044.282**	**(169.163.960)**	**(8.274,98)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan **Corporate income tax benefit (expense)**				
Kini Current	-	(393.722)	393.722	(100,00)
Tangguhan Deferred	35.971.673	(16.144)	35.987.817	(222.917,60)
Laba (rugi) tahun berjalan **Income (loss) for the year**	**(131.148.005)**	**1.634.416**	**(132.782.421)**	**(8.124,15)**

Laba (Rugi) Usaha

Rugi usaha tahun 2021 mencapai Rp22,92 miliar, menurun 40,22% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp38,46 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating loss in 2021 was Rp22.92 billion, a decrease of 40.22% compared to Rp38.46 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Rugi tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp131,15 miliar, meningkat 8.124,15% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami laba sebesar Rp1,63 miliar.

Income (loss) for the Year

Loss for the year in 2021 was Rp131.15 billion, a decrease of 8,124.15% compared to the profit of Rp1.63 billion in 2020.

PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan operasi, neto Operating revenues, net	1.370.339.726.911	1.205.917.060.335	1.369.133.809.851	13,63
Pendapatan konstruksi Construction revenues	191.128.602.215	192.037.830.165	(909.227.950)	(0,47)
Beban operasi Operating expenses	(1.159.195.044.363)	(965.250.309.424)	(193.944.734.939)	20,09
Beban konstruksi Construction expenses	(191.128.602.215)	(192.037.830165)	909.227.950	(0,47)
Pendapatan operasi lainnya, neto Other operating revenues, net	14.675.596.601	5.901.745.524	8.773.851.077	148,67
Laba usaha **Operating profit**	**225.820.279.149**	**246.568.486.435**	**(20.748.207.286)**	**(8,41)**
Pendapatan keuangan Finance income	35.448.008.819	30.727.743.044	4.720.265.775	15,36
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	80.360.601.060	45.757.378.627	34.603.222.433	75,62
Beban keuangan Finance costs	(107.294.792.414)	(99.906.982.006)	(7.387.810.408)	7,39
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan **Income before final tax and corporate income tax**	**234.334.096.614**	**223.146.636.100**	**11.187.460.514**	**5,01**
Beban Pajak Final Final tax expense	(1.643.388.542)	(1.703.415.763)	60.027.221	(3,52)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax	232.690.708.072	221.443.220.337	11.247.487.735	5,08
Beban pajak penghasilan badan **Corporate income tax expense**				
Kini Current	(46.333.505.112)	(47.195.918.441)	862.413.329	(1,83)
Tangguhan Deferred	2.710.014.755	4.551.066.886	(1.841.052.131)	(40,45)
Beban pajak penghasilan badan **Corporate income tax expense**	**(43.623.490.357)**	**(42.644.851.555)**	**(978.638.802)**	**2,29**
Laba tahun berjalan **Income for the year**	**189.067.217.715**	**178.798.368.782**	**188.888.419.347**	**5,74**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp225,82 miliar, menurun 8,41% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp246,57 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp225.82 billion, a decrease of 8.41% compared to Rp246.57 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp189,07 miliar, meningkat 5,74% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp178,80 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp189.07 billion, an increase of 5.74% compared to Rp178.80 billion in 2020.

PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Tabel Kinerja Usaha PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Petikemas Surabaya Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha **Operating revenues**	**2.476.929.469.816**	**2.369.984.006.827**	**106.945.462.989**	**4,51**
Pendapatan (beban) usaha Operating income (expense)				
Bagi hasil Profit sharing	(681.969.748.061)	(592.496.001.717)	(89.473.746.344)	15,10
Sewa Rent	(137.650.702.731)	(142.745.062.275)	5.094.359.544	(3,57)
Personalia Personnel	(223.917.325.502)	(210.846.400.876)	(13.070.924.626)	6,20
Suku cadang dan bahan bakar Spare parts and fuel	(86.766.468.995)	(73.995.454.465)	(12.771.014.530)	17,26
Penyusutan aset tetap Decreasing asset	(140.268.953.229)	(121.762.728.893)	(18.506.224.336)	15,20
Penyusutan aset hak-guna Depreciation of right-of-use assets	(18.211.697.422)	(11.202.645.159)	(7.009.052.263)	62,57
Pemeliharaan Maintenance	(105.818.756.610)	(89.977.951.501)	(15.840.805.109)	17,61
Umum General	(71.356.354.627)	(69.185.319.912)	(2.171.034.715)	3,14
Asuransi Insurance	(12.902.018.740)	(12.551.732.695)	(350.286.045)	2,79
Sumbangan pengembangan masyarakat Community development contributions	(4.762.205.672)	(5.619.971.794)	857.766.122	(15,26)
Administrasi kantor Office administration	(7.601.600.612)	(6.795.202.013)	(806.398.599)	11,87
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs Gain (loss) on foreign exchange	116.750.337	242.228.954	(125.478.617)	(51,80)
Beban bunga atas liabilitas sewa Interest expense on lease liability	(1.247.457.184)	(990.014.015)	(257.443.169)	26,00
Beban usaha lain, neto Other operating expenses, net	(23.662.932.495)	(34.285.170.993)	10.622.238.498	(30,98)
Beban usaha, neto **Operating expenses, net**	**(1.516.019.471.543)**	**(1.372.211.427.354)**	**(143.808.044.189)**	**10,48**
Laba usaha Operating profit	960.909.998.273	997.772.579.473	(36.862.581.200)	(3,69)
Pendapatan bunga Interest income	23.301.316.906	19.113.533.714	4.187.783.192	21,91
Laba sebelum beban pajak penghasilan Profit before income tax expense	984.211.315.179	1.016.886.113.187	(32.674.798.008)	(3,21)
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(223.397.244.060)	(238.657.227.467)	15.259.983.407	(6,39)
Laba tahun berjalan **Profit for the Year**	**760.814.071.119**	**778.228.885.720**	**(17.414.814.601)**	**(2,24)**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp960,91 miliar, menurun 3,69% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp997,77 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 reached Rp960.91 billion, decreased by 3.69% compared to 2020 which reached Rp997.77 billion.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp760,81 miliar, menurun sebesar 2,24% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp778,23 miliar.

Income (loss) for the Year

Profit for the year 2021 reached Rp760.81 billion, a decrease of 2.24% compared to 2020 which reached Rp778.23 billion.

PT TERMINAL TELUK LAMONG

PT TERMINAL TELUK LAMONG

Tabel Kinerja Usaha PT Terminal Teluk Lamong
PT Terminal Teluk Lamong Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Expenses	831.704.071.332	777.497.164.050	54.206.907.282	6,97
Beban operasi Operating expenses	(664.407.642.446)	(557.750.517.332)	(106.657.125.114)	19,12
Beban usaha lainnya, neto Other operating expenses, net	(645.829.596)	(2.350.793.354)	1.704.963.758	(72,53)
Laba usaha Operating profit	**186.650.599.290**	**197.395.853.364**	**(10.745.254.074)**	**(5,44)**
Pendapatan keuangan Finance income	4.597.789.829	2.739.168.065	1.858.621.764	67,85
Beban keuangan Finance costs	(267.040.201)	(356.234.687)	89.194.486	(25,04)
Laba sebelum pajak penghasilan Income before corporate income tax	**190.981.348.918**	**199.778.786.742**	**(8.797.437.824)**	**(4,40)**
Beban pajak penghasilan Corporate income tax expense	**(40.918.180.662)**	**(43.970.598.048)**	**3.052.417.386**	**(6,94)**
Laba tahun berjalan Income for the year	**150.063.168.256**	**155.808.188.694**	**(5.745.020.438)**	**(3,69)**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp186,65 miliar, menurun 5,44% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp197,40 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp186.65 billion, a decrease of 5.44% compared to Rp197.40 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp150,06 miliar, menurun sebesar 3,69% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp155,81 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp150.06 billion, an increase of 3.69% compared to Rp155.81 billion in 2020.

PT KALTIM KARIANGAU TERMINAL

PT KALTIM KARIANGAU TERMINAL

Tabel Kinerja Usaha PT Kaltim Kariangau Terminal
PT Kaltim Kariangau Terminal Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan operasi Operating revenues	194.875.763.027	215.392.599.663	(20.516.836.636)	(9,53)
Beban operasi Operating expenses	(182.021.814.210)	187.175.484.719	(369.197.298.929)	(197,25)
Laba usaha Operating profit	**12.853.984.817**	**28.217.114.944**	**(15.363.130.127)**	**(54,45)**
Beban keuangan Finance costs	(1.862.925.055)	(3.414.373.869)	1.551.448.814	(45,44)
Pendapatan keuangan Finance income	2.125.382.465	3.698.005.768	(1.572.623.303)	(42,53)
Beban lain-lain, neto Other Expenses, net	(2.664.293.226)	(284.141.513)	2.948.434.739	(1.037,66)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax	**10.452.113.001**	**28.214.605.330**	**(17.762.492.329)**	**(62,95)**

Tabel Kinerja Usaha PT Kaltim Kariangau Terminal
PT Kaltim Kariangau Terminal Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Beban pajak penghasilan badan Corporate income tax expense				
Kini Current	(9.135.564.520)	(13.647.376.969)	4.511.812.449	(33,06)
Tangguhan Deferred	(633.181.828)	(690.124.415)	56.942.587	(8,25)
Laba tahun berjalan **Income for the year**	**683.366.653**	**13.877.103.946**	**(13.193.737.293)**	**(95,08)**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp12,85 miliar, menurun 54,45% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp28,22 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp12.85 billion, a decrease of 54.45% compared to Rp28.22 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp683,37 juta, menurun 95,08% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp13,88 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp683.37 million, a decrease of 95.08% compared to Rp13.88 billion in 2020.

PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK

PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK

Tabel Kinerja Usaha PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Indonesia Logistik Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan operasi Operating revenues	184.337.271.660	121.324.947.951	63.012.323.709	51,94
Beban langsung Direct expenses	(153.923.291.291)	(105.344.940.347)	(48.578.350.944)	46,11
Beban pemasaran Marketing expenses	(185.234.050)	(79.136.250)	(106.097.800)	134,07
Beban umum dan administrasi General and Admin expenses	(4.302.377.728)	(4.253.456.156)	(48.921.572)	1,15
Laba operasi **Operating profit**	**25.926.368.591**	**11.647.415.198**	**14.278.953.393**	**122,59**
Pendapatan keuangan Finance income	1.413.898.213	3.255.586.736	(1.841.688.523)	(56,57)
Beban keuangan Finance costs	(7.755.625.092)	(9.193.412.925)	1.437.787.833	(15,64)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto Other revenue (expenses), net	(6.222.435.002)	515.210.308	(6.737.645.310)	(1.307,75)
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	2.892.762.469	156.751.248	2.736.011.221	1745,45
Laba sebelum pajak penghasilan badan **Income before corporate income tax**	**16.254.969.179**	**6.381.550.565**	**9.873.418.614**	**154,72**

Tabel Kinerja Usaha PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Indonesia Logistik Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan Corporate income tax benefit (expense)				
Pajak kini Current tax	(4.062.958.880)	(3.461.001.536)	(601.957.344)	17,39
Pajak tangguhan Deferred tax	(2.823.783.371)	2.257.208.612	(5.080.991.983)	(225,10)
Laba tahun berjalan Deferred tax	**9.368.226.928**	**5.177.757.641**	**4.190.469.287**	**80,93**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp25,93 miliar, meningkat 122,59% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp11,65 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp25.93 billion, an increase of 122.59% compared to Rp11.65 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp9,37 miliar, meningkat 80,93% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp5,18 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp9.37 billion, an increase of 80.93% compared to Rp5.18 billion in 2020.

PT MULTI TERMINAL INDONESIA

PT MULTI TERMINAL INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha PT Multi Terminal Indonesia
PT Multi Terminal Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan operasi Operating revenues	571.668.330	545.801.103	25.867.227	4,74
Beban operasi Operating expenses	(541.129.353)	(523.613.855)	(17.515.498)	3,35
Pendapatan operasi lainnya Other operating revenues	891.886	2.905.187	(2.013.301)	(69,30)
Beban operasi lainnya Other operating expenses	(12.039.747)	(18.333.729)	6.293.982	(34,33)
Laba (rugi) usaha **Operating profit (loss)**	**19.391.116**	**(2.241.294)**	**21.632.410**	**(965,18)**
Pendapatan keuangan Finance income	3.934.472	6.820.828	(2.886.356)	(42,32)
Beban keuangan Finance costs	(736.991)	(294.526)	(442.465)	150,23
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan **Income before final tax and corporate income tax**	**22.588.597**	**4.285.008**	**18.303.589**	**427,15**
Beban pajak final Final tax expense	(11.489.597)	(10.560.338)	(929.259)	8,80
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan badan **Profit (loss) before corporate income tax**	**11.099.000**	**(6.275.330)**	**17.374.330**	**(276,87)**
Pajak penghasilan badan **Corporate income tax**				

Tabel Kinerja Usaha PT Multi Terminal Indonesia
PT Multi Terminal Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Kini Current	-	-	-	-
Tangguhan Deferred	(1.035.417)	(3.734.445)	2.699.028	(72,27)
Laba (rugi) tahun berjalan **Income (loss) for the year**	**10.063.583**	**(10.009.775)**	**20.073.358**	**(200,54)**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp19,39 miliar, meningkat 965,18% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai kerugian Rp2,24 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp19.39 billion, an increase of 965.18% compared to the loss of Rp2.24 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 Rp10,06 miliar, meningkat 200,54% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai kerugian Rp10,01 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp10.06 billion, an decrease of 200.54% compared to the loss of Rp10.01 billion in 2020.

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Operating revenues				
Pendapatan operasi Operating revenues	803.430.692	804.106.293	(675.601)	(0,08)
Pendapatan jalan tol Toll Road Revenues	13.391.532	-	13.391.532	(100,00)
Pendapatan konstruksi Construction revenues	1.931.003.073	1.962.429.659	(31.426.586)	(1,60)
Jumlah **Total**	**2.747.825.297**	**2.766.535.952**	**(18.710.655)**	**(0,68)**
Beban Expenses				
Beban langsung operasional jalan tol Toll Road direct operating expenses	(11.340.623)	-	(11.340.623)	(100,00)
Beban konstruksi Construction expenses	(1.931.003.073)	(1.962.429.659)	31.426.586	(1,60)
Jumlah **Total**	**(1.942.343.696)**	**(1.962.429.659)**	**20.085.963**	**(1,02)**
Laba Bruto Gross Profit	**805.481.601**	**804.106.293**	**1.375.308**	**0,17**
Beban umum dan dan administrasi General and administrative expenses	(282.444.582)	(273.088.999)	(9.355.583)	3,43
Pendapatan (beban) operasi lainnya, neto Other operating revenues (expenses), net	85.788.057	(76.259.098)	162.047.155	(212,50)
Laba usaha Operating profit	**608.825.076**	**454.758.205**	**154.066.871**	**33,88**
Penghasilan (beban lain-lain) income (other expenses)				

Tabel Kinerja Usaha PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan keuangan Finance income	8.239.707	40.264.303	(32.024.596)	(79,54)
Beban keuangan Finance costs	(224.111.669)	(184.657.599)	(39.454.070)	21,37
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax	**392.953.114**	**310.364.909**	**82.588.205**	**26,61**
Beban pajak final Final tax expense	(78.705.661)	(77.157.026)	(1.548.635)	2,01
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax	**314.247.453**	**233.207.883**	**81.039.570**	**34,75**
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan Corporate income tax benefit (expense)				
Kini Current	(7.738.943)	(9.698.352)	1.959.409	(20,20)
Tangguhan Deferred	(341.191)	35.560	(376.751)	(1.059,48)
Laba (rugi) tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba merging entity **Income (loss) for the year after effect of merging entity's income**	306.294.319	223.545.091	82.749.228	37,02

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp608,83 miliar, meningkat 33,88% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp454,76 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp608.83 billion, an increase of 33.88% compared to Rp454.76 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp306,29 miliar, meningkat 37,02% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp223,55 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp306.29 billion, an increase of 37.02% compared to Rp223.55 billion in 2020.

PT NUSANTARA TERMINAL SERVICES

PT NUSANTARA TERMINAL SERVICES

Tabel Kinerja Usaha PT Nusantara Terminal Services
PT Nusantara Terminal Services Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	233.619	185.529	48.090	25,92
Beban Usaha Operating Expenses	(224.629)	(179.240)	45.352	25,30
Laba (Rugi) Usaha **Operating Income (Loss)**	**8.990**	**6.289**	**2.701**	**42,95**
Laba (Rugi) Non Usaha – Neto Non-Operating Income (Loss) - Net	705	438	267	60,96
Beban Keuangan Finance Costs	-	-	-	0,00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak **Income (Loss) Before Tax**	**9.695**	**7.911**	**1.784**	**22,55**

Tabel Kinerja Usaha PT Nusantara Terminal Services
PT Nusantara Terminal Services Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Beban Pajak Penghasilan Badan **Corporate Income Tax Expense**	**(9.725)**	**(1.883)**	**(7.842)**	**0,00**
Laba (Rugi) Bersih **Income (Loss) - Net**	**(30)**	**6.028**	**(6.058)**	**(100,50)**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp8,99 miliar, meningkat 42,95% dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp6,29 miliar.

Operating Income (Loss)

The operating income in 2021 was Rp8.99 billion, an increase of 42.95% compared to Rp6.629 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Rugi bersih tahun 2021 mencapai Rp30 juta, menurun Rp6,06 miliar atau sebesar 100,50% dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp6,03 miliar.

Income (Loss) – Net

The net loss in 2021 was Rp30 million, a decrease of 100.50% or Rp6.06 billion compared to Rp3.54 billion in 2020.

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenues	272.202.520.549	217.296.872.601	54.905.647.948	25,27
Beban Usaha Operating expenses	(262.019.793.181)	(206.962.619.290)	(55.057.173.891)	26,60
Pendapatan operasi lainnya Other operating revenues	94.746.253	147.383.653	(52.637.400)	(35,71)
Beban operasi lainnya Other operating revenues	(1.816.087.088)	(816.266.642)	(999.820.446)	122,49
Laba usaha Operating profit	**8.461.386.533**	**9.665.370.322**	**(1.203.983.789)**	**(12,46)**
Pendapatan bunga Interest income	**243.978.677**	**457.342.545**	**(213.363.868)**	**(46,65)**
Beban keuangan Finance costs	(2.412.073.242)	(2.950.591.147)	538.517.905	(18,25)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan Income before corporate income tax	**6.293.291.968**	**7.172.121.720**	**(878.829.752)**	**(12,25)**
Beban pajak final Final tax expense	(121.107.704)	-	(121.107.704)	(100,00)
Laba sebelum pajak penghasilan **Income before corporate income tax**	**6.172.184.264**	**7.172.121.720**	**(999.937.456)**	**(13,94)**
Beban pajak penghasilan, neto Corporate income tax expense, net	(3.595.038.494)	(3.627.592.836)	32.554.342	(0,90)
Laba tahun berjalan **Final tax expense**	**2.577.145.770**	**3.544.528.884**	**(967.383.114)**	**(27,29)**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp8,46 miliar, menurun 12,46% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp9,67 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp8.46 billion, a decrease of 12.46% compared to Rp9.67 billion in 2020.

Laba (Rugi) Bersih

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp2,58 miliar, menurun 27,29% dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp3,54 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp2.58 billion, a decrease of 27.29% compared to Rp3.54 billion in 2020

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

Tabel Kinerja Usaha PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT Jasa Armada Indonesia Tbk Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Penjualan dan pendapatan usaha Sales and business revenue	820.160.995	696.560.527	123.600.468	17,74
Beban pokok penjualan dan pendapatan Cost of sales and revenue	(572.345.480)	(470.486.833)	(101.858.647)	21,65
Jumlah laba bruto **Total Gross Profit**	**247.815.515**	**226.073.694**	**21.741.821**	**9,62**
Beban umum dan administrasi General and Admin expenses	(90.378.941)	(98.984.690)	8.605.749	(8,69)
Pendapatan keuangan Finance income	14.976.646	27.137.170	(12.160.524)	(44,81)
Beban keuangan Finance costs	(3.008.295)	(4.617.977)	1.609.682	(34,86)
Pendapatan lainnya Other Revenues	7.522.870	518.571	7.004.299	1.350,69
Beban lainnya Other expenses	(5.962.262)	(38.348.029)	32.385.767	(84,45)
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Total profit (loss) before tax income	170.965.533	111.688.739	59.276.794	53,07
Pendapatan (beban) pajak Revenues (expense) tax	(34.382.814)	(31.454.564)	(2.928.250)	9,31
Jumlah laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan Total profit (loss) from operations continued	136.582.719	80.234.175	56.348.544	70,23
Jumlah laba (rugi) **Total profit (loss)**	**136.582.719**	**80.234.175**	**56.348.544**	**70,23**

Laba (Rugi) Bruto

Laba bruto tahun 2021 mencapai Rp247,82 miliar, meningkat 9,62% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp226,07 miliar.

Operating Income (Loss)

Gross profit in 2021 was Rp247.82 billion, an increase of 9.62% compared to Rp226.07 billion in 2020.

Laba (Rugi)

Laba tahun 2021 mencapai Rp136,58 miliar, meningkat 70,23% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp80,23 miliar.

Income (Loss) – Net

Income for the year in 2021 was Rp136.58 billion, an increase of 70.23% compared to Rp80.23 billion in 2020.

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Energi Pelabuhan Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha Operating revenues	180.746.125.202	192.984.814.874	(12.238.689.672)	(6,34)
Beban usaha Operating expenses	(169.466.977.578)	(175.438.462.201)	(5.971.484.623)	(3,40)
Pendapatan operasi lainnya Other operating revenues	3.592.465.658	954.868.941	2.637.596.717	276,23
Beban operasi lainnya Other operating expenses	(282.473.462)	(661.674.011)	(379.200.549)	(57,31)
Laba usaha **Operating profit**	**14.589.139.820**	**17.839.547.603**	**(3.250.407.783)**	**(18,22)**

Tabel Kinerja Usaha PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Energi Pelabuhan Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan keuangan Finance income	620.604.233	1.631.957.683	(1.011.353.450)	(61,97)
Beban keuangan Finance costs	(262.446.925)	(553.228.892)	(290.781.967)	(52,56)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan Income before final tax and corporate income tax	**14.947.297.128**	**18.918.276.394**	**(3.970.979.266)**	**(20,99)**
Beban pajak final Final tax expense	(834.054.481)	(1.569.404.386)	(735.349.905)	(46,86)
Laba sebelum pajak penghasilan Income before corporate income tax	14.113.242.647	17.348.872.008	(3.235.629.361)	(18,65)
Beban pajak penghasilan - neto Income before corporate income tax	(3.680.176.302)	(4.113.010.512)	(432.834.210)	(10,52)
Laba tahun berjalan Income for the year	**10.433.066.345**	**13.235.861.496**	**(2.802.795.151)**	**(21,18)**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp14,59 miliar, menurun 18,22% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp17,84 miliar.

Gross Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp14.59 billion, a decrease of 18.22% compared to Rp17.84 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp10,43 miliar, menurun Rp2,80 miliar dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp13,24 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp10.43 billion, a decrease of Rp2.80 billion compared to Rp13.24 billion in 2020.

PT PENGERUKAN INDONESIA

PT PENGERUKAN INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha PT Pengerukan Indonesia
PT Pengerukan Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha Operating revenues	275.211.556.867	158.276.802.935	116.934.753.932	73,88
Beban usaha Operating expenses	(294.026.371.475)	(169.222.014.446)	124.804.357.029	73,75
Pendapatan operasi lainnya Other operating revenues	2.321.370.876	5.989.430.387	(3.668.059.511)	(61,24)
Beban operasi lainnya Other operating expenses	(29.454.692.694)	(4.611.237.596)	24.843.455.098	538,76
Rugi usaha Operating loss	**(45.948.136.426)**	**(9.567.018.720)**	**36.381.117.706**	**380,28**
Pendapatan keuangan Finance income	1.271.352.122	925.068.883	346.283.239	37,43
Beban Keuangan Finance costs	(19.903.561.976)	(12.556.829.909)	7.346.732.067	58,51
Rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan Loss before final tax and corporate income tax	**(64.580.346.280)**	**(21.198.779.746)**	**43.381.566.534**	**204,64**
Beban pajak final Final tax expense	(7.816.706.586)	(2.150.777.772)	5.665.928.814	263,44
Rugi sebelum pajak penghasilan **Loss – Net**	**(72.397.052.866)**	**(23.349.557.518)**	**49.047.495.348**	**210,06**

Laba (Rugi) Usaha

Rugi usaha tahun 2021 mencapai Rp45,95 miliar, meningkat 380,28% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kerugian sebesar Rp9,57 miliar.

Operating Income (Loss)

Operating loss in 2021 was Rp45.95 billion, an increase of 380.28% compared to Rp9.57 billion in 2020.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Rugi sebelum pajak penghasilan tahun 2021 mencapai Rp72,40 miliar, meningkat 210,06% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp23,35 miliar.

Income (Loss) – Net

Loss net for the year in 2021 was Rp72.40 billion, an increase of 210.06% compared to Rp23.35 billion in 2020.

PT PELINDO MARINE SERVICE

PT PELINDO MARINE SERVICE

Tabel Kinerja Usaha PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Marine Service Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan operasi Operating revenues	1.500.251.623.764	1.515.124.391.490	(14.872.767.726)	(0,98)
Beban operasi Operating expenses	(1.227.379.682.655)	(1.149.920.644.694)	(77.459.037.961)	6,74
Pendapatan usaha lainnya - neto Other operating revenues, net	15.562.509.561	15.258.341.838	304.167.723	1,99
Laba usaha **Operating profit**	**288.434.450.670**	**380.462.088.634**	**(92.027.637.964)**	**(24,19)**
Pendapatan keuangan Finance income	4.573.225.442	7.470.676.853	(2.897.451.411)	(38,78)
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	456.095.996	616.609.437	(160.513.441)	(26,03)
Beban Keuangan Finance costs	(12.652.550.293)	(50.809.442.471)	(38.156.892.178)	(75,10)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan **Income before final tax and corporate income tax**	**280.811.221.815**	**337.739.932.453**	**(56.928.710.638)**	**(16,86)**
Beban pajak final Final tax expense	(9.335.587.434)	(11.648.303.797)	(2.312.716.363)	(19,85)
Laba sebelum pajak penghasilan badan **Income before corporate income tax**	**271.475.634.381**	**326.091.628.656**	**(54.615.994.275)**	**(16,75)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan Corporate income tax benefit (expense)				
Kini Current	(40.566.265.301)	(56.958.766.440)	(16.392.501.139)	(28,78)
Tangguhan Deferred	(708.975.211)	2.054.108.170	(2.763.083.381)	(134,51)
Laba tahun berjalan **Income for the year**	**230.200.393.869**	**271.186.970.386**	**(40.986.576.517)**	**(15,11)**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp288,43 miliar, menurun 24,19% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp380,46 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp288.43 billion, a decrease of 24.19% compared to Rp380.46 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp230,20 miliar, menurun 15,11% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp271,19 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp230.20 billion, a decrease of 15.11% compared to Rp271.19 billion in 2020.

PT EQUIPORT INTI INDONESIA

PT EQUIPORT INTI INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha PT Equiport Inti Indonesia
PT Equiport Inti Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Operasi Operating revenues	182.166.320.995	194.367.949.653	(12.201.628.658)	(6,28)
Beban Operasi Operating expenses	(166.285.800.090)	(188.758.480.448)	22.472.680.358	(11,91)
Laba Usaha Operating profit	**15.880.520.905**	**5.609.469.205**	**10.271.051.700**	**183,10**
Pendapatan Keuangan Finance income	117.344.947	42.480.560	74.864.387	176,23
Beban Keuangan Finance costs	**1.465.213.854**	**6.544.304.127**	**(5.079.090.273)**	**(77,61)**
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income before corporate income tax	**17.463.079.706**	**12.196.253.892**	**5.266.825.814**	**43,18**
Beban Pajak Penghasilan Badan Corporate income tax expense				
Kini Current	(4.301.104.500)	(2.921.738.586)	(1.379.365.914)	47,21
Tangguhan Deferred	660.077.840	(20.611.272)	680.689.112	(3.302,51)
Laba Tahun Berjalan	**13.822.053.046**	**9.253.904.034**	**4.568.149.012**	**49,36**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp15,88 miliar, meningkat 183,10% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp5,61 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp15.88 billion, an increase of 183.10% compared to Rp5.61 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp13,82 miliar, meningkat 49,36% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp9,25 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp13.82 billion, an increase of 49.36% compared to Rp9.25 billion in 2020.

PT PELINDO HUSADA CIPTA MEDAN

PT PELINDO HUSADA CIPTA MEDAN

Tabel Kinerja Usaha PT Pelindo Husada Cipta Medan
PT Pelindo Husada Cipta Medan Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha Operating revenues	84.475.330.642	57.723.364.329	26.751.966.313	46,35
Beban pokok usaha Cost of revenues	(43.934.771.668)	(38.367.787.048)	(5.566.984.620)	14,51
Laba bruto **Gross Profit**	**40.540.558.974**	**19.355.577.281**	**21.184.981.693**	**109,45**
Beban usaha **Operating expenses**				
Beban pegawai Employee expenses	(6.177.959.714)	(5.900.964.116)	(276.995.598)	4,69

Tabel Kinerja Usaha PT Pelindo Husada Cipta Medan
PT Pelindo Husada Cipta Medan Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(5.533.937.701)	(870.081.476)	(4.663.856.225)	536,03
Beban usaha lainnya Other operating expenses	(2.169.544.309)	(3.083.963.941)	914.419.632	(29,65)
Total beban usaha Total operating expenses	**(13.881.441.724)**	**(9.855.009.533)**	**(4.026.432.191)**	**40,86**
Laba usaha Operating profit	**26.659.117.250**	**9.500.567.748**	**17.158.549.502**	**180,61**
(Beban) pendapatan di luar usaha (Expenses) revenues from outside of business				
Pendapatan di luar usaha Revenues from outside of business	2.513.532.646	2.817.769.850	(304.237.204)	(10,80)
Pendapatan keuangan Finance income	483.199.764	336.103.383	147.096.381	43,77
Beban di luar usaha Expenses from outside of business	(4.538.745.684)	(98.840.259)	(4.439.905.425)	4,492,00
Total (Beban) pendapatan di luar usaha **Total (Expenses) revenues from outside of business**	**(1.542.013.274)**	**3.055.032.974**	**(4.597.046.248)**	**(150,47)**
Laba sebelum pajak penghasilan badan **Income before corporate income tax**	**25.117.103.976**	**12.555.600.722**	**12.561.503.254**	**100,05**
Beban Pajak Penghasilan, neto Corporate income tax expense, net	5.221.520.962	1.869.298.592	3.352.222.370	179,33
Laba tahun berjalan **Income for the year**	**19.895.583.014**	**10.686.302.130**	**9.209.280.884**	**86,18**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp26,66 miliar, meningkat 180,61% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp9,50 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp26.66 billion, an increase of 180.61% compared to Rp9.50 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp19,90 miliar, meningkat 86,18% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp10,69 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp19.90 billion, an increase of 86.18% compared to Rp10.69 billion in 2020.

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA

Tabel Kinerja Usaha PT Pelabuhan Indonesia Investama
PT Pelabuhan Indonesia Investama Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha **Operating income**				
Keuntungan atas efek yang diperdagangkan Profit from traded securities	71.705.787.389	167.316.380.278	(95.610.592.889)	(57,14)
Profit from traded securities Dividend income	12.046.258.014	9.904.361.513	2.141.896.501	21,63

Tabel Kinerja Usaha PT Pelabuhan Indonesia Investama
PT Pelabuhan Indonesia Investama Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan dividen Bond coupon income	618.274.976	508.642.514	109.632.462	21,55
Dividend income Consulting service income	141.872.728	2.015.153.641	(1.873.280.913)	(92,96)
Pendapatan kupon obligasi Interest income from loans	32.142.027	1.149.853.899	(1.117.711.872)	(97,20)
Total pendapatan usaha **Total operating income**	**84.544.335.134**	**180.894.391.845**	**(96.350.056.711)**	**(53,26)**
Beban usaha Operating expenses				
Kerugian atas efek yang diperdagangkan Losses on traded securities	(702.749.102)	(157.052.413.976)	(156.349.664.874)	(99,55)
Beban bunga pinjaman kepada pemegang saham Interest expense on loans to shareholders	(60.306.962.482)	(72.470.928.339)	(12.163.965.857)	(16,78)
Gaji dan tunjangan Salaries and allowances	(6.082.505.012)	(14.253.846.558)	(8.171.341.546)	(57,33)
Konsultan Consultant	(1.933.039.574)	(6.287.774.511)	(4.354.734.937)	(69,26)
Umum dan administrasi General and administration	(1.826.199.454)	(2.751.758.641)	(925.559.187)	(33,64)
Sewa Rent	(1.197.832.138)	(4.704.763.203)	(3.506.931.065)	(74,54)
Penyusutan dan amortisasi Depreciation and amortization	(819.519.102)	(1.142.996.264)	(323.477.162)	(28,30)
Total beban usaha Total operating expenses	**(72.868.806.864)**	**(258.664.481.492)**	**(185.795.674.628)**	**(71,83)**
Laba (rugi) usaha Operating profit (loss)	11.675.528.270	(77.770.089.647)	89.445.617.917	115,01
Pendapatan keuangan Finance income	203.573.062	676.811.237	(473.238.175)	(69,92)
Pendapatan lain-lain, neto Other income, net	2.262.579.470	8.906.558.455	(6.643.978.985)	(74,60)
Laba (rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Profit (loss) before final tax and corporate income tax	**14.141.680.802**	**(68.186.719.955)**	**82.328.400.757**	**(120,74)**
Pajak final Final tax	(6.007.650.662)	(898.990.345)	5.108.660.317	568,27
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan badan Profit (loss) before corporate income tax	**8.134.030.140**	**(69.085.710.300)**	**77.219.740.440**	**111,77**
Beban pajak penghasilan badan Corporate income tax expense	(364.462.102)	(1.333.461.240)	(968.999.138)	(72,67)
Laba (rugi) tahun berjalan Income (loss) for the year	**7.769.568.038**	**(70.419.171.540)**	**78.188.739.578**	**111,03**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp11,68 miliar, meningkat 115,01% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kerugian usaha mencapai Rp77,77 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp11.68 billion, an increase of 115.01% compared to the loss of Rp77.77 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp7,77 miliar, meningkat 111,03% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kerugian sebesar Rp70,42 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp7.77 billion, an increase of 111.03% compared to the loss of Rp70.42 billion in 2020.

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

Tabel Kinerja Usaha PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan operasi Operating revenues	191.677.621	166.067.072	25.610.549	15,42
Beban pokok pendapatan Cost of revenues	(135.901.825)	(140.410.033)	4.508.208	(3,21)
Laba bruto Gross Profit	**55.775.796**	**25.657.039**	**30.118.757**	**117,39**
Beban penjualan Selling expenses	(220.668)	(149.802)	(70.866)	47,31
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(43.382.128)	(28.440.657)	14.941.471	52,54
Pendapatan (beban) usaha lainnya Other operating revenues (expenses)	(2.141.548)	10.037.863	(12.179.411)	(121,33)
Pendapatan keuangan Finance income	701.935	1.079.685	(377.750)	(34,99)
Beban Keuangan Finance costs	(465.330)	(269.669)	195.661	72,56
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax	**10.268.057**	**7.914.459**	**2.353.598**	**29,74**
Manfaat (beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate income tax benefit (expense)	1.423.461	(2.323.391)	3.746.852	(161,27)
Laba tahun berjalan Income for the year	**11.691.518**	**5.591.068**	**6.100.450**	**109,11**

Laba (Rugi) Bruto

Laba bruto tahun 2021 mencapai Rp55,78 miliar, meningkat 117,39% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp25,66 miliar.

Gross Profit (Loss)

Gross profit in 2021 was Rp55.78 billion, an increase of 117.39% compared to Rp25.66 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp11,69 miliar, meningkat 109,11% dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp5,59 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp11.69 billion, an increase of 109.11% compared to Rp5.59 billion in 2020.

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha PT Electronic Data Interchange Indonesia
PT Electronic Data Interchange Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha Operating revenues	79.308.106	102.410.610	(23.102.504)	(22,56)
Beban pokok pendapatan Cost of revenues	(73.151.114)	(149.326.716)	(76.175.602)	(51,01)
Laba (rugi) bruto **Gross Profit (Loss)**	**6.156.992**	**(46.916.106)**	**53.073.098**	**113,12**
Beban usaha Operating expenses	(32.125.287)	(30.815.964)	1.309.323	4,25
Beban usaha lain-lain - neto Other operating expenses, net	(2.700.023)	(3.644.542)	(944.519)	(25,92)
Pendapatan keuangan Finance income	83.176	325.922	(242.746)	(74,48)
Beban keuangan Finance costs	(3.217.172)	(4.356.118)	(1.138.946)	(26,15)
Rugi sebelum pajak **Loss before tax**	**(31.802.314)**	**(85.406.808)**	**(53.604.494)**	**(62,76)**
(Beban) manfaat pajak penghasilan Expenses) income tax benefits	(529.779)	2.214.149	(2.743.928)	(123,93)
Rugi tahun berjalan **Loss for the year**	**(32.332.093)**	**(83.192.659)**	**(50.860.566)**	**(61,14)**

Laba (Rugi) Bruto

Laba bruto tahun 2021 mencapai Rp6,16 miliar, menurun 113,12% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kerugian bruto mencapai Rp46,92 miliar.

Gross Profit (Loss)

Gross profit in 2021 was Rp6.16 billion, an increase of 113.12% compared to the gross loss of Rp46.92 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Rugi tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp32,33 miliar, menurun 61,14% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kerugian mencapai Rp83,19 miliar.

Income (Loss) for the Year

Loss for the year in 2021 was Rp32.33 billion, a decrease of 61.14% compared to the loss of Rp83.19 billion in 2020.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

Tabel Kinerja Usaha PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan operasi Operating revenues	131.463.854.516	70.252.388.324	61.211.466.192	87,13
Beban operasi Operating expenses	(122.417.408.558)	(65.560.241.758)	(56.857.166.800)	86,73
Pendapatan operasi lainnya Other operating revenues	445.881.921	167.842.565	278.039.356	165,65

Tabel Kinerja Usaha PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Beban operasi lainnya Other operating expenses	(1.728.368.350)	(35.264.124)	(1.693.104.226)	4801,21
Laba usaha **Operating profit**	**7.763.959.529**	**4.824.725.007**	**2.939.234.522**	**60,92**
Pendapatan keuangan Finance income	327.865.072	235.026.012	92.839.060	39,50
Beban keuangan Finance costs	(98.045.230)	(71.312.577)	(26.732.653)	37,49
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax	**7.993.779.371**	**4.988.438.442**	**3.005.340.929**	**60,25**
Beban pajak penghasilan badan Corporate income tax expense				
Kini Current	(2.891.544.920)	(1.762.819.960)	(1.128.724.960)	64,03
Tangguhan Deferred	902.767.774	23.919.726	878.848.048	3674,16
Laba tahun berjalan **Income for the year**	**6.005.002.225**	**3.249.538.208**	**2.755.464.017**	**84,80**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp7,76 miliar, meningkat 60,92% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp4,82 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp7.76 billion, an increase of 60.92% compared to Rp4.82 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp6,00 miliar, meningkat 84,80% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp3,25 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp6.00 billion, an increase of 84.80% compared to Rp3.25 billion in 2020.

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

Tabel Kinerja Usaha PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Daya Sejahtera Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha Operating revenues	546.127.301.530	516.745.974.416	29.381.327.114	5,69
Beban usaha Operating expenses	(519.014.207.273)	(488.038.590.292)	30.975.616.981	6,35
Pendapatan (beban) lain-lain, neto Other revenues (expenses), net	(1.739.111.507)	18.529.049.895	(20.268.161.402)	(109,39)
Beban bunga atas liabilitas sewa Interest expense on lease liability	(157.005.939)	(160.057.684)	3.051.745	(1,91)
Laba usaha **Operating profit**	**25.216.976.811**	**47.076.376.335**	**(21.859.399.524)**	**(46,43)**
Pendapatan keuangan Finance income	1.423.366.172	1.025.327.720	398.038.452	38,82
Laba sebelum pajak penghasilan **Income before corporate income tax**	**26.640.342.983**	**48.101.704.055**	**(21.461.361.072)**	**(44,62)**

Tabel Kinerja Usaha PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Daya Sejahtera Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Beban pajak penghasilan Corporate income tax expense	(5.278.556.912)	(12.857.652.816)	(7.579.095.904)	(58,95)
Laba tahun berjalan **Income for the year**	**21.361.786.071**	**35.244.051.239**	**(13.882.265.168)**	**(39,39)**

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha tahun 2021 mencapai Rp25,22 miliar, menurun 46,43% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp47,08 miliar.

Operating Profit (Loss)

Operating profit in 2021 was Rp25.22 billion, a decrease of 46.43% compared to Rp47.08 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp21,36 miliar, menurun 39,39% dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp35,24 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp21.36 billion, an increase of 39.39% compared to Rp35.24 billion in 2020.

PT KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

PT KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

Tabel Kinerja Usaha PT KSO Terminal Petikemas Koja
PT KSO Terminal Petikemas Koja Business Performance

(dalam jutaan Rupiah)/(in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Revenues	1.507.820.399	1.325.322.353	182.498.046	13,77
Beban operasi langsung Direct operating expenses	(791.868.353)	(738.792.470)	(53.075.883)	7,18
Laba bruto Gross Profit	**715.952.046**	**586.529.883**	**129.422.163**	**22,07**
Beban operasi tidak langsung Indirect operating expenses	(231.158.285)	(205.404.252)	(25.754.033)	12,54
Pendapatan lainnya Other Revenues	6.639.744	1.831.000	4.808.744	262,63
Beban lainnya Other expenses	(50.180.402)	(51.449.628)	1.269.226	(2,47)
Pendapatan bunga Interest income	14.834.330	21.278.896	(6.444.566)	(30,29)
Beban bunga Interest expense	(317.833.334)	(331.622.492)	13.789.158	(4,16)
Laba tahun berjalan **Income for the year**	**138.254.099**	**21.163.407**	**117.090.692**	**553,27**

Laba (Rugi) Bruto

Laba bruto tahun 2021 mencapai Rp715,95 miliar, meningkat 22,07% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp586,53 miliar.

Gross Profit (Loss)

Gross profit in 2021 was Rp715.95 billion, an increase of 22.07% compared to Rp586.53 billion in 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 mencapai Rp138,25 miliar, meningkat 553,27% dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp21,16 miliar.

Income (loss) for the Year

Income for the year in 2021 was Rp138.25 billion, an increase of 553.27% compared to Rp21.16 billion in 2020.


PELINDO

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW



Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja dan mendapat opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (dahulu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The following financial review refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2021 and 2020 which are presented in this Annual Report. The Financial Statements were audited by Purwantono, Sungkoro & Surja with an opinion of "fair in all material respects", together with the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) and its subsidiaries as of December 31, 2021 as well as the financial performance and the consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan Perseroan terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance includes the Consolidated Statement of Financial Position, Profit and Loss and Comprehensive Income Statement, and Consolidated Statement of Cash Flows as follows.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position Table

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET ASSETS				
ASET LANCAR CURRENT ASSETS				
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent	12.922.388.587	11.613.056.790	1.309.331.797	11,27
Investasi jangka pendek Short-term investment	5.718.525.973	11.094.379.218	(5.375.853.245)	(48,46)
Piutang usaha-neto Trade receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	1.253.132.841	1.277.605.993	(24.473.152)	(1,92)
Pihak berelasi Related parties	263.129.705	279.352.489	(16.222.784)	(5,81)
Piutang lain-lain-neto Other receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	126.988.519	103.528.199	23.460.320	22,66
Pihak berelasi Related parties	1.153.378.016	1.316.074.276	(162.696.260)	(12,36)
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	258.677.724	192.477.003	66.200.721	34,39
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues				
Pihak ketiga Third parties	297.585.161	435.894.846	(138.309.685)	(31,73)
Pihak berelasi Related parties	33.383.321	67.889.867	(34.506.546)	(50,83)
Persediaan Inventories	217.674.563	187.041.439	30.633.124	16,38
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	1.080.535.298	1.161.817.240	(81.281.942)	(7,00)
Aset lancar lainnya Other current assets	55.194.659	154.078.392	(98.883.733)	(64,18)
Total Aset Lancar **Total Current Assets**	**23.380.594.367**	**27.883.195.752**	**(4.502.601.385)**	**(16,15)**
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS				
Investasi jangka panjang Long-term investments	3.751.638.877	3.518.317.017	233.321.860	6,63
Properti investasi-neto Investment properties - net	873.433.978	867.416.746	6.017.232	0,69
Aset tetap-neto Fixed assets - net	46.300.182.922	44.578.602.925	1.721.579.997	3,86
Aset kerja sama operasi-neto Joint operation assets - net	408.013.146	434.117.133	(26.103.987)	(6,01)
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	452.002.189	516.020.761	(64.018.572)	(12,41)
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	587.268.838	753.558.421	(166.289.583)	(22,07)

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position Table

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset tak berwujud-neto Intangible assets - net	38.760.454.848	36.701.629.229	2.058.825.619	5,61
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	750.660.351	1.312.773.446	(562.113.095)	(42,82)
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	964.824.984	2.011.116.364	(1.046.291.380)	(52,03)
Total Aset Tidak Lancar **Total Non-current Assets**	**92.848.480.133**	**90.693.552.042**	**2.154.928.091**	**2,38**
TOTAL ASET **TOTAL ASSETS**	**116.229.074.500**	**118.576.747.794**	**(2.347.673.294)**	**(1,98)**
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
LIABILITAS LIABILITIES				
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES				
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	5.196.855	4.000.000	1.196.855	29,92
Utang usaha Trade payables				
Pihak ketiga Third parties	1.338.142.064	1.686.203.358	(348.061.294)	(20,64)
Pihak berelasi Related parties	1.926.350.211	3.267.820.968	(1.341.470.757)	(41,05)
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	1.298.045.484	1.379.039.522	(80.994.038)	(5,87)
Utang pajak Taxes payable	578.540.987	647.527.154	(68.986.167)	(10,65)
Beban akrual Accrued expenses	3.699.192.020	3.664.488.679	34.703.341	0,95
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities				
Utang obligasi Bonds payable	-	499.768.052	(499.768.052)	(100,00)
Utang bank Bank loans	2.365.898.747	504.471.670	1.861.427.077	368,99
Liabilitas sewa Lease liabilities	76.345.578	75.354.511	991.067	1,32
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities				
Pihak ketiga Third parties	1.182.432.796	1.023.914.350	158.518.446	15,48
Pihak berelasi Related parties	1.066.277.650	930.066.278	136.211.372	14,65
Total Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**13.536.422.392**	**13.682.654.542**	**(146.232.150)**	**(1,07)**

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position Table

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

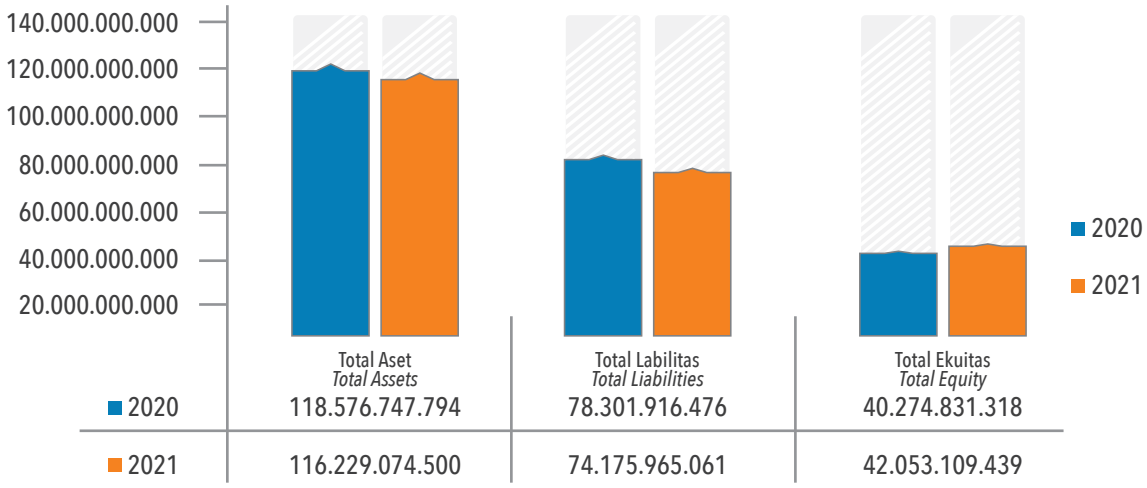
Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES				
Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi bagian lancar Long-term liabilities - of current maturities				
Utang obligasi Bonds payable	40.176.176.480	39.699.180.499	476.995.981	1,20
Utang bank Bank loans	6.656.343.511	11.128.996.490	(4.472.652.979)	(40,19)
Liabilitas sewa Lease liabilities	257.540.134	319.371.402	(61.831.268)	(19,36)
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities				
Pihak ketiga Third parties	476.290.919	332.402.837	143.888.082	43,29
Pihak berelasi Related parties	949.751.736	670.300.506	279.451.230	41,69
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	105.071.621	117.774.083	(12.702.462)	(10,79)
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	4.495.055.535	4.620.448.208	(125.392.673)	(2,71)
Liabilitas jangka panjang lainnya Other long-term liabilities	962.389.202	792.645.412	169.743.790	21,41
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	6.560.923.531	6.938.142.497	(377.218.966)	(5,44)
Total Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-current Liabilities**	**60.639.542.669**	**64.619.261.934**	**(3.979.719.265)**	**(6,16)**
TOTAL LIABILITAS **TOTAL LIABILITIES**	**74.175.965.061**	**78.301.916.476**	**(4.125.951.415)**	**(5,27)**
EKUITAS EQUITY				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent entity				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B Modal dasar - 33.000.000 saham dan, terdiri dari: 1 saham seri A dwiwarna dan 32.999.999 saham Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 4.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.457.067 saham terdiri dari: 1 saham Seri A Dwiwarna dan 8.457.066 saham Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1.444.029 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.	8.475.067.000	1.444.029.000	7.031.038.000	486,90

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position Table

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively Authorized capital- 33,000,000 shares, consist of: 1 Series A Dwiwarna share and 32,999,999 Series B shares as of December 31, 2021 2020 and 2019 Issued and fully paid - 8,457,067shares consists of: 1 Series A Dwiwarna share and 8,457,066 Series B shares as of December 31, 2021 and 1,444,029 shares as of December 31, 2020 and 2019				
Modal donasi Donated capital	26.825.982	26.825.982	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(1.128.322.898)	(205.004.707)	(923.318.191)	450,39
Komponen ekuitas lainnya Other equity component	1.466.121	-	1.466.121	100,00
Selisih atas perubahan ekuitas dan dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali Difference in value of transactions with non-controlling interest	836.072.934	836.072.934	-	-
Ekuitas *merging entity* Merging entity equity	-	21.516.406.212	(21.516.406.212)	(100,00)
Saldo Laba **Retained earnings**				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	29.925.514.788	15.021.058.681	14.904.456.107	99,22
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	4.434.909.230	993.019.548	3.441.889.682	346,61
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	(2.062.503.591)	(1.119.546.220)	(942.957.371)	84,23
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk-Neto **Equity Attributable to Owners of the Parent Entity-Net**	**40.509.029.566**	**38.512.861.430**	**1.996.168.136**	**5,18**
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	1.544.079.873	1.761.969.888	1.996.168.136	113,29
TOTAL EKUITAS **TOTAL EQUITY**	**42.053.109.439**	**40.274.831.318**	**1.778.278.121**	**4,42**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS **TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**	**116.229.074.500**	**118.576.747.794**	**(2.347.673.294)**	**(1,98)**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Financial Position (in thousand Rupiah)



ASET

Aset tahun 2021 mencapai Rp116,23 triliun, menurun 1,98% atau Rp2,35 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp118,58 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari menurunnya aset lancar sebesar Rp4,50 triliun.

ASSETS

Assets in 2021 reached Rp116.23 trillion, a decrease of 1.98% or Rp2.35 trillion compared to Rp118.58 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in current assets of Rp4.50 trillion.

Tabel Aset
Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset lancar Current assets	23.380.594.367	27.883.195.752	(4.502.601.385)	(16,15)
Aset tidak lancar Non-current assets	92.848.480.133	90.693.552.042	2.154.928.091	2,38
Total aset **Total assets**	**116.229.074.500**	**118.576.747.794**	**(2.347.673.294)**	**(1,98)**

ASET LANCAR

Aset lancar tahun 2021 mencapai Rp23,38 triliun, menurun 16,15% atau Rp 4,50 triliun dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp27,88 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan menurunnya investasi jangka pendek sebesar Rp5,38 triliun.

CURRENT ASSETS

Current assets in 2021 reached Rp23.38 trillion, a decrease of 16.15% or Rp4.50 trillion compared to Rp27.88 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in short-term investments of Rp5.38 trillion.

Tabel Aset Lancar
Current Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	12.922.388.587	11.613.056.790	1.309.331.797	11,27
Investasi jangka pendek Short-term investment	5.718.525.973	11.094.379.218	(5.375.853.245)	(48,46)
Piutang usaha-neto Trade receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	1.253.132.841	1.277.605.993	(24.473.152)	(1,92)
Pihak berelasi Related parties	263.129.705	279.352.489	(16.222.784)	(5,81)
Piutang lain-lain-neto Other receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	126.988.519	103.528.199	23.460.320	22,66
Pihak berelasi Related parties	1.153.378.016	1.316.074.276	(162.696.260)	(12,36)
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	258.677.724	192.477.003	66.200.721	34,39
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues				
Pihak ketiga Third parties	297.585.161	435.894.846	(138.309.685)	(31,73)
Pihak berelasi Related parties	33.383.321	67.889.867	(34.506.546)	(50,83)
Persediaan Inventories	217.674.563	187.041.439	30.633.124	16,38
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	1.080.535.298	1.161.817.240	(81.281.942)	(7,00)
Aset lancar lainnya Other current assets	55.194.659	154.078.392	(98.883.733)	(64,18)
Total aset lancar **Total current assets**	**23.380.594.367**	**27.883.195.752**	**(4.502.601.385)**	**(16,15)**

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas tahun 2021 mencapai Rp12,92 triliun, meningkat 11,27% atau Rp1,31 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp11,61 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas yang berasal dari bank sebesar 56,62% atau Rp1,71 triliun.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents in 2021 reached Rp12.92 trillion, an increase of 11.27% or Rp1.31 trillion compared to Rp11.61 trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in cash from banks of 56.62% or Rp1.71 trillion.

Tabel Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas Cash	42.703.201	101.731.358	(59.028.157)	(58,02)
Bank	4.727.772.682	3.018.630.537	1.709.142.145	56,62
Deposito berjangka Time deposits	8.151.912.704	8.492.694.895	(340.782.191)	(4,01)
Total kas dan setara kas **Total cash and cash equivalents**	**12.922.388.587**	**11.613.056.790**	**1.309.331.797**	**11,27**

INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek tahun 2021 mencapai Rp5,72 triliun, menurun 48,46% atau Rp5,38 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp11,09 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya investasi jangka pendek berasal dari deposito berjangka dan efek yang diperdagangkan, masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp5,23 triliun dan Rp143,79 miliar.

SHORT-TERM INVESTMENTS

Short-term investments in 2021 reached Rp5.72 trillion, a decrease of 48.46% or Rp5.38 trillion compared to Rp11.09 trillion in 2020. The decrease was due to a decrease in time deposits and traded securities, which decreased by Rp5.23 trillion and Rp143.79 billion, respectively.

Tabel Investasi Jangka Pendek
Short Term Investments

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total deposito berjangka Total time deposits	5.718.327.340	10.950.390.500	(5.232.063.160)	(47,78)
Efek yang diperdagangkan Marketable securities	198.633	143.988.718	(143.790.085)	(99,86)
Total investasi jangka pendek **Total short-term investments**	**5.718.525.973**	**11.094.379.218**	**(5.375.853.245)**	**(48,46)**

PIUTANG USAHA-NETO

Piutang usaha neto tahun 2021 mencapai Rp1,52 triliun, menurun 2,61% atau Rp40,70 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp1,56 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang usaha dari pihak ketiga maupun pihak berelasi, masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp24,47 miliar dan Rp16,22 miliar.

TRADE RECEIVABLES - NET

Trade receivables - net in 2021 reached Rp1.52 trillion, a decrease of 2.61% or Rp40.70 billion compared to Rp1.56 trillion in 2020. The decrease was due to a decrease in trade receivables from third parties and related parties, which decreased by Rp24.47 billion and Rp16.22 billion, respectively.

Tabel Piutang Usaha - Neto
Trade Receivables-Net

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga - neto Third parties - net	1.253.132.841	1.277.605.993	(24.473.152)	(1,92)
Pihak berelasi - neto Related parties -net	263.129.705	279.352.489	(16.222.784)	(5,81)
Piutang usaha - neto **Trade receivables - net**	**1.516.262.546**	**1.556.958.482**	**(40.695.936)**	**(2,61)**

PIUTANG LAIN-LAIN-NETO

Piutang lain-lain neto tahun 2021 mencapai Rp1,28 triliun, menurun 9,81% atau Rp139,24 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp1,42 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp162,70 miliar.

OTHER RECEIVABLES-NET

Other receivables - net in 2021 reached Rp1.28 trillion, a decrease of 9.81% or Rp139.24 billion compared to Rp1.42 billion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in other receivables from related parties of Rp162.70 billion.

Tabel Piutang Lain-Lain - Neto
Other Receivables - Net

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga - neto Third parties - net	126.988.519	103.528.199	23.460.320	22,66
Pihak berelasi - neto Related parties -net	1.153.378.016	1.316.074.276	(162.696.260)	(12,36)
Piutang lain-lain - neto **Other receivables - net**	**1.280.366.535**	**1.419.602.475**	**(139.235.940)**	**(9,81)**

UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Uang muka dan beban dibayar di muka tahun 2021 mencapai Rp258,68 miliar, meningkat 34,39% atau Rp66,20 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp192,47 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban dibayar di muka sebesar Rp132,63 miliar.

ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Advances and prepaid expenses in 2021 reached Rp258.68 billion, an increase of 34.39% or Rp66.20 billion compared to Rp192.47 billion in 2020. The increase was mainly due to an increase in prepaid expenses of Rp132.63 billion.

Tabel Uang Muka Dan Beban Dibayar Di Muka
Advances And Prepaid Expenses

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Uang muka Advances				
Operasional Operational	67.420.878	59.027.000	8.393.878	14,22
Lain-lain Others	1.518.015	823.922	694.093	84,24
Subtotal	**68.938.893**	**59.850.922**	**9.087.971**	**15,18**
Beban dibayar di muka Prepaid expenses				
Pegawai Employee	52.374.591	61.630.898	(9.256.307)	(15,02)
Asuransi Insurance	44.471.527	31.832.643	12.638.884	39,70
Sewa Rental	42.059.099	15.697.868	26.361.231	167,93
Umum General	14.060.826	9.803.669	4.257.157	43,42
Pemeliharaan Maintenance	12.008.540	-	12.008.540	100,00
Pemindahan tempat penimbunan petikemas Transfer of container hoarding sites	-	369.137	(369.137)	(100,00)
Lain-lain Others	24.764.248	13.291.866	11.472.382	86,31
Subtotal	**189.738.831**	**132.626.081**	**57.112.750**	**43,06**
Total	**258.677.724**	**192.477.003**	**66.200.721**	**34,39**

PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan masih akan diterima tahun 2021 mencapai Rp330,97 miliar, menurun 34,30% atau Rp172,82 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp503,78 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan yang masih akan diterima dari pihak ketiga dan pihak berelasi, masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp138,31 miliar dan Rp34,51 miliar.

ACCRUED REVENUES

Accrued revenues in 2021 reached Rp330.97 billion, a decrease of 34.30% or Rp172.82 billion compared to Rp503.78 billion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in revenues received from third parties and related parties, which decreased by Rp138.31 billion and Rp34.51 billion, respectively.

Tabel Pendapatan yang Masih Akan Diterima
Accrued Revenues

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga - neto Third parties - net	297.585.161	435.894.846	(138.309.685)	(31,73)
Pihak berelasi - neto Related parties -net	33.383.321	67.889.867	(34.506.546)	(50,83)
Total	**330.968.482**	**503.784.713**	**(172.816.231)**	**(34,30)**

PERSEDIAAN

Persediaan tahun 2021 mencapai Rp217,67 miliar, meningkat 16,38% atau Rp30,63 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp187,04 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan bahan bakar dan suku cadang, masing-masing meningkat sebesar Rp17,03 miliar dan Rp13,86 miliar.

INVENTORIES

Inventories in 2021 reached Rp217.67 billion, an increase of 16.38% or Rp30.63 billion compared to Rp187.04 billion in 2020. The increase was mainly due to an increase in fuel and spare parts inventories, which increased by Rp17.03 billion and Rp13.86 billion, respectively.

Tabel Persediaan
Inventories

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Suku cadang Spareparts	176.273.424	162.416.045	13.857.379	8,53
Bahan bakar Fuels	42.728.088	25.695.651	17.032.437	66,29
Alat tulis dan barang cetakan Stationaries and printings	643.761	628.103	15.658	2,49
Obat, bahan, dan alat medis Medicines, materials, and equipment	331.907	595.578	(263.671)	(44,27)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) Others (each below Rp1 billion)	6.182.313	3.548.653	2.633.660	74,22
Total	**226.159.493**	**192.884.030**	**33.275.463**	**17,25**
Dikurangi: Penyisihan persediaan usang Less: Allowance for inventory obsolence	(8.484.930)	(5.842.591)	(2.642.339)	45,23
Neto **Net**	**217.674.563**	**187.041.439**	**30.633.124**	**16,38**

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Pajak dibayar di muka tahun 2021 mencapai Rp1,08 triliun, menurun 7,00% atau Rp81,28 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp1,16 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pajak dibayar di muka yang berasal dari Perseroan sebesar Rp112,36 miliar.

PREPAID TAXES

Prepaid taxes in 2021 reached Rp1.08 trillion, a decrease of 7.00% or Rp81.28 billion compared to Rp1.16 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in the Company's prepaid taxes of Rp112.36 billion.

Tabel Pajak Dibayar Dimuka
Prepaid Taxes

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan The Company				
Pajak pertambahan nilai Value Added Tax	199.195.000	345.716.736	(146.521.736)	(42,38)
Pajak penghasilan Income taxes	176.154.037	141.996.590	34.157.447	24,06
Subtotal	**375.349.037**	**487.713.326**	**(112.364.289)**	**(23,04)**
Entitas anak Subsidiaries				
Pajak pertambahan nilai Value Added Tax	659.421.104	544.447.637	114.973.467	21,12
Pajak penghasilan lainnya Income taxes	45.765.157	129.656.277	(83.891.120)	(64,70)
Subtotal	**705.186.261**	**674.103.914**	**31.082.347**	**4,61**
Total	**1.080.535.298**	**1.161.817.240**	**(81.281.942)**	**(7,00)**

ASET LANCAR LAINNYA

Aset lancar lainnya tahun 2021 mencapai Rp55,19 miliar, menurun 64,18% atau Rp98,88 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp154,08 miliar.

OTHER CURRENT ASSETS

Other current assets in 2021 reached Rp55.19 billion, a decrease of 64.18% or Rp98.88 billion compared to Rp154.08 billion in 2020.

Tabel Aset Lancar Lainnya
Other Current Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset lancar lainnya Other current assets	55.194.659	154.078.392	(98.883.733)	(64,18)
Total	**55.194.659**	**154.078.392**	**(98.883.733)**	**(64,18)**

ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar tahun 2021 mencapai Rp92,84 triliun, meningkat 2,38% atau Rp2,15 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp90,69 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap-neto sebesar Rp1,72 triliun.

NON-CURRENT ASSETS

Non-current assets in 2021 reached Rp92.84 trillion, an increase of 2.38% or Rp2.15 trillion compared to Rp90.69 trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in fixed assets-net of Rp1.72 trillion.

Tabel Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi jangka panjang Long-term investments	3.751.638.877	3.518.317.017	233.321.860	6,63
Properti investasi-neto Investment properties - net	873.433.978	867.416.746	6.017.232	0,69
Aset tetap-neto Fixed assets - net	46.300.182.922	44.578.602.925	1.721.579.997	3,86
Aset kerja sama operasi-neto Joint operation assets - net	408.013.146	434.117.133	(26.103.987)	(6,01)
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	452.002.189	516.020.761	(64.018.572)	(12,41)
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	587.268.838	753.558.421	(166.289.583)	(22,07)
Aset tak berwujud-neto Intangible assets - net	38.760.454.848	36.701.629.229	2.058.825.619	5,61
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	750.660.351	1.312.773.446	(562.113.095)	(42,82)
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	964.824.984	2.011.116.364	(1.046.291.380)	(52,03)
Total aset tidak lancar **Total non-current assets**	**92.848.480.133**	**90.693.552.042**	**2.154.928.091**	**2,38**

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang tahun 2021 mencapai Rp3,75 triliun, meningkat 6,63% atau Rp233,32 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp3,52 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi jangka panjang pada surat utang sebesar Rp143,54 miliar.

LONG-TERM INVESTMENTS

Long-term investments in 2021 reached Rp3.75 trillion, an increase of 6.63% or Rp233.32 billion compared to Rp3.52 trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in long-term investment in debt securities of Rp143.54 billion.

Tabel Investasi Jangka Panjang
Long-Term Investments

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates	3.109.069.141	3.079.458.527	29.610.614	0,96
Investasi pada penyertaan saham Investment in share of stock	82.207.761	22.034.000	60.173.761	273,10
Investasi pada surat utang Investment in bonds	560.361.975	416.824.490	143.537.485	34,44
Total	**3.751.638.877**	**3.518.317.017**	**233.321.860**	**6,63**

PROPERTI INVESTASI-NETO

Properti investasi tahun 2021 mencapai Rp873,43 miliar, meningkat 0,69% atau Rp6,02 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp867,42 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya harga perolehan tanah sebesar Rp23,00 miliar.

INVESTMENT IN PROPERTY-NET

Investment in property in 2021 reached Rp873.43 billion, an increase of 0.69% or Rp6.02 billion compared to Rp867.42 billion in 2020. The increase was mainly due to the increase in the cost of land of Rp 23.00 billion.

Tabel Properti Investasi
Investment in Property

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition cost				
Tanah Land	576.010.187	553.013.673	22.996.514	4,16
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	700.131.110	693.909.905	6.221.205	0,90
Jalan dan bangunan Roads and buildings	28.074.591	28.074.591	0	0,00
Total	**1.304.215.888**	**1.274.998.169**	**29.217.719**	**2,29**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation				
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	(416.980.942)	(395.931.577)	(21.049.365)	5,32
Jalan dan bangunan Roads and buildings	(12.274.158)	(11.649.846)	(624.312)	5,36
Total	**(429.255.100)**	**(407.581.423)**	**21.673.677**	**5,32**
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Less: Allowance for impairment	(1.526.810)	0	(1.526.810)	(100,00)
Nilai buku neto **Net book value**	**873.433.978**	**867.416.746**	**6.017.232**	**0,69**

ASET TETAP-NETO

Aset tetap neto tahun 2021 mencapai Rp46,30 triliun, meningkat 3,86% atau Rp1,72 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp44,58 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap pada harga perolehan bangunan fasilitas pelabuhan Rp968,80 miliar.

FIXED ASSETS-NET

Fixed assets - net in 2021 reached Rp46.30 trillion, an increase of 3.86% or Rp1.72 trillion compared to Rp44.58 trillion in 2020. The increase was mainly due to the increase in fixed assets for the acquisition cost of port facilities of Rp.968.80 billion.

Tabel Aset Tetap
Fixed Assets - Net

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition cost				
Tanah Land	3.403.711.516	3.321.174.108	82.537.408	2,49
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	19.113.857.430	18.145.061.821	968.795.609	5,34
Kapal Vessels	5.945.716.876	5.644.336.695	301.380.181	5,34

Tabel Aset Tetap
Fixed Assets - Net

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	16.712.741.883	16.031.236.158	681.505.725	4,25
Instalasi fasilitas pelabuhan Port installation	3.498.893.462	2.937.873.881	561.019.581	19,10
Jalan dan bangunan Roads and buildings	5.779.160.164	5.801.563.436	(22.403.272)	(0,39)
Peralatan Equipment	1.669.392.356	1.458.075.401	211.316.955	14,49
Kendaraan Vehicles	178.116.172	192.995.218	(14.879.046)	(7,71)
Emplasemen Emplacement	662.029.394	550.609.196	111.420.198	20,24
Subtotal	**56.963.619.253**	**54.082.925.914**	**2.880.693.339**	**5,33**
Aset dalam penyelesaian Construction in progress	7.933.244.086	6.023.457.792	1.909.786.294	31,71
Total	**64.896.863.339**	**60.106.383.706**	**4.790.479.633**	**7,97**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	(18.532.994.344)	(15.408.577.997)	(3.124.416.347)	20,28
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for impairment	(63.686.073)	(119.202.784)	55.516.711	(46,57)
Nilai buku neto **Net book value**	**46.300.182.922**	**44.578.602.925**	**1.721.579.997**	**3,86**

ASET KERJA SAMA OPERASI-NETO

Aset kerja sama operasi-neto tahun 2021 mencapai Rp408,07 miliar, menurun 6,00% atau sebesar Rp26,04 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp434,12 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penyisihan penurunan nilai pada aset kerja sama operasi.

JOINT OPERATION ASSETS-NET

Joint operation assets - net in 2021 reached Rp408.07 billion, a decrease of 6.00% or Rp26.04 billion compared to Rp434.12 billion in 2020. The decrease was mainly due to an increase in the allowance for impairment of joint operation assets.

Tabel Aset Kerja Sama Operasi
Joint Operation Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition Costs				
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	772.669.489	772.669.489	0	0,00
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	87.538.706	86.424.760	1.113.946	1,29
Instalasi fasilitas pelabuhan Port installation	10.504.447	10.504.447	0	0,00

Tabel Aset Kerja Sama Operasi
Joint Operation Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Jalan dan bangunan Roads and buildings	1.082.111	1.082.111	0	0,00
Peralatan Equipment	1.535.821	1.535.821	0	0,00
Emplasemen Emplacement	4.530.521	4.530.520	1	0,00
Total	**877.861.095**	**876.747.148**	**1.113.947**	**0,13**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	(469.787.481)	(442.630.015)	(27.157.466)	6,14
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for impairment	(60.467)	0	(60.467)	(100,00)
Nilai buku neto **Net book value**	408.073.614	434.117.133	(26.043.519)	(6,00)

ASET HAK GUNA

Aset hak guna neto tahun 2021 mencapai Rp452,00 miliar, menurun 12,41% dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp516,02 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya aset hak guna dari perolehan peralatan sebesar Rp14,78 miliar.

RIGHT-OF-USE ASSETS-NET

Right-of-use assets - net in 2021 reached Rp452.00 billion, a decrease of 12.41% compared to Rp516.02 billion in 2020. The decrease was due to a decrease in right-of-use assets from the acquisition of equipment of Rp14.78 billion.

Tabel Aset Hak Guna
Right-of-use Assets - Net

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition Costs				
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	203.669.947	194.592.564	9.077.383	4,66
Kapal Vessels	119.407.557	119.407.557	0	0,00
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	25.697.627	23.224.766	2.472.861	10,65
Peralatan Equipment	98.735.557	113.513.905	(14.778.348)	(13,02)
Tanah Land	173.665.160	174.268.831	(603.671)	(0,35)
Kendaraan Vehicles	36.365.322	3.471.137	32.894.185	947,65
Subtotal	**657.541.170**	**628.478.760**	**29.062.410**	**4,62**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	(205.538.981)	(112.457.999)	(93.080.982)	82,77
Nilai buku bersih **Net book value**	**452.002.189**	**516.020.761**	**(64.018.572)**	**(12,41)**

ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset pajak tangguhan tahun 2021 mencapai Rp587,27 miliar, menurun 22,07% atau Rp166,29 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp753,56 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya aset pajak tangguhan pada induk perusahaan dan entitas anak, yang masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp84,99 miliar dan Rp81,30 miliar.

DEFERRED TAX ASSETS

Deferred tax assets in 2021 reached Rp587.27 billion, a decrease of 22.07% or Rp166.29 billion compared to Rp753.56 billion in 2020. The decrease was due to a decrease in deferred tax assets in the parent company and subsidiaries, which decreased by Rp84.99 billion and Rp81.30 billion, respectively.

Tabel Aset Pajak Tangguhan
Deferred Tax Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan The Company	435.310.826	520.297.490	(84.986.664)	(16,33)
Entitas anak Subsidiaries	151.958.012	233.260.931	(81.302.919)	(34,85)
Total	**587.268.838**	**753.558.421**	**(166.289.583)**	**(22,07)**

ASET TAK BERWUJUD-NETO

Aset tak berwujud tahun 2021 mencapai Rp38,76 triliun, meningkat 5,61% atau Rp2,06 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp36,70 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tak berwujud yang berasal dari aset hak konsesi sebesar Rp2,35 triliun.

INTANGIBLE ASSETS-NET

Intangible assets-net in 2021 reached Rp38.76 trillion, an increase of 5.61% or Rp2.06 trillion compared to Rp36.70 trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in intangible assets originating from concession rights assets of Rp2.35 trillion.

Tabel Aset Tak berwujud
Intangible Assets-Net

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset hak konsesi Concession rights assets	39.317.534.983	36.971.125.428	2.346.409.555	6,35
Piranti lunak Software application	1.332.014.102	1.251.393.901	80.620.201	6,44
Sertifikasi Certification	143.041.164	142.810.494	230.670	0,16
Lisensi License	93.309.813	93.044.688	265.125	0,28
Aset dalam penyelesaian Construction in progress	72.392.067	105.543.969	(33.151.902)	(31,41)
Aset tak berwujud lainnya Other intangible assets	300.537.663	205.129.207	95.408.456	46,51
Subtotal	**41.258.829.792**	**38.769.047.687**	**2.489.782.105**	**6,42**
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai Accumulated amortization and allowance for impairment	(2.498.374.944)	(2.067.418.458)	(430.956.486)	20,85
Neto **Net**	**38.760.454.848**	**36.701.629.229**	**2.058.825.619**	**5,61**

TAKSIRAN TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

Taksiran tagihan restitusi pajak tahun 2021 mencapai Rp750,66 miliar, menurun 42,82% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1,31 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya taksiran tagihan restitusi pajak di perusahaan maupun entitas anak, yang masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp366,52 miliar dan Rp195,59 miliar.

ESTIMATED CLAIMS FOR TAX REFUND

Estimated claims for tax refunds in 2021 reached Rp750.66 billion, a decrease of 42.82% compared to Rp1.31 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in estimated claims for tax refunds by the Company and its subsidiaries, which decreased by Rp366.52 billion and Rp195.59 billion, respectively.

Tabel Taksiran Tagihan Restitusi Pajak
Estimated Claims for Tax Refund

(dalam juta Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan The Company	569.941.684	936.464.452	(366.522.768)	(39,14)
Entitas anak Subsidiaries	180.718.667	376.308.994	(195.590.327)	(51,98)
Total	**750.660.351**	**1.312.773.446**	**(562.113.095)**	**(42,82)**

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya tahun 2021 mencapai Rp964,82 miliar, menurun 52,30% atau Rp1,05 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp2,01 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya aset tidak lancar pada pajak final dibayar di muka sebesar Rp1,12 triliun

OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other non-current assets in 2021 reached Rp964.82 billion, a decrease of 52.30% or Rp1.05 trillion compared to Rp2.01 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in non-current assets for prepaid final taxes of Rp1.12 trillion.

Tabel Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Uang muka pembelian aset tetap Advances for purchase of fixed assets	248.304.048	172.467.503	75.836.545	43,97
Aset tetap tidak produktif Unproductive fixed assets	130.179.339	130.182.642	(3.303)	(0,00)
Pajak final dibayar di muka Prepaid final tax	126.924.148	1.244.598.181	(1.117.674.033)	(89,80)
Jaminan pelaksanaan Performance guarantee	69.777.240	64.999.265	4.777.975	7,35
Piutang pemulihan investasi Receivable investment recovery	64.838.387	55.016.590	9.821.797	17,85
Uang jaminan Guarantee	42.549.064	21.053.483	21.495.581	102,10
Goodwill	32.550.784	32.550.782	2	0,00
Piutang pajak Tax receivables	29.340.959	56.479.833	(27.138.874)	(48,05)
Aset tetap belum dimanfaatkan Fixed assets not utilized	25.493.693	25.392.745	100.948	0,40
Aset lain-lain Other assets	381.667.895	404.904.994	(23.237.099)	(5,74)

Tabel Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Dikurangi: Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai Less: Accumulated depreciation and impairment	(186.800.573)	(196.529.654)	9.729.081	(4,95)
Total	**964.824.984**	**2.011.116.364**	**(1.046.291.380)**	**(52,03)**

LIABILITAS

Liabilitas tahun 2021 mencapai Rp74,18 triliun, menurun 5,27% atau Rp4,13 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp78,30 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, yang masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp3,98 triliun dan Rp146,23 miliar.

LIABILITIES

Liabilities in 2021 reached Rp74.18 trillion, a decrease of 5.27% or Rp4.13 trillion compared to Rp78.30 trillion in 2020. The decrease was due to a decrease in long-term and short-term liabilities, which decreased by Rp3.98 trillion and Rp146.23 billion, respectively.

Tabel Liabilitas
Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas jangka pendek Current liabilities	13.536.422.392	13.682.654.542	(146.232.150)	(1,07)
Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities	60.639.542.669	64.619.261.934	(3.979.719.265)	(6,16)
Total liabilitas **Total liabilities**	**74.175.965.061**	**78.301.916.476**	**(4.125.951.415)**	**(5,27)**

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek tahun 2021 mencapai Rp13,65 triliun, menurun 1,07% atau Rp146,23 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp13,68 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya utang usaha yang sebesar Rp1,34 triliun.

CURRENT LIABILITIES

Current liabilities in 2021 reached Rp13.65 trillion, a decrease of 1.07% or Rp146.23 billion compared to Rp13.68 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in trade payables of Rp1.34 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	5.196.855	4.000.000	1.196.855	29,92
Utang usaha Trade payables				

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	1.338.142.064	1.686.203.358	(348.061.294)	(20,64)
Pihak berelasi Related parties	1.926.350.211	3.267.820.968	(1.341.470.757)	(41,05)
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	1.298.045.484	1.379.039.522	(80.994.038)	(5,87)
Utang pajak Taxes payable	578.540.987	647.527.154	(68.986.167)	(10,65)
Beban akrual Accrued expenses	3.699.192.020	3.664.488.679	34.703.341	0,95
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities				
Utang obligasi Bonds payable	-	499.768.052	(499.768.052)	(100,00)
Utang bank Bank loans	2.365.898.747	504.471.670	1.861.427.077	368,99
Liabilitas sewa Lease liabilities	76.345.578	75.354.511	991.067	1,32
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities				
Pihak ketiga Third parties	1.182.432.796	1.023.914.350	158.518.446	15,48
Pihak berelasi Related parties	1.066.277.650	930.066.278	136.211.372	14,65
Total liabilitas jangka pendek **Total current liabilities**	**13.536.422.392**	**13.682.654.542**	**(146.232.150)**	**(1,07)**

PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek tahun 2021 mencapai Rp5,20 miliar, meningkat 29,92% atau sebesar Rp1,20 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp4,00 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank jangka pendek pada pihak ketiga sebesar Rp1,20 miliar.

SHORT-TERM BANK LOANS

Short-term bank loans in 2021 reached Rp5.20 billion, an increase of 29.92% or Rp1.20 billion compared to Rp4.00 billion in 2020. The increase was due to an increase in short-term bank loans to third parties of Rp1.20 billion.

Tabel Pinjaman Bank Jangka Pendek
Short-term Bank Loans

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	5.196.855	4.000.000	1.196.855	29,92
Pihak berelasi Related parties	0	0	0	0
Total pinjaman bank jangka pendek **Total short-term bank loans**	**5.196.855**	**4.000.000**	**1.196.855**	**29,92**

UTANG USAHA

Utang usaha tahun 2021 mencapai Rp3,26 triliun, menurun 38,74% atau Rp1,69 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp4,95 triliun. Penurunan tersebut terutama

TRADE PAYABLES

Trade payables in 2021 reached Rp3.26 trillion, a decrease of 38.74% or Rp1.69 trillion compared to Rp4.95 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in trade payables to

disebabkan oleh menurunnya utang usaha kepada pihak ketiga maupun berelasi, yakni masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp3448,06 miliar dan Rp1,34 triliun.

third parties and related parties, which decreased by Rp3448.06 billion and Rp1.34 trillion, respectively.

Tabel Utang Usaha
Trade Payables

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	1.338.142.064	1.686.203.358	(348.061.294)	(24,69)
Pihak berelasi Related parties	1.926.350.211	3.267.820.968	(1.341.470.757)	(46,01)
Total utang usaha **Total trade payables**	**3.264.492.275**	**4.954.024.326**	**(1.689.532.051)**	**(38,74)**

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK

Pendapatan diterima di muka jangka pendek tahun 2021 mencapai Rp1,30 triliun, menurun 5,87% atau Rp80,99 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp1,38 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya uang yang diperhitungkan pada pihak ketiga sebesar Rp64,75 miliar.

SHORT-TERM UNEARNED REVENUES

Short-term unearned revenues in 2021 reached Rp1.30 trillion, a decrease of 5.87% or Rp80.99 billion compared to Rp1.38 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in money received by third parties of Rp64.75 billion.

Tabel Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek
Short-term Unearned Revenues

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sewa kuartalan Quarterly rent	695.543.951	654.685.673	40.858.278	6,24
Uang untuk diperhitungkan Advances from customer				
Pihak ketiga Third parties	130.044.647	194.792.015	(64.747.368)	(33,24)
Pihak berelasi Related parties	8.064.950	59.290.895	(51.225.945)	(86,40)
Pendapatan diterima di muka jangka pendek - lainnya Other short-term unearned revenues	66.976.899	2.669.938	54.925.965	455,78
Pelayanan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Land, building, water and electricity services	172.666.515	146.993.072	25.673.443	17,47
Subtotal	**1.073.296.962**	**1.067.812.589**	**5.484.373**	**0,51**
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang Current portion of long-term unearned revenue	224.748.522	311.226.933	(86.478.411)	(27,79)
Total	**1.298.045.484**	**1.379.039.522**	**(80.994.038)**	**(5,87)**

UTANG PAJAK

Utang pajak tahun 2021 mencapai Rp578,54 miliar, menurun 10,65% atau Rp68,99 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp647,53 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh utang pajak pada induk perusahaan sebesar Rp155,56 miliar.

TAXES PAYABLE

Taxes payable in 2021 reached Rp578.54 billion, a decrease of 10.65% or Rp68.99 billion compared to Rp647.53 billion 2020. The decrease was mainly due to taxes payable to the parent company amounting to Rp155.56 billion.

Tabel Utang Pajak
Taxes Payable

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Induk perusahaan The Company	246.971.066	402.534.775	(155.563.709)	(38,65)
Entitas anak Subsidiaries	331.569.921	244.992.379	86.577.542	35,34
Utang pajak **Taxes payable**	**578.540.987**	**647.527.154**	**(68.986.167)**	**(10,65)**

BEBAN AKRUAL

Beban akrual tahun 2021 mencapai Rp3,70 triliun, meningkat 0,95% atau Rp34,70 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp3,66 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pegawai sebesar Rp173,63 miliar.

ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses in 2021 reached Rp3.70 trillion, an increase of 0.95% or Rp34.70 billion compared to Rp3.66 trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in employee expenses of Rp173.63 billion.

Tabel Beban Akrual
Accrued Expenses

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pegawai Employee	1.536.062.485	1.362.433.077	173.629.408	12,74
Kerja sama mitra usaha Partnership	708.323.183	866.823.662	(158.500.479)	(18,29)
Umum General	417.036.376	572.154.903	(155.118.527)	(27,11)
Bunga Interest	351.739.853	348.881.640	2.858.213	0,82
Bahan Fuel	206.967.006	102.363.721	104.603.285	102,19
Pemeliharaan Maintenance	167.675.465	108.486.693	59.188.772	54,56
Asuransi Insurance	41.050.044	16.245.675	24.804.369	152,68
Biaya konsesi Concession fee	26.989.964	28.354.981	(1.365.017)	(4,81)
Lain-lain Others	243.347.644	258.744.327	(15.396.683)	(5,95)
Total	**3.699.192.020**	**3.664.488.679**	**34.703.341**	**0,95**

BAGIAN LANCAR ATAS LIABILITAS JANGKA PANJANG

Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang tahun 2021 mencapai Rp2,44 triliun, meningkat 126,22% atau sebesar Rp1,36 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1,08 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan bagian lancar atas liabilitas jangka panjang pada utang bank sebesar Rp1,86 triliun.

CURRENT MATURITIES OF LONG-TERM LIABILITIES

Current maturities of long-term liabilities in 2021 reached Rp2.44 trillion, an increase of 126.22% or Rp1.36 trillion compared to Rp1.08 trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in the current share of long-term liabilities in bank loans of Rp1.86 trillion.

Tabel Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang
Current Maturities of Long-Term Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang - utang obligasi Long-term liabilities - Bonds payable	-	499.768.052	(499.768.052)	(100,00)
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang - utang bank Long-term liabilities - Bank loans	2.365.898.747	504.471.670	1.861.427.077	368,99
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang-liabilitas sewa Long-term liabilities - lease liabilities	76.345.578	75.354.511	991.067	1,32
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang **Total long-term liabilities - of current maturities**	**2.442.244.325**	**1.079.594.233**	**1.362.650.092**	**126,22**

LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

Liabilitas jangka pendek lainnya tahun 2021 mencapai Rp2,25 triliun, meningkat 15,08% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp1,95 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka pendek lainnya pada pihak ketiga dan pihak berelasi, yang masing-masing meningkat sebesar Rp158,52 miliar dan Rp136,21 miliar.

OTHER CURRENT LIABILITIES

Other current liabilities in 2021 reached Rp2.25 trillion, an increase of 15.08% compared to Rp1.95 trillion in 2020. The increase was mainly due to the increase in other current liabilities to third parties and related parties, which increased by Rp158.52 billion and Rp136.21 billion, respectively.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
Other Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	1.182.432.796	1.023.914.350	158.518.446	15,48
Pihak berelasi Related parties	1.066.277.650	930.066.278	136.211.372	14,65
Liabilitas jangka pendek lainnya **Other current liabilities**	**2.248.710.446**	**1.953.980.628**	**294.729.818**	**15,08**

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang tahun 2021 mencapai Rp60,64 triliun, menurun 6,16% atau Rp3,98 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp64,62 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang pada utang bank setelah dikurangi bagian lancar sebesar Rp4,47 triliun.

NON-CURRENT LIABILITIES

Non-current liabilities in 2021 reached Rp60.64 trillion, a decrease of 6.16% or Rp3.98 trillion compared to Rp64.62 trillion in 2020. This decrease was mainly due to a decrease in bank loans of Rp4.47 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar Long-term liabilities - of current maturities				
Utang obligasi Bonds payable	40.176.176.480	39.699.180.499	476.995.981	1,20
Utang bank Bank loans	6.656.343.511	11.128.996.490	(4.472.652.979)	(40,19)
Liabilitas sewa Lease liabilities	257.540.134	319.371.402	(61.831.268)	(19,36)
Utang lembaga keuangan non-bank Loan from non-bank	)			
Pihak ketiga Third parties	476.290.919	332.402.837	143.888.082	43,29
Pihak berelasi Related parties	949.751.736	670.300.506	279.451.230	41,69
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	105.071.621	117.774.083	(12.702.462)	(10,79)
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	4.495.055.535	4.620.448.208	(125.392.673)	(2,71)
Liabilitas jangka panjang lainnya Other long-term liabilities	962.389.202	792.645.412	169.743.790	21,41
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	6.560.923.531	6.938.142.497	(377.218.966)	(5,44)
Total liabilitas jangka panjang **Total long-term liabilities**	**60.639.542.669**	**64.619.261.934**	**(3.979.719.265)**	**(6,16)**

LIABILITAS JANGKA PANJANG-SETELAH DIKURANGI BAGIAN LANCAR

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar tahun 2021 mencapai Rp47,09 miliar, menurun 7,93% atau Rp4,06 miliar dibandingkan dengan 2020 mencapai Rp51,15 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang pada utang bank setelah dikurangi bagian lancar sebesar Rp4,47 triliun.

LONG-TERM LIABILITIES - OF CURRENT MATURITIES

Long-term liabilities - of current maturities in 2021 reached Rp47.09 billion, decreased by 7.93% or Rp4.06 billion compared to 2020 which reached Rp51.15 billion. The decrease was mainly due to a decrease in bank loans of Rp4.47 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang-Setelah
Long-Term Liabilities - of Current Maturities

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas jangka panjang - utang obligasi Long-term liabilities - Bonds payable	40.176.176.480	39.699.180.499	476.995.981	1,20
Liabilitas jangka panjang - utang bank Long-term liabilities - Bank loans	6.656.343.511	11.128.996.490	(4.472.652.979)	(40,19)
Liabilitas jangka panjang - liabilitas sewa Long-term liabilities - lease liabilities	257.540.134	319.371.402	(61.831.268)	(19,36)
Total liabilitas jangka panjang - setelah di bagian jangka panjang **Total long-term liabilities - of current maturities**	**47.090.060.125**	**51.147.548.391**	**(4.057.488.266)**	**(7,93)**

UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Utang lembaga keuangan non bank sewa tahun 2021 mencapai Rp1,43 triliun, meningkat 42,22% atau sebesar Rp423,34 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp1,00 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lembaga keuangan non-bank pada pihak ketiga dan pihak berelasi sebesar Rp279,45 miliar dan Rp143,89 miliar.

LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION

Loan from non-bank financial institutions in 2021 reached Rp1.43 trillion, an increase of 42.22% or Rp423.34 billion compared to Rp1.00 trillion in 2020. The increase was mainly due to the increase in loans to third parties and related parties of Rp279.45 billion and Rp143.89 billion, respectively.

Tabel Utang Lembaga Keuangan Non Bank
Loan from Non-Bank Financial Institutions

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	476.290.919	332.402.837	143.888.082	43,29
Pihak berelasi Related parties	949.751.736	670.300.506	279.451.230	41,69
Total utang lembaga keuangan non bank **Total loan from non-bank financial institution**	**1.426.042.655**	**1.002.703.343**	**423.339.312**	**42,22**

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas pajak tangguhan tahun 2021 mencapai Rp105,07 miliar, menurun 10,79% atau sebesar Rp12,70 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp117,77 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas pajak tangguhan dari entitas anak.

DEFERRED TAX LIABILITIES

Deferred tax liabilities in 2021 reached Rp105.07 billion, a decrease of 10.79% or Rp12.70 billion compared to Rp117.77 billion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in deferred tax liabilities from subsidiaries.

Tabel Liabilitas Pajak Tangguhan
Deferred Tax Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Entitas anak Subsidiaries	105.071.621	117.774.083	(12.702.462)	(10,79)
Total liabilitas pajak tangguhan **Total deferred tax liabilities**	**105.071.621**	**117.774.083**	**(12.702.462)**	**(10,79)**

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

Pendapatan diterima di muka jangka panjang tahun 2021 mencapai Rp4,50 triliun, menurun 2,71% atau Rp125,39 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp4,62 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan diterima di muka jangka panjang dari sewa tanah dan bangunan sebesar Rp264,41 miliar.

LONG-TERM UNEARNED REVENUE

Long-term unearned revenue in 2021 reached Rp4.50 trillion, a decrease of 2.71% or Rp125.39 billion compared to Rp4.62 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in long-term unearned income from land and building rentals of Rp264.41 billion.

Tabel Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang
Long-Term Unearned Revenue

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Premium JICT JICT Premium	1.967.827.813	2.087.090.104	(119.262.291)	(5,71)
Sewa diterima di muka - NPCT 1 Advance rental fee - NPCT 1	1.151.689.282	1.019.435.010	132.254.272	12,97
Premium TPK Koja TPK Koja Premium	457.634.375	418.084.656	39.549.719	9,46
Sewa tanah dan/atau bangunan Land and/or building rental	1.142.652.587	1.407.065.371	(264.412.784)	(18,79)
Subtotal	**4.719.804.057**	**4.931.675.141**	**(211.871.084)**	**(4,30)**
Bagian lancar Current portion	(224.748.522)	(311.226.933)	86.478.411	(27,79)
Total bagian jangka panjang **Total long-term portion**	**4.495.055.535**	**4.620.448.208**	**(125.392.673)**	**(2,71)**

LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

Liabilitas jangka panjang lainnya tahun 2021 mencapai Rp962,39 miliar, meningkat 21,41% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp792,65 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang lainnya pihak ketiga.

OTHER LONG-TERM LIABILITIES

Other long-term liabilities in 2021 reached Rp962.39 billion, an increase of 21.41% compared to Rp792.65 billion in 2020. The increase was mainly due to an increase in other long-term liabilities to third parties.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Lainnya
Other Long-Term Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	495.850.804	326.107.014	169.743.790	52,05
Pihak berelasi Related parties	466.538.398	466.538.398	0	0,00
Liabilitas jangka panjang lainnya **Other long-term liabilities**	**962.389.202**	**792.645.412**	**169.743.790**	**21,41**

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja tahun 2021 mencapai Rp6,56 triliun, menurun 5,44% atau Rp377,22 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp6,94 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas imbalan kerja induk perusahaan sebesar Rp422,29 miliar.

EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Employee benefit liabilities in 2021 reached Rp6.56 trillion, a decrease of 5.44% or Rp377.22 billion compared to Rp6.94 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in the parent company's employee benefits liability of Rp422.29 billion.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja
Employee Benefit Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan The Company				
Program pensiun Pension program	635.994.743	1.036.144.810	(400.150.067)	(38,62)
Program penghargaan masa bhakti Gratuity and compensation benefits	906.174.293	849.857.115	56.317.178	6,63
Program kesehatan pensiunan Pension healthcare program	4.126.658.787	4.300.395.029	(173.736.242)	(4,04)
Imbalan kerja jangka panjang lainnya Other long-term employee benefits	434.967.735	339.690.518	95.277.217	28,05
Subtotal	**6.103.795.558**	**6.526.087.472**	**(422.291.914)**	**(6,47)**
Entitas anak Subsidiaries				
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program	457.127.973	412.055.025	45.072.948	10,94
Total	**6.560.923.531**	**6.938.142.497**	**(377.218.966)**	**(5,44)**

EKUITAS

Ekuitas tahun 2021 mencapai Rp42,05 triliun, meningkat 4,42% atau Rp1,78 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp40,27 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp14,90 triliun.

EQUITY

Equity in 2021 reached Rp42.05 trillion, an increase of 4.42% or Rp1.78 trillion compared to Rp40.27 trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in appropriated retained earnings of Rp14.90 trillion.

Tabel Ekuitas
Equity

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 4.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham Share capital -Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal dasar- 4.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham	8.475.067.000	1.444.029.000	7.031.038.000	486,90

Tabel Ekuitas
Equity

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Modal donasi Donation capital	26.825.982	26.825.982	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid- in capital	(1.128.322.898)	(205.004.707)	(923.318.191)	450,39
Komponen ekuitas lainnya Other equity component	1.466.121	-	1.466.121	#DIV/0!
Selisih atas perubahan ekuitas dan dampak transaksi dengan kepentingan non pengendali Difference in value of transactions with non-controlling interest	836.072.934	836.072.934	-	-
Ekuitas *merging entity* Equity merging entity	-	21.516.406.212	(21.516.406.212)	(100,00)
Saldo laba Retained earn				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	29.925.514.788	15.021.058.681	14.904.456.107	99,22
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	4.434.909.230	993.019.548	3.441.889.682	346,61
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	(2.062.503.591)	(1.119.546.220)	(942.957.371)	84,23
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto **Equity attributable to owners of the parent entity - net**	**40.509.029.566**	**38.512.861.430**	**1.996.168.136**	**5,18**
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	1.544.079.873	1.761.969.888	1.996.168.136	113,29
Total ekuitas **Total equity**	**42.053.109.439**	**40.274.831.318**	**1.778.278.121**	**4,42**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan operasi Container services	28.814.806.337	26.591.131.827	2.223.674.510	8,36
Pendapatan konstruksi Construction revenues	3.195.512.405	3.924.471.433	(728.959.028)	(18,57)
Beban operasi Operating expenses	(22.503.946.817)	(20.675.933.360)	(1.828.013.457)	8,84
Beban konstruksi Construction expenses	(3.195.512.405)	(3.924.471.433)	728.959.028	(18,57)
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto Other operating income (expense) - net	229.338.106	(196.538.108)	425.876.214	(216,69)
LABA USAHA **INCOME FROM OPERATIONS**	**6.540.197.626**	**5.718.660.359**	**821.537.267**	**14,37**
Pendapatan keuangan Finance income	407.775.884	699.581.748	(291.805.864)	(41,71)
Beban keuangan Finance costs	(2.540.082.866)	(2.544.366.171)	4.283.305	(0,17)
Bagian laba (rugi entitas asosiasi) Equity in income (loss) of associates	255.107.588	(39.998.707)	295.106.295	(737,79)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN **INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX**	**4.662.998.232**	**3.833.877.229**	**829.121.003**	**21,63**
Beban pajak final Final tax expense	(487.671.869)	(436.180.278)	(51.491.591)	11,81
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN **INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX**	**4.175.326.363**	**3.397.696.951**	**777.629.412**	**22,89**
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan CORPORATE INCOME TAX Benefit (EXPENSE)				
Kini Current	(847.733.176)	(745.867.105)	(101.866.071)	13,66
Tangguhan Deferred	(151.447.911)	307.112.625	(458.560.536)	(149,31)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.176.145.276**	**2.958.942.471**	**217.202.805**	**7,34**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN **OTHER COMPREHENSIVE INCOME**				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss				

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

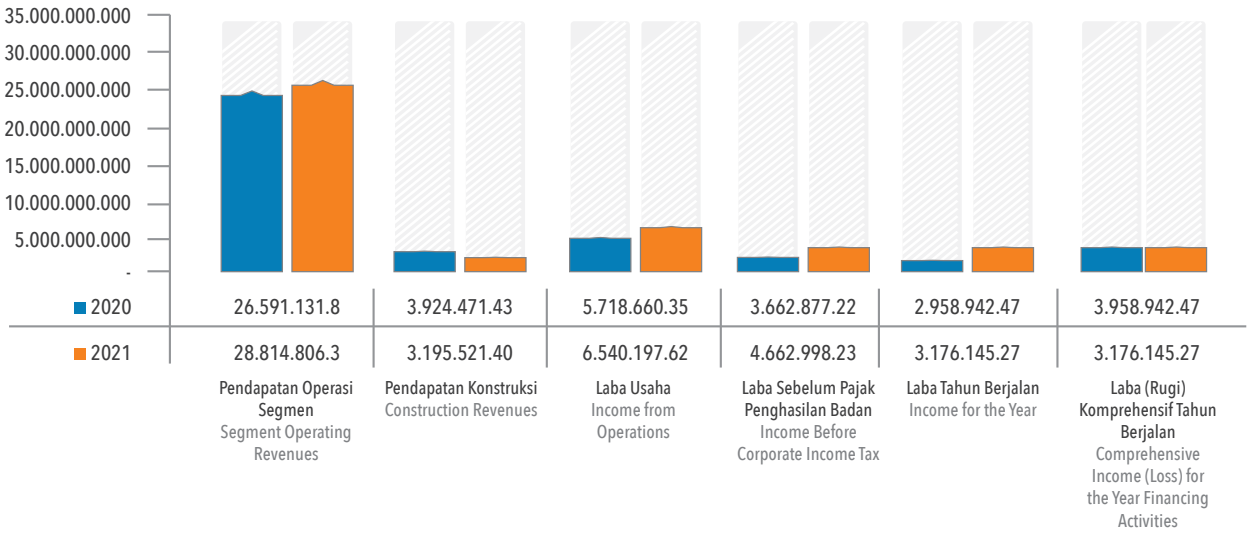
Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net off tax	94.351.746	(1.643.196.940)	1.737.548.686	(105,74)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi **Item that will be reclassified to profit or loss**				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	13.379.913	(329.050.522)	342.430.435	(104,07)
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual Changes in fair value of available-for-sale financial assets	(47.180.224)	108.347.081	(155.527.305)	(143,55)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.236.696.711**	**1.095.042.090**	**2.141.654.621**	**195,58**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE TO:**				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	3.292.133.734	3.076.425.168	215.708.566	7,01
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	(115.988.458)	(117.482.697)	1.494.239	(1,27)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.176.145.276**	**2.958.942.471**	**217.202.805**	**7,34**
Penyesuaian atas Laba *Merging Entity*: **Adjustment of merging entity's other income:**				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	(2.280.313.686)	(1.805.995.892)	(474.317.794)	26,26
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	130.572.397	88.960.075	41.612.322	46,78
	(2.149.741.289)	**(1.717.035.817)**	**(432.705.472)**	**25,20**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE**				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	1.011.820.048	1.270.429.276	(258.609.228)	(20,36)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	14.583.939	(28.522.622)	43.106.561	(151,13)
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**1.026.403.987**	**1.241.906.654**	**(215.502.667)**	**(17,35)**

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY INCOME ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	3.351.776.051	1.212.324.495	2.139.451.556	176,48
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	(115.079.340)	(117.282.405)	2.203.065	(1,88)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.236.696.711**	**1.095.042.090**	**2.141.654.621**	**195,58**
Penyesuaian atas laba komprehensif lainnya *merging entity*: Adjustment of merging entity's other comprehensive income:				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	(2.170.608.365)	(956.432.580)	(1.214.175.785)	126,95
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	129.586.062	88.563.419	41.022.643	46,32
	(2.041.022.303)	(867.869.161)	(1.173.153.142)	135,18
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	1.181.167.686	255.891.915	925.275.771	361,59
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	14.506.722	(28.718.786)	43.225.508	(150,51)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**1.195.674.408**	**227.173.129**	**968.501.279**	**426,33**
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) **BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)**	**1.028.217**	**2.130.446**	**(1.102.229)**	**(51,74)**
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh) **DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)**	**842.992**	**1.560.716**	**(717.724)**	**(45,99)**

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)



PENDAPATAN OPERASI

Pendapatan operasi tahun 2021 mencapai Rp28,81 triliun, meningkat 14,28% atau Rp3,60 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp25,21 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan operasi yang berasal dari pelayanan jasa kapal, pelayanan terminal petikemas, serta pelayanan jasa terminal yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp911,66 miliar, Rp847,24 miliar, serta Rp760,55 miliar.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2021 reached Rp28.81 trillion, an increase of 14.28% or Rp3.60 trillion compared to Rp25.21 trillion 2020. The increase was mainly due to an increase in operating revenues from ship services, container terminal services, and terminal services, which increased by Rp911.66 billion, Rp847.24 billion, and Rp760.55 billion, respectively.

Tabel Pendapatan Operasi
Operating Revenues

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pelayanan terminal petikemas Container services	12.523.675.532	11.676.435.120	847.240.412	7,26
Pelayanan jasa kapal Vessel services	5.301.304.055	4.389.645.659	911.658.396	20,77
Pelayanan jasa terminal Terminal services	4.807.499.447	4.046.948.858	760.550.589	18,79
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Land, building, water and electricity services	3.737.059.523	3.798.370.127	(61.310.604)	(1,61)
Jasa logistik Logistic services	634.300.177	563.751.400	70.548.777	12,51
Kerja sama dan *fee for services* Partnership and fee for services	492.430.376	254.327.379	238.102.997	93,62
Pendapatan pas pelabuhan dan terminal Port and terminal entry fee	207.238.912	252.328.028	(45.089.116)	(17,87)

Tabel Pendapatan Operasi
Operating Revenues

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pengusahaan peralatan Equipment services	196.132.682	175.848.774	20.283.908	11,53
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi Network services and consultant information system	163.204.450	56.400.000	106.804.450	189,37
Pelayanan jasa barang Cargo services	157.613.300	630.768.305	(473.155.005)	(75,01)
Jasa pengerukan Dredging services	69.024.070	105.145.109	(36.121.039)	(34,35)
Pelayanan kesehatan Medical services	56.969.167	293.797.290	(236.828.123)	(80,61)
Lain-lain Others	468.354.646	347.365.778	120.988.868	34,83
Total	**28.814.806.337**	**25.214.055.345**	**3.600.750.992**	**14,28**

PENDAPATAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi tahun 2021 mencapai Rp3,20 triliun, menurun 18,57% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp3,92 triliun.

CONSTRUCTION REVENUES

Construction revenues in 2021 reached Rp3.20 trillion, a decrease of 18.57% compared to Rp3.92 trillion in 2020.

Tabel Pendapatan Konstruksi
Construction Revenues

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan konstruksi Construction revenues	3.195.512.405	3.924.471.433	(728.959.028)	(18,57)

BEBAN OPERASI

Beban operasi tahun 2021 mencapai Rp22,50 triliun, meningkat 8,84% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp20,68 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban dari kerja sama mitra usaha dan beban dari kerja sama mitra usaha sebesar Rp1,76 triliun.

OPERATING EXPENSES

Operating expenses in 2021 reached Rp22.50 trillion, an increase of 8.84% compared to Rp20.68 trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in partnership The increase was mainly due to an increase in the cost of business partnerships of Rp1.76 trillion.

Tabel Beban Operasi
Operating Expenses

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kerja sama mitra usaha Partnership	6.594.578.809	4.839.661.539	1.754.917.270	36,26

Tabel Beban Operasi
Operating Expenses

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pegawai Employee	5.776.773.548	5.424.752.602	352.020.946	6,49
Umum General	3.205.464.552	3.881.753.138	(676.288.586)	(17,42)
Penyusutan dan amortisasi Depreciation and amortization	3.199.471.975	3.262.323.970	(62.851.995)	(1,93)
Bahan bakar dan bahan habis pakai Fuels and supplies	1.858.083.842	1.812.150.958	45.932.884	2,53
Pemeliharaan Maintenance	1.205.821.148	761.171.028	444.650.120	58,42
Asuransi Insurance	381.095.875	357.709.826	23.386.049	6,54
Administrasi kantor Office administration	214.514.237	169.980.210	44.534.027	26,20
Beban pajak dan retribusi Tax expense and retribution	44.159.327	42.233.589	1.925.738	4,56
Lain-lain Others	23.983.504	124.196.500	(100.212.996)	(80,69)
Total	**22.503.946.817**	**20.675.933.360**	**1.828.013.457**	**8,84**

BEBAN KONSTRUKSI

Beban konstruksi tahun 2021 mencapai Rp3,20 triliun, turun 18,57% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp3,92 triliun.

CONSTRUCTION EXPENSES

Construction expenses in 2021 reached Rp3.20 trillion, a decrease of 18.57% compared to Rp3.92 trillion in 2020.

Tabel Beban Konstruksi
Construction Expenses

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban konstruksi Construction expenses	3.195.512.405	3.924.471.433	(728.959.028)	(18,57)

PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - NETO

Pendapatan operasi lainnya neto tahun 2021 sebesar Rp229,34 miliar, turun 216,69% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami beban operasi sebesar Rp196,54 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan dari penerimaan aset *build, operate, transfer* sebesar Rp219,66 miliar.

OTHER OPERATING INCOME (EXPENSE)-NET

Other operating income (expense) - net in 2021 reached Rp229.34 billion,a decrease of 216.69% compared to Rp196.54 billion in 2020. The increase was mainly due to revenue growth from build, operate, and transfer assets of Rp219.66 billion.

Tabel Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya
Other Operating Income (Expense) - Net

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penerimaan aset *build, operate, transfer* Receive of build, operate, transfer assets	219.657.600	0	219.657.600	100,00
Pendapatan denda Income from penalties	164.990.708	21.495.028	143.495.680	667,58
Amortisasi premium Amortization of premium	146.997.708	146.997.708	0	0,00
Kelebihan pembayaran PBB Overpayment of PBB	21.704.447	44.093.769	(22.389.322)	(50,78)
Beban pajak penghasilan final Final income tax expense	(1.902.224)	(23.970.761)	22.068.537	(92,06)
Laba (rugi) penjualan aset tetap Gain (loss) on sale of fixed assets	(1.969.868)	2.941.075	(4.910.943)	(166,98)
Beban denda Expenses from penalties	(88.995.349)	(217.099.773)	128.104.424	(59,01)
Beban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Expense of non-tax state revenue (PNBP)	(37.574.438)	(31.713.558)	(5.860.880)	18,48
Rugi selisih kurs - neto Loss on foreign exchange - net	(274.562.559)	(221.928.633)	(52.633.926)	23,72
Lain-lain - neto Others - net	80.992.081	82.647.037	(1.654.956)	(2,00)
Total	**229.338.106**	**(196.538.108)**	**425.876.214**	**216,69**

LABA USAHA

Laba usaha tahun 2021 sebesar Rp6,54 triliun, meningkat 14,37% atau sebesar Rp821,54 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp5,72 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan operasi sebesar Rp2,23 triliun.

INCOME FROM OPERATIONS

Income from operations in 2021 was Rp6.54 trillion, an increase of 14.37% or Rp821.54 billion compared to Rp5.72 trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in operating revenues of Rp2.23 trillion.

Tabel Laba Usaha
Income From Operations

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan operasi Operating revenues	28.814.806.337	26.591.131.827	2.223.674.510	8,36
Pendapatan konstruksi Construction revenues	3.195.512.405	3.924.471.433	(728.959.028)	(18,57)
Beban operasi Operating expenses	(22.503.946.817)	(20.675.933.360)	(1.828.013.457)	8,84
Beban konstruksi Construction expenses	(3.195.512.405)	(3.924.471.433)	728.959.028	(18,57)
Pendapatan operasi lainnya-neto Other operating income - net	229.338.106	(196.538.108)	425.876.214	(216,69)
Laba usaha **Income From Operations**	**6.540.197.626**	**5.718.660.359**	**821.537.267**	**14,37**

PENDAPATAN KEUANGAN

Pendapatan keuangan tahun 2021 sebesar Rp407,78 miliar, menurun 41,71% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp699,58 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan bunga deposito sebesar Rp373,84 miliar.

FINANCE INCOME

Finance income in 2021 was Rp407.78 billion, a decrease of 41.71% compared to Rp699.58 billion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in interest income from deposits of Rp373.84 billion.

Tabel Pendapatan Keuangan
Finance Income

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga deposito Interest income from deposits	249.312.805	623.150.376	(373.837.571)	(59,99)
Pendapatan bunga pinjaman Interest income from loan	90.775.509	67.299.251	23.476.258	34,88
Pendapatan jasa giro Interest income on current account	67.687.570	9.132.121	58.555.449	641,20
Total	**407.775.884**	**699.581.748**	**(291.805.864)**	**(41,71)**

BEBAN KEUANGAN

Beban keuangan tahun 2021 sebesar Rp2,54 triliun, menurun 0,17% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,54 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya beban keuangan yang berasal dari beban bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi sebesar Rp174,56 miliar.

FINANCE COSTS

Finance costs in 2021 amounted to Rp2.54 trillion, a decrease of 0.17% compared to Rp2.54 trillion in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in Interest expenses, and amortization of discount and transaction cost of Rp174.56 billion.

Tabel Beban Keuangan
Finance Costs

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban bunga obligasi Interest expense from bonds	1.968.778.546	1.855.783.845	112.994.701	6,09
Beban bunga pinjaman bank Interest expense from bank loans	461.005.512	436.671.860	24.333.652	5,57
Beban bunga sewa Lease interest expenses	26.110.179	16.736.620	9.373.559	56,01
Beban bunga, dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi Interest expenses, and amortization of discount and transaction cost	49.744.513	224.305.870	(174.561.357)	(77,82)
Beban administrasi bank Bank administration charges	4.738.635	7.790.398	(3.051.763)	(39,17)
Beban amortisasi penerbitan obligasi Amortization expenses	874.035	806.801	67.234	8,33
Beban lain-lain Other expenses	28.831.446	2.270.777	26.560.669	1,169,67
Total	**2.540.082.866**	**2.544.366.171**	**(4.283.305)**	**(0,17)**

BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

Bagian laba entitas asosiasi tahun 2021 sebesar Rp255,11 miliar, meningkat 737,79% dibandingkan dengan tahun 2020 yang rugi sebesar Rp40,00 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya bagian laba entitas asosiasi yang berasal dari JICT sebesar Rp131,30 miliar.

EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

Equity in income of associates in 2021 was Rp255.11 billion, an increase of 737.79% compared to a loss of Rp40.00 billion in 2020. The increase was mainly due to the increase in the profit share of associates from JICT of Rp131.30 billion.

Tabel Bagian Laba Entitas Asosiasi
Equity in Income of Associates

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
BKMS	90.170.663	57.865.279	32.305.384	55,83
JICT	75.292.403	(56.010.859)	131.303.262	(234,42)
NPCT1	56.314.207	(35.870.716)	92.184.923	(256,99)
RSP	28.714.581	(6.478.544)	35.193.125	(543,23)
PHC	25.430.121	14.336.173	11.093.948	77,38
Ambapers	10.105.662	10.118.013	(12.351)	(0,12)
LNG	456.096	616.609	(160.513)	(26,03)
PCN	157.451	40.529	116.922	288,49
TNU	(9.921.272)	(11.795.315)	1.874.043	(15,89)
JBT	(21.612.324)	(12.976.627)	(8.635.697)	66,55
PTI	0	156.751	(156.751)	(100,00)
Total	**255.107.588**	**(39.998.707)**	**295.106.295**	**737,79**

LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar Rp4,66 triliun, meningkat 21,63% atau sebesar Rp829,12 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,83 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan laba usaha serta bagian laba entitas asosiasi, yang masing-masing meningkat sebesar Rp821,54 miliar dan Rp295,11 miliar

INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX

Income before final tax and corporate income tax in 2021 was Rp4.66 trillion, an increase of 21.63% or Rp829.12 billion compared to Rp3.83 trillion in 2020. The increase was mainly due to the increase in operating income, and share in the associates' income, which increased by Rp.821.54 billion and Rp.295.11 billion, respectively.

Tabel Laba Sebelum pajak Final dan Pajak Penghasilan
Income Before Final Tax and Corporate Income Tax

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba usaha Income From Operations	6.540.197.626	5.718.660.359	821.537.267	14,37
Pendapatan keuangan Finance income	407.775.884	699.581.748	(291.805.864)	(41,71)
Beban keuangan Finance costs	(2.540.082.866)	(2.544.366.171)	(4.283.305)	(0,17)
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	255.107.588	(39.998.707)	295.106.295	737,79
Total	**4.662.998.232**	**3.833.877.229**	**829.121.003**	**21,63**

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba sebelum pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar Rp4,18 triliun, meningkat 22,89% atau sebesar Rp777,63 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,40 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan sebesar Rp829,12 miliar.

INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX

Income before corporate income tax in 2021 was RpR4.18 trillion, an increase of 22.89% or Rp777.63 billion compared to Rp3.40 trillion in 2020. The increase was mainly due to the increase in income before final tax and corporate income tax of Rp829.12 billion.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan
Income Before Corporate Income Tax

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax	4.662.998.232	3.833.877.229	829.121.003	21,63
Beban pajak final Final tax expense	(487.671.869)	(436.180.278)	(51.491.591)	11,81
Laba sebelum pajak penghasilan badan **Income before corporate income tax**	**4.175.326.363**	**3.397.696.951**	**777.629.412**	**22,89**

LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*

Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2021 sebesar Rp3,18 triliun, meningkat 7,34% atau sebesar Rp217,20 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,96 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp777,63 miliar.

INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME

Income for the year after effect of merging entity's income in 2021 was Rp3.18 trillion, an increase of 7.34% or Rp217.20 billion compared to Rp2.96 trillion in 2020. This increase was due to an increase in income before corporate income tax of Rp777.63 billion.

Tabel Laba Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba *Merging Entity*
Income for the Year after Effect of Merging Entity's Income

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income before corporate income tax	4.175.326.363	3.397.696.951	777.629.412	22,89
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate income tax benefit (expense)				
Kini Current	(847.733.176)	(745.867.105)	(101.866.071)	13,66
Tangguhan Deferred	(151.447.911)	307.112.625	(458.560.536)	(149,31)
Laba Tahun Berjalan **Income for the year**	**3.176.145.276**	**2.958.942.471**	**217.202.805**	**7,34**

Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* kepada pemilik entitas induk pada tahun 2021 mencapai Rp3,29 triliun, meningkat 7,01% atau Rp215,71 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp3,08 triliun. Sedangkan laba tahun berjalan yang

The income for the year after effect of merging entity's income attributable to owners of the parent entity in 2021 was Rp3.29 trillion, an increase of 7.01% or Rp215.71 billion compared to Rp3.08 trillion in 2020. The income for the year after effect of the merging entity's income attributable to non-controlling interests

dapat diatribusikan Setelah efek penyesuaian laba *merging entity* kepada kepentingan non pengendali pada tahun 2021 mencapai Rp115,99 miliar, menurun 7,34% atau Rp217,20 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp117,48 miliar.

in 2021 was Rp115.99 billion, a decrease of 7.34% or Rp217.20 billion compared to Rp117.48 billion in 2020.

Tabel Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Setelah Efek Penyesuaian Laba *Merging Entity*
Income for the Year after Effect of Merging Entity's Income

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	3.292.133.734	3.076.425.168	215.708.566	7,01
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	(115.988.458)	(117.482.697)	(1.494.239)	(1,27)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* **Attributable income for the year after effect of merging entity's income**	**3.176.145.276**	**2.958.942.471**	**217.202.805**	**7,34**

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain tahun 2021 mencapai Rp60,55 miliar, meningkat 103,25% dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai (Rp1,84 triliun). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pengukuran kembali program imbalan pasti.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Other comprehensive income in 2021 reached Rp60.55 billion, an increase of 103.25% compared to a loss of Rp1.84 trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in the remeasurement of defined benefit plans.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran kembali program imbalan pasti Remeasurements of defined benefit plans	94.351.746	(1.643.196.940)	1.737.548.686	105,74
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will be reclassified to profit or loss				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	13.379.913	(329.050.522)	342.430.435	104,07
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual Changes in fair value of available-for-sale financial assets	(47.180.224)	108.347.081	(155.527.305)	(143,55)
Penghasilan komprehensif lain **Other comprehensive income**	**60.551.435**	**(1.863.900.381)**	**1.924.451.816**	**103,25**

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*

Laba komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2021 sebesar Rp3,24 triliun, meningkat 195,58% atau sebesar Rp2,14 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,10 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba tahun berjalan.

COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME

Comprehensive income for the year after effect of merging entity's income in 2021 was Rp3.24 trillion, an increase of 195.58% or Rp2.14 trillion compared to Rp1.10 trillion in 2020. The increase was due to the increase in income for the year.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba *Merging Entity*
Comprehensive Income for the Year after Effect of Merging Entity's Income

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan Income for the year	3.176.145.276	2.958.942.471	217.202.805	7,34
Penghasilan komprehensif Lain Other comprehensive income	60.551.435	(1.863.900.381)	1.924.451.816	(103,25)
Laba komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* **Comprehensive income for the year after effect of merging entity's income**	**3.236.696.711**	**1.095.042.090**	**2.141.654.621**	**195,58**

Adapun laba komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2021 mencapai Rp3,35 triliun, meningkat 176,48% atau Rp2,14 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp1,21 triliun. Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali pada tahun 2021 mencapai Rp115,08 miliar menurun 1,88% dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp117,28 miliar.

Comprehensive income for the year after effect of merging entity's income attributable to owners of the parent entity in 2021 was Rp3.35 trillion, an increase of 176.48% or Rp2.14 trillion compared to Rp1.21 trillion in 2020. Comprehensive income for the year after effect of the merging entity's income attributable to non-controlling interests in 2021 was Rp115.08 billion, a decrease of 1.88% compared to Rp117.28 billion in 2020.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba *Merging Entity* Yang Diatribusikan
Comprehensive Income for the Year After Effect of Merging Entity's Income Attributable to Owners of the Parent Entity

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	3.351.776.051	1.212.324.495	2.139.451.556	176,48
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	(115.079.340)	(117.282.405)	(2.203.065)	(1,88)
Laba komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* yang diatribusikan Comprehensive income for the year after effect of merging entity's income attribution	3.236.696.711	1.095.042.090	2.141.654.621	195,58

LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar tahun 2021 sebesar Rp1.028.217 , menurun 51,74% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.130.446.

BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share in 2021 was Rp1,028,217, a decrease of 51.74% compared to Rp2,130,446 in 2020.

Tabel Laba Per Saham Dasar
Basic Earnings Per Share

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba per saham dasar Basic Earnings Per Share	1.028.217	2.130.446	(1.102.229)	(51,74)

LABA PER SAHAM DILUSIAN

Laba per saham dilusian tahun 2021 sebesar Rp842.992, menurun 45,99% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.560.716.

DILUTED EARNING PER SHARE

Diluted earnings per share in 2021 was Rp842,992, a decrease of 45.99% compared to Rp1,560,716 in 2020.

Tabel Laba Per Saham Dilusian
Diluted Earnings Per Share

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba per saham dilusian Diluted earning per share	842.992	1.560.716	(717.724)	(45,99)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

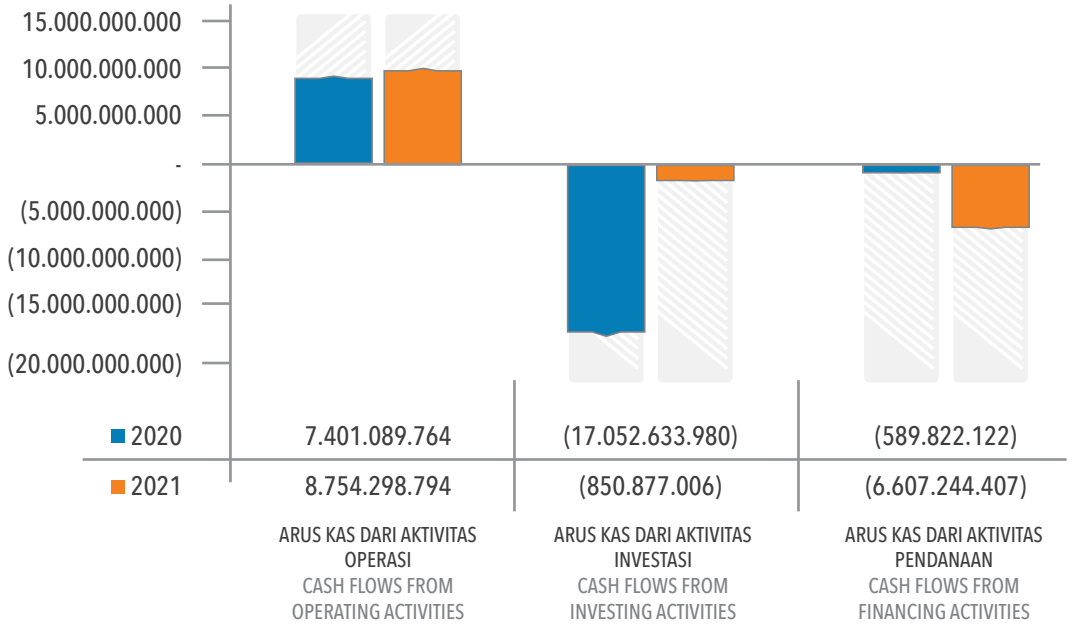
Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	28.876.470.288	27.085.501.244	1.790.969.044	6,61
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya Payment to contractors, suppliers and others	(14.481.551.070)	(14.473.317.581)	(8.233.489)	0,06
Pembayaran kepada karyawan Payment to employees	(5.661.556.853)	(5.472.976.164)	(188.580.689)	3,45
Pembayaran pajak penghasilan Payment for income taxes	(1.319.862.044)	(997.779.715)	(322.082.329)	32,28
Penghasilan bunga Interest received	1.336.818.218	1.196.017.199	140.801.019	11,77
Penerimaan pajak Tax receipt	1.078.288.509	63.644.781	1.014.643.728	1.594,23
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi **Net Cash Provided by Operating Activities**	**9.828.607.048**	**7.401.089.764**	**(8.233.489)**	**0,06**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
Penerimaan dividen Receipt of dividend	322.271.932	240.088.963	82.182.969	34,23
Laba penjualan aset tetap Gain on disposal assets	(1.969.868)	2.941.075	(4.910.943)	(166,98)
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets and intangible assets	(6.908.699.330)	(9.290.836.817)	2.382.137.487	(25,64)
Penerimaan (penempatan) investasi jangka pendek Receipt of (placement) short-term investments	5.742.520.260	(8.147.327.201)	13.889.847.461	(170,48)
Penjualan (penambahan) pada penyertaan saham Sales (additional) of investment in shares	(16.515.198)	142.500.000	(159.015.198)	(111,59)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi **Net Cash Used in Investing Activities**	**(3.520.185.260)**	**(17.052.633.980)**	**13.532.448.720**	**79,36**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
Setoran modal saham Capital additional	1.201.500.000	84.100.000	1.117.400.000	1,328,66
Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya Receipt (payment) of bank and other financial institution loans	(4.345.416.914)	962.524.322	(5.307.941.236)	(551,46)

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penerimaan pinjaman Receipt of loans	1.611.983.309	3.431.790.723	(1.819.807.414)	(53,03)
Pembayaran bunga Interest payment	(2.752.569.073)	(3.537.254.879)	784.685.806	(22,18)
Pembayaran liabilitas sewa Interest payment	(162.741.729)	(153.938.339)	(8.803.390)	5,72
Pembayaran dividen Payment of dividend	(560.000.000)	(1.377.043.949)	817.043.949	(59,33)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan **Net Cash Used in Financing Activities**	**(5.007.244.407)**	**(589.822.122)**	**(4.417.422.285)**	**748,94**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	1.301.177.381	(10.241.366.338)	11.542.543.719	(112,71)
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	8.154.416	34.409.204	(26.254.788)	(76,30)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN **CASH AND CASH EQUIVALENTS THE AT BEGINNING OF THE YEAR**	**11.613.056.790**	**21.820.013.924**	**(10.206.957.134)**	**(46,78)**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**	**12.922.388.587**	**11.613.056.790**	**1.309.331.797**	**11,27**

Grafik Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Cash Flows (in thousand Rupiah)



ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2021 mencapai Rp9,83 triliun, meningkat 32,80% atau Rp7,43 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp7,40 triliun. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan baik piutang lama maupun piutang baru, penghasilan bunga dan penerimaan pajak.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2021 mencapai Rp845,88 miliar, menurun 79,36% atau Rp13,53 miliar atau dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp17,02 triliun. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penempatan investasi jangka pendek.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2021 Rp5,01 triliun meningkat 748,94% atau Rp4,42 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai Rp589,82 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya.

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net cash from operating activities in 2021 reached Rp9.83 trillion, an increase of 32.80% or Rp7.43 trillion compared to Rp7.40 trillion in 2020. This was mainly due to the increase in cash receipts from customers, both old and new receivables, interest income and tax receipts.

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Net cash used for investment activities in 2021 reached Rp845.88 billion, a decrease of 79.36% or Rp13.53 billion or compared to Rp17.02 trillion in 2020. This was mainly due to the placement of short-term investments.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Net cash used for financing activities in 2021 reached Rp5.01 trillion, an increase of 748.94% or Rp4.42 trillion compared to Rp589.82 billion in 2020. This mainly due to loan repayments from banks and other financial institutions.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditor dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya secara tepat waktu. Kemampuan Pelindo dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari sejumlah indikator, misalnya: kondisi keuangan jangka pendek dan kondisi keuangan jangka panjang.

Kemampuan membayar hutang jangka pendek tercermin dari rasio likuiditas sedangkan kemampuan membayar hutang jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagai berikut.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS)

Rasio likuiditas 2021 baik diukur dengan menggunakan rasio kas (*cash ratio*) dan rasio lancar (*current ratio*). Rasio kas diperoleh dari penambahan nilai kas, deposito, dan surat berharga jangka pendek, lalu dibagi dengan nilai liabilitas jangka pendek. Sedangkan rasio lancar diperoleh dari pembagian nilai aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY

ABILITY TO PAY DEBT

The Company is committed to fulfilling the rights of creditors by making timely payments of loan principal and interest. Pelindo's ability to fulfill its obligations can be seen in a number of indicators, for example: short-term financial condition and long-term financial condition.

The ability to pay short-term debt is reflected in the liquidity ratio, while the ability to pay long-term debt is reflected in the solvency ratio. The liquidity ratio and solvency ratio are presented as follows.

ABILITY TO PAY SHORT-TERM DEBT (LIQUIDITY)

The 2021 liquidity ratio is measured using the cash ratio and current ratio. The cash ratio is obtained from the addition of cash, time deposits, and short-term securities, divided by the amount of short-term liabilities. Meanwhile, the current ratio is obtained by dividing the amount of current assets with the amount of current liabilities.

Tabel Likuiditas
Liquidity

(dalam %) (in %)

Likuiditas Liquidity	2021	2020	Perubahan Change
Cash Ratio	137,71	165,95	(28,24)
Current Ratio	172,72	203,7	(30,98)

Rasio kas tahun 2021 mencapai 137,71%, turun 28,24% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 165,95%. Demikian pula dengan rasio lancar tahun 2021 mencapai 172,72%, turun 30,98% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 203,7%. Penurunan rasio kas dan rasio lancar karena penggunaan kas internal Perseroan untuk pelunasan pinjaman Bank di Regional I dan Regional IV, serta penggunaan kas internal untuk akuisisi Cibitung Tanjung Priok *Port Tollways*.

The Cash ratio in 2021 reached 137.71%, a decrease of 28.24% compared to 165.95% in 2020. The current ratio in 2021 reached 172.72%, a decrease of 30.98% compared to 203.7% in 2020. The decrease in the cash ratio and current ratio was due to the use of the Company's internal cash for repayment of Bank loans in Regional I and Regional IV, and the use of internal cash for the acquisition of Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS)

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajibannya khususnya kewajiban jangka panjang. Uraian mengenai rasio solvabilitas dijabarkan sebagai berikut.

ABILITY TO PAY LONG-TERM DEBT (SOLVENCY)

The solvency ratio shows the Company's ability to pay its obligations, especially long-term liabilities. The solvency ratio is described as follows.

Tabel Solvabilitas
Solvency Table

(dalam %) (in %)

Solvabilitas Solvency	2021	2020	Perubahan Change
Return on Assets (ROA)	0,03	0,01	0,02
Return on Equity (ROE)	0,08	0,05	0,03
Return on Investment (ROI)	11,71	8,00	3,71
Debt to Equity (DER)	1,76	1,95	(0,18)

ROA tahun 2021 mencapai, 0,03%, meningkat 0,02% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 0,01%. Demikian pula dengan ROE dan ROI yang meningkat masing-masing menjadi 0,08% dan 11,71%. Peningkatan ROA, ROE dan ROI tersebut disebabkan kenaikan arus produksi sejalan dengan pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2021 seiring dengan turunnya pandemi COVID-19. Sedangkan DER tahun 2021 mencapai, 1,76%, turun 0,18% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 1,95%. Hal tersebut disebabkan pelunasan hutang Regional I dan Regional IV.

ROA in 2021 reached 0.03%, an increase of 0.02% compared to 0.01% in 2020. ROE and ROI increased to 0.08% and 11.71%, respectively. The increase in ROA, ROE and ROI was due to an increase in production flows in line with Indonesia›s economic recovery in 2021 from the decline in the COVID-19 pandemic. DER in 2021 reached 1.76%, down 0.18% compared to 1.95% in 2020. This was due to the settlement of Regional I and Regional IV debts.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DARI EFEK YANG DITERBITKAN

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat obligasi, obligasi secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan obligasi yang diterbitkan. Obligasi ini tercatat di Bursa Efek Singapura dan telah meraih peringkat internasional dari berbagai lembaga pemeringkat yaitu *Standard and Poor's* (S&P), Moody's dan Fitch serta Pefindo.

ABILITY TO PAY DEBT FROM ISSUED SECURITIES

The ability to pay debts can also be reflected in the bond ratings, with bonds being routinely assessed by rating agencies to support the feasibility of bonds issued. The bonds are listed on the Singapore Stock Exchange and have received international ratings from the following rating agencies, Standard and Poor's (S&P), Moody's and Fitch and Pefindo.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Obligasi Global
Ability to Pay Global Bonds

Uraian Description	Peringkat Rating			Pelindo III	Pelindo IV
	2021	2020			
	(*Merger*)	Pelindo I	Pelindo II		
Obligasi Global dan Domestik Global and Domestic Bonds	• S&P : - • Moody's : Baa3 • Fitch : BBB • Pefindo : AAA	• Pefindo : AA	• S&P : - • Moody's : Baa3 • Fitch : BBB • Pefindo : -	• S&P : BBB- • Moody's : Baa3 • Fitch : BBB- • Pefindo : -	• Pefindo : AA

Adapun definisi dari setiap peringkat obligasi yang diberikan adalah sebagai berikut.
The definition of each bond rating given follows.

Tabel Definisi Peringkat Obligasi Global
Global Bond Rating Ratnig

Pemeringkat Rating		
Standar and Poor's (S&P)	BBB	Termasuk ke dalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - resiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan. Included in the investment category of medium quality - medium risk and currently in a satisfactory condition.
Moody's	Baa3	Obligasi dengan risiko moderat dan oleh karenanya memiliki karakteristik spekulatif. Bonds with moderate risk and therefore have speculative characteristics.
Fitch	BBB	Termasuk ke dalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - resiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan. Included in the investment category of medium quality - medium risk and currently in a satisfactory condition.
Pefindo	AAA	Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya. The obligor's ability to meet its long-term financial commitments, relative to other Indonesian obligors.
	AA	Kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. The obligor's ability to meet its long-term financial commitments for these debt securities, compared to other obligors in Indonesia, is very strong.
Outlook		
Stable	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil peringkat akan stabil. A stable prospect so the rating results are stable.	
Positive	Prospek yang berpotensi untuk menaikkan peringkat. Prospects with the potential to raise their rating.	
Tanda tambah (+)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat dalam masing-masing kategori peringkat. A rating that indicates the ranking is relatively strong in each rating category.	
Tanda minus (-)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif lemah dalam masing-masing kategori peringkat. A rating that indicates the ranking is relatively weak in each rating category.	

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Rasio perputaran piutang tahun 2021 mencapai 19,46 hari, menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 24,37 hari. Hal tersebut karena telah berjalannya fungsi pengelolaan dan pengendalian piutang di masing-masing regional dan *subholding* dan adanya implementasi PSAK 71.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The receivables turnover ratio in 2021 reached 19.46 days, a decrease from 24.37 days in 2020. This is due to the receivables management and control functions in each region and subholding being carried out, and the implementation of PSAK 71.

Tabel Kolektibilitas Piutang
Receivable Collectibility Table

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	Perubahan Growth
Average Collection Period (ACP)	Hari	19,46	24,37	(20,14%)

Analisa umur piutang tahun 2021 yang belum jatuh tempo sebesar Rp540,60 miliar, lebih besar dibandingkan jumlah piutang yang lewat jatuh tempo 91-180 hari sebesar Rp145,97 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolektibilitas piutang masih dalam kategori baik, sehingga dapat mendukung kegiatan Perseroan.

Total receivables not yet matured in 2021 amounted to Rp540.60 billion, greater than the number of receivables that are past due 91-180 days of Rp145.97 billion. This shows that the collectibility of receivables is still in the good category, and the Company can support its activities.

Tabel Analisis Umur Piutang Usaha
Account Receivable Age Analysis

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Analisis Umur Piutang Usaha Trade Receivables	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Belum jatuh tempo Not yet due	540.601.210	654.680.568	(114.079.358)	(17,43)
Lewat jatuh tempo Past due				
1-90 hari/days	914.452.233	971.366.722	(56.914.489)	(5,86)
91-180 hari/days	145.965.228	182.697.751	(36.732.523)	(20,11)
Lebih dari 180 hari More than 180 days	1.076.472.802	913.217.202	163.255.600	17,88
Subtotal	**2.677.491.473**	**2.721.962.243**	**(44.470.770)**	**(1,63)**
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Less: Allowance for impairment	(1.161.228.927)	(1.165.003.761)	3.774.834	(0,32)
Neto **Net**	**1.516.262.546**	**1.556.958.482**	**(40.695.936)**	**(2,61)**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

For December 31, 2021 and 2020, management believes that the allowances for expected credit losses on trade receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible trade receivables. Management also believes that there is no significant concentration of credit risk on receivables from third parties.

STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2021 yang dimiliki oleh Pelindo adalah 63,82% berasal dari liabilitas, dan 36,18% berasal dari ekuitas. Komposisi ini sedikit mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2020, komposisi struktur modal yang berasal dari liabilitas sebesar 66,03 dan ekuitas sebesar 33,97%.

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

In 2021, Pelindo's capital structure composition was 63.82% from liabilities, and 36.18% from equity. This composition has slightly changed when compared to 2020, where the capital structure composition from liabilities was 66.03 and equity was 33.97%.

Tabel Rincian Struktur Modal
Capital Structure Details

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021		2020		Pertumbuhan Growth	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	13.536.422.392	11,65	13.682.654.542	11,54	(146.232.150)	(1,07)
Liabilitas Jangka Panjang (utang berbasis bunga) Long-Term Liabilities (interest-based debt)	60.639.542.669	52,17	64.619.261.934	54,50	(3.979.719.265)	(6,16)
Jumlah Liabilitas Total liabilities	74.175.965.061	63,82	78.301.916.476	66,03	(4.125.951.415)	(5,27)
Jumlah Ekuitas Total equity	42.053.109.439	36,18	40.274.831.318	33,97	1.778.278.121	4,42
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas **Total liabilities and equity**	**116.229.074.500**	**100,00**	**118.576.747.794**	**100,00**	**(2.347.673.294)**	**(1,98)**

Struktur modal terkait dengan struktur modal kerja jangka pendek (likuiditas) telah disajikan pada bagian kemampuan membayar hutang dalam Laporan Tahunan ini.

The capital structure related to short-term working capital structure (liquidity) can be found in the ability to pay debts section of this Annual Report.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Dalam mengelola permodalannya, Pelindo senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko. Untuk itu, Perseroan menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Pelindo secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT POLICY

When managing its capital, Pelindo always looks to maintains its business continuity and maximizes the benefits for shareholders and other stakeholders, to provide adequate returns to shareholders by determining the price of products and services commensurate with the level of risk. To that end, the Company has determined a number of capital ratios in proportion to risk. Pelindo actively and regularly reviews and manages its capital to ensure an optimal capital structure and returns for shareholders, taking into account the efficient use of capital based on operating cash flows and capital expenditures, as well as future capital requirements.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Pelindo mengelola struktur modal dan hasil pengembalian kepada pemegang saham yang optimal dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan profitabilitas baik masa sekarang maupun yang akan datang, perkiraan arus kas operasi, estimasi belanja modal, dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

BASIS FOR THE CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT POLICY

Pelindo manages the capital structure and optimal returns to shareholders by taking into account future capital requirements and current and future profitability, operating cash flow estimates, capital expenditure estimates, and projected strategic investment opportunities.

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Pelindo melakukan ikatan material untuk investasi barang modal yang disajikan sebagai berikut.

MATERIAL CAPITAL GOODS INVESTMENT BONDS

Pelindo made the following material commitments for capital goods investment.

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal
Material Capital Goods Investment Bonds

NO	Jenis Ikatan Type of Bond	Nama Pihak (*Vendor*) Pelaksana Program Name of the Party (Vendor) Executing the Program	Mata Uang yang menjadi Denominasi Denominated Currency
1	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Kijing Terminal Port Development	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Istaka Karya (Persero) PT Yodya Karya (Persero)	Rupiah
2	Makassar New Port	PT PP (Persero) Tbk PT Yodya Karya (Persero)	Rupiah
3	Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) Benoa Harbor (Bali Maritime Tourism Hub) Development	PT PP (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Istaka Karya (Persero) PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Brantas Abipraya (Persero) PT Virama Karya (Persero) PT Bina Karya (Persero)	Rupiah
4	Kawasan Industri Kuala Tanjung Kuala Tanjung Industrial Estate	PT PP (Persero), Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Rupiah
5	Jalan Tol Cibitung - Cilincing Cibitung - Cilincing Toll Road	PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Waskita Beton Precast PT Virama Karya (Persero) PT Jasa Marga Toll Maintenance PT Jasa Marga Toll Operator	Rupiah

TUJUAN IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan ikatan material untuk investasi barang modal dengan tujuan peningkatan kapasitas, produktivitas, dan pelayanan untuk membangun dermaga, lapangan penumpukan, serta melengkapi alat bongkar/muat, dan pengerukan.

PURPOSE OF MATERIAL CAPITAL GOODS INVESTMENT BONDS

In 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s material capital goods investments related to increasing capacity, productivity, and services to build docks, stacking yards, and complete loading/unloading and dredging equipment.

SUMBER DANA

Sumber pendanaan atas ikatan material investasi barang modal berasal dari dana internal Pelindo dan *commercial loan*/obligasi.

SOURCE OF FUNDS

The source of funds for material commitments for capital goods investments come from Pelindo's internal funds and commercial loans/bonds.

LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG

Dalam ikatan yang terjadi pada tahun 2021, tidak terdapat ikatan dalam mata uang asing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perseroan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (nilai penuh):

CURRENCY RISK PROTECTION MEASURES

For the bonds issued in 2021, there are no bonds in foreign currencies in line with Bank Indonesia Regulations related to the obligation to use Rupiah in all transactions within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

In addition, the consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency and presentation currency of the Company. Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the time the transactions were made. The following shows the major foreign exchange rates used for translation as of December 31, 2021 and 2020 (full amount):

Mata Uang Exchange Rate	31 Desember 2021 December 31, 2021	31 Desember 2020 December 31, 2020
Dolar Amerika Serikat (USD) 1 United States Dollar (USD) 1	14.269	14.105
Euro Eropa (EUR) 1 European Euro (EUR) 1	16.126	17.330
Dolar Singapura (SGD) 1 Singapore Dollar (SGD) 1	10.533	10.644

INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Selama tahun 2021, Perseroan tidak memiliki informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

FINANCIAL INFORMATION FOR EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

For 2021, the Company has no financial information to report for extraordinary and rare events.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Selama tahun 2020, Perseroan tidak terkena dampak yang signifikan terhadap perubahan harga penjualan atau pendapatan bersih Perseroan.

IMPACT OF CHANGES IN PRICES ON THE COMPANY SALES OR NET INCOME

During 2021, the Company's net income was not significantly affected by changes in sales prices.

KOMPONEN-KOMPONEN SUBSTANSI DARI PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA

Selama tahun 2021, tidak terdapat komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih 20 persen dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.

SUBSTANTIAL COMPONENTS OF OTHER INCOME AND EXPENSES

During 2021, there are no other components of income and expenses whose value was equal to or more than 20 percent of the total value of other income and expenses.

PENINGKATAN/PENURUNAN MATERIAL DARI PENJUALAN/PENDAPATAN BERSIH

Selama tahun 2021, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan material dari penjualan/pendapatan bersih.

MATERIAL INCREASES/DECREASES IN SALES/ NET INCOME

During 2021, there was no material increases or decreases in sales/net income.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi berupa Barang Modal *(Capital Expenditure)* merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

CAPITAL GOODS INVESTMENTS

Capital goods Investment (Capital Expenditure) is the activity of disbursing funds to purchase fixed assets or increase the value of fixed assets that are expected to provide future value.

JENIS DAN NILAI INVESTASI

Investasi barang modal dan penyertaan modal yang terealisasi pada tahun 2021 sebesar Rp12,24 triliun, meningkat 64,27% atau Rp4,79 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp7,45 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh investasi entitas anak dan penyertaan modal perusahaan induk. Lebih tingginya realisasi investasi dan penyertaan modal terutama disebabkan penyerapan untuk pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC) dan penyertaan modal terhadap 4 (empat) pembentukan *subholding* baru.

INVESTMENT TYPE AND VALUE

Capital goods investments and capital investments realized in 2021 amounted to Rp12.24 trillion, an increase of 64.27% or Rp4.79 billion compared to Rp7.45 billion in 2020. This increase was due to investments in subsidiaries and equity participation in the parent company. The higher investment and equity participation was mainly due to absorption for the construction of the Cibitung Cilincing Toll Road (JTCC) and investments in 4 (four) new subholdings.

Adapun rincian per jenis terkait nilai investasi barang modal dan penyertaan modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

The types and value of capital goods investments and equity participation are shown in the following table:

Tabel Jenis dan Nilai Investasi
Investment Type and Value

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Jenis Type	Nilai Tahun 2021 2021 Value	Nilai Tahun 2020 2020 Value	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Bangunan Fasilitas Building Facilities	3.251.823.620	4.348.206.040	(1.096.382.420)	(25,21)
Kapal Vessels	135.004.474	180.171.005	(45.166.531)	(25,07)
Alat-Alat Fasilitas Equipment Facilities	169.652.467	461.940.733	(292.288.266)	(63,27)
Instalasi Fasilitas Installation Facilities	119.840.020	154.708.449	(34.868.429)	(22,54)
Tanah dan Hak atas Tanah Land and Land Rights	79.312.158	8.323.741	70.988.417	852,84
Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure	318.443.032	572.159.657	(253.716.625)	(44,34)
Peralatan dan Perlengkapan Equipment and Supplies	72.326.686	144.297.541	(71.970.855)	(49,88)
Kendaraan Vehicles	4.104.800	10.546.304	(6.441.504)	(61,08)
Emplasemen Emplacement	36.851.791	21.112.050	15.739.741	74,55
Investasi Non Fisik Non Physical Investment	89.857.217	118.476.419	(28.619.202)	(24,16)
Kapitalisasi Bunga Interest Capitalization	351.536.468	267.949.555	83.586.913	31,20
Total Investasi Perusahaan Induk Total Parent Company Investment	4.628.752.733	**6.287.891.494**	(1.659.138.761)	(26,39)
Investasi Entitas Anak Subsidiary Investment	2.820.371.634	1.115.276.295	1.705.095.339	152,89
Total Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment	7.449.124.367	**7.403.167.789**	45.956.578	0,62
Penyertaan Modal Equity Capital	4.793.029.537	49.200.000	4.743.829.537	9.641,93
Total Investasi + Penyertaan Modal Total Investment + Equity Participation	12.242.153.904	**7.452.367.789**	4.789.786.115	64,27

Bangunan Fasilitas Pelabuhan

Realisasi investasi bangunan fasilitas pelabuhan tahun 2021 sebesar Rp3,25 triliun, menurun 25,21% atau Rp1,10 triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,35 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh belum terserap optimal pada investasi bangunan fasilitas pelabuhan di antaranya:

1. Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I;
2. Pekerjaan Pengembangan Kapasitas Terminal Teluk Lamong;
3. Pekerjaan lanjutan pengerukan alur dan kolam pelabuhan Benoa; dan
4. Perbaikan berat dan perkuatan dermaga TPK.

Kapal

Realisasi investasi kapal pelabuhan tahun 2021 sebesar Rp135,00 miliar, menurun 25,07% atau Rp45,17 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp180,17 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh belum terserap optimal pada investasi kapal di antaranya:

Port Building Facilities

Investments in port building facilities in 2021 was Rp3.25 trillion, a decrease of 25.21% or Rp1.10 trillion compared to Rp4.35 trillion in 2020. This decrease was due to not optimally absorbing the investment in Port Building Facilities for:

1. Construction of North Kalibaru Terminal Phase I;
2. Teluk Lamong Terminal Capacity Development Work;
3. Continuing work of dredging the channel and pond of Benoa harbor; and
4. TPK dock weight repair and reinforcement.

Vessels

Investments in port vessels in 2021 was Rp135.00 billion, a decrease of 25.07% or Rp45.17 billion compared to Rp180.17 billion in 2020. This decrease was due to not optimally absorbing the vessel investments for:

1. Pengadaan 2 (dua) unit Kapal Tunda Kap.2x1800 HP untuk Cabang Dumai dikarenakan pelaksana pekerjaan PT Dok dan Perkapalan Surabaya; dan
2. Pengadaan 3 (tiga) unit Kapal Tunda 2x1600 HP untuk Cabang Belawan dikarenakan pelaksana pekerjaan PT Daya Radar Utama.

Alat-Alat Fasilitas

Realisasi investasi alat-alat fasilitas pelabuhan tahun 2021 sebesar Rp169,65 miliar, menurun 63,27% atau Rp292,29 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp461,94 miliar. Penurunan ini disebabkan investasi di antaranya:

1. Perbaikan berat alat bongkar muat milik Cabang Pelabuhan Palembang (Regional 2); dan
2. Penambahan Daya 3 MVA berikut pemasangan *cable reel* 1 unit QCC, 2 unit *Jib Crane* dan 4 unit RMGC, Cabang Pelabuhan Pontianak (Regional 2).

Instalasi Fasilitas

Realisasi investasi instalasi fasilitas pelabuhan tahun 2021 sebesar Rp119,84 miliar, menurun 22,54% atau Rp34,87 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp154,71 miliar. Penurunan ini disebabkan investasi di antaranya:

1. Penataan sistem proteksi tegangan lebih *(surge voltage)* di area pelabuhan pada Regional 1; dan
2. Elektrifikasi *crane* pelabuhan Teluk Bayur berikut fasilitas pendukung (Regional 2).

Tanah dan Hak atas Tanah

Realisasi investasi tanah dan hak atas tanah tahun 2021 sebesar Rp79,31 miliar, meningkat 852,84% atau Rp70,99 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp8,32 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh pengadaan dan pembebasan lahan akses jalan tol untuk Makassar *New Port*.

Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana

Realisasi investasi jalan, bangunan, sarana dan prasarana tahun 2021 sebesar Rp318,44 miliar, menurun 44,34% atau Rp253,72 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp572,16 miliar. Penurunan ini disebabkan investasi di antaranya:

1. Pembangunan Jalan Akses Timur Pelabuhan Kalibaru; dan
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Industri I, II, dan III Pelabuhan Tanjung Priok .

Peralatan dan Perlengkapan

Realisasi investasi alat-alat fasilitas pelabuhan tahun 2021 sebesar Rp72,33 miliar, menurun 49,88% atau Rp71,97 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp144,30 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh masih belum terserapnya di antaranya:

1. Pengembangan perangkat *remote crane management* and *monitoring system* tahap II; dan
2. Perbaikan berat peralatan bongkar muat cabang Pontianak.

1. Procurement of 2 (two) Tugboats with a capacity of 2x1800 HP for Dumai Branch due to work in PT Dok and Perkapalan Surabaya; and
2. Procurement of 3 (three) Tugboats with a capacity of 2x1600 HP for Belawan Branch due to work in PT Daya Radar Utama.

Equipment Facilities

Investments in port equipment facilities in 2021 was Rp169.65 billion, a decrease of 63.27% or Rp292.29 billion compared to Rp461.94 billion in 2020. This decrease was due to:

1. Repairs to loading and unloading equipment belonging to the Palembang Port Branch (Regional 2; and
2. Addition of 3 MVA Power with the installation of 1 QCC cable reel, 2 Jib Cranes and 4 RMGC units, Pontianak Port Branch (Regional 2).

Installation Facilities

Investments in installation facilities in 2021 was Rp119.84 billion, a decrease of 22.54% or Rp34.87 billion compared to Rp154.71 billion in 2020. This decrease was due to:

1. Arranging the surge voltage protection system in the port area in Regional 1; and
2. Electrification of Teluk Bayur harbor cranes and supporting facilities (Regional 2).

Land and Land Rights

Investments in land and land rights in 2021 was Rp79.31 billion, an increase of 852.84% or Rp70.99 billion compared to Rp8.32 billion in 2020. This increase was due to procurement and land acquisition for toll road access for Makassar New Port.

Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure

Investments in roads, buildings, facilities and infrastructure in 2021 was Rp318.44 billion, a decrease of 44.34% or Rp253.72 billion compared to Rp572.16 billion 2020. This decrease was due to:

1. Construction of the Kalibaru Port East Access Road; and
2. Construction of Tanjung Priok Port I, II, and III Industrial Roads.

Equipment and Supplies

Investments in equipment and supplies in 2021 was Rp72.33 billion, a decrease of 49.88% or Rp71.97 billion compared to Rp144.30 billion in 2020. This decrease was due to non-absorption for:

1. Stage II development for remote crane management and monitoring system devices; and
2. Repairs to loading and unloading equipment at the Pontianak branch.

Kendaraan

Realisasi investasi kendaraan tahun 2021 sebesar Rp4,10 miliar, menurun 61,08% atau Rp6,44 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp10,55 miliar. Hal ini disebabkan oleh pengadaan mobil pemadam kebakaran kebutuhan Cabang Pelabuhan Kumai dan pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran kebutuhan Cabang Pelabuhan Panjang.

Emplasemen

Realisasi investasi emplasemen tahun 2021 sebesar Rp36,85 miliar, meningkat 74,55% atau Rp15,74 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp21,11 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya serapan investasi dipengaruhi:

1. Pekerjaan penanganan banjir di Pelabuhan Tanjung Emas;
2. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPAL yang dilaksanakan di TPK Makassar, Cabang Pelabuhan Ambon dan Cabang Pelabuhan Sorong; dan
3. Pekerjaan pembangunan *fasilitas reception* pada Cabang Pelabuhan Balikpapan, Bitung, Sorong dan Tarakan.

Investasi Non-Fisik

Realisasi investasi non-fisik tahun 2021 sebesar Rp89,86 miliar, menurun 24,16% atau Rp28,62 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp118,48 miliar. Penurunan ini disebabkan di antaranya:

1. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pengembangan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan dan Kuala Tanjung pada Regional 1;
2. Pengembangan sistem pendukung *back office* (Kantor Pusat dan Regional 2); dan
3. Pembangunan digitalisasi Terminal Regional 2.

Kapitalisasi Bunga

Realisasi investasi kapitalisasi bunga tahun 2021 sebesar Rp351,54 miliar, meningkat 31,20% atau Rp83,59 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp267,95 miliar.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Dari arahan strategis dan juga inisiatif strategis yang telah disusun untuk tahun 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) harus melakukan kegiatan investasi guna menutup kesenjangan kapasitas dan kapabilitas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) antara kondisi eksisting dengan aspirasi yang ingin dicapai PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Besaran investasi yang dibutuhkan terdiri dari tiga macam investasi yaitu investasi terkait inisiatif strategis, investasi rutin *(business as usual*), dan investasi proyek strategis Perseroan. Investasi rutin bertujuan memenuhi minimal *requirement*, meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja, serta mendukung tujuan administratif. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan terus melanjutkan program investasi yang sudah berjalan, seperti pembangunan terminal. Investasi yang ada juga akan diprioritaskan pada pembangunan Proyek Strategis Perseroan.

Vehicles

Investments in vehicles in 2021 was Rp4.10 billion, a decrease of 61.08% or Rp6.44 billion compared to Rp10.55 billion in 2020. This decrease was due to the procurement of fire trucks for the Kumai Port Branch and the procurement of 1 fire engine for the Panjang Port Branch.

Emplacement

Investments in emplacements in 2021 was Rp36.85 billion, an increase of 74.55% or Rp15.74 billion compared to Rp21.11 billion in 2020. This increase was due to an increase in investment absorption for:

1. Flood handling work at Tanjung Emas Port;
2. Work on the procurement and installation of WWTPs at the Makassar TPK, Ambon Port Branch and Sorong Port Branch; and
3. Construction of Reception Facilities at Balikpapan, Bitung, Sorong and Tarakan Port Branches.

Non Physical Investment

Non-physical investments in 2021 amounted to Rp89.85 billion, a decrease of 24.16% or Rp28.62 billion compared to Rp118.48 billion in 2020. This decrease was due to:

1. Preparation of Environmental Documents for Development of Tanjung Balai Asahan and Kuala Tanjung Ports in Regional 1;
2. Development of back office support system (Head Office and Regional 2); and
3. Development for digitization of Regional Terminal 2.

Interest Capitalization

Investment interest capitalization in 2021 was Rp351.54 billion, an increase of 31.20% or Rp83.59 billion compared to Rp267.95 billion in 2020.

CAPITAL GOODS INVESTMENTS PURPOSE

From the strategic directives and initiatives prepared for 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) must carry out investment activities to close the gap in the capacity and capability of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) between the existing conditions and the aspirations PT Pelabuhan Indonesia (Persero) wants to achieve. The amount of investment required consists of three investment types, namely investments related to strategic initiatives, routine investments (business as usual), and investments for the Company's strategic projects. Routine investments are required to meet minimum requirements, improve work safety and security, and support administrative objectives. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will continue to conduct investment programs, including terminal construction. Existing investments will also be prioritized for the development of the Company's Strategic Projects.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS OCCURRING AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT›S REPORT

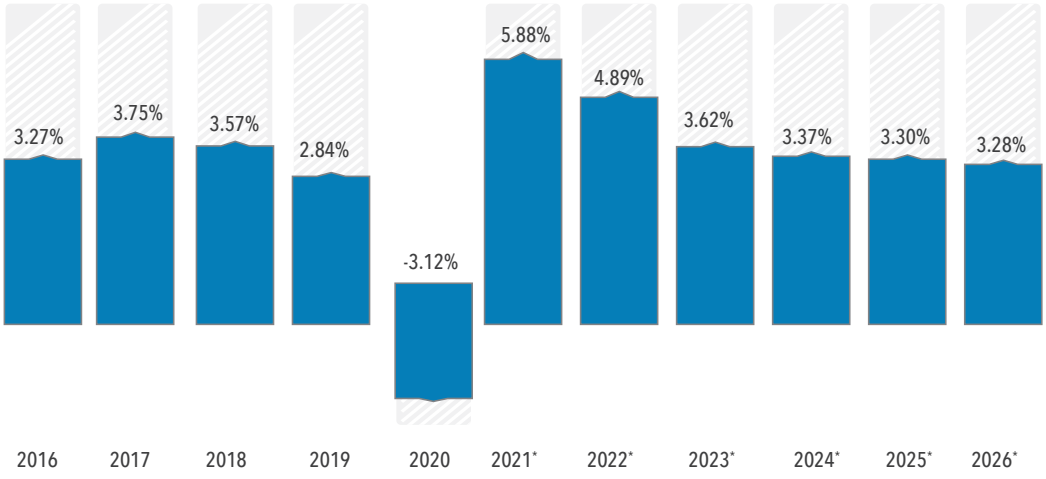
Up to the publication date of this Annual Report, no significant events occurred after the date of the accountant's report that could impact future business performance and risks.

PROSPEK USAHA

Pertumbuhan ekonomi global diprediksikan akan melanjutkan tren positif sampai tahun 2026 walaupun akan melandai dari realisasi pertumbuhan tahun 2021 sebesar 5,5%. Pertumbuhan positif ini tentu akan diikuti oleh pertumbuhan arus barang secara internasional. Kondisi pandemi telah menciptakan tren kebiasaan baru di mana yang salah satunya adalah terkait belanja daring (*online shopping*). Pertumbuhan bisnis *e-commerce* pun meningkat pesat sebagai jawaban akan kebutuhan belanja daring ini. Hampir sebagian besar barang-barang *e-commerce* diangkut dalam kemasan petikemas yang turut memberikan efek positif pada pertumbuhan arus petikemas global. Potensi pertumbuhan arus petikemas global ini dapat dioptimalkan dengan pengembangan international *transshipment* memanfaatkan lokasi wilayah pelabuhan Pelindo yang berada di jalur pelayaran dunia.

BUSINESS PROSPECTS

Global economic growth is predicted to continue a positive trend until 2026 although it will follow an upward-sloping curve from the growth seen in 2021 of 5.5%. This positive growth will be followed by growth in the flow of goods internationally. The pandemic created a new habit trend, one being the move to online shopping, and the e-commerce business has increased rapidly in response to this change. Most e-commerce goods are transported in container packaging and this will have a positive effect on global container traffic growth. This growth potential can be optimized by developing international transshipment in the Pelindo port areas located on the world's shipping lanes.



Gambar Proyeksi Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Global Sumber: Statista.com
Global Gross Domestic Product (GDP) Growth Projection Source: Statista.com

Untuk kargo non petikemas, pasar arus barang domestik masih memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan pada saat ini Pelindo hanya memiliki pangsa pasar sebagian kecil dari pasar nasional. Pelindo dapat melakukan kerja sama dalam beberapa skema dengan pelabuhan non-petikemas yang terdiri dari pelabuhan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan pelabuhan milik Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah. Kekurangan yang dimiliki Pelindo untuk dapat menjalin kerja sama adalah tarif yang secara umum relatif lebih tinggi dari para pelaku swasta. Selain hal tersebut, Pelindo perlu merumuskan nilai lebih yang dapat diberikan kepada mitra pemilik/pengelola pelabuhan non-petikemas domestik.

For non-container cargo, the market for domestic goods traffic still has a huge potential as currently Pelindo only has a small market share of the national market. Pelindo will cooperate in several schemes with non-container ports including the Special Terminal (Tersus)/Terminal for Self Interest (TUKS) and ports belonging to Government Ministries/Institutions (K/L). Pelindo's weakness in establishing these corporations is that the tariffs are generally higher than private businesses. In addition, Pelindo needs to formulate additional value for its partners who own/manage domestic non-container ports.

Dalam menghadapi tahun 2021, Perseroan melakukan analisis secara internal untuk mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang dapat dicapai dengan berbekal keunggulan yang dimiliki. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki beberapa kekuatan internal yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan bisnis pelabuhan di Indonesia, seperti portofolio yang terdiversifikasi, menguasai pasar petikemas di Indonesia, dan memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan *transshipment* hub. Namun, untuk dapat melakukan perencanaan strategi dan mencapai sasaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021-2025 Perseroan tidak cukup mengandalkan kekuatan internalnya saja tetapi juga mengkalkulasi faktor eksternal yang menjadi ancaman sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan guna keberlangsungan Perseroan, sehingga perlu dilakukan Analisis Lingkungan Bisnis Perseroan dengan menggunakan *framework Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT). Analisis SWOT adalah bagian integral setiap proses perencanaan strategis dalam menangkap potensi dan memetakan hambatan yang ada. Analisis mencakup lingkungan internal Perseroan yang akan menghasilkan *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), sedangkan analisis eksternal akan menghasilkan *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman).

In 2021, the Company conducted an internal analysis to identify achievable business opportunities given the advantages it has. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has many internal strengths that can be used as the basis for developing the port business in Indonesia, such as a diversified portfolio, control of the container market in Indonesia, and being strategically located to serve as a transshipment hub. However, to carry out strategic planning and achieve PT Pelabuhan Indonesia (Persero) targets for 2021-2025, the Company cannot simply rely on its internal strengths but must also calculate the external factors that pose a threat as well as an opportunity that can be optimized for the Company's sustainability, so it was necessary to conduct a Business Environment Analysis using a Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) framework. The SWOT analysis formed an integral part of the strategic planning process in capturing potential and mapping existing obstacles. The analysis included the Company's internal factors to produce its strengths and weaknesses, while an external analysis produced the opportunities and threats.

Tabel Analisis SWOT PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2021-2025
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) SWOT Analysis for 2021-2025

Strengths	*Weaknesses*
1. Luas dan Kendali Jaringan, Serta Pangsa Pasar Petikemas a. Jangkauan jaringan pelabuhan yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia; b. Kendali strategis lebih baik secara nasional melalui adanya perencanaan keseluruhan untuk jaringan dan investasi aset; dan c. Menguasai pasar petikemas Indonesia secara dominan. **2. Kelengkapan Jasa Kepelabuhan dan Portofolio Terdiversifikasi** a. Rantai jasa usaha yang lengkap di bisnis kepelabuhan, memiliki 4 (empat) klaster yaitu: » Petikemas » Non-Petikemas » Logistik *and Hinterland Development* » *Marine, Equipment and Port Services* b. Memiliki portofolio yang terdiversifikasi di luar bisnis kepelabuhan. **3. *Strategic Port*** Memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan *transshipment hub*. **4. *Stakeholder Relation*** Dukungan aspek legalitas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan. **5. *Business Experience*** Pengalaman dan rekam jejak dalam pelaksanaan aktivitas pelabuhan *(port know-how)*.	**1. *Gap* pengembangan SDM dan Organisasi** a. Kecepatan unit kerja untuk beradaptasi dengan perubahan model bisnis baru yang masih lambat; dan b. Kompetensi SDM belum merata untuk semua pelabuhan ketika integrasi dilakukan. **2. *Gap* Teknologi** Penerapan teknologi yang terintegrasi untuk mendukung proses operasional masih terbatas. **3. Pangsa Pasar Non Petikemas (NPK)** Penguasaan pangsa pasar muatan non-petikemas yang masih rendah. **4. *Gap* Operasi** a. Terdapat beberapa terminal yang belum termanfaatkan secara optimal; dan b. Terdapat kesenjangan dalam standardisasi proses bisnis antar pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). **5. *Gap* Kapabilitas Bisnis** Kapabilitas dan kemampuan layanan di segmen logistik, *hinterland development*, *marine*, serta *port services* belum memiliki perkembangan yang baik.

Tabel Analisis SWOT PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2021-2025
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) SWOT Analysis for 2021-2025

Strengths	*Weaknesses*
1. Network Area and Control, and Container Market Share a. The wide reach of the port network throughout Indonesia; b. Better strategic control nationally through overall planning for network and asset investments; and c. Dominates the Indonesian container market. **2. Completeness of Port Services and a Diversified Portfolio** a. A complete business service chain in the port business with 4 (four) clusters: » Containers » Non Containers » Logistics and Hinterland Development » Marine, Equipment and Port Services b. A diversified portfolio outside the port business. **3. Strategic Port** Strategical locations for transshipment hubs. **4. Stakeholder Relation** Support for high legality aspects in every business activity carried out. **5. Business Experience** Experience and track record in carrying out port activities (port know-how).	**1. HC and Organizational Development Gap** a. The speed of work units must adapt to changes in new business models is still slow; and b. b. HC competencies were not evenly distributed across all ports when integration was carried out. **2. Technology Gap** The application of integrated technology to support operational processes is still limited. **3. Non Containerized Market Share (NPK)** The market share for non-container cargo is still low. **4. Operation Gap** a. There are several terminals not being used optimally; and b. There is a gap in the standardization of business processes between the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ports. **5. Business Capability Gap** Service capabilities and abilities in the logistics, hinterland development, marine, and port services segments have not been developed well.
Opportunities	*Threats*
1. Visi/Program Pemerintah untuk pengembangan infrastruktur maritim dan intensifikasi program pemerintah di bidang maritim berpotensi mendukung rencana integrasi Pelindo. **2. Potensi Pengembangan Layanan dan Rantai Nilai Kepelabuhan** a. Mengembangkan penawaran jasa pelabuhan yang lebih terintegrasi dengan hadirnya layanan di segmen logistik, *hinterland development, marine*, serta *port services* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan b. Peningkatan sinergi dengan BUMN lain di segmen transportasi pelayaran dan logistik. **3. Pemanfaatan Teknologi** Potensi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi jasa layanan kepelabuhan. **4. *Strategic Partnership*** Peningkatan kerja sama usaha dengan mitra strategis dan strategi aliansi.	**1. Pemulihan Ekonomi** a. Ketidakpastian ekonomi global dan nasional akibat pandemi COVID-19; b. Makroekonomi Indonesia terdampak oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat; dan c. Volatilitas nilai Rupiah. **2. *Entry Barriers* Yang Semakin Rendah** Pemilik barang, pelaku industri dan Pemerintah Daerah yang membuka dan melakukan operasi pelabuhan sendiri, serta dapat ber*partner* dengan operator pelabuhan dari luar negeri. **3. Konektivitas Maritim** Tingkat konektivitas maritim nasional yang masih rendah, sehingga belum terwujudnya *network* maritim yang terintegrasi. **4. Integrasi Multimoda dan Integrasi Hinterland Yang Masih Rendah** Integrasi multimoda dan integrasi *hinterland* yang masih rendah dan lebih banyak bergantung pada transportasi jalur darat.
1. Government Vision/Program for the development of maritime infrastructure and the intensification of Government programs in the maritime sector have the potential to support Pelindo's integration plan. **2. Potential for Port Service and Value Chain Development** a. Developing a more integrated port service offering with services in the logistics, hinterland development, marine, and port services segments at PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and b. Increased synergies with other SOEs in the shipping and logistics transportation segment. **3. Use of Technology** Potential use of technology and digitalization to increase the port services effectiveness and efficiency. **4. Strategic Partnership** Increase in business cooperation with strategic partners and strategic alliances.	**1. Economic Recovery** a. Global and national economic uncertainty due to the COVID-19 pandemic; b. Indonesia's macroeconomy is affected by slowing world economic growth; and c. Rupiah volatility. **2. Lower Entry Barriers** Goods owners, industry businesses and local governments who open and carry out port operations themselves, and partner with overseas port operators. **3. Maritime Connectivity** The level of national maritime connectivity is still low, and an integrated maritime network has not yet been realized. **4. Multimodal Integration and Low Hinterland Integration** Multimodal integration and hinterland integration is still low, with a reliance on land transportation.

Sumber: Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 masing-masing Perusahaan Pelindo I-IV, Analisis BCG
Source: Company Long-Term Plan (RJPP) 2020-2024 for each Pelindo I-IV Company, BCG Analysis

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan menilai bahwa kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang dimiliki oleh Perseroan melebihi kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Dengan dilakukannya penggabungan Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV ke dalam Pelindo II, Perseroan optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Perseroan memiliki prospek usaha yang baik yang juga didukung oleh kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan.

Based on the above, the Company is of the opinion that Company's strengths and opportunities outweigh the existing weaknesses and threats. With the merger of Pelindo I, Pelindo III, and Pelindo IV into Pelindo II, the Company is optimistic that it can continuously improve its performance both in the short term and in the long term. In other words, the Company has good business prospects supported by the strengths of the Company.

STRATEGI TAHUN 2022

Berdasarkan *roadmap* strategi perusahaan yang terdapat pada Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2021-2025, pada tahun 2022 Pelindo berada pada fase *Business Alignment and Integration*. Pada fase ini Pelindo akan berfokus pada:

1. Penyelarasan bisnis paska integrasi melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan;
2. Melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis; dan
3. Reorganisasi perusahaan dan pengembangan budaya terintegrasi.

Selaras dengan fase *Business Alignment and Integration*, inisiatif strategis yang akan dilakukan baik pada tahap perencanaan maupun tahap eksekusi pada tahun 2022 antara lain:

1. Inisiatif Strategis Tahap Perencanaan Pada Tahun 2022:
   a. Digitalisasi dan sistemisasi operasi kepelabuhan;
   b. Pengembangan infrastruktur dan peralatan pelabuhan;
   c. *Additional marine service offering* untuk *key account* Pelindo;
   d. Alokasi modal terintegrasi;
   e. Restrukturisasi organisasi;
   f. Pengembangan fungsi *shared service;*
   g. Sentralisasi *knowledge management;* dan
   h. Internalisasi budaya Pelindo terintegrasi.
2. Inisiatif Strategis Tahap Pelaksanaan Pada Tahun 2022:
   a. Standardisasi operasi pelabuhan.
   b. *Key account management* terintegrasi;
   c. Penurunan/optimalisasi *financing cost;*
   d. Pengadaan bersama/terpusat; dan
   e. Optimalisasi aset.
3. Inisiatif Strategis Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Pada Tahun 2022:
   a. Pembuatan klaster dan model bisnis;
   b. Optimisasi bisnis *core* dan non-*core* untuk memperluas akses pendanaan;
   c. Program *Learning and Development* (L and D) terintegrasi untuk standardisasi dan peningkatan kualitas SDM; dan
   d. Implementasi *enterprise architect* dan IT *Masterplan*.

STRATEGY FOR 2022

Based on the Company's strategic roadmap in the Company's Long Term Plan Book (RJPP) for 2021-2025, in 2022 Pelindo will be in the Business Alignment and Integration phase. In this phase, Pelindo will focus on:

1. Post-integration business alignment through operational and commercial standardization and integration to improve service quality;
2. Integrated investments for business development; and
3. Company reorganization and integrated culture development.

In the Business Alignment and Integration phase, the strategic initiatives to be carried out at the planning and execution stages in 2022 will include:

1. Strategic Initiatives Planning Phase in 2022:
   a. Digitization and systemization of port operations;
   b. Development of port infrastructure and equipment;
   c. Additional marine service offering for Pelindo key accounts;
   d. Integrated capital allocation;
   e. Organizational restructuring;
   f. Shared service function development;
   g. Centralized knowledge management; and
   h. Internalization of an integrated Pelindo culture.
2. Strategic Initiatives Implementation Phase in 2022:
   a. Standardization of port operations;
   b. Integrated key account management;
   c. Reducing/optimizing financing costs;
   d. Joint/centralized procurement; and
   e. Asset optimization.
3. Strategic Initiatives in the Planning and Implementation Phase in 2022:
   a. Cluster creation and business model;
   b. Optimization of core and non-core businesses to expand access to funding;
   c. Integrated Learning and Development (L and D) program for standardization and quality HC improvement; and
   d. Implementation of enterprise architect and IT Masterplan.

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

PENCAPAIAN TARGET

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI

Uraian atas perbandingan target dan realisasi produksi tahun 2021 adalah sebagai berikut.

TARGET ACHIEVEMENT AND FUTURE TARGETS

TARGET ACHIEVEMENT

COMPARISON OF PRODUCTION TARGET AND REALIZATION

A comparison of the production targets and realization in 2021 is as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi
Comparison of Production Targets and Realization

Jenis Kegiatan Type of Activity	Satuan Unit	RKAP Tahun 2021 2021 RKAP	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
Arus Kapal Ship Traffic	Unit	254.857	254.669	99,93
	GT	1.186.128.672	1.186.217.247	100,01
Arus Petikemas Container Traffic	Box	12.458.288	13.234.256	106,23
	Teus	15.925.346	17.056.636	107,10
Arus Barang Non-petikemas Non-Container Traffic	Ton	136.830.665	146.200.809	106,85
	M^3	5.117.506	4.515.637	88,24
	Unit	901.461	1.519.404	168,55
	MMBTU	15.080.000	7.820.960	51,86
	Ekor	743.041	635.120	85,48
Arus Penumpang Passenger Traffic	Orang	10.607.417	8.056.905	75,96

Capaian Arus kapal dalam satuan unit tahun 2021 mencapai 99,93%, sedikit berada di bawah target RKAP, ketidaktercapaian ini disebabkan menurunnya kunjungan kapal penumpang pada Cabang Tanjung Balai Karimun. Sedangkan untuk satuan GT berhasil melampaui target RKAP yang mencapai 100,01%, hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kunjungan Kapal Roro di Dermaga Umum pada Cabang Tanjung Wangi, Lembar dan Terminal Jamrud akibat tingginya kegiatan kapal PT Atosim Lampung Pelayaran dengan jumlah kunjungan minimal 30 *call*/bulan. Hal yang sama juga terjadi pada Cabang Gresik khususnya kegiatan kapal curah cair non-BBM di TUKS.

Ship traffic in 2021 reached 99.93%, slightly below the RKAP target, due to a decrease in passenger ship visits at the Tanjung Balai Karimun Branch. GT exceeded the RKAP target to reach 100.01%, due to an increase in Roro Ship visits at the Public wharf at Tanjung Wangi Branch, Lembar and Jamrud Terminal due to the high activity of PT Atosim Lampung Pelayaran ships with a minimum number of 30 calls/month. The same also occurred at the Gresik Branch, especially for non-fuel liquid bulk ships activities at TUKS.

Arus petikemas dalam satuan box tahun 2021 berhasil melampaui target RKAP yang mencapai 106,85% demikian pula dalam satuan teus tercapai 107,10%. Ketercapaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Regional 2
   a. Adanya peningkatan kegiatan kapal adhoc di tahun 2021 sebanyak 104,701 teus, selain itu penambahan *service* baru seperti CIS (OOCL), CS2 (CMA,WANHAI), CIS/CIM2 (OOCL, GOLDSTAR, ONE), CMI2 (SITC), NSJ (TSINE/BENLINE) dan *Direct* US (Ali Express) pada JICT; dan
   b. Adanya kenaikan arus petikemas Pelayaran PT Salam Pasific Indonesia Line, PT Tanto Intim Line, PT Caraka Tirta Perkasa, PT Indo Container Line, PT Pelayaran Tresnamuda Sejati pada IPC TPK Tanjung Priok 1.

Container traffic in box units in 2021 exceeded the RKAP target by 106.85%, and by 107.10% for teus units. This achievement can be explained as follows:

1. Regional 2
   a. There was due to an increase in adhoc vessel activities in 2021 of 104.701 TEUs, in addition to new services such as CIS (OOCL), CS2 (CMA, WANHAI), CIS/CIM2 (OOCL, GOLDSTAR, ONE), CMI2 (SITC), NSJ (TSINE/BENLINE) and Direct US (Ali Express) at JICT; and
   b. There was an increase in shipping container traffic by PT Salam Pacific Indonesia Line, PT Tanto Intim Line, PT Caraka Tirta Perkasa, PT Indo Container Line, PT Pelayaran Tresnamuda Sejati at IPC TPK Tanjung Priok 1.

2. Regional 3
   a. Kunjungan kapal petikemas luar negeri di PT Terminal Teluk Lamong yaitu kegiatan *ad-hoc* dari pelayaran KMTC Line, GSL Line, Cosco, CMA, dan Evergreen. Peningkatan juga terjadi pada kunjungan kapal domestik dari agen pelayaran Mentarimas Multimoda untuk rute Indonesia bagian Tengah dan Timur seperti untuk rute Lembar, Kendari, Kumai, Sampit dan Gorontalo. Secara total, rute Sampit dan Kumai terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 30% dan 69% untuk pelayaran besar di TTL seperti Temas, 3M, dan Meratus;
   b. Peningkatan arus petikemas domestik dan internasional juga terjadi pada Terminal Petikemas Semarang, hal ini disebabkan adanya penambahan windows SITC CMI II dan juga peningkatan dari beberapa perusahaan seperti Orient Overseas Container Line co.,Ltd., Mediterranean Shipping Company, Samudera Shipping Line dan Wan Hai Lines, Meratus lines dan Pelayaran Indo Container Lines; dan
   c. Tercapainya kegiatan petikemas domestik baik dari sisi bongkar maupun muat petikemas terjadi pada TPKB, Terminal Jamrud dan Terminal Nilam-Mirah.

Arus barang non-petikemas dalam satuan ton tahun 2021 mencapai 106,85%, hal ini dipengaruhi oleh:
1. Adanya peningkatan produksi kegiatan bongkar kargo pada beberapa *cargo owner* seperti PT Charoen Phokpand Indonesia Tbk (kedelai), PT Sreeya Sewu Tbk dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (kebutuhan bahan baku) pada PT Terminal Teluk Lamong; dan
2. Peningkatan juga terjadi pada PT BJTI khususnya komoditi pupuk dari PT Permata Agro Persada, PT Fertilizer Inti Technology, dan PT Multi Mas Chemindo, serta komoditas klinker PT Semen Indonesia (Persero).

Arus barang non-petikemas satuan M3 mencapai 88,24%, yang berada di bawah target RKAP. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh adanya penurunan bongkar kayu masak milik PT Pelita Bandar Nasional pada Terminal Jamrud, bongkar komoditi kayu log pada Cabang Gresik dan penurunan arus barang bongkaran kayu olahan serta penurunan muatan sepeda motor milik PT Cahaya Mitra Maritim di Terminal Mirah.

Arus barang non-petikemas dalam satuan unit berhasil melampaui target RKAP yang mencapai 168,55%, ketercapaian ini disebabkan oleh:
1. Regional 2
   Adanya peningkatan jumlah bongkar/muat kendaraan pada Cabang IKT Tanjung Priok akibat telah mulai pulihnya sektor industri otomotif tanah air.
2. Regional 3
   a. Adanya rute tetap kapal roro PT Atosim Lampung Pelayaran tujuan Tanjung Wangi-Gilimas maupun sebaliknya dengan jumlah kunjungan kapal 29 s.d 34 call per bulan;
   b. Peningkatan angkutan darat di wilayah Sumba Timur dan sekitarnya dengan rute Surabaya-Lembar-Waingapu; dan
   c. Adanya penambahan armada milik PT Berlian Lautan Sejahtera pada Cabang Bima dan Cabang Ende-Ippi.

2. Regional 3
   a. The overseas container ship visits at PT Terminal Teluk Lamong was an ad-hoc activity from KMTC Line, GSL Line, Cosco, CMA, and Evergreen shipping. An increase also occurred in domestic ship visits from shipping agency Mentarimas Multimoda for Central and Eastern Indonesia routes, such as the Lembar, Kendari, Kumai, Sampit and Gorontalo routes. In total, the Sampit and Kumai routes saw a significant increase of 30% and 69% for large shipping in TTL such as Temas, 3M, and Meratus;
   b. An increase in domestic and international container traffic also occurred at the Semarang Container Terminal, due to the addition of the SITC CMI II windows and also an increase from several companies such as Orient Overseas Container Line co., Ltd., Mediterranean Shipping Company, Samudera Shipping Line and Wan Hai Lines, Meratus lines and Pelayaran Indo Container Lines; and
   c. Domestic container activities both in terms of loading and unloading of containers occurred at TPKB, Jamrud Terminal and Nilam-Mirah Terminal.

Non-container goods traffic in tons in 2021 reached 106.85%, due to:
1. An increase in cargo unloading activities by several cargo owners such as PT Charoen Phokpand Indonesia Tbk (soybeans), PT Sreeya Sewu Tbk and PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (raw material needs) at PT Terminal Teluk Lamong; and
2. An increase also occurred in PT BJTI, especially for fertilizer commodities from PT Permata Agro Persada, PT Fertilizer Inti Technology, and PT Multi Mas Chemindo, as well as clinker commodities from PT Semen Indonesia (Persero).

Non-container goods traffic in M3 units reached 88.24%, below the RKAP target. This was due to a decrease in the unloading of cooking wood by PT Pelita Bandar Nasional at Jamrud Terminal, and the unloading of logs at the Gresik Branch, and a decrease in the unloading of processed wood goods, as well as a decrease in the loading of motorbikes by PT Cahaya Mitra Maritim at Mirah Terminal.

Non-container goods traffic in units exceeded the RKAP target by 168.55%, due to:
1. Regional 2
   There has been an increase in the loading/unloading of vehicles at the Tanjung Priok IKT Branch due to the recovery in the country's automotive industry sector.
2. Regional 3
   a. There was a fixed route for PT Atosim Lampung Pelayaran's roro ships to Tanjung Wangi-Gilimas and vice versa with the number of ship visits reaching 29 to 34 calls per month;
   b. Increased land transportation in the East Sumba area and its surroundings using the Surabaya-Lembar-Waingapu route; and
   c. There was an additional fleet belonging to PT Berlian Lautan Sejahtera at the Bima Branch and the Ende-Ippi Branch.

Arus barang non-petikemas dalam satuan MMBTU berada di bawah target RKAP, dengan capaian 51,86%. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena belum terealisasinya kegiatan bongkar gas milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk di PT Terminal Teluk Lamong dan adanya perubahan pola kerja sama antara PT Indonesia Power dengan PT Pelabuhan Energi Logistik menjadi *minimum throughput* di Cabang Benoa.

Pencapaian arus hewan mencapai 85,48% yang berada di bawah target RKAP. Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh:
1. Penurunan di Cabang Belawan dan Cabang Panjang yang disebabkan minimnya daya minat masyarakat akan daging sapi impor serta adanya himbauan untuk memaksimalkan penjualan sapi lokal sehingga kapasitas kandang penuh dan berdampak pada penurunan impor sapi; dan
2. Penurunan juga terjadi pada kegiatan impor hewan dari negara Australia di Terminal PTP Tanjung Priok.

Capaian arus penumpang tahun 2021 mencapai 75,96% yang berada di bawah target RKAP. Ketidaktercapaian tersebut dipengaruhi oleh:
1. Sejalan dengan belum terealisasinya kegiatan kapal *cruise* pada beberapa cabang di antaranya di Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Asahan sehingga menyebabkan rendahnya penumpang luar negeri karena negara asal masih memberlakukan pembatasan;
2. Penumpang domestik juga mengalami penurunan khusus pada saat mudik Lebaran dan libur Natal pada Cabang Makassar, Sorong, Ambon, Balikpapan, Ternate, Parepare, Nunukan dan Tolitoli akibat masih berlakunya pembatasan oleh pemerintah; dan
3. Penurunan arus penumpang di Cabang Tanjung Priok.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN

Uraian atas realisasi perbandingan target dan realisasi laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Non-container goods traffic in MMBTU units was below the RKAP target, with an achievement of 51.86%. This was due to PT Perusahaan Gas Negara Tbk's gas unloading activities not yet being realized at PT Terminal Teluk Lamong, and a change in the pattern of cooperation between PT Indonesia Power and PT Pelabuhan Energi Logistik that caused minimum throughput at the Benoa Branch.

Animal traffic reached 85.48%, below the RKAP target. This was due to:
1. A decline in Belawan and Panjang branches due to the lack of public interest in imported beef as well as an appeal to maximize sales of local cattle meaning the cage capacity was full and resulted in a decrease in cattle imports; and
2. There was a decline in animal imports from Australia at the Tanjung Priok PTP Terminal.

Passenger traffic in 2021 reached 75.96%, below the RKAP target. This was due to:
1. The unrealized cruise ship activities at several branches, including Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang and Tanjung Balai Asahan, due to the low number of overseas passengers as the countries of origin were still imposing restrictions;
2. Domestic passengers also experienced a special decline during Lebaran homecoming and Christmas holidays at Makassar, Sorong, Ambon, Balikpapan, Ternate, Parepare, Nunukan and Tolitoli branches due to the Government's restrictions; and
3. There was a decrease in passenger traffic at Tanjung Priok Branch.

COMPARISON OF FINANCIAL TARGETS AND REALIZATION →BUDGET AND REPORTING

The comparison of the 2021 consolidated statement of financial position targets and realization is as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)
Comparison of the Consolidated Statement of Financial Position Targets and Realization (in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
ASET ASSETS			
ASET LANCAR CURRENT ASSETS			
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent	12.095.614	12.922.389	106,84
Investasi jangka pendek Short-term investment	2.990.879	5.718.526	191,20
Piutang usaha-neto Trade receivables, net	2.280.904	1.516.263	66,48
Piutang lain-lain-neto Other receivables, net	1.018.677	1.280.366	125,69
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	626.022	258.678	41,32

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)
Comparison of the Consolidated Statement of Financial Position Targets and Realization (in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues	575.205	330.968	57,54
Persediaan Inventories	207.959	217.675	104,67
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	1.814.939	1.080.535	59,54
Aset lancar lainnya Other current assets	123.690	55.195	44,62
Total Aset Lancar **Total Current Assets**	**21.733.889**	**23.380.595**	**107,58**
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS			
Investasi jangka panjang/investasi pada entitas asosiasi Long-term investments/investments in associates	6.282.183	3.751.639	59,72
Properti investasi-neto Investment properties - net	454.742	873.434	192,07
Aset tetap-neto Fixed assets - net	57.584.213	46.300.183	80,40
Aset kerja sama operasi-neto Joint operation assets - net	422.685	408.013	96,53
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	1.859.837	452.002	24,30
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	1.059.608	587.269	55,42
Aset tak berwujud-neto Intangible assets - net	33.537.061	38.760.455	115,57
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	733.901	750.660	102,28
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	2.490.680	964.825	38,74
Total Aset Tidak Lancar **Total Non-current Assets**	**104.424.910**	**92.848.480**	**88,91**
TOTAL ASET **TOTAL ASSETS**	**126.158.799**	**116.229.075**	**92,13**
LIABILITAS LIABILITIES			
LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT-TERM LIABILITIES			
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	0	5.197	-
Utang usaha Trade payables	3.184.725	3.264.492	102,50
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	1.319.382	1.298.046	98,38
Utang pajak Taxes payable	775.936	578.541	74,56
Beban akrual Accrued expenses	2.953.528	3.699.192	125,25
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities			
Utang obligasi Bonds payable	0	0	
Utang bank Bank loans	326.465	2.365.899	724,70

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)
Comparison of the Consolidated Statement of Financial Position Targets and Realization (in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Liabilitas sewa Lease liabilities	77592	76.345	98,39
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities	1.049.214	2.248.710	214,32
Total Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**9.686.842**	**13.536.422**	**139,74**
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES			-
Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi bagian lancar Long-term liabilities - of current maturities			-
Utang obligasi Bonds payable	44.194.220	40.176.176	90,91
Utang bank Bank loans	13.678.610	6.656.344	48,66
Liabilitas sewa Lease liabilities	1.802.412	257.540	14,29
Utang lembaga keuangan non-bank Loan from non-bank	-	1.426.043	-
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	184.708	105.072	56,89
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	5.964.551	4.495.056	75,36
Liabilitas jangka panjang lainnya Other long-term liabilities	689.678	962.389	139,54
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	5.779.117	6.560.924	113,53
Total Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-current Liabilities**	**72.293.296**	**60.639.544**	**83,88**
TOTAL LIABILITAS **TOTAL LIABILITIES**	**81.980.138**	**74.175.966**	**90,48**
EKUITAS EQUITY			
Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh Authorized capital issued and fully paid	7.275.067	8.475.067	116,49
Modal donasi Donated capital	26.826	26.826	100,00
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	1.045.734	(1.128.323)	(107,90)
Komponen ekuitas lainnya Other equity components	0	1.466	-
Selisih atas perubahan ekuitas dan dampak transaksi dengan kepentingan non pengendali Differences from changes in equity and the impact of transactions with non-controlling interests	0	836.073	-
Ekuitas *merging entity* Merging entity equity	0	0	
Saldo Laba Retained earnings			
Ditentukan penggunaannya Appropriated	30.495.798	29.925.515	98,13
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	3.217.667	4.434.909	137,83
Penghasilan Komprehensif Lain Other comprehensive income	(653.879)	(2.062.503)	315,43

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)
Comparison of the Consolidated Statement of Financial Position Targets and Realization (in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk-Neto **Equity attributable to owners of the parent entity-net**	**41.407.213**	**40.509.030**	**97,83**
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	2.771.388	1.544.079	55,72
TOTAL EKUITAS **TOTAL EQUITY**	**44.178.601**	**42.053.109**	**95,19**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS **TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**	**126.158.739**	**116.229.075**	**92,13**

Berdasarkan rincian data pada tabel di atas pencapaian total aset mencapai 92,13%, sedikit berada di bawah target RKAP demikian pula dengan pencapaian liabilitas yang mencapai 90,487% dan capaian ekuitas yang mencapai 95,19%. Meskipun demikian jika dilihat dari sisi aset lancar, pencapaian aset lancar berhasil melampaui target yang mencapai 107,58%. aset lancar melampaui target di atas RKAP, terutama disebabkan:

1. Kas dan setara kas terealisasi sebesar Rp12,92 triliun atau 6,84% di atas RKAP Tahun 2021 yang sebesar Rp12,10 triliun;
2. Investasi jangka pendek terealisasi sebesar Rp5,72 triliun atau 91,20% di atas RKAP Tahun 2021 yang sebesar Rp2,99 triliun. Hal ini terutama disebabkan lebih tingginya realisasi penempatan deposito yang lebih dari tiga bulan dibandingkan RKAP Tahun 2021;
3. Piutang lain-lain - neto terealisasi sebesar Rp1,28 triliun atau 25,69% di atas RKAP Tahun 2021 yang sebesar Rp1,02 triliun terutama disebabkan adanya piutang atas pinjaman dari entitas anak PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI) kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebagai entitas asosiasi; dan
4. Persediaan sebesar Rp217,68 miliar atau 4,67% di atas RKAP Tahun 2021 yang sebesar Rp207,96 miliar.

Adapun perbandingan target dan realisasi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan sebagai berikut:

Based on the above data, total assets reached 92.13%, slightly below the RKAP target, with liabilities reaching 90.487%, and equity reaching 95.19%. However, current assets exceeded the RKAP target by 107.58%, mainly due to:

1. Cash and cash equivalents of Rp12.92 trillion or 6.84% above the 2021 RKAP target of Rp12.10 trillion;
2. Short-term investments of Rp5.72 trillion or 91.20% above the 2021 RKAP target of Rp2.99 trillion. This was mainly due to the higher deposit placements of more than three months compared to the 2021 RKAP;
3. Other receivables - net of Rp1.28 trillion or 25.69% above the 2021 RKAP target of Rp1.02 trillion, mainly due to receivables from loans from the subsidiary PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI) to PT Berkah Manyar Sejahtera Area (BKMS) as an associate entity; and
4. Inventories of Rp217.68 billion or 4.67% above the 2021 RKAP target of Rp207.96 billion.

The comparison of targets and realization of the profit and loss statement and other comprehensive income is as follows:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)
Comparison of Targets and Realization of Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Pendapatan Operasi Operating revenues	28.702.438	28.814.806	100,39
Pendapatan Konstruksi Construction revenues	2.887.407	3.195.512	110,67
Beban Operasi Operating expenses	(22.128.709)	(22.503.947)	101,70
Beban Konstruksi Construction expenses	(2.887.407)	(3.195.512)	110,67
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto Other operating revenues (expenses) - net	(155.122)	229.338	(147,84)

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)
Comparison of Targets and Realization of Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
LABA USAHA **INCOME FROM OPERATIONS**	**6.418.607**	**6.540.197**	**101,89**
Pendapatan Keuangan Finance income	508.392	407.776	80,21
Beban Keuangan Finance costs	(2.755.910)	(2.540.083)	92,17
Bagian Laba Entitas Asosiasi Equity in income of associates	89.449	255.108	285,20
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN **INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX**	**4.260.538**	**4.662.998**	**109,45**
Beban Pajak Final Final tax expense	(309.837)	(487.672)	157,40
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN **INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX**	**3.950.701**	**4.175.326**	**105,69**
Beban Pajak Penghasilan Badan Corporate income tax expense			
Kini Current	(835.166)	(847.733)	101,50
Tangguhan Deferred	-	(151.448)	-
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.115.535**	**3.176.145**	**101,95**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss			
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net off tax	(88.536)	94.352	(106,57)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi **Item that will be reclassified to profit or loss**			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	-	13.380	-
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual Changes in fair value of available-for-sale financial assets	-	(47.180)	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY INCOME**	**3.026.999**	**3.236.697**	**106,93**
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE TO:**			
Pemilik Entitas Induk Owner of the parent entity	3.217.667	3.292.134	102,31
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	(102.133)	(115.988)	113,57
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	3.115.534	3.176.146	101,95

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)
Comparison of Targets and Realization of Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**			
Penyesuaian atas laba *merging entity :* Adjustment for merging entity income:			
Pemilik Entitas Induk Owner of the parent entity	-	(2.280.313)	-
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling interests	-	130.572	-
	-	(2.149.741)	-
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE TO:**			
Pemilik Entitas Induk Owner of the parent entity	3.129.131	1.011.820	32,34
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling interests	(102.133)	14.584	(14,28)
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	3.026.998	1.026.404	33,91
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE TO:**			
Pemilik Entitas Induk Owner of the parent entity	-	3.351.776	-
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	-	(115.079)	-
	-	**3.236.697**	**-**
Penyesuaian atas laba *merging entity :* *Adjustment for merging entity income:*			
Pemilik Entitas Induk Owner of the parent entity	-	(2.170.608)	-
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	-	129.568	-
	-	**(2.041.040)**	**-**
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE TO:**			
Pemilik Entitas Induk Owner of the parent entity	-	1.181.168	-
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	-	14.507	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**-**	**1.195.675**	**-**

Berdasarkan rincian data pada tabel di atas, pencapaian laba usaha berhasil melampaui target mencapai 101,89%, demikian pula dengan laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* yang mencapai 101,95%. Pencapaian target laba tersebut sejalan dengan pencapaian pendapatan konstruksi dan pendapatan operasi.

Capaian pendapatan konstruksi yang mencapai 110,67% lebih tinggi dibandingkan RKAP tahun 2021 terutama yang berasal dari konsesi jalan Tol Cibitung-Cilincing. Selain itu, pendapatan operasi mencapai 100,39% terutama disebabkan oleh peningkatan arus petikemas, arus kapal, arus barang non-petikemas, dan pendapatan rupa-rupa yang diuraikan sebagai berikut:

1. Arus petikemas
   Peningkatan arus petikemas terjadi karena telah pulihnya pelayaran petikemas baik domestik maupun internasional seperti kenaikan arus petikemas di PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Tanjung Priok 1, kenaikan arus petikemas internasional di Teluk Lamong, kenaikan arus petikemas domestik di Lembar, Kendari, Kumai, Sampit, dan Gorontalo, kenaikan arus petikemas domestik dan internasional di Terminal Petikemas Semarang serta kenaikan arus petikemas domestik di Terminal Petikemas Banjarmasin, Terminal Jamrud, dan Terminal Nilam Mirah. Peningkatan arus petikemas juga berdampak pada peningkatan produksi pelayanan petikemas internasional dan domestik tahun 2021 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020;
2. Arus kapal
   Peningkatan arus kapal ini berdampak pada peningkatan produksi pelayanan pemanduan, pelayanan penundaan, dan pelayanan penambatan. Peningkatan arus kapal terutama terjadi karena peningkatan kunjungan kapal Roro di dermaga umum Cabang Tanjung Wangi, Cabang Lembar, dan Terminal Jamrud serta meningkatnya kegiatan kapal curah cair non-BBM di TUKS pada Cabang Gresik;
3. Arus barang non-petikemas
   Peningkatan arus barang non-petikemas antara lain disebabkan peningkatan produksi kegiatan bongkar kargo di Terminal Teluk Lamong, peningkatan produksi bongkar komoditi pupuk dan klinker di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, peningkatan produksi bongkar dan muat kendaraan di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tanjung Priok, penambahan rute baru kapal RORO tujuan Tanjung Wangi ke Gilimas, peningkatan produksi bongkar muat hewan pada Terminal Jamrud dan Terminal Kalimas; dan
4. Pendapatan rupa-rupa;
   Peningkatan pendapatan rupa-rupa disebabkan meningkatnya pelayanan kesehatan selama masa pandemi serta tercapainya produksi pengusahaan alat bongkar muat.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2021 yang dimiliki oleh Pelindo adalah 63,82% berasal dari liabilitas, dan 36,18% berasal dari ekuitas. Adapun uraian perbandingan target dan realisasi struktur modal tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Based on the above data, the operating profit exceeded the target by 101.89%, as well as the income for the year after the effect merging entity's income exceeded the target by 101.95%. The achievement of the profit target was due to the construction revenues and operating revenues achievements.

Construction revenues reached 110.67% of the 2021 RKAP, mainly due to the Cibitung-Cilincing toll road concession. In addition, operating revenues reached 100.39% mainly due to an increase in container traffic, vessel traffic, non-container goods traffic, and miscellaneous revenues as follows:

1. Container traffic
   The increase in container traffic occurred due to the recovery in domestic and international container shipping, including the increase in container traffic at PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Tanjung Priok 1, the increase in international container traffic in Teluk Lamong, the increase in domestic container traffic in Lembar, Kendari, Kumai, Sampit, and Gorontalo, the increase in domestic and international container traffic at the Semarang Container Terminal, and the increase in domestic container traffic at the Banjarmasin Container Terminal, Jamrud Terminal, and Nilam Mirah Terminal. The increase in container traffic was also due to increasing international and domestic container services in 2021 which is higher than in 2020;
2. Ship traffic
   This increase in ship traffic also increased the pilotage services, towing services, and mooring services. The increase in ship traffic was mainly due to the increase in Roro ship visits at the Tanjung Wangi Branch Public wharf, Lembar Branch, and Jamrud Terminal as well as increased non-fuel liquid bulk vessel activities at Gresik Branch TUKS;
3. Non-container goods traffic
   The increase in non-container good traffic was due to, an increase in cargo unloading activities at Teluk Lamong Terminal, an increase in unloading fertilizer and clinker commodities at PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, an increase in loading and unloading vehicles at PT Indonesia Vehicle Terminal Tanjung Priok, adding a new route for RORO ships from Tanjung Wangi to Gilimas that increased animal loading and unloading at Jamrud Terminal and Kalimas Terminal; and
4. Miscellaneous income
   The increase in miscellaneous income was due to an increase in health services during the pandemic, and the production for loading and unloading equipment.

COMPARISON OF TARGETS AND CAPITAL STRUCTURE REALIZATION

In 2021, Pelindo's capital structure composition was 63.82% from liabilities, and 36.18% from equity. A comparison of targets and realization of capital structure in 2021 is presented as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal (dalam jutaan Rupiah)
Comparison of Targets and Realization of Capital Structure (in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Liabilitas jangka pendek Current liabilities	9.686.842	13.536.422	139,74
Liabilitas jangka panjang Non-Current liabilities	72.293.296	60.639.544	83,88
Total liabilitas Total liabilities	81.980.138	74.175.966	90,48
Total ekuitas Total equity	44.178.601	42.053.109	95,19
Total liabilitas dan ekuitas **Total liabilities and equity**	**126.158.739**	**116.229.075**	**92,13**

Pencapaian total liabilitas mencapai 90,48% berada di bawah target RKAP, demikian pula dengan total ekuitas yang sedikit berada di bawah target yang mencapai 95,19%.

Total liabilities reached 90.48%, below the RKAP target, with total equity slightly below the target with 95.19%.

Liabilitas jangka pendek melampaui target mencapai 139,74%, lebih tingginya realisasi liabilitas jangka pendek tahun 2021 dibandingkan RKAP antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya pinjaman di entitas anak yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) kepada Bank OCB NISP berupa kredit rekening koran Rp2,66 miliar dari *plafon* Rp4,00 miliar dan *demand loan* Rp2,53 miliar dari *plafon* Rp15,00 miliar;
2. Meningkatnya beban usaha yang signifikan per 31 Desember 2021;
3. Tidak terealisasinya divestasi anak perusahaan PTP1 dan PMT, rencananya dana yang diperoleh digunakan untuk melunasi sebagian utang bank; dan
4. Meningkatnya uang titipan/panjar pengguna jasa atas pelayanan yang belum diperhitungkan dengan pelayanan dan sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha serta berasal dari instrumen keuangan.

Short-term liabilities exceeded the RKAP target by 139.74%, this higher realization in 2021 was partly due to:

1. A subsidiary loan for PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) from Bank OCB NISP in the form of overdraft of Rp2.66 billion from a limit of Rp4.00 billion, and a demand loan of Rp2.53 billion from a limit of Rp15.00 billion;
2. A significant increase in operating expenses as of December 31, 2021;
3. The divestment of PTP1 and PMT not being realized, where the plan was that the proceeds would be used to pay off part of the bank loan; and
4. The increase in down payments by service users for services, not being taken into account with services, resulted in an increase in operating income from financial instruments.

Liabilitas jangka panjang di bawah target RKAP yang mencapai 83,88%, lebih rendahnya realisasi liabilitas jangka panjang tahun 2021 dibandingkan RKAP antara lain disebabkan oleh:

1. Pencapaian liabilitas pajak tangguhan di bawah RKAP yang disebabkan penyesuaian komponen beda waktu dari masing-masing Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV yang telah bergabung ke Pelindo II pada tanggal 1 Oktober 2021;
2. Utang obligasi terealisasi sebesar Rp40,18 triliun atau 9,09% di bawah RKAP Tahun 2021 yang sebesar Rp44,19 triliun dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah di mana kurs per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.269 per USD sedangkan pada RKAP Tahun 2021 menggunakan asumsi kurs sebesar Rp14.600 per USD serta tidak terealisasinya pinjaman obligasi di Regional I;
3. Program *refinancing* atas utang bank di beberapa regional sebagai bagian dari inisiatif *merger* serta tidak terealisasinya rencana pinjaman di CTP dan Regional; dan
4. Pencapaian liabilitas sewa 85,71% di bawah RKAP terutama disebabkan realisasi di regional I di bawah RKAP atas aset Belawan Fase II serta berubahnya beberapa pola kerja sama dari tarif sewa tetap menjadi *revenue sharing*.

Long-term liabilities were below the RKAP target of 83.88%, partly due to:

1. Deferred tax liabilities being below the RKAP due to adjustments of the time difference component in Pelindo I, Pelindo III, and Pelindo IV when they were merged into Pelindo II on October 1, 2021;
2. Bonds payable of Rp40.18 trillion were 9.09% below the 2021 RKAP of Rp44.19 trillion, due to the rupiah exchange rate as of December 31, 2021 was Rp14,269 per USD, while for the 2021 RKAP the exchange rate was assumed at Rp14,600 per USD and the bonds credit not realized in Region I;
3. The refinancing program for bank loans in several regions as part of the merger initiative and the unrealized loan plan in CTP and Regional I; and
4. The lease liabilities were 85.71% below the RKAP, mainly due to the RKAP including realization in regional I for Belawan Phase II assets, as well as changes in several patterns of cooperation from fixed rental rates to revenue sharing.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMASARAN

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

COMPARISON OF MARKETING TARGET AND REALIZATION

The comparison of marketing targets and realizations is presented as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison of Marketing Targets and Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
REGIONAL 1				
Memorandum of Understanding (MoU)/ Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU)/ Cooperation	MoU/ Kerjasama MoU/ Cooperation	Adanya MoU/ Kerjasama baru minimal 2 (dua) buah. Minimum 2 (two) new MoU/ Cooperations.	Realisasi MoU/Kerjasama baru di tahun 2021 yaitu sebagai berikut: 1. Telah dilakukan kerjasama baru yaitu pelayanan jasa pemanduan dan penundaan dengan agen pelayaran di wilayah TUKS Lubuk Gaung Dumai selama periode tahun 2021 yaitu dengan PT Urban Shipping Agency, PT Energi Unggul Persada, PT Samudera Mas Sejahtera, PT Tirta Dumai Bahari, PT Adhigana Praduta Mulya; 2. Telah dilakukan kerjasama Operasi Pemanduan dan Penundaan dengan pemilik TUKS yaitu PT Kawasan Industri Dumai ; dan 3. Telah dilakukan perpanjangan kerjasama Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal dan Penyediaan Fasilitas Penundaan di Wilayah Perairan Selat Bangka di Terminal Khusus (Tersus) *Corridor Storage Tanker* (CST) Provinsi Bangka Belitung dengan *ConocoPhilips* (Grissik) Ltd di Cabang Pelabuhan Batam. The new MoU/Cooperations realized in 2021 were as follows: 1. A new collaboration for pilotage and tugboat services with shipping agents in the TUKS Lubuk Gaung Dumai area during 2021, namely with PT Urban Shipping Agency, PT Energi Unggul Persada, PT Samudera Mas Sejahtera, PT Tirta Dumai Bahari, PT Adhigana Praduta Mulya; 2. Cooperation for Pilotage and Tugboat Operations with the owner of the TUKS, namely PT Kawasan Industri Dumai; and 3. A cooperation extension for Pilotage and Tugboat Services and Tugboat Facilities in the Bangka Strait Waters at the Special Terminal (Tersus) Corridor Storage Tanker (CST) of Bangka Belitung Province with ConocoPhillips (Grissik) Ltd at the Batam Port Branch.	150%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison of Marketing Targets and Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
Perpanjangan Kerjasama Cooperation Extension	MoU/ Kerjasama MoU/ Cooperation	Adanya Perpanjangan Kerjasama sebanyak 5 (lima) buah. 5 (five) Cooperation Extensions	Perpanjangan kerjasama di Belawan dan Dumai: 1. Perjanjian antara PT Pelindo I dengan PT Sari Dumai Sejati tentang Kerjasama Pelayanan *Handling* Bongkar Muat dan Pengusahaan Gudang 003 milik Pelindo I; 2. Perjanjian antara PT Pelindo I dengan PT Intibenua Perkasatama tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Bagian dari Hak Pengelolaan Pelindo I; 3. Perjanjian antara PT Pelindo I dengan PT Belawan Tanki Indonesia tentang Kerjasama Penggunaan Tanah Bagian dari Hak Pengelolaan Pelindo I; 4. Perjanjian antara PT Pelindo I dengan PT Solusi Bangun Andalas tentang Kerjasama Penggunaan Tanah untuk Penanganan Semen Curah; 5. Perjanjian antara PT Pelindo I dengan PT Industri Plywood Tjipta Rimba Djaja tentang Kerjasama Penggunaan Tanah Bagian dari Hak Pengelolaan Pelindo I; 6. Perjanjian antara PT Pelindo I dengan PT Belawan Deli Chemical Industry tentang Kerjasama Penggunaan Tanah Bagian dari Hak Pengelolaan Pelindo I; 7. Perjanjian antara PT Pelindo I dengan PT Seirama Laju tentang Kerjasama Penggunaan Lahan di Lokasi IKD II (Samping PT AKR); 8. Perjanjian antara PT Pelindo dengan PT Inti Indosawit Subur tentang Kerjasama Pemanfaatan Gudang 009 Milik PT Pelindo; dan 9. Perjanjian antara PT Pelindo dengan PT Ivo Mas Tunggal tentang Kerjasama Pemanfaatan Gudang 010 Milik PT Pelindo. Cooperation Extension in Belawan and Dumai: 1. Agreement between PT Pelindo I and PT Sari Dumai Sejati for Cooperation in Loading and Unloading Services and Operations at the 003 Warehouse owned by Pelindo I; 2. Agreement between PT Pelindo I and PT Intibenua Perkasatama for Cooperation in Land Utilization as part of the Management Rights of Pelindo I; 3. Agreement between PT Pelindo I and PT Belawan Tanki Indonesia for Cooperation in Land Use as part of the Management Rights of Pelindo I; 4. Agreement between PT Pelindo I and PT Solusi Bangun Andalas for Cooperation in Land Use for Bulk Cement Handling; 5. Agreement between PT Pelindo I and PT Industri Plywood Tjipta Rimba Djaja for Cooperation in Land Use as part of the Management Rights of Pelindo I.	

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison of Marketing Targets and Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
			6. Agreement between PT Pelindo I and PT Belawan Deli Chemical Industry regarding Cooperation in the Use of Land as part of the Management Rights of Pelindo I. 7. Agreement between PT Pelindo I and PT Seirama Laju regarding Cooperation in Land Use at IKD II Location (Beside PT AKR). 8. Agreement between PT Pelindo and PT Inti Indosawit Subur regarding Cooperation in Utilization of PT Pelindo's 009 Warehouse; and 9. Agreement between PT Pelindo and PT Ivo Mas Tunggal regarding Cooperation in Utilization of PT Pelindo's 010 Warehouse.	
REGIONAL 2				
Program pemasaran Terminal Kijing dengan hasil berupa *Memorandum of Understanding* (MoU)/*Letter of Intent* (LOI)/*Head Of Agreement* (HOA) dengan potensial *customer*/mitra Kijing Terminal marketing program resulting in Memorandum of Understanding (MoU)/Letter of Intent (LOI)/ Head Of Agreement (HOA) with potential customers/partners	*customer*/ mitra	5	10	200%
Pelaksanaan *customer visit* pelanggan eksisting dan potensial di lingkungan Regional 2 Customer visits to existing and potential customers in Regional 2	*customer*/mitra	72	115	160%
REGIONAL 3				
Customer Visit	Freq	432	415	96%
Customer Gathering/Sharing Session	Freq	2	2	100%
Kerja sama pengangkutan FAME dari TUKS PT Wilmar Nabati Indonesia di Gresik ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Cooperation in transporting FAME from PT Wilmar Nabati Indonesia's TUKS in Gresik to Tanjung Perak Port, Surabaya.	Rp miliar Rp billion	66	66,8	101%
Kerja sama pengelolaan TUKS milik PT Semen Indonesia (Persero) di Gresik. Cooperation in the management of TUKS owned by PT Semen Indonesia (Persero) in Gresik.	Rp miliar Rp billion	27,5	32,7	119%
Kerja sama kegiatan fumigasi dengan anggota DPD ASPPHAMMI Jawa Tengah di Tanjung Emas. Cooperation in the fumigation activities with members of the Central Java ASPPHAMMI DPD in Tanjung Emas.	Rp miliar Rp billion	2	3,9	196%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison of Marketing Targets and Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
REGIONAL 4				
Optimalisasi lahan dan bangunan di Pelabuhan Makassar Optimization of land and buildings in Makassar Port	-	*Cargo Consilidation and Distribution Center* (CCDC) dan *Buffer* Zone Diterapkan 100% Cargo Consilidation and Distribution Center (CCDC) and Buffer Zones Implemented 100%	Telah diterapkan sistem CCDC dan *Buffer Zone* 100% CCDC and Buffer Zone systems have been implemented100%	100%
Implementasi Hubungan Pelanggan Customer Relations Implementation	-	Penetapan *Key Customer* Petikemas (Key Account Management/KAM) Determination of Key Container Customers Key Account Management (KAM)	Telah ditetapkan 5 *Key Customer* Petikemas. 5 Key Container Customers have been determined	100%
Komersialisasi dan kerja sama pada Pelabuhan Garongkong Commercialization and cooperation at Garongkong Port	-	Penyampaian Proposal Kerja Sama Pengelolaan (KSP) Submission of KSP Proposals	Telah disampaikan proposal KSP kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Garongkong KSP proposal has been submitted to KUPP Class II Garongkong	100%

REGIONAL 1

Terdapat 3 (tiga) kompetitor BUP pemanduan dan penundaan yang berada disekitar Wilayah Kerja Pelabuhan Dumai Regional 1 yang menimbulkan adanya kemungkinan agen pelayaran disekitar wilayah kerja bekerjasama dengan BUP lain. Kerja sama yang dilakukan secara B to B dengan agen pelayaran diharapkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan pelayanan pemanduan dan penundaan yang dilakukan di wilayah Lubuk Gaung sebagaimana saat ini yang telah berjalan dengan agen pelayaran lain.

Dengan adanya BUP kompetitor ini, Regional 1 tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik agar pangsa pasar yang selama ini sudah diraih dapat dipertahankan. Adapun strategi yang harus dilakukan untuk dapat bersaing dengan para kompetitor adalah meningkatkan kualitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana pemanduan dan penundaan,serta membina hubungan yang baik dengan Pemilik TUKS maupun para pengguna jasa serta KSOP sebagai Regulator.

REGIONAL 2

Pembangunan Terminal Kijing merupakan salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan beroperasi untuk tahap 1 pada akhir tahun 2021. Dalam rangka mendukung pengoperasian tersebut, Regional 2 berupaya dalam memasarkan Terminal Kijing dengan melakukan pendekatan kepada potensial *customer*/mitra baik komoditi petikemas maupun non-petikemas. Pada tahun 2021 telah berhasil mencapai kesepakatan berupa LoI/MoU/HoA dengan 10 *customer*/mitra dari target 5 *customer*/mitra yang merupakan potensial *customer* komoditi curah kering dan curah kering.

REGIONAL 1

There are 3 (three) BUP pilotage and towing competitors located around the Dumai Regional 1 Port Work Area which raises the possibility of shipping agents around the work area collaborating with other BUPs. The cooperation carried out on a B to B basis with shipping agents is expected to provide a significant contribution to the pilotage and towing services revenue carried out in the Lubuk Gaung area as is currently running with other shipping agents.

With these BUP competitors, Regional 1 remains committed to providing the best service so that the market share that has been achieved to date can be maintained. The strategy that must be carried out to compete against the competitors is to improve the quality of HC and complete the infrastructure for scouting and towing facilities, as well as foster good relationships with TUKS Owners and service users and KSOP as the Regulator.

REGIONAL 2

The construction of the Kijing Terminal, as part of the National Strategic Project (PSN), was targeted to operate for phase 1 by the end of 2021. To support its operations, Regional 2 marketed the Kijing Terminal by approaching potential customers/partners, for container and non-container commodities. In 2021, we reached an agreement in the form of LoI/MoU/HoA with 10 customers/partners from a target of 5 customers/partners identified as potential customers for dry bulk and dry bulk commodities.

Sebagai bagian dari kegiatan pemasaran juga telah dilaksanakan *customer visit* untuk menangkap informasi peluang bisnis dan kebutuhan pasar serta meningkatkan kualitas layanan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Selama tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 115 visit ke pelanggan eksisting maupun potensial di 12 cabang pelabuhan Regional 2 baik secara *online* maupun *offline* dengan capaian 160% dari yang ditargetkan.

As part of marketing activities, customer visits were carried out to gain information on business opportunities and market needs and improve service quality to maintain customer satisfaction. During 2021, 115 online and offline visits to existing and potential customers were carried out at 12 Regional 2 port branches reaching 160% of the target.

REGIONAL 3

Regional 3 telah melaksanakan kegiatan *customer visit* dan *customer gathering/sharing session* dengan para pelanggan dalam upaya untuk meningkatkan pangsa pasar, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Selama tahun 2021, kegiatan *customer visit* telah dilaksanakan sebanyak 415 kunjungan ke pelanggan dimasing-masing sub regional baik secara *offline* dan *online*. Pelaksanaan kegiatan ini cukup terpengaruh oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga realisasinya hanya sebesar 96% dari target yang telah ditetapkan. Selain itu, selama tahun 2021 juga diadakan kegiatan *customer gathering/sharing session* dengan melibatkan para *prime customer* di Regional 3. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) kali dengan pelaksanaan bertempat di Bali.

REGIONAL 3

Regional 3 conducted customer visits and customer gatherings/sharing sessions with customers in an effort to increase market share, service quality, and customer satisfaction. During 2021, 415 customer visits were carried out in each sub-region both offline and online. This activity was affected by the COVID-19 pandemic so the realization was only 96% of the set target. In 2021 there were customer gatherings/sharing sessions involving prime customers in Regional 3. This activity was held twice with the events taking place in Bali.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan produk/layanan, Regional 3 juga telah melakukan sinergi BUMN maupun bekerja sama dengan instansi Pemerintah dan pihak swasta, seperti:

1. Regional 3 bekerja sama dengan Pertamina Group dan juga PT Wilmar Nabati Indonesia untuk melakukan perubahan moda pengangkutan *Fatty Acid Methyl Esther* (FAME) dari menggunakan truk tangki menjadi kapal dalam rangka efisiensi biaya dan waktu. FAME tersebut digunakan sebagai komponen campuran pada bahan bakar jenis solar (B0) untuk memproduksi biodiesel oleh Pertamina. Dalam kerja sama tersebut, Regional 3 menyediakan paket layanan terintegrasi untuk pengiriman FAME dari BUBBN Wilmar di Gresik melalui moda angkutan kapal laut, pelayanan jasa kepelabuhanan di Terminal Mirah, hingga penyaluran melalui pipa dari dermaga di Terminal Mirah sampai dengan IT (*Integrated Tank*) Pertamina di Tanjung Perak;
2. Regional 3 dan PT Semen Indonesia (Persero) melakukan kerja sama pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) milik PT Semen Indonesia (Persero) di Gresik dalam rangka meraih *customer/market* khususnya komoditi batubara karena keterbatasan fasilitas dermaga untuk sandar kapal di Gresik. Adapun manfaat atas kerja sama dimaksud bagi TUKS Semen Indonesia adalah peningkatan utilisasi penggunaan dermaga dan produktivitas bongkar/muat, serta peningkatan pendapatan bagi Regional 3 maupun PT Semen Indonesia (Persero) di Gresik; dan
3. Kerja sama pelaksanaan kegiatan fumigasi dengan anggota DPD ASPPHAMMI Jawa Tengah di Tanjung Emas merupakan program pengembangan usaha guna mendukung meningkatnya geliat ekspor industri pertanian di Jawa Tengah. Kerja sama ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang selaku regulator dan juga sebagai Unit Pelayanan Teknis Badan Karantina Pertanian di Kementerian Pertanian, dengan tugas pokok dan fungsi mencegah masuk,

In addition, for developing products/services, Regional 3 also carried out SOE synergies and collaborated with government agencies and private parties, including:

1. Regional 3 cooperated with Pertamina Group and PT Wilmar Nabati Indonesia to change the mode of transportation of Fatty Acid Methyl Esther (FAME) from using tanker trucks to ships for cost and time efficiencies. FAME is used as a component in the mixture of diesel fuel (B0) to produce biodiesel by Pertamina. In this cooperation, Regional 3 provided an integrated service package for the delivery of FAME from BUBBN Wilmar in Gresik using ship transportation, port services at Mirah Terminal, with pipe distribution from the Mirah Terminal wharf to Pertamina's IT (Integrated Tank) in Tanjung Perak;
2. Regional 3 and PT Semen Indonesia (Persero) cooperated to manage the TUKS owned by PT Semen Indonesia (Persero) in Gresik in order to reach customers/markets, especially coal commodities due to limited facilities to dock ships in Gresik. The benefits of this collaboration for Semen Indonesia TUKS were to increase utilization of dock usage and loading/unloading productivity, as well as to increase revenue for Regional 3 and PT Semen Indonesia (Persero) in Gresik; and
3. Cooperation in fumigation activities with members of the Central Java ASPPHAMMI DPD in Tanjung Emas was a business development program to support the increase in exports from the agricultural industry in Central Java. This collaboration was carried out in coordination with the Semarang Class I Agricultural Quarantine Center as the regulator, and also the Technical Service Unit of the Agricultural Quarantine Agency at the Ministry of Agriculture,

tersebarnya dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Hal ini guna mendukung peningkatan daya saing produk pertanian dan pemberdayaan ekonomi rakyat dan membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis *sanitary* and *phytosanitary* dari negara tujuan ekspor. Saat ini, Regional 3 di Cabang Pelabuhan Tanjung Emas telah menjalin kerja sama dengan 4 *fumigator* dengan menyediakan lapangan petikemas sebagai tempat kegiatan fumigasi di lini 2.

with the main task and function to prevent the entry, spread and release of Quarantine Animal Disease Pests (HPHK) and Quarantined Plant Destruction Organisms. (OPTK). This is to support the increased competitiveness of agricultural products and to empower the people's economy and assist agricultural businesses in meeting the technical sanitary and phytosanitary requirements from export destination countries. Currently, Regional 3 at the Tanjung Emas Port Branch has collaborated with 4 fumigators by providing a container field as a place for fumigation activities in line 2.

REGIONAL 4

Pemanfaatan lahan (lapangan penumpukan petikemas) di Regional 4 Makassar merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset milik perusahaan. Pemanfaatan lahan dilaksanakan dengan melakukan kerja sama antara Regional 4 Makassar dengan Regional 4 Terminal Petikemas Makassar, dengan membagi pemanfaatan lahan menjadi 2 (dua) area yaitu area CCDC dan *Buffer Zone*. Skema kerja sama dengan menerapkan yakni sistem bagi hasil dengan persentase sesuai dengan BA Kesepakatan.

REGIONAL 4

Utilization of land (container stacking fields) in Regional 4 Makassar is a strategic step towards optimizing the Company's assets. Land use is carried out in collaboration between Regional 4 Makassar and Regional 4 Makassar Container Terminal, by dividing land use into 2 (two) areas, as a CCDC area and a Buffer Zone. The cooperation scheme involves a profit sharing system with a percentage in accordance with the BA Agreement.

Untuk memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan utama, maka Regional 4 telah menetapkan 5 *Key Costumer* (KAM) segmen pelayanan petikemas yang merupakan pelanggan dengan kontribusi terbesar pada aspek pendapatan dan trafik petikemas yakni PT SPIL, PT Meratus, PT Temas, PT Tanto, dan PT Caraka Tirta Perkasa. Program KAM ini juga merupakan salah satu inisiatif yang disusun pada saat *merger* PT Pelindo (Persero) di mana telah disusun *draft* Peraturan Direksi terkait pengelolaan KAM terintegrasi.

To provide optimal service to key customers, Regional 4 established 5 Key Customer (KAM) container service segments for customers with the largest contribution to the revenue and container traffic aspects, namely PT SPIL, PT Meratus, PT Temas, PT Tanto, and PT Caraka. Mighty Tirta. This KAM program was one of the initiatives prepared at the time of the merger of PT Pelindo (Persero), with a draft of the Board of Directors' Regulation for the management of integrated KAM being prepared.

Untuk pengembangan dan peningkatan kinerja di Pelabuhan Garongkong, Regional 4 telah mengajukan proposal untuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) kepada KUPP Kelas II Garongkong. Saat ini *progress* pengajuan kerja sama sudah pada tahap penawaran dan ditargetkan selesai tanggal 7 April 2022.

For the development and performance improvement at the Garongkong Port, Regional 4 submitted a proposal for Utilization Cooperation (KSP) at the KUPP Class II Garongkong. Currently, the proposal for cooperation is at the bidding stage and is targeted for completion on April 7, 2022.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Realisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pelindo untuk induk perusahaan, *subholding,* dan Entitas Anak pada tahun 2021 mencapai 25.795 orang atau 95,71% dari RKAP 2021. Sementara itu, realisasi jumlah pegawai untuk induk perusahaan mencapai 10.988 orang atau 87,21% dari RKAP 2021. Realisasi jumlah pegawai Entitas Anak mencapai 14.043 orang atau 97,86% dari RKAP 2021.

COMPARISON OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT TARGET AND REALIZATION

Pelindo's Human Capital (HC) for the parent company, subholding, and subsidiaries in 2021 reached 25,795 people or 95.71% of the 2021 RKAP. The number of employees in the parent company was 10,988 people or 87.21% of the 2021 RKAP. The number of employees in the subsidiaries was 14,043 people or 97.86% of the 2021 RKAP.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sumber Daya Manusia (dalam satuan Orang)
Comparison of Human Capital and Realization (in People)

No	Perusahaan Company	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization	Tren Trend	Pencapaian Achievement
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)	(5)=(3)/(2)*100%
1	**Posisi Organik** Organic Position				
	Induk Perusahaan (a) Parent Company (a)	6.141	5.205	(936)	84,76
	Induk-dalam penugasan ke *Subholding* (b) Parent-on assignment to Subholding (b)	-	650	-	-
	Induk-dalam penugasan ke Entitas Anak (c) Parent-on assignment to Subsidiaries (c)	1.477	1.515	38	102,57
	Sub Total Organik Induk Perusahaan **Parent Company Organic Sub Total**	**7.618**	**7.370**	**(248)**	**96,74**

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sumber Daya Manusia (dalam satuan Orang)
Comparison of Human Capital and Realization (in People)

No	Perusahaan Company	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization	Tren Trend	Pencapaian Achievement
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)	(5)=(3)/(2)*100%
	Organik *Subholding* (d)	-	8	8	-
	Organik Entitas Anak (e) Subsidiary Organic (e)	2.966	2.731	(235)	92,08
	Total Pegawai Organik **Total Organic Employees**	**10.584**	**10.109**	**(475)**	**95,51**
2	**Posisi Non Organik, Organik Pemegang Sahama Lainnya dan BOD Non-Pelindo** Non-Organic, Other Shareholders' Organic and Non-Pelindo BOD Positions				
	Induk Perusahaan (f) Parent Company (f)	6.459	5.783	(676)	89,53
	Subholding (g)	-	106	-	-
	Non-Organik Non-Organic	-	88	-	-
	Organik Pemegang Saham Lainnya Other Shareholder Organic	-	-	-	-
	BOD Non-Pelindo Non Pelindo BOD	-	18	-	-
3	**Entitas Anak (i)** Subsidiaries (i)	9.907	9.797	110	98,89
	Non-Organik Non-Organic	9.884	9.762	(122)	98,77
	Organik Pemegang Saham Lainnya Other Shareholder Organic	5	12	7	240,00
	BOD Non-Pelindo Non-Pelindo BOD	18	23	5	127,78
	Total Pegawai Non-Organik (i + j) **Total Non-Organic Employees (i + j)**	**16.366**	**15.792**	**(574)**	**96,49**
4	**Jumlah Pegawai Induk Perusahaan (a + f)** **Total Parent Company Employees (a + f)**	**12.600**	**10.988**	**(1.612)**	**87,21**
5	**Jumlah *Subholding* (b) + (d) + (g)** **Total Subholding (b) + (d) + (g)**	**-**	**764**	**-**	**-**
6	**Jumlah Entitas Anak (c + e + j)** **Total Subsidiaries (c + e + j)**	**14.350**	**14.043**	**(307)**	**97,86**
7	**Total (4) + (5) + (6)** **Total (4) + (5) + (6)**	**26.950**	**25.795**	**(1.155)**	**95,71**

Keterangan:

Data di atas tidak memperhitungkan pegawai organik anak Perusahaan yaitu PT Jakarta International Container Terminal, PT Menara Maritim Indonesia, PT Terminal Petikemas Indonesia dan PT Rusah Sakit Pelabuhan yang disesuaikan dengan pencatatan keuangan.

Note:

The data above does not take into account the organic employees of the subsidiaries: PT Jakarta International Container Terminal, PT Menara Maritim Indonesia, PT Terminal Petikemas Indonesia dan PT Rusah Sakit Pelabuhan that are adjusted to the financial records.

PROYEKSI/TARGET KE DEPAN

ASUMSI DALAM MENYUSUN PROYEKSI 2022

Dalam penyusunan proyeksi tahun 2022, Pelindo menggunakan beberapa asumsi dasar makro antara lain sebagai berikut:

FUTURE PROJECTIONS/TARGETS

ASSUMPTIONS FOR THE 2022 PROJECTIONS

When preparing the 2022 projections, Pelindo used several basic macro assumptions, including the following:

Tabel Asumsi Dasar Makro
Basic Macro Assumptions

Indikator Indicator	Asumsi Makro Ekonomi 2022 Macroeconomic Assumptions for 2022
Pertumbuhan ekonomi Economic growth	5,0% - 5,5 %
Tingkat inflasi Inflation rate	3,0%
Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun 10 Year Government Securities (SBN)	6.82%
Kurs Rupiah per USD Indonesian Rupiah to USD exchange rate	Rp14.350
Harga minyak mentah Crude oil price	63 USD per barel

Sumber:
Surat Kementerian BUMN No.S-787/MBU/10/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022.

Source:
The Ministry of SOEs Letter No.S-787/MBU/10/2021 dated October 8, 2021 concerning Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of the Company's 2022 Work Plan and Budget.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, Pelindo menyusun proyeksi untuk tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

Based on the above assumptions, Pelindo projections for 2022 are as follows.

PROYEKSI PRODUKSI TAHUN 2022

Uraian proyeksi produksi tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

PRODUCTION PROJECTION FOR 2022

The production projection for 2022 is presented as follows.

Tabel Proyeksi Produksi
Production Projection Table

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2022 2022 Projection
Arus Kapal Ship Traffic	Unit	258.951
	Ribu GT	1.271.376
Arus Barang Goods Traffic	Ribu Ton	144.330
Arus Petikemas Container Traffic	Ribu Box	13.344
	Ribu Teus	17.250
Arus Penumpang Passenger Traffic	Ribu Orang	7.017

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2022

Uraian proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

FINANCIAL PROJECTIONS FOR 2022

The projections for the 2022 Consolidated Statement of Financial Position are as follows.

Tabel Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam juta Rupiah)
Consolidated Statement of Financial Position Projection (in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2022 2022 Projection
POSISI KEUANGAN FINANCIAL POSITION	
Aset lancar Current assets	21.275.007
Aset tidak lancar Non-current assets	91.250.848

Tabel Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam juta Rupiah)
Consolidated Statement of Financial Position Projection (in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2022 2022 Projection
Jumlah aset Total assets	112.525.855
Liabilitas jangka pendek Short-term liabilities	10.635.024
Liabilitas jangka panjang Long-term liabilities	56.256.957
Jumlah liabilitas Total liabilities	66.891.981
Ekuitas Equity	45.633.874
LABA RUGI PROFIT AND LOSS	
Pendapatan Usaha Operating revenues	30.382.587
Pendapatan Konstruksi Construction revenues	4.150.136
Laba Usaha Income from operations	6.934.307
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	5.124.387
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	4.718.951
Laba Periode Berjalan Income for the Period	3.900.591
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan Total Comprehensive Income for the Period	3.475.409
RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS	
Rasio Kas Cash Ratio	1,42
Rasio Lancar Current Ratio	2,00
BOPO	77,18
EBITDA	10,59
EBITDA Margin	35,23
Debt to Equity Ratio (DER)	1,00
Total Assets to Total Debt	2,59

PROYEKSI STRUKTUR MODAL TAHUN 2022

Uraian proyeksi struktur modal tahun 2022 disajikan sebagai berikut

CAPITAL STRUCTURE PROJECTION FOR 2022

The projections for capital structure in 2022 areas follows

Tabel Proyeksi Struktur Modal (dalam juta Rupiah)
Capital Structure Projection (in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2022 2022 Projection
(1)	(2)
Liabilitas Jangka Pendek Current liabilities	10.635.024
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current liabilities	56.256.957
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	66.891.981
Jumlah Ekuitas Total Equity	45.633.874

Tabel Proyeksi Struktur Modal (dalam juta Rupiah)
Capital Structure Projection (in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2022 2022 Projection
(1)	(2)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	112.525.855

PROYEKSI KEBIJAKAN DIVIDEN TAHUN 2022

Kebijakan dividen didasarkan pada pemenuhan kepentingan Pemegang Saham serta rencana pengembangan usaha. Keputusan penentuan besaran dividen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Pada tahun 2022, Pelindo berencana membagikan dividen atas laba tahun buku 2021 sebesar Rp1.316,85 miliar. Besarnya pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2022, penentuan nilai dividen 2022 sebesar 40% dari laba atau senilai Rp1.316,85 miliar dilakukan saat pembahasan Pra RUPS.

DIVIDEND POLICY PROJECTION FOR 2022

The dividend policy is based on fulfilling the interests of the Shareholders as well as the business development plan. The decision to determine the amount of dividends is made at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM). In 2022, Pelindo plans to distribute dividends amounting to Rp1,316.85 billion for the fiscal year 2021 profit. The amount of cash dividend payments will be made after approval at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), the determination of the 2022 dividend of 40% of profits or Rp1,316.85 billion was carried out during a Pre-GMS discussion.

PROYEKSI PEMASARAN TAHUN 2022

Uraian proyeksi pemasaran tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

MARKETING PROJECTIONS FOR 2022

The marketing projections for 2022 are as follows.

Tabel Proyeksi Pemasaran
Marketing Projection

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2022 2022 Projection
(1)	(2)	(3)
REGIONAL 1		
Adanya MoU/kerjasama baru pemasaran minimal 2 (dua) buah dan pengelolaan properti minimal 2 (dua) buah. The existence of MoU/new cooperation for marketing of at least 2 (two) units and property management of at least 2 (two) units.	MoU/Kerjasama MoU/Cooperation	4
Adanya perpanjangan kerjasama pemasaran minimal sebanyak 5 (lima) buah dan pengelolaan properti minimal sebanyak 8 (delapan) buah. There is an extension of marketing cooperation of at least 5 (five) units and property management of at least 8 (eight) units.	MoU/Kerjasama MoU/Cooperation	13
REGIONAL 2		
Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di Pelabuhan Manggar, Belitung Timur Piloting and Towing Services at Manggar Harbor, East Belitung	GT	81.600
Kerja sama Pelayanan Pemanduan dan Penundaan dengan PT Pertamina di Pelabuhan Banten dan Cirebon Cooperation in Piloting and Towing Services with PT Pertamina in Banten and Cirebon Ports	Rp miliar Rp billion	67,12
REGIONAL 3		
Kerja sama Pengangkutan FAME dari TUKS PT Wilmar Nabati Indonesia di Gresik ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Cooperation in Transporting FAME from the TUKS of PT Wilmar Nabati Indonesia in Gresik to the Port of Tanjung Perak, Surabaya.	Rp miliar Rp billion	68
Kerja sama Pengelolaan TUKS Sriboga melalui Tanjung Emas Semarang. Cooperation in the Management of TUKS Sriboga through Tanjung Emas Semarang.	Rp miliar Rp billion	12,8
Kerja sama Pelayanan Bongkar Muat Raw Sugar PT Kebon Agung di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Cooperation in PT Kebon Agung's Raw Sugar Unloading Service at Tanjung Emas Port, Semarang.	Rp miliar Rp billion	2,4
Kerja sama Pelayanan Bongkar Kayu Log PT Setia Indo Putra di Tanjung Emas Semarang. Cooperation in PT Setia Indo Putra Log Unloading Service at Tanjung Emas Semarang.	Rp juta Rp million	900
Kerja sama Bongkar Muat Curah Cair BBM dengan PT AKR di Pelabuhan Benoa. Cooperation in loading and unloading of BBM Liquid Bulk with PT AKR at Benoa Harbor.	Rp juta Rp million	750

Tabel Proyeksi Pemasaran
Marketing Projection

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2022 2022 Projection
(1)	(2)	(3)
Kerja sama bongkar muat dengan PT Muria Sumba Manis di Pelabuhan Waingapu. Cooperation in loading and unloading with PT Muria Sumba Manis at the Waingapu Port.	Rp miliar Rp billion	3,2
REGIONAL 4		
Implementasi *Centrillized Ticketing Teminal* (CTT) *System* pada terminal penumpang Implementation of a Centrillized Ticketing Terminal (CTT) System at the passenger terminal	Cabang Branch	20
Optimalisasi Gudang Regional 4 Makassar Optimization of Regional Warehouse 4 Makassar	Rp juta Rp million	700
Penjajakan rencana kerja sama baru dengan mitra kerja yaitu *dry port* di Sidrap dan *dry port* di Jeneponto Exploration of new cooperation plans with partners, namely dry port in Sidrap and dry port in Jeneponto	*Dry port*	2

REGIONAL 1

Proyeksi pemasaran Regional 1 di tahun 2022 adalah melakukan kerjasama:

1. Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di Terminal Khusus (Tersus) Anoa Natuna Perairan Lepas Pantai Natuna Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dengan *Premier Oil* Natuna Sea B.V. di Cabang Pelabuhan Batam; dan
2. Pemasaran Jasa Pelayanan Penundaan Kapal Pada Terminal Khusus Lubuk Gaung Dumai dengan PT Wasaka Indonesia Jaya di Cabang Pelabuhan Dumai.

Proyeksi pengelolaan properti Regional 1 di tahun 2022 adalah melakukan MOU/perjanjian kerjasama baru dan perpanjangan kerjasama yang diuraikan sebagai berikut:

1. MOU/Perjanjian Kerjasama Baru
   a. Perjanjian kerjasama baru pemanfaatan Gedung A GPS dengan *subholding* SPMT; dan
   b. Perjanjian kerjasama baru sewa lahan untuk kegiatan bongkar muat batubara di Cabang Tembilahan.
2. Perpanjangan Kerjasama
   a. Perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT Bank Negara Indonesia di Gedung B Grha Pelindo Satu;
   b. Perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan ruangan dengan PT Prima Pengembangan Kawasan di Gedung B Grha Pelindo Satu;
   c. Perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT SAN/KPBN luas 25.353,7 m^2 di Cabang Belawan;
   d. Perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT SAN/KPBN luas 6.777 m^2 di Cabang Belawan;
   e. Perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT Wilmar Nabati Indonesia luas 27.827,63 m^2 di Cabang Dumai;
   f. Perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT Wilmar Nabati Indonesia luas 6.167,91 m^2 di Cabang Dumai.

REGIONAL 1

Regional 1 marketing projections in 2022 are to collaborate:

1. Pilotage and towing Services at the Anoa Natuna Special Terminal (Tersus) in the Natuna Offshore Waters, Anambas Islands Regency, Riau Islands Province with Premier Oil Natuna Sea B.V. at Batam Port Branch; and
2. Marketing Towing Services at the Lubuk Gaung Dumai Special Terminal with PT Wasaka Indonesia Jaya at the Dumai Port Branch.

The Regional 1 property management projection for 2022 is to enter into new MOU/cooperation agreements and cooperation extensions as described belowllows:

1. MOU/New Cooperation Agreement
   a. New cooperation agreement for the use of A GPS Building with SPMT subholding; and
   b. New cooperation agreement for lease land for coal loading and unloading activities at the Tembilahan Branch.
2. Extension Cooperation
   a. Extension of the land use cooperation agreement with PT Bank Negara Indonesia in B Grha Pelindo Satu Building.
   b. Extension cooperation agreement for the use of space with PT Prima Kawasan Pembangunan in B Grha Pelindo Satu Building;
   c. Extension of the land use cooperation agreement with PT SAN/KPBN covering an area of 25,353.7 m^2 in the Belawan Branch;
   d. Extension of the land use cooperation agreement with PT SAN/KPBN covering an area of 6,777 m^2 in the Belawan Branch.
   e. Extension of the land use cooperation agreement with PT Wilmar Nabati Indonesia covering an area of 27,827.63 m^2 in Dumai Branch;
   f. Extension of the land use cooperation agreement with PT Wilmar Nabati Indonesia covering an area of 6,167.91 m^2 in Dumai Branch.

g. Perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT Komet Infra Nusantara di Cabang Tembilahan.; dan
h. Perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT Jui Shin Indonesia di Cabang Malahayati.

REGIONAL 2

Untuk proyeksi pemasaran Regional 2 di tahun 2022 terdapat 2 (dua) potensi peningkatan pangsa pasar yaitu:

1. Peningkatan pendapatan melalui optimalisasi pelimpahan Pelayanan Pemanduan Regional 2 Tanjung Pandan melalui ekspansi layanan pemanduan di Pelabuhan Manggar, Belitung Timur. Potensi pasar di Pelabuhan Manggar cukup besar karena terdapat beberapa TUKS yang beroperasi di kawasan tersebut; dan
2. Sebagai bentuk sinergi antar BUMN, Regional 2 telah bekerja sama dengan PT Pertamina dalam layanan pemanduan dan penundaan di beberapa cabang seperti Cirebon dan Banten. Pada tahun 2022 untuk optimalisasi kerja sama, maka akan dilaksanakan secara terpusat melalui perjanjian induk antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pertamina.

REGIONAL 3

Proyeksi pemasaran Regional 3 di tahun 2022 adalah melakukan kerja sama yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kerja sama Pengangkutan FAME dari TUKS PT Wilmar Nabati Indonesia di Gresik ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
2. Kerja sama Pengelolaan TUKS Sriboga melalui Tanjung Emas Semarang;
3. Kerja sama Pelayanan Bongkar Muat *Raw Sugar* PT Kebon Agung di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;
4. Kerja sama Pelayanan Bongkar Kayu Log PT Setia Indo Putra di Tanjung Emas Semarang;
5. Kerja sama Bongkar Muat Curah Cair BBM dengan PT AKR di Pelabuhan Benoa; dan
6. Kerja sama bongkar muat dengan PT Muria Sumba Manis di Pelabuhan Waingapu.

REGIONAL 4

Proyeksi pemasaran Regional 4 di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Pelabuhan MNP sebagai hub (Penghubung) membutuhkan *spoke* (pengumpul) yang menghubungkan *system logistic* di daerah. Pembangunan *dry port* di Kabupaten Jeneponto untuk wilayah selatan dan Kabupaten Sidrap untuk wilayah utara diharapkan menjadi *spoke* (pengumpul). Dengan demikian untuk mengembangkan bisnis Perusahaan, Regional 4 rencana akan membangun *dry port* di lokasi tersebut;
2. Optimalisasi Gudang 105 di Regional 4 Makassar seluas 3.800 m^2 akan dikerjasamakan dengan mitra yang diharapkan akan dapat memberi tambahan kontribusi pendapatan Perusahaan;
3. Program CTT diharapkan dapat meningkatkan *level of service* pada terminal penumpang dengan menyajikan laporan embarkasi dan debarkasi penumpang secara *online* sehingga dapat diakses secara *real time* yang lebih akurat dan detail.

g. Extension of the land use cooperation agreement with PT Komet Infra Nusantara at the Tembilahan Branch; and
h. Extension of the land use cooperation agreement with PT Jui Shin Indonesia at the Malahayati Branch.

REGIONAL 2

From Regional 2 marketing projections in 2022, there are 2 (two) potential increases in market share, namely:

1. Increased revenue by optimizing the delegation of Regional 2 Tanjung Pandan Guidance Services by expanding the piloting services at Manggar Port, East Belitung. The market potential at Manggar Port is large as there are several TUKS operating in the area; and
2. As a form of synergy between SOEs, Regional 2 has collaborated with PT Pertamina in the piloting and towing services in several branches such as Cirebon and Banten. In 2022 to optimize cooperation, this system will be implemented centrally through a master agreement between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Pertamina.

REGIONAL 3

Regional 3 marketing projections in 2022 are as follows:

1. Cooperation in Transporting FAME from the TUKS of PT Wilmar Nabati Indonesia in Gresik to the Port of Tanjung Perak, Surabaya;
2. Cooperation in the Management of TUKS Sriboga through Tanjung Emas Semarang;
3. Cooperation in PT Kebon Agung's Raw Sugar Unloading Service at Tanjung Emas Port, Semarang;
4. Cooperation in PT Setia Indo Putra's Log Unloading Services in Tanjung Emas Semarang;
5. Cooperation in loading and unloading of BBM Liquid Bulk with PT AKR at Benoa Harbor; and
6. Cooperation in loading and unloading with PT Muria Sumba Manis at the Waingapu Port.

REGIONAL 4

Regional 4 marketing projections in 2022 are as follows:

1. To support MNP Port as a hub a spoke (collector) is required that connects the logistics system in the region. The construction of dry ports in Jeneponto Regency for the southern region and Sidrap Regency for the northern region is expected to be the spoke (collector). Thus, to develop the Company's business, Regional 4 plans to build a dry port in these locations;
2. Optimization of Warehouse 105 in Regional 4 Makassar with an area of 3,800 m^2 in collaboration with partners is expected to contribute to the Company's revenue;
3. The CTT program is expected to increase the level of service at the passenger terminal by presenting more accurate and detailed passenger embarkation and disembarkation reports online so that they can be accessed in real time.

PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2022

Uraian proyeksi pengembangan SDM tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

HC DEVELOPMENT PROJECTION IN 2022

The HC development projections in 2022 are as follows.

Tabel Proyeksi Sumber Daya Manusia (dalam satuan Orang)
Human Capital Projection (in People)

No	Perusahaan Company	Proyeksi RKAP 2022 2022 RKAP Projection
1	**Posisi Organik** Organic Position	
	Induk Perusahaan (a) Parent Company (a)	4.272
	Induk-dalam penugasan ke Entitas Anak dalam Regional (b) Parent-on assignment to Subsidiaries in Regional (b)	-
	Induk - dalam penugasan ke *Subholding* (c) Parent-on assignment to Subholding (c)	2.933
	Induk - dalam penugasan ke Entitas Anak Lainnya (d) Parent-on assignment to Subsidiaries (d)	63
	Sub Total Organik Induk Perusahaan (a) + (b) + (c) + (d) Sub Total Parent Company Organic (a) + (b) + (c) + (d)	7.268
	Organik Entitas Anak pada Regional (e) Subsidiary Organic in Regional (e)	-
	Organik Entitas Anak pada *Subholding* (f) Subsidiary Organic in Subholding (f)	2.303
	Organik Entitas Anak pada Lainnya (g) Subsidiary's Organic in Others (g)	641
	Jumlah Pegawai Organik (a+b+c+d+e+f+g) Total Organic Employees (a+b+c+d+e+f+g)	10.610
2	**Posisi Non-Organik** Non-Organic Position	
	Induk Perusahaan (h) Parent Company (h)	5.467
	PKWT (h.1)	-
	Tenaga Alih Daya (h.2) Outsourcing (h.2)	5.467
	Entitas Anak dalam Regional (i) = (i1) + (i2) + (i3) Subsidiaries in Regional (i) = (i1) + (i2) + (i3)	-
	Non-Organik (i1) Non-Organic (i1)	-
	PKWT (i.1.1)	-
	Tenaga Alih Daya (i.1.2) Outsourcing (i.1.2)	-
	Organik Pemegang Saham Lainnya (i2) Other Shareholder Organics (i2)	-
	BOD Non Pelindo (j3) Non Pelindo BOD (j3)	-
	Subholding (j) = (j1) + (j2) + (j3) Subholding (j) = (j1) + (j2) + (j3)	9.295
	Non-Organik (j1) Non-Organic (j1)	9.264
	PKWT (i.1.1)	849
	Tenaga Alih Daya (j.1.2) Outsourcing (j.1.2)	8.415
	Organik Pemegang Saham Lainnya (j2) Other Shareholders Organic (j2)	1
	BOD Non-Pelindo (j3) Non-Pelindo BOD (j3)	30
	Jumlah Pegawai Entitas Anak Lainnya (k) = (k1) + (k2) + (k3) Total Employees of Other Subsidiaries (k) = (k1) + (k2) + (k3)	1.610
	Non-Organik (k1) Non-Organic (k1)	1.601
	PKWT (k.1.1)	699
	Tenaga Alih Daya (k.1.2) Outsourcing (k.1.2)	902
	Organik Pemegang Saham Lainnya (k2) Other Shareholders Organic (k2)	3
	BOD Non-Pelindo (k3) Non-Pelindo BOD (K3)	6
	Jumlah Pegawai Non-Organik (h) + (i) + (j) + (k) **Total Non-Organic Employees (h) + (i) + (j) + (k)**	**16.372**
3	**Jumlah Induk Perusahaan (a + h)** **Total Parent Company (a + h)**	**9.739**
4	**Jumlah Entitas Anak pada Regional (b + e + i)** **Total Subsidiaries in Regional (b + e + i)**	**0**
5	**Jumlah *Subholding* (c + f + j)** **Total Subholding (c + f + j)**	**14.531**
6	**Jumlah Entitas Anak Lainnya (d + g + k)** **Total Other Subsidiaries (d + g + k)**	**2.314**
7	**Total (3) + (4) + (5) + (6)** **Total (3) + (4) + (5) + (6)**	**26.584**

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sehubungan dengan penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") sebagai perusahaan hasil penggabungan pada tanggal 1 Oktober 2021, maka penjelasan kebijakan dividen untuk masing-masing Perseroan disajikan sebagai berikut:

1. **Perseroan (dahulu Pelindo I)**
   Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, laba bersih dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang undang. Pembagian dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan berdasarkan rekomendasi Perseroan;
2. **Perseroan (dahulu Pelindo II)**
   Melaksanakan pembayaran dividen setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Sesuai dengan PMK No. 05/ PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dividen, pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dividen ditetapkan oleh Pemegang Saham. Jumlah dividen yang ditetapkan adalah sebesar persentase tertentu dari laba bersih (setelah pajak) Pelindo II yang diatribusikan kepada Pemegang Saham. Kebijakan dividen yang didasarkan pada pemenuhan kepentingan Pemegang Saham serta rencana pengembangan usaha Pelindo II;
3. **Perseroan (dahulu Pelindo III)**
   Perseroan membagikan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kompetensi inti di bidang jasa pelayanan kepelabuhanan, Pelindo III senantiasa berkomitmen untuk memberikan dividen kepada Pemegang Saham (Kementerian BUMN) serta berupaya memperlancar integrasi logistik dalam upaya mendukung pembangunan dalam lingkup makro ekonomi. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Pengusulan penetapan dividen oleh Perseroan didasarkan pada kepentingan Perseroan dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan, serta rencana investasi; dan
4. **Perseroan (dahulu Pelindo IV)**
   Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI. Penyetoran dividen sepenuhnya menjadi hak Pemerintah. Penentuan besarnya dividen yang disetorkan kepada Pemegang Saham berdasarkan keputusan Kementerian BUMN Selaku RUPS dan kuasa Pemegang Saham.

POLICIES, ANNOUNCEMENTS AND PAYMENT OF DIVIDENDS

DIVIDEND POLICY

In connection with the merger of PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III"), and PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") into PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo II), as the result of the merger on October 1, 2021, the dividend policy for each company is presented as follows:

1. **Company (formerly Pelindo I)**
   In accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia, and the Company's Articles of Association, net profit can be distributed to Shareholders as dividends after a provision for mandatory reserve funds, as required by law. The dividend distribution must be approved by the Shareholders through an Annual General Meeting of Shareholders (GMS resolution) based on the recommendation of the Company;
2. **Company (formerly Pelindo II)**
   The annual payment of dividends was based on a General Meeting of Shareholders (GMS) resolution, in accordance with PMK No. 05/ PMK.02/2013 concerning Procedures for Depositing Non-Tax State Revenue from dividends, dividend payments are made no later than 1 (one) month after the dividend is determined by the Shareholders. The amount of dividends determined will be a certain percentage of Pelindo II's net profit (after tax) attributable to Shareholders. The dividend policy is based on fulfilling the interests of Shareholders and Pelindo II's business development plans;
3. **Company (formerly Pelindo III)**
   The Company distributed dividends to the Government of the Republic of Indonesia as Shareholders based on a General Meeting of Shareholders (GMS) resolution. As a State-Owned Enterprise (SOE) with core competencies in the field of port services, Pelindo III was committed to providing dividends to Shareholders (Ministry of SOEs), and to facilitating logistics integration in an effort to support development in the macroeconomic sphere. The determination of dividends was carried out by the Shareholders in the GMS. The proposal for determining dividends by the Company was based on the interests of the Company after considering business continuity, strategies that will be and are being implemented, as well as investment plans; and
4. **Company (formerly Pelindo IV)**
   The Company is a State-Owned Enterprise (BUMN) whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. The payment of dividends is fully the right of the Government. The determination of dividends to be paid to Shareholders was based on a Ministry of SOEs resolution, as the GMS and proxy of the Shareholders.

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

ANNOUNCEMENT AND PAYMENT OF DIVIDENDS

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun 2020-2021
Announcement and Payment of Dividends for 2020-2021

Uraian Description	2021			
	Perseroan (dahulu Pelindo I) Company (formerly Pelindo I)	Perseroan (dahulu Pelindo II) Company (formerly Pelindo II)	Perseroan (dahulu Pelindo III) Company (formerly Pelindo III)	Perseroan (dahulu Pelindo IV) Company (formerly Pelindo IV)
Dividen Kas (Rp) Cash Dividend (Rp)	-	560.000.000.000	-	-
Dividen Non-Kas Non-Cash Dividend	-	-	-	-
Dividen Kas Per Saham (Rp) Cash Dividend Per Share (Rp)	-	66.076	-	-
Dividen Non-Kas Per Saham Non-Cash Dividend Per Share (Rp)	-	-	-	-
Dividend Pay Out Ratio (%) Dividend Pay Out Ratio (%)	-	47,26%	-	-
Tanggal Pengumuman Announcement Date	16 September 2021 September 16, 2021	10 Mei 2021 May 10, 2021	5 Agustus 2021 August 5, 2021	10 Mei 2021 May 10, 2021
Tanggal Pembayaran Payment Date	-	3 Juni 2021 June 3, 2021	-	-
Tanggal Pembayaran Dividen Non-Kas Non-Cash Dividend Payment Date	-	-	-	-

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2021, tidak terdapat realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Sehingga Pelindo tidak menyajikan informasi yang meliputi total perolehan dana; rencana penggunaan dana; rincian penggunaan dana; saldo dana; dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

Realization of the Use of Public Offering Proceeds

In 2021, there is no realization of the use of funds public offering results. Pelindo does not serve information covering the total acquisition of funds; plan use of funds; details of the use of funds; fund balance; and the date of approval of the GMS/RUPO for changes use of funds.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

MATERIAL INFORMATION CONCERNING INVESTMENTS, EXPANSIONS, BUSINESS MERGERS/CONSOLIDATIONS, DIVESTMENTS, ACQUISITIONS, AND DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

INVESTASI

Uraian investasi jangka pendek dan jangka panjang Pelindo tahun 2020-2021 disajikan sebagai berikut.

INVESTMENTS

Pelindo's short-term and long-term investments in 2020-2021 are as follows.

	2020			
	Perseroan (dahulu Pelindo I) Company (formerly Pelindo I)	Perseroan (dahulu Pelindo II) Company (formerly Pelindo II)	Perseroan (dahulu Pelindo III) Company (formerly Pelindo III)	Perseroan (dahulu Pelindo IV) Company (formerly Pelindo IV)
	60.050.953.594	708.218.661.061	524.815.825.889	83.958.445.763
	-	-	-	-
	35.324	490.446	515.054	26.978
	-	-	-	-
	16,25%	28,84%	25,03%	19,13%
	6 Juli 2020 July 6, 2020	24 Agustus 2020 August 24, 2020	15 Juli 2020 July 15, 2020	6 Juli 2020 July 6, 2020
	26 Agustus 2020 August 26, 2020	30 Juli 2020 31 Agustus 2020 1 Oktober 2020 3 November 2020 July 30, 2020 August 31, 2020 October 1, 2020 November 3, 2020	4 Agustus 2020 4 September 2020 5 Oktober 2020 5 November 2020 August 4, 2020 September 4, 2020 October 5, 2020 November 5, 2020	3 Agustus 2020 August 3, 2020
	-	-	-	-

Tabel Investasi (dalam ribuan Rupiah)
Investment Table (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENT				
Total deposito berjangka Total time deposits	5.718.327.340	10.950.390.500	(5.232.063.160)	(47,78)
Efek yang diperdagangkan Marketable securities	198.633	143.988.718	(143.790.085)	(99,86)
Total	**5.718.525.973**	**11.094.379.218**	**(5.375.853.245)**	**(48,46)**
INVESTASI JANGKA PANJANG LONG TERM INVESTMENT				
Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates	3.109.069.141	3.079.458.527	29.610.614	0,96
Investasi pada penyertaan saham Investment in share of stocks	82.207.761	22.034.000	60.173.761	273,10

Tabel Investasi (dalam ribuan Rupiah)
Investment Table (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi pada surat utang Investment in bonds	560.361.975	416.824.490	143.537.485	34,44
Total	**3.751.638.877**	**3.518.317.017**	**233.321.860**	**6,63**

EKSPANSI

Selama tahun 2021, Pelindo tidak melakukan kegiatan ekspansi.

PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan BUMN *Non-Listed* yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, secara legal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021, di mana PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bertindak sebagai *surviving entity* (perusahaan yang bertahan). Kemudian berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.

DIVESTASI

Selama tahun 2021, Pelindo tidak melakukan kegiatan divestasi.

AKUISISI

Selama tahun 2021, Pelindo tidak melakukan kegiatan akuisisi.

RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Selama tahun 2021, Pelindo tidak melakukan kegiatan restrukturisasi hutang dan modal.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

EXPANSIONS

During 2021, Pelindo did not carry out any expansion activities.

BUSINESS MERGERS/CONSOLIDATIONS

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) are non-listed state-owned companies whose shares are 100% owned by the Ministry of SOEs as shareholders representing the Republic of Indonesia. On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) were merged into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Government Regulation No. 101 of 2021, where PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) acts as the surviving entity. Then based on the Republic of Indonesia Minister of SOEs Letter No. S-756/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Approval of Change of Name, Change of Articles of Association and Company Logo, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to PT Pelabuhan Indonesia (Persero), or abbreviated to Pelindo.

DIVESTMENTS

During 2021, Pelindo did not carry out any divestment activities.

ACQUISITIONS

During 2021, Pelindo did not carry out any acquisition activities.

DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

During 2021, Pelindo did not carry out any debt and capital restructuring activities.

MATERIAL INFORMATION FOR TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

A Material Transaction is a transaction carried out by a public company or controlling company where the transaction value limit is equal to 20% (twenty percent) or more of the equity of the Public Company (Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities).

Lingkup Transaksi:

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dalam:

1. 1 (satu) kali transaksi; atau
2. Suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

Batasan Nilai:

1. Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
2. Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal:
   a. Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
   b. Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
   c. Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
   d. Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).

Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan.

TRANSAKSI AFILIASI

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

Scope of Transactions:

Where the Public Company conducts Material Transactions in:

1. 1 (one) transaction; or
2. A series of transactions for a specific purpose or activity, must comply with the provisions as stipulated in POJK No.17/POJK.04/2020.

Value Limit:

1. A transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the equity of the Public Company;
2. Transactions in the form of acquisitions and disposals of companies or operating segments are categorized as Material Transactions when:
   a. The transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the equity of the Public Company;
   b. The total assets that are the object of the transaction divided by the total assets of the Public Company are equal to or more than 20% (twenty percent);
   c. The net profit of the object of the transaction divided by the net profit of the Public Company is equal to or more than 20% (twenty percent); or
   d. The operating income of the object of the transaction divided by the operating income of the Public Company is equal to or more than 20% (twenty percent).

(3) In the event that the transactions as referred to in (1) and (2) are carried out by a Public Company that has negative equity, the transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 10% (ten percent) or more of the total assets of the Public Company.

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, a Conflict of Interest is the difference between the economic interests of a public company and the personal economic interests of members of the board of directors, members of the board of commissioners, majority shareholders, or the controlling shareholders that may harm the public company in question.

In 2021, there were no transactions that met any of the categories of conflict of interest transactions.

AFFILIATED TRANSACTIONS –Financial Manager

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, Affiliated means:

1. Familial relationships due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
2. Relationships between the party and the employee, director, or commissioner of the same party;
3. Relationships between 2 (two) companies where there are 1 (one) or more members on both board of directors or board of commissioners;
4. Relationships between the company and parties that directly or indirectly control or are controlled by the company;

5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi pihak afiliasi.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 45 dalam Laporan Keuangan. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

5. Relationships between 2 (two) companies controlled, directly or indirectly, by the same party; or
6. Relationships between the company and the majority shareholders.

Affiliated transactions related to any activity and/or transaction carried out by a public company or controlled company with an Affiliate of a public company or Affiliate of a Member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, Majority or Controlling Shareholder, including all activities and/or transactions carried out by the Public Company or Controlling Company for the benefit of Affiliates of the Public Company or Affiliates of members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, Majority or Controlling Shareholders.

In 2021 there were no transactions that met any of the categories of affiliated party transactions.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Company and its subsidiaries have related party transactions in accordance with the definition described in PSAK 7. These transactions are carried out on terms agreed by both parties, which may not be the same as other transactions made with unrelated parties. Material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 45 of the Financial Statements. Unless specifically disclosed as related parties, the other parties mentioned in the notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
Pemegang Saham Shareholder	Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	Jasa konsesi Concession services
Entitas berelasi dengan Pemerintah Entities related to the Government	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman Banking and loan services
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman Banking and loan services
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa Perbankan Banking services
	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Wika Haka Joint Operation	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales services
	PT Semen Padang (Persero)	Penjualan jasa Sales services
	PT Brantas Abipraya (Persero)	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal Ship Classification and Registration Services
	BPPU ITS	Penjualan jasa Sales services
	PT Sucofindo (Persero)	Jasa pemeriksaan Inspection services
	Koperasi Pegawai PT Pelindo III	Alih Daya Outsourcing
	PT Surveyor Indonesia	Jasa pemeriksaan Inspection services
	PT Danareksa (Persero)	Jasa Keuangan Financial Services
	PT Sarana Bandar Nasional	Jasa Bongkar Muat Loading and Unloading Services
	BPKD Provinsi DKI Jakarta	Penjualan jasa Sales services
	PT Multimedia Nusantara	Jasa Telekomunikasi dan Informasi IT Telecommunication and IT Information Services
	PT Yodya Karya (Persero)	Konsultan Consultant
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Nindya Karya (Persero)	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Jasa Pensiun Pension Services
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	Direktorat Jenderal Pajak	Perpajakan Taxation
	Badan Layanan Umum Sekretariat, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Pinjaman Loans
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales Services
	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero	Penjualan jasa Sales Services
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa Sales Services
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa Sales Services
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa Sales Services
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa Sales Services
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa Sales Services
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa Sales Services

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Virama Karya (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Krakatau Engineering Amarta	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	Karya (Persero)	
	PT Indonesia Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pinjaman Loans
	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman Loans
	PT Taspen (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	BPJS Ketenagakerjaan	Penjualan jasa Sales Services
	Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	Penjualan jasa Sales Services
	PT Daya Radar Utama	Penjualan jasa Sales Services
	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Petrokimia Gresik	Penjualan jasa Sales Services
	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jasa Kesehatan Health Services
	PT Prima Citra Nutrindo	Jasa Boga Catering Services
	PT Bahtera Adhiguna	Penjualan jasa Sales Services
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan Jasa Pembangunan Sales of Development Services
	PT Semen Tonasa	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pelni (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	Perusda-Aneka Usaha dan Jasa	Penjualan jasa Sales Services
	PT Petra Arun Gas	Penjualan jasa Sales Services
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Jasa Keuangan dan Pinjaman Financial and Loans Services
	Lembaga Manajemen Aset Negara	Piutang Pembebasan Lahan Land Acquisition Receivables
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Penjualan Jasa Sales Services
	PT Asuransi Kredit Indonesia	Jasa Asuransi Insurance Services
Entitas asosiasi Associated Entity	JICT	Sewa dan royalty Rent and Royalties
	NPCT1	Investasi Investment
	RSP	Kesehatan Health

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PHC	Jasa Kesehatan Health Services
	KSO TPK KOJA	Penjualan Sales
	BKMS	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales and Operational Activities Services

KEWAJARAN TRANSAKSI

Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan (*Arm's Length Transaction*). Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

TRANSACTION FAIRNESS

All transactions with related parties have been carried out fairly in accordance with the interests of the Company (Arm's Length Transaction). The transactions carried out comply with the laws and regulations and are free from conflicts of interest.

ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan atas dasar alasan kebutuhan usaha Pelindo serta ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pelindo.

REASONS FOR THE TRANSACTION

All transactions with related parties are carried out on the basis of Pelindo's business needs and are aimed at improving Pelindo's performance.

REALISASI (NILAI) TRANSAKSI

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut.

TRANSACTION REALIZATION (VALUE)

The significant accounts with related parties (government, government entities or others) are as follows.

Tabel Realisasi (Niliai) Transaksi Pihak Berelasi (dalam ribuan Rupiah)
Realization (Value) of Related Party Transactions (in thousand Rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2021 December 31, 2021		31 Desember 2020 December 31, 2020	
	Total	Persentase (%) Percentage	Total	Persentase (%) Percentage
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents				
Bank				
Rupiah	3.725.987.853	3,2	1.567.270.855	1,32
Dolar AS	518.814.309	0,45	393.722.497	0,32
Euro	-	-	-	-
Deposito berjangka Time deposits				
Rupiah	7.190.688.390	6,18	4.323.761.302	3,53
Dolar AS	161.894.623	0,13	3.539.392.201	2,99
Investasi jangka pendek Short-term investments				
Deposito berjangka Time deposits	5.718.327.340	4,92	10.947.390.500	9,22
Piutang usaha Trade receivables	263.129.705	0,23	279.352.489	0,22
Piutang Lain-lain Other receivables	1.153.378.016	0,97	1.316.074.276	1,09
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues	33.383.321	0,04	67.889.867	0,06
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	0	-	0	-
Utang usaha Trade payables	1.926.350.211	2,7	3.267.820.968	4,16
Uang untuk diperhitungkan Advances from customer	8.064.950	0	59.290.895	0,07
Uang titipan pelanggan Advances from customer	65.132.073	0,09	33.588.018	0,04

Tabel Realisasi (Niliai) Transaksi Pihak Berelasi (dalam ribuan Rupiah)
Realization (Value) of Related Party Transactions (in thousand Rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2021 December 31, 2021		31 Desember 2020 December 31, 2020	
	Total	Persentase (%) Percentage	Total	Persentase (%) Percentage
Liabilitas jangka pendek lainnya Other Current Liabilities	1.001.145.577	1,24	896.478.260	1,15
Liabilitas jangka panjang lainnya Other Non-current Liabilities	466.538.398	0,63	466.538.398	0,6

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada catatan atas Laporan Keuangan No. 45 yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Details of the names of the parties related to the realization (value) of related party transactions are presented in note No. 45 in the Financial Statements attached to this Annual Report. These related transactions are business activities carried out to generate business income and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously.

KEBIJAKAN MEKANISME REVIU TRANSAKSI

Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus melalui mekanisme reviu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, dilakukan dengan syarat normal dan wajar. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi secara umum dilakukan sebagaimana dengan pihak ketiga yang direviu oleh Komite Audit serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

TRANSACTION REVIEW MECHANISM POLICY

All transactions with related parties must go through a review mechanism in accordance with what has been determined by the Company. All transactions and significant balances with related parties are carried out on normal and fair terms. Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties, where these terms may not be the same as transactions made with unrelated parties. The terms and conditions of transactions with related parties are carried out as with those with third parties, and are reviewed by the Audit Committee and must obtain approval from the Board of Commissioners.

PEMENUHAN PERATURAN TERKAIT

Selama tahun 2021, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi.

COMPLIANCE WITH RELATED REGULATIONS

In 2021, there were no violations of laws and regulations related to transactions with related parties.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

CHANGES IN LEGISLATION AND THE IMPACT

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021
Changes in Legislation in 2021

No	Peraturan Perundang-Undangan Laws and regulations	Pokok Pengaturan Principle	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Perusahaan Company Adjustment Information	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Impact on the Company's Financial Statements
1	Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2021 Government Regulation No. 101 of 2021	Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Merger of PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2021. Merger of PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which became effective as of October 1, 2021.	Dampak signifikan adanya penggabungan terhadap laporan keuangan adalah perubahan ekuitas yang tercatat menggunakan dasar nilai kekayaan definitif, sehingga pembukuan atas selisih nilai buku dan nilai dasar kekayaan definitif sebesar Rp31 triliun. Significant impact of the merger on the financial statements is the change in equity recorded using the basis of definitive wealth, so that the book value of the difference between book value and basic value of definitive wealth is Rp31 trillion.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan standar akuntansi keuangan dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku dalam tahun berjalan.

Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 22: Definisi Bisnis

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis mengklarifikasi bahwa untuk dianggap sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset harus mencakup minimal, *input* dan proses substantif yang bersama-sama, berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan menghasilkan *output*. Selain itu, Amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu bisnis tetap ada walaupun tidak mencakup seluruh input dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan *output*.

Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, tetapi dapat berdampak pada periode-periode mendatang jika Kelompok Usaha melakukan kombinasi bisnis.

PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 dan PSAK 73 - Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 2)

Amendemen-Amendemen ini memberikan kelonggaran sementara terkait dengan dampak pelaporan keuangan ketika suku bunga penawaran antarbank *(Interbank Offered Rate)* diganti dengan acuan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko (SBB). Amendemen tersebut mencakup cara praktis sebagai berikut ini:

1. Cara praktis yang mensyaratkan perubahan kontraktual, atau perubahan arus kas yang secara langsung sebagaimana disyaratkan oleh reformasi (suku bunga acuan), untuk diperlakukan sebagai perubahan suku bunga mengambang, yang setara dengan pergerakan suku bunga pasar;
2. Mengizinkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi suku bunga acuan terhadap penetapan dan dokumentasi lindung nilai tanpa penghentian hubungan lindung nilai; dan
3. Memberikan kelonggaran sementara kepada entitas untuk memenuhi ketentuan dapat diidentifikasi secara terpisah, pada saat instrumen SBB ditetapkan sebagai lindung nilai dari suatu komponen risiko.

Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. Kelompok Usaha bermaksud untuk menggunakan cara praktis di periode-periode mendatang jika dapat diterapkan.

Amendemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa - Terkait COVID-19 Setelah 30 Juni 2021

Sehubungan dengan pandemi yang terus berlangsung, Amendemen tambahan diterbitkan pada bulan Maret 2021 di

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The financial accounting standards applied comply with the Statement of Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) applicable in the current year.

The Group applied all new and/or revised standards that became effective for the period beginning on or after January 1, 2021, including the following revised standards that affected the Group's consolidated financial statements:

Amendment to Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") 22: Definition of Business

Amendments to PSAK 22 Business Combinations clarified that to be considered a business, an integrated set of activities and assets must include, at a minimum, substantive inputs and processes that, together, contribute significantly to the ability to generate outputs. In addition, this Amendment clarifies that a business still exists even though it does not cover all the inputs and processes required to produce outputs.

This amendment has no impact on the Group's consolidated financial statements, but may have an impact in future periods if the Group enters into a business combination.

Amendments to PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 and PSAK 73 - Reform of Benchmark Interest Rates (Phase 2)

These amendments provide temporary relief concerning the impact of financial reporting when the Interbank Offered Rate is replaced with an almost risk-free alternative reference rate (SBB). This amendment includes the following practical means:

1. A practical way for contractual changes, or changes in cash flows that are directly required by the benchmark interest rate, to be treated as changes in floating interest rates, which are equivalent to movements in market interest rates;
2. Allows changes required by benchmark interest rate reforms to hedge designation and documentation without terminating the hedging relationship; and
3. Provides temporary leeway for entities to comply with separately identifiable requirements, when the SBB instrument is designated as a hedge of a risk component.

This amendment has no impact on the Group's consolidated financial statements. The Group intends to use practical methods in future periods if applicable.

Amendment to PSAK 73: Leases - Lease Concessions - Regarding COVID-19 After June 30, 2021

Due to the ongoing pandemic, an additional Amendment was issued in March 2021 that extends the scope of the lease

mana memperpanjang cakupan periode konsesi sewa, yang merupakan salah satu syarat penerapan cara praktis, dari tanggal 30 Juni 2021 dalam amendemen PSAK 73 Sewa tentang Konsesi Sewa terkait COVID-19 yang diterbitkan di bulan Mei 2020, menjadi 30 Juni 2022.

concession period, where one of the requirements is for implementing the practical method, from June 30, 2021 in the amendment to PSAK 73 Leases concerning Lease Concessions related to COVID-19 issued in May 2020, and June 30, 2022.

Jika penyewa telah menerapkan cara praktis dalam Amendemen di bulan Mei 2020, maka diharuskan untuk terus menerapkannya secara konsisten, untuk semua kontrak sewa dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa, menggunakan Amendemen tersebut. Jika penyewa tidak menerapkan cara praktis dalam Amendemen di bulan Mei 2020 untuk konsesi sewa yang memenuhi syarat, maka penyewa tidak dapat menerapkan cara praktis dalam Amendemen di bulan Maret 2021.

If the lessee applied the practical means of the Amendment in May 2020, they are required to continue to apply them consistently, for all leases with similar characteristics and under similar circumstances, using this Amendment. If the lessee did not apply the practical means of the May 2020 Amendment to eligible lease concessions, then the lessee cannot apply the practical means of the March 2021 Amendment.

Amendemen Maret 2021 diterapkan secara retrospektif, dengan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal Amendemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba pada awal periode pelaporan tahunan di mana penyewa pertama kali menerapkan Amendemen tersebut. Namun, Kelompok Usaha belum menerima konsesi sewa terkait COVID-19, tetapi berencana untuk menerapkan cara praktis jika berlaku dalam periode penerapan yang diizinkan.

The March 2021 Amendment can be applied retrospectively, recognizing the cumulative effect of the initial application of the Amendment as an adjustment to opening retained earnings at the beginning of the annual reporting period in which the lessee first applied the Amendment. However, the Group has not received any lease concessions related to COVID-19, but plans to implement practical means if applicable within the permitted application period.

Namun, Kelompok Usaha belum menerima konsesi sewa terkait COVID-19, tetapi berencana untuk menerapkan cara praktis jika berlaku dalam periode penerapan yang diizinkan.

However, the Group has not received any lease concessions related to COVID-19, but plans to implement practical means if applicable within the permitted application period.

Berikut adalah ringkasan informasi tentang penyesuaian PSAK tahunan 2021 yang berlaku efektif untuk pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penyempurnaan PSAK tahunan pada dasarnya merupakan rangkaian Amendemen dalam lingkup sempit yang memberikan klarifikasi agar tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip yang ada atau prinsip-prinsip baru.

The following is a summary of information on the 2021 annual PSAK adjustments effective for annual reporting starting on or after January 1, 2021. The annual PSAK improvements are basically a series of amendments in a narrow scope that provides clarification so there will be no significant changes to existing principles. or new principles.

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	Paparan Konsekuensi dan Penyesuaian yang Dilakukan Consequences and Adjustments Made	Dampak Secara Kuantitatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Quantitative Impact of Changes in Accounting Policies on Financial Statements
1	PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, beberapa perubahan tentang pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. PSAK 1: Presentation of Financial Statements, several changes regarding the judgments made by management in the process of applying accounting policies that significantly affect the amounts recognized in the financial statements.	Atas pertimbangan manajemen dalam penerapan kebijakan akuntansi yang signifikan dan material disajikan tersendiri dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Management's consideration in applying significant and material accounting policies is presented separately in the Notes to Financial Statements (CALK).	Tidak ada dampak secara kuantitatif atas perubahan di PSAK 1 atas materialitas, atas peristiwa yang material telah disajikan secara tersendiri di dalam CALK. There was no quantitative impact from the changes in PSAK 1 on materiality, material events have been presented separately in CALK.

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	Paparan Konsekuensi dan Penyesuaian yang Dilakukan Consequences and Adjustments Made	Dampak Secara Kuantitatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Quantitative Impact of Changes in Accounting Policies on Financial Statements
2	PSAK 13: Properti Investasi, tentang pengungkapan penerapan model nilai wajar telah dihapus. PSAK 13: Property Investments, regarding the disclosure of the application of the fair value model has been removed.	Pengakuan aset properti investasi di seluruh entitas konsolidasian menggunakan metode nilai *cost*. Recognition of investment property assets across consolidated entities using the cost value method.	Tidak ada dampak kuantitatif karena seluruh pengakuan properti investasi di Pelindo Grup telah menggunakan metode nilai *cost* semua. There was no quantitative impact as all investment property recognitions in the Pelindo Group have used the cost value method.
3	PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, tentang ruang lingkup penurunan nilai aset dan menghapus perbedaan dengan IFRS pada IAS 36 paragraf 04(a). PSAK 48: Impairment of Assets Value, regarding the scope of asset impairment and writing off differences with IFRS in IAS 36 paragraph 04(a).	Pemberlakuan *impairment financia*l aset yang terbuku sebagai investasi anak perusahaan . Implementing impairment of financial assets as investment in subsidiaries.	Tidak ada dampak kuantitatif atas pemberlakuan *impairment financial* aset pada investasi anak perusahaan karena tidak ada perbedaan antara nilai pasar dengan nilai buku pada pembukuan anak perusahaan di Pelindo Grup. There was no quantitative impact on the financial asset impairment on subsidiary investments as there is no difference between the market value and the book value in the Pelindo Group subsidiary books.
4	PSAK 66: Pengaturan Bersama, mengenai penyesuaian pada paragraf 25, PP11, PP33A(b) dan catatan kakinya, C12 dan C14 tentang rujukan ke PSAK 71: Instrumen Keuangan PSAK 66: Joint Arrangements, regarding adjustments to paragraphs 25, PP11, PP33A(b) and its footnotes, C12 and C14 regarding references to PSAK 71: Financial Instruments	Atas pencatatan ventura bersama, jika entitas tidak memiliki pengendalian bersama tetapi ikut berpartisipasi di dalamnya wajib mencatat investasi nya sesuai PSAK 71. For recording a joint venture, if the entity does not have joint control but participates in it, it is required to record the investment in accordance with PSAK 71.	Tidak ada dampak kuantitatif atas pencatatan ventura bersama karena di Pelindo grup tidak ada transaksi ventura bersama. There was no quantitative impact on the listing of joint ventures as in the Pelindo group there are no joint venture transactions.
5	ISAK 16: Pengaturan Konsesi Jasa, mengenai penyesuaian dalam beberapa paragraf dalam contoh ilustrasi agar konsisten dengan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. ISAK 16: Service Concession Arrangements, regarding adjustments in several paragraphs in the illustrative examples to be consistent with PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.	Operator hak infrastruktur menjalan pengakuan pendapatan sesuai dengan yang berlaku di PSAK 72. Operators of infrastructure rights carry out revenue recognition in accordance with PSAK 72.	Tidak ada dampak kuantitatif atas perubahan di ISAK 16 atas pengakuan pendapatan PSAK 72 karena pengakuan pendapatan di Pelindo sebagai operator Infrastruktur tidak terdampak atas perlakuan PSAK 72. There was no quantitative impact from changes in ISAK 16 on PSAK 72 revenue recognition as revenue recognition at Pelindo as an Infrastructure operator is not affected by PSAK 72.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara terdapat tiga aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Untuk indikator aspek keuangan dan aspek administrasi indikatornya sudah ditentukan di dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, sedangkan untuk aspek operasional disesuaikan dengan bisnis Perseroan.

COMPANY HEALTH LEVEL

Based on the Minister of SOEs Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the assessment of the health level of State-Owned Enterprises, there are three aspects for the assessment, the financial aspect, operational aspect, and administrative aspect. The financial aspect and administrative aspect indicators have been determined in the Minister of SOEs Decree No. KEP-100/MBU/2002, while the operational aspect is adjusted to the Company's business.

Tabel Realisasi Tingkat Kesehatan Perseroan
Realization of Company Health Level

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	2021	
				RKAP	Realisasi Realization
I.	**ASPEK KEUANGAN** FINANCIAL ASPECT				
	Return on Equity (ROE)	%	15,00	7,50	9,00
	Return on Investment (ROI)	%	10,00	4,00	6,00
	Rasio Kas Cash Ratio	%	3,00	3,00	3,00
	Rasio Lancar Current Ratio	%	4,00	4,00	4,00
	Collection Period	Hari Days	4,00	4,00	4,00
	Perputaran Persediaan Inventory Turnover	Hari Days	4,00	4,00	4,00
	Perputaran Total Aset Total Asset Turnover	%	4,00	1,00	1,00
	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Equity to Total Assets Ratio	%	6,00	6,00	6,00
	SKOR UNTUK ASPEK KEUANGAN **FINANCIAL ASPECT SCORE**		**50,00**	**33,50**	**37,00**
II.	**ASPEK OPERASIONAL** OPERATIONAL ASPECT				
	Waiting Time For Pilot	Jam Hour	7,00	9,00	9,00
	Tingkat Efektivitas Tambatan Petikemas Container Mooring Effectiveness Level	%	7,00	9,00	9,00
	Produktivitas B/M Petikemas Container B/M Productivity	B/S/H	7,00	9,00	9,00
	Yard Occupancy Ratio Petikemas Container Yard Occupancy Ratio	%	7,00	8,00	8,00
	SKOR UNTUK ASPEK OPERASIONAL **OPERATIONAL ASPECT SCORE**		**35,00**	**35,00**	**35,00**
III.	**ASPEK ADMINISTRATIF** ADMINISTRATIVE ASPECT				
	Laporan Perhitungan Tahunan Annual Report Calculation	Bulan Month	3	3,00	3,00
	Rancangan RKAP RKAP draft	Bulan Month	3	3,00	3,00
	Laporan Periodik Periodic Report	Tanggal Date	3	3,00	3,00
	Efektivitas Penyaluran Dana Funds Disbursement Effectiveness	%	3	3,00	0,00
	Kolektabilitas Pengembalian Pinjaman Loan Repayment Collectability	%	3	3,00	1,00
	SKOR UNTUK ASPEK ADMINISTRATIF **ADMINISTRATIVE ASPECT SCORE**		**15,00**	**15,00**	**10,00**
	TOTAL SKOR **TOTAL SCORE**		**100,00**	**83,50**	**82,00**
	KATEGORI **CATEGORY**			**SEHAT** **HEALTHY**	**SEHAT** **HEALTHY**
				AA	**AA**

Skor PT Pelabuhan Indonesia untuk realisasi tahun 2021 sebesar 82,00 yang berada dalam kategori SEHAT dengan nilai AA.

PT Pelabuhan Indonesia's score for the realization in 2021 was 82.00 in the HEALTHY category with an AA score.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Pada tahun 2021 secara umum bisnis Pelindo mengalami pertumbuhan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2021 mencapai 100,4% dari RKAP dan meningkat 8% dari realisasi tahun sebelumnya. Realisasi beban usaha mencapai 102% dari RKAP dan lebih besar 9% dari tahun sebelumnya, sedangkan EBITDA tercapai di 95% RKAP. Hal ini dikarenakan adanya pencatatan beban pemeliharaan aset konsesi. Walaupun realisasi EBITDA di bawah target RKAP, realisasi *net profit* tercapai sebesar 102% dari RKAP dan meningkat 7% dari realisasi tahun sebelumnya. Tercapainya target net profit tersebut disebabkan karena efisiensi beban bunga pinjaman dan obligasi yang lebih rendah Rp278 miliar dari target RKAP.

Realisasi total aset tercapai 92% dari target RKAP dan turun 2% dari tahun sebelumnya yang dikarenakan realisasi investasi masih di bawah target seperti Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I dan Pengembangan Pelabuhan Benoa. Liabilitas terealisasi 90% dari RKAP dan turun 5% dari tahun sebelumnya. Beberapa rencana pendanaan eksternal yang tidak terealisasi di tahun 2021 serta pelunasan pinjaman Bank dan obligasi untuk efisiensi beban bunga. Realisasi ekuitas tercapai 95% dari RKAP dan mengalami peningkatan sebesar 4% dari tahun sebelumnya oleh karena selisih nilai transaksi akuisisi PT CTP di bulan Oktober 2021 sebesar Rp2,1 triliun. Untuk saldo kas Pelindo per Desember 2021 adalah sebesar Rp12,92 triliun atau sebesar 107% dari RKAP dan 11% lebih besar dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan PMN, serta serapan kas untuk investasi yang masih di bawah target RKAP.

Beberapa hal penting dari Laporan Manajemen 2021 antara lain:

1. Pembayaran beban bunga dan pinjaman membantu meningkatkan kinerja keuangan Perseroan;
2. Capaian realisasi investasi termasuk proyek strategis pada tahun 2021 cukup rendah yaitu, 29,21% di bawah RKAP 2021. Terkait ini manajemen perlu meningkatkan kinerja capaian investasi khususnya pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis. Selain itu, sesuai dengan objektif perusahaan untuk meningkatkan efisiensi investasi dengan alokasi modal terintegrasi dan pengadaan terpusat, *screening,* dan perencanaan setiap investasi harus dilakukan dengan matang;
3. Perseroan berhasil mencapai skor KPI sebesar 104,81% pada tahun 2021, sehingga secara keseluruhan dapat memenuhi target ditetapkan pada tahun 2021.

Berdasarkan hal-hal yang dijabarkan di atas tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Pelindo. Manajemen menganalisa bahwa meskipun terdapat kendala-kendala yang tengah dihadapi oleh Pelindo, hal tersebut masih dapat diakomodir dengan menggunakan inisiatif strategis yang tepat dan dengan utilisasi sumber daya yang optimal, sehingga kelangsungan usaha Pelindo dapat terjaga dengan baik.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

MATTERS THAT COULD POTENTIALLY INFLUENCE BUSINESS CONTINUITY

In 2021, overall Pelindo's business experienced a growth with revenues in 2021 reaching 100.4% of the RKAP, 8% higher than the previous year. Operating expenses reached 102% of the RKAP, 9% higher than the previous year, while EBITDA achieved 95% of the RKAP. This was due to the recording of concession assets expenses. Even though EBITDA was below the RKAP target, the net profit was 102% of the RKAP, 7% higher than the previous year, due to the efficiencies in interest expenses for loans and bonds, which were Rp278 billion lower than the RKAP target.

Total assets reached 92% of the RKAP target, 2% lower than the previous year due to investments still falling below the target, including the Construction of the North Kalibaru Terminal Phase I and the Development of the Benoa Port. Liabilities reached 90% of the RKAP, 5% lower than the previous year due to several external funding plans not being realized in 2021, as well as the repayment of bank loans and bonds for interest expense efficiency. Equity reached 95% of the RKAP, 4% higher than the previous year due to the difference in the value of the PT CTP acquisition transaction in October 2021 of Rp2.1 trillion. Pelindo's cash balance as of December 2021 stood at Rp12.92 trillion, or 107% of the RKAP and 11% higher than the previous year. This was due to cash receipts from customers and PMN receipts, as well as cash absorption for investments being below the RKAP target.

Some important factors from the 2021 Management Report include:

1. Payments of interest expense and loans help improve the Company's financial performance;
2. The investment realization including strategic projects in 2021 was 29.21% below the 2021 RKAP. Related to this, management needs to improve the investment achievement performance, especially for the strategic projects implementation and completion. Also, the Company's objective to improve investment efficiency through integrated capital allocation and centralized procurement, screening, and planning for each investment must be carried out with care;
3. The Company achieved a KPI score of 104.81% in 2021, so overall it met the target set in 2021.

Based on the above factors, there are none that could potentially influence Pelindo's business continuity. Management's view is that although there are obstacles being faced by Pelindo, these can still be overcome by using the right strategic initiatives, and by using optimal resources, so that Pelindo's business continuity can be well maintained.

ASESMEN MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen Pelindo melakukan asesmen atas kemampuan Pelindo untuk melanjutkan kelangsungan usahanya, asesmen dilakukan dengan berdasarkan berbagai faktor seperti analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non keuangan. Berdasarkan hasil asesmen, Pelindo berkeyakinan bahwa Pelindo memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, Manajemen Pelindo tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Pelindo untuk melanjutkan usahanya.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF MATTERS THAT COULD POTENTIALLY INFLUENCE BUSINESS CONTINUITY

Pelindo's management conducts assessments on Pelindo's business continuity, with the assessment carried out based on various factors including an analysis of the strengths of its financial and non-financial condition. Based on the assessment results, Pelindo believes that it has the resources to continue its business in the future, and does not see any material uncertainties that could give rise to any significant doubt about Pelindo's business continuity.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN UNTUK MELAKUKAN ASESMEN

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan sumber daya Pelindo yang unggul untuk berkompetisi dalam industri pelabuhan;
2. Posisi Pelindo dalam industri yang baik dalam kancah regional, yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perekonomian negara;
3. Kondisi keuangan yang baik dengan profitabilitas pencapaian laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2021 sebesar Rp3,17 triliun; dan
4. Tingkat kesehatan Perseroan dengan kualifikasi AA yang berada dalam kategori Sehat.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT DURING THE ASSESSMENTS

Several factors are taken into consideration by management when conducting assessments on business continuity, including:

1. The ability of Pelindo's superior resources to compete in the port industry;
2. Pelindo's position in the industry is good in the regional arena, which can make a major contribution to the country's economy;
3. Good financial conditions by achieving Income for the year after effect of merging entity's income in 2021 of Rp3.17 trillion; and
4. The Company health level with AA qualification in the Healthy category.

ASPEK PAJAK

Pelindo dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembayaran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diuraikan sebagai berikut:

TAX ASPECT

In its operational activities, Pelindo has implemented Good Corporate Governance in a transparent and accountable manner, especially for managing its tax rights and obligations, which are carried out in accordance with applicable regulations.

Tax Payments and Non-Tax State Revenue (PNBP) are as follows:

Tabel Pembayaran Pajak dan PNBP (dalam miliar Rupiah)
Tax Payments and PNBP (in billion Rupiah)

No.	Jenis Kontribusi Pada Pemerintah Type of Contribution to the Government	2021	2020
1	Dividen Dividends	1.161,90	560,00
2	PNBP	180,97	209,25
3	Konsesi Concessions	453,40	480,62
4	PPh Pasal 21 PPh Article 21	552,20	594,59
5	PPh Pasal 22 PPh Article 22	13,72	10,46
6	PPh Pasal 23 PPh Article 23	113,48	143,05
7	PPh Pasal 4 Ayat 2 PPh Article, Paragraph 2	187,26	140,14
8	PPh Pasal 15 PPh Article 15	11,14	12,31
9	PPh Pasal 26 PPh Article 26	402,61	281,16
10	PPh Pasal 25 PPh Article 25	554,50	398,05
11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Land & Building Tax (PBB)	117,25	142,60
12	Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Compulsory Value Added Tax	1.265,07	918,59
13	Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax	439,14	801,99
TOTAL		**5.452,65**	**4.692,81**

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Capital



05



STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL STRATEGY



Pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan. Strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia yang sejalan dengan strategi Perseroan akan mendorong pada pencapaian tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, percepatan proses bisnis Perseroan, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, serta pada akhirnya akan memberikan nilai tambah yang maksimum pada semua pemangku kepentingan Perseroan.

Strategi pengelolaan SDM difokuskan untuk mempersiapkan SDM menghadapi perubahan lingkungan bisnis Perseroan, terkait dengan telah dilaksanakannya *Merger* PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dilakukan penyesuaian terhadap strategi pengelolaan SDM. Sebagai implementasi dari strategi pengelolaan SDM tersebut pada tahun 2021 telah dilaksanakan program kerja sebagai berikut:

1. Restrukturisasi organisasi dan tata kelola di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) membagi fungsi pengelolaan bisnis perusahaan dalam empat *cluster* bisnis utama yaitu: *Container Services, Non Container Services, Marine & Terminal Services,* dan *Logistic & Hinterland Development*. Masing-masing cluster tersebut dibentuk dalam struktur organisasi *Subholding* dan berperan sebagai *Business Owner* yang fokus pada pengembangan segmen bisnisnya masing-masing, adapun *Holding* sebagai *Strategic Architect and Concession*

Human Capital Management is one of the keys to success in carrying out the Company's business strategy. The Human Capital management strategy is in line with the Company's strategy will encourage the achievement of a high level of effectiveness and efficiency, accelerate the Company's business processes, improve the quality of customer service, and ultimately provide maximum added value to all stakeholders of the Company.

The HC management strategy was focused on preparing HC to face changes in the Company's business environment, related to the implementation of the Merger of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) to become PT Pelabuhan Indonesia (Persero), with adjustments made to the HC management strategy. For the HC management strategy in 2021, the following work programs were implemented:

1. Organizational restructuring and governance within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) by dividing the Company's business management functions into four main business clusters: Container Services, Non Container Services, Marine & Terminal Services, and Logistics & Hinterland Development. Each of these clusters was established within the organizational structure of a Subholding that acts as a Business Owner focusing on developing their respective business segments, with a Holding as a Strategic Architect and Concession

Owner berperan dalam penentu kebijakan umum dan mengkonsolidasikan kegiatan usaha di lingkungan *Group* Perusahaan. Restrukturisasi organisasi dan tata kelola dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pencapaian target Perseroan, *value creation* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah percepatan proses dan mempersingkat waktu *cargo stay* dan *ship stay* di lingkungan pelabuhan yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada penurunan biaya logistik nasional. Restrukturisasi organisasi dan tata kelola di lingkungan Perseroan dilaksanakan secara bertahap, sejalan dengan kegiatan alih operasi layananan kapal dan barang dari Cabang kepada *Subholding*, kegiatan pemurnian bisnis Anak Perusahaan, dan penerapan sentralisasi layanan terpadu, di mana akan dilakukan penyesuaian pada *size* organisasi dan alokasi SDM; dan

2. Pengembangan *Shared Services Center* (SSC) dalam upaya mendukung layanan bisnis Perusahaan, dilaksanakan secara bertahap dengan mengintegrasikan sistem *Shared Service Center* dari masing-masing entitas sebelum *merger* menjadi satu sistem. Untuk tahun 2021 ini dilaksanakan proses inisiasi dan persiapan. Adapun proses pembangunan dan implementasi akan dilaksanakan pada tahun 2022-2023. Fungsi yang akan di kelola dalam pengembangan SSC ke depan antara lain: Keuangan, SDM, dan Pengadaan.

Penyusunan *Manpower Planning* sejalan dengan perubahan proses bisnis dan restrukturisasi organisasi. Pasca *merger*, pengelolaan alokasi SDM baik pada *Holding*, *Subholding,* maupun Anak/Cucu Perusahaan/Afiliasi, dilakukan evaluasi secara menyeluruh dengan tujuan komposisi SDM yang efektif dan efisien. Hal ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas perusahaan. Beberapa kebijakan yang diterapkan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah SDM antara lain, kebijakan *minus growth.* Selama proses evaluasi penataan pasca *merger* sampai dengan beberapa tahun ke depan, penugasan pekerja dalam skema *job Sharing*, pelaksanaan *assessment*, pengembangan kompetensi dan *regrouping*.

Owner playing a role in determining the general policies and consolidating business activities within the Company Group. Organizational restructuring and governance was carried out to realize an effective and efficient organization so as to support the achievement of the Company's targets, with the expected value creation from this activity being to accelerate the process and shorten the time of cargo stay and ship stay in the ports, which will ultimately reduce the national logistics costs. The Company's organizational restructuring and governance was carried out in stages, in line with the transfer of ship and goods service operations from the Branches to the Subholding, the refinement of Subsidiaries activities, and the implementation of integrated service centralization, where adjustments were made on the size of the organization and allocation of human capital; and

2. Development of Shared Services Center (SSC) to support the Company's business services was carried out in stages by integrating the Shared Service Center system of each entity prior to the merger into one system. In 2021, the initiation and preparation process was carried out. The development and implementation process will be carried out in 2022-2023. Functions to be managed in the future development of SSC include: Finance, HC, and Procurement.

Manpower Planning in line with changes in business processes and organizational restructuring. After the merger, the management of HC allocation for Holding, Subholding, and Subsidiaries/ Affiliates was thoroughly evaluated to create an effective and efficient HC composition, and encourage an increase in Company productivity. Several policies were implemented to control the growth in HC, including a minus growth policy. During the post-merger evaluation process over the next few years, there will be an assignment of employees in the job sharing scheme, and an implementation of assessments, competency development and regrouping.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REKRUTMEN

Sebagai upaya memperoleh SDM berkualitas untuk mendukung pencapaian kinerja agar semakin optimal, Perseroan menyelenggarakan proses rekrutmen secara transparan dan terbuka. Rekrutmen dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan pekerja berdasarkan formasi kebutuhan yang disusun oleh Divisi Strategi SDM Perseroan. Informasi terkait rekrutmen disampaikan secara luas melalui *website* www.ipc.e-seleksi.com, media sosial milik Perseroan, serta media surat kabar nasional. Kesempatan yang sama diberikan kepada setiap orang, baik pria maupun wanita dengan tidak memandang latar belakang yang dimiliki calon pekerja, seperti suku, agama, ras, hingga kondisi fisik untuk mengikuti rekrutmen pekerja sepanjang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Perseroan kemudian mengangkat calon pekerja dengan mengacu pada hasil seleksi, hasil evaluasi masa percobaan, serta pencapaian orientasi pekerja.

Tahapan pelaksanaan rekrutmen adalah:

1. Pengumuman Pembukaan secara Terbuka;
2. Registrasi melalui *Website*;
3. Seleksi Administrasi;
4. Tes Berenang (untuk Jabatan Pandu);
5. Tes Seleksi Tahapan Pertama (Tes Potensi Akademik);
6. Tes Seleksi Tahapan Kedua (Psikotes dan Bahasa Inggris);
7. *Interview User*;
8. Tes Kesehatan; dan
9. *Interview* Direksi.

Sebelum pelaksanaan *merger*, pada tahun 2021 Perseroan melaksanakan Program Rekrutmen dan mendapatkan sebanyak 6 (enam) orang untuk Pekerja Organik Perusahaan. Setelah penggabungan (*merger*) Perseroan dengan PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Perseroan memiliki strategi untuk melaksanakan *minus growth* sebagai salah satu upaya dalam mencapai target *value creation* pelaksanaan penggabungan (*merger*) PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam rangka pelaksanaan *minus growth* tersebut, maka Perseroan tidak melaksanakan program rekrutmen untuk menjadi pekerja Perseroan sepanjang sisa Tahun 2021. Seiring dengan hal tersebut, Perseroan juga saat ini sedang menyusun kebijakan rekrutmen yang sesuai dengan kondisi dan strategi Perseroan pasca *merger*.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pekerja tertuang di dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 18 Februari 2022 Nomor. HK.01/18/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 tentang Pembelajaran Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Program Pembelajaran Pekerja terdiri dari:

1. Program Pendidikan adalah program peningkatan kompetensi akademis melalui institusi pendidikan formal pada tingkat diploma, sarjana, pasca sarjana, dan *doctoral*;

RECRUITMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

To attract quality HC to support achieving an optimal performance, the Company has instigated a transparent and open recruitment process. Recruitment is carried after an analysis of employees required based on a need analysis prepared by the Company's HC Strategy Division. Recruitment requirements are widely conveyed through the website www.ipc.e-seleksi.com, the Company's social media, and national newspapers. Equal opportunities are given to everyone, both male and female to participate in the recruitment of workers as long as they meet the required criteria, regardless of the background of the prospective employees, including ethnicity, religion, race, and physical condition. The Company recruits prospective employees after referring to the selection results, the evaluation results during the probationary period, and the employees' orientation achievements.

The recruitment stages are:

1. Open Public Announcement;
2. Registration via the Website;
3. Selection Administration;
4. Swimming Test (for Pilot Position);
5. First Stage Selection Test (Potential Academic Test);
6. Second Stage Selection Test (Psychology and English);
7. User Interviews;
8. Health Test; and
9. Interview with the Board of Directors.

In 2021, prior to the merger, through the Company's Recruitment Program, 6 (six) people were recruited as Organic Employees. After the merger of the Company with PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV to become PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the Company's strategy was for minus growth in an effort to achieve the value creation target folloeing the merger of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). To achieve minus growth, the Company did not carry out a recruitment program for Company employees for the remainder of 2021. Currently, the Company is developing a recruitment policy that is in accordance with the conditions and strategies of the Company post-merger.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF COMPETENCY DEVELOPMENT

The Employee Competency Development Policy is contained in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/18/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 dated February 18, 2022 concerning Employee Learning at PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Employee Learning Program consists of:

1. Education Program, a program to improve academic competencies through formal educational institutions at the diploma, undergraduate, postgraduate, and doctoral levels;

2. Program Pelatihan adalah program peningkatan kompetensi non-akademis melalui sertifikasi, pelatihan atau kursus, yang dapat disampaikan melalui metode antara lain namun tidak terbatas pada metode konvensional maupun eksperimental, kelas tatap muka, seminar/webinar, *E-learning*, *Coaching, Mentoring, On-Job-Training* (*Job Assignment* dan/atau *Job Rotation*) *Self-Learning*, dan *Blended Learning*, yang disampaikan secara tatap muka (luring), elektronik (*online*/daring) ataupun keduanya; dan
3. Program Magang adalah adalah program peningkatan keterampilan dan keahlian secara langsung di industri terkait dalam waktu tertentu.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIER

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan karier pekerja Perseroan pada tahun 2021 sebelum pelaksanaan *merger* dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang terkait dengan Alih tugas Pekerja baik secara rotasi, promosi, maupun demosi baik di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Afiliasi. Alih tugas Pekerja ini dilakukan pada semua level jabatan di Perseroan hingga ke Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dengan didasari oleh klasifikasi talenta Perusahaan yang bersumber dari kompetensi dan kinerja Pekerja Perseroan.

Pasca penggabungan, Perseroan masih mengikuti kebijakan di masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/1/10/1/ HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Hal ini pun berlaku untuk pengelolaan karier pekerja Perseroan hingga proses penyusunan kebijakan pengelolaan karier pekerja perusahaan selesai dilakukan. Sebelum kebijakan pengelolaan karier pekerja selesai disusun, alih tugas pekerja tetap dilaksanakan dalam rangka pemenuhan posisi jabatan lowong, penataan SDM dalam serah terima operasi, dan *replacement* dari perubahan struktur organisasi *Subholding*, Regional, ataupun unit lainnya di bawah *Holding*.

PENILAIAN KINERJA

Dalam rangka mengevaluasi kinerja seluruh Pekerja, Perseroan setiap tahunnya melakukan pengukuran keberhasilan kinerja individu dengan menggunakan menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: HK.01/1/11/1/KPIU/UTMA/PLND-21 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu pada Masa Peralihan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Berdasarkan Peraturan Direksi tersebut, masing-masing unit kerja masih menggunakan mekanisme penilaian kinerja sesuai dengan unit asal masing-masing dengan dilakukan konversi atas kategorisasi hasil penilaian di masing-masing unit kerja.

2. Training Program, a non-academic competency development program through certification, training or courses, which can be delivered through methods including but not limited to conventional and experimental methods, face-to-face classes, seminars/webinars, E-learning, Coaching, Mentoring, On-Job-Training (Job Assignment and/or Job Rotation), Self-Learning, and Blended Learning, delivered through face-to-face (offline), electronic (online) or both; and
3. Internship Program, a program to improve skills and expertise directly related to the industry within a certain time.

CAREER DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

The management and career development of the Company's employees in 2021 prior to the merger was carried out based on the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Regulation related to the Transfer of Employee duties through rotation, promotion, or demotion either at the Head Office, Port Branches, Subsidiaries, and Affiliated Companies. This transfer of Employee duties was carried out at all levels of positions in the Company including the Directors and Commissioners of Subsidiaries based on a classification of the Company's talent sourced from the competence and performance of the Company's employees.

After the merger, the Company still followed the policies of each company prior to the merger as stipulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/1/10/1/ HUKU/UTMA/PLND-21 dated October 01, 2021 concerning the Temporary Enforcement of the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Board of Directors Regulations at PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This was also applied to the Company's employees career management, including the development of the Company's employees career management policies until they were completed. Before the employee career management policy were completed, the transfer of employee duties would continue to be carried out to fill vacant positions, structure HC in handover operations, and replacement of changes in the organizational structure of Subholding, Regional, or other units under the Holding.

PERFORMANCE ASSESSMENT

To evaluate all employees' performance, the Company annually To evaluate all employees' performance, the Company annually measures the success of individual performances using an assessment method based on the Board of Directors regulation No. HK.01/1/11/1/KPIU/UTMA/PLND-21 concerning Guidelines for Managing Individual Performance during the Transition Period within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Based on this Board of Directors Regulation, each work unit will still use a performance appraisal mechanism in accordance with the respective unit of origin by converting the categorization of the assessment results in each work unit.

Secara umum, ukuran kinerja individu yang digunakan merupakan hasil penurunan (*cascading*) dari ukuran kinerja/*key performance indicator* (KPI) Korporat. Hal ini dilakukan agar terjadi keselarasan antara pencapaian kinerja korporasi dengan kinerja individu. Hasil dari penilaian kinerja individu akan menjadi salah satu dasar bagi Perseroan dalam menentukan pengembangan karier, pemberian insentif dan bonus kepada Pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEBIJAKAN REMUNERASI

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Visi menjadi "Pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia", berkomitmen untuk secara konsisten memberikan kesejahteraan bagi para Pekerja. Pemberian remunerasi, fasilitas dan kesejahteraan pekerja pasca kerja oleh Perusahaan pasca penggabungan masih mengikuti kebijakan di masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/1/10/1/ HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/KIRF /UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, Benefit, dan Kesejahteraan Paska Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PROGRAM PENSIUN

Dalam alur sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, terdapat tahapan pekerja yang akan memasuki masa pensiun atau pengakhiran hubungan kerja. Pemberian remunerasi, fasilitas dan kesejahteraan pegawai pasca kerja oleh Perusahaan pasca penggabungan masih mengikuti kebijakan di masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/ PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/ PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, *Benefit*, dan Kesejahteraan Paska Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Kebijakan masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan, mengatur ketentuan terkait:

1. Pekerja yang diberhentikan atau pensiun jika mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, akibat pelanggaran disiplin, permintaan sendiri, mengikuti program *Golden Handshake* dan lain sebagainya; dan
2. Kesejahteraan pekerja saat memasuki masa pensiun dengan program pensiun baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.

In general, the individual performance measurements use the cascading result of the corporate key performance indicators (KPI). This is carried out to achieve a harmony between the corporate performance and individual performance. The individual performance assessments results will become one of the basis for the Company in determining career development, providing incentives and bonuses to employees in accordance with applicable regulations.

REMUNERATION POLICY

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with a vision to become "to be a world-class integrated leader in the maritime ecosystem", is committed to consistently providing welfare for its employees. The remuneration, facilities and welfare for post-employment employees by the Company after the merger still follows the policies of each company prior to the merger as stipulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/1/10/1/ HUKU/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 concerning the Temporary Enforcement of the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) At PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulations.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 dated October 15, 2021 concerning the Use of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Remuneration, Facilities, Benefits, and Post-Employment Welfare Policies.

PENSION PROGRAM

The Human Capital management system covers the stages for employees entering retirement, or for when their term of employment ends. The remuneration, facilities and welfare for post-employment employees by the Company after the merger still follows the policies of each Company prior to the merger as stipulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/ PLND-21 dated October 1, 2021 concerning the Temporary Enforcement of the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Board of Directors Regulations at PT Pelabuhan Indonesia (Persero), and the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/15/10/1/KIRF/ UTMA/PLND-21 dated October 15, 2021 concerning the Use of Remuneration, Facilities, Benefits, and Post-Employment Welfare Policies of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) by PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The policies of each Company prior to the merger, stipulated the relevant provisions:

1. Employees who are dismissed or retire if they reach the retirement age, pass away, or due to disciplinary violations, or at their own request, participate in a Golden Handshake program and so forth; and
2. Employees welfare when entering retirement includes a pension program for both short-term and long-term benefits.

Komponen program Pensiun pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero), antara lain:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja;
2. Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
4. Program Pemberian Pesangon dan lainnya;
5. Program Jaminan sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan
6. Program Asuransi Jiwa.

Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-049/MK.13/1989 tanggal 13 Januari 1989. Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan program pensiun yang dikelola oleh Yayasan Bersama Dana Pensiun Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV , dan Perusahaan Umum Pengerukan (YP4) yang telah didirikan sebelumnya. PPMP berlaku bagi pegawai tetap Perusahaan yang diangkat sebelum tahun 2002.

Sehubungan dengan status *merger* per 1 Oktober 2021, maka Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Mitra Pendiri yaitu PT Pengerukan Indonesia (Rukindo). Adapun besaran Iuran dan Manfaat Pensiun pada Program ini berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang disusun oleh Pendiri dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat pensiun. Pegawai yang tidak didaftarkan pada PPMP, didaftarkan pada PPIP Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3) yang bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), di samping terdapat Pegawai yang menjadi peserta PPMP dan PPIP.

The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pension program components include:

1. Defined Benefit Pension Program in Employer Pension Funds;
2. Defined Contribution Pension Program in Financial Institution Pension Funds;
3. Old Age Benefits Insurance Program;
4. Severance pay program and others;
5. The BPJS Employment Social Security Program by the Social Security Administering Body (BPJS); and
6. Life Insurance Program.

The Defined Benefit Pension Program ("PPMP") is a pension program with benefits stipulated in the Pension Fund regulations. This program is managed by Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) whose establishment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Finance No. S-049/MK.13/1989 dated January 13, 1989. This Pension Fund is a continuation of the pension program managed by the previously established Yayasan Bersama Dana Pensiun Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV, and Perusahaan Umum Pengerukan (YP4). The PPMP applies to permanent employees of the Company employed before 2002.

In connection with the merger status as of October 1, 2021, the Founder of the Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) became PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the Founding Partner, PT Pengerukan Indonesia (Rukindo). The Pension Contributions and Benefits in this Program are based on the Pension Fund Regulation prepared by the Founder and determined by the Financial Services Authority.

The Defined Contribution Pension Program ("PPIP") is a pension program with contributions stipulated in the Pension Fund Regulations where all contributions and the results of their development are recorded in an account for each Participant as pension benefits. Employees who are not registered with the PPMP, are registered with the PPIP Pelindo Purnakarya Pension Fund (DP3) in collaboration with Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), together with employees who are PPMP and PPIP participants.

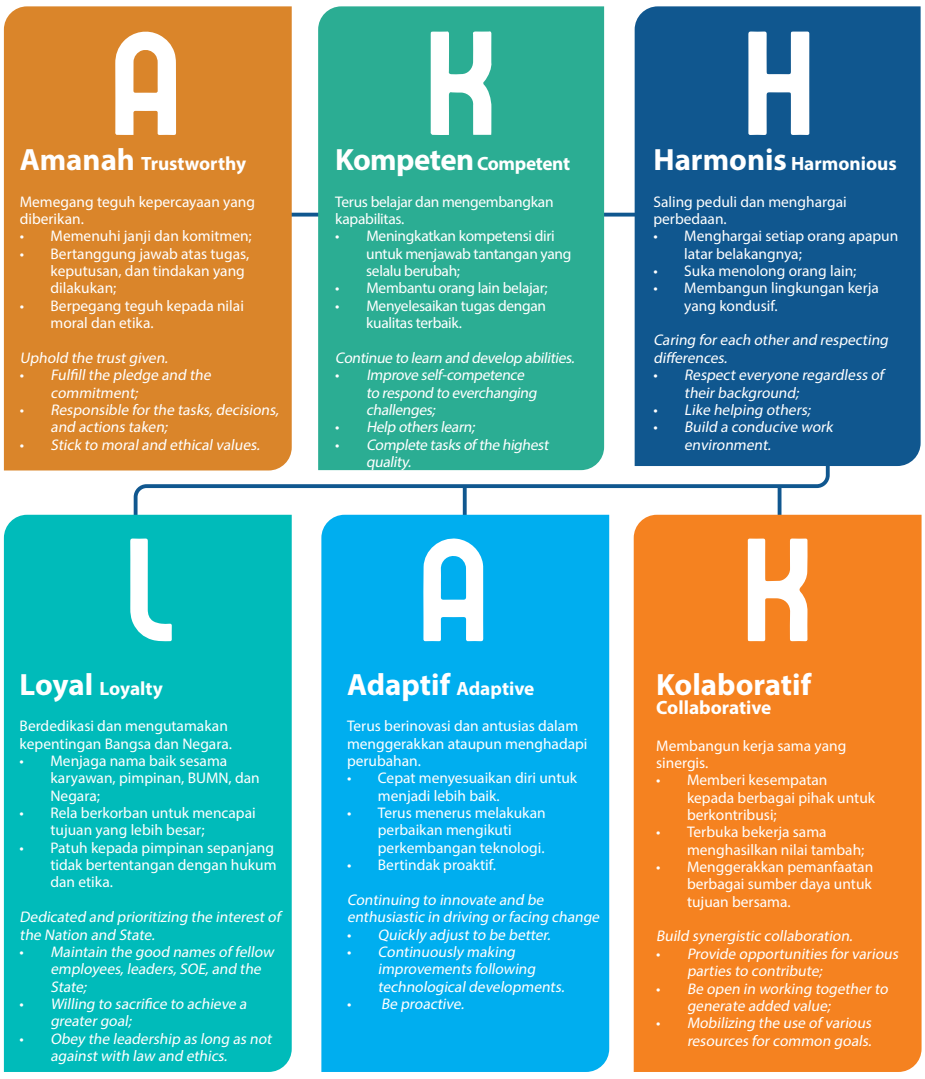
INTERNALISASI BUDAYA
CULTURE INTERNALIZATION

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Kementerian BUMN melalui Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-7/ MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Perseroan juga telah mempertegas penerapan AKHLAK sebagai Nilai-nilai Utama (*Core Values*) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Anak Perusahaan serta Perusahaan Afiliasi dan terkonsolidasi melalui Surat Edaran Nomor 0T.02.03/31/12/1/KBDK/UTMA/PLND-21.

As mandated by the Ministry of SOEs through the Republic of Indonesia Minister of SOEs Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 concerning the Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises, the Company has emphasized the application of AKHLAK as Core Values within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), its Subsidiaries and Affiliated Companies and has consolidated these through Circular Letter No. 0T.02.03/31/12/1/KBDK/UTMA/PLND-21.

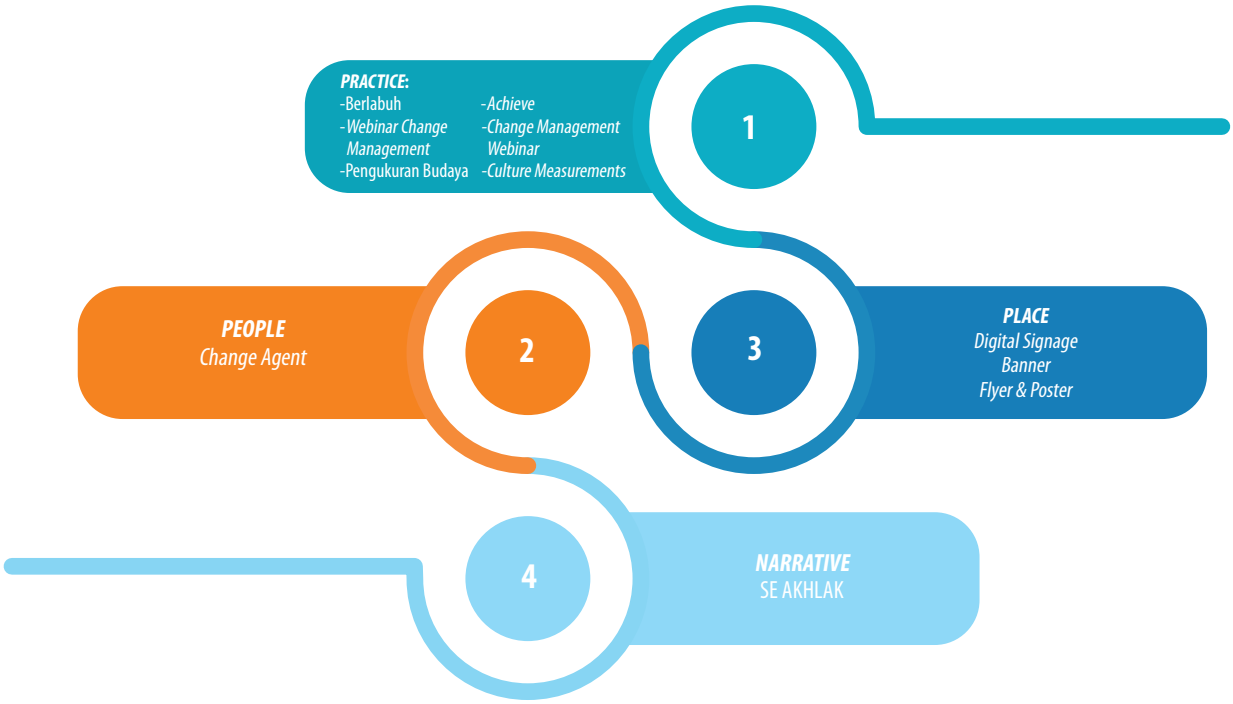
Sebagai dasar pembentukan karakter SDM guna meningkatkan daya saing, perusahaan melakukan program internalisasi budaya dengan berpegang pada core values AKHLAK yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

As the basis for building the HC character to increase competitiveness, the Company carried out a cultural internalization program that adhered to the core values of AKHLAK, an acronym for Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, and Kolaboratif, or Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative.



Agar *value* AKHLAK dapat dipahami dan dilaksanakan dengan *embedded mechanism* terhadap proses bisnis Perseroan, internalisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip *People* (*improving role fit*), *Practice (connecting roles to purpose), Place and Narrative (establishing connections in the workplace).*

To ensure the AKHLAK values are understood and embedded into the Company's business process mechanisms, internalization is carried out following the principles of People (improving role fit), Practice (connecting roles to purpose), Place and Narrative (establishing connections in the workplace).



Pengelolaan Budaya Perusahaan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki tujuan:

1. Memberikan pedoman dalam pengelolaan Budaya Perusahaan;
2. Memberikan pengetahuan akan peran Budaya Perusahaan dalam struktur organisasi dan fungsinya dalam kinerja Perseroan; dan
3. Membuat pekerja mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa harus melakukan hal tersebut sehingga pekerja lebih yakin dalam bertindak.

Management of Corporate Culture at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has the following objectives:

1. Provides guidelines for the management of Corporate Culture;
2. Provides knowledge of the Corporate Culture role in the organizational structure and its function in the Company's performance; and
3. Ensures employees know what to do, how to do it, and why to do it so that employees are more confident in taking any action.

Dalam rangka persiapan penggabungan perusahaan (*merger*), pada periode bulan Juni 2021 hingga September 2021 dilakukan beberapa program budaya bersama berupa rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh pekerja, yang meliputi:

1. Penetapan Tim *Change Management & Support, Change Champion* dan *Change Agent* melalui Surat Keputusan Ketua Tim Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Badan Usaha Milik Negara dalam Layanan Pelabuhan nomor SK.02.03/08/7/1/PSH/PMO-21 tanggal 8 Juli 2021;
2. Webinar *Change Management* Pelindo Bersatu pada tanggal 25 Juni 2021 terhadap seluruh pekerja;
3. *Workshop Key Success Factors in Running Change Management Toward* Pelindo - Bersatu pada tanggal 9 Juli 2021 terhadap *Change management & Change Support*;
4. Webinar *Key Success Factors in Running Change Management Toward* Pelindo - Bersatu Part II pada tanggal 16 Juli 2021 terhadap Tim Pokja Merger;

In preparation for the merger, in the period from June 2021 to September 2021, several joint cultural programs were carried out through a series of activities involving all employees, including:

1. Determining the Change Management & Support Team, Change Champions and Change Agents through the Team Leader for the Acceleration of Synergy Improvement and Integration of State-Owned Enterprises in Port Services Decree No. SK.02.03/08/7/1/PSH/PMO-21 dated 8 July 2021;
2. Holding a Pelindo Bersatu Change Management Webinar on June 25, 2021 for all employees;
3. Holding a workshop on Key Success Factors in Running Change Management Toward Pelindo - Bersatu on July 9, 2021 for Change management & Change Support;
4. Holding a webinar on Key Success Factors in Running Change Management Toward Pelindo - Bersatu Part II on July 16, 2021 for the Merger Working Group Team;

5. Webinar *Key Success Factors in Running Change Management Toward* Pelindo - Bersatu Part III - pada tanggal 21 Juli 2021 terhadap Tim Pokja Merger; dan
6. *Workshop Change Agent* terhadap 779 Peserta dari empat perusahaan asal pra penggabungan yang terbagi dalam 15 *batch* dan dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus – 15 September 2021.

Setelah dilaksanakannya *merger* pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melanjutkan proses internalisasi budaya dengan beberapa penyesuaian, yaitu:

1. Konsolidasi berupa inventarisir terhadap hal-hal yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan;
2. Survei kesiapan kerja *Post Merger* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan melibatkan seluruh pekerja yang ditempatkan di Kantor Pusat, *Subholding* dan Regional. Survei tersebut bertujuan untuk pemetaan kondisi riil yang dialami pekerja pada masa transisi pasca *merger* untuk meningkatkan kelancaran kerja dan koordinasi pasca Integrasi Pelabuhan Indonesia. Hasil tindak lanjut survei tersebut langsung dilakukan oleh masing-masing manajemen kantor pusat, *subholding* dan regional;
3. *Town Hall Meeting* dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan agenda perkenalan Dewan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara resmi kepada para pekerja perusahaan pasca penggabungan. Selain itu, pada *Town Hall Meeting* ini juga Direksi memberikan *guidance* serta penjelasan mengenai rencana korporasi pasca penggabungan; dan
4. Pelaksanaan *Sharing session* melalui program BERLABUH (Bincang Bersama Pelabuhan Indonesia) yang dilaksanakan secara rutin tiga kali dalam sebulan dengan menghadirkan narasumber BOD & BOD-1 pada Kantor Pusat, Regional dan *Subholding*. Adapun topik yang dibahas pada BERLABUH adalah update mengenai kondisi terkini dari unit kerja narasumber dikaitkan dengan salah satu dari nilai AKHLAK. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan budaya saling *sharing* di lingkungan Perusahaan serta sebagai salah satu media updating, kreativitas, aktualisasi unit kerja seiring dengan *core values* AKHLAK.

Pengukuran tingkat pemahaman dan implementasi terhadap proses internalisasi budaya perusahaan yang dilakukan pada bulan Desember 2021 terhadap 1.074 responden, terdiri dari 278 Pekerja Kantor Pusat, 501 Pekerja *Subholding* dan 295 Pekerja Regional. Dari kegiatan survei tersebut, diperoleh hasil Indeks Implementasi Budaya Perusahaan secara Korporat tahun 2021 sebesar 4,56. Adapun hasil survei tersebut menunjukkan Nilai Amanah merupakan nilai tertinggi sebagai nilai yang paling diyakini dan diimplementasikan dalam bekerja sehari-hari. Sedangkan Nilai Adaptif dan Kolaboratif merupakan nilai yang perlu diperhatikan dalam internalisasi Budaya Perusahaan agar pekerja memahami pentingnya transformasi budaya bagi kelangsungan organisasi.

5. Holding a webinar on Key Success Factors in Running Change Management Toward Pelindo - Bersatu Part III - on July 21, 2021 for the Merger Working Group Team; and
6. Holding a Change Agent workshop for 779 Participants from the four pre-merger companies, divided into 15 batches, and held from August 23 – September 15, 2021.

After the merger on October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) continued the cultural internalization process with several adjustments, including:

1. Consolidating an inventory of matters to be carried out by each Company prior to the merger;
2. Conducting a Post Merger work readiness survey on October 15, 2021, involving all employees at the Head Office, Subholding and Regional Offices. The survey purpose was to map the real conditions experienced by employees during the post-merger transition period to improve work smoothness and coordination after the Integration of Pelabuhan Indonesia. The respective head offices, subholding and regional management directly carried out a survey results follow-up;
3. Holding a Town Hall Meeting on October 6, 2021 with the agenda of officially introducing the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Company employees after the merger. At this Town Hall Meeting, the Board of Directors also provided guidance and an explanation on the post-merger corporate plan; and
4. Holding regular Sharing sessions through the BERLABUH (Talk with Pelabuhan Indonesia) program three times a month, presented by BOD & BOD-1 resource persons at the Head Office, Regional and Subholding. The topics discussed at BERLABUH included an update on the current condition in the resource person's work unit related to one of the AKHLAK values. The purpose of this activity was to increase a sharing culture in the Company, as well as a medium for updating, creativity, and actualization in the work units in line with the core values of AKHLAK.

Measuring the level of understanding and application of the corporate culture internalization process was carried out in December 2021 with 1,074 respondents, consisting of 278 Head Office Employees, 501 Subholding Employees and 295 Regional Employees. Through these surveys, the 2021 Corporate Culture Implementation Index result was 4.56. Through these surveys, the results showed that the Amanah Value had the highest value as the value most believed in and implemented in daily work. The Adaptive and Collaborative Values were the values considered to be the most important in the Corporate Culture internalization to help employees understand the importance of cultural transformation for the organization's continuity.

HUBUNGAN INDUSTRIAL
INDUSTRIAL RELATIONS

Untuk dapat memayungi seluruh pekerja, Pelindo telah bersepakat membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat seluruh ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pencapaian dalam hubungan industrial yang telah dilakukan oleh Direksi dan Manajemen Perseroan adalah pembaharuan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja.

Di dalam usaha memajukan Perseroan, Manajemen telah menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan serikat pekerja untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menjalin kelangsungan kerja perusahaan. Manajemen memandang serikat pekerja sebagai mitra strategis, sehingga kebijakan–kebijakan khususnya di bidang SDM terkait masalah kesejahteraan dapat memperoleh masukan dari serikat pekerja.

Sehubungan dengan penggabungan usaha Pelindo I, II, III, dan IV menjadi Pelindo, Perseroan akan membentuk membentuk wadah baru atau forum bipartit dengan serikat pekerja yang berfungsi untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang timbul maupun yang berpotensi menjadi masalah dan bertujuan sebagai wadah untuk memberikan saran kepada Manajemen dalam pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan. Wadah tersebut mempermudah pekerja dalam menyampaikan aspirasi kepada Perusahaan secara berjenjang sehingga komunikasi dua arah antara Perseroan dan pekerja tetap terjaga. Forum Bipartit tersebut dibentuk dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja (sampai saat ini hasil verifikasi belum disampaikan oleh masing-masing Serikat);
2. Membuat Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit;
3. Membuat *Timeline* dan program kerja kegiatan LKS Bipartit; dan
4. Pelaksanaan LKS Bipartit.

To provide an umbrella for all employees, Pelindo has established a Collective Labor Agreement (CLA) containing all provisions related to employment. Industrial relations are carried out by the Board of Directors and Management of the Company, which led to a renewal of the Collective Labor Agreement (CLA) between the Company and the Trade Union.

In an effort to move the Company forward, Management has established harmonious industrial relations with the trade unions to create a conducive working atmosphere and maintain the Company's continuity. Management views the trade unions as strategic partners, so the policies, especially for HC welfare issues, must obtain input from the union.

In connection with the merger of Pelindo I, II, III, and IV into Pelindo, the Company will establish a new forum or bipartite forum with the trade unions to accommodate and resolve labor problems that arise, as well as those that have the potential to become problems, and act as a forum for providing advice to Management in making decisions in the field of employment. This forum will make it easier for employees to convey their aspirations to the Company in stages so that a two-way communication between the Company and employees can be maintained. The Bipartite Forum was formed after going through the following stages:

1. Verification of Trade Union Membership (currently the verification results have not been submitted by each union);
2. Prepared Minutes of the Establishment of Bipartite LKS;
3. Prepared a timeline and work program for the Bipartite LKS activities; and
4. Implemented the Bipartite LKS.

SYSTEM AND INFRASTRUCTURE HUMAN CAPITAL

HUMAN CAPITAL SYSTEM AND INFRASTRUCTURE

Penggunaan *System and Infrastructure Human Capital* paska penggabungan perusahaan masih menggunakan masing-masing sistem dan infrastruktur yang ada pada entitas sebelum penggabungan, di mana sistem yang digunakan dalam pengelolaan *database* pegawai yaitu:

1. *Enterprise Resource Planning* (ERP) *Oracle System* - Regional 2;
2. *Enterprise Resource Planning* (ERP) *System Application and Processing* (SAP) - Regional 1 dan Regional 3); dan
3. *Human Resource Information System* (HRIS) - Regional 4.

Untuk pengelolaan database pegawai kedepannya akan menggunakan *single system* ERP SAP. Hal ini bertujuan agar lebih efisien dan efektif dalam pengelolaannya. Adapun tahapan yang akan dilakukan untuk menuju *single system* tersebut meliputi:

1. Melaksanakan migrasi data dari masing-masing Regional ke dalam *System Application and Processing* (SAP);
2. Membangun integrasi data SDM dari masing-masing Regional ke dalam *System Application and Processing* (SAP), selama masa transisi (sebelum menjadi *single system* ERP);
3. Membangun *single Enterprise Resource Planning* (ERP) secara bertahap dengan *System Application and Processing* (SAP), yang dipilih sebagai *single* sistem tersebut; dan
4. Modul HR yang ada di dalam *single* ERP tersebut mencakup *HR Core, Payroll, Time & Attendance, Travel Management, Performance Management, Competency Management,* dan *Learning & Knowledge Management*.

Dalam pengembangan infrastruktur *Human Capital*, Perseroan akan melakukan kajian terhadap dua opsi yang memungkinkan yaitu *On-Premise Server* (*server* fisik dimiliki oleh Perseroan dan disimpan dalam *Data Center*) dan *Cloud Server* (*server* virtual yang berbasis *cloud*), di mana faktor yang menjadi pertimbangan adalah keamanan data, efisiensi pengembangan dan pemeliharaan sistem.

For the Human Capital System and Infrastructure after the merger, the Company still used the respective systems and infrastructure in the entities prior the merger, where the systems used for managing the employee database included:

1. Enterprise Resource Planning (ERP) Oracle System - Regional 2;
2. Enterprise Resource Planning (ERP) System Application and Processing (SAP) - Regional 1 and Regional 3); and
3. Human Resource Information System (HRIS) - Regional 4.

For future employee database management, we will use a single SAP ERP system for a more efficient and effective management. The stages to be carried out towards the single system include:

1. Migrating data from each Regional into the System Application and Processing (SAP);
2. Developing the integration of HC data from each Region into the System Application and Processing (SAP) during the transition period (before becoming a single ERP system);
3. Developing a single Enterprise Resource Planning (ERP) in stages with System Application and Processing (SAP), which was chosen as the single system; and
4. The HC modules in the single ERP include HR Core, Payroll, Time & Attendance, Travel Management, Performance Management, Competency Management, and Learning & Knowledge Management.

For developing the Human Capital infrastructure, the Company will review two possible options: On-Premise Server (physical server owned by the Company and stored at the Data Center), and Cloud Server (cloud-based virtual server), where the factors to be considered will include security data, efficiency of system development and maintenance.

KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Pekerja merupakan aset penting yang berkontribusi besar dalam pencapaian visi dan misi Perseroan. Oleh karenanya Pekerja Perseroan termasuk keluarganya mendapatkan fasilitas kesehatan. Pola pemberian fasilitas kesehatan Pekerja pasca penggabungan perusahaan masih mengikuti kebijakan di masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/ PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, Benefit, dan Kesejahteraan Paska Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Beberapa pola pelayanan kesehatan yang digunakan antara lain *managed care, reimbursement*, dan asuransi. Selain itu, dalam kondisi pandemi COVID-19, Perseroan senantiasa memberikan dukungan fasilitas dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, seperti penyediaan fasilitas cuci tangan, pembersih tangan serta penyediaan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi pegawai mengalami infeksi virus dimaksud sehingga dapat mencegah penularan serta menggiatkan pegawai untuk melakukan vaksinasi COVID-19.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen atas kesehatan pegawai, Perseroan mengikutsertakan seluruh Pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas ini diberikan untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian serta jaminan hari tua bagi seluruh Pekerja.

Employees are important assets that contribute greatly to the achievement of the Company's vision and mission. Therefore, the Company's employees, including their families, receive health facilities. The pattern of providing health facilities for employees after the merger still followed the policies of each Company prior to the merger as stipulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 concerning the Temporary Enforcement of the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Board of Directors Regulations at PT Pelabuhan Indonesia (Persero), and the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 dated October 15, 2021 concerning the Use of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) Remuneration, Facilities, Benefits, and Post-Employment Welfare Policies by PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Several health services patterns are used including managed care, reimbursement, and insurance. In addition, during the COVID-19 pandemic, the Company continued to provide support facilities in compliance with health protocols, such as providing hand washing facilities, hand sanitizers and health checks to detect employees experiencing viral infections to prevent transmission, and encouraging employees to get their COVID-19 vaccinations.

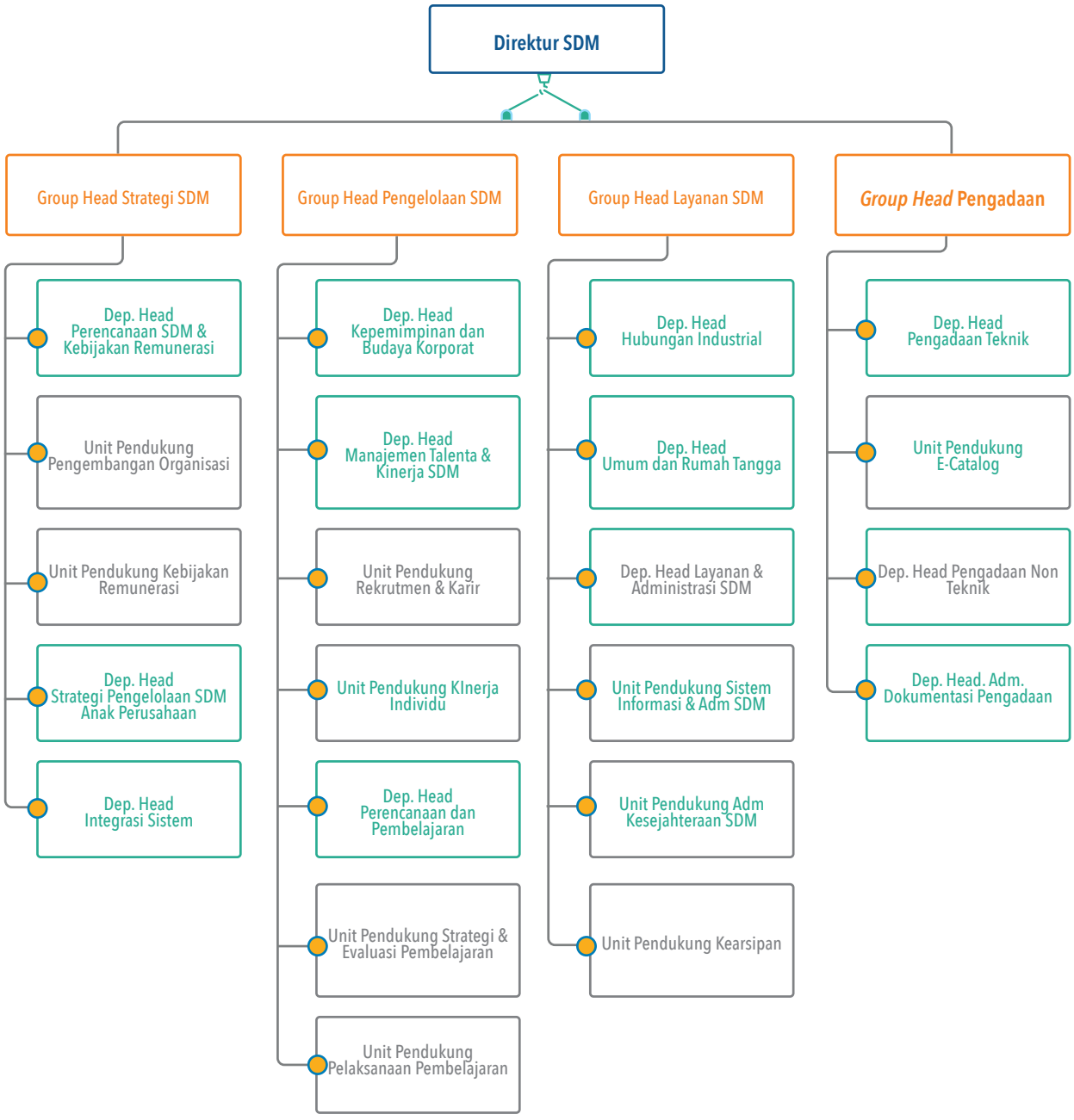
In compliance with applicable laws and regulations and as a commitment to employee health, the Company includes all employees in the BPJS Health and BPJS Employment programs. These facilities provide health insurance, work accident and death insurance as well as old age insurance for all employees.

STRUKTUR PENGELOLA DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN CAPITAL DIRECTORATE MANAGEMENT STRUCTURE

Struktur organisasi Direktorat Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yaitu berdasarkan sebagaimana Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/30/11/1/PSKR/UTMA/PLND-21 tanggal 30 November 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Struktur organisasi Direktorat Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) HC Directorate organization structure refers to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/30/11/1/PSKR/UTMA/PLND-21 dated November 30, 2021 concerning the Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The following shows the HC Directorate organization structure as of December 31, 2021.



Tugas Direktorat Sumber Daya Manusia sebagai pengelolaan strategi bidang SDM meliputi:
1. Strategi perencanaan SDM, organisasi dan budaya Perusahaan;
2. Kebijakan dan pengelolaan remunerasi dan *benefit*;
3. Kebijakan dan pengelolaan manajemen talenta dan kinerja SDM;
4. Strategi rekrutmen dan pengembangan SDM;
5. Kebijakan pengelolaan sistem dan infrastruktur bidang SDM;
6. Strategi pengelolaan hubungan industrial, kebijakan masa persiapan pensiun, dan *exit plan*;
7. Kebijakan dan pengelolaan arsip;
8. Kebijakan dan pedoman pengadaan.

The HC Directorate duties for the strategic management of HC includes:
1. HC planning strategy, organization and corporate culture;
2. Remuneration and benefits and management policies;
3. Talent management and HC performance and management policies;
4. HC recruitment and development strategy;
5. HC system and infrastructure management policies;
6. Industrial relations management strategy, retirement preparation, and exit plan policies;
7. Archive and management policy;
8. Procurement policies and guidelines.

PROGRAM STRATEGIS SUMBER DAYA MANUSIA 2021

HUMAN CAPITAL STRATEGIC PROGRAM 2021

Dalam mendukung penggabungan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV, telah dilaksanakan program-program strategis sumber daya manusia pada tahun 2021 yang meliputi:
1. Penyiapan suksesi milenial;
2. Pemenuhan standar keahlian teknis;
3. Persentase perempuan dalam *nominated talent*;
4. Kebijakan *corporate parenting* pengelolaan SDM;
5. Harmonisasi kebijakan kepegawaian dan persiapan PKB Baru.

To support the merger of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV, strategic HC programs were instigated in 2021 including:
1. Millennials succession preparation;
2. Compliance with technical expertise standards;
3. Percentage of women nominated as talent;
4. HC management corporate parenting policy;
5. Harmonization of personnel policies and preparation of a New CLA.

RENCANA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN AND STRATEGY FOR 2022

Dalam rangka penataan bidang Sumber Daya Manusia pasca penggabungan perusahaan, untuk tahun 2022 Perseroan telah menyusun program-program strategis sumber daya manusia yang meliputi:
1. Standardisasi dan digitalisasi layanan kepelabuhan;
2. Perempuan dalam *nominated talent*;
3. Milenial dalam *nominated talent*;
4. Penyusunan kajian program *talent development*.

In the context of structuring the Human Capital sector after the merger, for 2022 the Company has prepared strategic HC programs including:

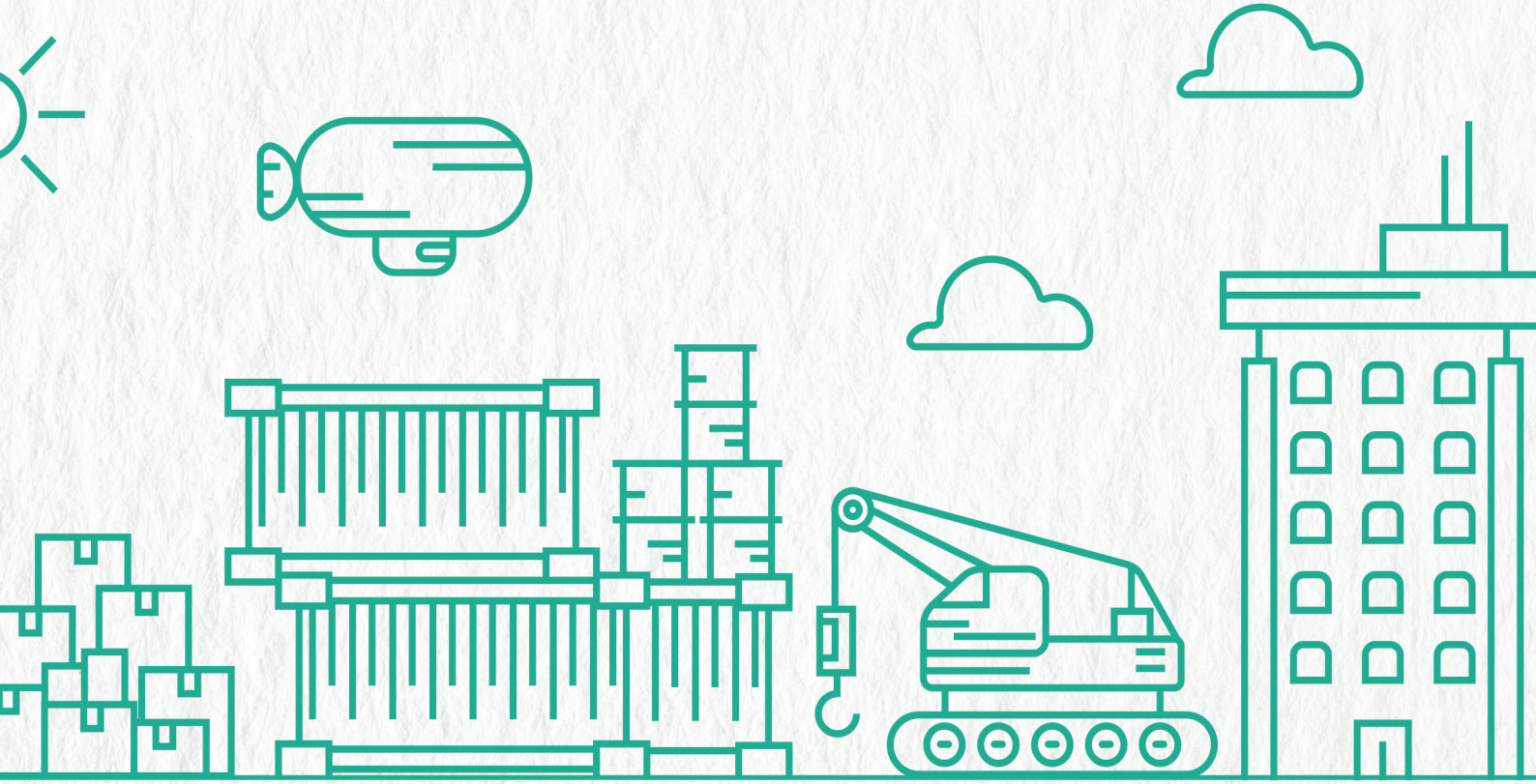
1. Standardization and digitization of port services;
2. Women nominated as talent;
3. Millennials nominated as talent;
4. Preparation of a talent development program study.

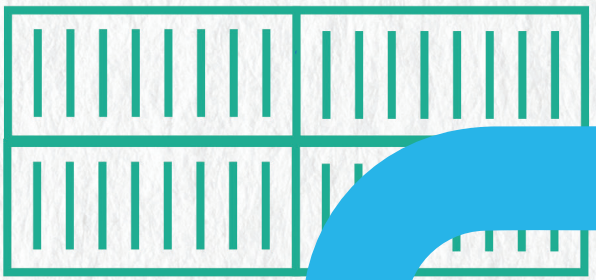
TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology



06





Teknologi Informasi
Information Technology



Era 4.0 menuntut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan teknologi informasi, baik melalui pengembangan *system* dan infrastruktur beserta *maintenance* yang dibutuhkan. Secara umum, implementasi teknologi informasi berfokus kepada 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang ada di perusahaan melalui integrasi aplikasi untuk menghilangkan proses serupa dan berulang;
2. Peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya melalui *real-time transaction* menggunakan aplikasi yang bersifat *online*; dan
3. Pengendalian yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan dan kemudahan dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan *executive summary dashboard system*.

Era 4.0 requires PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to continue to improve efficiency and effectiveness in the management of information technology, both through systems and infrastructure development as well as maintenance as required. In general, the information technology focuses on 3 (three) objectives:

1. Increasing the effectiveness and efficiency of existing business processes in the company through application integration to eliminate similar and repetitive processes;
2. Increasing revenue and reducing costs through real-time transactions using online application; and
3. Better control over company performance and ease of decision making by utilizing the executive summary dashboard system.

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penetapan arah pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) beserta strategi dan program kerja dituangkan ke dalam *Master Plan* Teknologi Informasi (TI) 2022 – 2026. Penyusunan *Master Plan* ini merupakan *master plan* awal untuk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) setelah *merger*, yang kemudian disesuaikan dengan RJPP 2021 – 2025 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian

INFORMATION TECHNOLOGY MASTER PLAN

The establishment of Information and Communication Technology (ICT) development direction along with strategies and work programs is outlined in the Information Technology (IT) Master Plan 2022 – 2026. This Master Plan is the initial master plan for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) after the merger, which was later adjusted with RJPP 2021 – 2025 and Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2018 dated February 12, 2018 concerning Information Technology Governance Principles of

BUMN. Penyusunan *Master Plan* TI akan dibantu oleh tim konsultan. *Master Plan* TI mencakup antara lain *IT Vision and Principles*, desain *Enterprise Architecture,* strategi TI, IT *Operating Model,* dan IT *Roadmap*.

the Ministry of SOEs. The preparation of IT Master Plan will be assisted by a team of consultants. The IT Master Plan includes, among others, IT Vision and Principles, Enterprise Architecture design, IT strategy, IT Operating Model, and IT Roadmap.

STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI

Strategi Teknologi Informasi yang dijalankan di Pelindo mengatur pembagian wewenang, peran dan fungsi TIK pada masing – masing level. Selain itu juga diatur terkait pengelolaan investasi, sumber daya, risiko dan proyek. Peran TIK Kantor Pusat sebagai Pembina bagi TIK Regional/Cabang dan Terminal, juga sebagai pengawas bagi TIK *Subholding*, memiliki tugas dan wewenang untuk membuat kebijakan – kebijakan TIK untuk korporat, seperti menyusun *Information Technology* (IT) Tata Kelola, IT *Master Plan*, dan lainnya. Selain itu juga, TIK Kantor Pusat berkewajiban dalam melaksanakan dan memantau pelaksanaan IT *Roadmap*.

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY

Pelindo's Information Technology Strategy regulates the division of authority, roles and functions of ICT at each level, as well as the management of investments, resources, risks and projects. Head Office ICT, which acts as advisor for Regional/Branch and Terminal ICT and supervisor for ICT Subholding, has the task and authority to compile corporate ICT policies, such as compiling Information Technology (IT) Governance, IT Master Plan, and others. In addition, Head Office ICT is obliged to implement and monitor the implementation of IT Roadmap.

Group TIK Pelindo juga bekerja sama dengan Anak Perusahaan PT ILCS sebagai *IT Solution Provider* dalam melakukan inovasi, pengembangan sistem dan memberikan solusi sistem yang dibutuhkan oleh Perusahaan. Hal tersebut terutama untuk mendukung rencana perusahaan dalam melakukan standardisasi sistem untuk seluruh Pelindo.

Pelindo Group ICT also collaborates with its Subsidiary, PT ILCS, as an IT Solution Provider in innovating, developing systems and providing system solutions needed by the Company. This aims to support the company's plan to standardize the system for all Pelindo.

Pasca *merger*, pengembangan sistem informasi perusahaan difokuskan pada penyesuaian sistem eksisting di masing-masing regional untuk memenuhi *minimum requirement* agar proses bisnis dapat berjalan dengan lancar seperti biasa. Pengembangan dan penyesuaian dilakukan pada sistem aplikasi yang akan digunakan baik pada entitas *holding* maupun regional. Adapun pengembangan yang dilakukan mencakup penyesuaian pada sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) keuangan dan SDM, rekonsiliasi data *customer*, aksesibilitas antar *data center*, serta *branding adjustment* pada berbagai sistem seperti *customer portal*, sistem intranet, sistem *port core business (billing), corporate website*, portal pengadaan, dan sistem lainnya yang terkait.

Post-merger, the development of the company's information system is focused on adjusting the existing system in each region to meet the minimum requirements so that business processes can run smoothly as usual. Developments and adjustments are made to the application system that will be used for both the holding and regional entities. The development carried out includes adjustments to the financial and HC Enterprise Resource Planning (ERP) system, customer data reconciliation, accessibility between data centers, and branding adjustments to various systems such as customer portal, intranet system, core business port system (billing), corporate website, procurement portal, and other related systems.

Program 100 hari pasca *merger* yang terkait dengan pengembangan TI antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan dan tata Kelola TIK;
2. Konsolidasi data *asset* dan program kerja TIK;
3. Harmonisasi IT *Master Plan*;
4. Persiapan dan desain *single* ERP seluruh regional dan *subholding*;
5. Persiapan dan desain aplikasi intranet dan tata naskah pegawai;
6. Persiapan dan desain sentralisasi *procurement*;
7. Penyusunan dan standardisasi master data operasional sebagai *baseline* seluruh sistem;
8. Desain *dashboard* eksekutif *summary*; dan
9. Implementasi TOS di regional 1.

The post-merger 100 days program related to IT development includes the following:

1. Development of ICT policies and governance;
2. Consolidation of ICT asset data and work programs;
3. Harmonization of IT Master Plan;
4. Preparation and design of single ERP for all regions and subholdings;
5. Preparation and design of intranet applications and employee archives;
6. Preparation and design of centralized procurement;
7. Preparation and standardization of operational master data as the baseline for the entire system;
8. Design an executive summary dashboard; and
9. Implementation of TOS in region 1.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Pada masa pasca *merger* ini, saat ini sedang dilakukan konsolidasi inventarisasi aset IT di seluruh Pelindo, sehingga ke depannya dapat dilakukan standardisasi aset dan efisiensi manajemen aset.

Salah satu aset besar yang sedang diteliti adalah terkait *data center*. Saat ini Pelindo memiliki 4(empat) *data center* akibat penggabungan 4 (empat) perusahaan. Keempat *data center* ini, dengan sejarah dan strategi yang berbeda, menghasilkan 4 (empat) arsitektur teknologi yang berbeda. Manajemen telah menyorot untuk dilakukan penyelarasan arsitektur teknologi dari ke empat ekosistem *data center* tersebut menjadi lebih efisien dari segi biaya dan lebih sesuai dengan kebutuhan Pelindo ke depannya. Keempat *data center* di setiap regional telah dilengkapi dengan *backup system* dan *disaster recovery* untuk menjaga kelancaran dan keberlangsungan layanan perusahaan.

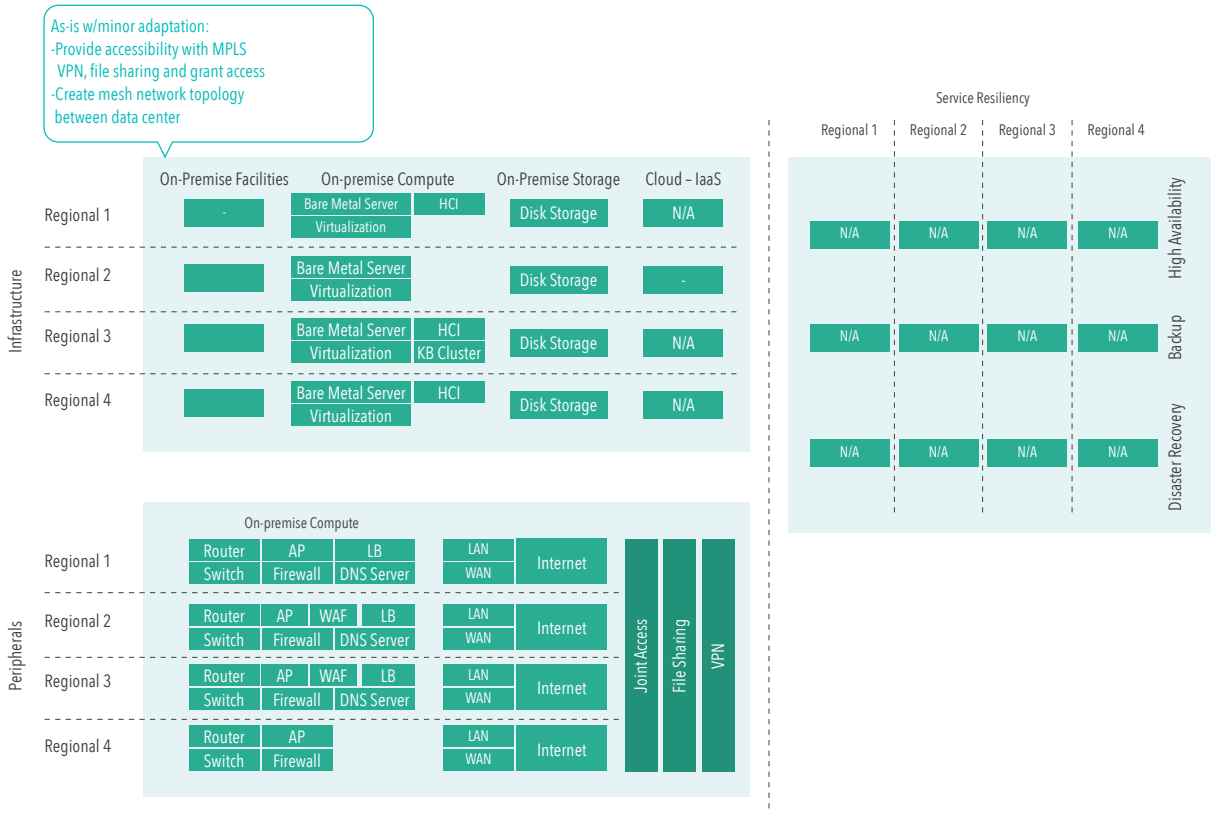
Trend infrastruktur saat ini adalah penggunaan teknologi *Cloud* untuk menggantikan infrastruktur *on premise*. Teknologi *cloud* menjanjikan biaya operasional yang lebih rendah dan kehandalan sistem yang lebih tinggi untuk mendukung sistem dan bisnis yang ditunjangnya. Untuk itu Pelindo juga sudah mulai bergerak untuk menerapkan teknologi tersebut. Saat ini teknologi *cloud* sudah mulai diimplementasikan dalam bentuk *Infrastructure as a Service* (IaaS), yang sudah mulai digunakan pada Regional 2 dan akan dikembangkan untuk seluruh regional secara bertahap.

Information Technology Infrastructure

In the post-merger period, IT asset inventory consolidation is currently being carried out throughout Pelindo, so that asset standardization and asset management efficiency can be carried out in the future.

One of the big assets being researched is related to Datacenter. Currently, Pelindo has 4 (four) data centers due to the merger of 4 (four) companies. These four data centers, with different histories and strategies, resulted in 4 (four) different technology architectures. The Management has highlighted technology architecture alignment of the four data center ecosystems to be more cost efficient and more in line with Pelindo's future needs. The four data centers in each region have been equipped with backup systems and disaster recovery to maintain the smoothness and continuity of the company's services.

The current infrastructure trend is the use of cloud technology to replace on premise infrastructure. Cloud technology promises lower operating costs and higher system reliability to support the system and the business. For this reason, Pelindo has also started to apply the technology. Currently, cloud technology has begun to be implemented in the form of Infrastructure as a Service (IaaS), which has begun to be used in Regional 2 and will be developed for all regions in stages.



IT GOVERNANCE

Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero) ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 1 Oktober 2021 mempengaruhi strategi bisnis dan mengubah tujuan Perusahaan. Oleh karenanya *Masterplan* IT perlu dilakukan penyesuaian dan harmonisasi dengan kebutuhan bisnis agar dapat selaras dan menjawab tantangan. Agar pemanfaatan teknologi informasi terarah, sesuai kebutuhan dan selaras dengan visi,misi, nilai dan budaya perusahaan maka PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menerapkan tata kelola IT (IT *Governance*).

Tata Kelola IT menjabarkan tanggung jawab Direksi dan Eksekutif, struktur organisasi serta proses-proses yang memastikan sIstem TI dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. Dalam *Master Plan* IT (ITMP) menjabarkan peranan IT sebagai *enabler* teknologi dalam proses bisnis Perusahaan baik di *front-end* dan *back-end*. ITMP merupakan dokumen perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi yang mendukung visi misi perusahaan. IT *Master Plan* berisikan mengenai kajian strategi bisnis, inisiatif-inisiatif teknologi informasi, IT *enterprise architecture*, *trend* teknologi informasi dengan pendefinisian *roadmap* yang jelas. Dalam hal ini diharapkan Perusahaan dapat berjalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dengan dukungan teknologi dan meminimalkan distrupsi teknologi di era 4.0.

Pasca *merger* juga dilakukan penyesuaian tata kelola IT sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan saat ini. Tata Kelola IT disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN terkait panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN, serta berpedoman pada *framework* pengelolaan TI seperti COBIT, ITIL, TOGAF, dan lainnya. Pedoman dan kebijakan tata kelola teknologi informasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Strategis
   a. Penetapan Peran TIK Perusahaan;
   b. Perencanaan TIK;
   c. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TIK;
   d. Pengelolaan Investasi TIK;
   e. Pengelolaan Sumber Daya TIK;
   f. Pengelolaan Risiko TIK;
   g. Pengelolaan Proyek (*Project Management*); dan
   h. Penanganan Kebutuhan dan Identifikasi Solusi (*Identify Automated Solution*).
2. Kebijakan Operasional
   a. Pengelolaan Operasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
   b. Pengelolaan Layanan TIK;
   c. Pengelolaan Keamanan TIK;
   d. Pengembangan Sistem Informasi;
   e. Serah Terima Layanan TIK (*Handover*);
   f. *Post Implementation Review;*
   g. Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga;
   h. Pengelolaan Mutu;
   i. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja TIK;
   j. Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal; dan
   k. Pengelolaan *Compliance External Regulation*.

IT GOVERNANCE

The merger of PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV (Persero) to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on October 1, 2021 affected the business strategies and changed the objectives of the Company. Therefore, the IT Masterplan needs to be adjusted and harmonized with business needs, in order to be aligned and can respond to challenges. For more directed utilization of information technology, according to needs and in line with the vision, mission, values and corporate culture, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) applies the IT Governance.

IT Governance encompasses the responsibilities of Board of Directors and Executives, the organizational structure and the processes that ensure the IT system can support the Company's goals achievement. The IT Master Plan (ITMP) describes the role of IT as a technology enabler in the Company's business processes, both on the front-end and back-end. ITMP is a long-term planning document in the development of information systems that support the company's vision and mission. IT Master Plan contains a study of business strategies, information technology initiatives, IT enterprise architecture, information technology trends with a clear roadmap definition. The objective is that the Company can be running with the principles of Good Corporate Governance along with the support of technology and minimize technological disruption in the 4.0 era.

After the merger, IT governance is also adjusted according to the current conditions and needs of the company. IT Governance is prepared based on the Regulation of Minister of SOEs related to guidelines for the preparation of IT management for SOEs, and is guided by IT management frameworks such as COBIT, ITIL, TOGAF, and others. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) information technology governance guidelines and policies include the following:

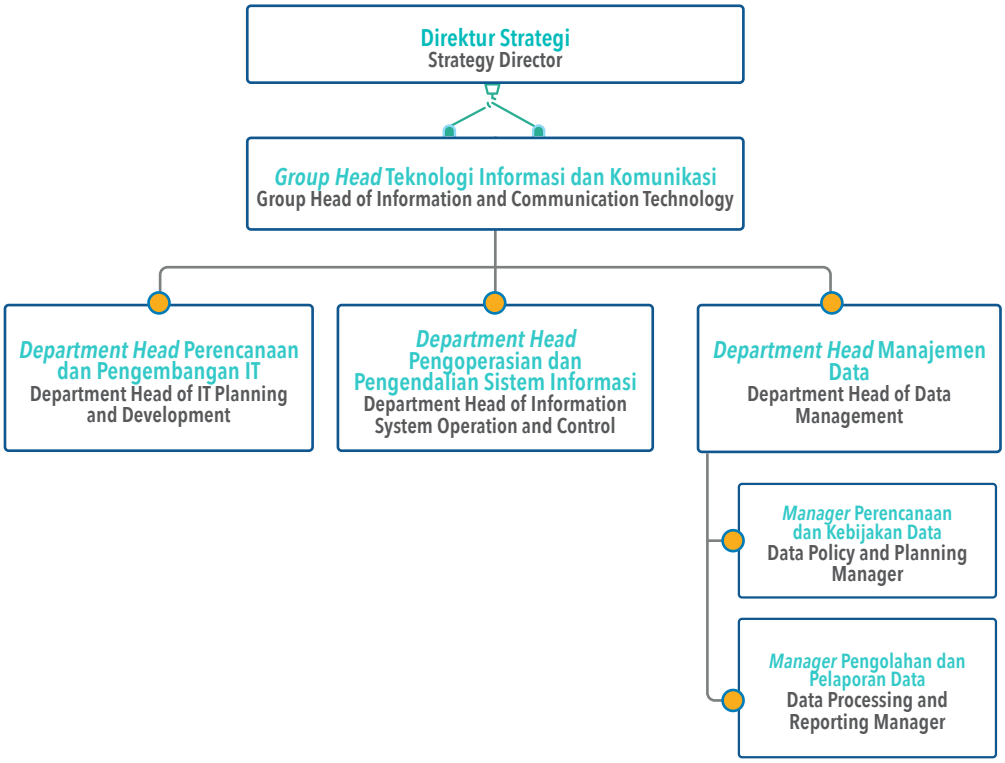
1. Strategic Policy
   a. Determination of the Role of the Company's ICT;
   b. ICT planning;
   c. ICT Process and Organizational Framework;
   d. ICT Investment Management;
   e. ICT Resource Management;
   f. ICT Risk Management;
   g. Project Management; and
   h. Identify Automated Solution).
2. Operational Policy
   a. Management of Information and Communication Technology Operations;
   b. ICT Service Management;
   c. ICT Security Management;
   d. Information System Development;
   e. ICT Service Handover;
   f. Post Implementation Review;
   g. Management of Third-Party Services;
   h. Quality Management;
   i. ICT Performance Monitoring and Evaluation;
   j. Internal Control Monitoring and Evaluation; and
   k. Management of Compliance External Regulations.

STRUKTUR PENGELOLA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur Pengelola Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara area kerja terbagi kedalam pengelola TIK Kantor Pusat, TIK Regional dan TIK *Subholding*. Struktur Pengelola Teknologi Informasi Kantor Pusat disebut juga *Group* Teknologi Informasi dan Komunikasi digambarkan sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION MANAGEMENT STRUCTURE

By work area, the structure of Information Technology Management of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is divided into Head Office ICT, Regional ICT and Subholding ICT management. The Head Office Information Technology Management, which is also known as the Group Information and Communication Technology is described as follows:



Tugas dan Tanggung Jawab Organ Pengelolaan TI pada *Group* Teknologi Informasi dan Komunikasi *Group* TIKS berada di bawah Direktorat Strategi dan dipimpin oleh seorang *Group Head*. Pada group TIKS, di bawah *Group head,* terdapat 3 departemen yang masing–masing dipimpin oleh *department head,* dan 2 posisi manager. Pembagian tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

1. *Department Head* Perencanaan dan Pengembangan IT
   a. Memastikan keselarasan dan kesinambungan proses pengembangan baru dan/atau penyempurnaan solusi TIK dengan kebutuhan BPO terkait berdasarkan analisis biaya dan ketercapaian manfaat;
   b. Memastikan agar proses perencanaan, akuisisi dan pengembangan solusi TIK sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan;
   c. Memastikan dilakukannya riset dan pengembangan dengan mempertimbangkan tren teknologi di industri kepelabuhanan untuk memberi solusi yang inovatif bagi bisnis;
   d. Memastikan adanya sinergi rencana strategis *Group* TIK ke dalam unit-unit terkait melalui pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan program kerja unit-unit terkait;

Duties and Responsibilities of IT Management Organ in Group Information and Communication Technology Group ICT System is under the Directorate of Strategy and is led by a Group Head. In Group ICT System, under the Head Group, there are 3 departments that led by a department head and 2 manager positions. The division of duties and responsibilities is as follows:

1. Department Head of IT Planning and Development
   a. Ensuring the alignment and continuity of the process of ICT new development and/or solution improvement with related BPO's needs based on cost and benefit achievement analysis;
   b. Ensure that the process of planning, acquisition and development of ICT solutions is in line with the Company's business needs;
   c. Ensure that research and development is carried out by taking into account technological trends in the port industry to provide innovative solutions for the business;
   d. Ensuring the synergy of Group ICT's strategic plans into related units through mentoring, monitoring and evaluation of the work programs preparation of related units;

e. Memastikan bahwa investasi TIK seimbang sesuai dengan nilai strategis yang diberikan bagi Perusahaan;
f. Memastikan adanya dukungan dan keterlibatan *Business Process Owner* atas penerapan inisiatif-inisiatif TIK;
g. Memastikan terwujudnya transformasi solusi TIK ke aktivitas operasional *Business Process Owner* melalui proses manajemen perubahan;
h. Memastikan tersedianya Rencana Kerja dan Portfolio TIK yang sesuai dengan target, strategi dan kebutuhan bisnis Perusahaan;
i. Memastikan agar Rencana Kerja dan Portfolio TIK diterjemahkan, dikembangkan dan dilaksanakan di dalam koridor yang telah disepakati bersama;
j. Memastikan adanya pengelolaan dan pemeliharaan Arsitektur TIK Perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola TIK serta sesuai dengan IT *Masterplan* perusahaan;
k. Memastikan adanya pengelolaan sumber daya manusia TIK yang meliputi proses perencanaan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu aset penting perusahaan;
l. Memastikan tersedianya proses pengelolaan Risiko TIK dalam pelaksanaan program kerja dan operasional TIK;
m. Memastikan adanya Kebijakan, *Standard* dan Prosedur TIK yang sesuai dengan kondisi Perusahaan dan menjamin adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya;
n. Memastikan adanya *Service Level Agreement* (SLA) dalam layanan TIK;
o. Memastikan adanya proses *monitoring* SLA, termasuk hasil analisis dan evaluasi kinerja SLA, dan penyusunan laporan konsolidasi mengenai kinerja dan pencapaian layanan secara berkala;
p. Menjamin adanya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan memastikan tersedianya dokumentasi proyek sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
q. Memastikan adanya pengelolaan *Change Management* dalam penyediaan layanan TIK;
r. Memastikan adanya pengelolaan *Quality Assurance* dalam penyediaan layanan TIK;
s. Memastikan adanya analisis profil vendor, penilaian Risiko dan ruang lingkup pekerjaan;
t. Memastikan adanya inventarisasi atas aset dan kajian terhadap efektivitas aset dalam memenuhi kebutuhan bisnis; dan
u. Menjamin adanya tindak lanjut dan perbaikan atas setiap rekomendasi yang telah disepakati bersama dengan auditor internal dan eksternal.

2. *Department Head* Pengoperasian dan Pengendalian Sistem Informasi
   a. Memastikan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh sumber daya yang mendukung jalannya operasional dan pelayanan TIK perusahaaan secara berkesinambungan;

e. Ensure that ICT investments are balanced according to the strategic value they provide to the Company;
f. Ensuring the support and involvement of the Business Process Owner for the implementation of ICT initiatives;
g. Ensuring the realization of ICT solutions transformation into Business Process Owner's operational activities through the change management process;
h. Ensuring the availability of an ICT Work Plan and Portfolio in accordance with the Company's targets, strategies and business needs;
i. Ensure that the ICT Work Plan and Portfolio are translated, developed and implemented within mutually agreed corridors;
j. Ensuring the management and maintenance of the Company's ICT Architecture in accordance with the principles of ICT governance and in accordance with the Company's IT Masterplan;
k. Ensuring the management of ICT human capital which includes the process of planning, coaching, and developing human capital as one of the Company's key assets;
l. Ensuring the availability of ICT Risk management processes in the implementation of work programs and ICT operations;
m. Ensuring the existence of ICT Policies, Standards and Procedures that are in accordance with the Company's conditions and ensuring regular evaluations of their implementation;
n. Ensuring the existence of a Service Level Agreement (SLA) in ICT services;
o. Ensure that an SLA monitoring process is carried out, including the results of analysis and evaluation of SLA performance, and the preparation of consolidated reports on service performance and achievement on a regular basis;
p. Ensuring the supervision of project implementation and the availability of project documentation in accordance with applicable standards and regulations;
q. Ensuring the management of Change Management in the provision of ICT services;
r. Ensuring the management of Quality Assurance in the provision of ICT services;
s. Ensuring vendor profile analysis, risk assessment and scope of work;
t. Ensuring an inventory of assets and a review of the effectiveness of assets in meeting business needs; and
u. Ensuring the follow-up and improvement of any recommendations that have been mutually agreed with the internal and external auditors.

2. Department Head of Information System Operation and Control
   a. Ensuring the monitoring and evaluation of the performance of all resources that support the Company's ICT operations and services on an ongoing basis;

b. Memastikan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas operasional dan pelayanan TIK sekaligus memastikan adanya langkah-langkah strategis untuk perbaikan dan pengembangan kualitas pelayanan berdasarkan standar dan target kerja perusahaan;
c. Memastikan ketersediaan, kapasitas, keamanan dan kehandalan layanan TIK;
d. Memastikan terlaksananya operasional infrastruktur jaringan dan *Data Center* dengan optimal sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku;
e. Memastikan kesiapan *Disaster Recovery Center* bila ada kegagalan pada *Data Center* utama;
f. Memastikan beroperasinya *help desk* dalam memenuhi kebutuhan dan menjawab keluhan pengguna layanan TIK sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan;
g. Melakukan investigasi, analisis dan menyelesaikan permasalahan pada layanan TIK dan kegagalan komponennya; dan
h. Memastikan penyelesaian permintaan perubahan/ penyempurnaan layanan TIK dilakukan dengan tepat waktu, terkendali, dan terdokumentasikan sesuai aturan yang berlaku.

3. *Department Head Manajemen* Data
a. Memastikan dan me-*review* manajemen data perusahaan dapat dikelola sesuai kebutuhan unit kerja terkait;
b. Memastikan dan me-*review* tersedianya fasilitas penyimpanan dan keamanan data perusahaan;
c. Memastikan dan me-*review* terhadap:
- Prosedur dan *framework* dalam melakukan pengelolaan data;
- Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kepemilikan data dan pengelola data;
- Program kerja terkait dengan perbaikan/ pengembangan manajemen data;
- Standar kualitas data dan *monitoring* atas kualitas data;
- Operasional data maupun *delivery* pengembangan terkait dengan data.

d. Merekomendasikan usulan terkait hal-hal sebagai berikut:
- Manajemen pengelolaan data;
- Arsitektur dan integrasi data;
- Standar kualitas data;
- Kebijakan terkait Penyimpanan data;
- Kebijakan terkait Penggunaan data.

e. Mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola data dengan para pihak yang berkepentingan namun tidak terbatas pada manajemen, *business process owners, data owners*; dan
f. Melakukan monitor terhadap pelaksanaan proses tata kelola data, standar kualitas data, kebijakan terkait penyimpanan data, dan kebijakan terkait penggunaan data.

4. Manager Perencanaan dan Kebijakan Data, mengusulkan dan menjalankan hal-hal sebagai berikut:
a. Prosedur dan *framework* dalam melakukan pengelolaan data;
b. Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kepemilikan dan pengelola data;

b. Ensure that the supervision and evaluation of all ICT operational activities and services is carried out, as well as ensure that there are strategic measures to improve and develop service quality based on company work standards and targets;
c. Ensuring the availability, capacity, security and reliability of ICT services;
d. Ensuring optimal implementation of network infrastructure and Data Center operations in accordance with applicable standards and procedures;
e. Ensuring the readiness of Disaster Recovery Center in the event of a failure in main Data Center;
f. Ensuring the operation of help desk in meeting the needs and responding to complaints from users of ICT services in accordance with the established SLA;
g. Conduct investigations, analyzes and resolve problems in ICT services and component failures; and
h. Ensuring the completion of requests for changes/ improvements to ICT services in a timely, controlled, and documented manner according to applicable regulations.

3. Department Head of Data Management
a. Ensure and review the management of company data according to the needs of relevant work units;
b. Ensure and review the availability of company data storage and security facilities;
c. Ensure and review:
- Procedures and frameworks in performing data management;
- Duties and responsibilities related to data ownership and data management;
- Work programs related to data management improvement/development;
- Data quality standards and data quality monitoring;
- Data operations and development delivery are related to data.

d. Recommend proposals regarding the following matters:
- Data management;
- Data architecture and integration;
- Data quality standards;
- Policies regarding Data retention;
- Policies regarding Data usage.

e. Coordinate matters relating to data governance with interested parties including but not limited to the management, business process owners, data owners; and
f. Monitor the implementation of data governance processes, data quality standards, policies related to data storage, and policies related to data usage.

4. Data Policy and Planning Manager, proposes and carries out the following:
a. Procedures and frameworks in performing data management;
b. Duties and responsibilities related to data ownership and management;

c. Program kerja terkait dengan perbaikan manajemen data;
d. Kebutuhan terkait data dan pelaporan;
e. Konsolidasi pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber dan melakukan pemeriksaan data untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data;
f. Analisa data terkait rencana bisnis jangka pendek dan panjang untuk meningkatkan proses, peluang, dan risiko bisnis;
g. Keselarasan terkait manajemen data serta kebutuhan terkait data dan pelaporan antara tim manajemen data dengan pihak-pihak terkait;
h. Desain solusi atas isu-isu operasional terkait dengan manajemen data sebagai titik kontak antara bisnis dan manajemen data; dan
i. Analisa dan pemetaan kebutuhan terkait data dan pelaporan dan kemudian membuat rencana implementasi berdasarkan kebutuhan.

5. Manager Pengolahan dan Pelaporan Data, mengusulkan dan menjalankan hal-hal sebagai berikut:
a. Desain standar kualitas data dan *monitoring* atas kualitas data;
b. Operasional data maupun dukungan atas *delivery* pengembangan baru terkait dengan data;
c. Program kerja terkait dengan perbaikan manajemen data Pemodelan data, data *flow*, dan kebutuhan kualitas pada model data;
d. Struktur data, deskripsi data, dan arsitektur data, serta mencakup model data, definisi data, diagram aliran data, data *dictionaries*;
e. Pemetaan atas kebutuhan bisnis, fungsionalitas sistem, dan proses bisnis untuk memelihara sumber dan pengembangan desain data;
f. Identifikasi spesifikasi, strategi data, dan dokumentasi arsitektur data dari sumber hingga tujuan; dan
g. Rencana implementasi solusi integrasi skala kecil hingga besar dengan mengadopsi beberapa teknologi.

c. Work programs related to data management improvement;
d. Needs related to data and reporting;
e. Consolidating data and information collection from various sources and conducting data checks to ensure data accuracy and completeness;
f. Analysis of data related to short and long-term business plans to improve business processes, opportunities and risks;
g. Alignment related to data management as well as needs related to data and reporting between the data management team and related parties;
h. Design of solutions for operational issues related to data management as a point of contact between business and data management; and
i. Analysis and mapping of requirements related to data and reporting and then making an implementation plan based on needs.

5. Data Processing and Reporting Manager, proposes and carries out the following:
a. Design of data quality standards and monitoring of data quality;
b. Data operations and support for the delivery of new developments related to data;
c. Work programs related to the improvement of data management, data modeling, data flow, and quality requirements in data models;
d. Data structure, data description, and data architecture, and includes data models, data definitions, data flow diagrams, data dictionaries;
e. Mapping of business requirements, system functionality, and business processes to maintain data sources and design development;
f. Identification of specifications, data strategy, and documentation of data architecture from source to destination; and
g. Implementation plans for small to large scale integrated solutions by adopting several technologies.

PROGRAM STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 2021

Pelindo telah melakukan berbagai pengembangan dan implementasi IT guna mendukung dan meningkatkan nilai tambah yang mengedepankan pengalaman baru bagi pelanggan. Adapun pengembangan dan implementasi yang telah dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Autogate* dan Terminal *Operating System* dalam rangka mendukung Program *National Logistic Ecosystem;*
2. Implementasi Sistem *Single E-Procurement;*
3. Pengembangan Aplikasi *Single* Tata Naskah;
4. Inventarisasi aset TI yang dimiliki Regional 1 – 4;
5. Pengembangan infrastruktur TI di Terminal Kijing Kalimantan Barat;
6. Penerapan SSL (*Secure Socket Layer*) untuk menunjang WFH (*Work From Home*) yang aman;
7. Penyusunan Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Pengembangan Aplikasi GEN-C;

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIC PROGRAM IN 2021

Pelindo has carried out a number of IT developments and implementations to support and increase added value that promotes new experiences for customers. The developments and implementations carried out in 2021 are as follows:

1. Implementation of Autogate and Terminal Operating System in order to support the National Logistic Ecosystem Program;
2. Implementation of Single E-Procurement System;
3. Development of Single Manuscript Application;
4. Inventory of IT assets owned by Regional 1 – 4;
5. IT infrastructure development at Kijing Terminal, West Kalimantan;
6. Application of SSL (Secure Socket Layer) to support secure WFH (Work From Home);
7. Preparation of Information and Communication Technology Governance;
8. Development of GEN-C Application;

9. Implementasi *Marine Operating System* pada Cabang Banten;
10. Pengembangan system NPK Billing dan *E-Service, Easy Billing* dan implementasi I-HUB di Cabang Pelabuhan Panjang;
11. Pengembangan *auto collection* di Cabang Pelabuhan Panjang, Pontianak, Jambi, Pangkal Balam, dan Sunda Kelapa;
12. Pengembangan *invoice management* SSC Portal di area kerja Pelindo II;
13. *Roll out e-Catalogue* di Anak Perusahaan dan KSO;
14. Integrasi *e-Procurement* dengan *Platform* Pasar Digital (PaDI) UMKM Kementerian BUMN;
15. Penyusunan IT *Master Plan* Pelindo I 2020 – 2024;
16. Penyusunan IT *Master Plan* Pelindo II 2020 – 2024;
17. Penyusunan Dokumen ITSP 2021-2025 Pelindo IV;
18. Pelaksanaan IT *Maturity Level Assessment* Pelindo IV; dan
19. Penyusunan DRP (*Disaster Recovery Plan*) untuk *Data Center* dan *Data Recovery Center* untuk seluruh perangkat lunak dan perangkat keras sebagai bagian dari *business continuity management* untuk layanan teknologi informasi.

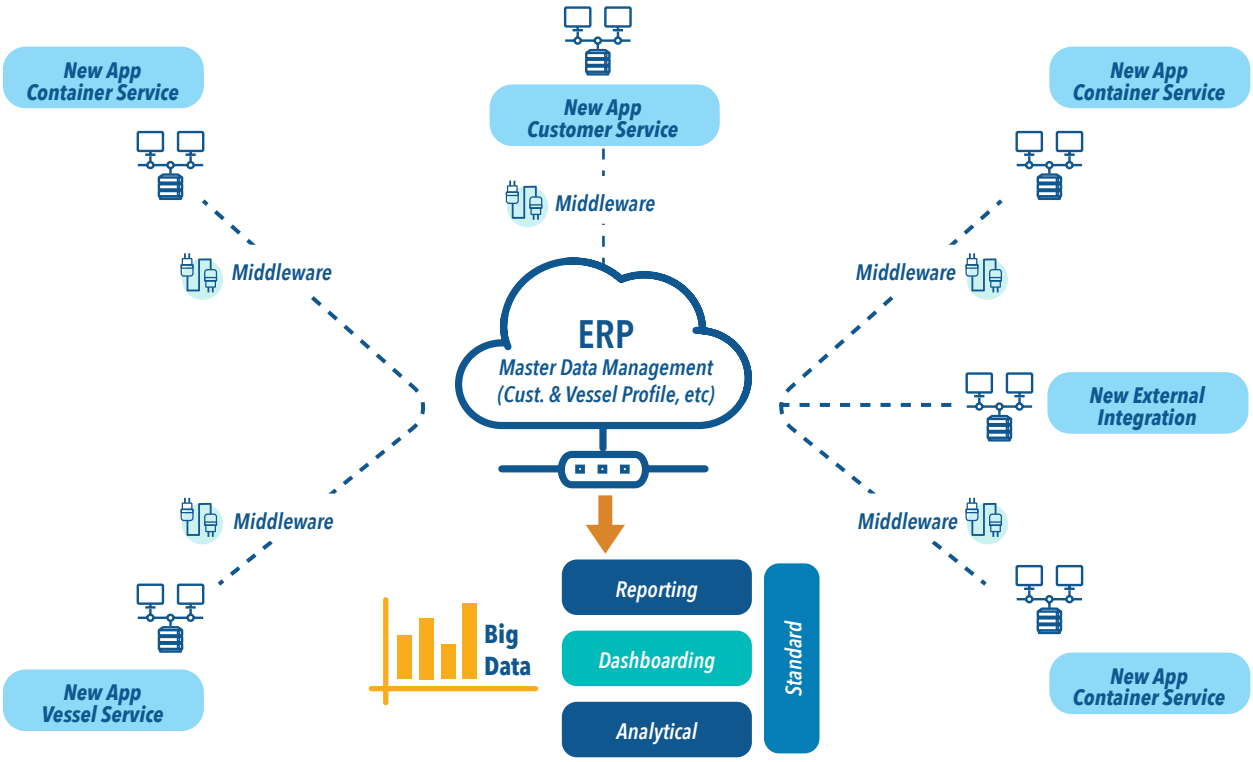
9. Implementation of Marine Operating System at Banten Branch;
10. Development of NPK Billing and E-Service system, Easy Billing and implementation of I-HUB at Panjang Port Branch;
11. Development of auto collection in Panjang, Pontianak, Jambi, Pangkal Balam, and Sunda Kelapa Branches;
12. Development of invoice management SSC Portal in the work area of Pelindo II;
13. Roll out e-Catalogue in Subsidiaries and JOs;
14. Integration of e-Procurement with the Digital Market Platform (PaDI) of the Ministry of SOEs;
15. Preparation of Pelindo I IT Master Plan 2020 – 2024;
16. Preparation of Pelindo II IT Master Plan 2020 – 2024;
17. Preparation of Pelindo IV ITSP Document 2021-2025;
18. Implementation of Pelindo IV IT Maturity Level Assessment; and
19. Preparation of DRP (Disaster Recovery Plan) for Data Center and Data Recovery Center for all software and hardware as part of business continuity management for information technology services.

RENCANA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2022

Pasca penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) terlihat berbagai macam variasi sistem aplikasi yang digunakan. Ke depan, akan dilakukan *re-engineering* aplikasi berdasarkan *cluster* layanan dengan menggabungkan fitur terbaik dari sistem eksisting untuk mendukung *value creation* yang lebih besar.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN AND STRATEGY IN 2022

After the merger of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero), there were lots of variations of the application system used. In the future, application re-engineering will be carried out based on service clusters by combining the best features from the existing system to support greater value creation.



Dalam pengembangan dan implementasi solusi teknologi informasi tahun 2022, terdapat tiga kategori umum bidang TIK yaitu, Pengembangan dan Implementasi Aplikasi, Peningkatan Infrastruktur IT dan IT *Strategic Management & Governance*. Adapun pengembangan dan implementasi yang akan dilakukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

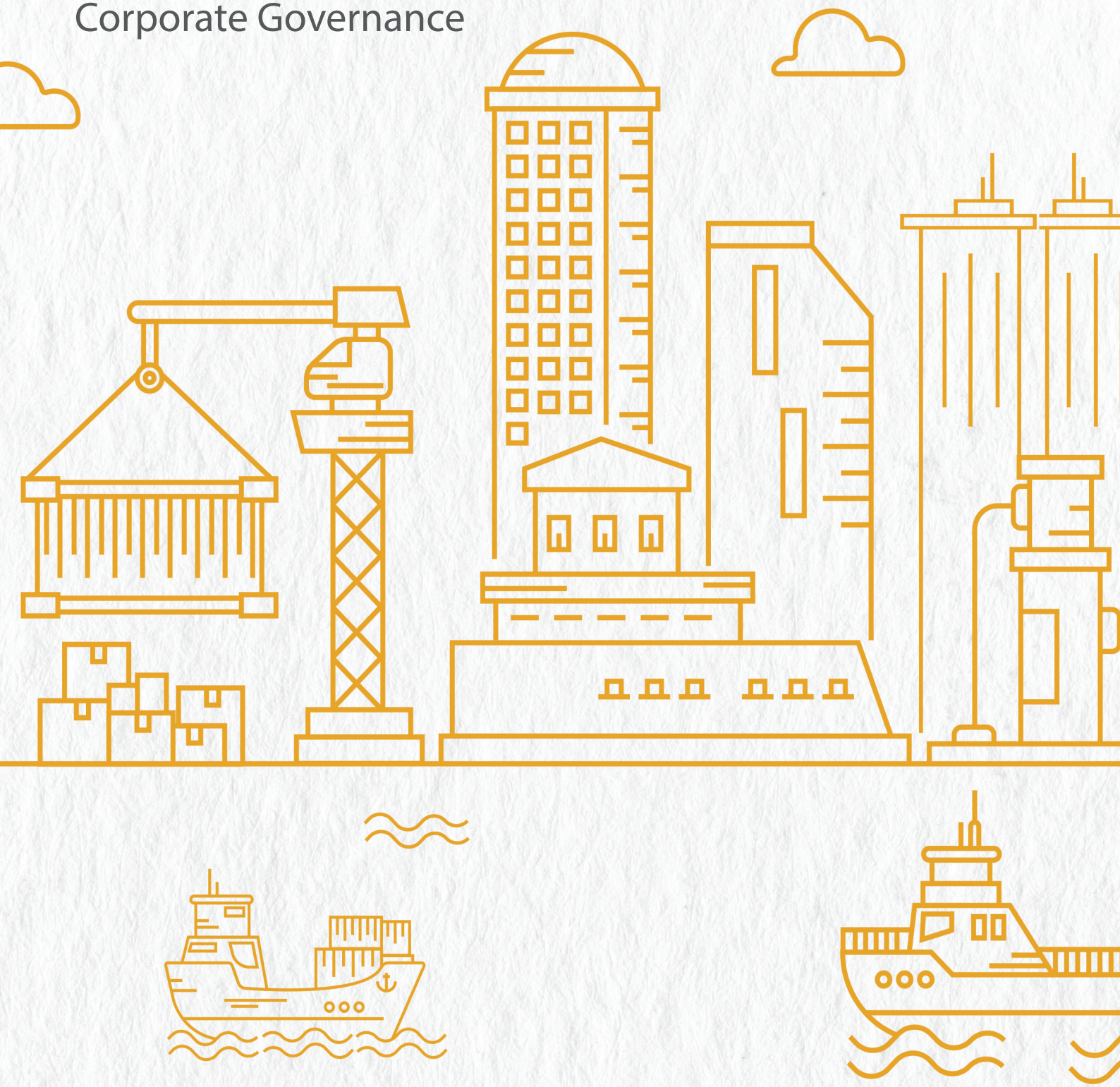
1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi
   a. Penyusunan Strategi dan Implementasi Single ERP;
   b. Pengembangan dan Implementasi *Dashboard Executive*;
   c. Pengembangan *Enhancement* SIMPANDA Area kerja Regional 2;
   d. Pengembangan dan Implementasi *Shared Service Center* SDM;
   e. Implementasi TOS di di area Kerja Regional 1; dan
   f. Implementasi Terminal *Operating System* TPK di area Kerja Regional 4.
2. Peningkatan Infrastruktur IT
   a. Pengembangan Infrastruktur TI Untuk mendukung implementasi *Single* ERP;
   b. Pembangunan *Command Center* di Gedung GPS Belawan;
   c. Pengembangan IT Infrastruktur di area kerja Terminal Regional 3;
   d. Pembangunan IT Infrastruktur di area Terminal TPK Regional 4; dan
   e. Pembangunan Infrastruktur untuk *Maritime Tower*.
3. Penyusunan IT *Strategic and Governance*
   a. Penyusunan IT *Master Plan* berdasarkan RJPP 2021 – 2025 berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2013;
   b. Melakukan asesmen IT *Maturity Level* untuk mengevaluasi penerapan Tata Kelola TI di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) oleh pihak independen;
   c. Melakukan asesmen INDI 4.0 untuk mengukur kesiapan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam bertransformasi menuju industri 4.0; dan
   d. Penyusunan dan standardisasi *master* data operasional sebagai *baseline* seluruh sistem.

In the development and implementation of information technology solutions in 2022, there are three general categories in the ICT sector, namely, Application Development and Implementation, IT Infrastructure Improvement and IT Strategic Management & Governance. The development and implementation that will be carried out in 2022 are as follows:

1. Application Development and Implementation
   a. Strategy Formulation and Implementation of Single ERP;
   b. Executive Dashboard Development and Implementation;
   c. Enhancement of SIMPANDA Regional 2 work area;
   d. Development and Implementation of HC Shared Service Center;
   e. Implementation of TOS in Regional 1 work area; and
   f. Implementation of TPK Terminal Operating System in Regional 4 work area.
2. IT Infrastructure Improvement
   a. IT Infrastructure Development to support the implementation of Single ERP;
   b. Construction of Command Center in GPS Belawan Building;
   c. Development of IT Infrastructure in Regional 3 Terminal work area;
   d. Development of IT Infrastructure in Regional 4 TPK Terminal area; and
   e. Infrastructure development for Maritime Tower.
3. Preparation of IT Strategic and Governance
   a. Preparation of IT Master Plan based on RJPP 2021 – 2025, as referred to the Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/2013;
   b. Conduct an IT Maturity Level assessment to evaluate the implementation of IT Governance at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) by an independent party;
   c. Conduct an INDI 4.0 assessment to measure the readiness of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in transforming towards industry 4.0; and
   d. Preparation and standardization of operational master data as a baseline for the entire system.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance



07



PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

ACHIEVEMENTS IN CORPORATE GOVERNANCE

Pelindo 1:

- ***Score* GCG : 95,63 dengan predikat sangat baik**
  GCG Score : 95.63 with very good predicate

Award:

- **BUMN Marketeers Award 2021 – *Silver Winner The Most Promising Company* in Tactical Marketing – 9 Juni 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021 : Kategori Terpopuler di Media Cetak 2020 Sub Kategori BUMN Non-Tbk, PR Indonesia tanggal 31 Maret 2021;**
- **Inhouse Magazine Award 2021 – *Bronze Winner* – 24 Februari 2021;**
- **Inews Maker Award 2021 - 7 April 2021.**

Award :

- **BUMN Marketeers Award 2021 – Silver Winner The Most Promising Company in Tactical Marketing – June 9, 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021: Most Popular Category in Print Media 2020 Sub-Category of BUMN Non-Tbk, PR Indonesia on March 31, 2021;**
- **Inhouse Magazine Award 2021 – Bronze Winner – February 24, 2021;**
- **Inews Maker Award 2021 - April 7, 2021.**

Pelindo 2:

- ***Score* GCG : 98,73 dengan predikat sangat baik**
  GCG Score : 98.73 with very good predicate

Award :

- ***Bronze Winner*, Kategori *Best Annual Report-Publicly Held Corporations*-Stevie Awards Tahun 2021;**
- ***Top Leader* on CSR *Commitment* 2021: Arif Suhartono Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)-Top CSR *Awards* 2021, TOP Business tanggal 22 April 2021;**
- **Top CSR *Awards* 2021 : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)-Top CSR *Awards* 2021 #Star 4, TOP Business tanggal 22 April 2021;**
- **Top GRC *Awards* 2021: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)-Top GRC *Awards* 2021 #Star 4, TOP Business tanggal 7 Oktober 2021;**
- **Top GRC *Awards* 2021: Arif Suhartono Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)-*The Most Committed* GRC *Leader* 2021, TOP Business tanggal 7 Oktober 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021: Sub Kategori *Corporate* PR, *Bronze Winner - Port Virtual* 2020 Run & Ride - PR Indonesia tanggal 31 Maret 2021;**
- ***Corporate Branding* PR *Awards* 2021: Kategori *Corporate Branding* PR - *Excellence in Public Relations Practice in* Indonesia - The Iconomics tanggal 22 April 2021;**
- **BUMN Non Tbk. Terpopuler di Media Digital 202, AMI #3 - Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2021 - PR Indonesia Group/ Humas Indonesia- Tanggal 17 Agustus 2021;**
- **3rd BUMN *Corporate Brand Awards* 2021 & Seminar *Building Brand Equity Through Corporate Communications : Preparing for The Upcoming Growth with Stronger Reputation* - BUMN Corporate PR Strategy - ICONOMICS- 12 Oktober 2021;**
- **Juara III Inovasi dan Teknologi - Anugerah BUMN - BUMN Track tanggal 8 April 2021.**

Award :

- **Bronze Winner, Best Annual Report-Publicly Held Corporations-Stevie Awards Category on 2021;**
- **Top Leader on CSR Commitment 2021: Arif Suhartono Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)-Top CSR Awards 2021, TOP Business on April, 22 2021;**
- **Top CSR Awards 2021 : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)-Top CSR Awards 2021 #Star 4, TOP Business on April, 22 2021;**
- **Top GRC Awards 2021: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)-Top GRC Awards 2021 #Star 4, TOP Business on October, 7 2021;**
- **Top GRC Awards 2021 : Arif Suhartono Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)-The Most Committed GRC Leader 2021, TOP Business 0n October, 7 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021 : Sub Category Corporate PR, Bronze Winner - Port Virtual 2020 Run & Ride - PR Indonesia on March, 31 2021;**
- **Corporate Branding PR Awards 2021 : Kategori Corporate Branding PR - Excellence in Public Relations Practice in Indonesia - The Iconomics on April , 22 2021;**
- **BUMN Non Tbk. Terpopuler di Media Digital 202, AMI #3 - Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2021 - PR Indonesia Group/ Humas Indonesia- on August, 17 2021;**
- **3rd BUMN Corporate Brand Awards 2021 & Seminar Building Brand Equity Through Corporate Communications : Preparing for The Upcoming Growth with Stronger Reputation - BUMN Corporate PR Strategy - ICONOMICS- on October, 12 2021;**
- **Juara III Inovasi dan Teknologi - Anugerah BUMN - BUMN Track tanggal April 8, 2021**

Pelindo 3:

- ***Score* GCG : 93,156 dengan predikat sangat baik**
  GCG Score : 93,156 with very good predicate

Award:
- **10th Anugerah BUMN 2021 Kategori Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), BUMN Track tanggal 8 April 2021;**
- **WSO Indonesia *Safety Culture Awards* (WISCA) 2021 # 4 Stars: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), WSO International tanggal 3 Februari 2021;**
- ***Top* CSR Awards 2021: Edi Priyanto Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)-*Top Leader on* CSR *Commitment* 2021, TOP Business tanggal 22 April 2021;**
- **Top CSR *Awards* 2021: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)-*Top* CSR *Awards* 2021 #Star 4, TOP Business tanggal 22 April 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021 : Sub Kategori *Corporate* PR, *Silver Winner - Port Virtual* 2020 *Run & Ride* - PR Indonesia tanggal 31 Maret 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021 : Sub Kategori *Sustainability Report, Gold Winner*- PR Indonesia tanggal 31 Maret 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021 : Sub Kategori Media Cetak, *Gold Winner* - Majalah Dermaga edisi September 2020- PR Indonesia tanggal 31 Maret 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021 : Kategori Terpopuler di Media Cetak 2020 Sub Kategori BUMN Non Tbk- PR Indonesia tanggal 31 Maret 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 202 : Sub Kategori Departemen PR, *Gold Winner*- PR Indonesia tanggal 31 Maret 2021;**
- ***2nd* Indonesia Corporate Branding PR *Awards* 2021: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) - *Port Operator*- PR Indonesia tanggal 31 Maret 2021.**

Award:
- **10th Anugerah BUMN 2021 Good Corporate Governance Category (GCG): PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), BUMN Track on April, 8 2021;**
- **WSO Indonesia Safety Culture Awards (WISCA) 2021 # 4 Stars: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), WSO International on February, 3 2021;**
- **Top CSR Awards 2021: Edi Priyanto Human Resources PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)-Top Leader on CSR Commitment 2021, TOP Business on April, 22 2021;**
- **Top CSR Awards 2021 : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)-Top CSR Awards 2021 #Star 4, TOP Business on April, 22 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021: Corporate PR Sub Category, Silver Winner - Port Virtual 2020 Run & Ride - PR Indonesia on March 31, 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021: Sub Category Sustainability Report, Gold Winner- PR Indonesia on March 31, 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021: Print Media Sub Category, Gold Winner - Dermaga Magazine September 2020 edition - PR Indonesia on March 31, 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021: Most Popular Category in Print Media 2020 Sub Category BUMN Non Tbk- PR Indonesia on March 31, 2021;**
- **Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021: PR Department Sub-Category, Gold Winner- PR Indonesia on March 31, 2021;**
- **2nd Indonesia Corporate Branding PR Awards 2021: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) - Port Operator- PR Indonesia on 31 March 2021.**

Pelindo 4:

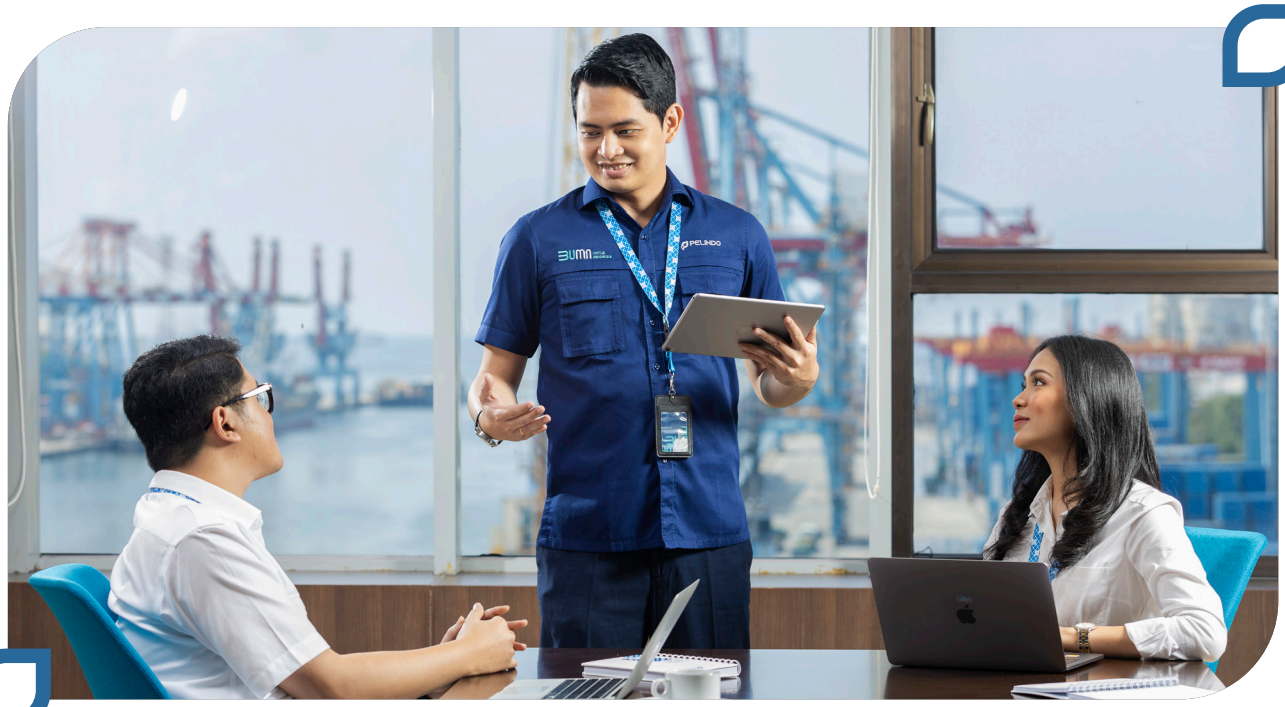
- ***Score* GCG : 91,93 dengan predikat sangat baik**
  GCG Score : 91.93 with very good predicate

Award:
- ***Top* CSR *Awards* 202 : Prasetyadi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) - *Top Leader* on CSR *Commitment* 2021, TOP Business tanggal 22 April 2021;**
- **Top CSR *Awards* 202 : PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) - *Top* CSR *Awards* 2021 #Star 4, TOP Business tanggal 22 April 2021;**
- ***The Best Digital Technology Team in Port & Logistics Industries - Digital Technology & Innovation (Digitech) Award* 2021.**

Award:
- **Top CSR Awards 2021: Prasetyadi President Director of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Top Leader on CSR Commitment 2021, TOP Business on 22 April 2021;**
- **Top CSR Awards 2021 : PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) - Top CSR Awards 2021 #Star 4, TOP Business on April 22, 2021;**
- **The Best Digitial Technology Team in Port & Logistics Industries - Digital Technology & Innovation (Digitech) Award 2021.**

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

BASIS OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION



Dalam menerapkan praktik GCG, Pelindo mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 10/MBU/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor

In implementing GCG practices, Pelindo refers to a number of laws and regulations, with the following descriptions:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT);
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOE);
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOE);
4. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 dated February 17, 2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER 10/MBU/2020 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER 02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.

PER-03/ MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/ MBU/04/2021 Tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/ MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; dan

7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners of Subsidiaries of State Owned Enterprises;

6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises; and

7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-11/MBU/07/2021 dated 30 July 2021 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Directors of State-Owned Enterprises.

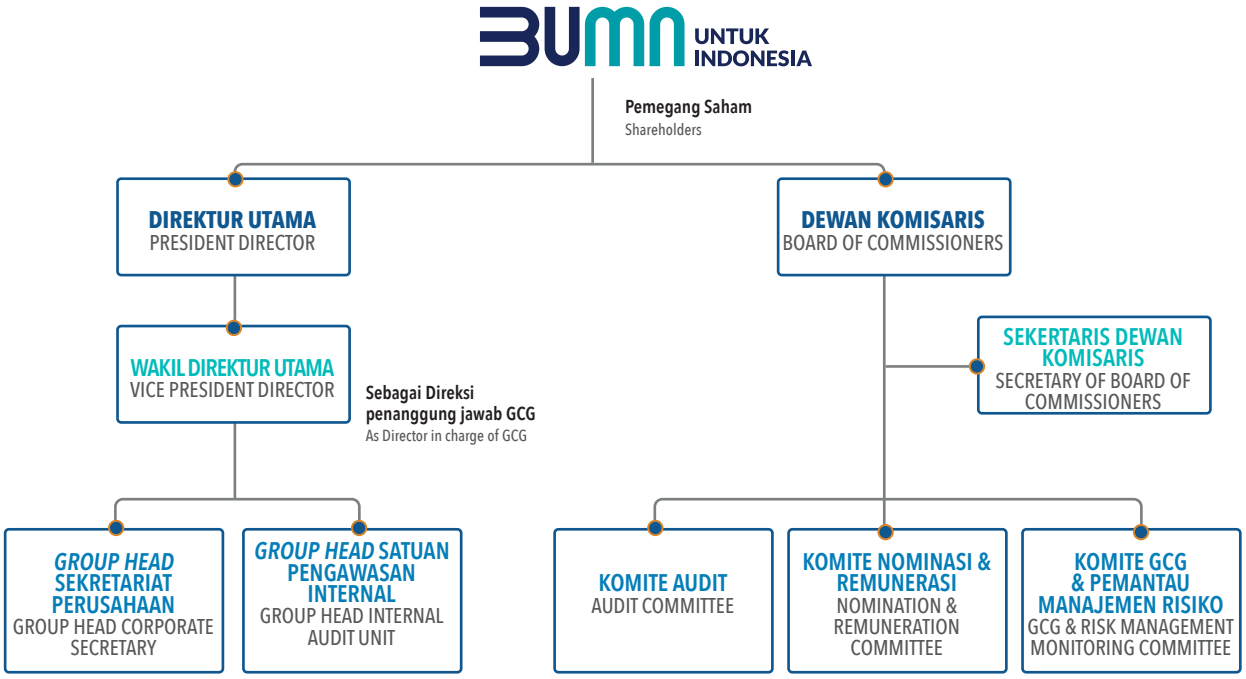
STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUCTURE AND MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE

STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

STRUCTURE OF CORPORATE ORGANS

ORGAN PENDUKUNG PERUSAHAAN DI BAWAH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
SUPPORTING ORGANS UNDER BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS



GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Dalam melaksanakan kegiatan Perseroan, Pelindo memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *governance soft structure*. *Governance soft structure* yang dimiliki Pelindo antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar;
2. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi;
3. *Board Manual* Direksi;
4. *Charter* Komite Audit;
5. *Charter* Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko;
6. *Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi;
7. Pedoman Kode Etik Bisnis;
8. Pedoman Pelaksanaan GCG Perusahaan;
9. Pedoman *Whistleblowing System;*
10. Pedoman Pengendalian Gratifikasi; dan
11. *Charter* Satuan Pengawasan Internal.

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

In carrying out the Company's activities, Pelindo has various policies/guidelines for executing its functions and duties, which are called the governance soft structure. Pelindo's governance soft structure includes:

1. Articles of Association;
2. Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors;
3. Board Manual of Board of Directors;
4. Audit Committee Charter;
5. GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter;
6. Nomination and Remuneration Committee Charter;
7. Code of Conduct;
8. Company GCG Implementation Guidelines;
9. Whistleblowing System Guidelines;
10. Gratification Control Guidelines; and
11. Charter Internal Audit Unit.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan RUPS melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak diterbitkannya pengumuman dan surat pemanggilan pelaksanaan rapat tersebut, seluruh bahan yang akan dibahas dalam RUPS telah tersedia di kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, para Pemangku Kepentingan yang menjadi peserta rapat dapat mengambil bahan tersebut. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP), sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelaksanaan RUPS didahului dengan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak Pemegang Saham

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS;
5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan, secara tepat waktu dan teratur;
6. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntungkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Pelindo dan suatu wadah atau forum bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak diterbitkannya pengumuman dan surat pemanggilan pelaksanaan rapat tersebut, seluruh bahan yang akan dibahas dalam RUPS telah tersedia di kantor Pelindo. Dengan demikian, para Pemangku Kepentingan yang menjadi peserta rapat dapat mengambil bahan tersebut.

Penyelenggaraan RUPS di Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan Pelindo setiap tahun,

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and is a forum where shareholders gather to make important decisions where the authority is not given to Boards of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations. GMS is held through a process of GMS announcement and summons in accordance with applicable regulations. After the announcement and summon letter for the meeting is published, all materials to be discussed at the GMS are available at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) office, so that the Stakeholders who will be participants in the meeting can take the material. GMS consists of Annual GMS and Extraordinary GMS. Annual GMS is held by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) every year, which includes Annual GMS on PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Annual Report of and Annual GMS on the Company's Work Plan and Budget (GMS RKAP), while Extraordinary GMS can be held at any time based on the needs and for the benefits of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). GMS holding is preceded by the GMS invitation, which is carried out in accordance with applicable regulations.

SHAREHOLDERS' RIGHTS

1. The right to request a GMS to be held;
2. The right to request information on the GMS agenda;
3. The right to submit proposals to be discussed in the GMS agenda;
4. The right to attend and vote in the GMS;
5. The right to obtain information about the Company, in a timely and regular manner;
6. The right to receive a portion of the Company's profits which are beneficial for Shareholders in the form of dividends and other profit sharing.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in Pelindo and is a forum where shareholders gather to make important decisions where the authority is not given to Boards of Directors and Board of Commissioners as stipulated in Pelindo's Articles of Association and all applicable laws.

GMS is held through a process of GMS announcement and summons in accordance with applicable regulations. After the announcement and invitation letter for the meeting, all materials to be discussed at the GMS are available at IPC office, so that the Stakeholders who will be participants in the meeting can take the material.

GMS in the Company consists of Annual GMS and Extraordinary GMS. Annual GMS is held by Pelindo every year, which includes

yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP). Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Annual GMS on Annual Report of and Annual GMS on the Company's Work Plan and Budget. While Extraordinary GMS can be held at any time based on the needs and for the benefits of the Company.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2021 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Januari 2021
Waktu : 18.30 WIB-19.45 WIB
Tempat : *Virtual Meeting* melalui Link Video Conference via Zoom Meeting

ANNUAL GMS ON THE APPROVAL OF 2021 CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET AND THE REALIZATION

The GMS was held on:

Day/Date : Friday, January 29, 2021
Time : 18.30 WIB-19.45 WIB
Place : Virtual Meeting melalui Link Video Conference via Zoom Meeting

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS PENGESAHAN RKAP TAHUN 2021

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT THE GMS ON 2021 RKAP APPROVAL

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Hadir Present
2	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
3	Nurrachman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
4	Raden Agus Haryoto Purnomo	Komisaris Commissioner	Hadir Present
5	Djaman Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Hadir Present
6	Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Hadir Present
7	Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Hadir Present
8	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
9	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Directo	Hadir Present
10	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik Engineering Director	Hadir Present
11	Muarip	Direktur Operasional Operations Director	Hadir Present
12	Ogi Rulino	Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	Hadir Present
13	Rima Novianti	Direktur Komersial Commercial Director	Hadir Present
14	Yon Irawan	Direktur Keuangan Finance Director	Hadir Present

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS RKAP TAHUN 2021 / DECISION AND REALIZATION OF 2021 RKAP GMS

Agenda Pertama First Agenda	
Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Approval of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Corporate Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024
Keputusan Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Visi Menjadi Ekosistem Maritim Berkelas Dunia b. Misi Membangun jaringan Pelabuhan dan Logistik Maritim yang terintegrasi guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan perdagangan Nasional c. Inisiatif Strategis • Rencana sinergi dan integrasi BUMN layanan pelabuhan melalui pelaksanaan *quick wins* standarisasi performansi Pelabuhan dan Pengelolaan Pelanggan Terintegrasi/secara Bersama (*Unified Key Account Management*). • Rata-rata pertumbuhan proyeksi operasional pada non petikemas diperkirakan naik sebesar 2,9-4, 7% pertahun, petikemas naik sebesar 2,5-4,5% pertahun, dan kapal naik sebesar 1,7-2,9% pertahun. • Besaran investasi yang dibutuhkan selama 5 tahun ke depan (2020-2024) sebesar Rp25,99 Triliun, untuk program *Business As Usual*, inisiatif strategis, dan Proyek Strategis Perusahaan yang di antaranya adalah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (antara lain Pengembangan Terminal *New* Priok dan Pelabuhan Kijing) serta Proyek Strategis lainnya yang masuk dalam *pipeline* pengembangan bisnis Perusahaan. • Pendanaan investasi direncanakan untuk menggunakan dana dari *Global Bond* Perusahaan, kas di luar *Global Bond* dan penambahan pinjaman baru (jika diperlukan), dengan detail sebagai berikut:	**Resolution** Approved PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Corporate Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024 with the following points: a. Vision Becoming a World Class Maritime Ecosyst b. Mission Building an integrated network of ports and maritime logistics to reduce logistics costs and improve national trade c. Strategic Initiatives • Plan for the synergy and integration of state-owned port services through the implementation of quick wins standardization of port performance and Unified Key Account Management. • Average operational growth projection for non-container is estimated to increase by 2.9 - 4.7% per year, container to increase by 2.5 - 4.5% per year, and ships to increase by 1.7 - 2.9% per year. • Total investment needed for the next 5 years (2020-2024) is Rp25.99 Trillion, for Business As Usual programs, strategic initiatives, and Corporate Strategic Projects which include the construction of National Strategic Projects (among others the Development of New Priok Terminal and Kijing Port) as well as other Strategic Projects that are included in the Company's business development pipeline. • Investment funding is planned to use funds from the Company's Global Bonds, cash other than Global Bonds and addition of new loans (if needed), with details as follows:

No	Pendanaan Investasi Investment Funding	Unit	2020	2021	2022	2023	2024
1.	*Global Bond*	%	100,00	100,00	100,00	-	-
2.	Kas di Luar *Global Bond* Cash other than Global Bond	%	-	-	-	90,00	85,00
3.	Pendanaan Lainnya Other Funding	%	-	-	-	10,00	15,00

- Implementasi program *Green Porl/Green Technology* pada tahun 2020-2024. | implementation of Green Port/Green Technology program in 2020-2024.

d. Pokok Laporan Keuangan Pokok | Principal Financial Statements

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	Rp Miliar Rp Billion	10,156.70	11,594.15	11,158.28	11,438.36	11,766.85	3.75
Laba Usaha Operating Profit	Rp Miliar Rp Billion	2.204,00	2,756.23	2,383.41	2,477.55	2,595.77	4.17
EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	3.075,80	3,664.73	3,392.57	3,512.82	3,657.77	4.43
Laba Bersih Net Profit	Rp Miliar Rp Billion	614.80	1.431,36	1.491,32	1,614.39	1,702.21	28.99
Investasi Investment	Rp Miliar Rp Billion	3,067,72	5,684.43	6,778.28	7,489.43	2,976.43	-0.75
Arus Kas Operas Operating Cash Flow i	Rp Miliar Rp Billion	1,356,29	1,918.97	2,760.81	2,528.14	2,892.50	20.85
Total Aset Total Assets	Rp Miliar Rp Billion	53.476,27	55,291.91	57,516.94	59,488.24	61,811.48	3.69
Total Liabilitas Total Liabilities	Rp Miliar Rp Billion	35,365.48	36,950.93	38,114.05	38,918,35	40,023.70	3.14
Total Ekuitas Total Equity	Rp Miliar Rp Billion	18,110.79	18,340.98	19,402.89	20,569.89	21,787.78	4.73

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 Termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Approval of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including Board of Commissioners 2021 Work Plan and Budget

Keputusan

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 Termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Resolution

Approved PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including Board of Commissioners 2021 Work Plan and Budget, with the following points:

a. Asumsi Penyusunan RKAP 2021

a. Assumptions for Compiling RKAP 2021

Uraian | Description	RKAP 2021
Nilai Tukar Rupiah/USD | Rupiah/USD Exchange Rate	14.600
Tingkat Inflasi (%) | Inflation Rate (%)	3.00
Pertumbuhan Ekonomi (%) | Economic Growth (%)	4.50
ICP (USD/Barrel) | ICP (USD/Barrel)	45.00
COVID *Recovery* | Covid Recovery	Q4 2021

b. Pokok-pokok Laporan Keuangan (Rp Miliar)

b. Principal Financial Statements (Rp Billion)

Uraian | Description	RKAP 2021
Pendapatan | Revenue	11,594.2
Laba Usaha | Operating Profit	2,756.2
EBITDA | EBITDA	3,664.7
Laba Bersih | Net Profit	1,431.4
Total Aset | Total Assets	55,291.9
Ekuitas | Equity	18,340.9
Interest Bearing Debt | Interest Bearing Debt	24,146.6
Net Operating Cash Flow | Net Operating Cash Flo	1,918.9

c. Investasi/CAPEX (Rp Miliar)

d. Investment/CAPEX (Rp Billion)

Uraian | Description	RKAP 2021
Bangunan Fasilitas Pelabuhan | Port Facility Building	2,896.7
Kapal | Ship	45.4
Alat Fasilitas Pelabuhan | Port Facility Tools	189.3
Instalasi Fasilitas Pelabuhan | Port Facility Installation	66.5
Tanah | Land	15.3
Jalan dan Bangunan | Roads and Buildings	248.7
Peralatan | Equipment	59.8
Kendaraan | Vehicle	0.4
Emplasemen | Emplacement	4.5
Investasi Non Fisik | Non-Physical Investment	380.8
Investasi Anak Perusahaan | Subsidiary Investment	829.6
Penyertaan Modal | Equity Capital	947.4
Total Investasi | Total Investment	5 684.4

Agenda Ketiga
Third Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Approval of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2021 Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL)
Keputusan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan pokok-pokok sebagai berikut:	**Resolution** Approved PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2021 Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL) with the following points:

Uraian | Description	RKAP 2021 (Rp Juta) RKAP 2021 (Rp Million)
Program Kemitraan | Partnership Program	
Dana Tersedia | Funds Available	49.071,04
Penggunaan Dana | Funds Used	49.071,04
Sisa Dana | Remaining Funds	0,00
Bina Lingkungan | Community Development	
Dana Tersedia | Funds Available	27.340,00
Penggunaan Dana | Funds Used	27.340,00
Sisa Dana | Remaining Funds	0,00

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021	Determination of the 2021 Annual Management Contract (Key Performance Indicator) between Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders
Keputusan Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.	**Resolution** Determining the 2021 Annual Management Contract (Key Performance Indicator) between Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders, as attached and is an integral part of this resolution.

No	KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
					Sub	Total
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia						46.00
Finansial | Financial						
1	ROIG-WAGG (*Cost of Equity* 3,28%)	%	0,58	*Maximize*	4.00	
2.	*Cash From Operation* (di luar pembayaran bunga) Cash From Operation (excluding interest payments)	Rp Miliar Rp Billion	2.993,89	*Maximize*	4.00	
3.	*Maximum Loss from Exchange Rate to Operating Income*	%	4,50	*Minimize*	4.00	
4.	*Interest Bearing Debt to Invested Capital*	%	56,83	*Minimize*	4.00	
5.	*Interest Bearing Debt to* EBITDA	Kali	6,59	*Minimize*	4.00	
Operasional | Operational						22.00
6.	*Througput*				11.00	
	a. Container Througput	TEUS	7.204.599	*Maximize*	6.00	
	b. Non Container Throghput	Ton	53.483.482	*Maximize*	5.00	
7.	B/S/H *Gross*	B/S/H	40,00	*Maximize*	6.00	
8.	*Waiting Time for Pilot*	Jam Hours	0,50	*Minimize*	5.00	
Sosial | Social						4.00
9.	Manfaat kesejahteraan masyarakat sekitar Pelabuhan Benefits for the welfare of community around the port	%	100,00	*Maximize*	4.00	
Inovasi Model Bisnis | Business Model Innovation						16.00
10.	Integrasi BUMN Layanan Kepelabuhanan SOEs Port Services Integration	%	90,00	*Maximize*	6.00	
11.	Standarisasi Performansi Pelabuhan Port Performance Standardization	%	100,00	*Maximize*	5.00	
12.	*Unified Key Account Management*	%	73,33	*Maximize*	5.00	
Kepemimpinan Teknologi | Technology Leadership						11.00
13.	Digitalisasi Pelayanan Pelabuhan Port Service Digitization	%	100,00	*Maximize*	6.00	
14.	Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan Implementation of Green Technology at the Port	%	100,00	*Maximize*	5.00	
Peningkatan Investasi | Investment Increase						11.00
15.	*Milestone* Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Port Infrastructure Development Milestone	%	100,00	*Maximize*	5.00	
16.	Optimalisasi Aset (Lahan dan Alat 8/M) Asset Optimization (Land and Equipment 8/M)	%	100,00	*Maximize*	6.00	
Pengembangan Talenta | Talent Development						16.00
17.	Pemenuhan Standar Keahlian Teknis Fulfillment of Technical Expertise Standards	%	100,00	*Maximize*	5.00	
18.	% Perempuan dalam *Nominated Talent* % Female in Nominated Talent	%	7,90	*Maximize*	6.00	
19.	Penyiapan Suksesor Milenial Millennial Successor	%	7,90	*Maximize*	6.00	
Jumlah Total						**100.00**

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021	Determination of 2021 Management Contract (Key Performance Indicator) between Board of Commissioners and Shareholders
Realisasi	**Realization**
Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.	Determined 2021 Management Contract (Key Performance Indicator) between Board of Commissioners and Shareholders, as attached and is an integral part of this resolution.

Key Performance Indicator

No	Indikator Pencapaian Kinerja | Performance Achievement Indicator	Satuan | Unit	Bobot | Weight	Target | Target
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan | Contribution to the company's performance achievements		10	
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi | Contribution to the realization of Board of Directors' KPI achievements	Poin Point	10	
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris | Timeliness of submission of Opinions and Suggestions that are the obligations of Board of Commissioners		20	
	a. Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2021, Laporan Triwulanan 2021, dan Laporan Tahunan 2020 | Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on RKAP 2021, Quarterly Report 2021, and Annual Report 2020	Hari Kerja Working Days	5	30
	b. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri | Responses to Board of Directors' actions that must be approved by the GMS/Minister	Hari Kerja Working Days	5	14
	c. Tanggapan alas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris | Responses to Board of Directors' actions that must be approved by Board of Commissioners	Hari Kerja Working Days	5	14
	d. Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan | Quarterly and Annual Board of Commissioners Report	Hari Kerja Working Days	5	30
3.	Kontribusi terhadap penerapan GCG | Contribution to the implementation of GCG		10	
	a. Kontribusi kualitas penerapan GCG | Contribution to the quality of GCG implementation	Poin Point	5	31,50
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG Aspek Dewan Komisaris | Follow-up to the Recommendations on the Results of GCG Assessment of Board of Commissioners aspect	%	5	100
4.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris | Meetings and Working Visits of Board of Commissioners		18	
	a. Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris | Number of Internal Meetings of Board of Commissioners	Jumlah Total	6	12
	b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi | Number of Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Total	6	12
	c. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang | Working Visit of Board of Commissioners to the Branch	Jumlah Total	6	7
5.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan | Supervision and direction to Board of Directors on Company plans and policies	Jumlah Total	14	7
6.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris | Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners		28	
	a. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris | Board of Commissioners Competency Improvement			
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris | Board of Commissioners Competency development	Pelaksanaan Implementation	10	4
	b. Efektivitas Organ Pendukung | Effectiveness of Supporting Organs			
	Komite Audit | Audit Committee			
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit | Implementation of Internal Audit Committee Meeting	Jumlah Total	3	12
	• Laporan Penugasan Komite Audit | Audit Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Manajemen Risiko | Risk Management Committee			
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR | Implementation of PMR Committee Internal Meeting	Jumlah Total	3	12
	• Laporan Penugasan Komite PMR | PMR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Nominasi dan Remunerasi | Nomination and Remuneration Committee			
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR | Implementation of NR Committee Internal Meetings	Jumlah Total	3	12
	• Laporan Penugasan Komite NR | NR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Jumlah | Total		100	

Agenda Keenam Fifth Agenda	
Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2021	Operational Aspect indicators for the Measurement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2021 Soundness Level
Keputusan Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2021, sebagai berikut:	**Resolution** Stipulated the Operational Aspect Indicators for the Measurement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2021 Soundness Level, as follows:

No	Indikator | Indicators	Satuan | Unit	Target | Target	Skor | Score	Bobot | Weight
Aspek Operasional Operational Aspect				**35**	**35,00**
1.	*Waiting Time For Pilot*	Jam Hours	BS (0,5)	9	9.0
2.	Tingkat Efektivitas Tambahan Petikemas Additional Container Effectiveness Level	%	BS (65,00)	9	9.0
3.	*Yard Occupancy Ratio* Petikemas Container Yard Occupancy Ratio	%	BS (40,00)	9	9.0
4.	Produktivitas B/M Petikemas - *Gross* Productivity of Container B/M - Gross	B/S/H	BS (40,00)	8	8.0

Agenda Ketujuh Seventh Agenda	
Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk Memberikan Persetujuan Apabila Terdapat Tindakan-tindakan yang Mengakibatkan Perubahan Alokasi Anggaran Investasi	Delegation of Authority to the Board of Commissioners to Approve If There Are Actions That Result in Changes to Investment Budget Allocation
Keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program/item investasi sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.	**Resolution** Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as does not change the investment program/item and does not exceed the total value investment.

REALISASI RUPS / GMS Realization

No	Arahan | Direction	Tindak Lanjut | Follow Up
1	Menyusun *cascading* langkah dan target pencapaian RJPP Tahun 2020-2024 yang terukur dengan penanggung jawab yang jelas serta melakukan evaluasi secara periodik. Prepare cascading of steps and targets for achieving the 2020-2024 RJPP that are measurable with clear responsibilities and conduct periodic evaluations.	Telah disusun Inisiatif Strategis (sebagai turunan dari sasaran strategis perusahaan) yang merupakan penjabaran langkah-langkah pencapaian RJPP Tahun 2020-2024. Inisiatif Strategis disusun secara jelas target setiap tahunnya untuk masing-masing Direktorat sebagai penanggung jawab dari inisiatif tersebut. Telah disusun KPI jangka panjang perusahaan ke dalam target tahunan secara spesifik dan terukur. Pada buku RJPP telah dijabarkan pula target-target tahunan untuk kinerja keuangan dan operasional perusahaan. RJPP dituangkan kedalam RKAP tahunan yang didalamnya mencakup Rencana Kerja Manajemen dan KPI. Pencapaian atas RJPP akan dievaluasi secara periodik dalam Laporan Manajemen RKAP. Strategic Initiatives (as derivatives of the Company's strategic goals) have been prepared, which outline the steps for achieving the 2020-2024 RJPP. Strategic Initiatives have annual clear targets for each Directorate as the unit in charge of the initiative. The Company's long-term KPIs have been compiled into specific and measurable annual targets. The RJPP book also describes the annual targets for the Company's financial and operational performance. The RJPP is incorporated into the annual RKAP, which includes the Management Work Plan and KPIs. The achievement of RJPP will be evaluated periodically in the RKAP Management Report.

No	Arahan | Direction	Tindak Lanjut | Follow Up
2	Memastikan seluruh insan perusahaan memahami dokumen RJPP Tahun 2020-2024 Perubahan melalui sosialisasi, dan penerapan *key performance indicators* agar diturunkan kepada unit-unit kerja sampai dengan target kinerja individual. Ensuring that all company personnel understand the Revised 2020-2024 RJPP document, through socialization, and the application of key performance indicators to be passed down to work units up to individual performance targets.	Telah dilakukan sosialisasi RJPP Tahun 2020-2024 kepada seluruh pegawai Pelindo *Group* dan menjadi acuan dalam setiap paparan pada forum manajemen. *Key performance indicators* (KPI) Perusahaan tiap tahunnya telah disusun dan diturunkan sampai level kinerja pegawai. Penerapan KPI Perusahaan dilakukan dengan *Cascading* KPI Direksi secara Kolegial menjadi KPI Direksi Individu, lalu diturunkan kepada para BOD-1 dan BOD-2 hingga target kinerja individu pegawai. The 2020-2024 RJPP socialization has been carried out to all Pelindo Group employees and has become a reference in every presentation at the management forum. Annually, the Corporate key performance indicators (KPI) have been compiled and broke down to the level of employee performance. The implementation of Corporate KPIs is carried out by cascading the collegial Board of Directors KPI into the Individual Director KPI, then passed down to BOD-1 and BOD-2 until the individual employee performance targets.
3	RKAP Tahun 2021 agar di-*breakdown* menjadi rencana bulanan untuk memudahkan *monitoring* dan evaluasi pencapaiannya RKAP 2021 to be broken down into a monthly plan, hence the achievements can be easily monitored and evaluated	RKAP telah di-*breakdown* per bulan baik di tingkat konsolidasi, regional, cabang, subholding, dan anak perusahaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin setiap bulannya dan dilaporkan pencapaiannya kepada Dewan Komisaris. The RKAP has been broken down per month at the consolidation, regional, branch, subholding and subsidiary levels. Monitoring and evaluation is carried out regularly every month and the achievements are reported to the Board of Commissioners.
4	Operasi perusahaan agar diupayakan untuk terus meningkatkan pendapatan, namun tetap berpegang pada efisiensi beban-beban usaha, baik beban pokok pendapatan maupun beban administrasi dan umum. The company's operations should be strived to increase revenue, but still adhere to the efficiency of operating expenses, both the cost of revenue as well as administrative and general expenses.	Pendapatan usaha tercapai 100,4% dari RKAP Tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 8% dari realisasi tahun sebelumnya. Perusahaan juga terus melakukan efisiensi, khususnya beban administrasi dan umum sehingga beban ini lebih rendah 17% dibandingkan tahun 2020 dan 11% di bawah RKAP tahun 2021. Operating revenues reached 100.4% from the 2021 RKAP and increased by 8% from the previous year's realization. The Company also continues to make efficiencies, especially administrative and general expenses, so that these expenses are 17% lower compared to 2020 and 11% below the 2021 RKAP.
5	Direksi agar memastikan bahwa penarikan pinjaman/pendanaan harus mempertimbangkan aspek *timing, sizing* dan *pricing* serta skema dan proses terbaik sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (*cost of fund*) serta tidak memberatkan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Board of Directors should ensure that loan/funding withdrawals must consider the timing, sizing and pricing aspects as well as the best schemes and processes so that the cost of funds can be made efficient and does not burden the company's financial performance in the future.	Sepanjang tahun 2021 Perusahaan melakukan *refinancing* pinjaman dalam rangka efisiensi *financing cost* dan berhasil membukukan beban bunga pinjaman yang lebih rendah sebesar Rp278 Miliar dari RKAP. Throughout 2021 the Company refinanced loans in the context of financing cost efficiency and managed to book lower loan interest expenses of Rp278 billion from the RKAP.
6	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, saran dan rekomendasi auditor baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. Board of Directors should follow up and complete the findings, suggestions and recommendations of the auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2020 and previous years. Follow-up to the completion of auditor's findings/suggestions to be discussed comprehensively with Board of Commissioners and reported in writing to Shareholders.	Tahun 2021 Perusahaan telah menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, saran dan rekomendasi auditor baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) dengan capaian Audit Internal (SPI) sebesar 96,25% telah ditindaklanjuti dan Audit Eksternal sebesar 333 rekomendasi dari total 463 rekomendasi yang telah sesuai ditindaklanjuti. Terhadap capaian tindaklanjut tersebut telah disampaikan secara triwulanan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. In 2021, the Company has followed up and completely completed the findings, suggestions and recommendations of auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI). 96.25% of Internal Audit (SPI) recommendations have been followed up and 333 recommendations of External Audit out of a total of 463 recommendations have been followed up. The follow-up achievements have been submitted quarterly to the President Director and the Board of Commissioners.
7	Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari RUPS diajukan secara tersendiri dengan dilengkapi sekurang-kurangnya tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi dan kajian risiko. The Board of Directors' actions that require written approval from the GMS are submitted separately, accompanied by at least Board of Commissioners' response, Board of Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies and risk studies.	Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahun melakukan penandatanganan pakta integritas. Direksi dan Dewan Komisaris juga menerapkan *board manual* Perusahaan yang meminta persetujuan tertulis Dari RUPS dengan melengkapi kajian tertulis dan kajian GRC. Board of Commissioners and Board of Directors sign an integrity pact every year. Board of Directors and Board of Commissioners also apply the Company's board manual, which requires written approval from the GMS by completing a written review and a GRC review.
8	Dewan Komisaris agar lebih meningkatkan pengawasan atas kebijakan dan tindakan Direksi terutama dalam bidang tata kelola perusahaan, operasional dan keuangan perusahaan yang sehat. Board of Commissioners should improve supervision over the policies and actions of Board of Directors, especially in corporate governance, operations and sound corporate finance.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas kebijakan dan tindakan Direksi Salah satu nya dengan pemberian masukan terhadap RKAP dan RJPP perusahaan. Board of Commissioners has supervised the policies and actions of Board of Directors. One of them is by providing input on the Company's RKAP and RJPP

No	Arahan | Direction	Tindak Lanjut | Follow Up
9	Direksi agar terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas SDM melalui program yang terukur untuk menciptakan lebih banyak calon suksesor dari kalangan milenial (termasuk di dalamnya memperhatikan keterwakilan perempuan) Board of Directors should continue to improve the skills and capabilities of SOM through measurable programs to create more potential successors from millennials (including paying attention to female's representation)	Pemenuhan Standar Keahlian Teknis telah dipenuhi melalui program-program pelatihan tersertifikasi, disamping itu pengembangan SDM juga dilaksanakan melalui beberapa program antara lain pelatihan baik secara *public training* maupun *in house training*, *learning wallet* serta program kepemimpinan yang secara komprehensif menyiapkan calon suksesor melalui modul-modul kegiatan. Technical Expertise Standards has been fulfilled through certified training programs. Besides that, HC development is also executed through several programs including public and in-house training, learning wallets and leadership programs, aiming to comprehensively prepare prospective successors through activity modules.
10	Memperkuat fungsi legal, pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan dalam rangka *early warning system*. Selanjutnya, Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan manajemen risiko serta melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham. Strengthening the company's legal, internal control and risk management function for early warning system. Furthermore, Board of Commissioners should evaluate the effectiveness of SPI's role and risk management and report the results to the Shareholders.	Melakukan perkuatan fungsi legal, pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan Divisi SPI, Manajemen Risiko dan Divisi Hukum secara rutin yang dilakukan per Triwulan, serta Membuat dan mengirimkan Laporan TW 1, 2 dan 3 kepada Pemegang Saham terkait realisasi kinerja Dewan Komisaris, termasuk didalamnya laporan hasil evaluasi atas efektivitas peran SPI dan manajemen risiko (point IV.2. Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan) Strengthening the legal function, internal control and risk management of the Company by conducting Coordination Meetings with SPI Division, Risk Management and Legal Division regularly which is conducted quarterly, as well as preparing and sending Q 1, 2 and 3 Reports to Shareholders regarding the realization of the Board of Commissioners performance, including an evaluation report on the effectiveness of the role of SPI and risk management (point IV.2. Evaluation/Direction/Response/Approval)
11	Memperhatikan saran dan pendapat Dewan Komisaris sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Nomor: 80/DK/PI.II/XI-2020 tanggal 25 November 2020 dan Nomor: 72/DK/PI.II/X-2020 tanggal 27 Oktober 2020. Taking into account the suggestions and opinions of Board of Commissioners as stated in letters Number: 80/DK/PI.II/XI-2020 dated November 25, 2020 and Number: 72/DK/PI.II/X-2020 dated October 27, 2020.	Berdasarkan Surat No. 80/DK/PI.II/XI-2020 tanggal 25 November 2020: 1. Dewan Komisaris telah: a. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP. 2. Atas Rancangan RJPP Tahun 2020-2024 Perubahan PT Pelindo II (Persero) yang disampaikan Direksi dengan surat Nomor PR.05/25/9/1/STR/UT/PI.II-2020 tanggal 25 September 2020, Dewan Komisaris telah menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 67/ DK/PI.II/IX-2020 tanggal 30 September 2020. Berdasarkan Surat No. 72/DK/PI.II/X-2020 tanggal 27 Oktober 2020: Atas rancangan RKAP Tahun 2021 yang disampaikan oleh Direksi, Dewan Komisaris telah meneliti dan menelaah rancangan tersebut dalam rapat Komite Dewan Komisaris dengan jajaran Manajemen dan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Dewan Komisaris memberi masukan atas rancangan RKAP Tahun 2021 dalam hal: a. Dampak penerapan PSAK 73 Akuntansi Sewa terhadap kinerja Anak Perusahaan. b. Pengaruh pendapatan (biaya) komprehensif lain terhadap laba (rugi) konsolidasi. c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Banding Pajak di Mahkamah Agung. d. Perubahan struktur organisasi di Kantor Pusat dan Cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dewan Komisaris telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 dan *Key Performance Indicators* (KPI) melalui surat Nomor: 63/DK/PI.II/IX-2020 tanggal 18 September 2020 yang merupakan bagian dari RKAP Tahun 2021, serta berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar seluruh target perusahaan pada tahun 2021 dapat tercapai.

No	Arahan | Direction	Tindak Lanjut | Follow Up
		Based on Letter No. 80/DK/PI.II/XI-2020 dated November 25, 2020: 1. Board of Commissioners has: a. Examined, reviewed and signed the RJPP and RKAP prepared by Board of Directors in accordance with the Articles of Association. b. Provided opinions and suggestions to the GMS regarding the RJPP and RKAP regarding the reasons for Board of Commissioners to sign the RJPP and RKAP. c. On the Draft of 2020-2024 RJPP Amendment to PT Pelindo II (Persero) submitted by Board of Directors with letter Number PR.05/25/9/1/STR/UT/PI.II-2020 dated September 25, 2020, Board of Commissioners has delivered responses via letter Number 67/ DK/PI.II/IX-2020 dated September 30, 2020. Based on Letter No. 72/DK/PI.II/X-2020 dated October 27, 2020: On the draft of 2021 RKAP submitted by Board of Directors, Board of Commissioners has examined and reviewed the draft in the Board of Commissioners' Committee meeting with the Management as well as the Board of Commissioners' meeting with the Board of Directors. From these discussions, the Board of Commissioners provided input on the draft of 2021 RKAP in terms of: a. Impact of the application of PSAK 73 Lease Accounting on the performance of Subsidiaries. b. Effect of other comprehensive income (expenses) on consolidated profit (loss). c. Legal Efforts to Review the Tax Appeal Decision at the Supreme Court. d. Changes in organizational structure at the Head Office and Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Board of Commissioners has submitted the 2021 Board of Commissioners Work Plan and Budget and Key Performance Indicators (KPI) through letter Number: 63/DK/PI.II/IX-2020 dated September 18, 2020 which is part of the 2021 RKAP, and is committed to improving the effectiveness and efficiency of the supervisory and advisory role to the Board of Directors, so that all company targets in 2021 can be achieved.
12	Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya akhir Februari 2021. Submit the Company's Annual Report including Financial Statements for the Fiscal Year 2020, which has been audited by the Public Accounting Firm no later than the end of February 2021.	Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik telah disampaikan kepada Pemegang Saham tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. The Company's Annual Report including the Financial Statements for the Fiscal Year 2020 audited by the Public Accounting Firm has been submitted to the Shareholders on time in accordance with applicable regulations.
13	Menyampaikan laporan secara tepat waktu melalui portal Kementerian BUMN dan senantiasa memperbaharui data/informasi portal tersebut yang terdiri dari portal Sistem Laporan Berkala (http://silaba.bumn.go.id), Portal Aset (http://asset.bumn.go.id), Portal SOM (http://sdm.bumn.go.id), Portal PKBL (http://pkbl.bumn.go.id) dan Portal Publik (www.bumn.go.id) serta melaporkannya kepada unit pengelola portal. Submit reports in a timely manner through the Ministry of SOE portal and constantly update the data/information on the portal which consists of Periodic Report System portal (http://silaba.bumn.go.id), Asset Portal (http://asset.bumn.go .id), SOM Portal (http://sdm.bumn.go.id), PKBL Portal (http://pkbl.bumn.go.id) and Public Portal (www.bumn.go.id) and report it to portal management unit.	Laporan periodik telah dilakukan secara tepat waktu melalui portal-portal BUMN dan Perusahaan memperoleh skor tertinggi dalam aspek administrasi pada Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2021. The Company's Annual Report including the Financial Statements for the Fiscal Year 2020 audited by the Public Accounting Firm has been submitted to the Shareholders on time in accordance with applicable regulations.
14	Berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan TJSL agar: Diutamakan yang mendukung kegiatan bisnis perusahan dan mampu melindungi serta meningkatkan kelangsungan usaha perusahaan, salah satunya dengan cara *community development* pada masyarakat sekitar wilayah usaha perusahaan yang terkena dampak langsung perusahaan-Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: RIS- 74/DSI.MBU. B/01 /2021. With regard to TJSL activities, it is necessary to prioritize those that support the company's business activities and are able to protect and improve the company's business continuity, one of which community development around the company's business areas that are directly affected by the company - Follow up and implement the recommendations for discussing TJSL Work Plan and Budget with the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility as stated in the Minutes of Meeting Number: RIS-74/DSI.MBU. B/01/2021.	Telah dilaksanakan kegiatan TJSL sesuai bidang prioritas dari Kementerian BUMN termasuk salah satunya adalah kegiatan Community Development, sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja TJSL Triwulanan dan Risalah Rapat Laporan Keuangan dan Pelaksanaan TJSL Tahun 2021. The Company's Annual Report including the Financial Statements for the Fiscal Year 2020 audited by the Public Accounting Firm has been submitted to the Shareholders on time in accordance with applicable regulations.

No	Arahan | Direction	Tindak Lanjut | Follow Up
15	Menindaklanjuti arahan Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Surat Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP Tahun 2021 Nomor: S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020. Follow up the Shareholders' directive as stated in the Shareholders' Aspiration Letter for the Preparation of 2021 RKAP Number: S-949/MBU/10/2020 dated October 23, 2020.	Penyusunan Buku RKAP tahun 2021 sudah mengakomodir dan menggunakan asumsi-asumsi yang Aspirasi Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Surat Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP Tahun 2021 Nomor: S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020. The Company's Annual Report including the Financial Statements for the Fiscal Year 2020 audited by the Public Accounting Firm has been submitted to the Shareholders on time in accordance with applicable regulations.
16	Buku RJPP Tahun 2020-2024, Buku RKAP Tahun 2021, Buku dan Risalah Pembahasan RKA-PKBL Tahun 2021, Kontrak Manajemen dan Tanggapan Dewan Komisaris, serta Arahan Pemegang Saham merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini. The 2020-2024 RJPP Book, 2021 RKAP Book, 2021 RKA-PKBL Discussion Book and Minutes, Management Contracts and Responses from the Board of Commissioners, and Shareholders' Directives are an integral part of the Minutes of this GMS.	Buku RJPP Pelindo terintegrasi telah ditetapkan pada November 2021. The integrated Pelindo RJPP book has been stipulated in November 2021.
17	Direksi agar mendukung, melaksanakan, dan mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan implementasi penggabungan (*Merger*) BUMN Pelabuhan (Pelindo I-IV) sesuai dengan arahan, inisiatif dan kebijakan kementerian BUMN; dalam rangka meningkatkan *value creation* bersama melalui kolaborasi penggunaan SOM, peralatan maupun pendanaan serta perencanaan pengembangan jaringan Pelabuhan yang terintegrasi secara Nasional. Board of Directors should support, implement, and take the necessary steps in the framework of the establishment and implementation of Port SOE Merger (Pelindo I-IV) in accordance with the directions, initiatives and policies of the Ministry of SOEs; in order to increase joint value creation through collaborative use of SOM, equipment and funding as well as planning for the development of nationally integrated port network.	Proses penggabungan Pelindo I-IV berhasil dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021. Dalam mendukung proses pra-penggabungan BUMN Pelabuhan, Direksi mendukung, melaksanakan dan mengambil langkah dalam tiap tahapannya, beberapa diantaranya berperan aktif Rakortas yang dilaksanakan sepanjang bulan juni hingga september 2022, berperan aktif dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI serta dalam penyusunan kajian bersama Penggabungan BUMN Pelabuhan (Manajemen Integrasi). The merger process of Pelindo I-IV was successfully carried out on October 1, 2021. In supporting the pre-merger process for Port SOEs, Board of Directors supported, carried out and took actions at each stage, some of which played an active role in the Coordination Meeting held from June to September 2022, as well in the Working Meeting of DPR RI Commission VI and in the preparation of joint study on the Merger of Port SOEs (Integration Management),
18	Direksi agar meningkatkan kinerja keuangan sehingga lebih berkesinambungan dengan secara bertahap mempertahankan rasio-rasio hutang pendanaan pada level rasio *investment grade.* *Board of Directors should improve financial performance in order to be more sustainable by gradually maintaining debt-funding ratios at the level of investment grade ratio.*	Perusahaan berhasil mempertahankan *rating* yang dikeluarkan *rating agency* dan dapat mempertahankan rasio-rasio/*covenant* yang dipersyaratkan oleh *rating agency*. he Company managed to maintain the rating issued by the rating agency and maintain the ratios/covenants required by the rating agency.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 DAN REALISASINYA

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2020 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 10 Mei 2021
Waktu	: 13.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat	: Video Conference Zoom Meeting

The GMS was held on:

Day/Date	: Monday, May 10, 2021
Time	: 13.00 WIB until finished
Venue	: Video Conference Zoom Meeting

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2020 ANNUAL REPORT

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Hadir Present
2	Nurrachman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
3	Raden Agus Haryoto Purnomo	Komisaris Commissioner	Hadir Present
4	Djaman Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Hadir Present
5	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
6	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
7	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik Engineering Director	Hadir Present
8	Muarip	Direktur Operasi Operations Director	Hadir Present
9	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	Hadir Present
10	Rima Novianti	Direktur Komersial Commerce Director	Hadir Present
11	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Hadir Present

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

OLUTION AND REALIZATION OF GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2020 ANNUAL REPORT

Agenda Pertama
First Agenda

Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.

Approval of the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020 and the Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2020.

Keputusan

Mengesahkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja (EY) sesuai laporannya Nomor: 00282/2.1032/AU.1/O6/0697-1/1/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolution

Ratify the 2020 Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2020 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro and Surja (EY) according to its report Number: 00282/2.1032/AU. 1/O6/0697-1/1/III/2021 dated March 25, 2021 with "unqualified" opinion, and gave full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions carried out in the Fiscal Year ending on December 31, 2020 as long as these actions are not criminal acts and are reflected in the Company's report books.

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.

Approval of Company's Partnership and Community Development Program Annual Report for Fiscal Year 2020.

Keputusan

Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja (EY) sesuai laporannya Nomor: 000328/2.1032/AU.2/06/0697-1/1/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Resolution

Ratify the 2020 Fiscal Year PKBL Annual Report and ratify the 2020 PKBL Financial Report which has been audited by the Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro and Surja (EY) according to their report Number: 000328/2.1032/AU.2/06/0697-1/1 /III/2021 dated March 25, 2021 with "unqualified" opinion, as well as giving full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of PKBL for 2020 Fiscal Year, as long as the action is not a criminal offense and is reflected in the report.

Agenda Ketiga Third Agenda
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020. Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2020.
Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp1.184.857.249.366,- sebagai berikut: - Sebesar 47,26% dari laba bersih atau sebesar Rp560.000.000.000,- ditetapkan sebagai deviden tunai; - Sebesar 52,74% dari laba bersih atau sebesar Rp624.857.249.366,- ditetapkan sebagai cadangan. **Resolution** Determine the use of Net Profit Attributable to Owners of Parent Entity of Fiscal Year 2020 amounted to Rp1,184,857,249,366 as follows: - 47.26% of net profit or Rp560,000,000,000 is determined as cash dividend; - 52.74% of the net profit or Rp624,857,249,366 is designated as reserve.

Agenda Keempat Fourth Agenda
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2021. Determination of Tantiem for Fiscal Year 2020, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Other Facilities and Allowances for 2021.
Keputusan Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2021, akan ditetapkan secara tersendiri. **Decision** Determination of Tantiem for Fiscal Year 2020, Salaries for Directors and Honorarium for Commissioners along with Other Facilities and Allowances for 2021, will be determined separately.

Agenda Kelima Fifth Agenda
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Partnership Program and Community Development Program for Fiscal Year 2021
Keputusan Penunjukan KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. **Decision** Appointment of KAP to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year and the Company's Partnership and Community Development Program Financial Statements for the 2021 Fiscal Year is carried out separately by the Minister of SOE as the GMS based on the Board of Commissioners' recommendation.

Realisasi RUPS

GMS Realization

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut
1	Direksi dan Dewan Komisaris diminta menjadi *role model (lead in example)* dalam setiap perilaku kerja setiap insan perusahaan dalam penerapan nilai-nilai AKHLAK sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN Board of Directors and Board of Commissioners are asked to be role model (lead in example) in every work behavior of every employee of the company in the application of AKHLAK values as determined by the Minister of SOEs	Dewan Komisaris dan Direksi terlibat dalam seluruh program transformasi budaya perusahaan khususnya: 1. Peringatan Hari Ulang Tahun Akhlak 2. *Sharing Session* Program: BERLABUH (Bincang Bersama Pelabuhan Indonesia) 3. NGOBRAS (Ngobrol Bareng Santuy) 4. Video AKLAK Board of Commissioners and Board of Directors are involved in all corporate culture transformation programs in particular: 1. AKHLAK Anniversary 2. Sharing Session Program: BERLABUH (Talk with Indonesian Ports) 3. NGOBRAS (Chat Together Casually) 4. AKHLAK Video
2	Direksi dan Dewan Komisaris perlu memastikan agar setiap pelaksanaan kerja sama pemanfaatan/optimalisasi aset dengan pihak ketiga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan diupayakan untuk dapat memberikan keuntungan yang setinggi-tingginya; Board of Directors and Board of Commissioners need to ensure that every implementation of asset utilization/optimization cooperation with third parties is carried out by taking into account the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and strives to provide the highest profit;	Setiap rencana pengembangan dan kerjasama, terlebih dilakukan kajian yang komprehensif mencakup analisa pasar, analisa kelayakan ekonomi dan finansial, analisa risiko dan analisa teknik dan operasi, yang kemudian akan diproses dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi terkait kerjasama dengan mitra Each development and cooperation plan, especially a comprehensive study of market analysis, economic and financial feasibility analysis, risk analysis and technical and operational analysis, which will then be processed and implemented in accordance with the Board of Directors' Regulations regarding cooperation with partners.

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut
3	Terhadap anak perusahaan yang belum memberikan kontribusi kepada perusahaan, Direksi diminta memberikan arahan kepada manajemen anak perusahaan untuk lebih fokus melakukan pengembangan usaha dan menggali strategi inisiatif baru pada sektor-sektor yang berpotensial menghasilkan pendapatan For subsidiaries that have not contributed to the company, Board of Directors is asked to provide direction to the management of subsidiaries to focus more on business development and explore new initiative strategies in sectors that have the potential to generate revenue.	Upaya peningkatan kinerja telah dilakukan dan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Anak Perusahaan tahun 2021 menunjukkan hasil positif dan/atau peningkatan kinerja utamanya atas anak-anak perusahaan yang pada periode tahun buku 2020 belum memberikan kontribusi optimal pada Perusahaan. Each development and cooperation plan, especially a comprehensive study of market analysis, economic and financial feasibility analysis, risk analysis and technical and operational analysis, which will then be processed and implemented in accordance with the Board of Directors' Regulations regarding cooperation with partners.
4	Direksi agar terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas SDM melalui program yang terukur untuk menciptakan lebih banyak calon suksesor dari kalangan milenial (termasuk di dalamnya memperhatikan keterwakilan perempuan); Board of Directors should continue to improve the skills and capabilities of human capital through measurable programs to create more prospective successors from the millennial circle (including paying attention to the representation of women);	Pemenuhan Standar Keahlian Teknis telah dipenuhi melalui program-program pelatihan tersertifikasi, disamping itu pengembangan SDM juga dilaksanakan melalui beberapa program antara lain pelatihan baik secara public training maupun in house training serta program kepemimpinan yang secara komprehensif menyiapkan calon suksesor melalui model-model kegiatan. Technical Expertise Standards Fulfillment has been met through certified training programs, in addition HR development is also carried out through several programs including training both in public and in-house training as well as leadership programs that comprehensively prepare prospective successors through activity models.
5	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan, catatan serta saran/rekomendasi baik dari auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI/BPK-RI termasuk instansi pengawasan berwenang lainnya) maupun auditor internal Perseroan yang belum dinyatakan selesai ditindaklanjuti. Progres tindak lanjut penyelesaian temuan-temuan dimaksud agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan disampaikan tertulis secara berkala kepada Pemegang Saham Board of Directors should follow up and completely resolve any findings, notes and suggestions/recommendations from external auditors (Public Accounting Firm/KAP, Financial and Development Supervisory Agency/BPKP, and the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia/BPK-RI including other authorized supervisory agencies) as well as the Company's internal auditors who have not been declared as having followed up. The progress of follow-up to the completion of findings should be discussed comprehensively with Board of Commissioners and submitted in writing on a regular basis to the Shareholders	Tahun 2020 Perseroan telah menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, saran dan rekomendasi auditor baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) dengan capaian tindak lanjut Audit Internal (SPI) sebesar 99% telah ditindaklanjuti untuk rekomendasi tahun 2011 -2018 dan sebesar 83% dari 626 rekomendasi telah ditindaklanjuti untuk rekomendasi tahun 2019 serta Audit Eksternal sebesar 115 rekomendasi dari total 190 rekomendasi yang telah sesuai ditindaklanjuti. Terhadap capaian tindaklanjut tersebut telah disampaikan secara triwulanan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. In 2020, the Company has followed up and completely completed the findings, suggestions and recommendations of the auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI). 99% recommendations of Internal Audit (SPI) in 2011-2018 have been followed-up and 83% of 626 recommendations in 2019 have been followed up, and for External Audit, 115 from a total of 190 recommendations have been followed up. The follow-up achievements have been submitted quarterly to the President Director and the Board of Commissioners.
6	Direksi agar senantiasa menjaga konsistensi dalam melakukan monitoring dan updating data pada 5 (lima) portal BUMN, yakni portal *Financial Information System*, Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal Publik. Progres pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan Board of Directors must always maintain consistency in monitoring and updating data on 5 (five) SOE portals, namely the Financial Information System portal, Asset Portal, HC Portal, PKBL Portal, and Public Portal. The progress of updating the data in the portal should be reported in the quarterly management reports and annual reports	*Monitoring, updating* data, dan pelaporan dalam portal BUMN telah dilakukan secara rutin dan tidak melewati batas waktu yang ditetapkan sehingga Perusahaan mendapatkan skor tertinggi dalam hal administrasi dalam tingkat kesehatan. Monitoring, updating of data, and reporting in the SOE portal have been carried out regularly and have not exceeded the stipulated time limit so that the Company obtained the highest score in terms of administration in soundness level.
7	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesuai surat yang disampaikan Nomor: 24/DK/P1.11/V-2021 tanggal 7 Mei 2021 Board of Directors should follow up on matters that become recommendations from Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) according to the letter submitted Number: 24/DK/P1.11/V-2021 dated 7 May 2021	Manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris yg dibuktikan dengan adanya pencapaian laba yg diperoleh sesuai dgn target yg telah ditetapkan. Management has followed up on the recommendations of the Board of Commissioners, proven by the achievement of profits in accordance with the set targets.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2020 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 24 Januari 2020
Waktu : 15.30 WIB – 16.30 WIB
Tempat : Kantor Kementerian BUMN RI, Jakarta

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2020 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

The GMS was held on:
Day/Date : Friday, January 24, 2020
Time : 3.30 WIB – 4.30 WIB
Location : Ministry of SOEs, Jakarta

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS PENGESAHAN RKAP TAHUN 2020

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT AGMS ON APPROVAL OF 2020 RKAP

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Djadmiko	Komisaris merangkap Komisaris Utama Commissioner concurrently as President Commissioner	Hadir Present
2	Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Hadir Present
3	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
4	Raden Agus Haryoto Purnomo	Komisaris Commissioner	Hadir Present
5	Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Hadir Present
6	Djaman Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Hadir Present
7	Elvyn Gani Masassya	Direktur Utama President Director	Hadir Present
8	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
9	Arif Suhartono	Direktur Komersial Commercial Director	Hadir Present
10	Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	Hadir Present
11	Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Engineering Director	Hadir Present
12	Prasetyadi	Direktur Operasional Operations Director	Hadir Present
13	Rizal Ariansyah	Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum Human Resources and General Affairs Directo	Hadir Present
14	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	Hadir Present

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS RKAP TAHUN 2020 DECISION AND REALIZATION OF 2020 RKAP GMS

Agenda Pertama First Agenda
Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020. Ratification of 2020 Corporate Budget Work Plan (RKAP).

Keputusan
Resolution

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:
Ratified the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), with the following points:

1. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian
   Consolidated Statement of Income (Loss)

Uraian Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) Amount (in Million Rupiah)
Pendapatan Usaha Operating revenues	13.500.795
Laba Setelah Pajak Profit After Tax	3.105.693

2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
   Consolidated Statement of Financial Position

Uraian Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) Amount (in Million Rupiah)
Total Aset Total Assets	59.176.641
Liabilitas Liabilities	38.600.649
Ekuitas Equity	20.575.992

3. Investasi
   Investment
   Rencana Investasi tahun 2020 sebagai berikut.
   Investment plan for 2020 is as follows.

Uraian Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) Amount (in Million Rupiah)
Bangunan fasilitas pelabuhan Harbor facility building	1.953.926
Kapal Ship	38.600
Alat fasilitas pelabuhan Port facility tools	67.170
Instalasi fasilitas pelabuhan Installation of port facilities	48.944
Tanah Land	13.026
Jalan dan bangunan Roads and buildings	232.030
Peralatan Equipment	102.721
Kendaraan Vehicle	4.600
Emplasemen Emplacement	4.871
Non-fisik Non physical	126.395
Kapitalisasi bunga Interest capitalization	147.798

Uraian Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) Amount (in Million Rupiah)
Anak Perusahaan Subsidiary	1.579.960
Penyertaan Modal Perusahaan Induk Parent Company Equity Participation	1.998.470
Total Investasi Total Investment	6.318.511

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10 persen (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program/item investasi, sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.
Delegating authority to the Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10 percent (ten percent) of the value of each investment program/item, as long as it does not change the program /investment items and does not exceed the total investment value.

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020.
Ratification of the 2020 Partnership and Community Development Program Budget Work Plan (RKA PKBL).

Keputusan
Resolution

Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesuai dengan Risalah Rapat No. RIS-29/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 18 November 2019.
Ratified the Budget Work Plan of the Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) for 2020 (two thousand and twenty) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting No. RIS-29/D7.MBU.3/11/2019 dated November 18, 2019.

Uraian Description	Jumlah (dalam Jutaan Rupiah) Amount (in Million Rupiah)	
	Kemitraan Partnership	Bina Lingkungan Community Development
Dana Tersedia Funds Available	47.847.674.685	24.737.964.260
Penggunaan Dana Funds Used	47.847.674.685	24.737.964.260
Sisa Dana / Remaining funds	-	-

Agenda Ketiga
Third Agenda

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020.
Approval and Ratification of 2020 Management Contract (Key Performance Indicators) of Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders

Keputusan
Resolution

Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020
Approved and ratified 2020 Management Contract (Key Performance Indicator) of Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020.
Approval and Ratification of 2020 Management Contract (Key Performance Indicators) of Board of Commissioners with Shareholders

Keputusan
Resolution

Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen *(Key Performance Indicator)* antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020.
Approved and ratified 2020 Management Contract (Key Performance Indicator) of Board of Commissioners with Shareholders

Agenda Kelima Fifth Agenda
Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020 Determination of Operational Aspect Indicators for Measurement of Corporate Soundness Level in 2020
Keputusan Resolution
Menetapkan indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020. Determined Operational Aspect indicators for Measurement of Corporate Soundness Level in 2020.

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Skor Score
I	**Pelayanan Jasa Kapal** Ship Service		
1.	Waiting Time for Pilot Waiting Time for Pilot	Jam Hours	9,00
2.	Tingkat Efektivitas Tambatan Peti Kemas Container Mooring Effectiveness Level	%	9,00
II	Pelayanan Jasa Barang Goods Service		
1.	Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas Productivity Loading and Unloading Containers	B/S/H	8,00
2.	Yard Occupancy Ratio Peti Kemas Yard Occupancy Ratio Container	%	9,00
Total Bobot Total Weight		35,00	

ARAHAN RUPS

GMS DIRECTIVES

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow Up
1	RKAP Tahun 2020 yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan *cascading* ke seluruh jajaran Perseroan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan *cascading* dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan I tahun 2019. The 2020 RKAP that has been ratified should be broken down into monthly targets and cascading to all levels of the Company. The Board of Commissioners is required to report the detailed and cascading results to Shareholders in the first quarter of 2019.	RKAP tahun 2020 telah dirinci per bulan baik di tingkat konsolidasi, regional, cabang, *subholding*, dan anak perusahaan. The 2020 RKAP has been detailed monthly at the consolidation, regional, branch, subholding, and subsidiary levels.
2	Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (*cost reduction program*) di semua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan Perseroan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen Perseroan. Strive to increase revenue and control costs (cost reduction program) in all lines of business in order to realize more effective and efficient management of the Company, and net profit is the minimum target that must be achieved by all levels of the Company's management.	Di tengah pandemic COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap kinerja sepanjang 2020, perusahaan selalu mengupayakan kenaikan pendapatan dan pengendalian biaya sehingga tetap membukukan laba positif pada tahun 2020. In the midst of the Covid-19 pandemic that significantly affect the performance throughout 2020, the Company sought increase revenue and control expenses, hence managed to continue recording positive profit in 2020.
3	Menindaklanjuti kerja sama dan sinergi yang telah dicanangkan dengan BUMN Pelabuhan maupun BUMN lainnya dalam hal pengembangan usaha kepelabuhanan, pemanfaatan aset, pengembangan SDM, *joint procurement*, serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. Following up on the cooperation and synergy that has been launched with the SOE Port and other SOEs in terms of port business development, asset utilization, HC development, joint procurement, as well as utilization and development of information technology.	Beberapa inisiatif untuk melakukan pengembangan usaha diantaranya adalah: 1. Kerjasama pengembangan pelabuhan milik Kementerian/Lembaga; 2. kerjasama pengembangan layanan operasi TUKS bekerjasama dengan BUMN dan swasta; 3. Kerjasama sinergi investasi dengan strategic partners (seperti INA) dalam rangka pengembangan pelabuhan; 4. Melakukan kajian eksplorasi kerjasama dengan BUMN dan swasta di bidang logistik (ex: *cold storage* dan multimoda kereta api); 5. Melakukan kajian rencana pengoperasian TUKS milik BUMN dan swasta; 6. Kajian eksplorasi pengembangan international *transshipment* di Kuala Tanjung melalui eksplorasi *partnership*. Several initiatives in business development include: 1. Cooperation in the development of ports belonging to the Ministry/ Agency, 2. Cooperation in the development of TUKS operational services in collaboration with SOE and private sector, 3. Investment synergy cooperation with strategic partners (such as INA) in the context of port development 4. Conduct exploratory studies in cooperation with SOE and private sector in logistics (ex: cold storage and multimode trains) 5. Review the plan for the operation of TUKS owned by SOE and private 6. Exploration study of international transshipment development in Kuala Tanjung through partnership exploration

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow Up
4	Melakukan *review* dan mapping terhadap bisnis Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dan menetapkan kebijakan strategis terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan sinergitas dalam *group* untuk meningkatkan *value* serta senantiasa melakukan, terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja Perseroan secara konsolidasi. Reviewing and mapping the business of Subsidiaries and Joint Ventures and establishing strategic policies for these Subsidiaries and Joint Ventures so as to optimize the synergy within the group to increase value and continue to do so, especially those that make a significant contribution to the Company's consolidated performance.	Inisiatif untuk melakukan *review* dan *mapping* bisnis Anak Perusahaan akan dilakukan setelah implementasi *Inbreng* kepada 4 (empat) *Subholding* tuntas yaitu di tahun 2022. The initiative to review and map the Subsidiary's business will be carried out after the implementation of Inbreng to 4 (four) Subholdings is complete in 2022.
5	Memastikan program pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan secara komprehensif oleh semua fungsi *Corporate Human Capital Development* (CHCD). Implementasi kebijakan pengembangan SDM, jenjang karier, dan *talent management* untuk mendukung pencapaian target-target perusahaan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang agar ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan SDM agar senantiasa sesuai dengan *best practice*. Ensure that HC management and development programs are carried out comprehensively by all Corporate Human Capital Development (CHCD) functions. Implementation of HC development policies, career paths, and talent management to support the achievement of company targets both in the short and long term to be improved, as well as evaluating HC policies in order to be always in accordance with best practice.	Dalam rangka mendukung pencapaian target-target perusahaan dalam masa transisi, Perusahaan saat ini sedang dalam proses evaluasi kebijakan-kebijakan dan penyempurnaan serta standarisasi sistem pengelolaan talenta dan kinerja perkerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perusahaan telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan talenta seperti Peraturan Direksi Nomor:HK.01/1/11/1/KPIU/UTMA/PLND-21 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu pada masa peralihan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Peraturan Direksi Nomor: HK.01/1/2/1/SPAP/UTMA/PLND-22 tentang kebijakan Pengelolaan Bidang SDM Pada Sub Holding, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi, dan Kerjasama Operasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Perusahaan mengatur pembagian peran antara pengelolaan SDM Kantor Pusat, Regional, dan Sub Holding yang akan dimasukkan dalam RUPS pada anak perusahaan untuk menjaga harmonisasi pengelolaan SDM pada seluruh lingkup perusahaan. Sementara proses evaluasi berlangsung, Perusahaan memberlakukan secara sementara ketentuan terkait dengan pengelolaan SDM) sebagai acuan dalam proses pengembangan dan pengelolaan talenta perusahaan serta menerapkan penilaian kinerja dalam masa transisi sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 tentang Pemberlakuan Sementara peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero). In order to support the achievement of Company's targets during the transition period, the Company is currently in the process of evaluating policies as well as improving and standardizing the talent management system and employee performance within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Company has issued several policies related to talent management such as the Board of Directors Regulation Number: HK.01/1/11/1/KPIU/UTMA/PLND-21 concerning Guidelines for Individual Performance Management during the transition period in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Board of Directors Regulation Number : HK.01/1/2/1/SPAP/UTMA/PLND-22 regarding policies for HC Management In Sub Holdings, Subsidiaries, Affiliated Companies, and Joint Operations within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Company regulates the division of roles between HC management of Head Office, Regional, and Sub Holding which will be included in the GMS in subsidiaries to maintain the harmonization of HC management throughout the company. While the evaluation process is in progress, the Company temporarily enforces provisions related to HC management as a reference in the process of developing and managing the company's talents as well as implementing performance appraisal during the transition period in accordance with the Board of Directors Regulation Number: HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA /PLND-21 concerning Temporary Enforcement of the regulations of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
6	Dalam menyusun Laporan Keuangan, Direksi agar memperhatikan *Chart of Account* (CoA) yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia dan standar akuntansi keuangan. In preparing the Financial Statements, the Board of Directors must pay attention to the Chart of Accounts (CoA) in accordance with the Accounting Guidelines for Indonesian Port Companies and financial accounting standards.	Perusahaan secara terus menerus melakukan *updating* terhadap Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia dan standar akuntansi keuangan terbaru, termasuk dalam hal *Chart of Account* (CoA). The Company continuously updates the Indonesian Port Company Accounting Guidelines and the latest financial accounting standards, including the Chart of Account (CoA).
7	Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait terhadap peraturan-peraturan dan isu-isu yang bersinggungan dengan kegiatan usaha Pelindo bersama-sama dengan Pelindo I – IV agar dapat berkoordinasi melalui *workshop* dan FGD untuk memperoleh solusi terhadap isu-isu tersebut. Coordinate with related Ministries/Institutions on regulations and issues relating to Pelindo's business activities together with Pelindo I – IV in order to coordinate through workshops and FGDs to obtain solutions to these issues.	Koordinasi dengan *stakeholder* terkait dilakukan dengan intens dalam rangka mendapatkan solusi atas isu-isu yang dihadapi oleh Pelindo I – IV terutama dalam proses penggabungan BUMN Pelabuhan yang banyak melibatkan Kementerian/Lembaga antara lain Kementerian BUMN, DPR-RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian PPN/Bappenas. Coordination with relevant stakeholders is carried out intensely in order to find solutions to the issues faced by Pelindo I – IV, especially in the process of merging Port SOEs that involved many Ministries/Institutions, including the Ministry of SOEs, DPR-RI, Ministry of Transportation, Ministry of Law and Human Rights, Ministry of State Secretariat and Ministry of National Development Planning/Bappenas.

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow Up
8	Investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, yang dapat memberikan *return*. Sebelum dilaksanakan, disiapkan kajian yang komprehensif, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya. Investments must be carried out based on a priority scale, which can provide returns. Prior to implementation, a comprehensive study should be prepared, according to standard operating procedures, transparent and accountable for the reasonableness of the price	Pelaksanaan investasi mengacu kepada Peraturan Direksi tentang investasi dimana sebelum ditetapkan dan dilaksanakan sudah melalui kajian yang komprehensif, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya. Investment refers to the Board of Directors' Regulation on investment, which prior to being stipulated and implemented has gone through a comprehensive study, according to standard operating procedures, transparent and can be accounted for its reasonable price.
9	Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Auditor Independen dan Satuan Pengawasan Intern perusahaan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2019 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaiannya pada tahun 2020. The Board of Directors should pay attention to the findings and recommendations of the Audit Board, the Independent Auditor and the Company's Internal Audit Unit that have not been resolved until 2019 and make this a target for completion in 2020.	Tahun 2020 Perusahaan telah menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, saran dan rekomendasi auditor baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) dengan capaian Audit Internal (SPI) untuk rekomendasi audit internal tahun 2011 – 2018 telah selesai sebesar 4692 atau sekitar 95% dari 4950 rekomendasi. Temuan audit internal tahun 2019 sebesar 66 rekomendasi atau sekitar 11 % dari 627 rekomendasi yang telah selesai. Sedangkan untuk tindak lanjut audit eksternal (BPK) telah diselesaikan sebanyak 111 rekomendasi dari 190 rekomendasi. In 2020, the Company has followed up and completely completed the findings, suggestions and recommendations of auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI). For internal audit (SPI) recommendations in 2011 – 2018, 4692 or about 95% of the 4950 recommendations have been completed. For internal audit findings in 2019, 66 or about 11% of the 627 recommendations have been completed. As for the follow-up to external audit (BPK), 111 out of 190 recommendations have been completed
10	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar melakukan persiapan dalam rangka integrasi layanan pelabuhan bersama-sama dengan Pelindo I, II, III, dan IV. The Board of Directors with the supervision of the Board of Commissioners should make preparations for the integration of port services together with Pelindo I, II, III, and IV.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap persiapan maupun pelaksanaan merger terkait Integrasi, Startegis, Keuangan, dll. Proses penggabungan Pelindo I-IV berhasil dilaksanakan dengan baik pada tanggal 1 Oktober 2021. Board of Commissioners has supervised the preparation and implementation of merger related to Integration, Strategic, Finance, etc. The merger process of Pelindo I-IV was successfully carried out on October 1, 2021.
11	Komisaris agar dapat mengawal dan mengawasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tepat waktu sehingga target dapat Tercapai. Board of Commissioners should be able to oversee and supervise the implementation of National Strategic Projects on time so that targets can be achieved.	1. Realisasi investasi tahun 2021 sebesar Rp12,24 triliun atau baru terserap 70,79% dari RKAP sebesar Rp17,29 triliun. Atas capaian tersebut Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi: a. Meningkatkan kinerja pelaksanaan investasi terutama investasi yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tetap memperhatikan profil risiko dan aspek *Good Corporate Governance* (GCG). b. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara intens atas progress fisik dan penyerapan dana tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) serta memastikan penyelesaiannya secara tepat waktu. 1. The realization of investment in 2021 is Rp12.24 trillion or only 70.79% has been absorbed from the RKAP of Rp17.29 trillion. For this achievement, Board of Commissioners recommends that Board of Directors should: a. Improving the performance of investment implementation, especially investments that are included in the National Strategic Project (PSN) while still taking into account the risk profile and of Good Corporate Governance (GCG) aspects. b. Conduct intense monitoring and evaluation of physical progress and absorption of additional State Capital Participation (PMN) funds and ensure timely completion.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 6 Juli 2020
Waktu : 09.30 – 10.30 WIB
Tempat : Video Conference Zoom Meeting

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2019 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

The GMS was held on:
Day/Date : Monday, July 6, 2020
Time : 09.30 – 10.30 WIB
Venue : Video Conference Zoom Meeting

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT GMS APPROVAL OF ANNUAL REPORT FISCAL YEAR 2019

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	Hadir Present
2	Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Hadir Present
3	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
4	Djaman Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Hadir Present
5	Djadmiko	Komisaris Commissioner	Hadir Present
6	R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Hadir Present
7	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
8	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
9	Rima Novianti	Direktur Komersial Commerce Director	Hadir Present
10	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik Engineering Director	Hadir Present
11	Muarip	Direktur Operasi Operations Director	Hadir Present
12	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	Hadir Present
13	Yon Irawan	Direktur Keuangan Finance Director	Hadir Present
14	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Hadir Present

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

RESOLUTION AND REALIZATION OF GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2019 ANNUAL REPORT

Agenda Pertama
First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.

Approval of the Annual Report and Approval of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2019 and the Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2019.

Keputusan
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (member of Ernst and Young Global) sesuai laporannya Nomor 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Decision
Approved the Fiscal Year 2019 Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report and approved the Company's Financial Statements for fiscal year 2019 which had been audited by KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (member of Ernst and Young Global) in accordance with their report Number 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 dated March 31, 2020 with "unqualified" opinion, as well as giving full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions carried out in the Fiscal Year ending on December 31, 2019 as long as the action is not a criminal act and is reflected in the Company's report books.

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019.

Approval of the Company's Partnership and Community Development Annual Report for Fiscal Year 2019.

Keputusan
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (member of Ernst and Young Global) sesuai laporannya Nomor 00370/2.1032/AU.2/06/0240-3/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Resolution
Approved and ratified the Fiscal Year 2019 Annual Report of Partnership and Community Development Program including the Financial Report of Partnership and Community Development Program which had been audited by KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (member of Ernst and Young Global) according to their report Number 00370/2.1032/AU.2 /06/0240-3/1/III/2020 dated March 31, 2020 with "unqualified" opinion, as well as giving full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the PKBL management and supervision actions for Fiscal Year 2019, as long as the action is not a criminal act and is reflected in the report.

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.

Determination of the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2019.

Keputusan
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.455.762.801.000,00 dengan alokasi sebagai berikut:
1. Dividen sebesar 28,84 persen dari laba bersih atau sebesar Rp708.218.661.061,00
2. Cadangan sebesar 71,16 persen dari laba bersih atau sebesar Rp1.747.544.138.938,00.

Resolution
Determined the use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2019 amounting to Rp2,455.762,801,000.00 with the following allocation:
1. Dividend amounted to 28.84 percent of net profit or Rp708.218.661.061.00
2. Reserves amounted to 71.16 percent of net profit or Rp1,747,544,138,938.00.

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Tahun Buku 2019.

Determination of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2020 as well as tantiem for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2019.

Keputusan
Memutuskan penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2019, akan ditetapkan secara tersendiri.

Resolution
Decided on the determination of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2020 as well as tantiem for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2019, which will be determined separately.

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.

Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2020.

Keputusan
1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Resolution
1. Re-appointed Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of Company's Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2020.
2. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners of the Company to determine the amount of compensation for audit services and other terms of appointment that are reasonable for the KAP.

ARAHAN RUPS / GMS DIRECTIVES

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow Up
1	Pemegang saham memberikan apresiasi atas kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh seluruh Direksi beserta jajaran dan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja tahun 2019 di mana walaupun belum mencapai target namun beberapa indikator dari sisi keuangan berhasil tumbuh dari tahun 2018 serta atas pencapaian beberapa penghargaan selama tahun buku 2019 oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Shareholders appreciate the hard work and efforts made by the Board of Directors and all management as well as the supervision of the Board of Commissioners for the performance in 2019, although has not yet reached the targets, several financial indicators managed to grow from 2018 and several awards were also received during 2019 fiscal year by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Pada tahun 2021 dilanjutkan dengan penghargaan yg telah diperoleh serta meningkatnya beberapa aspek keuangan. In 2021, it continues with the obtained awards and the improvement of several financial aspects.
2	Terkait dengan adanya dampak COVID-19 terutama dalam jasa keuangan serta sektor kepelabuhanan sebagaimana Surat Wakil Menteri BUMN No. S-46/Wk2. MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN II, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris diminta untuk segera mengajukan revisi RKAP tahun 2020 dengan harapan pengesahan dapat dilakukan pada akhir Juli 2020. Regarding the impact of COVID-19, especially in financial services and port sector, as stated in the Letter of the Deputy Minister of SOEs No. S-46/Wk2. MBU/06/2020 dated June 4, 2020 on the Amendment to the 2020 RKAP of SOEs assisted by the Deputy Minister of SOEs II, the Board of Directors with the Board of Commissioners' approval is requested to immediately submit a revision of the 2020 RKAP and the ratification is expected to be carried out at the end of July 2020.	Direksi Perusahaan telah menyampaikan Revisi RKAP 2020 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham pada tanggal 30 Juli 2020 melalui Surat DIrektur Utama Nomor KU.01.01/30/7/1/RKU/UT/PI.II-20 perihal Penyampaian Buku Revisi RKAP Tahun 2020. The Company's Board of Directors has submitted the 2020 RKAP Revision, which has received approval from the Board of Commissioners to Shareholders on July 30, 2020 through the President Director's Letter Number KU.01.01/30/7/1/RKU/UT/PI.II-20 regarding Submission of the 2020 RKAP Revision Book.
3	Tema revisi RKAP 2020 adalah agar Perseroan dapat bertahan dari dampak pandemi COVID-19, untuk itu, pada era *new normal*, agar Direksi melakukan efisiensi untuk mengimbangi penurunan pendapatan dari dampak COVID-19, melakukan reviu kembali terhadap *capital expenditure* (*capex*) atau investasi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan prospek bisnis ke depan. The theme of the 2020 RKAP revision is in order for the Company to be able to survive the impact of the COVID-19 pandemic, for that, in the new normal era, the Board of Directors must make efficiency to offset the decrease in income from the impact of COVID-19, conduct a review of capital expenditure (capex) or investment with considering the Company's financial condition and future business prospects.	Revisi RKAP 2020 yang disampaikan kepada Pemegang Saham telah mempertimbangkan COVID-19 dan upaya-upaya untuk mengimbangi penurunan pendapatan dari dampak Covid-19, serta hasil review terhadap capital expenditure (capex) atau investasi yang telah mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan prospek bisnis ke depan. The 2020 RKAP revision submitted to Shareholders has taken into account COVID-19 and efforts to offset the decline in income from the impact of Covid-19, as well as the results of a review of capital expenditure (capex) or investments by considering the Company's financial condition and future business prospects.
4	*Capex* yang menjadi prioritas adalah *capex* yang mendorong peningkatan pendapatan dalam jangka pendek, termasuk meningkatkan pelayanan kepada *customer.* The priority capex is the capex that can boost an increase in revenue in the short term, including improving service to customers.	Pengusulan RKAP untuk Capex sudah dilakukan prioritisasi Capex dan sudah dibagi berdasarkan jangka waktunya dimana Murni untuk yang selesai di tahun berjalan sedangkan multiyear yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. The RKAP proposal for Capex has been prioritized for Capex and divided based on the time period for those that are completed in the current year, while multi-years are taking more than one year.
5	Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS. The Board of Directors should pay attention to and follow up on the Board of Commissioners' suggestions and recommendations submitted at the GMS.	Di risalah RUPS Tahun 2019 tidak terdapat saran dan rekomendasi Dewan Komisaris. In the minutes of 2019 GMS, there are no suggestions and recommendations from the Board of Commissioners.
6	Memberi kuasa kepada Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dengan hak substitusi untuk menyatakan risalah ini dalam bentuk otentik di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang. Authorize the President Director of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II with the right of substitution to declare these minutes in authentic form before a Notary or authorized official.	Telah dinyatakan dalam akta penyimpanan Risalah RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor : 12.- tanggal 24 Agustus 2020. Has been stated in the Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Number: 12.- dated August 24, 2020.

DIREKSI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas pokok Direksi adalah:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; dan
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan.

Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan lengkap dengan anggaran keuangannya yang meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan saham untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan pengesahan;
3. Mengadakan dan memelihara akuntansi dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
4. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar setiap kali diminta oleh pemegang saham;
6. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan uraian tugasnya; dan
7. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau berdasarkan petunjuk RUPS.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan Perseroan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang

BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Board of Directors main duties are:

1. Lead and manage the Company in accordance with the Company's objectives and strives to improve the efficiency and effectiveness of the Company; and
2. Control, maintain and manage the Company's assets.

Board of Directors represents the Company inside and outside the court, performs all actions and deeds both regarding management and ownership, and binding the Company with other parties.

Board of Directors is obliged to:

1. Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its objectives and lines of business;
2. Prepare in time the Company's long-term plan, work plan and annual budget, completed with the financial budget that covers exploitation budget and investment budget, including other plans related to business implementation and share activities to be further submitted to the GMS for approval;
3. Conduct and maintain the accounting and administration of the Company in accordance with the norms that apply to a company;
4. Develop an accounting system based on the principles of internal control, especially the separation of the management, recording, storage and supervision functions;
5. Provide accountability and all information regarding the condition and operation of the Company in the form of reports on the Company's activities, including financial reports, both in the form of annual reports and in the form of other periodic reports according to the method and time specified in the Articles of Association whenever requested by the shareholders;
6. Prepare the Company's organizational structure, along with complete job descriptions; and
7. Carry out other obligations in accordance with the Articles of Association or based on the instructions of the GMS.

BOARD OF DIRECTORS RIGHTS AND AUTHORITIES

Board of Directors has the following rights and authorities:

1. Establish policies in leading and managing the Company.
2. Regulate the provisions regarding the Company's employment including the determination of salary, pension or old-age security and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations and the resolutions of the GMS.
3. Appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's employment regulations as well as laws and regulations.
4. Regulate the Board of Directors' transfer of power to represent the Company inside and outside the court to a person or

atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain; dan
5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MASA JABATAN DIREKSI

Para anggota Direksi diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

KRITERIA DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
4. Harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh intansi teksi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam tentang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris *(Board Manual)* antara lain berisi tentang petunjuk Tata Laksana kerja Direksi menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan adanya *Board Manual*, diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip- prinsip GCG.

Pedoman tata tertib kerja Direksi dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dijelaskan secara khusus dalam Bab II, yang mencakup:
a. Fungsi Direksi;
b. Keanggotaan Direksi;
c. Independensi (Kemandirian) Direksi;
d. Etika Jabatan Anggota Direksi;
e. Tugas dan Wewenang Direksi;
f. Kewajiban Direksi;
g. Tanggung Jawab Direksi;
h. Hak Direksi;
i. Prinsip-prinsip Pengambilan Keputusan Direksi;
j. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;

several members of Board of Directors who are specifically appointed for that purpose or to one or several employees of the Company either individually or jointly or to another person or entity; and
5. Carry out other actions both regarding the management and ownership, in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on applicable laws and regulations.

BOARD OF DIRECTORS TENURE

A member of Board of Directors is appointed for a period of 5 (five) years without prejudice to the GMS right to dismiss him/her at any time.

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

Those who can be appointed as members of Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions, unless within 5 (five) years prior to their appointment they have:
1. Been declared bankrupt;
2. Became a member of Board of Directors or Board of Commissioners or Supervisory Board, who is found guilty of causing a company or general company to be declared bankrupt;
3. Sentenced for committing a crime that is detrimental to the State's finances and/or related to the financial sector;
4. Must meet other requirements set by the technical agencies based on statutory regulations; and
5. The appointment of Board of Directors is carried out by taking into account the expertise, experience and other requirements based on the laws and regulations.

BOARD MANUAL OF BOARD OF DIRECTORS

In more detail, the guidelines and work procedures for Board of Directors are regulated in the Board Manual of Board of Directors and Board of Commissioners, which include, among others, the Board of Directors' work procedures that explains the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand and consistent manner, as well as can be a reference for Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). With the Board Manual, it is hoped that high work standards will be achieved in line with GCG principles.

The guidelines and work procedures of Board of Directors in the Board Manual of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are specifically described in Chapter II, which includes:
a. Functions of Board of Directors;
b. Membership of Board of Directors;
c. Independence of Board of Directors;
d. Job Ethics of Members of Board of Directors;
e. Duties and Authorities of Board of Directors;
f. Obligations of Board of Directors;
g. Responsibilities of Board of Directors;
h. Rights of Board of Directors;
i. Principles of Board of Directors Decision Making;
j. Induction and Capabilities Improvement Program;

k. Organ Pendukung Direksi;
l. Penilaian Kinerja Direksi;
m. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi; dan
n. Hubungan Perusahaan dengan *Subholding* dan/ atau Anak Perusahaan.

k. Supporting Organs of Board of Directors;
l. Board of Directors Performance Appraisal;
m. Board of Directors Performance Evaluation Criteria; and
n. Company Relationship with Subholding and/or Subsidiaries.

PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

DIVISION OF DUTIES OF BOARD OF DIRECTORS

The division of duties of Board of Directors are as follows.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Direksi
Board of Directors' Division of Duties

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	• Sebagai Pimpinan Perusahaan, Direktur Utama bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi untuk menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan melaksanakan kegiatan usaha perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Manajemen (RKM) dalam rangka tercapaianya tujuan perusahaan; • Sebagai Pimpinan Direktorat Utama, Direktur Utama memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan sekretariat perusahaan, satuan pengendalian internal, dan manajemen integrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku berdasarkan pada prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, dan tercapainya tujuan Integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero); • As the Head of the Company, President Director acts as the leader of Board of Directors to prepare the Company's Long-Term Plan (RJPP), and carry out the Company's business activities as stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Management Work Plan (RKM) in order to achieve company goals; • As the Head of the Main Directorate, President Director leads and stipulates a strategy as an elaboration of the RJPP, RKAP and RKM in the activities of corporate secretary, internal audit unit, and integration management to ensure compliance with applicable regulations based on the principles of good corporate governance, effective internal control, risk management and good corporate governance in order to achieve the Company's objectives and the objectives of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) integration;
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Sebagai koordinator dalam memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan sekretariat perusahaan, satuan pengendalian internal, dan manajemen integrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku berdasarkan pada prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, dan tercapainya tujuan Integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero); As a coordinator in leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP and RKM in corporate secretary activities, internal audit unit, and integration management to ensure compliance with applicable regulations based on the principles of good corporate governance, effective internal control, risk management and good corporate governance in order to achieve the Company's objectives and the objectives of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Integration;
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan strategis fungsional yang meliputi penetapan dan pengelolaan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan bidang keuangan serta manajemen risiko untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham. Responsible for functional strategic policies which include the establishment and management of strategic policies related to finance and risk management to support the achievement of the company's vision and mission and shareholder aspirations.
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Melaksanakan tugas khusus pada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum serta memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan kebijakan Perseroan. Carry out special duties to the Human Resources and General Affairs Director and provide advice and considerations in accordance with Company policy.
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan strategis yang meliputi Perencanaan Strategi, Pengembangan dan Kerja sama Usaha, Pembinaan Anak Perusahaan dan Pengelolaan Hukum untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham. Responsible for strategic policies which include Strategic Planning, Business Development and Cooperation, Subsidiary Development and Legal Management to support the achievement of the company's vision and mission and shareholder aspirations.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Direksi
Board of Directors' Division of Duties

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Melaksanakan tugas khusus pada Direktorat Investasi serta memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan kebijakan Perseroan. Carry out special duties at the Directorate of Investment and provide advice and considerations in accordance with Company policy.
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Mengarahkan, menetapkan dan menyetujui atas kebijakan-kebijakan strategis terkait pengelolaan pelayanan bisnis bidang komersial, bidang operasional, pengelolaan Regional dan Cabang, sinergi hubungan Perseroan serta menetapkan program kerja bidang pengelolaan perusahaan untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham. Directing, determining and approving strategic policies related to the management of business services in the commercial sector, operational sector, Regional and Branch management, synergy of Company relations and establishing work programs in the field of corporate management to ensure the achievement of the company's vision and mission and shareholder aspirations.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai berikut:

1. Direktur Utama atau Direktur pada BUMN Lainnya, atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan;
2. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
3. Jabatan-jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan yang dipimpinnya dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

POLICY OF BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

A member of Board of Directors may not hold other positions as follows:

1. President Director or Director in Other SOEs, or private company or other positions related to the management of the Company;
2. Other structural and functional positions in Central and Regional Government agencies/institutions; and
3. Other positions that may cause a conflict of interest directly or indirectly with the Company they lead and/or which are contrary to the applicable laws and regulations.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Board of Directors Concurrent Position

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position at Other Companies/Institutions	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Other Companies/Institutions
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	• Wakil Komisaris President Commissioner • Komisaris Utama Vice Commissioner	• PT Jakarta International Container Terminal • PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	• Komisaris Utama President Commissioner • Komisaris Utama President Commissioner • Komisaris Utama President Commissioner	• PT Pengembang Pelabuhan Indonesia • PT Pengerukan Indonesia • PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	• Komisaris Utama President Commissioner • Ketua Dewan Pengawas Chairman of Supervisory Board	• PT New Priok Container Terminal 1 • KSO TPK Koja
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Komisaris Commissioner	PT Terminal Teluk Lamong
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Komisaris Commissioner	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	• Komisaris Utama President Commissioner • Komisaris Utama President Commissioner	• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia • PT Ambang Barito Nusapersada
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	-	-

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Setiap anggota Direksi harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
   a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   c. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud Poin a di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
      - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
      - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
      - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

   d. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

MANAGEMENT OF BOARD OF DIRECTORS CONFLICT OF INTEREST

Each member of Board of Directors must comply with ethics related to conflicts of interest, as follows:

1. Must fill out a Special Register containing information on ownership of their shares and/or their families in other companies, including if they do not have share ownership, and periodically update at the end of each year and must notify the Company if there are changes to the data in accordance with the prevailing laws and regulations;
2. Members of Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
   a. There is a case before the Court between the Company and the concerned member of Board of Directors;
   b. The concerned member of Board of Directors has a conflict of interest with the Company;
   c. In the event of a situation as referred to in Point a above, those who are entitled to represent the Company are:
      - Other members of Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
      - Board of Commissioners in the event that all members of Board of Directors have a conflict of interest with the Company;
      - Other parties appointed by the GMS in the event that all members of Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
   d. In the event that all members of Board of Directors have a conflict of interest with the Company and there is no a single member of Board of Commissioners, the Company is represented by another party appointed by the GMS.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Seluruh Direksi telah melaporkan kepada Perseroan terkait kepemilikan saham yang dimiliki baik di Pelindo maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham masing-masing Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

The entire Board of Directors has submitted a reportto the Company regarding the ownership of shares both in Pelindo and in other companies. The share ownership of each Board of Directors can be seen in the table below:

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Board of Directors Share Ownership

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		Pelindo	Perusahaan Lain Other Companies
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Nihil Nil	PT Rejeki Sehat Sejahtera (550 lembar) PT Rejeki Sehat Sejahtera (550 shares)
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Nihil	Nihil
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Nihil	Nihil
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Nihil	• PT Aneka Kimia Raya (25.000 lembar) | (25,000 shares) • PT Aneka Tambang (12.500 lembar) | (12,500 shares) • Bukalapak (5.000 lembar) | (5,000 shares) • PT Elnusa (25.000 lembar) | (25,000 shares)

RAPAT DIREKSI

KEBIJAKAN RAPAT

1. Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau atas usuk dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
2. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi;
3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Direksi;
4. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila tidak hadir atau berhalangan, makan rapat dipimpin oleh salah satu seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama;
5. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat;
6. Jika tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambi dengan suara terbanyak;
7. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan satu suara;
8. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama atau pimpinan rapat yang menentukan;
9. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir;
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut; dan
11. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan rapat Direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

MEETING POLICY

1. Board of Directors holds a meeting whenever the President Director deems it necessary or on request from at least 1/3 (one third) of the total members of Board of Directors by mentioning the matters to be discussed;
2. Board of Directors meetings are held at the domicile of the Company or in other places within the territory of the Republic of Indonesia as determined by Board of Directors;
3. Board of Directors meetings are valid and have the right to make binding decisions, if attended by more than (half) of Board of Directors members;
4. All Board of Directors meetings are chaired by the President Director and if absent or unable to attend, the meeting is chaired by a Director specifically appointed for that purpose by the President Director;
5. All decisions in Board of Directors meetings are taken by deliberation to reach a consensus;
6. If this cannot be implemented, the decision will be taken by majority vote;
7. Each member of Board of Directors has the right to cast one vote;
8. If the number of agree and disagree votes is the same, then the President Director or the meeting chairman will decide;
9. From everything discussed and decided in Board of Directors meeting, the minutes of the meeting must be drawn up and signed by the chairman of Board of Directors meeting and by a member of Board of Directors appointed by and from among those present;
10. A member of Board of Directors may be represented at a meeting only by another member of Board of Directors based on a written authorization given specifically for this purpose; and
11. Binding decisions may also be taken without holding a Board of Directors meeting, provided that the decision is approved in writing and signed by all members of Board of Directors.

RENCANA RAPAT DIREKSI

Adapun rencana rapat Direksi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut

BOARD OF DIRECTORS MEETING PLAN

Board of Directors meeting plans for 2021 are as follows

Bulan Month	Agenda Agenda
Januari January	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BoD-BoC Meeting Materials • *Progress* Akuisisi JTCC| JTCC Acquisition Progress • *Progress* JTATP | JTATP Progress • Rencana Pembangunan Gudang Banten | Banten Warehouse Development Plan • *Update progress* tindak lanjut penyelesaian isu JICT | Update on the progress of follow-up to the resolution of JICT issue • *Update Progress* Kesiapan Operasi dan Peralatan Bongkar Muat di Terminal Kijing | Update on Operation Readiness Progress and Loading and Unloading Equipment at Kijing Terminal • Ekspose Pra FS New Palembang *Port* | Expose Pre FS New Palembang Port • *Update Progress* ALPI | ALPI Progress Update • *Progress* kesiapan EPI sebagai Utility Company | Progress of EPI's readiness as a Utility Company • *Progress* Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing | Kijing Terminal Construction and Development Progress • *Progress* Tindak Lanjut IT *Charging Model* IPC *Group* | Progress of Follow-up on IT Charging Model IPC Group • *Progress* Program Restrukturisasi DP4 | Progress of DP4 Restructuring Program • *Progress* tindak lanjut restrukturisasi hutang anak perusahaan | Progress of follow-up on debt restructuring of subsidiaries • *Progress* Pendudukan Bisnis terkait Kepemilikan Peralatan Bongkar Muat antar anak perusahaan | Progress of Business Occupation related to Ownership of Loading and Unloading Equipment between subsidiaries • *Progress* Rencana pengelolaan Bisnis Air Bersih oleh PT EPI di Tanjung Priok | Progress of Clean Water Business Management Plan by PT EPI in Tanjung Priok • Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2020 | Evaluation of Performance Achievements in 2020 • Lain-lain. | Others.
Februari February	• CEO *Direction* | CEO Direction • Laporan dan Persetujuan Hasil Rapat RKAP 2021 | Report and Approval of 2021 RKAP Meeting Results • Kajian Opsi PT EDII | PT EDII Option Study • *Progress* Kelanjutan Pasca Akuisisi ILCS | Continuing Progress after the Acquisition of ILCS • *Progress Review* Pedoman Kerja sama dan Kerja sama Usaha dengan Anak Perusahaan terkait Dampak PSAK 73 | • Progress Review of Guidelines for Cooperation and Business Cooperation with Subsidiaries regarding the Impact of PSAK 73 • *Progress* JTATP | JTATP Progress • Persiapan Rapat Kerja Nasional | Preparation for the National Work Meeting • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Materials • *Update Progress* Rencana Pengelolaan Bisnis Air Bersih oleh PT EPI di Tanjung Priok | Update on the Progress of Clean Water Business Management Plan by PT EPI in Tanjung Priok • *Update Progress* Penyelesaian Permasalahan dengan BUMN lain | Update on Problem Resolution Progress with other SOEs • Rencana Pembangunan Gudang Banten | Banten Warehouse Development Plan • Pendudukan Bisnis terkait Kepemilikan Peralatan Bongkar Muat antar Anak Perusahaan | Business Occupation related to Ownership of Loading and Unloading Equipment between Subsidiaries • *Update Progress* Tindak Lanjut Penyelesaian Isu JICT | Update on the progress of follow-up to the resolution of JICT issue • *Update Progress* P3K | First Aid Progress Update • Lain-lain | Others
Maret March	• CEO *Direction* | CEO Direction • Persiapan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 | Preparation of GMS Annual Report for Fiscal Year 2020 • *Progress* Pemilihan Mitra CT2 terminal Kalibaru | Progress of Selection of Kalibaru Terminal CT2 Partners • Laporan Komite Investasi dan manajemen Risiko terkait Investasi | Investment and Risk Management Committee Report related to Investment • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • Capaian Kinerja Manajemen Sampai Dengan Bulan Februari Tahun 2021 | Management Performance Achievements Until February 2021 • *Progress* Penyelesaian Restrukturisasi PT PII | Completion Progress of Restructuring of PT PII • *Update progress* tindak lanjut penyelesaian Isu JICT | Update on the progress of follow-up to the completion of JICT Issue • *Logistic market place* | Logistics market place • Organik anorganik *growth* dan sinergitas | Organic inorganic growth and synergy • Laporan Penyelesaian Temuan SPI | Report on the Completion of SPI Findings • Lain-lain | Others

Bulan Month	Agenda Agenda
April April	• CEO *Direction* | CEO Direction • Analisis Prioritas Rencana Pengembangan Logistic Centre Pelabuhan Tanjung Priok | Analysis of Priority of Tanjung Priok Port Logistic Center Development Plan • *Update* tindak lanjut kerja sama Batu Ampar | Update on the follow-up to Batu Ampar collaboration • *Update Progress* Komunikasi dengan Pemda DKI terkait Tukar Guling Lahan | Update on the Progress of Communication with DKI Regional Government regarding the Land Swap • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • Capaian Kinerja Keuangan Triwulan I dan Rencana Kerja Triwulan II | Quarter I Financial Performance Achievement and Quarter II Work Plan • Finalisasi Transformasi PT JPPI | Finalization of PT JPPI's Transformation • *Progress* Persiapan Rencana Pengembangan NPEA dan Rencana Kerja sama NPEA antara API dan IPC | Progress of Preparation of NPEA Development Plan and NPEA Cooperation Plan between API and IPC • Kelanjutan Project KEK Bengkulu | Continuation of Bengkulu SEZ Project • Laporan Pelaksanaan Investasi 2021 Triwulan I | Quarter I 2021 Investment Report • Lain-lain. | Others
Mei May	• CEO *Direction* | CEO Direction • Rencana Kerja sama Jangka Panjang MAL | MAL Long Term Cooperation Plan • Laporan *Progress* Kerja sama Batu Ampar Batam | Batu Ampar Batam Cooperation Progress Report • Persiapan Penanganan Arus Barang dan Penumpang Terkait Idul Fitri 1442H | Preparation for Handling the Goods and Passengers Flow Related to Eid Al-Fitr 1442H • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • Capaian Kinerja Manajemen Sampai Dengan Bulan April Tahun 2021 | Management Performance Achievements Until April 2021 • Lain-lain. | Others
Juni June	• CEO *Direction* | CEO Direction • Laporan Komite Investasi dan manajemen Risiko terkait Investasi | Investment and Risk Management Committee Report related to Investment • Laporan *Progress* LHA SPI | LHA SPI Progress Report • Capaian Kinerja Keuangan Sampai Dengan Juni 2021 | Financial Performance Achievement Until June 2021 • Reviu Penanganan Arus Barang dan Penumpang setelah Idul Fitri 1442H | Review of the Handling of Goods and Passengers Flow after Eid Al-Fitr 1442H • Lain-lain. | Others
Juli July	• CEO *Direction* | CEO Direction • Capaian Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2021 | First Semester 2021 Financial Performance Achievement • Rencana Kerja Perusahaan Semester II Tahun 2021 | Company Work Plan for Semester II 2021 • Laporan Rencana Kerja Manajemen Semester I Tahun 2021 | First Semester 2021 Management Work Plan • Laporan dan Rekomendasi Risk Manajemen Semester I | Risk Management Report and Recommendations for Semester I • Lain-lain. | Others
Agustus August	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • Capaian Kinerja Manajemen Sampai Dengan Bulan Juli Tahun 2021 | Management Performance Achievements Until July 2021 • Laporan Komite Investasi dan manajemen Risiko terkait Investasi | Investment and Risk Management Committee Report related to Investment • Laporan *Progress* LHA SPI | LHA SPI Progress Report • Lain-lain | Others
September September	• CEO *Direction* | • CEO Direction • Capaian Kinerja Manajemen Sampai Dengan Bulan Agustus Tahun 2021 | Management Performance Achievements Until August 2021 • Pembahasan Usulan Investasi Tahun 2022 Cabang dan Anak Perusahaan | Discussion on Investment Proposal for 2022 of Branches and Subsidiaries • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • Tindak Lanjut Forum Manajemen | Follow-up to Management Forum • Laporan *Progress* LHA SPI | LHA SPI Progress Report • Lain-lain | Others
Oktober October	• CEO *Direction* | • CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • Pembahasan Usulan Rencana Kerja Manajemen Tahun 2022 | Discussion on the Proposed Management Work Plan for 2022 • Laporan Aset yang diasuransikan IPC | IPC Insured Asset Report • Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2022 | Discussion of 2022 RKAP Proposal • Capaian Kinerja Keuangan Triwulan III dan Rencana Kerja Triwulan IV | Quarter III Financial Performance Achievement and Quarter IV Work Plan • Laporan Re-reviu SOP IPC | IPC SOP Review Report • Lain-lain | Others

Bulan Month	Agenda Agenda
November November	• CEO *Direction* | CEO Direction • Capaian Kinerja Keuangan Bulan Oktober Tahun 2021 | Financial Performance Achievement in October 2021 • Persiapan Rakernas | Preparation for National Work Meeting • Pembahasan Finalisasi Usulan RKAP Tahun 2022 | Discussion on the Finalization of 2022 RKAP Proposal • Persiapan HUT IPC | IPC Anniversary Preparation • Pembahasan Persiapan RUPS RKAP Tahun 2021 | Discussion on the Preparation for 2021 RKAP GMS • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • Laporan dan Persetujuan RKAP 2022 | 2022 RKAP Report and Approval • Progres Proses Pengadaan Tahun 2021 | Procurement Process Progress in 2021 • Laporan Rencana Kerja Manajemen Tahun 2021 | 2021 Management Work Plan Report • Laporan RKM Strategis Kantor Pusat | Head Office Strategic RKM Report • Lain-lain | Others
Desember December	• CEO *Direction* | CEO Direction • Capaian Kinerja Keuangan Bulan November Tahun 2021 | November 2021 Financial Performance Achievements • Laporan Persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022 | 2022 Christmas and New Year Transport Preparation Report • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • Laporan dan Persetujuan RKAP 2022 | 2022 RKAP Report and Approval • Laporan RKM Strategis Kantor Pusat | Head Office Strategic RKM Report • Lain-lain. | Others

AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

AGENDA, DATE AND PARTICIPANTS OF BOARD OF DIRECTORS' MEETING

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of Board of Directors Meetings are as follows.

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat-Hadir Meeting Participants - Present	Peserta Rapat-Tidak Hadir Meeting Participants - Absent
1	Kamis, Januari 2021 Thursday, January, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD BOC Meeting Material • *Progress* Akuisisi JTCC | JTCC Acquisition Progress • *Update Progress* Kesiapan Operasi dan Peralatan Bongkar Muat di Terminal Kijing | Update on Operation Readiness Progress and Loading and Unloading Equipment at Kijing Terminal • Ekspose Pra FS New Palembang Port | Expose Pre FS New Palembang Port • *Update Progress* ALPI | Update on ALPI Progress • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
2	Selasa, 02 Februari 21 Tuesday, February 02, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Kajian Opsi PT EDII | PT EDII Option Study • *Progress* JTATP | JTATP Progress • Rencana Pembangunan Gudang Banten | Banten Warehouse Development Plan • *Update progress* tindak lanjut penyelesaian Isu JICT | Update on the progress of follow-up to the completion of JICT Issue • *Update Progress* P3K | Update on First Aid Progress • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat-Hadir Meeting Participants - Present	Peserta Rapat-Tidak Hadir Meeting Participants - Absent
3	Kamis, 18 Februari 2021 Thursday, February 18, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • *Update Progress* Rencana Akuisisi Saham WTR di JTCC | Update on the Progress of Planned Acquisition of WTR Shares in JTCC • Pendudukan Bisnis terkait Kepemilikan Peralatan Bongkar Muat Antar anak Perusahaan | Business Occupation related to Ownership of Loading and Unloading Equipment Between Subsidiaries • *Update Progress* Rencana Pengelolaan Bisnis Air Bersih oleh PT EPI di Tanjung Priok | Update on the Progress of Clean Water Business Management Plan by PT EPI in Tanjung Priok • *Update Progress* Kesiapan Operasi dan Peralatan Bongkar Muat di Terminal Kijing | Update on Operation Readiness Progress and Loading and Unloading Equipment at Kijing Terminal • *Talent Pool* BoD-1 Kementrian BUMN | Talent Pool BoD - 1 Ministry of SOE • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
4	Selasa, 02 Maret 2021 Tuesday, Maret 02, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • *Update Progress* Kesiapan Operasi dan Peralatan Bongkar Muat di Terminal Kijing | Update on Operation Readiness Progress and Loading and Unloading Equipment at Kijing Terminal • *Update Progress* Rencana Pengembangan dan Rencana Kerja sama NPEA | Update on the Progress of NPEA Development Plan and Cooperation Plan • *Update Progress* CT2 | Update on CT2 Progress • Kerja sama Jangka Panjang RSP dengan Cabang | Long-Term Cooperation between RSP and Branches • Rencana Kelanjutan PT TPI | PT TPI Continuation Plan • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Yon Irawan Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
5	Selasa, 23 Maret 2021 Tuesday, Maret 23, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • *Update* Kebutuhan Curah Cair di Terminal Kijing | Update on Liquid Bulk Requirement at Kijing Terminal • Perencanaan Peralatan Bongkar Muat Curah Kering di Terminal Kijing | Planning of Dry Bulk Loading and Unloading Equipment at Kijing Terminal • Laporan Keuangan NPCT 1 Terkait Pengenaan PSAK 73 | NPCT 1 Financial Statements Regarding the Imposition of PSAK 73 • Transformasi PT Rukindo | Transformation of PT Rukindo • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat-Hadir Meeting Participants - Present	Peserta Rapat-Tidak Hadir Meeting Participants - Absent
6	Selasa, 06 April 2021 Tuesday, April 06, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pendudukan Kepemilikan Alat Bongkar Muat di Anak Perusahaan Di luar Alat Terminal 009 | Occupation of Ownership of Loading and Unloading Equipment in Subsidiaries Outside Terminal Equipment 009 • *Update Progress* Rencana Pengelolaan Bisnis Air Bersih di Tanjung Priok oleh PT EPI serta *Progress Contingency Plan* Pengelolaan Air Bersih Sementara oleh Cabang | Update on the Progress of Clean Water Business Management Plan in Tanjung Priok by PT EPI and the Progress of Temporary Clean Water Management Contingency Plan by Branch • Tindak Lanjut Rencana Pembangunan Curah Cair di Terminal Kijing | Follow-up to Liquid Bulk Development Plan at Kijing Terminal • Penyelesaian Pembangunan CT2 Terminal Kalibaru | Completion of Kalibaru Terminal CT2 Construction • *Group* IDP *Strategic Alignment and The Concept of Neurometric* | IDP Group Strategic Alignment and The Concept of Neurometric • *Program Golden Handshake* | Golden Handshake Program • Formulasi Tantiem Direksi Anak Perusahaan | Formulation of Tantiem for the Directors of Subsidiaries • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
7	Thursday, 22 April 2021 Thursday, April 22, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • *Update progress awarding* | Update on awarding progress • *Update Progress* Rencana Pengembangan dan Rencana Kerja sama NPEA | Update on the Progress of NPEA Development Plan and Cooperation Plan • *Update progress* program *improvement* pengelolaan terminal curah kering Bengkulu | Update on the progress of Bengkulu dry bulk terminal management improvement program • *Update progress* penyiapan organisasi DGO | Update on the progress of DGO organization preparation • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat-Hadir Meeting Participants - Present	Peserta Rapat-Tidak Hadir Meeting Participants - Absent
8	Selasa, 04 Mei 2021 Tuesday, May 04, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • *Update progress* rencana akuisisi saham WTR di CTP | Update on the progress of the plan to acquire WTR shares in CTP • *Update Progress* Penyelesaian *Addendum Project Implementation Agreement* (PIA) antara IPC dengan PT PPI | Update on the Progress of Completion of Addendum Project Implementation Agreement (PIA) between IPC and PT PPI • Usulan terkait *Positioning* Anak Perusahaan dan Cabang di Terminal Kijing | Proposal regarding the Positioning of Subsidiaries and Branches at Kijing Terminal • Hasil Asesmen BOD-1 | BOD-1 Assessment Results • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
9	Selasa, 18 Mei 2021 Tuesday, May 18, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	Mega Satria
10	Senin, 31 Mei 2021 Monday, May 31, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Penyampaian hasil *review* alignment RKM terkait integrasi Pelindo | Submission of the results of RKM alignment review related to the integration of Pelindo • *Update Progress* Rencana Pengembangan dan Rencana Kerja sama NPEA | Update on the Progress of NPEA Development Plan and Cooperation Plan • Penetapan penggunaan laba bersih anak perusahaan Tahun Buku 2020 | Determination of the use of the subsidiary's net profit for Fiscal Year 2020 • Pengelolaan kawasan pendukung Terminal Kijing | Management of Kijing Terminal supporting area • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
11	Selasa, 15 Juni 2021 Tuesday, June 15, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meeting Material • Pengelolaan kawasan pendukung Terminal Kijing | Management of Kijing Terminal supporting area • Tindak Lanjut SKD Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM | Follow-up SKD on HC Management Policy • Pembahasan Tantiem Anak Perusahaan Tahun Buku 2020 | Discussion on Subsidiary Tantiem for Fiscal Year 2020 • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat-Hadir Meeting Participants - Present	Peserta Rapat-Tidak Hadir Meeting Participants - Absent
12	Kamis, 01 Juli 2021 Thursday, July 01, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • *Update Progress* Rencana Pengembangan dan Rencana Kerja sama NPEA | Update on the Progress of NPEA Development Plan and Cooperation Plan • *Update progress* rencana akuisisi saham WTR di JTCC | Update on the progress of WTR share acquisition plan in JTCC • *Update progress* rencana pengelolaan bisnis air bersih di Tanjung Priok oleh PT EPI | Update on the progress of clean water business management plan in Tanjung Priok by PT EPI • Usulan perpanjangan kerja sama dengan PT MAL | Proposed extension of cooperation with PT MAL • *Update progress* penyelesaian JTATP | Update on the progress of JTATP completion • *Update progress* pelabuhan ketapang | Update on the progress of ketapang port • *Progress* Pembangunan *Maritime Tower* | Maritime Tower Construction Progress • Penunjukan KAP Bersama Pelindo 1-4 | Appointment of KAP with Pelindo 1- • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
13	Kamis, 08 Juli 2021 Thursday, July 08, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • RKAP 2022 (termasuk RKAP 2022 Pelindo Raya) | 2022 RKAP (including Pelindo Raya's 2022 RKAP) • Finalisasi Perubahan Laporan Fiskal Pajak 2019/2020 | Finalization of Changes to the 2019/2020 Fiscal Tax Report • Pinjaman ke Pelindo 4 | Loan to Pelindo 4 • *Update Progress* Penyelesaian JTATP | Update on JTATP Completion Progress • *Update progress New* Palembang *Port* | Update on the progress of New Palembang Port • Pengelolaan kawasan pendukung Terminal Kijing | Management of Kijing Terminal supporting area • *Update* Perpanjangan Kerja sama dengan PT MAL | Update on the Extension of Cooperation with PT MAL • Tantiem BOD Anak Perusahaan | Tantiem of Subsidiary BOD	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
14	Senin, 19 Juli 2021 Monday, July 19, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meting Material • Penyesuaian Target KPI Korporat Triwulan III 2021 | Adjustment of Quarter III 2021 Corporate KPI Targets • Restrukturisasi SHL Anak Perusahaan | Restructuring of SHL Subsidiaries • *Update* Perpanjangan Kerja sama dengan PT MAL | Update on the Extension of Cooperation with PT MAL • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	Muarip

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat-Hadir Meeting Participants - Present	Peserta Rapat-Tidak Hadir Meeting Participants - Absent
15	Selasa, 03 Agustus 2021 Tuesday, August 03, 2021	• CEO *Direction* | Others • Rencana Transformasi PT Rukindo | PT Rukindo's Transformation Plan • Strategi Pengembangan Kawasan Kijing | Kijing Area Development Strategy • Laporan Satgas COVID-19 dan Rencana Tindak Lanjutnya | Covid19 Task Force Report and Follow Up Plans • RKAP Revisi 2021 | Revised RKAP 2021 • Pilihan skema/proses transaksi kerja sama dengan LPI | Choice of scheme/process of cooperation transaction with LPI • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
16	Rabu, 18 Agustus 2021 Wednesday, August 18, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meting Material • Tindak lanjut penyelesaian permasalahan dengan DKB | Follow up on problem solving with DKB • Tindak lanjut penyelesaian permasalahan dengan Pelni | Follow up on problem solving with Pelni • Komitmen Bersama *Knowledge Management* | Joint Commitment to Knowledge Management • *Update progress New* Palembang *Port* | Update on the progress of New Palembang Port • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
17	Selasa, 14 September 2021 Tuesday, September 14, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pembahasan Materi Rakomdir | Discussion of BOD-BOC Meting Material • Analisis Kinerja PT PTP | PTP Performance Analysis • *Update progress* kerja sama PT JPPI dengan BP Batam di pelabuhan Batu Ampar | Update on the progress of cooperation between PT JPPI and BP Batam at Batu Ampar port • Kelanjutan Pasca Akuisisi PT ILCS | Continuation Post Acquisition of PT ILCS • Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 | ISO 9001:2015 Management Review • *Progress* RIP Tanjung Priok | Progress of RIP Tanjung Priok	Arif Suhartono Hambra Samal Rima Novianti Zuhri Iryansyah Muarip Mega Satria Ihsanuddin Usman Ogi Rulino	
18	Kamis, 07 Oktober 2021 Thursday, October 07, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • RKAP 2021 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | RKAP 2021 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Lain-lain | Others	Arif Suhartono Hambra Samal Mega Satria Ihsanuddin Usman Prasetyo Boy Robyanto Putut Sri Muljanto	
19	Selasa, 19 Oktober 2021 Tuesday, October 19, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Kasus Tanah Bandar Nelayan Benoa | Land Case of Benoa Fisherman City • Konsesi Priok Temuan BPK | Concession Priok Findings by BPK • *Update Progress New* Priok *Eastern Access* (NPEA | Update on New Priok Eastern Access (NPEA) Progress) • Kinerja YTD Q3 Tahun 2021 | YTD Q3 Performance in 2021	Arif Suhartono Hambra Samal Mega Satria Ihsanuddin Usman Prasetyo Boy Robyanto Putut Sri Muljanto	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat-Hadir Meeting Participants - Present	Peserta Rapat-Tidak Hadir Meeting Participants - Absent
20	Selasa, 09 November 2021 Tuesday, November 09, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • *Update Progress* Persiapan Inbreng Saham ke *Subholding* | Update on the Preparation Progress of Stock Inbreng to Subholding • *Update* terkait penerbitan IPR baru untuk Terminal Teluk Lamong | Update on the issuance of new IPR for Teluk Lamong Terminal • *Update* Kerja sama dengan INA | Update on Cooperation with INA • Percepatan Persetujuan RJPP *Holding* | Acceleration of RJPP Holding Approval • *Update* RKAP 2021 | Update on RKAP 2021 • Mekanisme Evaluasi Pengisian Posisi Jabatan Struktural | Evaluation Mechanism for Filling Structural Positions • *Update Progress* Program Kerja 100 Hari Pasca *Merger* | Update on 100 Days Post Merger Work Program Progress • Tunjangan *Cost of Living Adjustment* (CoLA) | Cost of Living Adjustment (CoLA) allowance • Pemetaan BOD dan BOC Anak Perusahaan | Mapping of Subsidiaries' BoD and BoC	Arif Suhartono Hambra Samal Mega Satria Ihsanuddin Usman Prasetyo Boy Robyanto	Putut Sri Muljanto
21	Rabu, 08 Desember 2021 Wednesday, December 08, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Remunerasi BOD-BOC Anak Perusahaan | Remuneration of BOD - BOC Subsidiary • Tunjangan *Cost of Living Adjustment* (CoLA) | Cost of Living Adjustment (CoLA) allowance • *Update* Perpindahan Menara Maritim terkait dengan Desain dan berikut *Timeline* nya | Update on the Movement of Maritime Tower related to the Design and timeline • Usulan Pembentukan Komite TJSL | Proposal for the Establishment of CSR Committee • Pemaparan Konsultan SKHA terkait Restrukturisasi PT Rukindo | SKHA Consultant's Presentation regarding PT Rukindo's Restructuring • *Progress* Proyek Strategis dan Isu Strategis Bidang Teknik di Regional | Progress of Strategic Projects and Strategic Issues in the Field of Engineering in the Region • *Update* Rencana Penyerahan Kerja sama kepada *Subholding* | Update on the Plan for Handing over the Cooperation to Subholding • Honorarium Pengawas Pemanduan dan Insentif Pandu Regional 1-4 | Scout Superintendent Honorarium and Regional Scout Incentives 1-4	Arif Suhartono Hambra Samal Mega Satria Ihsanuddin Usman Prasetyo Boy Robyanto Putut Sri Muljanto	
22	Senin, 27 Desember 2021 Monday, December 27, 2021	• CEO *Direction* | CEO Direction • Pemberian Pinjaman PMT | PMT Loan • Pembahasan Rekomendasi PII | Discussion of PII Recommendations • *Progress* Proyek Strategis | Strategic Project Progress • *Update* Kerja sama Usaha dengan Mitra Strategis di Pelindo | Update on Business Cooperation with Strategic Partners at Pelindo	Arif Suhartono Hambra Samal Mega Satria Prasetyo Boy Robyanto Putut Sri Muljanto	Ihsanuddin Usman

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

The agenda and participants for joint meeting of Board of Commissioners and Board of Directors have been presented in the Board of Commissioners Meeting section of the Corporate Governance Chapter of this annual report.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS

Meeting Frequency and Attendance of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meetings		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	22	22	100%
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	22	22	100%
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	18	17	94%
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	22	21	95%
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	5	5	100%
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	5	5	100%
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	5	4	80%

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam RKAP;
3. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk mempresentasikan kepada anggota Direksi lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*); dan
4. Anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut.

Adapun pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2021, yaitu:

BOARD OF DIRECTORS TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

Capability improvement is deemed important to enable the Board of Directors to update their knowledge on the latest developments of the Company's core business, to anticipate problems that arise in the future for the sustainability and progress of the Company. The provisions regarding the Board of Directors capability improvement program are as follows:

1. The capability improvement program is carried out to improve the work effectiveness of Board of Directors;
2. The capability improvement program plan must be included in the RKAP;
3. Each member of Board of Directors who participates in capability improvement programs such as seminar and/or training is required to present to other members of Board of Directors for sharing knowledge; and
4. The member of Board of Directors concerned is obliged to make report on the capability improvement program. The report is submitted to Board of Directors, no later than 30 (thirty) days after the date of the program.

The trainings that have been attended by Board of Directors during 2021 are:

	Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners Joint Meetings			RUPS GMS		
	Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
	12	12	100%	2	2	100%
	12	12	100%	1	1	100%
	10	10	100%	-	-	-
	12	12	100%	2	2	100%
	3	3	100%	-	-	-
	3	3	100%	-	-	-
	3	3	100%	-	-	-

No	Peserta Participants	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal/Tempat Date/Venue	Penyelenggara Organizer
1.	Arif Suhartono	*High Performing Executive Team*	30 November-1 Desember 2021- Bali November 30 – December 1, 2021 – Bali	Korn Ferry
		Executive Training For Directors and Commissioner	27 Desember 2021- Aston Sentul Bogor December 27, 2021 – Aston Sentul Bogor	PMLI Learning Centre
2.	Hambra	*High Performing Executive Team*	30 November-1 Desember 2021- Bali November 30 – December 1, 2021 – Bali	Korn Ferry
		Executive Training For Directors and Commissioner	27 Desember 2021- Aston Sentul Bogor December 27, 2021 – Aston Sentul Bogor	PMLI Learning Centre
3.	Mega Satria	*High Performing Executive Team*	30 November-1 Desember 2021- Bali 30 November – 1 Desember 2021- Bali	Korn Ferry
		Executive Training For Directors and Commissioner	27 Desember 2021- Aston Sentul Bogor December 27, 2021 – Aston Sentul Bogor	PMLI Learning Centre
4.	Ihsanuddin Usman	Pelatihan ESG	26 November 2021-PT TPK KOJA November 26, 2021 – PT TPK KOJA	McKinsey & Company
		High Performing Executive Team	30 November-1 Desember 2021- Bali November 30 – December 1, 2021 – Bali	Korn Ferry
		Executive Training For Directors and Commissioner	27 Desember 2021- Aston Sentul Bogor December 27, 2021 – Aston Sentul Bogor	PMLI Learning Centre
5.	Boy Robyanto	*High Performing Executive Team*	30 November-1 Desember 2021- Bali November 30 – December 1, 2021 – Bali	Korn Ferry
		Strategic Capital Investment, Performance Measurement, and Risk Management	02-03 Desember 2021 *(Online)* *December 02-03, 2021 (Online)*	Glomacs
		Risk Management For Corporate Leaders	12-17 Desember 2021, Boston Amerika December 12-17, 2021, Boston America	Harvard University Amerika
		Executive Training For Directors and Commissioner	27 Desember 2021- Aston Sentul Bogor December 27, 2021 – Aston Sentul Bogor	PMLI Learning Centre
6.	Putut Sri Muljanto	*High Performing Executive Team*	30 November-1 Desember 2021- Bali November 30 – December 1, 2021 – Bali	Korn Ferry
		Executive Training For Directors and Commissioner	27 Desember 2021- Aston Sentul Bogor December 27, 2021 – Aston Sentul Bogor	PMLI Learning Centre
7.	Prasetyo	*High Performing Executive Team*	30 November-1 Desember 2021- Bali November 30 – December 1, 2021 – Bali	Korn Ferry
		Executive Training For Directors and Commissioner	27 Desember 2021- Aston Sentul Bogor December 27, 2021 – Aston Sentul Bogor	PMLI Learning Centre

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan;
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretariat Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretariat Perusahaan;
3. Program pengenalan meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
   b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
   d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan; dan
5. Program pengenalan Perseroan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

The provisions regarding the induction program for members of Board of Directors are as follows:

1. Members of Board of Directors who are appointed for the first time must be given an induction program regarding the Company;
2. The responsibility for conducting the induction program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as the Corporate Secretary;
3. The induction program includes:
   a. Implementation of GCG principles by the Company;
   b. An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
   c. Information related to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; and
   d. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as other prohibited matters.
4. The Company's induction program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company; and
5. The Company's induction program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of Board of Directors.

Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru adalah sebagai berikut.

The implementation of orientation program for the new Directors is as follows.

Tanggal Pelaksanaan Date	Peserta Participants
23 Maret 2021 March 23, 2021	Mega Satria
5 Oktober 2021 October 5, 2021	• Prasetyo • Boy Robyanto • Putut Sri Muljanto

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi antara lain sebagai berikut.

BOARD OF DIRECTORS DECISION AND DUTIES IMPLEMENTATION

Decisions that have been issued by the Board of Directors include the following.

NO	NOMOR NUMBER	TANGGAL DATE	PERIHAL SUBJECT
1	HK.01/1/10/1/KBLG/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Surat Keputusan Direksi Terkait Pedoman Pengelolaan Komersial Kepelabuhanan Dalam Masa Peralihan Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Decree on Port Commercial Management Guidelines in the Transition Period within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

NO	NOMOR NUMBER	TANGGAL DATE	PERIHAL SUBJECT
2	HK.01/1/10/1/ADPG/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/8/6/1/ADP/UT/PI.II-20 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Regulation concerning Amendment to Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: HK.01/8/6/1/ADP/UT/PI.II-20 dated June 8, 2020 on Guidelines for the Procurement of Goods and Services within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
3	HK.01/1/10/5/PSKR/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Susunan Uraian Tugas Jabatan Organisasi Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Composition of Job Descriptions for PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Regional 4 Organization
4	HK.01/1/10/4/PSKR/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Susunan Uraian Tugas Jabatan Organisasi Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Composition of Job Descriptions for PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Regional 3 Organization
5	HK.01/1/10/3/PSKR/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Susunan Uraian Tugas Jabatan Organisasi Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Composition of Job Descriptions for PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Regional 2 Organization
6	HK.01/1/10/2/PSKR/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Susunan Uraian Tugas Jabatan Organisasi Regional 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Composition of Job Descriptions for PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Regional 1 Organization
7	HK.01/1/10/1/PSKR/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Susunan Uraian Tugas Jabatan Organisasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Composition of Job Descriptions for PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Head Office Organization
8	HK.01/1/10/5/STRA/UTMA/PLND-21	01 October 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Regional 4
9	HK.01/1/10/4/STRA/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Regional 3

NO	NOMOR NUMBER	TANGGAL DATE	PERIHAL SUBJECT
10	HK.01/1/10/3/STRA/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Regional 2
11	HK.01/1/10/2/STRA/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Regional 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Regional 1
12	HK.01/1/10/1/STRA/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
13	HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) Pada Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Temporary Enforcement of Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I, III and IV (Persero) at Pelabuhan Indonesia (Persero)
14	HK.01/1/10/1/PBEN/UTMA/PLND-21	01 Oktober 2021 October 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Kebijakan Pedoman Administrasi Keuangan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Policy Guidelines for Financial Administration within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
15	PW.05.02/4/10/1/MRNO/UTMA/PLND-21	04Oktober 2021 October 04, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Pembentukan Komite dan Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Establishment of Committee and the Stipulation of the Governance, Risk Management and Compliance Committee Charter of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
16	HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21	15 October 2021 October 15, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, *Benefit* dan Kesejahteraan Pasca Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Use of Remuneration, Facilities, Benefit and Post-Employment Welfare Policies of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) by PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
17	HK.01/19/10/1/KIRF/SDMA/PLND-21	19 October 2021 October 19, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pemakaian Seragam Dinas bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Use of Service Uniforms for Workers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

NO	NOMOR NUMBER	TANGGAL DATE	PERIHAL SUBJECT
18	HK.01/25/10/1/SKEU/UTMA/PLND-21	25 October 2021 October 25, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Financial Accounting Policy of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
19	HK.01/26/10/1/PSOG/SDMA/PLND-21	26 October 2021 October 26, 2021	Peraturan Direksi tentang Pedoman Perencanaan Tenaga Kerja (*Manpower Planning*) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation on Manpower Planning Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
20	HK.01/27/10/1/KIRF/SDMA/PLND-21	27 October 2021 October 27, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Working Days and Hours for Workers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
21	HK.01/29/10/1/MRIO/UTMA/PLND-21	29 October 2021 October 29, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Strategis dan Pedoman Teknis Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Strategic Guidelines and Technical Guidelines for Risk Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
22	HK.01/1/11/1/PSOG/UTMA/PLND-21	01 November 2021 November 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Komite Talenta di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for the Talent Committee within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
23	HK.01/1/11/1/KPIU/UTMA/PLND-21	01 November 2021 November 01, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu Masa Transisi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Managing Transitional Individual Performance within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
24	HK.01/11/11/1/MRNO/UTMA/PLND-21	11 November 2021 November 11, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko (*Risk Based Decision Making*) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Risk Based Decision Making within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
25	HK.01/18/11/1/PSOG/UTMA/PLND-21	18 November 2021 November 18, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Honorarium Narasumber dan Rapat di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Honorarium for Resource Persons and Meetings at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
26	HK.01/24/11/1/SKEU/UTMA/PLND-21	24 November 2021 November 24, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Manual Akuntansi Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulations of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Financial Accounting Manual
27	HK.01/25/11/2/PTUD/UTMA/PLND-21	25 November 2021 November 25, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Official Travel Provisions for Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

NO	NOMOR NUMBER	TANGGAL DATE	PERIHAL SUBJECT
28	HK.01/25/11/1/PTUD/UTMA/PLND-21	25 November 2021 November 25, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Hak Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Rights of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
29	HK.01/30/11/1/PSKR/UTMA/PLND-21	30 November 2021 November 30, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
30	HK.01/7/12/1/PTUD/UTMA/PLND-21	07 December 2021 December 07, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bagi Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Appointment of Daily Executives for Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
31	HK.01/14/12/1/PRKP/UTMA/PLND-21	14 December 2021 December 14, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) DI Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for the Preparation and Management of the Company's Long-Term Plan (RJPP) in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
32	HK.01/14/12/1/KIRF/UTMA/PLND-21	14 December 2021 December 14, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pelindo Purnakarya Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Pension Fund Regulations from Pelindo Purnakarya Pension Fund
33	HK.01/16/12/1/PRKJ/UTMA/PLND-21	16 December 2021 December 16, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Company Performance Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
34	HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21	20 December 2021 December 20, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dan Pejabat Struktural Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Reporting Wealth for Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officials within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
35	HK.01/23/12/1/LKPP/UTMA/PLND-21	23 December 2021 December 23, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Pedoman Administrasi Layanan Keuangan *(Shared Service Center)* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Financial Service Administration (Shared Service Center) within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

NO	NOMOR NUMBER	TANGGAL DATE	PERIHAL SUBJECT
36	HK.01/30/12/1/MRNO/UTMA/PLND-21	30 December 2021 December 30, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengasuransian Aset, Inventaris, Tanggung Gugat dan Gangguan Usaha di LIngkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines and Procedures for Insuring Assets, Inventory, Liability and Business Interruptions within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
37	HK.01/30/12/2/HLTI/UTMA/PLND-21	30 December 2021 December 30, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Good Corporate Governance (GCG) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
38	HK.01/30/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21	30 December 2021 December 30, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for the Work Procedure of Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
39	HK.01/31/12/1/KAPN/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Official Manuscripts within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
40	HK.01/31/12/5/PSOG/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Cabang/ Terminal/Unit Pelayanan Kepelabuhanan Pada Regional 4 Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Governance of Branches/Terminals/Port Service Units in Regional 4
41	HK.01/31/12/4/PSOG/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pada Regional 1 Cabang Batam PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Governance at Regional 1 Batam Branch of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
42	HK.01/31/12/3/PSOG/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pada Regional 1 Cabang Sungai Pakning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Governance at Regional 1 Pakning River Branch of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
43	HK.01/31/12/2/PSOG/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pada Regional 1 Cabang Dumai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Governance at Regional 1 Dumai Branch of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
44	HK.01/31/12/1/PSOG/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sub Regional Pada Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Organizational Structure and Sub-Regional Governance at Regional 3 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

NO	NOMOR NUMBER	TANGGAL DATE	PERIHAL SUBJECT
45	HK.01/31/12/1/PRIN/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Anggaran Investasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Investment Budgets within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
46	HK.01/31/12/3/HLTI/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System
47	HK.01/31/12/2/HLTI/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for the Code of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
48	HK.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Gratification Control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
49	HK.01/31/12/1/MNMT/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi tentang Pedoman Sistem Manajemen Terpadu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation on Guidelines for Integrated Management System in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
50	HK.01/31/12/1/KMKP/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Komunikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Communication within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
51	HK.01/31/12/2/KMKP/UTMA/PLND-21	31 December 2021 December 31, 2021	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Panduan Identitas Visual dan Brand PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on Guidelines for Visual Identity and Brand of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2021 Direksi telah menjalankan tugasnya untuk pengurusan Perseroan. Adapun tugas yang telah dilakukan oleh Direksi antara lain:

1. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2021;
2. Menyusun dan mengimplementasikan RJPP 2020 - 2024;
3. Menggelar rapat Direksi yang pada tahun 2021 telah terselenggara sebanyak 22 (dua puluh dua kali);
4. Menyusun RKAP dan RKM Perseroan Tahun 2021;
5. Membuat Pakta Integritas dalam rangka penerapan GCG, Kepatuhan Kode Etik Bisnis, Surat Pernyataan Benturan Kepentingan, Daftar Khusus Kepemilikan Saham;
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi yang telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas);
7. Melakukan kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan;
8. Melakukan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh seluruh Direksi, seluruh Manajerial Kantor Pusat, General Manager Cabang Pelabuhan dan Direksi Anak Perusahaan;

In accordance with their duties and responsibilities, in 2021, the Board of Directors has carried out their duties for the management of the Company. The Board of Directors has carried out the following duties:

1. Prepare the Annual Report and Sustainability Report for the 2021 Fiscal Year;
2. Develop and implement RJPP 2020 - 2024;
3. Held 22 (twenty-two) meetings of Board of Directors in 2021;
4. Prepare the Company's RKAP and RKM 2021;
5. Make an Integrity Pact in implementing GCG, Compliance with the Code of Conduct, Statement of Conflict of Interest, Special Register of Share Ownership;
6. Attending the Board of Commissioners meetings that invite the Board of Directors as many as 12 (twelve) times;
7. Pay working visits to Port Branches and Subsidiaries;
8. Conduct national work meetings attended by all Directors, all Head Office Managers, General Managers of Port Branches and Directors of Subsidiaries;

9. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
10. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terkait Pengesahan RKAP 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2021;
11. Melakukan hapus buku piutang pokok macet, bunga, denda, dan/atau ongkos yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Pemegang Saham;
12. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis, operasional dan *support*;
13. Melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai dunia kepelabuhanan;
14. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha;
15. Mewakili Perseroan di dalam dan luar Pengadilan yang mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan;
16. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dll;
17. Melaksanakan kegiatan CSR, selama tahun 2021 telah tersalur dana CSR untuk kegiatan sosial kemasyarakatan maupun lingkungan;
18. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan; dan
19. Menetapkan kebijakan lainnya untuk Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 2 (dua) Komite di bawah Direksi, yang terdiri dari Komite Pelindo Bersih dan Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Direksi berdasarkan rapat dan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama tahun buku.

Sepanjang tahun 2021, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Para anggota Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan salah satu di bawah ini:

1. Meninggal dunia;
2. Permohonan sendiri;
3. Pengalihan tugas;
4. Cacat fisik dan/atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
5. Terlibat dalam tindak pidana kejahatan;
6. Tidak mampu melaksanakan tugas;
7. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
8. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
9. Alasan-alasan lain yang dapat diterima RUPS.

9. Prepare the Company's organizational structure, along with detailed job description;
10. Holding the General Meeting of Shareholders on Ratification of the 2021 RKAP on January 29, 2021 and the General Meeting of Shareholders on the Annual Report on May 10, 2021;
11. Write off the books of bad debts, interest, fines, and/or fees which are then reported to the Board of Commissioners and get approval from the Shareholders;
12. Cooperating with third parties in various fields including business, operations and support;
13. Carry out educational activities in order to increase understanding of the world of ports;
14. Implement Good Corporate Governance in every business activity;
15. Representing the Company inside and outside the Court that binds the Company to other parties and/or other parties to the Company;
16. Regulate provisions regarding the Company's employment including salary, pension, promotion, training, old age insurance, health insurance, etc;
17. Carrying out CSR activities In 2021, CSR funds have been distributed for social and environmental activities;
18. Perform other duties related to the management of the Company; and
19. Establish other policies for the Company in accordance with the laws and regulations.

PERFORMANCE APPRAISAL OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS AND THE BASIS OF APPRAISAL

In carrying out its management duties, the Board of Directors is assisted by 2 (two) Committees under Board of Directors, consisting of Pelindo Bersih Committee and Governance, Risk Management and Compliance Committee. The performance evaluation of Committees under Board of Directors is carried out by the Board of Directors periodically with the criteria based on meetings and the implementation of duties that have been carried out during the fiscal year.

Throughout 2021, Board of Directors considered that the Committees under Board of Directors had carried out their duties and responsibilities well.

BOARD OF DIRECTORS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

Members of Board of Directors are dismissed before their term of office ends for any of the following reasons:

1. Passed away;
2. Own request;
3. Transfer of assignment;
4. Physical and/or mental disabilities that result in not being able to carry out their duties properly;
5. Engage in criminal acts of crime;
6. Unable to carry out the task;
7. Does not carry out their duties properly;
8. Not applying the provisions in the Articles of Association; and
9. Other reasons that can be accepted by the GMS.

DEWAN KOMISARIS

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi;
2. Melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris; dan
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta kebijaksanaan pemerintah, terutama dibidang-bidang yang berhubungan dengan tujuan dan lapangan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP, RKAP serta perubahan/tambahannya, laporan keuangan tahunan, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
2. Mengawasi pelaksanaan RJPP, RKAP tahunan Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian dan pendapatnya kepada RUPS;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS; dan
6. Memberikan laporan kepada RUPS secara berkala (triwulanan, semester, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan hasil pelaksanaan tugasnya.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Dewan Komisaris berhak meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut atas beban Perseroan;
3. Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh para anggota Dewan Komisaris atau ahli-ahli yang membantunya; dan
4. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak biasa setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia atau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.

BOARD OF COMMISSIONERS

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND OBLIGATIONS

Board of Commissioners is tasked to:

1. Supervise the management of the Company by the Board of Directors;
2. Perform tasks specifically assigned to the Board of Commissioners; and
3. Supervise the implementation of regulations and provisions as well as government policies, especially in the sectors related to the Company's objectives and business.

Board of Commissioners is obliged to:

1. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the RJPP, RKAP and amendments/additions thereto, annual financial reports, periodic reports and other reports from the Board of Directors;
2. Supervise the implementation of the Company's RJPP, annual RKAP and submit the results of assessment and opinions to the GMS;
3. Measure the progress of the Company's activities and in the event that the Company shows signs of deterioration, immediately report to the GMS accompanied by suggestions regarding corrective measures that must be taken;
4. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding any other issues deemed important for the management of the Company;
5. Perform other supervisory duties as determined by the GMS; and
6. Provide report to the GMS on a regular basis (quarterly, semester, yearly) and at any time required regarding the development of the Company and the results of its duties implementation.

BOARD OF COMMISSIONERS RIGHTS AND AUTHORITIES

1. Members of Board of Commissioners, either jointly or individually at any time have the right to enter buildings and courtyards or other places used or controlled by the Company and have the right to examine books, documents, inventory goods, checking and matching the condition of cash (for verification purposes) and other securities and being aware of all actions that have been carried out by the Board of Directors;
2. Board of Commissioners is entitled to request the assistance of experts to carry out the examination at the Company's expense;
3. Board of Directors is required to provide an explanation of all matters asked by the Board of Commissioners members or the experts who assist them; and
4. Board of Commissioners by ordinary majority vote has the right at any time to suspend one or more members of Board of Directors, if he or she acts contrary to the Articles of Association or neglects their obligations or there are urgent reasons for the Company.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Perbuatan-perbuatan Direksi yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris yaitu:

1. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain;
2. Memberikan pinjaman jangka pendek atas nama Perseroan;
3. Mengangkat kepala-kepala cabang dan/atau pejabat-pejabat Perseroan yang satu tingkat di bawah Direksi;
4. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam rangka melaksanakan penarikan kredit jangka pendek;
5. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
6. Mengadakan kerja sama operasi dan/atau kerja sama manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha; dan
7. Menyesuaikan struktur organisasi Perseroan dan uraian tugasnya.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
4. Harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh intansi teksi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhitungkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG secara konsisten dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha Perseroan dan memberikan nilai tambah Perseroan melalui pengelolaan bisnis yang didasarkan pada 6 (enam) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kesetaraan, dan Terpercaya, maka Dewan Komisaris dan Direksi

DECISIONS REQUIRING BOARD OF COMMISSIONERS' APPROVAL

Board of Directors' actions of that must first obtain the approval from Board of Commissioners are:

1. Receive short-term loans from banks or other financial institutions;
2. Provide short-term loans on behalf of the Company;
3. Appoint branch heads and/or officials who are one level below the Board of Directors;
4. As collateral for fixed assets required in order to carry out short-term credit withdrawals;
5. Release and write off movable assets with an economic life that is generally applicable in the industry in general up to 5 (five) years and to write off bad debts, inventories of dead goods up to a certain value determined by the GMS;
6. Conduct operational cooperation and/or management cooperation which is valid for a period of not more than 1 (one) year or 1 (one) business cycle; and
7. Adjusting the Company's organizational structure and job descriptions.

BOARD OF COMMISSIONERS TENURE

Members of Board of Commissioners are appointed for a period of 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office. Members of Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the decision of the GMS by stating the reasons.

CRITERIA FOR BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

Those who can be appointed as members of Board of Commissioners are individuals who are capable of carrying out legal actions, unless within 5 (five) years prior to their appointment they have:

1. Been declared bankrupt;
2. Become a member of Board of Directors or Board of Commissioners or Supervisory Board who is found guilty of causing a company or general company to be declared bankrupt;
3. Been sentenced for committing a crime that is detrimental to the State's finances and/or related to the financial sector;
4. Must meet other requirements set by the taxi agency based on statutory regulations; and
5. The appointment of Board of Commissioners is carried out by taking into account integrity, dedication, understanding on management issues, having adequate knowledge in the Company's business fields, and being able to provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on the laws and regulations.

BOARD MANUAL OF BOARD OF COMMISSIONERS

As a form of the Company's commitment to implementing GCG consistently in order to maintain the Company's business continuity and generate added value to the Company through business management based on 6 (six) GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Equality, and Trustworthiness, the Board of Commissioners and

menetapkan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). *Board Manual* berisi pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta proses hubungan fungsi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan antara kedua Organ Perseroan tersebut, agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik, profesional, transparan, efektif, dan efisien.

Board of Directors stipulated the Board Manual of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Board Manual contains guidelines that outline matters relating to the working procedures of Board of Commissioners and Board of Directors as well as the process of functional relations between Board of Commissioners, Board of Directors, and between the two organs of the Company, to create good, professional, transparent, effective and efficient corporate governance.

Adapun isi dari Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dijelaskan secara khusus dalam Bab III, yang mencakup:

1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Keanggotaan Dewan Komisaris;
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
4. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
5. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
6. Kewajiban Dewan Komisaris;
7. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
8. Hak Dewan Komisaris;
9. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris;
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris;
11. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris; dan
12. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.

The contents of the Board Manual of Board of Commissioners are described specifically in Chapter III, which includes:

1. Functions of Board of Commissioners;
2. Membership of Board of Commissioners;
3. Induction and Capability Improvement Program;
4. Ethics of Board of Commissioners;
5. Duties and Authorities of Board of Commissioners;
6. Obligations of Board of Commissioners;
7. Responsibilities of Board of Commissioners;
8. Rights of Board of Commissioners;
9. Principles of Board of Commissioners Decision Making of;
10. Supporting Organs of Board of Commissioners;
11. Performance Appraisal of Board of Commissioners; and
12. Criteria of Performance Evaluation of Board of Commissioners.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pembagian tugas anggota-anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

BOARD OF COMMISSIONERS DIVISION OF SUPERVISION DUTIES

The division of duties of Board of Commissioners members in 2021 has undergone several changes as follows.

Pra Merger

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/KEPDK/PI.II/I-2021 tanggal 6 Januari 2021, dengan susunan sebagai berikut:

Pre-Merger

Based on the Board of Commissioners Decree Number: 01/KEPDK/PI.II/I-2021 dated January 6, 2021:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner / Independent Commissioner	Koordinator Umum dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. General Coordinator and as Chairman of Nomination and Remuneration Committee.
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang sosial, PKBL, CSR, dan kemasyarakatan. Social, PKBL, CSR, and community.
Nurrachman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang operasional dan sistem informasi. Operations and information systems.
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Bidang audit, keuangan, dan sebagai Ketua Komite Audit. Audit, finance, and as Chairman of Audit Committee.
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Bidang teknik, komersial, manajemen risiko, dan sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. Engineering, commerce, risk management, and as Chairman of Risk Management Monitoring Committee.
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Bidang sumber daya manusia, remunerasi, hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi. Human capital, remuneration, legal, procurement of goods and services, and as Secretary of Nomination and Remuneration Committee.
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Bidang transformasi dan pengembangan bisnis. Business transformation and development.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 13/KEPDK/PI.II/VI-2021 tanggal 16 Juni 2021, sebagai berikut:

Based on Board of Commissioners Decree Number: 13/KEPDK/PI.II/VI-2021 dated June 16, 2021:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner / Independent Commissioner	Koordinator Umum dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. General Coordinator and as Chairman of Nomination and Remuneration Committee.
Nurrachman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang audit, keuangan, dan sebagai Ketua Komite Audit. Audit, finance, and as Chairman of Audit Committee.
Darwanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang sosial, PKBL, CSR, dan kemasyarakatan. Social, PKBL, CSR, and society.
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang teknik, komersial, manajemen risiko, dan sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. Engineering, commerce, risk management, and as Chairman of Risk Management Monitoring Committee
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Bidang operasional dan sistem informasi. Engineering, commerce, risk management, and as Chairman of Risk Management Monitoring Committee.
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Bidang sumber daya manusia, hukum, dan pengadaan barang dan jasa. Human capital, legal, and procurement of goods and services.
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Bidang transformasi dan pengembangan bisnis. Business transformation and development.

Pasca Merger

Pembidangan tugas Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 4 Oktober 2021. Adapun pembagian tugas anggota Dewan Komisaris Pelindo adalah sebagai berikut.

Post-Merger

The division of duties of Board of Commissioners is based on the Board of Commissioners Decree Number 1/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 4, 2021. The division of duties for Pelindo's Board of Commissioners members is as follows.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Division of Duties

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Marsetio	Komisaris Independen/ Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	Koordinator Umum, bidang remunerasi dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. General Coordinator, remuneration and as Chairman of Nomination and Remuneration Committee.
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang social, tanggung jawab sosial dan lingkungan, CSR dan kemasyarakatan dan sebagai Wakil Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Social, social and environmental responsibility, CSR and community and as Deputy Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee.
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Audit dan sebagai Ketua Komite Audit. Audit and as Chairman of Audit Committee.
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang teknik, komersial, manajemen risiko, dan sebagai Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Engineering, commerce, risk management, and as Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee.
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Bidang transformasi dan pengembangan bisnis dan sebagai Wakil Ketua Nominasi dan Remunerasi. Business transformation and development and as Deputy Chairman of Nomination and Remuneration.
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Bidang sumber daya manusia, hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Human capital, legal, procurement of goods and services, and as Deputy Chairman of Nomination and Remuneration Committee.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Division of Duties

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Bidang operasional dan sistem informasi dan sebagai Wakil Ketua Komite Audit. Operations and information systems and as Deputy Chairman of Audit Committee.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMN, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

POLICY OF BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITION

Members of Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:
1. Members of Board of Directors in SOE, ROE, Private Owned Enterprises;
2. Other positions according to laws and regulations, political party administrators and/or legislative candidates/members and/or Regional Head/Deputy Regional Head candidates; and
3. Other positions that may cause a conflict of interest.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Concurrent Positions of Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in Other Companies/ Institutions	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Other Companies/Institutions
Marsetio	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	Penasihat Khusus Special Advisor	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment in the Maritime Defense and Security Sector
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Special Staff to the Deputy Chairperson of the Indonesian People's Consultative Assembly	MPR RI Indonesian People's Consultative Assembly
		Anggota Member	Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Sulawesi Selatan The Governor's Team for the Acceleration of Development (TGUPP) of South Sulawesi Province
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Head of Strategic Delivery Unit*	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Staf Utama Main Staff	Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Laut dan Logistik Maritim Minister of Transportation for Sea Transportation and Maritime Logistics
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	-	-
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri General of Foreign Trade Director	Kementerian Perdagangan Ministry of Trade

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:
1. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;
2. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain,

MANAGEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS CONFLICTS OF INTEREST

Board of Commissioners should always avoid conflicts of interest, among others by:
1. Avoid any activity that can affect his/her independence in carrying out his duties;
2. Fill out a Special Register containing information on ownership of shares and/or their families in other companies, including

termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan sepanjang hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan;
4. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan; dan
5. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

if they do not have share ownership, and periodically update each year at the end of the year and are obliged to notify the Company if there are changes to the data in accordance with the applicable laws and regulations;

3. Not responding to requests from any party and for any reason, whether direct requests from certain parties including but not limited to officials/employees within government agencies and political parties relating to requests for donations, including those relating to the procurement of goods and services in the Company and can affect the decision making;
4. Firm in not taking advantage of his/her position for personal interests or for the interests of other people or related parties that are contrary to the interests of the Company; and
5. Disclose if a conflict of interest occur and the concerned member of Board of Commissioners shall not be involved in the Company's decision-making process related to this matter.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Board of Commissioners Share Ownership

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		Pelindo	Perusahaan Lain Other Companies
Marsetio	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	-	-
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	-	-
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	-	-
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	-	-

KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2021, anggota Dewan Komisaris Independen berjumlah 3 (tiga) orang atau 42,85 persen dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu minimal 20 persen dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan.

INDEPENDENT COMMISSIONER

As of December 31, 2021, there are 3 (three) Independent Commissioners or 42.85 percent of the total 7 (seven) members of Board of Commissioners, hence has fulfilled the required criteria, which is at least 20 percent of the total members of the Company's Board of Commissioners.

KRITERIA DAN PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

INDEPENDENT COMMISSIONER CRITERIA AND STATEMENT

Kriteria Komisaris Independen Independent Commissioner Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioner		
	Marsetio	Muchtar Luthfi Mutty	Heru Sukanto
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Does not own shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or major shareholder of the Issuer or Public Company.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut Does not have business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company	√	√	√

RAPAT DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

KEBIJAKAN RAPAT

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil salah satunya dalam Rapat Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*.

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh Seorang atau lebih Dewan Komisaris; dan/atau Permintaan tertulis dari Direksi;
2. Rapat Dewan Komisaris merupakan rapat yang bersifat segera dan/atau strategis. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha IPC atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia;
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama (atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama) dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
4. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Keterwakilan anggota Dewan Komisaris dalam rapat hanya dapat dilakukan dengan mewakilkan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya secara tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya;
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;

MEETING POLICY

Board of Commissioners decisions are made, among others, in the Board of Commissioners Meeting. Board of Commissioners meeting is regulated in the Articles of Association and the Board Manual.

1. Board of Commissioners meeting may be held at any time, if deemed necessary by one or more members of Board of Commissioners; and/or written request from Board of Directors;
2. Board of Commissioners meeting is an immediate and/or strategic meeting. These meetings may be held at the place of domicile or at the place of IPC's business activities or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia;
3. Invitation to Board of Commissioners Meeting is made in writing by the President Commissioner (or a Member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner) and delivered within a period of at least 3 (three) working days before the meeting is held, or in a shorter time if in urgent situation;
4. Board of Commissioners meetings are valid and have the right to make binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (one half) of the total members of Board of Commissioners. The representation of Board of Commissioners members in a meeting can only be done by written proxy to other member of Board of Commissioners, which is given specifically for this purpose, and provided that 1 (one) member can only represent 1 (one) other member of Board of Commissioners;
5. Board of Commissioners meetings are chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unable to attend, the meeting shall be chaired by another member of Board of Commissioners appointed by the President Commissioner;

6. Setiap peserta rapat Dewan Komisaris wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Oleh sebab itu, peserta rapat yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil. Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa;
7. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris, kecuali mengenai diri orang, dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat; dan
8. Hasil-hasil keputusan rapat disusun dalam lembar keputusan rapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat. Risalah rapat tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

6. Each participant of Board of Commissioners meeting must be involved in every decision-making process at the meeting. Therefore, meeting participants who are not present at the time the decision made, must be contacted to immediately return to the meeting process. If the contact is not successful, then the meeting participants are considered to have agreed to the meeting decision taken. The decisions of Board of Commissioners' Meetings are made by deliberation for consensus, if no agreement is reached, the decisions are made by ordinary majority vote;
7. Each member of Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote and plus 1 (one) vote for the member of Board of Commissioners he/she represents. If the number of agree and disagree votes is the same, then the decision is the same as the opinion of the meeting chairman, with due regard to the provisions regarding accountability as regulated in the Company's Articles of Association. Decision-making at the Board of Commissioners Meeting, except decision regarding an individual, is carried out by means of a closed election. A blank vote (abstain) is deemed to have approved the result of the meeting decision. Invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at the meeting; and
8. The meeting decisions are compiled in the meeting decision sheet as an integral part of the minutes of the meeting. The minutes of the meeting must be signed by the meeting chairman and all members of Board of Commissioners present at the meeting

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING PLAN

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

Board of Commissioners Internal Meeting Plan

No	Bulan Month	Agenda Agenda
1	Januari 2021 January 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan kinerja *unaudited* tahun 2020 | Discussion on 2020 unaudited performance • Laporan progres kinerja masing- masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Pembahasan Rencana Implementasi RKAP 2021 | Discussion on 2021 RKAP Implementation Plan • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters
2	Februari 2021 February 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan kinerja bulan Januari 2021 | Discussion on January 2021 performance • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2020 | Discussion on Audit Results for Fiscal Year 2020 • Pembahasan Hasil Asesmen GCG Tahun Buku 2020 | Discussion on GCG Assessment Results for Fiscal Year 2020 • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters
3	Maret 2021 March 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan kinerja bulan Februari 2021 | Discussion on February 2021 performance • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Pembahasan hasil temuan audit dan tindaklanjutnya | Discussion of audit findings and follow-up • Pembahasan Rencana Penunjukan Auditor Eksternal (KAP) Tahun Buku 2021 | Discussion on the Plan to Appoint External Auditor (KAP) for Fiscal Year 2021 • Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2020 | Discussion on Preparation for the GMS Ratification of 2020 Annual Report • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters

No	Bulan Month	Agenda Agenda
4	April 2021 April 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2021 | Discussion on the Quarter I/2021 Management Report • Pembahasan hasil RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2020 | Discussion on the results of GMS Ratification of 2020 Annual Report • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters
5	Mei 2021 May 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan kinerja bulan April 2021 | Discussion on April 2021 performance • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters
6	Juni 2021 June 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan kinerja bulan Mei 2021 | Discussion on May 2021 performance • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters
7	Juli 2021 July 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan Laporan Manajemen Semester I/2021 | Discussion on the Semester I/2021 Management Report • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Telaah atas pelaksanaan RKAP 2021 | Review the implementation of 2021 RKAP • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters
8	Agustus 2021 August 202	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan kinerja bulan Juli 2021 | Discussion on July 2021 performance • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters
9	September 2021 September 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan kinerja bulan Agustus 2021 | Discussion on August 2021 performance • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Pembahasan Usulan RKAP 2022 | Discussion on the 2022 RKAP Proposal • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters
10	Oktober 2021 October 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2021 | Discussion of the Quarter III/2021 Management Report • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Pembahasan Usulan RKAP 2022 | Discussion of the 2022 RKAP Proposal • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters
11	November 2021 November 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan kinerja bulan Oktober 2021 | Discussion on October 2021 performance • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Persiapan RUPS Pengesahan RKAP 2022 | Preparation of the GMS for Ratification of 2022 RKAP • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters
12	Desember 2021 December 2021	• Pembahasan hasil rapat terdahulu | Discussion of the results of previous meeting • Pembahasan kinerja bulan November 2021 | Discussion on November 2021 performance • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat | Performance progress reports for each Directorate • Pembahasan hal-hal strategis lainnya | Discussion of other strategic matters

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Board of Commissioners Internal Meeting Realization

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of Board of Commissioners Meetings are as follows.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Participants Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting Participants Absent	Alasan Ketidakhadiran Reason of Absence
1	Rabu, 6 Januari 2021 Wednesday, January 6, 2021	1. Penghapusbukuan Piutang PT PMLI kepada PT Pelindo II (Persero); 2. Penghapusbukuan Piutang PT Rukindo kepada PT Pelindo II (Persero); 3. Rencana Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap Cabang Tg Priok seluas 238.118,50 M² di Jln Ketel Uap Kalijapat dengan PT Indonesia Power; (4) Hal-hal strategis lainnya. 1. Write-off of PT PMLI's Receivables to PT Pelindo II (Persero); 2. Write-off of PT Rukindo's Receivables to PT Pelindo II (Persero); 3. Cooperation Plan for the Utilization of Fixed Assets in Tg Priok Branch covering an area of 238,118.50 M² on Jln Ketel Steam Kalijapat with PT Indonesia Power; (4) Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Kushari • Andhi • Nurrachman.	• Suaidi • Agus	• Sakit Sick • Penugasan lain Other Assignment
2	Rabu, 13 Januari 2021 Wednesday, January 13, 2021	1. Permohonan Tanggapan tertulis atas rencana Kerja Sama Pendayagunaan *Asset* Tetap PT Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Priok Seluas 56.760,26 M² di Kalibaru Barat II Tanjung Priok dengan PT Dharma Karya Perdana; 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Request for written response to the plan for Cooperation in the Utilization of Fixed Assets of PT Pelindo II (Persero) Tanjung Priok Branch covering an area of 56,760.26 M² in West Kalibaru II Tanjung Priok with PT Dharma Karya Perdana; 2. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Kushari • Andhi • Agus • Nurrachman	Suaidi	Sakit Sick
3	Rabu, 20 Januari 2021 Wednesday, January 20, 2021	1. Rencana Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap Cabang Tanjung Priok seluas 56.760,26 M² di Kalibaru Barat II dgn PT Dharma Karya Perdana; 2. Presentasi KAP atas Progres Audit Tahun Buku 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Cooperation Plan for the Utilization of Fixed Assets in Tanjung Priok Branch covering an area of 56,760.26 M² in West Kalibaru II with PT Dharma Karya Perdana; 2. KAP presentation on the 2020 Fiscal Year Audit Progress of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Andhi • Agus • Nurrachman	• Kushar • Suaidi	• Sakit Sick • Penugasan lain Other Assignment
4	Rabu, 26 Januari 2021 Wednesday, January 26, 2021	1. Permohonan Persetujuan Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap Cabang Tanjung Priok seluas 75.104,73 M² di Area Ancol Timur dengan PT Ekanuri; 2. Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 26 Januari 2021 pkl. 10.00 WIB; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Application for Approval for the Utilization of Fixed Assets in Tanjung Priok Branch covering an area of 75,104.73 M² in the East Ancol Area with PT Ekanuri; 2. Preparation for Coordination Meeting on January 26, 2021, at 10.00 WIB; 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Kushari • Andhi • Agus • Nurrachman	Suaidi	Sakit Sick
5	Rabu, 29 Januari 2021 Wednesday, January 29, 2021	1. RJPP 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. RKAP 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 3. Hal-hal strategis lainnya 1. RJPP 2020-2024 of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. RKAP 2021 of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Suaidi • Kushari • Andhi • Agus • Nurrachman		

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Participants Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting Participants Absent	Alasan Ketidakhadiran Reason of Absence
6	Rabu, 3 Februari 2021 Wednesday, February 3, 2021	1. Usulan KPI Individual Direksi Tahun 2021; 2. Perpanjangan dan Pergantian Anggota Komite; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposed 2021 Individual KPI of Board of Directors; 2. Extension and Change of Committee Member; 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Kushari • Andhi • Agus • Nurrachman	Suaidi	Sakit Sick
7	Rabu, 10 Februari 2021 Wednesday, February 10, 2021	1. Usulan Penghapusbukuan Aset di Sukapura, Cilincing; 2. Laporan Manajemen *Unaudited* Tahun Buku 2020; 3. Usulan Direksi Anak Perusahaan; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposed write-off of assets in Sukapura, Cilincing; 2. Unaudited Management Report for Fiscal Year 2020; 3. Proposal of Board of Directors of Subsidiary; 4. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Suaidi • Kushari • Andhi • Agus • Nurrachman		
8	Rabu, 17 Februari 2021 Wednesday, February 17, 2021	1. Usulan KPI Individual Direksi; 2. Penggantian Anggota Komite Audit; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposed Individual KPI of Board of Directors; 2. Replacement of Audit Committee Member; 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Suaidi • Kushari • Andhi • Agus • Nurrachman		
9	Minggu, 21 Februari 2021 Sunday, February 21, 2021	1. *Talent Pool* Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Hal-hal strategis lainnya 1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Talent Pool 2021; 2. Other strategic matters	• Moermahadi • Montty • Suaidi • Kushari • Andhi • Agus • Nurrachman		
10	Rabu, 24 Februari 2021 Wednesday, February 24, 2021	1. Wawancara Seleksi Calon Anggota Komite Audit; 2. Usulan Perubahan Kewenangan serta Draft SK Direksi tentang Pedoman Kerja Sama dengan Mitra; 3. Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 24 Februari 2021; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Audit Committee Member Candidate Selection Interview; 2. Proposed Change of Authority as well as Draft of Board of Directors Decree concerning Guidelines for Cooperation with Partners; 3. Preparation of Coordination Meeting on February 24, 2021; 4. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Suaidi • Kushari • Andhi • Agus • Nurrachman		
11	Rabu, 10 Maret 2021 Wednesday, March 10, 2021	1. Usulan Direksi Anak Perusahaan; 2. Usulan Perubahan Struktur Organisasi; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposal of Board of Directors for Subsidiary; 2. Proposed Changes in Organizational Structure; 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Suaidi • Andhi • Agus • Nurrachman		
12	Rabu, 17 Maret 2021 Wednesday, March 17, 2021	1. Presentasi KAP atas Progres Audit Tahun Buku 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Penggantian Anggota Komite Audit; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. KAP presentation on the 2020 Fiscal Year Audit Progress of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Replacement of Audit Committee Member; 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Suaidi • Andhi • Agus • Nurrachman		
13	Rabu, 24 Maret 2021 Wednesday, March 24, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris atas PKPT SPI tahun 2020; 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Board of Commissioners' Directions regarding the 2020 SPI PKPT; 2. Other Strategic Matters.	• Moermahadi • Montty • Suaidi • Andhi • Agus • Nurrachman		

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Participants Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting Participants Absent	Alasan Ketidakhadiran Reason of Absence
14	Rabu, 31 Maret 2021 Wednesday, March 31, 2021	1. Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 31 Maret 2021; 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Preparation of Coordination Meeting on March 31, 2021; 2. Other strategic matters.	• Moermahadi • Montty • Suaidi • Andhi • Agus • Nurrachman		
15	Rabu, 7 April 2021 Wednesday, April 7, 2021	1. Surat Pengaduan Indikasi Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan; 2. Surat Usulan Remunerasi Dekom & Direksi; 3. Rencana Kunker Dekom; (4) Hal-hal strategis lainnya. 1. Complaint Letter of Indication of Deviation in the Job Provider Selection; 2. Proposal Letter for Remuneration of Board of Commissioners & Board of Directors; 3. Board of Commissioners work visit plan; (4) Other strategic matters.	• Moermahadi • Andhi • Agus • Nurrachman		
16	Rabu, 21 April 2021 Wednesday, April 21, 2021	1. Tanggapan Dekom atas Laporan Manajemen *Audited* Tahun Buku 2020; 2. Usulan Pengangkatan Direksi Anak Perusahaan; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Board of Commissioners' response to the Audit 2020 Fiscal Year Management Report; 2. Proposal for Appointment of Directors of Subsidiaries; 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Andhi • Agus • Nurrachman		
17	Rabu, 28 April 2021 Wednesday, April 28, 2021	1. Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 28 April 2021; 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Preparation of Coordination Meeting on April 28, 2021; 2. Other strategic matters.	• Moermahadi • Andhi • Agus • Nurrachman		
18	Rabu,19 Mei 2021 Wednesday, May 19, 2021	1. Usulan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan; 2. Usulan Pemberian Pinjaman kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposal for Appointment of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries; 2. Proposed Loan to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Andhi • Agus • Nurrachman		
19	Kamis, 27 Mei 2021 Thursday, May 27, 2021	1. Usulan Pengangkatan Direksi Anak Perusahaan; 2. Usulan Pemberian Pinjaman kepada PT Pelindo I (Persero); 3. Persiapan Rapat Koordinasi tgl 27 Mei 2021; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposal for Appointment of Directors of Subsidiaries; 2. Proposed Loan to PT Pelindo I (Persero); 3. Preparation of Coordination Meeting on May 27, 2021; 4. Other strategic matters.	• Moermahadi • Andhi • Agus • Nurrachman		

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Participants Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting Participants Absent	Alasan Ketidakhadiran Reason of Absence
20	Rabu,9 Juni 2021 Wednesday, June 9, 2021	1. Usulan pengangkatan Direksi dan Dekom Anak Perusahaan; 2. Usulan perubahan struktur organisasi; 3. Pembahasan: a. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Usulan Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Kerja Sama; b. (3) Permohonan Persetujuan atas Usulan Draft SK Direksi tentang Pedoman Kerja Sama PT Pelindo II (Persero); 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposal for the appointment of Directors and Commissioners of Subsidiaries; 2. Proposed changes to the organizational structure; 3. Discussion on: a. Request for Written Response to the Proposal for Adjusting the Limits of Authority Value and Period of Cooperation; b. (3) Application for Approval of the Proposed Draft of Board of Directors Decree concerning Guidelines for Cooperation with PT Pelindo II (Persero); 4. Other strategic matters.	• Moermahadi • Andhi • Agus • Nurrachman		
21	Rabu,16 Juni 2021 Wednesday, June 6, 2021	1. Pemaparan : a. Usulan Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Kerja Sama; b. Usulan Draft SK Direksi tentang Pedoman Kerja Sama PT Pelindo II (Persero); 2. Pembagian Tugas Dekom PT Pelindo II (Persero); 3. Hal- hal strategis lainnya. 1. Presentation: a. Proposal for Adjusting the Limits of Authority Value and Period of Cooperation; b. Proposed Draft of Board of Directors Decree regarding Guidelines for Cooperation of PT Pelindo II (Persero); 2. Division of Duties of Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero); 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
22	Rabu, 23 Juni 2021 Wednesday, June 23, 2021	1. Pemaparan Direktur Komersial: a. Usulan Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Kerja Sama; b. Usulan Draft Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Sama PT Pelindo II (Persero); 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Commerce's Director Presentation: a. Proposal for Adjusting the Limits of Authority Value and Period of Cooperation; b. Proposed Draft of Board of Directors Decree regarding Guidelines for Cooperation of PT Pelindo II (Persero); 2. Other strategic matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
23	Selasa, 29 Juni 2021 Wednesday, June 29, 2021	1. (Revisi KPI Individual Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 29 Juni 2021; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Revised KPI of Individual Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Preparation of Coordination Meeting on June 29, 2021; 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Participants Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting Participants Absent	Alasan Ketidakhadiran Reason of Absence
24	Rabu,14 Juli 2021 Wednesday, July 14, 2021	1. Surat Usulan Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021; 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposal Letter for Appointment of KAP to Audit the Financial Statements of Fiscal Year 2021; 2. Other strategic matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
25	Rabu,28 Juli 2021 Wednesday, July 28, 2021	1. Pembahasan; a. Usulan Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Kerja Sama; b. Usulan Draft Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Sama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Pembahasan surat Permasalahan Pelabuhan Kijing; 3. Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 28 Juli 2021; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion on; a. Proposed Adjustment of the Limits of Authority Value and Duration of Cooperation; b. Proposed Draft of Board of Directors Decree concerning Guidelines for Cooperation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Discussion of the letter regarding Kijing Port Issue; 3. Preparation of Coordination Meeting on July 28, 2021; 4. Other strategic matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
26	Rabu,4 Agustus 2021 Wednesday, August 4, 2021	1. Usulan Perubahan KPI Direksi; 2. Tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I 2021; 3. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Proposed changes to the Board of Directors' KPI; 2. Responses to Semester I 2021 Management Report; 3. Other Strategic Matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
27	Selasa,10 Agustus 2021 Tuesday, August 10, 2021	1. Penjelasan Direksi atas Rencana Akuisisi Saham CTP dalam Rangka Revisi RKAP Tahun 2021; 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Board of Directors' Explanation on the Plan to Acquire CTP Shares in the Framework of Revised RKAP 2021; 2. Other Strategic Matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
28	Rabu,25 Agustus 2021 Wednesday, August 25, 2021	1. Pembahasan Penetapan KAP Tahun Buku 2021; 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion on Determining KAP for the 2021 Fiscal Year; 2. Other Strategic Matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
29	Rabu,25 Agustus 2021 Wednesday, August 25, 2021	1. Pembahasan *Kick Off Meeting* Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion on Kick Off Meeting of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Other Strategic Matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
30	Selasa, 31 Agustus 2021 Tuesday, August 31, 2021	1. Pembahasan Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo Terintegrasi; 2. Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 31 Agustus 2021; 3. Hal-hal Strategis Lainnya. 1. Discussion on proposed remuneration of Integrated Pelindo Board of Commissioners and Board of Directors; 2. Preparation of Coordination Meeting on August 31, 2021; 3. Other Strategic Matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Participants Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting Participants Absent	Alasan Ketidakhadiran Reason of Absence
31	Rabu,15 September 2021 Wednesday, September 15, 2021	1. Usulan Tambahan Penyertaan Modal PT JPPI; 2. (2) Usulan Tambahan Penyertaan Modal PT PMLI melalui Konversi SHL; 3. Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap; 4. Hal- hal strategis lainnya. 1. Proposal for additional PT JPPI Equity Participation; 2. Proposal for additional PT PMLI Equity Participation through SHL Conversion; 3. Proposed write-off of Fixed Assets; 4. Other strategic matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
32	Sabtu,18 September 2021 Saturday, September 18, 2021	1. Usulan Rencana Pendirian dan Penyertaan Modal pada Anak Perusahaan; 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposed Plan for Establishment and Equity Participation in Subsidiaries; 2. Other strategic matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
33	Rabu, 22 September 2021 Wednesday, September 22, 2021	1. Pembahasan Usulan Tambahan Penyertaan Modal PT JPPI; 2. Hal-hal strategis lainnya. 3. Discussion on the Proposed Additional Equity Participation of PT JPPI; 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Agus • Nurrachman • Didi • Sudung • Darwanto • Rainier.		
34	Rabu, 29 September 2021 Wednesday, September 29, 2021	1. Usulan Kerja Sama LPI pada Draft Surat Keputusan Direksi Tentang Pedoman Kerja Sama; 2. Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 29 September 2021; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposal for LPI Cooperation in the Draft of Board of Directors' Decree concerning Cooperation Guidelines; 2. Preparation of Coordination Meeting on September 29, 2021; 3. Other strategic matters.	• Moermahadi • Nurrachman • Sudung • Rainier.	• Agus • Didi • Darwanto	• Penugasan lain Other Assignment • Penugasan lain Other Assignment • Penugasan lain Other Assignment
35	Senin, 4 Oktober 2021 Monday, October 4, 2021	**Pembahasan** 1. Perkenalan Anggota Dewan Komisaris; 2. Pembagian Tugas Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris; 3. Hal- hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Introduction of Board of Commissioners member; 2. Division of duties of Board of Commissioners and Supporting Organs of Board of Commissioners; 3. Other strategic matters.	• Marsetio • Agus • Sudung • Rainier • Irma • Heru	Didi	Penugasan lain Other Assignment
36	Selasa, 12 Oktober 2021 Tuesday, October 12, 2021	Pembahasan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Discussion of Members of Board of Commissioners Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	• Marsetio • Agus • Didi • Sudung • Rainier • Irma • Heru		
37	Selasa, 2 November 2021 Tuesday, November 2, 2021	**Pembahasan** 1. Penyampaian RKAP Tahun 2022 PT Pelindo (Persero) oleh Komite Audit; 2. Penyampaian RKA Dekom Tahun 2022; 3. Isu Media tentang biaya Siluman di Pelabuhan; 4. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Submission of PT Pelindo (Persero) RKAP 2022 by Audit Committee; 2. Submission of 2022 Board of Commissioners RKA; 3. Media issues regarding stealth fees at the port; 4. Other strategic matters.	• Marsetio • Agus • Didi • Sudung • Rainier • Irma • Heru		

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Participants Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting Participants Absent	Alasan Ketidakhadiran Reason of Absence
38	Selasa, 9 November 2021 Tuesday, November 9, 2021	**Pembahasan** 1. Laporan Manajemen s.d Triwulan III Tahun 2021 oleh Komite Audit; 2. Usulan Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Persetujuan Kerja Sama oleh KGCG & PMR; 3. Usulan Perubahan Organisasi Kantor Pusat oleh KNR; 4. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Management Report up to Quarter III of 2021 by Audit Committee; 2. Proposal for Adjustment of Limits on Authority Value and Proposed Changes in the Organization of Head Office by KNR; 3. Other strategic matters.	• Marsetio • Agus • Rainier • Heru	• Didi • Sudung • Irma	• Penugasan lain Other Assignment • Penugasan lain Other Assignment • Penugasan lain Other Assignment
39	Senin, 22 November 2021 Monday, November 22, 2021	**Pembahasan** 1. Persiapan Rapat Koordinasi tgl 23 November 2021 (Penyampaian *Point of Concern* atas Laporan Manajemen Bulan Oktober 2021 dan RKAP 2022 setelah Aspirasi Pemegang Saham oleh Komite Dekom); 2. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Preparation of Coordination Meeting on November 23, 2021 (Submission of the Point of Concern on October 2021 Management Report and RKAP 2022 after the Shareholders' Aspiration by the Committees of Board of Commissioners); 2. Other strategic matters.	• Marsetio • Agus • Didi • Sudung • Heru	• Rainier • Irma	• Penugasan lain Other Assignment • Penugasan lain Other Assignment
40	Selasa, 7 Desember 2021 Tuesday, December 7, 2021	**Pembahasan** 1. Penyampaian Progres Audit KAP Purwantono, Sungkoro & Surja oleh Komite Audit; 2. Kesiapan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dan Makassar New Port (MNP) dalam Mendukung Program *Green Port* sebagai Bagian dari Agenda *Climate Change* Dunia; 3. Hal-hal strategis lainnya: Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT Pelindo (Persero) Pasca Merger oleh KNR. **Discussion on** 1. Submission of audit progress of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja by Audit Committee; 2. Readiness of Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) and Makassar New Port (MNP) in Supporting the Green Port Program as Part of the World Climate Change Agenda; 3. Other strategic matters: Organizational Structure and Governance of PT Pelindo (Persero) Post Merger by KNR.	• Marsetio • Agus • Didi • Sudung • Rainier • Heru	Irma	Penugasan lain Other Assignment

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETINGS

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting are as follows.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda
1	Rabu, 26 Januari 2021 Wednesday, January 26, 2021	**Pembahasan** 1. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 23 Desember 2020; 2. Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Desember 2020; 3. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Follow up on the results of Coordination Meeting on December 23, 2020; 2. Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until December 2020; 3. Other strategic matters.
2	Rabu, 24 Februari 2021 Wednesday, February 24, 2021	**Pembahasan** 1. Seremoni Penandatanganan KPI, RJPP 2020-2024, RKAP 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 26 Januari 2021; 3. Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Januari 2021; 4. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Signing Ceremony of KPI, RJPP 2020-2024, RKAP 2021 of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Follow up on the results of Coordination Meeting on January 26, 2021; 3. Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until January 2021; 4. Other strategic matters.
3	Rabu, 31 Maret 2021 Wednesday, March 31, 2021	**Pembahasan** 1. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 24 Februari 2021; 2. Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Februari 2021; 3. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Follow up on the results of Coordination Meeting on February 24, 2021; 2. Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until February 2021; 3. Other strategic matters.
4	Rabu, 28 April 2021 Wednesday, April 28, 2021	**Pembahasan** 1. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 31 Maret 2021; 2. Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Maret 2021; 3. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Follow up on the results of Coordination Meeting on March 31, 2021; 2. Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until March 2021; 3. Other strategic matters.
5	Kamis, 27 Mei 2021 Thursday, May 27, 2021	**Pembahasan** 1. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 28 April 2021; 2. Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan April 2021; 3. Paparan Direksi mengenai Rencana Pelunasan *Global Bond* pada saat jatuh tempo; 4. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Follow up on the results of Coordination Meeting on April 28, 2021; 2. Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until April 2021; 3. Board of Directors' explanation of the Plan for Repayment of Global Bonds at maturity; 4. Other strategic matters.
6	Selasa, 29 Juni 2021 Tuesday, June 29, 2021	**Pembahasan** 1. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 27 Mei 2021; 2. Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Mei 2021; 3. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Follow up on the results of Coordination Meeting on May 27, 2021; 2. Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until May 2021; 3. Other strategic matters.
7	Rabu, 28 Juli 2021 Wednesday, July 28, 2021	**Pembahasan** 1. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 29 Juni 2021; 2. Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Juni 2021; 3. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Follow up on the results of Coordination Meeting on June 29, 2021; 2. Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until June 2021; 3. Other strategic matters.

	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants Board of Commissioners	Peserta Rapat Direksi Meeting Participants Board of Directors
	Hadir: Moermahadi Montty Kushari Andhi Agus Nurrachman. Tidak Hadir: Suaidi	Hadir: Arif Hambra Rima Zuhri Muarip Yon Ihsanuddin Ogi
	Hadir: Moermahadi Montty Suaidi Andhi Agus Nurrachman.	Hadir: Arif Hambra Rima Zuhri Muarip Yon Ihsanuddin Ogi
	Hadir: Moermahadi Andhi Agus Nurrachman.	Hadir: Arif Hambra Rima Zuhri Muarip Mega Ihsanuddin Ogi
	Hadir: Moermahadi Andhi Agus Nurrachman.	Hadir: Arif Hambra Rima Zuhri Muarip Mega Ihsanuddin Ogi
	Hadir: Moermahadi Andhi Agus Nurrachman.	Hadir: Arif Hambra Rima Zuhri Muarip Mega Ihsanuddin Ogi
	Hadir: Moermahadi Agus Nurrachman Dldi Sudung Darwanto Rainier	Hadir: Arif Hambra Rima Zuhri Muarip Mega Ihsanuddin Ogi
	Hadir: Moermahadi Agus Nurrachman Dldi Sudung Darwanto Rainier	Hadir: Arif Hambra Rima Zuhri Muarip Mega Ihsanuddin Ogi

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda
8	Selasa, 31 Agustus 2021 Tuesday, August 31, 2021	**Pembahasan** 1. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 28 Juli 2021; 2. Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Juli 2021; (3) Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Follow up on the results of Coordination Meeting on July 28, 2021; 2. Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until July 2021; (3) Other strategic matters.
9	Rabu, 29 September 2021 Wednesday, September 29, 2021	**Pembahasan** 1. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 31 Agustus 2021; 2. Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) s.d. bulan Agustus 2021; (3) Hal-hal strategis lainnya. **Discussion on** 1. Follow up on the results of Coordination Meeting on August 31, 2021; 2. Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until August 2021; (3) Other strategic matters.
10	Senin, 11 Oktober 2021 Monday, October 11, 2021	**Pembahasan:** 1. Pembukaan oleh Plt. Komisaris Utama "*One Team One Spirit*"; 2. Paparan Direktur Utama tentang Rencana Kerja Garis Besar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pasca Penggabungan s.d. Desember 2021; 3. Penyampaian : a. Perkembangan Terminal *Multi Purpose* Labuan Bajo yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 14 Oktober 2021; b. Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur; c. Perkembangan PSN Bali *Maritime Tourism Hub* (BMTH); d. Rencana Usulan Ambon New Port untuk Mendukung Program Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN); 4. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion:** 1. Opening by Acting President Commissioner "One Team One Spirit"; 2. President Director's explanation on the Outline Work Plan of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) after the Merger until the end. December 2021; 3. Presentation: a. Progress of Labuan Bajo Multi Purpose Terminal which will be inaugurated by the President on October 14, 2021; b. Progress of Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) National Strategic Project (PSN) in Gresik, East Java; c. Progress of PSN Bali Maritime Tourism Hub (BMTH); d. Ambon New Port Proposed Plan to Support Maluku National Fish Barn (MLIN) Program; 4. Other strategic matters.
11	Selasa, 23 November 2021 Tuesday, November 23, 2021	**Pembahasan:** 1. Tindak Lanjut Rapat Korespondensi Surat menyurat sebelumnya; a. *Update* Transformasi kelembagaan dan SDM pasca Marger, Khususnya yang berkaitan dengan tata kerja dan hubungan Kelembagaan antara Pusat, Regional, *Subholding*, dan anak Perusahaan; b. Penjelasan atas Usulan Batas Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Persetujuan Kerja Sama; c. Rencana Investasi kemaritiman di 10 Pelabuhan Utama; d. Percepatan Implementasi *National Logistic Ecosystem* di 10 Pelabuhan Utama; 2. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Oktober 2021; 3. Pembahasan RKAP PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2022 setelah Aspirasi Pemegang Saham (APS); 4. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion:** 1. Follow-up to the previous correspondence meeting; a. Update on institutional and HC transformation after the merger, particularly with regard to work procedures and institutional relations between the Head Office, Regional, Subholding, and Subsidiaries; b. Explanation of the Proposed Limit of Authority Value and Term of Cooperation Agreement; c. Maritime Investment Plan in 10 Main Ports; d. Accelerating the Implementation of National Logistic Ecosystem in 10 Main Ports; 2. Discussion of the Management Report for October 2021; 3. Discussion on RKAP 2022 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) after the Shareholders' Aspirations (APS); 4. Other strategic matters.

	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants Board of Commissioners	Peserta Rapat Direksi Meeting Participants Board of Directors
	Hadir| Present: Moermahadi Agus Nurrachman Dldi Sudung Darwanto Rainier	Hadir| Present: Arif Hambra Rima Zuhri Muarip Mega Ihsanuddin Ogi
	Hadir| Present: Moermahadi Nurrachman Sudung Rainier Tidak Hadir | Not Present: Agus Dldi Darwanto	Hadir| Present: Arif Hambra Rima Zuhri Muarip Mega Ihsanuddin Ogi
	Hadir| Present: Marsetio Agus Sudung Rainier Heru Tidak Hadir | Not Present: Didi Irma	Hadir| Present: Arif Hambra Mega Ihsanuddin Prasetyo Boy Putut
	Hadir| Present: Marsetio Agus Sudung Rainier Heru Tidak Hadir | Not Present: Didi Irma	Hadir| Present: Arif Hambra Mega Ihsanuddin Prasetyo Boy Putut

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda
12	Selasa, 21 Desember 2021 Tuesday, December 21, 2021	**Pembahasan:** 1. Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. *Update* Struktur Organisasi dan Tata kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pasca Merger; b. Rencana *Inbreng* Saham/Aset kepada *Subholding*; c. Penjelasan RKAP Tahun 2022 setelah Rapat Teknis dengan Kementerian BUMN; d. *Update* kesiapan Pelabuhan dalam mendukung Program *Green Port* sebagai bagian Agenda *Climate Change* Dunia 2. Laporan Manajemen Bulan November 2021 3. Hal-hal strategis lainnya. **Discussion:** 1. Follow-up to the previous correspondence meeting; a. Update on the Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) after the Merger; b. Plan for Inbreng Shares/Assets to Subholdings; c. Explanation of 2022 RKAP after Technical Meeting with the Ministry of SOEs; d. Update on port readiness to support the Green Port Program as part of the World Climate Change Agenda 2. Management Report of November 2021 3. Other strategic matters.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Meeting Frequency and Attendance of Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Marsetio	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	6	6	100%
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	20	19	95%
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	34	32	94%
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	20	20	100%
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	20	17	85%

	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants Board of Commissioners	Peserta Rapat Direksi Meeting Participants Board of Directors
	Hadir| Present: Marsetio Agus Sudung Rainier Heru Luthfi Tidak Hadir | Not Present: Didi	Hadir| Present: Arif Hambra Mega Ihsanuddin Prasetyo Boy Putut

	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings			RUPS GMS		
	Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage	Program	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
	3	3	100%	-	-	-
	1	1	100%	-	-	-
	3	3	100%	-	-	-
	7	7	100%	-	-	-
	12	11	92%	2	2	100%
	7	7	100%	-	-	-
	7	3	43%	-	-	-

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan terkait program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam RKA Dewan Komisaris;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyampaikan bahan/hasil yang diperoleh dalam program peningkatan kapabilitas kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan; dan
4. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris, selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut.

BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

Capability improvement is deemed important to enable the Board of Commissioners to update their knowledge on the latest developments of the Company's core business, to anticipate problems that arise in the future for the sustainability and progress of the Company. The provisions regarding the Board of Commissioners capability improvement program are as follows:

1. The capability improvement program is carried out to improve the work effectiveness of Board of Commissioners;
2. The capability improvement program plan must be included in the Board of Commissioners RKA;
3. Each member of Board of Commissioners who participates in capability improvement programs such as seminar and/or training is required to present to other members of Board of Commissioners for sharing knowledge; and
4. The member of Board of Commissioners concerned is obliged to make report on the capability improvement program. The report is submitted to Board of Commissioners, no later than 30 (thirty) days after the date of the program.

Realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 dijabarkan dalam tabel berikut ini:

The trainings that have been attended by Board of Commissioners during 2021 are:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Subject of Training/ Competency Development	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Marsetio	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	*Executive Training* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Aston-Bogor 27 Desember 2021 Aston-Bogor December 27, 2021	Pelindo
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Executive Training* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Aston-Bogor 27 Desember 2021 Aston-Bogor December 27, 2021	Pelindo
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Executive Training* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Aston-Bogor 27 Desember 2021 Aston-Bogor December 27, 2021	Pelindo
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Executive Training* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Aston-Bogor 27 Desember 2021 Aston-Bogor December 27, 2021	Pelindo
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	*Executive Training* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Aston-Bogor 27 Desember 2021 Aston-Bogor December 27, 2021	Pelindo

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Subject of Training/ Competency Development	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	*Training* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Aston-Bogor 27 Desember 2021 Aston-Bogor December 27, 2021	Pelindo
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	*Training* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Aston-Bogor 27 Desember 2021 Aston-Bogor December 27, 2021	Pelindo

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan;
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretariat Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretariat Perusahaan;
3. Program pengenalan meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
   b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
   d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan;
5. Program pengenalan Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

Pelaksanaan program orientasi bagi Dewan Komisaris baru telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021 dan 10 Desember 2021.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF COMMISSIONERS

The provisions regarding the induction program for members of Board of Commissioners are as follows:

1. Members of Board of Commissioners who are appointed for the first time must be given an induction program regarding the Company;
2. The responsibility for conducting the induction program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as the Corporate Secretary;
3. The induction program includes:
   a. Implementation of GCG principles by the Company;
   b. An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
   c. Information related to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; and
   d. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as other prohibited matters.
4. The Company's induction program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company;
5. The Company's induction program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of Board of Commissioners.

The orientation program for new Commissioner has been carried out on October 4, 2021 and December 10, 2021.

REKOMENDASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2021, tanggapan, nasihat, rekomendasi dan persetujuan Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan penghapusbukuan dan penghapus tagih piutang bunga dan denda atas pinjaman PT PMLI kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Penilaian kinerja staf sekretaris Dewan Komisaris tahun 2019;

BOARD OF COMMISSIONERS RECOMMENDATIONS AND DUTIES IMPLEMENTATION

The followings are the Board of Commissioners' responses, advice, recommendations and approvals in 2021:

1. Approval of write-off and write-off for interest receivables and fines on loans from PT PMLI to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Performance appraisal of the secretarial staff of Board of Commissioners in 2019;

3. Rencana Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap;
4. Buku Rancangan RJPP Tahun 2020-2024;
5. RKAP Tahun 2021;
6. Buku Laporan Keuangan dan Buku Laporan Manajemen Tahun 2020 (*unaudited*);
7. Penghapusan Aktiva Tetap;
8. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan;
9. KPI Direksi secara Individual Tahun 2021;
10. Perubahan Kewenangan serta Draft Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Sama dengan Mitra;
11. Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat;
12. Evaluasi PKPT SPI Tahun 2021;
13. Tindak lanjut Pengaduan;
14. Pemberian Pinjaman;
15. Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan jangka Waktu Kerja sama;
16. Penyampaian *Nominated Talent* pada Klaster Logistik Laut
17. Penjelasan atas Insiden;
18. Persetujuan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2021
19. Laporan Manajemen;
20. Remunerasi Paska Integrasi Pelindo dan Faktor Pendukung Tantiem;
21. Pemberian *Intercompany Loan* (ICL); dan
22. Tambahan Penyertaan Modal untuk Anak Perusahaan.

Selama tahun 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya berdasarkan rencana kerja, antara lain:

1. Melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris dan organ pendukung, rapat internal Dewan Komisaris dangan mengundang Direksi serta rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi;
2. Pengawasan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
3. Pengawasan pelaksanaan audit eksternal dan mengajukan usulan auditor eksternal;
4. Memberikan tanggapan terhadap hal-hal terkait dengan tupoksi Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan;
5. Menyampaikan Laporan Dewan Komisaris; dan
6. Penugasan khusus.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dievaluasi secara periodik. Dewan Komisaris menetapkan indikator pencapaian kinerja (KPI) yang disahkan melalui RUPS setiap tahun. RUPS menetapkan indikator pencapaian kinerja (KPI) Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasinya kepada Pemegang Saham/Menteri BUMN.

3. Cooperation Plan for the Utilization of Fixed Assets;
4. Draft of 2020-2024 RJPP Book;
5. 2021 RKAP;
6. 2020 Financial Report Book and Management Report Book (unaudited);
7. Write-off of Fixed Assets;
8. Appointment of Commissioners and Directors of subsidiaries;
9. Individual KPI Directors in 2021;
10. Change of Authority as well as Draft of Board of Directors Decree regarding Guidelines for Cooperation with Partners;
11. Changes in the Organizational Structure of the Head Office;
12. Evaluation of the 2021 SPI PKPT;
13. Follow-up on Complaints;
14. Loans;
15. Adjustment of Limits of Authority Value and Cooperation Period;
16. Submission of Nominated Talent in Marine Logistics Cluster;
17. Explanation of Incidents;
18. Approval of Public Accounting Firm for Fiscal Year 2021;
19. Management Report;
20. Post-Integration Pelindo Remuneration and Supporting Factors Tantiem;
21. Provision of Intercompany Loans (ICL); and
22. Additional Equity Participation for Subsidiaries.

In 2021, the Board of Commissioners has carried out their duties based on the work plan, including:

1. Conducting internal meetings of Board of Commissioners and supporting organs, internal meetings of Board of Commissioners inviting Board of Directors and coordination meetings between Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Supervising the implementation of good corporate governance principles;
3. Supervising the implementation of external audit and submit proposal to external auditor;
4. Provide feedback on matters related to the duties and responsibilities of Board of Commissioners in managing the company;
5. Submit the Board of Commissioners Report; and
6. Special assignments.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE APPRAISAL

PROCEDURE OF BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE APPRAISAL

The performance of Board of Commissioners is evaluated periodically. The Board of Commissioners determines the performance achievement indicators (KPI) which are ratified through the GMS every year. The GMS determines the performance achievement indicators (KPI) of Board of Commissioners which is a success measure of Board of Commissioners duties and responsibilities implementation based on the proposal of Board of Commissioners and submits a quarterly report on the realization progress to the Shareholders/Minister of SOEs.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris tahun 2021 disusun dengan indikator utama dan bobot sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan
   Berupa kontribusi Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja perusahaan, yang ditunjukkan melalui pencapaian KPI perusahaan;
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris
   Merupakan ukuran ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, diukur menggunakan rata-rata penetapan persetujuan/rekomendasi dibandingkan dengan jumlah hari maksimal yang ditetapkan untuk proses persetujuan/pendapat/saran;
3. Kontribusi terhadap penerapan GCG
   Mengukur pencapaian GCG untuk aspek Dewan Komisaris pada Tahun 2020 serta tindak lanjut atas rekomendasi *area of improvement* pada pengukuran GCG tahun 2020;
4. Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
   Merupakan ukuran tingkat keaktifan Dewan Komisaris dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, baik rapat internal dan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, serta jumlah kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Cabang;
5. Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan
   Merupakan ukuran kegiatan pengawasan dan arahan yang diukur dari jumlah nasihat dan arahan yang diberikan kepada perusahaan atas 7 bidang utama sebagaimana yang dipersyaratkan dalam GCG; dan
6. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris
   Merupakan penilaian efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris yang diukur melalui jumlah penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta efektivitas organ pendukung Dewan Komisaris, yang terdiri atas tingkat kehadiran, jumlah rapat, dan laporan penugasan komite.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self assessment*.

CRITERIA OF BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE EVALUATION

The Key Performance Indicators (KPI) of Board of Commissioners in 2021 were prepared with the following main indicators and weights:

1. Contribution to the company's performance achievements
   The contribution made by the Board of Commissioners to the company's performance achievements, which is shown through the achievement of corporate KPIs;
2. Timely submission of opinions and suggestions which are the obligations of Board of Commissioners
   Measuring the timeliness of submitting opinions and suggestions which are the obligations of Board of Commissioners, using the average approval/recommendation determination compared to the maximum number of days set for the approval/opinion/suggestion process;
3. Contribution to GCG implementation
   Measuring the achievement of GCG for Board of Commissioners aspect in 2020 as well as following up on recommendations for areas of improvement in 2020 GCG assessment;
4. Meetings and Working Visits of Board of Commissioners
   Measuring the level of activeness of Board of Commissioners in meetings held by Board of Commissioners, both internal meetings and meetings of Board of Commissioners with Board of Directors, as well as the number of working visits of Board of Commissioners to Branches;
5. Supervision and direction to Board of Directors on company plans and policies
   Measuring the supervision and direction activities, measured by the amount of advice and direction given to the company on 7 main areas as required in GCG; and
6. Effectiveness of Board of Commissioners' supporting activities
   Assessing the effectiveness of Board of Commissioners' supporting activities, measured by the number of competency development held, as well as the effectiveness of supporting organs of Board of Commissioners, which consists of the level of attendance, number of meetings, and committee assignment reports.

ASSESSOR

The performance appraisal of Board of Commissioners is carried out using a self-assessment system.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

RESULTS OF BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE APPRAISAL

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan Contribution to the company's performance achievements		10,00				10,49
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to the realization of Board of Directors' KPI achievements	Poin Point	10,00	100	104,88	105%	10,49
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris Timeliness of submission of Opinions and Suggestions as Board of Commissioners' obligations		20,00				24,00
	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2022, Laporan Triwulanan 2021, dan Laporan Tahunan 2020 Opinions and Suggestions of Board of Commissioners on the 2022 RKAP, 2021 Quarterly Report, and 2020 Annual Report	Hari Days	5.00	30	16	120%	6,00
	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri Responses to the Board of Directors' actions that must be approved by the GMS/Minister	Hari Days	5,00	14	8	120%	6,00
	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Responses to the Board of Directors' actions that must be approved by the Board of Commissioners	Hari Days	5,00	14	8	120%	6,00
	Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan Quarterly and Annual Board of Commissioners Report	Hari Days	5,00	30	12	120%	6,00
3.	Kontribusi terhadap penerapan GCG Contribution to the implementation of GCG		10,00				10,00
	Kontribusi kualitas penerapan GCG Contribution to the quality of GCG implementation	Poin Point	5,00	31,5	31,5	100%	5,00
	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG Aspek Dewan Komisaris Follow-up to the Recommendations on the Results of GCG Assessment on Board of Commissioners Aspect	%	5,00	100	100	100%	5,00
4.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Meetings and Work Visits of Board of Commissioners		18,00				17,49
	Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Internal Meetings of Board of Commissioners	Jumlah Amount	6,00	12	40	120%	7,20

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Amount	6,00	12	12	100%	6,00
	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Working Visit of Board of Commissioners to the Branch	Jumlah Amount	6,00	7	5	71%	4,29
5.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan Supervision and direction to the Board of Directors on Corporate plans and policies	Jumlah Amount	14,00	7	7	100%	14,00
6.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners		28,00				26,60
	a. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Competency Improvement of Board of Commissioners						
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Competency development of Board of Commissioners	Pelaksanaan Amount	10,00	4	2	50%	5,00
	b. Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs						
	Komite Audit Audit Committee						
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meeting	Jumlah Times	3,00	12	18	120%	3,60
	• Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4	22	120%	3,60
	Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko GCG & Risk Management Monitoring Committee						
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of GRMM Committee Internal Meeting	Jumlah Times	3,00	12	18	120%	3,60
	• Laporan Penugasan Komite PMR GRMM Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4	28	120%	3,60
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee						
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of NR Committee Internal Meetings	Jumlah Times	3,00	12	20	120%	3,60
	• Laporan Penugasan Komite NR NR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4	23	120%	3,60
	Jumlah Total		**100**				**102,57**

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA KOLEGIAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pengelolaan KPI Direksi secara Kolegial diawali dengan penetapan KPI Direksi secara kolegial yang mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku, aspirasi pemegang saham, RJPP dan capaian KPI Perusahaan tahun sebelumnya. Hasil penetapan Direksi secara kolegial selanjutnya dituangkan dalam Kontrak Manajemen Tahunan Direksi secara Kolegial yang ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris beserta perwakilan dari Pemegang Saham.

Penilaian KPI Direksi secara Kolegial diawali dengan pemetaan sumber data dan unit pemilik data (*data producer*), untuk kemudian mengisi data realisasi KPI pada kertas kerja pengukuran KPI. Jika tidak tercapai, maka pemilik data harus menyampaikan justifikasi ketidaktercapaian KPI beserta dokumen pendukung lainnya kepada *Group* Perencanaan Strategis.

Pencapaian KPI Direksi secara Kolegial dilaporkan secara berkala yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Manajemen. Laporan Capaian KPI Direksi secara Kolegial yang menjadi kesatuan dalam Laporan Manajemen akan dievaluasi oleh Komite Audit dan kemudian disampaikan tanggapan dari Komisaris kepada Direksi atas capaian KPI tersebut. Penilaian KPI Direksi secara Kolegial dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun yang bersangkutan dengan ketentuan realisasi akhir masing-masing variabel KPI maksimal 110% (seratus sepuluh persen).

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Adapun KPI Direksi secara kolegial Tahun 2021 terdiri atas berikut ini:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
   Finansial
   a. ROIC-WACC;
   b. *Cash From Operational* (CFO);
   c. *Maximum Loss from Exchange Rate to Operating Income;*
   d. *Interest Bearing Debt to Invested Capital;*
   e. *Interest Bearing Debt to EBITDA;*
   f. Operasional;
   g. *Throughput;*
      - *Container Throughput;*
      - *Non Container Throughput.*
   h. B/S/H *(gross);*
   i. *Waiting Time;*
   j. Sosial;
   k. Manfaat kesejahteraan masyarakat di sekitar pelabuhan.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

COLLEGIAL BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

PROCEDURE OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

Collegial management of the Board of Directors' KPI begins with the determination of the Board of Directors' KPI collegially, by referring to the applicable government regulations, shareholder' aspirations, RJPP and the previous year's Corporate KPI achievement. The determination results of the Board of Directors' KPI collegially are then set forth in the Collegial Annual Management Contract of Board of Directors that is signed by Board of Directors the Board of Commissioners along with representatives from Shareholders.

Collegial evaluation of the Board of Directors' KPI begins with mapping the data source and data producer unit, then filling in the KPI realization data on KPI measurement working paper. If it is not achieved, then the data owner must convey the justification for the KPI not being achieved along with other supporting documents to the Strategic Planning Group.

The achievements of the Board of Directors collegial KPI are reported on a regular basis as an integral part of the Management Report. The Board of Directors' KPI Achievement Report in a collegial manner which is integrated in the Management Report will be evaluated by the Audit Committee and the Board of Commissioners' responses on the KPI are then submitted to the Board of Directors. Collegial KPI assessment of Board of Directors is carried out referring to the results of measurements by the External Auditor that audits the Company's Financial Statements for the year concerned with the provision that the final realization of each KPI variable is a maximum of 110% (one hundred and ten percent).

CRITERIA OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

The Board of Directors collegial KPI for 2021 consists of the following:

1. Economic and Social Value for Indonesia
   Financial
   a. ROIC-WACC;
   b. Cash From Operations (CFO);
   c. Maximum Loss from Exchange Rate to Operating Income;
   d. Interest Bearing Debt to Invested Capital;
   e. Interest Bearing Debt to EBITDA;
   f. Operational;
   g. Throughput;
      - Container Throughput;
      - Non-Container Throughput.
   h. B/S/H (gross);
   i. Waiting Time;
   j. Social;
   k. Benefits of community welfare around the port.

2. Inovasi Model Bisnis
   a. Standarisasi Performansi Pelabuhan;
   b. *Unified Key Account Management.*
3. Kepemimpinan Teknologi
   a. Digitalisasi Pelayanan Pelabuhan;
   b. Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan.
4. Peningkatan Investasi
   a. *Milestone* Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan;
   b. Optimalisasi Aset (lahan dan/atau alat B/M).
5. Pengembangan Talenta
   a. Pemenuhan Standar Keahlian Teknis;
   b. % Perempuan dalam *Nominated Talent;*
   c. Penyiapan suksesor milenial.

2. Business Model Innovation
   a. Standardization of Port Performance;
   b. Unified Key Account Management.
3. Technology Leadership
   a. Digitizing Port Services;
   b. Implementation of Green Technology in Ports.
4. Investment Increase
   a. Milestone for Port Infrastructure Development;
   b. Asset Optimization (land and/or B/M equipment).
5. Talent Development
   a. Compliance with Technical Expertise Standard;
   b. % Female in Nominated Talent;
   c. Preparation of Millennial successor.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi yaitu Dewan Komisaris dan disampaikan ke Pemegang Saham/RUPS.

ASSESSOR

The Board of Directors performance is assessed by the Board of Commissioners and is submitted to the Shareholders/GMS.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pencapaian KPI Direksi secara kolegial adalah sebagai berikut:

RESULTS OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

The Board of Directors collegial KPI achievements are as follows:

KPI	Satuan *Unit*	Target	Polaritas *Polarity*	Bobot *Weight*	31 Desember 2021 *Audited* / December 31, 2021 Audited		
					Realisasi / Realization	Capaian / Achievement	Skor / Score
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia / Economic and Social Value for Indonesia				46,00			49,47
Finansial / ***Financial***				20,00			21,72
ROIC-WACC	%	0,76	*Maximize*	4,00	0,92	110,00%	4,4
Cash From Operational (CFO)	Rp	8.585.788.017	*Maximize*	4,00	9.828.607.048	110,00%	4,4
Maximum Loss from Exchange Rate to Operating Income	%	9,91	*Minimize*	4,00	4,20	110,00%	4,4
Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	56,85	*Minimize*	4,00	54,63	104,07%	4,16
Interest Bearing Debt to EBITDA	kali	5,80	*Minimize*	4,00	5,32	109,02%	4,36
Operasional / Operational				22,00			49,47
Throughput							23,35
Container Throughput	TEUS	15.925.346	*Maximize*	6,00	17.056.636	107,10%	6,43
Non Container Throughput	Ton	143.590.763	*Maximize*	5,00	146.200.809	101,82%	5,09
B/S/H *(gross)*	B/S/H	38,00	*Maximize*	6,00	40,11	105,55%	6,33
Waiting Time	Jam	0,50	*Minimize*	5,00	0,17	110,00%	5,50
Sosial / Social				4,00			4,40
Manfaat kesejahteraan masyarakat di sekitar Pelabuhan / Benefits of community welfare around the port	%	100,00	*Maximize*	4,00	152,92	110,00%	4,40
Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation				14,00			13,91
Standarisasi Performansi Pelabuhan / Standardization of Port Performance	%	100,00	*Maximize*	7,00	98,75	98,75%	6,91
Unified Key Account Management	%	100,00	*Maximize*	7,00	100,00	100,00%	7,00
Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership				12,00			12,00
Digitalisasi Pelayanan Pelabuhan / Digitizing Port Services	%	100,00	*Maximize*	6,00	100,00	100,00%	6,00

KPI	Satuan *Unit*	Target	Polaritas *Polarity*	Bobot *Weight*	31 Desember 2021 *Audited* December 31, 2021 Audited		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan Implementation of Green Technology in Ports	%	100,00	*Maximize*	6,00	100,00	100,00%	6,00
Peningkatan Investasi Investment Increase				12,00			11,90
Milestone Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Milestone for Port Infrastructure Development	%	100,00	*Maximize*	6,00	100,00	100,00%	6,00
Optimalisasi Aset (lahan dan/ atau alat B/M) Asset Optimization (land and/ or B/M equipment)	%	100,00	*Maximize*	6,00	98,33	98,33%	5,90
Pengembangan Talenta Talent Development				16,00			17,60
Pemenuhan Standar Keahlian Teknis Compliance with Technical Expertise Standard	%	100,00	*Maximize*	5,00	136,23	110,00%	5,50
% Perempuan dalam Nominated Talent % Female in Nominated Talent	%	10,50	*Maximize*	6,00	20,07	110,00%	6,60
Penyiapan suksesor milenial Preparation of millennial successor	%	29,40	*Maximize*	5,00	52,17	110,00%	5,50
Total				**100,00**			**104,88**

PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDUAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pengelolaan KPI Direksi secara Individual mengacu kepada peraturan pemerintah yang belaku, RJPP, RKAP, KPI Direksi Kolegial dan inisiatif strategis/RKM pada direktorat tersebut. KPI Direksi Individual merupakan KPI Direktur Utama yang diturunkan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab anggota Direksi tersebut dalam lingkup direktorat yang dipimpinnya. KPI Direksi secara individual terdiri dari:

1. KPI Bersama : merupakan variabel KPI dalam KPI Direksi Kolegial yang disepakati menjadi tanggung jawab secara kolegial/bersama. Pembobotan atas KPI Bersama yaitu sebesar 40%; dan
2. KPI Direktorat : merupakan variabel KPI yang mencerminkan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat yang memberikan kontribusi/dukungan secara langsung kepada KPI Direksi Kolegial. Pembobotan atas KPI Direktorat yaitu sebesar 60%.

Hasil penetapan Direksi secara Individual selanjutnya dituangkan dalam Kontrak Manajemen KPI Direksi secara Individual yang ditandatangani oleh Direksi terkait, Komisaris Utama dan Direktur Utama. Penilaian KPI Direksi secara Individual diawali dengan pemetaan sumber data dan unit pemilik data (*data producer*), untuk kemudian mengisi data realisasi KPI pada kertas kerja pengukuran KPI. Jika tidak tercapai, maka pemilik data harus

INDIVIDUAL BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

PROCEDURE OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

Individual Board of Directors' KPI management refers to applicable government regulations, RJPP, RKAP, Collegial Board of Directors' KPI and strategic initiatives/RKM at the directorate. Individual Board of Directors' KPI is President Director's KPI that is passed down to each member of Board of Directors in accordance with the duties, functions, and responsibilities of the said members of Board of Directors within the scope of the directorate they lead. The Board of Directors' KPI individually consist of:

1. Joint KPI: is a KPI variable in the Collegial KPI of Board of Directors which is agreed to be a collegial/joint responsibility. The weighting of Joint KPI is 40%; and
2. Directorate KPI: is a KPI variable that reflects the duties, functions and responsibilities of the Directorate that contributes/ supports directly to the Board of Directors collegial KPI. The weighting of Directorate KPI is 60%.

The results of the determination of Individual Board of Directors are then set forth in the Individual Board of Directors' KPI Management Contract that is signed by the relevant Director, President Commissioner and President Director. The Board of Directors' individual KPI assessment begins with mapping the data source and data producer unit, then filling in the KPI realization data on KPI measurement working paper. If it is not

menyampaikan justifikasi ketidaktercapaian KPI beserta dokumen pendukung lainnya kepada *Group* Perencanaan Strategis.

Pencapaian KPI Direksi secara Individual beserta penjelasan capaiannya disampaikan kepada Komisaris melalui Surat Dinas. Penilaian KPI Direksi secara Individual dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan realisasi akhir masing-masing *variable* KPI maksimal 110% (seratus sepuluh persen).

achieved, then the data owner must submit the justification for the KPI not being achieved along with other supporting documents to the Strategic Planning Group.

The achievements of Individual Board of Directors' KPI with an explanation of their achievements are submitted to the Board of Commissioners through an official letter. The Board of Directors' individual KPI assessment is carried out referring to the measurement results carried out by the External Auditor that audits the Company's Financial Statements for the year concerned, with the provision that the final realization of each KPI variable is a maximum of 110% (one hundred and ten percent).

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi yaitu Dewan Komisaris dan disampaikan ke Pemegang Saham/RUPS.

ASSESSOR

The Board of Directors performance is assessed by the Board of Commissioners and is submitted to the Shareholders/GMS.

KRITERIA DAN HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pencapaian KPI Wakil Direktur Utama adalah sebagai berikut:

CRITERIA AND RESULTS OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

The KPI achievements of the Vice President Director are as follows:

KPI	Satuan *Unit*	Target	Polaritas *Polarity*	Bobot *Weight*	31 Desember 2021 *December 31, 2021*		
					Realisasi *Realization*	Capaian *Achievement*	Skor *Score*
KPI Bersama Joint KPI				40,00			42,89
ROIC-WACC	%	0,76	*Maximize*	10,00	0,92	110,00%	11,00
Throughput							
Container Throughput	TEUS	15.925.346	*Maximize*	10,00	17.056.636	107,10%	10,71
Non Container Throughput	Ton	143.590.763	*Maximize*	10,00	146.200.809	101,82%	10,18
Penyiapan suksesor milenial Preparation of millennial successor	%	29,40	*Maximize*	10,00	52,17	110,00%	11,00
KPI Wakil Direktur Utama Vice President Director KPI				60,00			61,00
Realisasi Penyelesaian Administrasi Pasca Merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Realization of Post-Merger Administrative Completion of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	%	100	*Maximize*	10,00	100,00	100,00%	10,00
Restrukturisasi Pelindo melalui *inbreng* saham kepada 4 *Subholding* Pelindo Restructuring through share transfers to 4 Subholding	%	100	*Maximize*	10,00	100,00	100,00%	10,00
Penyusunan *Masterplan* dan RJPP 4 *Subholding* Preparation of Masterplan and RJPP of 4 Subholding	%	100	*Maximize*	10,00	100,00	100,00%	10,00
Harmonisasi kebijakan kepegawaian dan persiapan PKB Baru Harmonization of employment policies and preparation of New PKB	%	100	*Maximize*	10,00	100,00	100,00%	10,00
Laporan Keuangan Pelindo I-IV per 30 September 2021 Pelindo I-IV Financial Report as of September 30, 2021	%	100	*Minimize*	10,00	100,00	100,00%	10,00

KPI	Satuan *Unit*	Target	Polaritas *Polarity*	Bobot *Weight*	31 Desember 2021 *December 31, 2021*		
					Realisasi *Realization*	Capaian *Achievement*	Skor *Score*
Pengalihan Hak Status Atas Lahan Transfer of Status Rights to Land	%	30	*Maximize*	10,00	100,00	110,00%	11,00
Total				**100,00**			**103,89**

Pencapaian KPI Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

The Finance and Risk Management Director KPI achievements are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2021 December 31, 2021		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40,00			42,89
ROIC-WACC	%	0,76	*Maximize*	10,00	0,92	110,00%	11,00
Throughput							
Container Throughput	TEUs	15.925.346	*Maximize*	10,00	17.056.636	107,10%	10,71
Non Container Throughput	Ton	143.590.763	*Maximize*	10,00	146.200.809	101,82%	10,18
Penyiapan suksesor milenial Preparation of millennial successor	%	29,40	*Maximize*	10,00	52,17	110,00%	11,00
KPI Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director KPI				60,00			63,31
Cash From Operational (CFO)	Rp	8.585.788.017	*Maximize*	10,00	9.828.607.048	110,00%	11,00
Maximum Loss from Exchange Rate to Operating Income	%	9,91	*Minimize*	10,00	4,20	110,00%	11,00
Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	56,85	*Minimize*	10,00	54,63	104,06%	10,41
Interest Bearing Debt to EBITDA	kali	5,80	*Minimize*	10,00	5,32	109,02%	10,90
Realisasi Implementasi Shared Service untuk transaksi di Pelindo Kantor Pusat Realization of Shared Service Implementation for transactions at Pelindo Head Office	%	100	*Minimize*	10,00	100,00	100,00%	10,00
Laporan Keuangan Pelindo I-IV per 30 September 2021 Pelindo I-IV Financial Report as of September 30, 2021	%	100	*Minimize*	10,00	100,00	100,00%	10,00
Total				**100,00**			**106,20**

Pencapaian KPI Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah sebagai berikut:

The Human Resources and General Affairs Director KPI achievements are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2021 December 31, 2021		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40,00			42,89
ROIC-WACC	%	0,76	*Maximize*	10,00	0,92	110,00%	11,00
Throughput							
Container Throughput	TEUs	15.925.346	*Maximize*	10,00	17.056.636	107,10%	10,71
Non Container Throughput	Ton	143.590.763	*Maximize*	10,00	146.200.809	101,82%	10,18
Penyiapan suksesor milenial Preparation of millennial successor	%	29,40	*Maximize*	10,00	52,17	110,00%	11,00

KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2021 December 31, 2021		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director KPI				**60,00**			**63,60**
Pemenuhan Standar Keahlian Teknis Fulfillment of with Technical Expertise Standards	%	100	*Maximize*	12,00	136,23	110,00%	13,20
% Perempuan dalam *Nominated Talent* % Female in Nominated Talent	%	10,50	*Maximize*	12,00	20,07	110,00%	13,20
Manfaat kesejahteraan masyarakat di sekitar Pelabuhan Benefits of community welfare around the port	%	100	*Maximize*	12,00	152,92	110,00%	13,20
Kebijakan *Corporate Parenting* Pengelolaan SDM HC Management Corporate Parenting Policy	%	100	*Maximize*	12,00	100,00	100,00%	12,00
Harmonisasi kebijakan kepegawaian dan persiapan PKB Baru Harmonization of employment policies and preparation of New CLA	%	100	*Maximize*	12,00	100,00	100,00%	12,00
Total				**100,00**			**106,49**

Pencapaian KPI Direktur Strategi adalah sebagai berikut: The Strategy Director KPI achievements are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2021 December 31, 2021		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				**40,00**			**42,89**
ROIC-WACC	%	0,76	*Maximize*	10,00	0,92	110,00%	11,00
Throughput							
Container Throughput	TEUs	15.925.346	*Maximize*	10,00	17.056.636	107,10%	10,71
Non Container Throughput	Ton	143.590.763	*Maximize*	10,00	146.200.809	101,82%	10,18
Penyiapan suksesor milenial Preparation of millennial successor	%	29,40	*Maximize*	10,00	52,17	110,00%	11,00
KPI Direktur Strategi Strategy Director KPI				**60,00**			**61,20**
Penyusunan *Masterplan* dan RJPP 4 *Subholding* Preparation of Masterplan and RJPP of 4 Subholding Indonesia (Persero)	%	100	*Maximize*	12,00	100,00	100,00%	12,00
Realisasi Penyelesaian Administrasi Pasca *Merger* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Realization of Post-Merger Administrative Completion of PT Pelabuhan	%	100	*Maximize*	12,00	100,00	100,00%	12,00
Restrukturisasi Pelindo melalui inbreng saham kepada 4 *Subholding* Pelindo Restructuring through share transfers to 4 Subholding	%	100	*Maximize*	12,00	100,00	100,00%	12,00
Pengalihan Hak Status Atas Lahan Transfer of Status Rights to Land	%	30	*Maximize*	12,00	100,00	110,00%	13,20

KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2021 December 31, 2021		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Realisasi Kajian Kerja Sama dengan Indonesia Investment Authority (INA) Realization of Cooperation Study with Indonesia Investment Authority (INA)	%	100	*Maximize*	12,00	100,00	100,00%	12,00
Total				**100,00**			**104,09**

Pencapaian KPI Direktur Investasi adalah sebagai berikut: The Investment Director KPIs achievements are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2021 December 31, 2021		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40,00			42,89
ROIC-WACC	%	0,76	*Maximize*	10,00	0,92	110,00%	11,00
Throughput							
Container Throughput	TEUS	15.925.346	*Maximize*	10,00	17.056.636	107,10%	10,71
Non Container Throughput	Ton	143.590.763	*Maximize*	10,00	146.200.809	101,82%	10,18
Penyiapan suksesor milenial Preparation of millennial successor	%	29,40	*Maximize*	10,00	52,17	110,00%	11,00
KPI Direktur Investasi Investment Director KPI				60,00			60,00
Milestone Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Milestone of Port Infrastructure Development	%	100	*Maximize*	15,00	100,00	100,00%	15,00
Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan Implementation of Green Technology in Ports	%	100	*Maximize*	15,00	100,00	100,00%	15,00
Realisasi Penyusunan usulan Investasi 2022 Pelindo *Group* Realization of the preparation of 2022 Pelindo Group Investment proposal	%	100	*Maximize*	15,00	100,00	100,00%	15,00
Realisasi Program Optimalisasi Peralatan Realization of Equipment Optimization Program	%	100	*Maximize*	15,00	100,00	100,00%	15,00
Total				**100,00**			**102,89**

Pencapaian KPI Direktur Pengelola adalah sebagai berikut: The Managing Director KPI achievements are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2021 December 31, 2021		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40,00			42,89
ROIC-WACC	%	0,76	*Maximize*	10,00	0,92	110,00%	11,00
Throughput							
Container Throughput	TEUs	15.925.346	*Maximize*	10,00	17.056.636	107,10%	10,71
Non Container Throughput	Ton	143.590.763	*Maximize*	10,00	146.200.809	101,82%	10,18
Penyiapan suksesor milenial Preparation of millennial successor	%	29,40	*Maximize*	10,00	52,17	110,00%	11,00

KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2021 December 31, 2021		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Direktur Pengelola Managing Director KPI				60,00			59,81
Standarisasi Performansi Pelabuhan Standardization of Port Performance	%	100	*Maximize*	15,00	98,75	98,75%	14,81
Digitalisasi Pelayanan Pelabuhan Digitizing Port Services	%	100	*Maximize*	15,00	100,00	100,00%	15,00
Unified Key Account Management	%	100	*Maximize*	15,00	100,00	100,00%	15,00
Standarisasi Sistem Manajemen Mutu Pelindo Standardization of Pelindo Quality Management System	%	100	*Maximize*	15,00	100,00	100,00%	15,00
Total				**100,00**			**102,70**

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Prosedur penilaian terhadap kinerja Komite dilakukan secara periodik. Kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Pelaksanaan Rapat Internal Komite dan Laporan Penugasan Komite .

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi aspek-aspek operasional dan strategis Perseroan dengan baik.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan
6. Mengundurkan diri.

Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

PERFORMANCE APPRAISAL OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BASIS OF APPRAISAL

In carrying out its duties and responsibilities, Board of Commissioners is assisted by committees under Board of Commissioners including Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and GCG and Risk Management Monitoring Committee. The performance of Committee is evaluated periodically. The criteria for performance evaluation of Committees under Board of Commissioners are part of the Board of Commissioners' KPIs that have been approved by the Shareholders. The criteria for evaluating the performance of Committees under Board of Commissioners are the Implementation of the Committee's Internal Meetings and the Committee's Assignment Report.

Throughout 2021, Board of Commissioners assessed that these committees had properly carried out their duties and responsibilities in supervising the operational and strategic aspects of the Company.

BOARD OF COMMISSIONERS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

The dismissal of a member of Board of Commissioners is carried out if based on the facts of the member of Board of Commissioners concerned, among others:

1. Unable to carry out his/her duties properly.
2. Not implementing the provisions of the legislation and/or the Articles of Association.
3. Engaged in actions that are detrimental to the Company and/or the State.
4. Performed actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of Board of Commissioners of SOEs.
5. Found guilty by a court decision that has permanent legal force; and
6. Resign.

In addition to the reasons for dismissing members of Board of Commissioners, a member of Board of Commissioners may be dismissed by the GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainya.

The tenure of a member of the Board of Commissioners ends when:

1. He/she passed away;
2. His/her term of office ends;
3. Is dismissed based on the GMS; and
4. No longer fulfills the requirements as a member of Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pelindo senantiasa menjaga keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, serta berdampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Dengan adanya keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, diharapkan Perusahaan dapat memperkaya sudut pandang dalam pengambilan keputusan, baik dalam jajaran Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam kegiatan operasional dan manajemen Perusahaan, termasuk dalam hal penerapan tata kelola perusahaan.

Board Manual telah mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan pengetahuan dan keahlian. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki keberagaman pengetahuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan operasional Perusahaan. Perusahaan belum mengembangkan kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara khusus, Keberagaman usia dan gender belum diatur karena Perusahaan masih menekankan pada keberagaman keahlian tanpa memandang usia dan gender

POLICY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY

Pelindo always maintains the diversity of the composition of Board of Commissioners and Board of Directors to encourage more objective, comprehensive, optimal decision making, hence can positively affect the supervision and management of the Company. With diverse composition of Board of Commissioners and Board of Directors, the Company is expected to be able to enrich the point of view in decision making, both within Board of Commissioners and Board of Directors, so as to be able to provide added value in the operational activities and management of the Company, including the implementation of corporate governance.

The Board Manual has stipulated that Board of Commissioners and Board of Directors members must meet the knowledge and expertise requirements. This shows that Board of Commissioners and Board of Directors must possess a variety of knowledge and expertise in accordance with the operational needs of the Company. The Company has not developed a policy on the diversity of Board of Commissioners and Board of Directors composition in particular. Age and gender diversity has not been regulated because the Company still emphasizes on the diversity of expertise regardless of age and gender.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Diversity in the Composition of Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Marsetio	Komisaris Independen/ Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	65 tahun 65 years old	Pria Male	• S1 bidang Fisip/ADNE • S2 bidang *Management* • Bachelor in of Social and Political Science/ADNE • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan pemerintahan Has work experience in education and government sector	Fisip dan Manajemen Social & Politics Science and Management
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	65 tahun 65 years old	Pria Male	• Program Sarjana Muda APDN • S1 Ilmu Pemerintahan • S2 bidang Kajian Ketahanan Nasional • S2 bidang Administrasi Negara • APDN Baccalaureate Program • Bachelor in Government Science • Master in National Resilience Studies • Master in State Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector	Ilmu Pemerintahan Administrasi Negara Government Science State Administration

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	64 tahun 64 years old	Pria Male	• S1 bidang Hukum • S2 bidang Manajemen • Bachelor in Law • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Has work experience in banking sector	Hukum Manajemen Law Management
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	43 tahun 43 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang Teknik Manajemen Lingkungan • S3 bidang *Build Environment* • Bachelor in Civil Engineering • Master in Environmental Management Engineering • Doctorate in Build Environment	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector	Teknik Sipil Manajemen Lingkungan Civil Engineering Management Environment
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	60 tahun 60 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Mesin • S2 bidang Manajemen • Bachelor in Mechanical Engineering • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector	Teknik Mesin Manajemen Mechanical Engineering Management
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	60 tahun 60 years old	Pria Male	• S2 bidang Hukum • Master in Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum Has work experience in legal sector	Hukum Law
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	57 tahun 57 years old	Pria Male	• S1 bidang Sosial Politik Administrasi Negara • Bachelor in Social Politics and State Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perdagangan Has work experience in trade sector	Sosial Politik Administrasi Negara Socio-political State Administration

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Diversity in the Composition of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	51 tahun 51 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang *Infrastructure Management* • S2 bidang *Business Administration* • Bachelor in Civil Engineering • Master in Infrastructure Management • Master in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in port and logistics services sector	Teknis Sipil Bisnis Administrasi Civil Engineering Business Administration
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	53 tahun 53 years old	Pria Male	• S1 bidang Ilmu Hukum • S2 bidang Hukum Bisnis • Bachelor in Law • Master in Business Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in legal, port and logistics services sector	Hukum Bisnis Law Business
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	52 tahun 52 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Pertambangan • S2 bidang *Innovation & Technology Management* • Bachelor in Mining Engineering • Master in Innovation & Technology Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pertambangan dan jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in mining, port and logistics services sector	Teknik Pertambangan Teknologi Mining Engineering Technology

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	48 tahun 48 years old	Pria Male	• S1 bidang Ekonomi Manajemen • S2 bidang Manajemen • Bachelor in Management Economics • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in port and logistics services sector	Manajemen Management
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	44 tahun 44 years old	Pria Male	• S1 bidang Administrasi Bisnis • S2 bidang Administrasi Bisnis • Bachelor in Business Administration • Master in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan penerbangan Has work experience in banking and aviation sector	Administrasi Bisnis Business Administration
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	48 tahun 48 years old	Pria Male	• D3 bidang Teknik Sipil • S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang Manajemen • Diploma in Civil Engineering • Bachelor in Civil Engineering • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in port and logistics services sector	Teknik Sipi Manajemen Civil Engineering Management
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	51 tahun 51 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Arsitektur • S2 bidang *Business Administration* • Bachelor in Architectural Engineering • Master in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in port and logistics services sector	Teknik Arsitektur Administrasi Bisnis Architectural Engineering Business Administration

NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan pada Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Bakal calon Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan melalui Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah seorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain serta lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Penetapan Direksi dan Dewan dilakukan melalui Keputusan RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS NOMINATION AND REMUNERATION

PROCEDURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS NOMINATION

In the nomination process, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors refer to the Regulation of Minister of SOEs PER-10/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 on Amendment to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises and the Regulation of Minister of SOEs PER-03/MBU/02/2015 dated February 17, 2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of Board of Directors of State-Owned Enterprises.

Candidates for Board of Commissioners and Board of Directors are proposed through the Board of Commissioners assisted by the Remuneration and Nomination Committee. The prospective candidate who will be appointed as a candidate for Board of Commissioners and Board of Directors is a person who has been declared to have fulfilled the formal requirements, material requirements and other requirements and passed the Fit and Proper Test (UKK). The appointment of Board of Directors and Board of Commissioners is carried out through the GMS Resolution.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

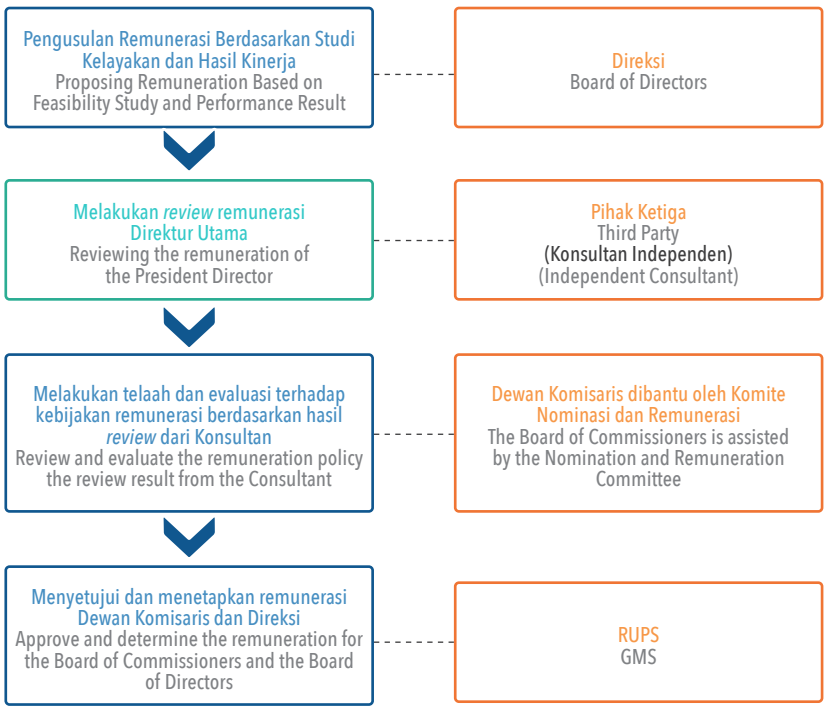
Dasar Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berawal dari tahap pengusulan yang diajukan oleh pihak Direksi. Direksi meminta pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan *review* remunerasi Direktur Utama. Hasil *review* dari konsultan tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan rekomendasi. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

PROCEDURE OF REMUNERATION DETERMINATION

The basis for determining remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors is the authority of Shareholders and is determined in the GMS whose formulation refers to the Regulation of Minister of SOE No: PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOE as has been amended several times, most recently by the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No: PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 on the Sixth Amendment to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

The procedure to determine the remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors begins with the proposal stage submitted by the Board of Directors. The Board of Directors requests a third party (consultant) to review the remuneration of President Director. The consultant's review results are submitted to the Board of Commissioners for recommendations. The Board of Commissioners, assisted by the Nomination and Remuneration Committee, reviews and evaluates the remuneration policy. The recommendation from Board of Commissioners is submitted to the Shareholders for approval at the GMS.



INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI

Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

REMUNERATION DETERMINATION INDICATORS

The determination of income in the form of salary or honorarium, allowances and facilities that are permanent in nature is carried out by considering business scale factor, business complexity factor, inflation rate, the Company's financial conditions and capabilities, and other relevant factors, and must not conflict with the laws and regulations.

STRUKTUR DAN JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

STRUCTURE AND AMOUNT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

The remuneration structure of Board of Commissioners and Board of Directors is as follows.

Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision		Keterangan Remarks
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	
Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	Honorarium Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama Anggota Dewan Komisaris : 90% dari Komisaris Utama Honorarium of President Commissioner: 45% from President Director Members of Board of Commissioners: 90% of President Commissioner	Gaji Direktur Utama : 100% Anggota Direksi lainnya 85% dari gaji Direktur Utama. Salary of President Director: 100% Other members of Board of Directors are 85% of the salary of President Director.	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021
Tunjangan Allowances			
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali honorarium 1 (one) time honorarium	1 (satu) kali gaji 1 (one) time salary	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021
Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun The premium borne by the company is 25% of annual salary	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun The premium borne by the company is 25% of annual salary	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021
Tunjangan perumahan Housing Allowance	-	Rp25.000.000 per bulan Rp25,000,000 per month	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021. Apabila menyediakan rumah jabatan wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan. In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021. If official house is provided, it must be used until the term of office of Board of Directors ends and the person concerned is not given housing allowance.
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of monthly honorarium	-	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021.

Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision		Keterangan Remarks
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	
Fasilitas Facilities			
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	-	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. 1 (one) unit along with maintenance costs and operational costs, taking into account the company's financial condition.	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc. The specifications and types of vehicles are regulated by Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc.
Fasilitas Kesehatan Medical Facilities	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021.
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian (*at cost*) At cost	Sebesar pemakaian (*at cost*) At cost	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021.
Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentive	Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan. Tantiem/Performance Incentive is given proportionally based on the performance achievement in the year concerned and taking into account the achievement of dividend contributions to the State or other indicators determined by the GMS/Minister in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year concerned.	Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan. Tantiem/Performance Incentive is given proportionally based on the performance achievement in the year concerned and taking into account the achievement of dividend contributions to the State or other indicators determined by the GMS/Minister in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year concerned.	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk membentuk organ-organ pendukung dalam rangka mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.

ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is given the authority to form supporting organs to encourage the effectiveness of supervisory and advisory function to the Board of Directors. The policy refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 on Amendment to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and the Regulation of Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. In carrying out its duties, Board of Commissioners is assisted by Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and GCG and Risk Management Monitoring Committee.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.

Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; dan
4. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Secretary of Board of Commissioners is appointed to assist the smooth running of Board of Commissioners' duties, particularly in the field of secretarial and liaison between the Board of Commissioners and other parties, including the Board of Directors.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Secretary of Board of Commissioners carries out the following duties:

1. Prepare the meetings, including the Board of Commissioners' briefing sheet;
2. Prepare the minutes of Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions;
3. Administering the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget; and
5. Drafting the Board of Commissioners Reports.

Secretary to the Board of Commissioners also carries out other duties as follows:

1. Ensuring that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and applies the principles of GCG;
2. Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. Coordinate members of the Committee, if necessary, in order to expedite the Board of Commissioners duties; and
4. Act as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Rizqi Kurnianto
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 22 Maret 1985/36 tahun Jakarta, March 22, 1985/36 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Program Diploma III Akuntansi (2006) • S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2009) • S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2014) • State College of Accountancy, Diploma in Accounting Program (2006) • Bachelor in Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia (2009) • Master in Management, Faculty of Economics, University of Indonesia (2014)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2008-2009) • Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2009-2013) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (2011-2016) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016-2019) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021) • Staff of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2008-2009) • Staff of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2009-2013) • Secretary of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IX (2011-2016) • Secretary of Board of Commissioners of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016-2019) • Secretary of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 7/KEP-DK/PI/X-2021 Decision of the Board of Commissioners Number 7/KEP-DK/PI/X-2021
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga & Masyarakat (2017-sekarang) Head of Sub Division of Inter-Institutional and Community Relations (2017 – present)

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2021, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES IMPLEMENTATION

During 2021, the Secretary of Board of Commissioners has carried out the following duties:

1. Prepare the meeting, including the Board of Commissioners' briefing sheet;
2. Prepare the minutes of Board of Commissioners meeting;
3. Administering the documents of Board of Commissioners, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget;
5. Drafting the Board of Commissioners Reports.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
6. Anggaran Dasar Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas-tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
4. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP;
5. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan pengendalian intern serta pelaksanaannya;
6. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
7. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
8. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut;
9. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
   a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
      - Nama yang diberi tugas;
      - Sifat penugasan;

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is a supporting organ under Board of Commissioners, which is formed to assist the Board of Commissioners in supervising the Company's management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Audit Committee is formed by the Board of Commissioners with reference to:

1. Law No. 19 of 2003 dated October 4, 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
5. Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs; and
6. Company's Articles of Association.

AUDIT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties of Audit Committee are as follows:

1. Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners;
2. Audit Committee is independent both in carrying out its duties and in reports and being responsible to the Board of Commissioners;
3. Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control system and the effectiveness of duties of the auditors of Public Accounting Firm (KAP) and Internal Audit Unit (SPI);
4. Audit Committee assesses the implementation of activities and the results of audits carried out by SPI and KAP auditors;
5. Audit Committee provides recommendations regarding the improvement of internal control and its implementation;
6. Audit Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for all information issued by the company;
7. Audit Committee identifies matters that require the Board of Commissioners' attention as well as other tasks assigned by the Board of Commissioners;
8. Audit Committee proposes to the Board of Commissioners a candidate for the KAP to audit the Annual Financial Statements along with the reasons for nomination and proposed fee/ fee for the KAP auditor;
9. Special Assignment from Board of Commissioners:
   a. Special tasks assigned to Audit Committee by the Board of Commissioners is carried out with a written order containing:
      - Name of assignee;
      - Nature of assignment;

- Lingkup pekerjaan;
- Tujuan dan sasaran pekerjaan; dan
- Jangka waktu penugasan.

b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
   - Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
   - Melakukan audit investigasi dapat bekerja sama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit; dan
   - Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

Tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
   a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
   b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit; dan
   c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
3. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang:
1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; dan
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit Pelindo mengacu pada Piagam Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEPDK/PI.II/ VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut

- Scope of work;
- Goals and objectives of the work; and
- Duration of assignment.

b. The scope of work for special tasks of Audit Committee is fully determined by the Board of Commissioners as long as does not against the applicable laws and regulations;

c. In carrying out special tasks, Audit Committee may:
   - Reviewing all necessary records, documents and other information including the minutes of Board of Directors meeting and Board of Commissioners meeting if deemed necessary;
   - Conducting an investigative audit by cooperating with SPI or ask for assistance from experts or consultants to assist the Audit Committee; and
   - Audit Committee submits a report on the implementation of special tasks to the Board of Commissioners.

Audit Committee responsibilities are as follows:
1. Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners.
2. The accountability of Audit Committee to the Board of Commissioners is presented in the following report:
   a. Annual report on the implementation of Audit Committee duties;
   b. Quarterly Report on the implementation of Audit Committee duties; and
   c. Reports for each implementation of special tasks of Audit Committee.
3. Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.

AUDIT COMMITTEE AUTHORITIES

In carrying out its duties, Audit Committee is authorized to:
1. Examine books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets;
2. Entering yards, buildings and offices used by the Company;
3. Requesting an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company; and
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be implemented by the Company.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, Pelindo's Audit Committee refers to the Audit Committee Charter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which was last stipulated by the Board of Commissioners through Board of Commissioners Decree No. 09/KEPDK/PI.II/ VII-2017 dated July 14, 2017 regarding the Update/ Stipulation of the Charter of Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Charter contains provisions that must be complied with in the establishment and implementation of Audit Committee's activities so that they can work independently, objectively, independently, transparently, and

ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain; dan
15. Penutup.

can be accounted for. The charter consists of the following sections:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duties;
4. Authorities;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Reports;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Education and Supporting Personnel;
13. Performance Assessment;
14. Others; and
15. Closing.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF AUDIT COMMITTEE

Pra Merger

Pre-Merger

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Nurrachman	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Marketing* Marketing
Muhdi Al Fajar	Wakil Ketua Vice Chairman	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Audit
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Keuangan Finance

Pada periode Triwulan II Tahun 2021 terdapat perubahan susunan Komite Audit sebagai berikut:

In the second Quarter of 2021, there were changes in the composition of Audit Committee as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Nurrachman	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Marketing* Marketing
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Audit
Mahbub Junaedi	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit, Hukum Accounting, Audit, Law

PASCA MERGER

POST-MERGER

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Nurrachman	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Marketing* Marketing
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Sosial Politik Administrasi Negara Socio-political State Administration
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Audit
Mahbub Junaedi	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit, Hukum Accounting, Audit, Law

Periode Triwulan IV Tahun 2021 terdapat perubahan susunan Komite Audit sebagai berikut:

In the fourth quarter of 2021, there were changes in the composition of Audit Committee as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Heru Sukanto	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hukum, Manajemen Law, Management
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Sosial Politik Administrasi Negara Socio-political State Administration
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Audit
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Audit

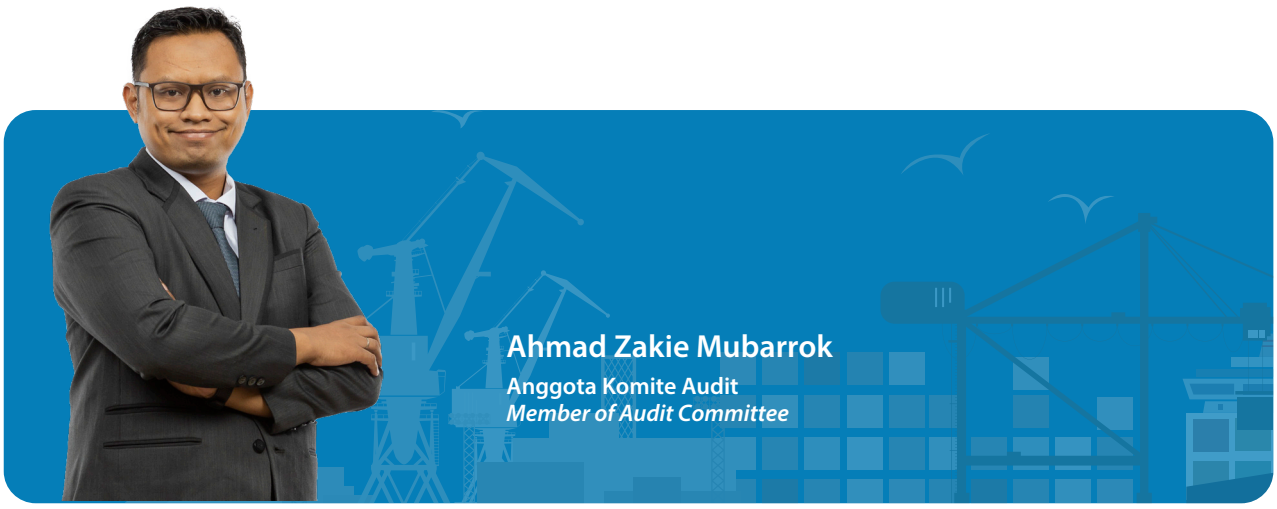
PROFIL KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE PROFILE

The profile of Audit Committee as of December 31, 2021 is as follows.

Heru Sukanto Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.
Didi Sumedi Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.



Ahmad Zakie Mubarrok
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Wonosobo, 16 Februari 1985/36 tahun Wonosobo, February 16, 1985/36 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjajaran (2007) • Magister Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik Universitas Gadjah Mada (2012) • Bachelor of Economics in Accounting, Padjadjaran University (2007) • Master of Accounting, Public Sector Accounting, Gadjah Mada University (2012)
Sertifikasi Certification	• *Certified in Audit Committee Practices* (CACP) • *Certified Public Accountant* (CPA)

Pengalaman Kerja Work Experience	• Dosen Tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (2012-sekarang) • *Associate Partner* KAP Jojo Sunarjo dan Rekan Cabang Bandung (2014-sekarang) • Komite Audit PT Perkebunan Nusantara VIII (2014-2017) • Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara VIII (2017-2019) • Komite Audit PT Pupuk Kujang (2019-2021) • Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021-sekarang) • Permanent Lecturer in the Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (2012 – present) • Associate Partner of KAP Jojo Sunarjo and Partners, Bandung Branch (2014 – present) • PT Perkebunan Nusantara VIII Audit Committee (2014 – 2017) • PT Perkebunan Nusantara VIII Risk Management Monitoring Committee (2017-2019) • PT Pupuk Kujang Audit Committee (2019 – 2021) • PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Audit Committee (2021 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KEP-DK/PI.II/III-2021 tanggal 1 Maret 2021 Board of Commissioners Decree No. 05/KEP-DK/PI.II/III-2021 dated March 1, 2021
Periode Menjabat Service Period	2021-2024
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Dosen Tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (2012-sekarang) • *Associate Partner* KAP Jojo Sunarjo dan Rekan Cabang Bandung (2014-sekarang) • Permanent Lecturer in the Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (2012 – present) • Associate Partner of KAP Jojo Sunarjo and Partners, Bandung Branch (2014 – present)



Sofia Chairunnisa

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 5 Agustus 1986/35 tahun Jakarta, August 5, 1986/35 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia (2009) • Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2022) • Bachelor of Economics in Accounting, University of Indonesia (2009) • Master of Management, Gadjah Mada University (2022)
Sertifikasi Certification	• *Certified Auditor under* The Audit *Board* of the Republic of Indonesia (BPK RI) • *Certified Professional Auditor* of Indonesia
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Audit Manager* KAP Bing Santrio & Eny (Deloitte Indonesia) (2009-2018) • *Financial, Accounting and Tax Manager* PT Steadfast Marine Tbk. (2018) • *Business Analyst Manager* PT Maxima Integra Investama (2019) • *Accounting & Tax Manager* PT Sumber Hidup Sehat (2019-2020) • *Audit Manager* KAP Gani Sigiro Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020-2021) • Audit Manager of KAP Bing Santrio & Eny (Deloitte Indonesia) (2009 – 2018) • Financial, Accounting and Tax Manager of PT Steadfast Marine Tbk. (2018) • Business Analyst Manager of PT Maxima Integra Investama (2019) • Accounting & Tax Manager of PT Sumber Hidup Sehat (2019 – 2020) • Audit Manager of KAP Gani Sigiro Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – 2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 4/KEP-DK/PI/X-2-21 tanggal 15 Oktober 2021 Board of Commissioners Decree No. 4/KEP-DK/PI/X-2-21 dated October 15, 2021

Periode Menjabat Service Period	2021-2024
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-

MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

AUDIT COMMITTEE TENURE

The tenure for members of Audit Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Educational Qualifications and Work Experience of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Heru Sukanto	Ketua Chairman	• Sarjana Hukum • Magister Manajemen • Bachelor of Law • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Has work experience in the banking sector
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	Sarjana Sosial Politik Administrasi Negara Bachelor of Social Politics in Public Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perdagangan Has work experience in the trading sector
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	• Sarjana Ekonomi • Magister Akuntansi • Bachelor of Economics • Master of Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dan *auditing* Has work experience in accounting and auditing
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	• Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi • Magister Manajemen • Bachelor of Economics in Accounting • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, akuntansi dan *auditing* Has work experience in finance, accounting and auditing

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE

Audit Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations. In accordance with the Audit Committee Charter, the independence qualifications of members of Audit Committee must meet the following criteria:

Tabel Independensi Komite Audit

Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Heru Sukanto	Didi Sumedi	Ahmad Zakie Mubarrok	Sofia Chairunnisa
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the company, subsidiary, or affiliated company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership relationship in the company	√	√	√	√

Aspek Independensi Independence Aspect	Heru Sukanto	Didi Sumedi	Ahmad Zakie Mubarrok	Sofia Chairunnisa
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	√	√	√	√

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2021

AUDIT COMMITTEE TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT IN 2021

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Subject of Training/ Competency Development	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Heru Sukanto	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	-	-	-
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	-	-	-

RAPAT KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEETING

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

AUDIT COMMITTEE MEETING POLICY

Audit Committee holds a meeting at least equal to the minimum requirements for Board of Commissioners meeting set out in the Company's Articles of Association. The Audit Committee meeting is chaired by the Chairman of Audit Committee or the most senior member of Audit Committee, if the Chairman of Audit Committee is unable to attend. If deemed necessary, Audit Committee may invite the Management related to the meeting material to attend the Audit Committee meeting. Each meeting of Audit Committee is stated in the minutes of meeting which is signed by all members of Audit Committee present. Audit Committee holds a coordination meeting with IAU at least once in 3 (three) months.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2021, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE MEETING AGENDA

Throughout 2021, the date, agenda and participants of Audit Committee meetings are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	Selasa, 12 Januari 2021 Tuesday, January 12, 2021	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan dan Penghapusan Tagih Piutang Bunga dan Denda alas Pinjaman PT PMLI kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Response to the Application for Approval of Write-off and Write-off of Interest Receivables and Penalties for PT PMLI's Loans to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	• Kushari • Nurrachman • Muhdi • Pionir
2	Kamis, 28 Januari 2021 Thursday, January 28, 2021	1. Tanggapan dan Rekomendasi atas Revisi Buku Rancangan RJPP Tahun 2020-2024 Perubahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Tanggapan dan Rekomendasi Atas Revisi RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2021. 1. Responses and Recommendations on the Revised Draft of 2020-2024 RJPP Revision of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Responses and Recommendations on the Revised 2021 RKAP of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	• Kushari • Nurrachman • Muhdi • Pionir
3	Selasa, 9 Februari 2021 Tuesday, February 9, 2021	1. Tanggapan atas Buku Laporan Keuangan dan Buku Laporan Manajemen Tahun 2020 (*unaudited*) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Penjelasan Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Tanah di Sukaoura. 1. Responses on 2020 Financial Report Book and Management Report Book (unaudited) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 2. Explanation of the Proposed Elimination of Land Fixed Assets in Sukaoura.	• Kushari • Nurrachman • Muhdi • Pionir
4	Selasa, 23 Maret 2021 Tuesday, March 23, 2021	Evaluasi PKPT SPI Tahun 2021. Evaluation of 2021 SPI PKPT.	• Nurrachman • Muhdi • Zakie
5	Selasa, 6 April 2021 Tuesday, April 6, 2021	Tindak Lanjut Pengaduan dari PT Philia Citra Sejahtera. Follow-up to Complaints from PT Philia Citra Sejahtera.	• Nurrachman • Muhdi • Zakie
6	Jumat 7 Mei 2021 Friday, May 7, 2021	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Responses to the First Quarter 2021 Management Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	• Nurrachman • Muhdi • Zakie
7	Selasa, 27 Juli 2021 Tuesday, July 27, 2021	Usulan Penetapan dan Persetujuan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2021. Proposal for Determination and Approval of Public Accounting Firm for Fiscal Year 2021.	• Nurrachman • Zakie • Mahbub
8	Selasa 3 Agustus 2021 Tuesday, August 3, 2021	Tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I Tahun PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Responses to the First Semester Management Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	• Nurrachman • Zakie • Mahbub
9	Senin, 9 Agustus 2021 Tuesday, August 9, 2021	Tanggapan atas Usulan RKAP Perubahan Tahun 2021. Responses to Proposed RKAP Revision for 2021.	• Nurrachman • Zakie • Mahbub
10	Jumat, 20 Agustus 2021 Tuesday, August 20, 2021	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Appointment of Public Accounting Firm (KAP).	• Nurrachman • Zakie • Mahbub
11	Selasa, 14 September 2021 Tuesday, September 14, 2021	Persetujuan atas Permohonan Penghapusbukuan Aset Tetap di Kantor Pusat, Cabang Sunda Kelapa, Cabang Pontianak, dan Cabang Panjang. Approval of the Application for Write-off of Fixed Assets at the Head Office, Sunda Kelapa Branch, Pontianak Branch, and Panjang Branch.	• Nurrachman • Zakie • Mahbub
12	Selasa, 14 September 2021 Tuesday, September 14, 2021	Persetujuan atas Permohonan Penghapusbukuan Aset Tetap di Kantor Pusat, Cabang Sunda Kelapa, Cabang Pontianak, dan Cabang Panjang. Approval of the Application for Write-off of Fixed Assets at the Head Office, Sunda Kelapa Branch, Pontianak Branch, and Panjang Branch.	• Nurrachman • Zakie • Mahbub

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
13	Kamis, 23 September 2021 Thursday, September 23, 2021	Persetujuan dan Tanggapan atas Surat Nomor HM.03.03/23/9/1/DHM/UT/PI.II-21 tanggal 23 September 2021. Approval and Response to Letter Number HM.03.03/23/9/1/DHM/UT/PI.II-21 dated September 23, 2021.	• Nurrachman • Zakie • Mahbub
14	Selasa, 28 Oktober 2021 Tuesday, October 28, 2021	Tanggapan atas usulan RKAP Tahun 2022 Responses to the proposed RKAP 2022	• Heru • Zakie • Sofia
15	Kamis, 11 November 2021 Thursday, November 11, 2021	Tanggapan atas Penyesuaian RKAP Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Responses to the Adjustment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2021 RKAP	• Heru • Zakie • Sofia
16	Kamis, 25 November 2021 Thursday, November 25, 2021	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Responses to the third Quarter 2021 Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Heru • Zakie • Sofia
17	Selasa, 7 Desember 2021 Tuesday, December 7, 2021	*Progress* Audit Penutupan 30 September 2021 dengan KAP. Progress of Audit Closing September 30, 2021 with KAP.	• Heru • Didi • Zakie • Sofia
18	Selasa, 20 Desember 2021 Tuesday, December 20, 2021	Tanggapan atas Laporan Manajemen periode November 2021. Responses to the November 2021 Management Report.	• Heru • Didi • Zakie • Sofia

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF AUDIT COMMITTEE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit
Attendance at Audit Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Nurrachman*	Ketua Chairman	13	13	100%
Heru Sukanto**	Ketua Chairman	5	5	100%
Didi Sumedi***	Wakil Ketua Vice Chairman	2	2	100%
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	14	14	100%
Mahbub Junaedi****	Anggota Member	7	7	100%
Sofia Chairunnisa*****	Anggota Member	5	5	100%

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2021

Selama tahun 2021 Komite Audit telah melaksanakan tugasnya yaitu:

1. Mengevaluasi RJPP;
2. Mengevaluasi usulan RKAP tahun 2021 dan menyusun tanggapan Dewan Komisaris;
3. Menganalisis kesenjangan yang terjadi antara *master plan* IT dengan aktual dengan mengidentifikasi risiko yang dapat ditimbulkan;
4. *Monitoring* audit keuangan oleh KAP;
5. Mengevaluasi kinerja KAP;
6. Tanggapan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2020;

BRIEF REPORT OF AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES IN 2021

Throughout 2021, Audit Committee has carried out the following duties:

1. Evaluate the RJPP;
2. Evaluate the proposed RKAP 2021 and prepare the Board of Commissioners' response;
3. Analyze the gap between the IT master plan and the actual by identifying the risks that may arise;
4. Monitoring financial audit by KAP;
5. Evaluating the performance of KAP;
6. Provide response to the 2020 Audited Financial Report;

7. Pemilihan KAP Audit Keuangan Tahun 2021;
8. Kunjungan Kerja untuk Evaluasi Kinerja Cabang dan cek fisik aset yang diusulkan penghapusan;
9. Evaluasi Kinerja SPI;
10. Evaluasi dan saran atas PKPT SPI (organ pendukung Dewan Komisaris);
11. Rapat koordinasi Triwulanan dengan SPI (Evaluasi LHA, Pemutakhiran Data dan Tindak lanjut);
12. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal;
13. Tanggapan Laporan Manajemen Tahun 2020;
14. Evaluasi Laporan Manajemen Triwulanan;
15. Menyusun kajian atas usulan Direksi yang Waktu sesuai memerlukan tanggapan/persetujuan Dewan kebutuhan Komisaris;
16. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit Tahun 2021;
17. Penyusunan Laporan Triwulanan Komite Audit;
18. Seminar/pelatihan/*workshop*/studi banding;
19. Rapat internal Komite Audit;
20. Rapat bersama Dewan Komisaris; dan
21. Melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Cabang.

7. Selection of KAP to conduct the 2021 Financial Audit;
8. Work Visit for Branch Performance Evaluation and physical check of assets proposed for elimination;
9. Evaluate SPI Performance;
10. Evaluate and provide advice on PKPT SPI (supporting organ of Board of Commissioners);
11. Quarterly coordination meeting with SPI (LHA Evaluation, Data Update and Follow-up);
12. Follow-up the monitoring of the results of external auditor's audit;
13. Provide response to the 2020 Management Report;
14. Evaluate the Quarterly Management Report;
15. Prepare a review of the Board of Directors' proposals that require the response/approval from Board of Commissioners;
16. Prepare the 2021 Audit Committee Work Plan and Budget;
17. Prepare the Audit Committee Quarterly Report;
18. Seminar/training/workshop/comparative study;
19. Internal Audit Committee meeting;
20. Meeting with Board of Commissioners; and
21. Carry out work visits to the Branch;

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang ·dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas kebijakan dan pelaksanaan nominasi dan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah melaksanakan proses nominasi dan remunerasi secara baik memadai.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas-tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perusahaan dan Direksi Anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi ke pada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
4. Berperan sebagai *Talent Committee* untuk Eksekutif BUMN (Direksi dan BOD-1); dan
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
    b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee is a Committee formed by the Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero) with the aim of assisting Board of Commissioners in carrying out its obligations to monitor, supervise and evaluate the nomination and remuneration policies and implementation. Nomination and Remuneration Committee is formed to provide input to Board of Commissioners, that the Company has carried out the nomination and remuneration process properly and adequately.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties of Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Provide recommendations regarding candidates for members of Board of Directors of the Company and Board of Directors of Subsidiaries to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
2. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for selecting and/or replacing members of Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
3. Evaluating the remuneration policy;
4. Acting as Talent Committee for SOE Executives (Director and BOD-1); and
5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
    a. Remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders; and
    b. Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.

The responsibilities of Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Nomination and Remuneration Committee is responsible to the Board of Commissioners;
2. Nomination and Remuneration Committee's accountability to the Board of Commissioners is presented in the following report:

a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang:

1. Melakukan reviu, memeriksa, melakukan Analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya;
2. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait; dan
3. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat komite.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo mengacu pada Piagam Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEPDK/PI.II/ VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/ Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain; dan
15. Penutup.

a. Annual report on the implementation of Nomination and Remuneration Committee's duties;
b. Quarterly Report on the implementation of Nomination and Remuneration Committee's duties; and
c. Reports on the implementation of each special duties of Nomination and Remuneration Committee.

3. Nomination and Remuneration Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Company documents, data and information.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE AUTHORITIES

In carrying out its duties, Nomination and Remuneration Committee is authorized to:

1. Reviewing, examining, analyzing and providing opinions and recommendations within the scope of their duties;
2. Seek and obtain relevant (unrestricted access) information from the Management Information System (MIS), reports, as well as from each member of Board of Directors, employees or individuals or related sources; and
3. Invite management to attend committee meetings.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, Pelindo's Nomination and Remuneration Committee refers to the Nomination and Remuneration Committee Charter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which was last stipulated by the Board of Commissioners through the Decree of Board of Commissioners No. 09/KEPDK/PI.II/ VII-2017 dated July 14, 2017 regarding the Update/ Stipulation of the Charter of Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Charter contains provisions that must be complied with in the establishment and implementation of Nomination and Remuneration Committee's activities so that they can work independently, objectively, independently, transparently, and can be accounted for. The charter consists of following sections:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duties;
4. Authorities;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Reports;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Education and Supporting Personnel;
13. Performance Assessment;
14. Others; and
15. Closing.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pra Merger

Pada periode Triwulan I Tahun 2021 susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Moermahadi Soerja Djanegara	Ketua Chairman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Akuntansi Accounting
D. Andhi Nirwanto	Sekretaris Secretary	Komisaris Commissioner	Logistik Keuangan Finance Logistics
R. Agus H. Purnomo	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Teknik Mesin, Manajemen Mechanical Engineering, Management
R. Nurhidayat	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi Accounting

Pada periode Triwulan II Tahun 2021 terdapat perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-192/MBU/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Melalui Keputusan tersebut, telah dilakukan Pemberhentian dengan Hormat Sdr. Suaidi Marasbessy sebagai Komisaris Independen selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta pemberhentian dengan hormat Sdr. D. Andhi Nirwanto sebagai Komisaris selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Maka susunan Komite Nominasi dan Remunerasi pada akhir periode Triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Moermahadi Soerja Djanegara	Ketua Chairman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Akuntansi Accounting
R. Agus H. Purnomo	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Teknik Mesin, Manajemen Mechanical Engineering, Management
R. Nurhidayat	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi Accounting

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Pre Merger

In the first quarter of 2021, the composition of Nomination and Remuneration Committee is as follows

Nomination and Remuneration Committee Structure, Membership and Expertise

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Moermahadi Soerja Djanegara	Ketua Chairman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Akuntansi Accounting
D. Andhi Nirwanto	Sekretaris Secretary	Komisaris Commissioner	Logistik Keuangan Finance Logistics
R. Agus H. Purnomo	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Teknik Mesin, Manajemen Mechanical Engineering, Management
R. Nurhidayat	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi Accounting

In the second Quarter of 2021, there were changes in the composition of Nomination and Remuneration Committee through a copy of Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)No. SK-192/MBU/06/2021 dated June 11, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Through this decree, Suaidi Marasbessy has been honorably dismissed as Independent Commissioner and Member of Nomination and Remuneration Committee and D. Andhi Nirwanto has been honorably dismissed as Commissioner and Member of Nomination and Remuneration Committee. Therefore, the composition of Nomination and Remuneration Committee at the end of the second Quarter of 2021 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Moermahadi Soerja Djanegara	Ketua Chairman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Akuntansi Accounting
R. Agus H. Purnomo	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Teknik Mesin, Manajemen Mechanical Engineering, Management
R. Nurhidayat	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi Accounting

Pasca Merger

Sebagai tambahan keterangan, bahwa telah dilakukan penyesuaian kembali susunan Komite Nominasi dan Remunerasi, yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 05/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021, Maka susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Post Merger

As additional information, Nomination and Remuneration Committee composition has been readjusted as stipulated on the Decree of Board of Commissioners No. 05/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021. Hence, the composition of Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Marsetio	Ketua Chairman	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/Acting President Commissioner	Fisip, Manajemen Politics and Social Science, Management
R. Agus H. Purnomo	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Teknik Mesin, Manajemen Mechanical Engineering, Management
Sudung Situmorang	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Hukum Law
Agus Pambagio	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Teknologi Kimia Tekstil Teknik Textile Chemical Technology Engineering
Mahbub Junaedi	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Hukum Accounting, Law

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFIL

Marsetio	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman of Nomination and Remuneration Committee
	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

R. Agus H. Purnomo	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of Nomination and Remuneration Committee
	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Sudung Situmorang	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of Nomination and Remuneration Committee
	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.



Agus Pambagio

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Semarang. 19 Agustus 1959/62 tahun Semarang, August 19, 1959/62 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 Teknologi Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung (1984) • S2 Engineering Management dari School of Engineering & Applied Science The George Washington University, Washington, DC, USA (1990). • Bachelor of Textile Chemical Technology from Bandung Textile Technology Institute (1984) • Master of Engineering Management from School of Engineering & Applied Science The George Washington University, Washington, DC, USA (1990).
Sertifikasi Certification	• *Certified Professional Negotiator from* Paska Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2008 • *Certified Professional US Lobbyist*, from American Lobby League, Washington, DC 2008 • *Certified Mastering Lobbyist*, from European Training Institute, Brussels, Belgium 2010 • *Certified Public Service Policy Development*, SNCF France 2013
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Tim Pakar Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (2021-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Penanganan Tailing PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019-sekarang) • Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Pelindo 3 (Persero) (2019-2021) • Anggota Dewan Pertimbangan Proper Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019-sekarang) • Anggota Team Ahli Siber Pungli, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan RI (2017 -2018) • Member of the Population Administration Expert Team, Ministry of Home Affairs (2021 – present) • Member of PT Freeport Indonesia's Tailings Handling Supervisory Board, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present) • Nomination and Remuneration Committee for Board of Commissioners of PT Pelindo 3 (Persero) (2019 – 2021) • Member of the National Proper Advisory Council, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present) • Member of the Cyber Extortion Expert Team, Coordinating Ministry for Political and Security Affairs of the Republic of Indonesia (2017 -2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 6/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021 Board of Commissioners Decree No. 6/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021
Periode Menjabat Service Period	2021 - 2024
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Penasehat Senior, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Kebijakan (2015-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Penanganan Tailing PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-sekarang) • Anggota Dewan Pertimbangan Proper Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-sekarang) • Senior Advisor, Ministry of Environment and Forestry in the Policy (2015-present) • Member of PT Freeport Indonesia's Tailings Handling Supervisory Board, Ministry of Environment and Forestry (2015 – present) • Member of the National Proper Advisory Council, Ministry of Environment and Forestry (2015 – present)



Mahbub Junaedi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 30 Desember 1972/49 tahun Jakarta, December 30, 1972/49 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia (1998) • Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2000) • Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis Universitas Indonesia (2011) • Magister Hukum Jurusan Hukum Perdagangan Internasional Universitas Indonesia (2012) • Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia (1998) • Diploma IV in Accounting, State College of Accountancy (STAN) (2000) • Bachelor of Business Law, Faculty of Law, University of Indonesia (2011) • Master of International Trade Law, Faculty of Law, University of Indonesia (2012)
Sertifikasi Certification	• Wakil Manajer Investasi (WMI) • Profesional Tata Kelola Bersertifikasi (CGP) • Manajemen Risiko Utama (CRP) • Ahli Kepelabuhanan • Investment Manager Representative • Certified Governance Professional (CGP) • Certified Risk Professional (CRP) • Port Expert
Pengalaman Kerja Work Experience	• Tim Penyelidik Persaingan Dagang antar Negara pada KPPI dan KADI, (2003-2008) • *Partner* JMTLawHouse – Konsultan Hukum, (2008-2014) • Komite Audit dan Anggota Tim Penyusunan Produk Hukum Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, (2014-2018) • Komite Audit Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), (2018-2020) • Sekretaris Dewan Pengawas BPKH, (2020-2021) • Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021) • Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), (2021-sekarang) • Investigator of Indonesian Safeguard Committee (KPPI) and Indonesian Antidumping Committee (KADI), (2003-2008) • Partner JMTLawHouse – Legal Consultant, (2011-2014) • Audit Committee and Legal Drafter - BPJS Kesehatan (2014-2018) • Audit Committee of Board of Hajj Fund Management Agency (BPKH), (2018-2020) • Secretary to Supervisory Board of Hajj Fund Management Agency (BPKH), (2018-2021) • Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021) • Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 4/KEP-DK/PI/X-2021 Board of Commissioners Decree No. 4/KEP-DK/PI/X-2021
Periode Menjabat Service Period	2021 - 2024
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Educational Qualifications and Work Experience

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Marsetio	Ketua Chairman	• S1 bidang Fisip/ADNE • S2 bidang *Management* • Bachelor in Politics and Social Science/ ADNE • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan pemerintahan Has work experience in the education and government sector
R. Agus H. Purnomo	Wakil Ketua Vice Chairman	• S1 bidang Teknik Mesin • S2 bidang Manajemen • Bachelor in Mechanical Engineering • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in the government sector
Sudung Situmorang	Wakil Ketua Vice Chairman	S2 bidang Hukum Master in Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum Has work experience in the legal sector
Agus Pambagio	Anggota Member	• S1 Teknologi Kimia Tekstil • S2 *Engineering Management* • Bachelor in Textile Chemical Technology • Master in Engineering Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang lingkungan Has work experience in the environment sector
Mahbub Junaedi	Anggota Member	• S1 Jurusan Akuntansi • DIV Jurusan Akuntansi • S1 Jurusan Hukum Bisnis • S2 Jurusan Hukum Perdagangan Internasional • Bachelor in Accounting • DIV in Accounting • Bachelor in Business Law • Master in International Trade Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang audit, akuntansi, dan hukum Has work experience in the auditing, accounting, and legal sector

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE INDEPENDENCE

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Marsetio	R. Agus H. Purnomo	Sudung Situmorang	R. Nurhidayat	Agus Pambagio	Mahbuh Junaedi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the company, subsidiary, or affiliated company	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership relationship in the company	√	√	√	√	√	√

Aspek Independensi Independence Aspect	Marsetio	R. Agus H. Purnomo	Sudung Situmorang	R. Nurhidayat	Agus Pambagio	Mahbuh Junaedi
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrator of political parties, official and government	√	√	√	√	√	√

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Subject of Training/Competency	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Marsetio	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
R. Agus H. Purnomo	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Sudung Situmorang	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Mahbub Junaedi	Anggota Member	• Diklat Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan • Pelatihan Penilaian SPI Korporasi berbasis IACM • Port Expert Training and Certification • Internal Audit Capabilty Model (IACM)Training	• PMLI • Pusdiklatwas BPKP • PMLI • GIA CORPU BPKP	• 2021 • 2021
Agus Pambagio	Anggota Member	-	-	-

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau anggota Komite Nominasi

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING POLICY

Nomination and Remuneration Committee holds a meeting at least equal to the minimum requirements for Board of Commissioners meeting set out in the Company's Articles of Association. Nomination and Remuneration Committee meeting is chaired by the Chairman of Nomination and Remuneration

dan Remunerasi yang paling senior, apabila Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural SDM sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Committee or the most senior member of Nomination and Remuneration Committee, if the Chairman of Nomination and Remuneration Committee is unable to attend. If deemed necessary, Nomination and Remuneration Committee may invite the Management related to the meeting material to attend the Nomination and Remuneration Committee meeting. Every meeting of Nomination and Remuneration Committee is stated in the minutes of meeting signed by all members of Nomination and Remuneration Committee present. Nomination and Remuneration Committee holds a coordination meeting with Structural HC at least once in 3 (three) months.

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING AGENDA

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	Selasa, 12 Januari 2021 Tuesday, January 12, 2021	Penilaian Kinerja Staf Sekretariat Dewan Komisaris tahun 2021. Performance Assessment of the Secretary of Board of Commissioners in 2021.	• Moermahadi Soerja Djanegara • D. Andhi Nirwanto • Suaidi Marasbessy • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
2	Selasa, 9 Februari 2021 Tuesday, February 9, 2021	• Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Direksi PT IKT Tbk; dan • Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Direksi PT MTI. • Response to the Proposed Appointment of f Directors of PT IKT Tbk; and • Response to the Proposed Appointment.	• Moermahadi Soerja Djanegara • D. Andhi Nirwanto • Suaidi Marasbessy • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
3	Selasa, 16 Februari 2021 Tuesday, February 16, 2021	Persetujuan atas Usulan KPI Direksi Secara Individual Tahun 2021. Approval of the Proposed Board of Directors Individual KPIs in 2021.	• Moermahadi Soerja Djanegara • D. Andhi Nirwanto • Suaidi Marasbessy • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
4	Selasa, 23 Februari 2021 Tuesday, February 23, 2021	• Tanggapan Permohonan Rekomendasi atas Usulan Perubahan Kewenangan; dan • Perubahan Kewenangan serta *Draft* Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Sama dengan Mitra di Pelindo. • Response to Request for Recommendation on Proposed; and • Changes of Authority and Draft of Board of Directors Decree regarding Guidelines for Cooperation with Partners at Pelindo.	• Moermahadi Soerja Djanegara • D. Andhi Nirwanto • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
5	Selasa, 9 Maret 2021 Tuesday, March 9, 2021	• Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Direksi PT PMLI; dan • Persetujuan atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat. • Response to the Proposed Appointment of Directors of PT PMLI; and • Approval of the Proposed Changes of Head Office Organizational Structure.	• Moermahadi Soerja Djanegara • D. Andhi Nirwanto • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
6	Selasa, 20 April 2021 Tuesday, April 20, 2021	Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Direksi PT IPC TPK. Response to the Proposal for Appointment of Directors of PT IPC TPK.	• Moermahadi Soerja Djanegara • D. Andhi Nirwanto • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
7	Selasa, 18 Mei 2021 Tuesday, May 18, 2021	Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Komisaris Anak Perusahaan PT ILCS & PT PTP. Response to the Proposal for Appointment of Commissioner of Subsidiaries PT ILCS & PT PTP.	• Moermahadi Soerja Djanegara • D. Andhi Nirwanto • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
8	Selasa, 25 Mei 2021 Tuesday, May 25, 2021	• Persetujuan atas Usulan Pengangkatan Sekretariat Perusahaan; • Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Direksi PT PPI; dan • Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Direksi PT Rukindo. • Approval of the Proposal for Appointment of Corporate Secretary; • Response to the Proposal for Appointment of Directors of PT PPI; and • Response to the Proposal for Appointment of Directors of PT Rukindo.	• Moermahadi Soerja Djanegara • D. Andhi Nirwanto • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
9	Selasa, 8 Juni 2021 Tuesday, June 8, 2021	• Persetujuan atas Usulan Perubahan Organisasi Kantor Pusat; dan • Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT IKT, Tbk. • Approval of the Proposed Changes of Head Office Organization; and • Response to the Proposal fpr Appointment of Commissioners and Directors of PT IKT, Tbk.	• Moermahadi Soerja Djanegara • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
10	Selasa, 3 Agustus 2021 Tuesday, August 3, 2021	Tanggapan atas Usulan Penyesuaian Target Triwulan III pada KPI Direksi Secara Individual Tahun 2021. Response to the Proposal for Adjusting the Third Quarter Targets of Board of Directors Individual KPIs in 2021.	• Moermahadi Soerja Djanegara • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
11	Senin, 30 Agustus 2021 Monday, August 30, 2021	Usulan Remunerasi Paska Integrasi Pelindo dan Faktor Pendukung Tantiem 2021. Proposal for Remuneration of Pelindo Post-Integration and Supporting Factors for Tantiem 2021.	• Moermahadi Soerja Djanegara • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
12	Rabu, 29 September 2021 Wednesday, September 29, 2021	Usulan Tantiem Pra Merger Tahun Kerja 2021. Proposal for Pre-Merger Tantiem 2021.	• Moermahadi Soerja Djanegara • R. Agus H. Purnomo • R. Nurhidayat
13	Selasa, 26 Oktober 2021 Tuesday, October 26, 2021	Tanggapan atas Usulan Penempatan Direksi Anak Perusahaan PT JICT. Response to the Proposed Placement of Directors of Subsidiary, PT JICT.	• Marsetio • R. Agus H. Purnomo • Sudung Situmorang • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi
14	Rabu, 10 November 2021 Wednesday, November 10, 2021	Tanggapan atas Usulan Perubahan Organisasi Kantor Pusat. Response to Proposed Changes of Head Office Organization.	• Marsetio • R. Agus H. Purnomo • Sudung Situmorang • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Attendance at Nomination and Remuneration Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Marsetio	Ketua Chairman	2	2	100%
R. Agus H. Purnomo	Wakil Ketua Vice Chairman	14	14	100%
Sudung Situmorang	Wakil Ketua Vice Chairman	2	2	100%
Agus Pambagio	Anggota Member	2	2	100%
Mahbub Junaedi	Anggota Member	2	2	100%

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2021

Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya yaitu:

1. Pengawasan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Evaluasi Kinerja Direksi;
3. Evaluasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

BRIEF REPORT OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE ACTIVITIES IN 2021

Throughout 2021, Nomination and Remuneration Committee has carried out the following duties:

1. Supervise the Implementation of Good Corporate Governance Principles;
2. Evaluated the Performance of Board of Directors;
3. Evaluate the remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors;

4. Evaluasi usulan/rekomendasi kepada RUPS Waktu sesuai tentang calon Anggota Direksi (apabila kebutuhan diperlukan), serta Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan;
5. Rapat koordinasi Triwulanan dengan Bagian SDM;
6. Evaluasi Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021;
7. Evaluasi atas desain dan pola struktur organisasi Perusahaan
8. Evaluasi atas Penerapan Pola Karier;
9. Evaluasi atas Penerapan HR *Contact center* untuk komunikasi antara HR HO dengan Anak Perusahaan & Cabang;
10. Evaluasi atas sistem manajemen Karier;
11. Evaluasi penerapan GCG perusahaan;
12. Evaluasi peraturan-peraturan mengenai GCG;
13. *Updating* data *talent pool* PT Pelindo II;
14. Kunjungan Kerja ke Cabang Pelabuhan;
15. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran KNR Tahun 2021;
16. Penyusunan Laporan Triwulanan KNR;
17. Seminar/pelatihan/*workshop*/studi banding;
18. Rapat internal KNR;
19. Rapat dengan Dewan Komisaris; dan
20. melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Cabang-Cabang maupun ke Anak Perusahaan.

4. Evaluate the proposals/recommendations to the GMS at the appropriate time regarding candidates for members of Board of Directors (if necessary), as well as Directors and Commissioners of Subsidiaries;
5. Quarterly coordination meeting with HC Department;
6. Evaluate the Proposed Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors in 2021;
7. Evaluate the design and pattern of the Company's organizational structure;
8. Evaluate the Application of Career Patterns;
9. Evaluate the implementation of HR Contact center for communication between HR of Head Office and Subsidiaries & Branches;
10. Evaluate the career management system;
11. Evaluate the company's GCG implementation;
12. Evaluate the regulations regarding GCG;
13. Updating PT Pelindo II's talent pool data;
14. Working Visit to Port Branch;
15. Prepare the 2021 KNR Work Plan and Budget;
16. Prepare the KNR Quarterly Reports;
17. Seminar/ training/ workshop/ comparative study;
18. KNR internal meeting;
19. Meeting with Board of Commissioners; and
20. Conducting working visits to Branches and Subsidiaries.

KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG & PMR adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas kebijakan dan pelaksanaan Pemantau Manajemen Risiko. Komite GCG & PMR dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah melaksanakan proses Risiko secara baik memadai.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

GCG & RMM Committee is a Committee formed by Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out their obligations to monitor, supervise and assess the policies and implementation of Risk Management. GCG & RMM Committee is formed to provide input to the Board of Commissioners that the Company has carried out the Risk process properly and adequately.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Tugas-tugas Komite GCG & PMR adalah sebagai berikut:

1. Komite GCG & PMR bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite GCG & PMR bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite GCG & PMR memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya;
4. Komite GCG & PMR memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
5. Komite GCG & PMR melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris; dan

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties of GCG & RMM Committee are as follows:

1. GCG & RMM Committee works collectively in carrying out their duties to assist the Board of Commissioners;
2. GCG & RMM Committee is independent both in carrying out its duties and in reports and is responsible to the Board of Commissioners;
3. GCG & RMM Committee provides recommendations regarding the improvement of Risk Management system and its implementation;
4. GCG & RMM Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for all information issued by the company;
5. GCG & RMM Committee identifies matters that require the Board of Commissioners' attention as well as other tasks assigned by the Board of Commissioners; and

6. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
   a. Pemberian tugas khusus kepada Komite GCG & PMR oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
      - Nama yang diberi tugas;
      - Sifat penugasan;
      - Lingkup pekerjaan;
      - Tujuan dan sasaran pekerjaan; dan
      - Jangka waktu penugasan.
   b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite GCG & PMR sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
   c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite GCG & PMR dapat:
      - Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris; jika dianggap perlu; dan
      - Melakukan analisis dan evaluasi, bekerja sama dengan Struktural Manajemen Risiko, dan atau Struktural unit kerja terkait atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite GCG & PMR dengan beban Perseroan.
   d. Komite GCG & PMR menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

Tanggung jawab Komite GCG & PMR adalah sebagai berikut:
1. Komite GCG & PMR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Pertanggungjawaban Komite GCG & PMR kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
   a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite GCG & PMR;
   b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite GCG & PMR; dan
   c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite GCG & PMR.
3. Komite GCG & PMR bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

WEWENANG KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugasnya Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko berwenang:
1. Mengakses catatan atau informasi tentang aset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, Gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
2. Berhak mendapat dan meminta setiap hasil kajian risiko yang dilakukan baik oleh para *risk owner,* para pejabat struktural terkait, *risk champion*, Satuan Pengawasan Intern maupun Direksi Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; dan

6. Special Duties from Board of Commissioners:
   a. The Board of Commissioners assigns special tasks to GCG & RMM Committee with a written order containing:
      - The name of assignee;
      - The nature of assignment;
      - Scope of work;
      - The goals and objectives of the work; and
      - The duration of assignment.
   b. The scope of work for special duties for GCG & RMM Committee is fully determined by the Board of Commissioners as long as it does not conflict with applicable laws and regulations;
   c. In carrying out the special duties, GCG & RMM Committee may:
      - Reviewing all necessary records, documents and other information including the minutes of Board of Directors meeting and Board of Commissioners meeting; if deemed necessary; and
      - Conduct analysis and evaluation, cooperate with Structural Risk Management, and/or Structural related work units or request assistance from experts or consultants to assist GCG & RMM Committee at the expense of the Company.
   d. GCG & RMM Committee submits a report on the implementation of special tasks to the Board of Commissioners.

The responsibilities of GCG & RMM Committee are as follows:
1. GCG & RMM Committee is responsible to the Board of Commissioners;
2. The accountability of GCG & RMM Committee to the Board of Commissioners is presented in the following report:
   a. Annual report on the implementation of GCG & RMM Committee duties;
   b. Quarterly Report on the implementation of GCG & RMM Committee duties; and
   c. Reports for each implementation of special duties of GCG & RMM Committee.
3. GCG & RMM Committee is responsible for maintaining the confidentiality of company documents, data and information.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE AUTHORITIES

In carrying out its duties, GCG and Risk Management Monitoring Committee is authorized to:
1. Accessing records or information about assets and other resources and entering the grounds, buildings, and offices used by the Company;
2. Obtain and request any results of risk studies conducted by the risk owners, related structural officials, risk champions, the Internal Audit Unit and the Board of Directors of the Company;
3. Requesting an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company; and

4. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerja sama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini para *risk owner*, pejabat struktural terkait kendali mutu dan manajemen risiko serta Satuan Pengawasan Internal Perseroan.

PIAGAM KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo mengacu pada Piagam Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEPDK/PI.II/ VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain; dan
15. Penutup.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Pra Merger

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Montty Girianna	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Transportasi, Keuangan Transportation, Finance
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi Accounting
Aries Fikirman	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Keuangan Finance

Pada Pra Merger terdapat perubahan susunan Komite GCG & PMR sebagai berikut:

4. In exercising its authority, the Committee cooperates with related work units, in this case the risk owners, structural officials related to quality control and risk management as well as the Company's Internal Monitoring Unit.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE CHARTER

In carrying out their duties and responsibilities, Pelindo's GCG and Risk Management Monitoring Committee refers to the GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which was last stipulated by the Board of Commissioners through Board of Commissioners Decree No. 09/KEPDK/PI.II/ VII-2017 dated July 14, 2017 regarding the Update/Stipulation of the Charter of Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Charter contains provisions that must be complied with in the establishment and implementation of the GCG and Risk Management Monitoring Committee's activities so that they can work independently, objectively, independently, transparently, and can be accounted for. The charter consists of the following sections:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duties;
4. Authority;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Reports;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Education and Supporting Personnel;
13. Performance Assessment;
14. Others; and
15. Closing.

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Pre Merger

During the Pre-Merger, there were changes in the composition of the & RMM Committee as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Teknik Sipil Manajemen Lingkungan Civil Engineering Environmental Management
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi Accounting
Aries Fikirman	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Keuangan Finance

Pasca Merger

Post Merger

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Teknik Sipil Manajemen Lingkungan Civil Engineering Environmental Management
Irma Suryani Chaniago	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Manajemen Management
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi Accounting
Aries Fikirman	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Keuangan Finance

Pada Pasca Merger per 31 Desember 2021 terdapat perubahan susunan Komite GCG & PMR sebagai berikut:

After the Merger as of December 31, 2021, there were changes in the composition of GCG & RMM Committee as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Teknik Sipil Manajemen Lingkungan Civil Engineering Environmental Management
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara Government Science, Public Administration
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi Accounting
Aries Fikirman	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Keuangan Finance

PROFIL KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Profil Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE PROFILE

The profile of GCG and Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2021 is as follows.

Antonius Rainier Haryanto	Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee
	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Muchtar Luthfi Mutty	Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee
	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.



Rakhmat Adi Santosa

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Banyumas, 20 November 1969/52 tahun Banyumas, November 20, 1969/52 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• DIII Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991) • S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2007) • S2 Jurusan Akuntansi, Manajemen *Strategic & Finance* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005) • Diploma of State College of Accountancy (1991) • Bachelor in Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia (2007) • Master in Accounting, Strategic Management & Finance, Faculty of Economics, University of Indonesia (2005)
Sertifikasi Certification	• *Certified Public Accountant* (CPA) • *Certified Risk Management Professional* (CRMP) • *Certified Risk Management Officer* (CRMO) • Certified Public Accountant (CPA) • Certified Risk Management Professional (CRMP) • Certified Risk Management Officer (CRMO)
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Managing Partner* PT Cipta Inspirasi Pratama (2011-sekarang) • *Partner* KAP Sohibul, Kasiani, Komarianto & Santosa (2016-sekarang) • *Partner* KAP Zainal Juhana dan Rekan (2006-2015) • Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Indonesia (2005-sekarang) • Managing Partner of PT Cipta Inspirasi Pratama (2011 – present) • Partner of KAP Sohibul, Kasiani, Komarianto & Santosa (2016 – present) • Partner of KAP Zainal Juhana and Partners (2006 – 2015) • Permanent Lecturer at the Faculty of Economics, Al Azhar University, Indonesia (2005 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Nomor 03/KEP-DK/PI.II/II-2021 tanggal 1 Februari 2018 Decree No. 03/KEP-DK/PI.II/II-2021 dated February 1, 2018
Periode Menjabat Service Period	• Periode I : 1 Februari 2018 – 1 Februari 2021 • Periode II : 1 Februari 2021 – 31 Januari 2023 • 1st Period: February 1, 2018 – February 1, 2021 • 2nd Period: February 1, 2021 – January 31, 2023
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• *Managing Partner* PT Cipta Inspirasi Pratama (2011-sekarang) • *Partner* KAP Sohibul, Kasiani, Komarianto & Santosa (2016-sekarang) • Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Indonesia (2005-sekarang) • Managing Partner of PT Cipta Inspirasi Pratama (2011 – present) • Partner of KAP Sohibul, Kasiani, Komarianto & Santosa (2016 – present) • Permanent Lecturer at the Faculty of Economics, Al Azhar University, Indonesia (2005 – present)



Aries Fikirman

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Sukabumi, 21 Maret 1964/57 tahun Sukabumi, March 21, 1964/57 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• DIII Postal dan Ilmu Akademis Umum Pendidikan Tinggi Pos (1986) • S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan Pendidikan Tinggi Pos Lanjutan (1993) • S2 Manajemen Keuangan Universitas Padjajaran Bandung (2005) • Diploma in Postal and General Academic Science, Postal Higher Education (1986) • Bachelor in Economics and Development Studies, Post Advanced Higher Education (1993) • Master in Financial Management, Padjadjaran University, Bandung (2005)
Sertifikasi Certification	• *Certified Risk Management Professional* (CRMP) • *Certified Risk Management Officer* (CRMO) • *Certified Professional in Human Resources Management* (CPHRM) • *Certified Human Resources Business Professional* (CHRBP) • *Certified Human Resources Management Professional* (CHRMP) • Sertifikat Ahli Kepelabuhanan • Certified Risk Management Professional (CRMP) • Certified Risk Management Officer (CRMO) • Certified Professional in Human Resources Management (CPHRM) • Certified Human Resources Business Professional (CHRBP) • Certified Human Resources Management Professional (CHRMP) • Port Expert Certificate
Pengalaman Kerja Work Experience	• Sekretaris Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2009) • Staf Ahli Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) (2011) • Manajer Kinerja Unit Bisnis PT Pos Properti Indonesia (2014) • Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Bisnis Syariah dan Pasar PT Pos Indonesia (Persero) (2017) • Pejabat Sementara Kepala Proyek Pengembangan Bisnis Syariah PT Pos Indonesia (Persero) (2017) • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018) • Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020) • Secretary of Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) (2009) • Expert Staff to President Director of PT Pos Indonesia (Persero) (2011) • Business Unit Performance Manager of PT Pos Properti Indonesia (2014) • Head of Planning, Sharia Business Development and Market of PT Pos Indonesia (Persero) (2017) • Act. Head of Sharia Business Development Project PT Pos Indonesia (Persero) (2017) • Member of Nomination and Remuneration Committee PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018) • Member of Risk Management Monitoring Committee PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KEP-DK/PI.II/II2018 tanggal 1 Februari 2018 • Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KEP-DK/PI.II/II-2021 tanggal 1 Februari 2021 • Board of Commissioners Decree No. 01/KEP-DK/PI.II/II2018 dated February 1, 2018 • Board of Commissioners Decree No. 03/KEP-DK/PI.II/II-2021 dated February 1, 2021
Periode Menjabat Service Period	• Periode I : 1 Februari 2018-1 Februari 2021 • Periode II : 1 Februari 2021-31 Januari 2023 • 1st Period: February 1, 2018 – February 1, 2021 • 2nd Period: February 1, 2021 – January 31, 2023
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-

MASA JABATAN KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE TENURE

The term of office for members of GCG and Risk Management Monitoring Committee who are not members of Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE

GCG and Risk Management Monitoring Committee Educational Qualifications and Work Experience.

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	• S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang Teknik Manajemen Lingkungan • S3 bidang *Build Environment* • Bachelor in Civil Engineering • Master in Environmental • Management Engineering Doctor in Build Environment	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in the government sector
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	• Program Sarjana Muda APDN • S1 Ilmu Pemerintahan • S2 bidang Kajian Ketahanan Nasional • S2 bidang Administrasi Negara • APDN Baccalaureate Program • Bachelor in Government Science • Master in National Resilience Studies • Master in State Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in the government sector
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	• DIII Akuntansi • S1 Jurusan Akuntansi Fakultas • S2 Jurusan Akuntansi • Diploma in Accounting • Bachelor in Accounting • Master in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang Akuntansi dan Audit Has work experience in the Accounting and Audit sector
Aries Fikirman	Anggota Member	• DIII Postal dan Ilmu Akademis Umum • S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan) • S2 Manajemen Keuangan • Diploma in Postal and General Academic Sciences • Bachelor in Economics and Development Studies • Master in Financial Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Has work experience in the courier services, logistics, and financial transactions sector

INDEPENDENSI KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Tabel Independensi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE INDEPENDENCE

GCG and Risk Management Monitoring Committee Independence.

Aspek Independensi Independence Aspect	Antonius Rainier Haryanto	Muchtar Luthfi Mutty	Rakhmat Adi Santosa	Aries Fikirman
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√

Aspek Independensi Independence Aspect	Antonius Rainier Haryanto	Muchtar Luthfi Mutty	Rakhmat Adi Santosa	Aries Fikirman
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the company, subsidiary, or affiliated company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership relationship in the company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrator of political parties, official and government	√	√	√	√

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2021

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT IN 2021

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Subject of Training/Competency	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	Pelatihan *Certified Risk Management Profesional* (CRMP) Certified Risk Management Professional (CRMP) Training	Jakarta Pusat tanggal 2 s/d 5 Februari 2021 Central Jakarta February 2-5, 2021	PPM Manajemen
		Diklat *Certified Risk Management Professional* (CRMP) Certified Risk Management Professional (CRMP) Training	Jakarta Pusat Pelatihan *online* tanggal 4-7 Oktober 2021 Ujian *offline* tanggal 15- 16 Oktober 2021 Central Jakarta Online training October 4-7, 2021 Offline exam October 15-16, 2021	PPM Manajemen
		Master Class Series XXI Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (CRMO, CRMP) Master Class Series XXI Risk Management Professional Certification Institute (CRMO, CRMP)	Bandung tanggal 2-3 Desember 2021 Bandung December 2-3, 2021	PPM Manajemen

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Subject of Training/Competency	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Aries Fikirman	Anggota Vice Chairman	Pelatihan *Certified Risk Management Profesional* (CRMP) Certified Risk Management Professional (CRMP) Training	Jakarta Pusat tanggal 2 s/d 5 Februari 2021 Central Jakarta February 2-5, 2021	PPM Manajemen
		Diklat *Certified Risk Management Professional* (CRMP) Certified Risk Management Professional (CRMP) Training	Jakarta Pusat Pelatihan *online* tanggal 4-7 Oktober 2021 Ujian *offline* tanggal 15- 16 Oktober 2021 Central Jakarta Online training October 4-7, 2021 Offline exam October 15-16, 2021	PPM Manajemen
		Master Class Series XXI Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (CRMO, CRMP) Master Class Series XXI Risk Management Professional Certification Institute (CRMO, CRMP)	Bandung tanggal 2-3 Desember 2021 Bandung December 2-3, 2021	PPM Manajemen

RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko atau anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang paling senior, apabila Ketua GCG dan Komite Pemantau Manajemen Risiko berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Setiap rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang hadir. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

AGENDA RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2021, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, sebagai berikut.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETINGS

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETING POLICY

GCG and Risk Management Monitoring Committee holds meetings at least the same as the minimum requirements for Board of Commissioners meeting set out in the Company's Articles of Association. GCG and Risk Management Monitoring Committee meetings are chaired by the Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee or the most senior member of GCG and Risk Management Monitoring Committee, if the Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee is unable to attend. If deemed necessary, GCG and Risk Management Monitoring Committee may invite the Management related to the meeting material to attend the GCG and Risk Management Monitoring Committee meeting. Each meeting of GCG and Risk Management Monitoring Committee is stated in the minutes of meeting signed by all members of GCG and Risk Management Monitoring Committee present. GCG and Risk Management Monitoring Committee holds coordination meetings with Structural Risk Management at least once in 3 (three) months.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETING AGENDA

Throughout 2021, the date, meeting agenda and participants of GCG and Risk Management Monitoring Committee meetings are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	Selasa, 19 Januari 2021 Tuesday, January 19, 2021	Tanggapan atas Rencana Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok di Kalibaru Barat II Tanjung Priok dengan PT Dharma Karya Perdana Response to the Cooperation Plan for Utilization of Fixed Assets of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Branch in West Kalibaru II Tanjung Priok with PT Dharma Karya Perdana	• Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
2	Senin, 25 Januari 2021 Monday, January 25, 2021	Persetujuan Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap Cabang Pelabuhan Tanjung Priok di Area Ancol Timur dengan PT Ekanuri Approval of the Cooperation for Utilization of Fixed Assets Tanjung Priok Port Branch in East Ancol Area with PT Ekanuri	• Montty Girianna • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
3	Selasa, 25 Mei 2021 Tuesday, May 25, 2021	Tanggapan atas Permohonan Pemberian Pinjaman Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Response to the Application for Loans to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
4	Selasa, 8 Juni 2021 Tuesday, June 8, 2021	Penjelasan atas Usulan Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Kerja Sama Explanation of the Proposed Adjustment of the Limits of Authority Value and Duration of Cooperation	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
5	Rabu, 9 Juni 2021 Wednesday, June 9, 2021	Penjelasan atas Usulan Draf Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Sama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Explanation of the Proposed Draft of Board of Directors Decree concerning Guidelines for Cooperation of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
6	Senin, 26 Juli 2021 Monday, July 26, 2021	Permintaan Penjelasan atas Insiden di Area Proyek Kijing Request for Explanation of Incidents in Kijing Project Area	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
7	Selasa, 27 Juli 2021 Tuesday, July 27, 2021	Tanggapan atas Permohonan Usulan Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Kerja Sama Response to the Application for Adjustment of the Limits of Authority Value and Duration of Cooperation	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
8	Senin, 2 Agustus 2021 Monday, August 2, 2021	Tanggapan atas Permohonan Pemberian Pinjaman Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Response to the Application for Loans to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
9	Senin, 6 September 2021 Monday, September 6, 2021	Tanggapan atas Rencana Pendirian dan Penyertaan Modal Pada Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai *Subholding* Tanggapan atas Permohonan Pemberian *Intercompany Loan* (ICL) kepada PT API Tanggapan atas Permohonan Tambahan Penyertaan Modal Untuk PT PPI (Persero) Response to the Plan for Establishment and Equity Participation in a Subsidiary PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Subholding Response to Application for Intercompany Loan (ICL) to PT API Response to Application for Additional Equity Participation for PT PPI (Persero)	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
10	Selasa, 14 September 2021 Tuesday, September 14, 2021	Tanggapan atas Tambahan Penyertaan Modal Untuk PT PMLI Melalui Konversi *Shareholder's Loan* (SHL) Response to Additional Equity Participation for PT PMLI through Shareholder's Loan (SHL) Conversion	• Antonius Rainier Haryanto • Adi Santosa • Aries Fikirman
11	Sabtu, 18 September 2021 Saturday, September 18, 2021	Tanggapan atas Rencana Pendirian dan Penyertaan Modal pada Anak Perusahaan sebagai Tindak Lanjut Restrukturisasi BUMN Pelabuhan Response to the Plan for Establishment and Equity Participation in Subsidiary as a Follow-up to the Restructuring of Port SOEs	• Antonius Rainier Haryanto • Adi Santosa • Aries Fikirman
12	Senin, 20 September 2021 Monday, September 20, 2021	Tanggapan atas Tambahan Penyertaan Modal untuk PT JPPI Response to Additional Equity Participation for PT JPPI	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
13	Kamis, 23 September 2021 Thursday, September 23, 2021	Persetujuan dan Tanggapan atas Surat Nomor:HM.03.03/23/9/1/DHM/UT/Pl.11-21 tanggal 23 September 2021 Approval and Response to Letter No: HM.03.03/23/9/1/DHM/UT/Pl.11-21 dated September 23, 2021	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
14	Selasa, 28 September 2021 Tuesday, September 28, 2021	Penjelasan atas Usulan Draf Pedoman Kerja Sama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris Explanation of the Proposed Draft of Cooperation Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) the Requires Board of Commissioners' approval	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
15	Selasa, 26 Oktober 2021 Tuesday, October 26, 2021	Pembahasan Persetujuan Rencana Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok di Lapangan Petikemas Eks Ingom Seluas 15.000 M Discussion on the Cooperation Plan for the Utilization of Fixed Assets of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Branch in the 15,000 m2 Ex Ingom Container Field	• Antonius Rainier Haryanto • Irma Suryani Chaniago • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
16	Rabu, 10 November 2021 Wednesday, November 10, 2021	Tanggapan Atas Usulan Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Persetujuan Kerja Sama Response to the Proposal for Adjusting the Limits of Authority Value and Duration of Cooperation Agreement	• Antonius Rainier Haryanto • Irma Suryani Chaniago • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
17	Senin, 29 November 2021 Monday, November 29, 2021	Tanggapan Atas Usulan Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Persetujuan Kerja Sama Response to the Proposal for Adjusting the Limits of Authority Value and Duration of Cooperation Agreement	• Antonius Rainier Haryanto • Irma Suryani Chaniago • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman
18	Senin, 20 Desember 2021 Monday, December 20, 2021	Pelaksanaan Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun Buku 2021 PT Pelindo (Persero) PT Pelindo (Persero)'s Good Corporate Governance (GCG) Assessment for 2021 Fiscal Year	• Antonius Rainier Haryanto • Rakhmat Adi Santosa • Aries Fikirman

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Attendance at GCG and Risk Management Monitoring Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	18	18	100%
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	-	-	-
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	18	18	100%
Aries Fikirman	Anggota Member	18	18	100%

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021

1. Memberikan arahan perubahan lingkungan Waktu sesuai bisnis yang diperkirakan akan berdampak kebutuhan besar pada usaha dan kinerja Perusahaan;
2. Menyusun kajian atas usulan Direksi yang Waktu sesuai memerlukan tanggapan/persetujuan Dewan kebutuhan Komisaris;
3. Evaluasi laporan Semesteran ERM dari manajemen dan penerapannya di perusahaan;

BRIEF REPORT OF GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE ACTIVITIES IN 2021

1. Provide direction on environmental changes according to the business that are expected to have an impact on the Company's business and performance;
2. Compile a study on the Board of Directors' recommendation that requires the response/approval from the Board of Commissioners;
3. Evaluate the ERM Semester report from management and its implementation in the company;

4. Pemantauan implementasi dari kontrol dan mitigasi risiko;
5. Kunjungan lapangan, evaluasi Cabang dan inventarisasi risiko;
6. Rapat Koordinasi dengan unit manajemen risiko;
7. Evaluasi *risk profile*;
8. Evaluasi atas implementasi penggunaan ERM dalam proses pengambilan keputusan dalam investasi;
9. Inventarisasi kendala dalam melakukan investasi berdasarkan *risk profile*;
10. Pembahasan & diskusi perkembangan ERM dalam investasi;
11. Identifikasi hambatan pencapaian KPI dan mencari KRI untuk peningkatan KPI di masa datang;
12. Analisis pelaksanaan program kerja dan mengidentifikasi keberhasilan pencapaian dan risiko hambatan yang terjadi dalam pencapaian;
13. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran KPMR Tahun 2021;
14. Penyusunan Laporan Triwulanan KPMR;
15. Seminar/pelatihan/*workshop*/studi banding;
16. Rapat internal KPMR; dan
17. Rapat dengan Dewan Komisaris.

4. Monitoring the implementation of risk control and mitigation;
5. Field visits, evaluation of Branches and risk inventory;
6. Coordination Meeting with risk management unit;
7. Evaluate the risk profile;
8. Evaluate the implementation of the use of ERM in the investment decision-making process;
9. Make an inventory of obstacles in making investments based on a risk profile;
10. Discuss the development of ERM in investment;
11. Identify obstacles to achieving KPIs and look for KRIs to improve KPIs in the future;
12. Analysis the implementation of work programs and identify the success of achievement and the risk of obstacles that occur in the achievement;
13. Prepare the 2021 KPMR Work Plan and Budget;
14. Prepare the KPMR Quarterly Report;
15. Seminar/training/workshop/comparative study;
16. KPMR internal meeting; and
17. Meeting with Board of Commissioners.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

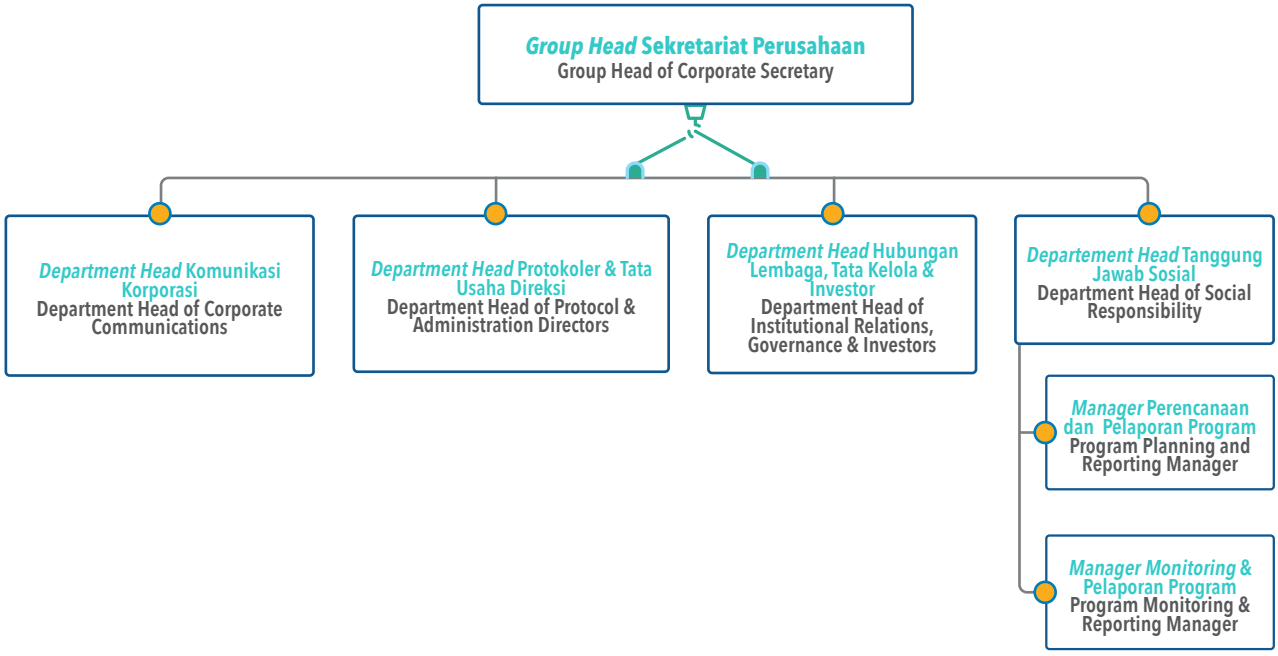
SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretariat Perusahaan merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai *Compliance Officer* yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG. *Group Head* Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholders*.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretariat Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Manajemen telah membuat Berita Acara Kesepakatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Pekerjaan Pada Jabatan Sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

STRUKTUR SEKRETARIAT PERUSAHAAN



ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is a corporate governance organ that plays a significant role as a Compliance Officer who assists the Board of Directors in implementing GCG principles and complying with the provisions of GCG practices. Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) reports directly to the President Director and is tasked with carrying out the mission to support the creation of a consistent and sustainable good corporate image through effective communication programs to all stakeholders.

CORPORATE SECRETARY APPOINTMENT BASIS

Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism under the approval of Board of Commissioners/Supervisory Board. This is in accordance with the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The management has made Minutes of Agreement of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 regarding Approval of Appointment at the Corporate Secretary and Internal Control Unit PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

CORPORATE SECRETARY STRUCTURE

FUNGSI ,TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Fungsi

Bertanggung jawab untuk memastikan dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang pengelolaan kegiatan komunikasi korporasi, tanggung jawab sosial, protokoler dan Tata Usaha Direksi, hubungan lembaga, penerapan tata kelola korporasi, serta kegiatan hubungan investor, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk memastikan tersedianya informasi yang dibutuhkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, tersedianya laporan manajemen triwulan dan tahunan, Sebagai penghubung *(liaison officer*) untuk membina Hubungan dengan Lembaga/Instansi Pemerintah dan/atau non Pemerintah pada skala Nasional, serta penyelenggaraan rapat Direksi, pengadaan bahan rapat Direksi dan penyusunan risalah rapat Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengelola, memutuskan dan me*review* rencana dan implementasi program kerja dan anggaran terkait bidang pengelolaan kegiatan komunikasi korporasi, tanggung jawab sosial, protokoler dan tata usaha Direksi, hubungan lembaga, penerapan tata kelola korporasi, serta kegiatan hubungan investor di lingkungan Perusahaan;
2. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap:
   a. Usulan rencana kegiatan terkait dengan penyebaran informasi kepada pihak internal ataupun eksternal serta peningkatan *corporate identity*;
   b. Laporan Manajemen Triwulanan, Tahunan untuk dapat disampaikan ke Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
   c. Usulan kebijakan peraturan perusahaan terkait dengan GCG beserta kebijakan turunan yang lainnya seperti *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
   d. Usulan *framework*/metode pengendalian GCG, *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
   e. Tindak lanjut hasil penilaian/pemeriksaan penerapan GCG, *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris, Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
   f. Usulan rencana kegiatan program pelayanan masyarakat meliputi Kemitraan, Bina Lingkungan dan CSR;
   g. Hasil evaluasi terhadap proposal atau usulan kegiatan pelayanan masyarakat, Bina Lingkungan dan CSR yang berasal dari pihak eksternal;
   h. Hasil evaluasi penerapan program kemitraan, bina lingkungan dan CSR;
   i. Usulan rencana pelaksanaan rapat Direksi yang dilaksanakan secara rutin ataupun insidental;
   j. Pengelolaan kegiatan protokoler Direksi Perusahaan;

CORPORATE SECRETARY FUNCTIONS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Functions

Responsible for ensuring and coordinating work plans and programs in the field of corporate communication activities management, social responsibility, protocol and administration of Board of Directors, institutional relations, implementation of corporate governance, as well as investor relations activities, are carried out in accordance with applicable regulations, to ensure the availability of information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested, the availability of quarterly and annual management report, as a liaison officer to foster Relations with Government Institutions/Agencies and/or non-Government on a National scale, as well as holding meetings of Board of Directors, materials for Board of Directors meetings and preparation of minutes of Board of Directors meetings.

Duties and Responsibilities

1. Manage, decide and review the plans and implementation of work programs and budgets related to the corporate communication activities management, social responsibility, protocol and administration of Board of Directors, institutional relations, implementation of corporate governance, and investor relations activities within the Company;
2. Conduct review and evaluation of:
   a. Proposed activity plans related to the dissemination of information to internal or external parties as well as improving corporate identity;
   b. Quarterly, Annual Management Report to be submitted to the Board of Commissioners/Supervisory Board;
   c. Proposed corporate regulatory policies related to GCG along with other derivative policies such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS);
   d. Proposed GCG framework/control method, Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS);
   e. Follow-up on the results of GCG assessment/inspection, Board Manual, the Company's Code of Conduct, Guidelines for Gratification and Whistleblowing System (WBS);
   f. Proposed plans for community service programs include Partnership, Community Development and CSR;
   g. Evaluate the proposals for community service activities, Community Development and CSR from external parties;
   h. The evaluation results of the implementation of partnership program, community development and CSR;
   i. Proposed plan for Board of Directors meeting which is held routinely or incidentally;
   j. Management of the Company's Board of Directors protocol activities;

k. Usulan pengelolaan dan penggunaan anggaran biaya Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
l. Mengelola tata usaha serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk daftar Pemegang Saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi/ rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan RUPS;
m. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam *website* perusahaan maupun media cetak atau media resmi perusahaan untuk dikelola ketika ada pembaharuan; dan
n. Pengelolaan kegiatan hubungan kelembagaan baik dengan Instansi terkait baik Pemerintah dan/atau non-Pemerintah, Nasional, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan calon mitra/investor.

3. Merekomendasikan usulan terkait:
   a. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada pegawai perusahaan dan/atau pihak eksternal;
   b. Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan *corporate identity*;
   c. Kebijakan *corporate identity* perusahaan;
   d. Jenis kegiatan Program Pelayanan masyarakat, Bina Lingkungan dan CSR yang akan dilaksanakan;
   e. Kebijakan perusahaan terkait dengan GCG dan peraturan turunannya seperti *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), dan Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
   f. Tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan atas Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS) oleh Pegawai di lingkungan Perusahaan;
   g. Agenda dan jadwal pelaksanaan rapat Direksi;
   h. Rencana anggaran biaya Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
   i. Jenis informasi yang dapat/tidak dapat disebarkan kepada pegawai internal perusahaan; dan
   j. Kebijakan keterbukaan informasi publik perusahaan.

4. Melakukan pengendalian terhadap:
   a. Realisasi program kerja dan kesesuaian pengelolaan anggaran terkait komunikasi perusahaan, penerapan GCG dan peraturan turunannya, Protokoler dan Tata Usaha Direksi, serta pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
   b. Implementasi strategi dan/atau peraturan perusahaan terkait komunikasi perusahaan, penerapan GCG dan peraturan turunannya, Protokoler dan Tata Usaha Direksi, serta pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan;
   c. Informasi untuk pegawai internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan;
   d. Keberhasilan program Pelayanan Masyarakat, Bina Lingkungan, dan CSR yang dilakukan oleh Perusahaan;
   e. Hasil evaluasi penerapan GCG dan peraturan turunannya seperti *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS); dan
   f. Keberjalanan Rapat Direksi secara rutin ataupun insidental.

k. Proposed management and use of the budget for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
l. Manage administration and store company documents including Shareholder register, special register and minutes of Board of Directors/Board of Commissioners/Supervisory Board meetings and GMS meetings;
m. Updating the information material presented on the company website as well as print media or official company media to be managed when there is an update; and
n. Manage the institutional relations activities with related agencies, both Government and/or non-Government, National, including facilitating communication with potential partners/investors.

3. Recommend proposals related to:
   a. Media used to disseminate information to company employees and/or external parties;
   b. Activities to be carried out to improve corporate identity;
   c. Company's corporate identity policy;
   d. Types of Community Service Program, Community Development and CSR activities to be carried out;
   e. Company policies related to GCG and its derivative regulations such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Guidelines for Gratification and Whistleblowing System (WBS);
   f. Follow up on non-compliance with Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS) by Employees of the Company;
   g. Agenda and schedule for Board of Directors meeting;
   h. Budget plan for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
   i. Types of information that can/cannot be disseminated to internal company employees; and
   j. Company's public information disclosure policy.

4. Controlling:
   a. Realization of work programs and suitability of budget management related to corporate communications, implementation of GCG and its derivative regulations, Protocol and Administration of Board of Directors, as well as implementation of partnership and community development programs with a predetermined budget;
   b. Implementation of corporate strategy and/or regulations related to corporate communication, implementation of GCG and its derivative regulations, Protocol and Administration of the Board of Directors, as well as implementation of partnership and community development programs;
   c. Information for the company's internal employees and external parties;
   d. The success of the Community Service, Community Development, and CSR programs carried out by the Company;
   e. The evaluation results of the implementation of GCG and its derivative regulations such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS); and
   f. Routine or incidental Board of Directors Meetings.

PROFIL SEKRETARIAT PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE



Ali Mulyono

***Group Head* Sekretariat Perusahaan**
Group Head Corporate Secretary

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesia Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jepara, 15 Agustus 1969 Jepara, August 15, 1969
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1998 Bachelor of Law from Gajah Mada University in 1998
Sertifikasi Certification	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• AGM Kepatuhan Internal dan Tanggap Bencana/PFSO Cabang Pelabuhan Tanjung Priok PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2012 -2014; • Deputi *Safety, Security and Environment* PT Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2014-2016; • DGM Hukum dan Pengendalian Internal Cabang Pelabuhan Tanjung Priok PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2016-2018; • Direktur SDM PT New Priok Container Terminal One pada tahun 2018-2020; • SVP Hukum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2020-2021; • EVP Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2021; • *Group Head* Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada tahun 2021 sampai saat ini. • AGM Internal Compliance and Disaster Response / PFSO PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Port Branch in 2012 -2014; • Deputy for Safety, Security and Environment of PT Pelabuhan Tanjung Priok in 2014 – 2016; • Legal DGM and Internal Control of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Port Branch in 2016 – 2018; • HC Director of PT New Priok Container Terminal One in 2018 – 2020; • SVP of Law of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2020 – 2021; • EVP Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2021; • Group Head Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2021 until now.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Berita Acara Kesepakatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Pekerjaan Pada Jabatan Sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Minutes of Agreement of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 concerning Approval for Appointment of Officials at Corporate Secretary and Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Subject of Training/Competency Development	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Pelatihan ICSA CG ICSA CG Training	28-30 Juni 2021 June 28-30, 2021	PMLI
Pelatihan *Coaching Style Leadership* BOD-1 Tahun 2021 *Batch* 2 BOD Leadership Style Coaching Training – 1 batch 2 of 2021	10-11 Mei 2021 May 10-11, 2021	PMLI
Workshop Effective Compliance Standard & Digital Transformation Workshop Effective Compliance Standard & Digital Transformation	5 - 6 April 2021 April, 5-6 2021	PMLI

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Subject of Training/Competency Development	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Business Leader Upskill Tahun 2021 *Batch* 2 Business Leader Upskill Batch 2 of 2021	26-27 Maret 2021 March 26-27, 2021	PMLI

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT PERUSAHAAN TAHUN 2021

Pelaksanaan tugas Sekretariat Perusahaan selama tahun 2021 yaitu:

1. Departemen Komunikasi Korporasi
   a. Menerbitkan majalah internal berbasis *web* setiap bulan;
   b. Mengelola informasi internal dan eksternal;
   c. Membuat kalender dan agenda perusahaan;
   d. Memproduksi cinderamata perusahaan;
   e. Mendokumentasikan kegiatan perusahaan;
   f. Mengelola kegiatan internal dan eksternal;
   g. Menerbitkan iklan;
   h. Partisipasi *sponsorship* dan bentuk partisipasi lainnya;
   i. Partisipasi dalam kegiatan *award*;
   j. Pembelian surat kabar; dan
   k. Konsultasi kehumasan.

2. Departemen Tanggung Jawab Sosial
   a. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan dan/atau CSR;
   b. Menyusun RKAP PKBL dan CSR tahun 2021;
   c. Menyusun Laporan *Audited* PKBL dan CSR tahun 2020.;
   d. Melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di Pelabuhan Kijing; dan
   e. Melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN untuk Indonesia.

3. Departemen Protokoler dan TU Direksi
   a. Melaksanakan rapat Direksi;
   b. Melaksanakan rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi;
   c. Melaksanakan administrasi dan keuangan kegiatan operasional Dewan Komisaris dan Direksi;
   d. Koordinasi kegiatan perusahaan dengan para protokol, sekretaris dan pihak eksternal;
   e. Melaksanakan pelatihan atau *workshop* Direksi; dan
   f. Memenuhi kelengkapan Direksi terkait citra perusahaan.
   g. Menyusun Peraturan Direksi tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bagi Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   h. Menyusun Peraturan Direksi tentang Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan
   i. Menyusun Peraturan Direksi tentang Hak Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

CORPORATE SECRETARY DUTIES IMPLEMENTATION IN 2021

In 2021, the Corporate Secretary has carried out the following duties:

1. Corporate Communications Department
   a. Publish a web-based internal magazine every month;
   b. Manage internal and external information;
   c. Create company calendar and agenda;
   d. Produce company souvenirs;
   e. Documenting company activities;
   f. Manage internal and external activities;
   g. Publish ads;
   h. Sponsorship participation and other forms of participation;
   i. Participation in award activities;
   j. Purchase of newspapers; and
   k. Public relations consultation.

2. Social Responsibility Department
   a. Distribution of Community Development and/or CSR Program Funds;
   b. Prepare RKAP PKBL and CSR in 2021;
   c. Prepare Audited PKBL and CSR Report for 2020;
   d. Carry out social and environmental responsibility programs at Kijing Port; and
   e. Carry out SOE social and environmental responsibility programs for Indonesia.

3. Protocol and TU Directors Department
   a. Conducting Board of Directors meeting;
   b. Carry out coordination meetings between Board of Commissioners and Board of Directors;
   c. Carry out administrative and financial operations of Board of Commissioners and Board of Directors;
   d. Coordinating company activities with protocols, secretaries and external parties;
   e. Carry out training or workshops for Board of Directors;
   f. Fulfilling the completeness of Board of Directors regarding the company's image;
   g. Prepare Board of Directors Regulation concerning the Appointment of Daily Executives for Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   h. Prepare Board of Directors Regulation regarding the Official Travel of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and
   i. Prepare Board of Directors Regulation concerning the Rights of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero.

4. Departemen Hubungan Lembaga, Tata Kelola dan Investor
   a. Melaksanakan *assessment* GCG;
   b. Menyusun dan mencetak *Annual Report* dan *Sustainability Report* tahun 2020;
   c. Melakukan *survey* pemahaman GCG;
   d. Melakukan penandatanganan kode etik dan pakta integritas;
   e. Optimalisasi implementasi GCG dan pemenuhan *Area of Improvement* (AoI) GCG;
   f. Melakukan pengendalian gratifikasi;
   g. Memperoleh penghargaan bidang GCG Tahun 2021;
   h. Melakukan penetapan, *monitoring*, dan evaluasi atas kebijakan *Whistleblowing System* (WBS);
   i. Tindaklanjut pencegahan Pelabuhan Bersih;
   j. Sosialisasi penerapan *corporate governance*;
   k. *Review* pedoman GCG;
   l. *Benchmark* GCG Perusahaan;
   m. Mengelola hubungan lembaga dan *issue* strategis lembaga;
   n. Melaksanakan kegiatan kunjungan kerja kementerian, *sharing knowledge and port visit* lembaga;
   o. Melaksanakan pendampingan RDP dan kunjungan kerja DPR RI ke cabang pelabuhan;
   p. Sinergi antara perusahaan dengan pemerintah/lembaga lainnya;
   q. Melaksanakan forum BOC anak perusahaan dan *shareholders* dengan Direktur Utama Perusahaan; dan
   r. Keanggotaan aktif pada organisasi internasional.

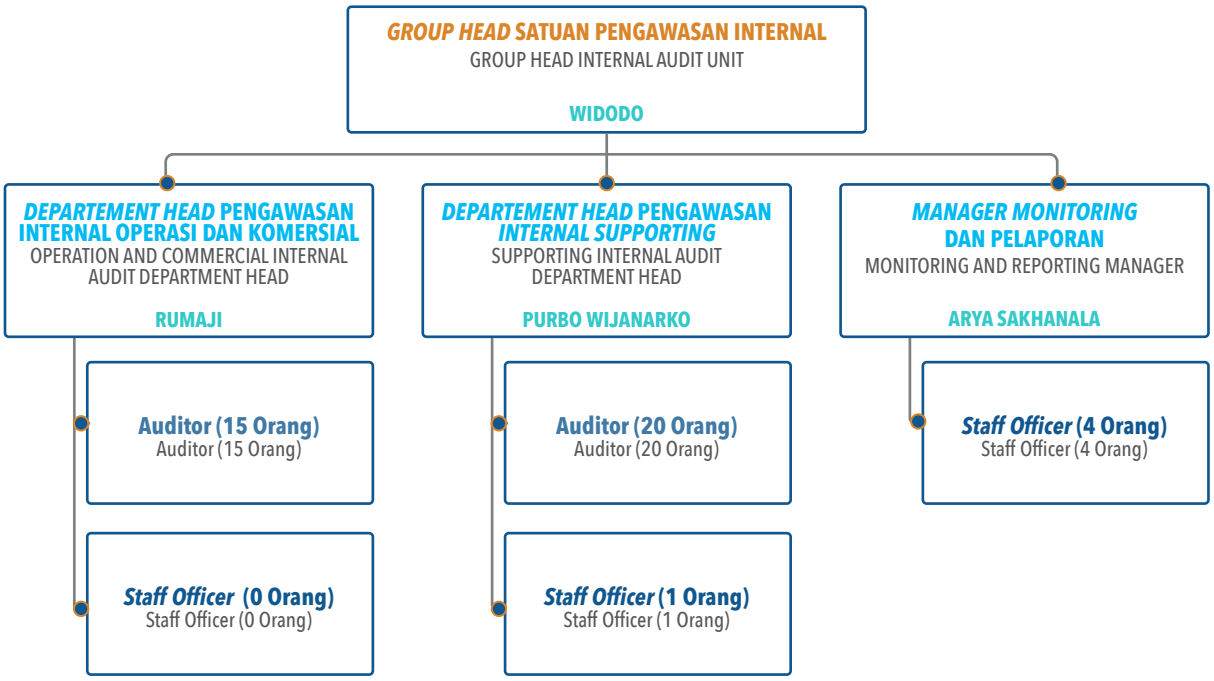
4. Institutional Relations, Governance and Investors Department
   a. Carry out GCG assessment;
   b. Prepare and print the 2020 Annual Report and Sustainability Report;
   c. Conducting the GCG understanding survey;
   d. Signing the code of conduct and integrity pact;
   e. Optimizing GCG implementation and fulfilling GCG Areas of Improvement (AoI);
   f. Carry out gratuity control;
   g. Receive award in the field of GCG in 2021;
   h. Establishing, monitoring, and evaluating the Whistleblowing System (WBS) policy;
   i. Follow-up on the prevention of Clean Port;
   j. Socialization of the implementation of corporate governance;
   k. Review of Code of GCG;
   l. Corporate GCG Benchmarks;
   m. Manage institutional relations and institutional strategic issues;
   n. Carry out ministry work visits, knowledge sharing and institutional port visits;
   o. Carry out RDP assistance and DPR RI working visits to port branches;
   p. Synergy between companies and government/other institutions;
   q. Organizing the BOC forum for subsidiaries and shareholders with the Company's President Director; and
   r. Active membership in international organizations.

SATUAN PENGAWASAN INTERN

STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN INTERN

INTERN AUDIT UNIT

INTERN AUDIT ORGANIZATIONAL STRUCTURE



KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Pengawasan Intern merupakan bagian dari manajemen yang independen dan dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern dan secara struktur bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Auditor Internal yang ditugaskan di Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.

INTERN AUDIT UNIT POSITION IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Internal Audit Unit is part of independent management and is led by the Head of Internal Audit I Unit and is structurally responsible directly to the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Internal Auditor assigned to the Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of Internal Audit Unit.

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

HEAD OF INTERN AUDIT UNIT PROFILE



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Semarang, 28 September 1969/52 tahun Semarang, September 28, 1969/52 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1993) • Magister Manajemen dari Universitas Budi Luhur (2001) • Magister I*nfrastructure Managemen*t dari Institut Teknologi Bandung (2005) • *Master Shipping and Transportation* dari Netherlands Maritime University (2013) • Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1993) • Master of Management from Budi Luhur University (2001) • Master in Infrastructure Management from Bandung Institute of Technology (2005) • Master of Shipping and Transportation from Netherlands Maritime University (2013)
Sertifikasi Certification	• *Qualified Internal Auditor*
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Sumber Daya Manusia PT Jakarta International Container Terminal (Juli 2020-Oktober 2021) • EVP Satuan Pengawasan Internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (September 2016-Juli 2020) • Kepala Biro Pengadaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (April 2014-Agustus 2016) • *Senior Manager* Perencanaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Oktober 2013-Maret 2014) • Staf Madya Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Agustus 2011-September 2013) • *Manager* Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Oktober 2019-Agustus 2011) • Human Resources Director of PT Jakarta International Container Terminal (July 2020 – October 2021) • EVP of Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (September 2016 – July 2020) • Head of Procurement Bureau of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (April 2014 – August 2016) • Senior Manager of Planning of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (October 2013 - March 2014) • Associate Staff Director of Human Capital of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (August 2011 - September 2013) • Technical Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (October 2019 – August 2011)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021. Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERN AUDIT UNIT COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

NO	NAMA PEKERJA NAME OF EMPLOYEE	KELAS JABATAN JOB CLASS	PROGRAM PELATIHAN/DIKLAT TRAINING/EDUCATION PROGRAM
1	Widodo	3	1 Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) | National Internal Audit Seminar (SNIA)
			2 *Review* dan sertifikasi CIDA) | CIDA review and certification
			3 *Review* dan sertifikasi CISA) | CISA review and certification

NO	NAMA PEKERJA NAME OF EMPLOYEE	KELAS JABATAN JOB CLASS	PROGRAM PELATIHAN/DIKLAT TRAINING/EDUCATION PROGRAM
2	Rumaji	3	1 Seminar Nasional Internal Audit (SNIA)) | National Internal Audit Seminar (SNIA)
			2 *Review* dan sertifikasi CIDA) | CIDA review and certification
			3 *Review* dan sertifikasi CISA) | CISA review and certification
3	Purbo Wijanarko	6	1 Seminar Nasional Internal Audit (SNIA)) | National Internal Audit Seminar (SNIA)
			2 *Review* dan sertifikasi CIDA) | CIDA review and certification
			3 *Review* dan sertifikasi CISA) | CISA review and certification
4	Arya Sakhanala	8	1 *Review* dan sertifikasi CRMA (Certified Risk Management)) | CRMA (Certified Risk Management) review and certification
			2 *Review* dan sertifikasi CISA) | CISA review and certification
			3 *Review* dan sertifikasi CACP (Certification in Audit Committee Practices)) | CACP (Certification in Audit Committee Practices) review and certification
5	Yan Berhen Pangondian Sitompul	7	1 Audit Investigasi) | Investigation Audit
			2 *Continuous Auditing/Monitoring*
			3 Data Analitik Untuk Auditor Internal) | Data Analytics For Internal Auditors
6	Rosseno Ratman	9	1 Psikologi dan Komunikasi Audit) | Psychology and Communication of Audit
			2 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*)
			3 Data Analitik untuk Auditor Internal) | Data Analytics For Internal Auditors
7	Rery Indra Kusuma	8	1 *Idea scripts for analysis*)
			2 *Review* dan sertifikasi CIDA) | CIDA review and certification
			3 *Review* dan sertifikasi CISA) | CISA review and certification
8	Ibnu Sukarma	8	1 Psikologi dan Komunikasi Audit) | National
			2 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*) | Psychology and Communication of Audit
			3 Data Analitik untuk Auditor Internal)
9	Aldimas Kharunia Zaman	9	1 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*)
			2 *The Impact of Technology Innovation for Internal Audit*)
			3 Data Analitik untuk Auditor Internal) | Data Analytics For Internal Auditors
10	Suwondo Widjatmoko	7	1 *Integrated Risk Based Internal Auditing*
			2 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*
			3 Audit Investigasi | Investigation Audit
11	Tanjung Halomoan Ambarita	8	1 Psikologi dan Komunikasi Audit | Psychology and Communication of Audit
			2 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*
			3 Data Analitik untuk Auditor Internal | Data Analytics For Internal Auditors
12	Deski Rizaldi	9	1 Psikologi dan Komunikasi Audit | Psychology and Communication of Audit
			2 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*
			3 Data Analitik untuk Auditor Internal | Data Analytics For Internal Auditors
13	Ramdhana Feri Martin	9	1 Psikologi dan Komunikasi Audit | Psychology and Communication of Audit
			2 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*
			3 Data Analitik untuk Auditor Internal | Data Analytics For Internal Auditors
14	Fitri Herayati Nasution	8	1 Psikologi dan Komunikasi Audit | Psychology and Communication of Audit
			2 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*
			3 Data Analitik untuk Auditor Internal | Data Analytics For Internal Auditors
15	Donny Simon Mayman Hutasoit	7	1 Tingkat Dasar | Basic Level
			2 Tingkat Lanjutan | Advanced Level
			3 Tingkat Manajerial | Managerial Level
16	Muhammad Badrum	8	1 Tingkat Lanjutan | Advanced Level
			2 Tingkat Manajerial | Managerial Level
			3 *Continuous Auditing/Monitoring*
17	Rustini	8	1 Tingkat Lanjutan | Advanced Level
			2 Tingkat Manajerial | Managerial Level
			3 Psikologi dan Komunikasi Audit | Psychology and Communication of Audit
18	Sugiarto	6	1 Tingkat Lanjutan | Advanced Level
			2 Tingkat Manajerial | Managerial Level
			3 Audit Investigasi | Investigation Audit
19	Abd. Rachman	9	1 Tingkat Lanjutan | Advanced Level
			2 Tingkat Manajerial | Managerial Level
			3 *Continuous Auditing/Monitoring*
20	Budi Herlambang	8	1 Sertifikasi *Certified Practitioner of Internal Audit*
			2 Data Analitik untuk Auditor Internal | Data Analytics For Internal Auditors
			3 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*

NO	NAMA PEKERJA NAME OF EMPLOYEE	KELAS JABATAN JOB CLASS	PROGRAM PELATIHAN/DIKLAT TRAINING/EDUCATION PROGRAM
21	Khrismayanti Dewi	8	1 Audit Investigasi | Investigation Audit
			2 *Continuous Auditing/Monitoring*
			3 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*
22	Septa Andreas Sitepu	8	1 Audit Investigasi | Investigation Audit
			2 Audit Pengadaan Barang/Jasa | Procurement Audit
			3 Data Analitik Untuk Auditor Internal | Data Analytics For Internal Auditors
23	Holly Tantyaka Yutha Keswara	8	1 Psikologi dan Komunikasi Audit | Psychology and Communication of Audit
			2 *Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor*
			3 Data Analitik untuk Auditor Internal | Data Analytics For Internal Auditors
24	Mohamad Rizki Kurniawan	8	1 *Fraud Risk Management Program*
			2 Psikologi dan Komunikasi Audit | Psychology and Communication of Audit
			3 Data Analitik untuk Auditor Internal | Data Analytics For Internal Auditors
25	Yulias Caesar Sihombing	7	1 *Idea scripts for analysis*
			2 *Review* dan sertifikasi CIDA | CIDA review and certification
			3 *Review* dan sertifikasi CISA | CISA review and certification

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian auditor internal dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat dari Kepala Satuan Pengawasan Intern dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF HEAD OF INTERN AUDIT UNIT

Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners. The President Director may dismiss the Head of Internal Audit Unit with the Board of Commissioners' approval. The appointment and dismissal of the internal auditor is carried out by taking into account the opinion of Head of Internal Audit Unit and meeting the requirements set by the Company.

INTERNAL AUDIT *CHARTER*

Dalam mewujudkan tugasnya secara *professional*, kompeten, independen dan objektif, unit Satuan Pengawasan Intern mengacu pada Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit *Charter*). Adapun isi Piagam Satuan Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) yaitu:

- Pendahuluan;
- Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Strategi;
- Ruang Lingkup;
- Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan, dan Akuntabilitas;
- Kode Etik;
- Pengorganisasian;
- Program Asuransi dan Peningkatan Kualitas SPI;
- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- Pelaporan dan *Monitoring;*
- Komunikasi SPI dengan Pihak Lain;
- Hubungan Kerja dengan Pihak Lain;
- Evaluasi Piagam Satuan Pengawasan Intern; dan
- Penutup.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In carrying out its duties in a professional, competent, independent and objective manner, the Internal Audit Unit refers to the Internal Audit Charter. The contents of Internal Audit Charter are:

- Introduction;
- Vision, Mission, Goals, Values and Strategy;
- Scope;
- Functions, Duties, Responsibilities, Authority and Accountability;
- Code of Conduct;
- Organization;
- IAU Quality Assurance and Improvement Program;
- Annual Supervision Work Program (PKPT);
- Reporting and Monitoring;
- IAU Communication with Other Parties;
- Working Relations with Other Parties;
- Evaluation of the Internal Audit Unit Charter; and
- Closing.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

1. Mengelola kegiatan pengawasan sesuai kode etik melalui jasa *assurance, probity* dan *consulting,* serta audit khusus dan audit objek tertentu lainnya atas perintah Direktur Utama di seluruh unit kerja di Perseroan, anak perusahaan dan afiliasinya;
2. Menguji, mengevaluasi, menilai dan melaporkan pelaksanaan pengawasan dan sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan sesuai dengan standar audit;

INTERNAL AUDIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Manage supervisory activities according to the code of conduct through assurance, probity and consulting services, as well as special audit and audit of certain other objects on orders from the President Director in all work units in the Company, its subsidiaries and affiliates;
2. Test, evaluate, assess and report the implementation of supervision and risk management system and corporate governance in accordance with auditing standards;

3. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan pengawasan intern berbasis risiko *(Risk Based Audit*) dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran;
4. Memberikan rekomendasi dan saran yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta melaporkan hasil pengawasan intern kepada *stakeholder* Satuan Pengawasan Intern;
5. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit oleh auditor internal maupun eksternal dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit;
6. Melakukan pendampingan kepada auditor eksternal dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan menjadi fasilitator bagi auditor eksternal dalam berinteraksi dengan unit-unit kerja di Perusahaan;
7. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pelaporan secara periodik atas kegiatan SPI kepada *stakeholder* Satuan Pengawasan Intern;
8. Mengembangkan teknologi yang terintegrasi untuk perencanaan, pelaksanaan, *monitoring,* dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan di Satuan Pengawasan Intern;
9. Menjaga profesionalitas auditor dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi yang diperlukan;
10. Melakukan *assessment* untuk mengevaluasi mutu dari Satuan Pengawasan Intern secara periodik; dan
11. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar terciptanya sinergis atas kegiatan Satuan Pengawasan Intern.

KEWENANGAN INTERNAL AUDIT

1. Unit SPI memiliki akses tak terbatas ke seluruh *auditee* di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap semua fungsi, catatan, dokumen, properti, personel, laporan hasil audit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya dan bertanggung jawab atas kerahasiaan catatan dan informasi tersebut;
2. Kepala SPI akan memastikan bahwa aktivitas audit internal bebas dari kondisi yang mengancam kemampuan audit internal untuk melakukan pekerjaannya dalam keadaan yang tidak memihak. Jika independensi atau objektivitas audit internal terganggu secara *Fact or Appearance,* Kepala SPI akan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
3. Jika sebelumnya Kepala SPI memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar audit internal, maka harus dibuat ketentuan untuk membatasi terjadinya penurunan independensi dan obyektivitas;
4. Menyusun dan merubah kebijakan pengawasan internal, antara lain pedoman, prosedur dan ketentuan lainnya terkait pekerjaan pengawasan internal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar tercipta pengawasan yang terintegrasi;

3. Develop and implement an annual risk-based internal control work program (Risk Based Audit) and submit it to the President Director and the Board of Commissioners cq the Audit Committee for consideration and advice;
4. Provide objective recommendations and suggestions on audited activities = in all work units within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as well as report the results of internal audit to stakeholders of Internal Audit Unit;
5. Monitor, evaluate and report the results of monitoring on the follow-up to recommendations of audit results by internal and external auditors, and the results are reported to the President Director and a copy is submitted to the Board of Commissioners cq the Audit Committee;
6. Provide assistance to external auditors by providing the required information and become a facilitator for external auditors in interacting with work units in the Company;
7. Communicating, coordinating and reporting periodically about IAU's activities to stakeholders of Internal Audit Unit;
8. Develop integrated technology for planning, implementation, monitoring, and reporting of all activities in the Internal Audit Unit;
9. Maintain the professionalism of the auditors by providing sufficient knowledge, skills and experience as well as the necessary certifications;
10. Conduct an assessment to evaluate the quality of Internal Audit Unit periodically; and
11. Provide guidance and coordination with the Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create synergies on the activities of Internal Audit Unit.

INTERNAL AUDIT AUTHORITIES

1. Internal Audit Unit has unlimited access to all auditees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to all functions, records, documents, property, personnel, audit reports related to the implementation of their works and is responsible for the confidentiality of such records and information;
2. Head of Internal Audit will ensure that the internal audit activity is free from conditions that threaten the ability of internal audit to carry out its work in an impartial manner. If the independence or objectivity of the internal audit is impaired by Fact or Appearance, the Head of IAU will report to the President Director and the Board of Commissioners;
3. If previously the Head of Internal Audit had roles and/or responsibilities other than internal audit, provisions must be made to limit the decrease in independence and objectivity;
4. Develop and change internal control policies, including guidelines, procedures and other provisions related to internal control work within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create integrated supervision;

5. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi penugasan, menetapkan objek penugasan, menentukan ruang lingkup penugasan, serta menetapkan teknik penugasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan;
6. Melakukan optimalisasi atas sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pekerjaan/pemeriksaan antara lain berasal dari auditor di dalam ataupun di luar lingkungan Perusahaan;
7. Mengusulkan penugasan tambahan terkait *Assurance, probity, consulting*, audit khusus atau audit lainnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit jika terdapat hal yang terindikasi akan mengganggu pencapaian tujuan perusahaan;
8. Melakukan peningkatan kualitas melalui penggunaan dan penerapan teknologi terintegrasi terkait pekerjaan pengawasan internal yang akan digunakan oleh Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
9. Menentukan pola pembinaan, *monitoring* dan koordinasi kepada Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar terciptanya pengawasan internal yang akan terintegrasi;
10. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit;
11. Melarang perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan
12. Menolak terhadap penugasan di luar fungsi, tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern, yaitu:
    a. Pengambilan keputusan dan menjalankan fungsi operasional secara langsung atau tidak langsung;
    b. Memulai dan menyetujui transaksi yang tidak berkaitan dengan Satuan Pengawasan Intern;
    c. Memberikan perintah secara langsung kepada pekerja di luar personil Satuan Pengawasan Intern;
    d. Bertanggung jawab terhadap personil, departemen atau aktivitas yang menjadi objek pemeriksaan;
    e. Memberhentikan karyawan atau membubarkan departemen terkait dengan temuan audit;
    f. Menyusun dan menjalankan prosedur, sistem atau aktivitas operasional yang menjadi milik obyek perusahaan; dan
    g. Melakukan pelaksanaan audit yang sedang ditangani oleh aparat hukum negara Republik Indonesia (RI).

5. Allocating resources, determining the frequency of assignments, determining the object of assignment, determining the scope of assignment, and determining the assignment techniques needed to achieve the assignment objectives;
6. Optimizing the resources used in work/audit activities, including from internal or external auditors;
7. Propose additional assignments related to assurance, probity, consulting, special audit or other audits to the President Director and the Board of Commissioners cq. The Audit Committee if there are things that are indicated will interfere with the achievement of company goals;
8. Improve quality through the use and application of integrated technology related to internal control work that will be used by the Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
9. Determine the pattern of guidance, monitoring and coordination to the Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create an integrated internal control;
10. Have access to communicate directly with the President Director and the Board of Commissioners cq the Audit Committee;
11. Prohibit the dual duties and positions of auditors and implementers who serve in the Internal Audit Unit from carrying out company operational activities within PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and
12. Refused to assignments other than the functions, duties and responsibilities of Internal Audit Unit, namely:
    a. Decision making and carrying out operational functions directly or indirectly;
    b. nitiate and approve transactions that are not related to the Internal Audit Unit;
    c. Give orders directly to employees outside the Internal Audit Unit personnel;
    d. Responsible for personnel, departments or activities that are the object of audit;
    e. Terminate employees or dissolve departments related to audit findings;
    f. Develop and carry out procedures, systems or operational activities that belong to the object of the company; and
    g. Carry out audit that is being handled by the state legal apparatus of the Republic of Indonesia (RI).

KOMPOSISI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

COMPOSITION AND PROFESSIONAL CERTIFICATION OF INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Widodo	*Group Head*	QIA
2	Rumaji	DHPI Operasi & Komersial DHPI Operations & Commercial	Auditor ISO ISO Auditor
3	Yan Berhen Pangondian Sitompul	Auditor Madya Associate Auditor	QIA
4	Rosseno Ratman	Auditor Pratama Senior Auditor	Lanjutan Advanced
5	Rery Indra Kusuma	Auditor Muda Junior Auditor	QIA

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
6	Ibnu Sukarma	Auditor Muda Junior Auditor	QIA
7	Aldimas Kharunia Zaman	Auditor Pratama Senior Auditor	Lanjutan Advanced
8	Suwondo Widjatmoko	Auditor Madya Associate Auditor	QIA
9	Tanjung Halomoan Ambarita	Auditor Pratama Senior Auditor	QIA
10	Deski Rizaldi	Auditor Pratama Senior Auditor	Lanjutan 1 Advanced 1
11	Ramdhana Feri Martin	Auditor Pratama Senior Auditor	QIA
12	Fitri Herayati Nasution	Auditor Pratama Senior Auditor	QIA
13	Donny Simon Mayman Hutasoit	Auditor Utama Main Auditor	- PIA (AAI) - Auditor Internal 3 - Akuntansi dan Keuangan (PIA) - Internal Auditor 3 - Accounting and Finance (PIA)
14	Muhammad Badrum	Auditor Madya Associate Auditor	Dasar Audit (PPAK) Basics of Audit (PPAK)
15	Rustini	Auditor Madya Associate Auditor	DDA (PPAK)
16	Sugiarto	Auditor Madya Associate Auditor	Dasar Audit (PPAK) -Diklat Audit Lanjutan Operasional Operational Advanced Audit Training
17	Abd. Rachman	Auditor Madya Associate Auditor	-DDA -Audit Operasional Operational Audit
18	Purbo Wijanarko	DHPI *Supporting*	QIA
19	Budi Herlambang	Auditor Muda Junior Auditor	QIA
20	Khrismayanti Dewi	Auditor Muda Junior Auditor	QIA
21	Septa Andreas Sitepu	Auditor Muda Junior Auditor	QIA
22	Holly Tantyaka Yutha Keswara	Auditor Muda Junior Auditor	-QIA -Ahli Pengadaan Nasional National Procurement Expert
23	Mohamad Rizki Kurniawan	Auditor Muda Junior Auditor	QIA
24	Yulias Caesar Sihombing	Auditor Muda Junior Auditor	-QIA -CIA -CA -CPA
25	Kurniawan Haryo Yudanto	Auditor Pratama Senior Auditor	QIA
26	Baihaqi	Auditor Pratama Senior Auditor	QIA
27	Darul Ikhran Angkasa Batubara	Auditor Pratama Senior Auditor	Tingkat Dasar Basic Level
28	Samsul	Auditor Pratama Senior Auditor	QIA
29	Ervina Lady Martha Simatupang	Auditor Pratama Senior Auditor	QIA
30	Rizaldy Hasian Harahap	Auditor Madya Associate Auditor	-QIA -PII
31	Sigit Poernomo	Auditor Utama Main Auditor	-Certified Accountant -Audit Operasional -Audit Kecurangan Operational Audit -Fraud Audit

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
32	Pandita Wisna Patria	Auditor Muda Junior Auditor	-Auditor Muda (LSPAI) -Junior Auditor (LSPAI)
33	Triana Usman	Auditor Utama Main Auditor	PIA (AAI)
34	Ranisa Trinanda Septira	*Senior Officer*	-CMA
35	Henny Nur Aini	Auditor Pratama Senior Auditor	-Auditor Madya (LSPAI) -Sertifikat *Supervisor* (Dale Carnegie & Associates) Associate Auditor (LSPAI) -Supervisor Certificate (Dale Carnegie & Associates)
36	Pramudito	Auditor Pratama Senior Auditor	- PIA (PPAK) -Sertifikat AK3 Dasar (Depnaker) Basic AK3 Certificate (Ministry of Manpower)
37	Jufrianto Siahaan	Auditor Muda Junior Auditor	-Auditor Internal (LSPAI) Internal Auditor (LSPAI)
38	Arendra Haryo Prabowo	Auditor Madya Associate Auditor	- Auditor Internal 3 Akuntansi dan Keuangan (PIA) Internal Auditor 3 Accounting and Finance (PIA)
39	Jusak Hadi Winarto	Auditor Pratama Senior Auditor	CRMO
40	Arya Sakhanala	*Manager Monitoring* & Pelaporan Pengendalian Internal Internal Control Monitoring & Reporting Manager	-QIA -CA Indonesia (IAI) -CMMA (TICMA)
41	Indri Andriani	*Senior Officer Monitoring* & Pelaporan Pengendalian Internal Internal Control Monitoring & Reporting Senior Officer	-
42	Fransisca Dina K.	*Senior Officer Monitoring* & Pelaporan Pengendalian Internal Internal Control Monitoring & Reporting Senior Officer	Lanjutan Advanced
43	Mohamad Jamil	*Senior Officer Monitoring* & Pelaporan Pengendalian Internal Internal Control Monitoring & Reporting Senior Officer	-

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
44	Arief Budiman	*Senior Officer* Unit Pendukung *Monitoring* & Pelaporan Pengendalian Internal Internal Control Monitoring & Reporting Supporting Unit Senior Officer	Dasar Audit (PPAK)

KODE ETIK AUDITOR

AUDITOR'S CODE OF ETHICS

Prinsip Dasar Basic Principles	Aturan Perilaku Behavioral Guidance
Integritas Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan dengan membangun kepercayaan untuk membuat pendapat (*judgment* yang handal). **Integrity** Integrity of Internal auditors build confidence by building trust to generate reliable opinion (judgment).	• Bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab; • Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sebagaimana yang diatur oleh hukum dan profesi; dan • Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan apapun yang mencemarkan profesi Auditor Internal atau Perusahaan. Menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan yang etis dan tela sesuai dengan hukum (*legitimate*). • Work honestly, diligently and responsibly; • Comply with the law and disclose information as required by law and the profession; and • Not involved in activities that violate the law or any activities that defame the profession of Internal Auditor or the Company. Respect and play a role in achieving the company's goals that are ethical and in accordance with the law (legitimate).
Objektivitas Auditor Internal menunjukkan objektivitas yang tinggi dalam memperoleh mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor Internal melakukan penilaian secara seimbang dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain, dalam membuat pendapat (*judgement*). **Objectivity** Internal auditors demonstrate high objectivity in obtaining, evaluating and communicating information about the audited activity or process. Internal Auditors perform a balanced assessment and are not influenced by personal interests or others, in making an opinion (judgment).	• Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengurang atau dianggap mengurangi objektivitas Auditor Internal dalam melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; • Tidak menerima apapun yang dapat melemahkan atau dianggap melemahkan pertimbangan *professional*; dan • Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang diperiksa. • Not involved in activities that may reduce or be deemed to reduce the objectivity of Internal Auditor in conducting an assessment, including in activities or relationships that may cause a conflict of interest; • Do not accept anything that could undermine or be deemed to impair professional judgment; and • Disclosing all known material facts, which if not disclosed can cause distortion of reporting on the activities being examined.
Kerahasiaan Auditor Internal menghormati nilai dan kepentingan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut. **Confidentiality** Internal auditors respect the value and the importance of information received and do not disclose such information without proper authorization unless there is a legal or professional obligation to disclose the information.	• Bertindak hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan tugas; dan • Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu pencapaian sasaran perusahaan yang etis dan berlegitimasi. • Act with caution in using and safeguarding the information obtained during the execution of tasks; and • Do not use information for personal gain or in any way that is against the law or interferes with the achievement of legitimate and ethical company goals.
Kompetensi Auditor internal menerapkan pengetahuan kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. **Competence** Internal auditors apply the knowledge, skills and experience required in providing internal audit services.	• Hanya terlibat dalam pemeriksaan apabila memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut; • Melaksanakan fungsi pengawasan intern sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan pengelolaan SPI; dan • Secara berkesinambungan meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pekerjaan; bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan standar *professional* yang berlaku. • Only engage in audit if they have the knowledge, skills and experience required for the audit; • Carry out the internal control function at least in accordance with the requirements for IAU management; and • Continuously improve skills as well as effectiveness and quality of work; act sincerely and in accordance with the method of carrying out the work and applicable professional standards.

Prinsip Dasar Basic Principles	Aturan Perilaku Behavioral Guidance
Perilaku Profesional Auditor Internal mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi. **Professional Behavior** Internal Auditors comply with applicable regulations and avoid any behavior that can reduce confidence in the profession.	• Melaksanakan fungsi pengawasan intern sesuai dengan prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku; • Menghindari perilaku apapun yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi auditor; • Dilarang menerima setiap pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan pekerjaannya baik dari dalam maupun dari luar perusahaan; • Harus mematuhi hukum dan menjunjung tinggi norma *professional* Auditor Internal; dan • Dilarang merangkap tugas dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, anak perusahaan maupun perusahaan terafiliasi bagi auditor dan pelaksana yang duduk dalam unit internal audit. • Carry out the internal control function in accordance with applicable procedures, provisions and regulations; • Avoid any behavior that can reduce confidence in the auditor profession; • Forbidden to accept any gifts in any form from other parties related to their work, both inside and outside the company; • Must comply with the law and uphold the professional norms of Internal Auditor; and • Prohibited to hold concurrent duties and positions in the implementation of the company's operational activities, subsidiaries and affiliated companies for auditors and executives who serve in the internal audit unit.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2021

Pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021, *Group* Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mempunyai beberapa obyek penugasan, yaitu audit Cabang Pelabuhan, audit Kantor Pusat, audit Anak Perusahaan, audit khusus/tematik dan jasa konsultansi pada Regional I (eks Pelindo I), Regional II (eks Pelindo II), Regional III (eks Pelindo III) dan Regional IV (eks Pelindo IV).

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 *Group* Satuan Pengawasan Intern telah melaksanakan 49 (empat puluh sembilan) audit rutin, 4 (empat) audit khusus dan 6 (enam) kegiatan jasa konsultansi dengan rincian sebagai berikut:

1. Regional I (eks Pelindo I)
   Pada regional I (eks Pelindo I) telah dilaksanakan 8 (delapan) penugasan audit rutin yaitu 8 (delapan) Cabang Pelabuhan dan 1 (satu) audit khusus serta 5 (lima) kegiatan jasa konsultansi, dengan perincian sebagai berikut:
   a. Audit Rutin pada 8 (delapan) Cabang Pelabuhan yang telah diselesaikan yaitu: Sibolga, Tanjung Balai Karimun, Tanjungpinang, Sei Pakning, Dumai, Gunung Sitoli, Kuala Tanjung dan Pekanbaru;
   b. 1 (satu) Audit khusus yaitu audit khusus pada unit galangan kapal; dan
   c. 5 (lima) kegiatan jasa konsultansi yaitu Reviu Biaya Pemeliharaan, Reviu Program IGMT, Reviu Kinerja UGK 2017 s.d 2020 (dalam rangka reorganisasi), Reviu Kinerja PT Prima multi Peralatan Tahun 2019 dan 2020 dan Reviu Pekerjaan Sheetpile di Phase 1.

BRIEF REPORT OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IN 2021

In the 2021 Annual Audit Work Program (PKPT), PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Group Internal Audit Unit (IAU) has several assignment objects, namely Port Branch audit, Head Office audit, Subsidiary audit, special/thematic audits and consulting services on Regional I (ex-Pelindo I), Regional II (ex-Pelindo II), Regional III (ex-Pelindo III) and Regional IV (ex-Pelindo IV).

As of the third quarter of 2021, the Group Internal Audit Unit has carried out 49 (forty nine) routine audits, 4 (four) special audits and 6 (six) consulting services activities with the following details:

1. Regional I (ex Pelindo I)
   In regional I (ex Pelindo I), 8 (eight) routine audit assignments have been carried out, namely 8 (eight) Port Branches and 1 (one) special audit as well as 5 (five) consulting service activities, with the following details:
   a. Routine Audits at 8 (eight) Port Branches that have been completed: Sibolga, Tanjung Balai Karimun, Tanjungpinang, Sei Pakning, Dumai, Gunung Sitoli, Kuala Tanjung and Pekanbaru;
   b. 1 (one) special audit: special audit on the shipyard unit; and
   c. 5 (five) consulting service activities: Maintenance Cost Review, IGMT Program Review, UGK Performance Review 2017 to 2020 (in the context of reorganization), PT Prima Multi Equipment Performance Review 2019 and 2020 and Sheetpile Work Review in Phase 1.

2. Regional II (eks Pelindo II)
   Pada regional II (eks Pelindo II) telah dilaksanakan 7 (tujuh) penugasan audit rutin yaitu Kantor Pusat dan 6 (enam) Cabang Pelabuhan, 12 (dua belas) audit performansi dan kepatuhan Anak Perusahaan, 1 (satu) audit Khusus, dan 1 (satu) kegiatan Jasa Konsultansi dengan perincian sebagai berikut:
   a. Audit Rutin pada 6 (enam) Cabang Pelabuhan yang telah diselesaikan yaitu: Bengkulu, Jambi, Tanjung Pandan, Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan Cirebon;
   b. Audit performansi dan kepatuhan pada 12 (dua belas) Anak Perusahaan yang telah dilaksanakan yaitu: PT EDII, PT ILCS, PT PMLI, PT EPI, KSO Koja, PT MTI, PT PPI, PT PII, PT Rukindo, PT JPPI, PT PTP, dan PT IPC TPK;
   c. 1 (satu) audit khusus terhadap penyelesaian proyek pengerukan pada PT Rukindo; dan
   d. 1 (satu) jasa konsultansi pada Bidang SDM.

3. Regional III (eks Pelindo III)
   Pada regional III (eks Pelindo III) telah dilaksanakan 5 (lima) penugasan audit terpadu dan 2 (dua) audit tematik dengan perincian sebagai berikut:
   a. 5 (lima) Audit terpadu yang telah diselesaikan yaitu: Regional Bali Nusa Tenggara, Regional Jawa Tengah, Regional Jawa Timur, Regional Kalimantan dan Kantor Pusat; dan
4. Regional IV (eks Pelindo IV)
   Pada regional IV (eks Pelindo IV) telah dilaksanakan 17 (tujuh belas) penugasan audit rutin operasional yang telah diselesaikan yaitu: Cabang Gorontalo, Manado, Bitung, Terminal Petikemas Bitung, Balikpapan, Samarinda, Sangatta, Bontang, Tanjung Redeb, Nunukan, Tarakan, Parepare, Kendari, Ambon, Pantoloan, Ternate, dan Toli-toli.

   Dalam penyelesaian audit, Tim Audit mengalami kendala sebagai akibat dampak wabah COVID-19, di mana setiap *auditee* menerapkan kebijakan *Work From Home*. Terhadap kondisi tersebut, *Group* SPI telah mengantisipasi dengan memaksimalkan implementasi *Audit Management System* (AMS), di mana proses perencanaan, kegiatan audit, pelaporan dan *monitoring* tindak lanjut telah dilakukan secara secara gabungan *one on one*.

   Audit tematik yang telah diselesaikan yaitu Audit Tematik Umum.

Pelaksanaan tugas unit Pengendalian Internal pada tahun 2021 di samping melaksanakan fungsi *assurance* melalui audit rutin Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan serta audit performansi pada anak perusahaan juga melaksanakan pemenuhan arsitektur Unit Satuan Pengawasan Intern *after merger* yang tertuang dalam Program 100 hari kerja Satuan Pengawasan Intern diantaranya:
a. *Review* PKPT tahun 2021 dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022;
b. Penyusunan Usulan Tata Kerja Unit SPI;
c. Penyusunan *Roadmap* SPI Tahun 2022;
d. Review Audit Charter;

2. Regional II (ex Pelindo II)
   In regional II (ex Pelindo II), 7 (seven) routine audit assignments have been carried out, namely the Head Office and 6 (six) Port Branches, 12 (twelve) performance and compliance audit of Subsidiaries, 1 (one) Special audit, and 1 (one) Consulting Services activities, with the following details:
   a. Routine Audits at 6 (six) Port Branches that have been completed: Bengkulu, Jambi, Tanjung Pandan, Pangkal Balam, Sunda Kelapa and Cirebon;
   b. Performance and compliance audits on 12 (twelve) Subsidiaries that have been carried out: PT EDII, PT ILCS, PT PMLI, PT EPI, KSO Koja, PT MTI, PT PPI, PT PII, PT Rukindo, PT JPPI, PT PTP, and PT IPC TPK;
   c. 1 (one) special audit on the completion of dredging project at PT Rukindo; and
   d. 1 (one) consulting service in the HC field.

3. Regional III (ex Pelindo III)
   In regional III (ex Pelindo III), 5 (five) integrated audit assignments and 2 (two) thematic audits have been carried out with the following details:
   a. 5 (five) integrated audits that have been completed: Bali Nusa Tenggara Region, Central Java Region, East Java Region, Kalimantan Region and Head Office; and
4. Regional IV (ex Pelindo IV)
   In regional IV (ex Pelindo IV), 17 (seventeen) routine operational audit assignments have been completed: Gorontalo Branch, Manado, Bitung, Bitung Container Terminal, Balikpapan, Samarinda, Sanpatta, Bontang, Tanjung Redeb, Nunukan, Tarakan, Parepare, Kendari, Ambon, Pantoloan, Ternate, and Toli-toli.

   In completing the audit, Audit Team encountered obstacles as a result of the impact of the Covid-19 outbreak, in which every auditee implemented the Work From Home policy. With regard to these conditions, the Group IAU has anticipated by maximizing the implementation of Audit Management System (AMS), where the planning process, audit activities, reporting and follow-up monitoring have been carried out in a one-on-one manner.

   The thematic audits that have been completed are General Thematic Audit.

The implementation of duties in 2021 is the Internal Audit Unit has carried out the assurance function through routine audit of Head Office and Port Branches as well as performance audit at subsidiaries, and carried out the fulfillment of the architecture of Internal Audit Unit after the merger as stated in the 100 working days Program of Internal Audit Unit including:
a. Review of the 2021 PKPT and Prepare the 2022 Annual Audit Work Program (PKPT);
b. Prepare the Proposed IAU Work Procedures;
c. Prepare the IAU Roadmap for 2022;
d. Review the Audit Charter;

e. Sosialisasi dan Pelatihan *Audit Management System* (AMS);
f. Standarisasi Kompetensi Auditor (Sertifikasi); dan
g. *Review* SOP unit SPI.

Selain itu, *Group* Satuan Pengawasan Intern dalam pelaporannya melaksanakan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit secara periodik.

e. Socialization and Training on Audit Management System (AMS);
f. Auditor Competency Standardization (Certification); and
g. Review the IAU's SOP.

In addition, the Group Internal Audit Unit is reported to holding periodic meetings with Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, *progress* tindak lanjut rekomendasi terhadap Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern telah diselesaikan 96,25% dari 9.832 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut.

FINDINGS AND FOLLOW-UP ON AUDIT RESULTS

As of the fourth quarter of 2021, the progress of follow-up to the recommendations of Internal Audit Unit Audit Report has been completed 96.25% of the 9,832 recommendations, with details as follows.

LHA	Jumlah Rekomendasi Total Recommendations	Tindak Lanjut (persentase) Follow Up (percentage)
Regional I (Eks Pelindo I) (Ex Pelindo I)	280	71%
Regional II (Eks Pelindo II) (Ex Pelindo II)	6.875	98%
Regional III (Eks Pelindo III) (Ex Pelindo III)	1.710	93%
Regional IV (Eks Pelindo IV) (Ex Pelindo IV)	967	96%

GROUP HEAD MANAJEMEN RISIKO

GROUP HEAD RISK MANAGEMENT

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GROUP HEAD MANAJEMEN RISIKO

1. Menyusun/merumuskan dan mengusulkan rencana program kerja dan anggaran terkait bidang pengelolaan risiko operasional dan non-operasional di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Mengambil keputusan terkait dengan implementasi rencana program kerja dan anggaran bidang pengelolaan risiko operasional dan non-operasional berdasarkan hasil putusan Direksi;
3. Melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap:
   a. *Risk objective, risk appetite, risk tolerance* perusahaan, dan taksonomi risiko;
   b. Mekanisme penetapan *Key Risk Indicators* (KRI) di tingkat korporat serta penerapan *Early Warning System* (EWS);
   c. Profil risiko operasional (profil risiko korporat);
   d. Profil risiko non-operasional (profil risiko investasi);
   e. Pengembangan peralatan (*tools*) Manajemen Risiko yang terdiri dari metode dan aplikasi Manajemen Risiko;
   f. Laporan Monitor Risiko; dan
   g. Usulan pengelolaan pengetahuan Manajemen Risiko dalam rangka membangun lingkungan sadar risiko di Perusahaan antara lain melalui kampanye kepedulian Manajemen Risiko, portal pengetahuan Manajemen Risiko, program pemeliharaan dan kompetensi Manajemen Risiko, dan sosialisasi Kebijakan dan Proses Manajemen Risiko.
4. Merekomendasikan usulan terkait:
   a. Usulan strategi terkait dengan pengelolaan risiko operasional dan non-operasional;
   b. *Risk objective, risk appetite, risk tolerance* perusahaan, dan taksonomi risiko;

GROUP HEAD RISK MANAGEMENT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Prepare/formulate and propose a work program plan and budget related to operational and non-operational risk management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Make decisions related to the implementation of work program plans and budgets in operational and non-operational risk management based on the results of the Board of Directors' decisions;
3. Conduct inspections and studies on:
   a. Risk objective, risk appetite, risk tolerance, and risk taxonomy;
   b. The mechanism for determining Key Risk Indicators (KRI) at corporate level and applying Early Warning System (EWS);
   c. Operational risk profile (corporate risk profile);
   d. Non-operational risk profile (investment risk profile);
   e. Development of Risk Management tools consisting of Risk Management methods and applications;
   f. Risk Monitoring Report; and
   g. Proposal for risk management knowledge management in order to build a risk-aware environment in the Company include, among others, Risk Management awareness campaign, Risk Management knowledge portal, Risk Management competency and maintenance programs, and dissemination of Risk Management Policies and Processes.
4. Recommend suggestions related to:
   a. Proposed strategies for operational and non-operational risk management;
   b. Risk objective, risk appetite, risk tolerance, and risk taxonomy;

c. Mekanisme penetapan *Key Risk Indicators* (KRI) di tingkat korporat serta penerapan *Early Warning System* (EWS);
d. Pengembangan peralatan (*tools*) Manajemen Risiko yang terdiri dari metode dan aplikasi Manajemen Risiko;
e. Tanggapan atas pertanyaan dari pihak eksternal mengenai risiko-risiko strategis Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku;
f. Penyusunan RKAP berbasis Risiko; dan
g. Pengelolaan Audit Berbasis Risiko.

5. Mengoordinasikan pihak internal Perusahaan dalam rangka pelaksanaan proses manajemen risiko.
6. Melakukan monitor terhadap:
   a. Realisasi program kerja dan kesesuaian pengelolaan anggaran bidang pengelolaan risiko dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
   b. Implementasi strategi dan/atau peraturan perusahaan terkait bidang pengelolaan risiko;
   c. Tindak lanjut pengendalian risiko terhadap risiko yang signifikan secara periodik;
   d. Realisasi capaian KRI dan penerapan EWS; dan
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan bidang risiko di korporat.

c. The mechanism for determining Key Risk Indicators (KRI) at the corporate level and applying Early Warning System (EWS);
d. Development of Risk Management tools consisting of Risk Management methods and applications;
e. Responses to questions from external parties regarding the Company's strategic risks in accordance with applicable Company regulations;
f. Risk-based RKAP preparation; and
g. Risk-based Audit Management.

5. Coordinate the Company's internal parties in implementing the risk management process.
6. Monitor:
   a. Realization of work programs and compliance with budget management in risk management with previously determined budget;
   b. Implementation of company strategies and/or regulations related to risk management;
   c. Periodic follow-up of risk control on significant risks;
   d. Realization of KRI achievements and implementation of EWS; and
7. Coordinate the implementation of risk management in the corporate sector.

PROFIL KEPALA *GROUP HEAD RISK MANAGEMENT*

HEAD OF RISK MANAGEMENT GROUP PROFILE



Moudy Pitoy

Group Head Manajemen Risiko
Group Head Risk Management

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/ Age	Bitung, 28 April 1974/47 tahun Bitung, April 28, 1974/47 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Diploma III Akuntansi dari Akademi Akuntansi Manado, Manado (1996) • Sarjana Ekonomi dari STIE Pioneer, Manado (2000) • Magister Manajemen SDM dari Sekolah Tinggi Manajemen IMNI, Jakarta (2011) • Diploma III Accounting from Manado Accounting Academy, Manado (1996) • Bachelor of Economics from STIE Pioneer, Manado (2000) • Master of Human Resource Management from IMNI Management College, Jakarta (2011)
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Occupational Safety and Health Expert Certification
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Senior Manager* Manajemen Mutu, K4L dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (November 2018-September 2021) • *Project Management Officer* Bidang Mutu dan Risiko PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Juli 2016-November 2018) • *Senior Manager* Karier & Pengembangan SDM PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Maret 2015-Juli 2016) • *General Manager* Cabang Sorong PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Januari 2014-Maret 2015) • *General Manager* Cabang Merauke PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (November 2012-Januari 2014) • Senior Manager of Quality Management, K4L and Risk Management of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (November 2018 – September 2021) • Project Management Officer for Quality and Risk of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (July 2016 - November 2018) • Senior Manager Career & HR Development of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (March 2015 - July 2016) • General Manager of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Sorong Branch (January 2014 - March 2015) • General Manager of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Merauke Branch (November 2012 - January 2014)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 Tentang Pengalihan Status Pekerja/Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) Menjadi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Penugasan Pekerja Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 Regarding the Transfer of Status of Workers/Employees of PT Pelabuhan Indonesia I, III and IV (Persero) to Employees of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and Assignment in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Telah dilaksanakan Pelatihan, *Webinar*, dan Diskusi pada tahun 2021 dengan detail sebagai berikut :

RISK MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

Training, Webinars, and Discussions have been held in 2021, with the following details:

No	Jenis Pelatihan Training Type	Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (Persons)
1.	*Integrated Risk Management* Tahun 2021 Integrated Risk Management of 2021	4
2.	*Key Risk Indicator & Early Warning System* Tahun 2021 Key Risk Indicator & Early Warning System of 2021	18
3.	Metodologi dan Teknik *Assessment* Risiko Kecurangan (*Fraud Risk assessment*) Fraud Risk Assessment Methodology and Techniques	5
4.	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko Dana Pensiun Pension Fund Risk Management Training & Certification	1
5.	Pelatihan dan Sertifikasi *Governance Risk & Compliance* Profesional Tahun 2021 Professional Governance Risk & Compliance Training and Certification in 2021	1
6.	*Risk Management* Tahun 2021 Risk Management of 2021	18
7.	*Webinar* Forum Diskusi Risiko Tahun 2021 Webinar on Risk Discussion Forum of 2021	166
8.	*Webinar Legal and Compliance Aspect in Fraud Risk Management* Tahun 2021 Webinar on Legal and Compliance Aspect in Fraud Risk Management of 2021	15

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT CERTIFICATIONS

No	Judul Sertifikasi Title of Certifications	Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (Persons)
1.	*Qualified Chief Risk Officer* (QCRO)	4
2.	*Qualified Risk Management Professional* (QRMP)	34
3.	*Qualified Risk Management Analyst* (QRMA)	83
4.	*Qualified Risk Management Officer* (QRMO)	110
5.	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	1

PELAKSANAAN TUGAS *GROUP HEAD* MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021

Sejalan dengan Program Kerja 100 hari pasca merger yang telah ditetapkan Perseroan, Bagian Manajemen Risiko telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

GROUP HEAD RISK MANAGEMENT DUTIES IMPLEMENTATION IN 2021

In line with the 100-day post-merger Work Program that has been determined by the Company, the Risk Management Division has carried out the following work programs:

No	Program kerja Work Program	*Output* Output
Infrastruktur Manajemen Risiko Risk Management Infrastructure		
1	Pengesahan Peraturan Direksi *Risk Based Decision Making* (RBDM) Ratification of Board of Directors Regulations on Risk-Based Decision Making (RBDM)	Peraturan Direksi *Risk Based Decision Making* (RBDM). Board of Directors Regulations regarding Risk Based Decision Making (RBDM).
2	Penyusunan Pedoman Teknis Manajemen Risiko untuk *Holding*, Regional dan Cabang Pelabuhan Preparation of Risk Management Technical Guidelines for Holding, Regional and Port Branches	1. Peraturan Direksi; 2. Pedoman Teknis; dan 3. Sosialisasi. 1. Board of Directors Regulations; 2. Technical Guidelines; and 3. Socialization.
3	Sosialisasi Socialization	1. Jadwal Sosialisasi; 2. Bahan Presentasi (Pedoman teknis dan strategis); 3. Bahan *Workshop* (RCSA, Piagam Manajemen Risiko, pelaporan, LEM, *Template* powerpoint); dan 4. Surat Dinas ke Regional 1,2,3 dan 4 dan *subholding* penyampaian Perdir rencana kunjungan. 1. Socialization Schedule; 2. Presentation Materials (Technical and Strategic Guidelines); 3. Workshop Materials (RCSA, Risk Management Charter, reporting, LEM, PowerPoint template); and 4. Official Letters to Regions 1,2,3 and 4 and subholding regarding the visit plan of President Director.
4	Penyusunan Pedoman Strategis Manajemen Risiko untuk *Holding, Subholding*, dan Non-*Subholding* Preparation of Risk Management Strategic Guidelines for Holding, Subholding, and Non-Sub-Holding	1. Peraturan Direksi; 2. Pedoman Strategis; dan 3. Sosialisasi. 1. Board of Directors Regulations; 2. Technical Guidelines; and 3. Socialization.
5	*Review* dan Penyusunan Peraturan Direksi terkait *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* *Review and Preparation of Board of Directors Regulations related to Risk Appetite and Risk Tolerance*	Peraturan Direksi terkait *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance.* *Board of Directors Regulations regarding Risk Appetite and Risk Tolerance.*
6	Pengesahan SK Komite GRC Ratification of the GRC Committee Decree	SK Komite GRC. GRC Committee Decree.

No	Program kerja Work Program	*Output* Output
7	Penyusunan SOP Manajemen Risiko Preparation of Risk Management SOP	SOP RBDM. SOP for RBDM.
		SOP Usulan Investasi. SOP for Investment Proposal.
		SOP Penyusunan *Loss Event Management.* *SOP for Preparation of Loss Event Management.*
		SOP Penyusunan Profil Risiko dan Pemantauan Mitigasi Risiko. SOP for Risk Profile Preparation and Risk Mitigation Monitoring.
		SOP Pengelolaan Sistem Manajemen Risiko. SOP for Risk Management System Management.
		SOP Implementasi Indikator Risiko Utama/*Key Risk Indicator.* *SOP for Implementation of Key Risk Indicators.*
		SOP Penyusunan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance.* *SOP for Preparation of Risk Appetite and Risk Tolerance.*
		SOP Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko. SOP for Risk Management Maturity Level Assessment.
8	Pembuatan *Jobdesc* Fungsi Manajemen Risiko *Holding, Subholding*, Non-*Subholding* dan Cabang Pelabuhan Creation of Jobdesc Risk Management Functions for Holding, Subholding, Non-Subholding and Port Branches	*Jobdesc* Fungsi Manajemen Risiko *Holding, Subholding*, Non-*Subholding* dan Cabang Pelabuhan. Jobdesc of Risk Management Functions for Holding, Subholding, Non-Subholding and Port Branches.
Budaya Manajemen Risiko Risk Management Culture		
9	Pengembangan Budaya Risiko Risk Culture Development	Seminar Manajemen Risiko. Risk Management Seminar.
		Koordinasi Sistem Manajemen Risiko Pelindo *Group*. Pelindo Group Risk Management System Coordination.
		Pelaksanaan Diskusi Manajemen Risiko (Disko) di lingkungan internal Perseroan. Implementation of Risk Management Discussion (Disko) in the Company's internal environment.
Pengelolaan Asuransi Insurance Management		
10	Pembuatan Peraturan Direksi tentang Pengelolaan Asuransi Preparation of Board of Directors Decree on Insurance Management	Peraturan Direksi tentang Pedoman dan Tata Cara Pengasuransian Aset, Tanggung Gugat, dan Gangguan Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Regulation of Board of Directors concerning Guidelines and Procedures for Insuring Assets, Liability, and Business Interruptions within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
11	Pengadaan Asuransi Aset Milik Regional 2 dan Anak Perusahaan Procurement of Insurance for Assets owned by Regional 2 and Subsidiaries	Perjanjian Kerja Sama dan Polis Asuransi. Cooperation Agreement and Insurance Policy.
12	*Risk Aseessment* sebagai data penunjang re-asuransi di Pelabuhan Besar/*High Risk* dan sosialisasi hasil *Risk assessment* *Risk Assessment as supporting data for re-insurance in Major/High Risk Ports and dissemination of Risk assessment results*	*Risk Assessment* dan Sosialisasi *Report* Regional 1. Risk Assessment and Dissemination of Regional Report 1.
13	Penilaian aset pertanggungan atas seluruh aset alat & fasilitas yang diasuransikan Assessment of the insured assets for all equipment & facilities assets that are insured	Hasil *appraisal*. Appraisal Results.
14	Pengadaan Asuransi Aset Secara Terpusat Centralized Procurement of Asset Insurance	Polis Asuransi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Insurance Policy.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE PELINDO BERSIH

Pelindo Bersih yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK 01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

PELINDO BERSIH COMMITTEE

Pelindo Bersih which was formed based on the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK 01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 dated December 31, 2021 regarding Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in the Implementation of Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PELINDO BERSIH

1. Membahas dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran *Whistleblowing System* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan pengaduan;
2. Rekomendasi yang diberikan berupa kesimpulan hasil pembahasan laporan *whistleblowing system* oleh komite (laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak dan membutuhkan investigasi lebih lanjut atau tidak) dan rekomendasi urgensi laporannya;
3. Menindaklanjuti dan melakukan investigasi semua laporan yang masuk (termasuk *out of scope*) untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tipe pelanggarannya selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima dibantu oleh PIC WBS dari regional, *subholding* dan anak perusahaan Pelindo;
4. Melakukan investigasi dan membuat kesimpulan, saran serta rekomendasi atas hasil pemeriksaan/permintaan yang dikoordinasikan oleh *Group Head* Satuan Pengawasan Intern dan meminta keterangan ahli apabila diperlukan;
5. Me*monitoring* tindak lanjut/putusan atas laporan yang masuk jika terbukti terjadi pelanggaran, untuk tindak lanjut/putusan kepada internal dikoordinasikan oleh *Group Head* Layanan SDM;
6. Melakukan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS;
7. Melakukan pengawasan terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan;
8. Melakukan *benchmarking* pada perusahaan lain untuk melihat perkembangan skema WBS;
9. Setiap anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya;
10. Membuat dan me*review* kebijakan dan sistem prosedur operasi (SOP) terkait WBS dibantu oleh pihak independen yang ditunjuk perusahaan;
11. Melakukan sosialisasi kepada insan Pelindo dan stakeholder terkait penggunaan saluran WBS;
12. Membuat laporan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama atas pelaksanaan WBS; dan
13. Perusahaan dapat menunjuk pihak eksternal/KAP, atau pihak eksternal lainnya untuk menangani pengelolaan WBS di Perseroan.

PELINDO BERSIH COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Discuss and provide recommendations for follow-up on incoming reports of alleged violations through the Whistleblowing System channel within a period of no later than 14 (fourteen) working days after receiving the complaint;
2. Recommendations given are in the form of Conclusions on the discussion results of the Whistleblowing System report by the Committee (reports can be followed up or not and require further investigation or not) and recommendations for the report urgency;
3. Follow up and investigate all incoming reports (including out of scope) so that further action can be taken according to the type of violation for 30 (thirty) working days after the report is received, assisted by PIC WBS from Regional, Subholding and Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
4. Conduct investigations and make conclusions, suggestions and recommendations on the results of examination/request coordinated by the Group Head of Internal Audit Unit and request expert's explanation if necessary;
5. Monitoring the follow-up/decision on incoming reports if a violation is proven to occur, for internal follow-up/decision coordinated by the Group Head of HC Services;
6. Conduct internal meeting of Pelindo Bersih Committee at least 1 (one) time in every 3 (three) months and/or every time there is a report of alleged violations through the Whistleblowing System;
7. Supervise the independence and effectiveness of the Company's Whistleblowing System:
8. Perform benchmarking on other companies to see the development of Whistleblowing System scheme;
9. Each member of Pelindo Bersih Committee is required to sign an integrity pact in order to always maintain confidentiality in carrying out their duties;
10. Create and review policies and operating procedure systems (SOP) related to the Whistleblowing System assisted by an independent party appointed by the company;
11. Organizing socialization to Pelindo People and Stakeholders regarding the use of Whistleblowing System channel;
12. Make periodic reports every semester to the President Director and President Commissioner on the implementation of WBS; and
13. The Company may appoint external party/KAP, or other external parties to handle the management of Whistleblowing System in the Company.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PELINDO BERSIH

PELINDO BERSIH COMMITTEE MEMBERSHIP

No	Unit Kerja Work Unit	Jabatan dalam Tim Position in the Team
1.	*Group Head* Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretary	Ketua (Merangkap Anggota) Chairman (Concurrently Member)
2.	*Group Head* Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit Unit	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairman (Concurrently Member)
3.	Departemen Head Hubungan Lembaga, Tata Kelola dan Investor Department Head of Institutional Relations, Governance and Investors	Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (Concurrently Member)
4.	*Group Head* Hukum Group Head of Legal	Anggota Member
5.	*Group Head* Manajemen Risiko Group Head of Risk Management	Anggota Member
6.	*Group Head* Layanan SDM Group Head of HC Service	Anggota Member
7.	*Group Head* Layanan SDM Group Head of HC Service	Anggota Member

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PELINDO BERSIH

Komite Pelindo Bersih melaksanakan tugasnya melalui rapat yang dilaksanakan. Adapun pelaksanaan rapat Komite Pelindo Bersih selama tahun 2021 yaitu:

PELINDO BERSIH COMMITTEE MEETING AND DUTIES IMPLEMENTATION

Pelindo Bersih Committee carries out its duties through meetings held. The implementation of Pelindo Bersih Committee meetings during 2021 are:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	17 November 2021 November 17, 2021	• Pembahasan teknis pengelolaan WBS; • Pembahasan tindak lanjut atas pelaporan WBS yang masuk. • Technical discussion of WBS management; • Discussion of follow-up on incoming WBS reports.
2.	3 Desember 2021 December 3, 2021	• Pembahasan teknis pengelolaan WBS; • Pembahasan tindak lanjut atas pelaporan WBS yang masuk. • Technical discussion of WBS management; • Discussion of follow-up on incoming WBS reports.

KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan transformasi bisnis yang memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan terkait dengan pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional Perseroan dan pengendalian kegiatan strategis usaha Grup Pelindo, maka Direksi membentuk Komite Tata Kelola, Manajemen risiko dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. PW.05.02/4/10/1/MRNO/UTMA/PLND-21tanggal 4 Oktober 2021 Tentang Pembentukan Komite dan Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

In order to support performance improvement and business transformation that takes into account the aspects of good corporate governance, risk management and compliance in the Company's decision-making process related to investment management, strategic operational policies of the Company and controlling business strategic activities of Pelindo Group, the Board of Directors formed a Governance, Risk Management and Compliance Committee of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), by virtue of the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. PW.05.02/4/10/1/MRNO/UTMA/PLND-21 dated October 4, 2021 concerning the Formation of Committee and the Establishment of Charter of Governance, Risk Management and Compliance Committee of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

1. Melaksanakan tugasnya secara kolektif dalam membantu Direksi;
2. Memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan atas usulan program investasi Perseroan, kebijakan strategis operasional dan pengendalian kegiatan strategis usaha *Group* Perseroan;
3. Memberikan opini atas kelengkapan dan kesesuaian usulan program investasi perusahaan, kebijakan strategis operasional dan pengendalian kegiatan strategis usaha Group Perseroan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan;
4. Harus bersikap independen dan obyektif serta *professional* dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi; dan
5. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian dari Direksi sebelum keputusan/kebijakan strategis akan ditetapkan oleh Perusahaan.

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Carry out duties collectively in assisting the Board of Directors;
2. Ensuring the suitability and completeness of the governance, risk management and compliance documents for the Company's proposed investment program, the Company's strategic operational policies, and controlling the strategic activities of the Company's group business;
3. Provide opinions on the completeness and suitability of the Company's investment program proposals, the Company's strategic operational policies, and control of strategic business activities of the Company's group related to Governance, Risk Management and Compliance with laws and regulations;
4. Must be independent and objective as well as professional in carrying out their duties as well as in reports and be responsible directly to the Board of Directors; and
5. Identifying matters that require the Board of Directors' attention, before strategic decisions/policies are made by the Company.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

No	Jabatan Position	Posisi Position
1.	*Group Head* Manajemen Risiko Group Head of Risk Management	Ketua Chairman
2.	*Group Head* Hukum Group Head of Legal	Sekretaris Secretary
3.	*Group Head* Perencanaan Strategis Group Head of Strategic Planning	Anggota Member
4.	*Group Head* Pembinaan Anak Perusahaan Group Head of Subsidiary Development	Anggota Member
5.	*Group Head* Anggaran & Pelaporan Group Head of Budget & Reporting	Anggota Member
6.	*Group Head* Pengelolaan Keuangan Group Head of Financial Management	Anggota Member
7.	*Group Head* Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretary	Anggota Member

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan melaksanakan tugasnya melalui rapat yang dilaksanakan. Adapun pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan selama tahun 2021 yaitu:

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE DUTIES IMPLEMENTATION

Governance, Risk Management and Compliance Committee carries out its duties through meetings held. The implementation of Governance, Risk Management and Compliance Committee meetings during 2021 are:

No.	Tanggal Date	Agenda Schedule
1.	Senin, 1 November 2021 Monday, November 1, 2021	Rapat Pembahasan Penambahan Penyertaan modal PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI) Melalui Tambahan Setoran Modal dan Konversi *Shareholder Loan* (SHL) Menjadi Ekuitas. Discussion Meeting on Additional Capital Participation of PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia spasi (PT JPPI) through Additional Capital Deposit and Conversion of Shareholder Loan (SHL) into Equity.
2.	Kamis, 18 November 2021 Thursday, November 18, 2021	Rapat Pembahasan Usulan Investasi Tahun 2022 dengan Komite GRC: a. Pengadaan dan Pemasangan Infrastruktur IT Makassar *New Port*; b. Pengadaan tanah (tahap I 30,65 Ha + tahap II 75 Ha) di PPK (Kuala Tanjung); dan c. Konvesi SHL menjadi setoran modal ke PT PII. Discussion Meeting on 2022 Investment Proposal with GRC Committee: a. Procurement and Installation of Makassar New Port IT Infrastructure; b. Land acquisition (phase I 30.65 ha + phase II 75 ha) in KDP (Kuala Tanjung); and c. SHL convention into capital deposit to PT PII.
3.	Senin, 29 November 2021 Monday, November 29, 2021	Rapat Pembahasan Usulan Investasi Tahun 2022 dengan Komite GRC: Pengadaan tanah (tahap I 30,65 Ha + tahap II 785 Ha) di PPK (Kuala Tanjung). Discussion Meeting on 2022 Investment Proposal with GRC Committee: Land acquisition (phase I 30.65 ha + phase II 785 ha) in KDP (Kuala Tanjung).

AKUNTAN PUBLIK

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Pemilihan penyedia jasa KAP dilakukan dengan *E-Procurement*. Dimulai dengan mengundang Pelaku Usaha dengan status *activated* pada tanggal 15 Juli 2021. Sedangkan untuk penyampaian dokumen penawaran dibuka sejak tanggal 19 Juli 2021 hingga 21 Juli 2021. Hasil Laporan dan Usulan Penyedia selesai pada 21 Juli 2022 dan disampaikan melalui surat dari Direktur Penyelenggara kepada dewan komisaris dan direksi masing-masing BUMN Pelabuhan. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri BUMN tanggal 24 Juli 2020 untuk mendapat persetujuan. Persetujuan penunjukan KAP oleh Menteri BUMN dan penetapan penyedia dilakukan pada 30 Juli 2021. Proses penyediaan jasa oleh KAP tertunjuk selesai pada 31 Maret 2022.

PUBLIC ACCOUNTANT

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT

The selection of KAP service provider is carried out using E-Procurement. Starting by inviting Business Players with activated status on July 15, 2021. As for the submission of bid documents was open from July 19, 2021 to July 21, 2021. The results of Provider Report and Proposal was completed on July 21, 2022 and submitted by letter from the Managing Director to the Board of Commissioners and Board of Directors of each state-owned port. The proposal was then submitted to the Minister of SOEs on July 24, 2020 for approval. Approval for the appointment of KAP by the Minister of SOEs and the determination of providers was carried out on July 30, 2021. The process of providing services by the appointed KAP will be completed on March 31, 2022.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN *FEE*

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee

PUBLIC ACCOUNTING OFFICE, NAME OF ACCOUNTANT AND FEE

Public Accounting Firms, Accountant Names and Fees

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name (Responsible Partner)	Periode AP AP Period	*Fee* Jasa Audit Audit Service Fee	Izin AP AP License
2021	Ernst Young	Periode Kedelapan Eighth Period	Moch Dadang Syachruna	Periode Kedua Second Period	Rp4.438.792.110	603/KM.1/2015
2020	Ernst Young	Periode Ketujuh Seventh Period	Moch Dadang Syachruna	Periode Pertama First Period	Rp4.438.792.110	603/KM.1/2015
2019	Ernst Young	Periode Keenam Sixth Period	Muhammad Kurniawan	Periode Ketiga Third Period	Rp3.802.636.200	603/KM.1/2015
2018	Ernst Young	Periode Kelima Fifth Period	Muhammad Kurniawan	Periode Kedua Second Period	Rp3.874.519.000	603/KM.1/2015
2017	Ernst Young	Periode Keempat Fourth Period	Muhammad Kurniawan)	Periode Pertama First Period	Rp3.583.700.000	603/KM.1/2015

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Selama tahun 2021, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

OTHER SERVICES PROVIDED BY ACCOUNTANT

During 2021, there were no other services provided by accountants.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan GCG, karena dapat mendorong Perseroan menjadi lebih transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, adil, dan terpercaya. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan andal mampu memberikan keyakinan bagi para *stakeholder* bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjadi tanggung jawab dari Manajemen Perseroan. Guna mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari Manajemen Perseroan. Guna mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan.

TUJUAN PENGENDALIAN

1. Efisiensi dan Efektivitas Operasional
   Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.
2. Keandalan Pelaporan
   Dimaksudkan untuk menjamin laporan yang akurat, wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan operasional lebih terjamin dengan adanya pengendalian intern yang efektif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh data yang diolah adalah transaksi yang sah dan telah mendapat otorisasi, serta seluruh transaksi telah dicatat pada tanggal terjadinya dengan nilai yang akurat.
3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
   Dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN

Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activites*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*); dan
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

LINGKUNGAN PENGENDALIAN *(CONTROL ENVIRONMENT)*

Lingkungan pengendalian merupakan faktor yang mempengaruhi keseluruhan Perseroan dan menjadi atmosfer bagi setiap individu di Perseroan melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang menjadi bagiannya. Lingkungan pengendalian menjadi fondasi

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal Control System is a very important aspect in implementing of GCG, because it can encourage the Company to be more transparent, accountable, responsible, independent, fair, and reliable. An effective and reliable Internal Control System is able to provide confidence to stakeholders that all available resources can be managed properly in order to achieve the Company's goals. The implementation of a reliable and effective Internal Control System at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is the responsibility of the Company's Management. In order to support the development of Internal Control System in the Company. The implementation of a reliable and effective Internal Control System is the responsibility of the Company's Management. To support the development of the Internal Control System in the Company.

OBJECTIVES OF CONTROL

1. Operational Efficiency and Effectiveness
   Intended to increase effectiveness and efficiency in managing the Company's resources in order to achieve the Company's objectives.
2. Reporting Reliability
   Intended to guarantee accurate, fair, timely and relevant reports, as a basis for making appropriate and accountable decisions. The presentation and disclosure of information in financial and operational reports is more secure with effective internal control. This is intended to provide assurance that all processed data are valid and authorized transactions, and all transactions have been recorded on the date of occurrence with accurate values.
3. Compliance with Laws and Regulations
   Intended to ensure that all of the Company's activities are carried out in accordance with the applicable laws and regulations, both provisions issued by the government or other authorities, as well as policies, provisions, and procedures established by the Company.

INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE COMPANY

The conceptual framework of COSO internal control as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control consists of 5 (five) components:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication; and
5. Monitoring and Evaluation.

CONTROL ENVIRONMENT

Control environment is a factor that affects the entire Company and becomes the atmosphere for each individual in the Company to carry out activities and carry out control responsibilities that are their part. The control environment becomes an effective foundation for other components of internal control. The

yang efektif bagi komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian Perseroan dibangun dengan:

Prinsip 1: menunjukkan Komitmen terhadap Integritas dan Nilai Etika

Perseroan menunjukan komitmen terhadap penegakan integritas dan nilai etika.

1. Menegakkan *Tone of the Top*
   Dewan Komisaris dan Direksi di setiap tingkatan menunjukkan keteladanan *(role model),* melalui arahan, tindakan, dan perilaku, komitmen terhadap integritas dan nilai etika untuk mendukung efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
2. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku
   Ekspektasi dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait integritas dan nilai etika didefinisikan dalam aturan perilaku Perseroan dan dipahami oleh setiap tingkatan organisasi dan oleh pihak partner eksternal.
3. Mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan perilaku
   Penerapan proses evaluasi atas implementasi individu dan tim terhadap aturan perilaku Perseroan.
4. Mengidentifikasi deviasi secara tepat waktu
   Deviasi/pelanggaran terhadap aturan perilaku diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu dan konsisten.
5. Menghilangkan peluang/godaan untuk berperilaku tidak etis
   a. Penetapan target dan sasaran yang realistis/dapat dicapai dan tidak menuntut pegawai untuk mencapai sasaran yang tidak realistis;
   b. Memberikan penghargaan yang sepadan kepada pegawai atas prestasi kerjanya. Penghargaan diberikan dalam rangka penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika; dan
   c. Menegakkan sanksi sesuai aturan yang berlaku atas pelanggaran terhadap integritas dan nilai etika.

Prinsip 2: Implementasi Tanggung Jawab Pengawasan

Dewan Komisaris bersikap independen terhadap Direksi dan mengimplementasikan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan dari pengendalian internal.

1. Tanggung jawab pengawasan oleh Dewan Komisaris
   Dewan Komisaris mengidentifikasi dan menerima tanggung jawab pengawasan terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
2. Memegang atau mendelegasikan tanggung jawab pengawasan
   Dewan Komisaris memegang tanggung jawab pengawasan atau mendelegasikan tanggung jawab tersebut Direksi untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
3. Mengimplementasikan keahlian yang relevan
   Dewan Komisaris mendefinisikan dan secara periodik menilai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota-anggota Dewan Komisaris untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersikap kritis terhadap Direksi dan mengambil tindakan yang diperlukan.
4. Beraktivitas secara independen
   Dewan Komisaris memiliki jumlah anggota yang cukup, bersikap independen, dan objektif.

Company's control environment is built by:

Principle 1: Demonstrate Commitment to Integrity and Ethical Values

The Company demonstrates a commitment to upholding integrity and ethical values.

1. Upholding Tone of the Top
   Board of Commissioners and Board of Directors at every level demonstrate role models, through direction, actions, and behavior, commitment to integrity and ethical values to support the effectiveness of Internal Control System.
2. Develop and apply rules of conduct
   The expectations of Board of Commissioners and Board of Directors regarding integrity and ethical values are defined in the Company's code of conduct and understood by every level of the organization and by external partners.
3. Evaluating compliance with the rules of conduct
   The evaluation process for individual and team implementation of the Company's code of conduct.
4. Identify deviation in a timely manner
   Deviation/violation against the rules of conduct are identified and corrected in a timely and consistent manner.
5. Eliminate opportunities/temptations to behave unethically
   a. Setting realistic/achievable targets and targets and not requiring employees to achieve unrealistic goals;
   b. Provide appropriate rewards to employees for their work performance. The award is given in the context of upholding integrity and compliance with ethical values; and
   c. Enforce sanctions in accordance with applicable regulations for violations of integrity and ethical values.

Principle 2: Implementation of Supervisory Responsibilities

Board of Commissioners acts independently toward the Board of Directors and implements oversight of the development and implementation of internal control.

1. Supervisory responsibilities by Board of Commissioners
   Board of Commissioners identifies and accepts supervisory responsibility for the adequacy and effectiveness of internal control.
2. Holding or delegating supervisory responsibilities
   Board of Commissioners holds supervisory responsibilities or delegates these responsibilities to the Board of Directors to support the achievement of the Company's objectives.
3. Implement relevant skills
   Board of Commissioners defines and periodically assesses the knowledge and skills required by members of the Board of Commissioners to improve their ability to be critical of Board of Directors and take necessary action.
4. Work independently
   Board of Commissioners has a sufficient number of members, is independent and objective.

Prinsip 3: Pembentukan Struktur Organisasi, Kewenangan, dan Tanggung Jawab yang Sesuai dengan Kebutuhan

Dalam pengawasan Dewan Komisaris, Direksi membentuk struktur organisasi, jalur pelaporan dan kewenangan, serta pertanggungjawaban yang memadai untuk mencapai tujuan Perseroan.

1. Mempertimbangkan seluruh struktur entitas
   Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai struktur yang digunakan (termasuk unit operasional, entitas legal, penyedia jasa *outsourcing*) untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
2. Membangun garis pelaporan
   Manajemen mendesain dan mengevaluasi garis pelaporan untuk setiap struktur/entitas agar mampu mengeksekusi kewenangan, tanggung jawab, serta arus informasi dalam mengelola aktivitasnya.
3. Mendefinisikan, mengalokasikan, dan membatasi kewenangan dan tanggung jawab
   Direksi dan Dewan Komisaris mendelegasikan kewenangan, mendefinisikan dan mengalokasikan tanggung jawab, serta memisahkan fungsi secara memadai pada berbagai tingkatan dalam organisasi.
4. Tanggung jawab dan garis pelaporan dapat dibagi ke dalam Model 3 Lini (*Three Lines Model*)
   a. Manajemen dan pekerja operasional sehari-hari berada di Lini Pertama yang bertanggung jawab untuk menjaga efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal. Lini Pertama bertanggung jawab dalam melaporkan kinerja kepada Direksi;
   b. Manajemen risiko, kepatuhan, hukum, dan kendali mutu berada di Lini Kedua, bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memonitor efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal di Lini Pertama. Lini Kedua memberikan bantuan, dukungan, keahlian, pelengkap, pemantauan, dan kritik kepada Lini Pertama. Peran Lini Pertama dan Lini Kedua dapat dibentuk menjadi satu atau terpisah. Lini Kedua bertanggung jawab dan melapor kepada Direksi; dan
   c. Auditor internal berperan sebagai Lini Ketiga yang bertanggung jawab untuk menilai dan melaporkan kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola Perusahaan. Posisi auditor internal relatif lebih independen terhadap Manajemen karena bertanggung jawab dan melapor langsung kepada Direktur Utama.
5. Melaksanakan evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan terhadap struktur organisasi dalam hal terjadi perubahan lingkungan yang strategis.
6. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai untuk formasi manajerial dan non-manajerial

Prinsip 4: Komitmen terhadap Kompetensi

Perseroan menunjukan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang berkompeten, dengan cara:

1. Menyusun kebijakan dan praktik (standar kompetensi)
   Kebijakan dan praktik menggambarkan harapan organisasi

Principle 3: Establish Organizational Structure, Authority and Responsibilities According to Needs

Under the supervision of Board of Commissioners, Board of Directors established the organizational structure, reporting lines and authorities, as well as adequate responsibilities to achieve the Company's objectives.

1. Considering the entire entity structure
   Board of Directors and Board of Commissioners consider the various structures used (including the operational, legal entities, outsourcing service providers) to support the achievement of the Company's objectives.
2. Establish reporting lines
   Management designs and evaluates reporting lines for each structure/entity in order to be able to execute authority, responsibility, and information flow in managing its activities.
3. Define, allocate, and limit authority and responsibility
   Board of Directors and Board of Commissioners delegate authority, define and allocate responsibilities, and adequately segregate functions at various levels within the organization.
4. Responsibilities and reporting lines can be divided into 3 Lines Model (Three Lines Model)
   a. Management and day-to-day operational employees are in the First Line, responsible for maintaining the effectiveness of risk management and internal control. The First Line is responsible for reporting performance to the Board of Directors;
   b. Risk management, compliance, legal, and quality control are in the Second Line, responsible for facilitating and monitoring the effectiveness of risk management and internal control in the First Line. The Second Line provides assistance, support, expertise, complement, monitoring and criticism to the First Line. The First Line and Second Line roles can be formed together or separately. The Second Line is responsible for and reports to the Board of Directors; dan
   c. Internal auditors act as the Third Line responsible for assessing and reporting on the adequacy and effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance. The position of internal auditor is relatively more independent from the Management since it is accountable and reports directly to the President Director.
5. Carry out evaluations, adjustments, and improvements to the organizational structure in the event of strategic environmental changes.
6. Determine the appropriate number of employees for managerial and non-managerial formations.

Principle 4: Commitment on Competencies

The Company demonstrates a commitment to attracting, developing and retaining competent individuals, by:

1. Develop policies and practices (competency standards)
   Policies and practices describe the organization's expectations of the competencies needed to support the

atas kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

2. Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu
   Perseroan menyediakan mentoring dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan kecukupan dan kompetensi pekerja dan penyedia jasa *outsourcing* untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
3. Mengevaluasi kompetensi dan mengatasi kekurangan
   Direksi mengevaluasi kompetensi seluruh tingkat dan individu organisasi, termasuk penyedia jasa *outsourcing*, terkait dengan kebijakan dan praktik yang ditetapkan, dan bertindak memadai untuk mengatasi kekurangan.
4. Merencanakan dan menyiapkan suksesi
   Direksi merencanakan dan menyiapkan suksesi pelimpahan tanggung jawab secara signifikan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

achievement of the Company's goals.

2. Attract, develop and retain individuals
   The Company provides the mentoring and training needed to attract, develop, and maintain the adequacy and competencies of employees and outsourcing service providers to support the achievement of the Company's goals.
3. Evaluating competencies and overcoming deficiencies
   Board of Directors evaluates the competencies of all levels and individuals of the organization, including outsourcing service providers, in relation to established policies and practices, and acts accordingly to address deficiencies.
4. Planning and preparing for succession
   Board of Directors plans and prepares a succession of significant delegation of responsibilities to support the achievement of the Company's objectives.

Prinsip 5: Penegakan Akuntabilitas

Perusahaan meminta pertanggungjawaban individual atas area pengendalian internal yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.

1. Menegakkan akuntabilitas melalui struktur, kewenangan, dan tanggung jawab
   Perseroan membangun mekanisme untuk mengkomunikasikan dan menuntut para pekerja supaya akuntabel atas pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal organisasi dan mengimplementasikan tindakan koreksi jika diperlukan.
2. Membangun pengukuran kinerja, insentif, dan penghargaan
   Perseroan membangun ukuran kinerja, insentif, dan penghargaan yang layak bagi pertanggungjawaban pada setiap level entitas, yang menggambarkan dimensi dari kinerja dan standar perilaku, dan mempertimbangkan pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengevaluasi ukuran kinerja, insentif, dan penghargaan
   Perseroan menyelaraskan insentif dan penghargaan dengan pemenuhan tanggung jawab pengendalian internal dalam pencapaian tujuan Perseroan.
4. Mempertimbangkan tekanan berlebihan
   Perseroan mengevaluasi dan menyesuaikan tekanan-tekanan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan ketika memberikan tanggung jawab, mengembangkan ukuran kinerja, dan mengevaluasi kinerja.
5. Mengevaluasi kinerja dan penghargaan atau sanksi disiplin individu
   Perseroan mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap aturan dan tingkat kompetensi yang diharapkan dapat memberikan penghargaan atau sanksi disiplin.

Principle 5: Enforce Accountability

The Company holds individual accountability for the area of internal control under his/her responsibility in the context of achieving goals.

1. Enforce accountability through structure, authority, and responsibility
   The Company builds a mechanism to communicate and hold employees accountable for the implementation of the organization's internal control responsibilities and implement corrective actions if necessary.
2. Build performance measurement, incentives, and rewards
   The Company develops performance measures, incentives, and appropriate rewards for accountability at each level of the entity, which describes the dimensions of performance and standards of behavior, and considers the achievement of short-term and long-term goals.
3. Evaluate performance measures, incentives, and rewards
   The Company aligns incentives and rewards with the fulfillment of internal control responsibilities in achieving the Company's objectives.
4. Considering excessive pressure
   The Company evaluates and adjusts the pressures associated with achieving goals when assigning responsibilities, developing performance measures, and evaluating performance.
5. Evaluating individual performance and rewards or disciplinary sanctions
   The Company evaluates the implementation of internal control responsibilities, including compliance with the rules and the level of competencies that is expected to provide rewards or disciplinary sanctions.

PENILAIAN RISIKO *(RISK ASSESSMENT)*

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis terhadap risiko-risiko yang berpotensi dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko Perseroan yang menjadi prioritas untuk ditangani secara tepat, agar tingkat risiko dapat berkurang

RISK ASSESSMENT

Risk assessment is a process of identifying and analyzing risks that could potentially hinder the achievement of the Company's objectives. Risk assessment is carried out to identify the Company's risks which are priorities to be handled appropriately, hence the level of risk can be reduced to a level that is acceptable to the

sampai pada tingkatan yang dapat diterima oleh Perseroan. Oleh sebab itu, penilaian risiko merupakan basis untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Sebelum melakukan penilaian risiko, terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan Perseroan sampai pada tingkat kegiatan, yang dibagi menjadi tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Penetapan tujuan Perseroan memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu, serta dikomunikasikan ke seluruh pegawai.

Penilaian risiko Perseroan dilakukan dengan:

Prinsip 6: Menetapkan Tujuan yang Relevan

Perseroan menetapkan tujuan secara jelas untuk implementasi proses identifikasi dan penilaian risiko-risiko terkait dengan tujuan.

Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Perseroan yang dituangkan dalam rencana strategis (Rencana Jangka Panjang Perusahaan), rencana kinerja tahunan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Tujuan Perseroan yang telah ditetapkan secara jelas dikomunikasikan pada semua pegawai. Manajemen menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis Perseroan.

Penetapan Tujuan pada Level Kegiatan

Penetapan tujuan pada level kegiatan berdasarkan pada tujuan dan rencana strategi Perseroan. Tujuan pada level kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Tujuan pada level kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama Perseroan dan mempunyai unsur kriteria pengukuran yang didukung oleh sumber daya Perseroan yang cukup. Kepala unit kerja mengidentifikasi tujuan pada level kegiatan yang menunjang pada keberhasilan Perseroan secara keseluruhan. Seluruh kepala unit kerja terlibat dalam proses penetapan tujuan pada level kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya.

Berikut ini merupakan atribut-atribut terkait dengan tujuan pengendalian internal:

1. Atribut Terkait Tujuan Operasional
   a. Mempertimbangkan toleransi risiko
      Manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima dalam pencapaian tujuan operasional.
   b. Menggambarkan pilihan manajemen
      Tujuan operasional menggambarkan pilihan manajemen terkait struktur, pertimbangan industri, dan kinerja Perseroan.
   c. Memasukkan target kinerja operasional dan keuangan
      Perseroan menggambarkan tingkat kinerja operasional dan keuangan yang diharapkan dalam tujuan operasional.
   d. Membangun dasar dalam mengalokasikan sumber daya
      Manajemen menggunakan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja operasional dan keuangan yang diharapkan.

Company. Therefore, risk assessment is the basis for determining how risk will be managed. Before conducting a risk assessment, the Company's objectives must first be determined at the activity level, which is divided into operational, reporting, and compliance objectives. The Company's goal setting contains statements and directions that are specific, measurable, achievable, realistic and time-bound, and communicated to all employees.

The Company's risk assessment is carried out by:

Principle 6: Setting Relevant Goals

The Company sets clear objectives for the implementation of risk identification and assessment related to the objectives.

Board of Directors and Board of Commissioners determine the Company's vision, mission, goals, and objectives as outlined in the strategic plan (Company Long-Term Plan), annual performance plan (Corporate Budget Work Plan), as well as the Company's Articles of Association. The Company's objectives that have been clearly defined are communicated to all employees. Management establishes an operational strategy that is consistent with the Company's strategic plan.

Goal Setting at Activity Level

Setting goals at the activity level is based on the objectives and strategic plans of the Company. Goals at the activity level complement each other, support each other, and do not conflict with one another. Objectives at the activity level are relevant to all of the Company's main activities and have elements of measurement criteria supported by sufficient Company resources. The head of work unit identifies goals at the activity level that support the overall success of the Company. All heads of work units are involved in the process of setting goals at the activity level and are committed to achieving them.

The following are attributes related to the objectives of internal control:

1. Attributes Related to Operational Objectives
   a. Considering risk tolerance
      Management considers the level of risk that is acceptable in achieving operational objectives.
   b. Describe management options
      Operational objectives describe management's choices regarding the structure, industry considerations, and performance of the Company.
   c. Include operational and financial performance targets
      The Company describes the level of operational and financial performance expected in the operational objectives.
   d. Establish a basis for allocating resources
      Management uses operational objectives as the basis for allocating resources required to achieve the expected operational and financial performance.

2. Atribut Terkait Tujuan Pelaporan
   Untuk tujuan pelaporan, atribut dibedakan menjadi pelaporan internal, pelaporan non-keuangan eksternal, dan pelaporan keuangan eksternal.
   a. Tujuan Pelaporan Internal (Keuangan dan/atau Non-Keuangan)
      - Mempertimbangkan tingkat akurasi
        Manajemen mempertimbangkan tingkat akurasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam tujuan pelaporan non-keuangan dan materialitas, serta dalam tujuan pelaporan keuangan.
      - Menggambarkan pilihan manajemen
        Pelaporan internal menyediakan informasi yang akurat dan lengkap terkait pilihan manajemen dan informasi yang dibutuhkan dalam mengelola Perseroan.
      - Menggambarkan aktivitas Perseroan
        Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.
   b. Tujuan Pelaporan Keuangan Eksternal
      - Mempertimbangkan materialitas
        Manajemen mempertimbangkan materialitas dalam penyajian laporan keuangan.
      - Mematuhi Standar Akuntansi Keuangan
        Tujuan pelaporan keuangan konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan tersedia di Perseroan. Prinsip akuntansi dipilih sesuai dengan keadaan.
      - Menggambarkan aktivitas Perseroan
   c. Tujuan Pelaporan Non-Keuangan Eksternal
      - Mempertimbangkan tingkat akurasi yang dipersyaratkan
        Manajemen menggambarkan tingkat akurasi yang dipersyaratkan yang cocok dengan kebutuhan pengguna laporan dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh pihak ketiga atas pelaporan non-keuangan.
      - Mematuhi standar dan kerangka yang dibangun pihak eksternal
        Manajemen menetapkan tujuan secara konsisten dengan standar dan kerangka yang dibangun oleh organisasi eksternal yang diakui.
      - Menggambarkan aktivitas Perseroan
        Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.
3. Atribut terkait Tujuan Kepatuhan
   a. Mempertimbangkan toleransi risiko
      Manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima terkait pencapaian tujuan kepatuhan.
   b. Mempertimbangkan aturan dan hukum eksternal
      Hukum dan aturan merupakan standar minimal yang diintegrasikan ke dalam tujuan kepatuhan.

Prinsip 7: Identifikasi dan Analisis Risiko

Perseroan mengidentifikasi risiko untuk mencapai tujuannya dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko dapat dikelola. Proses identifikasi dan analisis risiko diatur lebih lanjut dalam Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan.

2. Attributes Related to Reporting Purpose
   For reporting purposes, attributes are divided into internal reporting, external non-financial reporting, and external financial reporting.
   a. Purposes of Internal Reporting (Financial and/or Non-Financial)
      - Considering the degree of accuracy
        Management considers the level of accuracy appropriate to user needs for non-financial reporting purposes and materiality, as well as for financial reporting purposes.
      - Describe management options
        Internal reporting provides accurate and complete information regarding management choices and information needed to manage the Company.
      - Describe the Company's activities
        External reporting describes the underlying transactions and events within an acceptable range of limits.
   b. Objectives of External Financial Reporting
      - Considering materiality
        Management considers materiality in the presentation of the financial statements.
      - Complying with Financial Accounting Standards
        The objective of financial reporting is consistent with the accounting principles that are applicable and available in the Company. Accounting principles are chosen according to the circumstances.
      - Describe the Company's activities
   c. Purposes of External Non-Financial Reporting
      - Taking into account the level of accuracy required
        Management describes the required level of accuracy that matches the needs of report users and is based on criteria set by third parties for non-financial reporting.
      - Comply with standards and frameworks developed by external parties
        Management sets objectives consistently with standards and frameworks established by recognized external organizations.
      - Describe the Company's activities
        External reporting describes the underlying transactions and events within an acceptable range of limits.
3. Attributes related to Compliance Objectives
   a. Consider risk tolerance
      Management considers the acceptable level of risk regarding the achievement of compliance objectives.
   b. Taking into account external rules and laws
      Laws and regulations are minimal standards that are integrated into compliance objectives.

Principle 7: Risk Identification and Analysis

The Company identifies risks to achieve its objectives and analyzes risks as a basis for determining how risks can be managed. The risk identification and analysis process is further regulated in the Company's Risk Management Framework.

1. Melibatkan berbagai tingkatan manajemen
   Perseroan melaksanakan mekanisme penilaian risiko yang efektif dan melibatkan berbagai tingkatan manajemen.
2. Meliputi tingkatan entitas, anak usaha, divisi, unit operasional, dan fungsional
   Perseroan mengidentifikasi dan menilai risiko pada tingkat entitas, anak usaha, divisi, unit operasional, dan fungsional yang relevan dengan pencapaian tujuan Perseroan.
3. Menganalisis faktor internal dan eksternal
   Identifikasi risiko mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian tujuan Perseroan.
4. Mengestimasi tingkat kemungkinan dan signifikansi risiko yang teridentifikasi
   Risiko yang teridentifikasi dianalisis melalui suatu proses, termasuk estimasi tingkat kemungkinan dan potensi signifikansi.
5. Menentukan bagaimana merespons risiko
   Penilaian risiko termasuk mempertimbangkan bagaimana risiko-risiko signifikan seharusnya dikelola, dan apakah diterima, dihindari, dikurangi, atau di-*share*.

Prinsip 8: Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud*) dan Penyuapan

Organisasi mempertimbangkan potensi terjadi kecurangan (*fraud*) dan penyuapan dalam menilai risiko untuk pencapaian tujuan Perseroan.

1. Mempertimbangkan berbagai modus kecurangan (*fraud*)
   Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan kemungkinan kehilangan aset, laporan manipulatif, dan korupsi yang diakibatkan oleh berbagai cara untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dan tidak patut.
2. Mempertimbangkan faktor risiko
   Penilaian risiko mempertimbangkan faktor signifikan yang mempengaruhi kehilangan atas aset dan dampak signifikan terkait aktivitas operasional, pelaporan, dan kepatuhan.
3. Menilai insentif dan tekanan
   Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan insentif dan tekanan.
4. Menilai kesempatan
   Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan kesempatan untuk mengakuisisi, menggunakan, atau melepas aset secara tidak sah, mengubah catatan pelaporan entitas, atau melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) lainnya.
5. Menilai perilaku dan rasionalisasi
   Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan bagaimana manajemen dan pekerja lainnya dapat menjustifikasi tindakan tidak patut.
6. Menilai risiko penyuapan
   Penilaian risiko mempertimbangkan tindakan memberi/menerima suap kepada pihak eksternal/internal yang dapat mempengaruhi proses kerja dan pilihan keputusan pejabat pihak eksternal/internal sehingga mengeluarkan keputusan yang diinginkan dan memberi dampak kerugian bagi Perseroan.

1. Involve various levels of management
   The Company implements an effective risk assessment mechanism and involves various levels of management.
2. Covering the levels of entities, subsidiaries, divisions, operational units, and functional:
   The Company identifies and assesses risks at the entity, subsidiary, division, operational and functional levels that are relevant to the achievement of the Company's objectives.
3. Analyze internal and external factors
   Risk identification takes into account internal and external factors and how they impact the achievement of the Company's objectives.
4. Estimating the level of likelihood and significance of the identified risks
   Identified risks are analyzed through a process, including estimation of likelihood and potential significance.
5. Determine how to respond to risk
   The risk assessment includes considering how significant risks should be managed, and whether they are accepted, avoided, mitigated, or shared.

Principle 8: Fraud and Bribery Risk Assessment

The organization considers the potential for fraud and bribery in assessing risks for the achievement of the Company's objectives.

1. Consider various modes of fraud
   The fraud risk assessment considers the possibility of asset loss, manipulative reporting, and corruption caused by various ways to commit fraud and improper actions.
2. Considering risk factors
   The risk assessment considers significant factors that affect the loss of assets and significant impacts related to operational, reporting and compliance activities.
3. Assess incentives and pressures
   The fraud risk assessment considers incentives and pressures.
4. Assess opportunities
   The fraud risk assessment considers opportunities to unlawfully acquire, use, or dispose of assets, alter the entity's reporting records, or commit other fraudulent acts.
5. Assess behavior and rationalization
   A fraud risk assessment considers how management and other employees can justify inappropriate behavior.
6. Assess bribery risk
   The risk assessment considers the act of giving/accepting bribes to external/internal parties that can affect the work process and decision choices of external/internal party officials so as to issue the desired decisions and result in losses for the Company.

Prinsip 9: Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan Signifikan

1. Menilai perubahan lingkungan eksternal
   Proses identifikasi risiko mempertimbangkan perubahan faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mencapai tujuannya.
2. Menilai perubahan model bisnis
   Perseroan mempertimbangkan dampak potensial dari bisnis baru, perubahan besar pada komposisi bisnis yang ada, mengakuisisi atau melepas operasi bisnis terhadap Sistem Pengendalian Internal, perubahan geografi luar negeri, teknologi baru, dan perubahan lingkungan fisik di mana bisnis beroperasi.
3. Menilai perubahan kepemimpinan
   Perseroan mempertimbangkan perubahan dalam manajemen, yaitu perilaku dan filosofi manajemen terhadap Sistem Pengendalian Internal.

Principle 9: Identify and Analyze Significant Changes

1. Assess changes in the external environment
   The risk identification process takes into account changes in external factors that significantly affect the Company's ability to achieve its objectives.
2. Assess business model changes
   The Company considers the potential impact of a new business, major changes to the composition of the existing business, acquiring or divesting business operations of the Internal Control System, changes in overseas geography, new technologies, and changes in the physical environment in which the business operates.
3. Assess leadership changes
   The Company considers changes in management, namely the behavior and management philosophy of the Internal Control System.

KEGIATAN PENGENDALIAN *(CONTROL ACTIVITIES)*- PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dibangun melalui kebijakan dan prosedur yang membantu untuk menjamin arahan manajemen dapat dilaksanakan dengan benar. Kegiatan pengendalian dilaksanakan di semua tingkatan Perseroan di berbagai tahapan proses bisnis, dan di lingkungan teknologi. Kegiatan pengendalian dapat bersifat preventif atau detektif dan meliputi aktivitas manual dan otomatis. Pemisahan fungsi dibangun dalam penetapan dan pengembangan aktivitas pengendalian. Ketika pemisahan fungsi tidak praktis, manajemen menetapkan dan mengembangkan pengendalian kompensatif.

CONTROL ACTIVITIES - FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL

Control activities are actions that are built through policies and procedures that help to ensure that management directives can be carried out correctly. Control activities are carried out at all levels of the Company at various stages of the business process, and in the technology environment. Control activities can be preventive or detective and include both manual and automated activities. The separation of functions is built into the establishment and development of control activities. When segregation of functions is impractical, management establishes and develops compensatory controls.

Prinsip 10: Menetapkan dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian

Perseroan menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian untuk memitigasi risiko signifikan terhadap pencapaian tujuan Perseroan ke level yang dapat diterima.

1. Terintegrasi dengan proses penilaian risiko
   Aktivitas pengendalian membantu dan menjamin respons risiko telah dilaksanakan dalam mengatasi dan memitigasi risiko signifikan. Setelah proses penilaian risiko, manajemen mengidentifikasi dan mengimplementasikan aktivitas yang diperlukan untuk merespons risiko tertentu.
2. Menentukan proses bisnis yang relevan
   Manajemen menentukan proses bisnis yang relevan yang membutuhkan aktivitas pengendalian.
3. Mempertimbangkan faktor spesifik entitas
   Manajemen mempertimbangkan kompleksitas, sifat, dan operasional lingkungan, serta karakteristik spesifik dari Perseroan yang mempengaruhi pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian.
4. Mengevaluasi bauran tipe aktivitas pengendalian
   Aktivitas pengendalian termasuk rentang, variasi, dan bauran pengendalian untuk memitigasi risiko, dengan mempertimbangkan pengendalian manual dan otomatis, serta pengendalian preventif dan detektif.
5. Menerapkan pemisahan fungsi/tugas
   Manajemen memisahkan fungsi/tugas yang tidak kompatibel (tidak dapat bersamaan), dan ketika pemisahan tersebut menjadi tidak praktis dan efisien, manajemen

Principle 10: Establish and Develop Control Activities

The Company establishes and develops control activities to mitigate significant risks to the achievement of the Company's objectives to an acceptable level.

1. Integrated with risk assessment process
   Control activities assist and ensure that risk responses have been implemented to address and mitigate significant risks. Following the risk assessment process, management identifies and implements the activities required to respond to specific risks.
2. Define relevant business processes
   Management determines the relevant business processes that require control activities.
3. Taking into account entity-specific factors
   Management considers the complexity, nature, and operational environment, as well as the specific characteristics of the Company that affect the selection and development of control activities.
4. Evaluating the mix of control activity types
   Control activities include the range, variety, and mix of controls to mitigate risk, taking into account manual and automated controls, as well as preventive and detective controls.
5. Implement segregation of functions/duties
   Management separates incompatible functions/tasks (cannot concurrently), and when such separation becomes impractical and efficient, management determines and

menentukan dan mengembangkan aktivitas pengendalian alternatif (pengendalian kompensatif).

Pemisahan fungsi umumnya membagi tanggung jawab pencatatan, otorisasi, dan persetujuan transaksi, serta penanganan aset terkait. Ketidakadaan pemisahan fungsi dan pengendalian kompensatif akan:

a. Membuat pengendalian internal menjadi tidak efektif, sehingga dapat menimbulkan tindakan kecurangan (*fraud*);
b. Memitigasi risiko terjadinya *management override* (pengabaian manajemen), yang sering terjadi saat melakukan kecurangan (*fraud*);
c. Pemisahan fungsi juga mengurangi risiko kecurangan (*fraud*) oleh satu orang dan risiko kesalahan karena para pihak terpisah tidak saling mereviu pekerjaan pihak lainnya; dan
d. Namun, kadang kala pemisahan fungsi tidak praktis atau tidak efisien. Dalam situasi ini, manajemen menetapkan dan mengembangkan pengendalian internal alternatif sebagai kompensasi dari tidak diterapkannya prinsip pengendalian internal.

Pemisahan fungsi diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan, dan pemborosan. Pemisahan fungsi di lingkungan Perseroan, dilakukan dengan memastikan bahwa:

a. Tidak seorang pun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama kejadian dan transaksi dari awal sampai akhir proses;
b. Pemisahan tanggung jawab dan tugas atas kejadian dan transaksi kepada pegawai yang berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset;
c. Pembagian tugas kepada lebih dari satu orang pegawai dilakukan secara sistematik untuk memberikan keyakinan adanya *check and balances*; dan
d. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kolusi.

Prinsip 11: Menetapkan dan Mengembangkan Pengendalian Umum *(General Controls)* terhadap Teknologi

1. Menentukan ketergantungan antara penggunaan teknologi dalam proses bisnis dan pengendalian umum teknologi
   Manajemen memahami dan menentukan ketergantungan otomatis, dan pengendalian umum teknologi.

2. Membangun aktivitas pengendalian atas infrastruktur teknologi
   Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian atas infrastruktur teknologi, yang dirancang dan diimplementasikan untuk membantu menjamin kelengkapan, akurasi, dan keberlangsungan proses teknologi.
3. Membangun aktivitas pengendalian atas proses manajemen keamanan
   Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang didesain dan diimplementasikan untuk membatasi hak akses teknologi hanya bagi pengguna

develops alternative control activities (compensative control).

Segregation of functions generally divides the responsibilities of recording, authorizing, and approving transactions, and handling the associated assets. The absence of segregation of functions and compensatory controls will:

a. Making internal control ineffective, hence can lead to fraud;

b. Mitigating the risk of management override, which often occurs when committing fraud;

c. The separation of functions also reduces the risk of fraud by one person and the risk of error because the separate parties do not review each other's work; and

d. However, sometimes separation of functions is impractical or inefficient. In this situation, management establishes and develops alternative internal controls as compensation for not applying the principles of internal control.

Segregation of functions is geared towards reducing errors, fraud, and waste. The separation of functions within the Company is carried out by ensuring that:

a. No one is allowed to control all major aspects of events and transactions from start to finish;

b. Segregation of responsibilities and duties for events and transactions to different employees relating to authorization, approval, processing and recording, payment or receipt of funds, reviews and audits, and asset storage and handling functions;
c. The division of tasks to more than one employee is carried out systematically to ensure that there are checks and balances; and
d. The Board of Directors establishes policies to reduce opportunities for collusion.

Principle 11: Establish and Develop General Controls on Technology

1. Determine the dependence between the use of technology in business processes and general technology control
   Management understands and determines the dependencies and relationships between business processes, automated control activities, and general technology controls.
2. Establish control activities over technology infrastructure
   Management establishes and develops control activities over the technology infrastructure, which are designed and implemented to help ensure the completeness, accuracy, and continuity of the technological process.

3. Establish control activities over the security management process
   Management establishes and develops control activities designed and implemented to limit technology access rights only to authorized users in accordance with their

terotorisasi sesuai dengan tanggung jawab tugasnya dan untuk melindungi aset Perseroan dari ancaman eksternal dan internal.

4. Membangun aktivitas pengendalian atas proses akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi
   Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian terkait akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi dan infrastrukturnya, untuk mencapai tujuan Perseroan. Secara detail, pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*) atas sistem informasi diatur dalam Kerangka Sistem Informasi Perseroan.

responsibilities and to protect the Company's assets from external and internal threats.

4. Establish control activities over the technology acquisition, development, and maintenance process
   Management establishes and develops control activities related to the acquisition, development, and maintenance of technology and infrastructure, to achieve the Company's objectives. In detail, general control and application control over the information system are regulated in the Company's Information System Framework.

Prinsip 12: Implementasi melalui Kebijakan dan Prosedur
Perseroan menjalankan aktivitas pengendalian dalam bentuk kebijakan yang merupakan pernyataan apa yang diharapkan dan prosedur untuk menjalankan kebijakan tersebut.

1. Pembentukan kebijakan prosedur untuk mendukung pelaksanaan arahan manajemen
   Manajemen membentuk aktivitas pengendalian yang dibangun ke dalam proses bisnis dan aktivitas sehari-hari para pekerja, melalui kebijakan dan prosedur.
2. Membangun tanggung jawab dan akuntabilitas untuk pelaksanaan kebijakan dan prosedur
   Manajemen membangun tanggung jawab dan akuntabilitas atas aktivitas pengendalian melalui personel yang ditunjuk dari unit bisnis atau fungsi, di mana risiko relevan berada.
3. Implementasi oleh pekerja kompeten
   Pekerja kompeten dapat melaksanakan aktivitas pengendalian dengan tekun dan berkelanjutan.
4. Implementasi secara tepat waktu
   Pekerja melaksanakan aktivitas pengendalian secara tepat waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur.
5. Mengambil tindakan korektif
   Pekerja yang bertanggung jawab dapat melakukan investigasi dan merespons permasalahan yang teridentifikasi dari pelaksanaan aktivitas pengendalian.
6. Mereviu kebijakan dan prosedur
   Manajemen secara periodik mereviu aktivitas pengendalian untuk menilai apakah masih relevan dan dapat diperbaharui jika diperlukan.

Principle 12: Implementation through Policies and Procedures
The Company carries out control activities in the form of policies which are statements of what is expected and the procedures for implementing these policies.

1. Establishment of procedural policies to support the implementation of management directives
   Management establishes control activities that are built into business processes and daily activities of workers, through policies and procedures.
2. Establish responsibility and accountability for the implementation of policies and procedures
   Management establishes responsibility and accountability for control activities through designated personnel from the business unit or function, where the relevant risk is located.
3. Implementation by competent workers
   Competent workers can carry out control activities diligently and continuously.
4. Implementation in a timely manner
   Employees carry out control activities in a timely manner as stipulated in the policies and procedures.
5. Take corrective action
   Responsible workers can investigate and respond to problems identified from the implementation of control activities.
6. Reviewing policies and procedures
   Management periodically reviews control activities to assess whether they are still relevant and can be updated if necessary.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Dalam meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, Perseroan memiliki Komite di bawah Direksi yaitu Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang memiliki tugas memberikan opini atas kelengkapan dan kesesuaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan Mempertimbangkan toleransi risiko yaitu manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima terkait pencapaian tujuan kepatuhan serta mempertimbangkan aturan dan hukum eksternal yaitu Hukum dan aturan merupakan standar minimal yang diintegrasikan ke dalam tujuan kepatuhan.

COMPLIANCE WITH OTHER LAW REGULATIONS

In improving the Company's compliance with laws and regulations, the Company has a Committee under the Board of Directors, namely the Governance, Risk Management and Compliance Committee, which is tasked to providing opinions on the completeness and conformity of compliance with laws and regulations. Compliance with laws and regulations is carried out by taking into account risk tolerance, i.e., the management considers the acceptable level of risk related to the achievement of compliance objectives and considers external rules and laws, which are Laws and regulations that are the minimum standards and integrated into the compliance objectives.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI *(INFORMATION & COMMUNICATION)*

Direksi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi (keuangan dan non-keuangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu dan bentuk (format) yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawabannya. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, baik komunikasi di lingkungan Perseroan maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait.

Penyelenggaraan komunikasi yang efektif di Perseroan dilakukan dengan:

Prinsip 13: Menggunakan Informasi Relevan

Perseroan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas, relevan untuk mendukung efektivitas komponen-komponen pengendalian internal.

1. Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan
   Suatu proses dilaksanakan untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan diharapkan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal dan pencapaian tujuan Perseroan.
2. Mendapatkan data eksternal dan internal
   Sistem informasi dapat memperoleh data eksternal dan internal.
3. Memproses data relevan menjadi informasi
   Sistem informasi memproses dan mengubah data relevan menjadi informasi.
4. Memelihara kualitas selama proses berlangsung
   Sistem informasi menghasilkan informasi secara tepat waktu, terkini, akurat, lengkap, dapat diakses, terlindungi, dan dapat diverifikasi, serta dapat disimpan. Informasi direviu untuk menilai relevansinya dalam mendukung efektivitas pengendalian internal.
5. Mempertimbangkan biaya dan manfaat
   Sifat, kuantitas, dan akurasi informasi disinkronkan dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

Prinsip 14: Komunikasi secara Internal

Perseroan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab atas pengendalian internal, yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal.

1. Mengkomunikasikan pengendalian internal atas informasi ke para pekerja
   Suatu proses dilaksanakan untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan agar para pekerja dapat memahami dan melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal mereka.
2. Mengkomunikasikan dengan Dewan Komisaris
   Terdapat komunikasi antara manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga mereka memiliki informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi peran mereka dalam mencapai tujuan Perseroan.
3. Menyediakan garis komunikasi yang terpisah
   Jalur komunikasi terpisah diterapkan sebagai *fail safe*

INFORMATION & COMMUNICATION

Board of Directors is required to identify, record, and communicate information (financial and non-financial) related to the implementation of its main tasks and functions in the right time and form (format) to facilitate its implementation, control and accountability. Communication of information must be carried out effectively, both within the Company's environment and communication with related external parties.

Effective communication in the Company is carried out by:

Principle 13: Using Relevant Information

The Company obtains or produces and uses quality, relevant information to support the effectiveness of the components of internal control.

1. Identify the information needed
   A process is implemented to identify the information needed and expected to support the effectiveness of internal control and the achievement of the Company's objectives.
2. Obtain external and internal data
   Information systems can obtain external and internal data.
3. Processing relevant data into information
   Information systems process and convert relevant data into information.
4. Maintain quality throughout the process
   Information systems produce information that is timely, current, accurate, complete, accessible, protected, and verifiable, and can be stored. Information is reviewed to assess its relevance in supporting the effectiveness of internal control.
5. Considering costs and benefits
   The nature, quantity, and accuracy of information are synchronized to support the achievement of the Company's objectives.

Principle 14: Internal Communication

The Company communicates information internally, including the objectives and responsibilities for internal control, which is needed to support the effectiveness of internal control.

1. Communicating internal control over information to employees
   A process is implemented to communicate the information needed to enable employees to understand and carry out their internal control responsibilities.
2. Communicating with the Board of Commissioners
   There is communication between the management/Board of Directors and the Board of Commissioners, so that they have the information needed to fulfill their role in achieving the Company's goals.
3. Provide separate line of communication
   Separate line of communication is implemented as fail

mechanisms untuk dijalankan sebagai komunikasi anonim atau rahasia ketika jalur normal tidak beroperasi atau tidak efektif. Seperti saluran khusus *whistleblower*.

4. Menetapkan metode komunikasi relevan
   Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, audiens/pendengar, dan dan sifat informasi.

Prinsip 15: Komunikasi secara Eksternal

Perseroan mengkomunikasikan dengan pihak eksternal terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal.

1. Komunikasi dengan pihak eksternal
   Suatu proses diterapkan untuk mengkomunikasikan informasi relevan dan secara tepat waktu ke pihak eksternal termasuk pemegang saham, partner, pemilik, pemerintah, konsumen, analis keuangan, serta pihak eksternal lainnya;
2. Memudahkan komunikasi masuk
   Jalur komunikasi terbuka memudahkan *input* dari konsumen, pemasok, auditor eksternal, pemerintah, analis keuangan, dan lainnya, untuk menyediakan informasi relevan bagi manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Menyediakan garis komunikasi yang terpisah
   Jalur komunikasi terpisah diterapkan sebagai *fail safe mechanisms* untuk dijalankan sebagai komunikasi anonim atau rahasia ketika jalur normal tidak beroperasi atau tidak efektif. Seperti saluran khusus *whistleblower*;
4. Komunikasi dengan Dewan Komisaris
   Informasi relevan dihasilkan dari penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal dikomunikasikan kepada manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Menetapkan metode komunikasi
   Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, audiens/pendengar, sifat komunikasi, serta ketentuan perjanjian dan aturan pemerintah;
6. Menerapkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dengan pegawai dan pihak lain yang terkait, antara lain melalui:
   a. Penyusunan buku pedoman pelaksanaan kebijakan dan prosedur;
   b. Surat edaran;
   c. Memorandum;
   d. Pengumuman;
   e. Pemanfaatan intranet dan internet; dan
   f. Arahan lisan.
7. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi secara terus menerus, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pengembangan sistem informasi didasarkan pada rencana strategis pengembangan sistem informasi yang merupakan bagian dari rencana strategis Perseroan secara menyeluruh;
   b. Mekanisme identifikasi perkembangan kebutuhan informasi;
   c. Perkembangan dan kemajuan teknologi;
   d. Pemantauan secara berkelanjutan terhadap mutu informasi yang mencakup ketepatan isi, akurasi, dan kemudahan mengakses informasi; dan

safe mechanisms to operate as anonymous or confidential communications when normal lines are inoperative or ineffective. Such as a special whistleblower channel.

4. Establish relevant communication methods
   The method of communication takes into account the time, the audience/listener, and the nature of the information.

Principle 15: External Communication

The Company communicates with external parties regarding matters that affect the effectiveness of internal control.

1. Communication with external parties
   A process is implemented to communicate relevant and timely information to external parties including shareholders, partners, owners, governments, consumers, financial analysts and other external parties;
2. Facilitate incoming communication
   Open lines of communication facilitate input from consumers, suppliers, external auditors, government, financial analysts, and others, to provide relevant information to management/Board of Directors and the Board of Commissioners;
3. Provide a separate line of communication
   Separate communication lines are implemented as fail safe mechanisms to operate as anonymous or confidential communications when normal lines are inoperative or ineffective. Like a special whistleblower channel;
4. Communication with the Board of Commissioners
   Relevant information generated from the assessment carried out by external parties is communicated to the management/Board of Directors and the Board of Commissioners;
5. Establish communication methods
   The communication method takes into account the timing, audience, nature of communication, as well as the terms of agreement and government regulations;
6. Appy various forms and means of communication with employees and other related parties, including through:
   a. Preparation of guidelines for implementing policies and procedures;
   b. Circular letter;
   c. Memorandum;
   d. Announcement;
   e. Utilization of intranet and internet; and
   f. Oral directions.
7. Manage, develop, and update information systems to improve the usability and reliability of communication on an ongoing basis, taking into account the following:
   a. Information system development is based on the strategic plan for developing information systems which is part of the Company's overall strategic plan;
   b. Mechanism to identify the development of information needs;
   c. Technological developments and advancements;
   d. Continuous monitoring of the quality of information which includes content accuracy, accuracy, and ease of accessing information; and

e. Kecukupan sumber daya manusia dan dana untuk pengembangan teknologi informasi.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Monitoring adalah proses menilai kualitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui:

Prinsip 16: Melakukan Evaluasi *Ongoing*/Berjalan dan/atau Terpisah

Perseroan menetapkan, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berjalan dan/atau terpisah untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal telah didesain secara memadai dan efektif.

1. Mempertimbangkan bauran evaluasi berjalan dan terpisah
   Manajemen menyeimbangkan bauran evaluasi berjalan dan terpisah.
2. Mengembangkan pemahaman titik awal
   Desain dan kondisi berjalan dari Sistem Pengendalian Internal digunakan untuk membangun titik awal untuk evaluasi berjalan dan terpisah.
3. Mempertimbangkan tingkat perubahan
   Manajemen mempertimbangkan tingkat perubahan dalam proses bisnis ketika menetapkan dan mengembangkan evaluasi berjalan dan terpisah.
4. Menggunakan pekerja yang kompeten
   Evaluator yang melaksanakan evaluasi berjalan dan terpisah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami apa yang sedang dievaluasi.
5. Terintegrasi dengan proses bisnis
   Evaluasi berjalan dibangun dalam proses bisnis dan disesuaikan dengan perubahan kondisi.
6. Evaluasi secara obyektif
   Evaluasi terpisah dilaksanakan secara periodik untuk memberikan masukan yang objektif.
7. Menyesuaikan lingkup dan frekuensi
   Manajemen menyesuaikan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah, tergantung pada risiko.

Prinsip 17: Evaluasi dan Komunikasi Kelemahan Pengendalian Internal

Perseroan mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada para pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan koreksi, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Menilai hasil
   Direksi dan Dewan Komisaris menilai hasil evaluasi berjalan dan terpisah.
2. Mengkomunikasikan kelemahan kepada manajemen
   Kelemahan dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan koreksi dan kepada setidaknya manajemen satu tingkat ke atas.
3. Melaporkan kelemahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
   Kelemahan signifikan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, jika diperlukan.
4. Memonitor tindakan koreksi
   Manajemen memonitor apakah kelemahan diperbaiki secara baik dan tepat waktu.

e. Adequacy of human resources and funds for the development of information technology.

MONITORING AND EVALUATION

Monitoring is the process of assessing the quality of the Company's Internal Control System within a certain period of time. Monitoring and evaluation is carried out through:

Principle 16: Conduct Ongoing/Walking and/or Separate Evaluations

The Company establishes, develops, and carries out ongoing and/or separate evaluations to ensure that internal controls have been designed adequately and effectively.

1. Consider a mix of ongoing and separate evaluations
   Management balances the mix of ongoing and separate evaluations.
2. Develop an understanding of starting points
   The design and running state of the Internal Control System is used to establish a starting point for ongoing and separate evaluations.
3. Consider the rate of change
   Management considers the degree of change in business processes when establishing and developing ongoing and separate evaluations.
4. Using competent workers
   Evaluators who carry out ongoing and separate evaluations have sufficient knowledge to understand what is being evaluated.
5. Integrated with business processes
   Ongoing evaluation is built into business processes and adapted to changing conditions.
6. Evaluation objectively
   Separate evaluations are carried out periodically to provide objective input.
7. Adjust the scope and frequency
   Management adjusts the scope and frequency of separate evaluations, depending on the risk.

Principle 17: Evaluation and Communication of Internal Control Weaknesses

The Company evaluates and communicates internal control weaknesses in a timely manner to the parties responsible for taking corrective action, including the Board of Directors and the Board of Commissioners.

1. Assess results
   Board of Directors and Board of Commissioners assess the results of ongoing and separate evaluations.
2. Communicating weaknesses to management
   Weaknesses are communicated to those responsible for taking corrective action and to at least one level of management and above.
3. Report weaknesses to Board of Directors and Board of Commissioners
   Significant weaknesses are reported to Board of Directors and Board of Commissioners, if necessary.
4. Monitor corrective actions
   Management monitors whether weaknesses are corrected properly and in a timely manner.

KESESUAIAN DENGAN *COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF TRADEWAY COMMISSION* (COSO)

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah mengacu ke COSO Internal *Control Integrated Framework* Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian *(Control Environment);*
2. Penilaian Risiko *(Risk Assessment);*
3. Kegiatan Pengendalian *(Control Activities);*
4. Informasi dan Komunikasi *(Information & Communication);* dan
5. Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring).

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta konsistensi implementasinya. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2021 telah dilakukan secara *self assessment* dengan hasil bahwa seluruh Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terbukti dapat berjalan cukup efektif. Hal tersebut menunjukan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mematuhi elemen-elemen pengendalian internal yang telah disusun.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada tahun 2021. Kecukupan pengendalian internal tercermin dalam laporan hasil audit yang telah disampaikan oleh SPI kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

COMPLIANCE WITH THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF TRADEWAY COMMISSION (COSO)

The Company's Internal Control System has referred to the COSO Internal Control Integrated Framework. The COSO internal control conceptual framework as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control consists of 5 (five) components:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication; and
5. Monitoring and Evaluation.

INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regularly evaluates the effectiveness of Internal Control System, aims to assess the reliability of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Internal Control System and the consistency of its implementation. The 2021 internal control system implementation was evaluated by self-assessment with the result that the entire Internal Control System of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has proven to be quite effective. This shows that PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has complied with the internal control elements that have been prepared.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Commissioners expresses its appreciation for the performance achieved by the Internal Audit Unit (SPI) in 2021. The adequacy of internal control is reflected in the audit report that has been submitted by IAU to the Board of Directors and Board of Commissioners.

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat eksposur risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi dan menciptakan nilai perusahaan. Perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada ISO 31000:2018. Setiap perusahaan pasti menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Target Perusahaan mencakup berbagai aspek, nilai dari aspek strategis, operasional, finansial, pembentukan citra perusahaan keselarasan hukum dan kepatuhan, lingkungan serta keselamatan kerja.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Pelindo telah mengadopsi standar arsitektur manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 *Risk Management Guidelines*, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko.

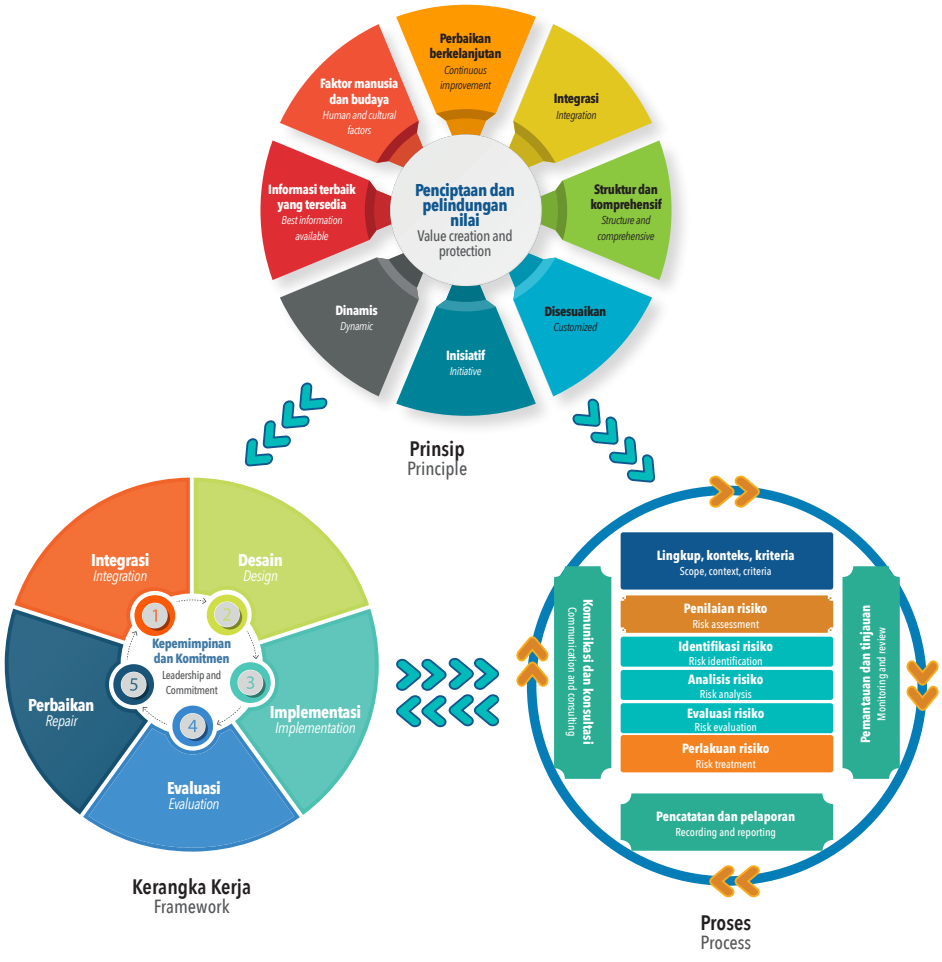
RISK MANAGEMENT

Risk management is one of the important elements in running the company's business because the growing world of the company and the increasing complexity of company activities have resulted in an increase in the level of risk exposure faced by the company. The main objective of implementing risk management is to protect and create corporate value. The company manages risk by balancing its business strategy with risk management so that the company can obtain optimal results from its operations.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) applies risk management that refers to ISO 31000:2018. Every company certainly has to deal with risks that can affect the achievement of targets that have been set. The Company's targets cover various aspects, values from strategic, operational, financial aspects, corporate image formation, legal and compliance, environmental and work safety aspects.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Pelindo has adopted the risk management architecture standard based on ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines, which consists of 3 (three) parts, namely Principles, Framework and Risk Management Process.



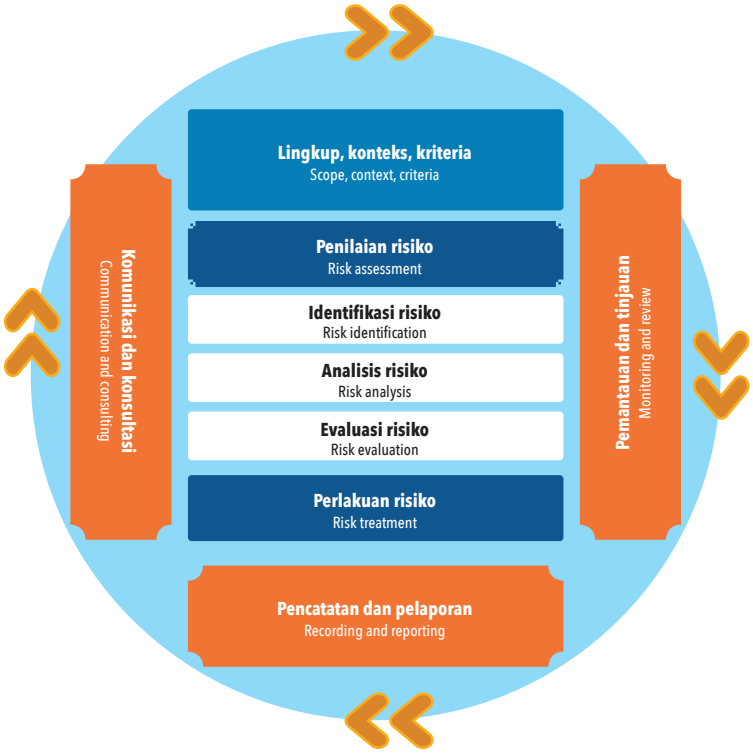
SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko melibatkan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan dan pelaporan risiko.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management process involves systematic application of policies, procedures and practices to communication and consulting activities, context setting, and risk assessment, treatment, monitoring, review, recording and reporting.

PROSES MANAJEMEN RISIKO
Risk management process



Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi membantu *risk owner* dalam memahami risiko, sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang dipelukan. Komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sementara konsultasi mencakup umpan balik (*feedback*) dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat dan dapat dimengerti. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu.

Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria

Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang memadai. Ruang lingkup, konteks dan kriteria mencakup penentuan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal.

Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. Penilaian risiko sebaiknya dilakukan secara sistematis, berulang dan kolaboratif berdasarkan pengetahuan dan pandangan pemangku kepentingan.

Communication and Consultation

Communication and consultation helps the risk owner in understanding the risk, as the basis for making decisions and the reasons for taking required actions. Communication will increase awareness and understanding of risk, while consultation includes feedback and information obtained to support decision making. Coordination must be factual, timely, relevant, accurate and understandable. Information exchange must pay attention to the confidentiality and integrity of information, including individual copyrights.

Scope, Context and Criteria

The purpose of establishing the scope, context and criteria is to adapt the risk management process, enable effective risk assessment and adequate risk assessment. Scope, context and criteria include determining the scope of the process and understanding the external and internal context.

Risk Assessment

Risk Assessment is a comprehensive process of risk identification, risk analysis and risk evaluation. Risk assessment should be carried out in a systematic, iterative and collaborative manner based on the knowledge and views of stakeholders.

1. Identifikasi risiko
   Tujuan identifikasi risiko adalah untuk menemukan, mengenali dan menguraikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasarannya. Informasi yang relevan, memadai dan mutakhir penting dalam mengidentifikasi risiko. Perseroan mengidentifikasi risiko tanpa memandang apakah sumber risiko dapat dikendalikan atau tidak.
2. Analisis Risiko
   Tujuan analisis risiko adalah untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya, termasuk, jika memungkinkan tingkat risikonya. Analisis risiko melibatkan pertimbangan mendetail terhadap ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa, *scenario*, kendali dan efektivitas kendali tersebut. Analisis risiko dapat dilakukan dengan beragam tingkat detail dan kompleksitas, bergantung pada tujuan analisis, ketersediaan dan keandalan informasi serta ketersediaan sumber daya. Analisis risiko memberikan masukan untuk evaluasi risiko, untuk keputusan apakah risiko memerlukan perlakuan dan bagaimana perlakuannya, serta terhadap strategi dan metode perlakuan risiko yang paling sesuai.
3. Evaluasi Risiko
   Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi risiko melibatkan pembandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan tambahan.

Perlakuan Risiko

Tujuan perlakuan risiko adalah untuk memilih dan menerapkan opsi penanganan risiko. Perlakuan risiko mencakup proses berulang dari:

1. Formulasi dan seleksi opsi perlakuan risiko;
2. Perencanaan dan implementasi perlakuan risiko;
3. Penilaian efektivitas perlakuan itu;
4. Pengambilan keputusan apakah risiko tersisa dapat diterima; dan
5. Pelaksanaan perlakuan lanjutan, jika opsi tidak diterima.

Monitoring* dan *Review

Bentuk *monitoring* dan *review* terdiri atas:

1. *Monitoring* berkelanjutan (*on going monitoring*)
   Unit pemilik risiko secara terus menerus melakukan *monitoring* atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan perusahaan. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam:
   a. Ruang lingkup dan konteks;
   b. Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas risiko;
   c. Sistem pengendalian/media kontrol yang sudah ada; dan
   d. Penanganan risiko.

1. Risk identification
   The purpose of risk identification is to find, identify and describe risks that can help or hinder the organization in achieving its goals. Relevant, adequate and up-to-date information is important in identifying risks. The Company identifies risks regardless of whether the source of the risk can be controlled or not.

2. Risk Analysis
   The purpose of risk analysis is to understand the nature of the risk and its characteristics, including, if possible, the level of risk. Risk analysis involves a detailed consideration of the uncertainties, sources of risk, impacts, possibilities, events, scenarios, controls and the effectiveness of those controls. Risk analysis can be carried out with varying levels of detail and complexity, depending on the purpose of the analysis, the availability and reliability of the information and the availability of resources. Risk analysis provides input for risk evaluation, for decisions on whether risks need treatment and how to treat them, as well as on the most appropriate risk treatment strategies and methods.

3. Risk Evaluation
   The purpose of risk evaluation is to support decision making. Risk evaluation involves comparing the results of risk analysis with the established risk criteria to determine whether additional action is required.

Risk Treatment

The purpose of risk treatment is to select and implement risk treatment options. Risk treatment includes an iterative process of:

1. Formulation and selection of risk treatment options;
2. Planning and implementation of risk treatment;
3. Assessment of the effectiveness of treatment;
4. Decision making whether the remaining risk is acceptable; and
5. Implementation of further treatment, if the option is not accepted.

Monitoring and Review

The form of monitoring and review consists of:

1. On going monitoring
   The risk owner unit continuously monitors all factors that affect the risk and environmental conditions of the company. If there is a planned organizational change or a changing external environment, changes are most likely to occur in:
   a. The scope and context;
   b. The risk that occurs or the priority level of risk;
   c. Existing control system/control media; and
   d. Risk handling.

Dalam hal terjadi perubahan signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil risiko. *Monitoring* dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dalam proses bisnis perusahaan.

2. *Monitoring* berkala
   Monitoring risiko dilakukan untuk memantau pelaksanaan realisasi penanganan risiko, analisis status indikator risiko utama serta tren perubahan tingkat eksposur risiko. Setelah dilakukan *monitoring* oleh *risk owner*, dilakukan pembahasan profil risiko bersama fungsi manajemen risiko dan *risk owner* yang dihadiri minimal terdiri dari *risk agent* dan *risk officer*.

3. *Review*
   Review Implementasi manajemen risiko bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan *output* seluruh proses manajemen risiko dengan ketentuan yang berlaku. *Review* implementasi manajemen risiko dilaksanakan oleh fungsi manajemen risiko dan/atau pengelola risiko/pemilik risiko sesuai kewenangannya.

Pencatatan dan Pelaporan

Proses dan hasil keluaran manajemen risiko sebaiknya didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk:

1. Mengkomunikasikan aktivitas manajemen risiko dan hasil keluaran dari proses manajemen risiko;
2. Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan;
3. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko; dan
4. Membantu interaksi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk aktivitas manajemen risiko.

In the event of a significant change, it is possible to reassess the risk profile. Monitoring is carried out regularly and becomes part of the company's business processes.

2. Periodic monitoring
   Risk monitoring is carried out to monitor the implementation of the realization of risk management, analysis of the status of main risk indicators as well as trends in changes in the level of risk exposure. After monitoring by the risk owner, a discussion of the risk profile is carried out with the risk management function and risk owner, which consists of at least risk agents and risk officers.
3. Review
   The risk management review aims to see the suitability of the implementation and the output of the entire risk management process with applicable regulations. The risk management = review is carried out by the risk management function and/or risk manager/risk owner according to their respective authorities.

Recording and Reporting

Risk management processes and outputs should be documented and reported through appropriate mechanisms. Recording and reporting aims to:

1. Communicating risk management activities and the outputs of risk management process;
2. Provide information for decision making;
3. Increase the effectiveness of risk management; and
4. Assist in interaction with Board of Directors, Board of Commissioners and Risk Management Monitoring Committee, including those who have responsibility and accountability for risk management activities.

PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 (sebelum integrasi Pelindo) Perusahaan mengelola risiko dengan lingkup eks-Pelindo 2. Setelah tanggal 1 Oktober 2021, di mana telah dilakukan legal merger Pelindo 1, 2, 3 dan 4, Perusahaan kemudian menyusun ulang profil risiko tahun 2021 sebagai dampak adanya perubahan kondisi internal (perubahan struktur organisasi, penempatan ulang Sumber Daya Manusia, perubahan kebijakan perusahaan dan lain-lain) dan kondisi eksternal perusahaan (integrasi Pelindo, perubahan Aspirasi Pemegang Saham dan lainnya). Pada tabel di bawah ini ditunjukan Profil dan Peta Risiko Tahun 2021 Perusahaan pasca integrasi Pelindo yang merupakan data konsolidasi dari eks-Pelindo 1, 2, 3 dan 4.

RISK PROFILE AND THE MANAGEMENT

Until the third quarter of 2021 (before the integration of Pelindo), the Company manages risks withIN the scope of ex-Pelindo 2. After October 1, 2021, where the legal merger of Pelindo 1, 2, 3 and 4 has been performed, the Company then rearranged the risk profile for 2021 as the impact of changes in internal conditions (changes in organizational structure, relocation of Human Capital, changes in company policies and others) and external conditions of the company (Pelindo integration, changes in Shareholders' Aspirations and others). The table below shows the Company's 2021 Risk Profile and Map after the integration of Pelindo, which is consolidated data from ex-Pelindo 1, 2, 3 and 4.

Profil Risiko Tahun 2021 / 2021 Risk Profile

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	Proyek (O1) a. Keterlambatan Penyelesaian Investasi b. Vendor yang tidak *qualified* c. Terjadinya pelanggaran peraturan/kebijakan/ kontrak dalam pelaksanaan proyek d. Ketidaksesuaian kualitas dan volume pekerjaan e. Tertundanya Proyek Strategis Nasional Terminal Kijing Project (O1) a. Delayed Investment Completion b. Unqualified vendors c. Violation of regulations/ policies/contracts in project implementation d. Mismatch of quality and volume of work e. Delayed National Strategic Project of Kijing Terminal	1. Persiapan administrasi serah terima pada pekerjaan CY 57; 2. Sudah dilakukan pelaksanaan pekerjaan *placing core rock, armour* dan produksi A-Jack pada pembangunan *breakwater*; 3. Sudah dilakukan *Survey* Topografi dan Bathimetry pada Lahan dan Perairan terdampak Pembangunan NPEA; 4. Sudah dilakukan Penandatangan Perjanjian/HoA antara Pelindo dengan PT KBN terkait Kerja Sama Komersial dan trase NPEA; 5. Sudah dilakukan *Survey* Andalalin/Kajian Lalu Lintas NPEA; 6. Melakukan proses penyelidikan tanah terkait desain pier NPEA; 7. Audiensi terkait Trase NPEA dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; 8. Berkoordinasi dengan *stakeholder* sedini mungkin yang bertujuan agar proses investasi berjalan sesuai jadwal atau sebelumnya misalnya dalam pengurusan perizinan; 9. Melakukan *monitoring* dan pengendalian investasi yang lebih ketat, meningkatkan kompetensi *Technical Knowledge* serta mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan Program-program Investasi; dan 10. Sudah dilakukan pemberian sanksi *blacklist* terhadap peserta/calon penyedia atau penyedia yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan perusahaan. 1. Preparation of handover administration on CY 57 work; 2. The work of placing core rock, armor and production of A-Jack has been carried out for the construction of breakwater; 3. Topographic and Bathimetry Surveys have been carried out on Land and Waters affected by NPEA Development; 4. The signing of Agreement/HoA between Pelindo and PT KBN has been carried out regarding Commercial Cooperation and NPEA trace; 5. NPEA Traffic Survey/Traffic Study has been conducted; 6. Carry out the soil investigation process related to NPEA pier design; 7. Hearings related to NPEA Trace with the Department of Human Settlements, Spatial Planning and Land Affairs of DKI Jakarta Province; 8. Coordinate with stakeholders as early as possible with the aim of making the investment process run according to schedule or earlier, for example in licensing arrangements; 9. Monitor and control investment more strictly, improve the competencies of Technical Knowledge and optimize the use of domestic products in the implementation of Investment Programs; and 10. Blacklist sanctions have been imposed on participants/potential providers who violate the provisions in force in the company.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
2	Pengelolaan Aset & Pemasaran (O2) a. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Aset Perusahaan yang *idle* b. Keluhan pengguna jasa terhadap mutu layanan c. Adanya BUP baru/ pesaing d. Ketidaksiapan sarana dan pra sarana pelayanan bongkar muat Asset Management & Marketing (O2) a. Less Optimal Utilization of Idle Company Assets b. Service user complaints about service quality c. New BUP/competitor d. Unpreparedness of facilities and infrastructure for loading and unloading services	1. Telah dilaksanakan beberapa relokasi alat pada beberapa cabang yang memiliki utilisasi alat yang rendah diantaranya relokasi *forklift* dari MNP ke Nunukan, relokasi *reefer plugging* dan genset dari Cabang Kendari ke Cabang Jayapura dan relokasi *spreader* dan *head truck* dari Cabang Pantoloan ke Cabang Tolitoli; 2. Telah disusun Buku Aset Lahan yang terdiri dari Mapping Alas Hak dan Pemanfaatan Lahan serta *Site Analysis* Lahan *Idle*; 3. Telah disusun *market data analysis* sebagai strategi pemasaran; 4. Implementasinya IAMS (*Integrated Aset Management Systems*) untuk aset tanah, bangfaspel, kapal untuk aset pada Regional 2; 5. Pelaksanaan *Customer Hearing* pada Regional 1, 3, dan 4 untuk mendengar keluhan dari *key customer* terhadap kinerja pelabuhan dan hal-hal apa yang perlu ditindak lanjuti di tahun depan; 6. Optimalisasi pemasaran lahan dengan digitalisasi, kerja sama dengan perusahaan BUMN dan pendayagunaan aset tetap dengan mitra; 7. Inventarisasi Aset Tetap yang *idle* pada Kategori Aset Tetap Bangunan Fasilitas Pelabuhan di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan; dan 8. Melakukan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan sehingga selalu siap operasi. 1. Several equipment relocations have been carried out in several branches with low equipment utilization including relocation of forklifts from MNP to Nunukan, relocation of reefer plugs and generator sets from Kendari Branch to Jayapura Branch and relocation of spreaders and head trucks from Pantoloan Branch to Tolitoli Branch; 2. Land Assets Book has been compiled, which consists of Mapping of Rights and Land Use and Site Analysis of Idle Land; 3. Market data analysis has been prepared as a marketing strategy; 4. Implementation of IAMS (Integrated Asset Management Systems) for land assets, building construction facilities, ships for assets in Regional 2; 5. Holding Customer Hearings in Regions 1, 3, and 4 to hear complaints from key customers regarding port performance and what matters need to be followed up in the next year; 6. Optimization of land marketing by digitalization, cooperation with state-owned companies and utilization of fixed assets with partners; 7. Inventory of Idle Assets in the Fixed Assets Category of Port Facility Buildings at the Head Office and Port Branches; and 8. Carry out maintenance of port facilities and equipment so that they are always ready for operation.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
3	SDM (O3) a. Resistensi oleh karyawan karena kekhawatiran potensi rotasi jabatan, perbedaan kesejahteraan berdasarkan perbedaan pendapatan masing-masing *Subholding* b. Turunnya kinerja pegawai c. Ketidaksiapan sumber daya manusia dan aset operasional dalam mendukung layanan/ kerja sama d. Turunnya kinerja pegawai HC (O3) a. Employees' resistance due to concerns about potential job rotation, differences in welfare based on differences in income for each Subholding b. Decreased employee performance c. Unpreparedness of human capital and operational assets in supporting services/ cooperation d. Declined employee performance	1. Telah dilakukan evaluasi dan reviu terhadap kebijakan pola penugasan pegawai di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero); 2. Disusun Peraturan Direksi terkait Penggunaan Kebijakan Remunerasi; 3. Telah dilaksanakan sosialisasi secara intensif terkait organisasi pasca merger di Kantor Pusat dan Regional serta *benefit* jangka panjang untuk seluruh pegawai; 4. Dibentuk dan dikelola *Tim Change Management* selama masa transisi pasca integrasi Pelindo yang bertugas melakukan pendekatan dan pemahaman terhadap pegawai terkait tujuan aksi integrasi dan melakukan familirisasi terhadap etos kerja pasca aksi integrase; 5. Dilakukan KPI Terintegrasi dan Sentralisasi *Knowledge Management*; 6. Program *Learning & Development* Terintegrasi untuk Standardisasi dan Peningkatan Kualitas SDM; 7. Pelaksanaan *Accelerated Leadership Program for* IPC (ALPI) yang diikuti oleh BOD-1, BOD-2 dan BOD-3; 8. Menetapkan pola karier yang jelas dengan memperhatikan kondisi dan kompetensi; dan 9. Pelaksanaan Asesmen untuk pegawai perusahaan sebagai dasar penyusunan pengembangan diri pegawai. 1. Policy on employee assignment patterns within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has been evaluated and reviewed; 2. Prepared the Board of Directors Regulations regarding the Use of Remuneration Policy; 3. Intensive socialization related to post-merger organization at the Head Office and Regional Offices as well as long-term benefits for all employees has been carried out; 4. Formed and managed by a Change Management Team during the post-integration transition period of Pelindo, which is tasked with approaching and giving an understanding to employees regarding the objectives of the integration action and familiarizing the work ethic after the integration; 5. Integrated KPI and Knowledge Management Centralization are carried out; 6. Integrated Learning & Development Program for Standardization and Quality Improvement of Human Capital; 7. Implementation of the Accelerated Leadership Program for IPC (ALPI), which was attended by BOD-1, BOD-2 and BOD-3; 8. Establish a clear career pattern by taking into account conditions and competencies; and 9. Implementation of assessment for company employees as the basis for preparing employee self-development.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
4	Proses & Produktivitas (O4) a. Turunnya Trafik/ *Throughput* b. Kehilangan pendapatan dari pelayanan bisnis inti c. Kerja Sama pelayanan penundaan kapal kurang optimal Process & Productivity (O4) a. Decrease in Traffic/ Throughput b. Loss of revenue from core business services c. Cooperation in ship delay services is not optimal	1. Standardisasi Operasi di Pelabuhan; 2. Digitalisasi dan Sistemisasi Operasi Kepelabuhan; 3. Penyusunan Standardisasi Model Bisnis Kerja Sama Pelabuhan Indonesia *Group* (Regional/Cabang & *Subholding*/Anak Perusahaan); 4. Penyusunan dan Implementasi Strategi *Unified Key Account Management* (KAM); 5. Optimalisasi Aset dengan disusunnya kajian pola Kerja Sama dan/atau hasil evaluasi rencana Kerja Sama dengan mitra untuk di Terminal Kijing; 6. Kerja Sama dengan Kawasan Industri/Logistik; 7. Pengembangan Layanan Operasi TUKS dengan Bekerja Sama dengan BUMN dan Swasta; 8. Standardisasi Pelayanan Kapal/Peningkatan Mutu Pelayanan Kapal; 9. *Marine Services Transformation*; 10. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penundaan; 11. Minimalisasi Kecelakaan Armada Kapal dengan penerapan sistem manajemen keselamatan ISM Code di setiap armada kapal, pelaksanaan audit ISM Code dan inspeksi kapal, penerapan rencana perawatan kapal dan melaksana kegiatan pekerjaan sesuai prosedur; dan 12. Evaluasi Pelimpahan Pemanduan dan Penundaan Kapal. 1. Standardization of Operations at Ports; 2. Digitization and Systemization of Port Operations; 3. Preparation of Standardization of Indonesian Port Cooperation Business Model Group (Regional/ Branch & Subholding/Subsidiary); 4. Formulation and Implementation of Unified Key Account Management (KAM) Strategy; 5. Optimization of Assets by compiling a study of cooperation patterns and/or evaluation results of cooperation plans with partners for Kijing Terminal; 6. Cooperation with Industrial Estates/Logistics; 7. Development of TUKS Operational Services by Collaborating with SOEs and Private; 8. Standardization of Ship Services/Improving the Quality of Ship Services; 9. Marine Services Transformation; 10. Fulfillment of Delayed Facilities and Infrastructure; 11. Minimization of Fleet Accidents by implementing the ISM Code safety management system in each fleet, implementing ISM Code audits and ship inspections, implementing ship maintenance plans and carrying out work activities according to procedures; and 12. Evaluate the Delegation of Guiding and Towing Ships.
5	Teknologi dan Sistem Informasi (O5) a. *Cyber Attack* Sistem Informasi b. Kegagalan integrasi sistem teknologi informasi c. Jaringan CTOS/IGMT/ SAP dan lainnya mengalami kendala d. Kegagalan sistem teknologi pendukung operasional (P3) Information Technology and Systems (O5) a. Cyber Attack Information System b. Information technology system integration failure c. CTOS/IGMT/SAP network and others are having problems d. Operational support technology system failure (P3)	1. Melakukan *Monitoring* secara berkala berbasis SIEM (*Security Incident and Event Management*) untuk memonitor *logging* dari perangkat secara *realtime*; 2. Melengkapi fitur keamanan dengan beberapa perangkat *security* seperti *Firewall*, dan lainnya; Memastikan *Annual Technical Support* ke *Principal* terkait untuk selalu dapat di*support* untuk integrasi; 3. Melakukan optimasi pada *middleware* untuk selalu memastikan integrasi antar aplikasi berjalan dengan baik; 4. Memperpanjang *Annual Technical Support* ke *Principal* untuk mendapatkan kepastian *support*/ perawatan dari Pemilik *Software/Hardware* jika terjadi *bug* dan permasalahan *system*; 5. Menggunakan NAT terhadap *segment* IP tertentu yang terjadi konflik; 6. Sudah diselesaikan dokumen pengadaan konsultan (RKS/KAK, RAB, dsb) untuk pekerjaan Penyusunan IT *Master Plan* Pelindo Terintegrasi; 7. Sudah dilakukan desain *single* ERP untuk Regional dan *Subholding*; dan 8. Menyediakan *Link*/Jaringan VPN *Primary* (Telkom) dan *Secondary* (Lintas Arta) yang dapat berjalan bersamaan (Active-Active Link). 1. Conducting periodic monitoring based on SIEM (Security Incident and Event Management) to monitor logging from the device in real time; 2. Complete security features with several security devices such as Firewalls, and others; 3. Ensuring Annual Technical Support to the related Principal can always be supported for integration; 4. Optimizing middleware to always ensure the integration between applications runs well; 5. Extend the Annual Technical Support to the Principal to get certainty of support/maintenance from the Software/Hardware Owner in case of bugs and system problems; 6. Using NAT against certain IP segments where there is a conflict; 7. The consultant procurement documents (RKS/KAK, RAB, etc.) have been completed for the work of Integrated Pelindo IT Master Plan preparation; 8. The design of a single ERP for Regional and Subholding has been carried out; and 9. Provide Primary (Telkom) and Secondary (Lintas Arta) VPN Link/Network that can run simultaneously (Active-Active Link).

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
6	Lingkungan Eksternal (O6) a. Risiko Penularan dan Penyebaran COVID-19 External Environment (O6) a. Risk of Transmission and Spread of Covid-19	1. Telah diterapkan WFO dan WFH serta protokol kesehatan bagi seluruh pegawai di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selama menghadapi masa Pandemi; 2. Optimalisasi penggunaan sarana IT dalam menjalankan proses bisnis secara *online*; 3. Meningkatkan fungsi Tim Satgas COVID-19 untuk melakukan edukasi secara terus menerus tentang bahaya COVID-19, memonitor dan melakukan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. Telah dilakukan *Tracking* untuk setiap pegawai yang terkonfirmasi positif dan melakukan tindakan *lockdown* pada lokasi terdampak; 5. Pelaksanaan PCR *swabtest* serta pemberian Vaksin 1 dan 2 bagi seluruh pegawai; dan 6. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi setiap orang yang masuk dan keluar gedung kantor. 1. WFO and WFH have been implemented as well as health protocols for all employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) during the pandemic period; 2. Optimizing the use of IT facilities in running online business processes; 3. Improve the function of the Covid-19 Task Force Team to provide continuous education about the dangers of Covid-19, monitor and implement health protocols in accordance with applicable regulations; 4. Tracking has been carried out for every employee who has been confirmed positive and has taken lockdown measures at the affected location; 5. Implementation of PCR swabtest and provision of Vaccines 1 and 2 for all employees; and 6. Use of Peduli Lindungi application for everyone who enters and leaves the office building.
7	K3L (O7) a. Kecelakaan Kerja pada kegiatan operasional b. Pencemaran Lingkungan HSE (O7) a. Work Accidents in operational activities b. Environmental pollution	**Realisasi Mitigasi Kecelakaan Kerja** 1. Telah didapatkan dokumen CR untuk Sertifikasi ISO 45001 : 2018 Kantor Pusat sebagai pemenuhan klausul dan sertifikasi ISO 45001:2018. Proses CR dilakukan pada tanggal 31 September untuk merubah ruang lingkup pekerjaan karena adanya rencana pemindahan Gedung Kantor Pusat ke Menara Maritim Indonesia; 2. Proses sertifikasi SMK3 Cabang Pelabuhan Pangkal Balam dan Tanjung Pandan yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan dokumen Sistem Manajemen K3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012; 3. Meningkatkan penerapan SMK3, pengawasan penggunaan APD, pemasangan rambu-rambu K3 dan Penerapan ISPS *code*; dan 4. *Implementasi Business Continuity Management* (BCM). **Realisasi Mitigasi Pencemaran Lingkungan** 1. Implementasi ISO 14001:2015 di 11 Cabang Pelabuhan Regional II pada tahun 2021. Kantor Pusat telah mengirimkan draft pedoman Sistem Manajemen Lingkungan kepada Cabang Pelabuhan Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, Pontianak, Panjang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Balam, Tanjung Pandan dan Teluk Bayur; 2. Melakukan pemantauan lingkungan perusahaan secara kontinyu yang dilakukan oleh tiap-tiap Cabang yang memiliki Izin dan Dokumen Lingkungan; dan 3. Mencantumkan dalam klausul perjanjian terkait pengerukan agar memperhatikan aspek lingkungan dan melengkapi perijinannya. **Realization of Work Accident Mitigation** 1. A CR document has been obtained for the Head Office ISO 45001: 2018 Certification as a fulfillment of the clause and ISO 45001:2018 certification. The CR process was carried out on September 31 to change the scope of work due to the plan to relocate the Head Office Building to the Indonesian Maritime Tower; 2. The OHSMS certification process for Pangkal Balam and Tanjung Pandan Port Branches, which is currently in the stage of compiling the OHS Management System document based on PP No. 50 of 2012; 3. Improving the implementation of OHSMS, supervising the use of PPE, installing OHS signs and implementing ISPS code; and 4. Implementation of Business Continuity Management (BCM). **Realization of Environmental Pollution Mitigation** 1. Implementation of ISO 14001:2015 in 11 Regional II Port Branches in 2021. The Head Office has sent draft of Environmental Management System guidelines to the Ports of Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, Pontianak, Panjang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Balam, Tanjung Pandan and Teluk Bayur; 2. Continuous monitoring of the company's environment is carried out by each Branch that has Environmental Permits and Documents; and 3. Include in the agreement clause related to dredging to pay attention to environmental aspects and complete the permit.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
8	Portofolio Bisnis & Aksi Korporasi (S1) a. Gagal kerja sama dengan mitra strategis b. Tidak beralihnya hak istimewa/izin usaha ke *surviving entity* c. Pengambilan keputusan investasi yang lambat Business Portfolio & Corporate Action (S1) a. Fail to cooperate with strategic partners b. No transfer of privileges/business licenses to surviving entity c. Slow investment decision making	1. Telah terbit peraturan pemerintah nomor 101 2021 tentang penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia III dan PT Pelabuhan Indonesia IV kedalam PT Pelabuhan Indonesia (Persero), didalam pasal 4 disebutkan selama perizinan, konsesi, dan dokumen hukum lain yang dimiliki oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV belum dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perizinan, konsesi, dan dokumen hukum tersebut dinyatakan tetap berlaku dan merupakan perizinan, konsesi, dan dokumen hukum bagi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II; 2. Mengusulkan pengajuan keringanan/fasilitas pajak kepada Dirjen Pajak; 3. Sudah disusun Kajian Konsultan BRI Danareksa dan Umbra terkait kajian awal dan persiapan transaksi pada Lanjutan Program Kerja Sama dengan Mitra Strategis untuk pengembangan dan pengoperasian Terminal Peti Kemas Fase 1 dan Fase 2 Belawan; 4. Penyusunan dan Implementasi Strategi *Unified Key Account Management* (KAM); 5. Sudah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya dalam penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama; 6. Sudah disusun laporan *progress* awal hasil pekerjaan konsultan pemilihan mitra pada pelaksanaan pemilihan mitra CT 2; 7. Melakukan pembahasan sesuai arahan dan jadwal yang ditetapkan RUPS; dan 8. Melakukan Penyusun FS secara komprehensif dan pemenuhan kelengkapan dokumen investasi. 1. Government regulation No. 101 2021 has been issued regarding the merger of PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia III and PT Pelabuhan Indonesia IV into PT Pelabuhan Indonesia (Persero), in article 4 it is stated as long as permits, concessions, and other legal documents are owned by the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, and the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV have not made adjustments as referred to in letter b, the permits, concessions, and legal documents are declared to remain valid and constitutes permits, concessions, and legal documents for the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II; 2. Propose the application of tax relief/facility to the Director General of Taxes; 3. The BRI Consultant Study of Danareksa and Umbra has been prepared regarding the initial study and preparation of transactions in the Continued Cooperation Program with Strategic Partners for the development and operation of Phase 1 and Phase 2 of Belawan Container Terminal; 4. Formulation and Implementation of Unified Key Account Management (KAM) Strategy; 5. Coordination has been carried out with the Ministry of Transportation and other relevant agencies in preparing the draft of Cooperation Agreement; 6. An initial progress report has been prepared on the results of partner selection consultant's work on the implementation of CT 2 partner selection; 7. Conducting discussions according to the directions and schedule determined by the GMS; and 8. Compile FS comprehensively and fulfill the completeness of investment documents.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
9	Transformasi & Pengembangan Bisnis (S2) a. Gagal Kerja Sama dengan mitra strategis b. Respon pasar tidak sesuai dengan kajian kelayakan c. Rendahnya tingkat pengembalian investasi Business Transformation & Development (S2) a. Fail to cooperate with strategic partners b. Market response does not match the feasibility study c. Low rate of return on investment	1. Telah disusun Peraturan Direksi Tentang Pedoman Pengembangan Bisnis Perusahaan. *Progress* dari Peraturan Direksi tersebut sudah dilakukan sirkulasi dokumen dan saat ini sedang menunggu persetujuan Direktur Utama; 2. Telah dilakukan pemetaan dan analisis market awal mengenai Pengembangan Bisnis Logistik dan Kawasan Industri untuk mendukung rencana ekspansi perusahaan dalam bisnis kepelabuhanan; 3. Penyusun kajian secara komprehensif dengan menggunakan data-data yang *update*. Kajian yang telah disusun antara lain Kajian Pra Studi Kelayanan Pengembangan Angkutan batubara melalui sungai di Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Bukit Asam, Kajian Pra Studi Kelayanan Pengembangan New Palembang Port dan Studi Pendahuluan Pengembangan New Palembang Port bersama dengan Konsultan Kementerian Perhubungan; 4. Telah Dilakukan koordinasi dan sinergi dengan Anak Perusahaan dan Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam penyusunan kajian; dan 5. Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif terkait rencana Pengembangan Angkutan di Sungai Musi dan Palembang New Port dengan *stakeholder* terkait (PT Bukit Asam, Kementerian Perhubungan, Pemda, dan instansi lainnya) dalam rangka penyiapan kajian pengembangan bersama. 1. The Board of Directors Regulations concerning Guidelines for Company Business Development have been drawn up. The progress of Board of Directors Regulations has been circulated for documents and is currently awaiting the approval of President Director; 2. An initial market mapping and analysis has been carried out regarding the Development of Logistics Business and Industrial Estates to support the company's expansion plan in the port business; 3. Compilation of a comprehensive study using updated data. The studies that have been prepared include a Pre-Study of Services for the Development of Coal Transport by River in South Sumatra in collaboration with PT Bukit Asam, a Pre-Study of Services for the Development of New Palembang Port and a Preliminary Study of the Development of New Palembang Port together with Consultants from the Ministry of Transportation; 4. Coordination and synergy have been carried out with Subsidiaries and Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to obtain accurate and relevant data in preparing the study; and 5. Intensive communication and coordination has been carried out regarding the transportation development plan on Musi River and Palembang New Port with relevant stakeholders (PT Bukit Asam, Ministry of Transportation, Regional Government, and other agencies) in the context of preparing joint development studies.
10	Sosial Politik & Regulasi (S3) a. Kurang taat terhadap perubahan regulasi b. Adanya peraturan/ adat setempat terkait kepemilikan lahan pada pelabuhan di wilayah timur Indonesia Social Politics & Regulation (S3) c. Lack of compliance with regulatory changes d. The existence of local regulations/ customs related to land ownership in ports in eastern Indonesia	1. Proaktif menjalin *sharing discussion* dengan regulator, menerapkan sistem manajemen termasuk audit internal & eksternal berbasis ISO terutama untuk ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 dan 20001, ISPS *Code* serta SMK3; 2. Pendekatan persuasif kepada pemangku kepentingan/adat; 3. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan/ masyarakat adat; dan 4. Mengutamakan tindakan preventif dalam menyelesaikan tuntutan masyarakat adat dan telah dilaksanakan pendampingan Jaksa Pengacara Negara apabila terdapat tuntutan hukum. 1. Proactively conduct sharing discussions with regulators, apply the management systems including internal & external audits based on ISO, especially for ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 and 20001, ISPS Code and OHSMS; 2. Persuasive approach to stakeholders/customs; 3. Always maintain good relations with stakeholders/indigenous people; and 4. Prioritizing preventive action in resolving the demands of indigenous peoples and assistance from the State Attorney's Office in the event of a lawsuit.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
11	Persepsi Negatif (R1) a. Pemberitaan Negatif Perusahaan Negative Perception (R1) a. Negative Corporate News	1. Program Komunikasi Internal dan Eksternal a. Telah disusun konten pemberitaan berupa artikel, *press release* atau infografis, konten pemberitaan di media sosial dan konten iklan media massa; b. Telah dilakukan kegiatan media *relations* seperti Media *Visit, Port Visit,* Media *Gathering*, *Pimred Gathering*, Media *Interview*, serta perlombaan atau kompetisi korporasi; dan c. Telah dilakukan sosialisasi penggabungan/merger Pelindo kepada seluruh *Stakeholders* Pelindo melalui surat dan pertemuan langsung. 2. Program Implementasi *Brand Guidelines* : SK Direksi dan Pedoman Implementasi *Brand Guidelines* PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 3. Standardisasi Program Komunikasi dan Publikasi 4. Pengelolaan Hubungan Perseroan dengan *Stakeholder* a. Telah dilakukan pemetaan serta strategi kegiatan bina hubungan *stakeholder* sesuai dengan skala prioritasnya terhadap perusahaan; dan b. Inisiasi komunikasi/silaturahmi dengan *stakeholders* lembaga secara berkesinambungan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan lembaga tersebut; 5. Keanggotaan Aktif pada International Association of Port and Harbour (IAPH) & Asean Port Association (APA). 1. Internal and External Communication Program a. News content has been compiled in the form of articles, press releases or infographics, news content on social media and mass media advertising content; b. Media relations activities have been carried out such as Media Visit, Port Visit, Media Gathering, Pimred Gathering, Media Interview, as well as competitions or corporate competitions; and c. Socialization of Pelindo merger has been carried out to all Pelindo Stakeholders through letters and direct meetings. 2. Brand Guidelines Implementation Program : Decree of Board of Directors and PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Brand Guidelines Implementation. 3. Standardization of Communication and Publication Programs 4. Management of the Company's Relationship with Stakeholders a. Mapping and strategy for stakeholder relationship development activities have been carried out according to the priority scale for the company; and b. Initiate communication/relationship with institutional stakeholders on an ongoing basis and play an active role in the institution's activities; 5. Active Membership of the International Association of Port and Harbor (IAPH) & Asean Port Association (APA).

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
12	Pengelolaan *Stakeholders* (R2) a. Hubungan kurang baik dengan masyarakat sekitar pelabuhan Stakeholder Management (R2) a. Poor relationship with the community around the port	Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan realisasi sebagai berikut: 1. Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil a. Pameran WSBK Mandalika, Lombok Barat, 18-20 Nov 2021; b. Pekan Kreatif Nusantara Jatim Park III Batu, Malang, 19-21 Nov 2021; dan c. Pameran Munas VIII Kadin Sulawesi Tenggara 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan a. Transformasi *fishing ground nelayan kijing*; b. *Champion Scholarship*; c. Program jambanisasi dan sarana air bersih; d. Sosialisasi anti narkoba; e. Program pelatihan nelayan; dan f. Program BPJS ketenagakerjaan untuk nelayan. 3. *Creating Shared Value* (CSV) dan Program Prioritas/Unggulan a. Program Mahasiswa Magang Bersertifikat; b. Aksi Bersih Limbah dan Sampah di Sungai dan Laut; c. Konservasi dan Rehabilitasi pesisir melalui penanaman *mangrove*; d. Peningkatan kesehatan dan Imunitas TKBM; dan e. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19. 4. Mitra Binaan Naik Kelas Risk mitigation that has been carried out is through the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program with the following realizations: 1. Micro and Small Business Funding a. WSBK Mandalika Exhibition, West Lombak, Nov 18-20, 2021; b. Nusantara Creative Week Jatim Park III Batu, Malang, Nov 19-21, 2021; and c. Southeast Sulawesi Chamber of Commerce VIII National Conference Exhibition 2. Sustainable Development Goals a. Transformation of fishing ground for mussel fishermen; b. Champion Scholarships; c. Toilet and clean water facilities program; d. Anti-drug socialization; e. Fisherman training program; and f. BPJS Employment program for fishermen. 3. Creating Shared Value (CSV) and Priority Programs a. Certified Student Internship Program; b. Action to Clean Waste and Garbage in Rivers and Seas; c. Coastal Conservation and Rehabilitation through mangrove planting; d. Improving the health and immunity of TKBM; and e. Health promotion and prevention of the spread of Covid-19. 4. Fostered Partners Upgrading

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
13	Hukum (H1) a. Tuntutan Hukum atas Kepemilikan Aset b. Kealpaan Mematuhi Peraturan/ Regulasi Perusahaan c. Permasalahan Hukum d. Realisasi kerja sama yang tidak sesuai ruang lingkup kontrak perjanjian Legal (H1) a. Lawsuit for Ownership of Assets b. Failure to comply with company regulations/ regulations c. Legal Issues d. Realization of cooperation that is not within the scope of the contract agreement	1. Telah disusun Kajian Transformasi Divisi Hukum dan 1 implementasi *Quick Win* untuk Transformasi Hukum Korporasi di tahun 2021; 2. Telah dibangun *Automation Base On Technology* dalam bentuk "*Hallo Lawyer*" untuk menyediakan jawaban atas pertanyaan terkait permasalahan hukum; 3. Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (KSOP) terkait perubahan Perjanjian Konsesi pada pembahasan final untuk konsesi pada pelabuhan yang diusahakan perusahaan; 4. Telah dilakukan kerja sama dengan Kejaksaan, KSOP dan Konsultan Hukum untuk penanganan permasalah hukum perusahaan; 5. Melakukan penataan data lahan dan sertifikasi serta peningkatan kompetensi pegawai terkait pengelolaan asset; 6. Memasukan klausul sanksi pada setiap perjanjian kerja sama dengan mitra; 7. Meningkatkan pengetahuan/kapabilitas hukum kepada pegawai; 8. Melakukan penertiban administrasi dokumen hukum perusahaan; 9. Melakukan kajian-kajian hukum yang tertulis di setiap kegiatan perusahaan; dan 10. Meningkatkan kepatuhan pada hukum/regulasi. 1. Legal Division Transformation Study and 1 Quick Win implementation for Corporate Law Transformation have been prepared in 2021; 2. Automation Base On Technology has been built in the form of "Hello Lawyer" to provide answers to questions related to legal issues; 3. Coordinate with the Ministry of Transportation (KSOP) regarding changes to the Concession Agreement in the final discussion for concessions at ports operated by the company; 4. Cooperation with the Prosecutor's Office, KSOP and Legal Consultants has been carried out for handling the company's legal problems; 5. Organizing land data and certification as well as improving employee competencies related to asset management; 6. Include a sanction clause in every cooperation agreement with partners; 7. Increase legal knowledge/capability to employees; 8. Controlling the administration of company legal documents; 9. Conduct written legal studies in every company activity; and 10. Improve compliance with laws/regulations.
14	Tata Kelola (H2) a. Bertambahnya rantai birokrasi karena memerlukan proses berjenjang hingga ke tingkat *Holding* Governance (H2) a. An increase in the bureaucratic chain because requires a tiered process up to the Holding level	1. Telah disusun dan disosialisasikan Surat Kuasa Khusus dari Induk kepada *Subholding* tertanggal 20 Oktober 2021 terkait Pengelolaan Anak Perusahaan pada masa transisi sebelum proses inbreng selesai; 2. Telah dilakukan penyerahan operasi bisnis Pelindo kepada *Subholding* Petikemas, *Subholding* Non Petikemas, dan *Subholding* Jasa Maritim. Untuk *Subholding* Jasa Logistik, penyerahaan operasi masih tahap persiapan; 3. Telah disusun Peraturan Direksi terkait Pedoman Hubungan Tata Kelola Induk dan Anak Perusahaan (termasuk pengaturan pembagian peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki *Holding* dan *Subholding*; Organ Perseroan dalam hubungan *Holding* dan *Subholding*, Praktik dalam Pengelolaan Perusahaan; dan 4. Telah disusun Proses Bisnis, Pedoman, dan Prosedur Strategis Pengembangan Bisnis *Subholding* dan Anak Perusahaan. 1. A Special Power of Attorney has been prepared and socialized from the Parent to the Subholding dated October 20, 2021 regarding the Management of Subsidiaries during the transition period before the inbreng process is completed; 2. Pelindo business operations have been handed over to the Container Subholding, Non Container Subholding, and Maritime Services Subholding. For Logistics Services Subholding, the handover of operations is still in the preparatory stage; 3. Board of Directors Regulations have been drawn up regarding Guidelines for the Governance of Parent and Subsidiaries (including arrangements for the division of roles, responsibilities, and authorities of Holding and Subholding; Company organs in Holding and Subholding relations, Practices in Company Management; and 4. Business Processes, Guidelines, and Strategic Procedures for Subholding and Subsidiary Business Development have been prepared.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
15	*Fraud*, Penyuapan & Kepatuhan (H3) a. Penyuapan dan *fraud* Fraud, Bribery & Compliance (H3) a. Bribery and fraud	1. Mitigasi Penyuapan dan *Fraud* a. Telah dilakukan Audit *Surveillance* untuk Implementasi ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Suap pada 26 November 2021 dan pemahaman Penyuapan dan *Fraud* melalui pelatihan dan seminar; b. Peningkatan Implementasi *Whistleblowing System* melalui: • Pelaksanaan rapat koordinasi Komite IPC Bersih secara periodik atau bila ada laporan indikasi *fraud*; dan • Telah dilakukan penyusunan Surat Keputusan Direksi terkait Tim Pelabuhan Bersih pasca merger. c. Telah disusun dan ditandatangani Peraturan Direksi terkait Komite GRC (*Governance Risk Compliance*); d. Penandatanganan Pakta Integritas Insan Maritim di Pelabuhan Indonesia yang melibatkan operator pelabuhan, instansi di sekitar pelabuhan, asosiasi, pengguna jasa dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021; dan e. Telah dilakukan sosialisasi dan *campaign* secara konsisten terkait larangan pungutan liar; penerimaan suap serta gratifikasi. 2. Mitigasi Kerja Sama yang Tidak Sesuai Ruang Lingkup Kontrak Perjanjian Telah dilaksanakan peningkatan kapabilitas pegawai dalam bidang penyusunan dan pengelolaan kontrak kerja sama melalui *training* dan seminar. 1. Bribery and Fraud Mitigation a. A Surveillance Audit has been carried out for the Implementation of ISO 37001-2016 Anti-Bribery Management System on November 26, 2021 and an understanding of Bribery and Fraud through training and seminars; b. Improved Whistleblowing System Implementation through: • Implementation of periodic coordination meetings of Clean IPC Committee or if there are reports of indications of fraud; and • Board of Directors' Decree regarding the Clean Port Team has been prepared after the merger. c. Board of Directors Regulations related to the GRC (Governance Risk Compliance) Committee have been prepared and signed; d. The signing of Maritime Personnel Integrity Pact at the Port of Indonesia involving port operators, agencies around the port, associations, service users, which was held on December 28, 2021; and e. There have been consistent outreach and campaigns related to the prohibition of illegal levies; acceptance of bribes and gratuities. 2. Mitigation of Cooperation that is not in accordance with the Scope of Contract Agreement: efforts have been made to increase the capability of employees in the field of drafting and managing cooperation contracts through training and seminars.
16	Makro Ekonomi (P1) a. Rugi Selisih Kurs b. Volatilitas kurs valuta asing yang mempengaruhi rugi selisih kurs c. Melemahnya nilai rupiah Macroeconomics (P1) a. Foreign Exchange Loss b. Volatility of foreign exchange rates that affect foreign exchange losses c. The weakening of rupiah	1. *Natural Hedging* *Natural Hedging* dengan adanya pendapatan dalam USD yang berpotensi mencapai USD 722 Juta p.a atau sebesar 35% dari total pendapatan Pelindo 2. Melakukan *review* atas *Net Open Position* (NOP) yang menjadi basis *hedging*; 3. Optimalisasi Pendanaan Tahap I a. Telah dilakukan rekapitulasi dan *review* terhadap hutang perusahaan dan rencana *refinancing/ prepayment*; b. Telah disusun kajian oleh PT PPA yang di dalam nya ada rencana optimalisasi pendanaan PT Prima Multi Terminal dan rencana *buyback/refinancing global bond*; dan c. Telah dilakukan proses pelunasan kredit sindikasi sebesar Rp1,325 triliun di bulan Oktober 2021 1. Natural Hedging Natural Hedging with income in USD which has the potential to reach USD 722 million p.a or 35% of Pelindo's total revenue 2. Reviewing the Net Open Position (NOP) which is the basis for hedging; 3. Optimization of Phase I Funding a. A recapitulation and review of the company's debt and refinancing/prepayment plans have been carried out; b. A study has been prepared by PT PPA which includes a plan to optimize PT Prima Multi Terminal's funding and a global bond buyback/refinancing plan; and c. The syndicated loan repayment process of Rp1.325 trillion has been carried out in October 2021
17	Komoditas (P2) a. Turunnya harga batubara dan CPO Commodity (P2) a. Lower coal and CPO prices	1. Telah dilakukan kajian pengembangan bisnis baru di dalam dan/atau di luar wilayah PT Pelabuhan Indonesia (Persero), seperti kajian Pengembangan *Shorebase* Terminal di Area Kerja PT PTP; dan 2. Mengoptimalkan pelayanan bongkar muat batu bara dan CPO untuk aktivitas bongkar/muat dalam negeri; 1. A new business development study has been conducted within and/or outside PT Pelabuhan Indonesia (Persero) area, such as a study on the development of a Shorebase Terminal in PT PTP Work Area; and 2. Optimizing loading and unloading services for coal and CPO for domestic loading/unloading activities;

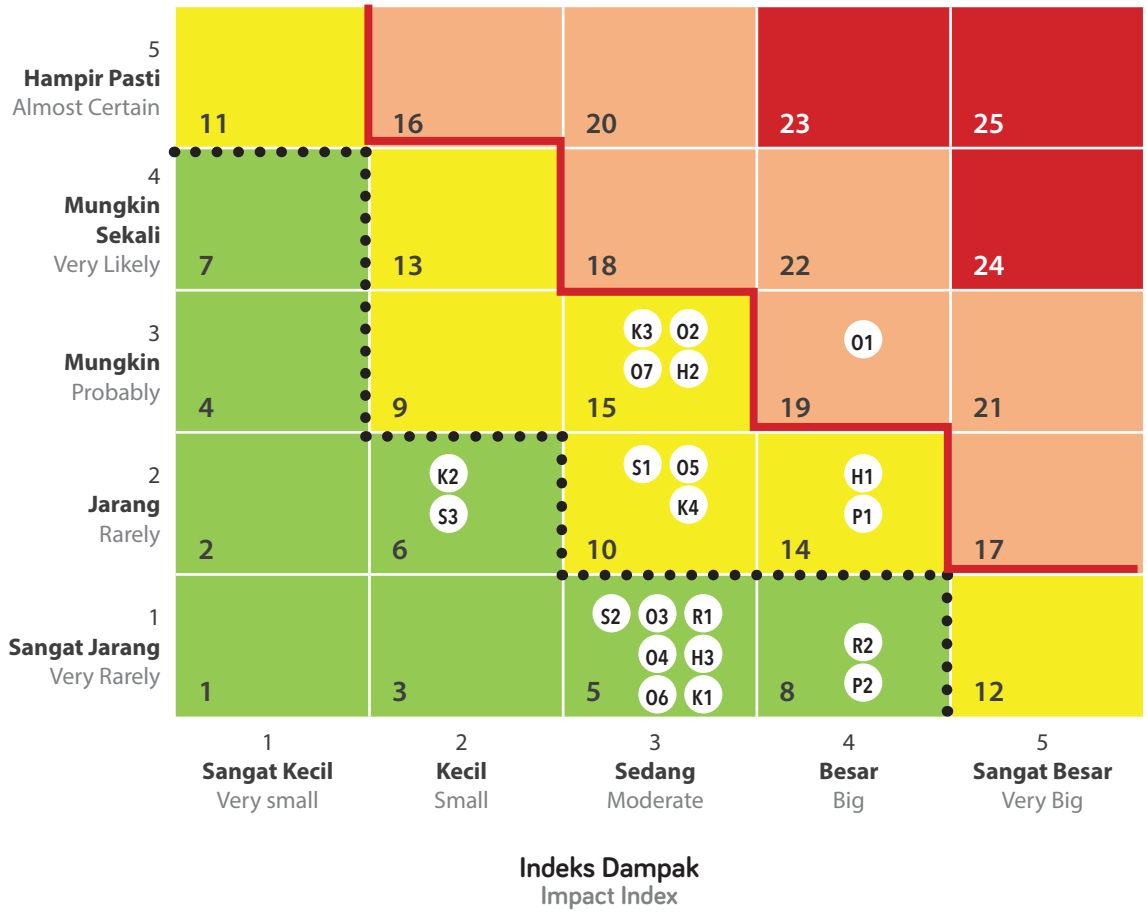
No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
18	Operasional Keuangan (K1) a. Meningkatnya Beban Biaya Perusahaan b. Tingginya biaya buruh Financial Operations (K1) a. Increased Company Expenses b. High labor costs	1. Telah diimplementasikan aplikasi pengendalian anggaran di Kantor Pusat menggunakan ERP-SAP; 2. Telah disusun Peraturan Direksi Nomor: HK.01/1/10/1/PBEN/UTMA/PLND- 21 tentang Kebijakan Administrasi Keuangan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 1 Oktober 2021; 3. Telah menyampaikan Surat Edaran Nomor: KU.01.04/8/10/1/PKPN/KUMR/PLND-21 tentang Pengendalian Anggaran di Kantor Pusat dan Regional PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Surat Nomor: KU.01.04/24/11/1/PRIN/UTMA/ perihal Pemberitahuan Pengendalian Anggaran Eksploitasi Tahun 2021 dan Nota Dinas Nomor: KU.01.02/12/11/1/PRIN/KUMR perihal Pengendalian Anggaran Eksploitasi Tahun 2021 tanggal 24 November 2021; 4. Memfokuskan pengeluaran biaya hanya untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam RKAP dan berdampak langsung pada pendapatan; 5. Meningkatkan ketertiban administrasi untuk menghindari biaya sanksi/denda perusahaan yang masih sering terjadi; dan 6. Telah dilakukannya koordinasi dengan Otoritas Pelabuhan untuk melibatkan Operator Terminal dalam penetapan biaya TKBM. 1. A budget control application has been implemented at the Head Office using ERP-SAP; 2. Board of Directors Regulation No: HK.01/1/10/1/PBEN/UTMA/PLND-21 concerning Financial Administration Policy in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has been drafted on October 1, 2021; 3. Submission of Circular Letter No: KU.01.04/8/10/1/PKPN/KUMR/PLND-21 concerning Budget Control at the Head Office and Regional Office of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Letter No: KU.01.04/24/11/1/PRIN/UTMA/ regarding Notification of Exploitation Budget Control for 2021 and Office Note No: KU.01.02/12/11/1/PRIN/KUMR regarding Control of Exploitation Budget for 2021 on November 24, 2021; 4. Focusing on expenditures only for activities that have been budgeted for in the RKAP and have a direct impact on income; 5. Improving administrative order to avoid the cost of corporate sanctions/fines that still occur frequently; and 6. Coordination has been carried out with the Port Authority to involve Terminal Operators in determining TKBM fees.
19	Akuntansi (K2) a. Rendahnya validitas dan Kredibilitas laporan keuangan b. *Subholding* tidak dapat mempersiapkan laporan keuangan *post* penggabungan secara akurat dan tepat waktu Accounting (K2) a. Low validity and credibility of financial statements b. Subholding cannot prepare post-merger financial statements accurately and on time	1. Telah diimplementasikan standardisasi/ *single Chart of Account* (CoA) untuk lingkup Pelindo (Regional 1, 2, 3, 4) dan lingkup *Subholding*; 2. Telah disusun Peraturan Direksi tentang Kebijakan Akuntansi dan Manual Akuntansi; 3. Telah dilakukan penyelarasan kebijakan akuntansi, standardisasi proses pelaporan keuangan, dan template pelaporan keuangan konsolidasian untuk memudahkan proses konsolidasi; dan 4. Telah dilakukan implementasi ERP *Subholding* per 1 November 2021. 1. Standardization/single Chart of Accounts (CoA) has been implemented for the scope of Pelindo (Regional 1, 2, 3, 4) and the scope of Subholding; 2. Board of Directors Regulations on Accounting Policies and Accounting Manuals have been drawn up 3. Alignment of accounting policies, standardization of financial reporting processes, and consolidated financial reporting templates have been carried out to facilitate the consolidation process; and 4. Subholding ERP implementation has been carried out as of November 1, 2021.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
20	Strategi Keuangan (K3) a. Piutang macet Financial Strategy (K3) a. Bad debts	1. Telah dilakukan inventarisasi data piutang pada Regional maupun di Anak Perusahaan Pelindo *Group*; 2. Telah dilakukan implementasi *Autocollection, Cash Management System* (CMS), dan Termin Pembayaran untuk meminimalkan adanya piutang; 3. Telah dilakukan drafting atas Surat Penegasan untuk Perjanjian Kerja sama *Supply Chain Financing* (SCF) antara Pelindo dan BNI; 4. Telah dilakukan pengembangan Sistem *Autocollection* Jasa kapal untuk semua cabang di Regional 2; 5. Telah dilakukan seleksi pelayanan terhadap *customer* yang memiliki kredibilitas rendah dalam penyelesaian piutang; 6. Telah dilakukan koordinasi dan meminta pendampingan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penagihan piutang kepada *customer*; dan 7. Telah dilakukan koordinasi dan renegoisasi dengan pelanggan untuk melakukan pembayaran cicilan piutang 1. An inventory of receivables data has been carried out at the Regional and Pelindo Group Subsidiaries; 2. The implementation of Autocollection, Cash Management System (CMS), and Payment Term to minimize the existence of receivables; 3. Drafting of the Affirmation Letter for the Supply Chain Financing (SCF) Cooperation Agreement between Pelindo and BNI has been carried out; 4. Ship service autocollection system has been developed for all branches in Regional 2; 5. Service selection has been carried out for customers who have low credibility in the settlement of receivables; 6. Coordination has been carried out and requested assistance from the State Attorney (JPN) in collecting receivables from customers; and 7. Coordination and renegotiation have been carried out with customers to make payment of debt installments
21	Pajak (K4) a. Tidak Optimalnya Pengelolaan Perpajakan b. Besarnya Pajak Pengalihan Saham dan Aset Dalam Pelaksanaan Merger Tax (K4) a. Tax Management is Not Optimal b. Large amount of Transfer of Shares and Assets Tax in the Implementation of Merger	Tidak Optimalnya Pengelolaan Perpajakan 1. Integrasi Data Pajak Lanjutan; 2. Rekonsiliasi pajak pada tanggal 8 setiap bulannya; 3. Dilakukan penyusunan ekualisasi pajak untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 (2) dan PPN; 4. Optimalisasi proses pencatatan atau pengenaan pajak pada setiap transaksi dengan membuka ruang konsultasi; dan 5. Melakukan penyetoran pajak sebelum batas waktu jatuh tempo pada tanggal 10 pada bulan berikutnya. Besarnya Pajak atas Pengalihan Saham & Aset Dalam Pelaksanaan Merger 1. Menyampaikan surat permohonan dukungan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang saham; dan 2. Telah dilaksanakannya FGD terkait permohonan nilai buku, pengalihan saham, dan penghapusan aktiva tetap. Tax Management is Not Optimal 1. Advanced Tax Data Integration; 2. Tax reconciliation on the 8th of every month; 3. Preparation of tax equalization for PPh Article 21, PPh Article 22, PPh Article 23, Final PPh Article 4 (2) and VAT; 4. Optimizing the process of recording or imposing tax on each transaction by opening a consultation room; and 5. Make tax deposits before the due date on the 10th of the following month. Large amount of Tax on Transfer of Shares & Assets in the Implementation of Merger 1. Submit a letter of request for support to the Ministry of SOEs as shareholder; and 2. An FGD has been carried out regarding the application for book value, transfer of shares, and the write-off of fixed assets.

PENILAIAN RISIKO

RISK APPRAISAL

Peta risiko residual triwulan IV
VI quarter residual risk map



Level risiko
Risk level

- Rendah — Low
- Menengah — Intermediate
- Tinggi — High
- Ekstrim — Extreme

- Batas Selera Risiko — Risk Appetite Limit
- Batas Toleransi Risiko — Risk Tolerance Limit

EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Mekanisme pelaksanaan evaluasi Manajemen Risiko dilakukan secara berjenjang, mulai dari Cabang Pelabuhan ke Fungsi Manajemen Risiko Regional kemudian diteruskan ke *Group Head* Manajemen Risiko Kantor Pusat, sedangkan untuk anak perusahaan ke Divisi Manajemen Risiko *Subholding* kemudian dilaporkan ke *Group Head* Manajemen Risiko Kantor Pusat dan untuk anak perusahaan di luar *cluster* bisnis, dilakukan evaluasi secara langsung *Group Head* Manajemen Risiko Kantor Pusat. Evaluasi telah dilakukan dengan melihat data pada pengisian profil risiko pada kertas kerja *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dengan pendekatan efektivitas tindakan mitigasi yang telah dilaksanakan oleh pemilik risiko (*Risk Owner*) , kemudian divalidasi dan diverifikasi kembali dengan

RISK MANAGEMENT EVALUATION

The Risk Management is evaluated in stages, starting from the Port Branch to the Regional Risk Management Function then forwarded to the Head Office Risk Management Group, while for subsidiaries to the Subholding Risk Management Division then reported to the Head Office Risk Management Group and for subsidiaries outside business cluster, is evaluated directly by the Head Office Risk Management Group. The evaluation has been carried out by looking at the data of risk profile as has been filled on the Risk Control Self Assessment (RCSA) working paper with an approach to the effectiveness of mitigation actions that have been carried out by the Risk Owner, then validated and re-verified by showing operational, financial performance

menunjukkan data-data kinerja operasional, keuangan, investasi dan data pendukung lainnya serta menggunakan data kejadian yang merugikan (*loss event*).

Hasil evaluasi disampaikan melalui Nota Dinas kepada Unit Kerja terkait atau pun dilakukan pembahasan secara langsung bersama dengan *risk owner* dengan mekanisme memberikan masukan, saran, dan *feed back* terkait pengisian RCSA.

Rencana mitigasi yang sudah ada akan dilakukan *monitoring* dengan periode bulanan dan pelaporan dilakukan pertriwulanan. Selanjutnya, laporan *monitoring* profil risiko triwulanan akan disusun dan disampaikan kepada *Group* Anggaran dan Pelaporan untuk dimuat dalam laporan manajemen triwulanan korporat.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris Perusahaan memiliki organ pendukung yakni Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Di Triwulan IV tahun 2021, nama komite ini kemudian diubah menjadi Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko (disingkat "Komite GCG dan PMR").

Group Head Manajemen Risiko Kantor Pusat secara periodik selalu melakukan pertemuan dengan Komite GCG dan PMR dalam rangka melakukan koordinasi terkait rencana dan *monitoring* proses implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. Hasil koordinasi dituangkan dalam bentuk notulen rapat untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh *Group Head* Manajemen Risiko. Koordinasi yang secara rutin telah dilakukan dengan Komite GCG dan PMR di tahun 2021 adalah Koordinasi Bulanan dan Koordinasi Triwulanan. Adapun topik yang dibahas dalam koordinasi tersebut diantaranya meliputi Usulan Profil Risiko RKAP, Hasil *Monitoring* Profil Risiko Triwulanan dan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris.

data, investment and other supporting data as well as using loss event data.

The evaluation results are submitted through a Memorandum of Service to the relevant Work Units or direct discussions with the risk owner, by providing input, suggestions, and feedback related to filling out the RCSA.

The existing mitigation plan will be monitored on a monthly basis and the reporting will be done quarterly. Furthermore, a quarterly risk profile monitoring report will be prepared and submitted to the Group Budget and Reporting to be included in the corporate quarterly management report.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company's Board of Commissioners has a supporting organ, namely the Risk Management Monitoring Committee (RMM Committee) that is in charge of monitoring and evaluating the implementation of Risk Management work unit's duties in order to provide recommendations to the Board of Commissioners. In the fourth quarter of 2021, the name of this committee was changed to Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee (abbreviated as "GCG and RMM Committee").

The Head Office Group Risk Management periodically holds meetings with the GCG and RMM Committee to coordinate the planning and monitoring of the Company's Risk Management process. The coordination results are stated in the form of meeting minutes for further action by the Group Head Risk Management. Coordination that has been routinely carried out with the GCG and PMR Committee in 2021 is the Monthly Coordination and Quarterly Coordination. The topics discussed in the coordination are the Proposed RKAP Risk Profile, Results of Quarterly Risk Profile Monitoring and other matters that are of concern to the Board of Directors and Board of Commissioners.

PERKARA HUKUM

LEGAL CASES

Tabel Perkara Hukum

Legal Cases

No	Perkara Penting Litigation	Jumlah Amount		
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial Relations
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (had permanent legal force)	8	0	0
2.	Dalam proses penyelesaian In the process of completion	67	9	3
Total		75	9	3

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

LITIGATION

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Litigation Faced by the Company

No	Pokok Perkara / Gugatan Case Principal / Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Nominal of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Influence on the Company's condition
1	Perkara Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PT Metito Indonesia di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 281/Pdt.G/2019/PN Mdn kepada PT Pelindo terkait dengan Kerja sama Operasi Pengusahaan Air Minum di Pelabuhan Belawan, Dumai, dan Tanjung Balai Karimun. Default lawsuit filed by PT Metito Indonesia at Medan District Court with case register number 281/Pdt.G/2019/PN Mdn to PT Pelindo related to the Joint Operation for Drinking Water Concession at Belawan, Dumai, and Tanjung Balai Karimun ports.	Tingkat Pertama: PT Pelindo kalah Tingkat Banding: PT Pelindo Kalah PT Pelindo telah mengajukan Kasasi sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi Nomor Kasasi Nomor: 85/Pdt/Kasasi/2021/PN.Mdn pada tanggal 7 Oktober 2021. First Level: PT Pelindo lost Appeal Level: PT Pelindo lost PT Pelindo filed a Cassation as stated in the Deed of Cassation Statement Number: 85/Pdt/Kasis/2021/PN.Mdn on October 7, 2021.	PT Pelindo berpotensi membayar Rp24.560.623.050,62 kepada PT Metito Indonesia atas pembelian dan pembayaran fasilitas milik pembanding yang telah ditanam di pelabuhan Dumai apabila dinyatakan kalah dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. PT Pelindo might have to pay Rp24,560,623,050.62 to PT Metito Indonesia for the purchase and payment of comparison facilities that have been planted in Dumai port if declared defeated in a Court Decision with permanent legal force.	-	-

No	Pokok Perkara / Gugatan Case Principal / Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Nominal of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Influence on the Company's condition
2	Gugatan PT Artha Sempana kepada PT Pelindo (Dahulu PT Pelindo II) selaku Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada intinya mengklaim sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Lodan No. 43, Kelurahan Ancol, kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, seluas ± 5.148 M^2 yang semula telah disewa dari Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa berdasarkan Perjanjian yang telah berakhir pada 6 Agustus 2012 yang merupakan bagian tanah HPL yang dikelola Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa. PT Artha Sempana's lawsuit against PT Pelindo (formerly PT Pelindo II) as Defendant I at the North Jakarta District Court which essentially claims to be the owner of the land located at Jalan Lodan No. 43, Ancol Village, Penjaringan sub-district, North Jakarta City, covering an area of ± 5,148 M^2 which was originally leased from Sunda Kelapa Port Branch based on the Agreement which expired on August 6, 2012 and is part of the HPL land managed by Sunda Kelapa Port Branch.	Tingkat Pertama: PT Pelindo menang Tingkat Banding: PT Pelindo menang PT Artha Sempana mengajukan Kasasi atas Putusan Banding pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan PT Pelindo Telah menyampaikan Kontra memori Kasasi pada tanggal 25 Januari 2022 First Level: PT Pelindo won Appeal Level: PT Pelindo won PT Artha Sempana filed a Cassation on the Appeal Decision of DKI Jakarta High Court and PT Pelindo Has submitted a Contra memorandum of Cassation on January 25, 2022	PT Pelindo berpotensi membayar kehilangan aset seluas 5.143 M^2 di Regional 2 Sunda Kelapa apabila dinyatakan kalah dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap PT Pelindo might have to pay for the loss of assets covering an area of 5,143 M^2 in Regional 2 Sunda Kelapa if declared defeated in a Court Decision with permanent legal force	-	-

No	Pokok Perkara / Gugatan Case Principal / Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Nominal of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Influence on the Company's condition
3	Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Manado dengan nomor register perkara 384/pdt.G/2017/PN.Mnd antara Penggugat (Makis Sasambe/ PT Dian Osiania) Tergugat (PT Pelindo IV) terkait ganti rugi yang dialami Penggugat. Civil litigation case at Manado District Court with case register number 384/pdt.G/2017/PN.Mnd between the Plaintiff (Makis Sasambe/ PT Dian Osiania) and the Defendant (PT Pelindo IV) regarding the compensation suffered by the Plaintiff.	Tingkat Pertama: PT Pelindo menang Tingkat Banding: PT Pelindo menang Makis Sasambe / PT Dian osiania mengajukan Kasasi atas Putusan Banding pengadilan Tinggi Manado First Level: PT Pelindo won Appeal Level: PT Pelindo won Makis Sasambe / PT Dian osiania filed a Cassation on the Appeal Decision of Manado High Court	PT Pelindo berpotensi membayar Rp82.649.572.000,00 kepada Makis Sasambe/ PT Dian Osiania atas Tenggelamnya Kapal KM. Bawangung Nusa 1 dan rusaknya *Part* kapal seperti area kamar mesin, mesin bantu dan sistem jaringan elektrik, panel-panel kelistrikan, modul komputer terendam air laut sehingga semua peralatan kapal rusak miliknya apabila PT Pelindo dinyatakan kalah dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. PT Pelindo might have to pay Rp82,649,572,000.00 to Makis Sasambe/PT Dian Osiania for the sinking of KM Bawangung Nusa 1 Ship and the damage to ship parts such as the engine room area, auxiliary engines and electrical network systems, electrical panels, computer modules were submerged in seawater so that all of the ship's equipment was damaged if PT Pelindo is declared defeated in a Court Decision with permanent legal force.	-	-

No	Pokok Perkara / Gugatan Case Principal / Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Nominal of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Influence on the Company's condition
4	Gugatan perdata PMH yang diajukan Komura kepada Penggugat dan Turut Tergugat di pengadilan negeri Samarinda dengan Nomor register perkara 75/Pdt.G/2019/PN. Smr terkait dengan permasalahan yang diklaim oleh Penggugat bahwa Surat Tergugat Nomor 0148.03.17/Dir/PSP tanggal 18 Maret 2017 Perihal Penangguhan Biaya TKBM adalah Tidak Sah, karena tidak melibatkan komura. Surat dari PT PSP perihal penangguhan biaya TKBM atas komponen upah dari struktur tarif resmi terhadap jasa TKBM Komura Vivil lawsuit against PMH was filed by Komura to the Plaintiff and Co-Defendant at Samarinda District Court with case register number 75/Pdt.G/2019/PN. Smr, related to the problem claimed by the Plaintiff that the Defendant's Letter Number 0148.03.17/Dir/PSP dated March 18, 2017 regarding the Suspension of TKBM Fees is not valid, because it does not involve komura. Letter from PT PSP regarding the suspension of TKBM fees for the wage component of official tariff structure for Komura TKBM services	Tingkat Pertama: PT PSP Kalah (Pelindo harus tunduk pada Putusan) Tingkat Banding: PT PSP Kalah (Pelindo harus tunduk pada Putusan) PT PSP Mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI First Level: PT PSP Lost (Pelindo must comply with the Decision) Appeal Level: PT PSP Lost (Pelindo must comply with the Decision) PT PSP filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Atas perkara ini, PT Pelindo berpotensi kehilangan sharing fee dengan Tergugat PT PSP senilai Rp20.908.733.088,00 (Dua puluh milyar sembilan ratus delapan delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah). In this case, PT Pelindo might lose the sharing fee with the Defendant PT PSP in the amount of Rp20,908,733,088.00 (twenty billion nine hundred eight million seven hundred thirty-three thousand and eighty-eight rupiah).	-	-
5	Gugatan Perdata PMH yang dilakukan oleh PT Pelindo (Dahulu PT Pelindo IV) kepada para Tergugat terkait dengan penguasaan sebagian Tanah HPL No.1/Cambayya Tahun 1994 seluas 4.18 Ha. PMH Civil Lawsuit by PT Pelindo (formerly PT Pelindo IV) against the Defendant related to the partial control of Land HPL No.1/Cambayya Year 1994 covering an area of 4.18 Ha.	Tingkat Pertama: PT Pelindo kalah Tingkat Banding: PT Pelindo Kalah Tingkat Kasasi: PT Pelindo Kalah Perkara saat ini dalam tahap persiapan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. First Level: PT Pelindo lost Appeal Level: PT Pelindo lost Cassation Level: PT Pelindo lost The case is currently in the preparation stage for a judicial review at the Supreme Court.	PT Pelindo berpotensi tidak bisa memanfaatkan sebagian HPL 1/ Cambayya seluas 4.18 Ha karena putusan pengadilan menyatakan sah HGB atas nama pihak lain di atas HPL PT Pelindo seluas 4.023 M^2 PT Pelindo might not be able to utilize part of HPL 1/ Cambayya covering an area of 4.18 Ha because the court's decision stated that the HGB on behalf of another party was valid on PT Pelindo's HPL covering an area of 4,023 M^2	-	-

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2021, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

LEGAL CASES FACED BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN OFFICE

During 2021, there was no legal cases being faced by the Board of Commissioners and Board of Directors in office.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

LEGAL CASES FACED BY SUBSIDIARIES

No	Pokok Perkara / Gugatan Case Principal / Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Nominal of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Influence on the Company's condition
1	PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) sebagai Terlapor berdasarkan surat panggilan dari KPPU Wilayah II Panjang No. 33/Wil.II/P/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait penyediaan jasa dermaga dan bongkar muat di Pelabuhan Panjang, Lampung, sehubungan adanya surat GM IPC Cabang Panjang tahun 2013, yang mewajibkan pengguna jasa menggunakan *Jib Crane* dalam pelaksanaan proses bongkar muat di Pelabuhan Panjang PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) as the Reported Party based on a summon from KPPU Region II Panjang No. 33/Wil.II/P/II/2021 dated February 22, 2021 for alleged violation of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, related to the provision of dock and loading and unloading services at Panjang Port, Lampung, in connection with a letter from GM IPC Panjang Branch in 2013, which requires service users to use Jib Cranes in carrying out the loading and unloading process at Panjang Port	Saat ini PT PTP menunggu keputusan resmi atas penghentian penyelidikan dari KPPU wilayah II Panjang, yang akan disampaikan oleh SNHN Lawfirm selaku Kuasa Hukum PT PTP Currently PT PTP is waiting for an official decision on the termination of investigation from KPPU region II Panjang, which will be submitted by SNHN Lawfirm as PT PTP's Legal Counsel.	Berdasarkan Pasal 48 UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 26 - Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Based on Article 48 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Violation of the provisions of Article 4, Article 9 to Article 14, Article 16 to Article 19, Article 25, Article 27, and PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA - 26 - Article 28 shall be subject to a maximum fine of Rp25,000,000,000.00 (twenty-five billion rupiah) and a maximum of Rp100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah), or imprisonment in lieu of a fine for a maximum of 6 (six) months.	Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 26 - Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Violation of the provisions of Article 4, Article 9 to Article 14, Article 16 to Article 19, Article 25, Article 27, and PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA - 26 - Article 28 shall be subject to a maximum fine of Rp25,000,000,000.00 (twenty-five billion rupiah) and a maximum of Rp100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah), or imprisonment in lieu of a fine for a maximum of 6 (six) months.	Perusahaan dinyatakan melakukan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat The Company is declared to have conducted Monopolistic Practices and Unfair Business Competition

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI OLEH OTORITAS PASAR MODAL DAN OTORITAS LAINNYA

Selama tahun 2021, tidak terdapat Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED ON THE COMPANY, MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS BY CAPITAL MARKET AUTHORITIES AND OTHER AUTHORITIES

During 2021, there was no Administrative Sanctions Imposed on the Company, Members of Board of Commissioners and Board of Directors by the Capital Market Authority and Other Authorities

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan akan mengungkapkan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Pengungkapan informasi kepada Publik dan *Stakeholders* lainnya dilakukan secara wajar, dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perseroan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap jajaran Perseroan tidak diperkenankan melakukan pengungkapan informasi yang bertentangan dengan peraturan dan etika bisnis, antara lain:

1. Mengungkapkan informasi yang salah;
2. Mengungkapkan informasi yang tidak seluruhnya benar;
3. Mengungkapkan informasi yang tidak lengkap;
4. Perseroan melarang penggunaan informasi oleh Orang Dalam, termasuk data/informasi yang berasal dari Anak Perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek dan belum diungkap ke publik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau orang lain secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Perseroan melarang memperbincangkan tentang informasi rahasia dengan keluarga atau pihak di luar Perseroan, atau membicarakannya di tempat-tempat umum di luar lingkungan Perseroan;
6. Pengungkapan Informasi Biasa dapat dilakukan oleh setiap jajaran Perseroan;
7. Pengungkapan Informasi Terbatas kepada pihak lain dapat dilakukan oleh Pejabat di bawah Direktur terkait atau Pejabat lainnya yang secara khusus ditunjuk oleh Direksi;
8. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak lain dapat dilakukan, di mana Direktur atau Pejabat Perseroan dapat ditugasi oleh Direksi untuk meminta persetujuan tertulis dari Direktur Utama atau Direktur terkait; dan
9. Informasi yang belum terklasifikasi tidak dapat diungkapkan pihak lain sebelum informasi tersebut ditetapkan klasifikasinya oleh Direksi.

Pengungkapan informasi Perseroan harus memperhatikan tingkat *urgency* dan manfaat bagi Perseroan. Informasi Biasa Perseroan yang dipublikasikan dapat diperoleh atau diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi Perseroan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat umum, Perseroan telah menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses melalui

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

The Company will disclose complete, accurate and timely information to the Shareholders and the Board of Commissioners. Disclosure of information to the public and other stakeholders is carried out fairly, taking into account the classification of information, the interests of the Company and the needs of interested parties in accordance with applicable regulations. Each level of the Company is not allowed to disclose information that is contrary to regulations and business ethics, including:

1. Disclosing false information;
2. Disclosing information that is not entirely true;
3. Disclosing incomplete information;
4. The Company prohibits the use of information by Insiders, including data/information originating from Subsidiaries that have been listed on the Stock Exchange and have not been disclosed to the public, with the intention of illegally benefiting themselves, groups, or other people and contrary to regulations. current regulation;
5. The Company prohibits discussing confidential information with family or parties outside the Company, or discussing it in public places outside the Company's environment;
6. Ordinary Information Disclosure can be made by every level of the Company;
7. Disclosure of Limited Information to other parties can be made by Officers under the relevant Director or other Officers specifically appointed by the Board of Directors;
8. Disclosure of Confidential Information to other parties can be made, where the Director or Company Officer may be assigned by the Board of Directors to request written approval from the President Director or the relevant Director; and
9. Information that has not been classified cannot be disclosed by other parties before the information is classified by the Board of Directors.

Disclosure of Company information must take into account the level of urgency and benefits for the Company. The Company's published Ordinary Information can be obtained or accessed quickly and in a timely manner, at low cost, and in a simple way.

As a form of implementing the Company's information disclosure to stakeholders and the general public, the Company has provided information in a timely, relevant, adequate, clear, accurate, and easily accessible manner through various media,

berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.

both print and electronic media.

Kantor Pusat
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14310, Indonesia
Telp: 021 4301080
Email: info@Pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Sekretariat Perusahaan
Ali Mulyono
Email: corp_sec@Pelindo.co.id

Media Sosial:
Facebook: BUMN Pelabuhan Indonesia
Twitter: @indonesiaport
Instagram: @Pelindo
Youtube: Pelindo

Head Office
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
North Jakarta 14310, Indonesia
Tel: 021 4301080
Email: info@Pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Corporate Secretary
Ali Mulyono
Email: corp_sec@Pelindo.co.id

Social Media:
Facebook: BUMN Pelabuhan Indonesia
Twitter: @indonesiaport
Instagram: @Pelindo
Youtube: Pelindo

SIARAN PERS

PRESS CONFERENCE

No	Tanggal Terbit Publishing Date	Judul Title
1	8 Januari 2021 January 8, 2021	IPC Gandeng BNN Turut Mengentaskan Masyarakat Rawan Narkoba IPC Collaborates with BNN to Help Relieve Drug-Prone Communities
2	13 Januari 2021 January 13, 2021	IPC Berikan Dukungan Evakuasi Korban Sriwijaya Air IPC Supported the Evacuation of Sriwijaya Air Victims
3	17 Januari 2021 January 17, 2021	Peduli Produk Dalam Negeri, IPC Dukung Pelaksanaan Gernas BBI Caring for Domestic Products, IPC Supported the Implementation of Gernas BBI
4	2 Februari 2021 February 2, 2021	Kinerja Operasional *Unaudited* 2020 Turun, IPC Optimis Perbaikan di 2021 Unaudited 2020 Operational Performance is Declining, IPC is Optimistic for Improvement in 2021
5	5 Februari 2021 February 5, 2021	IPC Salurkan Rp520 Juta Untuk Korban Gempa Mamuju-Majene IPC Distributed Rp520 Million for Mamuju - Majene Earthquake Victims
6	22 Februari 2021 February 22, 2021	Optimis Perbaikan, IPC Targetkan Pertumbuhan Kinerja Operasional Optimistic for Improvement, IPC is Targetting Operational Performance Growth
7	26 Februari 2021 February 26, 2021	Melalui Nota Kesepahaman, IPC Dukung Sinergi Anak Perusahaan Pelindo Through a Memorandum of Understanding, IPC Supported the Synergy of Pelindo Subsidiaries
8	3 Maret 2021 March 3, 2021	IPC dan KPK Bersinergi Berantas Tipikor IPC and KPK Synergize to Fight Corruption
9	16 Maret 2021 March 16, 2021	Kementerian BUMN Tunjuk Direktur Keuangan Baru IPC Ministry of SOEs Appointed New IPC's Director of Finance
10	23 Maret 2021 March 23, 2021	Tingkatkan Produktivitas, IPC *Group* Tandatangani Kesepakatan Kerja Sama Increase Productivity, IPC Group Signed a Cooperation Agreement
11	7 April 2021 April 7, 2021	Kegiatan Ekspor Impor di Pelabuhan Tanjung Priok Tumbuh Positif Export-Import Activities at Tanjung Priok Port are Growing Positively
12	12 April 2021 April 12, 2021	Mengusung Produk IT Unggulan, IPC Berpartisipasi dalam Hannover Messe 2021 Expo Carrying Leading IT Products, IPC Participated in Hannover Messe 2021 Expo
13	17 April 2021 April 17, 2021	IPC Bersama KPK Gelar *Directorship* Program Anti Korupsi dan Gratifikasi IPC with KPK Held Directorship of Anti-Corruption and Gratification Program
14	20 April 2021 April 20, 2021	Pandemi COVID-19, Arus Peti Kemas IPC Tahun 2020 Tembus 6,9 Juta TEUs Covid-19 Pandemic, IPC Container Flow in 2020 Reached 6.9 Million TEUs
15	23 April 2021 April 23, 2021	Triwulan I 2021, Proyek Maritime Tower Capai *Progress* 67,5% First Quarter of 2021, Maritime Tower Project Reached 67.5% Progress
16	27 April 2021 April 27, 2021	IPC Peduli Bagikan Lebih dari 7.500 New Normal Kit IPC Peduli Distributed More Than 7,500 New Normal Kits
17	10 Mei 2021 May 10, 2021	IPC Jamin Pelayanan Operasional Berjalan Normal Selama Libur Idul Fitri IPC Guarantees Normal Operational Services During Eid Al-Fitr Holiday
18	11 Mei 2021 May 11, 2021	Program IPC Berbagi Ramadan Salurkan Total Rp4,8 Miliar IPC Berbagi Ramadan Program Distributed a total of Rp4.8 Billion
19	19 Mei 2021 May 19, 2021	*Topping Off*, Maritime Tower Siap Beroperasi Semester II 2021 Topping Off, Maritime Tower is Ready to Operate in 2nd Semester of 2021
20	10 Juni 2021 June 10, 2021	IPC Dukung Penuh Vaksinasi Massal di Lingkungan Pelabuhan IPC Fully Supported Mass Vaccination in Port Environment
21	15 Juni 2021 June 15, 2021	Sinergi IPC Wujudkan Pelabuhan Bersih IPC Synergy Realizes Clean Port

No	Tanggal Terbit Publishing Date	Judul Title
22	23 Juni 2021 June 23, 2021	IPC *Group* dan Mitra Usaha Tanda Tangani Deklarasi Bersama Pelabuhan Bersih IPC Group and Business Partners Signed Joint Declaration on Clean Ports
23	25 Juni 2021 June 25, 2021	Serikat Pekerja Dukung Integrasi Pelindo Labor Union Supported Pelindo Integration
24	29 Juni 2021 June 29, 2021	Digitalisasi IPC Tingkatkan Pelayanan Dan Cegah Suap IPC Digitization Improves Service And Prevents Bribery
25	30 Juni 2021 June 30, 2021	Integrasi Pelindo Tingkatkan Kinerja Pelabuhan, Konektivitas Maritim dan Ekonomi Nasional Pelindo Integration Improves Port Performance, Maritime Connectivity and National Economy
26	7 Juli 2021 July 7, 2021	IPC Sukseskan Percepatan Vaksinasi COVID-19 di Jakarta Utara IPC Participated in Accelerating Covid-19 Vaccination in North Jakarta
27	15 Juli 2021 July 15, 2021	Pelabuhan Tanjung Priok Antisipasi Dampak Gangguan Sistem CEISA Bea Cukai Tanjung Priok Port AnticipateD the Impact of the CEISA Customs System Interference
28	17 Juli 2021 July 17, 2021	IPC Pastikan Pelayanan Berjalan Normal Selama Perlambatan Ceisa IPC Assures Its Services Are Running Normally During The Ceisa Droll
29	20 Juli 2021 July 20, 2021	Idul Adha 1442 H, IPC Bagikan Ratusan Hewan Kurban Eid Al-Adha 1442 H, IPC Shared Hundreds of Sacrifice Animal
30	21 Juli 2021 July 21, 2021	Perbaikan Sistem CEISA, YOR Pelabuhan Tanjung Priok Capai Kapasitas Aman CEISA System Improvement, YOR Tanjung Priok Port Reached Safe Capacity
31	23 Juli 2021 July 23, 2021	Merger BUMN Pelabuhan, Pelindo Gelar Lomba Karya Tulis Jurnalistik 2021 SOE Port Merger, Pelindo Held 2021 Journalistic Writing Competition
32	27 Juli 2021 July 27, 2021	IPC Fasilitasi Bongkar Muat Alat Tempur Kegiatan Garuda *Shield*-15/2021 IPC Facilitated Loading and Unloading of Combat Equipment for Garuda Shield Activities -15/2021
33	31 Juli 2021 July 31, 2021	Proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing Seksi 1 Mulai Beroperasi Section 1 Cibitung Cilincing Toll Road Project Started to Operate
34	6 Agustus 2021 August 6, 2021	IPC Dukung Ekspor Merdeka 2021 di Sumatera Selatan IPC Supported the 2021 Merdekat Export in South Sumatra
35	9 Agustus 2021 August 9, 2021	Semarak HUT RI ke-76 Pelindo Bersatu, Ikuti Lomba dan Menangkan Ratusan Juta! Pelindo Bersatu in the 76th Indonesian Independence Day, Joined the Competition and Won Hundreds of Millions!
36	10 Agustus 2021 August 10, 2021	IPC Berlakukan *Auto Gate* di Buffer Area IPC Applied Auto Gate in Buffer Area
37	16 Agustus 2021 August 16, 2021	Merdeka Ekspor 2021 : IPC Group Layani Rp1,6 Triliun Ekspor Pertanian 2021 Merdeka Export: IPC Group Served Rp1.6 Trillion of Agricultural Exports
38	27 Agustus 2021 August 27, 2021	Sukseskan Gelar Buah Nusantara, IPC Distribusikan 575 Paket Buah Untuk Nakes Participating in the Fruits of Nusantara Event, IPC Distributed 575 Fruit Packages for Healthcare Workers
39	1 September 2021 September 1, 2021	Rancangan Penggabungan BUMN Pelabuhan Port SOE Merger Plan
40	8 September 2021 September 8, 2021	Tingkatkan Pelayanan Barang, IPC Terapkan *Single* TID Improve Goods Service, IPC Applies Single TID
41	27 September 2021 September 27, 2021	Pelindo I-IV Gelar Sosialisasi Tentang Merger kepada Asosiasi dan Instansi Terkait Pelindo I - IV Held a Dissemination About Merger to Related Associations and Agencies
42	1 Oktober 2021 October 1, 2021	Empat BUMN Pelabuhan Resmi Menjadi Satu Pelindo Four State-Owned Port Enterprises Officially Became One Pelindo
43	8 Oktober 2021 October 8, 2021	Pelindo Terima Peringkat AAA Dengan *Outlook* Stabil Pelindo Received AAA Rating With Stable Outlook
44	8 Oktober 2021 October 8, 2021	Pelindo Umumkan Pemenang Lomba Pelabuhan Indonesia Award 2021 Pelindo Announced Winners of the 2021 Indonesian Port Competition Award
45	14 Oktober 2021 October 14, 2021	Merger BUMN Pelabuhan Diresmikan Presiden RI The President of the Republic of Indonesia inaugurated the Merger of State-Owned Port Enterprises
46	05 November 2021 November 05, 2021	Komitmen BUMN Kembangkan *Green & Smart Port* Dalam Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim di COP26 SOE Commitment to Develop Green & Smart Port to Support Climate Change Mitigation at COP26
47	10 November 2021 November 10, 2021	Trafik Peti Kemas Pelindo TW III 2021 Capai 12,4 Juta TEUs Pelindo Container Traffic in Q3/2021 Reached 12.4 Million TEUs
48	29 November 2021 November 29, 2021	Pelindo Turut Sukseskan Program Rehabilitasi *Mangrove* di Indramayu Pelindo Participated in the Success of Mangrove Rehabilitation Program in Indramayu
49	6 Desember 2021 December 6, 2021	Pelindo Siap Kembali Layani Kapal Pesiar Pelindo is ready to return to servicing cruise ships
50	9 Desember 2021 December 9, 2021	Pelindo Tanam 85 Ribu Bibit Mangrove Pelindo Planted 85 Thousand Mangrove Seeds
51	20 Desember 2021 December 20, 2021	Pelindo Persiapkan Inbreng Saham Empat *Subholding* Kelolaan Pelindo Prepared Transfer of Shares of Four Managed Subholding
52	29 Desember 2021 December 29, 2021	Wujudkan Pelabuhan Bersih, Pelindo dan *Stakeholders* Kepelabuhanan Tandatangani Pakta Integritas Bersama Realize Clean Ports, Pelindo and Port Stakeholders Sign Joint Integrity Pact

No	Tanggal Terbit Publishing Date	Judul Title
53	31 Desember 2021 December 31, 2021	Pelindo Berkomitmen Dukung Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Pelindo is Committed to Support the Development of Bali Cultural Center

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi kewajiban penyampaian laporan yang bersifat insidental maupun sektoral yang dimintakan oleh Regulator, Pemegang Saham, maupun pihak lain yang memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun laporan yang telah disampaikan selama tahun 2021 antara lain:

1. Laporan Kinerja TJSL Triwulan I;
2. Laporan Kinerja TJSL Triwulan II;
3. Laporan Kinerja TJSL Triwulan III;
4. Laporan Kinerja TJSL Triwulan IV;
5. Laporan Kinerja TJSL *Audited;*
6. Pelaporan Pemberitaan Agenda *Setting;* dan
7. Laporan *Progress* Pelindo Paska Penggabungan.

KODE ETIK

Kode Etik Bisnis merupakan panduan berisi prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan. Kode Etik ini diharapkan menjadi aspirasi bagi Insan Pelindo untuk mencapai visi dan misi Pelindo. Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dibangun atas fondasi yang kuat dari visi, misi, tata nilai serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha PT Pelindo (Persero). Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan Pelindo yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan. Kode Etik Bisnis ini akan membantu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mengatasi isu-isu seputar etika atau dilema yang berpotensi dihadapi dalam bekerja.

Pedoman Kode Etik Perseroan telah dilakukan pemutakhiran dengan melihat berbagi Pedoman yang ada di PT Pelabuhan Indonesia I,II,III dan IV (Persero) nantinya pedoman kode etik bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
   a. Setiap Insan Pelindo memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Ketidakberpihakan, Kewajaran dan Terpercaya;
   b. Mendorong seluruh Insan Pelindo untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
   c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
   d. Membangun reputasi Perusahaan lebih baik; dan
   e. Meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan.

TRANSPARENCY OF REPORT SUBMISSION

The Company is committed to complying with the obligation to submit incidental and sectoral reports requested by the Regulator, Shareholders, and other parties who have rights in accordance with the applicable laws and regulations. The reports that have been submitted during 2021 include:

1. 1st Quarter CSER Performance Report;
2. 2nd Quarter CSER Performance Report;
3. 3rd Quarter CSER Performance Report;
4. 4th Quarter CSER Performance Report;
5. Audited CSER Performance Report;
6. Reporting on Agenda Setting; and
7. Post Merger Pelindo Progress Report.

CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is a guide containing the principles that govern behavior in implementing corporate values. The Code of Conduct is expected to be an aspiration for Pelindo people to achieve Pelindo's vision and mission. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Code of Conduct is built on a strong foundation of vision, mission, values and principles of Good Corporate Governance in carrying out the business activities of PT Pelindo (Persero). This Code of Conduct applies to the entire Pelindo People, namely Board of Commissioners, Board of Directors and all Employees. This Code of Conduct will assist PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in overcoming ethical issues or dilemmas that may be faced at work.

The Company's Code of Conduct has been updated with due observance to the existing guidelines at PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero). In the future, the code of conduct of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will be ratified by the President Director and President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PURPOSE AND OBJECTIVES

1. The purposes of implementing the Code of Conduct for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are as follows:
   a. Every Pelindo People understands that all Company's activities are based on the principles of good corporate governance which include Transparency, Accountability, Responsibility, Impartiality, Fairness and Trustworthiness;
   b. Encouraging all Pelindo people to behave well in carrying out all Company's activities;
   c. Creating a healthy and comfortable working atmosphere in the Company's environment;
   d. Build a better reputation of the Company; and
   e. Minimize the chance of deviation.

2. Tujuan penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
   a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;
   b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Pelindo yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis;
   c. Sebagai landasan etis untuk bertindak dan berpikir serta mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan; dan
   d. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika, agar menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi.

2. The objectives of implementing the Code of Conduct for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are as follows:
   a. As a shared commitment to realize the vision and carry out the mission of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in a professional and ethical manner of doing a business;
   b. As a behavioral guide for all Pelindo People that must be obeyed in carrying out all business activities;
   c. As an ethical basis for acting, thinking and making decisions related to the Company; and
   d. Develop harmonious, synergistic and mutually beneficial relationships between Pelindo People and other stakeholders based on sound and ethical corporate principles, in order to become a highly competitive company.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode Etik Bisnis mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang menjadi panduan Insan Pelindo dalam berinteraksi dengan semua Pemangku Kepentingan (Karyawan, Pelanggan, Pemerintah, Vendor, dan Komunitas) untuk membangun hubungan jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta cara untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakjelasan terkait dengan etika profesional dan etika kerja. Kode etik Bisnis Perseroan mengatur terkait Etika Profesional dan Etika Kerja.

PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct reflects the actions and values that guide Pelindo People in interacting with all Stakeholders (Employees, Customers, Government, Vendors, and Communities) to build long-term relationships that aim to provide information, understanding and ways to report any violations or ambiguity regarding professional ethics and work ethics. The Company's Code of Conduct regulates Professional Ethics and Work Ethics.

Etika Profesional

Etika Profesional yaitu etika yang berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk memastikan kualitas dan proses yang dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dalam profesi serta sebagai acuan untuk berhubungan dengan *Stakeholders*. Dalam etika profesional mengatur mengenai:

1. Hubungan dengan Pekerja;
2. Hubungan dengan Pemegang Saham;
3. Hubungan dengan Serikat Pekerja;
4. Hubungan dengan Pelanggan;
5. Hubungan dengan Vendor;
6. Hubungan dengan Kreditur;
7. Hubungan dengan Debitur;
8. Hubungan dengan Investor dan Lembaga Keuangan;
9. Hubungan dengan Pesaing;
10. Hubungan dengan Masyarakat, Komunitas dan Lingkungan;
11. Hubungan dengan Regulator dan Aparatur Pemerintah;
12. Hubungan dengan *Subholding* dan/atau Anak Perusahaan; dan
13. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Lain.

A. Professional Ethics

Professional Ethics, namely ethics related to the field of work in order to ensure the quality and processes carried out in accordance with the rules in the profession as well as as a reference for dealing with stakeholders. Professional ethics regulates:

1. Relationship with Employees;
2. Relationship with Shareholders;
3. Relationship with Trade Union;
4. Relationship with Customers;
5. Relationship with Vendors;
6. Relationship with Creditors;
7. Relationship with Debtors;
8. Relationship with Investors and Financial Institutions;
9. Relationship with Competitors;
10. Relationship with Society, Community and Environment;
11. Relationship with Regulators and Government Apparatus;
12. Relationship with Subholding and/or Subsidiaries; and
13. Relationship with Other Stakeholders.

Etika Kerja

Etika Kerja yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan dalam bekerja didasarkan pada kerja keras dan ketekunan yang diharapkan dapat meningkatkan karakter moral Insan Pelindo seperti kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan loyalitas.

1. Kepatuhan Terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya;
2. Benturan Kepentingan;
3. Korupsi dan Suap;
4. Pencurian dan Penyelewengan Sejenisnya;
5. Pencucian Uang;

Work Ethics

Work Ethics is a system of values or norms used in work based on hard work and perseverance, which is expected to improve the moral character of Pelindo People such as honesty, openness, sincerity and loyalty.

1. Compliance with Laws, Legislations and Other Provisions;
2. Conflict of Interest;
3. Corruption and Bribery;
4. Theft and Other Misappropriation;
5. Money Laundering;

6. Gratifikasi (Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Imbalan, Jamuan, Hiburan dan Donasi;
7. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi;
8. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan;
9. Integritas Laporan Keuangan;
10. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi;
11. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi;
12. Pengelolaan Arsip;
13. Perlindungan Harta Perusahaan;
14. Pengendalian Intern;
15. Perjalanan Dinas;
16. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
17. Aktivitas Politik dan Sosial; dan
18. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pekerja.

6. Gratification (Giving and Receiving of Gifts or Rewards, Meals, Entertainment and Donations);
7. Equal Opportunity to Get Job and Promotion;
8. Company's Documentation and Records;
9. Financial Report Integrity;
10. Confidentiality of Data and/or Information;
11. Media, Communication and Information Dissemination;
12. Archive Management;
13. Company's Assets Protection;
14. Internal Control;
15. Business trip;
16. Intellectual Property Rights (IPR);
17. Political and Social Activities; and
18. Ethical Behavior towards Fellow Workers.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

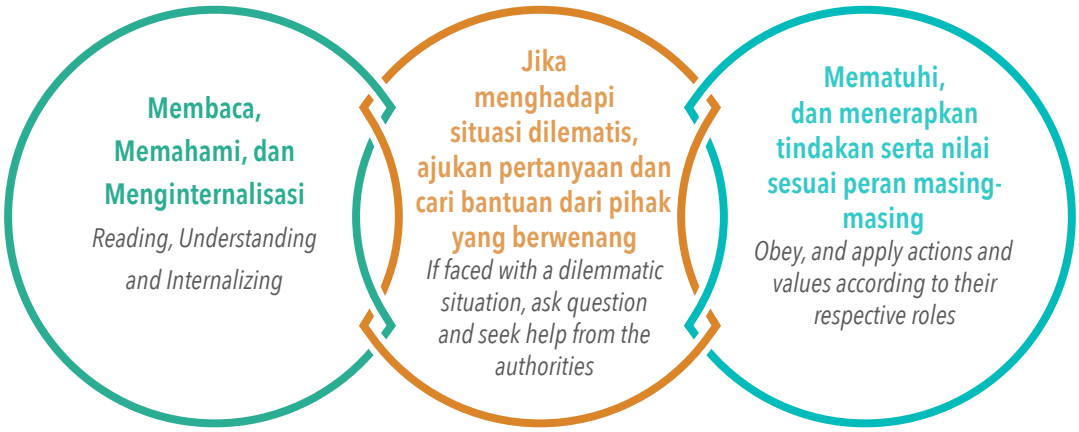
Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan Pelindo yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Karyawan Pelindo. Setiap tahun seluruh Insan Pelindo menandatangani Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis.

Setiap tahun seluruh Insan Pelindo menandatangani Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis sebagai bentuk komitmen bersama atas kepatuhan kepada asas-asas GCG. Penandatanganan pakta integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis di PT Pelabuhan Indonesia I,II,III dan IV (Persero) pada tahun 2021 tercapai penuh. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan 98% Pegawai Pelindo pasca merger (Oktober-Desember 2021) telah menandatangani pakta integritas. Pegawai yang tidak melakukan tanda tangan dikarenakan pensiun dan meninggal dunia.

COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct applies to all Pelindo People, i.e., Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of Pelindo. Every year, all Pelindo People sign the Integrity Pact and Compliance with the Code of Conduct.

Every year, all Pelindo People sign the Integrity Pact and Compliance with the Code of Conduct as a form of joint commitment to comply with GCG principles. The signing of integrity pact and Compliance with the Code of Conduct at PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) in 2021 has been fully achieved. The entire Board of Commissioners, Board of Directors and 98% of employees of Pelindo after the merger (October – December 2021) have signed the integrity pact. Employees who did not sign were due to retirement and death.



PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Saat ini, Pedoman Kode Etik Pelindo masih dalam proses penyusunan yang akan disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan. Selanjutnya Pedoman Kode Etik akan disosialisasikan keseluruh regional 1, 2, 3 dan 4. Selain itu, bagi sub holding akan dilakukan ratifikasi.

CODE OF CONDUCT DISSEMINATION

Currently, Pelindo's Code of Conduct are still in the process of being drafted which will be approved by President Commissioner and President Director of the Company. Furthermore, the Code of Conduct will be disseminated to all regions 1, 2, 3 and 4. In addition, ratification will be carried out for sub holdings.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka seluruh Insan Pelindo memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan;
2. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan;
3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan;
4. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan/mitra bisnis dan dengan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta bersedia berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
6. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perusahaan;
7. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang;
8. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan Pelindo dengan baik serta memahami dan mematuhi etika dan perilaku; dan
9. Bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Oleh sebab itu sebagai perwujudan Komitmen diatas maka:

1. Seluruh Insan Pelindo wajib menandatangani Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis yang merupakan komitmen Insan Pelindo untuk melaksanakan Pedoman Kode Etik Bisnis yang diperbaharui setiap tahun;
2. Pedoman Kode Etik Bisnis harus disosialisasikan dan dipahami oleh Insan Pelindo;
3. Pakta Integritas, Janji Pedoman Kode Etik Bisnis dan Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam satu rangkap dan disimpan di Sekretariat Perusahaan;
4. Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis Pekerja Perusahaan dibuat dan ditandatangani dalam satu rangkap dan disimpan di Sekretariat Perusahaan untuk Kantor Pusat dan di Bagian SDM masing-masing Cabang Pelabuhan serta Sekretariat Perusahaan *Subholding* dan Anak Perusahaan;
5. Adapun unit kerja di Kantor Pusat (*Departemen Head* Hubungan Lembaga, Tata Kelola, Investor), Regional (*Departemen Head* Pelayanan SDM dan Umum), *Subholding* dan Anak Perusahaan (SVP Sekretariat Perusahaan) melakukan *monitoring*, membuat laporan dan rekapitulasi Pekerja Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas di wilayah kerjanya masing-masing setiap tahunnya, untuk kemudian disampaikan kepada *Group Head* Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

In order to realize the Company's commitment to stakeholders, all Pelindo People are committed to:

1. Always think and behave in a corporate manner by prioritizing the interests of the Company above personal and/or group interests and to provide the best for the Company;
2. Always care and maintain the good image and reputation of the Company;
3. Carry out duties professionally with full responsibility and uphold integrity, honesty, and the spirit of togetherness;
4. Care and respond to customer/business partner complaints and immediately follow up in accordance with applicable regulations;
5. Have a strong motivation to develop themselves and expand their knowledge and are willing to share knowledge and skills as well as help other co-workers without fearing competition;
6. Always be commendable as an individual and a member of the community and not commit any disgraceful act that could degrade the Company's image;
7. Avoid all actions that may violate the provisions and or abuse authority;
8. Carry out religious worship adhered to by each Pelindo People properly, and understand and comply with ethics and behavior; and
9. Work in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

As an embodiment of the above commitments:

1. All Pelindo People are required to sign the Integrity Pact and the Code of Conduct Pledge, which are the commitments of Pelindo People to implement the Code of Conduct that is updated every year;
2. The Code of Conduct must be socialized and understood by Pelindo People;
3. Integrity Pact, Promises of Code of Business Ethics Guidelines and Statements of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners and Directors are made and signed in one copy and kept in the Corporate Secretary;
4. The Integrity Pact and the Code of Conduct Pledge are drawn up and signed in one copy and stored at the Head Office Corporate Secretary and in the HC Department of each Port Branch as well as the Subholding and Subsidiary Corporate Secretary;
5. Work units at the Head Office (Department Head of Institutional Relations, Governance, Investors), Regional (Department Head of Human Capital and General Affairs), subholdings and Subsidiaries (SVP of Corporate Secretary) monitor, make reports and recapitulate employees who sign the Integrity Pact in their respective working area every year, to then be submitted to Group Head Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and

6. Seluruh Pimpinan Unit Kerja sampai dengan pimpinan 2 (dua) level di bawahnya bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis ini.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Setiap Insan Pelindo yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan, dengan melalui mekanisme indisipliner. Sanksi bagi Pekerja yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Indisipliner.

Dewan Komisaris dan/atau Direksi akan memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi indisipliner dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan unit kerja masing-masing/mekanisme indisipliner. Sanksi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.

Bila mitra usaha atau *Stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan ketentuan lain yang mengatur hal tersebut. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Sanksi atas pelanggaran kode etik Perseroan pasca merger masing mengacu pada jenis hukuman sesuai tingkatan hukum masing-masing dari eks Pelindo I, II, III, dan IV. Tingkatan hukuman atas sanksi pelanggaran kode etik terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

JUMLAH PELANGGARAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

Pasca merger terdapat 3 (tiga) pelanggaran atas kode etik dan telah diberikan sanksi dengan pelanggaran berat.

BUDAYA PERUSAHAAN

Uraian terkait Budaya Perusahaan disampaikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

6. All Heads of Work Units up to 2 (two) levels below are responsible for and set an example for their subordinates for the implementation of this Code of Conduct.

TYPES OF SANCTIONS FOR VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

Every Pelindo People who is proven to have violated the Code of Conduct will be given sanctions in accordance with the applicable rules and regulations in the Company, through an disciplinary mechanism. Sanctions for employees who commit violations are determined by the Board of Directors after receiving a recommendation from the disciplinary team.

The Board of Commissioners and/or the Board of Directors will decide on the provision of coaching actions, disciplinary sanctions and/or other actions as well as prevention that must be carried out by direct superiors within the respective work units/disciplinary mechanisms. Sanctions for members of Board of Directors and Board of Commissioners who commit violations are decided by the Shareholders.

If a business partner or other Stakeholders commit a violation, the provisions as contained in the contract and other provisions governing this will be imposed. If it is related to a criminal act, it can be forwarded to the authorities.

Sanctions for violating the Company's code of conduct after the merger refer to the types of punishment according to the respective legal levels of former Pelindo I, II, III, and IV. The level of punishment for sanctions for violating the code of conduct consists of light disciplinary penalties, moderate disciplinary penalties and severe disciplinary penalties.

NUMBER OF VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED

After the merger, there were 3 (three) violations of the code of conduct and have been given sanctions of heavy violations.

CORPORATE CULTURE

Descriptions related to Corporate Culture are presented in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

Perseroan tidak memiliki kebijakan kompensasi jangka panjang berbasis kinerja. Pelindo bukan merupakan Perusahaan Terbuka sehingga tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

PERFORMANCE-BASED LONG-TERM COMPENSATION POLICY

The Company does not have a long-term performance-based compensation policy. Pelindo is not a Public Company, hence does not have a Share Ownership Program by Employees and/or Management (ESOP/MSOP).

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PELAKSANAANNYA

Pelindo bukan merupakan Perusahaan Terbuka sehingga tidak terdapat informasi Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

POLICY ON INFORMATION DISCLOSURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP AND THE IMPLEMENTATION

Pelindo is not a Public Company, hence there is no information on share ownership of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the ownership or any changes in the ownership of shares of Public Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan serta dengan niat baik.

Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen Pelindo beserta seluruh cabang pelabuhan dan grup perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.

PENYAMPAIAN DAN MEDIA LAPORAN PELANGGARAN

Pelindo menyediakan aplikasi/sistem untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Pelindo, cabang pelabuhan, dan grup perusahaan melalui sistem yang independen. Melalui sistem ini, Pelindo dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional. Bagi Insan Pelindo atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah sistem yang digunakan untuk menerima, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Telah dilakukan penyampaian surat terkait tindak lanjut pelaksanaan penerapan *single* WBS untuk Pelindo Group di mana di dalam nya juga terdapat perintah untuk melakukan publikasi terkait larangan pungli, praktik suap seta gratifikasi No SK.01.01/21/12/1/HLTI/WDUT/PLND-21 tanggal 21 Desember 2021. Sehingga saluran WBS Pelindo Group terkelola menjadi satu pintu di Kantor Pusat.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) or what is known as Pelindo Bersih was introduced to strengthen its implementation in providing opportunities for all Pelindo people and other stakeholders to submit report regarding indications of violations of applicable ethical values, based on accountable evidence and with good intentions.

Pelindo Bersih is a real program from Pelindo management and all port branches and corporate groups to create a workplace that is clean from fraud, corruption and extortion.

VIOLATION REPORT SUBMISSION AND MEDIA

Pelindo provides an application/system to report fraudulent acts, corruption, and extortion for all stakeholders who have information and wish to report an act indicating a violation committed by Pelindo people, port branches, and corporate groups through an independent system. Through this system, Pelindo can become a better company and have competitiveness both at the national and international level. Pelindo people or stakeholders who report will be given a protection, both in terms of identity confidentiality and from possible retaliation by the reported party.

The whistleblowing system is a system used to receive, process and follow up as well as make report on information submitted by the whistleblower regarding violation that occurred within the company.

A letter has been submitted regarding the follow-up to the implementation of single WBS for Pelindo group, in which there is also an instruction to publish the prohibition of extortion, bribery practices and gratification No. SK.01.01/21/12/1/HLTI/WDUT/PLND-21 dated December 21, 2021. Thus, Pelindo Group WBS channel is managed as one door at the Head Office.



PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

1. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib;
2. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan;
3. Perseroan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan saluran WBS dan ditegaskan bahwa para pihak yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor;
4. Perseroan menjamin terhadap pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikanya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik; dan
5. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas; dan
   c. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya *(personal file record)*;

WHISTLEBLOWER PROTECTION

1. The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity, except if the disclosure is required related to the report or investigation conducted by the authorities;
2. Report made without an identity will still be processed, however, the seriousness of the report content, credibility, and evidence submitted, as well as the possibility to confirm the report will be considered;
3. The Company stipulates sanctions for the misuse of WBS channel and emphasizes that parties who submit report in the form of slander or false report will be subject to sanctions including legal processes and does not receive either guarantees of confidentiality or Whistleblower protection;
4. The Company guarantees the whistleblower against all lawsuits, both criminal and civil, intimidation, punishment or unpleasant actions from any party for the testimony and/or reporting that will be, is being or has been given, unless the testimony and/or report is not submitted with good intention; and
5. The Company provides protection to the whistleblower against the possibility of the following things:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion of rank for unclear reasons; and
   c. Adverse records in his/her personal file record;

6. Perusahaan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi pelapor pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait hal yang dilaporkan; dan
7. Perusahaan memberikan hak kepada pelapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan kepetingan dan pendampingan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan.

PENANGANAN PENGADUAN

1. Laporan dapat ditindaklanjuti bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Termasuk pada kriteria jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan;
   b. Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan Insan Pelindo;
   c. Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan
   d. Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.

2. Persyaratan laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal dibawah ini:
   a. Identitas Pelapor;
      Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan. Pelapor dapat tidak menyertakan identitas (*anonimus*) tetapi untuk kebutuhan verifikasi laporan dibutuhkan identitas pelapor.
   b. Uraian pelanggaran yang dilakukan dengan dalam pelaporan sedikitnya memuat:
      - Permasalahan: Pelanggaran yang diadukan merupakan pelanggaran yang terkait dengan aktivitas perusahaan dan atau anak perusahaan;
      - Lokasi kejadian; dan
      - Waktu kejadian.
   c. Data terlapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);
   d. Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya; dan
   e. Pengaduan yang akan diproses lebih lanjut adalah kejadian/peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterimanya laporan oleh Komite Pelindo Bersih.

3. Bukti-bukti sebagaimana *point* 3.b.4 meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
   a. Bukti tertulis berupa Dokumen, surat, kwitansi atau Nota tagihan yang dituangkan di atas kertas ataupun dalam bentuk data atau Surat elektronik yang dapat dibaca dan dibuktikan secara hukum;
   b. Bukti Tidak Tertulis berupa saksi, Rekaman Suara (Audio), Rekaman Visual atau gambar (video); dan
   c. Bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. The Company guarantees the interests and provides legal assistance to the whistleblower before and after the completion of the case process related to the reported matter; and
7. The Company grants the right to the whistleblower to participate in the process of selecting and determining the form of interest protection and legal assistance as long as does not conflict with company regulations.

COMPLAINT HANDLING

1. A report can be followed up if the following criteria is fulfilled:
   a. Included in the criteria for the types of violations as have been determined;
   b. The report is an act of violation involving Pelindo People;
   c. The report has an impact on the performance and reputation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and
   d. The management of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will prioritize the follow-up to the report submitted by the Whistleblower that is stating his/her identity and equipped with 2 (two) supporting evidences.

2. The requirements for the report submitted should at least contain the following:
   a. Whistleblower Identity;
      The Whistleblower must state his/her identity so that the Whistleblower can get protection from the management of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and will facilitate the follow-up of the report if additional data is required. The whistleblower may not include an identity (anonymous) but for the purposes of report verification, the whistleblower's identity is required.
   b. The description of violation committed in the report shall at least contain:
      - Problem: The reported violation is a violation related to the activities of the company and or its subsidiaries;
      - Incident location; and
      - Incident time.
   c. Data of the reported and other parties involved and their units (if any);
   d. Supporting documents and/or other evidence; dan
   e. Complaints that will be further processed are incidents/events that occurred within the last 3 (three) years from the receipt date of the report by Pelindo Bersih Committee.

3. The evidence as referred to in point 3.b.4 includes, but is not limited to the following:
   a. Written evidence in the form of Documents, letters, receipts or billing notes that are written on paper or in the form of data or electronic letter that can be read and legally proven;
   b. Unwritten Evidence in the form of witnesses, Sound Recordings (Audio), Visual Recordings or pictures (video); and
   c. Other evidence in accordance with applicable regulations;

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah semua perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perusahaan, kode etik, melawan hukum dan segala perbuatan di luar ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian secara material maupun penurunan citra perusahaan.

Kategori pelanggaran meliputi:

Tindakan Curang (Tidak Adil)

Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok Insan Pelindo dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara–cara yang tidak benar dan melawan hukum.

Contoh dari tindakan curang :

1. Menyetujui pemberian order kepada *supplier* yang memiliki "hubungan istimewa";
2. Membayar atau tidak membayar vendor yang memiliki "hubungan istimewa", yang secara langsung-tidak langsung memberi keuntungan komersial atau bentuk manfaat kompetitif lainnya bagi pada vendor lain; dan
3. Merekrut staf yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, sementara ada kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.

Korupsi

Tindakan Insan Pelindo, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang orang yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, dengan menyalah gunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Contoh dari tindakan korupsi :

1. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
2. Menerima keuntungan (contohnya uang, hadiah, keramah-tamahan) yang bertentangan dengan tanggung jawab jabatan;
3. Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi perusahaan dan anak perusahaan untuk aktivitas di luar kedinasan; dan
4. Menerima keuntungan (dalam bentuk apapun) dari siapapun selain dari gaji dan tunjangan yang berhak mereka terima.

Pencurian

Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP Pasal 362).

Contoh dari tindakan pencurian:

1. Mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tersebut;
2. Menggunakan identitas diri orang lain untuk mendapatkan barang dan pelayanan;
3. Menjual benda-benda dan menyimpan hasil dari penjualan secara rahasia; dan

TYPES OF VIOLATIONS THAT CAN BE REPORTED

Violations that can be reported are all acts that deviate or conflict with company regulations, code of conduct, against the law and all actions outside the provisions that can result in material losses or a decrease in the company's image.

The categories of violation are

Fraudulent Action

It is an act committed by individual/a group of Pelindo People for personal benefit or others by using false identity or false dignity by trickery or lies or moving others to benefit him or her in prohibited and unlawful ways.

Example of fraudulent action:

1. Approve an order to supplier with special relationship.
2. Paying or not paying vendors who have a "special relationship", which directly or indirectly provides a commercial advantage or other form of competitive advantage to other vendors; and
3. Recruit staff that has a "special relationship" with them while there are candidates with better qualifications.

Corruption

It is an act of Pelindo People that improperly and illegally enriches or enriches those who have a "special relationship", by abusing positions and powers.

Example of corruption act:

1. Abusing power for personal or group interests
2. Receiving benefits (eg money, gifts, hospitality) contrary to the responsibilities of his/her position;
3. Using budgets, assets, services and information of the company and subsidiaries for activities outside the service; and
4. Receive benefits (in any form) from anyone other than salary and benefits that they are entitled to receive.

Theft

It is the activity/action to take goods, wholly or partly belongs to another person, with the intent to possess unlawfully (KUHP Article 362).

Example of theft:

1. Taking the property of other person without the owner's consent;
2. Using the identity of others to get goods and services
3. Selling goods and keeping the proceeds from the sale in secret; and

4. Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/ barang/data/ dokumen milik perusahaan dan/atau nasabah di lingkungan kerja.

Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan Pelindo baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perusahaan dan Anak Perusahaan. Pelaku pelanggaran ini dapat diancam sanksi menurut ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

Contoh dari tindakan pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan:

1. Menjalankan tugas di luar prosedur dan instruksi yang telah ditetapkan;
2. Membocorkan informasi perusahaan, seperti: mengenai anggaran, penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak di luar kewenangannya;
3. Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/ atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan perusahaan dan/atau nasabah dan/ atau investor/calon investor;
4. Pemberian fasilitas kredit atau perpanjangan waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau vendor/*supplier* yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan Perusahaan dan Anak Perusahaan secara ekonomis; dan
5. Pelanggaran Norma & Etika (Kode Etik) dengan tindakan diantaranya Perbuatan asusila dilingkungan perseroan, pelecehan, penggunaan narkoba dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

Benturan Kepentingan

Sebuah situasi dan kondisi di mana Insan Pelindo atau Pemegang Saham karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas keputusan atas tugas yang diamanatkan kepadanya, sehingga kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Contoh dari tindakan Benturan Kepentingan :

1. Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari vendor atau *supplier*;
2. Menerima bantuan finansial atau non-finansial dari vendor atau *supplier*;
3. Di mana seseorang atau pasangannya melakukan tindakan yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kegiatan bisnis di perusahaan; dan

4. Abusing/taking without any reason in the form of money/ goods/data/documents owned by the Company in the workplace.

Violations of Company Policies and Regulations

Activities/actions carried out by Pelindo Pelindo, whether intentional or planned, are contrary to the internal policies and regulations of the Company and its Subsidiaries. Perpetrators of this violation can be threatened with sanctions according to applicable regulations, both internal and external.

Example of violation of company policies and policies:

1. Carry out the tasks other than the established procedures and instructions;
2. Leaking corporate information, such as: about the budget, supply from suppliers, business strategies and so on to unauthorized people.
3. Creating and/or using and/or providing and/or changing and/or copying and/or duplicating data and/or information that are not in accordance with the truth, detrimental to the company and/or customers and/or investors/potential investors;
4. Provision of credit facilities and extension of obligation payments to customers or vendors/suppliers indicated to violate the provisions and potentially harm the Company and Subsidiaries in an economic manner; and
5. Violation of Code of Ethics with actions including immoral acts within the company, harassment, drug use and involvement in prohibited community activities.

Conflict of Interest

A situation in which Pelindo People or the Shareholder due to the position in the Company has the authority that is potentially misused either intentionally or unintentionally for his or her personal interest, resulting in a conflict between personal interests and/or groups and/or families with the economic interests of the Company.

Such condition can affect the quality of decision on the tasks assigned, so that the performance of the decision results can be detrimental to the Company and its Subsidiaries.

Example of Conflict of Interest:

1. Receive prizes in the form of money or entertainment from vendors or suppliers;
2. Receive financial or non-financial assistance from vendors or suppliers;
3. A person or his/her spouse performs actions that have conflict of interests with business activities in the company; and

4. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, di mana Insan Pelindo tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.

4. Decide the appointment of a certain party as a provider of goods/services, in which Pelindo people have an economic interest in the appointed party.

Penyuapan/Gratifikasi

Suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar menerima sesuatu atau janji, sedangkan dia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya dia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pasal 128 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Untuk informasi lebih lanjut terkait Penyuapan/Gratifikasi terdapat di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Contoh dari tindakan penyuapan/gratifikasi :

1. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis perusahaan; dan
2. Menerima keuntungan-keuntungan dalam bentuk apapun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis perusahaan yang akan diambil.

Bribery/Gratification

A deliberate and conscious act of accepting something or a promise, while he or she knows or can reasonably expect that the giving of something or a promise is meant for he or she to do something or to do anything in his or her duties, which is contrary to his or her authority or obligation in the public interest (Article 3 of Law No. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery).

In a broad sense, giving includes the provision of money, goods, rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities. (Article 128 of Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. For further information regarding Bribery/Gratification, please refer to the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Gratification Control Guidelines.

Example of bribery/gratification:

1. Receive direct or indirect benefits from any parties related to a business transaction of his or her company; and
2. Receive benefits in any form that affect the assessment or business decisions to be taken.

Penipuan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 378).

Contoh dari tindakan Penipuan :

1. Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;
2. Dengan sengaja memberikan produk yang dalam kondisi rusak yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk finansial; dan
3. Bekerja sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau Perusahaan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

Embezzlement

An activity that deliberately and consciously violate the law to own a thing that wholly or partially belong to another person, who is currently in his or her power not out of a crime.

Example of Embezzlement:

1. A ruse used by a party to cause the other party to sign the contract, even though without this ruse the other party would not have signed the contract concerned;
2. Deliberately providing products that are in a damaged condition resulting in financial losses; and
3. Working alone or in collaboration with other parties to deceive superiors or the Company by using fake signatures or fake invoices.

Pemerasan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 368).

Fraud

An activity that is intentionally and consciously intended to benefit themselves or others unlawfully, using false identity or false dignity, with tricks, or lies, moving others to surrender something to them, or to give debt or write off accounts receivable (KUHP Article 368).

Contoh dari tindakan Pemerasan :

1. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;
2. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon *supplier* sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan; dan
3. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada pelanggan sebagai pengganti untuk sebuah pelayanan istimewa/khusus.

Example of Fraud:

1. Performing illegal levies in any form in carrying out their duties for the interests of personal/group/other party;
2. Requesting a sum of money or a gift from potential supplier as a substitute for a job; and
3. Requesting a certain amount of money or a gift from a customer in exchange for a special service.

Penggelapan

Tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. (KUHP Pasal 372).

Extortion

An act/activity that is intentionally and consciously intendend against the law to possess goods that are wholly or partly owned by another person, which is currently under their control, not because of a crime. (KUHP Article 372).

Contoh dari tindakan Penggelapan:

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik perusahaan, yang dalam kekuasaannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya; dan
2. Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Example of Extortion:

1. Deliberately and unlawfully owns an object which is wholly or partly owned by the company, which is under his/her control either because of his/her position or not because of his/her position; and
2. Performing dishonest actions by hiding company goods/assets without the company's knowledge with the aim of possessing, controlling, or using them for other purposes.

PENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama pihak ketiga selaku mitra dalam penerapan sistem WBS telah menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eksternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim Pelindo Bersih sebagai *counterpart* yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang beranggotakan:

WHISTLEBLOWING MANAGEMENT

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) together with a third party as partner in implementing the WBS system have received and monitored complaints, both internally and externally, and made monthly reports to Pelindo Bersih Team as counterpart as regulated in the Board of Directors Decree No. SK.01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 dated December 31, 2021 regarding the Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in the Implementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Whistleblowing System, which consists of:

No.	Unit Kerja Work Unit	Jabatan dalam TIm Position in the Team
1.	*Group Head* Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretary	Ketua (Merangkap Anggota) Chairman (Concurrently Member)
2.	*Group Head* Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit Unit	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairman (Concurrently Member)
3.	Departemen *Head* Hubungan Lembaga, Tala Kelola dan Investor Department Head of Institutional Relations, Governance and Investors	Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (Concurrently Member)
4.	*Group Head* Hukum Group Head of Legal	Anggota Member
5.	*Group Head* Manajemen Risiko Group Head of Risk Management	Anggota Member
6.	*Group Head* Layanan SDM Group Head of HC Service	Anggota Member
7.	*Group Head* Pelayanan Terminal Group Head of Terminal Services	Anggota Member

SOSIALISASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Sebanyak 240 pegawai yang terdiri dari *Departemen Head* Layanan SDM dan Umum, *Departemen Head* Hukum dan Humas, *Departemen Head* Operasi, *Departemen Head* Komersial di Regional 1,2,3 dan 4 serta SVP Sekretariat Perusahaan pada *Subholding* ikut dalam sosialisasi pelabuhan bersih (gratifikasi dan WBS) via *zoom* yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021; dan
2. Sebanyak 120 pegawai yang bertanggung jawab (PIC) terkait WBS di wilayah regional 1,2,3 dan 4 ikut dalam sosialisasi penguatan alur koordinasi terkait WBS via *zoom* dengan melibatkan PIC terkait WBS pada tanggal 8 Desember 2021.

JUMLAH PENGADUAN DAN PROSES PENGADUAN

Periode Oktober-Desember 2021 atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero):

1. Terdapat laporan yang masuk melalui saluran WBS yang terdiri dari 47 laporan *out of scope* dan 1 (satu) laporan terkait kategori jenis pelanggaran WBS; dan
2. 1 (satu) laporan terkait kategori jenis pelanggaran WBS telah ditindaklanjuti dengan pencapaian 100% dan pada laporan yang termasuk dalam kategori *out of scope* telah disarankan oleh pengelola WBS Independen untuk melakukan pelaporan kepada saluran *customer service* Pelindo.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2021

Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku diperusahaan dan/atau perundang-undangan. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipliner masing-masing wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Direksi Terkait Indisipliner.

Berdasarkan 1 (satu) laporan yang masuk telah ditindaklanjuti dan tidak terbukti bersalah sehingga tidak terdapat pemberian sanksi.

PROGRAM ANTI KORUPSI

Program Anti Korupsi Perseroan diatur dalam kode etik, pedoman *Whistleblowing System* serta pedoman gratifikasi Perseroan. Pelindo berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan (*Fraud*). Komitmen Perseroan diperkuat dengan dibentuknya sistem *Whistleblowing System* yaitu sistem yang disediakan oleh Pelindo bagi seluruh *stakeholders.*

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk korupsi dan suap. Korupsi (*Corruption*), merupakan tindakan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan lain yang merugikan atau perekonomian Negara. Penyuapan dapat diartikan sebagai pemberian atau penerimaan segala bentuk penawaran, komitmen, uang, hadiah, hiburan, atau barang berharga yang

WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION

1. A total of 240 employees consisting of Departemen Head Human Capital and General Affairs, Departemen Head Legal and Public Relations, Departemen Head Operations, Departemen Head Commercial in Regions 1,2,3 and 4 as well as SVP Corporate Secretary in Subholdings participated in the socialization of clean ports (gratification and WBS), which was held via zoom on November 25, 2021; and
2. A total of 120 employees who are in charge (PIC) of WBS in regional areas 1,2,3 and 4 participated in the socialization of strengthening the WBS coordination flow via zoom by involving WBS PIC on December 8, 2021.

NUMBER OF COMPLAINTS AND COMPLAINTS HANDLING

For the period of October – December 2021, on behalf of PT Pelabuhan Indonesia (Persero):

1. There were incoming reports through the WBS channel, which consist of 47 out of scope reports and 1 (one) report related to WBS violations; and
2. 1 (one) report related to WBS violations has been followed up with 100% achievement and the reports included in the out of scope category have been suggested by the Independent WBS manager to be reported to Pelindo customer service channel.

SANCTIONS/FOLLOW-UP ON COMPLAINTS IN 2021

The reported party who is found guilty may be sentenced in accordance with the regulations in force in the company and/or the legislation. Sentencing can be carried out by the Indiscipline Team of each work area in accordance with the Regulations of Director Related to Indiscipline.

The 1 (one) incoming report has been followed up and not proven guilty, hence no sanction was imposed.

ANTI-CORRUPTION PROGRAM

The Company's Anti-Corruption Program is regulated in the code of conduct, Whistleblowing System guidelines and the Company's gratification guidelines. Pelindo is committed to creating clean business practices and avoiding all forms of fraud. The Company's commitment is strengthened by the establishment of Whistleblowing System, which is a system provided by Pelindo for all stakeholders.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) firmly condemns and prohibits all forms of corruption and bribery. Corruption is an act that violates the law, enriches oneself, other people or other entities that are detrimental to the country's economy. Bribery can be defined as the giving or receiving of any form of offer, commitment, money, gift, entertainment, or valuables that is not in accordance with ethics, given or received with the aim of

tidak sesuai dengan etika, yang diberikan atau diterima dengan tujuan favoritisme, mempengaruhi, mengubah keputusan, melanggar perjanjian kerja, memberikan keuntungan yang tidak pantas dan tidak sesuai etika ketika Insan Pelindo berada dalam kapasitas pekerjaan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengharapkan semua Insan Pelindo untuk:

1. Tidak memberi atau menerima semua hal yang telah disebutkan di atas dari pihak eksternal seperti pelanggan, pesaing dan vendor; dan
2. Apabila terdapat pihak eksternal yang memberikan penawaran atau mencoba untuk melakukan hal serupa, Insan Pelindo perlu melaporkannya kepada atasan untuk menentukan tindakan yang pantas dilakukan dan/atau Tim UPG.

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI

1. Telah dilakukan penyampaian surat edaran kepada Regional, *Subholding* dan *Other Business* Portofolio tentang larangan permintaan, pengiriman dan penerimaan suap serta gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No SK. 01.01/25/10/2/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 25 Oktober 2021;
2. Telah dilakukan penyampaian Surat Penandatanganan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No SK.01.01/29/11/2/HLTI/WDUT/PLND-21 tanggal 29 November 2021;
3. Telah dilakukan penyampaian surat terkait tindak lanjut pelaksanaan penerapan *single* WBS untuk Pelindo Group di mana di dalam nya juga terdapat perintah untuk melakukan publikasi terkait larangan pungli, praktik suap seta gratifikasi No SK.01.01/21/12/1/HLTI/WDUT/PLND-21 tanggal 21 Desember 2021;
4. Penandatanganan kembali seluruh Insan Pelindo II dan Pelindo (Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pegawai, eksternal) terkait penguatan komitmen Insan Pelindo dalam pencegahan praktik penerimaan dan pemberian suap, praktik KKN;
5. Telah dilakukan penyampaian surat kepada Regional, *Subholding* dan *Other Business* Portofolio terkait Larangan pungutan liar, pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi pada perayaan hari natal dan tahun baru No SK.01.01/21/12/2/HLTI/WDUT tanggal 21 Desember 2021;
6. Telah dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas Insan Maritim di Pelabuhan Indonesia yang melibatkan operator pelabuhan, instansi disekitar pelabuhan, asosiasi, pengguna jasa dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021.
7. Telah dibentuk Komite Pelindo Bersih berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK. 01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan

favoritism, influencing, changing decisions, violating employment agreements, providing inappropriate benefits, and unethical with due regard to the work capacity of Pelindo People.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) expects all Pelindo People to:

1. Not giving or receiving all of the things mentioned above from external parties such as customers, competitors and vendors; and
2. If an external party makes an offer or tries to do something similar, Pelindo People need to report to their superiors to determine the appropriate action to take and/or the GCU Team.

PROGRAMS AND PROCEDURES UNDERTAKEN TO OVERCOME CORRUPTION PRACTICES

1. Circular letter has been submitted to Regional, Subholdingand Other Business Portfolios regarding the prohibition of requesting, sending and receiving bribes and gratification within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No SK. 01.01/25/10/2/HLTI/UTMA/PLND-21 dated October 25, 2021;
2. The signing of Letter of Integrity Pact and Compliance with the 2021 Code of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK.01.01/29/11/2/HLTI/WDUT/PLND-21 dated November 29, 2021;
3. A letter has been submitted regarding the follow-up to the implementation of single WBS for Pelindo Group, in which there is also an order to publish the prohibition of extortion, bribery and gratification practices No. SK.01.01/21/12/1/HLTI/WDUT/PLND-21 dated December 21, 2021;
4. Re-signing of the entire Pelindo II and Pelindo People (Directors, Board of Commissioners, and all employees, external) related to the strengthening of Pelindo People's commitment in preventing the accepting and giving bribes as well as corruption, collusion, and nepotism practices;
5. A letter has been submitted to Regional, Subholding and Other Business Portfolios related to the prohibition of illegal collection, giving and receiving of bribes and gratification at Christmas and New Year celebrations No. SK.01.01/21/12/2/HLTI/WDUT dated December 21, 2021;
6. The signing of Maritime Personnel Integrity Pact at the Port of Indonesia involving port operators, agencies around the port, associations, service users, which was held on 28 December 2021.
7. Pelindo Bersih Committee has been established based on the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK. 01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 dated December 31, 2021 concerning Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in the Implementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System; and

8. Telah dibentuk Tim UPG berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP 20.01/13/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 13 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Pelaksanaan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

8. GCU Team has been formed based on the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP 20.01/13/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 dated December 13, 2021 regarding the Formation of Gratification Control Unit (GCU) Team on the Gratification Prevention and Handling System within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan IPC memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan IPC untuk tidak terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap.

Pengertian Gratifikasi menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 pasal 12B adalah Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan IPC yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

GRATIFICATION POLICY

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) realizes that in establishing a working relationship with third parties, the practice of gratification is often involved, hence a guideline is needed to control this practice. This aims for all Pelindo Personnel to have the same understanding about the treatment of gratification and assist Pelindo Personnel not to be entangled in gratification practices which is included the crime of bribery.

The definition of gratification according to Law No. 20 of 2001 article 12B is a gift in a broad sense, which includes the giving and/or receipt of gifts/souvenirs and entertainment, both received domestically and abroad and carried out using electronic devices or without electronic devices, given or received by Pelindo Personnel that occur due to their position/authority in the Company, which may cause a conflict of interest and/or affect their independence at work as well as contrary to their obligations or duties.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam kondisi tertentu, saat Insan Pelindo tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dengan pemberian tersebut di luar ketentuan atau pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada/melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Pelindo, maka yang bersangkutan wajib melaporkan baik secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai mekanisme yang telah diatur.

GRATIFICATION CONTROL MANAGEMENT

Under certain conditions, when Pelindo people cannot avoid receiving a gift from a Third Party, provided that the gift is other than the provisions or the gift is already in a place that is entrusted to/through another person without the knowledge of Pelindo people, then the person concerned must report it either directly to KPK or through Gratification Control Unit (GCU) according to the regulated mechanism.

PENGELOLA PELAPORAN GRATIFIKASI

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP 20.01/1/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada pelaksanaan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berfungsi sebagai pengendali gratifikasi di lingkungan Pelindo. UPG bersifat *ad-hock*, dan terdiri dari:

GRATIFICATION REPORTING MANAGEMENT

Gratification Control Unit (GCU) is a unit established based on the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP 20.01/1/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 dated December 31, 2021 regarding the Formation of Gratification Control Unit (GCU) Team for the implementation of Gratification Prevention and Handling System within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which function as a controller of gratification within Pelindo environment. The GCU is ad-hock, and consists of:

NO	JABATAN DALAM TIM POSITION IN THE TEAM	JABATAN POSITION
1.	Ketua Chairman	*Group Head* Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretary
2.	Wakil Ketua Vice Chairman	*Group Head* Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit Unit
3.	Sekretaris Secretary	Departemen *Head* Hubungan Lembaga, Tata Kelola dan Investor Department Head of Institutional Relations, Governance and Investors
4.	Anggota Member	*Group Head* Hukum Group Head of Legal

NO	JABATAN DALAM TIM POSITION IN THE TEAM	JABATAN POSITION
5.	Anggota Member	*Group Head* Layanan SDM Group Head of HR Service
6.	Penanggung Jawab UPG-Regional GCU Person in Charge - Regional	Regional *Head* 1, 2, 3 , 4 Regional Head 1, 2, 3 , 4
7	Anggota UPG-Regional GCU Member - Regional	*Division Head* Pelayanan SDM dan Umum Regional 1,2, 3, 4 Division Head of Regional HC and General Affairs 1,2, 3, 4
8.	Penanggung Jawab UPG-Cabang GCU Person in Charge - Branch	*General Manager* General Manager
9.	Anggota UPG-Cabang GCU Member - Branch	Unit Pengelola Layanan SDM dan Umum HC and General Affairs Management Unit

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi

1. Tim UPG Kantor Pusat:

a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
c. Me*review* dan memperbaharui kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
d. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
e. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK;
f. Menindaklanjuti hasil rekomendasi KPK atas penetapan status barang gratifikasi;
g. Berkoordinasi dengan tim KPK terkait dengan pelaksanaan gratifikasi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan
h. Berkoordinasi dengan Tim UPG Regional, Cabang, *Holding*, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dan *Other Business Portfolio* terkait Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

2. Tim UPG Regional:

a. Para *Regional Head* menjadi penanggung jawab di wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan *Group Head* Sekretariat Perusahaan dalam hal pengelolaan gratifikasi di wilayah regional masing-masing;
b. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkoordinasi dengan Tim UPG Kantor Pusat;
c. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Tim UPG Kantor Pusat; dan
d. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK dan melaporkannya ke Tim UPG Kantor Pusat.

3. Tim UPG Cabang:

a. Para *General Manager* cabang menjadi penanggung jawab di wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan *Regional Head* dan Kantor Pusat dalam hal pengelolaan gratifikasi di wilayah regional masing-masing;

Gratification Control Unit Duties and Responsibilities

1. Head Office GCU Team:

a. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
b. Coordinate with units or sections related to the implementation and effectiveness of gratification control;
c. Reviewing and updating management policies, establishing an anti-gratification environment and preventing corruption within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
d. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Corruption Eradication Commission;
e. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by KPK;
f. Following up on the results of KPK's recommendation on the determination of the status of goods of gratification;
g. Coordinate with KPK team related to the implementation of gratification in working environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and
h. Coordinate with the Regional GCU Team, Branches, Holding, Subsidiaries, Affiliated Companies and Other Business Portfolios related to Gratification Control in working environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

2. Regional GCU Team:

a. Regional Heads are responsible for their working areas and coordinate with the Group Head Corporate Secretary in terms of gratification management in their respective regional areas;
b. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in coordination with the Head Office GCU Team;
c. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Head Office GCU Team; and
d. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by the KPK and reporting it to the Head Office GCU Team.

3. Branch GCU Team:

a. Branch General Managers are responsible for their working areas and coordinate with Regional Heads and Head Office in terms of gratification management in their respective regional areas;

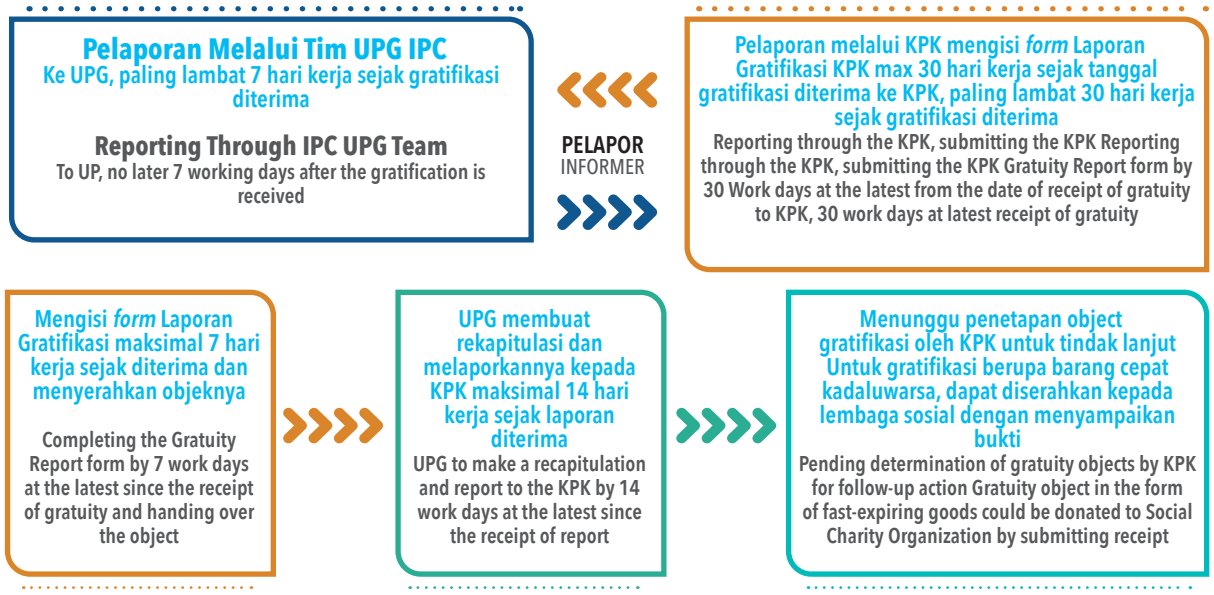
b. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkoordinasi dengan Tim UPG Regional;
c. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Tim UPG Kantor Pusat dan tembusan kepada *Regional Head*; dan
d. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK dan melaporkannya ke Tim UPG Kantor Pusat tembusan kepada *Regional Head*.

b. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in coordination with the Regional GCU Team;
c. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Head Office GCU Team and a copy to the Regional Head; and
d. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by KPK and reporting it to the Head Office GCU Team with a copy to the Regional Head.

Mekanisme Pelaporan

Reporting Mechanism

Mekanisme Pelaporan
Reporting Mechanism



Apabila terdapat Gratifikasi sebagaimana yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan Pelindo yang bersangkutan wajib melaporkan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Saluran Pelaporan Gratifikasi, jika Insan Pelindo menerima barang Gratifikasi :
   a. Pelaporan Melalui KPK
      Laporan Gratifikasi disampaikan secara *online* melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL). Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di https://gol.kpk.go.id/login; dan
   b. Pelaporan Melalui Tim UPG Perusahaan
      Jika Insan Pelindo menerima baik secara langsung maupun tidak langsung gratifikasi dapat mengisi *form* Laporan Gratifikasi UPG Perusahaan sebagaimana terlampir, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima dengan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima.

In the event of a gratification occurs, as stipulated by the Company, the relevant Pelindo People must report it in the following manner:

1. Gratification Reporting Channel, if Pelindo People receive Gratification goods:
   a. Reporting Through KPK
      The Gratification Report is submitted online through the Online Gratification (GOL) application. The Gratification Report will be processed by KPK within 30 (thirty) working days after the report is declared complete and received by KPK. For more complete information, see https://gol.kpk.go.id/login; and
   b. Reporting Through the Company's UPG Team
      If Pelindo People receive gratuities directly or indirectly, they can fill out the Company's UPG Gratification Report form as attached, no later than 7 (seven) working days from the receipt date of the Gratification by submitting the object of gratification received.

Tim UPG membuat rekapitulasi Laporan Gratifikasi serta melaporkannya kepada KPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh Tim UPG Perusahaan untuk selanjutnya mendapat penetapan status objek Gratifikasi oleh KPK;

Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kedaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Gratifikasi.

Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang seperti Cinderamata/Uang/Makanan yang tidak cepat kedaluwarsa, dan sebagainya menunggu penetapan objek Gratifikasi oleh KPK untuk tindak lanjut.

2. Saluran Pelaporan Gratifikasi, jika Insan Pelindo melihat adanya dugaan pelanggaran terkait Gratifikasi :
   Penyampaian laporan gratifikasi juga dapat dilakukan melalui saluran *Whistleblowing System* (Pelindo Bersih) bagi Insan Pelindo yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran gratifikasi, sebagaimana yang telah diatur pada Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Sebanyak 240 pegawai yang terdiri dari Departemen *Head* Layanan SDM dan Umum, Departemen *Head* Hukum dan Humas, Departemen *Head* Operasi, Departemen *Head* Komersial di Regional 1,2,3 dan 4 serta SVP Sekretariat Perusahaan pada *Subholding* ikut dalam sosialisasi pelabuhan bersih (gratifikasi dan WBS) via *zoom* yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2021

Selama tahun 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tidak terdapat laporan atas gratifikasi.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN

1. Sebanyak 240 pegawai yang terdiri dari Departemen *Head* Layanan SDM dan Umum, Departemen Head Hukum dan Humas, Departemen *Head* Operasi, Departemen *Head* Komersial di Regional 1,2,3 dan 4 serta SVP Sekretariat Perusahaan pada *Subholding* ikut dalam sosialisasi pelabuhan bersih (gratifikasi dan WBS) via *zoom* yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021; dan
2. Sebanyak 120 pegawai yang bertanggung jawab (PIC) terkait WBS di wilayah regional 1,2,3 dan 4 ikut dalam sosialisasi penguatan alur koordinasi terkait WBS via *zoom* dengan melibatkan PIC terkait WBS pada tanggal 8 Desember 2021.

The UPG Team makes a recapitulation of the Gratification Report and submit a report to KPK no later than 14 (fourteen) working days after the Gratification report is received by the Company's UPG Team for further approval of the status of Gratification object by KPK;

For Gratification which is an item that expires quickly (eg food and drink), can be submitted to Social Institutions by submitting proof of handover to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the receipt date of the Gratification.

For Gratification in the form of goods such as Souvenirs/Money/Food that does not expire quickly, and others, is waiting for the determination of the object of Gratification by KPK for follow-up.

2. Gratification Reporting Channel, if Pelindo Personel witnesses an alleged violation related to Gratification:
   Gratification report can also be submitted through the Whistleblowing System (Pelindo Bersih) channel for Pelindo People who are aware of any indications of gratification violation, as stipulated in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System Guidelines.

GRATIFICATION POLICY SOCIALIZATION

A total of 240 employees consisting of Department Head Human Capital and General Affairs, Department Head Legal and Public Relations, Department Head Operations, Department Head Commercial in Regions 1,2,3 and 4 as well as SVP Corporate Secretary in Subholdings participated in the socialization of clean ports (gratuities and WBS), which was held via zoom on November 25, 2021.

GRATIFICATION REPORT IN 2021

In 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) did not receive any gratification reports.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/SOCIALIZATION FOR EMPLOYEES

1. A total of 240 employees consisting of Department Head Human Capital and General Affairs, Department Head Legal and Public Relations, Department Head Operations, Department Head Commercial in Regions 1,2,3 and 4 as well as SVP Corporate Secretary27 in Subholdings participated in the socialization of clean ports (gratuities and WBS), which was held via zoom on November 25, 2021; and
2. A total of 120 employees as person in charge of WBS in regions 1,2,3 and 4 participated in the socialization on strengthening coordination flow related to WBS via zoom by involving PIC of WBS on December 8, 2021.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

STATE OFFICIAL WEALTH REPORT (LHKPN)

The Company has a policy regarding the management of State Official Wealth Report (LHKPN), which has been ratified based on the Board of Directors PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regulation No: HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 dated December 20, 2021 concerning Guidelines for Wealth Report of Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officers within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Adapun pengelola LHKPN yaitu: The management team of LHKPN are:
Penanggung jawab: *Group Head* Kesekretariatan Perusahaan Kantor Pusat Person in Charge: Corporate Secretary Group Head of Head Office.
Koordinator Bidang Kepegawaian: *Group Head* Layanan SDM Kantor Pusat. Personnel Coordinator: HC Services Group Head of Head Office.
Koordinator Bidang Pengawasan: *Group Head* Hukum Kantor Pusat. Supervision Coordinator: Legal Group Head of Head Office.

Jumlah wajib lapor di lingkungan Pelindo sebanyak 401 orang. Pada tahun 2021 wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 393 orang dan sebanyak 8 orang belum melaporkan.

Adapun uraian tugas Unit Pengelolaan LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Penanggung jawab memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan LHKPN;
2. Koordinator Bidang Kepegawaian
   a. Koordinator Bidang Kepegawaian memiliki tugs untuk melakukan pemutakhiran data pegawai, melakukan pendaftaran wajib lapor LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN serta mengelola dan mengkoordinir Administrator Unit di lingkungan Perusahaan;
   b. Dalam pelaksanaan tugasnya, Koordinator Bidang Kepegawaian dibantu oleh Administrator Unit sebagai berikut:
      - Kantor Pusat: *Department Head* Layanan dan Administrasi SDM;
      - Regional: *Department Head* Pelayanan Sumber Daya Manusia.
3. Koordinator Bidang Pengawasan
   a. Koordinator Bidang Pengawasan memiliki tugs pengawasan terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN;
   b. Untuk memudahkan monitoring penyampaian LHKPN, bukti pelaporan LHKPN kepada KPK disampaikan kepada Koordinator Bidang Pengawasan.

The number of mandatory report in Pelindo is 401 persons. In 2021, 393 persons whom are mandatory have reported LHKPN and 8 persons have not reported.

The job descriptions of LHKPN Management Unit are as follows:

1. Person in Charge
   The person in charge has the task of coordinating the implementation of duties, coaching and providing administrative support in the implementation of LHKPN management;
2. Personnel Coordinator
   a. The Personnel Coordinator has the task of updating employee data, carrying out registration of LHKPN mandatory report through e-LHKPN application and manage and coordinate the Administrator Unit within the Company;
   b. In carrying out his/her duties, the Personnel Coordinator is assisted by Unit Administrator as follows:
      - Head Office: Department Head of HC Services and Administration;
      - Regional: Department Head of Human Capital Services.
3. Supervision Coordinator
   a. The Supervision Coordinator has the task of supervising compliance of LHKPN mandatory report in fulfilling LHKPN obligations;
   b. To facilitate the monitoring of LHKPN submission, proof of LHKPN reporting to KPK is submitted to the Supervision Coordinator.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

GUIDELINES OF PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Aspects; Principles; Recommendations
A.	Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	Aspect 1: Relationship between Public Company and Shareholders in guaranteeing Shareholders' rights
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	Principle 1: Increase value of General Meetings of Shareholders (GMS) Implementation
A.1.1.	**Rekomendasi 1** Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. **Penjelasan** Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	**Recommendation 1** Public Company has implemented open and closed voting based-decision making mechanism and procedure that promote independency and interest of Shareholders. **Explanation** Any shares with right to vote that issued have one vote (one share one vote). Shareholders may use their voting rights at the time of decision making, especially if voting needs to be done. However, the decision making mechanism by voting either openly or closedly has not been regulated in details. Public Company is recommended to have a voting procedure in making its decisions as one of GMS' agenda. The voting procedure must maintain shareholders's independency. For example, voting is done openly by raising hands to choose the options offered by the GMS' chairman. Meanwhile, closed voting is done in a decision making process that need secrecy or as requested by shareholders. This procedure may use card or electronic voting.
A.1.2.	**Rekomendasi 2** Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. **Penjelasan** Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	**Recommendation 2** Every Board of Directors and Board of Commissioners Member of the Public Company attend the Annual GMS **Explanation** The presence of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is intended to ensure that each member is able to observe, explain and answer directly the problems or questions raised by shareholders regarding the GMS' agenda.
A.1.3.	**Rekomendasi 3** Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs *Web* Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. **Penjelasan** Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	**Recommendation 3** Summary of GMS Minutes shall be available at the Public Company Website minimum for 1 (one) year. **Explanation** Public Company must prepare summary of GMS minutes in Indonesian and other languages (minimum in English), and announced to the public in 2 (two) working days after the GMS was held, one of it is through the Company's Website. The availability of summary of GMS minutes at the Company's website provides an opportunity for the absent shareholders in GMS to obtain important easily and quickly. Therefore, the regulation concerning the minimum period of the availability of summary of GMS minutes on the Website is intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.

Comply or Explain

Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait tata cara prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka maupun tertutup disebabkan karena Perseroan bukan merupakan Perusahaan Terbuka.
The Company does not have a policy regarding the technical procedures for open or closed voting, since the Company is not a Public Company.

Comply

Setiap tahunan Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPS tahunan yang dipimpin oleh Pemegang Saham (kuasa Pemegang Saham) dari Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Ketidakhadiran Direksi dan Dewan Komisaris disertai dengan Surat Kuasa.
Every year, the entire Board of Directors and Board of Commissioners attend the annual GMS chaired by the Shareholders (Proxy of Shareholders) from the Government represented by the Ministry of SOEs. The absence of Board of Directors and the Board of Commissioners is accompanied by a Power of Attorney.

Comply

Perseroan bukan perusahaan terbuka sehingga tidak menerbitkan risalah RUPS pada *web* Perseroan.
The Company is not a public company, hence does not publish the minutes of GMS on the Company's website.

Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Aspects; Principles; Recommendations
A.2.	**Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.**	Principle 2: Improve quality of Communication between Public Company and Shareholders or Investors
A.2.1.	**Rekomendasi 4** Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. **Penjelasan** Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	**Recommendation 4** Public Company has a policy on communication with shareholders or investors. **Explanation** Any communication between the Company and shareholders or investors is intended for them to gain a clearer understanding of publicly available information, such as periodic reports, information disclosure, business or performance conditions and prospects, and Corporate Governance implementation. In addition, shareholders or investors may also submit feedback and opinions to the Company's management The Company's commitment in conducting communication with shareholders or investors is demonstrated by the communication policy. Such policy may includes strategies, programs, and communication timelines, as well as guidance that support shareholders or investors to participate in such communications.
A.2.2.	**Rekomendasi 5** Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. **Penjelasan** Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	**Recommendation 5** Public Company shall disclose communication policy of Public Company with Shareholders or investors at the website. **Explanation** The Company's commitment on transparency in providing equity to all shareholders or investors is shown in the communication policy disclosure. Such disclosure also aims to increase shareholders or investors' participation and role in the Company's communication program implementation
B.	**Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**	Aspect 2: Board of Commissioners' Function and Role
B.1.	**Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.**	Principle 3: Strengthening Board of Commissioners membership and composition
B.1.1.	**Rekomendasi 6** Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. **Penjelasan** Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	**Recommendation 6** Determination of the number of Board of Commissioners member takes into account the condition of Public Company. **Explanation** The number of Board of Commissioners members may affect their effectiveness in work. The number of members determination shall refer to the applicable laws, that at least 2 (two) persons according to OJK regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the Company's conditions which include, among other things, the characteristics, capacities and sizes, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among the Company. However, too many members of Board of Commissioners is potentially disrupt the effectiveness of Board of Commissioners' functions implementation.
B.1.2.	**Rekomendasi 7** Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. **Penjelasan** Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	**Recommendation 7** Determination of the composition of Board of Commissioners members concerns diversity of required skill, knowledge and experience. **Explanation** Board of Commissioners composition is a characteristics combination both in terms of Board of Commissioners as a body and Board of Commissioners members as an individual, in accordance with the Company's needs. Such characteristics may be reflected in the determination of skills, knowledge and experience required for supervisory and advisory tasks implementation by Board of Commissioners of the Company. Composition that has taken into account the needs of the Company is a positive thing, especially regarding decision-making in supervisory function implementation that consider various broader aspects.

Comply or Explain

Perusahaan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Setiap tahunnya perusahan rutin melakukan pertemuan dengan Pemegang Saham, Investor dan *Stakeholders* lainnya untuk menyampaikan informasi dan aktivitas perusahaan terkini termasuk isu-isu yang berkembang.
The Company has a communication policy with shareholders or investors. Every year, the Company regularly holds meetings with Shareholders, Investors and other Stakeholders to convey latest information and activities of the Company, including developing issues.

Comply

Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Perseroan mempublikasikan laporan tahunan, laporan keuangan, dan informasi terkait lainnya di dalam situs *Web* secara berkala. Bagi *stakeholders* yang menginginkan informasi selain yang terdapat di *website* Perseroan bisa melalui *website* PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang saat ini masih dalam pengembangan.
In the context of public information disclosure, the Company publishes annual reports, financial reports, and other related information on its website regularly. For stakeholders who want information other than those contained on the Company's website, they can go through the PPID (Information and Documentation Management Officer) website which is currently still under development.

Comply

Per 31 Desember 2021, anggota Dewan Komisaris Independen berjumlah 3 (tiga) orang atau 42,85 persen dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu minimal 20 persen dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan.
As of December 31, 2021, there are 3 (three) Independent Commissioners or 42.85 percent of the total 7 (seven) members of Board of Commissioners, so that they have met the required criteria, namely at least 20 percent of the total members of the Company's Board of Commissioners

Comply

Komposisi Dewan Komisaris perusahaan termasuk beragam dengan tingkat pengalaman dan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
The composition of the company's Board of Commissioners includes various levels of experience and competencies according to the duties and functions required by the Company in carrying out its supervisory function.

Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Aspects; Principles; Recommendations
B.2.	**Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**	**Principle 4: Improve the quality of Board of Commissioners duty and responsibility implementation.**
B.2.1.	**Rekomendasi 8** Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. **Penjelasan** Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	**Recommendation 8** Board of Commissioners has self-asessment policy to evaluate its performance. **Explanation** Board of Commissioners' self assessment policy is a guideline used as a form of accountability for Board of Commissioners' performance in a collegial manner. The Self Assessment is undertaken by each member to assess Board of Commissioners' performance in a collegial manner, rather than assessing the individual performance of each member. By doing self assessment, each member of Board of Commissioners is expected to contribute in continuous performance improvement. This policy contains assessment activities undertaken, purposes and objectives, periodic execution time, and assessment indicators or criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Company, where such function is required in OJK Regulation on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
B.2.2.	**Rekomendasi 9** Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. **Penjelasan** Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	**Recommendation 9** Self Assessment policy to evaluate Board of Commissioners' performance shall be disclosed in the Annual Report of Public Company. **Explanation** The disclosure on policy of Board of Commissioners' performance Self Assessment is conducted not only to fulfill the transparency aspect as part of performance accountability, but also to give confidence to shareholders or investors upon the efforts to improve Board of Commissioners' performance. This disclosure enables shareholders or investors to acknowledge the check and balance mechanism on Board of Commissioners' performance.
B.2.3.	**Rekomendasi 10** Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. **Penjelasan** Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	**Recommendation 10** Board of Commissioners has policy on resignation of Board of Commissioners members if involved in financial crime. **Explanation** The resignation policy of Board of Commissioners members that involved in financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Company, so that the Company's integrity will be maintained. This policy is required to expedite the legal process and to ensure that the legal process does not interfere business activities. In addition, from morality side, this policy builds an ethical culture within the Company's environment. This policy may be covered in the Board Manual or Code of Conduct that are applicable to Board of Commissioners. Furthermore, what is meant by involved in financial crime is the convicted status of Board of Commissioners' member from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and fraud in the financial service activities and Money Laundering Crime Act as referred to Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.

Comply or Explain

Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan *Board Manual*.

Dewan Komisaris juga memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) secara kolegial maupun secara individu yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, sebagai sasaran kerja dari Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners performance appraisal has been regulated in the Code of Corporate Governance and the Board Manual.

The Board of Commissioners also has collegial and individual Key Performance Indicators (KPI) that have been approved by the Shareholders, as the work targets of Board of Commissioners.

Comply

Setiap tahunnya Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan di publikasikan melalui *website*. perusahaan.

Di dalam Laporan tahunan juga disajikan tugas dan kegiatan Dewan Komisaris dalam satu tahun terakhir termasuk memberikan penilaian atas kinerja Direksi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.

Every year, the Company publishes an Annual Report which is submitted to the Shareholders and published through the company's website.

The annual report also presents the duties and activities of Board of Commissioners in the previous year, including assessing the Board of Directors performance and the role of Board of Commissioners in supervising.

Comply

Perusahan memiliki Board Manual sebagai dasar tata kelola antar organ perusahaan yang mengatur tentang kebijakan pengunduran diri serta termasuk mengatur Etika jabatan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Selain itu Dewan Komisaris juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.

The Company has a Board Manual as the basis for governance between corporate organs, which regulates the resignation policy as well as regulates job ethics and other matters prohibited from being done by the Board of Commissioners.

In addition, the Board of Commissioners also signed an Integrity Pact as a commitment to upholding job ethics in accordance with corporate values.

Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Aspects; Principles; Recommendations
B.2.4.	**Rekomendasi 11** Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. **Penjelasan** Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	**Recommendation 11** Board of Commissioners or Committee who is in charge in Nomination and Remuneration function formulates succession policy in Board of Directors members nomination process. **Explanation** Based on Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the nomination committee has duty to formulate policies and criteria required in Board of Directors' candidates nomination process. One of the policies is the succession policy of Board of Directors members. The succession policy aims to maintain the leadership regeneration process in the Company in order to maintain the Company's business sustainability and long-term goals.
C.	Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi	Aspect 3: Board of Directors' Role and Function
C.1.	Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	Principle 5: Strengthening Board of Directors membership and composition
C.1.1.	**Rekomendasi 12** Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. **Penjelasan** Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	**Recommendation 12** Determination of the number of Board of Directors members takes into account the condition of the Public Company and effectiveness in the decision making process. **Explanation** As corporate body in charge of managing the Company, the determination of the number of Board of Directors greatly affects the Company's performance. Thus, the number of Board of Directors' members determination shall be conducted through careful consideration and shall refer to the prevailing laws and regulations, which in accordance with OJK Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies that shall comprises of at least 2 (two) persons. In addition, in determining the number of Board of Directors shall be based on the need to achieve the Company's goals and objectives and adjusted to the Company's conditions, including characteristics, capacity and size, and how effective Board of Directors in decision making.
C.1.2.	**Rekomendasi 13** Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. **Penjelasan** Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	**Recommendation 13** Determination of Board of Directors members composition takes into account the diversity of required skill, knowledge and experience. **Explanation** As with Board of Commissioners, the diversity of Board of Directors' members composition is the desirable characteristics of Board of Directors as an organization and Board of Directors members as an invidual, in accordance to the Company's needs. The combination is determined by taking into account the appropriate skills, knowledge and experiences on Board of Directors' division and functions in achieving the Company's objectives. Therefore, the characteristics consideration will have an impact in the accuracy of nomination process and individual appointment of Board of Directors's members in a collegial manner.

Comply or Explain

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas melakukan proses nominasi untuk suksesi kepemimpinan perusahaan termasuk Direksi.
The Board of Commissioners has formed a Nomination and Remuneration Committee, which is in charge of carrying out the nomination process for the succession of company leadership including the Board of Directors.

Comply

Saat ini jumlah Direksi sebanyak 7 orang yang salah satunya berperan sebagai Direktur Utama.

Pembagian tugas Direksi terdiri atas 7 Direktorat yang saling terkait dan sesuai dengan kebutuhan perusahan ke depan.

Setiap Direktorat membawahi Divisi-Divisi yang telah disesuaikan dan dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing Direktorat, sehingga setiap Divisi memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi untuk pencapaian tujuan perusahaan.

Saat ini perusahaan memiliki 23 Divisi yang dipimpin oleh *Group Head* dan dibantu oleh *Departement Head*.

Currently, there are 7 members of Board of Directors, one of whom acts as the President Director.

The division of duties of Board of Directors consists of 7 Directorates, which are interrelated and in accordance with the needs of the company going forward.

Each Directorate oversees Divisions that have been adjusted and grouped based on the duties and functions of each Directorate, so that each Division has tasks and functions that complement each other to achieve company goals.

Currently, the Company has 23 Divisions led by Group Head and assisted by Department Head.

Comply

Perusahaan saat ini memiliki komposisi anggota Direksi yang beragam namun sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang mumpuni.
The Company currently has a diverse composition of members of Board of Directors in accordance with their duties and functions and based on experience and qualified competencies.

Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Aspects; Principles; Recommendations
C.1.3.	**Rekomendasi 14** Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	**Recommendation 14** Board of Directors member who supervises Accounting or Finance has expertise and/or knowledge in Accounting.
	Penjelasan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.	**Explanation** The Financial Statements is the management accountability report on managing the resources owned by the Public Company, which must be prepared and presented in accordance with the generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia as well as related OJK regulations, including regulation on the Capital Market sector regarding the presentation and disclosure of Public Company's Financial Statements. Under the Capital Market sector laws and regulations that governing Board of Directors' responsibilities on the Financial Statements, Board of Directors is jointly and severally liable for the Financial Statements, signed by the President Director and Director that is in charge of accounting or finance.
	Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	Thus, the disclosure and compilation of financial information presented in the financial statements will largely depend on the expertise, and/or knowledge of Board of Directors, especially members of Board of Directors in charge of accounting or finance. The expertise and/or knowledge qualification in the accounting field at least give Board of Directors members confidence in the preparation of Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied upon by the stakeholders as the basis for economic decision making. Such expertise and/or knowledge may be evidenced by educational background, training certification and/or related work experience.
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Principle 6: Improve the quality of Board of Directors duty and responsibility implementation.
C.2.1.	**Rekomendasi 15** Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	**Recommendation 15** Board of Directors has self assessment policy to evaluate Board of Directors' performance.
	Penjelasan Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.	**Explanation** As with Board of Commissioners, Board of Directors' self assessment policy is a guideline used as a performance accountability for Board of Directors in a collegial manner. The Self Assessment is conducted by each member of Board of Directors to assess Board of Directors' performance in a collegial manner rather than assessing the individual performance of each member of Board of Directors. With the existence of Self Assessment is expected that each member of Board of Directors can contribute to improve Board of Directors' performance on an ongoing basis.
	Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	The policy contains assessment activities undertaken, purposes and objectives, periodic execution time, and assessment indicators and criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Company, where such function is required in Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
C.2.2.	**Rekomendasi 16** Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	**Recommendation 16** Self-assessment policy to evaluate Board of Director's performance shall be disclosed in the Annual Report of Public Company.
	Penjelasan Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.	**Explanation** The disclosure of Self Assessment policy on Board of Directors' performance is conducted not only to fulfill the transparency aspect as a performance accountability, but also to provide important information regarding improvement efforts in the management of the Public Company. Such information is very useful to provide confidence to shareholders or investors that there is certainty of corporate management to be continuously carried out in a better direction. With the disclosure, shareholders or investors acknowledge the check and balance mechanism on Board of Directors' performance

Comply or Explain

Direksi bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan dan setiap tutup tahun dilakukan audit kewajaran atas penyajian laporan keuangan oleh Auditor eksternal.

Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan melakukan fungsi pengendalian disetiap proses transaksi keuangan sampai transaksi tersebut dibukukan dalam pencatatan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan Keuangan yang senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan PSAK terkini.

Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Director in charge for the presentation of financial statements and at the end of each year an audit is carried out on the fairness of financial statements presentation by external auditor.
Director in charge of accounting and finance carries out the control function in every process of financial transactions until the transactions are recorded in financial records in accordance with Accounting and Financial Policies which are constantly evaluated and adjusted to the latest PSAK provisions.
Director in charge of accounting and finance has sufficient qualifications and competencies as well as experience in carrying out his/her duties.

Comply

Setiap triwulan Direksi menerbitkan laporan kinerja perusahaan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Kebijakan penilaian kinerja Direksi sesuai dengan Pedoman tata kelola perusahaan dan *Board Manual.*

Pelaporan atas Kinerja Direksi sesuai dengan *Key Performace Indicator* (KPI) yang telah disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Penilaian Direksi dilakukan secara Kolegial dan Individual.

Every quarter, the Board of Directors publishes a company performance report and is reported to the Board of Commissioners and Shareholders.
The Board of Directors' performance appraisal policy is in accordance with the Code of Corporate Governance and the Board Manual.
The Board of Directors performance report is in accordance with the Key Performance Indicators (KPI) that have been approved by the Shareholders and the Board of Commissioners. The Board of Directors is assessed collegially and individually.

Comply

Direksi telah mengungkapkan penilaian kinerja Direksi melalui laporan tahunan Perusahaan.
The Board of Directors has disclosed the performance appraisal of Board of Directors through the Company's annual report.

Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Aspects; Principles; Recommendations
C.2.3.	**Rekomendasi 17** Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	**Recommendation 17** Board of Directors has policy related to resignation of Board of Directors member if involved in financial crime.
	Penjelasan Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.	**Explanation** The resignation policy of Board of Directors members that involved in financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Company, so that the Company's integrity will be maintained. This policy is required to expedite the legal process and to ensure that the legal process does not interfere business activities. In addition, from morality side, this policy builds an ethical culture within the Company's environment. This policy may be covered in the Guidelines or Code of Conducts that are applicable to Board of Directors
	Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Furthermore, what is meant by involved in financial crime is the convicted status of Board of Directors member from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and fraud in the financial service activities and Money Laundering Crime Act as referred to Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime
D.	**Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan**	Aspect 4: Stakeholders Participation
D.1.	**Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.**	Principle 7: Improve Corporate Governance Aspect through Stakeholders Participation.
D.1.1.	**Rekomendasi 18** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	**Recommendation 18** Public Company has policy to prevent insider trading.
	Penjelasan Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	**Explanation** A person who has inside information is prohibited to engaging in a Securities transaction by using inside information as referred to the Capital Market Law. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example by strictly separating confidential data and/or public information, as well as dividing the management duties and responsibilities for such information in a proportionate and efficient manner
D.1.2.	**Rekomendasi 19** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*.	**Recommendation 19** Public Company has anti-corruption and anti-fraud policy.
	Penjelasan Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	**Explanation** Anti-corruption policy is useful to ensure that the Company's business activities are conducted legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy may be part of the code of conduct, or in its own form. The policy may include, among others, the programs and procedures undertaken in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in the Public Company. The policy scope should illustrate the Public Company's prevention against any corrupt practices of either giving or receiving from other parties.

Comply or Explain

Perusahan memiliki *Board Manua*l sebagai dasar tata kelola antar organ perusahaan yang mengatur pengunduran diri anggota Direksi termasuk mengatur Etika jabatan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Direksi.

Selain itu Direksi juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.

The company has a Board Manual as the basis for governance between corporate organs which regulates the resignation of members of Board of Directors including regulating job ethics and other matters that are prohibited from being done by the Board of Directors.

In addition, the Board of Directors also signed an Integrity Pact as a commitment to upholding job ethics in accordance with corporate values.

Comply

Perusahaan tidak menerbitkan Saham pada Pasar Modal, karena perusahaan merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.
The company does not issue shares on the capital market, because the company is a state-owned company whose shares are owned by the government.

Comply

Perusahaan memiliki kebijakan Kode Etik Bisnis di mana di dalamnya mengatur mengenai anti korupsi dan anti *fraud.*

Selain itu Seluruh Pegawai juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.

The company has a Code of Conduct policy which regulates anti-corruption and anti-fraud.

In addition, all employees also signed an Integrity Pact as a commitment to upholding job ethics in accordance with corporate values.

Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Aspects; Principles; Recommendations
D.1.3.	**Rekomendasi 20** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. **Penjelasan** Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman Procurement.	**Recommendation 20** Public Company has policy on suppliers and vendors selection and capacity building. **Explanation** The policy on suppliers or vendors selection is useful to ensure that Public Company obtains the goods or services needed at competitive prices and good quality. While the policy on capacity building of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services needed by the Company will affect the quality of the Company's output. The implementation of these policies can guarantee supply continuity, both in terms of quantity and quality required by Public Company. The scope of these policies includes criteria in selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanism, efforts to increase the ability of suppliers or vendors, and fulfillment of rights relating to suppliers or vendors. The Company has a policy related to the procurement of goods and services which contains the selection and improvement of supplier or vendor capabilities as stated in the standard Procurement Guidelines.
D.1.4.	**Rekomendasi 21** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. **Penjelasan** Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	**Recommendation 21** Public Company has policy on creditors' rights fulfillment. **Explanation** The creditors' rights fulfillment policy is used as a guide in providing loan to creditors. The policy's objective is to maintain the rights fulfillment and the creditors' trust to the Company. The policy includes consideration in making agreements, as well as follow-up in obligations fulfilment by the Company to the creditors.
D.1.5.	**Rekomendasi 22** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. **Penjelasan** Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	**Recommendation 22** Public Company has whistleblowing system policy. **Explanation** Well-structured whistleblowing policy will provide protection assurance to witnesses or whistleblowers for a violation indication committed by employee or management. Policy system implementation will have an impact on the establishment of good corporate governance culture. Whistleblowing system policies include, among others, types of offenses, complaints, whistleblower's protection and confidentiality, complaint handling, complaint handling party, and the results of handling and follow-up.

Comply or Explain

Perusahaan memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Peraturan Direksi yang telah mengatur mengenai mekanisme seleksi pemasok/ vendor dan jenis-jenis pengadaannya.
The Company has a Policy for the Procurement of Goods and Services through the Board of Directors Regulation which regulates the supplier/ vendor selection mechanism and the types of procurement.

Comply

Saat ini Perseroan masih menyusun kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur.
Currently, the Company is still formulating policies related to the fulfillment of creditor rights.

Comply

Perusahaan telah memiliki kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) melalui Surat Keputusan Direksi NoHK.01/25/3/5/HLTI/UTMA/PLND-22 tanggal 25 Maret 2022

Sistem WBS diterapkan melalui 6 saluran utama yaitu :
Web *Online* : https://Pelindobersih.whistleblowing.link/
Telepon : +62 21 2782 2345
Faksimile : +62 21 2782 3456
SMS / WhatsApp : +62 811 933 2345 / +62 811 9511 665
Email : Pelindobersih@whistleblowing.link
Pos : Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010

Perusahaan juga mempunyai Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Tugas dan Tanggung Jawab komite Pelindo Bersih dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) nomor SK.01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-31 tanggal 31 Desember 2021

The company has a Whistleblowing System (WBS) policy through the Board of Directors Decree NoHK.01/25/3/5/HLTI/UTMA/PLND-22 dated March 25, 2022

The WBS system is applied through 6 main channels, namely:
Web Online : https://Pelindonet.whistleblowing.link/
Phone : +62 21 2782 2345
Fax : +62 21 2782 3456
SMS / WhatsApp : +62 811 933 2345 / +62 811 9511 665
Email : Pelindonet@whistleblowing.link
Mail : Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010

The Company also has a Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding the Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in the Implementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Whistleblowing System No. SK.01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-31 dated December 31, 2021

Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Aspects; Principles; Recommendations
D.1.6.	**Rekomendasi 23** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. **Penjelasan** Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	**Recommendation 23** Public Company has long-term incentives for Board of Directors and employees. **Explanation** Long-term incentives are incentive based on long-term performance achievement. Long-term incentive plan has a rationale that the Company's long-term performance is reflected by the stock value growth or other long-term targets of the Company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and motivate Board of Directors and employees to improve performance or productivity that will impact on improving the Company's performance over the long term. The long-term incentives policy is the Company's actual commitment to encourage the long-term incentives to Board of Directors and Employees on terms, procedures and forms that are comply to long-term objectives of the Company. Such policies may include, goals and purposes of providing long-term incentives, terms and procedures for granting incentives, as well as the conditions and risks to be considered by the Company in providing incentives. The policy may also be included in the Company's existing remuneration policy.
E.	**Aspek 5 : Keterbukaan Informasi**	Aspect 5: Information Disclosure
E.1.	**Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.**	Principle 8: Improve the implementation of information disclosure.
E.1.1.	**Rekomendasi 24** Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. **Penjelasan** Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs *Web* diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	**Recommendation 24** Public Company utilizes broader information technology application besides website as means of information disclosure. **Explanation** Information technology can be useful as a way of information disclosure. The information disclosure is not only those that have been regulated in legislation, but also other information related to the Company that is felt useful to be known by shareholders or investors. With the utilization of more widely technology than the Website, the Company is expected to improve the corporate information dissemination effectiveness. Nevertheless, the information technology utilization should still pay attention to the Company's benefits and costs.
E.1.2.	**Rekomendasi 25** Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. **Penjelasan** Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	**Recommendation 25** Annual Report of Public Company shall disclose the shareholding of Public Company minimum 5% (five percent), in addition to disclosure of end-benefit owners in the shareholding of Public Company via major and controlling shareholders. **Explanation** The Capital Market sector legislation in governing the Company's annual report submission has set out the obligation to disclose information regarding the shareholders of 5% (five percent) or more as well as the major and controlling shareholders of the Company either directly or indirectly up to the end-benefit owners in the ownership of such shares. In the Governance Manual, it is recommended to disclose the end-benefit owners of Public Company's shares of at least 5% (five percent), other than to disclose the end-benefit owners of shares by major and controlling shareholders.

Comply or Explain

Perusahaan telah memiliki Jaminan Hari Tua untuk Direksi dan Karyawan.

Selain itu Direksi juga diberikan asuransi purna jabatan.

The company already has an Old Age Insurance for Directors and Employees.
In addition, the Board of Directors is also provided post-employment insurance.

Comply

Perusahaan telah memiliki *website* resmi melalui www.pelindo.co.id, pemutahiran *websites* ini dilakukan secara periodik dan merupakan tanggung jawab Sekretariat perusahaan.

Selain itu perusahaan juga memiliki media sosial melalui Youtube, Twitter, Facebook dan instagram.

The Company already has an official website at www.pelindo.co.id. This website is updated periodically and is the responsibility of the corporate secretariat.

In addition, the Company also has social media at Youtube, Twitter, Facebook and Instagram.

Comply

Saham Perusahaan saat masih dimiliki oleh mayoritas Pemerintah, karena status perusahaan sebagai BUMN.

Saham Perusahaan belum dimiliki oleh masyarakat karena perusahaan belum melakukan IPO.

The Company's shares are most currently owned by the Government, due to the Company's status as an SOE.
The Company's shares are not yet owned by the public because the Company has not yet conducted an IPO.

Comply

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Untuk mengetahui efektivitas dan mengukur tingkat implementasi praktik GCG di lingkup usaha, Perseroan setiap tahunnya melakukan asesmen GCG. Pelaksanaan asesmen GCG ini menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai acuan Perseroan dalam melakukan perbaikan praktik GCG di Perseroan secara berkelanjutan. Prosedur pelaksanaan penilaian GCG Pelindo mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER- 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara; dan
5. Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. SE14/ MBU/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Program *Assessment* dan *Review* Pelaksanaan GCG.

To identify the effectiveness and measure the level of implementation of GCG practices in the business scope, the Company annually conducts a GCG assessment. The GCG assessment produces recommendations that can be used as a reference for the Company in continuously improving GCG practices in the Company. The procedure of Pelindo's GCG assessment refers to several provisions, including:

1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
2. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
3. Decree of the Minister of SOEs No. KEP-117/MMBU/2002 dated August 1, 2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises;
4. Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises; and
5. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE14/ MBU/2010 dated November 11, 2010 concerning Assessment and Review Program of GCG Implementation.

KRITERIA PENILAIAN

Assessment GCG untuk tahun buku 2020 dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Indikator yang digunakan dalam *assessment* GCG tersebut meliputi:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi; dan
6. Aspek lainnya.

ASSESSMENT CRITERIA

GCG assessment for the 2020 fiscal year was carried out using the assessment criteria based on the Decree of Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The indicators used in the GCG assessment are:

1. Commitment on sustainable implementation of good corporate governance;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Board of Directors;
5. Disclosure of information and transparency; and
6. Other aspects.

PIHAK YANG MELAKUKAN *ASSESSMENT*

ASSESSOR

Adapun pihak yang melakukan *assessment* yaitu:

Assessors in the assessment are:

	Pihak yang melakukan *assessment* Assessor
Pelindo I	*Self Assessment* dibantu oleh PT Kharisma Integrasi Manajemen Self Assessment assisted by PT Kharisma Integrasi Manajemen
Pelindo II	*Self Assessment* dibantu PT Pratama Indomitra Konsultan Self Assessment assisted by PT Pratama Indomitra Consultant
Pelindo III	BPKP Provinsi Jawa Timur East Java Province BPKP
Pelindo IV	*Self Assessment* dibantu JSM Management Consultant Self Assessment assisted by JSM Management Consultant

SKOR PENILAIAN

ASSESSMENT SCORE

Tabel Hasil GCG *Assessment* PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun Buku 2020

GCG Assessment Results of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for Fiscal Year 2020

Aspek Pengujian/Indikator Parameter Assessment Aspects/Parameter Indicators	Bobot Weight	Capaian Tahun 2020 2020 Achievement		Penjelasan Description
		Skor Score	% Capaian Achievement	
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara berkelanjutan Commitment on Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,00	85,70	Sangat Baik Very Good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,46	93,99	Sangat Baik Very Good
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	34,54	98,69	Sangat Baik Very Good
Direksi Board of Directors	35,00	34,35	98,16	Sangat Baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,27	80,83	Sangat Baik Very Good
Aspek Lainnya Other Aspect	5,00	5,00	100,00	Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan **Total Score**	**100,00**	**95,63**	**95,63**	**Sangat Baik** **Very Good**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG **Classification of GCG Implementation Quality**		**Sangat Baik** **Very Good**		

Tabel Hasil GCG *Assessment* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2020

GCG Assessment Results of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for Fiscal Year 2020

Aspek Pengujian/Indikator Parameter Assessment Aspects/Parameter Indicators	Bobot Weight	Capaian Tahun 2020 2020 Achievement		Penjelasan Description
		Skor Score	% Capaian Achievement	
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara berkelanjutan Commitment on Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	7,00	100,00	Sangat Baik Very Good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,57	95,27	Sangat Baik Very Good
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	34,50	98,57	Sangat Baik Very Good
Direksi Board of Directors	35,00	34,66	99,02	Sangat Baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	9,00	100,00	Sangat Baik Very Good
Aspek Lainnya Other Aspect	5,00	5,00	100,00	Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan **Total Score**	**100,00**	**98,73**	**98,73**	**Sangat Baik** **Very Good**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG **Classification of GCG Implementation Quality**		**Sangat Baik** **Very Good**		

Tabel Hasil GCG *Assessment* PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun Buku 2020

GCG Assessment Results of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for Fiscal Year 2020

Aspek Pengujian/Indikator Parameter Assessment Aspects/Parameter Indicators	Bobot Weight	Capaian Tahun 2020 2020 Achievement		Penjelasan Description
		Skor Score	% Capaian Achievement	
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara berkelanjutan Commitment on Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,253	89,33	Sangat Baik Very Good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	7,941	88,23	Sangat Baik Very Good
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	32,569	93,05	Sangat Baik Very Good
Direksi Board of Directors	35,00	32,501	92,86	Sangat Baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,892	98,80	Sangat Baik Very Good
Aspek Lainnya Other Aspect	5,00	5,000	100,00	Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan **Total Score**	**100,00**	**93,156**	**93,156**	**Sangat Baik** **Very Good**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG **Classification of GCG Implementation Quality**		**Sangat Baik** **Very Good**		

Tabel Hasil GCG *Assessment* PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tahun Buku 2020

GCG Assessment Results of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) for Fiscal Year 2020

Aspek Pengujian/Indikator Parameter Assessment Aspects/Parameter Indicators	Bobot Weight	Capaian Tahun 2020 2020 Achievement		Penjelasan Description
		Skor Score	% Capaian Achievement	
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara berkelanjutan Commitment on Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,40	91,49	Sangat Baik Very Good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,68	96,40	Sangat Baik Very Good
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	33,94	96,96	Sangat Baik Very Good
Direksi Board of Directors	35,00	32,84	93,82	Sangat Baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,20	91,12	Sangat Baik Very Good
Aspek Lainnya Other Aspect	5,00	1,88		Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan **Total Score**	**100,00**	**91,93**	**91,93**	**Sangat Baik** **Very Good**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG **Classification of GCG Implementation Quality**		**Sangat Baik** **Very Good**		

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA

RECOMMENDATIONS AND FOLLOW-UP

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
1	Memastikan Dewan Komisaris juga menandatangani Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).	Ensure that the Board of Commissioners also signs the Code of Conduct.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
2	Agar Pedoman Perilaku memuat pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris.	The Code of Conduct should contain a statement of the commitment of Board of Directors and Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
3	Agar Perusahaan memastikan terpenuhinya tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN, dengan memastikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris yang baru telah menyampaikan LHKPN.	The Company should ensure the fulfillment of compliance level of the State Officials in submitting the LHKPN, by ensuring that the new Board of Directors and Board of Commissioners have submitted the LHKPN.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
4	Agar Perusahaan melakukan pengukuran tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan terhadap pengendalian gratifikasi.	The Company should measure the level of understanding of Board of Commissioners, Board of Directors and Employees on the gratification control.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
5	Agar Perusahaan melakukan kegiatan diseminasi/sosialisasi terkait pengendalian Gratifikasi kepada *Stakeholders* Perusahaan.	The Company should conduct dissemination/ socialization activities related to Gratification control to the Company's Stakeholders.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
6	Agar Perusahaan melakukan kegiatan pengelolaan gratifikasi di lingkungan perusahaan.	The Company should carry out gratification management activities within the company.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
7	Agar Perusahaan membuat laporan secara berkala terkait kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan	The Company should make periodic reports related to gratification control activities within the company	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
8	Perusahaan agar menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk melalui mekanisme *whistleblowing system* Perusahaan.	The Company is required to follow up on every incoming complaint through the Company's whistleblowing system mechanism.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
9	Agar Keputusan Menteri BUMN mengenai pemberhentian Direksi PT Pelabuhan Indonesia I memuat alasan pemberhentian.	The Minister of SOEs Decree regarding the dismissal of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I should include the reasons for the dismissal.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
10	Pemegang Saham agar memastikan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/02/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/10/2020 dapat dipenuhi oleh calon Anggota Dewan Komisaris.	Shareholders should ensure that the requirements to be appointed as members of Board of Commissioners as stated in the Attachment to the Regulation of the Minister of SOEs No. 02/MBU/02/2015 as amended by the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-10/MBU/10/2020 can be fulfilled by candidates for Members of Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
11	Pemegang Saham agar segera memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RJPP.	Shareholders should immediately provide approval/ratification of the RJPP draft.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
12	Pemegang Saham Agar memastikan pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan tepat waktu.	Shareholders should ensure that the ratification/approval of the RJPP is carried out on time.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
13	Pemegang Saham agar memastikan Kontrak Manajemen memuat target kinerja individu Direksi, yang disahkan/disetujui Pemegang Saham.	Shareholders should ensure that the Management Contract contains the individual performance targets of Board of Directors, which are ratified/approved by the Shareholders.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
14	Pemegang Saham agar memberikan penilaian kinerja anggota Direksi (Individu) berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.	Shareholders should assess the performance of members of Board of Directors (Individual) based on the performance report of Board of Directors and consider the Board of Commissioners' response on the performance of Board of Directors.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
15	Pemegang Saham agar melakukan upaya-upaya menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan.	Shareholders should make efforts to follow up on areas of improvement resulting from the Good Corporate Governance assessment.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
16	Dewan Komisaris agar melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.	The Board of Commissioners should evaluate the performance of Board of Directors based on a review of the criteria, targets and key performance indicators included in the Board of Directors Management Contract individually with the realization of each achievement.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
17	Dewan Komisaris agar menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara individu kepada RUPS.	The Board of Commissioners should submit the results of individual Board of Directors performance assessment to the GMS.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
18	Dewan Komisaris agar menindaklanjuti seluruh *area of improvement* hasil GCG yang menjadi kewenangannya.	The Board of Commissioners should follow up on all areas of improvement resulting from GCG that are under their authority.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
19	Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris agar mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.	The Board of Commissioners or the Committee of Board of Commissioners should evaluate the performance achievements of each member of Board of Commissioners, to be included in the minutes of Board of Commissioners Meeting.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
20	Komite audit agar merencanakan program kerja tahunan terkait *Self-assessment* kinerja Komite Audit.	The audit committee should plan an annual work program related to self-assessment of the audit committee's performance.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
21	Agar dibuat Laporan hasil pelatihan yang telah dijalani oleh anggota Direksi.	Make a report on the results of training that has been undertaken by members of Board of Directors.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
22	Agar dalam Laporan Kinerja Teknologi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris mencantumkan hasil Audit IT.	The Technology Performance Report submitted to the Board of Commissioners includes the results of IT Audit.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
23	Agar Kebijakan pengaturan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan mencakup pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.	The policy for regulating Subsidiaries and Joint Ventures includes the appointment of Board of Commissioners/Supervisory Board and Board of Directors, setting performance targets and performance appraisals as well as incentives for Board of Commissioners/Supervisory Board and Board of Directors.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
24	Agar Perusahaan menyeimbangkan jumlah tenaga auditor dengan kebutuhan perusahaan.	The Company should balances the number of auditors with the company's needs.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
25	Agar Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.	The GMS invitation should be made within a period of no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS, excluding the date of the GMS invitation and holding.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
26	Memastikan bahwa identitas perusahaan dicantumkan di setiap halaman.	Ensure that the Company's identity is listed on every page.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
27	Laporan tahunan agar memuat penjelasan misi perusahaan.	The annual report should include an explanation of the company's mission.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
28	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional agar memuat mengenai Masa berlaku.	Awards and certifications received by the Company both on a national and international scale should include the validity period.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
29	Laporan Tahunan agar memuat Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.	The Annual Report should contain a discussion and analysis of financial information containing extraordinary and rare events.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
30	Laporan Tahunan agar memuat bahasan tentang sejauh mana perubahan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih yang dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.	The Annual Report should contain a discussion of material increase or decrease in sales or net income associated with, among other things, the number of goods or services sold, and or the presence of new products or services.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
31	Laporan Tahunan agar memuat Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.	The Annual Report should contain a discussion of the impact of price changes on the company's sales or net income as well as the company's operating profit for 2 (two) years or since the company started its business if the business barely started for less than 2 (two) years.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
1	Penilaian calon Dewan Komisaris agar didukung dengan Dokumen berita acara penilaian.	Assessment of candidates for Board of Commissioners should be supported with Documents of the minutes of assessment.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
2	Pemegang Saham agar menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tepat waktu sesuai ketentuan yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.	Shareholders should determine the appointment of members of Board of Commissioners on time in accordance with the provisions, namely no later than 30 (thirty) days from the end of the term of office.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
3	Pemegang Saham mengupayakan agar melakukan pengesahan terhadap rancangan dan revisi RJPP 2020-2024 secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Shareholders strive to ratify the draft and revision of the 2020-2024 RJPP in a timely manner according to the provisions.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
4	RUPS untuk pengesahan laporan tahunan agar dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.	The GMS for ratification of annual report should be carried out on time according to the provisions, which is no later than 6 (six) months after the end of the previous fiscal year.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
5	Dewan Komisaris agar memberikan tanggapan atas rancangan RKAP agar diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam *Board Manual.*	*The Board of Commissioners should provide a response to the draft of RKAP to be submitted within the timeframe as stipulated in the Board Manual.*	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
6	Dewan Komisaris agar menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.	The Board of Commissioners is required to submit the results of individual Board of Directors performance assessment to the GMS in the semi-annual and semi-annual Board of Commissioners supervisory report.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
7	Dewan Komisaris agar melengkapi risalah rapat Dewan Komisaris dengan memuat evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris.	The Board of Commissioners should complete the minutes of Board of Commissioners' meeting by including an evaluation of the performance achievements of each member of Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
8	Dewan Komisaris agar memberikan pengesahan terhadap Laporan Kinerja Pengawasan Dewan Komisaris.	The Board of Commissioners is required to approve the Board of Commissioners Supervisory Report.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
9	Program kerja tahunan komite lainnya agar memuat paling sedikit sesuai dengan piagam komite lainnya dan mencakup *self assessment* kinerja komite lainnya.	The annual work program of other committees should at least be in accordance with the charter of other committees and include self-assessment of the performance of other committees.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
10	Direksi agar segera mengesahkan *Draft Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan *Information Technology Detail Plan* (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP.	The Board of Directors should immediately ratify the Draft of Information Technology Master Plan (ITMP) as a guideline in the development of information technology and the Information Technology Detail Plan (ITDP) as a further elaboration of the ITMP, which is used as a reference for the implementation of annual planning according to the ITMP.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
11	Pelaksanaan kegiatan kemitraan agar sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam RKAP, karena dalam praktik realisasinya masih 0%.	The implementation of partnership activities should be in accordance with the work plan set out in the RKAP, because in practice the realization is still 0%.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
12	Pimpinan Fungsi Audit Internal agar memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (*Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor*).	Head of Internal Audit Function should possess recognized expertise in the internal auditor profession by obtaining the right professional certification (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
13	RUPS untuk pengesahan/persetujuan RJPP 2020-2024 agar dilaksanakan tepat waktu, yaitu dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan, karena sampai dengan *self assessment* ini dilakukan belum dilaksanakan RUPS.	The GMS for ratification/approval of the 2020-2024 RJPP should be carried out on time, which is no later than the end of the year before the current fiscal year, because until this self-assessment was carried out the GMS had not been held.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
1	Pemutakhiran pedoman *Code of Corporate Governance* (CoCG) belum disahkan dan ditandatangani oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.	The updated Code of Corporate Governance (CoCG) guidelines have not been ratified and signed by the Board of Directors and Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
2	Pemutakhiran pedoman perilaku masih dalam bentuk draft dan belum disahkan dan ditandatangani oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.	The updated code of conduct is still in draft form and has not been ratified and signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
3	Pada tahun 2020, perusahaan belum melakukan pembahasan tentang penyempurnaan perangkat pendukung pengendalian gratifikasi beserta tindak lanjutnya.	In 2020, the company has not discussed the improvement of supporting tools for gratification control and its follow-up.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
4	Belum dilakukan pemutakhiran atas kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistleblowing system*).	There is no update on the policy regarding the company's whistle blowing system.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
5	Belum terdapat program/rencana sosialisasi ketentuan penerapan *whistleblowing system* yang secara khusus ditujukan kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan perusahaan dalam program kerja tahunan 2020, serta belum terdapat konten/muatan terkait kebijakan/mekanisme *whistleblowing system* di majalah elektronik.	There is no program/plan to socialize the provisions of the whistle blowing system that is specifically addressed to the Board of Commissioners, Board of Directors, employees of the company in the 2020 annual work program, and there is no content related to the policy/mechanism of the whistle blowing system in electronic magazines.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
6	Belum dilakukan evaluasi atas pelaksanaan *whistleblowing system* yang mencakup perangkat pendukung, sosialisasi yang telah dilakukan dan efektivitas unit pelaksana dan media.	Evaluation on the implementation of the whistleblowing system has not been carried out, which includes supporting devices, socialization carried out and the effectiveness of implementer unit and the media.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
7	Belum maksimalnya penilaian terhadap proses penilaian terhadap pengangkatan anggota Direksi, karena asesor belum mendapatkan keyakinan yang memadai dan proses seleksi yang rahasia tersebut.	The assessment process for the appointment of members of Board of Directors has not been maximized, because the assessors have not received adequate assurance and the selection process is confidential.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
8	Belum terdapat aturan yang secara eksplisit menetapkan maksimal jumlah jabatan sebagai Dewan Komisaris yang dapat dipegang seorang anggota Dewan Komisaris.	There are no rules that explicitly stipulate the maximum number of positions as Commissioner that can be held by a member of Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
9	Belum terdapat pedoman/penilaian kinerja dewan komisaris yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.	There is no guideline/assessment of the performance of Board of Commissioners established by the Shareholders.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
10	Belum terdapat pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.	There is no guideline for preparing the Board of Commissioners supervisory report established by the shareholders.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
11	RUPS untuk pengesahan kinerja tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 6 Juli 2020, diselenggarakan tidak tepat waktu. Seharusnya RUPS untuk pengesahan kinerja diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.	The GMS for approval of 2019 performance on July 6, 2020 was not held on time. The GMS of performance approval should be held no later than 6 (six) months after the end of the previous fiscal year.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
12	Belum terdapat rencana tindak lanjut atas *area of improvement* aspek pemegang saham yang dihasilkan dari asesmen GCG periode sebelumnya.	There is no follow-up plan for the area of improvement in the shareholder aspect resulting from the previous GCG assessment.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
13	RUPS pengesahan RJPP periode 2020-2024 tidak dilaksanakan, sedangkan RUPS pengesahan RJPP *rolling plan* periode 2020-2024 dilaksanakan tidak tepat waktu (RUPS pengesahan RJPP diselenggarakan selambat lambatnya dalam waktu 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP atau revisi RJPP).	The GMS for approval of 2020-2024 RJPP period was not held, while the GMS for approval of RJPP rolling plan for the 2020-2024 period was not held on time (the GMS for ratification of RJPP should held no later than 60 days after the receipt of the draft of RJPP or revised RJPP).	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
14	Persetujuan atas usulan aksi korporasi Direksi (penghapusbukuan aset) belum diberikan secara tepat waktu yaitu maksimal 7 hari sejak usulan diterima oleh pemegang saham beserta kelengkapan dokumen pendukungnya.	Approval of the proposed corporate action of Board of Directors (asset write-off) has not been given in a timely manner, which is a maximum of 7 days after the proposal is received by the shareholders along with the completeness of supporting documents.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
15	Kebijakan Dewan Komisaris dalam pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem pengendalian intern belum dimutakhirkan.	The policy of Board of Commissioners' advisory on internal control system policies has not been updated.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
16	Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit melakukan telaah atas kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.	The Board of Commissioners together with the Audit Committee should conduct a review of the policy/design and the implementation of internal control system.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
17	Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan pada saat awal pengangkatan dan diperbaharui pada setiap awal tahun.	The Board of Commissioners signs a statement that there is no conflict of interest at the time of the initial appointment and is renewed at the beginning of every year.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
18	Pedoman tata/tertib rapat Dewan Komisaris belum mengatur pelaksanaan evaluasi hasil tindak lanjut rapat sebelumnya, telaah atas usulan Direksi dan persetujuan RUPS atas usulan Direksi.	The Board of Commissioners meeting rules and regulations do not regulate the evaluation of the results of follow-up to previous meetings, review of the Board of Directors' recommendations and approval of the GMS on the proposals of Board of Directors.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
19	Tidak semua risalah rapat membahas atas tindak lanjut dan me*monitoring* hasil rapat sebelumnya.	Not all meeting minutes discuss the follow-up and monitoring of the results of previous meetings.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
20	Komite melakukan pertemuan berkala dengan agenda yang dibahas sesuai program kerja tahunan.	The Committee holds regular meetings with discussion agenda according to the annual work program.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
21	Komite Dewan Komisaris belum secara rutin menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan triwulanan, yang memuat hasil telaah dan rekomendasi yang telah diberikan kepada Dewan Komisaris.	The Committee of Board of Commissioners has not routinely submitted quarterly report to the Board of Commissioners, which contains the results of study and recommendations that have been given to the Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
22	Anggota Direksi belum seluruhnya mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas Direksi yang telah direncanakan oleh perusahaan.	Members of Board of Directors have not yet participated in the Board of Directors Capability Improvement Program that has been planned by the company.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
23	Direksi belum menyusun dan menyampaikan kepada dewan komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing direktorat (laporan kinerja direktorat) berdasarkan target-target dalam kontrak individu masing-masing Direksi.	The Board of Directors has not prepared and submitted to the board of commissioners regarding the performance achievement of each directorate (directorate performance report) based on the targets in the individual contracts of each Director.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
24	Direksi belum menyampaikan secara berkala laporan pelaksanaan sistem teknologi informasi terutama terkait implementasi/pelaksanaan *Master Plan* Teknologi Informasi, kepada Dewan Komisaris.	The Board of Directors has not periodically submitted reports on the implementation of information technology systems, especially related to the implementation of Information Technology Master Plan, to the Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
25	Pada tahun 2020, Direksi belum melakukan ratifikasi/pengesahan terhadap Peraturan Direksi terkait Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak Perusahaan PT Pelindo III (Persero), Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris untuk anak perusahaan, serta pedoman penghitungan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris untuk anak perusahaan. Selain itu Direksi belum menyusun dan menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi anak perusahaan secara individu dalam RUPS anak perusahaan.	In 2020, the Board of Directors has not ratified the Board of Directors Regulations regarding the Guidelines for Governance of Relations between Parent and Subsidiaries of PT Pelindo III (Persero), Guidelines for the appointment and dismissal of Directors and Commissioners of subsidiaries, as well as guidelines for calculating salaries/honorariums, allowances, and facilities of Directors and Commissioners of subsidiaries. In addition, the Board of Directors has not developed and established a system/guideline for assessing the performance of Directors of subsidiaries individually in the GMS of subsidiaries.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
26	Direksi belum melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian internal baik pada tingkat entitas maupun tingkat operasional/aktivitas, serta melaporkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris.	The Board of Directors has not evaluated/assessed the effectiveness of internal control both at the entity level and at the operational/activity level, and has not reported the evaluation results to the Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
27	Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan/tahunan unaudited kepada Dewan Komisaris dan Pemegang saham Secara bersamaan. Laporan manajemen triwulanan paling lambat harus disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS 1 (satu) bulan setelah triwulanan yang bersangkutan, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris seharusnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum batas penyampaian laporan kepada pemegang saham berakhir, sehingga Dewan Komisaris memiliki waktu 14 (empat belas) hari untuk melakukan penelaahan dan memberikan tanggapan sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.	The Board of Directors submitted the unaudited quarterly/annual management report to the Board of Commissioners and Shareholders simultaneously. The quarterly management report must be submitted to the Shareholders/GMS 1 (one) month after the relevant quarter, then the submission process to the Board of Commissioners should be no later than 14 (fourteen) days before the deadline for submitting reports to shareholders ends, so that the Board of Commissioners has 14 (fourteen) days to review and provide feedback before being submitted to the Shareholders.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
28	Dalam risalah rapat Direksi belum terdapat terdokumentasikan pembahasan/evaluasi (pemantauan *progress*) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya, serta belum terdapat dokumentasi monitoring tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.	In the minutes of Board of Directors meeting, there is no documentation of discussion/evaluation (monitoring progress) of the implementation of decisions made from the previous meeting, and there is no documentation of follow-up monitoring of the direction and/or decisions of Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
29	RUPS Pengesahan RJPP periode 2020-2024 tidak dilaksanakan, RUPS Pengesahan RJPP *Rolling Plan* periode 2020-2024 dilaksanakan tidak tepat waktu, dan RUPS untuk pengesahan Kinerja Tahun 2019 diselenggarakan tidak tepat waktu.	The GMS for Ratification of RJPP for 2020-2024 period was not held, the GMS for Ratification of RJPP Rolling Plan for 2020-2024 period was not held on time, and the GMS for approval of the 2019 Performance was held not on time.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
1	Perusahaan agar melakukan pemutakhiran terhadap Pedoman GCG, Pedoman Perilaku dan *Boad Manual*.	The Company should update the Code of GCG, Code of Conduct and Board Manual.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
2	Perusahaan agar melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pedoman Perilaku, dan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh karyawan.	The Company should make efforts to increase the understanding of the Code of Good Corporate Governance, the Code of Conduct, and the Gratification Control Policy to all employees.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
3	Perusahaan agar melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh karyawan dan *stakeholder* Perusahaan terhadap Sistem Pelaporan atas Pengaduan Dugaan Penyimpangan pada Perusahaan (*Whistleblowing System*) dan menyempurnakan sistem yang telah ada.	The Company should make efforts to increase understanding to all employees and stakeholders of the Company regarding the Whistleblowing System in the Company and improve the existing system.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
4	Pengesahan/Persetujuan Rancangan RJPP agar secara tepat waktu, yaitu sebelum tahun berjalan.	Ratification/Approval of the RJPP Draft should be done a timely manner, ie before the current year.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
5	Membuat laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.	Make a report on the results of training that has been undertaken by members of Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
6	Memberikan arahan dengan kualitas yang memadai terhadap Kebijakan Direksi tentang : a. Manajemen risiko; b. Sistem Teknologi Informasi; c. Suksesi Manajemen; d. Pengadaan; dan e. Pengelolaan Anak Perusahaan.	Provide direction with adequate quality to the Board of Directors' Policy regarding: a. Risk Management; b. Information Technology System; c. Management Succession; d. Procurement; and e. Subsidiary Management.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
7	Melakukan Pemutakhiran Piagam Komite Risiko.	Update the Risk Committee Charter.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
8	Membuat laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.	Make a report on the results of training that has been undertaken by members of Board of Directors.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
9	Melakukan usaha-usaha untuk merealisasikan peluang bisnis yang mampu memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/dibuat.	Make efforts to realize business opportunities that can generate benefits to the Company in accordance with the submitted/prepared plans.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
10	Menyempurnakan Kebijakan Teknologi Informasi, termasuk menyusun *Information Technology Master Plan* (ITMP) dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris. Melakukan Audit Teknologi Informasi (TI) oleh Audit Eksternal, menyesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem TI kepada Dewan Komisaris.	Improve Information Technology Policy, including preparing the Information Technology Master Plan (ITMP) and submitting its implementation report to the Board of Commissioners. Conduct Information Technology (IT) Audit by External Audit, adjusting to the needs of the Company, and submitting a report on the implementation of IT System to the Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
11	Menyempurnakan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta penetapan remunerasinya.	Improve the regulatory policy for subsidiaries (subsidiary governance) the appointment and dismissal of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and the determination of their remuneration.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
12	Melakukan pengukuran kepuasan pemasok.	Measure supplier satisfaction.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
13	Melakukan pemutakhiran Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*).	Update the Internal Audit Charter.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
14	Perusahaan agar menetapkan (menyempurnakan) kebijakan tentang sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	The Companies should establish (improve) policies on company information control systems and procedures with the aim of securing important company information.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
15	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.	Adequate level of company compliance with company information control policies.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
16	Direksi agar terus mengikuti Program Penghargaan *Annual Report Award* (ARA) sehingga dapat menang serta penghargaan lain dalam Bidang publikasi dan keterbukaan informasi.	Board of Directors should continue to participate in the Annual Report Award (ARA) Program and aiming to be a winner, as well as other awards in the field of publication and information disclosure.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Rekomendasi AoI dan Tindak Lanjut PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tahun 2020

AoI Recommendations and Follow-up of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) in 2020

No	Rekomendasi	Recommendation	Tindaklanjut Follow Up
17	Perusahaan agar meningkatkan kualitas produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi dan kualitas praktik Tata Kelola Perusahaan untuk dapat menjadi *benchmark* oleh Perusahaan lain. Pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya.	The Company should improve the quality of products, processes, supporting functions, organizational performance, or strategies and quality of Corporate Governance practices in order to become benchmark by other companies. Achieve the best company performance in the SOE business sector or in the industry.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

Perseroan menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola yang Baik (GCG) yang telah dibangun oleh Perseroan. Oleh karena itu, selama tahun 2021, Perseroan tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

The Company realizes that bad corporate governance practices will disrupt the Good Governance (GCG) system that has been built by the Company. Therefore, during 2021, the Company did not take any actions and policies related to this practice as shown in the following table:

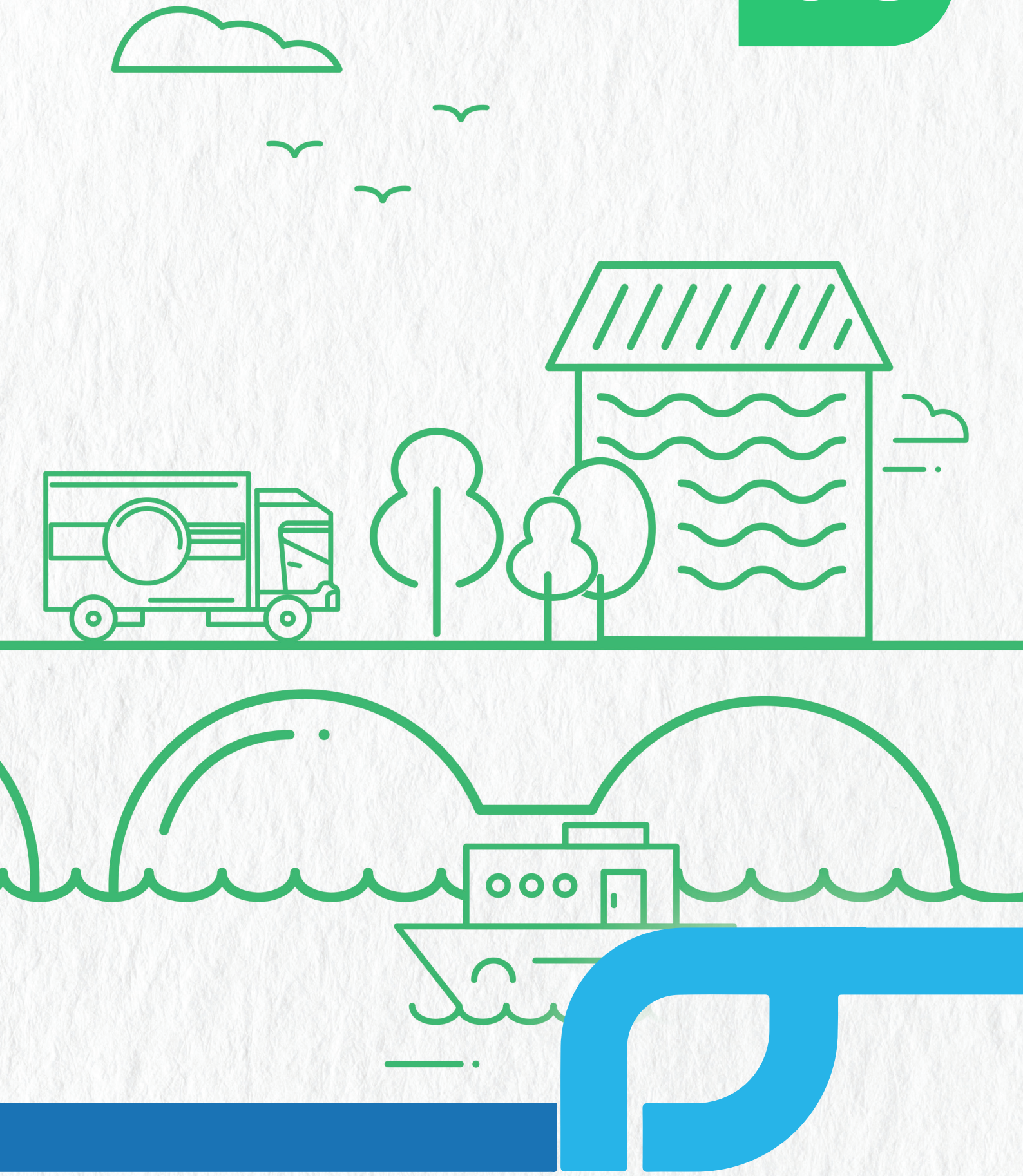
No	Keterangan Description	Praktik Practices
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan. There are reports of the Company polluting the environment.	Nihil Nil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Important cases being faced by the Company, subsidiaries, members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners in office are not disclosed in the Annual Report.	Nihil Nil
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Non-compliance in fulfilling tax obligations.	Nihil Nil
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK. Incompatibility of presentation of annual report and financial statements with applicable regulations and SAK.	Nihil Nil
5	Kasus terkait buruh dan karyawan. Cases related to labor and employees.	Nihil Nil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan *listed.* No disclosure of operating segments in listed companies.	Nihil Nil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara LT *hardcopy* dengan LT *softcopy.* Incompatibility of hardcopy AR and softcopy AR.	Nihil Nil

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility



08





Pelindo menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan usaha saat ini tidak hanya ditentukan dari perolehan profitabilitas semata, tetapi juga sejauh mana kontribusi Perseroan dalam mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan berkomitmen penuh untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Pelaksanaan program TJSL/CSR berlandaskan pada konsep *three bottom line* dengan menekankan keseimbangan antara 3 (tiga) aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu *People, Profit,* dan *Planet.*

Pelindo is fully aware that its current business success is not only determined by profitability alone, but also the extent to which the Company contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). To achieve this, the Company is fully committed to implementing a Corporate Social Responsibility (CSR) program that will provide economic, social, environmental, and legal and governance benefits with more integrated, focused principles, the impact will be measurable and accountable for, and will be part of the Company's business approach. The implementation of the CSR program will be based on the three bottom line concept by emphasizing a balance between 3 (three) important sustainable development aspects, namely People, Profit, and Planet.

Pelindo juga memahami adanya peran penting dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal Perseroan melalui kegiatan pelibatan pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui harapan, aspirasi, dan masukan dari setiap pemangku kepentingan yang berguna dalam proses perumusan strategi dan program kerja yang dapat menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para *stakeholder.*

Pelindo also understands the important role stakeholders play in the Corporate Social and Environmental Responsibility program. Therefore, the Company endeavors to maintain harmonious and mutually beneficial relationships with all its internal and external stakeholders through stakeholder engagement. This is achieved by understanding the hopes, aspirations, and input of all stakeholders, so that the Company can formulate the strategies and work programs that add value for our stakeholders.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi berkelanjutan, kinerja lingkungan berkelanjutan dan kinerja sosial berkelanjutan

In line with the Financial Services Authority Circular Letter No. 16 /SEOJK.04/2021 concerning the Form and Contents of Issuers or Public Companies Annual Reports, Information related to corporate social responsibility, especially for sustainable governance, sustainable economic performance, sustainable

disampaikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.

Dalam Laporan Keberlanjutan telah disampaikan uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen, uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "*community development program*" yang telah dilakukan serta uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan.

environmental performance and sustainable social performance is contained in a Sustainability Report published separately from this Annual Report.

In the Sustainability Report, a description of the activities and costs incurred related to responsibilities corporate social responsibility, especially regarding corporate commitment on consumer protection, a description of the activities and costs associated with responsibilities corporate social responsibility, especially regarding "community development" program" that has been carried out as well as a description of the activities and costs associated with social responsibility companies, especially environmental activities.



LAMPIRAN

Appendix





Kriteria OJK, ARA dan SK-16

OJK, ARA and SK-16 CRITERIA

KRITERIA CRITERIA	
UMUM GENERAL	
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris. The annual report is presented in good and correct Bahasa Indonesia and it is recommended to be also presented in English.	
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The annual report is printed in good quality and using easy-to-read type and size.	
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. The annual report clearly states the company's identity.	
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. The annual report is displayed on the company website.	
KILAS KINERJA PERFORMANCE HIGHLIGHTS	
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun. The summary of key financial data contains financial information presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has merely been running its business activities for less than 3 (three) years.	

	PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
			√	ARA
			√	ARA SK-16
	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:	The company name and year of annual report are displayed on:	√	ARA SK-16
	1. Sampul muka.	1. Cover face.	√	
	2. Samping.	2. Side cover.	√	
	3. Sampul belakang.	3. Back cover.	√	
	4. Setiap halaman.	4. Every page.	√	
			√	ARA SK-16
	Informasi memuat antara lain:	Information includes, among others:		
	1. Pendapatan/penjualan.	1. Revenue/sales.	29	SEOJK 16 ARA SK-16
	2. Laba bruto.	2. Gross profit.	29	
	3. Laba Operasional.	3. Operating profit.	N/A	SEOJK 9 SK-16
	4. Laba sebelum pajak.	4. Profit before tax.	29	
	5. Laba bersih.	5. Net profit.	30	
	6. Laba (rugi).	6. Profit (loss).	30	SEOJK 16 ARA SK-16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	7. Total comprehensive profit (loss).	N/A	SEOJK 9
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	8. Total profit (loss) attributable to owners of parent entity and non-controlling interests.	30	SEOJK 16 ARA
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	9. Total comprehensive profit (loss).	30	SEOJK 16
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	10. Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of parent entity and non-controlling interests.	30	
	11. Laba (rugi) per saham.	11. Earnings (loss) per share.	31	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16
	12. Jumlah aset.	12. Total assets.	26	
	13. Investasi pada entitas asosiasi.	13. Investment in associates.	N/A	
	14. Jumlah liabilitas.	14. Total liabilities.	27	
	15. Jumlah ekuitas.	15. Total equity.	28	
	16. Dana pihak ketiga.	16. Third party funds.	N/A	SEOJK 9
	17. Pinjaman yang diterima.	17. Loans received.		
	18. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	18. Return on asset ratio	32-33	SEOJK 16
	19. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	19. Return on equity ratio		
	20. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan.	20. Profit margin.		
	21. Rasio lancar.	21. Current ratio.		
	22. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	22. Debt to equity ratio.		
	23. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	23. Debt to asset ratio.		

KRITERIA CRITERIA	

Informasi Saham
Information on Shares

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
24. Rasio KPMM.	24. CAR ratio.	N/A	SEOJK 9
25. Aset produktif.	25. Earning assets.		
26. Rasio Non-performing Loans (NPL).	26. Non-performing Loans.		
27. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	27. Operational Efficiency Ratio.		
28. Cost to Income Ratio (CIR).	28. Cost to Income Ratio.		
29. Rasio Net Interest Margin (NIM).	29. Net Interest Margin.		
30. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	30. Percentage of violations and exceeding the Maximum Lending Limit.		
31. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	31. Reserve Requirement.		
32. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	32. Net Open Position.		
33. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	33. Information and other financial ratios relevant to the issuer or public company and the type of industry.	33	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16
Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	Information on shares for a Public Company shall at least contain:	36	SEOJK 16 ARA SK-16
1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	1. Shares that have been issued for each quarterly period are presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:		
a. Jumlah saham yang beredar.	a. Number of shares outstanding.		
b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	b. Market capitalization based on price on the stock exchange where the shares are listed.		
c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	c. Highest, lowest, and closing share prices based on price on the stock exchange where the shares are listed.		
d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	d. Trading volume on the stock exchange where the shares are listed.		
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.	Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange. Information is presented in the form of graphs and tables.		
2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	2. In the event of a corporate action that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	36-37	SEOJK 16 ARA
a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.	a. The date of implementation of corporate action.		
b. Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham. c. bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.	b. b. The ratio of stock split, , stock dividends, shares. c. c. bonuses, number of convertible securities issued, and changes in the par value of shares.		
d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.	d. d. Number of outstanding shares before and after the corporate action.		
e. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).	e. e. Number of conversion effects executed (if any).		
f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	f. f. Stock prices before and after corporate action.		

KRITERIA CRITERIA	
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Information on bonds, sharia bonds or convertible bonds that are still outstanding in the last 2 (two) fiscal years.	

LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Laporan Direksi Board of Directors Report	

	PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
3.	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut.	3. In the event of suspension and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained.	36-37	SEOJK 16
4.	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut.	4. In the event that the suspension as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the suspension and/or delisting shall be explained.	N/A	SEOJK 16
Informasi memuat:		Information includes:		ARA SK-16
1.	Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding).	1. Number of outstanding bonds/sharia bons/ convertible bonds.	39-39	
2.	Tingkat bunga/imbalan.	2. Interest rate/yield.		
3.	Tanggal jatuh tempo.	3. Due date.		
1.	Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021.	4. Bond/sharia bonds rating for 2020 and 2021.		
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.		Note: if the company does not have bonds/sharia bonds/convertible bonds, it should be disclosed.		
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	53-55	
1.	Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	1. Performance of Issuers or Public Companies, at least containing:	55	
a.	Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	a. Issuer's or Public Company's strategy and strategic policies (including for UUS if the Bank owns UUS).	55	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16
b.	Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	b. The role of Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies.	55	SEOJK 16
c.	Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	c. The process carried out by Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy.	56-57	
d.	Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	d. Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company.		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16
e.	Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	e. Constraints faced by Issuers or Public Companies.	N/A	

KRITERIA CRITERIA	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
f. Struktur organisasi.	f. Organizational structure.		SEOJK 9
a. Aktivitas utama.	a. Main activity.		
b. Teknologi informasi.	b. Information Technology.		
c. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	c. Types of products and services offered, including lending to micro, small and medium business debtors.		
d. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	d. Interest rate for raising and providing funds.		
e. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	e. Economic development and target market.		
f. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	f. Network and business partners at home and/or abroad.		
g. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	g. Number, type, and location of offices.		
h. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	h. Ownership of Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders in the Bank's business group.		
i. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	i. Important changes that occurred in the Bank and the Bank's business groups in the relevant year.	N/A	
j. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	j. Important things that are expected to happen in the future.	57-59	
k. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	k. Human capital include the number, level of education, training, and human capital development.	59-68	
2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	2. Description of the business prospects of the Issuer or Public Company.	68-70	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16
3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	3. Implementation of the governance of Issuers or Public Companies.		
4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	4. Changes in the composition of members of Board of Directors (if any) and the reasons for changes.	73-77	SEOJK 9 ARA SK-16
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	77	
1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	1. Assessment of the Board of Directors performance on the management of the Issuer or Public Company, including the supervision of Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by Board of Directors.	77-81	SEOJK 16 SEOJK 9 ARA SK-16
2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	2. Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors.	80-81	
3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	3. Views on the implementation of the governance of the Issuer or Public Company.	82-84	
4. Pandangan atas penerapan/pengelolaan Whistleblowing System (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut	4. Views on the implementation/management of Whistleblowing System (WBS) in the company and the role of Board of Commissioners in the WBS	73-74	ARA
5. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	5. Changes in the composition of Board of Commissioners (if any) and the reasons for changes.	81-82	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
6. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	6. Frequency and method of providing advice to members of Board of Directors.		SEOJK 9
7. Penilaian kinerja Komite-komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	7. Performance appraisal of Committees under the supervision of Board of Commissioners/Supervisory Board.	86-87	SK-16

KRITERIA CRITERIA	
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Signatures of members of Board of Directors and Board of Commissioners	

PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	
Nama dan alamat lengkap perusahaan Name and full address of the company	
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of subsidiary and/or branch office or representative office (if any)	
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik Brief history of Issuer or Public Company	
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri. 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya. 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	Contains the following: 1. The signature written on a separate sheet. 2. A statement that Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for the correctness of the annual report contents. 3. Signed by all members of Board of Commissioners and members of Board of Directors stating their names and positions. 4. A written explanation in a separate letter from the person concerned in the event that a member of Board of Commissioners or a member of Board of Directors does not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from another member in the event that there is no written explanation from the person concerned.		ARA SK-16
Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: 1. Alamat 2. Nomor telepon 3. Alamat surat elektronik 4. Alamat situs web	Access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that allow the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including: 1. Address 2. Phone number 3. Email address 4. Website address	90-91	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web	Contains information about: 1. Name and address of subsidiaries, including: a. Address b. Phone number c. Email address d. Website address	176-181	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
1. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web	1. Name and address of branch/representative office, including: a. Address b. Phone number c. Email address d. Website address	*92-95*	
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	Note: if the company does not have a subsidiary, branch office, and representative office, it must be disclosed.		
Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	Include among others: date/year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name.	97-98	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.	Note: if the company has never changed its name, it should be disclosed.		
Mencakup:	Includes:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16

KRITERIA CRITERIA	
Kegiatan Usaha Business Activities	
Wilayah Operasional Operational Area	
Struktur Organisasi Organizational Structure	
Keanggotaan Asosiasi Membership in Association	
Profil Direksi Board of Directors Profile	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
1. Visi Perusahaan	1. Company Vision	99	
1. Misi Perusahaan	1. Company Mission		
2. Penjelasan Visi	2. Vision Explanation		
3. Penjelasan Misi	3. Mission Explanation		
4. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris pada tahun buku.	4. Information that the vision and mission have been reviewed and approved by Board of Directors/Board of Commissioners for the fiscal year.		
5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki Perusahaan.	5. Statement regarding the corporate culture of the Company.	100	
Uraian mengenai antara lain:	Description of, among others:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	1. The company's business activities according to the latest articles of association.	101-102	
2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	2. Business activities carried out.	102	
3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	3. Products and/or services produced.	103-106	
Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	Operational area of the Issuer or Public Company. Operational area is the area for carrying out operational activities or the range of the company's operational activities.	108	SEOJK 16 ARA
Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	Organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below Board of Directors including committees under Board of Directors (if any) and committees under Board of Commissioners, along with names and positions.	110-111	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.	109	SEOJK 16
Profil Direksi, paling sedikit memuat:	Profile of Board of Directors, at least contains:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	1. Name and position in accordance with duties and responsibilities.	112-137	
2. Foto terbaru.	2. Recent photos.		
3. Usia.	3. Age.		
4. Kewarganegaraan.	4. Nationality.		
5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.	5. Educational history and/or certification.		
6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	6. Position history, including information on:		
a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan	a. Legal basis for appointment as a member of Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned		
b. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	b. History of appointment (period and position) as a member of Board of Directors in the Company since first appointed.		
c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	c. Concurrent positions, either as a member of Board of Directors, member of Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of Board of Directors does not have concurrent positions, this will be disclosed.		
d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	d. Work experience and service period both inside and outside the Issuer or Public Company.		

KRITERIA CRITERIA	

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

PENJELASAN		EXPLANATION		HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
7.	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	7.	Affiliation with other members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, major and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that the members of Board of Directors have no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter. Financial and family relationships of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners with other members of Board of Directors, other members of Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of the Bank.	138	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
8.	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	8.	Changes in the composition of members of Board of Directors and the reasons for changes. In the event that there is no change in the composition of members of Board of Directors, this will be disclosed.	139-141	SEOJK 16
Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		Profile of Board of Commissioners, at least contains:			SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
1.	Nama dan jabatan.	1.	Name and title.	142-165	
2.	Foto terbaru.	2.	Recent photos.		
3.	Usia.	3.	Age.		
4.	Kewarganegaraan.	4.	Nationality.		
5.	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.	5.	Educational history and/or certification.		
6.	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	6.	Position history, including information on:		
a.	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris	a.	Legal basis for appointment as member of Board of Commissioners		
b.	Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.	b.	Legal basis for appointment for the first time as a member of Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned.		
c.	Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	c.	History of appointment (period and position) as a member of Board of Commissioners in the Company since first appointed.		
d.	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	d.	Concurrent positions, either as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of Board of Commissioners does not have concurrent positions, this will be disclosed.		
e.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	e.	Work experience and service period both inside and outside the Issuer or Public Company.		

KRITERIA CRITERIA	
Profil singkat pejabat eksekutif Executive Officials Short Profile	
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan. Number of employees and data regarding employee competency development.	
Komposisi pemegang saham Shareholders composition	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	7. Affiliation with other members of Board of Commissioners, major and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter. Financial and family relationships of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners with other members of Board of Directors, other members of Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of the Bank.	166	SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16
8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.	8. Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms.	N/A	SEOJK 16
9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	9. Changes in the composition of members of Board of Commissioners and the reasons for changes. In the event that there is no change in the composition of members of Board of Commissioners, this will be disclosed.	167-169	
Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	Including the composition of executive officials along with positions and a summary of curriculum vitae.	N/A	SEOJK 9
Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year.	169-171	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	Disclosure of information can be presented in tabular form.		
Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan serta adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan.	Data on employee competency development that has been carried out in the fiscal year consisting of parties (position level) who participated in the training, types of training, and training objectives as well as equal opportunities for all employees.	172-174	ARA SK 16
Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	Employee competency development costs that have been incurred in the fiscal year.		
Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:		
1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Shareholders who own 5% (five percent) or more of shares of the Issuer or Public Company.	174	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut..	2. Members of Board of Directors and members of Board of Commissioners who own shares in Issuers or Public Companies. In the event that all members of Board of Directors and/or all members of Board of Commissioners do not own shares, then this is disclosed.		

KRITERIA CRITERIA	
Pemegang saham utama dan pengendali Major and controlling shareholders	
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura List of subsidiaries, associates, venture companies	
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank Information related to Bank Business Group	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya).	3. Percentage of indirect ownership of shares of Issuers or Public Companies by members of Board of Directors and members of Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners. In the event that all members of Board of Directors and/or all members of Board of Commissioners do not have indirect ownership of shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed. Directors and commissioners who own Shares (Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board are required to report to the company regarding the ownership of Shares and/or their families in the company concerned and other companies, including any changes thereto).	175	
4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.	4. Public shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of shares of the Issuer or Public Company.	174	SEOJK 16 ARA
5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	5. Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	174	SEOJK 16
1. Kepemilikan institusi lokal.	a. Local institutional ownership.		
2. Kepemilikan institusi asing.	b. Foreign institutional ownership.		
3. Kepemilikan individu lokal.	c. Local individual ownership.		
4. Kepemilikan individu asing.	d. Foreign individual ownership.		
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	The above information can be presented in tabular form.		
Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	Information regarding the major and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners, which is presented in the form of a scheme or chart. Note: major shareholder is the party who, directly or indirectly, owns at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights issued by a company, but is not the controlling shareholder.	175	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	The name of subsidiary, associated company, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	176-185	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:	Banks that are part of a business group and/or have a Subsidiary, must add:	N/A	SEOJK 9

KRITERIA CRITERIA	
Struktur grup perusahaan Company group structure	
Kronologis pencatatan saham Share listing chronology	
Kronologis penerbitan efek (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Chronology of securities issuance (including private placement) and/or share listing from the beginning of issuance to the end of the fiscal year	
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) Information on the use of services from public accountants (AP) and public accounting firms (KAP)	
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang. Name and address of supporting institution and/or profession.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi: a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (sister company), Entitas Induk sampai dengan ultimate shareholder. b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank. c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.	The structure of the Bank's business group which includes: a. The structure of the Bank's business group, among others, consists of the Bank, Subsidiaries, sister companies, Parent Entity to ultimate shareholder. b. Management linkage structure within the Bank's business group. c. Shareholders acting on behalf of other shareholders. The definition of a shareholder acting on behalf of another shareholder is an individual shareholder or entity that has a common goal of controlling the Bank, based on or not based on an agreement.		
Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	Company group structure in the form of a chart depicting parent entity, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPV).	186-187	SEOJK 16 ARA SK 16
Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	Chronology of share listing, number of shares, number of registered shares after each corporate action, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock split, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any).	188-189	SEOJK 16 ARA SK 16
Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, jenis tindakan perusahaan (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek (jika ada).	Other securities listing information that have not matured in the fiscal year at least contain the name of the securities, type of corporate action that causes changes in the number of other securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, name of the stock exchange where other securities are listed, and the rating of the securities (if any).	190-192	SEOJK 16 ARA SK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi: 1. Nama dan alamat. 2. Periode penugasan. 3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan. 4. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing- masing penugasan yang diberikan selama tahun buku. 5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/ asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/allies include: 1. Name and address. 2. Assignment period. 3. Information on audit and/or non-audit services provided. 4. Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year. 5. In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/ allies can be presented in tabular form.	192	SEOJK 16 SK 16
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	192	SEOJK 16 ARA SK 16

KRITERIA CRITERIA	
Penghargaan dan Sertifikasi. Awards and Certifications.	
Informasi pada Website Perusahaan. Awards and Certifications.	

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE

Rencana Strategis Bank Bank Strategic Plan
Tinjauan operasi per segmen usaha Operational review by business segment
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description of the company's financial performance

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
Informasi memuat antara lain:	Information includes:		SEOJK 9 ARA SK 16
1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).	1. Name of award and/or certification (national and international scale).	194-208	
2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.	2. Year of award and/or certification.		
3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.	3. The awarding and/or certification body.		
4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	4. Validity period (for certification).		
Meliputi paling kurang:	Include at least:		ARA
1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu.	5. Shareholder information up to individual ultimate owners.	210-211	
2. Isi Kode Etik.	6. Contents of Code of Conduct.		
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan.	7. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes material on the agenda discussed in GMS, a summary of the minutes of GMS, and information on important dates, namely the date of GMS announcement, the date of GMS invitation, the date of GMS, the date on which the summary of minutes of GMS is announced.		
4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir).	8. Separate annual financial statements (last 5 years).		
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.	9. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors.		
6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	10. Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.		
1. Rencana jangka panjang (corporate plan). 2. Rencana jangka menengah dan pendek (business plan).	1. Long-term plan (corporate plan). 2. Medium and short term plans (business plan).	N/A	SEOJK 13
Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	Operational review per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	1. Explanation of each business segment.	254-262	
2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:	2. Performance per business segment, including:		
a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	3. Production, which includes the process, capacity, and development.	254-262	
b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	4. Increase/decrease in production capacity.	254-262	
c. Penjualan/pendapatan usaha.	5. Sales/operating revenues.	263-266	
d. Profitabilitas.	6. Profitability.	263-266	
Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	Comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years (in the form of narratives and tables), an explanation of the causes of changes and the impact of these changes, at least regarding:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	1. Current assets, non-current assets, and total assets.	289-305	
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	2. Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities.	305-313	
3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset.	3. Funding (investment and lending/financing) and total assets.	N/A	

KRITERIA CRITERIA	
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan. Analysis of the quality of earning assets and relevant financial ratios.	
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Discussion and analysis of the company's ability to pay debts and receivables collectibility rate by presenting the relevant ratio calculations according to the type of company industry.	
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy). Discussion on capital structure and management policy on capital structure (capital structure policy).	
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. Discussion on material commitments for capital goods investment (not funding commitments) in the last fiscal year.	
Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. Discussion and analysis of financial information that has been reported containing extraordinary and rare events.	
Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan. Description of substantial components of other income and expenses, in order to acknowledge the company's operational results.	
Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru. If the financial statements reveal a material increase or decrease in sales or net income, must be accompanied by discussion of the extent to which these changes can be related, among others, to number of goods or services sold, and or existence of new products or services.	
Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun. Discussion on the impact of price changes on the company's sales or net income as well as the company's operating profit for 2 (two) years or since the company started its business, if merely started its business for less than 2 (two) years.	
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Discussion of caital goods investment realized in the last fiscal year.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	4. Third party funds and other funding sources.	N/A	
5. Ekuitas.	5. Equity.	313-314	
6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	6. Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss).	315-327	
7. Arus kas.	7. Cash flow.	328-330	
8. Suku bunga dasar kredit.	8. Basic loan interest rate.	N/A	SEOJK 9
		N/A	SEOJK 9
Penjelasan tentang:	Explanation of:		SEOJK 16 ARA SK 16
1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	1. Ability to pay debts, both short term (liquidity) and long term (solvability).	330-331	
2. Tingkat kolektibilitas piutang.	2. Level of receivables collectibility.	333	
Penjelasan atas:	Explanation of:		SEOJK 16 ARA SK 16
1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas.	1. Details of capital structure consisting of interest-based debt/sharia bonds and equity.	333-334	
2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies).	2. Management policies on capital structure (capital structure policies).	334	
3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	3. Basis for selecting management policies.	334	
Penjelasan tentang:	Explanation of:		SEOJK 16 ARA SK 16
1. Nama pihak yang melakukan ikatan.	1. Name of the party involved	335	
2. Tujuan dari ikatan tersebut.	2. The purpose of commitment.	335	
3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan- ikatan tersebut.	3. The expected source of funds to fulfill the commitment.	335	
4. Mata uang yang menjadi denominasi.	4. The currency to be denominated.	335	
5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	5. Measures planned by the company to protect the risk from the related foreign currency position.	335	
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	Note: if the company has no commitments related to investment in capital goods in the last fiscal year, it should be disclosed.		
		336	SK 16
		336	SK 16
		336	SK 16
		336	SK 16
Penjelasan tentang:	Explanation of:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
1. Jenis investasi barang modal.	1. Types of investment in capital goods.	336-337	
2. Tujuan investasi barang modal.	2. The purpose of investment in capital goods.	339	

KRITERIA CRITERIA	
informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Information and material facts subsequent to the date of the accountant's report	
Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Description of the company's business outlook.	
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang. Information on comparison between the targets at the beginning of fiscal year with the results achieved (realization), and the targets or projections to be achieved for the coming year.	
Uraian tentang aspek pemasaran. Description of marketing aspect.	
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of dividends for the last 2 (two) fiscal years.	
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Realization of the use of proceeds from public offering (in the event that the company is still required to submit a report on the realization of the use of funds)	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	3. The investment value of capital goods issued in the last fiscal year.	336-337	
Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	Note: if there is no realization of capital goods investment, it must be disclosed.		
Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	Description of significant events after the date of accountant's report including their impact on future business performance and risks. Note: if there is no significant event after the date of the accountant's report, it should be disclosed.	340	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	Business outlook of the Issuer or Public Company related to industrial conditions, general economy and international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.	340-343	SEOJK 16 ARA SK 16
Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	Comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:		
1. Pendapatan/penjualan.	1. Revenue/sales.	349-352	SEOJK 16 ARA
2. Laba (rugi).	2. Profit (loss).	349-352	
3. Struktur modal (capital structure).	3. Capital structure (capital structure).	352-353	SEOJK 16
4. Pemasaran.	4. Marketing.	354-359	ARA
5. Pengembangan SDM.	5. HC development.	359-360	ARA
6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	6. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	344-349	SEOJK 16 ARA
Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:		
1. Pendapatan/penjualan.	1. Revenue/sales.	362	SEOJK 16 ARA
2. Laba (rugi).	2. Profit (loss).	362	
3. Struktur modal (capital structure).	3. Capital structure (capital structure).	362	SEOJK 16
4. Kebijakan dividen.	4. Dividend policy.	363	
5. Pemasaran.	5. Marketing.	263-265	ARA
6. Pengembangan SDM.	6. HC development.	366	ARA
7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	7. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	361-362	SEOJK 16 ARA
Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	Marketing aspect of goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.	247-253	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	Description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:		SEOJK 16 ARA SK 16
1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	1. Dividend policy, among others, contains information on the percentage of dividends distributed to net income.	367-368	
2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	2. Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends.	368	
3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	3. Total dividends per share (cash and/or non-cash).	368	
4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	4. Amount of dividends per year paid.	368	
Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	Note: if there is no dividend distribution, the reasons should be disclosed.		
Memuat uraian mengenai:	Contains a description of:		SEOJK 16 ARA SK 16
1. Total perolehan dana.	1. Total proceeds.	368	

KRITERIA CRITERIA	
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan. Material information on (if any) investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliate transactions, and conflict of interest transactions.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
2. Rencana penggunaan dana.	2. Plan for the use of funds.	368	
3. Rincian penggunaan dana.	3. Details of the use of funds.	368	
4. Saldo dana.	4. Fund balance.	368	
5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	5. Date of approval of the GMS/GMB for changes in the use of funds (if any).	368	
a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku. b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.	a. In the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year. b. In the event that there is a change in the use of funds as stipulated in the Regulation of Financial Services Authority regarding the report on the realization of the use of proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change.		
Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	Note: if no information available on the realization of the use of proceeds from the public offering, please disclose it.		
Memuat uraian mengenai:	Contains a description of:		SEOJK 16 ARA SK 16
a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.	a. Date, value, and transaction object.	368-376	
b. Nama pihak yang melakukan transaksi.	b. Name of the party conducting the transaction.	368-376	
c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).	c. Nature of the affiliation relationship (if any).	368-376	
d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.	d. Explanation of the fairness of transaction.	368-376	
e. Pemenuhan ketentuan terkait.	e. Fulfillment of related provisions.	368-376	
f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	f. In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in points a) to number f), the Issuer or Public Company also discloses information:	371-372	
1. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle).	1. Statement of Board of Directors that affiliated transactions have gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle.	371-372	
2. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms length principle).	2. Role of Board of Commissioners and audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arm's length principle.	371-372	

KRITERIA CRITERIA	
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. Description of changes in laws and regulations to the company in the last fiscal year.	
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Description of changes in accounting policies applied by the company in the last fiscal year.	
Informasi kelangsungan usaha. Information on business continuity.	

	PENJELASAN		EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
g.	Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	g.	For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	371-372	
h.	Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.	h.	For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of GMS that approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added.	371-372	SEOJK 16 SEOJK 13 ARA SK 16
i.	Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	i.	In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, this matter shall be disclosed.	371-372	
Uraian memuat antara lain:		Description contains:			SEOJK 16 ARA SK 16
1.	Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.	1.	Name of legislation that is undergoing changes.	376	
2.	Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	2.	Impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or a statement that the impact is not significant.	376	
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: if there are no changes to the laws and regulations in the last fiscal year, they must be disclosed.			
Uraian memuat antara lain:		Description contains:			SEOJK 16 ARA SK 16
1.	Perubahan kebijakan akuntansi.	1.	Changes in accounting policies.	377-379	
2.	Alasan perubahan kebijakan akuntansi.	2.	Reasons for changes in accounting policies.	377	
3.	Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	3.	Quantitative impact on financial statements.	377-379	
Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: If there is no change in accounting policy in the last fiscal year, it must be disclosed.			
Pengungkapan informasi mengenai:		Disclosure of information regarding:			ARA
1.	Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	1.	Matters that have the potential to have a significant effect on the company's business continuity in the last fiscal year.	381	
2.	Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1.	2.	Management's assessment of the matters in number 1.	382	
3.	Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.	3.	Assumptions used by management in conducting the assessment.	382	

KRITERIA CRITERIA	
Adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau dalam rangka pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang antara Bank dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha. Prohibitions, limitations, and/or other significant obstacles to transfer funds or to fulfill capital requirements required by the competent authority between the Bank and other entities within the same business group.	
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan. Information on Risk Exposure and Capital.	
TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE	
RUPS. GMS	
Direksi. Board of Directors.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
Catatan: Apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	Note: If there are no matters that have the potential to significantly affect the company's business continuity in the last fiscal year, should be disclosed about the assumptions underlying the management in believing that there are no matters that have the potential to significantly affect the company's business continuity in the last fiscal year.		
			SEOJK 9
Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	Risk and capital exposures include annual period risk and capital exposure reports as stipulated in Part II of the risk and capital exposure publication report.		SEOJK 9
Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	Information regarding the resolutions of GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year includes:		SEOJK 16
a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku.	a. GMS resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have been realized in the fiscal year.	420-430	
b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan.	b. GMS resolutions for the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not being realized.	431-442	
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of GMS to calculate the votes, this matter shall be disclosed.		
1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	1. Duties and responsibilities of each member of Board of Directors. Information regarding duties and responsibilities of each member of Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	445-446	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16
1. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi.	1. A statement that Board of Directors has Board of Directors guidelines or charter.	444-445	SEOJK 16 ARA
2. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Informasi memuat antara lain: a. Tanggal Rapat. b. Peserta Rapat. c. Agenda Rapat.	2. Policy and frequency of meetings of Board of Directors, meetings of Board of Directors with Board of Commissioners, and level of attendance of members of Board of Directors in these meetings including attendance at the GMS. Information on level of attendance of members of Board of Directors at meeting of Board of Directors, meeting of Board of Directors with Board of Commissioners, or GMS can be presented in tabular form. Information includes, among others: a. Meeting Date. b. Meeting participants. c. Meeting agenda.	448-459	SEOJK 16 ARA SK 16
1. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	1. Training and/or competency development of members of Board of Directors:	458-460	SEOJK 16 SK 16

KRITERIA CRITERIA	
Dewan Komisaris. Board of Commissioners.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).	a. Policy on training and/or competency development for members of Board of Directors, including orientation program for newly appointed members of Board of Directors (if any).		
b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).	b. Training and/or competency development attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (any).		
2. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	2. Board of Directors' assessment of the performance of committees that support duties implementation of Board of Directors in the fiscal year shall at least contain:	467	SEOJK 16 ARA
a. Prosedur penilaian kinerja.	a. Performance appraisal procedure.		
b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.	b. Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competencies and attendance at meetings.		
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports duties implementation of Board of Directors, this matter shall be disclosed.		
1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. Bank yang bersangkutan.. b. Bank lain. c. Lembaga keuangan bukan bank. d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.	1. Share ownership of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners reaching 5% (five percent) or more of the paid-up capital, which includes the type and number of shares in: a. The bank concerned. b. Another bank. c. Non-bank financial institutions. d. Other companies domiciled both at home and abroad.	N/A	SEOJK 13
1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	1. Duties and responsibilities of Board of Commissioners.	468	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16
1. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris.	1. A statement that Board of Commissioners has Board of Commissioners' guidelines or charter.	469-470	SEOJK 16 ARA
1. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen. 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	1. Independent Commissioner (minimum 30% of total Board of Commissioners). Include among others: 1. Criteria for determining the Independent Commissioner. 2. Statement on the independence of each Independent Commissioner.	473-474	ARA
3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Informasi memuat antara lain: a. Tanggal Rapat. b. Peserta Rapat. c. Agenda Rapat.	3. Policy and frequency of meetings of Board of Commissioners, meetings of Board of Commissioners with Board of Directors and level of attendance of members of Board of Commissioners in these meetings, including attendance at the GMS. Information on level of attendance of members of Board of Commissioners at meeting of Board of Commissioners, meeting of Board of Commissioners with Board of Directors, or GMS can be presented in tabular form. Information includes, among others: a. Meeting Date. b. Meeting participants. c. Meeting agenda.	474-489	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16

KRITERIA CRITERIA	
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Policy regarding the diversity of Board of Commissioners and Board of Directors composition. Description of the Company's written policies regarding the diversity of Board of Commissioners and Board of Directors composition in education, work experience, age, and gender.	
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Nomination and remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners.	
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar. Sharia supervisory board, for Issue or Public Company whose business activities are based on sharia principles as stated in the articles of association.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	4. Training and/or competency development of members of Board of Commissioners:	490-491	SEOJK 16
a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).	a. Policy on training and/or competency development of members of Board of Commissioners, including orientation program for newly appointed members of Board of Commissioners (if any).		
b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).	b. Training and/or competency development attended by members of Board of Commissioners in the fiscal year (if any).		
5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	5. Performance appraisal of Board of Directors and Board of Commissioners as well as each member of Board of Directors and Board of Commissioners, at least containing:	492-503	SEOJK 16
a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.	a. Performance appraisal procedure.		
b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.	b. Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competencies and attendance at meetings.		
c. Pihak yang melakukan penilaian.	c. Assessor.		
6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	d. Board of Commissioners' assessment on the performance of Committees that support duties implementation of Board of Commissioners in the fiscal year includes:	503	SEOJK 16 ARA
a. Prosedur penilaian kinerja.	a. Performance appraisal procedure.		
b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.	b. Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competencies and attendance at meetings.		
Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	Note: if there is no such policy, the reasons and considerations should be disclosed.	504-506	ARA
Paling sedikit memuat:	At least contains:		
1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1. Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners.		SEOJK 16
2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	2. Procedures and implementation of remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners, including:	506	SEOJK 16 ARA SK 16
a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	c. Procedure for determining remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners.	507	
b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.	d. Disclosure of indicators for determining the remuneration of Board of Directors.	507	
a. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	e. Remuneration structure of Board of Directors and Board of Commissioners, such as salaries, allowances, bonuses and others; and Note: if there are no performance bonuses, non-performance bonuses, and stock options received by each member of Board of Commissioners and Board of Directors, it must be disclosed.	508-509	
a. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	a. Total remuneration for each member of Board of Directors and member of Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	-	
Paling sedikit memuat:	At least contains:	N/A	SEOJK 16

KRITERIA CRITERIA	
Komite Audit. Audit Committee.	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Nomination and remuneration committee or function of Issuers or Public Companies.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
a. Nama.	a. Name.		
b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.	b. Legal basis for appointment as Sharia Supervisory Board.		
c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.	c. Period of assignment of Sharia Supervisory Board.		
d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.	d. Duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board.		
e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	e. Frequency and method of giving advice and suggestions as well as supervision of compliance with sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies.		
1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	1. Name and position in committee membership.	515-516	SEOJK 16 ARA SK 16
2. Usia.	2. Age.		SEOJK 16 ARA
3. Kewarganegaraan.	3. Nationality.		
4. Riwayat pendidikan.	4. Educational history.		
5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	5. Position history, including information on:		SEOJK 16 ARA SK 16
a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	a. Legal basis for appointment as committee member.		
b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	b. Concurrent positions, either as a member of Board of Commissioners, a member of board of directors, and/or committee member as well as other positions (if any).		
c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.	c. Work experience and service period both inside and outside the issuer or public company.		
6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.	6. Period and term of office of audit committee members.		SEOJK 16 ARA SK 16
7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	7. Description of duties and responsibilities.	512-513	SEOJK 13 ARA SK 16
8. Pernyataan independensi komite audit.	8. Statement of independence of audit committee.	517-518	SEOJK 16 ARA SK 16
9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	9. Training and/or competency development attended in the fiscal year (if any).	518	SEOJK 16
10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	10. Policies and frequency of audit committee meetings and level of attendance of audit committee members in these meetings.	518-520	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SEOJK 13 SK 16
11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit.	11. The implementation of audit committee's activities for the fiscal year is in accordance with what is stated in the guidelines or charter of audit committee.	520-521	
Paling sedikit memuat:	At least contains:	525-528	
1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	1. Name and position in committee membership.		SEOJK 16 ARA SK 16
2. Usia.	2. Age.		
3. Kewarganegaraan.	3. Nationality.		
4. Riwayat pendidikan.	4. Educational history.		
5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	5. Position history, including information on:		

KRITERIA CRITERIA	

Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
Other committees owned by Issuers or Public Companies that support the functions and duties of Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of Board of Commissioners.

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	a. Legal basis for appointment as committee member.		
b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	b. Concurrent positions, either as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any).		
c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	c. Work experience and service period inside and outside the Issuer or Public Company.		
6. Periode dan masa jabatan anggota komite.	6. Period and term of office of committee members.		
7. Pernyataan independensi komite.	7. Committee independence statement.		
8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	8. Training and/or competency development attended in the fiscal year (if any).	528-529	
9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	9. Description of duties and responsibilities.	529	
10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter).	10. A statement that has had guidelines or charter.	522-523	
11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	11. Policy and frequency of meetings and level of attendance of members at the meeting.	523	
12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	12. Brief description of the implementation of activities in the fiscal year.	529-531	
13. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	13. Policy regarding the succession of Board of Directors.	531-532	
Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:		
1. Alasan tidak dibentuknya komite	1. Reasons for not forming the committee		
2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.	2. Unit carrying out the nomination and remuneration function.		
Paling sedikit memuat:	At least contains:		SEOJK 16 ARA
1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	1. Name and position in committee membership.	535-537	
2. Usia.	2. Age.		
3. Kewarganegaraan.	3. Nationality.		
4. Riwayat pendidikan.	4. Educational history.		
5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	5. Position history, including information on:		
a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	a. Legal basis for appointment as committee member.		
b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	b. Concurrent positions, either as a member of board of commissioners, member of board of directors, and/or committee member as well as other positions (if any).		
c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.	c. Work experience and service period both inside and outside the issuer or public company.		
6. Periode dan masa jabatan anggota komite.	6. Period and term of office of committee members.		
7. Pernyataan independensi komite.	7. Committee independence statement.	538-539	
8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	8. Training and/or competency development attended in the fiscal year (if any).	539-540	
9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	9. Description of duties and responsibilities.	532-533	

KRITERIA CRITERIA	
Sekretaris perusahaan. Corporate secretary.	
Unit Audit Internal. Internal Audit Unit	
Akuntan Publik. Public Accountant.	

	PENJELASAN		EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
10.	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite.	10.	A statement that the committee has had guidelines or charter.	534	
11.	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	11.	Policy and frequency of committee meetings and level of attendance of committee members at the meeting.	540-542	
12.	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	12.	Brief description of the committee's activities during the fiscal year.	542-543	
1.	Nama.	1.	Name.		SEOJK 16 ARA
2.	Domisili.	2.	Domicile.	547	
3.	Riwayat jabatan, meliputi:	3.	Position history, including:		
a.	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.	a.	Legal basis for appointment as company secretary.		
b.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.	b.	Work experience and service period both inside and outside the issuer or public company.		
4.	Riwayat pendidikan.	4.	Educational history.		
5.	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	5.	Training and/or competency development attended during the fiscal year.	547-548	
6.	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	6.	Brief description of duties implementation of corporate secretary in the fiscal year.	548-549	
1.	Nama kepala unit audit internal.	1.	Name of head of internal audit unit.		SEOJK 16 ARA
2.	Riwayat jabatan, meliputi:	2.	Position history, including:		
a.	Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.	a.	Legal basis for appointment as head of internal audit unit.	551	
b.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.	b.	Work experience and service period both inside and outside the issuer or public company.		
3.	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).	3.	Qualification or certification as an internal audit profession (if any).		
4.	Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	4.	Number of employees (internal auditors) in internal audit unit.	555-557	
5.	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	5.	Training and/or competency development attended in the fiscal year.	551-553	
6.	Struktur dan kedudukan unit audit internal.	6.	Structure and position of internal audit unit.	550	
7.	Uraian tugas dan tanggung jawab.	7.	Description of duties and responsibilities.	553-554	
8.	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal.	8.	A statement that internal audit unit has had guidelines or charter.	553	
9.	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	9.	Brief description of duties implementation of internal audit unit for the fiscal year, including the policy and frequency of meetings with board of directors, board of commissioners, and/or audit committee.	559-561	
1.	Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	1.	Name and year of public accountant that has audited the annual financial statements for the last 5 years.	570	ARA
2.	Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	2.	Name and year of Public Accounting Firm that has audited the annual financial statements for the last 5 years.		
3.	Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.	3.	Amount of fee for each type of service provided by Public Accounting Firm in the last fiscal year.		
4.	Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	4.	Other services provided by Public Accounting Firm and public accountant other than auditing services for annual financial statements in the last fiscal year.		
Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		Note: if there is no other service, it should be disclosed.			

KRITERIA CRITERIA	
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal Control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik. Description of the internal control system applied by issuer or public company.	
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. The risk management system applied by Issuer or Public Company.	
Fungsi kepatuhan. Compliance function.	
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada). Legal cases that have material impact faced by issuers or public companies, subsidiaries, members of board of directors and members of board of commissioners (if any).	
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada). Information on administrative sanctions/sanctions imposed on issuers or public companies, members of board of commissioners and members of board of directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the fiscal year (if any).	
Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Access to company information and data: Description of the availability of public access to company information and data, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, bulletins, meetings with analysts, and so on.	
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik. Information regarding the code of conduct of Issuer or Public Company.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations.	578-580	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA
2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework).	2. Explanation of the suitability of internal control system with an internationally recognized framework (COSO – internal control framework).	584	
3. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	3. Review of the effectiveness of internal control system.	584	
4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	4. Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statement on the adequacy of internal control system.	584	SEOJK 16
1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Overview of the risk management system of Issuer or Public Company.	586-588	SEOJK 16 SEOJK 13 ARA
2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	2. Types of risks and how to manage them.	589-601	
3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	3. Review of the effectiveness of Issuer's or Public Company's risk management system.	602-603	
4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	4. Statement of Board of Directors and/or Board of Commissioners or audit committee on the adequacy of risk management system.	603	SEOJK 16
Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	The level of the Bank's compliance with all provisions and laws and regulations as well as the fulfillment of commitments with competent authorities.	N/A	SEOJK 13
1. Pokok perkara/gugatan.	1. Principal case/lawsuit.	603-608	SEOJK 16 ARA
2. Status penyelesaian perkara/gugatan.	2. Status of settlement of cases/lawsuits.		
3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik. 4. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan.	3. Impact on the condition of issuer or public company. 4. The risk faced by the company and nominal value of the claim.		
5. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.	5. Impact on the company's financial condition.		SK 16
6. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	6. Disclosure of legal issues shall at least include: a. total civil and criminal cases faced and have received decisions with permanent legal force. b. total civil and criminal cases faced and still in the process of being resolved. Note: in the event that the company, subsidiaries, members of Board of Commissioners, and members of Board of Directors do not have litigation, it must be disclosed.		SEOJK 13
		609	SEOJK 16 ARA
		609-612	ARA
1. Pokok-pokok kode etik.	1. Points contained in code of conduct.	613-614	SEOJK 16 ARA

KRITERIA CRITERIA	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank. Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Bank..	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
2. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi.	2. A statement that the code of conduct applies to all levels of the organization.	614	
3. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	3. Form of socialization of code of conduct and enforcement efforts	614-616	
4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif).	4. Sanctions for each type of violation stipulated in the code of conduct (normative).	616	
5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	5. Number of code of conduct violations along with the sanctions given in the last fiscal year.	616	
Catatan: Apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Note: If there is no violation of code of conduct in the last fiscal year, it must be disclosed.		
2. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	6. A statement regarding the company's corporate culture.	616	SK 16
1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	1. Remuneration Committee a. Name of members, composition, duties and responsibilities. b. Number of meetings held. c. Remuneration that has been paid to members of Remuneration Committee for 1 (one) year.	N/A	POJK 45
2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	2. Remuneration policy formulation process which includes: a. Overview of the background and objectives of Remuneration policy. b. Review of Remuneration policy in the previous year, along with its improvements. c. Mechanisms to ensure that the remuneration for employees in the control unit is independent from the work units they supervise.	N/A	
3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	3. Scope of Remuneration policy and its implementation per business unit, per region and at subsidiaries or branch offices located overseas	N/A	
4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	4. Remuneration, which is associated with risks, includes: a. Type of key risk used in implementing the Remuneration. b. Criteria for determining the key risk types, including those that are difficult to measure. c. Impact of determining the key risk on Variable Remuneration policy. d. Changes in the determination of the key risk types compared to last year and the reasons, if any.	N/A	
5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	5. Performance appraisal, which is related to Remuneration, includes: a. a. Overview of the Remuneration policy related to performance appraisal. b. Method of linking individual remuneration with bank performance, work unit performance and individual performance. c. Description of the method used by the Bank to state that the agreed performance cannot be achieved, hence it is necessary to make adjustments to the remuneration and the amount of remuneration adjustments if such conditions occur.	N/A	

KRITERIA CRITERIA	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (malus), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (clawback).	6. Adjustment of Remuneration related to Performance and Risk, which includes: a. Policy regarding deferred Variable Remuneration, the amount, and the criteria for determining the amount. b. Bank Policy regarding deferred Variable Remuneration which is delayed in payment (malus), or withdrawn when has been paid (clawback).	N/A	
7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	7. Name of external consultant and the consultant's duties related to Remuneration policy, if the Bank uses the services of external consultant	N/A	
8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	8. Remuneration and facilities package received by Board of Directors and Board of Commissioners include the structure of remuneration and details of nominal amount.		
9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	9. Variable Remuneration, including: c. Forms of Variable remuneration and the reasons for choosing the form. and d. Explanation if there are differences in the provision of Variable Remuneration among Board of Directors, Board of Commissioners and/or Employees.	N/A	
10. jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	10. Number of Board of Directors, Board of Commissioners and Employees receiving Variable Remuneration for 1 (one) year, and total nominal value.	N/A	
11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers.	11. Position and number of parties who are material risk takers.	N/A	
12. Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	12. Shares options owned by Board of Directors, Board of Commissioners, and Executive Officers.	N/A	
13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	13. Ratio of highest and lowest salary	N/A	
14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	14. Number of recipients and total amount of guaranteed unconditional Variable Remuneration given by the Bank to candidates for Board of Directors, candidates for Board of Commissioners, and/or prospective employees for the first 1 (one) year of employment	N/A	
15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	15. Number of employees affected by termination of employment and total nominal amount of severance pay paid		
16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	16. Total deferred Variable Remuneration, which consists of cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank.		
17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	17. Total deferred Variable Remuneration paid for 1 (one) year.		
18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	18. Details of total annual Remuneration, covering: a. Fixed or variable remuneration. b. Deferred and non-deferred remuneration. c. The form of remuneration given in cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank.		

KRITERIA CRITERIA	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (employee Stock ownership program/ESOP). Brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP).	
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai Brief description of the policy of information disclosure regarding	
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik. Description of the whistleblowing system of Issuer or Public Company.	
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik. Description of anti-corruption policy of Issuer or Public Company.	
Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). Provision of funds to related parties and provision of large funds (large exposure).	
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions that have not been disclosed in other reports.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	19. Quantitative information regarding: a. Total remaining Remuneration that is still deferred, both those exposed to implicit and explicit adjustments. b. Total Remuneration reduction due to explicit adjustments during the reporting period. c. Total Remuneration reduction due to implicit adjustments during the reporting period.		
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (management stock Ownership program/MSOP) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock Ownership program/ ESOP).	In terms of compensation in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP).	617	SEOJK 16 ARA
Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:	Information disclosed shall at least contain:		
1. Jumlah saham dan/atau opsi.	1. Number of shares and/or options.		
2. Jangka waktu pelaksanaan.	2. Implementation period.		
3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.	3. Requirements for eligible employees and/or management.		
4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.	4. Exercise price or determination of exercise price.		
1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka.	1. Share ownership of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company.	617	SEOJK 16
2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.	2. Implementation of the said policy.		
1. Cara penyampaian laporan pelanggaran.	1. Violation report submisstion.	618-619	SEOJK 16 ARA
2. Perlindungan bagi pelapor.	2. Protection for whistleblowers.	619-620	
3. Penanganan pengaduan.	3. Handling complaints.	620	
4. Pihak yang mengelola pengaduan.	4. Whistleblowing management team.	624	
5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	5. The results of complaint handling, at least:		
a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku.	a. Number of complaints received and processed in the fiscal year.	625	
b. Tindak lanjut pengaduan.	b. Follow up on omplaints.		
Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	In the event that the issuer or public company does not have a whistleblowing system, then this is disclosed.		
1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), Fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Programs and procedures carried out in overcoming the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuers or Public Companies.	625-630	SEOJK 16 ARA
2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	2. Anti-corruption training/socialization for employees of Issuers or Public Companies.	630	
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.	In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.		
Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan	Information that needs to be disclosed is total amount of debit balances of funds provision to related parties and to core debtors (individuals or groups) per report position.	N/A	SEOJK 13
		N/A	SEOJK 13

KRITERIA CRITERIA	
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank. Other information related to Bank Governance, among others in the form of owner intervention, internal disputes or problems that arise as a result of remuneration policy of the Bank.	
Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud). Number of Irregularities (Internal Fraud).	
Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/atau Obligasi Bank. Buy Back of Bank Shares and/or Bonds.	
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan. Provision of Funds for Social Activities and/or Political Activities During the Reporting Period.	
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik. Implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers who issue equity securities or Public Companies.	
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2020 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Assessment of GCG Implementation for the 2020 fiscal year, which includes at least Board of Commissioners and Board of Directors aspect.	
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF ISSUER OR PUBLIC COMPANY	
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Corporate social responsibility.	

	PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
			N/A	SEOJK 13
	Pengungkapan mengenai penyimpangan (internal fraud) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	Disclosure of irregularities (internal fraud) includes at least: 1. Number of irregularities (internal fraud) that have been resolved. 2. Number of irregularities (internal fraud) that are in the process of being resolved at the internal bank. 3. Number of irregularities (internal fraud) that has not yet in the process of being resolved at the internal bank. 4. Number of irregularities (internal fraud) that have been followed up through the legal process.	N/A	
	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (buy back) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	1. Policy in buying back shares or bonds of the Bank. 2. Number of buyback shares and/or bonds. 3. Repurchase price per share and/or bonds. 4. Increase in earnings per share and/or bonds.	N/A	SEOJK 13
	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	Disclosure regarding the provision of funds for social activities and/or political activities shall at least include the party receiving the funds and the amount of the funds given.	N/A	SEOJK 13
	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	1. Statement of recommendations that have been implemented and/or	632-647	SEOJK 16
	2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	2. Explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).		
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	Disclosure of information can be presented in tabular form.		
	Memuat uraian mengenai:	Contains a description of:	648-658	ARA
	1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian	1. Criteria used in the assessment		
	2. Pihak yang melakukan penilaian	2. Assessor		
	3. Skor penilaian masing-masing kriteria	3. Assessment score of each criteria		
	4. Rekomendasi hasil penilaian	4. Recommendations of assessment results		
	5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.	5. Reasons for not implementing the recommendations.		
	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	1. Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at least contains:	660-663	SEOJK 16
	a. Penjelasan strategi keberlanjutan.	a. Explanation of sustainability strategy.		
	b. Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup).	b. Summary of sustainability aspects (economic, social, and environmental).		
	c. Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik.	c. Brief profile of Issuer or Public Company.		
	d. Penjelasan Direksi.	d. Board of Directors Explanation.		

KRITERIA CRITERIA	

PENJELASAN		EXPLANATION		HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
e.	Tata kelola keberlanjutan.	e.	Sustainable governance.		
f.	Kinerja keberlanjutan.	f.	Sustainable performance.		
g.	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.	g.	Written verification from an independent party, if any.		
h.	Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada.	h.	Feedback sheet for readers, if any.		
i.	Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.	i.	Issuer or Public Company's response to the previous year's report feedback.		
2.	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	2.	The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.		
3.	Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	3.	Information on the Sustainability Report in point 1) can:		
a.	Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	a.	Disclosed in other relevant sections outside of the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or		
b.	Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.	b.	Referring to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company.		
1.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.	1.	The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report.		
2.	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	2.	In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:		
a.	Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	a.	Contains all the information as referred to in number 1); and		
b.	Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	b.	Compiled according to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.		
3.	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.	3.	In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information regarding social and environmental responsibilities has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report.		

KRITERIA CRITERIA	
INFORMASI KEUANGAN FINANCIAL INFORMATION	
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang TanggungJawab atas Laporan Keuangan. Statement Letter of Board of Directors and/or Board of Commissioners on Accountability for Financial Statements.	
Opini auditor independen atas laporan keuangan. Independent auditor's opinion on the financial statements.	
Deskripsi Auditor Independen di Opini. Description of Independent Auditor in Opinion.	
Laporan keuangan yang lengkap. Full financial statements.	
Perbandingan tingkat profitabilitas. Comparison of profitability levels.	
Laporan Arus Kas. Statements of cash flow.	
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Summary of Accounting Policies.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
4. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	4. The Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.		
Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Compliance with related regulations regarding Accountability for Financial Statements.	Laporan Keuangan (LK) Halaman Surat Pernyataan Direksi	ARA
			ARA
Deskripsi memuat tentang:	Description contains:		ARA
1. Nama dan tanda tangan.	1. Name and signature.	LK Halaman Opini Auditor	
2. Tanggal Laporan Audit	2. Audit Report Date	LK Halaman Opini Auditor	
3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	3. KAP license number and Public Accountant license number.	LK Halaman Opini Auditor	
4. Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:	4. Completely contains the elements of financial statements:		ARA
1. Laporan posisi keuangan.	1. Statement of financial position.	LK Halaman 1-3	
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.	2. Statement of profit or loss and other comprehensive income.	LK Halaman 4-6	
3. Laporan perubahan ekuitas.	3. Statement of changes in equity.	LK Halaman 7	
4. Laporan arus kas.	4. Statement of cash flows.	LK Halaman 8	
5. Catatan atas laporan keuangan.	5. Notes to financial statements.	LK Halaman 9-336	
6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya.	6. Comparative information about previous period.	LK Halaman 1-336	
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membupenyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	7. Statement of financial position at the beginning of previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or restates financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).	LK Halaman 1-3, 142-148	
Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	Comparison of performance/profit (loss) for the current year with the previous year	LK Halaman 4-6	ARA
Memenuhi ketentuan sebagai berikut:	Fulfill the following terms:		ARA
1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan.	1. Grouping into three categories of activities: operating, investing, and financing.	LK Halaman 8	
2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.	2. Use direct method to report cash flows from operating activities.	LK Halaman 87	
3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.	3. Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities.	LK Halaman 8	
4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	4. Disclosure of non-cash transactions must be included in the notes to the financial statements.	LK Halaman 335-336	
Meliputi sekurang-kurangnya:	Include at least:		ARA
1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK.	1. Statement of compliance with SAK.	LK Halaman 87-88	
2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.	2. Basis of measurement and preparation of financial statements.	LK Halaman 87-88	

KRITERIA CRITERIA	
Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Disclosure of related party transactions.	
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. Disclosures relating to taxation.	
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Disclosures relating to fixed assets.	
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. Disclosures relating to operating segments.	

PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
3. Pajak penghasilan.	3. Income tax.	LK Halaman 110-113	
4. Imbalan kerja.	4. Work benefits.	LK Halaman 113-116	
5. Instrumen Keuangan.	5. Financial Instruments.	LK Halaman 116-123	
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	Matters to be disclosed are:		ARA
1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi.	1. The name of related party, as well as the nature and relationship with related party.	LK Halaman 241-246	
2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait.	2. Transaction value and its percentage of total related revenues and expenses.	LK Halaman 246-256	
3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	3. Total balance and its percentage to total related assets or liabilities.	LK Halaman 246-256	
Hal-hal yang harus diungkapkan:	Matters to be disclosed:		ARA
1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini.	1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax burden.	LK Halaman 181-187	
2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi.	2. Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit.	LK Halaman 181-187	
3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.	3. Statement that taxable profit (LKP) resulting from the reconciliation is used as the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return.	LK Halaman 183	
4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan.	4. Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period, and the amount of deferred tax expense (income) recognized in profit or loss if the amount is not reflected in the amount of deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of financial position.	LK Halaman 187	
5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	5. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.	LK Halaman 188-190	
Hal-hal yang harus diungkapkan:	Matters to be disclosed:		ARA
1. Metode penyusutan yang digunakan.	1. The depreciation method used.	LK Halaman 98-100	
2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya.	2. Description of the accounting policy chosen between the revaluation model and the cost model.	LK Halaman 98-100	
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya).	3. The significant methods and assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (for the revaluation model) or the disclosure of fair value of fixed assets (for the cost model).	LK Halaman 98-100	
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangandan reklasifikasi.	4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of period by showing: additions, subtractions and reclassifications.	LK Halaman 161-168	
Hal-hal yang harus diungkapkan:	Matters to be disclosed:		ARA
1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan.	1. General information covering the factors used to identify reported segments.	LK Halaman 124-125	
2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan.	2. Information on reported segment profit or loss, assets and liabilities.	LK Halaman 333-335	

KRITERIA CRITERIA	
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. Disclosures relating to Financial Instruments.	
Penerbitan laporan keuangan. Issuance of financial statements.	

Keterangan
Remarks

SEOJK 16	:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Financial Services Authority Circular No. 16/SEOJK.04/2021 concerning te Form and Content of Annual Report of Issuers or Public Companies.
SEOJK 9	:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Financial Services Authority Circular No. 9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.
SEOJK 13		Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Financial Services Authority Circular No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
POJK 45	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.
ARA	:	Kriteria *Annual Report Award* Annual Report Award Criteria
SK 16	:	Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2021 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Copy of Decree of the Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2021 concerning Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.

	PENJELASAN	EXPLANATION	HALAMAN PAGE	REGULASI REGULATION
3.	Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas.	3. Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other material segment items to the related amounts within the entity.	LK Halaman 333-335	
4.	Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	4. Disclosure at the entity level, which includes information about products and/or services, geographic areas and key customers.	LK Halaman 333-335	
Hal-hal yang harus diungkapkan:		Matters to be disclosed:		ARA
1.	Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya.	1. Details of financial instruments owned based on their classification.	LK Halaman 116-123, 258-261	
2.	Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan.	2. Fair values and their hierarchy for each group of financial instruments.	LK Halaman 258-261	
3.	Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.	3. Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk.	LK Halaman 261-265	
4.	Kebijakan manajemen risiko.	4. Risk management policy.	LK Halaman 261-265	
5.	Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	5. Analysis of risks associated with financial instruments quantitatively.	LK Halaman 261-265	
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		Matters to be disclosed are:		ARA
1.	Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.	1. The date on which the financial statements were authorized for issue.	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi	
2.	Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	2. The party responsible for authorizing the financial statements.	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi	

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia
(dahulu Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II)
dan entitas anaknya/
(formerly Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II)
and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
as of December 31, 2021 for the year then ended
with independent auditors' report

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBISIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-6	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	7	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9-336	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

PELINDO

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA (DAHULU
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA

DIRECTORS' STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA (FORMERLY
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name* : Arif Suhartono
   Alamat kantor/*Office address* : PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
   Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
   Jakarta Utara, 14310, Indonesia
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Jl. Tunas Kelapa Raya / 167
   RT/RW 005/007 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
   Nomor telepon/*Telephone number* : 62-21-4301080
   Jabatan/*Title* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Mega Satria
   Alamat kantor/*Office address* : PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
   Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
   Jakarta Utara, 14310, Indonesia
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Jl. Senayan Blok HH.11/4 RT/RW 003/015
   Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren,
   Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
   Nomor telepon/*Telephone number* : 62-21-4301080
   Jabatan/*Title* : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
   Finance and Risk Management Director

We, the undersigned below:

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anaknya.

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended.*

2. *The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, and,*

   b. *The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*

4. *We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 29 Maret 2022 / *March 29, 2022*



Arif Suhartono
Direktur Utama/
President Director

Mega Satria
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022

The Shareholder and the Board of Commissioners and Directors
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memeroleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II) and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 (lanjutan)

Penekanan suatu hal

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian, efektif tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan penggabungan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 (continued)

Emphasis of matters

As discussed in Note 1f to the consolidated financial statements, effective October 1, 2021, the Company merged with Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, with the Company as the surviving entity. Our opinion is not modified with respect of this matter.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Moch. Dadang Syachruna
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/*Public Accountant Registration No. AP.0697*

29 Maret 2022/*March 29, 2022*

00352

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

			Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	Catatan/ *Notes*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2d,2e,2g,2u,5 45,46,47	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	2d,2e,2u 6,45,46,47	5.718.525.973	11.094.379.218	2.624.641.107	*Short-term investments*
Piutang usaha - neto	2d,2u,7				*Trade receivables - net*
Pihak ketiga	46,47	1.253.132.841	1.277.605.993	1.427.409.151	*Third parties*
Pihak berelasi	2e,45	263.129.705	279.352.489	567.011.017	*Related parties*
Piutang lain-lain - neto	2d,2u,8				*Other receivables - net*
Pihak ketiga	46,47	126.988.519	103.528.199	238.179.011	*Third parties*
Pihak berelasi	2e,45	1.153.378.016	1.316.074.276	1.432.457.049	*Related parties*
Uang muka dan beban dibayar di muka	2i,9	258.677.724	192.477.003	254.756.941	*Advances and prepaid expenses*
Pendapatan masih akan diterima	2d,2u,10				*Accrued revenues*
Pihak ketiga	46,47	297.585.161	435.894.846	437.277.939	*Third parties*
Pihak berelasi	2e,45	33.383.321	67.889.867	123.414.505	*Related parties*
Persediaan	2h,11	217.674.563	187.041.439	201.270.798	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	2s,24a	1.080.535.298	1.161.817.240	1.662.075.285	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	2u,47	55.194.659	154.078.392	117.794.047	*Other current assets*
Total Aset Lancar		**23.380.594.367**	**27.883.195.752**	**30.906.300.774**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi jangka panjang	2j,12	3.751.638.877	3.518.317.017	3.635.325.634	*Long-term investment*
Properti investasi - neto	2k,13	873.433.978	867.416.746	885.703.650	*Investment properties - net*
Aset tetap - neto	2l,14	46.300.182.922	44.578.602.925	42.239.772.185	*Fixed assets - net*
Aset kerjasama operasi - neto	2n,15	408.013.146	434.117.133	461.100.101	*Joint operation assets - net*
Aset hak-guna - neto	2m,17	452.002.189	516.020.761	-	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan	2s,24f	587.268.838	753.558.421	241.393.302	*Deferred tax assets*
Aset takberwujud - neto	2o,16	38.760.454.848	36.701.629.229	32.528.607.574	*Intangible assets - net*
Taksiran tagihan restitusi pajak	2s,24a	750.660.351	1.312.773.446	1.174.901.960	*Estimated claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	2u,18,47	964.824.984	2.011.116.364	2.461.193.103	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar		**92.848.480.133**	**90.693.552.042**	**83.627.997.509**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET		**116.229.074.500**	**118.576.747.794**	**114.534.298.283**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2021
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

			Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	Catatan/ *Notes*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka pendek	2u,19,46	5.196.855	4.000.000	34.193.914	*Short-term bank loans*
Utang usaha	2d,2u				*Trade payables*
Pihak ketiga	20,46,47	1.338.142.064	1.686.203.358	3.044.115.352	*Third parties*
Pihak berelasi	2e,45	1.926.350.211	3.267.820.968	3.672.159.168	*Related parties*
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	2q,21	1.298.045.484	1.379.039.522	1.207.043.755	*Short-term unearned revenues*
Utang pajak	2s,24b	578.540.987	647.527.154	827.210.649	*Taxes payable*
Beban akrual	2u,22,47	3.699.192.020	3.664.488.679	3.838.675.350	*Accrued expenses*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang	2u,46,47				*Current maturities of long-term liabilities*
Utang obligasi	25	-	499.768.052	-	*Bonds payable*
Utang bank	26	2.365.898.747	504.471.670	388.678.828	*Bank loans*
Liabilitas sewa	2m,17	76.345.578	75.354.511	-	*Lease liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	2u,23				*Other current liabilities*
Pihak ketiga	47	1.182.432.796	1.023.914.350	762.147.091	*Third parties*
Pihak berelasi	2e,45	1.066.277.650	930.066.278	608.481.268	*Related parties*
Total Liabilitas Jangka Pendek		**13.536.422.392**	**13.682.654.542**	**14.382.705.375**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar	2d,2u 47,48				*Long-term liabilities - net of current maturities*
Utang obligasi	25	40.176.176.480	39.699.180.499	39.615.134.308	*Bonds payable*
Utang bank	26	6.656.343.511	11.128.996.490	8.613.919.696	*Bank loans*
Liabilitas sewa	2m,17	257.540.134	319.371.402	-	*Lease liabilities*
Utang lembaga keuangan non-bank	2d,2u,27				*Loan from non-bank financial institution*
Pihak ketiga	47	476.290.919	332.402.837	213.793.871	*Third parties*
Pihak berelasi	45	949.751.736	670.300.506	437.976.537	*Related parties*
Liabilitas pajak tangguhan	2s, 24f	105.071.621	117.774.083	91.505.345	*Deferred tax liabilities*
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	2q,28	4.495.055.535	4.620.448.208	4.604.082.256	*Long-term unearned revenue*
Liabilitas jangka panjang lainnya	2d,2u,29,47	962.389.202	792.645.412	702.551.614	*Other long-term liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	2t,30	6.560.923.531	6.938.142.497	4.822.593.130	*Employee benefit liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang		**60.639.542.669**	**64.619.261.934**	**59.101.556.757**	***Total Non-current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS		**74.175.965.061**	**78.301.916.476**	**73.484.262.132**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
Tanggal 31 Desember 2021
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

			Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	Catatan/ *Notes*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)					***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
EKUITAS					***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B Modal dasar - 33.000.000 saham dan, terdiri dari: 1 saham seri A dwiwarna dan 32.999.999 saham Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 4.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.457.067 saham terdiri dari: 1 saham Seri A Dwiwarna dan 8.457.066 saham Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1.444.029 saham pada pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	31	8.475.067.000	1.444.029.000	1.444.029.000	*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively Authorized capital - 33,000,000 shares, consist of: 1 Series A Dwiwarna share and 32,999,999 Series B shares as of December 31, 2021 and 4,000,000 shares as of December 31, 2020 and 2019 Issued and fully paid - 8,457,067shares consists of: 1 Series A Dwiwarna share and 8,457,066 Series B shares as of December 31, 2021 and 1,444,029 shares as of December 31, 2020 and 2019*
Modal donasi	32	26.825.982	26.825.982	26.825.982	*Donated capital*
Tambahan modal disetor	2f,33	(1.128.322.898)	(205.004.707)	(317.597.475)	*Additional paid-in capital*
Komponen ekuitas lainnya		1.466.121	-	-	*Other equity component*
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	1b,2c,34	836.072.934	836.072.934	836.072.934	*Difference in value of transactions with non-controling interest*
Ekuitas *merging entity*	1f,1g	-	21.516.406.212	21.050.900.765	*Merging entity equity*
Saldo laba					*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		29.925.514.788	15.021.058.681	13.273.514.540	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		4.434.909.230	993.019.548	2.455.762.802	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	1e,36	(2.062.503.591)	(1.119.546.220)	(105.008.860)	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto		**40.509.029.566**	**38.512.861.430**	**38.664.499.688**	***Equity attributable to owners of the parent entity - net***
Kepentingan nonpengendali	2c,37	1.544.079.873	1.761.969.888	2.385.536.463	*Non-controlling interests*
Ekuitas - neto		**42.053.109.439**	**40.274.831.318**	**41.050.036.151**	***Equity - net***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**116.229.074.500**	**118.576.747.794**	**114.534.298.283**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021,
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2021	**Catatan/ Notes**	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*)**	
Pendapatan operasi	28.814.806.337	2r,38	26.591.131.827	*Operating revenues*
Pendapatan konstruksi	3.195.512.405	2r,39	3.924.471.433	*Construction revenues*
Beban operasi	(22.503.946.817)	2r,40	(20.675.933.360)	*Operating expenses*
Beban konstruksi	(3.195.512.405)	2r,39	(3.924.471.433)	*Construction expenses*
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	229.338.106	2r,41	(196.538.108)	*Other operating income (expense) - net*
LABA USAHA	**6.540.197.626**		**5.718.660.359**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	407.775.884	2r,42	699.581.748	*Finance income*
Beban keuangan	(2.540.082.866)	2r,43	(2.544.366.171)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi	255.107.588	2j,2n,44	(39.998.707)	*Equity in income of associates*
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	**4.662.998.232**		**3.833.877.229**	***INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak final	(487.671.869)	24d	(436.180.278)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**4.175.326.363**		**3.397.696.951**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN		2s		***CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini	(847.733.176)	24d,24e	(745.867.105)	*Current*
Tangguhan	(151.447.911)	24d,24f	307.112.625	*Deferred*
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	**3.176.145.276**		**2.958.942.471**	***INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak	94.351.746	2t,36	(1.643.196.940)	*Remeasurements of defined benefit plans - net off tax*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	13.379.913	1e,36	(329.050.522)	*Exchange differences due to financial statements translation*
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(47.180.224)	2g,36	108.347.081	*Changes in fair value of available-for-sale financial assets*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	**3.236.696.711**		**1.095.042.090**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021,
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2021	**Catatan/ Notes**	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*)**	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	3.292.133.734		3.076.425.168	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	(115.988.458)	2c	(117.482.697)	*Non-controlling interests*
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*	**3.176.145.276**		**2.958.942.471**	***INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***
Penyesuaian atas laba *merging entity*:				*Adjustment of merging entity's profit:*
Pemilik entitas induk	(2.280.313.686)		(1.805.995.892)	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	130.572.397		88.960.075	*Non-controlling interests*
	(2.149.741.289)		(1.717.035.817)	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	1.011.820.048		1.270.429.276	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	14.583.939	2c	(28.522.622)	*Non-controlling interests*
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*	**1.026.403.987**		**1.241.906.654**	***INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021,
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2021	**Catatan/ Notes**	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*)**	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	3.351.776.051		1.212.324.495	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	(115.079.340)	2c	(117.282.405)	*Non-controlling interests*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*	**3.236.696.711**		**1.095.042.090**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***
Penyesuaian atas laba komprehensif lainnya *merging entity*:				*Adjustment of merging entity's other comprehensive income:*
Pemilik entitas induk	(2.170.608.365)		(956.432.580)	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	129.586.062		88.563.419	*Non-controlling interests*
	(2.041.022.303)		(867.869.161)	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	1.181.167.686		255.891.915	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	14.506.722		(28.718.786)	*Non-controlling interests*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*	**1.195.674.408**		**227.173.129**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	1.028.217	2v	2.130.446	***BASIC EARNINGS PER SHARE*** *(full amount)*
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh)	842.992	2v	1.560.716	***DILUTED EARNINGS PER SHARE*** *(full amount)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Equity attributable to owners of the parent entity*															
										Penghasilan komprehensif lain/*Other comprehensive income*							
								Saldo laba/Retained earnings									
	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Modal donasi/ *Donation capital*	Tambahan modal disetor/ *Additonal paid-in capital*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity component*	Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali/ *Difference in value of transactions with non-controlling interest*	Ekuitas *merging entites*/ *Equity merging entities*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ *Exchange difference due to financial statement translation*	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ *Remeasurements of defined benefit plans*	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual/ Changes in fair value of available *for-sale* financial *assets*	Neto/ *Net*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Ekuitas - neto/ *Equity - net*	
Saldo per 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 (dilaporkan sebelumnya)		**1.444.029.000**	**26.825.982**	**(317.597.475)**	**-**	**836.072.934**	**-**	**13.273.514.540**	**2.455.762.802**	**620.425.512**	**(510.069.366)**	**(215.365.006)**	**17.613.598.923**	**532.133.658**	**18.145.732.581**	***Balance as of January 1, 2020/ December 31, 2019 (as previously reported)***
Penyajian kembali	4	-	-	-	-	-	21.050.900.765	-	-	-	-	-	21.050.900.765	1.853.402.805	22.904.303.570	*Restatement*
Saldo per 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 (Disajikan kembali - Catatan 4)		**1.444.029.000**	**26.825.982**	**(317.597.475)**	**-**	**836.072.934**	**21.050.900.765**	**13.273.514.540**	**2.455.762.802**	**620.425.512**	**(510.069.366)**	**(215.365.006)**	**38.664.499.688**	**2.385.536.463**	**41.050.036.151**	***Balance as of January 1, 2020/ December 31, 2019 (As restated - Note 4)***
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK 71		-	-	-	-	-	-	-	(277.409.727)	-	-	-	(277.409.727)	-	(277.409.727)	*Beginning balance adjustment for implementation of PSAK 71*
Pembagian dividen kas	35	-	-	-	-	-	-	-	(708.218.661)	-	-	-	(708.218.661)	(21.134.537)	(729.353.198)	*Distribution of cash dividend*
Cadangan umum	35	-	-	-	-	-	-	1.747.544.141	(1.747.544.141)	-	-	-	-	-	-	*General reserve*
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	33	-	-	112.592.768	-	-	-	-	-	-	-	-	112.592.768	-	112.592.768	*Difference arising from business combination of entities under common control*
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1e,36	-	-	-	-	-	-	-	-	(329.050.940)	-	-	(329.050.940)	418	(329.050.522)	*Exchange difference due to financial statement translation*
Pengukuran kembali program imbalan pasti	1e,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(793.822.665)	-	(793.822.665)	(207.618)	(794.030.283)	*Remeasurements of defined benefit plans*
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	1e,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.336.245	108.336.245	10.836	108.347.081	*Changes in fair value of available-for-sale financial assets*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	1.270.429.275	-	-	-	1.270.429.275	(28.522.622)	1.241.906.653	*Income for the year*
Laba proforma *merging entity*		-	-	-	-	-	465.505.447	-	-	-	-	-	465.505.447	(573.713.052)	(108.207.605)	*Proforma income from merging entity*
Saldo per 31 Desember 2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)		**1.444.029.000**	**26.825.982**	**(205.004.707)**	**-**	**836.072.934**	**21.516.406.212**	**15.021.058.681**	**993.019.548**	**291.374.572**	**(1.303.892.031)**	**(107.028.761)**	**38.512.861.430**	**1.761.969.888**	**40.274.831.318**	***Balance as of December 31, 2020 (As restated - Note 4)***
Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif	1f,33	-	-	32.100.516.121	-	-	-	-	-	-	-	-	32.100.516.121	-	32.100.516.121	*Additional capital based on determination of definitive value*
Pembagian dividen kas	35	-	-	-	-	-	-	-	(560.000.000)	-	-	-	(560.000.000)	-	(560.000.000)	*Distribution of cash dividend*
Cadangan umum	35	-	-	-	-	-	-	624.857.249	(624.857.249)	-	-	-	-	-	-	*General reserve*
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	1f,33	-	-	(33.312.976.996)	-	-	-	-	-	-	-	-	(33.312.976.996)	-	(33.312.976.996)	*Difference arising from business combination of entites under common control*
Pendapatan komprehensif lain	36	-	-	-	-	-	-	-	-	13.379.913	93.442.628	(47.180.224)	59.642.317	909.118	60.551.435	*Other comprehensive income*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	3.292.133.734	-	-	-	3.292.133.734	(115.988.458)	3.176.145.276	*Income for the year*
Laba proforma *merging entity*		-	-	-	-	-	676.401.829	-	-	-	-	-	676.401.829	(65.629.646)	610.772.183	*Proforma income from merging entity*
Pembalikan proforma ekuitas *merging entity*		7.031.038.000	-	289.142.684	1.466.121	-	(22.192.808.041)	14.279.598.858	1.334.613.197	-	(1.002.599.688)	-	(259.548.869)	(37.181.029)	(296.729.898)	*Reversal of proforma equity merging entity*
Saldo per 31 Desember 2021		**8.475.067.000**	**26.825.982**	**(1.128.322.898)**	**1.466.121**	**836.072.934**	**-**	**29.925.514.788**	**4.434.909.230**	**304.754.485**	**(2.213.049.091)**	**(154.208.985)**	**40.509.029.566**	**1.544.079.873**	**42.053.109.439**	***Balance as of December 31, 2021***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021,
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2021	**Catatan/ Notes**	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*)**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	28.876.470.288		27.085.501.244	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(14.481.551.070)		(14.473.317.581)	*Payment to contractors, suppliers and others*
Pembayaran kepada karyawan	(5.661.556.853)		(5.472.976.164)	*Payment to employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(1.319.862.044)		(997.779.715)	*Payment for income taxes*
Penghasilan bunga	1.336.818.218		1.196.017.199	*Interest received*
Penerimaan pajak	1.078.288.509		63.644.781	*Tax receipt*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**9.828.607.048**		**7.401.089.764**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen	322.271.932		240.088.963	*Receipt of dividend*
Laba penjualan aset tetap	(1.969.868)		2.941.075	*Gain on disposal assets*
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(6.908.699.330)		(9.290.836.817)	*Acquisition of fixed assets and intangible assets*
Penerimaan (penempatan) investasi jangka pendek	5.742.520.260		(8.147.327.201)	*Receipt of (placement) short-term investments*
Penjualan (penambahan) pada penyertaan saham	(2.674.308.254)		142.500.000	*Sales (additional) of investment in shares*
Kas Neto Digunakan dari Aktivitas Investasi	**(3.520.185.260)**		**(17.052.633.980)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Setoran modal saham	1.201.500.000		84.100.000	*Capital additional*
Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(4.345.416.914)		962.524.322	*Receipt (payment) of bank loans and other financial institution*
Penerimaan pinjaman	1.611.983.309		3.431.790.723	*Receipt of loans*
Pembayaran bunga	(2.752.569.073)		(3.537.254.879)	*Interest payment*
Pembayaran liabilitas sewa	(162.741.729)	17	(153.938.339)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen	(560.000.000)	35	(1.377.043.949)	*Payment of dividend*
Kas Neto Digunakan dari Aktivitas Pendanaan	**(5.007.244.407)**		**(589.822.122)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**1.301.177.381**		**(10.241.366.338)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	8.154.416		34.409.204	*Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**11.613.056.790**	5	**21.820.013.924**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**12.922.388.587**	5	**11.613.056.790**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" atau "Pelindo II") ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 07 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 1 Oktober 2021 mengenai persetujuan perubahan nama, anggaran dasar dan logo Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021 (Catatan 1f).

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" or "Pelindo II") ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 57 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan II was changed into a State Owned Company (Persero). As result of such government regulation, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Notarial Deed No. 3 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise ("MOSOE") in 1998, the Company has been under the supervision of MOSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by the Company's General Meeting of Shareholders Decision Statement notarized by Notarial Deed No. 07 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated October 1, 2021 regarding approval on changes in the Company's name, Articles of Association and logo. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0053936.AH.01.02 dated October 1, 2021 (Note 1f).

Based on the Notarial Deed No. 09 dated August 21, 2019, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs to changes the type of shares which originally without series, changed to be consisted of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihanan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II), dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1f).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

On October 1, 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") merged to the Company (formerly Pelindo II), with the Company (formerly Pelindo II) as the surviving entity (Note 1f).

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Sehubungan dengan penggabungan tersebut di atas, Perusahaan mengelola 4 (empat) Regional yang terdiri dari:

Regional 1
Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Regional 1 memiliki 15 (lima belas) pelabuhan cabang dan 11 (sebelas) pelabuhan perwakilan. Wilayah kerja cabang-cabang operasional pelabuhan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

In relation to the merger as mentioned above, the Company manages 4 (four) Regions as follows:

Region 1
In providing its services, Region 1 has 15 (fifteen) port branches and 11 (eleven) representative branches. Work areas of operational branches of port are as follows:

Cabang Kelas Utama	Belawan	*Prime Class Branch*
Cabang Kelas I	Dumai dan/*and* Terminal Petikemas Belawan	*Class I Branches*
Cabang Kelas II-A	Pekanbaru	*Class II-A Branches*
Cabang Kelas II-B	Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, dan/*and* Kuala Tanjung	*Class II-B Branches*
Cabang Kelas III	Batam, Sei Pakning, dan/*and* Sibolga	*Class III Branches*
Cabang Kelas IV	Malahayati, Lhokseumawe, dan/*and* Tanjung Balai Asahan	*Class IV Branches*
Cabang Kelas V	Tembilahan dan/*and* Gunung Sitoli	*Class V Branches*

Regional 2
Regional 2 mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

Region 2
Region 2 manages 12 (twelve) Port Branches as follows:

Cabang Pelabuhan Utama	Tanjung Priok, Banten dan/*and* Panjang	*Main Port Branch*
Cabang Pelabuhan Madya	Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi dan/*and* Cirebon	*Medium Port Branches*
Cabang Pelabuhan Pratama	Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan/*and* Tanjung Pandan	*Small Port Branches*

Regional 3
Regional 3 mengelola 4 (empat) kantor regional yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Terminal Pelabuhan (Cabang) yang terdiri dari:

Region 3
Region 3 manages 4 (four) regional offices which includes 29 (twenty nine) Port Terminals (Branches) as follows:

Regional	Cabang/*Branch*	*Region*
Jawa Timur		*East Java*
Cabang Kelas Utama	Tanjung Perak	*Prime Class Branch*
Cabang Kelas II	Gresik	*Class II Branch*
Cabang Kelas III	Tanjung Wangi	*Class III Branch*
Cabang Kelas IV	Tanjung Tembaga dan/*and* Kalianget	*Class IV Branches*
Bali Nusra		*Bali Nusra*
Cabang Kelas II	Benoa	*Class II Branch*
Cabang Kelas III	Tenau Kupang, Lembar dan/*and* Labuan Bajo	*Class III Branches*
Cabang Kelas IV	Bima, Celukan Bawang, Maumere, Badas, Waingapu, Kalabahi, dan/*and* Ende Ippi	*Class IV Branches*

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

Regional 3
Regional 3 mengelola 4 (empat) kantor regional yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Terminal Pelabuhan (Cabang) yang terdiri dari: (lanjutan)

Region 3
Region 3 manages 4 (four) regional offices which includes 29 (twenty nine) Port Terminals (Branches) as follows: (continued)

Regional	Cabang/*Branch*	*Region*
Jawa Tengah		*Central Java*
Cabang Kelas I	Tanjung Emas, Terminal Petikemas Semarang	*Class I Branches*
Cabang Kelas II	Tanjung Intan	*Class II Branch*
Cabang Kelas IV	Tegal	*Class IV Branch*
Kalimantan		*Kalimantan*
Cabang Kelas I	Banjarmasin	*Class I Branch*
Cabang Kelas II	Bagendang	*Class II Branch*
Cabang Kelas III	Sampit, Kotabaru, Batulicin, dan/*and* Mekar Putih	*Class III Branches*
Cabang Kelas IV	Pulang Pisau, Kumai dan/*and* Bumiharjo	*Class IV Branches*

Regional 4
Regional 4 mengelola 31 (tiga puluh satu) cabang yang terdiri dari:

Region 4
Region 4 manages 31 (thirty one) branches as follows:

Cabang Kelas Utama	Makassar dan Terminal Petikemas Makassar/ *Makassar and Makassar Container Terminal*	*Main Branch*
Cabang Kelas Madya	Terminal Petikemas Makassar *New Port*/ *Makassar New Port Container Terminal*	*Middle Branch*
Cabang Kelas Satu	Balikpapan, Samarinda, Bitung, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Terminal Petikemas Bitung/*and Bitung Container Terminal*	*First Class Branch*
Cabang Kelas Dua	Tarakan, Ternate, Pantoloan, Kendari dan/*and* Bontang	*Second Class Branch*
Cabang Kelas Tiga	Manokwari, Biak, Nunukan, Tanjung Redep, Parepare dan/*and* Merauke	*Third Class Branch*
Cabang Kelas Empat	Gorontalo, Tolitoli, Fakfak dan/*and* Manado	*Fourth Class Branch*
Unit Pelayanan Kepelabuhanan *Strategic Business Unit*	UPK Sangat *Marine Service*, Properti Non Kepelabuhanan, Intan Curah Perkasa, Intan Pesona Pariwisata, dan Terminal Petikemas Indonesia Timur/ *and Eastern Indonesia Container Terminal*	*Port Services Unit* *Strategic Business Unit*

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tanggal 7 Mei 2008.
b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015.
c. Surat Menteri Perhubungan No. HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, II dan IV (Persero).
d. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
e. Peraturan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 121 Tahun 2018.
f. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2015.
g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
h. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations:

a. Act No. 17 Tahun 2008 regarding Shipping dated May 7, 2008.
b. Government Regulation No. 61 Tahun 2009 regarding Port dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Year 2015.
c. Minister of Transportation's Letter No. HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No. 17 Tahun 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).
d. Government Regulation No. 15 Tahun 2016 regarding Type and Tariff on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation.
e. Regulation of the Minister of Transportation No. 72 Tahun 2017 on Types, Structures, Classes, and Mechanisms for Determining Port Services Rates as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 121 Tahun 2018.
f. Regulation of the Minister of Transportation No. 15 Tahun 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 166 Tahun 2015.
g. Regulation of the Minister of Transporation No. 57 Tahun 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation No. 51 Tahun 2015 concerning the Operation of Seaports.
h. Regulation of the Minister of Transportation No. 77 Tahun 2016 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

i. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sebagai BUP.

j. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 936 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

k. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.

l. Keputusan Menteri Perhubungan No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").

m. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 603 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.

n. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

o. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 730 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations: (continued)

i. Decree of the Minister of Transportation of Republic Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 dated March 2, 2011 regarding issuance of business permit to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a BUP.

j. Decision of Minister of Transportation No. KP 936 Tahun 2012 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Port Operation Entity.

k. Decision of Minister of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.

l. Decree of Minister of Transportation No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as Port Operation Entity ("BUP").

m. Decree of Minister of Transportation No. KP 603 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.

n. Decision of Minister of Transportation No. KP 27 Tahun 2011 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) as Port Operation Entity.

o. Decision of Minister of Transportation No. KP 730 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

p. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ("NIB") kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan tanggal 25 September 2018.
q. Perjanjian konsesi (Catatan 49).

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations: (continued)

p. The Government of the Republic of Indonesia c.q OSS Organizing Management Institution based on the provisions of Article 24 paragraph 1 of government regulation number 24 year 2018 concerning electronic integrated business licensing services ("NIB") to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which are set on 25 September 2018.
q. Concession agreement (Note 49).

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation

As of December 31, 2021 and 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	% Kepemilikan/*Ownership percent*				Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination*		
		Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	31 Des/ *Dec 31,* 2021	31 Des/ *Dec 31,* 2020	31 Des/ *Dec 31,* 2019		31 Des/ *Dec 31,* 2021	31 Des/ *Dec 31,* 2020	31 Des/ *Dec 31,* 2019
Kepemilikan langsung / Direct ownership									
PT Prima Indonesia Logistik ("PIL")	Medan	Jasa logistik/*Logistic service*	99,67%	99,67%	99,67%	2014	358.829.673	392.104.065	72.424.303
PT Prima Pengembangan Kawasan ("PPK")	Medan	Pengembangan kawasan/*Region developer*	90,00%	90,00%	90,00%	2015	900.317.677	899.389.444	98.144.837
PT Prima Husada Cipta Medan ("PHCM")	Medan	Layanan jasa kesehatan/ *Health care services*	99,70%	99,70%	99,70%	2016	71.146.634	38.299.762	22.106.580
PT Prima Terminal Petikemas ("PTP1")	Medan	Layanan terminal petikemas/*Container port services*	70,00%	70,00%	70,00%	2013	3.206.686.441	3.233.653.816	3.223.795.923
PT Prima Multi Terminal ("PMT")	Medan	Terminal petikemas dan konvensional/ *Container and multicargo terminal*	55,00%	55,00%	55,00%	2014	3.713.797.403	3.971.706.852	4.232.027.591
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII")	Jakarta	Sistem informasi/ *Information system*	51,00%	51,00%	51,00%	1995	63.663.137	95.075.606	79.282.586

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2020	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2019	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2020	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2019
Kepemilikan langsung / *Direct ownership* (lanjutan/*continued*)									
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Jakarta	Jasa logistik/*Logistic services*	99,00%	99,00%	99,00%	2002	865.710.890	906.370.055	84.682.897
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") [v]	Jakarta	Terminal kendaraan/ *Car terminal*	71,28%	71,28%	71,28%	2012	1.960.929.214	1.827.715.741	262.080.95
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") [vii]	Jakarta	Sistem informasi/ *Information system*	99,00%	99,00%	99,00%	2012	163.124.440	137.134.393	60.100.918
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ("PPI")	Jakarta	Pengembangan pelabuhan/*Port development*	99,89%	99,89%	99,89%	2012	15.559.407.092	5.136.951.404	841.105.04
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa peralatan pelabuhan/*Port equipment services*	99,00%	99,00%	99,00%	2012	225.749.31	199.238.113	57.445.101
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia energi listrik dan air bersih/*Electricity provider and treated water*	55,00%	55,00%	55,00%	2012	191.234.589	175.927.346	45.105.432
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan alur/ *Dredging*	99,93%	99,93%	99,93%	1991	430.624.904	373.782.108	76.359.505
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI") [iv]	Jakarta	Penyedia jasa transportasi laut/ *Ship transportation services provider*	76,89%	76,89%	76,89%	2013	1.449.715.963	1.397.383.219	1.277.801.802
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Jakarta	Jasa pelatihan dan pendidikan maritim dan logistic/*Maritime and logistic education services*	99,00%	99,00%	99,00%	2013	93.462.940	64.532.883	71.354.014
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/*container and multicargo terminal*	99,00%	99,00%	99,00%	2013	1.275.310.698	4.711.001.619	1.762.867.454
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/*Container and multicargo terminal*	99,00%	99,00%	99,00%	2013	1.389.731.399	4.555.083.524	1.099.123.570
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Jakarta	Investasi pasar modal dan konsultan bisnis/ *Investment in stock exchange and business consultant*	99,00%	99,00%	99,00%	2017	1.035.473.853	1.073.885.201	1.036.864.363

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2020	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2019	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2020	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2019
Kepemilikan langsung / *Direct ownership* (lanjutan/*continued*)									
PT Terminal Petikemas Surabaya ("TPS")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/*Container port services*	99,50%	99,50%	99,50%	1999	2.651.990.612	2.043.353.665	1.789.406.335
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/*Container port services*	96,84%	96,84%	96,84%	2002	4.310.583.419	3.974.496.765	3.696.174.378
PT Pelindo Marine Service ("PMS")	Surabaya	Layanan jasa kapal/ *Shipping services*	98,23%	98,23%	98,23%	2011	1.670.790.972	1.845.664.632	1.638.141.996
PT Terminal Teluk Lamong ("TTL")	Surabaya	Layanan terminal petikemas dan curah kering/*Container and dry bulk port services*	99,50%	99,50%	99,50%	2013	797.343.088	717.611.660	667.177.840
PT Pelindo Daya Sejahtera ("PDS")	Surabaya	Layanan penyedia jasa tenaga kerja/ *Human resources services*	90,00%	90,00%	90,00%	2008	210.558.102	202.338.316	167.539.358
PT Kaltim Kariangau Terminal ("KKT")	Balikpapan	Layanan terminal petikemas/ *Container port service*	50,00%	50,00%	50,00%	2012	160.170.950	188.852.062	96.015.498
PT Equiport Inti Indonesia ("EII")	Makassar	Jasa pemeliharaan/ *Maintenance services*	99,29%	99,29%	99,29%	2012	115.512.217	89.391.524	50.327.283
PT Nusantara Terminal Services ("NTS")	Makassar	Bongkar muat/ *Loading unloading*	99,16%	99,16%	99,16%	2013	79.401.311	76.934.614	57.955.495
PT PelindoTerminal Petikemas ("SPTP") (dahulu/*formerly* PT Terminal Petikemas)	Surabaya	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/*Provision and operation of maritime services*	99,90%	25,00%	25,00%	2013	150.288.574	134.140.778	31.111.708
PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")	Makassar	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/*Provision and operation of maritime services*	99,90%	-	-	2021	125.153.051	-	-
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	Medan	Pelayanan jasa terminal non-petikemas/ *Non-container terminal services*	99,90%	-	-	2021	149.135.356	-	-
PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL")	Jakarta	Jasa logistik/*logistic services*	99,90%	-	-	2021	83.154.426	-	-
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership*									
Dimiliki melalui/*Owned through* PIL									
PT Prima Multi Peralatan ("PMP")	Medan	Jasa pemeliharaan dan perbaikan/ *Equipment Maintenance and repair services*	99,00%	99,00%	99,00%	2019	67.512.708	28.070.089	13.148.877

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2020	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2019	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2020	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2019
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership* (lanjutan/*continued*)									
Dimiliki melalui/*Owned through* PPI									
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	Jakarta	Penyertaan saham pada proyek Jalan Tol/*Investment in Toll and access Road Project*	99,79%	99,52%	99,52%	2014	3.287.110.395	1.000.147.569	79.593.101
PT Menara Maritim Indonesia ("MMI") [viii]	Jakarta	Jasa pengelola properti/*Building management service*	99,99%	78,87%	78,87%	2018	713.773.830	655.089.060	57.601.919
Dimiliki melalui/*Owned through* API									
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (Catatan 1g/ *Notes 1g* [ii])	Jakarta	Operasi jalan tol/ *Toll road operation*	100,00%	45,00%	45,00%	2006	10.807.877.590	8.966.942.359	375.640.508
Dimiliki melalui/*Owned through* TPS									
PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas	Surabaya	Jasa terminal petikemas/ *Container port services*	99,00%	99,00%	99,00%	2016	671.120	667.291	667.790
Dimiliki melalui/*Owned through* BJTI									
PT Berlian Manyar Sejahtera ("BMS")	Surabaya	Layanan terminal/ *Port services*	60,00%	60,00%	60,00%	2012	1.291.838.128	1.076.495.522	990.995.604
PT Pelindo Properti Indonesia ("PPI1")	Surabaya	Pengelolaan properti/ *Property management*	99,91%	99,91%	99,91%	2014	172.213.748	137.354.589	138.227.647
PT Berkah Industri Mesin Angkat ("BIMA")	Surabaya	Jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan/*Port equipment equipment maintenance and repair service*	90,00%	90,00%	90,00%	2015	202.830.021	164.815.343	109.595.952
PT Terminal Curah Semarang ("TCS")	Semarang	Jasa pelayanan curah cair dan gas/*Liquid bulk and gas services*	51,00%	51,00%	51,00%	2015	847.354	2.115.438	53.765.258

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	31 Des/ *Dec 31,* 2020	31 Des/ *Dec 31,* 2019	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	31 Des/ *Dec 31,* 2020	31 Des/ *Dec 31,* 2019
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership* (lanjutan/*continued*)									
Dimiliki melalui/*Owned through* PMS									
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")	Surabaya	Jasa pengerukan, reklamasi dan pengelolaan alur pelayaran/ *Dredging, reclamation Service and management of shipping channel*	90,00%	90,00%	90,00%	2014	586.152.148	520.417.229	528.097.719
PT Pelindo Energi Logistik ("PEL")	Surabaya	Perdagangan jasa/ *Trading services*	98,90%	90,00%	90,00%	2014	494.780.481	520.168.658	551.284.560
PT Berkah Multi Cargo ("BMC")	Surabaya	Jasa angkutan multi moda/*Multi-modal transportation services*	99,80%	99,80%	99,80%	2015	115.931.443	124.434.863	119.883.956
Dimiliki melalui/*Owned through* TTL									
PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI")	Surabaya	Penyediaan energi/ *Energy provider*	99,00%	99,00%	99,00%	2014	179.967.734	154.101.291	135.330.012
Dimiliki melalui/*Owned through* PDS									
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera ("TEDS")	Surabaya	Kegiatan tally/ *Tally activity*	99,00%	99,00%	99,00%	2014	20.843.815	17.233.405	16.039.950
Dimiliki melalui/*Owned through* NTS									
PT Intan Sejahtera Utama ("ISU")	Makassar	Penyedian jasa ketenagakerjaan/ *Employment services provider*	99,60%	99,60%	99,60%	2019	30.695.642	22.759.823	19.966.146
Entitas asosiasi/*Associate entities*									
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP") [vi]	Jakarta	Rumah sakit/ *Hospital*	32,88%	32,88%	99,84%	1999	704.687.910	548.048.589	75.930.021
PT Portek Indonesia	Surabaya	Layanan terminal petikemas/*Stevedoring equipment maintenance*	49,00%	49,00%	49,00%	1999	11.517.531	11.517.531	11.517.531
PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")	Banjarmasin	Pengelolaan alur pelayanan Sungai Barito/*Management of Shipping Barito River*	40,00%	40,00%	40,00%	2004	129.159.146	126.688.061	124.947.401
PT Jasa Marga Bali Tol ("JBT")	Bali	Pengelolaan jalan tol/*Toll road operator*	13,86%	13,86%	17,58%	2011	1.827.452.099	1.820.838.360	1.890.157.490

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2020	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2019	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2020	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2019
Entitas asosiasi/*Associate entities* (lanjutan/*continued*)									
PT Prima Husada Citra ("PHC")	Surabaya	Layanan jasa kesehatan/ *Health care services*	31,73%	31,73%	98,73%	1999	492.692.215	444.415.648	396.148.132
PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 50f/ *Note 50f)*	Jakarta	Terminal petikemas/ *Container terminal*	48,90%	48,90%	48,90%	1999	16.811.477.500	18.098.499.339	42.577.010
Dimiliki melalui/*Owned through* PIL									
PT Prima Tangki Indonesia ("PTI")	Medan	Perdagangan dan pergudangan/ *Trading and warehousing*	20.00%	20,00%	20,00%	2013	212.849.468	212.363.761	21.720.312
Dimiliki melalui/*Owned through* IPC TPK									
PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") (Catatan 50d/ *Note 50d*) [i]	Jakarta	Terminal petikemas/ *Container terminal*	51,00%	51,00%	51,00%	2014	3.725.893.761	3.629.484.871	3.878.213.647
Dimiliki melalui/*Owned through* BJTI									
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("BKMS")	Surabaya	Pengelolaan kawasan industri JIIPE/*JIIPE industrial estate management*	40,00%	40,00%	40,00%	2012	7.111.460.493	6.782.542.323	6.187.896.430
PT Terminal Nilam Utara ("TNU")	Surabaya	Layanan terminal curah cair dan gas/ *Liquid and gas bulk terminal service*	40,00%	40,00%	40,00%	2013	392.687.318	409.267.771	434.556.428
PT Energi Manyar Sejahtera ("EMS")	Surabaya	Jasa pembangkit listrik/*Power plant service*	30,00%	30,00%	30,00%	2015	1.101.761	1.101.762	1.101.762
PT Prima Citra Nutrisi ("PCN")	Surabaya	Layanan jasa katering/*Catering service*	30,00%	30,00%	30,00%	2016	11.471.348	12.608.437	11.118.057
Dimiliki melalui/*Owned through* PEL									
PT Lamong Nusantara Gas ("LNG")	Surabaya	Pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian Terminal LNG Jawa Timur/ *Development, management and operation of LNG terminal in East Java*	49,00%	49,00%	49,00%	2019	148.731.767	148.135.270	145.083.823

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2020	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ *Dec 31,* 2019	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2021	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2020	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2019
Operasi Bersama/*Joint Operation*									
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan 50e/ *Note 50e*).	Jakarta	Terminal petikemas/ *Container terminal*	54,91%	54,91%	54,91%	1994	3.641.898.183	3.718.062.921	520.428.809
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Koja ("MKO MTKI") [iii]	Gresik	Terminal kendaraan/ *Car terminal*	45,00%	45,00%	45,00%	2015	3.048.669	3.083.275	4.339.729

[i]) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1.

[ii]) Pada bulan September 2015, API melakukan akuisisi 45% kepemilikan saham di CTP.

[iii]) Pada bulan April 2015, IKT membentuk manajemen kerjasama operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dengan porsi pendanaan 45%.

[iv]) Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.

[v]) Pada bulan Juli 2018, IKT menerbitkan saham baru sebanyak 509.147.700 saham atau 28% dari modal ditempatkan dan disetor IKT setelah penawaran umum perdana saham IKT di Bursa Efek Indonesia.

[vi]) Pada bulan Agustus 2020, Perusahaan melakukan penjualan saham RSP kepada PT Pertamina Bina Medika IHC sebesar 67% sehingga kepemilikan saham Perusahan menjadi sebesar 32,88% dan karenanya laporan keuangan RSP tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian ini sejak pengendalian telah beralih ke PBM IHC.

[vii]) Pada tanggal 14 April 2021, PPI melakukan setoran saham portepel ke ILCS sebanyak 101.010 lembar saham atau 1% dari total kepemilikan saham ILCS. Sehingga kepemilikan saham ILCS oleh Perusahaan menjadi 99% atau sebanyak 10.000.000 lembar saham.

[viii]) Pada tanggal 16 April 2021, PPI melakukan pembelian saham MMI dari PT PP Properti Tbk sebesar 21,13%, dengan nilai pengalihan sebesar Rp70.087.500. Sehingga kepemilikan PPI atas MMI saat ini adalah sebesar 100% atau setara dengan 3.106.250.000 lembar saham.

[i]) The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1.

[ii]) On September 2015, API performed an acquisition of 45% share of ownership in CTP.

[iii]) On April 2015, IKT establishing joint operation management Maspion Terminal Kendaraan Indonesia with funding portion of 45%.

[iv]) On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

[v]) On July 2018, IKT issued new shares of 509.147.700 shares or 28% of IKT's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

[vi]) On August 2020, the Company sold shares of RSP to PT Pertamina Bina Medika IHC by 67%, bringing the Company's share ownership to 32.88% and therefore the financial statements of RSP have not been consolidated in the consolidated financial statements since control has been transferred to PBM IHC.

[vii]) On April 14, 2021, PPI deposited portfolio stocks to ILCS equivalent to 101.010 shares or 1% of ILCS total share ownership. So, the Company hold the share ownership of ILCS by 99% or equivalent to 10.000.000 shares.

[viii]) On April 16, 2021, PPI purchased MMI shares from PT PP Properti Tbk for 21.13%, with a transfer value of Rp70,087,500. So that the ownership of PPI over MMI currently is 100% or equivalent to 3,106,250,000 shares.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PIL

PIL didirikan berdasarkan akta No. 34 tanggal 26 September 2014 oleh Rahmad Nauli Siregar, SH., Notaris di Medan pada dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- 27882.40.10.2014 tanggal 6 Oktober 2014.

Modal dasar PIL sebesar Rp205.500.000 terdiri atas 205.500 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 99,67% atau sebanyak 204.820 saham dengan nilai sebesar Rp204.820.000.
- Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kota Medan ("Kopkarpel UTPK") memiliki 0,33% atau sebanyak 680 saham dengan nilai sebesar Rp680.000.

Saat ini, PIL bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan multimoda, depo petikemas serta layanan logistik lainnya.

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham PIL milik Perusahaan (dahulu Pelindo I) dialihkan kepada SPSL (Catatan 52f).

PPK

PPK didirikan berdasarkan akta No. 15 tanggal 8 September 2015 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2455231.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 8 September 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PIL

PIL was established based on deed No. 34 dated September 26, 2014 by Rahmad Nauli Siregar, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU- 27882.40.10.2014 dated October 6, 2014.

The authorized capital of PIL amounted to Rp205,500,000 composed of 205,500 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo I) owns 99.67% or 204,820 shares with total amount of Rp204,820,000.*
- *Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kota Medan ("Kopkarpel UTPK") owns 0.33% or 680 shares with total amount of Rp680,000.*

Currently, PIL operates in providing multimode transportation, container yard and other logistic services.

On March 1, 2022, all PIL's shares owned by the Company (formerly Pelindo I) were transferred to SPSL (Note 52f).

PPK

PPK was established based on Deed No. 15 dated September 8, 2015 by Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-2455231.AH.01.01.Tahun.2015 dated September 8, 2015.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPK (lanjutan)

Modal dasar PPK sebesar Rp3.000.000.000 terdiri atas 3.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 90,00% atau sebanyak 759.000 saham dengan nilai sebesar Rp759.000.000
- PMT memiliki 10,00% atau sebanyak 84.333 saham dengan nilai sebesar Rp84.333.000.

Saat ini, PPK bergerak dalam bidang penyewaan properti dan utilitas.

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham PPK milik Perusahaan (dahulu Pelindo I) dialihkan kepada SPSL (Catatan 52f).

PHCM

PHCM didirikan berdasarkan akta No. 4 tanggal 8 November 2016 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052052.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016.

Modal dasar PHCM sebesar Rp20.000.000 terdiri atas 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 99,70% atau sebanyak 15.840 saham dengan nilai sebesar Rp15.840.000.
- Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 0,30% atau sebanyak 50 saham dengan nilai sebesar Rp50.000.

Saat ini, PHCM bergerak dalam bidang rumah sakit dan pelayanan kesehatan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPK (continued)

The authorized capital of PPK amounted to Rp3,000,000,000 composed of 3,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo I) owns 90.00% or 759,000 shares with total amount of Rp759,000,000.*
- *PMT owns 10.00% or 84,333 shares with total amount of Rp84,333,000.*

Currently, PPK operates in real estate and utilities.

On March 1, 2022, all PPK's shares owned by the Company (formerly Pelindo I) were transferred to SPSL (Note 52f).

PHCM

PHCM was established based on deed No. 4 dated November 8, 2016 by Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0052052. AH.01.01.Tahun 2016 dated November 22, 2016.

The authorized capital of PHCM amounted to Rp20,000,000 composed of 20,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo I) owns 99.70% or 15,840 shares with total amount of Rp15,840,000.*
- *Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 0.30% or 50 shares with total amount of Rp50,000.*

Currently, PHCM operates in hospital and health care provider.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP1

PTP1 didirikan berdasarkan akta No. 162 tanggal 30 Juli 2013 oleh Rahmad Nauli Siregar, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 3 September 2013. Perusahaan memulai kegiatan operasional di bulan April 2021.

Modal dasar PTP1 sebesar Rp4.500.000.000 terdiri atas 4.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 623.572.000 saham atau sebesar Rp623.572.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 70% atau sebanyak 436.500.000 saham dengan nilai sebesar Rp436.500.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) memiliki 15% atau sebanyak 93.536.000 saham dengan nilai sebesar Rp93.536.000.
- PT Hutama Karya (Persero) memiliki 15% atau sebanyak 93.536.000 saham dengan nilai sebesar Rp93.536.000.

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 04 Juni 2020 dari Henry Tjong, SH., Notaris di Medan, bahwa saham Perusahaan yang telah disetor dan ditempatkan berjumlah Rp623.572.000. Berdasarkan Keputusan Sirkuler, para Pemegang Saham Perusahaan dengan bulat memutuskan dan menyetujui melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp958.464.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar dan modal ditempatkan /disetor sebesar Rp334.892.000 dengan nominal sebesar Rp1.000 per lembar.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP1

PTP1 was established based on deed No. 162 by July 30, 2013 Rahmad Nauli Siregar, SH., Notary in Medan on, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 3, 2013. The company is started their operational activity in April 2021.

The authorized capital of PTP1 amounted to Rp4,500,000,000 composed of 4,500,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp623,572,000 composed of 623,572,000 shares with share ownership as follows:

- *The Company (formerly Pelindo I) owns 70% or 436,500,000 shares with total amount of Rp436,500,000.*
- *PT Wijaya Karya (Persero) owns 15% or 93,536,000 shares with total amount of Rp93,536,000.*
- *PT Hutama Karya (Persero) owns 15% or 93,536,000 shares with total amount of Rp93,536,000.*

Based on Deed No. 04 dated June 04, 2020 by Henry Tjong, SH., Notary in Medan, that the Company's paid-up and issued shares amounted to Rp623,572,000. Based on the Circular Decision, the Shareholders of the Company unanimously decided and agreed to increase the authorized capital to Rp958,464,000 with a nominal value of Rp1,000 per share and the issued/paid-up capital of Rp334,892,000 with a nominal value of Rp1,000 per share.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP1 (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 30 Juli 2020 dari Henry Tjong, SH., Notaris di Medan, para Pemegang Saham Perusahaan dengan bulat memutuskan dan menyetujui melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp4.500.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar dan modal ditempatkan /disetor sebesar Rp264.000.000 dengan nominal sebesar Rp1.000 per lembar. Sehingga modal disetor semula sebesar 958.464.000 menjadi sebesar Rp1.222.464.000. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 70% atau sebanyak 855.724.000 saham dengan nilai sebesar Rp855.724.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) memiliki 15% atau sebanyak 183.370.000 saham dengan nilai sebesar Rp183.370.000.
- PT Hutama Karya (Persero) memiliki 15% atau sebanyak 183.370.000 saham dengan nilai sebesar Rp183.370.000.

Saat ini, PTP1 bergerak dalam bidang pengoperasian terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya di Belawan.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham PTP1 milik Perusahaan (dahulu Pelindo I) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

PMT

PMT didirikan berdasarkan akta No. 04 tanggal 26 September 2014 oleh Tuti Sumarni, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26883.40.10.2014 tanggal 29 September 2014.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP1 (continued)

Based on Deed No. 36 dated July 30, 2020 from Henry Tjong, SH., Notary in Medan, the Shareholders of the Company unanimously decided and agreed to increase the authorized capital to Rp4,500,000,000 with a nominal value of Rp.1,000 per share and issued/paid-up capital of Rp264.000,000 with a nominal value of Rp. 1,000 per share. So that the paid-up capital was originally 958,464,000 to Rp1,222,464,000. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo I) owns 70% or 855,724,000 shares with total amount of Rp855,724,000.*
- *PT Wijaya Karya (Persero) owns 15% or 183,370,000 shares with total amount of Rp183,370,000.*
- *PT Hutama Karya (Persero) owns 15% or 183,370,000 shares with total amount of Rp183,370,000.*

Currently, PTP1 operates in providing container services and other port services in Belawan.

On January 3, 2022, all PTP1's shares owned by the Company (formerly Pelindo I) were transferred to SPTP (Note 52e).

PMT

PMT was established based on deed No. 04 dated September 26, 2014 by Tuti Sumarni, SH., Notary in Jakarta, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU- 26883.40.10.2014 dated September 29, 2014.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PMT (lanjutan)

Modal dasar PMT sebesar Rp3.177.000.000 terdiri atas 3.177.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 55% atau sebanyak 807.048 saham dengan nilai sebesar Rp807.048.000.
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 366.840 saham dengan nilai sebesar Rp366.840.000.
- PT Waskita Karya (Persero) memiliki 20% atau sebanyak 293.472 saham dengan nilai sebesar Rp293.472.000.

PMP

PMP didirikan berdasarkan akta No. 74 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Hj. Bambang Suprianto, SH., Sp.N., M.H di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006164.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019.

Modal dasar PMP sebesar Rp50.000.000 terdiri atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PIL memiliki 99% atau sebanyak 12.375 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.375.000.
- PMT memiliki 1% atau sebanyak 125 saham dengan nilai nominal sebesar Rp125.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PMT (continued)

The authorized capital of PMT amounted to Rp3,177,000,000 composed of 3,177,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo I) owns 55% or 807,048 shares with total amount of Rp807,048,000.*
- *PT Pembangunan Perumahan (Persero) owns 25% or 366,840 shares with total amount of Rp366,840,000.*
- *PT Waskita Karya (Persero) owns 20% or 293,472 shares with total amount of Rp293,472,000.*

PMP

PMP was established based on deed No. 74 dated December 28, 2018 made by Notary Hj. Bambang Suprianto, SH., Sp.N., MH in Jakarta and got approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0006164.AH.01.01.Tahun 2019 dated February 6, 2019.

The authorized capital of PMP amounted to Rp50,000,000 composed of 50,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *PIL owns 99% or 12,375 shares with total amount of Rp12,375,000.*
- *PMT owns 1% or 125 shares with total amount of Rp125,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTI

PTI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 12 Desember 2013 oleh Rahmad Nauli Siregar SH., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-68302.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013.

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 27 April 2016 oleh Ashoya Ratam, SH., M.kn, Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PIL telah menyertakan saham sebanyak 18.000 lembar saham PTI, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- 0008200.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Charleston Logistics Pte. Ltd. memiliki 49,00% atau sebanyak 88.200 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp44.100.000.
- PT Tason Putra Mandiri memiliki 22,80% atau sebanyak 41.040 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20.520.000.
- PIL memiliki 20,00% atau 36.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000.
- Tuan Gaotama Setiawan memiliki 8,20% atau 14.760 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.380.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTI

PTI was established under Notarial Deed No. 41 dated December 12, 2013 of Public Notary Rahmad Nauli Siregar, SH., and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU- 68302.AH.01.01.Tahun 2013 dated December 27, 2013.

Based on Deed No. 65 dated April 27, 2016 by Ashoya Ratam, SH., M.kn, Notary in Jakarta concerning the Declaration of Decisions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders', PIL has been approved to purchase of 18,000 shares in PTI, and the deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0008200.AH.01.02.Tahun 2016 dated April 28, 2016.

The capital share ownership of issued and fully paid capital are as follows:

- *Charleston Logistics Pte. Ltd. owns 49.00% or 88,200 shares with nominal amount of Rp44,100,000.*
- *PT Tason Putra Mandiri owns 22.80% or 41,040 shares with nominal amount of Rp20,520,000.*
- *PIL owns 20.00% or 36,000 shares with nominal amount of Rp18,000,000.*
- *Mr. Gaotama Setiawan owns 8.20% or 14,760 shares with nominal amount of Rp7,380,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

EDII

EDII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

Modal dasar EDII adalah sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 51,00% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.
- PT Sisindokom Teknologi memiliki 49,00% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, *transfer* data, penjualan piranti lunak dan pelayanan administrasi efek.

MTI

MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

EDII

EDII was established based on Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1995 of Sulami Mustafa, S.H and was approved by Minister of Justice in Decree No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

The authorized capital of EDII amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000,000 shares with share ownership as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 51.00% or 12,750,000 shares amounting to Rp12,750,000.*
- *PT Sisindokom Teknologi owns 49.00% or 12,250,000 shares amounting to Rp12,250,000.*

Currently, EDII's activities consist of providing of information data, data transfer, software sales and securities administration services.

MTI

MTI was established based on Notarial Deed of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15, 2002. The establishment of MTI was approved by Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal April 11, 2002.

The authorized capital of MTI amounted to Rp28,500,000 composed of 57,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp17,314,719 composed of 34,629,439 shares.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1,00% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang jasa transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, dan kepabeanan.

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham MTI milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPSL (Catatan 52f).

RSP

RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Nelly Elsye Tahamata. SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999.

Modal dasar RSP sebesar Rp153.979.000 terdiri dari 153.979 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PT Pertamina Bina Medika IHC ("PBM IHC") melakukan pengambilalihan 103.166 lembar saham RSP yang dimiliki oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) (67%) senilai Rp167.500.000.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pengambilalihan saham tersebut sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,88% atau sebanyak 153.799 saham dengan nilai nominal sebesar Rp15.379.900.000.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,12% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MTI (continued)

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 34,283,150 shares with total amount of Rp17,141,575.*
- *Koperasi Pegawai Maritim owns 1.00% or 346,289 shares with total amount of Rp173,144.*

Currently, MTI's activities are in transportation, warehousing, cargo consolidation, cargo space provision and customs services.

On March 1, 2022, all MTI's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPSL (Note 52f).

RSP

RSP was established based on Establishment Notarial Deed of Notary Nelly Elsye Tahamata, S.H., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia with the Decree No. C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.

The authorized capital RSP of Rp153,979,000 composed of 153,979 shares with par value Rp1,000,000 (full amount) per share.

Based on Decision-Shares Conditional Agreement on June 30, 2020, PT Pertamina Bina Medika IHC ("PBM IHC") takeover RSP 103,166 shares owned by the Company (formerly Pelindo II) (67%) worth Rp167,500,000.

The capital share ownership of issued and fully paid capital before shares takeover is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.88% or 153,799 shares with total amount of Rp15,379,900,000.*
- *Koperasi Pegawai Maritim owns 0.12% or 180 shares with total amount of Rp180,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

RSP (lanjutan)

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pengambilalihan saham tersebut dan pada tanggal 1 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

- PBM IHC memiliki 67% atau sebanyak 103.166 saham dengan nilai nominal sebesar Rp103.166.000.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 32,88% atau sebanyak 50.633 saham dengan nilai nominal sebesar Rp50.633.000.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,12% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

IKT

IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IKT No. 19 tanggal 18 Juli 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, atau sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana IKT, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, termasuk pengalokasian sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari saham baru yang dikeluarkan dengan program ESA (*Employee Stock Option Allocation*).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

RSP (continued)

The capital share ownership of issued and fully paid capital after shares takeover and as of October 1, 2021 is as follows:

- *PBM IHC owns 67% or 103,166 shares with total amount of Rp103,166,000.*
- *The Company (formerly Pelindo II) owns 32.88% or 50,633 shares with total amount of Rp50,633,000.*
- *Koperasi Pegawai Maritim owns 0.12% or 180 shares with total amount of Rp180,000.*

Currently, RSP activities are in health services and other health support services.

IKT

IKT was established based on Notarial Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, SH., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IKT was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 dated November 19, 2012.

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of IKT No. 19 dated July 18, 2018 by Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed, amount of shares issued in the context of Public Offering were at most 30% from the issued and paid-up capital after the Public Offering has been completed, or no more than 557,142,800 of new shares offered to the public through the IKT's Initial Public Offering, each with nominal value of Rp100 (full amount) per share, including allocation of at most 10% of new shares issued with the ESA (Employee Stock Option Allocation) program.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IKT (lanjutan)

Modal dasar IKT sebesar Rp181.838.482 terdiri dari 1.818.384.820 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh IKT adalah sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 71,28% atau sebanyak 1.296.144.749 saham dengan nilai sebesar Rp129.614.475.
- MTI memiliki 0,72% atau sebanyak 13.092.371 saham dengan nilai sebesar Rp1.309.237.
- PII memiliki 5,54% atau sebanyak 100.682.600 saham dengan nilai sebesar Rp10.068.260.
- Masyarakat memiliki 22,46% atau sebanyak 408.465.100 saham dengan nilai sebesar Rp40.846.510.

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham IKT milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPMT (Catatan 52c).

ILCS

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49,00% porsi kepemilikan saham ILCS.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IKT (continued)

The authorized capital of IKT amounting Rp181,838,482 consisted of 1,818,384,820 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of issued and paid-up capital of IKT are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 71.28% or 1,296,144,749 shares with total amount of Rp129,614,475.*
- *MTI owns 0.72% or 13,092,371 shares with total amount of Rp1,309,237.*
- *PII owns 5.54% or 100,682,600 shares with total amount of Rp10,068,260.*
- *Public owns 22.46% or 408,465,100 shares with total amount of Rp40,846,510.*

Currently, IKT's activities consist of car terminal management, stevedoring/cargodoring, yard operation and other logistic services.

On January 3, 2022, all IKT's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPMT (Note 52c).

ILCS

ILCS was established based on Notarial Deed No. 11 dated September 21, 2012 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. The establishment of ILCS was approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 dated September 26, 2012.

The authorized capital of ILCS amounted to Rp400,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share.

On October 9, 2020, the Company (formerly Pelindo II) acquired the share ownership of PT Multimedia Nusantara in ILCS of 4,900,000 shares or equivalent to 49.00% of the share ownership of ILCS.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

ILCS (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 14 September 2021 oleh Notaris Refki Ridwan, S.H, M.BA, Sp.N, PPI menyetorkan saham dalam portepel sejumlah 101.010 lembar saham pada ILCS dengan nilai Rp1.010.100. Penyetoran saham dalam portepel tersebut telah disetujui oleh pemegang saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham No. PR.03/7/4/1/PCB/UT/PI.II-21.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum penyetoran saham tersebut sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 100,00% atau sebanyak 10.000.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp100.000.000.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah penyetoran saham tersebut sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 10.000.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp100.000.000.
- PPI memiliki 1,00% atau sebanyak 101.010 lembar saham dengan nilai sebesar Rp1.010.100.

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa *e-commerce*, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

ILCS (continued)

Based on Deed No. 12 on September 14, 2021 by Notary Refki Ridwan, S.H, M.BA, Sp.N, PPI deposited portfolio stocks amounted 101,010 shares in ILCS with transfer value of Rp1,010,100. The deposit of portfolio stocks has been approved by the shareholders based on the Decision of the Shareholders Without Going Through The General Meeting of Shareholders No. PR.03/7/4/1/PCB/UT/PI.II-21.

The capital share ownership of issued and fully paid capital before shares deposits is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 100.00% or 10,000,000 shares with total amount of Rp100,000,000.*

The capital share ownership of issued and fully paid capital before shares depositis as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 10,000,000 shares with total amount of Rp100,000,000.*
- *PPI owns 1.00% or 101,010 shares with total amount of Rp1,010,100.*

Currently, ILCS' activities consist of providing e-trade logistic services and other services including data management, e-commerce, consultation on computing and informatics engineering services, software development services, multimedia provision and utilization through telecommunication hardware and consultation in information technology services.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPI

PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan (dahulu Pelindo II) melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan MTI masing-masing sebesar Rp224.750.000 dan Rp250.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-0019856.AH.01.02 tanggal 25 September 2018.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 37 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam PPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp342.000.

Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,89% atau sebanyak 22.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp224.750.000.
- PII memiliki 0,11% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPI

PPI was established based on Notarial Deed No. 9 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Deed No. 11 dated September 13, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company (formerly Pelindo II) increased the authorized capital to Rp900,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp225,000,000 which was subscribed by the Company (formerly Pelindo II) and MTI amounting to Rp224,750,000 and Rp250,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0019856.AH.01.02 dated September 25, 2018.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 37 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in PPI to PII with a buying price of Rp342,000.

The authorized capital of PPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.89% or 22,475,000 shares with total amount of Rp224,750,000.*
- *PII owns 0.11% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPI (lanjutan)

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pengembangan pelabuhan.

Pada tanggal 17 Februari 2022, PPI berubah nama menjadi PT Pelindo Solusi Logistik (Catatan 52c).

JPPI

JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam JPPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp227.500.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*), serta bidang usaha terkait.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPI (continued)

Currently, PPI engages in port development.

On February 17, 2022, PPI change its company name to PT Pelindo Solusi Logistik (Note 52c).

JPPI

JPPI was established based on Notarial Deed No. 8 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in JPPI to PII with a buying price of Rp227,500.

The authorized capital of JPPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.*
- *PII owns 1.00% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.*

Currently, JPPI activities are in providing technical activities including installation, reparation and maintenance and installation of technical tools, installation of equipment for water, gas, telecommunication, electrical and mechanical and boiler/pressure vessel and the related activities.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JPPI (lanjutan)

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham JPPI milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

EPI

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

Modal dasar EPI sebesar Rp174.543.000 terdiri dari 17.454.300 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 55,00% atau sebanyak 2.400.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.000.000.
- PT Haleyora Power memiliki 45,00% atau sebanyak 1.963.575 saham dengan nilai sebesar Rp19.635.750.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik dan penyediaan air bersih di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham EPI milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

Rukindo

Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JPPI (continued)

On January 3, 2022, all JPPI's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPJM (Note 52d).

EPI

EPI was established based on Notarial Deed No. 11 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.

The authorized capital of EPI amounted to Rp174,543,000 composed of 17,454,300 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 55.00% or 2,400,000 shares with total amount of Rp24,000,000.*
- *PT Haleyora Power owns 45.00% or 1,963,575 shares with total amount of Rp19,635,750.*

Currently, EPI's activities consist of providing electrical supply and supplying treated water on port areas and surrounding.

On January 3, 2022, all EPI's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPJM (Note 52d).

Rukindo

Rukindo was established under the name of PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2 dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of Notary Imas Fatimah, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Rukindo (lanjutan)

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 47 tanggal 28 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan (dahulu Pelindo II) menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp195.000.000 yang akan dikonversi menjadi modal pada akhir tahun ke-10 (sepuluh). Saham yang diterbitkan sejumlah 195.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima 70.000 saham baru sebagai hasil konversi utang Rukindo kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II). Kepemilikan saham Perusahaan (dahulu Pelindo II) di Rukindo bertambah menjadi 99,93%.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,93% atau sebanyak 806.622 saham dengan nilai sebesar Rp806.622.000.
- PPI memiliki 0,07% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham Rukindo milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Rukindo (continued)

The authorized capital of Rukindo amounted to Rp2,000,000,000 composed of 2,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 47 dated December 28, 2017, the Company's (formerly Pelindo II) shareholders approved the following matters:

- *Increase in the issued and paid capital from Rp195,000,000 which will be converted into capital at the end of 10 (ten) year. The issued shares amounted to 195,000 shares with a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.*

Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated December 28, 2017, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-AH.01.03-0007913 dated January 10, 2018, the Company (formerly Pelindo II) received 70,000 newly-issued shares as a result of the conversion of Rukindo's payable to the Company (formerly Pelindo II). The Company's (formerly Pelindo II) shares ownership in Rukindo increased to 99.93%.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.93% or 806,622 shares with total amount of Rp806,622,000.*
- *PPI owns 0.07% or 542 shares with total amount of Rp542,000.*

Currently, Rukindo's main activities consist of dredging of sail navigation channel, port basin, reclamation and transportation of dredging products.

On January 3, 2022, all Rukindo shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPJM (Note 52d).

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JAI

JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JAI No. 14 tanggal 11 Oktober 2017 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham JAI menyetujui diantaranya:

- Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Pengeluaran saham dari portopel JAI, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.743.987.600 saham baru, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham JAI.
- Meningkatkan modal dasar JAI dari sebesar Rp100.000.000 menjadi Rp1.500.000.000, yang terbagi atas 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp58.000.000 menjadi Rp406.930.460 dimana peningkatan sebesar Rp348.930.460 atau sebesar 3.489.304.600 saham dilakukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) melalui inbreng 21 unit kapal, terdiri dari 9 unit kapal pandu, 10 unit kapal tunda dan 2 unit kapal kepil. Inbreng kapal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dengan hasil penilaian No. P.PP.17.00.0111 tanggal 9 Juni 2017.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JAI

JAI was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 9, 2013.

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of JAI No. 14 dated October 11, 2017 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, JAI's shareholders agree among others:

- *Change in par value of share from Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share.*
- *Issuance of shares from JAI's portfolio, which represents new shares issued from the portfolio of as much as 30% of the issued and paid-up capital after the public offering has been completed or as much as 1,743,987,600 new shares, offered to the public through initial public offering.*
- *Increase of the authorized share capital of JAI from Rp100,000,000 to Rp1,500,000,000, divided into 15,000,000,000 shares at par value of Rp100 (full amount) per share and the increase of issued and paid-up capital from Rp58,000,000 to Rp406,930,460 whereby an increase of Rp348,930,460 or 3,489,304,600 shares was performed by the Company (formerly Pelindo II) through injection of 21 units of vessels, consist of 9 units of pilotage vessels, 10 units of tug vessels and 2 units of mooring vessels. Injection of vessels has been appraised by KJPP Toto Suharto & Partners through appraisal report No. P.PP.17.00.0111 dated June 9, 2017.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JAI (lanjutan)

Modal dasar JAI sebesar Rp1.500.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 76,89% atau sebanyak 4.063.504.600 saham dengan nilai sebesar Rp406.350.460.
- MTI memiliki 0,11% atau sebanyak 5.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.
- PII memiliki 10,78% atau sebanyak 569.551.400 saham dengan nilai sebesar Rp56.955.140.
- Masyarakat memiliki 12,07% atau sebanyak 637.915.300 saham dengan nilai sebesar Rp63.791.530.
- Saham treasuri 0,15% atau sebanyak 8.039.800 saham dengan nilai sebesar Rp803.980

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham JAI milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

PMLI

PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JAI (continued)

The authorized capital of JAI amounted to Rp1,500,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 76.89% or 4,063,504,600 shares with total amount of Rp406,350,460.*
- *MTI owns 0.11% or 5,800,000 shares with total amount of Rp580,000.*
- *PII owns 10.78% or 569,551,400 shares with total amount of Rp56,955,140.*
- *Public owns 12.07% or 637,915,300 shares with total amount of Rp63,791,530.*
- *Treasury stock 0.15% or 8,039,800 shares with total amount Rp803,980*

Currently, JAI's activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

On January 3, 2022, all JAI's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPJM (Note 52d).

PMLI

PMLI was established based on Notarial Deed No. 26 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PMLI was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 2, 2013.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PMLI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 1 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 300 saham yang ada dalam PMLI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp173.500.

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan, pelatihan, konsultasi di bidang maritim dan logistik serta mengelola fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

PTP

PTP didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PMLI (continued)

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 1 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 300 shares in PMLI to PII with a buying price of Rp173,500.

The authorized capital of PMLI amounted to Rp120,000,000 composed of 120,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 29,700 shares with total amount of Rp29,700,000.*
- *PII owns 1.00% or 300 shares with total amount of Rp300,000.*

Currently, PMLI's activities consist of providing educational, training services, consultation on maritime and logistic areas and also managing facilities and infrastructure of education and training.

PTP

PTP was established based on Notarial Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PTP was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian No.HK.566/20/13/PI/II-13 tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PTP mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo II) setuju untuk memberikan hak kepada PTP untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan lahan pelabuhan yang merupakan aset milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 dan No. HK.566/27/12/1/PTP-17 tanggal 27 Desember 2017 dimana PTP dan Perusahaan (dahulu Pelindo II) sepakat, diantaranya untuk tidak lagi mengadakan kerjasama serah operasi Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam PTP kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp16.549.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI/II-13, dated December 27, 2013, the Company (formerly Pelindo II) and PTP entered into Agreement of Handover of Port Facilities, Port Supporting Facilities and Land under Right to Operate (HPL) of the Company (fomerly Pelindo II) on Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, the Company (formerly Pelindo II) agreed to provide the rights to PTP to operate port facilities and port supporting facilities also the land owned by the Company (formerly Pelindo II) to perform Port Services and other services based on the terms and condition stipulated in the agreement. This agreement have been extended several times. Recently with addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 and No. HK.566/27/12/1/PTP-17 dated on December 27, 2017 whereas PTP and the Company (formerly Pelindo II) agreed among others, to no longer holding the cooperation of handover of the Right to Operate (HPL) owned by Company's (formerly Pelindo II) Tanjung Priok Branch.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 29 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in PTP to PII with a buying price of Rp16,549,000.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan (dahulu Pelindo II) tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, diatur mengenai zonasi bisnis PTP di cabang pelabuhan Perusahaan (dahulu Pelindo II), termasuk kegiatan pengoperasian dan pola kerjasama serta pembagiannya.

Pada tanggal 16 Juli 2018, PTP melakukan *spin-off* operasi petikemasnya di pelabuhan Tanjung Priok kepada IPC TPK, pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Juli 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) cabang Bengkulu dan Jambi terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 Agustus 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) cabang Panjang terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 September 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) cabang Banten terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

The authorized capital of PTP amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.*
- *PII owns 1.00% or 250 shares with total amount of Rp250,000.*

Based on Company's (formerly Pelindo II) Directors' Decision Letter dated December 22, 2017, as has been amended on May 18, 2018, it regulated PTP's business zonation in Company's (formerly Pelindo II) port branches, including the operational activities as well as the agreement scheme and allocation.

On July 16, 2018, PTP spins-off its container operation in Tanjung Priok port to IPC TPK, a related party.

On July 31, 2018, PTP cooperates with Company's (formerly Pelindo II) Bengkulu branch and Jambi branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On August 1, 2018, PTP cooperates with Company's (formerly Pelindo II) Panjang branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On September 1, 2018, PTP cooperates with Company's (formerly Pelindo II) Banten branch in relation to operational and management of non-container terminal.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2019, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) cabang Palembang, Pangkal Balam, Cirebon dan Tanjung Pandan terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 Juli 2019, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) cabang Teluk Bayur terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham PTP milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPMT (Catatan 52c).

IPC TPK

IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam IPC TPK kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp7.915.500.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

On January 1, 2019, PTP cooperates with the Company's (formerly Pelindo II) Palembang branch, Pangkal Balam branch, Cirebon branch and Tanjung Pandan branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On July 1, 2019, PTP cooperates with the Company's (formerly Pelindo II) Teluk Bayur branch in relation to operational and management of non-container terminal.

Currently, PTP's activities consist of container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

On January 3, 2022, all PTP's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPMT (Note 52c).

IPC TPK

IPC TPK was established based on Notarial Deed No. 25 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IPC TPK was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 dated July 25, 2013.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 36 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in IPC TPK to PII with a buying price of Rp7,915,500.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IPC TPK (lanjutan)

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham IPC TPK milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

PII

PII didirikan berdasarkan Akta No. 112 tanggal 17 November 2017 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

Modal dasar PII sebesar Rp800.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 198.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp198.000.000.
- MTI memiliki 1,00% atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.

Saat ini, PII bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan maupun jasa terkait kepelabuhanan lainnya, investasi di pasar modal dan pasar uang, jasa konsultasi bisnis serta bertindak sebagai penasihat.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IPC TPK (continued)

The authorized capital of IPC TPK amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.*
- *PII owns 1.00% or 250 shares with total amount of Rp250,000.*

Currently, IPC TPK's activities consist of container terminal services and other port services.

On January 3, 2022, all IPC TPK's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPTP (Note 52e).

PII

PII was established based on Deed No. 112 dated November 17, 2017 of Notary Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision letter No. AHU-0052776.AH.01.01.Tahun 2017 dated November 21, 2017.

The authorized capital of PII amounted to Rp800,000,000 which is divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 198,000 shares with total amount of Rp198,000,000.*
- *MTI owns 1.00% or 2,000 shares with total amount of Rp2,000,000.*

Currently, PII's activities consist of investment in companies engaged in port services and other port related services, investment in capital markets and money markets, business consultancy services and acting as advisor.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

API

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014. Anggaran Dasar API telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan (dahulu Pelindo II) melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

API

API was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014. API's Articles of Association has been amended based on Deed No. 29 dated March 26, 2015 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, regarding the increase in authorized and paid-in capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 dated April 27, 2015.

Based on Deed No. 33 dated December 21, 2017 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company (formerly Pelindo II) increased the authorized capital to Rp1,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp386,000,000 which was subscribed by PPI and PTP amounting to Rp382,140,000 and Rp3,860,000, respectively. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0027756.AH.01.02. TAHUN 2017 dated December 27, 2017.

Based on Deed No. 26 dated December 28, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the issued and fully paid capital to Rp805,760,000 which was subscribed by PPI and PTP amounted to Rp801,900,000 and Rp3,860,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

API (lanjutan)

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 99,52% atau sebanyak 80.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp801.900.000.
- PTP memiliki 0,48% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.

Saat ini, kegiatan API terutama terkonsentrasi pada investasi pada CTP, entitas asosiasi yang bergerak dalam penyelenggaraan proyek jalan tol.

NPCT1

NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC TPK memiliki 51,00% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki 49,00% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

Saat ini, NPCT1 bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat barang.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

API (continued)

The capital share ownership of issued and fully paid capital are as follows:

- *PPI owns 99.52% or 80,190,000 shares with total amount of Rp801,900,000.*
- *PTP owns 0.48% or 386,000 shares with total amount of Rp3,860,000.*

Currently, the API's activities are primarily concentrated on investment in CTP, an associate which is engaged in a toll road project.

NPCT1

NPCT1 was established based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

The authorized capital of NPCT1 amounted to Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital are as follows:

- *IPC TPK owns 51.00% or 510 Class A shares with total amount of Rp173,770,056.*
- *Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49.00% or 490 Class B shares with total amount of Rp166,955,544.*

Currently, NPCT1 engage in cargo handling services.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JICT

JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsye Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 tanggal 29 Maret 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsye Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut (Catatan 50f, 50g, 50h dan 50i):

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 48,90% atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,10% atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) memiliki 51,00% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JICT

JICT was established based on Notarial Deed No. 72 dated March 27, 1999 of Notary Nelly Elsye Tahamata, S.H., M.Kn. The establishment of JICT was approved by Minister of Law and Human Rights No. C-5466.HT.01.01.TH'99 dated March 29, 1999.

Based on Deed of Amendment No. 77 and 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsye Tahamata, S.H., the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406, comprising of 1 Series A share for The Government of Republic of Indonesia portion and 442,900,812 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows (Note 50f, 50g, 50h and 50i):

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 48.90% or 216,578,498 Series B shares with total amount of Rp108,289,249.*
- *Koperasi Pegawai Maritim owns 0.10% or 442,899 Series B shares with total amount of Rp221,449.*
- *Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51.00% or 225,879,415 Series B shares with total amount of Rp112,939,707.*

Currently, JICT's activities consist of port services, container terminal services, dockyard and other related services.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 ("Amendemen I") dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 ("Amendemen II"), tanggal 5 Agustus 2014 ("Amendemen III") dan tanggal 22 Juni 2015. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Maret 2039 (Catatan 50e).

Proporsi investasi partisipan untuk tahun 2021 adalah 54,91% untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan 45,09% untuk HPI.

Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas.

CTP

Berdasarkan Perjanjian Pengambilbagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham MTDX tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, API, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di MTDX dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan MTDX. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan API menjadi pemilik 45,00% saham MTDX.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja was established based on Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Imas Fatimah, S.H. and on Master Cooperation Agreement dated August 16, 1994 between the Company (formerly Pelindo II) and PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). The agreement was substantially revised on March 26, 1999 ("Amendment I") and revised further on June 22, 2011 ("Amendment II"), August 5, 2014 ("Amendment III") and June 22, 2015. The term of the agreement is 20 (twenty) years from the date of commencement of full commercial operations on November 1, 1998 and has been extended until March 26, 2039 (Note 50e).

The investment proportions of the participants for the year 2021 are 54.91% for the Company (formerly Pelindo II) and 45.09% for HPI.

Currently, TPK Koja's activities consist of operating and managing a container port and terminal.

CTP

Based on Conditional Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement of MTDX dated April 14, 2015, which was amended and restated on August 28, 2015, API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in MTDX by subscribing to 130,220 new shares with a total nominal amount of Rp118,500,200 (representing 45% share ownership) issued by MTDX. On September 18, 2015, the transaction was completed and API became the owner of 45.00% shares in MTDX.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

CTP (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX mengganti nama menjadi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0011468.AH.01.02 tanggal 26 Mei 2017.

Pada bulan Oktober 2021, API meningkatkan kepemilkan saham di CTP dari 45,00% menjadi 100,00% (Catatan 1g).

MKO MTKI

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 (dua puluh lima) tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45,00% dan 55,00%.

Pada bulan Maret 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia telah beroperasi secara komersial dan bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan.

MMI

MMI didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Juli 2018 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018.

Modal dasar MMI sebesar Rp350.000.000 yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

CTP (continued)

Based on Deed No. 17 dated May 24, 2017 drawn before Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX change the name to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0011468.AH.01.02 dated May 26, 2017.

On October 2021, API increase share ownership in CTP from 45.00% to 100.00% (Note 1g).

MKO MTKI

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 (twenty five) years with the funding portion for IKT and MIE amounted to 45.00% and 55.00%, respectively.

On March, 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia has operated commercially and engages in car terminal operation.

MMI

MMI was established based on Deed No. 16 dated July 5, 2018 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0033122.AH.01.01.Tahun 2018 dated July 16, 2018.

The authorized capital of MMI amounted to Rp350,000,000 which is divided into 350,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MMI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MMI No. 54 tanggal 16 April 2021, PPI mengakuisisi kepemilikan saham PT PP Properti Tbk pada MMI sebanyak 656.250.000 lembar saham atau setara dengan 21,13% porsi kepemilikan saham MMI dengan nilai pengalihan sebesar Rp70.087.500.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pengambilalihan saham tersebut sebagai berikut:

- PPI memiliki 78,87% atau sebanyak 2.450.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp245.000.000.
- PT PP Properti Tbk memiliki 21,13% atau sebanyak 656.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp65.625.000.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah pengambilalihan saham tersebut sebagai berikut:

- PPI memiliki 100,00% atau sebanyak 3.106.250.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp310.625.000.

Saat ini, MMI belum melakukan kegiatan komersial.

Pada tanggal 17 Februari 2022, PPI berubah nama menjadi PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) (Catatan 52c).

TPS

TPS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 1999 oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No.C-6465 HT.01.01 Th.99 tanggal 9 April 1999.

Modal dasar TPS sebesar Rp127.884.057 terdiri dari 255.768.116 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MMI (continued)

Based on the Decision of the Meeting Deed of MMI No. 54 dated April 16, 2021, PPI acquired the share ownership of PT PP Properti Tbk in MMI of 656,250,000 shares or equivalent to 21,13% of the share ownership of MMI with transfer value of Rp70,087,500.

The capital share ownership of issued and fully paid capital before shares takeover is as follows:

- *PPI owns 78.87% or 2,450,000,000 shares with total amount of Rp245,000,000*
- *PT PP Properti Tbk owns 21.13% or 656,250,000 shares with total amount of Rp65,625,000.*

The capital share ownership of issued and fully paid capital after shares takeover is as follows:

- *PPI owns 100.00% or 3,106,250,000 shares with total amount of Rp310,625,000.*

At the moment, MMI has not performed any commercial activities.

On February 17, 2022, PPI change its company name to PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) (Note 52c).

TPS

TPS was established under the Notarial Deed No. 1 dated April 1, 1999 of Notary Rahmat Santoso, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-6465 HT.01.01 Th.99 dated April 9, 1999.

The authorized capital of TPS amounted to Rp127,884,057 composed of 255,768,116 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPS (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 50,50% atau sebanyak 129.162.897 saham dengan nilai nominal Rp64.581.448.
- P&O Dover memiliki 49,00% atau sebanyak 125.326.377 saham dengan nilai nominal Rp62.663.188.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau sebanyak 1.278.841 saham dengan nilai nominal Rp639.420.

Berdasarkan Akta Notaris No. 143 tanggal 28 April 2019, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, mengenai Perjanjian Pemindahan Hak (Jual Beli) Saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 99,50% atau sebanyak 254.489.274 saham dengan nilai nominal Rp127.244.637.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau sebanyak 1.278.841 saham dengan nilai nominal Rp639.420.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham TPS milik Perusahaan (dahulu Pelindo III) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

BJTI

BJTI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 9 Januari 2002 oleh Notaris Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 tanggal 5 Maret 2002.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPS (continued)

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 50.50% or 129,162,897 shares with total amount of Rp64,581,448.*
- *P&O Dover owns 49.00% or 125,326,377 shares with total amount of Rp62,663,188.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 1,278,841 shares with total amount of Rp639,420.*

Based on Notarial Deed No. 143 dated April 28, 2019, by Notary Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notary in Surabaya, regarding the Agreement on Transfer of Rights (Sale and Purchase) of Shares. The composition of the issued and fully paid capital as of January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 99.50% or 254,489,274 shares with total amount of Rp127,244,637.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 1,278,841 shares with total amount of Rp639,420.*

On January 3, 2022, all TPS's shares owned by the Company (formerly Pelindo III) were transferred to SPTP (Note 52e).

BJTI

BJTI was established under the Notarial Deed No. 1 dated January 9, 2002 of Notary Moendjiati Soegito S.H., Notary in Jakarta, and was approved Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 dated March 5, 2002.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

BJTI (lanjutan)

Anggaran Dasar BJTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 1 tanggal 1 Maret 2017 oleh Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2017 dan peningkatan modal dasar menjadi Rp4.000.000.000 terbagi atas 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham dan persetujuan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp1.114.310.000 terbagi atas 1.114.310 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-0006656.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 18 Maret 2017.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (Pelindo III) memiliki 96,84% atau sebanyak 1.079.138 saham dengan nilai sebesar Rp1.079.138.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 3,16% atau sebanyak 35.172 saham dengan nilai nominal sebesar Rp35.172.000.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham BJTI milik Perusahaan (dahulu Pelindo III) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

PMS

PMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 31 Desember 2011 oleh Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-34988.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.

Modal dasar PMS sebesar Rp260.500.000 terdiri dari 260.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

BJTI (continued)

BJTI's Articles of Association has been amended several times, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 1 dated March 1, 2017 by Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the approval of Company's Budget Plan (RKAP) year 2017 and increase of authorized capital to become Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and approval of reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp1,114,310,000 divided into 1,114,310 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0006656.AH.01.02. Year 2017 dated March 18, 2017.

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 96.84% or 1,079,138 shares amounting to Rp1,079,138,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 3.16% or 35,172 shares amounting to Rp35,172,000.*

On January 3, 2022, all BJTI's shares owned by the Company (formerly Pelindo III) were transferred to SPTP (Note 52e).

PMS

PMS was established under the Notarial Deed No. 8 dated December 31, 2011, of Notary Stephanus R. Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-34988.AH.01.01 Tahun 2012 dated September 27, 2012.

The authorized capital of PMS amounted to Rp260,500,000 composed of 260,500,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PMS (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 97,89% atau sebanyak 255.000.000 saham dengan nilai nominal Rp255.000.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 2,11% atau sebanyak 5.500.000 saham dengan nilai nominal Rp5.500.000.

Anggaran Dasar PMS telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 1 tanggal 18 November 2019 oleh Heni Yuniantin, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar menjadi Rp310.500.000.000 terbagi atas 310.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0361631 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki 98,23% atau sebanyak 305.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp305.000.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,77% atau sebanyak 5.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.500.000.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham PMS milik Perusahaan (dahulu Pelindo III) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

TTL

TTL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 309 tanggal 30 Desember 2013, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., Magister Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PMS (continued)

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 97.89% or 255,000,000 shares with total amount of Rp255,000,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 2.11% or 5,500,000 shares with total amount of Rp5,500,000.*

PMS's Articles of Association has been amended, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 1 dated November 18, 2019 by Heni Yuniantin, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the notification amendment of the Articles of Association to become Rp310,500,000,000 divided into 310,500,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0361631 Year 2019 dated November 19, 2019.

The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 98.23% or 305,000,000 shares amounting to Rp305,000,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.77% or 5,500,000 shares amounting to Rp5,500,000.*

On January 3, 2022, all PMS's shares owned by the Company (formerly Pelindo III) were transferred to SPJM (Note 52d).

TTL

TTL was established under Notarial Deed No. 309 dated December 30, 2013, of Notary Yatiningsih, S.H., Master of Laws, Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 dated March 13, 2014.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TTL (lanjutan)

Modal dasar TTL sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 400.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 99,50% atau sebanyak 134.325 saham dengan nilai nominal Rp134.325.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau 675 saham dengan nilai nominal Rp675.000.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham TTL milik Perusahaan (dahulu Pelindo III) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

PDS

PDS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 10 Maret 2008 oleh Notaris Inas Abdullah Thalib, S.H., Notaris di Gresik, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-18839AH.01.01.TH.2008 tanggal 16 April 2008.

Modal dasar PDS sebesar Rp17.500.000 terdiri dari 35.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 31.500 saham dengan nilai nominal Rp15.750.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 10,00% atau sebanyak 3.500 saham dengan nilai nominal Rp1.750.000.

PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas (dahulu PT Berlian Manyar Stevedore ("BMST"))

BMST didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 241 tanggal 28 Januari 2016, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013280.AH.01.11 tanggal 30 Januari 2016.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TTL (continued)

The authorized capital of TTL amounted to Rp400,000,000 composed of 400,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 99.50% or 134,325 shares with total amount of Rp134,325,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 675 shares with total amount of Rp675,000.*

On January 3, 2022, all TTL's shares owned by the Company (formerly Pelindo III) were transferred to SPTP (Note 52e).

PDS

PDS was established under Notarial Deed No. 41 dated March 10, 2008 by Notary Inas Abdullah Talib, S.H., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-18839AH.01.01.TH.2008 dated April 16, 2008.

The authorized capital of PDS amounted to Rp17,500,000 composed of 35,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 90.00% or 31,500 shares with total amount of Rp15,750,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 3,500 shares with total amount of Rp1,750,000.*

PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas (formerly PT Berlian Manyar Stevedore ("BMST"))

BMST was established under Notarial Deed No.241 dated January 28, 2016 by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0013280.AH.01.11 dated January 30, 2016.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas (d/h PT Berlian Manyar Stevedore ("BMST")) (lanjutan)

Modal dasar BMST adalah sebesar Rp2.000.000 terdiri dari 2.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 60,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.
- UEPN memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 200 saham dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 6 September 2019, dan Akta Notaris No. 08 tanggal 31 Oktober 2019, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai Perjanjian Jual Beli saham "PT Berlian Manyar Stevedore". Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 1 Januari 2020/31 Desember 2019 sebagai berikut:

- TPS memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 495 saham dengan nilai sebesar Rp495.000.
- UEPN memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 5 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 11 November 2019, oleh Notaris Mira Irani S.H., M.Kn., PT BMST mengubah namanya menjadi PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas ("PT Pelindo3 TPK") dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063161.AH.01.01 tanggal 28 November 2019.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas (d/h PT Berlian Manyar Stevedore ("BMST")) (continued)

The authorized capital of BMST amounted to Rp2,000,000 composed of 2,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *BJTI owns 60.00% or 300 shares amounting to Rp300,000.*
- *UEPN owns 40.00% or 200 shares amounting to Rp200,000.*

Based on Notarial Deed No. 02 dated September 6, 2019, and Notary Deed No. 08 dated October 31, 2019, by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the Agreement of Sale and Purchase of shares "PT Berlian Manyar Stevedore". The composition of the issued and fully paid capital as of January 1, 2020/ December 31, 2019 are as follows:

- *TPS owns 99.00% or 495 shares amounting to Rp495,000.*
- *UEPN owns 1.00% or 5 shares amounting to Rp5,000.*

Based on Notary Deed No. 03 dated November 11, 2019 by Notary Mira Irani S.H., MKn., PT BMST changed its name to PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas ("PT Pelindo3 TPK") which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0063161.AH.01.01 dated November 28, 2019.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

BMS

BMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 12 Juni 2012 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya. PT BMS secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.164 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013.

Modal dasar BMS adalah sebesar Rp1.000.000.000 terdiri dari 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 60,00% atau sebanyak 432.600 saham dengan nilai sebesar Rp432.600.000.
- UEPN memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 288.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.400.000.

PPI1

PPI1 didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 Desember 2014 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0130014.40.80.2014 tanggal 12 Desember 2014.

Modal dasar PPI1 adalah sebesar Rp220.000.000 terdiri dari 220.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 99,91% atau sebanyak 84.920.000 saham dengan nilai sebesar Rp84.920.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 0,09% atau sebanyak 80.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp80.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

BMS

BMS was established under Notarial Deed No. 12 dated June 12, 2012 of Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya. PT BMS had officially become Badan Usaha Pelabuhan (BUP), by Minister of Transportation under Decision Letter No. KP.164 Year 2013 dated February 15, 2013.

The authorized capital of BMS amounted to Rp1,000,000,000 composed of 1,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 60.00% or 432,600 shares amounting to Rp432,600,000.*
- *UEPN owns 40.00% or 288,400 shares amounting to Rp288,400,000.*

PPI1

PPI1 was established under Notarial Deed No. 5 dated December 5, 2014 by Notary Yahya Abdullah Waber, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014.

The authorized capital of PPI1 amounted to Rp220,000,000 composed of 220,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 99.91% or 84,920,000 shares amounting to Rp84,920,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.09% or 80,000 shares amounting to Rp80,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

BIMA

BIMA didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 11 November 2015 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2468002.AH.01.01 tanggal 23 November 2015.

Modal dasar BIMA adalah sebesar Rp10.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 90,00% atau 6.750 saham dengan nilai sebesar Rp6.750.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp750.000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 17 tanggal 6 September 2021 oleh Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, mengenai pengesahan peningkatan modal dasar menjadi Rp90.000.000 terbagi atas 90.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp22.500.000 terbagi atas 22.500 lembar saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0049916.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 15 September 2021. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 90,00% atau 20.250 saham dengan nilai sebesar Rp20.250.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 2.250 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.250.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

BIMA

BIMA was established under Notarial Deed No. 6 dated November 11, 2015, by Notary Yahya Abdullah Waber, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-2468002.AH.01.01 dated November 23, 2015.

The authorized capital of BIMA amounted to Rp10,000,000 composed of 10,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *BJTI owns 90.00% or 6,750 shares amounting to Rp6,750,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 750 shares amounting to Rp750,000.*

The Company's Articles of Association has been amended, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 17 dated September 6, 2021 by Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, regarding the approval of the increase of authorized capital to Rp90,000,000 divided into 90,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and the increase of issued and fully paid shares to Rp22,500,000 divided into 22,500 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree No. AHU-0049916.AH.01.02 year 2021 dated
September 15, 2021. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *BJTI owns 90.00% or 20,250 shares amounting to Rp20,250,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 2,250 shares amounting to Rp2,250,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TCS

TCS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 189 tanggal 15 Desember 2015, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0003534.AH.01.01 tanggal 21 Januari 2016.

Modal dasar TCS adalah sebesar Rp240.000.000 terdiri dari 240.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 51,00% atau sebanyak 30.600 saham dengan nilai sebesar Rp30.600.000.
- PT Andahanesa Abadi memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 29.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp29.400.000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 74 tanggal 29 Januari 2020 oleh Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, mengenai pengesahan penurunan modal dasar menjadi Rp8.000.000 terbagi atas 8.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham dan penurunan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp2.000.000 terbagi atas 2.000 lembar saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0026976.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 1 April 2020.

APBS

APBS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 21 April 2014 oleh Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-06051.40.10.2014 tanggal 25 April 2014.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TCS

TCS was established, under Notarial Deed No. 189 dated December 15, 2015, by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0003534.AH.01.01 dated January 21, 2016.

The authorized capital of TCS amounted to Rp240,000,000 composed of 240,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *BJTI owns 51.00% or 30,600 shares amounting to Rp30,600,000.*
- *PT Andahanesa Abadi owns 49.00% or 29,400 shares amounting to Rp29,400,000.*

The Company's Articles of Association has been amended, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 74 dated January 29, 2020 by Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, regarding the approval of the decrease of authorized capital to Rp8,000,000 divided into 8,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and the decrease of issued and fully paid shares to Rp2,000,000 divided into 2,000 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree No. AHU-0026976.AH.01.02 year 2020 dated April 1, 2020.

APBS

APBS was established under Notarial Deed No. 9 dated April 21, 2014 by Notary Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notary in Depok, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-06051.40.10.2014 dated April 25, 2014.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

---

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

APBS (lanjutan)

Modal dasar APBS adalah sebesar Rp750.000.000 terdiri dari 750.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 168.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp168.750.000.
- Van Oord memiliki sebesar 5,00% atau sebanyak 9.375.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.375.000.
- Gerbang Sarana Utama memiliki sebesar 5,00% atau sebanyak 9.375.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.375.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 10 Februari 2021 oleh Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, Notaris di Surabaya, mengenai jual beli saham serta perubahan komposisi kepemilikan saham dari "PT Alur Pelayaran Barat Surabaya". Komposisi modal yang telah ditempatkan per 1 Oktober 2021 sebagai berikut:

- PMS memiliki sebesar 93,00% atau sebanyak 174.375.000 saham dengan nilai sebesar Rp174.375.000.
- Gerbang Sarana Utama memiliki sebesar 7,00% atau sebanyak 13.125.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp13.125.000.

PEL

PEL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 9 September 2014 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2963.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014.

Modal dasar PEL adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

APBS (continued)

The authorized capital of APBS amounted to Rp750,000,000 composed of 750,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *PMS owns 90.00% or 168,750,000 shares amounting to Rp168,750,000.*
- *Van Oord owns 5.00% or 9,375,000 shares amounting to Rp9,375,000.*
- *Gerbang Sarana Utama owns 5.00% or 9,375,000 shares amounting to Rp9,375,000.*

Based on Notarial Deed No. 02 dated February 10, 2021, by Notary Stephanus R. Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya, regarding the agreement of sale and purchase along with changes on composition of shareholders in "PT Alur Pelayaran Barat Surabaya". The composition of the fully paid capital as of October 1, 2021 are as follows:

- *PMS owns 93.00% or 174,375,000 shares amounting to Rp174,375,000.*
- *Gerbang Sarana Utama owns 7.00% or 13,125,000 shares amounting to Rp13,125,000.*

PEL

PEL was established under Notarial Deed No. 2 dated September 9, 2014, by Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-2963.40.10.2014 dated October 14, 2014.

The authorized capital of PEL amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PEL (lanjutan)

- PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 9.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.000.000.
- PEL (pembelian kembali) memiliki sebesar 9,00% atau sebanyak 900.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp900.000.
- BJTI memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 100.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 4 tanggal 30 Desember 2020 oleh Amanda Mirza Evariana, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, mengenai pengesahan penurunan modal dasar menjadi Rp36.400.000 terbagi atas 36.400.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per lembar saham dan penurunan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp9.100.000 terbagi atas 9.100.000 lembar saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0014114.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 7 Maret 2021. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PMS memiliki sebesar 98,90% atau sebanyak 9.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.000.000.
- BJTI memiliki sebesar 1,10% atau sebanyak 100.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

BMC

BMC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 16 Desember 2015, oleh Notaris Yohana S. Aminah Hadijanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU.2473417.AH.01.01 tanggal 21 Desember 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PEL (continued)

- *PMS owns 90.00% or 9,000,000 shares amounting to Rp9,000,000.*
- *PEL (buyback) owns 9.00% or 900,000 shares amounting to Rp900,000.*
- *BJTI owns 1.00% or 100,000 shares amounting to Rp100,000.*

The Company's Articles of Association has been amended, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 4 dated December 30, 2020 by Amanda Mirza Evariana, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, regarding the approval of the decrease of authorized capital to Rp36,400,000 divided into 36,400,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share and the decrease of issued and fully paid shares to Rp9,100,000 divided into 9,100,000 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree No. AHU-0014114.AH.01.02 Year 2021 dated March 7, 2021. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *PMS owns 98.90% or 9,000,000 shares amounting to Rp9,000,000.*
- *BJTI owns 1.10% or 100,000 shares amounting to Rp100,000.*

BMC

BMC was established under Notarial Deed No.17 dated December 16, 2015, by the Notary Yohana S. Aminah Hadijanto, S.H., M.Kn., Notary in Kendal, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU.2473417.AH.01.01 dated December 21, 2015.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

BMC (lanjutan)

Modal dasar BMC adalah sebesar Rp1.000.000 terdiri dari 1.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 900 saham dengan nilai sebesar Rp900.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 29 November 2019, oleh Notaris Amanda Mirza Ervariana, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0102677.AH.01.02 Tahun 2019. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- PMS memiliki sebesar 99,80% atau sebanyak 50.900 saham dengan nilai sebesar Rp50.900.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 0,20% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

LEGI

LEGI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 8 Desember 2014, oleh Notaris Yatiningsih, SH., M.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005031.AH.01.01 tanggal 3 Februari 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

BMC (continued)

The authorized capital of BMC amounted to Rp1,000,000 composed of 1,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PMS owns 90.00% or 900 shares amounting to Rp900,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 100 shares amounting to Rp100,000.*

Based on Notarial Deed No. 5 dated November 29, 2019, by Notary Amanda Mirza Ervariana, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0102677.AH.01.02 Tahun 2019. The composition of the issued and fully paid capital as of January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

- *PMS owns 99.80% or 50,900 shares amounting to Rp50,900,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.20% or 100 shares amounting to Rp100,000.*

LEGI

LEGI was established under Notarial Deed "No. 58 dated December 8, 2014 by Notary Yatiningsih, SH., M.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0005031.AH.01.01 on February 3, 2015.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

LEGI (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Akta Notaris No. 35 oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., tanggal 7 Juni 2017, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan pemindahan hak saham TTL pada Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebanyak 91 saham atau sebesar Rp91.000. Penjualan saham tersebut telah disahkan dengan Akta Jual Beli saham No. 36 tanggal 7 Juni 2017 oleh Yatiningsih, S.H., M.H.

Modal dasar LEGI adalah sebesar Rp36.000.000 terdiri dari 36.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- TTL memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 9.009 saham dengan nilai sebesar Rp9.009.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 91 saham dengan nilai nominal sebesar Rp91.000.

TEDS

TEDS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 360 tanggal 29 September 2014, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-306131.40.10.2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Modal dasar TEDS adalah sebesar Rp5.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PDS memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 3.960 saham dengan nilai sebesar Rp1.980.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 40 saham dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

LEGI (continued)

Based on Extraordinary General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 35 dated June 7, 2017 by Yatiningsih, S.H., M.H., the shareholders approved and authorized the transfer of shares from TTL to Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to 91 shares or equivalent to Rp91,000. The transfer of shares was approved by Deed of Sale and Purchase of shares No. 36 dated June 7, 2017 by Yatiningsih, S.H., M.H.

The authorized capital of LEGI amounted to Rp36,000,000 composed of 36,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *TTL owns 99.00% or 9,009 shares amounting to Rp9,009,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.00% or 91 shares amounting to Rp91,000.*

TEDS

TEDS was established under Notarial Deed No. 360 dated September 29, 2014, by Notary Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, and was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-306131.40.10.2014 dated October 21, 2014.

The authorized capital of TEDS amounted to Rp5,000,000 composed of 10,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PDS owns 99.00% or 3,960 shares amounting to Rp1,980,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.00% or 40 shares amounting to Rp20,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT Portek Indonesia

PT Portek Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 175 tanggal 21 September 1999 oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-2242 HT.01.01 TH2000 tanggal 14 Februari 2000.

Modal dasar PT Portek Indonesia adalah sebesar USD2.000.000 (angka penuh) terdiri dari 400 saham dengan nilai nominal USD5.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 49 saham dengan nilai sebesar Rp2.670.500.
- Portek System & Equipment Pte Ltd., Singapura memiliki 51,00% atau sebanyak 51 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.779.500.

PT Pelindo Terminal Petikemas (dahulu PT Terminal Petikemas Indonesia) (SPTP)

SPTP didirikan dengan nama PT Terminal Petikemas Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 10 April 2013, oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar SPTP pada saat pendirian adalah sebesar Rp500.000.000 terdiri dari 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki sebesar 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT Portek Indonesia

PT Portek Indonesia was established under Notarial Deed No. 175 dated September 21, 1999 by Notary Rahmat Santoso, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-2242 HT.01.01 TH2000 dated February 14, 2000.

The authorized capital of PT Portek Indonesia amounted to USD2,000,000 (full amount) composed of 400 shares with par value of USD5,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 49.00% or 49 shares amounting to Rp2,670,500.*
- *Portek System & Equipment Pte Ltd., Singapore owns 51.00% or 51 shares amounting to Rp2,779,500.*

PT Pelindo Terminal Petikemas (formerly PT Terminal Petikemas Indonesia) (SPTP)

SPTP was established namely PT Terminal Petikemas Indonesia under Notary Deed No. 36 dated April 10, 2013 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-21873.AH.01.01. Year 2013 dated April 24, 2013.

The authorized capital of SPTP at established date amounted to Rp500,000,000 composed of 500,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.*
- *PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT Pelindo Terminal Petikemas (dahulu PT Terminal Petikemas Indonesia) (SPTP) (lanjutan)

- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

Perusahaan memiliki 100% atau sebanyak 150.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 18 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, tanggal 11 Oktober 2021, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan perubahan nama menjadi PT Pelindo Terminal Petikemas, perubahan modal, nama, tempat kedudukan dan logo SPTP.

Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

Ambapers

Ambapers didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 26 Maret 2004 oleh Notaris Grace Senda Sardjito, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-14469 HT.01.TH.2004 11 Juni 2004.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 16 oleh Notaris Neddy Farmanto, S.H., tanggal 9 Maret 2018, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp5.000.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT Pelindo Terminal Petikemas (formerly PT Terminal Petikemas Indonesia) (SPTP) (continued)

- *PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.*
- *PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.*

The Company owns 100% or 150,000 shares with nominal amount of Rp150,000,000.

Based on the Decision Statement of the General Meeting of Shareholders in the Notary Deed No. 18 by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, October 11, 2021, the shareholders have approved and ratified the change of name to PT Pelindo Terminal Petikemas, the changes of capital, name, domicile and logo of SPTP.

Currently, TPI has not yet started commercial operation.

Ambapers

Ambapers was established under Notarial Deed No. 9 dated March 26, 2004 by Notary Grace Senda Sardjito, S.H., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No.C-14469 HT.01.TH.2004 dated June 11, 2004.

Based on General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 16 dated March 9, 2018 by Neddy Farmanto, S.H., the shareholders approved and authorized the reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp5,000,000.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Ambapers (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 33 Tanggal 21 Maret 2017 oleh Notaris Neddy Farmanto, S.H., para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp6.000.000.

Modal dasar Ambapers adalah sebesar Rp20.000.000 terdiri dari 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 6.000 saham dengan nilai sebesar Rp6.000.000.
- PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 60,00% atau sebanyak 9.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.000.000.

JBT

JBT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 oleh Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.TH.2011 tanggal 25 November 2011.

Modal dasar JBT adalah sebesar Rp745.434.000 terdiri dari 745.434 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 17,58% atau sebanyak 131.048 saham dengan nilai sebesar Rp131.048.000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 55,00% atau sebanyak 409.993 saham dengan nilai nominal sebesar Rp409.993.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Ambapers (continued)

Based on General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 33 dated March 21, 2017 by Neddy Farmanto, S.H., the shareholders approved and authorized the reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp6,000,000.

The authorized capital of Ambapers amounted to Rp20,000,000 composed of 20,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo IV) owns 40.00% or 6,000 shares amounting to Rp6,000,000.*
- *PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan owns 60.00% or 9,000 shares amounting to Rp9,000,000.*

JBT

JBT was established under Notarial Deed No. 2 dated August 22, 2011 by Notary Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H. and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-57740.AH.01.01.TH.2011 dated November 25, 2011.

The authorized capital of JBT amounted to Rp745,434,000 composed of 745,434 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 17.58% or 131,048 shares amounting to Rp131,048,000.*
- *PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 55.00% or 409,993 shares amounting to Rp409,993,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JBT (lanjutan)

- Pemerintah Provinsi Bali memiliki 8,01% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- Pemerintah Kabupaten Badung memiliki 8,01% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- PT Angkasa Pura I memiliki 8,00% atau sebanyak 59.635 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.635.000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Hutama Karya (Persero) memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 0,40% atau sebanyak 2.982 saham dengan nominal sebesar Rp2.982.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 12 November 2020 oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga Bali Tol, para pemegang saham menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor ke dalam kas Perseroan sebesar Rp200.000.000 oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 13,86% atau sebanyak 131.048 saham dengan nilai sebesar Rp131.048.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JBT (continued)

- *Government of Bali Province owns 8.01% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.*
- *Government of Badung District owns 8.01% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.*
- *PT Angkasa Pura I owns 8.00% or 59,635 shares amounting to Rp59,635,000.*
- *PT Adhi Karya (Persero) Tbk owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.*
- *PT Hutama Karya (Persero) owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.*
- *PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.*
- *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 0.40% or 2,982 shares amounting to Rp2,982,000.*

Based on Notarial Deed No. 24 dated November 12, 2020, by Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the Minutes of Meeting of PT Jasamarga Bali Tol, the shareholders approved the additional issued and fully paid to the PT Jasamarga Bali Tol's cash amounting to Rp200,000,000 by PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

The composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2021 and December 31, 2020 are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 13.86% or 131,048 shares amounting to Rp131,048,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

JBT (lanjutan)

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut (lanjutan):

- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 64,44% atau sebanyak 609.193 saham dengan nilai nominal sebesar Rp609.193.000.
- Pemerintah Provinsi Bali memiliki 6,32% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- Pemerintah Kabupaten Badung memiliki 6,32% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- PT Angkasa Pura I memiliki 6,31% atau sebanyak 59.635 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.635.000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki 0,79% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Hutama Karya (Persero) memiliki 0,79% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) memiliki 0,79% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 0,40% atau sebanyak 3.782 saham dengan nominal sebesar Rp3.782.000.

PHC

PHC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 September 1999 oleh Notaris Syafran, S.H., Notaris di Semarang, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-16306 HT.01.01 TH.1999, tanggal 13 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 11 tanggal 13 September 1999.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

JBT (continued)

The composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2021 and December 31, 2020 are as follows (continued):

- *PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 64.44% or 609,193 shares amounting to Rp609,193,000.*
- *Government of Bali Province owns 6.32% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.*
- *Government of Badung District owns 6.32% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.*
- *PT Angkasa Pura I owns 6.31% or 59,635 shares amounting to Rp59,635,000.*
- *PT Adhi Karya (Persero) Tbk owns 0.79% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.*
- *PT Hutama Karya (Persero) owns 0.79% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.*
- *PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) owns 0.79% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.*
- *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 0.40% or 3,782 shares amounting to Rp3,782,000.*

PHC

PHC was established under Notarial Deed No. 1 dated September 1, 1999 of Notary Syafran, S.H., Notary at Semarang, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-16306 HT.01.01 TH.1999, dated September 13, 1999 and was published in the State Gazette No. 11, dated September 13, 1999.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

PHC (lanjutan)

Modal dasar PHC sebesar Rp142.000.000 terdiri dari 284.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 98,73% atau sebanyak 280.400.000 saham dengan nilai nominal Rp140.200.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,27% atau sebanyak 3.600.000 saham dengan nilai nominal Rp1.800.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 7 Agustus 2020, oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Pelindo Husada Citra", komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 1 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 31,73% atau sebanyak 90.120.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp45.060.000.
- PT Pertamina Bina Medika IHC memiliki sebesar 67% atau sebanyak 190.280.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp95.140.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,27% atau sebanyak 3.600.000 saham dengan nilai nominal Rp1.800.000.

PBM IHC

Berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 7 Agustus 2020, oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar "PT Pertamina Bina Medika IHC", komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

PHC (continued)

The authorized capital of PHC amounted to Rp142,000,000 composed of 284,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The composition share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 98.73% or 280,400,000 shares with total amount of Rp140,200,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.27% or 3,600,000 shares with total amount of Rp1,800,000.*

Based on Notarial Deed No. 18 dated August 7, 2020, by Notary Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the Statement of shareholders' decisions of PT Pelindo Husada Citra, the composition of the issued and fully paid capital as of October 1, 2021 and December 31, 2020 are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 31.73% or 90,120,000 shares with total amount of Rp45,060,000.*
- *PT Pertamina Bina Medika IHC owns 67% or 190,280,000 shares with total amount of Rp95,140,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.27% or 3,600,000 shares with total amount of Rp1,800,000.*

PBM IHC

Based on Notarial Deed No.42 dated August 7, 2020, by Notary Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the Statement of shareholders' decisions of PT Pertamina Bina Medika IHC, the composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2020 are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

PBM IHC (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 4,00% atau sebanyak 1.168.743 saham dengan nilai nominal sebesar Rp116.874.300.
- PT Pertamina (Persero) memiliki sebesar 81,11% atau sebanyak 23.700.021 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.370.002.100.
- PT Perkebunan Nusantara X memiliki sebesar 5,62% atau sebanyak 1.643.253 saham dengan nilai nominal sebesar Rp164.325.300.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki sebesar 2,00% atau sebanyak 584.372 saham dengan nilai nominal sebesar Rp58.437.200.
- PT Perkebunan Nusantara XI memiliki sebesar 1,94% atau sebanyak 566.840 saham dengan nilai nominal sebesar Rp56.684.000.
- PT Timah Tbk. memiliki sebesar 1,78% atau sebanyak 518.889 saham dengan nilai nominal sebesar Rp51.888.900.
- PT Perkebunan Nusantara XII memiliki sebesar 1,74% atau sebanyak 508.403 saham dengan nilai nominal sebesar Rp50.840.300.
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. memiliki sebesar 0,75% atau sebanyak 218.239 saham dengan nilai nominal sebesar Rp21.823.900.
- PT Krakatau Industrial Estate Cilegon memiliki sebesar 0,61% atau sebanyak 178.559 saham dengan nilai nominal sebesar Rp17.855.900.
- PT Krakatau Bandar Samudera memiliki sebesar 0,44% atau sebanyak 128.959 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.895.900.
- PT Pertamina Pedeve Indonesia memiliki sebesar 0,01% atau sebanyak 1.484 saham dengan nilai nominal sebesar Rp148.400.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

PBM IHC (continued)

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 4.00% or 1,168,743 shares with total amount of Rp116,874,300.*
- *PT Pertamina (Persero) owns 81.11% or 23,700,021 shares with total amount of Rp2,370,002,100.*
- *PT Perkebunan Nusantara X owns 5.62% or 1,643,253 shares with total amount of Rp164,325,300.*
- *The Company (formerly Pelindo II) owns 2.00% or 584,372 shares with total amount of Rp58,437,200.*
- *PT Perkebunan Nusantara XI owns 1.94% or 566,840 shares with total amount of Rp56,684,000.*
- *PT Timah Tbk. owns 1.78% or 518,889 shares with total amount of Rp51,888,900.*
- *PT Perkebunan Nusantara XII owns 1.74% or 508,403 shares with total amount of Rp50,840,300.*
- *PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. owns 0.75% or 218,239 shares with total amount of Rp21,823,900.*
- *PT Krakatau Industrial Estate Cilegon owns 0.61% or 178,559 shares with total amount of Rp17,855,900.*
- *PT Krakatau Bandar Samudera owns 0.44% or 128,959 shares with total amount of Rp12,895,900.*
- *PT Pertamina Pedeve owns 0.01% or 1,484 shares with total amount of Rp148,400.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

BKMS

BKMS didirikan dengan Akta Notaris No. 56 tanggal 18 Mei 2012 oleh Notaris Ardi Kristiar berkedudukan di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Andayani Risilawati S.H., M.H.,C.N., No. 01 tanggal 19 Maret 2014 berkedudukan di Gresik, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0019775 tanggal 27 Maret 2015.

Modal dasar BKMS adalah sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 800.000 saham dengan nilai sebesar Rp800.000.000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) memiliki 60,00% atau sebanyak 1.200.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000.

TNU

TNU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 23 Agustus 2013 oleh Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-13479.AH.01.01 Tahun 2014.

Modal dasar TNU adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 68.500 saham dengan nilai sebesar Rp68.500.000.
- PT Andahanesa Abadi memiliki 60,00% atau sebanyak 102.750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp102.750.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

BKMS

BKMS was established under Notarial Deed, No. 56 dated May 18, 2012 by Notary Ardi Kristiar in Jakarta and has recent amended by Notary Andayani Risilawati, SH., MH., CN., No. 01 dated March 19, 2014 domiciled in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0019775 dated March 27, 2015.

The authorized capital of BKMS amounted to Rp4,000,000,000 composed of 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *BJTI owns 40.00% or 800,000 shares amounting to Rp800,000,000.*
- *PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) owns 60.00% or 1,200,000 shares amounting to Rp1,200,000,000.*

TNU

TNU was established under Notarial Deed No. 89 dated August 23, 2013 of Notary Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-13479.AH.01.01 Year 2014.

The authorized capital of TNU amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *BJTI owns 40.00% or 68,500 shares amounting to Rp68,500,000.*
- *PT Andahanesa Abadi owns 60.00% or 102,750 shares amounting to Rp102,750,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

EMS

EMS didirikan berdasarkan Akta No.14 tanggal 5 Maret 2015 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010566.AH.01.01 tanggal 6 Maret 2015.

Modal dasar EMS adalah sebesar Rp4.000.000 terdiri dari 4.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 30,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.
- UEPN memiliki 45,00% atau sebanyak 450 saham dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.
- PT Santiniluwansa Lestari memiliki 15,00% atau sebanyak 150 saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.
- PT Amanah Indo Invest memiliki 10,00% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

PCN

PCN didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 11 Januari 2016, oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002328.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016.

Modal dasar PCN adalah sebesar Rp20.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PHC memiliki sebesar 70,00% atau sebanyak 7.000 saham dengan nilai sebesar Rp3.500.000.
- BJTI memiliki sebesar 30,00% atau sebanyak 3.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

EMS

EMS was established under Notarial Deed No. 14 dated March 5, 2015 by Yulia, S.H., Notary in Jakarta., and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0010566.AH.01.01 dated March 6, 2015.

The authorized capital of EMS amounted to Rp4,000,000 composed of 4,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *BJTI owns 30.00% or 300 shares amounting to Rp300,000.*
- *UEPN owns 45.00% or 450 shares amounting to Rp450,000.*
- *PT Santiniluwansa Lestari owns 15.00% or 150 shares amounting to Rp150,000.*
- *PT Amanah Indo Invest owns 10.00% or 100 shares amounting to Rp100,000.*

PCN

PCN was established under Notarial Deed No. 35 dated January 11, 2016, by Notary Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0002328.AH.01.01 Tahun 2016 dated January 15, 2016.

The authorized capital of PCN amounted to Rp20,000,000 composed of 40,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *PHC owns 70.00% or 7,000 shares amounting to Rp3,500,000.*
- *BJTI owns 30.00% or 3,000 shares amounting to Rp1,500,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

LNG

LNG didirikan berdasarkan Akta No.01 tanggal 1 Oktober 2019 dari Heni Yuniantin, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051386.AH.01.01 tanggal 5 Oktober 2019.

Modal dasar dan disetor LNG masing-masing sebesar Rp580.000.000 dan Rp145.000.000, yang terdiri dari 145.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT PGN LNG Indonesia (PLI) memiliki sebesar 51,00% atau sebanyak 73.950 saham dengan nilai sebesar Rp73.950.000.
- PEL memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 71.050 saham dengan nilai sebesar Rp71.050.000.

PPI1 - Patimban

PPI1 - Patimban didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 5 Februari 2021 dari Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-008867.AH.01.01 tanggal 5 Februari 2021.

Modal dasar PPI1 - Patimban adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT CTCorp Infrastruktur Indonesia memiliki sebesar 32,00% atau sebanyak 3.200.000 saham dengan nilai sebesar Rp3.200.000.
- PT Indika Logistic & Support memiliki 29,00% atau sebanyak 2.900.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.900.000.
- PT U Connectivity Services memiliki 29,00% atau sebanyak 2.900.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.900.000.
- PT Terminal Petikemas Surabaya memiliki 10,00% atau sebanyak 1.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

LNG

LNG was established under Notarial Deed No. 01 dated October 1, 2019 by Heni Yuniantin, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0051386.AH.01.01 dated October 5, 2019.

The authorized capital and issued and paid capital of LNG totaling Rp580,000,000 and Rp145,000,000 respectively, which consists of 145,000 shares with nominal value per share of Rp1,000,000 (full amount). The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT PGN LNG Indonesia (PLI) owns 51.00% or 73,950 shares amounting to Rp73,950,000.*
- *PEL owns 49.00% or 71,050 shares amounting to Rp71,050,000.*

PPI1 - Patimban

PPI1 - Patimban was established under Notarial Deed No. 1 dated February 5, 2021 by Dedy Syamri, S.H., Notary in Jakarta., and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-008867.AH.01.01 dated February 5, 2021.

The authorized capital of PPI1 - Patimban amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT CTCorp Infrastruktur Indonesia owns 32.00% or 3,200,000 shares amounting to Rp3,200,000.*
- *PT Indika Logistic & Support owns 29.00% or 2,900,000 shares amounting to Rp2,900,000.*
- *PT U Connectivity Services owns 29.00% or 2,900,000 shares amounting to Rp2,900,000.*
- *PT Terminal Petikemas Surabaya owns 10.00% or 1,000,000 shares amounting to Rp1,000,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

KKT

KKT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 8 Februari 2012 dari Notaris Hasanuddin, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Samarinda, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012.

Modal dasar KKT sebesar Rp500.000 terdiri dari 1.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memiliki sebesar 50% atau sebanyak 125 lembar saham dengan nilai nominal Rp62.500.
- Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya memiliki sebesar 50% atau sebanyak 125 lembar saham dengan nilai nominal Rp62.500.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham KKT milik Perusahaan (dahulu Pelindo IV) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

EII

EII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 16 Januari 2012 dari Notaris Yenny Himawan, S.H.,M.Kn, Notaris di Makassar, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-11047.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012.

Modal dasar EII sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo IV)memiliki sebesar 99,29% atau sebanyak 28.050 lembar saham dengan nilai nominal Rp28.050.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

KKT

KKT was established under the Notarial Deed No. 22 dated February 8, 2012 of Notary Hasanuddin, S.H., M.Hum., M.Kn, Notary in Samarinda, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 dated March 26, 2012.

The authorized capital of KKT amounted to Rp500,000 composed of 1,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo IV) owns 50% or 125 shares with total amount of Rp62,500.*
- *Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya owns 50% or 125 shares with total amount of Rp62,500.*

On January 3, 2022, all KKT's shares owned by the Company (formerly Pelindo IV) were transferred to SPTP (Note 52e).

EII

EII was established under the Notarial Deed No. 69 dated January 16, 2012 of Notary Yenny Himawan, S.H.,M.Kn, Notary in Makassar, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter AHU-11047.AH.01.01 Tahun 2012 dated February 29, 2012.

The authorized capital of EII amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo IV) owns 99.29% or 28,050 shares with total amount of Rp28,050,000.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

EII (lanjutan)

- Koperasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki sebesar 0,71% atau sebanyak 200 lembar saham dengan nilai nominal Rp200.000.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham EII milik Perusahaan (dahulu Pelindo IV) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

NTS

NTS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 11 Oktober 2013 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-506034.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 4 November 2013.

Modal dasar NTS sebesar Rp200.000.000 terdiri dari 200.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memiliki sebesar 99,16% atau sebanyak 60.240 lembar saham dengan nilai nominal Rp60.240.000.
- Koperasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki sebesar 0,84% atau sebanyak 510 lembar saham dengan nilai nominal Rp510.000.

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham NTS milik Perusahaan (dahulu Pelindo IV) dialihkan kepada SPSL (Catatan 52f).

ISU

ISU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 29 November 2018 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

EII (continued)

- *Koperasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 0.71% or 200 shares with total amount of Rp200,000.*

On January 3, 2022, all EII's shares owned by the Company (formerly Pelindo IV) were transferred to SPJM (Note 52d).

NTS

NTS was established under the Notarial Deed No. 3 dated October 11, 2013 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-506034. AH.01.01 Tahun 2013 dated November 4, 2013.

The authorized capital of NTS amounted to Rp200,000,000 composed of 200,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo IV) owns 99.16% or 60,240 shares with total amount of Rp60,240,000.*
- *Koperasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 0.84% or 510 shares with total amount of Rp510,000.*

On March 1, 2022, all NTS's shares owned by the Company (formerly Pelindo IV) were transferred to SPSL (Note 52f).

ISU

ISU was established under the Notarial Deed No. 9 dated November 29, 2018 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0057261.AH.01.01 Tahun 2018 dated November 30, 2018.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

ISU (lanjutan)

Modal dasar ISU sebesar Rp500.000 terdiri dari 1.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- NTS memiliki sebesar 99,60% atau sebanyak 249 lembar saham dengan nilai nominal Rp124.500.
- EII memiliki sebesar 0,40% atau sebanyak 1 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.

SPJM

SPJM didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 29 September 2021 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0061303.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021.

Modal dasar SPJM sebesar Rp580.000.000 yang terbagi atas 580.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,90% atau sebanyak 144.855 saham dengan nilai nominal sebesar Rp144.855.000.
- ILCS memiliki 0,10% atau sebanyak 145 saham dengan nilai nominal sebesar Rp145.000.

Saat ini, SPJM belum melakukan kegiatan komersial.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

ISU (continued)

The authorized capital of ISU amounted to Rp500,000 composed of 1,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *NTS owns 99.60% or 249 shares with total amount of Rp124,500.*
- *EII owns 0.40% or 1 shares with total amount of Rp500.*

SPJM

SPJM was established based on Deed No. 20 dated September 29, 2021 of Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0061303.AH.01.01 Tahun 2021 dated September 30, 2021.

The authorized capital of SPJM amounted to Rp580,000,000 which is divided into 580,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.90% or 144,855 shares with total amount of Rp144,855,000.*
- *ILCS owns 0.10% or 145 shares with total amount of Rp145,000.*

At the moment, SPJM has not performed any commercial activities.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

SPMT

Modal dasar SPMT sebesar Rp696.000.000 yang terbagi atas 696.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,90% atau sebanyak 173.826 saham dengan nilai nominal sebesar Rp173.826.000.
- ILCS memiliki 0,10% atau sebanyak 174 saham dengan nilai nominal sebesar Rp174.000.

Saat ini, SPMT belum melakukan kegiatan komersial.

SPSL

SPSL didirikan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 29 September 2021 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0061322.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021.

Modal dasar SPSL sebesar Rp408.000.000 yang terbagi atas 408.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,90% atau sebanyak 101.898 saham dengan nilai nominal sebesar Rp101.898.000.
- ILCS memiliki 0,10% atau sebanyak 102 saham dengan nilai nominal sebesar Rp102.000.

Saat ini, SPSL belum melakukan kegiatan komersial.

Pada tanggal 16 Februari 2022, SPSL berubah nama menjadi PT Pelindo Logistik Indonesia (PLI) (Catatan 52b).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

SPMT

The authorized capital of SPMT amounted to Rp696,000,000 which is divided into 696,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.90% or 173,826 shares with total amount of Rp173,826,000.*
- *ILCS owns 0.10% or 174 shares with total amount of Rp174,000.*

At the moment, SPMT has not performed any commercial activities.

SPSL

SPSL was established based on Deed No. 21 dated September 29, 2021 of Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0061322.AH.01.01 Tahun 2021 dated September 30, 2021.

The authorized capital of SPSL amounted to Rp408,000,000 which is divided into 408,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.90% or 101,898 shares with total amount of Rp101,898,000.*
- *ILCS owns 0.10% or 102 shares with total amount of Rp102,000.*

At the moment, SPSL has not performed any commercial activities.

On February 16, 2022, SPSL change its company name to PT Pelindo Logistik Indonesia (PLI) (Note 52b).

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham PLI milik Perusahaan (dahulu Pelindo I) dialihkan kepada SPSL (Catatan 52f).

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 dan No. SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan,S.H.,M.Kn No.08 dan No. 09 tanggal 6 Oktober 2021, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

SPSL (continued)

On March 1, 2022, all PLI's shares owned by the Company (formerly Pelindo I) were transferred to SPSL (Note 52f).

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Board of Commissioners and Directors

Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021 and No.SK-335/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. No.08 and No. 09 dated October 6, 2021, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commisioners and Directors as folllows:

31 Desember 2021		***December 31, 2021***
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Plt. Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Marsetio	*Acting President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Raden Agus Haryoto Purnomo	*Commissioner*
Komisaris	Didi Sumedi	*Commissioner*
Komisaris	Sudung Situmorang	*Commissioner*
Komisaris Independen	Antonius Rainier Haryanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Heru Sukanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Muchtar Luthfi Mutty	*Independent Commissioner*

31 Desember 2021		***December 31, 2021***
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arif Suhartono	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Hambra	*Vice President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Mega Satria	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Ihsanuddin Usman	*Director of Human Resources and General Affair*
Direktur Strategi	Prasetyo	*Strategy Director*
Direktur Investasi	Boy Robyanto	*Investment Director*
Direktur Pengelola	Putut Sri Muljanto	*Managing Director*

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Board of Commissioners and Directors (continued)

31 Desember 2020 / ***December 31, 2020***

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Independen	Moermahadi Soerja Djanegara	*President/Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Nurrachman	*Independent Commissioner*
Komisaris	Kushari Suprianto	*Commissioner*
Komisaris	Montty Girianna	*Commissioner*
Komisaris	D. Andhi Nirwanto	*Commissioner*
Komisaris	R. Agus H. Purnomo	*Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arif Suhartono	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Hambra	*Vice President of Director*
Direktur Komersial	Rima Novianti	*Director of Commercial*
Direktur Teknik	Zuhri Iryansyah	*Director of Engineering*
Direktur Operasi	Muarip	*Director of Operations*
Direktur Keuangan	Yon Irawan	*Director of Finance*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Ihsanuddin Usman	*Director of Human Resources and General Affair*
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Ogi Rulino	*Director of Transformation and Business Development*

1 Januari 2020/31 Desember 2019 / ***January 1, 2020/December 31, 2019***

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	-	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy	*Independent Commissioner*
Komisaris	Kushari Suprianto	*Commissioner*
Komisaris	Montty Giriana	*Commissioner*
Komisaris	D. Andhi Nirwanto	*Commissioner*
Komisaris	Djadmiko	*Commissioner*
Komisaris	R. Agus H. Purnomo	*Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Elvyn G. Masassya	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Hambra	*Vice President of Director*
Direktur Komersial	Arif Suhartono	*Director of Commercial*
Direktur Teknik	Dani Rusli Utama	*Director of Engineering*
Direktur Operasi	Prasetyadi	*Director of Operations*
Direktur Keuangan	Widyaka Nusapati	*Director of Finance*
Direktur Sumber Daya Manusia	Rizal Ariansyah	*Director of Human Resources*
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Ogi Rulino	*Director of Transformation and Business Development*

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021		***December 31, 2021***
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Heru Sukanto	*Head*
Wakil Ketua	Didi Sumedi	*Deputy Head*
Anggota	Ahmad Zakie Mubarok	*Member*
Anggota	Sofia Chairunnisa	*Member*
Sekretaris Perusahaan	Ali Mulyono	*Corporate Secretary*

31 Desember 2020		***December 31, 2020***
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Kushari Suprianto	*Head*
Anggota	Pionir H	*Member*
Anggota	Muhdi Al Fajar	*Member*
Sekretaris Perusahaan	Ari Santoso	*Corporate Secretary*

1 Januari 2020/31 Desember 2019		***January 1, 2020/December 31, 2019***
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Kushari Suprianto	*Head*
Anggota	Rakmat Adi Santosa	*Member*
Anggota	Muhdi Al Fajar	*Member*
Sekretaris Perusahaan	Shanti Puruhita	*Corporate Secretary*

Karyawan

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 masing-masing sebanyak 3.595, 3.668 dan 4.640 karyawan (tidak diaudit).

d. Mata Uang Pelaporan

Mata uang fungsional Kelompok Usaha adalah Rupiah, kecuali TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat.

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah Rupiah.

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2021, 2020 dan January 1 2020/December 31, 2019 are as follows:

Employees

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are 3,595, 3,668 and 4,640 employees, respectively (unaudited).

d. Reporting Currency

The Group's functional currency is Rupiah, except TPK Koja, NPCT1 and JICT which are in United States Dollar.

The presentation currency of the Group's consolidated financial statements is in Rupiah.

1. UMUM (lanjutan)

e. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, laporan keuangan TPK Koja, NPCT1 dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

e. Translation into Presentation Currency

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of TPK Koja, NPCT1 and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

- *Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;*
- *Income and expenses were translated using the average exchange rate; and*
- *All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.*

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	
Saldo awal	291.374.572	620.425.512	*Beginning balance*
Efek penjabaran - neto	13.379.913	(329.050.940)	*Effect due to translation - net*
Saldo akhir	**304.754.485**	**291.374.572**	***Ending balance***

f. Penggabungan

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") pada tanggal 1 Oktober 2021 mengatur diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang telah diselenggarakan beserta aset pengusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selanjutnya diselenggarakan dan dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo II;
- Pelindo II wajib melakukan penyesuaian terhadap perizinan, konsesi dan dokumen hukum paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penggabungan;

f. Merger

Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 101 Year 2021 regarding the Merger of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") into Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") on October 1, 2021, stipulating among others:

- *Port operational activities that have been carried out along with the operational assets owned or controlled by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are subsequently managed and owned or controlled by Pelindo II;*
- *Pelindo II is required to make adjustments to permits, concessions and legal documents no later than 2 (two) years since the date of merger;*

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

- Nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Pelindo II ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tanggal 1 Oktober 2021 dari notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri dengan Pelindo II, dimana Pelindo II sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha. Rancangan penggabungan telah disetujui oleh pemegang saham masing-masing perusahaan pada tanggal yang sama sebagai berikut:

- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo I No. 1 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo II No. 2 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo III No.3 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo IV No. 4 tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, seluruh pihak menyetujui penggabungan dengan kondisi diantaranya sebagai berikut:

1. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas dari Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih kepada Pelindo II.

2. Semua izin, konsesi, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.

3. Sejak tanggal efektif, seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

- *The definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are combined into Pelindo II are determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOE.*

Based on the Deed of Merger No. 5 dated October 1, 2021 from the notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV agreed to merge with Pelindo II, where Pelindo II as the surviving entity. The plan design of merger was approved by the shareholders of each company on the same date as follows:

- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo I General Shareholders Meeting (GSM) No. 1 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo II General Shareholders Meeting (GSM) No. 2 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo III General Shareholders Meeting (GSM) No. 3 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo IV General Shareholders Meeting (GSM) No. 4 on October 1, 2021.*

Based on the Deed of Merger No. 5, all parties agreed to the merger with the following conditions among others:

1. *All operations, businesses, and activities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*

2. *All permits, concessions, facilities, licenses, approvals and utilizations that have been granted by the authorities to Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*

3. *Since the effective date, all assets and liabilities owned by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

4. Seluruh pekerja Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV akan menjadi pekerja Pelindo II mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja dan Berita Acara Kesepakatan antara Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV dengan para pengurus serikat pekerja Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV tanggal 24 Juni 2021.

Komposisi modal saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut (nominal penuh):

Sebelum Penggabungan		***Before Merger***
Pelindo I		***Pelindo I***
Modal Dasar	Rp6.800.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.700.000.000	*Issued and fully-paid capital*
Pelindo II		***Pelindo II***
Modal Dasar	Rp4.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.444.029.000	*Issued and fully-paid capital*
Pelindo III		***Pelindo III***
Modal Dasar	Rp3.200.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp2.218.953.000	*Issued and fully-paid capital*
Pelindo IV		***Pelindo IV***
Modal Dasar	Rp10.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp3.112.085.000	*Issued and fully-paid capital*
Setelah Penggabungan		***After Merger***
Pelindo II		***Pelindo II***
Modal Dasar	Rp33.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp8.475.067.000	*Issued and fully-paid capital*

Saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV memiliki nilai nominal saham yang sama, yaitu sebesar Rp1.000 per saham. Sehubungan penggabungan, Pelindo II akan menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia sesuai dengan jumlah saham yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia pada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV. Hal ini merupakan nilai sementara atas Pelindo II dimana nilai definitif atas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabung ke dalam Pelindo II akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN (Catatan 52a).

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

4. All Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV workers will become Pelindo II workers in accordance with the provisions of the laws and regulations regarding labor and the Minutes of Agreement between Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV with the management of the Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV labor union on June 24, 2021.

The composition of the share capital of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV before and after the merger are as follows (full amount):

The shares of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV have the same nominal value, which is Rp1,000 per share. In connection with the merger, Pelindo II will issue new shares to the Republic of Indonesia in accordance with the number of shares previously owned by the Republic of Indonesia in Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV. This is a temporer value for Pelindo II where the definitive value for Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are merged into Pelindo II will be determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOEs (Note 52a).

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, dinyatakan bahwa tanggal efektif penggabungan adalah pada saat terbitnya Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pelindo II sehubungan penggabungan, yaitu melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-0014401 tanggal 1 Oktober 2021. Dengan efektifnya penggabungan ini, maka Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selaku perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar demi hukum sejak tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan dampak dari penggabungan tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 7 tanggal 1 Oktober 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya perubahan Anggaran Dasar, logo dan nama Perusahaan dari sebelumnya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia atau disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

Pengalihan aset dan liabilitas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Pelindo II dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berdasarkan PSAK No. 38, pengalihan aset, liabilitas, saham dan/atau instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Kelompok Usaha yang sama.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

Based on the above Deed of Merger No. 5, it is stated that the effective date of the merger is the date of issuance of the Receipt Notification of the Merger of the Entities from the Minister of Law and Human Rights of Pelindo II in connection with the merger, which is through its letter No. AHU-AH.01.10-0014401 dated October 1, 2021. With the commencement of this merger, Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV as the merging entities are dissolved by law since that date.

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended, have presented the effects of the merger.

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders Decision No. 7 dated October 1, 2021, the shareholders approved among others the changes of Article of Association, logo and name of the Company from Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia or abbreviated PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0053936.AH.01.02 *dated October 1, 2021.*

The transfer of assets and liabilities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to Pelindo II are recorded based on the pooling of interest method in accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities Under Common Control".

Based on PSAK No. 38, the transfer of assets, liabilities, shares and/or other ownership instruments between entities under common control will not result in a profit or loss for the Company or individual entities that are in the same group.

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan.

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan konsolidasian selama penggabungan terjadi disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal.

Penggabungan tersebut di atas menggunakan nilai buku mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Perubahan kedua atas PMK No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha. Sesuai dengan peraturan tersebut, manajemen akan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan pengggunaan nilai buku atas pengalihan aset Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Perusahaan (dahulu Pelindo II). Manajemen berkeyakinan dapat memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut untuk menggunakan nilai buku untuk tujuan perpajakan sehubungan dengan transaksi penggabungan.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

Because of restructuring transactions between entities under common control do not change the economic substance of the ownership of the assets, liabilities, shares or other ownership instruments that are exchanged, the transferred assets or liabilities must be recorded at their book value using the pooling of interest method.

In applying the pool of interests method, the components of the consolidated financial statements during the merger occurred are presented as if the merger had occurred since the beginning of the earliest presentation period.

Such merger as mentioned above is using book value which based on Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 dated June 4, 2021 regarding Second Amendment on PMK No. 52/PMK.010/2017 regarding The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover and General Director of Tax Regulation No. PER-21/PJ/2021 dated December 9, 2021 regarding Amendment on General Director of Tax Regulation No. PER-03/PJ/2021 regarding Procedures of Proposal and Issuance on Using Book Value for The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover. In accordance with the regulation, management will submit proposal to General Director of Tax to obtain approval for using book value on the transfers of assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company (formerly Pelindo II). Management believes that it can fulfill all requirements as required by such regulation for using book value for tax purposes in relation to the merger.

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31Desember 2019 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode pelaporan. Penyesuaian bagian kepentingan Perusahaan atas aset neto Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV, disajikan pada "Ekuitas *Merging Entity*" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019. Laba neto dari entitas yang bergabung dicatat sebagai "Laba Proforma *Merging Entity*" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020 (Catatan 4).

Sehubungan dengan telah ditetapkan PP No. 101 tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) (Catatan 1f) serta Surat Direksi Perusahaan (dahulu Pelindo II) tanggal 24 November 2021 tentang Usulan Nilai Kekayaan Definitif Perusahaan, Menteri BUMN menyampaikan usulan nilai kekayaan definitif kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. S-956/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Usulan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) berdasarkan laporan KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 23 September 2021.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

The consolidated statements of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 have been restated as if the effect of merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV into the Company had occurred since the beginning of the reporting period. The adjustment of the Company's interest in the net assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV is presented in "Merging Entity Equity" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019. Net income from entities merged are recorded as "Proforma Income from Merging Entity" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 4).

In relation to the establishment of PP No. 101 Year 2021 dated October 1, 2021 regarding the merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company (formerly Pelindo II) (Note 1f) and the Company's (formerly Pelindo II) Directors Letter dated November 24, 2021 regarding Proposal of Definitive Net Assets Value of the Company, the Minister of SOE delivered proposal of definitive net assets value to Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its letter No. S-956/MBU/12/2021 dated December 14, 2021. Such proposed definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount) based on the report of KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, independent appraisal, dated September 23, 2021.

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan usulan Menteri BUMN tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusannya No.527/KMK.6/2021 tanggal 29 Desember 2021, menetapkan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) (Catatan 1f).

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Nomor S-38/MBU/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notaris di Jakarta, melalui Akta Nomor 2 tanggal 9 Februari 2022, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp156.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 156.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).
- Pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 39.131.555 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) sehingga seluruhnya berjumlah Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh):
  - Sebesar Rp13.378.078.900.000 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo I ke dalam Perusahaan.
  - Sebesar Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo III ke dalam Perusahaan.
  - Sebesar Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo IV ke dalam Perusahaan.
  - Sebesar Rp878.740 (nilai penuh) merupakan setoran modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

Based on the proposal of the Minister of SOE as mentioned, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decision No.527/KMK.6/2021 dated December 29, 2021 established the definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount) (Note 1f).

Based on the decision of the Minister of SOE as the GMS Number S-38/MBU/01/2022 dated January 12, 2022 regarding Changes of Capital Structure and Changes of the Company's Article of Association, which has been notarized by Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notary in Jakarta, through Deed Number 2 dated February 9, 2022, the Company's shareholder approved among others:

- *Increase of the Company's authorized capital to Rp156,000,000,000,000 (full amount) divided into 156,000,000 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount.*
- *Issuance/placement of unused shares (portfolio) amounting to 39,131,555 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) totalling to Rp39,131,555,000,000 (full amount) which all taken by the State of The Republic of Indonesia.*
- *Additional capital by the State of The Republic of Indonesia to the Company's shares amounting to Rp39,131,555,000,000 (full amount):*
  - *Amounting to Rp13,378,078,900,000 (full amount) as a result of the merger of Pelindo I to the Company.*
  - *Amounting to Rp17,323,408,459,305 (full amount) as a result of the merger of Pelindo III to the Company.*
  - *Amounting to Rp8,435,066,761,955 (full amount) as a result of the merger of Pelindo IV to the Company.*
  - *Amounting to Rp878,740 (full amount) is a capital injection by the State of The Republic of Indonesia arising from the capitalization of part of the Company's reserves..*

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

g. Penambahan kepemilikan CTP

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat pada tanggal 21 Juli 2021 dan Akta Jual Beli Saham yang diaktakan dengan akta Notaris Ny. Hastuti Nainggolan, SH., M.Kn, No. 1 tanggal 1 Oktober 2021, API membeli saham CTP yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road (entitas dibawah pengendalian yang sama dan tidak bersifat sementara) sebanyak 1.386.131 lembar saham dengan harga beli sebesar Rp2.445.141.067 sehingga kepemilikan API pada CTP mengalami peningkatan dari 45,00% menjadi 100,00%.

API telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Waskita Toll Road pada tanggal 14 Oktober 2021.

Pembelian saham CTP oleh API tersebut memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi penambahan kepemilikan di CTP tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di CTP diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

The Deed of changes in Article of Association as mentioned above has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Number AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 dated March 1, 2022

g. Increase in ownership of CTP

Based on the Conditional Sales and Purchase Agreement on July 21, 2021 and The Deed of Shares Sales and Purchase which notarized by the Notarial Deed of Ny. Hastuti Nainggolan SH., M.Kn, No. 1 dated October 1 2021, API acquired CTP'shares which owned by PT Waskita Toll Road (an entity under common control and is not temporary) amounted to 1,386,131 shares at a purchase price of Rp2,445,141,067 which made the APIs ownership in CTP increased from 45.00% to 100.00%.

API has made payment of the shares transfer to PT Waskita Toll Road on October 14, 2021.

The acquisition of CTP by the API meet the criteria of business combination entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the increase in ownership of CTP transaction is recognized using the pooling of interest method. The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in CTP is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, with calculation as follows:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ *Amount recognized on transaction*	
Total nilai tercatat aset neto	2.256.810.555	*Total carrying amount of net assets*
55,00% dari total nilai tercatat aset neto	1.241.245.805	*55.00% of total carrying amount of net assets*
Peningkatan aset neto	**1.241.245.805**	***Increase in net assets***
Imbalan yang dialihkan	2.445.141.067	*Consideration paid*
Tambahan modal disetor	**(1.203.895.262)**	***Additional paid-in capital***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

h. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 29 Maret 2022. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

1. GENERAL (continued)

h. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 29, 2022. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Kelompok Usaha adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or " OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kelompok Usaha telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Kelompok Usaha akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 22: *Definisi Bisnis*

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis mengklarifikasi bahwa untuk dianggap sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset harus mencakup minimal, input dan proses substantif yang bersama-sama, berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan menghasilkan output. Selain itu, Amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu bisnis tetap ada walaupun tidak mencakup seluruh input dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output. Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, tetapi dapat berdampak pada periode-periode mendatang jika Kelompok Usaha melakukan kombinasi bisnis.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Changes in Accounting Principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2021, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

***Amendments to Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") 22:* Definition of a Business**

The amendment to PSAK 22 Business Combinations clarifies that to be considered a business, an integrated set of activities and assets must include, at a minimum, an input and a substantive process that, together, significantly contribute to the ability to create output. Furthermore, it clarifies that a business can exist without including all of the inputs and processes needed to create outputs. These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group, but may impact future periods should the Group enter into any business combinations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Amendemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 dan PSAK 73 - Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 2)

Amendemen-Amendemen ini memberikan kelonggaran sementara terkait dengan dampak pelaporan keuangan ketika suku bunga penawaran antarbank (*Interbank Offered Rate*) diganti dengan acuan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko (SBB). Amendemen tersebut mencakup cara praktis sebagai berikut ini:

- Cara praktis yang mensyaratkan perubahan kontraktual, atau perubahan arus kas yang secara langsung sebagaimana disyaratkan oleh reformasi (suku bunga acuan), untuk diperlakukan sebagai perubahan suku bunga mengambang, yang setara dengan pergerakan suku bunga pasar.

- Mengizinkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi suku bunga acuan terhadap penetapan dan dokumentasi lindung nilai tanpa penghentian hubungan lindung nilai.

- Memberikan kelonggaran sementara kepada entitas untuk memenuhi ketentuan dapat diidentifikasi secara terpisah, pada saat instrumen SBB ditetapkan sebagai lindung nilai dari suatu komponen risiko.

Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. Kelompok Usaha bermaksud untuk menggunakan cara praktis di periode-periode mendatang jika dapat diterapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Principles (continued)

Amendments to PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 and PSAK 73 - Interest Rate Benchmark Reform (Phase 2)

The amendments provide temporary reliefs which address the financial reporting effects when an interbank offered rate (IBOR) is replaced with an alternative nearly risk-free interest rate (RFR). The amendments include the following practical expedients:

- *A practical expedient to require contractual changes, or changes to cash flows that are directly required by the (interest rate benchmark) reform, to be treated as changes to a floating interest rate, equivalent to a movement in a market rate of interest.*

- *Permit changes required by interest rate benchmark reform to be made to hedge designations and hedge documentation without the hedging relationship being discontinued.*

- *Provide temporary relief to entities from having to meet the separately identifiable requirement when an RFR instrument is designated as a hedge of a risk component.*

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group. The Group intends to use the practical expedients in future periods if they become applicable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Amendemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021

Sehubungan dengan pandemi yang terus berlangsung, Amendemen tambahan diterbitkan pada bulan Maret 2021 dimana memperpanjang cakupan periode konsesi sewa, yang merupakan salah satu syarat penerapan cara praktis, dari tanggal 30 Juni 2021 dalam amendemen PSAK 73 Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 yang diterbitkan di bulan Mei 2020, menjadi 30 Juni 2022.

Jika penyewa telah menerapkan cara praktis dalam Amendemen di bulan Mei 2020, maka diharuskan untuk terus menerapkannya secara konsisten, untuk semua kontrak sewa dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa, menggunakan Amendemen tersebut. Jika penyewa tidak menerapkan cara praktis dalam Amendemen di bulan Mei 2020 untuk konsesi sewa yang memenuhi syarat, maka penyewa tidak dapat menerapkan cara praktis dalam Amendemen di bulan Maret 2021.

Amendemen Maret 2021 diterapkan secara retrospektif, dengan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal Amendemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba pada awal periode pelaporan tahunan di mana penyewa pertama kali menerapkan Amendemen tersebut.

Namun, Kelompok Usaha belum menerima konsesi sewa terkait Covid-19, tetapi berencana untuk menerapkan cara praktis jika berlaku dalam periode penerapan yang diizinkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Principles (continued)

Amendments to PSAK 73: Leases - Covid-19 Related Rent Concessions After June 30, 2021

In light of the ongoing pandemic additional amendment was subsequently issued in March 2021 to extend the scope of the lease concession period, which is one of the conditions for applying the practical expedient, from June 30, 2021 in Covid-19 Related Rent Concessions - Amendments to PSAK 73: Leases issued in May 2020, to June 30, 2022.

If a lessee already applied the practical expedient in the May 2020 amendment, it is required to continue to apply the practical expedient consistently, to all lease contracts with similar characteristics and in similar circumstances, using the March 2021 amendment. If a lessee did not apply the practical expedient in the May 2020 amendment to eligible lease concessions, it is prohibited from applying the practical expedient in the March 2021 amendment.

The March 2021 amendment is to be applied retrospectively, recognizing the cumulative effect of initially applying that amendment as an adjustment to the opening balance of retained earnings at the beginning of the annual reporting period in which the lessee first applies the amendment.

However, the Group has not received Covid-19-related rent concessions but plans to apply the practical expedient if it becomes applicable within allowed period of application.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Penyesuaian Tahunan 2021

Berikut adalah ringkasan informasi tentang penyesuaian PSAK tahunan 2021 yang berlaku efektif untuk pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penyempurnaan PSAK tahunan pada dasarnya merupakan rangkaian Amendemen dalam lingkup sempit yang memberikan klarifikasi agar tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip yang ada atau prinsip-prinsip baru.

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, beberapa perubahan tentang pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
- PSAK 13: Properti Investasi, tentang pengungkapan penerapan model nilai wajar telah dihapus.
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, tentang ruang lingkup penurunan nilai aset dan menghapus perbedaan dengan IFRS pada IAS 36 paragraf 04(a).
- PSAK 66: Pengaturan Bersama, mengenai penyesuaian pada paragraf 25, PP11, PP33A(b) dan catatan kakinya, C12 dan C14 tentang rujukan ke PSAK 71: Instrumen Keuangan.
- ISAK 16: Pengaturan Konsesi Jasa, mengenai penyesuaian dalam beberapa paragraf dalam contoh ilustrasi agar konsisten dengan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, *investor* mengendalikan *investee* jika dan hanya jika *investor* memiliki seluruh hal berikut ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Principles (continued)

2021 Annual Improvements

The following summary provides information on the annual improvements of PSAKs that are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2021. The annual improvements of PSAK are basically a set of narrow scope amendments that provide clarification so that there are no significant changes to existing principles or new principles.

- *PSAK 1: Presentation of Financial Statements, some changes regarding consideration made by management in the process of applying accounting policies that significantly affect the amounts they recognize in the financial statements.*
- *PSAK 13: Investment Property, regarding disclosure of applying fair value model has been deleted.*
- *PSAK 48: Impairment of Assets, regarding the scope of impairment of assets and deletion of the difference with IFRS in IAS 36 paragraph 04(a).*
- *PSAK 66: Joint Arrangement, Regarding adjustments in paragraphs 25, PP11, PP33A(b) and its footnotes, C12 and C14 regarding reference to PSAK 71: Financial instruments.*
- *ISAK 16: Service concession arrangement, regarding adjustment in several paragraphs in illustrative example to be consistent with PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.*

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Kelompok Usaha tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh kendali sampai tanggal Kelompok Usaha tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,

ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Kelompok Usaha dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" (Catatan 1d dan 1e).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (nilai penuh):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Note 1d and 1e).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2021, 2020 and 2019 (full amount):

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**31 Desember 2019/ *December 31, 2019***	
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	14.269	14.105	13.901	*United States Dollar (USD) 1*
Euro Eropa (EUR) 1	16.126	17.330	15.589	*European Euro (EUR) 1*
Dolar Singapura (SGD) 1	10.533	10.644	10.321	*Singapore Dollar (SGD) 1*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 45.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with Related Parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 45.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

f. Business Combinations Entities Under Common Control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Kas dan Setara Kas (lanjutan)

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

h. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan *crane*, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

i. Beban Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah salah satu tipe pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Cash and Cash Equivalents (continued)

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

h. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method and specific identification. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

j. Investment in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Kelompok Usaha atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKLKelompok Usaha. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Kelompok Usaha atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investment in Associates (continued)

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Setelah penerapan metode ekuitas, Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

k. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investment in Associates (continued)

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

k. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lifes of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Properti Investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

l. Aset Tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

Jenis Aset	Tahun/*Years*	*Type of Assets*
Bangunan fasilitas pelabuhan	2 - 50	*Building and port facilities*
Kapal	4 - 20	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	2 - 20	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	2 - 50	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	2 - 50	*Road and building*
Peralatan	3 - 25	*Equipment*
Kendaraan	4 - 5	*Vehicles*
Emplasemen	3 - 50	*Emplacement*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Investment Properties (continued)

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

l. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

After to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Fixed Assets (continued)

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

At the end of reporting period, the residual values, useful lifes and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Land is stated at cost and not depreciated.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerjasama operasi merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerjasama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

m. Sewa

Kelompok Usaha menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Kelompok Usaha sebagai Penyewa

Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Kelompok usaha mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed Assets (continued)

The cost of major repairs is recognized as the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lifes of similar fixed assets.

m. Lease

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna

Kelompok usaha mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Kelompok Usaha akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Kelompok Usaha dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Lease (continued)

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Kelompok Usaha menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Kelompok Usaha juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Kelompok Usaha sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Kelompok Usaha tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Lease (continued)

Lease liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Pengaturan bersama

Kelompok Usaha merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Kelompok Usaha dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:
- Ventura bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak hanya pada net aset dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Kelompok Usaha mempertimbangkan hal-hal berikut:
- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual
- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Kelompok Usaha mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Joint arrangements

The Group is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Group and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Group classifies its interests in joint arrangements as either:

- *Joint ventures: where the Group has rights to only the net assets of the joint arrangement*
- *Joint operations: where the Group has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.*

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Group considers:

- *the structure of the joint arrangement*
- *the legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *the contractual terms of the joint arrangement agreement*
- *any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

The Group accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

o. Intangible Assets

Intangible assets of the Group consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intagible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direviu setidaknya setiap akhir tahun tutup buku**.**

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat: i) dilepaskan; atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Aset Hak Konsesi

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset shall be derecognize: i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal pelabuhan dan alur pelayaran diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Kelompok Usaha dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

The Group records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are port terminal and shipping channel concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the port terminal and shipping channel. During the construction period, the accumulated port terminal and shipping channel construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") for no consideration.

Concession asset which granted to the Group are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi Pemeliharaan Terminal

Dalam pengoperasian terminal, Kelompok Usaha mempunyai kewajiban untuk menyerahkan aset pada akhir masa konsesi kepada OP dalam kondisi baik, antara lain dengan melakukan pemeliharaan secara berkala. Provisi pemeliharaan terminal diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - port terminal and shipping channel which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets are amortized over the concession period using straight line method.

Provision for Terminal Maintenance

In operating terminal, the Group has the obligation to transfer assets to OP at the end of concession period in good condition, among others by performing regular maintenance. The estimated net provision for terminal maintenance is discounted to its present value that reflects current provision.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima di muka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Capitalization of Borrowing Cost

The Group implemented PSAK No. 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

q. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Pendapatan dan Beban

Kelompok Usaha mengadopsi PSAK 72 pada tanggal 1 Januari 2020 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui efek kumulatif pada awal penerapan PSAK 72 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020.

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (*5-steps model*) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expenses

The Group adopted PSAK 72 dated January 1, 2020 using a retrospective method modified by recognizing the cumulative effect at the beginning of the application of PSAK 72 as an adjustment to the opening balance of equity on January 1, 2020.

PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" provides a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Selain itu, dalam mengadopsi PSAK 72, Kelompok Usaha juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pembiayaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengalihan untuk barang atau layanan tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Kelompok Usaha untuk pendapatan pelayanan terminal petikemas, pengusahaan tanah, bangunan, air & listrik, pelayanan jasa terminal, pelayanan jasa kapal, jasa logistik, pelayanan kesehatan, pendapatan pas pelabuhan, pengusahaan peralatan, pelayanan jaringan & konsultasi sistem informasi, pelayanan jasa barang, jasa keuangan, pendapatan dan pendapatan jasa lain-lain.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Kelompok Usaha menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa.

Fitur yang mengindikasikan bahwa Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal mencakup:

a. Kelompok Usaha mempunyai tanggung jawab utama menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan, atau memenuhi pesanan, misalnya Kelompok Usaha bertanggungjawab untuk penerimaan atas produk dan jasa yang dipesan atau dibeli oleh pelanggan;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expenses (continued)

In addition, in adopting PSAK 72, the Group has also chosen to apply practical guidance not to take into account the impact of the financing component when the period between payment for the goods or services promised and the transfer for the goods or services to the customer is less than one year.

Below is a summary of the Group's revenue recognition accounting policies for revenue from container services, land, building, water & electricity, terminal services, vessel services, logistic services, medical services, port entry fee, equipment services, network services and consultant of information system, cargo services, financial services, cleaning services and other services.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

The Group assesses its revenue arrangements against certain criteria to determine whether it is acting as principal or agent. The Group acts as the principal if it bears the impact of significant benefits and risks associated with the sale of goods and services.

Features that indicate that the Group is acting as a principal include:

a. The Group has the main responsibility of providing goods or services to customers, or fulfilling orders, for example, the Group is responsible for receiving products and services ordered or purchased by customers;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Fitur yang mengindikasikan bahwa Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal mencakup: (lanjutan)

b. Kelompok Usaha mempunyai risiko persediaan sebelum atau setelah pesanan pelanggan, selama pengiriman atau pengembalian;

c. Kelompok Usaha mempunyai kebebasan untuk menentukan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya menyediakan barang dan jasa tambahan; dan

d. Kelompok Usaha menanggung risiko kredit pelanggan atas jumlah yang dapat diterima dari pelanggan.

Kelompok Usaha telah melakukan analisa atas transaksi penjualan dan menyimpulkan bahwa Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatan.

Pengakuan Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama tahun berjalan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan dari aset atau peningkatan liabilitas yang menyebabkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan pembagian kepada pemilik ekuitas. Beban diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

s. Perpajakan

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expenses (continued)

Features that indicate that the Group is acting as a principal include: (continued)

b. The Group is subject to inventory risk before or after a customer order, during delivery or return;

c. The Group has the freedom to determine prices either directly or indirectly, for example providing additional goods and services; and

d. The Group bears the credit risk of the customers for the amounts it can receive from the customers.

The Group has analyzed the sales transaction and concluded that the Group acts as the principal in all revenue agreements.

Expenses Recognition

Expenses represent decreases in economic benefits during the year in the form of cash outflows or decreases from assets or increases in liabilities that cause a decrease in equity, other than those related to distributions to owners of equity. Expenses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred.

s. Taxation

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Kelompok Usaha beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam SPT sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Taxation (continued)

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Kelompok Usaha menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

t. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Taxation (continued)

Uncertainty over Income Tax

In accordance with ISAK 34: Uncertainty Over Income Tax Treatments which is effective on January 1, 2019, stated that the recognition and measurement of tax assets and liabilities that contain uncertainty over income tax are determined by considering whether to be treated separately or together, the assumptions used in the examination of tax treatments by the Tax Authorities, consideration the probability that the Tax Authorities will accept uncertain tax treatment and re-consideration or estimation if there is a change in facts and circumstances.

If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is probable, the measurement is in line with income tax fillings. If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is not possible, the Group measures its tax balances using the method that provides the better predict of resolution (i.e. most likely amount or expected value).

Accordingly, management believes that the interpretation did not have a significant impact on the consolidated financial statements.

t. Employee Benefits

Post-Employment Benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat memengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan. Penerapan peraturan tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memilki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini.

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan *(vested)*.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees. The implementation of the new regulation did not result in major changes to the Group's accounting policy and had no material impact on the amounts reported for the current.

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program Iuran Pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

u. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Kelompok Usaha mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Kelompok Usaha telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2r.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Kelompok Usaha untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Employee Benefits (continued)

Defined Contribution Plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

u. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2r.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR.

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kelompok Usaha mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Kelompok Usaha yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang, aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *FVTPL.*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments, other current assets and other non-current assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Instrumen utang Kelompok Usaha yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuotasi yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Kelompok Usaha dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Kelompok Usaha memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at FVOCI (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Group's debt instruments at FVOCI includes investments in quoted debt instruments included under other non-current financial assets.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Kelompok Usaha diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir
  Atau
- Kelompok Usaha telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Kelompok Usaha telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Kelompok Usaha telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Kelompok Usaha mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Kelompok Usaha masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Kelompok Usaha tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Kelompok Usaha tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Kelompok Usaha.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Kelompok Usaha untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired*
  Or
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual dan akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Kelompok Usaha atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dilklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Kelompok Usaha menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainya, utang bank, liabilitas jangka panjang lainnya, utang obligasi, utang lembaga keuangan non-bank dan liabilitas sewa.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Initial Recognition and Measurement (continued)
All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liability, bank loans, other long term liabilities, bonds payable, loan from non-bank financial institution and lease liabilities.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman) (lanjutan)

(ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings) (continued)

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

w. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

x. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

Diluted earning per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting year, adjusted to assume conversion of all potential dilutive ordinary shares.

w. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

x. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Informasi Segmen (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

y. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

z. Klasifikasi Lancar dan Tak Lancar

Kelompok Usaha menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,

ii) untuk diperdagangkan,
iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Segment Information (continued)

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. Segments are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

y. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

z. Classification of Current and Non-Current Assets

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

i) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or
iv) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

z. Klasifikasi Lancar dan Tak Lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:
i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,

ii) untuk diperdagangkan,
iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis - Rujukan ke Kerangka Konseptual

Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum, amendemen PSAK 22:
- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30".
- Mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang telah diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Classification of Current and Non-Current Assets (continued)

A liability is current when it is:
i) expected to be settled in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) due to be settled within 12 months after the reporting period, or
iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. The Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

Effective beginning on or after January 1, 2022

Amendments to PSAK 22: Business Combinations - Reference to Conceptual Frameworks

These amendments clarify the interactions between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.

In general, the amendments to PSAK 22:
- *Add a description regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30".*
- *Clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.*
- *Adds definition of a contingent asset and its accounting treatment.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 (lanjutan)

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis - Rujukan ke Kerangka Konseptual (lanjutan)

Amendemen PSAK 22 ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan Amendemen ini tidak diekspektasi memiliki dampak pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak

Amendemen PSAK 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari:

1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan Amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 71: Instrumen Keuangan

Amendemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2022 (continued)

Amendments to PSAK 22: Business Combinations - Reference to Conceptual Frameworks (continued)

These amendments will become effective on January 1, 2022 with earlier application permitted and are not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets - Onerous Contract Fulfillment Costs

These amendments provide that costs to fulfill an onerous contract consist of costs that are directly related to the contract, which consist of:

1. *incremental costs to fulfill the contract, and*
2. *allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.*

Amendments to PSAK 57 are effective on January 1, 2022 with earlier application permitted and are not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

2020 Annual Improvements – PSAK 71: Financial Instruments

The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the modified terms of a financial liability required derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 (lanjutan)

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen Keuangan (lanjutan)

Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 73: Sewa

Amendemen terhadap Contoh Ilustrasi 13 yang merupakan bagian dari PSAK 73 dengan menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian perbaikan properti sewaan oleh pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena cara insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

Amendemen ini diterapkan secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan diperkenankan namun Amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2022 (continued)

2020 Annual Improvements - PSAK 71: Financial Instruments (continued)

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

2020 *Annual Improvements - PSAK 73: Leases*

The amendment to Illustrative Example 13 accompanying PSAK 73 removes from the example the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that might arise because of how lease incentives are illustrated in that example.

The amendment prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

Effective beginning on or after January 1, 2023

Amendments to PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan (lanjutan)

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dimana entitas pertama kali menerapkan Amendemen tersebut.

Amendemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan hakya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif.

Amendemen tersebut diekspektasikan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2023 (continued)

Amendments to PSAK 16: *Fixed Assets - Proceeds before Intended Use (continued)*

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively to items of property, plant and equipment made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Group.

Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements - Classification of a Liability as current or non-current

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- *what is meant by a right to defer settlement,*
- *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively.

The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)

Amendemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amendemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amendemen ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Kelompok Usaha saat ini sedang menilai dampak dari Amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2023 (continued)

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provides guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments are effective on or after January 1, 2023 with earlier application permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's accounting policy disclosures.

Amendment of PSAK 25: *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – Definition of Accounting Estimates*

The amendments introduces a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)

Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi (lanjutan)

Amendemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan dini diperkenankan. Kelompok Usaha saat ini sedang menilai dampak dari Amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Kelompok Usaha saat ini sedang menilai dampak dari Amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2023 (continued)

Amendment of PSAK 25: *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates (continued)*

The amendments are effective on or after January 1, 2023 and apply to changes in accounting policies and changes in accounting estimates that occur on or after the start of that period. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 with early adoption permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

PSAK 74: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 74 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 74. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha pada saat diadopsi untuk pertama kali.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2025

PSAK 74: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 74 will replace PSAK 62: Insurance Contracts. *PSAK 74 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.*

PSAK 74 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 71 and PSAK 72 on or before the date of initial application of PSAK 74. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgements and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.109.540 (2020: Rp18.134.450). Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 24.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Nilai tercatat atas tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.334.916 (2020: Rp11.277.104). Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 24.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following disclosure represent a summary of the significant estimates, judgements and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgement is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2021 was Rp31,109,540 (2020: Rp18,134,450). Further details regarding taxation are disclosed in Note 24.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. The carrying amount of the Group's claims for tax refund and tax assessments under appeal as of December 31, 2021 was Rp30,334,916 (2020: Rp11,277,104). Further explanations regarding this account are provided in Note 24.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Kelompok Usaha sebagai penyewa
Kelompok Usaha menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Kelompok usaha memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Kelompok Usaha mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Kelompok Usaha menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 11.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada Catatan 2u.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee
The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 11.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by complying the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2u.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 49).

Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan terminal pelabuhan dan alur pelayaran kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Classification of financial assets and financial liabilities (continued)

If the Group determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, the Group includes them in a group of trade receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for companys of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a company of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the company. Further details are disclosed in Note 7.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. ISAK 16 provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

Port Authority ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 49).

Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the port terminal and shipping channel free of any form of charges, inluding reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the port terminal and shipping channel.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Kelompok Usaha berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Kelompok Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp3.195.512.405 dan Rp3.924.471.433.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa marjin.

Kerugian Kredit Ekpektasian untuk Aset Keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Kelompok Usaha menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekpektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Kelompok Usaha telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Service concession arrangement (continued)

The Group has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the year ended December 31, 2021 dan 2020, the Group recognized construction revenue amounting to Rp3,195,512,405 and Rp3,924,471,433, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Expected Credit Loss for Financial Assets

For trade receivables and contract assets, the Group applies practical guidelines in calculating expected credit losses. Accordingly, the Group does not identify changes in credit risk, but rather measures the allowance for losses based on expected credit losses as long as the assets hold at the reporting date. The Group has established a provisioning matrix based on historical data on credit losses, adjusted for specific forward-looking factors related to customers and the economic environment.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekpektasian untuk Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Kelompok Usaha menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Kelompok Usaha menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Kelompok Usaha menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 7 dan 8.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Expected Credit Loss for Financial Assets (continued)

For debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, the Group applies the simplified method. At each reporting date, the Group evaluates whether a debt instrument is considered to have low credit risk using all available information without undue cost or effort. In conducting this evaluation, the Group reassesses the external credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when the contract payment is more than 30 days in arrears.

The Group evaluates whether there is objective evidence that trade receivables are impaired at the end of each reporting period. Provision for impairment of trade and other receivables is calculated based on the current condition and historical collectibility of trade receivables. These provisions are adjusted periodically to reflect actual and estimated results. Details of the nature and carrying amount of provision for impairment of receivables are disclosed in Notes 7 and 8.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Kelompok Usaha menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokan pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif default yang diamati Kelompok Usaha secara historis. Kelompok Usaha akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah default di sektor usaha Kelompok Usaha, tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif default yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang dapat diamati secara historis, taksiran kondisi ekonomi dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Kelompok Usaha dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual default pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of financial assets

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Group's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Estimate useful lifes of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2l. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2h, 2j, 2l, 2o, 11, 13, 14, 15, 16 dan 18.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 24.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 24.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimate useful lifes of fixed assets (continued)

Estimated useful lifes of fixed assets are disclosed in Note 2l. There is no change in the estimated useful lifes of fixed assets during the year.

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Group's operations.

Further details are disclosed in Notes 2h, 2j, 2l, 2o, 11, 13, 14, 15, 16 and 18.

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 24.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 24.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan masing-masing sebesar Rp6.560.923.531, Rp6.938.142.497 dan Rp4.822.593.130 (Catatan 30).

Penyusutan aset hak-guna

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak-guna antara 1 (satu) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, employee benefits liability amounted to Rp6,560,923,531, Rp6,938,142,497 and Rp4,822,593,130, respectively (Note 30).

Depreciation of right-of-use assets

The costs of right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lifes. Management estimates the useful lifes of these leased assets to be within 1 (one) to 33 (thirty three) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lifes and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Sewa - Memperkirakan suku bunga pinjaman tambahan

Kelompok Usaha tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman tambahan (IBR) untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Kelompok Usaha untuk meminjam dengan syarat yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkup ekonomi yang serupa.

Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perusahaan, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedianya tingkat suku bunga yang dapat diobservasi atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan dari sewa. Kelompok Usaha mengestimasi IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti tingkat suku bunga pasar) jika tersedia dan diperlukan untuk membuat estimasi-spesifik entitas tertentu.

Amortisasi aset hak konsesi

Kelompok Usaha melakukan amortisasi hak aset konsesi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi pemeliharaan aset konsesi

Provisi pemeliharaan aset konsesi ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan sehubungan dengan kewajiban penyerahan aset kepada OP dalam kondisi baik pada akhir masa konsesi.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Leases - Estimating the incremental borrowing rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment.

The IBR therefore reflects what the Group 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates.

Amortization of concession assets

The Group decided to amortized concession assets using straight line method over the concession period.

Provision for concession assets maintenance

Provision for concession assets maintenance will be recorded periodically based on the estimated provision needed for maintenance in relation to the obligation to transfer assets to OP in good condition at the end of concession period.

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31Desember 2019 telah disajikan kembali untuk mencerminkan (1) dampak penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan (Catatan 1f), dan (2) dampak penambahan kepemilikan di CTP (Catatan 1g), seolah-olah seluruh kombinasi bisnis tersebut telah terjadi sejak awal periode pelaporan. Dengan demikian, penyesuaian bagian kepentingan Perusahaan atas aset neto entitas yang bergabung dan aset neto CTP, disajikan pada "Ekuitas *Merging Entity*" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019. Laba (rugi) neto dari entitas yang bergabung dan CTP yang diperoleh dicatat sebagai "Laba (Rugi) Proforma *Merging Entity*" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020.

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, efek penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated statements of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 have been restated to reflect (1) the effect of merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company (Note 1f), and (2) the effect of increase of ownership in CTP (Note 1g), as if all business combination had occurred since the beginning of the reporting period. Therefore, the adjustment of the Company's interest over the merged entities net assets and CTP net assets are presented in "Equity of Merging Entity" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019. Net profit (loss) from the merged entities and CTP acquired are recorded as "Profit (Loss) Proforma Merging Entity" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Summary of amounts previously reported, the adjustments effect and the restated amounts are as follows:

Laporan posisi keuangan konsolidasian / *Consolidated statement of financial position*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As previously reported*	Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ *Merger transaction adjustment effect (Note 1f)*	Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ *CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)*	Disajikan kembali/ *As restated*	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	5.298.274.315	6.253.595.090	61.187.385	11.613.056.790	*Cash and cash equivalent*
Investasi jangka pendek	11.090.879.218	3.000.000	500.000	11.094.379.218	*Short-term investment*
Piutang usaha, neto	621.234.556	935.723.926	-	1.556.958.482	*Trade receivables, net*
Piutang lain-lain, neto	1.191.805.010	338.669.913	(110.872.448)	1.419.602.475	*Other receivables, net*
Uang muka dan beban dibayar di muka	93.350.043	93.947.569	5.179.391	192.477.003	*Advances and prepaid expenses*
Pendapatan masih akan diterima	278.739.081	225.045.632	-	503.784.713	*Accrued revenues*
Persediaan	55.314.157	131.727.282	-	187.041.439	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	524.068.875	637.748.365	-	1.161.817.240	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	9.822.586	137.014.618	7.241.188	154.078.392	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**19.163.487.841**	**8.756.472.395**	**(36.764.484)**	**27.883.195.752**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi jangka panjang	2.776.393.603	1.360.500.056	(618.576.642)	3.518.317.017	*Long-term investments*
Properti investasi - neto	337.941.738	529.475.008	-	867.416.746	*Investment properties - net*
Aset tetap - neto	14.190.173.679	30.041.679.395	346.749.851	44.578.602.925	*Fixed assets - net*
Aset kerjasama operasi - neto	434.117.133	-	-	434.117.133	*Joint operation assets - net*
Aset hak-guna - neto	162.800.761	271.051.587	82.168.413	516.020.761	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan	158.035.340	595.523.081	-	753.558.421	*Deferred tax assets*
Aset takberwujud - neto	11.863.510.745	16.271.570.007	8.566.548.477	36.701.629.229	*Intangible assets - net*
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.052.309.931	260.463.515	-	1.312.773.446	*Estimated claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	1.545.880.270	404.157.618	61.078.476	2.011.116.364	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar	**32.521.163.200**	**49.734.420.267**	**8.437.968.575**	**90.693.552.042**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET	**51.684.651.041**	**58.490.892.662**	**8.401.204.091**	**118.576.747.794**	***TOTAL ASSETS***

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position (continued)

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***As previously reported***	**Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/** ***Merger transaction adjustment effect (Note 1f)***	**Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/** ***CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)***	**Disajikan kembali/** ***As restated***	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	-	-	4.000.000	*Short-term bank loans*
Utang usaha	1.581.921.230	1.624.912.796	1.747.190.300	4.954.024.326	*Trade payables*
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	957.175.849	421.863.673	-	1.379.039.522	*Short-term unearned revenues*
Utang pajak	357.031.402	290.495.752	-	647.527.154	*Taxes payable*
Beban akrual	1.765.278.079	1.475.399.894	423.810.706	3.664.488.679	*Accrued expenses*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang					*Current maturities of long-term liabilities*
Utang obligasi	-	499.768.052	-	499.768.052	*Bonds payable*
Utang bank	-	504.471.670	-	504.471.670	*Bank loans*
Liabilitas sewa	60.214.419	15.140.092	-	75.354.511	*Lease liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	314.856.006	1.127.076.349	512.048.273	1.953.980.628	*Other current liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**5.040.476.985**	**5.959.128.278**	**2.683.049.279**	**13.682.654.542**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar					*Long-term liabilities - of current maturities*
Utang obligasi	22.333.703.064	17.365.477.435	-	39.699.180.499	*Bonds payable*
Utang bank	-	7.558.701.974	3.570.294.516	11.128.996.490	*Bank loans*
Liabilitas sewa	112.676.519	206.694.883	-	319.371.402	*Lease liabilities*
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	1.002.703.343	1.002.703.343	*Loan from non-bank financial institution*
Liabilitas pajak tangguhan	43.507.959	74.266.124	-	117.774.083	*Deferred tax liabilities*
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.060.901.225	558.027.174	1.519.809	4.620.448.208	*Long-term unearned revenue*
Liabilitas jangka panjang lainnya	242.158.111	83.251.986	467.235.315	792.645.412	*Other long-term liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	2.764.262.295	4.173.880.202	-	6.938.142.497	*Employee benefit liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**29.557.209.173**	**30.020.299.778**	**5.041.752.983**	**64.619.261.934**	***Total Non-current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**34.597.686.158**	**35.979.428.056**	**7.724.802.262**	**78.301.916.476**	***TOTAL LIABILITIES***

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position (continued)

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***As previously reported***	**Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/** ***Merger transaction adjustment effect (Note 1f)***	**Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/** ***CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)***	**Disajikan kembali/** ***As restated***	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)					***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
Ekuitas					***Equity***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing Modal dasar - 4.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham	1.444.029.000	-	-	1.444.029.000	*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) Authorized capital - 4,000,000 shares Issued and fully paid - 1,444,029 shares*
Modal donasi	26.825.982	-	-	26.825.982	*Donated capital*
Tambahan modal disetor	(205.004.707)	-	-	(205.004.707)	*Additional paid-in capital*
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	-	836.072.934	-	836.072.934	*Difference in value of transactions with non-controlling interest*
Ekuitas *merging entity*	-	20.925.719.926	590.686.286	21.516.406.212	*Merging entity equity*
Saldo laba					*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	15.021.058.681	-	-	15.021.058.681	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	907.447.522	-	85.572.026	993.019.548	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	(1.119.689.737)	-	143.517	(1.119.546.220)	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	**16.074.666.741**	**21.761.792.860**	**676.401.829**	**38.512.861.430**	***Equity attributable to owners of the parent entity – net***
Kepentingan nonpengendali	1.012.298.142	749.671.746	-	1.761.969.888	*Non-controlling interests*
Ekuitas - neto	**17.086.964.883**	**22.511.464.606**	**676.401.829**	**40.274.831.318**	***Equity - net***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**51.684.651.041**	**58.490.892.662**	**8.401.204.091**	**118.576.747.794**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ *Years Ended December 31, 2020*				
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As previously reported*	**Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ *Merger transaction adjustment effect (Note 1f)***	**Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ *CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)***	**Disajikan kembali/ *As restated***	
Pendapatan operasi	10.453.610.044	16.137.521.783	-	26.591.131.827	*Operating revenues*
Pendapatan konstruksi	957.228.613	1.962.041.774	1.005.201.046	3.924.471.433	*Construction revenues*
Beban operasi	(8.271.983.135)	(12.403.950.225)	-	(20.675.933.360)	*Operating expenses*
Beban konstruksi	(957.228.613)	(1.962.041.774)	(1.005.201.046)	(3.924.471.433)	*Construction revenues*
Beban operasi lainnya – neto	(85.551.623)	(107.837.176)	(3.149.309)	(196.538.108)	*Other operating expense - net*
LABA USAHA	**2.096.075.286**	**3.625.734.382**	**(3.149.309)**	**5.718.660.359**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	508.515.645	189.322.558	1.743.545	699.581.748	*Finance income*
Beban keuangan	(1.122.841.759)	(1.419.948.396)	(1.576.016)	(2.544.366.171)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi	(97.537.586)	58.238.991	(700.112)	(39.998.707)	*Equity in income of associates*
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	**1.384.211.586**	**2.453.347.535**	**(3.681.892)**	**3.833.877.229**	***INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak final	(397.544.704)	(38.635.574)	-	(436.180.278)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**986.666.882**	**2.414.711.961**	**(3.681.892)**	**3.397.696.951**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN					***CORPORATE INCOME TAX EXPENSE***
Kini	(116.190.631)	(629.676.474)	-	(745.867.105)	*Current*
Tangguhan	286.311.037	(7.304.062)	28.105.650	307.112.625	*Deferred*
LABA TAHUN BERJALAN	**1.156.787.288**	**1.777.731.425**	**24.423.758**	**2.958.942.471**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					***Item that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak	(794.030.284)	(849.350.669)	184.013	(1.643.196.940)	*Remeasurements of defined benefit plans - net off tax*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					***Item that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(329.194.038)	143.516	-	(329.050.522)	*Exchange differences due to financial statements translation*
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	108.347.081	-	-	108.347.081	*Changes in fair value of available-for-sale financial assets*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**141.910.047**	**928.524.272**	**24.607.771**	**1.095.042.090**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian

4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position

	1 Januari 2020/31 Desember 2019/ *January 1,2020/December 31, 2019*				
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As previously reported*	**Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ *Merger transaction adjustment effect (Note 1f)***	**Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ *CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)***	**Disajikan kembali/ *As restated***	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	15.603.533.329	6.040.249.242	176.231.353	21.820.013.924	*Cash and cash equivalent*
Investasi jangka pendek	2.596.701.126	27.939.981	-	2.624.641.107	*Short-term investment*
Piutang usaha, neto	848.025.482	1.146.394.686	-	1.994.420.168	*Trade receivables, net*
Piutang lain-lain, neto	830.069.397	437.204.768	403.361.895	1.670.636.060	*Other receivables, net*
Uang muka dan beban dibayar di muka	104.181.981	148.283.756	2.291.204	254.756.941	*Advances and prepaid expenses*
Pendapatan masih akan diterima	305.452.354	255.240.090	-	560.692.444	*Accrued revenues*
Persediaan	82.940.596	118.330.202	-	201.270.798	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	680.605.067	981.470.218	-	1.662.075.285	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	10.253.126	43.351.836	64.189.085	117.794.047	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**21.061.762.458**	**9.198.464.779**	**646.073.537**	**30.906.300.774**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi jangka panjang	3.211.023.600	1.008.476.665	(584.174.631)	3.635.325.634	*Long-term investments*
Properti investasi - neto	357.295.487	528.408.163	-	885.703.650	*Investment properties - net*
Aset tetap - neto	13.387.155.835	28.852.135.176	481.174	42.239.772.185	*Fixed assets - net*
Aset kerjasama operasi - neto	461.100.101	-	-	461.100.101	*Joint operation assets - net*
Aset pajak tangguhan	73.873.814	259.300.281	(91.780.793)	241.393.302	*Deferred tax assets*
Aset takberwujud - neto	10.818.271.480	15.096.560.865	6.613.775.229	32.528.607.574	*Intangible assets - net*
Taksiran tagihan restitusi pajak	958.917.154	215.984.806	-	1.174.901.960	*Estimated claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	1.711.199.806	628.291.009	121.702.288	2.461.193.103	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar	**30.978.837.277**	**46.589.156.965**	**6.060.003.267**	**83.627.997.509**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET	**52.040.599.735**	**55.787.621.744**	**6.706.076.804**	**114.534.298.283**	***TOTAL ASSETS***

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position (continued)

	1 Januari 2020/31 Desember 2019/ *January 1,2020/December 31, 2019*				
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As previously reported*	**Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ *Merger transaction adjustment effect (Note 1f)***	**Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ *CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)***	**Disajikan kembali/ *As restated***	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka pendek	34.193.914	-	-	34.193.914	*Short-term bank loans*
Utang usaha	1.436.482.338	3.024.083.218	2.255.708.964	6.716.274.520	*Trade payables*
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	845.489.224	361.554.531	-	1.207.043.755	*Short-term unearned revenues*
Utang pajak	445.015.994	376.014.880	6.179.775	827.210.649	*Taxes payable*
Beban akrual	2.274.726.626	1.557.809.664	6.139.060	3.838.675.350	*Accrued expenses*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang					*Current maturities of long-term liabilities*
Utang bank	12.000	388.666.828	-	388.678.828	*Bank loans*
Liabilitas jangka pendek lainnya	317.802.505	1.023.552.276	29.273.578	1.370.628.359	*Other current liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**5.353.722.601**	**6.731.681.397**	**2.297.301.377**	**14.382.705.375**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar					*Long-term liabilities - of current maturities*
Utang obligasi	21.984.178.194	17.630.956.114	-	39.615.134.308	*Bonds payable*
Utang bank	114.978.000	5.853.483.564	2.645.458.132	8.613.919.696	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	651.770.408	651.770.408	*Loan from non-bank financial institution*
Liabilitas pajak tangguhan	254.289.069	(157.433.923)	(5.349.801)	91.505.345	*Deferred tax liabilities*
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.005.631.257	598.450.999	-	4.604.082.256	*Long-term unearned revenue*
Liabilitas jangka panjang lainnya	235.263.928	25.937.414	441.350.272	702.551.614	*Other long-term liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	1.966.325.908	2.856.267.222	-	4.822.593.130	*Employee benefit liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**28.560.666.356**	**26.807.661.390**	**3.733.229.011**	**59.101.556.757**	***Total Non-current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**33.914.388.957**	**33.539.342.787**	**6.030.530.388**	**73.484.262.132**	***TOTAL LIABILITIES***

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

4. *RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)*

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position (continued)

	1 Januari 2020/31 Desember 2019/ *January 1,2020/December 31, 2019*				
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As previously reported*	**Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ *Merger transaction adjustment effect (Note 1f)***	**Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ *CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)***	**Disajikan kembali/ *As restated***	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)					***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
Ekuitas					***Equity***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing Modal dasar - 4.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham	1.444.029.000	-	-	1.444.029.000	*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) Authorized capital - 4,000,000 shares Issued and fully paid - 1,444,029 shares*
Modal donasi	26.825.982	-	-	26.825.982	*Donated capital*
Tambahan modal disetor	(317.597.475)	-	-	(317.597.475)	*Additional paid-in capital*
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	-	836.072.934	-	836.072.934	*Difference in value of transactions with non-controlling interest*
Ekuitas merging entity	-	20.394.876.151	656.024.614	21.050.900.765	*Merging entity equity*
Saldo laba					*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	13.273.514.540	-	-	13.273.514.540	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	2.455.762.802	-	-	2.455.762.802	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	(105.008.860)	-	-	(105.008.860)	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	**16.777.525.989**	**21.230.949.085**	**656.024.614**	**38.664.499.688**	***Equity attributable to owners of the parent entity – net***
Kepentingan nonpengendali	1.348.684.789	1.017.329.872	19.521.802	2.385.536.463	*Non-controlling interests*
Ekuitas - neto	**18.126.210.778**	**22.248.278.957**	**675.546.416**	**41.050.036.151**	***Equity - net***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**52.040.599.735**	**55.787.621.744**	**6.706.076.804**	**114.534.298.283**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

5. KAS DAN SETARA KAS / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Kas	42.703.201	101.731.358	22.123.101	*Cash on hand*
Bank	4.727.772.682	3.018.630.537	2.465.078.215	*Cash in banks*
Deposito berjangka	8.151.912.704	8.492.694.895	19.332.812.608	*Time deposits*
Total kas dan setara kas	**12.922.388.587**	**11.613.056.790**	**21.820.013.924**	***Total cash and cash equivalents***

a. Kas / *a. Cash on hand*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Rupiah	42.703.201	101.731.358	22.123.101	*Rupiah*

b. Bank / *b. Cash in banks*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Rupiah:				*Rupiah:*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	368.088.278	423.116.891	123.142.371	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	58.890.818	42.122.255	42.415.021	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	36.918.896	44.958.944	9.462.526	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.293.298	3.917.685	4.028.865	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	1.151.216	5.086.865	32.893.252	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.130.734	2.653.138	-	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	356.120	17.253.283	10.561.558	*PT Bank Bukopin Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	7.738.149	2.721.937	3.679.954	*Others (each below Rp2 billion)*
Pihak berelasi (Catatan 45a)	3.725.987.853	1.567.270.855	1.876.032.958	*Related parties (Note 45a)*
Subtotal	4.205.555.362	2.109.101.853	2.102.216.505	*Sub-total*

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

b. Bank (lanjutan) / *b. Cash in banks (continued)*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Dolar AS:				*US Dollar:*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bank Permata Tbk	1.442.617	9.331	4.205.314	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	1.200.001	508.921.912	15.750.732	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	63.333	6.302.103	39.249.344	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	16.806	-	25.811.490	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	4.226.276	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	680.254	572.841	5.165.084	*Others (each below Rp2 billion)*
Pihak berelasi (Catatan 45a)	518.814.309	393.722.497	268.453.426	*Related parties (Note 45a)*
Subtotal	522.217.320	909.528.684	362.861.666	*Sub-total*
Euro:				*Euro:*
Pihak berelasi (Catatan 45a)	-	-	44	*Related parties (Note 45a)*
Total bank	**4.727.772.682**	**3.018.630.537**	**2.465.078.215**	***Total cash in banks***

c. Deposito berjangka / *c. Time deposits*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Rupiah:				*Rupiah:*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	577.710.000	194.410.000	164.510.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	75.400.000	219.000.000	473.200.000	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank Permata Tbk	54.000.000	-	12.000.000	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	24.000.000	142.000.000	207.500.000	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank DKI	15.000.000	-	3.412.058	*PT Bank DKI*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	10.000.000	10.513.179	13.217.229	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT Bank Mega Syariah	10.000.000	2.000.000	3.000.000	*PT Bank Mega Syariah*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	10.000.000	-	1.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
PT Bank Pembangunan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	9.100.000	15.100.000	15.100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*
PT Bank BRI Agroniaga Tbk	6.000.000	13.000.000	-	*PT Bank BRI Agroniaga Tbk*
PT Bank BTPN	5.000.000	-	-	*PT Bank BTPN*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.119.691	14.518.213	74.682.478	*PT Bank Pembagunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Mayapada International Tbk	1.000.000	8.000.000	2.000.000	*PT Bank Mayapada International Tbk*

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

c. Deposito berjangka (lanjutan) / *c. Time deposits (continued)*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Rupiah: (lanjutan)				*Rupiah: (continued)*
Pihak ketiga (lanjutan)				*Third parties (continued)*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.000.000	3.000.000	1.500.000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	-	3.000.000	3.000.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	-	5.000.000	5.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Bali*
PT Bank NTB Syariah	-	-	61.500.000	*PT Bank NTB Syariah*
PT Bank UOB Indonesia Tbk	-	-	35.596.970	*PT Bank UOB Indonesia Tbk*
PT Bank Mega Tbk	-	-	36.011.830	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Jatim Syariah	-	-	16.500.000	*PT Bank Jatim Syariah*
PT Bank Muamalat	-	-	5.000.000	*PT Bank Muamalat*
PT Bank J Trust Indonesia	-	-	5.000.000	*PT Bank J Trust Indoneisa*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-	-	5.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan*
PT Bank OCB NISP Tbk	-	-	3.000.000	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	-	3.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank BCA Syariah	-	-	2.000.000	*PT Bank BCA Syariah*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	-	-	2.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat*
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	-	-	1.000.000	*PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk*
Pihak berelasi (Catatan 45a)	7.190.688.390	4.323.761.302	4.823.725.504	*Related parties (Note 45a)*
Subtotal	7.990.018.081	4.953.302.694	5.978.456.069	*Sub-total*
Dolar AS:				*US Dollar:*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	5.605.625	*PT Bank Central Asia Tbk*
Pihak berelasi (Catatan 45a)	161.894.623	3.539.392.201	13.348.750.914	*Related parties (Note 45a)*
Total deposito berjangka	**8.151.912.704**	**8.492.694.895**	**19.332.812.608**	***Total time deposits***

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2021	2020	2019	
Rupiah	2,25% - 5,27%	5,25% - 7,50%	4,50% - 9,25%	*Rupiah*
Dolar AS	0,10% - 3,00%	1,00% - 3,25%	1,35% - 4,00%	*US Dollar*

6. INVESTASI JANGKA PENDEK / *6. SHORT-TERM INVESTMENTS*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Deposito berjangka				*Time deposits*
Rupiah:				*Rupiah:*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-	3.000.000	3.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	-	-	5.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	-	-	3.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	-	-	3.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur*
Pihak berelasi (Catatan 45b)	1.650.000.000	500.000	104.642.400	*Related parties (Note 45b)*
Dolar AS:				*US Dollar:*
Pihak berelasi (Catatan 45b)	4.068.327.340	10.946.890.500	2.154.655.000	*Related parties (Note 45b)*
Total deposito berjangka	5.718.327.340	10.950.390.500	2.273.297.400	*Total time deposits*
Surat Berharga Komersial (SBK)				*Securities (SBK)*
Rupiah:				*Rupiah:*
SBK I PT Pengelola Aset (Persero)	-	-	13.939.981	*SBK I PT Pengelola Aset (Persero)*
Efek yang diperdagangkan	198.633	143.988.718	337.403.726	*Marketable securities*
Total investasi jangka pendek	**5.718.525.973**	**11.094.379.218**	**2.624.641.107**	***Total short-term investments***

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,* 2021	2020	2019	
Rupiah	2,25% - 6,25%	5,35% - 9,25%	4,50% - 9,25%	*Rupiah*
Dolar AS	0,20% - 0,75%	0,75% - 1,25%	1,33% - 3,55%	*US Dollar*

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk saham jangka pendek dan reksadana pasar uang.

Marketable securities represent financial instrument in shares of stock and money market mutual funds.

7. PIUTANG USAHA / *TRADE RECEIVABLES*

a. Berdasarkan pelanggan / *a. By customer*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Pihak ketiga				*Third parties*
Swasta	2.120.714.748	2.069.140.307	1.960.818.835	*Private*
Perorangan	9.376.284	6.617.779	11.034.160	*Individuals*
Dikurangi:				*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(876.958.191)	(798.152.093)	(544.443.844)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	1.253.132.841	1.277.605.993	1.427.409.151	*Third parties - net*
Pihak berelasi (Catatan 45c)	547.400.440	646.204.156	795.166.440	*Related parties (Note 45c)*
Dikurangi:				*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(284.270.735)	(366.851.667)	(228.155.423)	*Allowance for impairment*
Pihak berelasi - neto	263.129.705	279.352.489	567.011.017	*Related parties - net*
Total piutang usaha - neto	**1.516.262.546**	**1.556.958.482**	**1.994.420.168**	***Total trade receivables - net***

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Rupiah	2.587.659.966	2.688.875.278	2.691.798.587	*Rupiah*
Dolar AS	89.831.507	33.086.965	75.141.944	*US Dollar*
Dolar Singapura	-	-	78.902	*Singapore Dollar*
Total	**2.677.491.473**	**2.721.962.243**	**2.767.019.433**	***Total***
Dikurangi:				*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.161.228.927)	(1.165.003.761)	(772.599.265)	*Allowance for impairment*
Neto	**1.516.262.546**	**1.556.958.482**	**1.994.420.168**	***Net***

c. Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut: / *c. Movements in the allowance for expected credit loss, are as follows:*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Saldo awal	1.165.003.761	772.599.265	563.534.540	*Beginning balance*
Penyisihan	122.259.579	447.038.448	211.101.892	*Allowance for impairment*
Pemulihan	(126.034.413)	(54.633.952)	(2.037.167)	*Reversal*
Saldo akhir	**1.161.228.927**	**1.165.003.761**	**772.599.265**	***Ending balance***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, management believes that the allowance for expected credit loss of trade receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk on receivables from third parties.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Belum jatuh tempo	540.601.210	654.680.568	398.347.946	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo				*Overdue*
1-90 hari	914.452.233	971.366.722	1.096.365.462	*1-90 days*
91-180 hari	145.965.228	182.697.751	200.008.304	*91-180 days*
Lebih dari 180 hari	1.076.472.802	913.217.202	1.011.767.175	*More than 180 days*
Subtotal	2.677.491.473	2.721.962.243	2.706.488.887	*Subtotal*
Dikurangi:				*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.161.228.927)	(1.165.003.761)	(712.068.719)	*Allowance for impairment*
Neto	**1.516.262.546**	**1.556.958.482**	**1.994.420.168**	***Net***

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Pihak ketiga				*Third parties*
Swasta	185.862.939	139.904.132	273.385.846	*Private*
Perorangan	10.838.039	3.485.654	6.261.145	*Individuals*
Dikurangi:				*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(69.712.459)	(39.861.587)	(41.467.980)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	126.988.519	103.528.199	238.179.011	*Third parties - net*
Pihak berelasi (Catatan 45d)	1.242.292.898	1.428.560.529	1.566.539.047	*Related parties (Note 45d)*
Dikurangi:				*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(88.914.882)	(112.486.253)	(134.081.998)	*Allowance for impairment*
Pihak berelasi - neto	1.153.378.016	1.316.074.276	1.432.457.049	*Related parties - net*
Piutang lain-lain - neto	**1.280.366.535**	**1.419.602.475**	**1.670.636.060**	***Other receivables - net***

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *8. OTHER RECEIVABLES (continued)*

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment of other receivable are as follows:

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Saldo awal	152.347.840	175.549.978	110.331.968	*Beginning balance*
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	6.279.501	(23.202.138)	65.218.010	*Provision (reversal) for the year*
Saldo akhir	**158.627.341**	**152.347.840**	**175.549.978**	***Ending balance***

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir tahun pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting year, the Group's management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES*

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Uang muka				*Advances*
Operasional	67.420.878	59.027.000	55.099.834	*Operational*
Lain-lain	1.518.015	823.922	892.674	*Others*
Subtotal	68.938.893	59.850.922	55.992.508	*Sub-total*
Beban dibayar di muka				*Prepaid expenses*
Pegawai	52.374.591	61.630.898	65.484.055	*Employees*
Asuransi	44.471.527	31.832.643	33.199.577	*Insurance*
Sewa	42.059.099	15.697.868	10.398.707	*Rental*
Umum	14.060.826	9.803.669	7.836.293	*General*
Pemeliharaan	12.008.540	369.137	43.766.441	*Maintenance*
Lain-lain	24.764.248	13.291.866	38.079.360	*Others*
Subtotal	189.738.831	132.626.081	198.764.433	*Sub-total*
Total	**258.677.724**	**192.477.003**	**254.756.941**	***Total***

10. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA / *10. ACCRUED REVENUES*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Pihak ketiga	297.585.161	435.894.846	437.277.939	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 45e)	33.383.321	67.889.867	123.414.505	*Related parties (Note 45e)*
Total	**330.968.482**	**503.784.713**	**560.692.444**	***Total***

11. PERSEDIAAN / *11. INVENTORIES*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Suku cadang	176.273.424	162.416.045	148.809.889	*Spareparts*
Bahan bakar	42.728.088	25.695.651	28.646.294	*Fuels*
Alat tulis dan barang cetakan	643.761	628.103	1.152.643	*Stationaries and printings*
Obat, bahan, dan alat medis	331.907	595.578	16.036.127	*Medicines, materials, and equipment*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	6.182.313	3.548.653	11.709.186	*Others (each below Rp1 billion)*
Total	226.159.493	192.884.030	206.354.139	*Total*
Dikurangi:				*Less:*
Penyisihan persediaan usang	(8.484.930)	(5.842.591)	(5.083.341)	*Allowance for inventory obsolence*
Neto	**217.674.563**	**187.041.439**	**201.270.798**	***Net***

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolence is as follows:

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Saldo awal	5.842.591	5.083.341	6.061.043	*Beginning balance*
Pemulihan tahun berjalan	-	(1.275.273)	(710.590)	*Recovery during the year*
Penambahan tahun berjalan	2.642.339	2.034.523	(267.112)	*Addition during the year*
Saldo akhir	**8.484.930**	**5.842.591**	**5.083.341**	***Ending balance***

12. INVESTASI JANGKA PANJANG / *12. LONG-TERM INVESTMENT*

	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*			
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Investasi pada entitas asosiasi	3.109.069.141	3.079.458.527	3.299.295.879	*Investment in associates*
Investasi pada penyertaan saham	82.207.761	22.034.000	30.278.100	*Investment in share of stocks*
Investasi pada surat utang	560.361.975	416.824.490	305.751.655	*Investment in bonds*
Total	**3.751.638.877**	**3.518.317.017**	**3.635.325.634**	***Total***

a. Investasi pada entitas asosiasi / *a. Investment in associates*

	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*			
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Metode ekuitas				***Equity method***
BKMS	1.073.791.573	983.415.201	925.599.602	*BKMS*
JICT (Catatan 50g)	1.023.072.772	1.195.871.471	1.802.286.963	*JICT (Note 50g)*
NPCT1 (Catatan 50b, 50c, 50d dan 50e)	359.887.918	299.868.935	337.706.705	*NPCT1 (Notes 50b, 50c, 50d and 50e)*
PHC	120.306.580	73.416.596	-	*PHC*
LNG	71.941.751	71.485.655	70.869.046	*LNG*
TNU	38.577.798	48.570.979	60.726.334	*TNU*
RSP	35.894.180	7.179.599	-	*RSP*
JBT	28.229.200	51.364.498	46.515.482	*JBT*
Ambapers	26.548.330	21.397.468	19.545.469	*Ambapers*
PTI	19.026.070	15.244.500	15.087.749	*PTI*
PCN	2.084.440	1.935.096	-	*PCN*
EMS	330.529	330.529	330.529	*EMS*
NWPKL				***FVOCI***
PBM IHC	288.750.000	288.750.000	-	*PBM IHC*
PT Djakarta Llyod	20.628.000	20.628.000	20.628.000	*PT Djakarta Llyod*
Total	**3.109.069.141**	**3.079.458.527**	**3.299.295.879**	***Total***

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut: / *The movements of investments in associates are as follows:*

	31 Desember/*December 31,* 2021					
	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	**Harga perolehan/ *Cost***	**Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ *Accumulated equity in net income (loss) of associates***	**Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Metode ekuitas						***Equity method***
Dimiliki melalui Perusahaan						*Owned through the Company*
BKMS	40,00%	800.000.000	273.685.226	106.347	1.073.791.573	*BKMS*
JICT	48,90%	108.289.249	559.896.301	354.887.222	1.023.072.772	*JICT*
PHC	31,73%	45.060.000	75.915.104	(668.524)	120.306.580	*PHC*
LNG	49,00%	71.050.000	891.751	-	71.941.751	*LNG*
TNU	40,00%	68.500.000	(29.922.202)	-	38.577.798	*TNU*
RSP	32,88%	13.706.360	22.236.037	(48.217)	35.894.180	*RSP*
JBT	13,86%	131.048.000	(102.804.955)	(13.845)	28.229.200	*JBT*
Ambapers	40,00%	6.000.000	20.361.307	187.023	26.548.330	*Ambapers*
PCN	30,00%	1.500.000	584.440	-	2.084.440	*PCN*
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	*EMS*
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	*Portek Indonesia*

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

12. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

a. Investment in associates (continued)

The movements of investments in associates are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2021					
	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Harga perolehan/ *Cost*	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ *Accumulated equity in net income (loss) of associates*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Metode ekuitas (lanjutan)						***Equity method (continued)***
Dimiliki melalui PIL						*Owned through PIL*
PTI	20,00%	18.000.000	1.026.070	-	19.026.070	*PTI*
Dimiliki melalui IPC TPK						*Owned through IPC TPK*
NPCT1	51,00%	173.770.056	156.461.679	29.656.183	359.887.918	*NPCT1*
NWPKL						***FVOCI***
Dimiliki melalui Perusahaan						*Owned through the Company*
PBM IHC	6,00%	288.750.000	-	-	288.750.000	*PTI*
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	-	20.628.000	*PTI*
Total		**1.749.272.165**	**975.690.787**	**384.106.189**	**3.109.069.141**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2020 Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4*					
	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Harga perolehan/ *Cost*	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ *Accumulated equity in net income (loss) of associates*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Metode ekuitas						***Equity method***
Dimiliki melalui Perusahaan						*Owned through the Company*
JICT	48,90%	108.289.248	1.057.544.585	30.037.638	1.195.871.471	*JICT*
BKMS	40,00%	800.000.000	183.514.563	(99.362)	983.415.201	*BKMS*
PHC	31,73%	45.060.000	28.776.376	(419.780)	73.416.596	*PHC*
LNG	49,00%	71.050.000	435.655	-	71.485.655	*LNG*
JBT	13,86%	131.047.297	(79.714.945)	32.146	51.364.498	*JBT*
TNU	40,00%	68.500.000	(19.954.690)	25.669	48.570.979	*TNU*
Ambapers	40,00%	6.000.000	15.220.049	177.419	21.397.468	*Ambapers*
RSP	32,88%	13.706.360	(6.478.544)	(48.217)	7.179.599	*RSP*
PCN	30,00%	1.500.000	435.096	-	1.935.096	*PCN*
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	*EMS*
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	*Portek Indonesia*
Dimiliki melalui PIL						*Owned through PIL*
PTI	20,00%	18.000.000	(2.755.500)	-	15.244.500	*PTI*
Dimiliki melalui IPC TPK						*Owned through IPC TPK*
NPCT1	51,00%	173.770.056	99.537.499	26.561.380	299.868.935	*NPCT1*
NWPKL						***FVOCI***
Dimiliki melalui Perusahaan						*Owned through the Company*
PBM IHC	6,00%	288.750.000	-	-	288.750.000	*PTI*
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	-	20.628.000	*PTI*
Total		**1.749.271.461**	**1.273.920.173**	**56.266.893**	**3.079.458.527**	***Total***

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan) / *12. LONG-TERM INVESTMENT (continued)*

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan) / *a. Investment in associates (continued)*

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *The movements of investments in associates are as follows: (continued)*

1 Januari 2020/31 Desember 2019/*January 1, 2020/December 31, 2019*
Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4*

	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Harga perolehan/ *Cost*	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ *Accumulated equity in net income (loss) of associates*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Metode ekuitas						***Equity method***
Dimiliki melalui Perusahaan						*Owned through the Company*
JICT	48,90%	108.289.248	1.113.555.444	580.442.271	1.802.286.963	*JICT*
BKMS	40,00%	800.000.000	125.782.185	(182.583)	925.599.602	*BKMS*
LNG	49,00%	71.050.000	(180.954)	-	70.869.046	*LNG*
TNU	40,00%	68.500.000	(7.799.561)	25.895	60.726.334	*TNU*
JBT	17,58%	131.047.297	(84.597.840)	66.025	46.515.482	*JBT*
Ambapers	40,00%	6.000.000	13.598.255	(52.786)	19.545.469	*Ambapers*
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	*EMS*
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	*Portek Indonesia*
Dimiliki melalui PIL						*Owned through PIL*
PTI	20,00%	18.000.000	(2.912.251)	-	15.087.749	*PTI*
Dimiliki melalui IPC TPK						*Owned through IPC TPK*
NPCT1	51,00%	173.770.056	141.558.496	22.378.153	337.706.705	*NPCT1*
NWPKL						***FVOCI***
Dimiliki melalui Perusahaan						*Owned through the Company*
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	-	20.628.000	*PTI*
Total		**1.400.255.101**	**1.296.363.803**	**602.676.975**	**3.299.295.879**	***Total***

b. Investasi pada penyertaan saham / *b. Investment in share of stock*

	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*			
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.304.818	-	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Astra International Tbk	14.250.000	15.062.500	17.312.500	*PT Astra International Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.920.020	-	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bukit Asam Tbk	9.015.086	5.620.000	5.320.000	*PT Bukit Asam Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.394.820	-	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	5.102.500	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.630.446	-	-	*PT Bumi Serpong Damai Tbk*
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	2.992.240	-	-	*PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk*
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.342.535	-	-	*PT Medco Energi Internasional Tbk*
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	2.172.000	-	-	*PT Buyung Poetra Sembada Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	13.185.796	1.351.500	2.543.100	*Others (each below Rp2 billion)*
Total	**82.207.761**	**22.034.000**	**30.278.100**	***Total***

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan) / *12. LONG-TERM INVESTMENT (continued)*

c. Investasi pada surat utang / *c. Investment in bonds*

	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*			
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
PT Medco Power Indonesia	51.906.614	51.812.250	50.432.290	*PT Medco Power Indonesia*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	-	50.000.000	50.000.000	*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	10.941.195	-	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	-	20.415.680	51.367.050	*PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	508.455.361	283.655.365	153.952.315	*Others (each below Rp2 billion)*
Total	**560.361.975**	**416.824.490**	**305.751.655**	***Total***

13. PROPERTI INVESTASI / *13. INVESTMENT PROPERTIES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/ *Year Ended December 31, 2021*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	553.013.673	5.873	-	22.990.641	576.010.187	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	693.909.905	6.221.205	-	-	700.131.110	*Port facilities*
Jalan dan bangunan	28.074.591	-	-	-	28.074.591	*Roads and buildings*
Total	**1.274.998.169**	**6.227.078**	**-**	**22.990.641**	**1.304.215.888**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(395.931.577)	(21.049.365)	-	-	(416.980.942)	*Port facilities*
Jalan dan bangunan	(11.649.846)	(624.312)	-	-	(12.274.158)	*Roads and buildings*
Total	**(407.581.423)**	**(21.673.677)**	**-**	**-**	**(429.255.100)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	**-**	**-**	**-**	**(1.526.810)**	**(1.526.810)**	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**867.416.746**				**873.433.978**	***Net book value***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ *Year ended December 31, 2020* Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	546.380.618	6.633.055	-	-	553.013.673	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	696.927.491	-	(3.017.586)	-	693.909.905	*Port facilities*
Jalan dan bangunan	28.074.591	-	-	-	28.074.591	*Roads and buildings*
Total	**1.271.382.700**	**6.633.055**	**(3.017.586)**	**-**	**1.274.998.169**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(374.657.010)	(21.671.974)	397.407	-	(395.931.577)	*Port facilities*
Jalan dan bangunan	(11.022.040)	(627.806)	-	-	(11.649.846)	*Roads and buildings*
Total	**(385.679.050)**	**(22.299.780)**	**397.407**	**-**	**(407.581.423)**	**Total**
Nilai buku neto	**885.703.650**				**867.416.746**	***Net book value***

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp35.780.564, Rp34.927.083 dan Rp22.518.573, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas properti investasi.

13. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Depreciation expenses of investment properties are recorded as part of operating expenses.

The fair value of investment properties as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are calculated amounting to Rp35,780,564, Rp34,927,083 and Rp22,518,573, respectively, which determined based on Sales Value of Tax Object (NJOP) of the investment properties.

14. ASET TETAP / *14. FIXED ASSETS*

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/
Year *Ended December 31, 2021***

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Tanah	3.321.174.108	49.458.238	-	33.079.170	3.403.711.516	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	18.145.061.821	77.741.877	(589.348)	891.643.080	19.113.857.430	*Port facilities*
Kapal	5.644.336.695	32.627.057	(3.343.767)	272.096.891	5.945.716.876	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	16.031.236.158	577.169.837	(16.607.812)	120.943.700	16.712.741.883	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	2.937.873.881	71.809.367	-	489.210.214	3.498.893.462	*Port installation*
Jalan dan bangunan	5.801.563.436	116.301.487	(2.355.484)	(136.349.275)	5.779.160.164	*Roads and buildings*
Peralatan	1.458.075.401	33.843.992	(6.648.513)	184.121.476	1.669.392.356	*Equipment*
Kendaraan	192.995.218	1.279.568	(11.471.022)	(4.687.592)	178.116.172	*Vehicles*
Emplasemen	550.609.196	4.386.607	(878.000)	107.911.591	662.029.394	*Emplacement*
Subtotal	**54.082.925.914**	**964.618.030**	**(41.893.946)**	**1.957.969.255**	**56.963.619.253**	***Sub-total***
Aset dalam penyelesaian	6.023.457.792	4.404.300.132	(7.981.912)	(2.486.531.926)	7.933.244.086	*Construction in progress*
Total	**60.106.383.706**	**5.368.918.162**	**(49.875.858)**	**(528.562.671)**	**64.896.863.339**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(3.742.590.535)	(664.737.328)	462.049	5.669.531	(4.401.196.283)	*Port facilities*
Kapal	(2.050.939.452)	(288.699.894)	3.276.892	3.790.305	(2.332.572.149)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(5.815.145.155)	(1.590.715.301)	13.178.426	(35.410.423)	(7.428.092.453)	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(988.819.802)	(151.473.698)	-	(14.264.620)	(1.154.558.120)	*Port-installation*
Jalan dan bangunan	(1.497.185.498)	(203.020.416)	1.458.778	5.003.586	(1.693.743.550)	*Roads and buildings*
Peralatan	(987.292.760)	(222.793.381)	6.488.338	3.819.258	(1.199.778.545)	*Equipment*
Kendaraan	(141.203.612)	(10.523.923)	8.862.822	25.485.738	(117.378.975)	*Vehicles*
Emplasemen	(185.401.183)	(23.054.196)	97.517	2.683.593	(205.674.269)	*Emplacement*
Total	**(15.408.577.997)**	**(3.155.018.137)**	**33.824.822**	**(3.223.032)**	(18.532.994.344)	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	**(119.202.784)**	**-**	**48.128.344**	**7.388.367**	**(63.686.073)**	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**44.578.602.925**				**46.300.182.922**	***Net book value***

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS (continued)*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ *Year ended December 31, 2020*
Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Tanah	3.160.782.511	5.666.069	-	154.725.528	3.321.174.108	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	16.231.701.424	8.022.446	(10.751.627)	1.916.089.578	18.145.061.821	*Port facilities*
Kapal	5.348.564.072	41.275.408	(41.254.895)	295.752.110	5.644.336.695	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	15.745.422.051	64.281.366	(424.638.955)	646.171.696	16.031.236.158	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	2.751.185.584	18.145.864	-	168.542.433	2.937.873.881	*Port installation*
Jalan dan bangunan	4.767.709.961	18.846.974	(987.417)	1.015.993.918	5.801.563.436	*Roads and buildings*
Peralatan	1.335.912.231	19.268.422	(5.494.787)	108.389.535	1.458.075.401	*Equipment*
Kendaraan	199.942.212	5.659.784	(7.580.281)	(5.026.497)	192.995.218	*Vehicles*
Emplasemen	490.409.592	-	-	60.199.604	550.609.196	*Emplacement*
Subtotal	**50.031.629.638**	**181.166.333**	**(490.707.962)**	**4.360.837.905**	**54.082.925.914**	***Sub-total***
Aset dalam penyelesaian	5.590.920.155	5.336.984.497	(19.201.714)	(4.885.245.146)	6.023.457.792	*Construction in progress*
Total	**55.622.549.793**	**5.518.150.830**	**(509.909.676)**	**(524.407.241)**	**60.106.383.706**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(3.153.128.182)	(593.085.558)	15.980.453	(12.357.248)	(3.742.590.535)	*Port facilities*
Kapal	(1.706.762.505)	(281.766.015)	39.405.517	(101.816.449)	(2.050.939.452)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(5.154.370.039)	(1.108.348.019)	437.146.023	10.426.880	(5.815.145.155)	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(811.174.253)	(178.121.487)	-	475.938	(988.819.802)	*installation*
Jalan dan bangunan	(1.260.196.015)	(238.987.788)	641.178	1.357.127	(1.497.185.498)	*Roads and buildings*
Peralatan	(910.117.010)	(82.400.553)	4.292.132	932.671	(987.292.760)	*Equipment*
Kendaraan	(136.604.525)	(10.614.859)	6.015.772	-	(141.203.612)	*Vehicles*
Emplasemen	(162.423.246)	(23.007.887)	-	29.950	(185.401.183)	*Emplacement*
Total	**(13.294.775.775)**	**(2.516.332.166)**	**503.481.075**	**(100.951.131)**	**(15.408.577.997)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(88.001.833)	(32.118.267)	917.316	-	(119.202.784)	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**42.239.772.185**				**44.578.602.925**	***Net book value***

Beban penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets are recorded as part of operating expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Group insured its fixed assets as follows:

31 Desember 2021 / *December 31, 2021*

Perusahaan Asuransi/ *Insurance Company*	**Risiko Asuransi/ *Insurable Risk***	**Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount***
PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi FPG Indonesia PT Asuransi Ramayana PT MS Amlin PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Shipowners Mutual Protection Indemnity Association PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya/ *Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks*	Rp46.550.371.671; USD528.000.000

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2020 / *December 31, 2020*

Perusahaan Asuransi/ *Insurance Company*	Risiko Asuransi/ *Insurable Risk*	Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount*
PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi FPG Indonesia PT Asuransi Ramayana PT MS Amlin PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Shipowners Mutual Protection Indemnity Association PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Asuransi Bina Dana Arta PT Asuransi Staco Mandiri PT Asuransi Chubb Syariah	Risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya/ *Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks*	Rp48.714.024.888; USD569.402.000

1 Januari 2020/31 Desember 2019 / *January 1, 2020/December 31, 2019*

Perusahaan Asuransi/ *Insurance Company*	Risiko Asuransi/ *Insurable Risk*	Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount*
PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi FPG Indonesia PT Asuransi Ramayana PT MS Amlin PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Shipowners Mutual Protection Indemnity Association PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Asuransi Bina Dana Arta PT Asuransi Staco Mandiri PT Asuransi Chubb Syariah PT Asuransi Jasaraharja Putera	Risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya/ *Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks*	Rp38.885.908.423; USD571.000.000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset tidak lancar lainnya sebesar Rp331.589.436, reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi sebesar Rp22.990.641 dan reklasifikasi aset tetap menjadi aset takberwujud sebesar Rp173.982.594.

Reclassification as of December 31, 2021 includes reclassification of property, plant and equipment into other current assets amounting to Rp331,589,436, reclassification of property and equipment amounting to Rp22,990,641 and reclassification of assets into intangible assets amounting to Rp173,982,594.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk reklasifikasi aset takberwujud menjadi aset tetap sebesar Rp43.511.404, reklasifikasi aset tidak lancar lainnya menjadi aset tetap sebesar Rp137.068.813, reklasifikasi aset tetap menjadi aset tidak lancar lainnya sebesar Rp17.404.054, reklasifikasi aset tetap menjadi aset takberwujud sebesar Rp282.193.221, reklasifikasi aset tetap menjadi aset tersedia untuk dijual sebesar Rp9.570.545, reklasifikasi aset tetap menjadi aset tetap usul hapus sebesar Rp6.477.151 serta reklasifikasi aset tetap dalam penyelesaian ke aset takberwujud sebesar Rp443.291.685.

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap

Pada tahun 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV (entitas yang menggabungkan diri ke dalam Perusahaan), serta entitas anak (PTP, PII dan PPI) menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS (continued)

Reclassification on December 31, 2020 included reclassification of intangible assets to fixed assets amounting to Rp43,511,404, reclassification of other non current assets to fixed assets amounting to Rp137,068,813, reclassification of fixed assets to other non-current assets amounting to Rp17,404,054, reclassification of fixed assets to intangible assets amounting to Rp282,193,221, reclassification of fixed assets to assets held for sale amounting to Rp9,570,545, reclassification of fixed assets to written-off fixed assets amounting to Rp6,477,151 and reclassification of fixed assets under construction to intangible assets amounting to Rp443,291,685.

Sale and Write-off of Fixed Assets

In 2021, the Company (formerly Pelindo II) and Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV (entities that merged into the Company), as well as subsidiaries (PTP, PII and PPI) sold and written-off several fixed assets with details as follows:

Penjualan aset tetap/*Sale of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai pelepasan/*Sales value*	Nilai buku/*Book value*	Laba (rugi) penjualan/*Gain (loss) of sales*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Perusahaan (dahulu/*formerly* Pelindo II)	3.521.883	3.148.632	373.251	No. 45/DK/PI.II/VII.2020 tanggal 31 Juli 2020/*No. 45/DK/PI.II/VII.2020 dated July 31, 2020*
Pelindo III	11.005.302	7.428.218	3.577.084	No. UM.186/08/S/CMSR-2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/ *No. UM.186/08/S/CMSR-2021 dated August 13, 2021 and SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 dated September 23, 2021*
Pelindo IV	154.255	2.899	151.356	No. 45/DK/PI.II/VII.2020 tanggal 31 Juli 2020/*No. 45/DK/PI.II/VII.2020 dated July 31, 2020*
PTP	6.763.000	3.546.690	3.216.310	No. SK.46/KU.202/DUT-2021 tanggal 10 September 2021, No. UM.186/08/S/CMSR-2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan No. SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 Tanggal 23 September 2021/ *No. SK.46/KU.202/DUT-2021 dated September 10, 2021, No. UM.186/08/S/CMSR-2021 dated August 13, 2021 and No. Ministerial Decree No. S-722/MBU/09/2021 September 23, 2021*
Total	**21.444.440**	**14.126.439**	**7.318.001**	

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)

Pada tahun 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV (entitas yang menggabungkan diri ke dalam Perusahaan), serta entitas anak (PTP, PII dan PPI) menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

In 2021, the Company (formerly Pelindo II) and Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV (entities that merged into the Company), as well as subsidiaries (PTP, PII and PPI) sold and written-off several fixed assets with details as follows: (continued)

Penghapusan aset tetap/*Write-off of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai buku/*Book value*	Laba (rugi) penjualan/*Gain (loss) of sales*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Pelindo I	2.844.376	(2.844.376)	No. KU.61/151/DK/PP.I/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020/ *No. KU.61/151/DK/PP.I/VII/2020 date July 27, 2020*
Pelindo III	1.965.207	(1.965.207)	No. UM.186/08/S/CMSR-2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/*No. UM.186/08/S/CMSR-2021 dated August 13, 2021 and Ministerial Decree No. S-722/MBU/09/2021 dated 23 September 2021*
Pelindo IV	690.727	(690.727)	No. SK.3/KU.202/DUT-2021 tanggal 9 Februari 2021, No. SK.014/KU.202/DUT-2020 tanggal 13 April 2020 dan No. SK Menteri S-623/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021/ *No. SK.3/KU.202/DUT-2021 dated February 9, 2021, No. SK.014/KU.202/DUT-2020 dated April 13, 2020 and No. Ministerial Decree S-623/MBU/08*/2021 dated August 25, 2021
PII	39.474	(39.474)	No. 003/DK-PII/Eksternal/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020/*No. 003/DK-PII/Eksternal/X/2020 dated October 12 2020*
PPI	-	-	No. DK/26/11/1/PPI-2021 tanggal 26 November 2021/*No. DK/26/11/1/PPI-2021 dated November 26, 2021*
Total	**5.539.784**	**(5.539.784)**	

Pada tahun 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Pelindo III (entitas yang menggabungkan diri ke dalam Perusahaan), serta entitas anak (Rukindo) menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

In 2020, the Company (formerly Pelindo II) and Pelindo III (an entity that merged into the Company), as well as a subsidiary (Rukindo) sold and written-off several fixed assets with details as follows:

Penjualan aset tetap/*Sale of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai pelepasan/*Sales value*	Nilai buku/*Book value*	Laba (rugi) penjualan/*Gain (loss) of sales*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Pelindo III	974.078	2.657.520	(1.683.442)	No. UM.49/08/CMSR-2020 tanggal 31 Agustus 2020/ *No. UM.49/08/CMSR-2020 date August 31, 2020*
Rukindo	6.680.000	3.508.274	3.171.726	No. UM.49/08/CMSR-2020 tanggal 31 Agustus 2020/ *No. UM.49/08/CMSR-2020 date August 31, 2020*
Total	**7.654.078**	**6.165.794**	**1.488.284**	

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

Pada tahun 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Pelindo III (entitas yang menggabungkan diri ke dalam Perusahaan), serta entitas anak (Rukindo) menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)

In 2020, the Company (formerly Pelindo II) and Pelindo III (an entity that merged into the Company), as well as a subsidiary (Rukindo) sold and written-off several fixed assets with details as follows: (continued)

Penghapusan aset tetap/*Write-off of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai buku/*Book value*	Laba (rugi) penjualan/*Gain (loss) of sales*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Perusahaan (dahulu/*formerly* Pelindo II)	262.807	(262.807)	No. 15/DK/PI.II/III-2020 tanggal 31 Maret 2020 dan No. X-793/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019/ *No. 15/DK/PI.II/III-2020 date Maret 31, 2020 dan No. X-793/MBU/10/2019 date October 17, 2019*
Rukindo	-	-	No. 004/DKPI/I/2020 tanggal 21 Januari 2020/*No. 004/DKPI/I/2020 date January 21, 2020*
Total	**262.807**	**(262.807)**	

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

Construction in Progress

Construction in progress consists of:

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.773.342.376	3.471.248.216	3.163.363.350	*Port facilities*
Jalan dan bangunan	781.678.607	1.338.358.613	415.223.464	*Roads and buildings*
Emplasemen	564.691.967	3.178.767	175.467.852	*Emplacement*
Kapal	324.424.550	446.558.201	659.805.197	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	204.236.990	387.421.740	627.408.034	*Port equipment*
Peralatan	138.923.954	182.368.724	55.836.894	*Equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	138.882.469	167.114.625	489.606.601	*Port installation*
Lainnya	7.063.175	27.208.906	4.208.763	*Others*
Total	**7.933.244.088**	**6.023.457.792**	**5.590.920.155**	***Total***

14. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS (continued)

Construction in Progress (continued)

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2021 are as follows:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Target penyelesaian/ *Target of completion*	*Type of assets*
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	4,00% - 91,00%	2022	*Elevation, reinforcement and dredging of dock project*
Pekerjaan pembangunan kapal	2,00% - 65,00%	2022	*Construction of ship*
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	3,00% - 87,00%	2022	*Construction of yard*
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	10,00% - 92,00%	2021-2024	*Building and port equipment facilities*
Instalasi fasilitas pelabuhan	16,00% - 67,00%	2022	*Port facility installation*

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2020 are as follows:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Target penyelesaian/ *Target of completion*	*Type of assets*
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	1,00% - 98,00%	2021	*Elevation, reinforcement and dredging of dock project*
Pekerjaan pembangunan kapal	3,00% - 80,00%	2021-2022	*Construction of ship*
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	5,00% - 95,00%	2021	*Construction of yard*
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	10,00% - 99,00%	2021-2022	*Building and port equipment facilities*
Instalasi fasilitas pelabuhan	24,00% - 84,00%	2021	*Port facility installation*

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS (continued)

Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)

Construction in Progress (continued)

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of January 1, 2020/ December 31, 2019 are as follows:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Target penyelesaian/ *Target of completion*	*Type of assets*
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	2,00% - 99,00%	2021	*Elevation, reinforcement and dredging of dock project*
Pekerjaan pembangunan kapal	31,00% - 99,00%	2020	*Construction of ship*
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	23,53% - 95,00%	2020	*Construction of yard*
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	0,05%-99,00%	2020-2022	*Building and port equipment facilities*
Instalasi fasilitas pelabuhan	4,00% - 99,00%	2020-2021	*Port facility installation*
Pematangan tanah	99,00%	2021	*Soil ripening*

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp89.535.918, Rp192.396.381 dan Rp247.738.510 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019.

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp89,535,918, Rp192,396,381 and Rp247,738,510 for the years ended December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, respectively.

15. ASET KERJASAMA OPERASI

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 50e) dan PT Maspion Industrial Estate, dengan rincian sebagai berikut:

15. JOINT OPERATION ASSETS

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja dan MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 50e) and PT Maspion Industrial Estate, respectively, with details as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ *Year ended December 31, 2021*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	*Port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	1.113.946	-	-	87.538.706	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	*Port installation*
Jalan dan bangunan	1.082.111	-	-	-	1.082.111	*Roads and buildings*
Peralatan	1.535.821	-	-	-	1.535.821	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Total	**876.747.148**	**1.113.946**	**-**	**-**	**877.861.094**	***Total***

15. ASET KERJASAMA OPERASI (lanjutan)

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 50e) dan PT Maspion Industrial Estate, dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

15. JOINT OPERATION ASSETS (continued)

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja dan MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 50e) and PT Maspion Industrial Estate, respectively, with details as follow: (continued)

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/
*Year ended December 31, 2021***

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(381.740.341)	(20.516.613)	-	-	(402.256.954)	*Port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	(53.685.589)	(6.034.232)	-	-	(59.719.821)	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(4.429.943)	(380.103)	-	-	(4.810.046)	*Port installation*
Jalan dan bangunan	(415.644)	(14.333)	-	-	(429.977)	*Roads and buildings*
Peralatan	(1.470.518)	(34.589)	-	-	(1.505.107)	*Equipment*
Emplasemen	(887.980)	(177.596)	-	-	(1.065.576)	*Emplacement*
Total	**(442.630.015)**	**(27.157.466)**	**-**	**-**	**(469.787.481)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	-	(60.467)	-	-	(60.467)	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**434.117.133**				**408.013.146**	***Net book value***

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/
*Year ended December 31, 2020***
Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	*Port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	*Port installation*
Jalan dan bangunan	602.861	479.250	-	-	1.082.111	*Roads and buildings*
Peralatan	609.224	926.597	-	-	1.535.821	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Total	**875.341.301**	**1.405.847**	**-**	**-**	**876.747.148**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(361.223.727)	(20.516.614)	-	-	(381.740.341)	*Port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	(47.699.898)	(5.985.691)	-	-	(53.685.589)	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(3.782.575)	(647.368)	-	-	(4.429.943)	*Port installation*
Jalan dan bangunan	(227.576)	(188.068)	-	-	(415.644)	*Roads and buildings*
Peralatan	(597.040)	(873.478)	-	-	(1.470.518)	*Equipment*
Emplasemen	(710.384)	(177.596)	-	-	(887.980)	*Emplacement*
Total	**(414.241.200)**	**(28.388.815)**	**-**	**-**	**(442.630.015)**	***Total***
Nilai buku neto	**461.100.101**				**434.117.133**	***Net book value***

16. ASET TAKBERWUJUD / *16. INTANGIBLE ASSETS*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Aset hak konsesi	39.317.534.983	36.971.125.428	32.106.704.089	*Concession rights assets*
Piranti lunak	1.332.014.102	1.251.393.901	772.420.659	*Software application*
Sertifikasi	143.041.164	142.810.494	143.624.929	*Certification*
Lisensi	93.309.813	93.044.688	93.044.688	*License*
Aset dalam penyelesaian	72.392.067	105.543.969	557.726.479	*Construction in progress*
Aset takberwujud lainnya	300.537.663	205.129.207	450.018.122	*Other intangible assets*
Subtotal	41.258.829.792	38.769.047.687	34.123.538.966	*Sub-total*
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(2.498.374.944)	(2.067.418.458)	(1.594.931.392)	*Accumulated amortization allowance for impairment*
Neto	**38.760.454.848**	**36.701.629.229**	**32.528.607.574**	***Net***

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, aset takberwujud tidak dijaminkan.

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, intangible assets are not pledged as collateral.

Aset hak konsesi

Concession rights assets

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan terminal pelabuhan dan jalan tol Cibitung - Cilincing berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 49).

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Port Authority to the Company to develop and operate port terminal and the Cibitung - Cilincing toll road based on Concession Agreement (Note 49).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal pelabuhan dan konstruksi jalan tol masih dalam konstruksi adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the average percentage completion of port and toll road construction are as follows:

Terminal Pelabuhan dan Jalan Tol/ *Port Terminal and Toll Road*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*
Kalibaru	97,78%	94,01%	70,84%
Kijing	92,60%	80,01%	46,32%
Teluk Lamong	94,00%	90,50%	75,00%
Manyar Gresik	95,00%	76,00%	52,50%
Kuala Tanjung	100,00%	39,00%	37,00%
Makassar New Port	79,71%	63,57%	6,82%
Cibitung-Cilincing Toll Road	92,15%	88,35%	82,32%

16. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal pelabuhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

16. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Borrowing costs capitalized for the concession assets of port terminal for the year ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Terminal Pelabuhan dan Jalan Tol/ ***Port Terminal and Toll Road***	**2021**	**2020**	**2019**
Kalibaru	198.224.721	135.348.204	124.983.524
Kijing	119.624.272	59.398.592	62.767.985
Makassar New Port	90.437.248	209.601.777	182.053.319
Teluk Lamong	26.115.965	31.736.396	41.123.556
Belawan Fase II	-	245.835.807	79.019.722
Cibitung-Cilincing Toll Road	511.684.405	418.212.539	338.189.911

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019.

The Group's management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik *(electronic data interchange)*, aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

Software

Software application represents cost incurred for the development of Port Wide Solution application for car terminal services, container terminal services and warehouse and Annual Technical Support (ATS) and change request, licensed software application used for electronic data interchange, operational application, ERP (finance, human resources, technical information system), development of Port Community System/ Inaportnet, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, autogate integration and VGM for terminal operating system.

17. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

17. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The movements in right-of-use assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ ***Year ended December 31, 2021***					
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Bangunan fasilitas pelabuhan	194.592.564	9.077.383	-	-	203.669.947	*Port facilities*
Kapal	119.407.557	-	-	-	119.407.557	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	23.224.766	2.472.861	-	-	25.697.627	*Port equipment*
Peralatan	113.513.905	-	(14.778.348)	-	98.735.557	*Equipments*
Tanah	174.268.831	-	(603.671)	-	173.665.160	*Lands*
Kendaraan	3.471.137	34.222.799	(1.328.614)	-	36.365.322	*Vehicles*
Subtotal	**628.478.760**	**45.773.043**	**(16.710.633)**	**-**	**657.541.170**	***Subtotal***

17. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut: (lanjutan)

17. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)

The movements in right-of-use assets are as follows: (continued)

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/
*Year ended December 31, 2021***

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(23.243.659)	(48.568.237)	-	-	(71.811.896)	*Port facilities*
Kapal	(55.621.215)	(28.998.101)	-	-	(84.619.316)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(12.629.956)	(5.802.799)	-	-	(18.432.755)	*Port equipment*
Peralatan	(18.154.093)	(5.584.463)	12.996.127	-	(10.742.429)	*Equipment*
Tanah	(674.450)	(3.224.583)	322.356	-	(3.576.677)	*Lands*
Kendaraan	(2.134.626)	(15.195.717)	974.435	-	(16.355.908)	*Vehicles*
Subtotal	**(112.457.999)**	**(107.373.900)**	**14.292.918**	**-**	**(205.538.981)**	***Subtotal***
Nilai buku bersih	**516.020.761**				**452.002.189**	***Net book value***

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/
*Year ended December 31, 2020***
Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Dampak Penerapan PSAK 73/ *Impact of Implementation PSAK 73*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Bangunan fasilitas pelabuhan	-	181.238.824	-	13.353.740	194.592.564	*Port facilities*
Kapal	-	31.321.247	-	88.086.310	119.407.557	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	-	21.163.550	-	2.061.216	23.224.766	*Port equipment*
Peralatan	-	113.513.905	-	-	113.513.905	*Equipment*
Tanah	-	174.268.831	-	-	174.268.831	*Lands*
Kendaraan	-	1.032.822	-	2.438.315	3.471.137	*Vehicles*
Subtotal	**-**	**522.539.179**	**-**	**105.939.581**	**628.478.760**	***Subtotal***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	-	(21.064.279)	-	(2.179.380)	(23.243.659)	*Port facilities*
Kapal	-	(55.621.215)	-	-	(55.621.215)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	-	(11.981.301)	-	(648.655)	(12.629.956)	*Port equipment*
Peralatan	-	(18.154.093)	-	-	(18.154.093)	*Equipment*
Tanah	-	(674.450)	-	-	(674.450)	*Lands*
Kendaraan	-	(2.134.626)	-	-	(2.134.626)	*Vehicles*
Subtotal	**-**	**(109.629.964)**	**-**	**(2.828.035)**	**(112.457.999)**	***Subtotal***
Nilai buku bersih	**-**				**516.020.761**	***Net book value***

17. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *17. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)*

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut: / *The detail of lease liabilities is as follows:*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020* disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*	
Liabilitas sewa			*Lease liabilities*
Bagian jangka pendek	76.345.578	75.354.511	*Current portion*
Bagian jangka panjang	257.540.134	319.371.402	*Non-current portion*
Total	**333.885.712**	**394.725.913**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut: / *Amount recognized in statement of cash flow is as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	2020 disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*	
Beban penyusutan aset hak-guna	107.373.900	109.629.964	*Depreciation of right-of-use assets*
Bunga atas liabilitas sewa	35.293.846	20.796.162	*Interest on lease liabilities*
Total	**142.667.746**	**130.426.126**	***Total***
Jumlah kas keluar untuk:			*Total cash outflow for:*
Pembayaran liabilitas sewa	126.329.193	133.142.177	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran bunga	36.412.536	20.796.162	*Payment of interests*
Total	**162.741.729**	**153.938.339**	***Total***

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Kelompok Usaha sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Kelompok Usaha. Kelompok Usaha mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Kelompok Usaha mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Kelompok Usaha.

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

17. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *17. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)*

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllow:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4***	
Liabilitas sewa			*Lease liabilities*
Saldo awal	394.725.913	-	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	45.773.043	273.352.811	*Additions during the year*
Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 73	-	277.409.727	*Adjustment of balance for the application of PSAK 73*
Arus kas	(162.741.729)	(153.938.339)	*Cash flow*
Perubahan non-kas	56.128.484	(2.098.286)	*Non-cash change*
Saldo akhir	**333.885.711**	**394.725.913**	***Ending balance***

Berdasarkan penilaian manajemen Kelompok Usaha, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019.

Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of right-of-use assets as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019.

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *18. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Uang muka pembelian aset tetap	248.304.048	172.467.503	406.371.161	*Advances for purchase of fixed assets*
Aset tetap tidak produktif	130.179.339	130.182.642	129.511.829	*Unproductive fixed assets*
Pajak final dibayar di muka (Catatan 24g)	126.924.148	1.244.598.181	1.230.024.963	*Prepaid final tax (Note 24g)*
Jaminan pelaksanaan	69.777.240	64.999.265	64.999.265	*Performance guarantee*
Piutang pemulihan investasi	64.838.387	55.016.590	269.245.974	*Receivable investment recovery*
Uang jaminan	42.549.064	21.053.483	17.096.154	*Guarantee*
Goodwill	32.550.784	32.550.782	35.090.782	*Goodwill*
Piutang pajak	29.340.959	56.479.833	-	*Tax receivables*
Aset tetap belum dimanfaatkan	25.493.693	25.392.745	25.392.745	*Fixed assets not utilized*
Aset lain-lain	381.667.895	404.904.994	465.445.407	*Other assets*
Dikurangi:				*Less:*
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(186.800.573)	(196.529.654)	(181.985.177)	*Accumulated depreciation and impairment*
Total	**964.824.984**	**2.011.116.364**	**2.461.193.103**	***Total***

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Aset tetap tidak produktif merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional Kelompok Usaha, yang sebagian besar terdiri atas kapal, dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti *transtainer, Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), forklift, reach stacker,* dan *harbour mobile crane*.

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing (Catatan 49a dan 49b).

Piutang pajak merupakan piutang kelebihan pembayaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Goodwill terutama merupakan *goodwill* yang timbul dari transaksi akuisisi 45,00% kepemilikan saham di CTP (dahulu MTDX) senilai Rp31.407.481 pada tahun 2015.

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan (dahulu Pelindo II).

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

Aset lain-lain terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan *vessel traffic service,* dan perbaikan kapal keruk.

18. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Unproductive fixed assets are fixed assets that cannot be operated anymore in the Group's operational activities, which mostly consist of ships and port facilities such as transtainer, Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), forklift, reach stacker, and harbour mobile crane.

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal and Kijing Terminal (Notes 49a and 49b).

Tax receivables represents overpayment of Tax of Land and Building (PBB) and Value Added Tax (VAT).

Goodwill mainly represents goodwill arising from acquisition of 45.00% shares ownership in CTP (formerly MTDX) amounting to Rp31,407,481 in 2015.

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company (formerly Pelindo II).

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

Other assets mainly represents deferred charge for dredging, vessel traffic service equipment, and dredges repairment.

19. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari:

19. SHORT-TERM BANK LOANS

Short-term bank loans consist of:

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Rupiah				*Rupiah*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bank OCBC NISP Tbk	5.196.855	4.000.000	6.000.000	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Pihak berelasi (Catatan 45f)	-	-	28.193.914	*Related party (Note 45f)*
Total	**5.196.855**	**4.000.000**	**34.193.914**	***Total***

19. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) / *19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)*

EDII

Pada tanggal 13 Oktober 2020, EDII memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP, Tbk. ("OCBC") berupa fasilitas rekening koran ("fasilitas RK"), bank garansi ("fasilitas BG") dan *Demand Loan* CPFP ("fasilitas DL") masing-masing dengan batas maksimum sebesar Rp4.000.000, Rp20.000.000, dan Rp15.000.000 dengan tingkat suku bunga 11%, 11%, dan 0% yang berakhir pada tanggal 10 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, saldo fasilitas RK masing-masing sebesar Rp2.748.419 dan Rp0 dan saldo fasilitas DL masing-masing sebesar Rp5.196.855 dan Rp4.000.000.

Pada tanggal 25 November 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari OCBC senilai Rp6.000.000 dengan suku bunga setara 11,75% per tahun dengan jatuh tempo pada 10 November 2020. Saldo pinjaman per 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.000.000.

EDII

On October 13, 2020, EDII obtained a loan from PT Bank OCBC NISP, Tbk. ("OCBC") in the form of current account facility, Bank Guarantee (BG facilities) and Demand Loan CPFP (DL facilities) with a maximum limit of Rp4,000,000, Rp20,000,000, and Rp15,000,000, respectively, with an interest rate of 11%, 11%, and 0% on December 10, 2021.

As of December 31, 2021, and December 31, 2020, the balance of the current account facility is Rp2,748,419 and Rp0 and the balance of the demand loan (DL) facilities is Rp5,196,855 and Rp4,000,000, respectively.

On November 25, 2019, the Company obtained loan facility from OCBC amounting to Rp6,000,000 with the equivalent interest rate of 11.75% per annum with the maturity date on November 10, 2020. Balance of the loan as of January 1, 2020/December 31, 2019 amounted to Rp6,000,000.

20. UTANG USAHA / *20. TRADE PAYABLES*

a. Berdasarkan pemasok / *a. Based on suppliers*

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Pihak ketiga				*Third parties*
Swasta	1.333.914.474	1.680.386.403	3.044.115.352	*Private*
Perorangan	4.227.590	5.816.955	-	*Individuals*
Subtotal - pihak ketiga	1.338.142.064	1.686.203.358	3.044.115.352	*Subtotal - third parties*
Pihak berelasi (Catatan 45g)	1.926.350.211	3.267.820.968	3.672.159.168	*Related parties (Note 45g)*
Total	**3.264.492.275**	**4.954.024.326**	**6.716.274.520**	***Total***

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Rupiah	2.949.116.000	4.553.491.536	5.792.481.301	*Rupiah*
Dolar AS	315.376.275	400.394.149	923.668.515	*US Dollar*
Euro Eropa	-	138.641	124.704	*European Euro*
Total	**3.264.492.275**	**4.954.024.326**	**6.716.274.520**	***Total***

21. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK / *21. SHORT-TERM UNEARNED REVENUES*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Sewa kuartalan (Catatan 50d dan 50e)	695.543.951	654.685.673	520.544.218	*Quarterly rent (Notes 50d and 50e)*
Uang untuk diperhitungkan				*Advances from customers*
Pihak ketiga	130.044.647	194.792.015	160.525.209	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 45h)	8.064.950	59.290.895	41.108.803	*Related parties (Note 45h)*
Pelayanan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	172.666.515	146.993.072	200.137.450	*Land, building, water and electricity services*
Pendapatan diterima di muka jangka pendek - lainnya	66.976.899	12.050.934	74.493.810	*Other short-term unearned revenues*
Subtotal	1.073.296.962	1.067.812.589	996.809.490	
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang (Catatan 28)	224.748.522	311.226.933	210.234.265	*Current portion of long-term unearned revenue (Note 28)*
Total	**1.298.045.484**	**1.379.039.522**	**1.207.043.755**	***Total***

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

22. BEBAN AKRUAL / *22. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Pegawai	1.536.062.485	1.362.433.077	1.180.628.855	*Employees*
Kerjasama mitra usaha	708.323.183	866.823.662	550.648.656	*Partnership*
Umum	417.036.376	572.154.903	1.055.395.304	*General*
Bunga	351.739.853	348.881.640	333.081.800	*Interest*
Bahan	206.967.006	102.363.721	213.467.133	*Material*
Pemeliharaan	167.675.465	108.486.693	144.995.439	*Maintenance*
Asuransi	41.050.044	16.245.675	30.959.550	*Insurance*
Biaya konsesi	26.989.964	28.354.981	32.077.764	*Concession fee*
Lain-lain	243.347.644	258.744.327	297.420.849	*Others*
Total	**3.699.192.020**	**3.664.488.679**	**3.838.675.350**	***Total***

22. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pelatihan dan pendidikan.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi (Catatan 49).

22. ACCRUED EXPENSES (continued)

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for training and education.

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement (Note 49).

23. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA / *23. OTHER CURRENT LIABILITIES*

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Pihak ketiga	1.182.432.796	1.023.914.350	762.147.091	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 45i dan 45j)	1.066.277.650	930.066.278	608.481.268	*Related parties (Note 45i and 45j)*
Total	**2.248.710.446**	**1.953.980.628**	**1.370.628.359**	***Total***

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Details of other current liabilities as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Uang titipan dari pelanggan				***Deposit from customers***
Pihak ketiga				*Third parties*
Swasta	462.031.106	362.541.225	119.820.796	*Private*
Lain-lain	63.994.238	107.486.408	137.559.314	*Others*
Pihak berelasi (Catatan 45i)	65.132.073	33.588.018	29.244.996	*Related parties (Note 45i)*
Subtotal	591.157.417	503.615.651	286.625.106	*Sub-total*
Liabilitas jangka pendek lainnya				***Other current liabilities***
Pihak ketiga	656.407.452	553.886.717	504.766.981	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 45j)	1.001.145.577	896.478.260	579.236.272	*Related parties (Note 45j)*
Subtotal	1.657.553.029	1.450.364.977	1.084.003.253	*Sub-total*
Total	**2.248.710.446**	**1.953.980.628**	**1.370.628.359**	***Total***

23. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA (lanjutan)

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Uang titipan - lain-lain terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Liabilitas jangka pendek lainnya - pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik dan cadangan klaim pelayanan kesehatan.

23. OTHER CURRENT LIABILITIES (continued)

Deposit from customers - private mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled with the customer or will be taken into account with subsequent services.

Deposit from customers - others mainly represents deposit from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance and employee co-operatives.

Other current liabilites - third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision and claim reserves for health services.

24. PERPAJAKAN / *24. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Perusahaan				*The Company*
Pajak Pertambahan Nilai	199.195.000	345.716.736	530.467.600	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan	176.154.037	141.996.590	183.019.881	*Income taxes*
Subtotal	375.349.037	487.713.326	713.487.481	*Sub-total*
Entitas anak				*Subsidiaries*
Pajak Pertambahan Nilai	659.421.104	544.447.637	582.456.403	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan	45.765.157	129.656.277	366.131.401	*Income taxes*
Subtotal	705.186.261	674.103.914	948.587.804	*Sub-total*
Total	**1.080.535.298**	**1.161.817.240**	**1.662.075.285**	***Total***

24. PERPAJAKAN (lanjutan) / *24. TAXATION (continued)*

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan) / *a. Prepaid taxes (continued)*

Taksiran tagihan restitusi pajak / *Estimated claims for tax refund*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Perusahaan				*The Company*
Pajak Pertambahan Nilai				*Value Added Tax*
2021	15.951.762	-	-	*2021*
2020	-	12.830.929	-	*2020*
2019	-	11.435.301	-	*2019*
2018	-	-	34.998.471	*2018*
Pajak penghasilan				*Income tax*
2021	178.619.622	-	-	*2021*
2020	176.820.302	137.776.872	-	*2020*
2019	198.549.998	220.897.155	220.897.155	*2019*
2018	-	171.961.012	207.638.786	*2018*
2015	-	381.563.183	381.563.183	*2015*
Subtotal	569.941.684	936.464.452	845.097.595	*Sub-total*
Entitas anak				*Subsidiaries*
Pajak Pertambahan Nilai				*Value Added Tax*
2020	42.809.039	-	2.342.005	*2020*
2019	33.168.340	-	-	*2019*
2018	-	-	16.158.615	*2018*
Pajak penghasilan	104.741.288	376.308.994	311.303.745	*Income tax*
Subtotal	180.718.667	376.308.994	329.804.365	*Sub-total*
Total	**750.660.351**	**1.312.773.446**	**1.174.901.960**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Perusahaan				*The Company*
PPh badan (Pasal 29)				*Corporate Income Tax (Article 29)*
2021	31.110.482	-	-	*2021*
2020	-	18.134.450	-	*2020*
Pajak Pertambahan Nilai	100.043.709	229.338.295	372.512.685	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan				*Income taxes*
Pasal 4(2)	43.240.495	59.383.623	71.712.728	*Article 4(2)*
Pasal 15	1.033.210	716.505	500.956	*Article 15*
Pasal 21	52.552.284	61.339.256	62.079.584	*Article 21*
Pasal 22	579.935	1.011.018	3.495.588	*Article 22*
Pasal 23/26	7.244.313	27.070.938	28.729.609	*Article 23/26*
Pasal 25	11.063.467	5.326.417	44.447.319	*Article 25*
Lainnya	103.171	214.273	341.384	*Others*
Subtotal	246.971.066	402.534.775	583.819.853	*Sub-total*

24. PERPAJAKAN (lanjutan) / *24. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Entitas anak				*Subsidiaries*
PPh badan (Pasal 29)				*Corporate Income Tax (Article 29)*
2021	155.530.522	-	-	*2021*
2020	393.636	55.447.001	-	*2020*
2019	-	-	40.702.123	*2019*
Pajak Pertambahan Nilai	82.375.379	68.598.002	55.918.477	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan				*Income taxes*
Pasal 4(2)	24.789.201	37.343.405	60.442.492	*Article 4(2)*
Pasal 15	356.918	205.023	169.364	*Article 15*
Pasal 21	39.415.682	38.843.591	40.920.599	*Article 21*
Pasal 22	946.457	338.152	111.818	*Article 22*
Pasal 23/26	15.319.754	7.075.179	9.304.932	*Article 23/26*
Pasal 25	11.344.250	33.743.163	29.603.564	*Article 25*
Lainnya	1.098.122	3.398.863	6.217.427	*Others*
Subtotal	331.569.921	244.992.379	243.390.796	*Sub-total*
Total	**578.540.987**	**647.527.154**	**827.210.649**	***Total***

c. Pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss for the year ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,* 2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.175.326.363	3.397.696.951	*Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi:			*Less:*
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.518.136.481	1.155.248.577	*Income before corporate income tax of subsidiaries*
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) -			*Income before corporate income tax - The Company (formerly Pelindo I Pelindo III and Pelindo IV) -*
Periode sembilan bulan yang berahir 30 September 2021	1.824.197.972	-	*- Ninth-month periods ended September 30, 2021*
Laba kena pajak final	1.824.197.972	-	
	1.490.582.034	2.465.265.046	*Income subject to final tax*

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss for the year ended December 31, 2021 and 2020 are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(657.590.124)	(222.816.672)	*Loss before corporate income tax expenses - the Company*
Beda temporer:			*Temporary differences:*
Provisi	-	3.683.335	*Provision*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	(224.559.118)	79.821.009	*Provision for employee benefits*
Cadangan beban pegawai	-	25.107.507	*Employee expense allowance*
Bonus	134.670.333	69.000.000	*Bonus*
Penyisihan penurunan nilai	18.922.257	56.665.265	*Allowance for impairment*
Bunga	-	15.018.499	*Interest*
Penyusutan dan amortisasi	(304.049.903)	(724.327.147)	*Depreciation and amortization*
Nilai wajar aset keuangan	-	(1.938.381)	*Fair value of financial assets*
Beda permanen:			*Permanent differences:*
Beban-beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	995.693.873	717.408.020	*Expenses that are not deductible for tax purposes*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(694.208.181)	(1.014.073.173)	*Income subject to final income tax*
Beban berkaitan pajak penghasilan final	916.090.756	585.935.286	*Expenses related to final income tax*
Beban umum	302.540.841	389.087.895	*General expenses*
Beban kesejahteraan karyawan	25.106.265	133.691.541	*Employees social welfare expenses*
Lainnya	42.335.315	761.090.084	*Others*
Subtotal	1.212.542.438	1.096.169.740	*Sub-total*
Taksiran laba pajak	**554.952.314**	**873.353.068**	***Estimated tax income***

24. PERPAJAKAN (lanjutan) / *24. TAXATION (continued)*

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan) / *c. Corporate income tax (continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.175.326.363	3.397.696.951	*Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan kena pajak final	3.152.428.151	2.455.811.980	*Income subject to final tax*
Laba sebelum pajak penghasilan badan	1.022.898.212	941.884.971	*Income before corporate income tax expenses*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	225.037.607	207.214.694	*Income tax calculated at applicable rate*
Dampak perbedaan permanen:			*Effect of permanent differences:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	349.262.951	346.090.724	*Non deductible expenses*
Penyesuaian	(424.435.442)	(466.101.124)	*Adjustment*
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	**149.865.116**	**87.204.294**	***Corporate income tax expense - The Company***
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	**291.207.982**	**-**	***Corporate income tax expense - The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021***
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	**441.073.098**	**87.204.294**	***Corporate income tax expense - The Company***
Beban pajak penghasilan badan - entitas anak	**558.107.989**	**351.550.186**	***Corporate income tax expense - subsidiaries***
Total	**999.181.087**	**438.754.480**	***Total***

Untuk tujuan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan melakukan perhitungan taksiran laba (rugi) pajak secara tahunan.

For the purpose of filling the annual corporate income tax return, the Company calculate the taxable income (loss) on annual basis.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)

d. The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Beban pajak final			*Final tax expense*
Perusahaan	367.537.823	341.390.936	*The Company*
Entitas anak	120.134.046	94.789.342	*Subsidiaries*
Subtotal	487.671.869	436.180.278	*Sub-total*
Beban pajak penghasilan badan			*Corporate income tax expense*
Kini			*Current*
Perusahaan	122.089.510	192.137.675	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	127.579.628	-	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	598.064.038	553.729.430	*Subsidiaries*
Subtotal	847.733.176	745.867.105	*Sub-total*
Tangguhan			*Deferred*
Perusahaan	(39.974.294)	(104.933.381)	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	259.781.683	-	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	(68.359.478)	(202.179.244)	*Subsidiaries*
Subtotal	151.447.911	(307.112.625)	*Sub-total*
Total	**999.181.087**	**438.754.480**	***Total***

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Taksiran penghasilan kena pajak			*Estimated taxable income*
Perusahaan	554.952.314	873.353.068	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang *Nine-month periods* berakhir 30 September 2021	579.907.401	-	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - ended September 30, 2021*
Entitas anak	2.718.472.900	2.516.951.945	*Subsidiaries*
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	3.853.332.615	3.390.305.013	*Total estimated taxable income*
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan			*Corporate income tax expense - current*
Perusahaan	122.089.510	192.137.675	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	127.579.628	-	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	598.064.038	553.729.430	*Subsidiaries*
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	847.733.176	745.867.105	*Corporate income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			*Less prepaid income tax*
Perusahaan	238.114.067	336.155.553	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	123.816.365	-	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	236.414.394	408.290.675	*Subsidiaries*
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	598.344.826	744.446.228	*Total prepaid income tax*

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Taksiran utang pajak penghasilan - Pasal 29			*Estimated income tax payable - Article 29*
Perusahaan	-	18.134.450	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	31.109.540	-	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	155.530.522	54.032.762	*Subsidiaries*
Total	**186.640.062**	**72.167.212**	***Total***
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			*Estimated claims for tax refund*
Perusahaan	116.024.558	137.776.872	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	62.595.063	-	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	27.202.474	154.976.033	*Subsidiaries*
Total	**205.822.095**	**292.752.905**	***Total***

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)

f. Deferred taxes

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/ *Year Ended December 31, 2021*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dibebankan pada/*Charged to*: Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income*	Dibebankan pada/*Charged to*: *Ekuitas/ Equity*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Assets***
Perusahaan						*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	1.370.114.018	(49.471.682)	26.413.898	160.734.141	1.507.790.375	*Employess benefit liabilites*
Cadangan beban pegawai	116.634.828	17.587.496	-	(79.132.384)	55.089.940	*Reserve for employee expense*
Penyisihan penurunan nilai piutang	224.235.926	(29.798)	-	(32.360.556)	191.845.572	*Provision for impairment of receivables*
Penyusutan dan amortisasi	(1.304.318.831)	(139.664.760)	-	124.568.530	(1.319.415.061)	*Depreciation and amortization*
Lain-lain	113.631.549	(70.167.093)	-	(43.464.456)	-	*Others*
Subtotal	520.297.490	(241.745.837)	26.413.898	130.345.275	435.310.826	*Sub-total*
Entitas anak	233.260.931	(50.533.859)	(29.951.750)	(817.310)	151.958.012	*Subsidiaries*
Total	**753.558.421**	**(292.279.696)**	**(3.537.852)**	**129.527.965**	**587.268.838**	***Total***
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Entitas anak	(117.774.083)	14.250.352	1.398.640	(2.946.530)	(105.071.621)	*Subsidiaries*

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ *Year Ended December 31, 2020*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dibebankan pada/*Charged to*: Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income*	Dibebankan pada/*Charged to*: *Ekuitas/ Equity*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Assets***
Perusahaan						*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	1.069.165.857	184.840.308	232.370.840	(116.262.987)	1.370.114.018	*Employess benefit liabilites*
Cadangan beban pegawai	114.221.887	17.443.050	-	(15.030.109)	116.634.828	*Reserve for employee expense*
Penyisihan penurunan nilai piutang	172.202.342	42.694.733	18.359.243	(9.020.392)	224.235.926	*Provision for impairment of receivables*
Penyusutan dan amortisasi	(1.325.027.593)	32.254.260	-	(11.545.498)	(1.304.318.831)	*Depreciation and amortization*
Lain-lain	134.071.535	(107.606.766)	-	87.166.780	113.631.549	*Others*
Subtotal	164.634.028	169.625.585	250.730.083	(64.692.206)	520.297.490	*Sub-total*
Entitas anak	76.759.274	107.176.022	50.142.944	(817.309)	233.260.931	*Subsidiaries*
Total	**241.393.302**	**276.801.607**	**300.873.027**	**(65.509.515)**	**753.558.421**	***Total***
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Entitas anak	(91.505.345)	100.361.548	(128.956.270)	2.325.984	(117.774.083)	*Subsidiaries*

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

1. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 20 April 2017, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp805.287.733.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan keberatan ke DJP atas SKPKB tersebut. Sebagai hasil keberatan Perusahaan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2017, diterbitkan SKPKB revisi sebesar Rp614.304.124.

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan banding ke pengadilan pajak atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 26 Juli 2019, pengadilan pajak menolak pengajuan banding yang diajukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan menetapkan sanksi administrasi sebesar Rp614.304.124. Pada tanggal 22 Agustus 2019 dan 5 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp614.304.124 dan mencatatnya sebagai aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 4 Mei 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali serta membatalkan surat keputusan Direktur Jendral Pajak tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB PPh tahun pajak 2015 dan menetapkan jumlah PPh lebih bayar untuk masa Januari - Desember 2015 adalah sebesar Rp377.838.436, memerintahkan untuk mengembalikan seluruh PPh kurang bayar sebesar Rp614.304.124 berikut sanksi administrasi sebesar Rp614.304.124. Pada tanggal 5 Agustus 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menerima pengembalian sebesar Rp992.142.560.

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

1. Tax assessment for fiscal year 2015

On April 20, 2017, the Company (formerly Pelindo II) received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp805,287,733.

On July 18, 2017, the Company (formerly Pelindo II) has filed an objection to the DJP for the SKPKB. As a result of the Company's objection, on December 22, 2017, the Company received a revised SKPKB amounting to Rp614,304,124.

On March 20, 2018, the Company (formerly Pelindo II) has filed an appeal to the tax court for the SKPKB.

On July 26, 2019, the tax court rejected the Company's (formerly Pelindo II) appeal and imposed an administrative penalty of Rp614,304,124. As a result, on August 22, 2019 and December 5, 2019, the Company made payments of Rp614,304,124, respectively and recorded as other non-current assets.

On October 17, 2019, the Company (formerly Pelindo II) filed a judicial review to the Supreme Court.

On May 4, 2021, the Company (formerly Pelindo II) received the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which decided to grant the request for a judicial review and cancel the decision letter from the Director General of Taxes regarding the taxpayer's objection to the SKPKB PPh for the 2015 tax year and determined the amount of overpaid income tax for the period January - December 2015 is amounting to Rp377,838,436, ordered to return all underpaid income tax of Rp614,304,124 including administrative sanctions amounting to Rp614,304,124. On August 5, 2021, the Company (formerly Pelindo II) has received a refund of Rp992,142,560.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) belum menerima pengembalian atas pembayaran STP terkait sanksi administrasi 100% sebesar Rp614.304.124, atas STP tersebut dicatat pada piutang lain-lain.

2. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2018

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima Surat Ketetapan Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp171.961.012 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2018. Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menerima pengembalian lebih bayar PPh badan 2018 pada tanggal 8 Januari 2021.

Pada tanggal 21 April 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar Rp126.924.148. Pada tanggal 19 Mei 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah melakukan pembayaran atas pokok dan sanksi bunga serta mencatat aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan keberatan atas SKPKB PPh badan 2019.

3. Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, Kelompok Usaha telah menerima beberapa surat ketetapan pajak untuk berbagai tahun pajak. Kelompok Usaha menyetujui sebagian ketetapan pajak tersebut dan telah membukukan tambahan beban sebesar Rp30.334.916 dan Rp11.277.104 dan Rp7.248.430 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

As of December 31, 2021, The Company (formerly Pelindo II) has not yet received a refund for the STP payment related to the 100% administrative penalty amounting to Rp614,304,124, the STP was recorded in other receivables.

2. Tax assessment for fiscal year 2018

On October 22, 2020, the Company (formerly Pelindo II) received an Assessment Letter of Overpayment ("SKPLB") amounting to Rp171,961,012 for the overpayment of corporate income tax for the 2018 fiscal year. The Company has received the refund of the 2018 corporate income tax overpayment on January 8, 2021.

On April 21, 2021, the Company (formerly Pelindo II) received SKPKB for the 2019 corporate income tax amounting to Rp126,924,148. On May 19, 2021, the Company (formerly Pelindo II) has paid the principal and interest penalties and recorded the underpayment in other non-current assets.

On July 15, 2021 the Company (formerly Pelindo II) filed an objection to the 2019 corporate income tax SKPKB.

3. In 2021, 2020 and 2019, the Group has received several tax assessment letter for various tax years. The Group has accepted a portion of these tax assessments and booked additional expenses of Rp30,334,916, Rp11,277,104 and Rp7,248,430 for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively, in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Atas jumlah sisanya, Kelompok Usaha telah mengajukan keberatan dan banding. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan dan banding adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

For the remaining amounts, the Group has filed objections and appeals. As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the amount of tax assessments in the process of objection and appeal were as follows:

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Pajak penghasilan badan	26.060.384	8.065.337	7.248.430	*Corporate income tax*
Pajak lainnya	4.274.532	3.211.767	-	*Other taxes*
Total	**30.334.916**	**11.277.104**	**7.248.430**	***Total***

h. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No.7/2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", yang menerapkan, antara lain, tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:

- sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020).
- Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif di atas

h. On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia signed UU No.7/2021 regarding "Harmonization of Tax Regulation", which applies, among others, the corporate income tax rate as follows:

- *22% effective starting fiscal year 2022 (previously 20% as stipulated in Perppu No.1 Year 2020 dated March 31, 2020).*
- *Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges and meet certain requirements in accordance with the government regulations, can apply tariff of 3% lower than tariff as stated above*

25. UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut:

25. BONDS PAYABLE

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the details of bonds payable are as follows:

			31 Desember/*December 31*, 2021				
Obligasi/ *Bonds*	**Pokok Utang/Debt *Principal***	**Penerbit/ *Issuer***	**Total/ *Total***	**Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Discount and Transaction Cost***	**Neto/ *Net***	**Jangka Pendek/ *Current***	**Jangka Panjang/ *Non-current***
Senior Notes, Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD1.100.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ *the Company (formerly Pelindo II)*	15.695.900.000	(78.890.126)	15.617.009.874	-	15.617.009.874
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ *the Company (formerly Pelindo II)*	7.134.500.000	(131.298.845)	7.003.201.155	-	7.003.201.155
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ *Issued in 2014*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ *the Company (formerly Pelindo III)*	7.134.505.000	(24.281.765)	7.110.223.235	-	7.110.223.235
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ *Issued in 2018*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) / *the Company (formerly Pelindo III)*	7.134.505.000	(29.844.283)	7.104.660.717	-	7.104.660.717
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ *Year 2016 Tranche C*	Rp400.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / *the Company (formerly Pelindo I)*	400.000.000	(398.100)	399.601.900	-	399.601.900
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/*Year 2016 Tranche D*	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / *the Company (formerly Pelindo I)*	50.000.000	(104.501)	49.895.499	-	49.895.499
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ *Year 2018 Tranche A*	Rp380.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / *the Company (formerly Pelindo IV)*	380.000.000	(208.812)	379.791.188	-	379.791.188
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ *Year 2018 Tranche B*	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / *the Company (formerly Pelindo IV)*	1.714.511.341	(1.722.857)	1.712.788.484	-	1.712.788.484
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ *Year 2018 Tranche C*	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / *the Company (formerly Pelindo IV)*	800.000.000	(995.572)	799.004.428	-	799.004.428
Total/*Total*			**40.443.921.341**	**(267.744.861)**	**40.176.176.480**	**-**	**40.176.176.480**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. BONDS PAYABLE (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the details of bonds payable are as follows: (continued)

			31 Desember/*December 31*, 2020 Disajikan kembali – Catatan 4/*As restated – Note 4*				
Obligasi/ *Bonds*	**Pokok Utang/*Debt Principal***	**Penerbit/ *Issuer***	**Total/ *Total***	**Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Discount and Transaction Cost***	**Neto/ *Net***	**Jangka Pendek/ *Current***	**Jangka Panjang/ *Non-current***
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD1.000.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II) / *the Company (formerly Pelindo II)*	15.515.500.000	(100.313.323)	15.415.186.677	-	15.415.186.677
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II) / *the Company (formerly Pelindo II)*	7.052.500.000	(133.983.613)	6.918.516.387	-	6.918.516.387
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ *Issued in 2014*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) / *the Company (formerly Pelindo III)*	7.052.500.000	(33.100.516)	7.019.399.484	-	7.019.399.484
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ *Issued in 2018*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) / *the Company (formerly Pelindo III)*	7.052.500.000	(52.212.171)	7.000.287.829	-	7.000.287.829
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri B/ *Year 2016 Tranche B*	Rp500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / *the Company (formerly Pelindo I)*	500.000.000	(231.948)	499.768.052	499.768.052	-
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ *Year 2016 Tranche C*	Rp400.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / *the Company (formerly Pelindo I)*	400.000.000	(663.870)	399.336.130	-	399.336.130
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ *Year 2016 Tranche D*	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / *the Company (formerly Pelindo I)*	50.000.000	(127.820)	49.872.180	-	49.872.180
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ *Year 2018 Tranche A*	Rp380.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / *the Company (formerly Pelindo IV)*	380.000.000	(481.495)	379.518.505	-	379.518.505
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ *Year 2018 Tranche B*	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / *the Company (formerly Pelindo IV)*	1.820.000.000	(101.923.019)	1.718.076.981	-	1.718.076.981
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ *Year 2018 Tranche C*	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / *the Company (formerly Pelindo IV)*	800.000.000	(1.013.674)	798.986.326	-	798.986.326
	Total/*Total*		**40.623.000.000**	**(424.051.449)**	**40.198.948.551**	**499.768.052**	**39.699.180.499**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. BONDS PAYABLE (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the details of bonds payable are as follows: (continued)

			1 Januari 2020/31 Desember 2019/*January 1, 2020/December 31,* 2019 Disajikan kembali – Catatan 4/*As restated – Note 4*				
Obligasi/ *Bonds*	**Pokok Utang/*Debt Principal***	**Penerbit/ *Issuer***	**Total/ *Total***	**Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Discount and Transaction Cost***	**Neto/ *Net***	**Jangka Pendek/ *Current***	**Jangka Panjang/ *Non-current***
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD1.000.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II) / *the Company (formerly Pelindo II)*	15.291.100.000	(120.891.181)	15.170.208.819	-	15.170.208.819
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II) / *the Company (formerly Pelindo II)*	6.950.500.000	(136.530.625)	6.813.969.375	-	6.813.969.375
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ *Issued in 2014*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) / *the Company (formerly Pelindo III)*	6.950.500.000	(41.943.427)	6.908.556.573	-	6.908.556.573
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ *Issued in 2018*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) / *the Company (formerly Pelindo III)*	6.950.500.000	(74.641.343)	6.875.858.657	-	6.875.858.657
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri B/ *Year 2016 Tranche B*	Rp500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / *the Company (formerly Pelindo I)*	500.000.000	(696.675)	499.303.325	-	499.303.325
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ *Year 2016 Tranche C*	Rp400.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / *the Company (formerly Pelindo I)*	400.000.000	(928.901)	399.071.099	-	399.071.099
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ *Year 2016 Tranche D*	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / *the Company (formerly Pelindo I)*	50.000.000	(150.947)	49.849.053	-	49.849.053
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ *Year 2018 Tranche A*	Rp380.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / *the Company (formerly Pelindo IV)*	380.000.000	545.984	380.545.984	-	380.545.984
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ *Year 2018 Tranche B*	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / *the Company (formerly Pelindo IV)*	1.820.000.000	(100.348.794)	1.719.651.206	-	1.719.651.206
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ *Year 2018 Tranche C*	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / *the Company (formerly Pelindo IV)*	800.000.000	(1.879.783)	798.120.217	-	798.120.217
	Total/*Total*		**40.092.600.000**	**(477.465.692)**	**39.615.134.308**	**-**	**39.615.134.308**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

25. BONDS PAYABLE (continued)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Other information in relation to bonds payables as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

Obligasi / *Bonds*	Peringkat/ *Rating*	Wali Amanat/ *Trustee*	Tempat Pencatatan/*Listed*	Tanggal Terbit/*Issue Date*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Periode Pembayaran Bunga/*Interest Payment Period*	Tingkat Bunga per Tahun/ *Interest Rate per Annum*
Senior Notes, USD1.100.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015 i)*	Baa3, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/*and* (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ *May 5, 2015*	5 Mei 2025/ *May 5, 2025*	Setengah tahunan/ *Semi-Annually*	4,250%
Senior Notes, USD500.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015 i)*	Baa3, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/*and* (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2045/ May 5, 2045	Setengah tahunan/ *Semi-Annually*	5,375%
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ *Issued in 2014 i)*	BBB-, BBB-, Baa3 stable (Fitch Rating, Standard and Poors, dan/*and* Moody's Investor Service)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	1 Oktober 2014/ *October 1, 2014*	1 Oktober 2024/ *October 1, 2024*	Setengah tahunan/*Semi-Annually*	4,875%
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ *Issued in 2018 i)*	BBB-, BBB-, Baa3 stable (Fitch Rating, Standard and Poors, dan/*and* Moody's Investor Service)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	2 Mei 2018/ *May 2, 2018*	2 Mei 2023/ *May 2, 2023*	Setengah tahunan/*Semi-Annually*	4,500%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ *Year 2016 Tranche C* ii)	idAA-/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ *June 21, 2016*	21 Juni 2023/ *June 21, 2023*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,250%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ *Year 2016 Tranche D* ii)	idAA-/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ *June 21, 2016*	21 Juni 2026/ *June 21, 2026*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,500%

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. BONDS PAYABLE (continued)

Other information in relation to bonds payables as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Obligasi / *Bonds*	Peringkat/ *Rating*	Wali Amanat/ *Trustee*	Tempat Pencatatan/*Listed*	Tanggal Terbit/*Issue Date*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Periode Pembayaran Bunga/*Interest Payment Period*	Tingkat Bunga per Tahun/ *Interest Rate per Annum*
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ *Year 2018 Tranche A* i)	AA (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ *July 4, 2018*	4 Juli 2023/ *July 4, 2023*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	8,000%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ *Year 2018 Tranche B* i)	AA (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ *July 4, 2018*	4 Juli 2025/ *July 4, 2025*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,150%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ *Year 2018 Tranche C* i)	AA (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ *July 4, 2018*	4 Juli 2028/ *July 4, 2028*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,350%

Jaminan
i) Tidak dijamin
ii) Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan (dahulu Pelindo I) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP.

Collateral
i) Unsecured
ii) These bonds are not guaranteed by special collaterals, but are guaranteed by all the Company's (formerly Pelindo I) assets, both moving and immovable goods, both existing and existing in the future to become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the KUHP.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi digunakan untuk melunasi pinjaman dan rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan. Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

Proceeds from the bond offering were used to refinance loan and will be used for the Company's expansion plan and the Company's general purposes. The Company must also maintain certain financial ratios.

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG

26. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Utang bank jangka panjang	9.022.242.258	11.633.468.160	9.002.598.524	*Long-term bank loans*
Bagian lancar	(2.365.898.747)	(504.471.670)	(388.678.828)	*Current portion*
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar	**6.656.343.511**	**11.128.996.490**	**8.613.919.696**	***Long-term bank loans, net of current portion***

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) / *26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)*

31 Desember 2021	Bagian lancar/ *Current portion*	Bagian jangka panjang/*long term portion*	Total	*December 31, 2021*
Entitas Anak				***Subsidiaries***
PTP1				***PTP1***
Bilateral				*Bilateral*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.094.628.442	-	1.094.628.442	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	416.948.060	-	416.948.060	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Indonesia Infrastructure Finance	416.948.060	-	416.948.060	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
Subtotal	**1.928.524.562**	**-**	**1.928.524.562**	***Sub-total***
PMT				***PMT***
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	417.173.318	417.173.318	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	102.399.640	536.936.991	639.336.631	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	102.399.640	536.936.991	639.336.631	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	102.399.640	536.936.991	639.336.631	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Subtotal	**307.198.920**	**2.027.984.291**	**2.335.183.211**	***Sub-total***
CTP				***CTP***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	133.296.919	-	133.296.919	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.159.896.385	1.159.896.385	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT CIMB Niaga Tbk	-	802.277.366	802.277.366	*PT CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	722.082.824	722.082.824	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	1.202.504.863	1.202.504.863	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	402.946.011	402.946.011	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	160.536.881	160.536.881	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank DKI	-	160.450.553	160.450.553	*PT Bank DKI*
Subtotal	**133.296.919**	**4.610.694.883**	**4.743.991.802**	***Sub-total***
PIL				***PIL***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	15.960.034	28.694.454	44.654.488	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Total pokok utang	**2.384.980.435**	**6.667.373.628**	**9.052.354.063**	***Total principal of loans***
Dikurangi:				*Less:*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(19.081.688)	(11.030.117)	(30.111.805)	*Unamortized costs of loans*
Total	**2.365.898.747**	**6.656.343.511**	**9.022.242.258**	***Total***

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) / *26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)*

31 Desember 2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)	Bagian lancar/ *Current portion*	Bagian jangka panjang /*long term portion*	Total	*December 31, 2020 (As restated - Note 4)*
Perusahaan				***The Company***
Bilateral				*Bilateral*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	148.806.322	59.403.067	208.209.389	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.089.861.217	1.089.861.217	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	124.142.809	956.918.329	1.081.061.138	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	124.142.809	487.592.996	611.735.805	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Deutsche Bank AG	82.021.890	-	82.021.890	*Deutsche Bank AG*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	469.325.333	469.325.333	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Subtotal	**479.113.830**	**3.063.100.942**	**3.542.214.772**	***Sub-total***
Entitas Anak				***Subsidiaries***
PTP1				***PTP1***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.102.929.032	1.102.929.032	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	397.016.148	397.016.148	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	397.016.148	397.016.148	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
Subtotal	**-**	**1.896.961.328**	**1.896.961.328**	***Sub-total***
PMT				***PMT***
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	417.173.318	417.173.318	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	705.164.971	705.164.971	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	705.164.971	705.164.971	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	705.164.971	705.164.971	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Subtotal	**-**	**2.532.668.231**	**2.532.668.231**	***Sub-total***
CTP				***CTP***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	271.792.678	271.792.678	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	856.675.257	856.675.257	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	845.312.356	845.312.356	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT CIMB Niaga Tbk	-	571.697.944	571.697.944	*PT CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	514.523.660	514.523.660	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	287.575.303	287.575.303	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	114.356.603	114.356.603	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank DKI	-	114.334.632	114.334.632	*PT Bank DKI*
Subtotal	**-**	**3.576.268.433**	**3.576.268.433**	***Sub-total***
PIL				***PIL***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	13.403.446	64.500.129	77.903.575	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
KKT				***KKT***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.954.394	13.946.800	25.901.194	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Total pokok utang	**504.471.670**	**11.147.445.863**	**11.651.917.533**	***Total principal ofloans***
Dikurangi:				*Less:*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(18.449.373)	(18.449.373)	*Unamortized costs of loans*
Total	**504.471.670**	**11.128.996.490**	**11.633.468.160**	***Total***

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) / *26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)*

1 Januari 2020/31 Desember 2019 (Disajikan kembali - Catatan 4)	Bagian lancar/ *Current portion*	Bagian jangka panjang/ *long term portion*	Total	*January 1, 2020/December 31, 2019 (As restated - Note 4)*
Perusahaan				***The Company***
Bilateral				*Bilateral*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	208.209.390	208.209.390	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman bank sindikasi				*Syndicated bank loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70.416.712	511.249.487	581.666.199	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	70.000.047	501.666.153	571.666.200	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	70.000.047	501.666.153	571.666.200	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Deutsche Bank AG	162.163.278	81.764.281	243.927.559	*Deutsche Bank AG*
Subtotal	**372.580.084**	**1.804.555.464**	**2.177.135.548**	***Sub-total***
Entitas Anak				***Subsidiaries***
PTP1				***PTP1***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.075.917.778	1.075.917.778	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman bank sindikasi				*Syndicated bank loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	145.451.537	145.451.537	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	145.451.537	145.451.537	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
Subtotal	**-**	**1.366.820.852**	**1.366.820.852**	***Sub-total***
PMT				***PMT***
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	416.657.416	416.657.416	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	719.793.492	719.793.492	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	719.793.492	719.793.492	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	719.793.492	719.793.492	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Subtotal	**-**	**2.576.037.892**	**2.576.037.892**	***Sub-total***
CTP				***CTP***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	486.511.856	486.511.856	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	557.548.955	557.548.955	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	557.541.817	557.541.817	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT CIMB Niaga Tbk	-	372.236.723	372.236.723	*PT CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	335.008.569	335.008.569	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	187.728.093	187.728.093	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	74.447.546	74.447.546	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank DKI	-	74.446.573	74.446.573	*PT Bank DKI*
Subtotal	**-**	**2.645.470.132**	**2.645.470.132**	***Sub-total***
PIL				***PIL***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.132.350	85.368.000	89.500.350	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
RSP				***RSP***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	12.000	114.978.000	114.990.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
KKT				***KKT***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.954.394	25.901.023	37.855.417	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Total pokok utang	**388.678.828**	**8.619.131.363**	**9.007.810.191**	***Total principal of loans***
Dikurangi:				*Less:*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(5.211.667)	(5.211.667)	*Unamortized costs of loans*
Total	**388.678.828**	**8.613.919.696**	**9.002.598.524**	***Total***

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/*The Company (formerly Pelindo I)*					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2017-2019)	2	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah marjin 3,00% / *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,00%*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2017-2019)	2	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah marjin 3,00% / *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,00%*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2017-2019)	2	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah marjin 3,00% / *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,00%*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2025)	7	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah marjin 3,75% / *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,75%*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) (lanjutan)/*The Company (formerly Pelindo I) (continued)*					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2025)	7	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah marjin 3,75% / *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,75%*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*
Pinjaman Bank Sindikasi/*Syndicated loan*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2025)	7	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah marjin 3,75% / *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,75%*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2029)	10	Tingkat suku bunga sebesar *time deposit* Bank Mandiri 3 bulan ditambah marjin 3,00% / *Interest rate of 3 months Bank Mandiri time deposit plus margin of 3.00%*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2029)	10	Tingkat suku bunga sebesar *time deposit* Bank Mandiri 3 bulan ditambah marjin 3,00% / *Interest rate of 3 months Bank Mandiri time deposit plus margin of 3.00%*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021 and 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) (lanjutan)/*The Company (formerly Pelindo I) (continued)*					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2029)	10	Tingkat suku bunga sebesar *time deposit* Bank Mandiri 3 bulan ditambah marjin 3,00% / *Interest rate of 3 months Bank Mandiri time deposit plus margin of 3.00%*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2021-2031)	10	*Tingkat suku bunga acuan ditambah marjin pada tanggal penetapan suku bunga / Bench mark interest rate plus margin at the stipulated date*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2021-2031)	10	Tingkat suku bunga acuan ditambah marjin pada tanggal penetapan suku bunga/ *Bench mark interest rate plus margin at the stipulated date*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2021-2031)	10	Tingkat suku bunga acuan ditambah marjin pada tanggal penetapan suku bunga/ *Bench mark interest rate plus margin at the stipulated date*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Permata Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2021-2031)	10	Tingkat suku bunga acuan ditambah marjin pada tanggal penetapan suku bunga/ *Bench mark interest rate plus margin at the stipulated date*	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / *Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ ***Credit Facility***	**Kreditur/** ***Creditor***	**Jadwal Pembayaran/** ***Repayment Schedule***	**Jangka Waktu (Tahun)/** ***Period (Year)***	**Tingkat Bunga/** ***Interest Rates***	**Jaminan/** ***Collateral***
Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) /*The Company (formerly Pelindo III)*					
Fasilitas *Letter of Credit* / *Letter of Credit Facilities*	Deutsche Bank AG, London Branch	Beberapa cicilan/*several installment* (2015-2021)	5	1,79%	Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini / *There is no collateral given for these facilities.*
Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) /*The Company (formerly Pelindo IV)*					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri(Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2020-2031)	10	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 3,40% / *Interest rate of 3 months JIBOR plus margin of 3,40%*	Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini / *There is no collateral given for these facilities.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2020-2031)	10	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 3,40% / *Interest rate of 3 months JIBOR plus margin of 3,40%*	Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini / *There is no collateral given for these facilities.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Maybank (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2020-2031)	10	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 3,40% / *Interest rate of 3 months JIBOR plus margin of 3,40%*	Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini / *There is no collateral given for these facilities.*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PMT					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2016-2026)	10	JIBOR 3 Bulan +3,25%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / *The facility is guaranteed with collateral as follows:* *1.* Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose ("TMP") dan diikat dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit fasilitas kredit / *Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.* *2.* Jaminan fidusia atas Fasilitas Pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan Fasilitas Pelabuhan terkait dengan TMP dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit kredit / *Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit.* *3.* Jaminan fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan *Security Coverage Ratio* 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi / *Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims.* *4.* Pengalihan (*cessie*) atas rekening penampungan / *Transfer (cessie) of escrow accounts*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021 and 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PMT					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2016-2026)	10	JIBOR 3 Bulan +3,25%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose ("TMP") dan diikat dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit fasilitas kredit / *Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.* 2. Jaminan fidusia atas Fasilitas Pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan Fasilitas Pelabuhan terkait dengan TMP dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit kredit / *Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit.* 3. Jaminan Fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan *Security Coverage Ratio* 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi / *Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims.* 4. Pengalihan (*cessie*) atas rekening penampungan / *Transfer (cessie) of escrow accounts*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021 and 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PMT					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2016-2026)	10	JIBOR 3 Bulan +3,25%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose ("TMP") dan diikat dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit fasilitas kredit / *Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.* 2. Jaminan fidusia atas fasilitas pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan fasilitas pelabuhan terkait dengan TMP dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit kredit / *Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit.* 3. Jaminan fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan *Security Coverage Ratio* 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi / *Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims.* 4. Pengalihan (*cessie*) atas rekening penampungan / *Transfer (cessie) of escrow accounts*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PMT					
Fasilitas Kredit / *Credit Facility Agreement*	PT Sarana Multi Infrastruktur	Beberapa cicilan/several installment (2018-2031)	13	JIBOR 3 Bulan +4,25%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Hak tanggungan untuk seluruh tanah dan bangunan serta benda-benda lain di atas tanah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung / *Mortgage rights for all land and buldings as well as other objects on the land of Kuala Tanjung Multipurpose Terminal* 2. Jaminan fidusia atas seluruh fasilitas Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dan seluruh peralatan serta perlengkapan fasilitas pelabuhan terkait dengan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung / *Fiduciary guarantee for all Kuala Tanjung Multipurpose Terminal facilities and all port facilities and equipment related to Kuala Tanjung Multipurpose Terminal* 3. Hak tanggungan untuk seluruh tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung / *Mortgage rights for all land and buildings as well as other objects attached to the land of Kuala Tanjung Multipurpose Terminal* 4. Jaminan fidusia atas seluruh fasilitas Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dan seluruh peralatan serta perlengkapan fasilitas pelabuhan terkait dengan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung / *Fiduciary guarantee for all Kuala Tanjung Multipurpose Terminal facilities and all port facilities and equipment related to Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.* 5. Jaminan fidusia atas seluruh hasil klaim bank garansi dan atau klaim asuransi Debitur atas pekerjaan pembangunan infrastruktur Terminal Multipurpose yang diterima dari kontraktor dan / atau supplier vendor / *Fiduciary guarantee for all bank guarantee claims and/or debtor insurance claims for the Multipurpose Terminal infrastructure development work received from contractors and/or vendor suppliers.* 6. Pengalihan *(cessie)* atas rekening penampungan / *Transfer (cessie) of escrow accounts* 7. Gadai deposito atas rekening *debt service reserve account (DSRA) / Pawn of time deposits on the debt service reserve account (DSRA).* 8. Surat pernyataan dan kesanggupan *(Letter of Undertaking)* dari para pemegang saham Debitur yang menyatakan bahwa Proyek TMP tidak akan dalam keadaan cidera janji./ *Letter of undertaking from the shareholders of the Debt or stating that the TMP Project will not be in a state of default.*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PTP1					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2030)	12	JIBOR 3 Bulan +3,85%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Fidusia atas hasil klaim/*proceed* atas jaminan pembayaran *(bank guarantee)* dan/atau SBLC dan/atau asuransi atas proyek / *Fiduciary over the results of claims/proceed for bank guarantees and/or SBLC and/or insurance for the project.* 2. Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas BICT Fase II atas nama PTP1 yang dibiayai oleh kreditur sindikasi / *Fiduciary on BICT Phase II container terminal equipment and supplies on behalf of PTP1 financed by syndicated creditors.* 3. Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan *banker's clause* dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi / *All collateral must be insured by including the banker's clause with the name of the collateral agent or the name of the syndicated creditor as insured by the syndicated creditor's partner insurance company.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Indonesia Infrastructure Finance Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2030)	12	JIBOR 3 Bulan +3,85%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Fidusia atas hasil klaim/*proceed* atas jaminan pembayaran *(bank guarantee)* dan/atau SBLC dan/atau asuransi atas proyek / *Fiduciary over the results of claims/proceed for bank guarantees and/or SBLC and/or insurance for the project.* 2. Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas BICT Fase II atas nama PTP1 yang dibiayai oleh kreditur sindikasi / *Fiduciary on BICT Phase II container terminal equipment and supplies on behalf of PTP1 financed by syndicated creditors.* 3. Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan *banker's clause* dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi / *All collateral must be insured by including the banker's clause with the name of the collateral agent or the name of the syndicated creditor as insured by the syndicated creditor's partner insurance company.*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PTP1					
Fasilitas Kredit Bilateral / *Billateral Credit Facility*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2015-2030)	15	JIBOR 3 Bulan +3,35%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Tanah, bangunan dermaga dan container yard serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Petikemas Belawan Fase II dan dan diikat dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit fasilitas kredit / *Land, jetty buildings and container yards as well as other objects attached to the land of the Belawan Container Terminal Phase II and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.* 2. Seluruh hasil klaim atas garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur Dermaga dan Terminal Petikemas BICT II / *All results of claims for guarantees and insurance on infrastructure development projects of Jetty and BICT II.*
PIL					
Fasilitas Kredit Bilateral / *Billateral Credit Facility*	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2017-2025)	8	9,50% per tahun untuk 3 (tiga) bulan pertama dan setara 17,50% per tahun untuk bulan berikutnya/ *9,50% per annum for the first 3 (three) months and equivalent 17.50% per annum for the remaining months.*	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan dengan aset tetap berupa dua unit *Harbor Mobile Crane* (HMC) yang didanai berdasarkan akta fidusia dengan nilai pengikatan Rp103.299.200 / *The loan is pledged as collateral for the fixed assets of the two units of Harbor Mobile Cranes (HMC) which are funded based on a fiduciary deed with a binding value of Rp103,299,200.*
RSP					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk ("BSM")	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2029)	10	Nisbah bagi hasil untuk BSM dan RSP masing-masing sebesar 2,22% dan 97,78%. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan/ *The profit sharing ratio for BSM and RSP was 2.22% and 97.78%, respectively. The financing period is 12 (twelve months).*	Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 21.330 m2 di RSP Cabang Jakarta yang terletak di Jl. Kramat Jaya / *The Facility is guaranteed by collateral in the form of land and building with area 21,330 m2 in RSP Jakarta branch, which located in Jl. Kramat Jaya.*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
CTP					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2034)	15	*Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2034)	15	*Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2034)	15	*Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2034)	15	*Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2034)	15	*Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
CTP					
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2036)	15	*Reference Rate + Margin Eqv 10,50% untuk Tranche A1 dan A2 , dan Reference Rate + Margin eqv 12,50% untuk trance B*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
Pinjaman Bank Sindikasi / *Syndicated loan*	PT Bank DKI	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2036)	15	*Reference Rate + Margin Eqv 10,50% untuk Tranche A1 dan A2 , dan Reference Rate + Margin eqv 12,50% untuk trance B*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
KKT					
Fasilitas Kredit Investasi / *Investment loan facility*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2015-2023)	7,5	Tingkat suku bunga sebesar 10,25% efektif per bulan / *Interest rate of 10,25% of effective per annum*	Pinjaman ini dijamin dengan 3 unit *Rubber Tyred Gantry (RTG)* dan lapangan penumpukan milik KKT / *The collateral given for this facility were 3 units Rubber Tyred Gantry (RTG) and container yard owned by KKT*

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, fasilitas tersebut mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya persyaratan rasio keuangan.

Based on the loan agreement, the facility requires compnay to comply to certain requirement, among others financial ratios as stipulated in the Loan Agreement.

Pada tanggal 31 Desember 2021, PTP1 tidak memenuhi sebagian persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman dan belum memperoleh surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut dapat menyebabkan pinjaman menjadi jatuh tempo, dan oleh karenanya seluruh saldo pinjaman terutang PTP1 disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Pada tanggal 22 Februari 2022 dan 16 Maret 2022, PTP1 telah memperoleh surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut masing-masing untuk fasilitas pinjaman bilateral dan sindikasi.

As of December 31, 2021, PTP1 did not comply to several financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement and not yet received waiver letter on the incompliance of financial ratio covenant until December 31, 2021. In accordance with the loan agreement, incompliance of financial ratio covenants may lead to the loan became due, and therefore, all the outstanding loan facility of PTP1 are presented as current liabilities. On February 22, 2022 and March 16, 2022, PTP1 has obtained waiver letters for non-fulfillment of the financial ratio requirements for bilateral and syndicated loan facilities, respectively.

27. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

27. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Rupiah				*Rupiah*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Indonesia Infrastruktur Finance	476.290.919	332.402.837	213.793.871	*PT Indonesia Infrastruktur Finance*
Rupiah				*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 45f)				*Related parties (Note 45f)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	949.751.736	670.300.506	437.976.537	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Total	**1.426.042.655**	**1.002.703.343**	**651.770.408**	***Total***

CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No.30 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta. CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 26).

Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi CTP untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan memiliki limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp7.404.162.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate* + *Margin eqv*. 10,50% untuk tranche A1 dan A2, dan *Reference Rate* + *Margin eqv*. 12,50% untuk tranche B yang bersifat Subordinasi.

Berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Penundukan Diri tertanggal 22 Oktober 2019, dinyatakan bahwa Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") selaku kreditur baru telah bergabung dengan pola incremental option dan telah menjadi salah satu kreditur untuk fasilitas tranche B dalam Perjanjian Kredit dengan limit pinjaman Rp521.248.000.

Perjanjian Kredit Sindikasi telah mengalami Perubahan Pertama Terhadap Akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 31 Tanggal 26 Februari 2019 pada tanggal 17 Desember 2019 dengan merubah limit fasilitas kredit investasi menjadi sebesar Rp7.321.248.000.

CTP

Based on the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 45 dated December 21, 2018 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta which was restated based on the deed of Restatement of the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No.30 dated February 26, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta. CTP entered into a Loan Syndicated with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk and other banking financial institution (Note 26).

In accordance with the decision of the Syndicated Creditor for participation in the syndicated financing of CTP for the purpose of development financing investment has an Investment Credit facility limit of Rp7,404,162,000 with a maximum period of 180 months from the Signing of the Credit Agreement including Grace Period with the construction interest rate is the Reference Rate + Margin eqv. 10.50% for tranche A1 and A2, and the Reference Rate + Margin eqv. 12.50% for tranche B which is Subordinated.

Based on the Notification of Self-Submission Statement dated October 22, 2019, it was stated that Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") as a new creditor had joined the incremental option pattern and had become one of the creditors for tranche B facilities in the Credit Agreement with a loan limit of Rp521,248,000.

The Syndicated Credit Agreement has amended the First Amendment to the Restatement of the Syndicated Credit Agreement Number 31 dated February 26, 2019 on December 17, 2019 by changing the investment credit facility limit to Rp7,321,248,000 .

27. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

Berdasarkan surat Agen Fasilitas nomor SSK/3.2/4425 tanggal 29 Desember 2021 perihal Penyesuaian Keputusan Para Kreditur Sindikasi atas Permohonan Penyesuaian Ketentuan Fasilitas Kredit CTP, terdapat penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit sebagai berikut:

- Tranche A masa konstruksi dari ATD+4,94% (equiv. 7,48%) menjadi ATD+4,15% (min equiv. sebesar 6,8%) masa operasi dari ATD+4,69% (equiv 7,23%) menjadi ATD+3,90% (min equiv. sebesar 6,55%)
- Tranche B masa konstruksi dari ATD+6,94% (equiv.9,48%) menjadi ATD+6,19% (min equiv. sebesar 9%) masa operasi dari ATD+6,69% (equiv. 9,23%) menjadi ATD+5,94% (min equiv. sebesar 9%)

27. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION (continued)

Based on the Facility Agent's letter number SSK/3.2/4425 dated December 29, 2021 regarding the Adjustment of the Syndicated Creditors' Decision on the Application for Adjustment to CTP's Credit Facility Provisions, there is an adjustment to the interest rate of the credit facility as follows:

- *Tranche A construction period from ATD+4.94% (equiv. 7.48%) to ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) operating period from ATD+4.69% (equiv 7 .23%) to ATD+3.90% (min equiv. of 6.55%)*
- *Tranche B construction period from ATD+6.94% (equiv.9.48%) to ATD+6.19% (min equiv. 9%) operating period from ATD+6.69% (equiv. 9, 23%) to ATD+5.94% (min equiv. of 9%)*

28. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

28. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Premium JICT (Catatan 50f)	1.967.827.813	2.087.090.104	2.325.614.688	*JICT Premium (Note 50f)*
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 50d)	1.151.689.282	1.019.435.010	771.175.595	*Advance rental fee - NPCT1 (Note 50d)*
Premium TPK Koja (Catatan 50e)	457.634.375	418.084.656	540.840.625	*TPK Koja Premium (Note 50e)*
Sewa tanah dan/atau bangunan	1.142.652.587	1.407.065.371	1.239.512.721	*Land rental and/or building*
Total	4.719.804.057	4.931.675.141	4.877.143.629	*Total*
Bagian lancar (Catatan 21)	(224.748.522)	(311.226.933)	(273.061.373)	*Current portion (Note 21)*
Total bagian jangka panjang	**4.495.055.535**	**4.620.448.208**	**4.604.082.256**	***Total long-term portion***

29. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA / *29. OTHER LONG-TERM LIABILITIES*

	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Pihak ketiga				*Third parties*
Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura	230.970.700	228.316.051	225.470.211	*Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore*
Provisi pemeliharaan terminal	264.880.104	97.790.963	35.731.131	*Provison for terminal maintenance*
Subtotal pihak ketiga	495.850.804	326.107.014	261.201.342	*Subtotal third parties*
Pihak berelasi (Catatan 45k)	466.538.398	466.538.398	441.350.272	*Related party) (Notes 45k)*
Total	**962.389.202**	**792.645.412**	**702.551.614**	***Total***

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terhutang (Catatan 50k).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 50k).

Provisi pemeliharaan terminal merupakan provisi atas pemeliharaan terminal dan beban bunga terkait penerapan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa (Catatan 16).

Provison for terminal maintenance represents provision for terminal maintenance and interest expense related to the application of ISAK 16 concerning Service Concession Arrangements (Note 16).

Utang kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") merupakan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal Rp288.000.000 (Catatan 50t).

Payable to the Ministry of Public Works and Public Housing - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") represents a loan for replacement costs for the purchase of land for the Cibitung-Cilincing toll road project with a maximum limit of Rp288,000,000 (Note 50t).

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES*

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan d/h PT Sentra Jasa Aktuaria dan Rekan, Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, PT Tower Watson Purbajaga, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, PT Emerald Delta Consulting, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dan PT Padma Radya Aktuaria dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, Actuarial Consultant Yusi dan Rekan formerly PT Sentra Jasa Aktuaria, Actuarial Consultant Arya Bagiastra, PT Tower Watson Purbajaga, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, PT Emerald Delta Consulting, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan and PT Padma Radya Aktuaria using the "Projected Unit Credit" method.

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Tingkat diskonto	3,49% - 7,64%	3,64% - 7,83%	7,04%-8,20%	*Discount rate*
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	0,00%-6,00%	4,00% - 10,00%	4,00-10,00%	*Salary increase projection rate*
Tingkat mortalitas	TMI 2019 & TMI III 2019	TMI 2019 & TMI III 2019	TMI 2019 & TMI III 2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat tetap	1-10% dari tabel amortisasi / *1-10% of amortization table*			*Permanent disability rate*
Tingkat pengunduran diri	1,00% untuk karyawan dibawah 30 tahun akan menurun sampai 0% pada usia 46 tahun/ *1.00% for employees under 30 years old will decrease to 0% at 46 years old*			*Level of resignation*
Usia pensiun normal	55-58 tahun/*years*	55-58 tahun/*years*	55-58 tahun/years	*Normal pension age*

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The employee benefit liabilities are as follows:

	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Perusahaan				***The Company***
Program pensiun	635.994.743	1.036.144.810	1.015.636.817	*Pension program*
Program penghargaan masa bhakti	906.174.293	849.857.115	750.788.445	*Gratuity and compensation benefits*
Program kesehatan pensiunan	4.126.658.787	4.300.395.029	2.248.340.341	*Pension healthcare program*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	434.967.735	339.690.518	320.044.483	*Other long-term employee benefits*
Subtotal	**6.103.795.558**	**6.526.087.472**	**4.334.810.086**	***Sub-total***
Entitas anak				***Subsidiaries***
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	457.127.973	412.055.025	487.783.044	*Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program*
Total	**6.560.923.531**	**6.938.142.497**	**4.822.593.130**	***Total***

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") dan untuk yang dipekerjakan sejak tahun 2004 dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

a. Pension Program

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2001 and managed by Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") and for employees hired with permanent status since 2004 managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program (continued)

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Nilai kini liabilitas	1.684.814.603	1.722.106.388	1.726.722.619	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(1.237.653.038)	(685.961.578)	(711.085.802)	*Fair value of plan assets*
Defisit program	447.161.565	1.036.144.810	1.015.636.817	*Deficit in plan*
Dampak batas atas aset	188.833.178	-	-	*Effect of asset ceiling*
Liabilitas yang diakui	**635.994.743**	**1.036.144.810**	**1.015.636.817**	***Recognized liabilities***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember / *Year Ended December 31,*			
	2021	**2020**	**2019**	
Biaya jasa kini	62.367.584	20.178.268	57.475.162	*Current service cost*
Biaya bunga	70.185.671	80.977.904	74.413.108	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	(44.092.909)	(15.110.307)	17.713.455	*Past service cost*
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	604.292	(575.097)	756.903	*Remeasurement of other long term employee benefits*
Beban yang diakui	89.064.638	85.470.768	150.358.628	*Recognized expense*

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Liabilitas awal tahun	1.036.144.809	1.015.636.817	715.440.991	*Liabilities at beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	89.064.638	85.470.768	193.251.615	*Expense recognized in profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain	257.136.910	36.203.298	199.641.474	*Other comprehensive income*
Iuran pemberi kerja	(439.091.114)	(75.384.616)	(64.112.045)	*Employer's contributions*
Pembayaran manfaat	(307.260.500)	(25.781.457)	(28.585.218)	*Benefits payment*
Liabilitas akhir tahun	**635.994.743**	**1.036.144.810**	**1.015.636.817**	***Liabilities at end of year***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Program Pensiun (lanjutan)

a. Pension Program (continued)

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows: (continued)

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	1.722.106.388	1.726.722.619	1.298.489.515	*Present value of liabilities - beginning of year*
Biaya jasa kini	54.124.291	45.242.190	43.706.775	*Current service cost*
Biaya bunga	99.047.757	136.743.753	107.524.576	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	(17.133.479)	(39.791.371)	14.607.388	*Past service cost*
Pembayaran manfaat	(143.092.380)	(52.190.952)	(112.632.384)	*Benefits payment*
Iuran peserta program	1.975.813	1.085.390	834.748	*Plan participants' contributions*
Ekspektasi pembayaran Imbalan	(32.794.099)	(93.507.894)	(67.200.908)	*Expected benefit payments*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	580.311	(2.197.347)	441.392.909	*Actuarial loss (gain)*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**1.684.814.602**	**1.722.106.388**	**1.726.722.619**	***Present value of liabilities - end of year***

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Nilai wajar aset program awal tahun	685.961.579	711.085.802	583.048.523	*Fair value of program assets - beginning of year*
Pendapatan bunga	12.586.031	16.830.138	18.827.649	*Interest revenue*
Rugi ekspektasian aset program	8.273.149	(32.200.548)	177.958.938	*Expected loss* on program assets
Imbal hasil ekspektasian aset program	14.118.819	39.126.276	26.384.278	*Expected return from program assets*
Iuran pemberi kerja	718.212.070	66.170.236	68.286.191	*Employer's contributions*
Iuran peserta program	1.975.814	1.510.734	2.160.500	*Plan participants' contributions*
Pembayaran manfaat	(129.962.126)	(3.775.647)	(88.793.401)	*Benefits payment*
Imbalan yang dibayarkan	(17.784.808)	(107.160.411)	(67.200.908)	*Benefits paid*
Kerugian aktuarial	(55.727.490)	(5.625.002)	(9.585.968)	*Actuarial loss*
Nilai wajar aset program akhir tahun	**1.237.653.038**	**685.961.578**	**711.085.802**	***Fair value of program assets - end of year***

Aset program yang dimiliki oleh Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Plan assets owned by the Group is as follows:

- Aset tetap 49,20%-49,90%
- Reksa dana 34,3%-49,20%
- Investasi saham 2,6%-2,90%
- Surat utang negara 7,37%-7,50%
- Deposito berjangka 0,2%-0,18%
- Penyertaan langsung 5,40%-5,50%

- *Fixed assets 49.20%-49.90%*
- *Mutual funds 34.3%-49.20%*
- *Investment in shares 2.6%-2.90%*
- *State bonds 7.37%-7.50%*
- *Time deposits 0.2%-0.18%*
- *Direct investment 5.40%-5.50%*

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program (continued)

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Jatuh tempo <= 1 tahun	644.859.810	419.891.401	422.602.425	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	355.084.278	258.894.850	213.841.891	*Maturity > 1 year and <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	2.502.166.185	2.385.983.984	2.452.147.561	*Maturity > 5 years*
Total	**3.502.110.273**	**3.064.770.235**	**3.088.591.877**	***Total***

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2021:

	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	
Nilai kini liabilitas	385.531.571	444.566.671	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	27.841.170	51.782.003	*Current service cost*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2021:

	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	
Nilai kini liabilitas	475.932.862	397.911.793	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	3.954.834	(6.127.887)	*Current service cost*

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Nilai kini liabilitas	906.174.293	849.857.115	750.788.445	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	-	-	-	*Fair value of plan assets*
Liabilitas yang diakui	**906.174.293**	**849.857.115**	**750.788.445**	***Recognized liabilities***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember / *Year Ended December 31,*			
	2021	**2020**	**2019**	
Biaya jasa kini	56.432.013	56.769.981	52.314.545	*Current service cost*
Biaya bunga	53.251.768	58.786.735	54.448.359	*Interest cost*
Keuntungan aktuarial	11.298.037	(338.639)	(32.512)	*Actuarial gain*
Beban imbalan kerja lain	(171.220)	53.311.245	292.156	*Other employee benefit cost*
Beban yang diakui	**120.810.598**	**168.529.322**	**107.022.548**	***Recognized expense***

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Liabilitas awal tahun	849.857.115	750.788.445	653.641.759	*Liabilities at beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	120.810.598	168.529.322	107.022.548	*Expense recognized in profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain	(10.304.590)	(24.231.841)	34.382.820	*Other comprehensive income*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(54.188.830)	(45.228.811)	(44.258.682)	*Current year benefit payment*
Liabilitas akhir tahun	**906.174.293**	**849.857.115**	**750.788.445**	***Liabilities at end of year***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan) / *b. Gratuity and compensation benefits (continued)*

	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*			
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	849.857.115	750.788.445	653.641.759	*Present value of liabilities - beginning of year*
Biaya jasa kini	56.432.013	56.769.981	52.314.544	*Current service cost*
Biaya bunga	53.251.768	58.786.735	54.448.359	*Interest cost*
Ekspektasi pembayaran imbalan	(54.188.830)	(45.228.811)	(44.258.682)	*Expected benefit payments*
Keuntungan aktuarial	(10.475.810)	(24.570.479)	34.350.308	*Actuarial gain*
Biaya jasa lalu	11.298.037	53.311.244	292.157	*Past service cost*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**906.174.293**	**849.857.115**	**750.788.445**	***Present value of liabilities - end of year***

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*			
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Jatuh tempo <= 1 tahun	39.540.818	35.328.941	27.438.107	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	266.485.402	225.617.887	192.447.732	*Maturity > 1 year and <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	4.317.065.814	5.028.940.902	5.227.027.064	*Maturity > 5 years*
Total	**4.623.092.034**	**5.289.887.730**	**5.446.912.903**	***Total***

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2021:

	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	
Nilai kini liabilitas	837.754.106	984.940.538	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	50.877.405	62.985.560	*Current service cost*

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2021:

	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	
Nilai kini liabilitas	982.860.903	838.493.009	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	62.815.823	50.938.058	Current service cost

c. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga. Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

c. Pension healthcare program

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family. The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Nilai kini liabilitas	4.126.658.787	4.300.395.029	2.248.340.341	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	-	-	-	*Fair value of plan assets*
Liabilitas yang diakui	**4.126.658.787**	**4.300.395.029**	**2.248.340.341**	***Recognized liabilities***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember / *Year Ended December 31,*			
	2021	**2020**	**2019**	
Biaya jasa kini	128.742.424	137.426.708	55.729.479	*Current service cost*
Biaya bunga	285.378.346	178.329.433	153.360.748	*Interest cost*
Beban yang diakui	**414.120.770**	**315.756.141**	**209.090.227**	***Recognized expense***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan) / *c. Pension healthcare program (continued)*

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Liabilitas awal tahun	4.300.395.029	2.248.340.341	1.812.156.310	*Liabilities at beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	414.120.770	315.756.141	209.090.228	*Expense recognized in profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain	(443.197.282)	1.875.603.309	381.033.684	*Other comprehensive income*
Pembayaran manfaat	-	(62.176.467)	(70.416.757)	*Benefits payment*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(144.659.730)	(77.128.295)	(83.523.124)	*Current year benefit payment*
Liabilitas akhir tahun	**4.126.658.787**	**4.300.395.029**	**2.248.340.341**	***Liabilities at end of year***

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	4.300.395.029	2.248.340.341	1.812.156.310	*Present value of liabilities - beginning of year*
Biaya jasa kini	98.088.542	118.400.675	55.729.480	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	19.026.033	-	*Past service cost*
Biaya bunga	285.378.346	178.329.434	153.360.748	*Interest cost*
Ekspektasi pembayaran imbalan	(107.321.183)	(139.304.761)	(153.939.881)	*Expected benefit payments*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(449.881.947)	1.875.603.307	381.033.684	*Actuarial loss (gain)*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**4.126.658.787**	**4.300.395.029**	**2.248.340.341**	***Present value of liabilities - end of year***

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Jatuh tempo <= 1 tahun	115.912.669	134.345.542	93.537.223	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	631.338.093	636.103.645	927.282.344	*Maturity > 1 year and <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	6.992.875.037	7.540.046.395	5.456.464.716	*Maturity > 5 years*
Total	**7.740.125.799**	**8.310.495.582**	**6.477.284.283**	***Total***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

c. Pension healthcare program (continued)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	671.039.756	1.825.027.257	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	11.614.945	(22.438.181)	*Current service cost*

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

d. Other long-term employee benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Nilai kini liabilitas	435.094.715	344.049.105	320.301.181	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(126.980)	(4.358.587)	(256.698)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas yang diakui	**434.967.735**	**339.690.518**	**320.044.483**	***Recognized liabilities***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember / *Year Ended December 31,*			
	2021	2020	2019	
Biaya jasa kini	21.199.979	28.329.075	25.691.328	*Current service cost*
Biaya bunga	23.450.664	25.660.954	22.449.246	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	-	181.605	3.106.068	*Past service cost*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(402.391)	2.673.067	4.665.138	*Actuarial loss (gain)*
Beban imbalan kerja lain	13.468.356	-	(1.437.912)	*Other employee benefits expense*
Beban yang diakui	**57.716.608**	**56.844.701**	**54.473.868**	***Recognized expense***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) / *d. Other long-term employee benefits (continued)*

	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Liabilitas awal tahun	339.690.519	320.044.483	257.645.054	*Liabilities at beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	57.716.608	56.844.701	54.473.868	*Expense recognized in profit or loss*
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	80.997.185	(10.351.498)	19.613.194	*Expenses (income) that recognized in other comprehensive incomes*
Iuran pemberi kerja	-	(25.083.594)	(8.689.332)	*Employee dues*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(43.436.577)	(1.763.574)	(2.998.301)	*Current year benefit payment*
Liabilitas akhir tahun	**434.967.735**	**339.690.518**	**320.044.483**	***Liabilities at end of year***

	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	344.049.107	320.301.181	274.429.133	*Present value of liabilities - beginning of year*
Biaya jasa kini	33.051.683	28.329.075	25.691.328	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	1.738.893	-	1.668.155	*Past service cost*
Biaya bunga	23.768.841	25.885.575	23.264.452	*Interest cost*
Iuran peserta program		-	-	*Program participant fees*
Ekspektasi pembayaran imbalan	(47.367.400)	(21.700.371)	(26.297.518)	*Expected benefit payments*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	79.726.612	(8.766.355)	21.545.631	*Actuarial loss (gain)*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**434.967.736**	**344.049.105**	**320.301.181**	***Present value of liabilities - end of year***

	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Nilai wajar aset program awal tahun	4.358.587	256.698	16.784.078	*Fair value of program assets - beginning of year*
Pendapatan bunga atas aset program	318.177	-	-	*Interest income on program assets*
Imbal hasil ekspektasian aset program	-	224.621	(1.917.497)	*Expected return from program assets*
Iuran pemberi kerja	18.000.000	24.104.397	-	*Employer's contributions*
Iuran peserta program	-	-	2.692.320	*Plan participants' contributions*
Imbalan yang dibayarkan	(22.549.784)	(19.139.205)	(17.302.203)	*Rewards paid*
Kerugian aktuarial	-	(1.087.924)	-	*Actuarial loss*
Nilai wajar aset program akhir tahun	**126.980**	**4.358.587**	**256.698**	***Fair value of program assets - end of year***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

d. Other long-term employee benefits (continued)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Jatuh tempo <= 1 tahun	48.250.931	29.858.758	8.819.164	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	204.354.197	172.435.179	67.342.210	*Maturity > 1 year and <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	1.702.323.949	1.496.399.938	499.074.913	*Maturity > 5 years*
Total	**1.954.929.077**	**1.698.693.875**	**575.236.287**	***Total***

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2021:

	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	
Nilai kini liabilitas	52.723.184	9.967.825	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	1.393.800	5.683.057	*Current service cost*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2021:

	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	
Nilai kini liabilitas	10.547.486	52.509.098	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	10.090.419	8.884.429	*Current service cost*

e. Program pensiun iuran pasti

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (”DPLK”) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (”DP3”), dan DPLK PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, iuran program yang dibayarkan Kelompok Usaha masing-masing sebesar Rp25.047.062, Rp29.707.971, dan Rp23.209.186.

e. Defined contribution plan

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (”DP3”), and DPLK PT Asuransi Jiwasraya. For the year ended December 31, 2021, the year ended December 31, 2020 and 2019, the contribution plans established by the Group amounted to Rp25,047,062, Rp29,707,971, and Rp23,209,186, respectively.

31. MODAL SAHAM / *31. SHARE CAPITAL*

Pemegang saham Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada tanggal 31 Desember 2021 adalah:

The Shareholders of the Company (formerly Pelindo II) as of December 31, 2021 are as follows:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nominal/ *Amount*	*Shareholders*
Negara Republik Indonesia	8.475.067	100,00%	8.475.067.000	*Republic of Indonesia*

Pemegang saham Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada tanggal 31 Desember 2020 adalah:

The Shareholders of the Company (formerly Pelindo II) as of December 31, 2020 are as follows:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nominal/ *Amount*	*Shareholders*
Negara Republik Indonesia	1.444.029	100,00%	1.444.029.000	*Republic of Indonesia*

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Based on General Meeting of Shareholders held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai berikut:

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No. 58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional Participation Capital of The Republic of Indonesia in the Company (formerly Pelindo II) as follows:

1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.
2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget) in 2005.

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

1) Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

2) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar Rp7.653.000 melalui:

   a) Sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
   b) Sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan (dahulu Pelindo II) yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

31. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

1) Approved the disbursement/placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.

2) Approved additional paid-in capital of the Company (formerly Pelindo II) owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:

   a) Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;

   b) Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company (formerly Pelindo II) by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company (formerly Pelindo II) changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang di aktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn. No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

Dengan adanya perubahan jenis saham tersebut, modal dasar Perusahaan (dahulu Pelindo II) adalah sebesar Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 3.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp1.444.029.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.444.028 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan penggabungan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV"), dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1f).

Dengan adanya penggabungan tersebut, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp33.000.000.000 yang terdiri dari 33.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 32.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp8.475.067.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 8.475.066 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

31. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Minister of SOEs Decree Statement as The General Meeting of Shareholders of the Company, which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 dated August 21, 2019, The Government of the Republic Indonesia , in this case represented by the Minister of SOEs, changed the types of shares that were originally without series became consisted of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares.

With the changes in types of shares, Company's authorized capital of the Company (formerly Pelindo II) is Rp4,000,000,000 consisting of 4,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 3,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp1,444,029,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 1,444,028 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

On October 1, 2021, the Company merged with Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV"), with the Company as the surviving entity (Note 1f).

With such merger, the Company's authorized capital of the company is Rp33,000,000,000 consisting of 33,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 32,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp8,475,067,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 8,475,066 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

32. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan (dahulu Pelindo II) memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan (dahulu Pelindo II) memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

32. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company (formerly Pelindo II) received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447.

In 2009, the Company (formerly Pelindo II) received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif (catatan 1f)	32.100.516.121	-	-	*Additional capital based on determination of definitive value (Note 1f)*
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali				*Difference in value of business combination transaction of entities und common control*
PHC	239.860.000	-	-	*PHC*
RSP	134.385.547	134.385.547	-	*RSP*
BMS	38.697.264	-	-	*BMS*
APBS	33.152.625	-	-	*APBS*
MMI	(8.565.613)	-	-	*MMI*
ILCS	(21.792.779)	(21.792.779)	-	*ILCS*
PMS	(34.886.436)	-	-	*PMS*
Rukindo	(317.597.475)	(317.597.475)	(317.597.475)	*Rukindo*
TPS	(514.813.986)	-	-	*TPS*
CTP (Catatan 1g)	(1.203.895.262)	-	-	*CTP (Note 1g)*
Transaksi penggabungan entitas sepengendali (Catatan 1f)	(32.100.516.121)	-	-	*Merger transactions of entities under common control (Note 1f)*
Pengalihan barang milik negara				*Transfer of government's assets*
Fasilitas Pelabuhan Dumai	414.128.745	-	-	*Dumai Port Facility*
2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53.560.436	-	-	*2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port*
Dermaga Gunung Sitoli	37.991.647	-	-	*Gunung Sitoli Jetty*
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989	-	-	*Gunung Sitoli Port Facility*
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayait	1.686.300	-	-	*3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port*
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	562.100	-	-	*1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port*
Total	**(1.128.322.898)**	**(205.004.707)**	**(317.597.475)**	***Total***

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

a. Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif sebesar Rp32.100.516.121 merupakan selisih nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV sejumlah Rp39.131.554.121 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021 dengan nilai modal saham Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV pada saat penggabungan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II), yaitu sebesar Rp7.031.038.000 (Catatan 1f). Penambahan modal tersebut akan dicatat sebagai modal saham pada saat telah disetujui dalam RUPS dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

   Transaksi penggabungan tersebut di atas menimbulkan selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp32.100.516.121 sesuai dengan metode penyatuan kepemilikan (Catatan 1f).

b. Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000. Atas pengalihan tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 100% saham Rukindo.

   Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan	108.820.525	*Net assets of Rukindo as of transfer date*
Nilai pengalihan	426.418.000	*Transfer amount*
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(317.597.475)**	***Difference arising from business combination of entites under common control***

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

a. Additional capital based on determination of definitive value amounting to Rp32,100,516,121 represents difference of definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV totalling to Rp39,131,554,121, which have been determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on December 29, 2021, with the share capital of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV at the time of merger to the Company (formerly Pelindo II), which amounting to Rp7,031,038,000 (Note 1f). The additional capital will be recorded as share capital upon approval of GMS and upon approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia.

   The merger transaction as stated above created the difference in value of business combination transaction of entities under common control amounting to Rp32,100,516,121 in accordance with the pooling of interest method (Note 1f).

b. On August 2, 2013, the Company (formerly Pelindo II) received the transfer of all of Rukindo's shares owned by the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp426,418,000. After the transfer, the Company (formerly Pelindo II) owned 100% shares of Rukindo.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

c. Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PBM IHC melakukan pengambilalihan 103.166 lembar saham RSP yang dimiliki oleh Perusahaan (67%) senilai Rp167.500.000 dengan mekanisme sebagai berikut:

- PBM IHC menerbitkan sejumlah 584.372 lembar saham baru kepada Perusahaan yang mewakili 2% saham di PBM IHC senilai Rp96.250.000. Sehingga PBM IHC memperoleh sebanyak 59.282 lembar saham RSP milik Perusahaan (38,5%).
- PBM IHC melakukan pembelian sejumlah 43.884 lembar saham RSP milik Perusahaan (28,5%) dengan mekanisme jual beli saham senilai Rp71.250.000.

PBM IHC telah melakukan penyetoran kas kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp71.250.000.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar RSP tanggal 7 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2020.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

b. Based on Decision-Shares Conditional Agreement on June 30, 2020, PBM IHC takeover 103,166 RSP shares owned by the Company (67%) worth Rp167,500,000 by using the following mechanism:

- *PBM IHC issued 584,372 new shares to the Company which represent 2% of the shares of PBM IHC amounting to Rp96,250,000. Therefore, PBM IHC acquired 59,282 RSP shares of the Company (38.5%).*
- *PBM IHC purchased a total of 43,884 RSP shares owned by the Company (28.5%) with a share sale and purchase mechanism worth Rp71,250,000.*

PBM IHC have transferred cash to the Company (formerly Pelindo II) amounted Rp71,250,000 on August 7, 2020 to the Company.

The Deed of Shareholder Decree Statement regarding the amendment to the RSP's articles of association dated August 7, 2020 has been notified to and received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on September 4, 2020.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Aset neto RSP pada tanggal pengalihan	33.114.453	*Net assets of RSP as of transfer date*
Nilai pengalihan	167.500.000	*Transfer amount*
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**134.385.547**	***Difference arising from business combination of entites under common control***

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

d. Berdasarkan akta jual beli saham tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49% porsi kepemilikan saham ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto ILCS pada tanggal pengalihan	27.407.221
Nilai pengalihan	49.200.000
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(21.792.779)**

e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MMI No. 54 tanggal 16 April 2021, PPI mengakuisisi kepemilikan saham PT PP Properti Tbk pada MMI sebanyak 656.250.000 lembar saham atau setara dengan 21,13% porsi kepemilikan saham MMI dengan nilai pengalihan sebesar Rp70.087.500.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto MMI pada tanggal pengalihan	61.521.887
Nilai pengalihan	70.087.500
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(8.565.613)**

f. Tambahan modal disetor pada BMS merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari UEPN masing-masing sebesar Rp38.697.264 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

d. Based on share sales purchase agreement dated October 9, 2020, the Company (formerly Pelindo II) acquired the share ownership of PT Multimedia Nusantara in ILCS of 4,900,000 shares or equivalent to 49% of the share ownership of ILCS with transfer value of Rp49,200,000.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of ILCS as of transfer date	
Transfer amount	
Difference arising from business combination of entites under common control	

e. Based on the Decision of the Meeting Deed of MMI No. 54 dated April 16, 2021, PPI acquired the share ownership of PT PP Properti Tbk in MMI of 656,250,000 shares or equivalent to 21.13% of the share ownership of MMI with transfer value of Rp70,087,500.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of MMI as of transfer date	
Transfer amount	
Difference arising from business combination of entites under common control	

f. Paid in capital of BMS represents the difference between the par value and the capital contribution received from UEPN amounting to Rp38,697,264 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

g. Tambahan modal disetor APBS merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV masing-masing sebesar Rp33.152.625 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

h. Tambahan modal disetor PEL merupakan nominal pembelian saham kembali milik PEL dan reklasifikasi dari bagian non pengendali atas pembelian saham kembali oleh PEL. Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 24 Mei 2018 oleh Notaris Amanda Mirza Ervariana, BJTI membeli 1% saham treasuri PEL sehingga saldo saldo tambahan modal disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.885.488. Pada tahun berjalan, PEL mendapatkan persetujuan atas penurunan modal dasar atas saham treasuri PEL, sehingga saldo tambahan modal disetor pada 31 Desember 2021 adalah nihil.

i. Tambahan modal disetor PMS merupakan selisih antara nilai nominal saham milik APBS yang dibeli oleh PMS dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV dan PT Gerbang Samudra Utama dengan setoran modal saham sebesar masing-masing Rp29.236.335 dan Rp29.223.425 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

j. Tambahan modal disetor TPS sebesar Rp514.813.986 merupakan selisih antara nilai nominal saham milik TPS yang dibeli oleh Perusahaan dari P&O Dover (Holdings) Limited dengan setoran modal saham.

k. Tambahan modal disetor PHC merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PHC yang dibeli oleh PBM IHC dari Perusahaan dengan setoran modal saham Rp239.860.000 pada tanggal 31 Desember 2020.

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

g. Paid in capital of APBS represents the difference between the par value and the capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV amounting to Rp33,152,625 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

h. Paid in capital of PEL represents the shares buy-back transactions of PEL and reclassification of the non-controlling interest that forms part of the shares buy back by PEL. Based on Notarial Deed No. 2 dated May 24, 2018 by Notary Amanda Mirza Ervariana, BJTI purchases 1% of PEL's treasury shares so that the additional balance of paid-in capital as of December 31, 2020 is Rp3,885,488, respectively. During the year, PEL received approval for a decrease in authorized capital for the PEL's treasury shares, so that the additional balance of paid-in capital as of December 31, 2021 is nil.

i. Paid in capital of PMS represents the difference between the par value owned by APBS which was purchased by PMS from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV and PT Gerbang Samudra Utama with the capital contribution received amounting to Rp29,236,335 and Rp29,223,425 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

j. Paid in capital of TPS amounting to Rp514,813,986 represents the difference between the par value owned by TPS which was purchased by the Company from P&O Dover (Holdings) Limited with the capital contribution received.

k. Paid in capital of PHC represents the difference between the par value owned by PHC which was purchased by the PBM IHC from the Company with the capital contribution received amounting to Rp239,860,000 as of December 31, 2020.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

I. Tambahan modal disetor yang berasal dari pengalihan barang milik negara merupakan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah ("PP") No. 10 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp527.133.217 yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

Rincian Barang Milik Negara yang dialihkan tersebut adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pelabuhan Dumai	414.128.745	*Dumai Port Facility*
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989	*Gunung Sitoli Port Facility*
2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53.560.436	*2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port*
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	562.100	*1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port*
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati	1.686.300	*3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port*
Dermaga Gunung Sitoli	37.991.647	*Gunung Sitoli Jetty*
Total	**527.133.217**	***Total***

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

I. Additional paid-in capital arise from transfer of government's assets represents additional capital investment from the Republic of Indonesia which stipulated through Government Regulation ("PP") No. 10 Year 2019 dated February 22, 2019 amounting to Rp527,133,217 resulting from the transfer of Government's Assets under the Ministry of Transportation which provided from the Indonesian State Budget Year 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011.

The details of the transferred Government's Assets are as follows:

34. SELISIH NILAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK NONPENGENDALI

Rincian selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali adalah sebagai berikut:

34. DIFFERENCE IN VALUE OF TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST

The details of difference in value of transactions with non-controlling interest are as follows:

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Perusahaan (dahulu Pelindo II)				*The Company (formerly Pelindo II)*
Penawaran saham perdana perdana IKT	565.027.539	565.027.539	565.027.539	*Initial public offering of IKT*
Penawaran saham perdana perdana JAI	271.045.395	271.045.395	271.045.395	*Initial public offering of JAI*
Total	**836.072.934**	**836.072.934**	**836.072.934**	***Total***

Penurunan kepemilikan saham Perusahaan sehubungan dengan penawaran saham perdana di IKT dan JAI tidak disertai dengan hilangnya pengendalian.

The decrease in company ownership in connection with the initial public offerings in IKT and JAI which is not accompanied by loss of control.

35. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2021:

35. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2021:

Perusahaan/ ***The Company***	**Rapat Umum Pemegang Saham/*General Meeting of Shareholders***	**Pembagian Dividen/*Dividend Distribution***	**Cadangan Umum/*General Reserve***	**Tanggal Pembayaran Dividen/** ***Date of Dividend Payment***
Perusahaan (dahulu Pelindo I)/ *The Company (formerly Pelindo I)*	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 10 tanggal 16 September 2021/*General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 10 dated September 16, 2021*	-	100,00% dari laba neto atau sebesar Rp309.298.348/ *100.00% of net income or amounted to Rp309,298,348*	-
Perusahaan (dahulu Pelindo II)/ *The Company (formerly Pelindo II)*	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah dilaksanakan tanggal 10 Mei 2021 dan telah diaktakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 01 tanggal 1 Juli 2021 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H./ *General Meeting of Shareholders of the Company which was held on May 10, 2021 and was notarized through Notarial Deed No. 01 on July 1, 2021 of Nanda Fauz Iwan, S.H.*	47,26% dari laba neto atau Rp560.000.000/ *47.26% of net income or amounted to Rp560,000,000*	52,74% dari laba neto atau sebesar Rp624.857.249/ *52.74% of net income or amounted to Rp624,857,249*	3 Juni 2021/ *June 3, 2021*
Perusahaan (dahulu Pelindo III)/ *The Company (formerly Pelindo III)*	Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Agustus 2021/*Annual General Meeting of Shareholders on August 5, 2021*	-	100,00% dari laba neto atau sebesar Rp1.205.564.000/ *100.00% of net income or amounted to Rp1,205,564,000*	-
Perusahaan (dahulu Pelindo IV)/ *The Company (formerly Pelindo IV)*	Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2021/ *Annual General Meeting of Shareholders on May 10, 2021*	-	100,00% dari laba neto atau sebesar Rp279.970.727/ *100.00% of net income or amounted to Rp279,970,727*	-

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2020:

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2020:

Perusahaan/ ***The Company***	**Rapat Umum Pemegang Saham/*General Meeting of Shareholders***	**Pembagian Dividen/*Dividend Distribution***	**Cadangan Umum/*General Reserve***	**Tanggal Pembayaran Dividen/** ***Date of Dividend Payment***
Perusahaan (dahulu Pelindo I)/ *The Company (formerly Pelindo I)*	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 3 tanggal 6 Juli 2020/ *General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 3 dated July 6, 2020*	16,25% dari laba neto atau sebesar Rp60.050.953/ *16.25% of net income or amounted to Rp60,050,953*	83,75% dari laba neto atau sebesar Rp309.460.760/ *83.75% of net income or amounted to Rp309,460,760*	26 Agustus 2020/ *August 26, 2020*
Perusahaan (dahulu Pelindo II)/ *The Company (formerly Pelindo II)*	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 dari Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H./ *General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 12 on August 24, 2020 of Dewi Sugina Mulyani, S.H.*	28,84% dari laba neto atau sebesar Rp708.218.661/ *28.84% of net income or amounted to Rp708,218,661*	71,16% dari laba neto atau sebesar Rp1.747.544.141/ *71.16% of net income or amounted to Rp1,747,544,141*	tanggal 30 Juli 2020, 31 Agustus 2020, 1 Oktober 2020 dan 3 November 2020/ *July 30, 2020, August 31, 2020, October 1, 2020, and November 3, 2020*

35. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2020: (lanjutan)

35. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE (continued)

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2020: (continued)

Perusahaan/ ***The Company***	**Rapat Umum Pemegang Saham/*General Meeting of Shareholders***	**Pembagian Dividen/*Dividend Distribution***	**Cadangan Umum/*General Reserve***	**Tanggal Pembayaran Dividen/** ***Date of Dividend Payment***
Perusahaan (dahulu Pelindo III)/ *The Company (formerly Pelindo III)*	Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 6 tanggal 15 Juli 2020 dari Notaris Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.KN./ *General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 6 on July 15, 2020 of Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.KN.*	25,03% dari laba neto atau sebesar Rp524.815.889/ *25.03% of net income or amounting to Rp524,815,889*	74,97% dari laba neto atau sebesar Rp1.571.755.480/ *74.97% of net income or amounting to Rp1,571,755,480*	4 Agustus, 4 September, 5 Oktober, dan 5 November 2020/ *August 4, September 4, October 5, and November 5, 2020*
Perusahaan (dahulu Pelindo IV)/ *The Company (formerly Pelindo IV)*	Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 6 Juli 2020/ *Annual General Meeting of Shareholders on July 6, 2020*	19,13% dari laba neto atau sebesar Rp83.958.446/ *19.13% of net income or amounting to Rp83,958,446*	80,87% dari laba neto atau sebesar Rp354.828.887/ *80.87% of net income or amounting to Rp354,828,887*	3 Agustus 2020/ *August 3, 2020*

36. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

36. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

		Disajikan kembali - Catatan 4/ ***As restated - Note 4***		
	31 Desember 2021/ ***December 31, 2021***	**31 Desember 2020/** ***December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019** ***January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that wil not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(2.212.905.575)	(1.303.892.031)	(510.069.366)	*Remeasurement of defined benefit plans*
Pos yang akan direklasifikasi akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	304.610.969	291.374.572	620.425.512	*Exchange difference due to financial statements translation*
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(154.208.985)	(107.028.761)	(215.365.006)	*Changes in fair value of available-for sale financial assets*
Total	**(2.062.503.591)**	**(1.119.546.220)**	**(105.008.860)**	***Total***

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan terutama merupakan penjabaran laporan keuangan JICT, NPCT1 dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation mainly represents translation of financial statements of JICT, NPCT1 and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

37. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *37. NON-CONTROLLING INTERESTS*

	Aset Neto/Net Assets			Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)			
		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*			Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	
BJTI	435.077.121	420.606.192	438.203.940	15.518.409	13.899.890	8.959.331	*BJTI*
PTP1	315.597.771	354.797.655	354.307.330	(39.199.884)	(5.652.855)	(6.238.521)	*PTP1*
IKT	238.342.114	225.354.877	198.816.669	12.691.442	(10.367.124)	30.107.262	*IKT*
PMT	240.559.565	372.607.432	551.529.372	(131.869.901)	(130.549.460)	(72.839.970)	*PMT*
JAI	135.675.953	129.040.363	128.773.880	15.124.847	14.060.080	16.483.423	*JAI*
PMS	63.682.361	71.857.877	135.328.492	13.214.497	8.289.749	16.178.672	*PMS*
EPI	54.724.011	49.807.774	48.589.605	4.891.099	3.299.008	6.417.198	*EPI*
KKT	32.801.635	35.250.290	31.673.693	1.414.112	6.378.203	2.786.619	*KKT*
PDS	13.455.278	10.343.046	7.060.394	3.112.232	45.223	1.881.546	*PDS*
TPS	10.705.555	8.239.056	327.952.120	3.820.347	2.889.150	4.637.452	*TPS*
MTI	5.614.188	5.519.876	5.898.716	63.940	15.253	202.359	*MTI*
TTL	4.210.531	3.676.090	2.461.793	930.082	207.509	1.108.108	*TTL*
PIL	871.763	822.580	815.028	49.330	(7.987)	3.341	*PIL*
EII	454.874	381.415	331.690	80.836	30.090	(401.664)	*EII*
NTS	466.525	571.252	406.084	31.491	34.139	17.391	*NTS*
PHCM	143.935	84.208	49.102	59.727	(33.157)	(20.607)	*PHCM*
MMI	-	66.201.719	68.594.301	-	(204.797)	316.272	*MMI*
ILCS	-	-	31.094.899	-	-	(13.004.818)	*ILCS*
RSP	-	-	194.516	-	-	(94.703)	*RSP*
PHC	-	-	3.461.633	-	-	273.097	*PHC*
EDII	(8.303.307)	6.808.186	49.993.206	(15.011.946)	(19.615.319)	7.565.246	*EDII*
Total	**1.544.079.873**	**1.761.969.888**	**2.385.536.463**	**(115.079.340)**	**(117.282.405)**	**4.337.034**	***Total***

38. PENDAPATAN OPERASI / *38. OPERATING REVENUES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)	
Pelayanan terminal petikemas	12.523.675.532	11.676.435.120	*Container services*
Pelayanan jasa kapal	5.301.304.055	4.389.645.659	*Vessel services*
Pelayanan jasa terminal	4.807.499.447	4.046.948.858	*Terminal services*
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	3.737.059.523	3.798.370.127	*Land, building, water and electricity services*
Jasa logistik	634.300.177	563.751.400	*Logistic services*
Kerjasama dan *fee for services*	492.430.376	254.327.379	*Partnership and fee for services*
Pendapatan pas pelabuhan dan terminal	207.238.912	252.328.028	*Port and terminal entry fee*
Pengusahaan peralatan	196.132.682	175.848.774	*Equipment services*
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	163.204.450	56.400.000	*Network services and consultant of information system*

38. PENDAPATAN OPERASI (lanjutan) / *38. OPERATING REVENUES (continued)*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Pelayanan jasa barang	157.613.300	630.768.305	*Cargo services*
Jasa pengerukan	69.024.070	105.145.109	*Dredging services*
Pelayanan kesehatan	56.969.167	293.797.290	*Medical services*
Lain-lain	468.354.646	347.365.778	*Others*
Total	**28.814.806.337**	**26.591.131.827**	***Total***

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada transaksi dari satu pelanggan dengan total penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the year ended as of December 31, 2021 and 2020, there were no sales made from any single customer with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

39. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI / *39. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES*

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Fase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya dan Jalan Tol Cibitung - Cilincing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Fase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya and Cibitung - Cilincing Toll Road. Construction revenue is measured using cost method, where all costs are directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Pendapatan konstruksi	3.195.512.405	3.924.471.433	*Construction revenues*
Beban konstruksi	(3.195.512.405)	(3.924.471.433)	*Construction expenses*

40. BEBAN OPERASI / *40. OPERATING EXPENSES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Kerja sama mitra usaha	6.594.578.809	4.839.661.539	*Partnership*
Pegawai	5.776.773.548	5.424.752.602	*Employee*
Umum	3.205.464.552	3.881.753.138	*General*
Penyusutan dan amortisasi	3.199.471.975	3.262.323.970	*Depreciation and amortization*
Bahan bakar dan bahan habis pakai	1.858.083.842	1.812.150.958	*Fuels and supplies*
Pemeliharaan	1.205.821.148	761.171.028	*Maintenance*
Asuransi	381.095.875	357.709.826	*Insurance*
Administrasi kantor	214.514.237	169.980.210	*Office administration*
Beban pajak & retribusi	44.159.327	42.233.589	*Tax expense and retribution*
Lain-lain	23.983.504	124.196.500	*Others*
Total	**22.503.946.817**	**20.675.933.360**	***Total***

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports.

Beban umum terutama merupakan beban jasa konsultan, penyisihan penurunan nilai piutang, kontribusi kepada pihak lain, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of consultants, allowance for impairment of receivables, contribution to the other parties, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada transaksi dari satu pemasok dengan total pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the year ended as of December 31, 2021 and 2020, there were no purchase made from any single supplier with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

41. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - NETO

41. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Penerimaan aset build, operate, transfer	219.657.600	-	*Receive of build, operate, transer assets*
Pendapatan denda	164.990.708	21.495.028	*Income from penalties*
Amortisasi premium (Catatan 50a, 50b dan 50e)	146.997.708	146.997.708	*Amortization of premium (Notes 50a, 50b and 50e)*
Kelebihan pembayaran PBB	21.704.447	44.093.769	*Overpayment of PBB*
Beban pajak penghasilan final	(1.902.224)	(23.970.761)	*Final income tax expense*
Laba (rugi) penjualan aset tetap	(1.969.868)	2.941.075	*Gain (loss) on sale of fixed asset*
Beban denda	(88.995.349)	(217.099.773)	*Expenses from penalties*
Beban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	(37.574.438)	(31.713.558)	*Expense of non-tax state revenue (PNBP)*
Rugi selisih kurs - neto	(274.562.559)	(221.928.633)	*Loss on foreign exchange - net*
Lain-lain - neto	80.992.081	82.647.037	*Others - net*
Total	**229.338.106**	**(196.538.108)**	***Total***

Beban denda merupakan denda pajak.

Expense from penalties represents tax penalty.

42. PENDAPATAN KEUANGAN

42. FINANCE INCOME

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Pendapatan bunga deposito	249.312.805	623.150.376	*Interest income from deposits*
Pendapatan bunga pinjaman	90.775.509	67.299.251	*Interest income from loan*
Pendapatan jasa giro	67.687.570	9.132.121	*Interest income on current account*
Total	**407.775.884**	**699.581.748**	***Total***

43. BEBAN KEUANGAN / *43. FINANCE COSTS*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Beban bunga obligasi	1.968.778.546	1.855.783.845	*Interest on provision for terminal*
Beban bunga pinjaman bank	461.005.512	436.671.860	*Interest expense from bank loans*
Beban bunga sewa	26.110.179	16.736.620	*Lease intersest expenses*
Beban bunga, dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	69.744.513	224.305.870	*Interest expenses, and amortization of discount and transaction cost*
Beban administrasi bank	4.738.635	7.790.398	*Bank administration charges*
Beban amortisasi penerbitan obligasi	874.035	806.801	*Amortization expenses*
Beban lain-lain	8.831.446	2.270.777	*Administration expenses*
Total	**2.540.082.866**	**2.544.366.171**	***Total***

44. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI / *44. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
BKMS	90.170.663	57.865.279	*BKMS*
JICT	75.292.403	(56.010.859)	*JICT*
NPCT1	56.314.207	(35.870.716)	*NPCT1*
RSP	28.714.581	(6.478.544)	*RSP*
PHC	25.430.121	14.336.173	*PHC*
Ambapers	10.105.662	10.118.013	*Ambapers*
LNG	456.096	616.609	*LNG*
PCN	157.451	40.529	*PCN*
TNU	(9.921.272)	(11.795.315)	*TNU*
JBT	(21.612.324)	(12.976.627)	*JBT*
PTI	-	156.751	*PTI*
Total	**255.107.588**	**(39.998.707)**	***Total***

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the company has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over these entities in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the controlling shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Pemegang saham/ *Controlling Shareholder*	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi/ *Concession service*
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ *Banking services and loans*
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ *Banking services*
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ *Banking services*
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ *Banking services and loans*
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa Perbankan/ *Banking services*
	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Jasa perbankan/ *Banking services*
	PT Wika Haka Joint Operation	Jasa Pembangunan *Construction services*
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of relationship with related parties (continued)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	Nama pihak berelasi/ *Name of related party*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ *Government-related entity (continued)*	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Semen Padang (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Brantas Abipraya (Persero)	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan/ *Construction services*
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal/ *Ship Classification & Registration services*
	BPPU ITS	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Sucofindo (Persero)	Jasa pemeriksaan/ *Inspection services*

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of relationship with related parties (continued)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ *Government-related entity (continued)*	Koperasi Pegawai PT Pelindo III	Alih daya/ *Outsourcing*
	PT Surveyor Indonesia	Jasa Pemeriksaan/ *Inspection services*
	PT Danareksa (Persero)	Jasa Keuangan / *Financial services*
	PT Sarana Bandar Nasional	Jasa Bongkar muat/ *Unloading services*
	BPKD Provinsi DKI Jakarta	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Multimedia Nusantara	Jasa Telekomunikasi & Informasi/ *IT services*
	PT Yodya Karya (Persero)	Konsultan/ *Consultant*
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Nindya Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Jasa pensiun/ *Pension services*
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	Direktorat Jenderal Pajak	Perpajakan/*Taxation*
	Badan Layanan Umum Sekretariat Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Pinjaman/*Loan*

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of relationship with related parties (continued)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/*Government-related entity (continued)*	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/*Sales*
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa/*Sales*
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa/*Sales*
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa/*Sales*
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Virama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Krakatau Engineering Amarta Karya (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operation Activities*
	PT Indonesia Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operation Activities*
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pinjaman/*Loan*

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of relationship with related parties (continued)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/*Government-related entity (continued)*	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman/*Loan*
	PT Taspen (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*
	BPJS Ketenagakerjaan	Penjualan jasa/*Sales*
	Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Daya Radar Utama	Penjualan jasa/Sales
	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan Jasa/Sales
	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Petrokimia Gresik	Penjualan jasa/*Sales*
	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jasa Kesehatan/*Health Service*
	PT Prima Citra Nutrindo	Jasa Boga/*Catering*
	PT Bahtera Adhiguna	Penjualan Jasa/*Sales*
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan Jasa/*Sales*
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Semen Tonasa	Penjualan Jasa/*Sales*
	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	Penjualan Jasa/*Sales*
	PT Pelni (Persero)	Penjualan Jasa/*Sales*
	Perusda-Aneka Usaha dan Jasa	Penjualan Jasa/*Sales*
	PT Petra Arun Gas	Penjualan Jasa/*Sales*
	PT Sarana Multi Infrastuktur (Persero)	Jasa keuangan dan pinjaman/ *Financial services and loans*

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of relationship with related parties (continued)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	Nama pihak berelasi/ *Name of related party*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/*Government-related entity (continued)*	Lembaga Manajemen Aset Negara	Piutang pembebasan Lahan/ *Land acquisition receivables*
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Penjualan jasa/Sales
	PT Asuransi Kredit Indonesia	Jasa asuransi/*Insurance Services*
Entitas asosiasi/*Associate entities*	JICT	Sewa dan royalti/ *Rental and royalty*
	NPCT1	Investasi/*Investment*
	RSP	Kesehatan/*Health services*
	PHC	Jasa Kesehatan/*Health Service*
	KSO TPK KOJA	Penjualan/*Sales*
	BKMS	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 5)

a. Cash and cash equivalent (Note 5)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	
Bank							***Cash in banks***
Rupiah							*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.779.033.646	1,53	912.150.608	0,77	1.010.481.837	0,88	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.721.811.595	1,48	455.037.235	0,38	405.317.169	0,35	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	174.633.653	0,15	177.388.586	0,15	434.362.399	0,37	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesa Tbk	36.472.548	0,03	12.672.710	0,01	24.053.822	0,02	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	13.369.930	0,01	9.387.244	0,01	1.817.731	0,00	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Lain-lain	666.481	0,00	634.472	0,00	-	-	*Others*
Total	**3.725.987.853**	**3,20**	**1.567.270.855**	**1,32**	**1.876.032.958**	**1,62**	***Total***

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

a. Kas dan setara kas (Catatan 5) (lanjutan)

a. Cash and cash equivalent (Note 5) (continued)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	
Bank (lanjutan)							***Cash in banks (continued)***
Dolar AS							*US Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	483.014.687	0,42	336.911.933	0,28	202.971.097	0,18	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20.050.440	0,02	12.901.807	0,01	26.977.820	0,02	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.460.745	0,01	39.879.104	0,03	38.504.509	0,03	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	-	2.819.753	0,00	-	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Lain-lain	1.288.437	0,00	1.209.900	0,00	-	-	*Others*
Total	**518.814.309**	**0,45**	**393.722.497**	**0,32**	**268.453.426**	**0,23**	***Total***
Euro							*Euro*
PT Bank Mandiri (Persero) tbk	-	-	-	-	44	0,00	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**44**	**0,00**	***Total***
Deposito Berjangka							***Time Deposits***
Rupiah							*Rupiah*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.594.189.481	2,23	550.611.127	0,46	741.324.758	0,64	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.576.448.731	2,22	1.597.705.368	1,24	2.002.052.020	1,64	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	944.053.995	0,81	804.089.799	0,67	662.986.573	0,58	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	865.288.338	0,74	866.602.921	0,73	980.171.663	0,86	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	210.707.845	0,18	78.752.087	0,07	311.290.490	0,27	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	-	-	426.000.000	0,36	125.900.000	0,11	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Total	**7.190.688.390**	**6,18**	**4.323.761.302**	**3,53**	**4.823.725.504**	**4,10**	***Total***
Dolar AS							*US Dollar*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	71.755.009	0,06	874.643.778	0,74	5.704.220.097	4,98	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	69.797.720	0,06	2.607.620.404	2,20	7.543.537.512	6,59	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.341.894	0,01	57.128.019	0,05	100.993.305	0,09	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Total	**161.894.623**	**0,13**	**3.539.392.201**	**2,99**	**13.348.750.914**	**11,66**	***Total***

) dari total aset** / *) from total assets***

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. Investasi jangka pendek (Catatan 6)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

b. Short-term investment (Note 6)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	
Deposito berjangka							***Time deposits***
Rupiah							*Rupiah*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.500.000.000	1,29	500.000	0,00	104.642.400	0,90	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	150.000.000	0,13	-	-	-	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Dolar AS							*US Dollar*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.066.665.000	3,50	8.555.387.750	7,21	2.154.655.000	1,88	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.662.340	0,00	-	-	-	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	2.391.502.750	2,01	-	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Total	**5.718.327.340**	**4,92**	**10.947.390.500**	**9,22**	**2.259.297.400**	**2,78**	***Total***

) dari total aset** — *) from total assets***

c. Piutang usaha (Catatan 7)

c. Trade receivables (Note 7)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	82.669.137	0,07	81.819.876	0,07	91.145.385	0,08	*PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	79.004.800	0,07	66.867.293	0,06	66.856.570	0,06	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	76.672.740	0,07	75.702.026	0,06	86.568.472	0,08	*PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)*
PT Pertamina Trans Kontinental	75.374.971	0,06	61.965.697	0,05	20.564.517	0,02	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	37.665.788	0,03	43.476.372	0,04	43.610.754	0,04	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Petrokimia Gresik	31.723.908	0,03	31.723.908	0,03	35.995.746	0,03	*PT Petrokimia Gresik*
PT Pertamina (Persero)	18.087.764	0,02	90.384.867	0,08	64.513.478	0,06	*PT Pertamina (Persero)*
PT Daya Radar Utama	10.366.520	0,01	-	-	-	-	*PT Daya Radar Utama*
PCN	10.205.118	0,01	3.128.665	0,00	-	-	*PCN*
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	10.176.645	0,01	6.859.848	0,01	-	-	*PT Pupuk Sriwidjaya Palembang*
Tentara Nasional Indonesia	9.591.555	0,01	28.718.608	0,02	13.898.865	0,01	*Indonesian Armed Forces*
PT Bahtera Adhiguna	8.852.657	0,01	10.864.531	0,01	11.163.377	0,01	*PT Bahtera Adhiguna*
PT Perikanan Nusantara (Persero)	8.162.920	0,01	8.549.323	0,01	9.373.897	0,01	*PT Perikanan Nusantara (Persero)*
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	7.814.283	0,01	7.818.189	0,01	9.314.629	0,01	*PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)*
PT Semen Padang (Persero)	7.045.334	0,01	19.692.496	0,02	17.401.269	0,02	*PT Semen Padang (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	5.051.236	0,00	4.397.552	0,00	1.024.346	0,00	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Dharma Lautan Nusantara	4.030.797	0,00	4.797.674	0,00	4.797.674	0,00	*PT Dharma Lautan Nusantara*
PT Semen Tonasa	3.589.727	0,00	525.973	0,00	21.594	0,00	*PT Semen Tonasa*
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2.541.070	0,00	2.820.283	0,00	1.889.080	0,00	*PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.452.945	0,00	-	-	4.723.761	0,00	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2.148.780	0,00	2.697.354	0,00	1.448.414	0,00	*PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	1.489.372	0,00	3.333.812	0,00	6.061.418	0,01	*PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)*

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

c. Piutang usaha (Catatan 7) (lanjutan)

c. Trade receivables (Note 7) (continued)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
Instansi Pemerintah	1.323.926	0,00	1.917.562	0,00	190.719	0,00	*Government Institutions*
PT Kawasan Berikat Nusantara	1.166.210	0,00	-	-	-	-	*PT Kawasan Berikat Nusantara*
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	1.040.961	0,00	2.562.050	0,00	-	-	*Ministry of Health Indonesia*
PT Bukit Asam Tbk	714.416	0,00	606.642	0,00	606.642	0,00	*PT Bukit Asam Tbk*
BPJS Kesehatan	-	-	-	-	110.506.011	0,10	*BPJS Kesehatan*
Lain-lain	48.436.860	0,04	84.973.555	0,07	193.489.822	0,15	*Others*
Subtotal	**547.400.440**	0,47	**646.204.156**	**0,54**	795.166.440	**0,69**	*Sub-total*
Dikurangi:							*Less:*
Penyisihan penurunan Nilai	(284.270.735)	(0,24)	(366.851.667)	(0,32)	(228.155.423)	(0,20)	*Allowance for impairment*
Total	**263.129.705**	**0,23**	**279.352.489**	**0,22**	**567.011.017**	**0,49**	***Total***

) dari total aset

****) from total assets***

d. Piutang lain-lain (Catatan 8)

d. Other receivables (Note 8)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
Direktorat Jenderal Pajak	674.223.612	0,58	-	-	-	-	*Directorate General of Taxes*
BKMS	201.989.952	0,17	241.872.570	0,20	227.363.181	0,20	*BKMS*
LMAN	151.822.082	0,13	299.262.323	0,25	515.437.422	0,45	*LMAN*
JICT	73.637.145	0,06	740.736.508	0,62	659.701.914	0,58	*JICT*
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	52.267.802	0,04	52.267.802	0,04	52.267.802	0,05	*Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut*
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	11.989.210	0,01	11.989.210	0,01	11.989.210	0,01	*Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	4.926.238	0,00	4.926.238	0,00	-	-	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
Instansi Pemerintah	2.508.645	0,00	2.511.770	0,00	2.688.218	0,00	*Government Institutions*
RSP	150.595	0,00	4.274.743	0,00	-	-	*RSP*
Tentara Nasional Indonesia	934.500	0,00	934.500	0,00	934.500	0,00	*Indonesia Armed Forces*
NPCT1	478.095	0,00	1.171.410	0,00	1.391.404	0,00	*NPCT1*
PT Nindya Karya (Persero)	-	-	8.745.745	0,01	-	-	*PT Nindya Karya (Persero)*
Lain-lain	67.365.022	0,06	59.867.710	0,05	94.765.396	0,08	*Others*
Subtotal	1.242.292.898	1,05	1.428.560.529	1,18	1.566.539.047	1,37	*Sub-total*
Dikurangi:							*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(88.914.882)	(0,08)	(112.486.253)	(0,09)	(134.081.998)	(0,12)	*Allowance for impairment*
Total	**1.153.378.016**	**0,97**	**1.316.074.276**	**1,09**	**1.432.457.049**	**1,25**	***Total***

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Piutang lain-lain (Catatan 8) (lanjutan)

d. Other receivables (Note 8) (continued)

Piutang dari Lembaga Manajemen Aset Negara ("LMAN") merupakan dana talangan yang telah dibayarkan oleh CTP kepada pemilik lahan dan akan diganti oleh LMAN sesuai dengan amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dimana CTP menyediakan dana talangan dengan nilai maksimum sebesar Rp4.560.709.011. Piutang ini digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 26).

Receivables from the State Assets Management Body ("LMAN") represent bailout funds that have been paid by CTP to land owners and will be reimbursed to LMAN in accordance with the Toll Operation Cibitung-Cilincing Toll Road Agreement amendments where CTP provides funding with a maximum of Rp4,560,709,011. These receivables used as collateral for bank loan (Note 26).

e. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 10)

e. Accrued revenues (Note 10)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	
PT Indonesia Power	17.731.187	0,02	2.477.438	0,00	1.779.312	0,00	*PT Indonesia Power*
KSO TPK Koja	2.023.775	0,00	-	-	-	-	*KSO TPK Koja*
JICT	1.410.041	0,00	8.058.465	0,01	2.600.380	0,00	*JICT*
BPJS Kesehatan	576.545	0,00	-	-	80.811.859	0,07	*BPJS Kesehatan*
PT Pertamina (Persero)	-	-	5.943.632	0,01	4.268.754	0,00	*PT Pertamina (Persero)*
Lainnya	11.641.773	0,02	51.410.332	0,04	33.954.200	0,03	*Others*
Total	**33.383.321**	**0,04**	**67.889.867**	**0,06**	**123.414.505**	**0,10**	***Total***

) dari total aset** *) from total assets***

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 19)

f. Short-term bank loans (Note 19)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	-	-	-	28.193.914	0,00	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*

****) dari total liabilitas** *****) from total liabilities***

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 19) (lanjutan)

Rukindo

Pada tanggal 30 April 2021, Rukindo memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. ("BTN") senilai Rp10.000.000 dengan suku bunga 2,00% di atas suku bunga agunan. Fasilitas ini dijaminkan dengan deposito senilai Rp12.000.000 dengan suku bunga deposito 3,25%. Pada tanggal 27 Oktober 2021, pinjaman ini telah dibayarkan seluruhnya.

Pada tanggal 28 Juli 2021, Rukindo memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN senilai Rp6.000.000 dengan suku bunga 2,00% di atas suku bunga agunan. Fasilitas ini dijaminkan dengan deposito senilai Rp8.500.000 dengan suku bunga deposito 3,25%. Pada tanggal 30 November 2021, pinjaman ini telah dibayarkan seluruhnya.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Rukindo memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN senilai Rp6.000.000 dengan suku bunga 2,00% di atas suku bunga agunan. Fasilitas ini dijaminkan dengan deposito senilai Rp7.500.000 dengan suku bunga deposito 3,00%. Pada tanggal 30 November 2021, pinjaman ini telah dibayarkan seluruhnya.

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

f. Short-term bank loans (Note 19) (continued)

Rukindo

On April 30, 2021, Rukindo obtained a loan facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk ("BTN") amounting to Rp10,000,000 with the equivalent interest rate of 2.00% above the collateral interest rate. This facility is collateralized by time deposits of Rp. 12,000,000 with an interest rate of 3.25%. As of October 27, 2021, this loan have been settled throughout.

On July 28, 2021, Rukindo obtained loan facility from BTN amounting to Rp6,000,000 with the equivalent interest rate of 2.00% above the collateral interest rate. This facility is collateralized by time deposits of Rp. 8,500,000 with an interest rate of 3.25%. As of November 30, 2021, this loan have been settled throughout.

On August 31, 2021, Rukindo obtained loan facility from BTN amounting to Rp6,000,000 with the equivalent interest rate of 2.00% above the collateral interest rate. This facility is collateralized by time deposits of Rp7,500,000 with an interest rate of 3.00%. As of November 30, 2021, this loan have been settled throughout.

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

g. Utang usaha (Catatan 20)

g. Trade payable (Note 20)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	976.412.332	1,37	1.658.107.772	2,12	2.019.192.453	2,75	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	532.060.366	0,78	953.254.016	1,22	971.717.599	1,32	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT Waskita Beton Precast	111.703.005	0,15	149.137.513	0,19	267.227.953	0,36	*PT Waskita Beton Precast*
PT Wika Haka Joint Operation	80.051.325	0,11	-	-	-	-	*PT Wika Haka Joint Operation*
PT Pertamina Patraniaga	31.818.091	0,04	3.138.943	0,00	3.869.484	0,01	*PT Pertamina Patraniaga*
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	30.050.713	0,04	-	-	-	-	*PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera*
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	17.947.428	0,02	17.947.727	0,02	13.703.333	0,02	*PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	14.693.889	0,02	37.803.219	0,05	17.664.437	0,02	*PT Pertamina (Persero)*
JICT	10.470.631	0,01	1.831.122	0,00	30.369	0,00	*JICT*
PT Brantas Abipraya (Persero)	8.957.552	0,01	15.399.700	0,02	77.857.274	0,11	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	8.933.314	0,01	250.896.123	0,32	21.670.740	0,03	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.811.099	0,01	7.990.599	0,01	55.749.774	0,08	*PT Adhi Karya (Persero Tbk)*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	6.800.078	0,01	17.048.004	0,02	22.646.004	0,03	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
Koperasi Pegawai Maritim	6.647.447	0,01	6.535.465	0,01	4.772.648	0,01	*Koperasi Pegawai Maritim*
PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	6.476.575	0,01	-	-	-	-	*PT Jasa Marga Tollroad Maintenance*
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	6.258.858	0,01	8.824.970	0,01	7.166.473	0,01	*PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)*
PT Virama Karya (Persero)	5.187.290	0,01	-	-	-	-	*PT Virama Karya (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	4.879.340	0,01	15.257.900	0,01	25.250.751	0,03	*PT Hutama Karya (Persero)*
RSP	4.254.408	0,01	11.770.706	0,02	-	-	*RSP*
Koperasi Pegawai PT Pelindo III	4.234.597	0,00	12.090.870	0,02	17.512.404	0,02	*Koperasi Pegawai Pelindo III*
PT Danareksa (Persero)	2.205.000	0,00	2.205.000	0,00	-	-	*PT Danareksa (Persero)*
Koperasi Karyawan TPK KOJA	1.939.442	0,00	1.972.257	0,00	478.459	0,00	*Koperasi Karyawan TPK KOJA*
PT Nusantara Regas	1.208.076	0,00	1.391.509	0,00	1.366.406	0,00	*PT Nusantara Regas*
PT Sarana Bandar Nasional	1.116.513	0,00	236.210	0,00	-	-	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Surveyor Indonesia (Persero)	858.959	0,00	2.022.002	0,00	3.106.596	0,00	*PT Surveyor Indonesia (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	327.651	0,00	327.651	0,00	976.449	0,00	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
BPKD Provinsi DKI Jakarta	42.369	0,00	42.369	0,00	-	-	*BPKD Provinsi DKI Jakarta*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	11.845	0,00	11.845	0,00	-	-	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
PT Sucofindo (Persero)	677.848	0,00	-	-	10.703.910	0,01	*PT Sucofindo (Persero)*
Lain-lain	42.314.170	0,06	92.577.476	0,12	129.495.652	0,17	*Others*
Total	**1.926.350.211**	**2,70**	**3.267.820.968**	**4,16**	**3.672.159.168**	**4,98**	***Total***

**) dari total liabilitas

) from total liabilities

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

h. Uang untuk diperhitungkan (Catatan 21)

h. Advances from customer (Note 21)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	
PT Pertamina (Persero)	2.437.195	0,00	16.115.087	0,02	18.925.977	0,03	*PT Pertamina (Persero)*
PT Pertaminal Patra Niaga	1.143.325	0,00	-	-	-	-	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	756.582	0,00	30.241.645	0,04	1.054.036	0,00	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	446.500	0,00	-	-	466.718	0,00	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	109.939	0,00	30.207	0,00	-	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pelindo Husada Citra	3.833	0,00	310.641	0,00	-	-	*PT Pelindo Husada Citra*
Ambapers	-	-	255.199	0,00	-	-	*Ambapers*
PT Bahtera Adhiguna	-	-	2.171.448	0,00	-	-	*PT Bahtera Adhiguna*
Instansi Pemerintah	-	-	18.512	0,00	18.512	0,00	*Government Institutions*
PT Semen Padang	-	-	15.923	0,00	1.448	0,00	*PT Semen Padang*
Tentara Nasional Indonesia	-	-	371	0,00	708.865	0,00	*Indonesian Armed Forces*
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	-	-	-	-	49.603	0,00	*PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)*
PT Pertamina Trans Kontinental	-	-	1.042	0,00	55.036	0,00	*PT Pertamina Trans Kontinental*
Lain-lain	3.167.576	0,00	10.130.820	0,01	19.828.608	0,03	*Others*
Total	**8.064.950**	**0,00**	**59.290.895**	**0,07**	**41.108.803**	**0,06**	***Total***

****) dari total liabilitas** *****) from total liabilities***

i. Uang titipan pelanggan (Catatan 23)

i. Deposits from customer (Note 23)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4* 31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	
PT Pertamina (Persero)	14.599.698	0,02	960.469	0,00	-	-	*PT Pertamnia (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5.000.000	0,01	-	-	-	-	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Asuransi Kredit Indonesia	3.914.953	0,01	-	-	-	-	*Asuransi Kredit Indonesii*
PT BNI Life Insurance	3.875.958	0,01	8.828.221	0,01	5.833.813	0,01	*PT BNI Life Insurance*
PT Pertamina Trans Kontinental	3.560.808	0,00	-	-	-	-	*PT Pertamina Trans Kontinental*
BPJS Ketenagakerjaan	3.109.284	0,00	4.366.521	0,01	-	-	*BPJS Ketenagakerjaan*

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

i. Uang titipan pelanggan (Catatan 23) (lanjutan)

i. Deposits from customer (Note 23) (continued)

	Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4*						
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	
DP4	1.754.067	0,00	-	-	-	-	*DP4*
BPJS Kesehatan	945.333	0,00	838.524	0,00	344.708	0,00	*BPJS Kesehatan*
PT Taspen (Persero)	937.111	0,00	8.828	0,00	-	-	*PT Taspen (Persero)*
PT Semen Tonasa	729.601	0,00	365.115	0,00	-	-	*PT Semen Tonasa*
TNI & Polri	144.496	0,00	-	-	-	-	*TNI & Polri*
Instansi Pemerintah	9.017	0,00	1.992.773	0,00	1.682.618	0,00	*Government Institutions*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	-	-	1.211.447	0,00	-	-	*PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)*
Lain-lain	26.551.747	0,04	15.016.120	0,02	21.383.857	0,03	*Others*
Total	**65.132.073**	**0,09**	**33.588.018**	**0,04**	**29.244.996**	**0,04**	***Total***

**) dari total liabilitas

) from total liabilities

j. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 23)

j. Other current liabilities (Notes 23)

	Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4*						
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	291.159.220	0,33	74.936.728	0,10	63.429.111	0,09	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero)	152.794.803	0,21	76.998.800	0,10	170.168.880	0,23	*PT Wijaya Karya (Persero)*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	142.416.505	0,19	72.024.980	0,09	14.637.235	0,02	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya (Persero)	128.776.800	0,12	37.000.000	0,05	-	-	*PT Waskita Karya (Persero)*
JICT	40.759.607	0,05	38.980.725	0,05	38.980.725	0,05	*JICT*
PHC	36.392.787	0,05	93.756.881	0,12	-	-	*PHC*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	35.240.734	0,05	78.298.153	0,10	-	-	*PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,04	31.666.118	0,04	31.666.118	0,04	*PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)*
PT Brantas Abipraya (Persero)	25.187.500	0,03	28.727.964	0,04	40.883.828	0,06	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
Instansi Pemerintah	5.826.282	0,01	8.322.909	0,01	5.164.073	0,01	*Government Institutions*
PT Krakatau Engineering Amarta Karya (Persero)	5.165.084	0,01	62.066.662	0,08	-	-	*PT Krakatau Engineering Amarta Karya (Persero)*
PT Nindya Karya (Persero)	3.795.525	0,01	17.793.511	0,02	79.575.063	0,11	*PT Nindya Karya (Persero)*
PT Virama Karya (Persero)	2.652.991	0,00	1.024.274	0,00	-	-	*PT Virama Karya (Persero)*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	463.709	0,00	824.890	0,00	-	-	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	329.150	0,00	976.449	0,00	-	-	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Sucofindo (Persero)	272.727	0,00	2.184.800	0,00	-	-	*PT Sucofindo (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	-	-	91.431.990	0,12	-	-	*PT Hutama Karya (Persero)*
DP4	-	-	1.084.174	0,00	2.714.983	0,00	*DP4*

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

j. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 23) (lanjutan)

j. Other current liabilities (Notes 23) (continued)

	Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4*						
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	
Lain-lain	98.246.035	0,13	178.378.252	0,23	132.016.256	0,18	*Others*
Total	**1.001.145.577**	**1,24**	**896.478.260**	**1,15**	**579.236.272**	**0,79**	***Total***

****) dari total liabilitas** *****) from total liabilities***

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No.024/Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Other current liabilites to PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No.HK.566/27/11/PI.II-11 and No.024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DP4 merupakan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan denda atas program pensiun Rukindo.

Other current liabilites to DP4 represents an obligation on the principal installments and penalties for pension program of Rukindo.

k. Liabilitas jangka panjang lainnya (Catatan 29)

k. Other long-term liabilities (Notes 29)

	Disajikan kembali - Catatan 4/*As restated - Note 4*						
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ *January 1, 2020/ December 31, 2019*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	Total/ *Total*	Persentase (%)**/ *Percentage (%)***	
BLU Set-BPJT	466.538.398	0,63	466.538.398	0,60	441.350.272	0,60	*BLU Set-BPJT*
Total	**466.538.398**	**0,63**	**466.538.398**	**0,60**	**441.350.272**	**0,60**	***Total***

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

I. Remunerasi personil manajemen kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Kelompok Usaha adalah sebesar Rp526.692.113, Rp706.084.073 dan Rp722.747.152 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019.

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

I. Key management personnel remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp526,692,113, Rp706,084,073 and Rp722,747,152 for the year ended December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019.

46. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING / *46. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES*

		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ *In foreign currencies (full amount)*	**Setara dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah***	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	47.943.930	684.111.943	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	USD	285.116.500	4.068.327.340	*Short-term investments*
Piutang usaha	USD	6.295.571	89.831.507	*Trade receivables*
Total aset			**4.842.270.790**	***Total assets***
Liabilitas				***Liabilities***
Utang obligasi	USD	2.600.000.000	37.099.400.000	*Bonds payables*
Utang usaha	USD	22.102.199	315.376.275	*Trade payables*
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.888	230.970.700	*Other long-term liabilities*
Total liabilitas			**37.645.746.975**	***Total liabilities***
Liabilitas neto			**32.803.476.185**	***Net liabilities***

		31 Desember 2020/ *December 31, 2020* Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ *In foreign currencies (full amount)*	**Setara dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah***	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	315.408.956	4.448.920.885	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	USD	776.100.000	10.946.890.500	*Short-term investments*
Piutang usaha	USD	2.345.761	33.086.965	*Trade receivables*
Total aset			**15.428.898.350**	***Total assets***

46. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

46. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

		31 Desember 2020/ *December 31, 2020* Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ *In foreign currencies (full amount)*	Setara dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah*	
Liabilitas				***Liabilities***
Utang obligasi	USD	2.600.000.000	36.673.000.000	*Bonds payables*
Utang usaha	USD	28.386.682	400.394.149	*Trade payables*
	EUR	8.000	138.641	
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	10.450.750	147.407.829	*Other short-term liabilities*
	EUR	2.234.472	38.723.400	
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.876	228.315.886	*Other long-term liabilities*
Total liabilitas			**37.487.979.905**	***Total liabilities***
Liabilitas neto			**22.059.081.555**	***Net liabilities***

		1 Januari 2020/31 Desember, 2019/ *Janaury 1, 2020/December 31, 2019* Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ *In foreign currencies (full amount)*	Setara dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah*	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	986.779.239	13.717.218.205	*Cash and cash equivalents*
	EUR	3	44	
Investasi jangka pendek	USD	155.000.000	2.154.655.000	*Short-term investments*
Piutang usaha	USD	5.266.097	75.141.944	*Trade receivables*
	SGD	7.645	78.902	
Piutang lain-lain	USD	863.760	12.007.128	*Other receivables*
Total aset			**15.959.101.223**	***Total assets***
Liabilitas				***Liabilities***
Utang obligasi	USD	2.600.000.000	36.142.600.000	*Bonds payables*
Utang usaha	USD	66.446.192	923.668.515	*Trade payables*
	EUR	7.999	124.704	
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	10.840.166	150.689.147	*Other short-term liabilities*
	EUR	79.912	1.245.748	
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.135.814	224.303.950	*Other long-term liabilities*
Total liabilitas			**37.442.632.064**	***Total liabilities***
Liabilitas neto			**21.483.530.841**	***Net liabilities***

47. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Kelompok Usaha:

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Aset Keuangan				***Financial Assets***
Kas dan setara kas	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	5.718.525.973	11.094.379.218	2.624.641.107	*Short-term investments*
Piutang usaha - neto	1.516.262.546	1.556.958.482	1.994.420.168	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	1.280.366.535	1.419.602.475	1.670.636.060	*Other receivables - net*
Pendapatan masih akan diterima	330.968.482	503.784.713	560.692.444	*Accrued revenues*
Aset lancar lainnya	1.244.900	4.100.129	2.161.748	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	428.028	2.682.470	4.080.847	*Other non-current assets*
Total	**21.770.185.051**	**26.194.564.277**	**28.676.646.298**	***Total***

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Liabilitas Keuangan				***Financial Liabilities***
Pinjaman bank jangka pendek	5.196.855	4.000.000	34.193.914	*Short-term bank loans*
Utang usaha	3.264.492.275	4.954.024.326	6.716.274.520	*Trade payables*
Beban akrual	3.699.192.020	3.664.488.679	3.838.675.350	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	2.248.710.446	1.953.980.628	1.370.628.359	*Other current liabilities*
Utang bank jangka panjang	6.656.343.511	11.128.996.490	8.613.919.696	*Long-term bank loan*
Utang obligasi	40.176.176.480	40.198.948.551	39.615.134.308	*Bonds payable*
Utang lembaga keuangan non-bank	1.426.042.655	1.002.703.343	651.770.408	*Loan from non-bank financial institution*
Liabilitas jangka panjang lainnya	968.389.200	792.645.412	702.551.614	*Other non-current liabilities*
Liabilitas sewa	333.885.712	394.725.913	-	*Lease liabilities*
Total	**58.778.429.154**	**64.094.513.342**	**61.543.148.169**	***Total***

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

47. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek - deposito berjangka, investasi jangka pendek - aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang - entitas asosiasi, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Investasi jangka pendek - efek yang diperdagangkan dan investasi jangka panjang - penyertaan saham dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar. Investasi jangka panjang - surat utang dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
- Estimasi nilai wajar utang obligasi, liabilitas sewa, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments - time deposits, short-term investments – financial assets measured at fair value through profit or losses, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments - associates, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.*
- *Short-term investments - marketable securities and long-term investments - investment in share of stocks are presented at fair value using market price quotation. Long-term investments - bonds are presented at fair value by reference to similar bond price at reporting date.*
- *The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.*
- *The estimated fair values of bonds payable, lease liability, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.*

47. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar bersifat *judgemental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Kelompok Usaha akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, hirarki nilai wajar Kelompok Usaha untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair value estimation is judgemental and involving various boundaries, including:

- *Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*

- *Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs)*

As of December 31, 2021 and 2020, fair value hierarchy of the Group for assets which fair value were disclosed are as follows:

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*				
	Total/ *Total*	**Tingkat 1/ *Level 1***	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Aset tidak lancar					***Non-current Assets***
Properti investasi (Catatan 13)	873.433.978	-	873.433.978	-	*Investment properties (Note13)*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
	Total/ *Total*	**Tingkat 1/ *Level 1***	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Aset tidak lancar					***Non-current Assets***
Properti investasi (Catatan 13)	867.416.746	-	867.416.746	-	*Investment properties (Note13)*

47. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada pengalihan dari Tingkat 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan berdasarkan nilai wajar selain yang telah dijelaskan di atas.

48. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang USD.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

As of December 31, 2021, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed based on fair value other than above explained.

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in USD.

48. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 46. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ *(Increases) decreases on foreign exchange rates*	**Dampak/ *Effect***	
Perubahan kurs mata uang asing 2021	(+)100bps	(328.034.762)	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2021*
	(-)100bps	328.034.762	
Perubahan kurs mata uang asing 2020	(+)100bps	(220.591.588)	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2020*
	(-)100bps	220.591.588	
Perubahan kurs mata uang asing 2019	(+)100bps	(213.710.050)	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2019*
	(-)100bps	213.710.050	

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Cash flows interest rate risk (continued)

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 46. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

48. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Kelompok Usaha yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2021.

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2021.

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	Total	
Aset						***Assets***
Kas dan setara kas	12.922.388.587	-	-	-	12.922.388.587	*Cash and cash equivalent*
Investasi jangka pendek	-	-	5.718.525.973	-	5.718.525.973	*Short-term investments*
Total aset	**12.922.388.587**	**-**	**5.718.525.973**	**-**	**18.640.914.560**	***Total assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	5.196.855	-	5.196.855	*Short-term bank loan*
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	-	2.248.710.446	-	2.248.710.446	*Other current liabilities*
Utang bank jangka panjang	-	-	2.365.898.747	6.656.343.511	9.022.242.258	*Long-term bank loan*
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	-	968.389.202	968.389.202	*Other long-term liabilities*
Liabilitas sewa	-	-	76.345.578	257.540.134	333.883.712	*Lease liabilities*
Obligasi	-	-	-	40.176.176.480	40.176.176.480	*Bonds*
Total liabilitas	**-**	**-**	**4.696.151.626**	**48.058.449.327**	**52.754.598.953**	***Total liabilities***

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

48. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

		Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*		
	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019*	
Aset Keuangan				***Financial Assets***
Kas dan setara kas	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	5.718.525.973	11.094.379.218	2.624.641.107	*Short-term investments*
Piutang usaha - neto	1.516.262.546	1.556.958.482	1.994.420.168	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	1.280.366.535	1.419.602.475	1.670.636.060	*Other receivables - net*
Pendapatan masih akan diterima	330.968.482	503.784.713	560.692.444	*Accrued revenues*
Aset lancar lainnya	1.244.900	4.100.129	2.161.748	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	428.028	2.682.470	4.080.847	*Other non-current assets*
Total	**21.770.185.051**	**26.194.564.277**	**28.676.646.298**	***Total***

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Kelompok Usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Kelompok Usaha.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

Selain itu, Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

48. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Liquidity Risk (continued)

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

	2021					
	< 1 tahun/ *< 1 year*	**1 - 2 tahun/ *1 - 2 years***	**2 - 3 tahun/ *2 - 3 years***	**> 3 tahun/ *> 3 years***	**Jumlah/ *Total***	
Pinjaman bank jangka pendek	5.196.855	-	-	-	5.196.855	*Short-term bank loan*
Utang usaha	3.264.492.275	-	-	-	3.264.492.275	*Trade payables*
Beban akrual	3.699.192.020	-	-	-	3.699.192.020	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	2.248.710.446	-	-	-	2.248.710.446	*Other short-term liabilities*
Utang obligasi	-	-	-	40.176.176.480	40.176.176.480	*Bonds payable*
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	962.389.202	-	-	962.389.202	*Other Long-term liabilities*
Liabilitas sewa	76.345.578	257.540.134	-	-	333.885.712	*Lease liabilities*
Total	**9.293.937.174**	**1.219.929.336**	**-**	**40.176.176.480**	**50.690.042.990**	***Total***

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Kelompok Usaha mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Kelompok Usaha dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, modal donasi, tambahan modal disetor, dan saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya).

Capital management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owners of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income).

49. PERJANJIAN KONSESI

a) Kalibaru

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penugasan kepada Perusahaan untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengadakan Perjanjian Pemberian Konsesi untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Perjanjian Konsesi) dimana Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok memberikan hak kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh para pihak.
- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok berupa bank garansi sebesar Rp37.000.000 dan berlaku sampai dengan 15 Januari 2019. Yang kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2027. Jaminan pelaksanaan tersebut dicatat oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai bagian dari akun “Aset tidak lancar lainnya” (Catatan 18).

49. CONCESSION AGREEMENTS

a) Kalibaru

Based on Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 36 Tahun 2012 dated April 5, 2012 regarding Assignment to the Company to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port, on August 31, 2012, the Company (formerly Pelindo II) entered into a Concession Agreement to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port with the Office of Tanjung Priok Main Port Authority (Tanjung Priok Port Authority) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Concession Agreement) in which the Tanjung Priok Port Authority granted rights to the Company (formerly Pelindo II), including the right to execute the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of executing the project without limiting the right of Tanjung Priok Port Authority in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law. Important conditions in the Concession Agreement are as follows:

- *Concession Agreement is valid for 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the required technical documents, financial documents, and performance bonds by the parties.*
- *Under the Concession Agreement, the Company (formerly Pelindo II) is required to submit a performance bond for development of Kalibaru terminal to the Tanjung Priok Port Authority in the form of bank guarantee amounting to Rp37,000,000 and is valid until January 15, 2019. Which was extended until December 31, 2027. The performance bond is recorded by the Company (formerly Pelindo II) as part of "Other non-current assets" (Note 18).*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

a) Kalibaru (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok berupa pendapatan konsesi sebesar 0,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kalibaru.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan untuk membangun:
  - Infrastruktur, termasuk pekerjaan pemecah gelombang, pekerjaan pengerukan, jalan akses, reklamasi dan dermaga.
  - Suprastruktur, termasuk *container terminal equipment*, *product terminal equipment*, *electrical mechanical* dan *information communications technology*.
  - Kapal dan fasilitas pendukung lainnya.

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) berhak mengadakan kerjasama kemitraan, sewa dan perjanjian serupa lainnya dengan kontraktor, mitra kerjasama dan anak perusahaan yang didirikan serta pihak ketiga lainnya.
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok untuk memberikan masukan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengenakan dan memungut tarif area konsesi di dalam area konsesi.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

a) Kalibaru (continued)

- *The Company (formerly Pelindo II) is required to pay to Tanjung Priok Port Authority, in form of concession revenues, 0.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kalibaru terminal.*
- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company (formerly Pelindo II) is required to build:*
  - *Infrastructure, including breakwater works, dredging works, access roads, reclamation and piers.*
  - *Superstructure, including container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical and information communications technology.*
  - *Vessels and other supporting facilities.*
- *The Company (formerly Pelindo II) has the rights to enter into partnership cooperation, rental and similar agreements with contractors, partners and subsidiaries established as well as with other third parties.*
- *The initial rate applied in the concession area is set by the Company (formerly Pelindo II) based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*
- *Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company (formerly Pelindo II) based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.*
- *The Company (formerly Pelindo II) will consult with the Tanjung Priok Port Authority regarding the rate before being applied to service users in order to provide opportunity for the Tanjung Priok Port Authority to provide advice.*
- *The Company (formerly Pelindo II) by its own discretion has the right to impose and levy concession rate within the concession area.*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

a) Kalibaru (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) dapat memberikan wewenang kepada mitra kerjasama sehubungan dengan tarif area konsesi, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok akan mengadakan kerjasama pemanfaatan dan pengoperasian dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) selama 25 tahun yang akan dimulai segera setelah berakhirnya jangka waktu konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo II) wajib:
  - Menyerahkan penguasaannya atas tanah reklamasi secara damai dan dalam keadaan kosong bersamaan dengan area konsesi dan infrastruktur area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
  - Menyerahkan penguasaannya atas aset tidak bergerak yang dimiliki Perusahaan (dahulu Pelindo II) secara damai di dalam area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
  - Aset bergerak dalam area konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II), Perusahaan (dahulu Pelindo II) dapat memilih dengan kebijaksanaannya sendiri, untuk mempertahankan hak, kepemilikan dan kepentingan atas aset bergerak dengan memindahkan atau mengeluarkan aset bergerak tersebut dari area konsesi, atau dapat menawarkan aset bergerak tersebut untuk dibeli oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dengan harga buku atau nilai wajar, yang mana lebih rendah.
  - Menyerahkan kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok seluruh dokumen terkait pengoperasian proyek.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

a) Kalibaru (continued)

- *The Company (formerly Pelindo II) may authorize cooperation partners in connection with the rate within the concession area, with condition that the implementation of such authority must be approved by the Company (formerly Pelindo II) and in accordance with applicable legislation.*
- *At the end of the concession period, the Tanjung Priok Port Authority will enter into a cooperation and operation with the Company (formerly Pelindo II) for 25 years, which will begin immediately after the expiration of the concession.*
- *At the end of the concession period, the Company (formerly Pelindo II) is obliged to:*
  - *Transfer the authorization of the reclamation land to the Tanjung Priok Port Authority in an empty condition and free of encumbrance, along with the concession area and concession area infrastructure free of any form of charges.*
  - *Transfer the authorization of the intangible assets of the Company (formerly Pelindo II) to the Tanjung Priok Port Authority free of encumbrance within the concession area and free of any form of charges.*
  - *For movable assets owned by the Company (formerly Pelindo II) within the concession area, the Company (formerly Pelindo II) may choose with its own discretion, to retain the rights, title and interest in movable assets by moving or removing the movable assets from the concession area, or may offer the movable assets to be purchased by the Tanjung Priok Port Authority with book value or fair value, whichever is lower.*
  - *Transfer all documents related to the operation of the project to the Tanjung Priok Port Authority.*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

a) Kalibaru (lanjutan)

- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib: (lanjutan)
  - Mengalihkan atau menyebabkan dialihkannya kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
  - Memindahkan atau mengeluarkan dari area konsesi semua aset bergerak yang ingin dipindahkan atau dikeluarkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II).

b) Kijing

Pada tanggal 12 Juli 2018, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak (Otoritas Pelabuhan Pontianak) mengadakan Perjanjian Konsesi tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Perjanjian Konsesi Kijing) dimana Otoritas Pelabuhan Pontianak memberikan hak kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) termasuk hak untuk melaksanakan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak beserta fasilitas pendukungnya pada area konsesi.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi Kijing adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi Kijing berlaku selama 69 (enam puluh sembilan) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Konsesi Kijing.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan untuk membangun:
  - Infrastruktur, termasuk jalan akses, dermaga, trestel, lapangan penumpukan dan fasilitas lainnya.
  - Suprastruktur, termasuk peralatan di terminal *multipurpose*, terminal petikemas, terminal curah kering dan terminal curah cair, *electrical mechanical* serta *information communications technology*.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

a) Kalibaru (continued)

- *At the end of the concession period, the Company is obliged to: (continued)*
  - *Transfer or effectively cause transfer of contracts made with third parties to the Tanjung Priok Port Authority.*
  - *Move or take out from the concession area all current assets which the Company (formerly Pelindo II) decides to move or take out.*

b) Kijing

On July 12, 2018, the Company (formerly Pelindo II) and Port Authority Office Class II Pontianak (Pontianak Port Authority) entered into a Concession Agreement of Construction and Operation of Port Services of Terminal Kijing Pontianak Port, West Kalimantan Province (Kijing Concession Agreement) in which the Pontianak Port Authority granted rights to the Company (formerly Pelindo II), including the right to execute construction and operation of port services as well as development of Kijing Terminal Pontianak Port including its supporting facilities in the concession area.

Important provisions in the Kijing Concession Agreement are as follows:

- *Kijing Concession Agreement is valid for 69 (sixty nine) years from the signing date of the Kijing Concession Agreement.*
- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company (formerly Pelindo II) is required to build:*
  - *Infrastructure, including access roads, piers, trestle, dock yard and other facilities.*
  - *Superstructure, including equipment in multipurpose terminal, container terminal, dry bulk terminal and liquid bulk terminal, electrical mechanical and information communications technology.*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

b) Kijing (lanjutan)

- Penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.
- Lahan pada area konsesi akan diterbitkan HPL atas nama Otoritas Pelabuhan Pontianak dan HGB atas nama Perusahaan (dahulu Pelindo II).
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) berhak mengadakan kerjasama kemitraan dengan mitra kerjasama dan entitas anak Perusahaan (dahulu Pelindo II).
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) berhak mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhan di dalam area konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo II) wajib menyerahkan seluruh aset di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan Pontianak.

c) Tanjung Priok - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo II)

Pada tanggal 11 November 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok) telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) (Perjanjian Konsesi), yang telah diadendum tanggal 15 Juli 2016, yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

b) Kijing (continued)

- *Provision and maintenance of shipping navigation channel and port basin at Kijing Terminal Pontianak Port.*
- *Land in the concession area will be issued HPL under Pontianak Port Authority and HGB under the Company (formerly Pelindo II).*
- *The Company (formerly Pelindo II) has the rights to enter into partnership cooperation with partners and subsidiaries of the Company (formerly Pelindo II).*
- *The initial rate applied in the concession area is set by the Company (formerly Pelindo II) based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*
- *Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company (formerly Pelindo II) based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.*
- *The Company (formerly Pelindo II) has the right to impose and levy port services rate within the concession area.*
- *At the end of the concession period, the Company (formerly Pelindo II) is obliged to transfer all assets within concession area to the Pontianak Port Authority.*

c) Tanjung Priok - Port Operated by The Company (formerly Pelindo II)

On November 11, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and Tanjung Priok Main Port Authority Office (Tanjung Priok Port Authority) has signed Concession Agreement regarding Operational Activities at Port that was operated by the Company (formerly Pelindo II) (Concession Agreement), which has been amended on July 15, 2016, which includes granting rights from the Tanjung Priok Port Authority to the Company (formerly Pelindo II) to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping.

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

c) Tanjung Priok - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo II) (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut, jangka waktu konsesi adalah 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan untuk membayar pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi.

Pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi ini, seluruh aset Perusahaan (dahulu Pelindo II) di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan (dahulu Pelindo II), tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan (dahulu Pelindo II).

d) Belawan - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo I)

Pada tanggal 9 November 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan ("Otoritas Pelabuhan Belawan") telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) (Perjanjian Konsesi Belawan), yang telah diaddendum tanggal 16 Juni 2016 dan 12 Juli 2017, mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan Belawan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo I) untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

c) Tanjung Priok - Port Operated by The Company (formerly Pelindo II) (continued)

Based on the Concession Agreement, the concession period is 50 (fifty) years from the date of agreement signing and the Company (formerly Pelindo II) is obliged to pay concession revenue obtained from the port operation at concession area on each port to Tanjung Priok Port Authority as Non-tax State Revenue every 3 (three) months amounting to 2.5% of gross revenue from port operation at concession area.

At the end of Concession Agreement, all the Company's (formerly Pelindo II) assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's (formerly Pelindo II) assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company (formerly Pelindo II).

d) Belawan - Port Operated by The Company (formerly Pelindo I)

On November 9, 2015, the Company (formerly Pelindo I) and Belawan Main Port Authority Office ("Belawan Port Authority") has signed Concession Agreement regarding Operational Activities at Port that was operated by the Company (formerly Pelindo I) (Belawan Concession Agreement), which has been amended on June 16, 2016 and July 12, 2017, which includes grants of rights from Belawan Port Authority to the Company (formerly Pelindo I) to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping.

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

d) Belawan - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo I) (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Konsesi Belawan tersebut, jangka waktu konsesi adalah 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan Perusahaan (dahulu Pelindo I) diharuskan untuk membayar pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan Belawan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi.

Pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi Belawan ini, seluruh aset Perusahaan (dahulu Pelindo I) di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan (dahulu Pelindo I), tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan (dahulu Pelindo I).

e) Kuala Tanjung

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung ("Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung") No. HK.107/1/1/KSOP.KIG-15 dan No. US.15/1/7/PI-15.TU tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung ("Perjanjian Konsesi Kuala Tanjung") dan addendumnya tanggal 16 November 2016 untuk mengubah judul perjanjian kerjasama menjadi Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Kuala Tanjung, Perusahaan (dahulu Pelindo I) telah memperoleh hak konsesi untuk melakukan kegiatan pengusahaan dermaga pada terminal *multipurpose* di Pelabuhan Kuala Tanjung, dengan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut:

- Periode perjanjian adalah selama 69 (enam puluh sembilan) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, dengan rincian sebagai berikut:

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

d) Belawan - Port Operated by The Company (formerly Pelindo I) (continued)

Based on the Belawan Concession Agreement, the concession period is 30 (thirty) years from the date of agreement signing and the Company (formerly Pelindo I) is obliged to pay concession revenue obtained from the port operation at concession area on each port to Belawan Port Authority as Non-tax State Revenue every 3 (three) months amounting to 2.5% of gross revenue from port operation at concession area.

At the end of Belawan Concession Agreement, all the Company's (formerly Pelindo I) assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's (formerly Pelindo I) assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company (formerly Pelindo I).

e) Kuala Tanjung

Based on the agreement between the Company (formerly Pelindo I) and the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia which represented by the Harbormaster and Port Authority Office of Kuala Tanjung ("Kuala Tanjung Port Authority") No. HK.107/1/1/KSOP.KIG- 15 or No. US.15/1/7/PI-15.TU dated January 23, 2015 related to Port Operation at Liquid Bulk Port in Kuala Tanjung Port ("Kuala Tanjung Concession Agreement" and its amendment dated November 16, 2016 to change the title of the cooperation agreement to Port Service Operation at Kuala Tanjung Port, the Company (formerly Pelindo I) has obtained concession rights to conduct port activities at multipurpose terminal at Kuala Tanjung Port, with provisions in this agreement, as follows:

- *Agreement period is of 69 (sixty-nine) years from the date of agreement signing, with the following details:*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

e) Kuala Tanjung (lanjutan)

a) Masa prakonstruksi dan masa konstruksi paling lambat selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
b) Masa operasi terhitung sejak diterimanya izin pengoperasian terminal *multipurpose* sampai dengan berakhirnya periode perjanjian.

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan sipil secara proporsional terhadap progress pembangunan.

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar *fee* konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor diluar Pajak Pertambahan Nilai atas pengoperasian dermaga pada terminal *multipurpose* terhitung sejak tanggal kegiatan pengoperasian komersial.

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar PNBP atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor terhitung sejak bulan ke-49 (empat puluh sembilan) setelah tanggal penandatangan kerjasama.

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diberikan hak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dan/atau bermitra dengan badan usaha atau afiliasi yang mempunyai kemampuan dan kompentensi untuk melaksanakan kegiatan kepelabuhanan dengan persetujuan tertulis oleh Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung.

- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

e) Kuala Tanjung (continued)

a) The pre-construction period and construction period is no later than 48 (forty eight) months, starting from the signing of the agreement; and

b) Operation period commencing from the receipt of the multipurpose terminal operating license until the end of the agreement.

- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to put security deposit amounting 1% from the project amount of civil construction proportionally to the construction progress.*

- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay concession fee amounting 2.5% from the gross revenue exclude Value Added Tax for the operational of wharves in the multipurpose terminal started from the date of comercial operation.*

- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay PNBP from port service activities amounting 2.5% from gross revenue started on the 49th (forty ninth) month after the date of agreement signing.*

- *The Company (formerly Pelindo I) were given rights to enter into agreement with other party and/or engage in partnership with other business entity or affiliate with competency to operates in port activities with written agreement from Kuala Tanjung Port Authority.*

- *The initial tariffs to be applied in the concession area are determined by the Company (formerly Pelindo I) based on the type, structure and class of tariffs determined by Minister of Transportation.*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

e) Kuala Tanjung (lanjutan)

- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) secara periodik setiap 2 (dua) tahun atau dalam kondisi-kondisi tertentu dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung dan dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung untuk memberikan masukan.

- Dalam hal jangka waktu konsesi berakhir, area konsesi dan seluruh aset dalam area konsesi sebagaimana tercantum pada Perjanjian Konsesi Kuala Tanjung akan diserahkan kepada Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Belawan Fase II

Pada tanggal 4 April 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan Otoritas Pelabuhan Belawan menandatangani Perjanjian Pengusahaan Terminal Belawan Fase II Pelabuhan Utama Belawan No. PR.801/1/9/OP.BLW-14 dan No. PR.02/1/15/PI-14 ("Perjanjian Konsesi Belawan Fase II") dan addendumnya tanggal 9 Februari 2016 dan 7 Mei 2018, Otoritas Pelabuhan Belawan memberikan hak konsesi kepada Perusahaan (dahulu Pelindo I) atas pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Fase II yang meliputi:

i) Dermaga sepanjang 350m;
ii) *Causeway*;
iii) *Container yard* dan utilitas;
iv) Peralatan; dan
v) Instalasi teknologi informasi.

dengan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut:

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

e) Kuala Tanjung (continued)

- *Adjustments on tariff applied in the concession area can be carried out by the Company (formerly Pelindo I) periodically every 2 (two) years or under certain conditions by first notifying the Kuala Tanjung Port Authority and consulting the Minister of Transportation in accordance with the law and regulations.*

- *The Company (formerly Pelindo I) will consult with the Kuala Tanjung Port Authority regarding the tariff before its applied to the customer to provide opportunity for the Kuala Tanjung Port Authority to provide input and recommendation.*

- *In the event of the concession period expires, the concession area and all the assets inside the area as stipulated in the Kuala Tanjung Concession Agreement shall be handed to the Kuala Tanjung Port Authority in accordance with law and regulations.*

f) Belawan Phase II

On April 4, 2014, the Company (formerly Pelindo I) and Belawan Port Authority signed Agreement of Terminal Operation for Belawan Phase II Main Port Belawan No. PR.801/1/9/OP-BLW-14 and No. PR.02/1/15/PI-14 ("Belawan Phase II Concession Agreement") and its amendment dated February 9, 2016 and May 7, 2018, Belawan Port Authority grant concession rights to the Company (formerly Pelindo I) for Belawan Phase II container terminal operation which includes:

i) 350m long jetty;
ii) Causeway;
iii) Container yard and utilities;
iv) Equipments; and
v) Information technology installation.

with terms in the agreement as follow:

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

f) Belawan Fase II (lanjutan)

Ketentuan dalam perjanjian diantaranya:

- Periode Perjanjian Konsesi Belawan Fase II adalah 70 (tujuh puluh) tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pembangunan Pekerjaan Sipil.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 1% dari Nilai Kontrak pekerjaan sipil secara proporsional terhadap progress pembangunan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membangun Terminal Petikemas Belawan Fase II di area konsesi.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membangun Terminal Petikemas Belawan Fase II di area konsesi.
- Jangka waktu pembangunan adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar *fee* konsesi sebesar 0,5% dari pendapatan kotor dengan periode triwulan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar PNBP atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan sebesar 0,5% dari pendapatan kotor terhitung sejak tanggal pengoperasian terminal.
- Jangka waktu pembangunan adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar *fee* konsesi sebesar 0,5% dari pendapatan kotor dengan periode triwulan.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

f) Belawan Phase II (continued)

The agreement arrangement are among others:

- *Belawan Phase II Concession Agreement period is 70 (seventy) years upon the date of signing of Minutes of Initiation of Civil Construction.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to put Security Deposit amounting 1% from the Project Amount of civil construction proportionally to the construction progress.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to build and develop Container Terminal Belawan Phase II in the concession area.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to build and develop Container Terminal Belawan Phase II in the concession area.*
- *The construction period is 36 (thirty six) months.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay concession fee amounting 0.5% from the gross revenue in quarterly term.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay PNBP from port service activities amounting 0.5% from gross revenue started on the date of terminal operation.*
- *The construction period is 36 (thirty six) months.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay concession fee amounting 0.5% from the gross revenue in quarterly term.*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

f) Belawan Fase II (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar PNBP atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan sebesar 0,5% dari pendapatan kotor terhitung sejak tanggal pengoperasian terminal.

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diberikan hak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dan/atau bermitra dengan badan usaha atau afiliasi tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban Perusahaan (dahulu Pelindo I) atas pelaksanaan Perjanjian Konsesi Belawan Fase II.

- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) secara periodik setiap 2 (dua) tahun atau dalam kondisi-kondisi tertentu dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Otoritas Pelabuhan Belawan dan dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan Belawan sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan Belawan untuk memberikan masukan.

- Dalam hal jangka waktu konsesi berakhir, area konsesi dan seluruh aset dalam area konsesi, kecuali atas aset yang diperoleh diluar investasi yang diperjanjikan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Konsesi Belawan Fase II, akan diserahkan kepada Otoritas Pelabuhan Belawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

f) Belawan Phase II (continued)

- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay PNBP from port service activities amounting 0.5% from gross revenue started on the date of terminal operation.*

- *The Company (formerly Pelindo I) were given rights to enter into agreement with other party and/or engage in partnership with other business entity or affiliate without eliminating the responsibilities and obligations of the Company (formerly Pelindo I) regarding the enforcement of the Belawan Phase II Concession Agreement.*

- *The initial tariffs to be applied in the concession area are determined by the Company (formerly Pelindo I) based on the type, structure and class of tariffs determined by Minister of Transportation.*

- *Adjustments on tariff applied in the concession area can be carried out by the Company (formerly Pelindo I) periodically every 2 (two) years or under certain conditions by first notifying the Belawan Port Authority and consulting the Minister of Transportation in accordance with the law and regulations.*

- *The Company (formerly Pelindo I) will consult with the Belawan Port Authority regarding the tariff before its applied to the customer to provide opportunity for the Belawan Port Authority to provide input and recommendation.*

- *In the event of the concession period expires, the concession area and all the assets inside the area, except for assets that excluded from the agreed investments as stipulated in the Belawan Phase II Concession Agreement, shall be handed to the Belawan Port Authority in accordance with law and regulations.*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

g) Alur Pelayaran Barat Surabaya

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS") No. HK.107/01/05/ OP.TPr-14 dan No. HK.0501/175/P.III-2014 (Perjanjian Konsesi APBS) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2014. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan (dahulu Pelindo III) memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) diharuskan untuk membiayai, merencanakan/merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran, serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS.

- Perjanjian Konsesi tidak dapat dialihkan ke pihak lain dan berlaku selama 25 tahun, yang terdiri dari masa pra-konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender, dan masa operasi selama 23 tahun terhitung sejak masa pemungutan pertama jasa penggunaan alur pelayaran hingga sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Konsesi APBS.

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 3,5% dari pendapatan kotor pengoperasian APBS kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya.

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib mengembalikan aset pengoperasian APBS yang berupa *capital dredging* kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya Perjanjian Konsesi.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

g) Alur Pelayaran Barat Surabaya

The Company (formerly Pelindo III) entered into an agreement on the provision of Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS") utilization services No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 and No. HK.0501/175/P.III-2014 (APBS Concession Agreement) with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 8, 2014. Based on this agreement, the Company (formerly Pelindo III) obtained the right to provide the APBS utilization services with the following conditions:

- *The Company (formerly Pelindo III) is required to finance, plan/design, build, operate, and maintain the APBS including the installation of shipping navigation facilities, as well as collecting APBS service fee.*

- *The Concession Agreement is not transferrable to another party and is valid for 25 years, consisting of the pre-construction period no later than 12 calendar months, and the operating period for 23 years from the first collection period until the end of the APBS Concession Agreement.*

- *The Company (formerly Pelindo III) is required to pay concession revenue amounting to 3.5% of the APBS operation's gross revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia every month, no later than 15 days in the following month.*

- *The Company (formerly Pelindo III) is required to return the APBS operating assets in form of capital dredging to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia as the Concession Agreement ends.*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

g) Alur Pelayaran Barat Surabaya (lanjutan)

- Atas kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS, Perusahaan (dahulu Pelindo III) berhak untuk memungut tarif jasa penggunaan APBS berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 tahun.

Berdasarkan Surat dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 tanggal 5 November 2015, alur baru APBS dinyatakan siap beroperasi. Pemungutan tarif jasa pengguna APBS dilakukan 2 hari setelah sosialisasi kepada para pengguna APBS.

h) Teluk Lamong

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian penyediaan dan pelayaran pengusahaan jasa kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong (TMTL) No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015 (Perjanjian Konsesi TMTL) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2015. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan (dahulu Pelindo III) memperoleh hak pengusahaan TMTL untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, kegiatan pemeliharaan, dan kegiatan pengoperasian dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi tidak dapat dialihkan ke pihak lain dan berlaku selama 72 tahun sejak diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP.001/3/20/DPPL-14 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong pada tanggal 11 November 2014.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

g) Alur Pelayaran Barat Surabaya (continued)

- *For the APBS utilization services provision, the Company (formerly Pelindo III) has the right to collect the APBS utilization service fee based on the mechanism required by the Law. The tariff is valid for at least 2 years.*

Based on the Letter from Tanjung Perak Surabaya Main Port Authority Office No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 dated November 5, 2015, the new APBS channel was declared ready to operate. The collection of APBS service fee was carried out 2 days after the socialization to APBS users.

h) Teluk Lamong

The Company (formerly Pelindo III) entered into an agreement on the provision of port services in Terminal Multipurpose Teluk Lamong (TMTL) No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015 (TMTL Concession Agreement) with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 19, 2015. Based on this agreement, the Company (formerly Pelindo III) obtained the TMTL utilization rights for the construction and the development of port facilities, maintenance activities, and the operational activities with the following conditions:

- *The Concession Agreement is not transferrable to another party and is valid for 72 years since the issuance of the General Director of Sea Transportation's Letter No. PP.001/3/20/DPPL-14 concerning the Operational Trials at Teluk Lamong Terminal on November 11, 2014.*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

h) Teluk Lamong (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan pengusahaan TMTL kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap 3 bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan pertama per triwulannya.

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib melaporkan laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan konsesi TMTL kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap bulan dan setiap tahun, dengan laporan tahunan diaudit oleh auditor independen.

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib mengembalikan aset konsesi TMTL yang berupa dermaga kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya Perjanjian Konsesi.

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) berhak melakukan kerja sama dengan pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan konsesi TMTL dengan pemberitahuan tertulis kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) berhak untuk menetapkan tarif awal jasa kepelabuhanan, melakukan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan, serta mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhanan.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

h) Teluk Lamong (continued)

- *The Company (formerly Pelindo III) is required to pay concession revenue amounting to 2.5% of the TMTL's utilization service provision activities' gross revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia every 3 months, no later than 15 days in the first month of each quarter.*

- *The Company (formerly Pelindo III) is required to report TMTL's operational performance and concession revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia monthly and annually, with the annual report audited by an independent auditor.*

- *The Company (formerly Pelindo III) is required to return TMTL's concession assets in the form of port to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia as the Concession Agreement ends.*

- *The Company (formerly Pelindo III) has the right to cooperate with other competent parties to carry out TMTL's concession activities with written notification to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.*

- *The Company (formerly Pelindo III) has the right to determine the initial rates of port services, make amendments to the port services rate, and apply and collect the port services rate payment.*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

i) Tanjung Perak - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo III)

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan yang diusahakan No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015 dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak pada tanggal 9 November 2015. Perjanjian ini telah diubah dengan Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atas Perjanjian Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan No. HK.107/01/12/OP.Tpr-16 dan No. HK.0502/437/P.III-2016 tanggal 14 Oktober 2016. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo III) memperoleh hak pengusahaan di area yang terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan milik Perusahaan (dahulu Pelindo III) yang telah diusahakan untuk kegiatan jasa kepelabuhanan dengan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 30 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi dan diperpanjang selama area konsesi masih diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo III) sesuai peraturan yang berlaku.

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan pengusahaan di area konsesi setiap 3 bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.
- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib melaksanakan audit laporan keuangan tahunan secara menyeluruh dengan auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan (dahulu Pelindo III).

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

i) Tanjung Perak - Port Operated by The Company (formerly Pelindo III)

The Company (formerly Pelindo III) entered into an agreement on the port services provision in the Commercial Ports No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015 with Tanjung Perak Main Port Authority Office on November 9, 2015. This agreement was updated with the Additional Agreement (Addendum) on the Port Services Provision Agreement in the Ports No. HK.107/01/12/OP.Tpr-16 and No. HK. 0502/437/P.III-2016 dated October 14, 2016. Based on this agreement, the Company (formerly Pelindo III) obtained the rights to commercially utilize the locations where the Company's (formerly Pelindo III) terminals and port facilities are located and operated with the following conditions:

- *The Concession Agreement is valid for 30 years since the signing of the Concession Agreement and is extended as long as the concession areas are still operated by the Company (formerly Pelindo III) in accordance with the applicable regulations.*
- *The Company (formerly Pelindo III) is required to pay concession revenue amounting to 2.5% of the commercial port utilization activities' gross revenue obtained from the concession area every 3 months, no later than the 15th of the first month of each quarter.*
- *The Company (formerly Pelindo III) is required to carry out annual financial statement audits with independent auditors appointed by the Company (formerly Pelindo III).*

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

i) Tanjung Perak - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo III) (lanjutan)

- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo III) berhak diantaranya menetapkan dan memungut tarif pelayanan jasa di area konsesi serta melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- Lahan dan aset di dalam area konsesi yang telah berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tercatat sebagai aset Perusahaan (dahulu Pelindo III), tetap sebagai hak pengelolaan dan/atau aset Perusahaan (dahulu Pelindo III).
- Apabila Perusahaan (dahulu Pelindo III) telah melakukan kerja sama operasi dengan mitra kerja sama sebelum Perjanjian Konsesi ditandatangani, maka perjanjian tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Kegiatan pengusahaan dari perjanjian kerja sama tersebut diperhitungkan sebagai komponen pendapatan konsesi dengan mekanisme yang disepakati dan diatur sendiri antara Perusahaan (dahulu Pelindo III) dan mitra kerja sama.

j) Makassar - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo IV)

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) mengadakan perjanjian kegiatan pengusahaan kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (Otoritas Pelabuhan Makassar) melalui perjanjian No. 1/HK.301/6/DUT-2015 tanggal 9 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Konsesi No. 5/HK.301/6/DUT-2017 tanggal 24 Februari 2017.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memperoleh hak pengusahaan di area yang terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan milik Perusahaan yang telah diusahakan untuk kegiatan jasa kepelabuhanan dengan ketentuan sebagai berikut:

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

i) Tanjung Perak - Port Operated by The Company (formerly Pelindo III) (continued)

- *Based on the Concession Agreement, the Company (formerly Pelindo III) has the right to determine and collect the service fee in the concession area and to cooperate with other parties.*
- *The land and assets within the concession area whose utilization rights and/or ownerships are under the Company's (formerly Pelindo III) name remain as the Company's (formerly Pelindo III) utilization rights and/or assets.*
- *If the Company (formerly Pelindo III) had entered into cooperation agreements before the Concession Agreement was signed, the cooperation agreements are still valid until their expiration date. The cooperation agreements' commercial activities are to be included as concession revenue components with mechanisms agreed and regulated by the Company (formerly Pelindo III) and the cooperation partners.*

j) Makassar - Port Operated by The Company (formerly Pelindo IV)

The Company (formerly Pelindo IV) entered into an agreement on the port services provision in the commercial port through agreement No. 1/HK.301/6/DUT-2015 dated November 9, 2015 with Makassar Main Port Authority Office (Makassar Port Authority) as amended with the Addendum to the Concession Agreement No. 5/HK.301/6/DUT-2017 dated February 24, 2017.

Based on such agreement, the Company (formerly Pelindo IV) obtained the rights to commercially utilize the location where the Company's terminals and port facilities are located and operated with the following conditions:

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

j) Makassar - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo IV) (lanjutan)

- Perjanjian konsesi berlaku selama 30 tahun sejak penandatanganan dan diperpanjang selama area konsesi masih diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo IV).

- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan jasa kepelabuhanan atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan di area konsesi dan dibayarkan setiap 3 bulan selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan pertama triwulan.

- Lahan dan/atau bangunan di area konsesi yang berstatus hak pengelolaan atas nama Perusahaan (dahulu Pelindo IV) diberikan kepada Otoritas Pelabuhan Makassar untuk kepentingan gedung kantor.

- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) diantaranya dapat menetapkan dan memungut tarif pelayanan jasa di area konsesi serta melakukan kerjasama dengan pihak lain.

k) Makassar New Port

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) mengadakan perjanjian pengusahaan di Terminal Petikemas Makassar *New Port* (MNP) Tahap IA No. 12/HK.301/3/DUT-2015 tanggal 19 Mei 2015 dengan Otoritas Pelabuhan Makassar.

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memperoleh hak atas pengusahaan MNP untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, kegiatan pemeliharaan dan kegiatan pengoperasian dengan ketentuan sebagai berikut:

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

j) Makassar - Port Operated by The Company (formerly Pelindo IV) (continued)

- *The concession agreement is valid for 30 years since the signing of the concession agreement and is extended as long as concession areas are still operated by the Company (formerly Pelindo IV).*

- *The Company (formerly Pelindo IV) is required to pay the concession fee amounting to 2.5% of the revenues from commercial port utilization activities as stipulated in amendment agreement that obtained from concession area and shall pay at every 3 months no later than 25th of the first month of each quarter.*

- *The land and/or building are under the Company's (formerly Pelindo IV) ultilization right within the concession area is transferred to Makassar Port Authority for their office buildings.*

- *The Company (formerly Pelindo IV) has the right to determine and collect the service fee in the concession area and to cooperate with other parties.*

k) Makassar New Port

The Company (formerly Pelindo IV) entered into an agreement on the port services provision in the Container Terminal Makassar New Port (MNP) Phase IA No. 12/HK.301/3/DUT-2015 dated May 19, 2015 with Makassar Port Authority.

The Company (formerly Pelindo IV) obtained the MNP utilization rights for the construction and the development of port facilities, maintenance activities and the operational activities with the following conditions:

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

k) Makassar New Port (lanjutan)

- Perjanjian konsesi ini berlaku selama 70 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.
- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) melakukan kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, kegiatan pemeliharaan dan kegiatan pengoperasian terminal sepanjang 320 meter.
- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) diwajibkan untuk membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari persentase pendapatan kotor dari pelaksanaan pengusahaan objek konsesi. Pembayaran pendapatan konsesi dilakukan setelah MNP ditetapkan siap beroperasi secara komersial sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan perjanjian ini.
- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) diwajibkan untuk mengembalikan aset konsesi MNP kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya perjanjian konsesi tersebut.

Berdasarkan surat yang diterbitkan Perusahaan (dahulu Pelindo IV) pada tanggal 27 Agustus 2020 No. 8/HK.304/2/DUT-2020 kepada Otoritas Pelabuhan Makassar, Perusahaan (dahulu Pelindo IV) sedang dalam proses pengajuan permohonan pemberian konsesi atas Terminal MNP tahap IB dan IC. Perusahaan (dahulu Pelindo IV) telah memperoleh Izin Reklamasi Pengembangan Terminal MNP keseluruhan tahap I berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. KP 644 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk Melakukan Pekerjaan Reklamasi Perairan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pengajuan pemberian konsesi masih dalam proses di Otoritas Pelabuhan Makassar.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

k) Makassar New Port (continued)

- *The concession agreement is valid for 70 years since the signing of the concession agreement.*
- *The Company (formerly Pelindo IV) is providing the construction and the development of port facilities, maintenance activities, and the operational activities of the 320 meter long terminal.*
- *The Company (formerly Pelindo IV) is required to pay the concession fee amounting to 2.5% of the gross income percentage from commercial port utilization activities. The concession fee will be paid after MNP is stated ready for commercial operation in accordance with regulation and laws.*
- *The Company (formerly Pelindo IV) is allowed to cooperate with other parties as long as it is not conflicting with this concession agreement.*
- *The Company (formerly Pelindo IV) is required to return the MNP's concession assets to the Republic of Indonesia Ministry of Transportation as the concession agreement ends.*

Based on letter issued by the Company (formerly Pelindo IV) dated August 27, 2020 No. 8/HK.304/2/DUT-2020 addressed to Makassar Port Authority, the Company (formerly Pelindo IV) is still in the process of requesting the concession rights of MNP Terminal phase IB and IC. The Company (formerly Pelindo IV) has obtained a Development Reclamation Permit for MNP Terminal phase I, based on decision from Minister of Transportation No. KP 644 Year 2017 regarding Reclamation Work Permission Granting for PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) at Makassar Port Working Area and Port Area of Interest, South Sulawesi Province. Until the completion date of the consolidated financial statement, this concession rights request is still in the process at Makassar Port Authority.

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

l) Gresik

Berdasarkan Perjanjian Konsesi No. 02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, BMS dan Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan Kelas II Gresik mengikatkan diri dalam perjanjian konsesi tentang kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan terminal manyar di pelabuhan Gresik dengan jangka waktu selama 76 tahun terhitung dari sejak tanggal ditandatangani perjanjian. Pendapatan konsesi pada area konsesi Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sebesar 2,75% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di area konsesi.

m) Labuan Bajo

Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebidang tanah seluas 36.333m2 yang terletak di Keluarahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanah tersebut digunakan untuk area pembangunan fasilitas penunjang operasional dan dermaga curah cair Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Pada tanggal 31 Desember 2020, tanah tersebut diklasifikasikan sebagai aset tetap oleh Perusahaan (dahulu Pelindo III).

Perusahaan (dahulu Pelindo III) menerima surat Menteri BUMN No. S-747/MBU/09/2021 tanggal 29 September 2021 tentang persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap tanah di Terminal *Multipurpose* Pelabuhan Labuan Bajo. Dalam hal ini, Perusahaan (dahulu Pelindo III) melakukan pelepasan hak atas tanah kepada Negara Republik Indonesia c.q Kementerian Perhubungan dalam rangka pemanfaatan barang milik negara melalui penerbitan konsesi. Berdasarkan surat tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2021 Perusahaan melakukan reklasifikasi aset tanah Labuan Bajo ke aset takberwujud sebesar Rp79.905.949.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

l) Gresik

Based on the Concession Agreement No. 02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 dated December 15, 2017, BMS and the Class II of Gresik Port Authority and Authority Office bind themselves in a concession agreement concerning the activities of port terminal services in the port of Gresik for a period of 76 years from the date of the signing of the agreement. The concession revenue of Terminal Manyar in Gresik Port is 2.75% of the gross revenue of port service operations in the concession area.

m) Labuan Bajo

The Company (formerly Pelindo III) owns a plot of land of 36,333m2 located Wae Kelambu, Komodo District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The land is used for the construction of operational support facilities and a liquid bulk dock at the Wae Kelambu Multipurpose Terminal at Labuan Bajo Port. As of December 31, 2020, the land is classified as fixed asset by the Company (formerly Pelindo III).

The Company (formerly Pelindo III) received a Decree of the Minister of SOE No. S-747/MBU/09/2021 dated September 29, 2021 regarding the approval for the write-off of land fixed assets at the Labuan Bajo Multipurpose Port. The Company (formerly Pelindo III) relinquished land rights to the Republic of Indonesia c.q the Ministry of Transportation in relation to utilizing state property through the issuance of concessions. Based on that decree, as of October 1, 2021, the Company (formerly Pelindo III) reclassified the land assets of Labuan Bajo to intangible assets amounting to Rp79,905,949.

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

m) Labuan Bajo (lanjutan)

Perusahaan (dahulu Pelindo III) telah mengadakan perjanjian No. HK.201/4/9/DJPL/ 2021 dan No. HK.05.01/5/REG3-2021 dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan pada tanggal 8 November 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo III) berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan di area Pelabuhan Labuan Bajo dengan skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN). Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani.

n) Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung

Pada tanggal 13 Februari 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan PMT menandatangani Perjanjian Penugasan Pembangunan dan Pengelolaan Terminal *Multipurpose* Kuala Tanjung Serta Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan ("Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung") Nomor: PP.21/1/4/PI-15.TU dan Nomor: PP.21/1/3/PMT-15 dimana PMT mendapatkan penugasan dari Perusahaan (dahulu Pelindo I) untuk (i) melakukan pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan terminal *multipurpose* Kuala Tanjung serta (ii) melakukan pemanfaatan dan pengelolaan lahan.

Pada tanggal 10 Februari 2016, Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan PMT menandatangani Perjanjian Bangun Guna Serah No. PP.21/1/3/PI-16.TU dan No. PP.21/1/21/PMT-16 ("Perjanjian BGS") dimana Perusahaan (dahulu Pelindo I) memberikan hak kepada PMT untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan lahan selama jangka waktu Perjanjian BGS, dengan mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

m) Labuan Bajo (continued)

The Company (formerly Pelindo III) entered into an agreement No. HK.201/4/9/DJPL/2021 and No. HK.05.01/5/REG3-2021 with Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation on November 8, 2021. Based on the agreement, The company (formerly Pelindo III) has the right to operate and carry out port service activities and port-related services in Labuan Bajo Port area under the State Property Utilization Cooperation (KSP-BMN) scheme. The agreement is valid for a period of 50 (fifty) years from the date of the signing of the agreement.

n) Kuala Tanjung Assignment Agreement

On February 13, 2015, the Company (formerly Pelindo I) and PMT signed Assignment Agreement of Construction and Management of the Kuala Tanjung Multipurpose Terminal and Land Utilization and Management ("Kuala Tanjung Assignment Agreement") No.PP.21/1/4/PI-15.TU and No: PP.21/1/3/ PMT-15 whereas PMT received an assignment from the Company (formerly Pelindo I) to (i) construct, finance and manage the Kuala Tanjung multipurpose terminal and (ii) conduct land utilization and management.

On February 10, 2016, the Company (formerly Pelindo I) and PMT signed Build Operate Transfer Agreement ("BOT Agreement") No. PP.21/1/3/PI-16.TU and No. PP.21/1/21/PMT-16 whereas the Company (formerly Pelindo I) grants the right to PMT to use and manage land during the BOT Agreement, with the mechanism for land utilization and management as regulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2014 concerning Guidelines for the Utilization of Fixed Assets of State-Owned Entities.

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

n) Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung (lanjutan)

Jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung, yaitu sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 12 Februari 2065.

o) Perjanjian Penugasan Belawan Fase II

Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan PTP menandatangani Perjanjian Kerjasama Penugasan Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Petikemas Belawan Fase II ("Perjanjian Penugasan Belawan Fase II") No. PR.02/3/23/PI-14.TU dan No. US.10/1/6/PTP-14 dimana PTP mendapatkan penugasan dari Perusahaan (dahulu Pelindo I) untuk melakukan pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase II.

Jangka waktu Perjanjian Penugasan Belawan Fase II adalah 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Penugasan Belawan Fase II, yaitu sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2064.

p) Gilimas

Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan (dahulu Pelindo III) sedang dalam proses pengajuan permohonan hak konsesi atas Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar. Perusahaan (dahulu Pelindo III) memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang Rencana Kegiatan Pengembangan TPGML berdasarkan keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/2016 tanggal 11 Mei 2016. Sesuai dengan prosedur, BPKP harus melakukan review di mana berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP, No.LR860/PW13/2/2017 tanggal 2 November 2017, salah satu yang masih dalam proses pembahasan adalah jangka waktu konsesi selama 59 tahun, yang masih dikaji ulang kembali akibat adanya penambahan investasi di masa depan.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

n) Kuala Tanjung Assignment Agreement (continued)

The term of the agreement is 50 (fifty) years from the signing of the Kuala Tanjung Assignment Agreement, which is from February 13, 2015 to February 12, 2065.

o) Belawan Phase II Assignment Agreement

On October 31, 2014, the Company (formerly Pelindo I) and PTP signed Agreement of Construction and Management Assignment of the Container Terminal Belawan Phase II ("Belawan Phase II Assignment Agreement") No. PR.02/3/23/PI-14.TU and No. US.10/1/6/PTP-14 whereas PTP assigned by the Company (formerly Pelindo I) to engage in construction, funding and operation of the container terminal Belawan Phase II.

The period of the Belawan Phase II Assignment Agreement is 50 (fifty) years from the signing of Belawan Phase II Assignment Agreement, which is from October 31, 2014 until October 30, 2064.

p) Gilimas

As of the date of the financial statements, the Company (formerly Pelindo III) is still in the process of requesting the concession rights for Terminal Gilimas in Lembar Port. The Company (formerly Pelindo III) obtained an Utilization Permit for Development Activity Plan TPGML based on the decision of the West Nusa Tenggara Investment Coordinating Board for Integrated Investment and Licensing Agency No. 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/2016 dated May 11, 2016. In accordance with the procedure, BPKP must conduct a review which is based on the BPKP Review Report, No.LR860/PW13/2/2017 dated November 2, 2017, one of which is still in the discussion process is the concession period of 59 years, which is still being reviewed, due to additional investment in the future.

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

q) Benoa

Perusahaan (dahulu Pelindo III) sedang dalam proses pengajuan permohonan hak konsesi atas area pengembangan Pelabuhan Benoa. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa ("KSOP Kelas II Benoa") No. AL.301/1/10/KSOP.BNA.2020 tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo III) diminta menyampaikan studi kelayakan terkait rencana konsesi pengusahaan area pengembangan Pelabuhan Benoa serta penguasaan lahan yang akan dikonsesikan kepada KSOP Kelas II Benoa. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan (dahulu Pelindo III) sedang dalam proses memenuhi persyaratan tersebut.

r) Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Pada tanggal 29 Januari 2007, CTP menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cibitung-Cilincing No. 01/PPJT/I/Mn/ 2007 dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perjanjian tersebut telah diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilincing antara CTP dan Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") dari notaris Rina Utami Djauhari, S.H., notaris di Jakarta, No. 10 tanggal 15 Agustus 2021. Perjanjian telah beberapa kali diAmendemen, terakhir berdasarkan Akta No. 3 tanggal 8 Desember 2020 dari Rina Utami Djauhari, Notaris di Jakarta, tentang Amendemen X Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Berdasarkan perjanjian tersebut CTP bertanggung jawab untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan. Jangka waktu perjanjian konsesi adalah 50 (lima puluh) tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja ("SPMK") tanggal 23 November 2018. Setelah berakhirnya masa konsesi, CTP harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT dalam kondisi terpelihara baik.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

q) Benoa

The Company (formerly Pelindo III) is still in the process of requesting the concession rights for Benoa Port development area. Based on the Letter of the Head of the Benoa Class II Port Authority ("KSOP Kelas II Benoa") No. AL.301/1/10/KSOP.BNA.2020 dated December 16, 2020, the Company (formerly Pelindo III) was asked to submit a feasibility study related to the concession plan for the Benoa Port development area as well as land tenure to be concessioned to the KSOP Kelas II Benoa. Until the completion date of the consolidated financial statements, the Company (formerly Pelindo III) is in the process of complying the requirements.

r) Toll Road Cibitung-Cilincing

On January 29, 2007, CTP entered into Operation Agreement of Cibitung - Cilincing Toll Road No. 01/PPJT/I/Mn/2007 with the Government of Indonesia through Ministry of General Works and Public Housing. The agreement has been amended and restated through Deed of Operation Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road between CTP and Toll Road Regulatory Body ("BPJT") from notary Rina Utami Djauhari, S.H., notary in Jakarta, No. 10 dated August 15, 2021. The agreement has been amended several times, lastly based on Deed No. 3 dated December 8, 2020 from Rina Utami Djauhari, Notary in Jakarta, regarding Amendment X of Operation Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road.

Based on the agreement, CTP is responsible for implementing the toll road operation, including funding, technical planning, construction, operation and maintenance in accordance with the terms of the agreement and laws and regulations. The Term of the concession agreement is 50 (fifty) years in since the issuance of Instruction Letter of Work Commencement ("SPMK"). After the end of concession period, CTP should transfer the toll road to BPJT in a well maintained condition.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

a) Perjanjian Pembangunan - PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP)

Pada tanggal 11 September 2012, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengadakan Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/17/2/PI.II-12, dengan PP yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian No. HK.566/19/11/PI.II-13 tanggal 6 Desember 2013. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 27 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 34 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1B selama 50 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.

Pada tanggal 23 November 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya seluruh pekerjaan menjadi sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.075.138.987 dan USD265.973.774 termasuk pajak pertambahan nilai.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a) Construction Agreement - PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP)

On September 11, 2012, the Company (formerly Pelindo II) entered into Agreement of Constructing North Kalibaru Container Terminal Phase I Tanjung Priok Port No. HK.566/17/2/PI.II-12 with PP which was extended with Agreement No. HK.566/19/11/PI.II-13 dated December 6, 2013. The period of construction work is as follows:

- *Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 27 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 34 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Construction Phase 1B for 50 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*

On November 23, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 which changed among others period of work activities and total project cost to become as follows:

- *Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Total project cost to amount to Rp7,075,138,987 and USD265,973,774 including value added tax.*

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Perjanjian Pembangunan - PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP) (lanjutan)

Pada tanggal 28 November 2016, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) ditetapkan selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter) ditetapkan selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan. Disamping itu, pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS harus dilakukan pada tahap 1A, tetapi serah terima pekerjaan pengerukan tersebut dilakukan bersamaan dengan serah terima seluruh pekerjaan pengerukan.
- Pekerjaan Tahap 1B ditetapkan selama 64 bulan sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III ini berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Construction Agreement - PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP) (continued)

On November 28, 2016, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 which changed among others regarding period of work activities and total project cost to become as follows:

- *Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Construction Phase 1A2 (451-850 meters) for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields. In addition, dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS should be conducted on phase 1A, however the handover of dredging should be conducted simultaneously with the handover of whole dredging.*
- *Construction Phase 1B for 64 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *The Additional Agreement (Addendum) III is effective from the day and date it is signed.*

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Perjanjian Pembangunan - PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP) (lanjutan)

Pada tanggal 18 November 2019, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) IV No. PD.01/18/11/1/ADP/UT/PI.II-19 dimana mengatur perubahan diantaranya:

- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.311.508.551 dan USD278.984.957 temasuk nilai penyesuaian harga terhadap pekerjaan pemancangan, pengerukan dan reklamasi periode Oktober 2013 sampai dengan Desember 2017 dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) IV ini berlaku terhitung sejak tanggal 28 Januari 2018.

Pada tanggal 14 Februari 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) V No. PD.01/14/2/1/ADP/UT/PI.II-20 dimana mengatur perubahan diantaranya:

- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.624.575.863 dan USD280.244.426 temasuk nilai penyesuaian harga terhadap klaim, pekerjaan tambah/kurang dan penyesuaian harga all item selain 3 item pekerjaan (pemancangan, pengerukan dan reklamasi) dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) V ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 18 Februari 2020.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) VI No. PD.01/18/5/1/PBT/UT/PI.II-20 dimana mengatur perubahan diantaranya:

Pada tanggal 14 Februari 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) V No. PD.01/14/2/1/ADP/UT/PI.II-20 dimana mengatur perubahan diantaranya:

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Construction Agreement - PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP) (continued)

On November 18, 2019, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into an Additional Agreement (Addendum) IV No. PD.01/18/11/1/ADP/UT/PI.II-19 which regulates changes including:

- *The cost of all work is Rp7,311,508,551 and USD278,984,957 including the value of price adjustments for the piling, dredging and reclamation works for the period October 2013 to December 2017 and including Value Added Tax (VAT) of 10%.*
- *This Addendum IV is effective as of January 28, 2018.*

On February 14, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into an Additional Agreement Letter (Addendum) V No. PD.01/14/2/1/ADP/UT/PI.II-20 which regulates changes including:

- *The cost of all work is Rp7,624,575,863 and USD280,244,426 including the value of price adjustments to claims, added/less works and price adjustments for all items other than 3 work items (embedding, dredging and reclamation) and including Value Added Tax (VAT) of 10%.*
- *This Additional Agreement Letter (Addendum) V is valid for 3 (three) months starting from February 18, 2020.*

On May 18, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into an Additional Agreement (Addendum) VI No. PD.01/18/5/1/PBT/UT/PI.II-20 which regulates changes including:

On February 14, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into an Additional Agreement Letter (Addendum) V No. PD.01/14/2/1/ADP/UT/PI.II-20 which regulates changes including:

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Perjanjian Pembangunan - PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP) (lanjutan)

- Mengenai penambahan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Perjanjian Tambahan (Addendum) V.
- Perjanjian Tambahan (Addendum) VI ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2020.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) VII No.PD.01/18/8/1/PBT/UT/PI.II-20 dimana mengatur perubahan diantaranya sebagai berikut:

- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp5.909.779.468 dan USD225.967.812 termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Perjanjian Tambahan (Addendum) VII ini berlaku selama 21 (dua puluh satu) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani yaitu 18 Agustus 2020.

b) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI

Perusahaan (dahulu Pelindo II) mendirikan PPI pada tanggal 5 November 2012 (Catatan 1b). Berdasarkan Surat Perusahaan (dahulu Pelindo II) No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menginstruksikan PPI untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada PPI. PPI juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) akan dialihkan kepada PPI dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan (dahulu Pelindo II) kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan PPI agar segera memproses pekerjaan *Technical*, *Legal*, *Financial*, *Tax* dan *Insurance Advisor*.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Construction Agreement - PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP) (continued)

- *Regarding the addition of a period of 3 (three) months from the end of the term of the Additional Agreement (Addendum) V.*
- *This Additional Agreement (Addendum) VI is valid for 3 (three) months starting from May 19, 2020.*

On August 18, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into an Additional Agreement (Addendum) VII No. PD.01/18/8/1/PBT/UT/PI.II-20 which regulates changes including the following:

- *The total cost of the work was Rp5,909,779,468 and USD225,967,812 including value added tax. This Additional Agreement (Addendum) VII is valid for 21 (twenty one) months from the date it was signed, namely August 18, 2020.*

b) Project Implementation Agreement - PPI

The Company (formerly Pelindo II) established PPI on November 5, 2012 (Note 1b). Based on Letter of the Company (formerly Pelindo II) No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company (formerly Pelindo II) instructed PPI to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal from PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's (formerly Pelindo II) contractor to PPI. PPI was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company (formerly Pelindo II) shall be assigned to PPI in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. The Company (formerly Pelindo II) then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed PPI to process the Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor works.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI (lanjutan)

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) memberikan kepada PPI hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum PPI menandatangani COA (Catatan 50d).

Sesuai dengan PIA, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada PPI. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada PPI.

Pada tanggal 6 Agustus 2018, novasi tidak jadi dilaksanakan dan diganti menjadi sewa/*site lease* yang dituangkan dalam perjanjian perubahan PIA dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai perubahan nilai dan jangka waktu sewa.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Implementation Agreement - PPI (continued)

On May 30, 2013, the Company (formerly Pelindo II) and PPI signed Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company (formerly Pelindo II) granted to PPI the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company (formerly Pelindo II) and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company (formerly Pelindo II) and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which PPI entered into the COA (Note 50d).

In accordance with the PIA, the Company (formerly Pelindo II) and PPI shall then identify the existing agreements signed by the Company (formerly Pelindo II) and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to PPI. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to PPI.

As of August 6, 2018, the novation was not carried out and was changed to a lease/site lease as outlined in the PIA amendment agreement and has undergone several changes recently on December 23, 2020 regarding changes in the value and term of the lease.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani surat Perjanjian Tambahan (Addendum) V No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21, yang mengatur mengenai:

- pengubahan Skema Kerja Sama yang sebelumnya Bangun Kelola Serah menjadi *site lease*/sewa;
- jangka waktu yang sebelumnya 70 (tujuh puluh) tahun menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
- jangka waktu kerjasama terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2043.

c) Perjanjian Pengelolaan Proyek - PPI

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) menunjuk PPI untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan.

PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada keuntungan untuk PPI atas penyediaan jasa ini.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Berita Acara No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 dan No. BAC-400-09102020-012 tentang Kesepakatan Bersama Rencana Pembaruan Manajemen Proyek Untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Implementation Agreement - PPI (continued)

On September 30, 2021, the Company and PPI (formerly Pelindo II) signed a letter of Additional Agreement (Addendum) V No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21, which regulates:

- *changing the Cooperation Scheme which was previously Build Manage Handover to site lease;*
- *the previous period of 70 (seventy) years to 23 (twenty three) years; and*
- *the cooperation period is from October 1, 2020 to September 30, 2043.*

c) Project Management Agreement- PPI

On February 24, 2014, the Company (formerly Pelindo II) and PPI signed Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), in which the Company (formerly Pelindo II) appointed PPI as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works.

The PMA is valid until the end of the project. There is no profit for PPI for providing this service.

On October 9, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PPI signed the Minutes No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 and No. BAC-400-09102020-012 concerning Mutual Agreement on Project Management Renewal Plan for Construction Work on Phase 1 of North Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok Port.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Pengelolaan Proyek - PPI (lanjutan)

Adapun maksud dalam Berita Acara ini adalah kesepakatan bersama untuk melakukan pembaruan terhadap PMA karena PIA telah mengalami perubahan skema kerja sama sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap PMA. Maka, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Baru yang akan menggantikan PMA.

Pada tanggal 18 Desember 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I di Pelabuhan Tanjung Priok No.PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 dan No.PJK-621-18122020-006.

Pada tanggal 29 April 2019, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 dan No. PJK-KJG-06-29042019-010.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No.KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 dan No.PJK-621-23102020-009.

Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No.PD.05.01/29/9/12/HPS/TEK/PI.II-21 dan No.PJK-621-29092021-013.

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan PPI dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan terminal Kijing pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Project Management Agreement - PPI (continued)

The intention in this Minutes is a mutual agreement to make updates to PMA because PIA has undergone a change in the cooperation scheme so that adjustments need to be made to PMA. So, the Company (formerly Pelindo II) and PPI agreed to make a New Cooperation Agreement that would replace PMA.

On December 18, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PPI agreed on the Agreement on the Construction of Phase I of the North Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port No. PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/ PI.II-20 and No.PJK-621-18122020-006.

On April 29, 2019, the Company (formerly Pelindo II) and PPI agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 and No. PJK-KJG-06-29042019-010.

On October 23, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PPI agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No.KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 and No.PJK-621-23102020-009.

On September 29, 2021, the Company (formerly Pelindo II) and PPI agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. PD.05.01/29/9/12/HPS/TEK/PI.II-21 and No. PJK-621-29092021-013.

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and PPI in performing construction and development cooperation of Kijing terminal Pontianak port in West Kalimantan.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1

Berdasarkan PIA (Catatan 50b), pada tanggal 9 Juni 2014, PPI dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana PPI menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada PPI.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 ("SAA"), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan. PPI harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya. Pada tanggal 17 September 2014, PPI menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1 dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 28).

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Construction and Operation Agreement - NPCT1

Based on PIA (Note 50b), on June 9, 2014, PPI and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which PPI appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meters quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to PPI.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meters quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meters quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 ("SAA"), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area. PPI shall handover the 450 meters quay and the 850 meters quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meters quay up to the commencement of operation of 850 meters quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter. On September 17, 2014, PPI received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1 and are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (Note 28).

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, PPI menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, PPI menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan PPI pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh PPI kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

Pada tanggal 24 Juni 2016, PPI menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1 dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 28).

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial.

Pada tanggal 13 Desember 2016, PPI dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Penyediaan akses oleh PPI kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

The handover of 450 meters quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, PPI received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, PPI responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

In addition, the handover of 850 meters quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by PPI on January 31, 2016, did not occur as well.

450 meters and 850 meters quays have been handed over by PPI to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

On June 24, 2016, PPI received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1 and are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (Note 28).

On August 18, 2016, 450 meters quay has started its commercial operation.

On December 13, 2016, PPI and NPCT1 signed a Letter of Acceptance which regulates items as follows:

- *Provision of access to certain areas within 850 meters quay from PPI to NPCT1;*
- *Agreement on the date of commencement of operations of 450 meters quay, which was August 18, 2016;*
- *Site Works Confirmation Notice for 850 meters quay was issued on October 16, 2016 with note on certain outstanding works;*

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
  - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
  - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan pressure tank dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
  - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
  - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
  - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.

- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;

- Jika PPI *Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;
- Jika terdapat salah satu *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh PPI *Undertaking* telah diselesaikan.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

- *PPI will complete the following works within the time specified for each item:*
  - *Strengthening of north side by March 16, 2017;*
  - *Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;*
  - *Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;*
  - *Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;*
  - *Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.*

- *Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;*
- *Agreement that the date of commencement of operations of 850 meters quay will be no later than March 16, 2017;*
- *If PPI Undertakings have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;*

- *If any one of the PPI Undertakings has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 meters quay, which is USD7,000,000 until the date that all PPI Undertakings have been completed.*

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 16 Januari 2018, PPI dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
  - Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
  - Pengoperasian *Go-live* atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
  - Pengoperasian *Go-live* OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
  - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
  - Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018;
  - Tambahan area *buffer* untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
  - Penyediaan fasilitas untuk petikemas *reefer* dan *cooling room* tanggal 30 April 2018;
  - Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
  - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
  - Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019;
  - Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, PPI akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.
- Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On January 16, 2018, PPI and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows:

- *PPI will complete the following works within the time specified for each item:*
  - *East area exit access road of CGA by December 15, 2017;*
  - *Go-live IT system operation by December 31, 2017;*
  - *Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;*
  - *Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;*
  - *Entry access road west side CGA by February 28, 2018;*
  - *Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018;*
  - *Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018;*
  - *Reparation work of exit access road (north side behandle dockyard at CGA) by April 30, 2018;*
  - *Reparation of north side behandle dockyard at CGA by May 31, 2018;*
  - *Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019;*
  - *If the above works have not been completed on the predetermined dates, PPI will pay USD5,000/day for each work.*
- *Agreement on the Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.*

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

PPI telah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diminta dalam MOA sebelum batas waktu yang ditentukan, walaupun masih terdapat 2 (dua) item yang sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian belum digunakan karena terdapat kendala administrasi yang perlu diselesaikan antara Perusahaan dengan kontraktor pelaksana pekerjaan.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, telah disepakati bersama antara PPI dan PP terkait kelanjutan 2 (dua) *item* pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian, dimana jangka waktu pelaksanaan untuk 2 *item* pekerjaan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2022.

Pada tanggal 2 November 2020, PPI membuat kesepakatan bersama dengan NPCT1 (SMA) mengenai sewa lokasi dimuka/*Advance Site Rent* (ASR) yang menjelaskan NPCT1 menyetujui untuk membayar kepada PPI beberapa bagian dari sewa lokasi di muka (ASR) sebesar USD23.500.000 meskipun penyerahan CY 57 meter belum dipenuhi oleh PPI. Sesuai dengan ketentuan SMA, PPI diharuskan mengirimkan pemberitahuan kepada NPCT1 tentang dimulainya pelaksanaan pembangunan CY 57 meter. Pada tanggal 20 April 2020, pembangunan CY 57 meter telah dilanjutkan kembali dan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2022.

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja antara Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPI (Catatan 1b) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Amendemennya adalah sebagai berikut:

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

PPI has succeeded in completing all requested work within the MOA before the specified time limit, although there are still 2 (two) items that have not been used until completion of the consolidated financial statements because there are administrative constraints that need to be resolved between the Company and the contractor implementing the work.

On 18 August 2020, it was mutually agreed between the PPI and PP regarding the continuation of 2 (two) work items as outlined in the Agreement Letter, where the implementation period for 2 work items will end on May 18, 2022.

On November 2, 2020, PPI entered into a joint agreement with NPCT1 (SMA) regarding Advance Site Rent (ASR) which explained that NPCT1 agreed to pay PPI some part of the upfront location lease (ASR) of USD23,500,000 despite submission CY 57 meters has not been fulfilled by PPI. In accordance with SMA regulations, PPI is required to send a notification to NPCT1 regarding the commencement of the construction of the 57 meter CY. On April 20, 2020, the construction of the 57 meter CY has been resumed and is targeted for completion in May 2022.

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

The Master Cooperation Agreement between the Company (formerly Pelindo II) and HPI (Note 1b) sets out the terms and conditions under which Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) is operating.

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

Perusahaan (dahulu Pelindo II)	54,91%
HPI	45,09%

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.
- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.
- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.
- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.
- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.
- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya.
- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

- *The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:*

The Company (formerly Pelindo II)	54,91%
HPI	45,09%

- *Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.*
- *Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.*
- *The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.*
- *Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.*
- *Royalties will be paid to the Company (formerly Pelindo II) if the annual container throughput exceeds the minimum annual target.*
- *If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.*
- *The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.*

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 2 April 2019, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2018.

Pada tanggal 16 Agustus 2019, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2018 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2018 sebesar USD10,11 juta atau setara dengan Rp140,48 miliar untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan USD9,64 juta atau setara dengan Rp134 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2018 adalah 54,91% untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 26 Mei 2020, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2019.

Pada tanggal 30 November 2020, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2019 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2019 sebesar USD9,45 juta atau setara dengan Rp133,31 miliar untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan USD8,59 juta atau setara dengan Rp121,10 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2019 adalah 54,91% untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan 45,09% untuk HPI.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On April 2, 2019, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2018 net income.

On August 16, 2019, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2018 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2018 of USD10.11 million or equivalent to Rp140.48 billion for the Company (formerly Pelindo II) and USD9.64 million or equivalent to Rp134 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2018 are 54.91% for the Company (formerly Pelindo II) and 45.09% for HPI.

On May 26, 2020, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2019 net income.

On November 30, 2020, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2019 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2019 of USD9.45 million or equivalent to Rp133.31 billion for the Company (formerly Pelindo II) and USD8.59 million or equivalent to Rp121.10 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2019 are 54.91% for the Company (formerly Pelindo II) and 45.09% for HPI.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2020 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2020 sebesar USD0,35 juta atau setara dengan Rp4,92 miliar untuk Pelindo dan USD0,21 juta atau setara dengan Rp3,03 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2020 adalah 54,91% untuk Pelindo dan 45,09% untuk HPI.

Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, KSO TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Pelindo sebesar USD8,75 juta, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh KSO TPK Koja kepada Pelindo. Biaya sewa kuartalan tersebut dapat disesuaikan sesuai Revisi Perjanjian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, KSO TPK Koja telah mengakui sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.600.202 (setara dengan Rp510,37 miliar) dan USD35.171.561 (setara dengan Rp526,24 miliar).

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Koja kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II).

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On December 31, 2021, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2020 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2020 of USD0.35 million or equivalent to Rp4.92 billion for Pelindo and USD0.21 million or equivalent to Rp3.03 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2020 are 54.91% for Pelindo and 45.09% for HPI.

In consideration to the Revised Agreement, KSO TPK Koja will have to pay quarterly rent fee to Pelindo amounting to USD8.75 million, while royalty will no longer be paid by KSO TPK Koja to Pelindo. The quarterly rent may be adjusted in accordance with the Revised Agreement. For the years ended December 31, 2021 and 2020, KSO TPK Koja has recognized quarterly rent amounting to USD35,600,202 (equivalent to Rp510.37 billion) and USD35,171,561 (equivalent to Rp526.24 billion), respectively.

On August 5, 2014, the Company (formerly Pelindo II) and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company (formerly Pelindo II) and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039. The Revised Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Koja will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000 to the Company (formerly Pelindo II), while royalty will no longer be paid by TPK Koja to the Company (formerly Pelindo II).

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) tanpa adanya pembebanan.

Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, KSO TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar USD8,75 juta, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh KSO TPK Koja kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, KSO TPK Koja telah mencatat sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar US$35.600.202 (setara dengan Rp510,37 miliar) dan USD35.171.561 (setara dengan Rp526,24 miliar).

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.368.082 (setara dengan Rp506,7 miliar), USD35.000.000 (setara dengan Rp503,92 miliar), dan USD35.000.000 (setara dengan Rp504,02 miliar).

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo II) berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerjasama antara Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo yang belum diamortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp471.502.083, Rp513.105.208, dan Rp540.840.625 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On June 22, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company (formerly Pelindo II) free of encumbrances.

In consideration to the Revised Agreement, KSO TPK Koja will have to pay quarterly rent fee to the Company (formerly Pelindo II) amounting to USD8.75 million, while royalty will no longer be paid by KSO TPK Koja to the Company (formerly Pelindo II). For the year ended December 31, 2021 and 2020, KSO TPK Koja has recorded for quarterly rent amounting to USD35,600,202 (equivalent to Rp510.37 billion) and USD5,171,561 (equivalent to Rp526.24 billion), respectively.

For the years ended December 31, 2021, 2021 and 2019, the Company (formerly Pelindo II) has recorded revenue from these quarterly rentals of USD35,368,082 (equivalent to Rp506.7 billion), USD35,000,000 (equivalent to Rp503.92 billion), and USD35,000,000 (equivalent to Rp504,02 billion) respectively.

In the Revised Agreement, the Company (formerly Pelindo II) has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company (formerly Pelindo II) and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2021 and 2020, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2021, 2020, and 2019 the balance of unamortized premium amounted to Rp471,502,083, Rp513,105,208, and Rp540,840,625 respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

f) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan (dahulu Pelindo II) di JICT.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company (formerly Pelindo II) appointed and confered authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company (formerly Pelindo II) calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company (formerly Pelindo II) for equipment rental and Company's (formerly Pelindo II) employee secondment in JICT.

On August 5, 2014, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into an Amended Authorization Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorization Agreement), whereby the Company (formerly Pelindo II) and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

f) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar USD21.250.000 (Catatan 50g), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 (empat) RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II). Perjanjian jasa dan teknis "*know how*" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) (Catatan 50j).

Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo II) akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 50i).

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri BUMN dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima surat dari Menteri BUMN tentang Kerjasama Pengelolaan/ Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri BUMN secara prinsip menyetujui rencana kerjasama usaha pengelolaan/ pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

In consideration to the Amended Authorization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent to the Company (formerly Pelindo II) fee amounting to USD21,250,000 (Note 50g), while royalty, equipment rental of 4 (four) RTGCs and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company (formerly Pelindo II). As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement, they will be terminated. Based on the Amended Authorization Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (formerly Pelindo II) (Note 50j).

Based on the Amended Authorization Agreement, the Company (formerly Pelindo II) will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 50i).

On June 22, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorization Agreement which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company (formerly Pelindo II) amounting to USD215,000,000. The Amended Authorization Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping as regulated in the letter of the Minister of SOEs and letter of the Minister of Transportation below.

On June 9, 2015, the Company (formerly Pelindo II) received a letter from the Minister of SOE regarding Cooperation of Management/ Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of SOEs principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

f) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN.

Berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Menteri BUMN tanggal 7 Januari 2016, Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan melakukan revisi terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) perlu melakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, revisi atas Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa belum selesai dilakukan.

g) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan.

Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II), JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

- *To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to the separation of operator and regulator functions in accordance with UU No. 17 Year 2008.*
- *To execute letter of Vice Minister of SOE Enterprise to President Director of SOE No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding result of Assets Working Committee of SOE and Decision of Constitutional Court, especially related to State Owned Enterprises cooperation.*

Based on the Letter of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia to the Minister of SOE dated January 7, 2016, the Company (formerly Pelindo II) was directed to revise the Amended Authorization Agreement where the Company (formerly Pelindo II) needs to make adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008. Until the completion of the consolidated financial statements, the revision on Amended Authorization Agreement has not been finished.

g) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company (formerly Pelindo II) granted and conferred the right to utilise and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement.

In consideration of the granting of the utilization right by the Company (formerly Pelindo II), JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

g) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT (lanjutan)

Perusahaan (dahulu Pelindo II) tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah 20 (dua puluh tahun) dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amendemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Penggunaan tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II). Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD89.446.718.

h) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II), HPJ, JICT dan Kopegmar mengadakan Amendemen Perjanjian Pemegang Saham dimana para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham sebagai berikut:

- Modal Dasar JICT ditingkatkan sejumlah 18.077.584 saham Seri B.
- Tambahan 18.059.505 lembar saham Seri B untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II).
- Tambahan 18.079 lembar saham Seri B untuk Kopegmar.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT (continued)

The Company (formerly Pelindo II) retained the rights of the properties ownership. The utilization period is 20 (twenty years) from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

On August 5, 2014, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into an Amended Utilization Agreement whereby the Company (formerly Pelindo II) and JICT agreed to extend the Utilization Agreement until the date of termination of Amended Authorization Agreement. The Amended Utilization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company (formerly Pelindo II) amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company (formerly Pelindo II). For the year ended December 31, 2021, 2020, and 2019 the Company (formerly Pelindo II) has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to USD89,446,718, respectively.

h) Amended Shareholders Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company (formerly Pelindo II), HPJ, JICT and Kopegmar entered into an Amended Shareholder Agreement, whereby all parties agreed to adjust the shares ownership as follows:

- *Authorized Share Capital of JICT is adjusted by increasing 18,077,584 B series shares.*
- *Additional 18,059,505 B series shares for the Company (formerly Pelindo II).*
- *Additional 18,079 B series shares for Kopegmar.*

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

h) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).
- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan (dahulu Pelindo II) belum melakukan penyetoran atas tambahan setoran modal tersebut di atas. Di samping itu, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut di atas belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h) Amended Shareholders Agreement - JICT (continued)

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

- *Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*
- *Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes. Until the completion of the consolidated financial statements, the Company (formerly Pelindo II) has not paid the additional paid-in capital as mentioned above. Moreover, the increase of authorized capital and issued and paid up capital has not received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

i) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 50f). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menerima pembayaran premium tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp89.446.718. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp2.027.458.958 dan Rp2.087.090.104 dan Rp2.325.614.688, dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

i) Premium Payment Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company (formerly Pelindo II) and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company (formerly Pelindo II) amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company (formerly Pelindo II) with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 50f). On June 22, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorization Agreement, the premium shall be repaid by the Company (formerly Pelindo II) to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company (formerly Pelindo II) has received payment of the premium.

For the year ended December 31, 2021 and 2020, the Company (formerly Pelindo II) has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp89,446,718, respectively. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the balance of unamortized premium amounted to Rp2,027,458,958, Rp2,087,090,104 and Rp2,325,614,688, respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

j) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 November 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) belum melakukan pembayaran tersebut dan kewajibannya dicatat sebagai bagian dari akun liabilitas jangka pendek lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 23).

k) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan STMS

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura (STMS) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS.

Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

j) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to the Company (formerly Pelindo II) Agreement where the Company (formerly Pelindo II) and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company (formerly Pelindo II) on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company (formerly Pelindo II) is obliged to make payment amounting to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using BI middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720.

As of December 31, 2021, the Company (formerly Pelindo II) has not made the payment and the liability was recorded as part of other current liabilities account in the consolidated financial position of the Company (Note 23).

k) Shareholders Agreement IPC TPK and STMS

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore (STMS) signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounting to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS.

The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

k) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan STMS (lanjutan)

Jika dalam suatu tahun buku, Perusahaan (dahulu Pelindo II) tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

Kepemilikan saham IPC TPK pada Perusahaan (dahulu Pelindo II) yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 (Catatan 1b).

l) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

k) Shareholders Agreement IPC TPK and STMS (continued)

If, in respect of any financial year, the Company (formerly Pelindo II) has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

IPC TPK's ownership in the Company (formerly Pelindo II) established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 (Note 1b).

l) Loan Agreement - Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd., Singapore

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

The amount of the facility will be paid back through a reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and of dividends that can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

l) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura (lanjutan)

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang revisi tingkat bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi 0%. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, IPC TPK dan STMS kembali menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang pengenaan bunga 0% untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

m) Perjanjian Penggunaan Tanah - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood)

Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Indofood atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m^2 berlokasi di Jl. Sindang laut dan Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan (dahulu Pelindo II) yang digunakan oleh Indofood.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

l) Loan Agreement - Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd., Singapore (continued)

On November 10, 2016, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

As of December 31, 2018, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2019 to December 31, 2020 to become 0%. Then, on December 31, 2020, IPC TPK and STMS re-signed the agreement to prolong the 0% interest period from January 1, 2021 to December 31, 2022.

m) Land Usage Agreement - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indoofod)

On March 2, 2012, the Company (formerly Pelindo II) entered into an agreement with Indoofod for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company (formerly Pelindo II) with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m^2 which located at Jl. Sindang Laut and Jl. Raya Cilincing, North Jakarta and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.

The agreement has been approved by the Minister of State Owned Enterprise through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimalization of the Company's (formerly Pelindo II) Land which is used by Indofood.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Penggunaan Tanah - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) (lanjutan)

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan (dahulu Pelindo II) juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/*jetty* sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) adalah sebesar Rp1.041.059.197. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo yang belum diamortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing adalah sebesar Rp536,67 miliar, Rp577,68 miliar dan Rp618,69 miliar (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2)).

n) Perjanjian Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Teluk Lamong

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.242.1/HK.0502/P.III-2021 tanggal 27 Juli 2021 PT Krakatau Engineering - PT Amarta Karya (Persero), KSO untuk pekerjaan perpanjangan dermaga petikemas di Terminal Teluk Lamong sebesar Rp226.633.000. Pada tanggal 31 Desember 2021, pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100%.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m) Land Usage Agreement - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indoofod) (continued)

Revenue earned by the Company (formerly Pelindo II) from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company (formerly Pelindo II) also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood.

Until December 31, 2021, the payment received by the Company (formerly Pelindo II) amounted to Rp1,041,059,197. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp536,67 billion, Rp577,68 billion and Rp618,69 billion, respectively, (before deducted by final income tax article 4(2)).

n) Agreement of Teluk Lamong Port Extension Work

The Company (formerly Pelindo III) entered into contract No. SP2.242.1/HK.0502/P.III-2021 dated July 27, 2021 with PT Krakatau Engineering - PT Amarta Karya (Persero), KSO for container dock extension work at Teluk Lamong Terminal amounting to Rp226,633,000. As of December 31, 2021, the work progress has reached 100% completion rate.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

o) Perjanjian Pekerjaan Perkuatan Dermaga Tanjung Perak

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.307 /HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk untuk pekerjaan perkuatan struktur dermaga di Terminal Berlian Pelabuhan Tanjung Perak sebesar Rp496.936.061 Pada tanggal 31 Desember 2021, pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 86%.

p) Perjanjian Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining* Balinusra

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.93/HK.0502/ P.III-2021 tanggal 30 April 2021 dan No. SP2.92/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 April 2021 dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) untuk pekerjaan *revetment* dan *retaining wall dumping* 1 dan *dumping* 2 Di Regional BaliNusra. Nilai pekerjaan masing-masing sebesar Rp129.140.000 dan Rp397.210.000 untuk dumping 1 dan dumping 2. Pada tanggal 31 Desember 2021, pekerjaan tersebut telah mencapai penyelesaian sebesar 24%.

q) Perjanjian Kerjasama - Terminal Teluk Lamong

Pada tanggal 23 Desember 2014, TTL membuat perjanjian kerjasama dengan PT Nusa Prima Logistik (NPL) terkait pelayanan pada terminal curah kering berupa pembangunan, pengoperasian dan pengadaan gudang transit komoditi curah kering. Periode perjanjian adalah 30 tahun sejak terminal curah kering tersebut beroperasi dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak. TTL telah mendapatkan izin pengoperasian terminal curah kering pada tanggal 28 Desember 2018 dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga periode perjanjian efektif dimulai tanggal 1 Januari 2019.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

o) Agreement of Tanjung Perak Port Enhancement Work

The Company (formerly Pelindo III) entered into contract No. SP2.307 /HK.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk for the enhancement of the wharf structure at the Berlian Terminal, Tanjung Perak Port amounting to Rp496,936,061. As of December 31, 2021 the work progress has reached 86% completion rate.

p) Agreement of Balinusra Reverment and Retaining Work

The Company (formerly Pelindo III) entered into contract No. SP2.93/HK.0502/P.III-2021 dated April 30, 2021 and No. SP2.92/HK.0502/P.III-2021 dated April 30, 2021 with PT Brantas Abipraya (Persero) and PT Waskita Karya (Persero) for the revetment and retaining dumping 1 and dumping 2 wall at BaliNusra Region. The price of the work is amounting to Rp129,140,000 and Rp397,210,000 for dumping 1 and dumping 2, respectively. As of December 31, 2021, the work progress has reached 24% completion rate.

q) Partnership Agreement - Teluk Lamong Terminal

On December 23, 2014, TTL entered into a cooperation agreement with PT Nusa Prima Logistik (NPL) related to the dry bulk terminal services such as construction, operation and procurements of dry bulk commodities transit warehouse. The agreement period is 30 years from dry bulk terminal commenced its commercial operations and could be extended with terms and conditions which were agreed by all parties. TTL has received the permit for operating the dry bulk terminal on December 28, 2018 from Director General of Sea Transportation, therefore the effective agreement period starts on January 1, 2019.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

r) Perjanjian Pembangunan Dermaga Makassar New Port (MNP) Tahap I

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) mengadakan Perjanjian Pembangunan Dermaga MNP Tahap IA dengan detail pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Perjanjian pekerjaan Paket A mengenai pekerjaan reklamasi dan pembangunan dermaga MNP senilai Rp326.868.365 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 3 dari Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notaris di Cibubur, tanggal 3 Juni 2015 dengan jangka waktu selama 725 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum III No. 15/HK.301/ 7/PI.IV-2018 tanggal 12 Juli 2018 menjadi senilai Rp345.785.871 dengan jangka waktu selama 1.227 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan Paket B mengenai pekerjaan reklamasi, pengerukan, lapangan kontainer dan *causeway* MNP senilai Rp1.076.779.375 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 05 September 2016 dengan jangka waktu selama 830 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum II No. 1/HK.301/ 3/PI.IV-2019 tanggal 15 Februari 2019 menjadi senilai Rp1.119.939.158 dengan jangka waktu selama 1.022 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

r) Construction Agreement of Makassar New Port (MNP) Quay Phase I

The Company (formerly Pelindo IV) entered into a Construction Agreement of MNP Quay Phase IA, with details of work as follows:

- *Agreement of work Package A regarding reclamation and construction of MNP Quay amounted to Rp326,868,365 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk based on Deed No. 3 from Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notary from Cibubur, dated June 3, 2015 with 725 calendar days period since the agreement was signed.*

- *This agreement of work was last amended through Addendum III No. 15/HK.301/ 7/PI.IV-2018 dated July 12, 2018 with changes on the agreement amount into Rp345,785,871 and agreement period into 1,227 calendar days since the agreement was signed.*

- *Agreement of work Package B regarding reclamation of dredging work, container yard, and causeway of MNP amounted to Rp1,076,779,375 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated 05 September 2016 with period of 830 calendar days since the agreement was signed.*

- *This agreement of work was last amended through Addendum II No. 1/HK. 301/3/PI. IV-2019 dated February 15, 2019 with changes on the agreement amount into Rp1,119,939,158 and agreement period into 1,022 calendar days since from the agreement was signed.*

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

r) Perjanjian Pembangunan Dermaga Makassar New Port (MNP) Tahap I (lanjutan)

- Perjanjian pekerjaan Paket C mengenai pekerjaan pembangunan *breakwater* MNP senilai Rp226.725.699 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 30 September 2016 dengan jangka waktu selama 600 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum IV No. 3/HK.301/ 13/PI.IV-2019 tanggal 13 September 2019 dengan jangka waktu menjadi selama 1.160 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan Paket D mengenai pekerjaan bangunan fasilitas serta mekanikal dan elektrikal MNP senilai Rp258.089.700 dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 30 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 31 Januari 2018 dengan jangka waktu selama 390 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum V No. 9/HK.301/10/ PI.IV-2020 tanggal 04 September 2020 menjadi senilai Rp283.679.319 dengan jangka waktu selama 1.066 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) juga mengadakan Perjanjian Pembangunan Dermaga MNP Tahap IB dan IC senilai Rp2.748.914.600 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 01 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., notaris di Makassar, tanggal 1 Februari 2019 dengan jangka waktu sampai dengan 16 Mei 2022.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

r) Construction Agreement of Makassar New Port (MNP) Quay Phase I (continued)

- *Agreement of work Package C regarding construction work of MNP breakwater amounted to Rp226,725,699 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated 30 September 2016 with period of 600 calendar days since from the agreement was signed.*

- *This agreement of work was last amended through Addendum IV No. 3/HK.301/ 13/PI.IV-2019 dated September 13, 2019 with changes on the agreement period into 1,160 calendar days since the agreement was signed.*

- *Agreement of work Package D regarding construction of facility building including mechanical and electrical of MNP amounted to Rp258,089,700 with PT Adhi Karya (Persero) Tbk based on Deed No. 30 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated January 31, 2018 with period of 390 calendar days since from the agreement was signed.*

- *This agreement of work was last amended through Addendum V No. 9/HK.301/ 10/PI.IV-2020 dated September 04, 2020 with changes on agreement amount into Rp283,679,319 and agreement period into 1,066 calendar days since the agreement was signed.*

The Company (formerly Pelindo IV) also entered into Agreement of Constructing of MNP Quay Phase IB and IC amounted to Rp2,748,914,600 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk based on Deed No. 01 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., notary in Makassar, dated February 1, 2019 with period up until May 16, 2022.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

s. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) mengadakan perjanjian kerjasama pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda dan PT Pelabuhan Samudera Palaran dengan No. 180/12/Huk-K5/VII/2007, No. 24/PL.405/ PT-07, dan No. 20.20.07/2007 tanggal 20 Juli 2007. Perjanjian ini berjangka waktu selama 50 tahun sejak masa uji coba, yaitu 3 tahun sejak ditandatanginya perjanjian.

Dalam perjanjian, Perusahaan (dahulu Pelindo IV) mendapatkan *management fee/ compensation fee* sebesar 10% dari total pendapatan kotor dari hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran. Selain itu, Perusahaan (dahulu Pelindo IV) juga menerima bagi hasil keuntungan sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pada akhir perjanjian, Perusahaan (dahulu Pelindo IV) berhak memperoleh kepemilikan bangunan infrastruktur Terminal Petikemas Palaran dari PT Pelabuhan Samudera Palaran.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan (dahulu Pelindo IV) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp32.729.045, dan Rp31.343.893 dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasi.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

s. Cooperation Agreement for The Construction and Operation of The Palaran Container Terminal Samarinda Port

The Company (formerly Pelindo IV) entered into a cooperation agreement for the construction and operation of the Palaran Container Terminal, Samarinda Port with the Samarinda City Government and PT Pelabuhan Samudera Palaran with No. 180/12/Huk-K5/VII/2007, No. 24/PL.405/PT-07, and No. 20.20.07/2007 dated July 20, 2007. This agreement has a term of 50 years from the trial period, which was 3 years since the contract signing.

In this agreement, the Company (formerly Pelindo IV) received the management fee/compensation fee amounting to 10% of gross revenue of operating Palaran Container Terminal. In addition, the Company (formerly Pelindo IV) also received the profit sharing at certain percentage from gross revenue of operating Palaran Container Terminal as regulated in this agreement.

At the end of the agreement, the Company (formerly Pelindo IV) has the right to acquire ownership of the Palaran Container Terminal infrastructure building from PT Pelabuhan Samudera Palaran.

Revenues obtained by the Company (formerly Pelindo IV) for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounting to Rp32,729,045 and Rp31,343,893, respectively and was recorded as part of operating revenues.

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

t. Perjanjian Pinjaman Biaya Pergantian Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Berdasarkan Akta Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Penggantian Pembelian Tanah dalam Rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilincing antara Badan Layanan Umum - Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dan CTP dari Notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H., No. 2 tanggal 4 Februari 2013, CTP memperoleh pinjaman untuk penggantian pembelian tanah dengan batas maksimal biaya pergantian Rp288.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Seksi I: Cibitung - Telaga Asih sebesar Rp11.519.488.
2. Seksi II: Telaga Asih - Tembalang sebesar Rp87.445.713.
3. Seksi III: Tembalang - Tarumajaya sebesar Rp118.906.715.
4. Seksi IV: Tarumajaya - Cilincing sebesar Rp70.128.083.

Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah. Nilai tambah pinjaman (bunga) sebesar tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") ditambah 1%. Nilai tambah diperhitungkan setiap bulan dan wajib dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Denda tunggakan pembayaran nilai tambah sebesar 2% per bulan dari nilai tambah yang tertunggak.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp466.538.398, Rp466.538.398 dan Rp441.350.272.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

t. Loan Agreement for Cibitung-Cilincing Toll Road Project Replacement Cost

Based on the Notarial Deed No. 2 dated February 4, 2013 by Mrs. Trie Sulistiowarni, S.H., a Notary in Jakarta , CTP has signed an agreement with Ministry of Public Works & Human Settlements - Public Service Agencies Secretariat of Toll Road Regulatory Body ("BLU Set-BPJT"). CTP obtained expense reimbursement loan on the purchase of land for Cibitung-Cilincing tol project for a maximum expense reimbursement amount of Rp288,000,000, with the following details:

1. *Section 1: Cibitung - Telaga Asih amounting to Rp11,519,488.*
2. *Section 2: Telaga Asih - Tembalang amounting to Rp87,445,713.*
3. *Section 3: Tembalang - Tarumajaya amounting to Rp118,906,715.*
4. *Section 4: Tarumajaya - Cilincing amounting to Rp70,128,083.*

The loan period is until the completion of the land acquisition process by the Ministry of Public Works. Based on this agreement, CTP has to pay an administration fee amounting to Rp25,000,000 and estimated cost of Rp2,880,000,000 in 2013. Once in every three months, CTP will be charged an additional value (interest expense) by BLU Set-BPJT which must be paid by CTP. The interest rate on the additional value is based on the Indonesia Deposit Insurance Corporation ("LPS") interest rate plus 1%.

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the outstanding balance of the payable amounting to Rp466,538,398, Rp466,538,398 and Rp441, 350,272, respectively.

51. PERKARA HUKUM

a) Permasalahan gugatan dari PT Artha Sempana meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Pada tahun 2019, PT Artha Sempana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dengan pokok gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa dan permintaan ganti kerugian tarhadap lahan yang dikuasai oleh PT Artha Sempana apabila Perusahaan (dahulu Pelindo II) ingin menguasai lahan tersebut.

Telah diterbitkan Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara No. KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 tanggal 23 April 2019.

Telah terbit Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 450/Pdt/2021/PT.DKI pada tanggal 24 November 2021 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juni 2020.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada upaya hukum dari pihak lawan.

b) Gugatan dari Serikat Pekerja JICT menuntut ganti rugi akibat perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

51. LAWSUIT

a) Lawsuit Issue of PT Artha Sempana requested for cancellation of Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 regarding the granting of the Right to Operate (HPL) the land to the Company (formerly Pelindo II) with area of 592,771 m2 in Port of Sunda Kelapa.

In 2019, PT Artha Sempana filed a lawsuit to the North Jakarta District Court with No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr with the subject of the lawsuit for cancellation of the Decree of the Minister of Home Affairs No.128/HPL/DA/86 on December 18, 1986 which contains the granting of Land Management Rights (HPL) to the Company (formerly Pelindo II) for a land area of 592,771 m2 at the Port of Sunda Kelapa and requesting for compensation for land controlled by PT Artha Sempana if the Company (formerly Pelindo II) wishes to control the land.

A special Power of Attorney has been issued from the President Director of the Company (formerly Pelindo II) to the Head of the North Jakarta Public Attorney as State Attorney No. KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 dated April 23, 2019.

The DKI Jakarta High Court Decision Number 450/Pdt/2021/PT.DKI on November 24, 2021, has been issued which basically strengthens the Decision of the North Jakarta District Court Number 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dated June 18, 2020.

As of the completion date of this consolidated financial statements, there is no legal action from the opposing party.

b) Lawsuit filed by Labor Union of JICT claiming compensation due to the extension of cooperation agreement on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok.

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Serikat Pekerja JICT mengajukan gugatan kepada JICT selaku Tergugat, Perusahaan selaku Turut Tergugat I, dan Hutchison Ports Ltd selaku Turut Tergugat II yang diregister dengan Perkara No. 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. dengan pokok gugatan menuntut pembatalan perpanjangan kerja sama pengelolaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok antara Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan JICT, pengembalian rental fee oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada JICT sebesar USD147.595 atau setara dengan Rp1.976.869.823, kerugian bonus pekerja JICT sebesar Rp45.057.583 , kerugian uang training sebesar USD539, ganti rugi immateriil Rp.100.000.000, sita jaminan atas rekening bank Perusahaan,

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr pada amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada tanggal 13 Maret 2018, Serikat Pekerja JICT telah mengajukan banding dan berdasarkan informasi dari website resmi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan Nomor 184/PDT/2019.PT.DKI yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr Tanggal 1 Maret 2018

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada informasi terkait dengan upaya hukum dari pihak lawan atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

c) Perkara dengan No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg.,di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia menuntut pembatalan Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah atas nama Perusahaan (dahulu Pelindo II) yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 100/Sei Selincah dan HGB No. 101/Sei Selincah atas nama PT Susel Prima Permai (sekarang PT Resources Alam Indonesia) yang telah berakhir jangka waktunya.

51. LAWSUIT (continued)

The Labor Union of JICT has filed a lawsuit to JICT as co-defendant I, and Hutchison Ports Ltd as co-defendant II as registered by Case No. 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., the main lawsuit demanding the cancellation of the extension of the cooperation in the management of the Container Terminal at Tanjung Priok Port between the Company (formerly Pelindo II) and JICT, refund of the rental fee by the Company (formerly Pelindo II) to JICT amounting to USD147,595 or equal to to Rp1,976,869,823, JICT employee bonus loss of Rp45,057,583, loss of training money of USD539, immaterial compensation of Rp100,000,000, confiscation of guarantee on the Company's bank account.

The verdict of the North Jakarta Public Court No. 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr stated that the lawsuit was not accepted, stating that the North Jakarta Public Court was not authorized to examine and adjudicate this case.

On March 13, 2018, the JICT Labor Union has filed an appeal and based on information from the official website of the Supreme Court, the DKI Jakarta High Court has issued a decision Number 184/PDT/2019.PT.DKI which affirms the decision of the North Jakarta District Court Number 312/ Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr dated March 1, 2018.

As of the completion date of these consolidated financial statements, there is no information regarding legal remedies from the counterparty against the decision of the DKI Jakarta High Court.

c) Case with No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT Resources Alam Indonesia demanding the cancellation of the Right to Operate (HPL) certificates No. 91/Sungai Selincah registered under the name of the Company (formerly Pelindo II) which is claimed to be overlapping with Right to Build (HGB) certificate No. 100/Sei Selincah and HGB certificate No. 101/Sei Selincah under the name of PT Susel Prima Permai (now PT Resources Alam Indonesia) which terms have terminated.

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah atas nama Perusahaan (dahulu Pelindo II) cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000 per tahun sejak terbitnya sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah seluas 23.500 m2 di Desa Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sesuai Berita Acara Sita Jaminan pada tanggal 28 Februari 2017 dengan No. 182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg. Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Februari 2018.

Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.2725K/PDT/2018 telah menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Perusahaan, sehingga perkara dimenangkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II).

PT Resource Alam Indonesia telah mendaftarkan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam hal ini Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai Termohon Peninjauan Kembali I.

Perusahaan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 392 PK/PDT/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang pada intinya menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT Resources Alam Indonesia.

51. LAWSUIT (continued)

The Palembang Public Court in Decision No. 182 / Pdt.G /2016/ PN.Plg. In its ruling stated that among them were certificates of HPL No. 91/Sungai Selincah registered under the name of the Company (formerly Pelindo II) is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp25,000 per year since the issuance of certificate of HPL No.91/Sungai Selincah until the decision has permanent legal force, declares valid and valuable confiscation of collateral that has been placed by the Palembang Public Court on land of HPL certificate No.91/Selincah River covering an area of 23,500 m2 in the Village Sungai Selincah, Kalidoni Subdistrict, Palembang City, according to the Official Record of Confiscation on February 28, 2017 with No. 182/BA.Pdt.G/ 2016 / PN.Plg.

Appeal Decision of South Sumatera High Court No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg has reinforced the Palembang Public Court in Decision No. 182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg. The Company (formerly Pelindo II) has filed a cassation to the Supreme Court registered on February 27, 2018.

Supreme Court on the Cassasion Decision No. 2725K/PDT/2018 has granted the cassation request from the Company, therefore the decision has favored the Company (formerly Pelindo II).

PT Resource Alam Indonesia registered the Judicial Review on August 12, 2019 at the Registrar of the Palembang Public Court in this case the Company (formerly Pelindo II) as the Respondent for Judicial Review I.

The Company has obtained copy of the appeal No. 392 PK/PDT/2020 Supreme Court on June 17, 2020 that stated the judicial review from PT Resources Alam Indonesia has been declined.

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

d) Perkara dengan No. 151/Pdt.G/2017/PN.Plg., di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia yang menuntut pembatalan Sertifikat HPL No. 88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan (dahulu Pelindo II) yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat HGB No. 100/Sei Selincah atas nama PT Resources Alam Indonesia yang telah berakhir jangka waktunya.

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya menyatakan sertifikat HPL No. 88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000 per tahun sejak terbitnya sertipikat HPL No. 88/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan banding No. 80/Pdt/2018/PT.Plg dalam amarnya telah menyatakan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 151/Pdt.G/2017/PN/Plg.

Mahkamah Agung dalam putusan di tingkat Kasasi No. 2225K/Pdt/2019 dalam amar putusan telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Perusahaan).

Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan Upaya Hukum Luar biasa Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 2225K/Pdt/2019.

Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 210PK/PDT/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang pada intinya menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Perusahaan menang).

51. LAWSUIT (continued)

d) Case with No. 151/Pdt.G/2017/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT Resources Alam Indonesia demanded the cancellation of Right to Operate (HPL) certificate No .88/Sungai Selincah registered under the name of the Company (formerly Pelindo II) which is claimed to be overlapped with HGB certificate No. 100/Sei Selincah registered under the name of PT Resources Alam Indonesia which terms has been terminated.

The Palembang Public Court in Decision No. 151/Pdt.G /2017/PN.Plg. in its ruling stated that among others certificates of HPL No. 88/Sungai Selincah registered under the name of the Company is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp25,000 per year since the issuance of certificate of HPL No. 88/Sungai Selincah until the decision has permanent legal force.

Palembang High Court on the appeal decision No. 80/Pdt/2018/PT.Plg has decided to strengthen the Decision of Palembang Public Court No. 151/Pdt.G/2017/PN/Plg.

Supreme Court in the decision at cassation level No. 2225K/Pdt/2019 has rejected the application for cassation from the cassation applicant (the Company).

The Company (formerly Pelindo II) filed an extraordinary legal action review of the decision of the Supreme Court of Cassation No. 2225K/Pdt/2019.

The Company (formerly Pelindo II) has received a copy of the Supreme Court's Decision No. 210PK/PDT/2021 dated December 15, 2021, which essentially received a request for reconsideration from the petitioner for review petition (the Company wins).

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

e) Perkara perdata No. 27/Pdt.G/2019/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Perusahaan (dahulu Pelindo II) selaku Tergugat I yang dikuasakan Direksi kepada Sugih Ardhian Pramono & Partners, atas sengketa tanah HPL No 2/91 Cabang Pelabuhan Banten oleh para Penggugat ahli waris Alm. H.Somad di Tindak Banding.

Salinan Putusan Banding No. 25/PDT/2020/ PT BTN menyatakan bahwa permohonan banding dari para penggugat ahli waris Alm. H. Somad ditolak sehingga Perusahaan (dahulu Pelindo II) dimenangkan.

Pihak lawan mengajukan upaya Kasasi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi dari Pengadilan Negeri Serang tanggal 9 Juni 2020.

Berdasarkan informasi dari Website resmi Mahkamah Agung, Putusan Kasasi No. 3672K/PDT/2020 tanggal 4 Desember 2020 dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (ahli waris Alm. H. Somad).

f) Perkara perdata No. 6/Pdt.G/2020/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Perusahaan selaku Tergugat II atas gugatan lahan di Bojonegara Persil No. 42 Desa Pulo Ampel Para Penggugat yaitu Sdr. Ali Rahman Bin (Alm) Madraf.

Telah diterima Salinan Putusan Resmi Pengadilan Negeri Serang No. 6/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 15 Oktober 2020 yang pada intinya Gugatan dari Penggugat (Ali Rahman Bin (Alm) Madraf) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pihak Penggugat telah mengajukan Upaya Banding sebagaimana Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas (*Inzage*) tanggal 11 November 2020.

51. LAWSUIT (continued)

e) The civil lawsuit No. 27/Pdt.G/2019/PN.Srg in Serang State Court, Banten. The Company (formerly Pelindo II) as the Defendant I, which represented by Sugih Ardhian Pramono & Partners, on the Land Dispute of Land Usage Permit No. 2/91 Banten Port Branch, is appealed by the Plaintif which is the heir of the late H. Somad.

The Copy of the Appeal No. 25/PDT/2020/ PT BTN stated that the appeal of the heir of late H.Somad has been rejected, therefore the decision has favored the Company (formerly Pelindo II).

The Plaintiff have proposed for the Cassation as written under the Cassation Statement Circular from Serang Public Court on June 9, 2020.

Based on information from Supreme Court website, Cassation Decision No. 3672K/PDT/2020 dated December 4, 2020, with verdict rejecting the cassation request that has been proposed by the cassation petitioners (the heir of late H. Somad).

f) The civil lawsuit No. 6/Pdt.G/2020/PN.Srg in Serang Public Court, Banten. The Company as the Defendant II on the land dispute in Bojonegara Persil No. 42 Desa Pulo Ampel, with Ali Rahman Bin (Alm.) Madraf as the Plaintiff.

The Company has received a Copy of the Decision of the Serang Public Court No. 6/Pdt.G/2020/PN Srd on October 15, 2020 which in essence the lawsuit from the plaintiff (Ali Rahman Bin (Alm) Madraf) is rejected (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Plaintiff has filed an Appeal as the Minutes of Notification of File Examination (Inzage) on November 11, 2020.

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Kantor Advokat Akmalsyah & Co. selaku Kuasa dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 24 November 2020.

Telah diperoleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 163/PDT/2020/PT BTN tanggal 27 Januari 2021 dengan hasil putusan dimenangkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan sampai batas waktu yang ditentukan, Pihak lawan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*).

g) Perkara di Pengadilan Pajak Jakarta dalam perkara Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01067/KEB/ WPJ.19/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.

Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put-002489.15/2018/PP/M.XXA tahun 2019.

Berdasarkan informasi dari Website Resmi Mahkamah Agung RI, Putusan Peninjauan Kembali No. 4223 B/PK/PJK/2020 dengan amar putusan Kabul PK, Batal Putusan Pengadilan Pajak, Adili Kembali, Kabul Banding. (Perusahaan (dahulu Pelindo II) dimenangkan). Perusahaan (dahulu Pelindo II) sedang menunggu salinan putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Mei 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima Salinan Resmi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4223B/PK/PJK/2020 yang memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali serta membatalkan surat keputusan Direktur Jendral Pajak tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB PPh tahun pajak 2015 dan menetapkan jumlah PPh lebih bayar untuk masa Januari-Desember 2015.

52. LAWSUIT (continued)

Akmalsyah & Co. Advocate as the Power of Attorney of the Company (formerly Pelindo II) has submitted a counter-memory appeal on November 24, 2020.

The Banten High Court Decision No. 163/PDT/2020/PT BTN date January 27, 2021 with the result of the decision being won by the Company (formerly Pelindo II) and until the specified time limit, the opposing party did not file a Cassation lawsuit so that the Decision has permanent legal force (In Kracht Van Gewijsde).

g) Case at the Jakarta Tax Court in the case of Appeal of the Decree of the Director-General of Taxation No. KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 dated December 22, 2017 concerning Taxpayer Objections to The Provision of Underpaid Income Tax.

The Company (formerly Pelindo II) filed an extraordinary legal action review to the Supreme Court on the Decision of the Tax Court No. Put-002489.15/2018/PP/M.XXA in 2019.

Based on information from the Official Website of the Supreme Court of The Republic of Indonesia, The Decision of Review No. 4223 B/PK/PJK/2020 with the warning of receive PK verdict, Cancel the Decision of the Tax Court, Re-fair, Accept the Appeal (the Company (formerly Pelindo II) won). The Company (formerly Pelindo II) is awaiting a copy of the judicial review decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia

On May 4, 2021, the Company (formerly Pelindo II) received the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4223B/PK/PJK/2020 which decided to grant the request for a judicial review and cancel the decision letter from the Director General of Taxes regarding the taxpayer's objection to the SKPKB PPh for the 2015 tax year and determined the amount of overpaid income tax for the period January - December 2015.

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Dirjen Pajak telah melaksanakan Putusan PK dengan melakukan pembayaran kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp992.142.560 (Catatan 24g).

h) Perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN.Cbn tentang gugatan dari Budi Nugroho selaku Direktur Utama PT Intijasa Niaga kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) terkait Perbuatan melawan Hukum pada pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pengerukan di alur dan kolam Pelabuhan Cirebon tahun 2014.

Pengadilan Negeri Cirebon telah membacakan putusan No. 28/Pdt.G/2020/PN Cbn dengan amar putusan yang pada intinya menolak gugatan dari Penggugat.

PT Intijasa Niaga telah mengajukan upaya hukum banding namun telah dicabut sebagaimana Akta Pencabutan Banding dari Pengadilan Negeri Cirebon No. 5/Akta.Pdt.G/2021/PN.Cbn. Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

i) Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negera pada Kejaksaan Tinggi Jambi selaku kuasa dari Cabang Pelabuban Jambi kepada PT Budigraha Perkasa Utama pada bulan November 2020 tekait dengan kelebihan nilai pembayaran atas pekerjaan perbaikan berat Dermaga TPK Pelabuhan Talang Duku Jambi.

Pengadilan Negeri Sengeti telah membacakan Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 15 April 2021 dengan amar putusan mengabulkan gugatan Perusahaan (dahulu Pelindo II).

j) Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial atas 68 (enam puluh delapan) orang Eks TNO Koperasi Pekerja Kekar dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk.

Pihak tergugat atas perkara tersebut adalah:
- Koperasi Pekerja Kekar sebagai Tergugat I.
- IPC TPK sebagai Tergugat II.
- Perusahaan sebagai Turut Tergugat.

51. LAWSUIT (continued)

Directorate General of Taxation has implemented the PK Decision by making a payment to the Company (formerly Pelindo II) on August 5, 2021, amounting to Rp992,142,560 (Notes 24g).

h) Case No. 28/Pdt.G/2020/PN-Cbn regarding the lawsuit from Budi Nugroho as President Director of PT Intijasa Niaga to the Company (formerly Pelindo II) related to the Acts against the Law on the implementation of Dredging Work Agreement in the flow and pool's Port of Cirebon in 2014.

The Cirebon District Court read out the verdict No. 28/Pdt.G/2020/PN Cbn with a verdict that rejects the claim from the Plaintiff.

PT Intijasa Niaga has filed an appeal but it has been revoked as stated in the Deed of Revocation of Appeal from the Cirebon District Court No. 5/Akta.Pdt.G/2021/PN.Cbn. The case has permanent legal force

i) Civil Lawsuit by the State Attorney General at the Jambi High Prosecutor's Office as the power of the Jambi Pelabuban Branch to PT Budigraha Perkasa Utama in November 2020 with an overpayment value for the work of heavy repairs TPK Port Talang Duku Jambi.

The Sengeti District Court has read its Decision No. 53/Pdt.G/2020/PN Snt dated April 15, 2021 with the decision to grant the Company (formerly Pelindo II)'s lawsuit.

j) Industrial Relations Lawsuit filed by 68 (sixty-eight) former nonpermanent staff at Koperasi Pekerja Kekar with Case Number 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk.

The defendants in this lawsuit:
- *Koperasi Pekerja Kekar as Defendant I.*
- *IPC TPK as Defendant II.*
- *The Company as co-Defendant.*

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Pada tanggal 12 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Putusan 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk memutuskan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, memutuskan Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan menghukum Tergugat I untuk membayar pesangon 2 (dua) kali upah sebulan sesuai dengan ketentuan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja/Kepmenaker Pasal 22 nomor 150 tahun 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi di Perusahaan (dahulu Pelindo II)), dengan besaran Rp6.472.030. Pesangon tersebut dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Putusan. Selain itu, menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses dengan besaran Rp2.013.318 dan dibayarkan segera tanpa dicicil. Upah proses dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Putusan.

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 12 April 2021, Koperasi Pekerja Kekar sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I mengajukan Kasasi dengan mengajukan Memori Kasasi tertanggal 5 Mei 2021, yang pada pokoknya menolak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut.

Atas Memori Kasasi yang diajukan oleh Koperasi Pekerja Kekar tersebut, IPC TPK sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II mengajukan Kontra Memori Kasasi tertanggal 24 Mei 2021 dan Bantahan tertanggal 25 Juni 2021.

Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memutus perkara kasasi No.1343/K/Pdt.Sus.PHI/2021 yang pada inti amar putusannya:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Koperasi Pekerja Kekar Cabang Panjang,
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, tanggal 12 April 2021.

51. LAWSUIT (continued)

On April 12, 2021, Tanjung Karang Public Court judges with case number 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk decided to grant some of the lawsuit, which is decided that Defendant I had terminated the employment relationship (PHK), sentenced Defendant I to pay severance pay of 2 (two) times a month's wages by the provisions (Regulation of the Minister of Manpower/Kepmenaker Article 22 number 150 the year 2000 concerning Termination of Employment and Severance Pay, Service Period Award and Compensation at the Company (formerly Pelindo II)), amounting to Rp6,472,030. The severance pay is paid no later than 14 (fourteen) days after the Decision. In addition, ordered Defendant I to pay processing fees in the amount of Rp2,013,318 and paid immediately without installments. Processing fees are paid no later than 14 (fourteen) days after the Decision.

Based on the decision of the Tanjung Karang District Court on April 12, 2021, Koperasi Pekerja Kekar as the Petitioner for Cassation, Defendant I first filed a Cassation by filing a Memorandum of Cassation dated May 5, 2021, essentially rejected the Tanjung Karang District Court Decision.

About the Memorandum of Cassation submitted by the Koperasi Pekerja Kekar, IPC TPK as the Respondent for Cassation II, Defendant II first filed a Counter Memorandum of Cassation dated May 24, 2021, and a Rebuttal dated June 25, 2021.

The Panel of Judges of the Supreme Court has decided on the cassation case No. 1343/K/Pdt.Sus.PHI/2021 which in essence the verdict:

1. *Reject the request for cassation from the Cassation Applicant Koperasi Pekerja Kekar of Panjang Branch,*
2. *Correcting the decision of the Industrial Relations Court at the Tanjung Karang District Court Number 02/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, April 12, 2021.*

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 59 juncto Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I sejak dibacakan putusan ini;

Perusahaan menang karena diputus oleh majelis Hakim pada tingkat Pertama dan Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat.

51. LAWSUIT (continued)

So, the full warning is as follows:
In exception:
- *To reject the exceptions submitted by the Defendants in their entirety;*

In Main Case:
- *Granted the Plaintiffs' claim in part;*
- *To declare that Defendant I had terminated the employment relationship of the Plaintiffs in contravention of Article 59 in conjunction with Article 164 of Law Number 13 of 2003;*
- *Declaring the termination of the employment relationship between the Plaintiffs and Defendant I since the reading of this decision;*

The Company won because it was decided by the panel of judges at the first level and the Cassation did not have a legal relationship with the Respondents in the original Cassation of the Plaintiffs.

52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS SPSL No. 5 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perubahan Nama Perseroan, para pemegang saham SPSL menyetujui perubahan Anggaran Dasar SPSL tentang nama Perusahaan dari sebelumnya PT Pelindo Solusi Logistik menjadi PT Pelindo Logistik Indonesia.

   Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0011769.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022.

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS PPI No. 6 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perubahan Nama Perseroan, para pemegang saham PPI menyetujui perubahan Anggaran Dasar PPI tentang nama Perusahaan dari sebelumnya PT Pengembang Pelabuhan Indonesia menjadi PT Pelindo Solusi Logistik.

   Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012004.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022.

52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Based on Deed of the Shareholders Decision in lieu of GMS of SPSL No. 5 dated February 16, 2022 regarding Change of The Company's Name, the shareholders of SPSL agreed on the amendment of Article of Association of SPSL regarding the change of the Company's name from PT Pelindo Solusi Logistik to PT Pelindo Logistik Indonesia.

   Such Amendment of the Article of Association has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0011769.AH.01.02.Tahun 2022 dated February 16, 2022.

b. Based on Deed of the Shareholders Decision in lieu of GMS of PPI No. 6 dated February 16, 2022 regarding Change of The Company's Name, the shareholders of PPI agreed on the amendment of Article of Association of PPI regarding the change of the Company's name from PT Pengembang Pelabuhan Indonesia to PT Pelindo Solusi Logistik.

   Such Amendment of the Article of Association has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0012004.AH.01.02.Tahun 2022 dated February 17, 2022.

52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

c. Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) berikut dialihkan kepada SPMT:
   - Saham IKT sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dengan nilai nominal Rp129.614.474.900 (nilai penuh).
   - Saham PTP sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

   Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-1049/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

   Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPMT menerbitkan 129.614 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham IKT dan PTP dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada SPMT.

   Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

c. On January 3, 2022, the following shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPMT:
   - *IKT shares amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% with nominal value of Rp129,614,474,900 (full amount).*
   - *PTP shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*

   The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-1049/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

   In relation to such transfer of right of shares, SPMT issued 129,614 new shares and 24,750 new shares for the Company (formerly Pelindo II) with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of IKT and PTP shares from the Company (formerly Pelindo II) to SPMT, respectively.

   The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

d. Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan (dahulu Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV) berikut dialihkan kepada SPJM:

- Saham JAI sebanyak 4.063.504.600 lembar saham atau setara dengan 76,89% dengan nilai nominal Rp406.350.460.000 (nilai penuh).
- Saham JPPI sebanyak 2.475.000 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).
- Saham EII sebanyak 28.050 lembar saham atau setara dengan 99,29% dengan nilai nominal Rp28.050.000.000 (nilai penuh).
- Saham EPI sebanyak 2.400.000 lembar saham atau setara dengan 55,00% dengan nilai nominal Rp24.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham PMS sebanyak 305.000.000 lembar saham atau setara dengan 98,23% dengan nilai nominal Rp305.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham Rukindo sebanyak 611.622 lembar saham atau setara dengan 99,91% dengan nilai nominal Rp611.622.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-1050/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPJM menerbitkan 406.350 saham baru, 24.750 saham baru, 28.050 saham baru, 24.000 saham baru, 305.000 saham baru dan 611.622 saham baru untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham JAI, JPPI, EII, EPI, PMS dan Rukindo dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada SPJM.

52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

d. On January 3, 2022, the following shares owned by the Company (formerly Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV) were transferred to SPJM:

- *JAI shares amounting to 4,063,504,600 shares or equivalent to 76.89% with nominal value of Rp406,350,460,000 (full amount).*
- *JPPI shares amounting to 2,475,000 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*
- *EII shares amounting to 28,050 shares or equivalent to 99.29% with nominal value of Rp28,050,000,000 (full amount).*
- *EPI shares amounting to 2,400,000 shares or equivalent to 55.00% with nominal value of Rp24,000,000,000 (full amount).*
- *PMS shares amounting to 305,000,000 shares or equivalent to 98.23% with nominal value of Rp305,000,000,000 (full amount).*
- *Rukindo shares amounting to 611,622 shares or equivalent to 99.91% with nominal value of Rp611,622,000,000 (full amount).*

The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-1050/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPJM issued 406,350 new shares, 24,750 new shares, 28,050 new shares, 24,000 new shares, 305,000 new shares and 611,622 new shares for the Company (formerly Pelindo II) with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of JAI, JPPI, EII, EPI, PMS and Rukindo shares from the Company (formerly Pelindo II) to SPJM, respectively.

52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

e. Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV) berikut dialihkan kepada SPTP:
   - Saham BJTI sebanyak 1.079.138 lembar saham atau setara dengan 96,84% dengan nilai nominal Rp1.079.138.000.000 (nilai penuh).
   - Saham TPS sebanyak 254.489.274 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp127.244.637.000 (nilai penuh).
   - Saham TTL sebanyak 134.325 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp134.325.000.000 (nilai penuh).
   - Saham PTP1 sebanyak 855.724.000 lembar saham atau setara dengan 70,00% dengan nilai nominal Rp855.724.000.000 (nilai penuh).
   - Saham KKT sebanyak 125 lembar saham atau setara dengan 50,00% dengan nilai nominal Rp62.500.000 (nilai penuh).
   - Saham IPC TPK sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

   Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-1048/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

e. On January 3, 2022, the following shares owned by the Company (formerly Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV) were transferred to SPTP:
   - *BJTI shares amounting to 1,079,138 shares or equivalent to 96.84% with nominal value of Rp1,079,138,000,000 (full amount).*
   - *TPS shares amounting to 254,489,274 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp127,244,637,000 (full amount).*
   - *TTL shares amounting to 134,325 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp134,325,000,000 (full amount).*
   - *PTP1 shares amounting to 855,724,000 shares or equivalent to 70.00% with nominal value of Rp855,724,000,000 (full amount).*
   - *KKT shares amounting to 125 shares or equivalent to 50.00% with nominal value of Rp62,500,000 (full amount).*
   - *IPC TPK shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*

   The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-1048/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPTP menerbitkan 1.079.138 saham baru, 127.244 saham baru, 134.325 saham baru, 855.724 saham baru, 62 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT dan IPC TPK dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada SPTP.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

f. Pada tanggal 28 Februari 2022, saham-saham milik Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo II dan Pelindo IV) berikut dialihkan kepada SPSL (dahulu PPI):
   - Saham MTI sebanyak 34.283.150 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp17.141.575.000 (nilai penuh).
   - Saham NTS sebanyak 60.240 lembar saham atau setara dengan 99,16% dengan nilai nominal Rp60.240.000.000 (nilai penuh).
   - Saham PIL sebanyak 204.820 lembar saham atau setara dengan 99,67% dengan nilai nominal Rp204.820.000.000 (nilai penuh).
   - Saham PPK sebanyak 759.000 lembar saham atau setara dengan 90,00% dengan nilai nominal Rp759.000.000.000 (nilai penuh).
   - Saham PLI (dahulu SPSL) sebanyak 101.898 lembar saham atau setara dengan 99,90% dengan nilai nominal Rp101.898.000.000 (nilai penuh).

   Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-133/MBU/02/2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

In relation to such transfer of right of shares, SPTP issued 1,079,138 new shares, 127,244 new shares, 134,325 new shares, 855,724 new shares, 62 new shares and 24,750 new shares for the Company (formerly Pelindo II) with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT and IPC TPK shares from the Company (formerly Pelindo II) to SPTP, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

f. On February 28, 2022, the following shares owned by the Company (formerly Pelindo I, Pelindo II and Pelindo IV) were transferred to SPSL (formerly PPI):
   - *MTI shares amounting to 34,283,150 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp17,141,575,000 (full amount).*
   - *NTS shares amounting to 60,240 shares or equivalent to 99.16% with nominal value of Rp60,240,000,000 (full amount).*
   - *PIL shares amounting to 204,820 shares or equivalent to 99.67% with nominal value of Rp204,820,000,000 (full amount).*
   - *PPK shares amounting to 759,000 shares or equivalent to 90.00% with nominal value of Rp759,000,000,000 (full amount).*
   - *PLI (formerly SPSL) shares amounting to 101,898 shares or equivalent to 99.90% with nominal value of Rp101,898,000,000 (full amount).*

   The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-133/MBU/02/2022 on February 25, 2022. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPSL (dahulu PPI) menerbitkan 1.714.157 saham baru, 6.024.000 saham baru, 20.482.000 saham baru, 75.900.000 saham baru dan 10.189.800 saham baru untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham MTI, NTS, PIL, PPK dan PLI (dahulu SPSL) dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada SPSL (dahulu PPI).

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2022.

52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

In relation to such transfer of right of shares, SPSL (formerly PPI) issued 1,714,157 new shares, 6,024,000 new shares, 20,482,000 new shares, 75,900,000 new shares and 10,189,800 new shares for the Company (formerly Pelindo II) with nominal value of Rp10,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of MTI, NTS, PIL, PPK and PLI (formerly SPSL) shares from the Company (formerly Pelindo II) to SPSL (formerly PPI), respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated March 1, 2022.

53. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Pandemi *COVID-19* tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan atau operasi Kelompok Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Kelompok Usaha digolongkan sebagai "jasa esensial" oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak diwajibkan untuk menutup kegiatan operasinya sebagai akibat dari langkah yang diambil Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran *COVID-19*. Kelompok Usaha tidak mengalami gangguan yang signifikan terhadap kegiatan operasionalnya.

Kelompok Usaha akan terus menilai situasi, bekerja sama dengan otoritas setempat untuk mendukung upaya dalam mencegah penyebaran *COVID-19*, dan menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis Kelompok Usaha.

Dampak akhir dari virus *COVID-19* terhadap kegiatan usaha Kelompok Usaha dalam jangka pendek maupun panjang tetap tidak dapat dipastikan dan akan tergantung pada berbagai faktor yang tidak dapat diperkirakan secara akurat oleh Kelompok Usaha, termasuk durasi, tingkat keparahan, kemungkinan terjadinya kembali dan skala pandemi serta sifat dan ketegasan langkah yang diambil oleh pemerintah.

53. MACROECONOMIC UNCERTAINTY

The COVID-19 pandemic did not have a significant impact on the Group's financial or operating performance the year ended Desember 31, 2021 and 2020. The Group is classified as an "essential service" by the Government. Therefore, the Group is not required to close its operations as a result of the steps taken by the Government to break the chain of spread of COVID-19. The Group did not experience significant disruption to operational activities.

The Group will continue to assess the situation, work closely with local authorities to support efforts to prevent the spread of COVID-19, and implement actions to minimize the impact on the Group's business.

The ultimate impact of the COVID-19 virus on the Group's business activities in the short and long term remains uncertain and will depend on a variety of factors that the Group cannot accurately predict, including the duration, severity, likelihood of reoccurrence and scale of the pandemic and the nature and extent of the pandemic. decisive steps taken by the government.

54. INFORMASI SEGMEN / *54. SEGMENT INFORMATION*

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Information concerning the Group's business segments is as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2021					
	Operasi Kepelabuhanan/ *Port Operation*	**Jasa Lainnya/ *Other Services***	**Total Sebelum Eliminasi/*Total Before Elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen						*Segment operating revenues*
Pendapatan operasi eksternal	28.353.022.778	461.783.559	28.814.806.337	-	28.814.806.337	*External operating revenues*
Pendapatan operasi antar segmen	5.399.655.411	1.317.551.756	6.717.207.167	(6.717.207.167)	-	*Inter-segment operating revenues*
Total pendapatan operasi segmen					28.814.806.337	*Total segment operating revenues*
Beban operasi	(27.309.172.059)	(1.649.297.717)	(28.958.469.776)	6.454.522.959	(22.503.946.817)	*Operating expenses*
Pendapatan operasi lainnya - neto	2.041.653.978	(39.558.040)	2.002.095.938	(1.772.757.832)	229.338.106	*Other operating income - net*
Laba usaha					**6.540.197.626**	***Operating income***
Pendapatan keuangan	587.319.404	5.235.434	592.554.838	(184.778.954)	407.775.884	*Finance income*
Beban keuangan	(3.357.351.484)	(78.509.211)	(3.435.860.695)	895.777.829	(2.540.082.866)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.626.599.275	-	1.626.599.275	(1.371.491.687)	255.107.588	*Equity in income of associates and joint control entity - net*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					**4.662.998.232**	***Income before final tax and corporate income tax***
Beban pajak final	(473.745.661)	(13.926.208)	(487.671.869)	-	(487.671.869)	*Final tax expense*
Laba sebelum pajak penghasilan badan					**4.175.326.363**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan						***Corporate income tax***
Kini	(821.369.756)	(26.363.420)	(847.733.176)	-	(847.733.176)	*Current*
Tangguhan	(150.992.261)	(455.650)	(151.447.911)	-	(151.447.911)	*Deferred*
Laba tahun berjalan					**3.176.145.276**	***Income for the year***
Posisi keuangan						***Financial position***
Aset segmen	140.129.226.645	2.199.514.469	142.328.741.114	(26.099.666.614)	116.229.074.500	*Segment assets*
Liabilitas segmen	90.795.308.159	2.036.440.753	92.831.748.912	(14.529.832.436)	78.301.916.476	*Segment liabilities*
Penyusutan dan amortisasi segmen	4.161.043.395	71.865.183	4.232.908.578	(1.033.436.603)	3.199.471.975	*Segment depreciation and amortization*

54. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

54. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

	31 Desember 2021/*December 31, 2020*					
	Operasi Kepelabuhanan/ *Port Operation*	**Jasa Lainnya/ *Other Services***	**Total Sebelum Eliminasi/*Total Before Elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen						*Segment operating revenues*
Pendapatan operasi eksternal	25.564.536.111	1.026.595.716	26.591.131.827	-	26.591.131.827	*External operating revenues*
Pendapatan operasi antar segmen	5.654.340.622	1.040.617.946	6.694.958.568	(6.694.958.568)	-	*Inter-segment operating venues*
Total pendapatan operasi segmen					26.591.131.827	*Total segment operating revenues*
Beban operasi	(25.157.491.937)	(2.010.773.976)	(27.168.265.913)	6.492.332.553	(20.675.933.360)	*Operating expenses*
Pendapatan operasi lainnya - neto	(170.496.231)	134.828.547	(35.667.684)	(160.870.424)	(196.538.108)	*Other operating income - net*
Laba usaha					**5.718.660.359**	***Operating income***
Pendapatan keuangan	822.774.118	(4.432.727)	818.341.391	(118.759.643)	699.581.748	*Finance income*
Beban keuangan	(3.396.549.936)	(20.047.524)	(3.416.597.460)	872.231.289	(2.544.366.171)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.112.175.109	-	1.112.175.109	(1.152.173.816)	(39.998.707)	*Equity in income of associates and joint control entity - net*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					**3.833.877.229**	***Income before final tax and corporate income tax***
Beban pajak final	(434.688.403)	(1.533.430)	(436.221.833)	41.555	(436.180.278)	*Final tax expense*
Laba sebelum pajak penghasilan badan					**3.397.696.951**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan						***Corporate income tax***
Kini	(725.083.124)	(31.651.454)	(756.734.578)	10.867.473	(745.867.105)	*Current*
Tangguhan	298.823.770	8.288.855	307.112.625	-	307.112.625	*Deferred*
Laba tahun berjalan					**2.958.942.471**	***Income for the year***
Posisi keuangan						***Financial position***
Aset segmen	141.344.212.696	9.892.111.717	151.236.324.413	(32.659.576.619)	118.576.747.794	*Segment assets*
Liabilitas segmen	92.292.535.867	819.275.449	93.111.811.316	(14.809.894.840)	78.301.916.476	*Segment liabilities*
Penyusutan dan amortisasi segmen	1.368.562.653	1.794.588.672	3.163.151.325	99.172.645	3.262.323.970	*Segment depreciation and amortization*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year then Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Pendapatan Operasi			***Operating Revenues***
Regional 1	3.397.814.392	3.083.766.414	*Region 1*
Regional 2	11.598.172.973	10.547.833.716	*Region 2*
Regional 3	9.906.466.364	9.320.309.563	*Region 3*
Regional 4	3.912.352.608	3.639.222.134	*Region 4*
Total	**28.814.806.337**	**26.591.131.827**	***Total***

54. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

54. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

	Disajikan kembali - Catatan 4/ *As restated - Note 4*			
	31 December2021/ *December 31, 2021*	**31 Desember 2020/ *December 31, 2020***	**1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *January 1, 2020/ December 31, 2019***	
Aset tidak lancar				***Non-current asset***
Regional 1	13.646.983.523	13.745.364.115	13.291.183.214	*Region 1*
Regional 2	41.600.903.896	40.779.140.983	36.568.735.012	*Region 2*
Regional 3	26.490.572.342	25.699.270.922	24.449.054.266	*Region 3*
Regional 4	11.110.020.372	10.469.776.022	9.319.025.017	*Region 4*
Total	**92.848.480.133**	**90.693.552.042**	**83.627.997.509**	***Total***

55. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

55. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Non-cash of investing activities for the year ended December 31, 2021 and 2020, are as follow:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year then Ended December 31,*		
	2021	**2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (*As restated - Note 4*)**	
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	45.773.043	398.618.777	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap	89.535.918	192.396.381	*Capitalization of borrowing costs*
Penambahan aset tetap melalui penambahan utang	159.270.441	193.128.224	*Acquisition of fixed assets through payable*
Penambahan aset tetap melalui uang muka	172.467.503	233.903.658	*Acquisition of fixed assets through advance*
Penambahan aset tetap melalui kapitalisasi bunga pinjaman	86.962.770	130.487.626	*Acquisition of fixed assets through interest capitalization*

55. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

55. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION (continued)

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2021/ *January 1, 2021*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Selisih kurs/ *Foreign exchange difference***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	1.196.855	-	-	5.196.855	*Short-term bank loans*
Utang bank	8.057.199.727	(2.758.419.792)	13.896.971	-	5.312.676.906	*Bank loan*
Utang obligasi	40.198.948.551	(372.969.276)	349.524.870	672.335	40.176.176.480	*Bonds payable*
Dividen	-	(560.000.000)	-	560.000.000	-	*Dividend*
Liabilitas sewa	398.376.465	(76.616.932)	-	12.126.179	333.885.712	*Lease liabilities*
Total	48.658.524.743	(3.766.809.145)	363.421.841	572.798.514	45.827.935.953	*Total*

2021 Annual Report
Laporan Tahunan

United we Stand

Bersatu kami Kuat

PELINDO

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara, 14310, Indonesia
T +62 31 3298631 - 37
E info@pelindo.co.id

pelindo.co.id